Surabaya CITY OF HEROES

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 34 TAHUN 2026

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2025

tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026

“

Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur









surabaya.go.id

Surabaya, Juli 2026

WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026, Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 73);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);

39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Tahun 2026 Nomor 10 Seri E);

40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

41. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 7);

42. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

43. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8)

44. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

45. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 31);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

46. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 58);

47. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2026 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kota Surabaya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

2. Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yaitu Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 7C, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, yang terdiri dari :

a. Lampiran I : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

b. Lampiran II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026 Kota Surabaya; dan

c. Lampiran III : Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026.

Pasal 7B

Dalam hal setelah ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini terdapat kebijakan di atas Peraturan Wali Kota yang mengamanatkan penambahan/pengurangan program atau sub kegiatan, maka dilakukan melalui kesepakatan bersama antara Wali Kota dengan Pimpinan DPRD dan dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.

Pasal 7C

Dalam hal terdapat perbedaan pada Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka dilakukan Perubahan Rencana Strategis oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan selambatnya sebelum APBD tahun berkenaan dilaksanakan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tangal 22 Juli 2026

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 34

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : **KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA** Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar xv
Daftar Lampiran xvii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-11
1.4 Maksud dan Tujuan I-12
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-13
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2026 ..... II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-40
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-77
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-213
2.1.8 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) II-231
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-232
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 ..... II-232
2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan II-235
2.3 Permasalahan Pembangunan II-245
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-248
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-250
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Surabaya III-5
3.1.2 Prospek Ekonomi Tahun 2025 dan Tahun 2026 ..... III-20
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-22
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-25

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-39
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah..... III-48
3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah III-52
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-7
4.2.1 Isu Strategis IV-7
4.2.2 Prioritas Pembangunan Kota Surabaya ..... IV -22
4.2.3 Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026 ..... IV-151
4.2.4 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-180
4.2.5 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal IV-181
4.2.6 Dukungan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) IV-193
4.2.7 Inovasi Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-220
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 ..... V-1
5.2 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 ..... V-10
BAB VI PENUTUP VI-1
6.1 Kesimpulan dan Substansial VI-1
6.2 Pengendalian dan Evaluasi VI-4
6.3 Penutup VI-5

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Sistem Drainase di Kota Surabaya II-3
Tabel II.2 Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan II-15
Tabel II.3 Luasan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Tahun 2022–2026 (TW I) II-15
Tabel II.4 Kelas Risiko Bencana di Kota Surabaya II-19
Tabel II.5 Kelas Risiko Per Bencana Per Kecamatan II-19
Tabel II.6 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-21
Tabel II.7 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-22
Tabel II.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2025 ..... II-27
Tabel II.9 Indeks Penyusun IKLH Tahun 2021 – 2025 ..... II-27
Tabel II.10 Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan II-35
Tabel II.11 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2025 ..... II-36
Tabel II.12 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama II-37
Tabel II.13 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2025 ..... II-38
Tabel II.14 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025 ..... II-39
Tabel II.15 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Surabaya Tahun 2025 ..... II-39
Tabel II.16 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2022 – 2026 (TW I) II-41
Tabel II.17 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2022 – 2026 (TW I) II-42
Tabel II.18 Tren Nilai PDRB dan Kontribusi Kota Surabaya terhadap Provinsi Jawa Timur II-43
Tabel II.19 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2022–2026 (TW I) (dalam Juta Rp) II-45
Tabel II.20 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2022–2026 (TW I) (dalam Juta Rp) II-46

Tabel II.21 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2021–2025 .... II-47
Tabel II.22 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-49
Tabel II.23 Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 ..... II-51
Tabel II.24 Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025..... II-52
Tabel II.25 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2021–2025 .... II-53
Tabel II.26 TPT Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021–2025 ..... II-54
Tabel II.27 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-54
Tabel II.28 Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-56
Tabel II.29 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-56
Tabel II.30 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-57
Tabel II.31 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2021–2025 ..... II-58
Tabel II.32 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-59
Tabel II.33 Indeks Kesejahteraan Sosial Kota Surabaya Tahun 2025 ..... II-62
Tabel II.34 Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-65
Tabel II.35 Skor Literasi dan Numerasi Asesmen Nasional Tahun 2023–2025 ..... II-68
Tabel II.36 Proporsi Penduduk Kota Surabaya Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2021-2025 ..... II-69
Tabel II.37 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-70
Tabel II.38 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-71
Tabel II.39 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2021–2026 (TW II) II-72
Tabel II.40 Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2022–2026 (TW II) II-73
Tabel II.41 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-75

Tabel II.42 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Surabaya Tahun 2021–2025 .....II-78
Tabel II.43 Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2021-2025 .....II-81
Tabel II.44 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Per Kecamatan Tahun 2025 .....II-82
Tabel II.45 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Tahun 2021–2025.....II-83
Tabel II.46 Perkembangan Angka Putus Sekolah Tahun 2021–2026 (TW II) II-84
Tabel II.47 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2026 (TW II) II-85
Tabel II.48 Jumlah PAUD Berkualitas di Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-86
Tabel II.49 Data Akreditasi Sekolah Dinas Pendidikan Tahun 2026 (TW II) II-87
Tabel II.50 Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2026 (TW II) II-88
Tabel II.51 Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2026 (TW II) II-88
Tabel II.52 Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2025.....II-89
Tabel II.53 Jumlah Peserta Didik Inklusi Di Kota Surabaya Tahun 2026 (TW I) II-89
Tabel II.54 Jumlah Kasus Baru Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2022–2026 (TW II) II-90
Tabel II.55 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani Kurang Dari 24 Jam Tahun 2022–2026 (TW II) II-91
Tabel II.56 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2022–2026 (TW II).....II-93
Tabel II.57 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2022–2026 (TW II) II-93
Tabel II.58 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2022–2026 (TW II) II-94
Tabel II.59 Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2022–2026 (TW II) II-95
Tabel II.60 Jumlah Posyandu Kota Surabaya Tahun 2022 – 2026 (TW I) II-96
Tabel II.61 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-96
Tabel II.62 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II).....II-97
Tabel II.63 Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....II-97
Tabel II.64 Nilai Kepuasan Masyarakat dan Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II).....II-97

Tabel II.65 Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-99
Tabel II.66 Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2022–2026 (TW II) II-100
Tabel II.67 Tempat Pengolahan Makanan (TPM)/Tempat Pengolahan Pangan (TPP) Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi Tahun 2021–2025 ..... II-101
Tabel II.68 Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2023–2025 ..... II-101
Tabel II.69 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-103
Tabel II.70 Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak Tahun 2022–2025 ..... II-103
Tabel II.71 PBG yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2022 – 2026 (TW II)..... II-104
Tabel II.72 Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai PBG Tahun 2022–2026 (TW II) II-105
Tabel II.73 Jumlah Rumah yang Terbangun dan Antriannya Tahun 2022–2026 (TW II)..... II-106
Tabel II.74 Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa..... II-107
Tabel II.75 Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU Tahun 2022-2026 (TW II) II-109
Tabel II.76 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kota Surabaya Tahun 2024–2025 ..... II-110
Tabel II.77 Lokasi Bebas Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun 2022–2026 (TW II) II-112
Tabel II.78 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-113
Tabel II.79 Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-114
Tabel II.80 Rasio Kejadian Unjuk Rasa Yang Mengarah Tindakan Anarkis Tahun 2022–2026 (TW II) II-115
Tabel II.81 Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2022–2026 (TW II) II-116
Tabel II.82 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-117
Tabel II.83 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)..... II-117

Tabel II.84 Penanganan PPKS Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-118
Tabel II.85 PPKS Penduduk non Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-119
Tabel II.86 PSKS Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-120
Tabel II.87 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-121
Tabel II.88 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2022 – 2026 (TW II) II-121
Tabel II.89 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir II-122
Tabel II.90 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-123
Tabel II.91 Penempatan Kerja Peserta Peningkatan Kompetensi Sesuai Pasar Kerja Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-123
Tabel II.92 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-124
Tabel II.93 Indeks Ketimpangan, Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-125
Tabel II.94 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-125
Tabel II.95 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-126
Tabel II.96 KDRT Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-127
Tabel II.97 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-128
Tabel II.98 Perempuan Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-129
Tabel II.99 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-131
Tabel II.100 Pola Pangan Harapan Tahun 2021–2025 ..... II-131
Tabel II.101 Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-132
Tabel II.102 Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat Tahun 2022–2026 (TW II) II-133
Tabel II.103 Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat Tahun 2022–2026 (TW II) II-134

Tabel II.104 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur dan Non Infrastruktur Tahun 2022–2026 (TW II) II-135
Tabel II.105 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021–2026 (TW II) II-135
Tabel II.106 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-136
Tabel II.107 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2022 – 2026 (TW II) II-137
Tabel II.108 Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-137
Tabel II.109 Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Surabaya II-138
Tabel II.110 Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-139
Tabel II.111 Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan Tahun 2022–2026 (TW II) II-140
Tabel II.112 Penerapan Upaya Konservasi Energi Tahun 2022–2026 (TW II) II-141
Tabel II.113 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2022–2026 (TW II) II-142
Tabel II.114 Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-142
Tabel II.115 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2021–2026 (TW II) II-143
Tabel II.116 Angka ASFR Kota Surabaya Tahun 2021–2025..... II-144
Tabel II.117 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-145
Tabel II.118 Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-145
Tabel II.119 Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-146
Tabel II.120 Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2022-2026 (TW II) II-148
Tabel II.121 Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2022 – 2026 (TW II) II-149
Tabel II.122 Layanan Transportasi Umum yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Surabaya..... II-149
Tabel II.123 Rata-rata Waktu Tunggu Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-150

Tabel II.124 Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Tahun 2022–2026 (TW II) II-151
Tabel II.125 Jumlah Rute dan Armada Layanan Angkutan Umum Kota Surabaya Berdasarkan Skema Pengelolaan Tahun 2023–2026 (TW II) II-152
Tabel II.126 Uji KIR Kendaraan Bermotor Kota Surabaya Tahun 2022–Triwulan 2 2026 ..... II-153
Tabel II.127 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-153
Tabel II.128 Weather Information Display Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW I) II-154
Tabel II.129 Operasional Perlintasan Sebidang Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-154
Tabel II.130 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-155
Tabel II.131 Jaringan Fiber Optic Kota Surabaya Tahun 2022 – 2026 (TW II) II-156
Tabel II.132 Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daring Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-156
Tabel II.133 Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2022–2026 (TW II) II-157
Tabel II.134 Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-159
Tabel II.135 Koperasi per Jenis Usaha di Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-159
Tabel II.136 Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2021–2026 (TW II) II-160
Tabel II.137 Pertumbuhan Produktivitas Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-162
Tabel II.138 Pembinaan dan Pengembangan UMKM Kota Surabaya Berdasarkan Intervensi Tahun 2022–2026 (TW II) II-162
Tabel II.139 Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Kota Surabaya Tahun 2021–2026 (TW II) II-164
Tabel II.140 Pertumbuhan Wirausaha di Kota Surabaya Tahun 2022 – 2026 TW II II-164
Tabel II.141 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW I) II-165

Tabel II.142 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW I) II-166
Tabel II.143 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2021–2026 (TW I) II-166
Tabel II.144 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022 – 2026 (TW II) II-167
Tabel II.145 Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pelatihan Wirausaha Kota Surabaya Tahun 2022-2026 (TW II) II-169
Tabel II.146 Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2023–2025..... II-170
Tabel II.147 Hasil Analisis Data yang Terpublikasi Tahun 2022–2025 ..... II-170
Tabel II.148 Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi Tahun 2022–2026 (TW II) II-171
Tabel II.149 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-173
Tabel II.150 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)..... II-174
Tabel II.151 Kelompok Seni Binaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-175
Tabel II.152 Jumlah Perpustakaan dan Layanan Baca serta Kunjungan Layanan Baca Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)..... II-177
Tabel II.153 Perkembangan Koleksi, Pustakawan, dan Pengunjung Perpustakaan di Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-178
Tabel II.154 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-179
Tabel II.155 Perkembangan Capaian Ketertiban Sistem Tata Kearsipan dan Ketersediaan Arsiparis di Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II).. II-180
Tabel II.156 Arsip Statis yang Telah Dilakukan Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Tahun 2022–2026 (TW II) II-181
Tabel II.157 Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-182
Tabel II.158 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2021–2026 (TW II)..... II-184
Tabel II.159 Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Tahun 2022–2026 (TW II) 185
Tabel II.160 Jumlah Kesepakatan Dengan Stakeholder Bidang Pariwisata Tahun 2022–2026 (TW II) II-186

Tabel II.1618 Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Surabaya per Subsektor Tahun 2022–2026 (TW II).....II-187
Tabel II.162 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II).....II-188
Tabel II.163 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II).....II-188
Tabel II.164 Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-189
Tabel II.165 Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-190
Tabel II.166 Jumlah Pasar PT Pasar Surya (Perseroda) Tahun 2022–2026 (TW II) II-190
Tabel II.167 Usaha Berdasarkan Izin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 .....II-191
Tabel II.168 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2021–2025 .....II-192
Tabel II.169 Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2022 – 2026 (TW II) II-193
Tabel II.170 Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2022–2026 (TW II) II-193
Tabel II.171 Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya Tahun 2021–2025 .....II-193
Tabel II.172 Capaian Indeks Pelayanan Publik Kota Surabaya Tahun 2021–2025 .....II-194
Tabel II.173 Survei Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ....II-195
Tabel II.174 MoU Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga Tahun 2024–2026 (TW II) II-196
Tabel II.175 MoU Kerjasama Luar Negeri Tahun 2023–2026 (TW II) II-196
Tabel II.176 MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi Tahun 2022–2026 (TW II) II-196
Tabel II.177 Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2022–2026 .....II-199
Tabel II.178 Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2022–2026 .....II-199
Tabel II.179 Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-200

Tabel II.180 Rata-rata Penyerapan Anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-200
Tabel II.181 Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Struktur Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-201
Tabel II.182 Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-203
Tabel II.183 Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2022 – 2026 (TW II) II-204
Tabel II.184 Inovasi Yang Diusulkan Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2022–2025 ..... II-204
Tabel II.185 Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2021–2025 ..... II-205
Tabel II.186 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2021–2025 ..... II-206
Tabel II.187 Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-207
Tabel II.188 Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-207
Tabel II.189 Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-209
Tabel II.190 Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-210
Tabel II.191 Jumlah Potensi Konflik Umat Beragama Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II) II-210
Tabel II.192 Indeks Reformasi Hukum Daerah Kota Surabaya Tahun 2021- 2025 ..... II- 212
Tabel II.193 Rekapitulasi Capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Surabaya Tahun 2022–2025 ..... II-214
Tabel II.194 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-215
Tabel II.195 Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-215
Tabel II.196 Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan Tahun 2021–2025 ..... II-216
Tabel II.197 Capaian Indeks Zakat Nasional Kota Surabaya Tahun 2023– 2025 ..... II-218
Tabel II.198 Indeks Infrastruktur Kota Surabaya Tahun 2022–2025 ..... II-219
Tabel II.199 Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-225

Tabel II.200 Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 ....II-226
Tabel II.201 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Surabaya Tahun 2021–2025 .....II-227
Tabel II.202 Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2021–2025.....II-227
Tabel II.203 TPT Kota Surabaya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021–2025.....II-228
Tabel II.204 TPT Kota Surabaya Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021- 2025 .....II-228
Tabel II.205 Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 .....II-229
Tabel II.206 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Surabaya Tahun 2024 .....II-231
Tabel II.207 Rekapitulasi Capaian PD pada Evaluasi Hasil RKPD Kota Surabaya sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 .....II-236
Tabel II.208 Rekapitulasi Tren Permasalahan di Kota Surabaya Tahun 2026 .....II-246
Tabel III.1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2020 s/d Tw I 2026** (dalam juta).....III-6
Tabel III.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2021 s/d Tw I 2026** (dalam Juta).....III-10
Tabel III.3 Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021s/d Tw I 2026*(dalam %).....III-13
Tabel III.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2020 - Tw I 2026**.....III-14
Tabel III.5 Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya Tahun 2020 –Tahun 2025 .....III-19
Tabel III.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya Tahun 2020-2025 .....III-20
Tabel III.7 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2023 s.d Tahun 2027.....III-30
Tabel III.8 Realisasi. Target dan Proyeksi Per PD Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2023 s.d Tahun 2027.....III-31
Tabel III.9 Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Surabaya Tahun 2023 s.d Tahun 2027 .....III-46
Tabel III.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 s.d Tahun 2027 .....III-51
Tabel IV.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran IV-2
Tabel IV.2 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2026..... IV-25

Tabel IV.3 Penyelarasan Subkegiatan Kota Surabaya dengan Astacita Presiden Tahun 2026 ..... IV-51
Tabel IV.4 Keselarasan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dengan Program Strategis Nasional Tahun 2026 ..... IV-137
Tabel IV.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026 ..... IV-152
Tabel IV.6 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026 ..... IV-157
Tabel IV.7 Standar Pelayanan Minimal pada RKPD Tahun 2026 ..... IV-182
Tabel IV.8 Penyelarasan Indikator Capaian TPB dengan Program RKPD Tahun 2026 ..... IV-194
Tabel V.1 Perubahan Pendanaan per Perangkat Daerah Tahun 2026 ..... V-2
Tabel V.2 Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2026 ..... V-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Grafik Curah Hujan dan Kelembapan Udara Kota Surabaya II-2
Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya II-11
Gambar II.3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya.....II-12
Gambar II.4 Peta Sesar Kendeng II-16
Gambar II.5 Peta Rawan Genangan Rob Wilayah Surabaya Utara II-17
Gambar II.6 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya.....II-17
Gambar II.7 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya II-18
Gambar II.8 Indeks Ketahanan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2025 .....II-23
Gambar II.9 Indeks Ketahanan Pangan Kota Surabaya Tahun 2021-2025 .....II-24
Gambar II.10 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2021-2025 ...II-25
Gambar II.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2021- 2025 .....II-28
Gambar II.12 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif Kota Surabaya Tahun 2021-2025 .....II-29
Gambar II.13 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kota Surabaya (Ton/Tahun) Tahun 2022–2026 (TW I).....II-30
Gambar II.14 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kota Surabaya Tahun 2021-2025 .....II-32
Gambar II.15 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Surabaya Tahun 2022-2026 (TW I) II-33
Gambar II.16 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kota Surabaya Tahun 2020-2024.....II-34
Gambar II.17 Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia.....II-36
Gambar II.18 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Surabaya Tahun 2021- 2025 .....II-60
Gambar II.19 Indeks Perlindungan Khusus Anak Tahun 2021–2024.....II-63
Gambar II.20 Indeks Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun 2021–2024 .....II-63
Gambar II.21 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022–2025.....II-67
Gambar II.22 Prevalensi Balita Stunting Tahun 2022–2026 (TW I).....II-70
Gambar II.23 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Tahun 2021–2025 .....II-76
Gambar II.24 Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Tahun 2025.....II-92
Gambar II.25 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2025 .....II-98

Gambar II.26 Persentase Atlet Berprestasi..... II-168
Gambar II.27 Indeks Daya Saing Daerah Kota Surabaya Tahun 2022–2025..... II-214
Gambar II.28 Inflasi Kota Surabaya (year-to-date) Tahun 2022–2026 (TW I) II-216
Gambar II.29 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kota Surabaya Tahun 2022-2026 (TW I) II-222
Gambar II.30 Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Surabaya Tahun 2021–2025 ..... II-223
Gambar II.31 Indeks Inovasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2021–2025..... II-230
Gambar III.1 Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (persen)..... III-18
Gambar IV.1 Visi dan Misi dalam RPJMN Tahun 2025-2029 ..... IV-7
Gambar IV.2 Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029..... IV-14
Gambar IV.3 Penyelarasan Tema Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 Kota Surabaya ..... Lampiran II-1

Lampiran III Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026..... Lampiran III-1

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR : 34 TAHUN 2026
TANGGAL : 22 JULI 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pembangunan di wilayahnya berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen utama untuk menerjemahkan visi, misi, dan prioritas pembangunan ke dalam kebijakan, program, serta kegiatan yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui tahapan pilihan prioritas, dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, serta memperhatikan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang tersedia dalam jangka waktu tertentu di daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 mempedomani pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu,

penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu dengan tahapan :

a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
c. Penetapan.

Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 diatur bahwa:

1. Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan :
   a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
   b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan,

   yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026
2. Perumusan perubahan RKPD Tahun 2026 memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah serta hasil kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan Ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.
3. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Muatan dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026.

Sebagai dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta dalam rangka menjamin konsistensi dalam penyusunan perencanaan di pusat, Propinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya, maka disusun Perubahan RKPD Tahun 2026 yang berpedoman pada prioritas nasional, prioritas Propinsi Jawa Timur, serta visi dan misi Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
30. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
42. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
43. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1032);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 73);
49. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
50. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1 -2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
52. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
53. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
55. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2025, Nomor 18 Seri E);

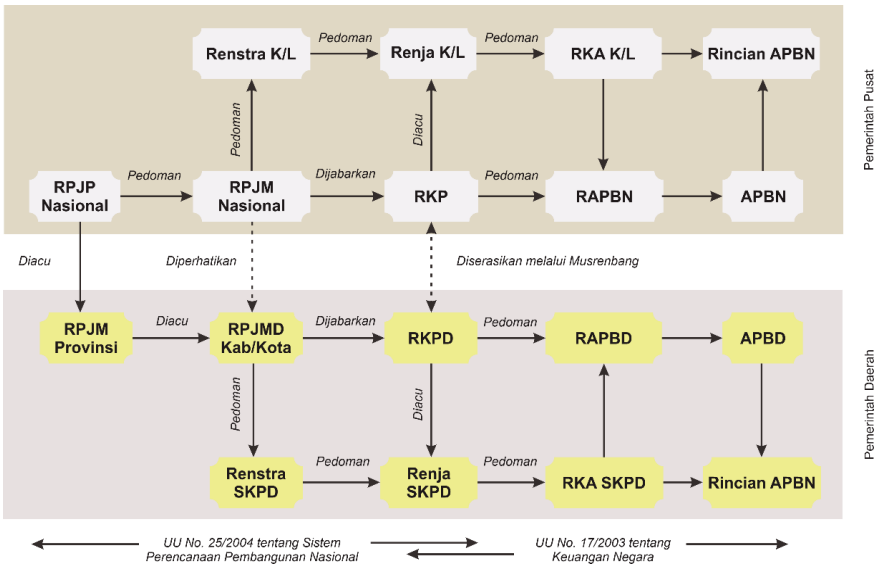
56. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
57. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 7);
58. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
59. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
60. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
61. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 31);
62. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 58);
63. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 72).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya 2026 berpedoman pada RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 juga mempedomani prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Secara substansial, Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah pada tahun 2026.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar I.1
Alur Penyusunan RKPD

Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara

Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah berpedoman Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 mengacu pada RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, program prioritas nasional dalam RKP 2026, Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029,RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, Perubahan RKPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2026, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2026 sampai dengan TW II, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan TW II, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.

Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah untuk:

1. Menjaga konsistensi antara substansi rencana jangka panjang, substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
3. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional;
4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2026;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, latar belakang penyusunan RKPD serta proses penyusunan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, Propinsi maupun kota.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Propinsi untuk penyusunan RKPD Kab/Kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan secara ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5 Sistematika

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2026

Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II menguraikan hasil evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2026, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 dan dokumen RKPD tahun 2026 sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan mengenai kondisi geografi daerah, kondisi demografi, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya

indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.5 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Menjelaskan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs dalam bentuk tabel yang disertai dengan penjelasan dan analisis untuk menjelaskan kondisi dan perkembangan pencapaian indikator TPB/SDGs.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan Nasional/Propinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi kota.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan ditingkat Daerah dan Nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Raperda RPJMD Kota Surabaya pada tahun 2026, dengan memperhatikan

prioritas nasional sesuai Asta Cita sebagaimana tercantum pada RPJMN Tahun 2025-2029, prioritas Propinsi Jawa Timur yang tercantum dalam Nawa Bhakti Satya dan mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, RKPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil. Penentuan prioritas tersebut dilakukan melalui sinkronisasi keselarasan tema dan prioritas pada RKP dan RKPD Propinsi Jawa Timur yang disampaikan pada Rakortekrenbang, dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah pada tahun rencana. Selain itu, dijabarkan juga kebijakan dan inovasi yang akan dilakukan untuk mendukung prioritas tersebut, sasaran pembangunan, serta inovasi unggulan

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

VI. PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

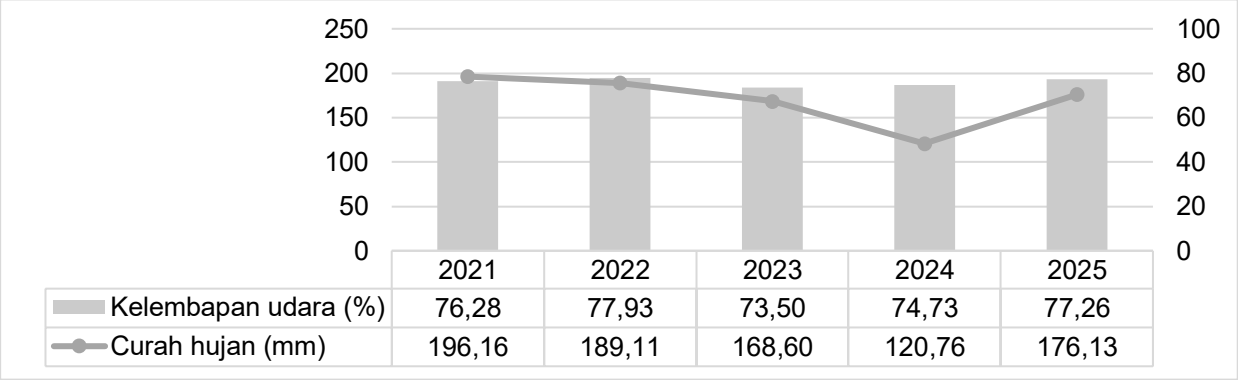
Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d. 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d. 112°54' Bujur Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara Dan Kelurahan Perak Timur Pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan, 153 kelurahan, 1.360 rukun warga (RW) dan 9.151 rukun tetangga (RT).

Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045, bahwa luas wilayah Kota Surabaya meliputi daratan seluas kurang lebih 33.850 Hektare atau setara 338,50 kilometer persegi. Sedangkan sesuai publikasi Surabaya Dalam Angka Tahun 2026, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, luas wilayah daratan Kota Surabaya kurang lebih 334,50 kilometer persegi.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah antara 3-6 meter di atas permukaan laut, pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen. Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan).

Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Di tahun 2024, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, yakni sebesar 463,8 milimeter dengan temperatur berkisar antara 28,25°C hingga

30,61°C dan kelembapan udara mencapai puncak tertingginya pada bulan Februari dan April tahun itu, yakni pada 98 persen. Sedangkan untuk data tahun 2025, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, yakni sebesar 515,8 milimeter. Sedangkan temperatur berkisar antara 27,8°C hingga 29,75°C, dan kelembapan udara mencapai puncak tertingginya pada bulan Januari, Maret, Juni, Oktober dan November tahun itu, yakni pada 98 persen. Gambar II.1 menunjukkan grafik hubungan curah hujan dengan kelembapan udara di Kota Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kelembapan udara (%)	76,28	77,93	73,50	74,73	77,26
Curah hujan (mm)	196,16	189,11	168,60	120,76	176,13

Gambar II.1 Grafik Curah Hujan dan Kelembapan Udara Kota Surabaya

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2026

Berdasarkan pencatatan data kelembapan udara di Kota Surabaya tersebut setiap bulannya dalam kurun waktu tahun 2021-2025 menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda, yakni berkisar antara 73 hingga 78 persen. Tinggi rendahnya kelembapan udara sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu suhu, tekanan udara, pergerakan angin, kuantitas dan kualitas penyinaran dan vegetasi.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas dan Kali Jagir. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya rawan terkena dampak atas yang terjadi di daerah hulu, secara kuantitas (debit air) maupun kualitas. Pada musim penghujan, limpahan air yang berasal dari DAS yang melalui Kota Surabaya, yaitu DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo dapat ditangani dengan baik oleh Pemerintah Kota Surabaya. Salah satu upaya yang telah dilakukan antara lain dengan pembuatan boezem di seluruh wilayah Kota Surabaya, yang berjumlah 112 boezem hingga triwulan II tahun 2026, yang berfungsi sebagai tampungan air sementara yang berkontribusi dalam pengendalian banjir di Kota Surabaya.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya melalui Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya dengan Perum Jasa Tirta (PJT) I juga melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik terkait pengondisian dan kontrol atas pintu air Ngagel dan pintu

air Jagir untuk memastikan memastikan pasokan air baku tetap terpenuhi baik pada musim penghujan maupun pada musim kemarau. Sedangkan kualitas air Sungai Brantas saat ini mengalami penurunan, sehingga berdampak pada tingginya kandungan zat pencemar dalam air baku yang diolah oleh Kota Surabaya seperti nitrit, amonia, dan bahan organik. Untuk mengatasi hal ini, Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan dosis disinfektan, menggunakan koagulan baru, memodifikasi sistem, serta mengoptimalkan proses produksi dan distribusi. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya dan Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya juga berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) I serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas untuk ikut serta dalam upaya pencegahan pencemaran sungai.

Sebagai upaya mengatasi potensi banjir, Kota Surabaya memiliki sistem drainase yang terintegrasi dan dirancang untuk mengelola limpasan air hujan secara efektif. Sistem drainase ini mencakup saluran primer, sekunder, dan tersier yang membagi Kota Surabaya menjadi 30 sistem drainase dengan catchment area seluas 31.881,1 Ha. Saluran primer berfungsi mengalirkan air dari daerah tangkapan besar ke sungai-sungai utama, sementara saluran sekunder dan tersier berfungsi mengalirkan air dari lingkungan permukiman dan jalan-jalan. Upaya pembangunan dan pemeliharaan rutin terhadap sistem drainase ini terus dilakukan untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah banjir dan mengurangi dampak genangan air di berbagai wilayah.

Tabel II.1
Sistem Drainase di Kota Surabaya

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
1	Saluran Perbatasan	10.166.967	Saluran Perbatasan	Saluran Dukuh Menanggal
				Saluran Menanggal Indah
				Saluran Cabang Menanggal Indah
				Saluran Tengah A. Yani Selatan
				Saluran Siwalankerto Permai
				Saluran Siwalankerto Selatan
				Saluran Cabang Siwalankerto
				Saluran Siwalankerto
				Saluran Kutisari Indah
				Saluran Rungkut Industri Selatan
				Saluran Rungkut Barat
				Saluran Rungkut Industri II
				Saluran Cabang Rungkut Industri II
				Saluran Tengah MERR
				Saluran Rungkut Barata
				Saluran Rungkut Menanggal
				Saluran Cabang Amir Mahmud

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran BP2IP
2	Kebon Agung	16.795.892	Saluran Kebon Agung	Saluran Kebon Agung
				Saluran Gayungan Peternakan I
				Saluran Gayungan Peternakan II
				Saluran Gayung Kebonsari
				Saluran Gayungsari
				Saluran Jemur Andayani
				Saluran Kutisari XII
				Saluran Kutisari IV
				Saluran Kutisari Utara I
				Saluran Gunung Anyar
				Saluran Gunung Anyar Jaya
				Saluran Rungkut Kidul
				Saluran Rungkut Harapan
				Saluran Medokan Asri
				Saluran Wiguna Timur
				Saluran Medayu Selatan
				Saluran Gunung Anyar Mas
3	Kali Sumo	3.834.787	Saluran Kali Sumo	Saluran Ngagel Jaya Tengah Barat
				Saluran Ngagel Jaya Tengah Timur
				Saluran Ngagel Jaya Selatan Barat
				Saluran Ngagel Jaya Selatan Timur
				Saluran Bratang Perintis VI
4	Avoor Wonorejo	19.539.892	Saluran Avoor Wonorejo	Saluran Jambangan
				Saluran Bibis Karah
				Saluran Karah Agung
				Saluran Ketintang Selatan
				Saluran Prof Supomo
				Saluran Ketintang Wiyata
				Saluran Ketintang
				Saluran Jemur Gayungan
				Saluran Tengah A. Yani Utara
				Saluran Wonokromo
				Saluran Cabang Wonokromo
				Saluran Wonocolo
				Saluran Raya Panjang Jiwo
				Saluran Kalirejo
				Saluran Tenggilis Kauman
				Saluran Rungkut
				Saluran Sidosermo
				Saluran Sidosermo Indah
				Saluran Drasimo
				Saluran Panjang Jiwo
				Saluran Rungkut Waru
				Saluran Cabang Rungkut Waru
				Saluran Kedung Asem
				Saluran Nirwana
				Saluran Penjaringan Timur

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Kendal Sari
				Saluran Nirwana Eksekutif
				Saluran Wonorejo Permai
				Saluran Wonorejo Permai Utara VIII
				Saluran Rungkut Jaya
				Saluran Wonorejo Rungkut I
5	Jagir Kalimir	2.701.859	Saluran Jagir Kalimir	Saluran Karang Rejo
				Saluran Bendul Merisi
6	Rungkut	7.789.178	Saluran Rungkut	Saluran Rungkut Asri
				Saluran Rungkut Asri Utara
				Saluran Rungkut Medokan
				Saluran Medokan Timur
				Saluran Medokan Asri
				Saluran Medokan Asri Selatan
7	Medokan Semampir	19.504.694	Saluran Medokan Semampir	Saluran Manyar Indah
				Saluran Wisma Mukti
				Saluran Klampis Indah 4
				Saluran Semolo Waru Utara
				Saluran Semolo Waru
				Saluran Araya Barat
				Saluran Araya Timur
				Saluran Suko Semolo
				Saluran Semolo Waru Bahari
				Saluran Araya Selatan
				Saluran Semampir Tengah
				Saluran Semolo Waru Timur
				Saluran Nginden Jangkungan
				Saluran Brimob
				Saluran Medokan Semampir Baru
				Saluran Medokan Semampir Baru I
				Saluran Medokan Semampir Tengah
				Saluran Keputih Tegal
8	Kalidami	15.111.012	Saluran Kalidami	Saluran Pucang Anom timur
				Saluran Pucang Adi
				Saluran Kertajaya X
				Saluran Srikana
				Saluran Karang Menjangan
				Saluran Dharmahusada Indah
				Saluran Wisma Permai II
				Saluran Mleto
				Saluran Raya ITS / Sawahan
				Saluran ITS Barat
				Saluran Bhaskara
9	Kalibokor	11.363.661	Saluran Kalibokor	Saluran Manyar Tirtosari
				Saluran Manyar Tirtomoyo
				Saluran Manyar Tirtoyoso
				Saluran Klampis Ngasem
				Saluran UPB

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran ITS Tengah
				Saluran ITS Selatan
				Saluran Laguna Utara
				Saluran Keputih Barat
				Saluran Keputih Tengah
				Saluran Keputih Timur
				Saluran Marina Barat
				Saluran Marina Tengah
				Saluran Marina Timur
				Saluran Laguna Selatan
10	Jeblokan	6.985.578	Saluran Jeblokan	Saluran Jolotundo
				Saluran Gersikan
				Saluran Rangkah
11	Pegirian	9.847.074	Saluran Pegirian	Saluran Bulak Banteng
				Saluran Bulak Banteng Tengah
				Saluran Sidotopo Lor
				Saluran Tenggumung Karya
				Saluran Wonosari Lor
				Saluran Simolawang
				Saluran Simokerto/Donokerto
				Saluran Sawah Pulo
				Saluran Wonosari Wetan
				Saluran Gembong III
				Saluran Gembong
				Saluran Kemuning
				Saluran Kalisari THR
				Saluran Kalisari Timur
				Saluran Jatisrono
				Saluran Mrutu – Kalianyar
12	Kenjeran	4.975.012	Saluran Kenjeran – Larangan	Saluran Kenjeran Utara I
				Saluran Lebak Arum
				Saluran Karang Empat
				Saluran Kalijudan
13	Tambak Wedi	7.223.897	Saluran Tambak Wedi	Saluran Bandar Rejo
				Saluran Tambak Wedi Utara
				Saluran Bulak Banteng Timur
				Saluran Tambak Wedi Barat
				Saluran Bulak Banteng Tengah Selatan
				Saluran Randu Barat
				Saluran Randu Timur
				Saluran Tanah Merah
				Saluran Kapas Madya Timur
				Saluran Kapas Madya
				Saluran Tambak Sari
14	Kali Kepiting (Kalisari)	7.400.810	Saluran Kalisari	Saluran Pacar Kembang
				Saluran Mulyorejo
				Saluran Sutorejo
				Saluran Prima

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Babatan Pantai
				Saluran Kenjeran Lama
				Saluran Mulyosari
15	Lebak Indah	5.131.741	Saluran Lebak Indah	Saluran Gading
				Saluran Lebak Jaya Utara
				Saluran Kenjeran
				Saluran Larangan Barat
				Saluran Komplek Kenjeran
				Saluran Pantai Ria
				Saluran Kyai Tambak Deres
				Saluran Bulak Setro
				Saluran Cumpat Kulon
16	Greges	14.608.194	Saluran Greges	Saluran Surabayan
				Saluran Tempel Sukorejo
				Saluran Kedung Anyar Wetan
				Saluran Kedung Anyar
				Saluran Margorukun
				Saluran Genie Pelajar
				Saluran Petemon V
				Saluran Petemon Sidomulya
				Saluran Petemon Kali
				Saluran Pacuan Kuda
				Saluran Asem Bagus
				Saluran Kedung Doro
				Saluran Tembok Gede
				Saluran Semarang
				Saluran Pasar Turi
				Saluran Dupak Timur
				Saluran Dupak
				Saluran Rembang
				Saluran Krembangan Baru
				Saluran Indrapura I
				Saluran Jepara
				Saluran Pesapen Kali
				Saluran Pesapen Selatan
				Saluran Moro Krembangan
				Saluran Ikan Mungsing
				Saluran Ikan Mungsing Selatan
				Saluran Johar
				Saluran Indrapura II
				Saluran Pasar Loak
				Saluran Asem Mulya
				Saluran Simo
17	Darmokali	2.754.455	Saluran Darmokali	Saluran Ciliwung
				Saluran Gajah Mada
				Saluran Hayam Wuruk
				Saluran Perwira
				Saluran Brawijaya

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
18	Dinoyo	2.612.612	Saluran Kupang	Saluran Dr Wahidin
				Saluran Dinoyo
				Saluran Ir Anwari
				Saluran Sriwijaya
				Saluran Kartini
				Saluran Kupang Panjaan
				Saluran Jenggolo
				Saluran Sambas-Untung Suropati
				Saluran Keputran
19	Kayun	1.550.764	-	Saluran Embong Sawo Barat
				Saluran Grahadi
				Saluran RRI
				Saluran Embong Ploso Barat
				Saluran Embong Tanjung Timur
				Saluran Kenongo Timur
				Saluran Embong Malang sisi Utara
				Saluran Embong Malang sisi Selatan
20	Balong	7.683.763	Saluran Kali Balong	Saluran Tengah Margomulyo
				Saluran Margomulyo Gendong
21	Kalianak	2.377.255	Saluran Kalianak	Saluran Kalianak Timur
22	Krembangan	10.292.349	Saluran Kali Krembangan	Saluran Tanjungsari
				Saluran Suko Manunggal Utara
				Saluran Tambak Mayor
				Saluran Tambak Mayor PJKA
23	Diversi Gunungsari	44.145.581	Saluran Diversi Gunungsari	Saluran Putat Jaya
				Saluran Simo Gunung
				Saluran Simo Mulyo Barat
				Saluran Simo Pomahan
				Saluran Kupang Jaya
				Saluran Darmo Satelit
				Saluran Darmo Harapan
				Saluran Darmo Indah
				Saluran Karangpoh
				Saluran Tubanan
				Saluran Balongsari
				Saluran Gadelsari
				Saluran Manukan Madya
				Saluran Manukan Kulon
				Saluran Manukan Kasman
				Saluran Manukan Mulyo
				Saluran Manukan Lor
				Saluran Sambikerep
				Saluran Sawo 1
				Saluran Sawo 2
				Saluran Made
				Saluran Citra Raya
				Saluran Sememi
				Saluran Kendung

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Babat Jerawat
				Saluran Mayjen Sungkono Utara
				Saluran Mayjen Sungkono Selatan
				Saluran Kencanasari
24	Kali Kandangan	8.391.999	Saluran Kali Kandangan	Saluran Grand Pakuwon Barat
25	Sememi	9.591.308	Saluran Sememi	Saluran Sememi Baru
				Saluran Babat Buran
26	Tambakdono	6.420.706	Saluran Tambakdono	Saluran Kauman
				Saluran Sumber Rejo 1
				Saluran Sukodono Tambakdono
27	Romo Kalisari	11.448.422	Saluran Romo Kalisari	Saluran Romo Kalisari
28	Sumberrejo	4.236.633	Saluran Sumberrejo	Saluran Beji
				Saluran Benowo
				Saluran Singgapur
				Saluran Sumber Rejo 2
				Saluran Jawu Kidul
29	Kalimakmur	38.088.100	Saluran Kalimakmur	Saluran Bukit Golf
				Saluran Jajar Tunggal
				Saluran Raya Menganti
				Saluran Kedurus Indah Tengah
				Saluran Kramat
				Saluran Bukit Golf Graha Family
				Saluran Wiyung/Kali Kendal
				Saluran Babatan Indah
				Saluran Babatan
				Saluran Babatan Mukti
				Saluran Lidah Harapan
				Saluran Lidah Wetan
				Saluran Lidah Kulon
				Saluran Raya Pakuwon
				Saluran Pakuwon
				Saluran Perum Lidah Kulon
				Saluran Banjar Mlati
				Saluran Banjar Mlati Tengah
				Saluran Banjar Mlati Barat
				Saluran Raya Lakarsantri
				Saluran Lakarsantri
				Saluran Bangkingan
				Saluran Pondok Manggala
				Saluran Pondok Maritim
				Saluran Pondok Bogangan
				Saluran Kebraon Manis Barat
				Saluran Kebraon Manis Selatan
				Saluran Kebraon Utara
				Saluran Kebraon Selatan
				Saluran Kemlaten Baru
				Saluran Kemlaten
				Saluran Pesapen

No.	Nama Sistem Drainase	Luas Sistem (m^2)	Saluran Primer	Saluran Sekunder
				Saluran Sumur Welut
				Saluran Pondok Maritim Indah Barat
30	Karangpilang	6.236.895	-	Saluran Ksatria
				Saluran Karangpilang Barat
				Saluran Karangpilang Bromo
				Saluran Karangpilang Bagong
				Saluran Karangpilang PDAM
				Saluran Warugunung Suparma
				Saluran Warugunung Makam
				Saluran Warugunung Perbatasan

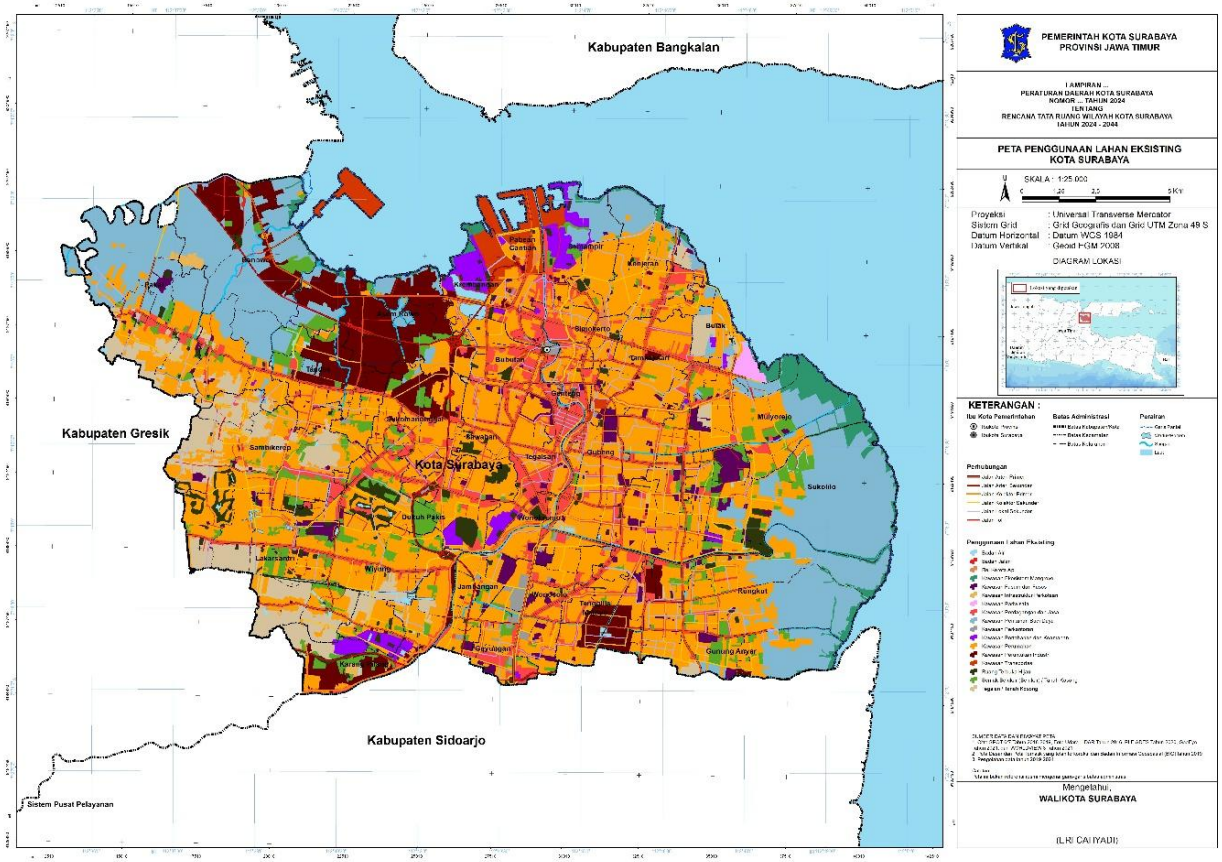
Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2026

Kota Surabaya adalah kota metropolitan yang secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Suroboyo yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
5. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya yang sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yang dikenal dengan sebutan Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.

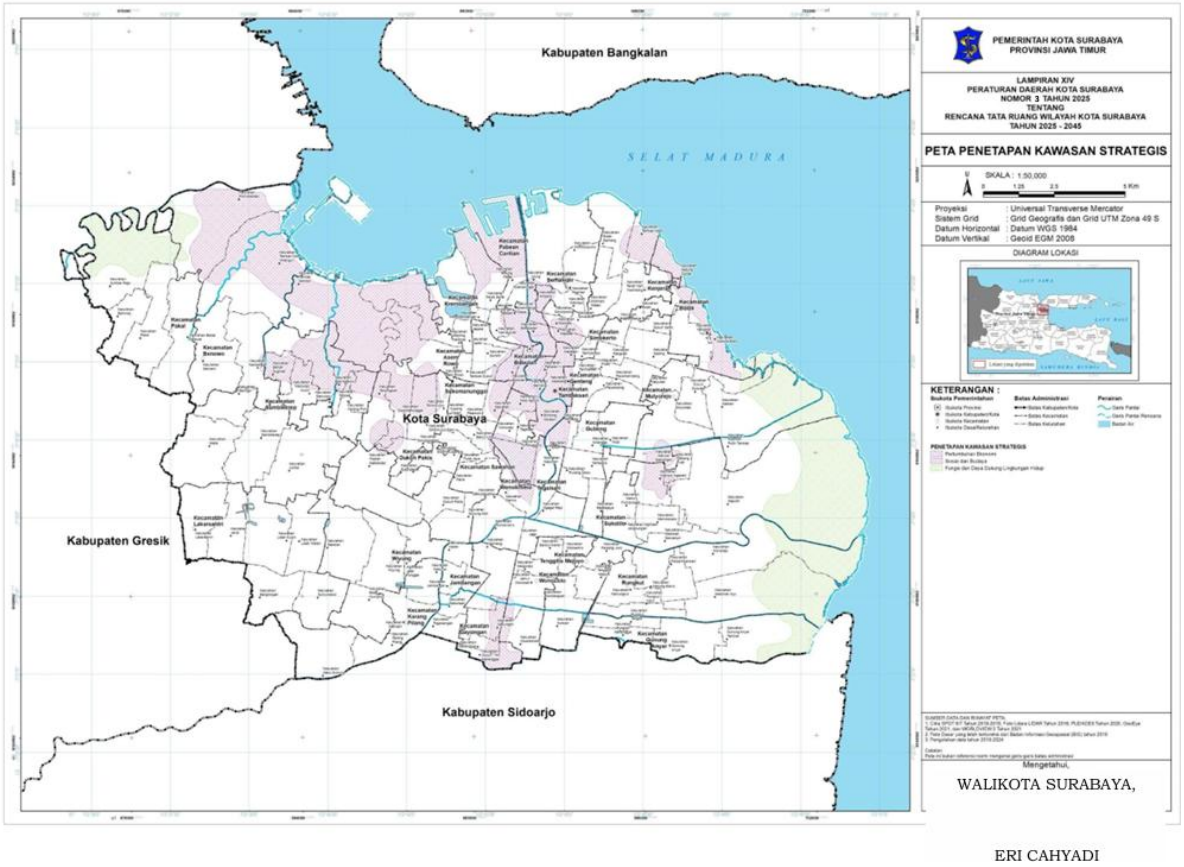


Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

Berdasarkan peta penggunaan lahan di atas, kawasan perumahan menjadi penggunaan lahan terbesar di Kota Surabaya, yaitu seluas 16.057 hektare atau sekitar 48 persen dari total luas wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar ruang di Kota Surabaya telah dimanfaatkan untuk kawasan terbangun, sehingga diperlukan optimalisasi pengembangan kawasan strategis yang mampu mendukung pertumbuhan kota secara berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi lindung lingkungan.

Salah satu kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah kawasan pesisir, mengingat kawasan ini memiliki fungsi strategis sebagai penyangga ekosistem, kawasan budidaya perikanan, pengendali banjir rob, serta ruang publik yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, termasuk pengembangan Kawasan Pesisir Terpadu *Surabaya Waterfront Land* (SWL). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025–2045, rencana pola ruang di Kawasan Pesisir Timur Kota Surabaya meliputi Kawasan Campuran, Perdagangan dan Jasa, Ekosistem *Mangrove*, serta Kawasan Budidaya Perikanan. Pada Kawasan Perdagangan dan Jasa, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan Pantai Kenjeran, sedangkan pada Kawasan Ekosistem *Mangrove* dan Kawasan Budidaya Perikanan dilakukan peningkatan kualitas kawasan, khususnya di Kebun Raya *Mangrove*. Dengan adanya berbagai program dan kegiatan tersebut, diharapkan pengembangan Kawasan Pesisir Timur Kota Surabaya dapat berjalan secara terpadu, berkelanjutan, dan selaras dengan fungsi tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga mampu meningkatkan kualitas lingkungan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan potensi pariwisata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi fungsi lindung kawasan pesisir. Selain itu, pelaksanaan pengembangan tersebut diharapkan menjadi wujud sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung keberhasilan Proyek Strategis Nasional Surabaya Waterfront Land (SWL) yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



Gambar II.3 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya

Sumber: Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, di antaranya adalah:

a) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan pendukung pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu area geografis yang memiliki potensi dalam pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Beberapa aspek yang mendukung dalam menetapkan kawasan ekonomi tersebut antara lain sumber daya alam, infrastruktur yang mendukung, SDM yang memiliki daya saing, akses fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mudah, serta keterbukaan dalam berinvestasi dan mengembangkan ekonomi. Kawasan yang memenuhi aspek tersebut dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di Kota Surabaya yakni:

- Kawasan Gerbang Kota Surabaya pada Kecamatan Gayungan dan Kecamatan Wonocolo;
- Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Kenjeran pada Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, dan Kecamatan Mulyorejo;
- Kawasan Koridor Jalan Dr. Ir. H. Soekarno – Jalan Kertajaya pada Kecamatan Mulyorejo dan Kecamatan Sukolilo;

- Kawasan perindustrian dan pergudangan Surabaya Barat terdapat di Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Benowo, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pakal, Kecamatan Sukomanunggal, dan Kecamatan Tandes
- Kawasan Segi Delapan Darmo pada Kecamatan Dukuh Pakis dan Kecamatan Sukomanunggal;
- Kawasan Tanjung Perak dan sekitarnya pada Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Pabean Cantian;
- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya terdapat di Kecamatan Bubutan, Kecamatan Genteng, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Tegalsari, dan Kecamatan Wonokromo.

b) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Kawasan strategis kepentingan sosial budaya merupakan salah satu area geografis yang memiliki potensi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui pengembangan sektor sosial budaya. Selain itu, kawasan ini juga dikembangkan untuk kepentingan sosial dan budaya yang telah kental dengan kawasan adat tertentu dan kawasan konservasi warisan budaya. Dalam pengembangannya, kawasan yang akan dipilih menjadi kawasan sosial budaya harus memiliki beberapa aspek yang mendukung dalam pengembangan sosial budaya. Aspek yang berbeda dan harus menonjol dalam menentukan kawasan ini adalah kawasan tersebut harus memiliki sejarah kebudayaan yang kental akan asal usul daerah. Kawasan yang memiliki karakteristik tersebut di Kota Surabaya terdapat beberapa wilayah yang masuk di dalamnya yakni:

- Kecamatan Genteng;
- Kecamatan Gubeng;
- Kecamatan Sawahan;
- Kecamatan Tegalsari;
- Kecamatan Wonokromo;
- Kecamatan Krembangan;
- Kecamatan Pabean Cantian;
- Kecamatan Sawahan;
- Kecamatan Semampir;
- Kecamatan Simokerto; dan
- Kecamatan Tegalsari.

Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota yang memiliki cagar budayanya pada era kolonial tidak hanya tersebar pada beberapa kawasan yang telah disebutkan di atas. Wilayah kecamatan di Kota Surabaya memiliki persebaran situs dan lingkungan cagar budayanya masing-masing. Hanya saja beberapa kecamatan yang memiliki situs cagar budaya belum menjadi pusat pengembangan kawasan sosial budaya.

Tabel II.2
Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
1	Genteng	67
2	Krembangan	57
3	Pabean Cantian	29
4	Tegalsari	28
5	Wonokromo	24
6	Bubutan	24
7	Semampir	14
8	Gubeng	11
9	Sawahan	9
10	Simokerto	8
11	Tambaksari	7
12	Lakarsantri	2
13	Gayungan	1
14	Bulak	1
15	Dukuh Pakis	1
16	Wonocolo	1
Jumlah		**285**

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2026

c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan ini merupakan kawasan yang memiliki nilai ekologi tinggi atau memiliki potensi besar untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kawasan ini dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya. Adapun kawasan yang masuk dalam kategori sebagai kawasan pelestarian lingkungan hidup yakni:

- Kawasan Muara Kali Lamong, terdapat di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal;
- Kawasan Pamurbaya di Kecamatan Bulak, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Rungkut dan Kecamatan Sukolilo.

Tabel II.3
Luasan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Tahun 2022–2026 (TW I)

No	Jenis RTH	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kawasan lindung dan pesisir timur	4.570,33	4.600,33	4.600,33	4.600,33	4.600,33
2	Hutan kota	66,03	66,03	66,03	66,03	66,03
Total (Ha)		4.636,36	4.666,36	4.666,36	4.666,36	4.666,36

Sumber: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, diolah, 2026

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/ Reklamasi di Teluk Lamong.
2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.
3. Pengembangan jalur komuter/kereta api *double track* serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga “relatif aman“ dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada Gambar II.4.



Gambar II.4 Peta Sesar Kendeng

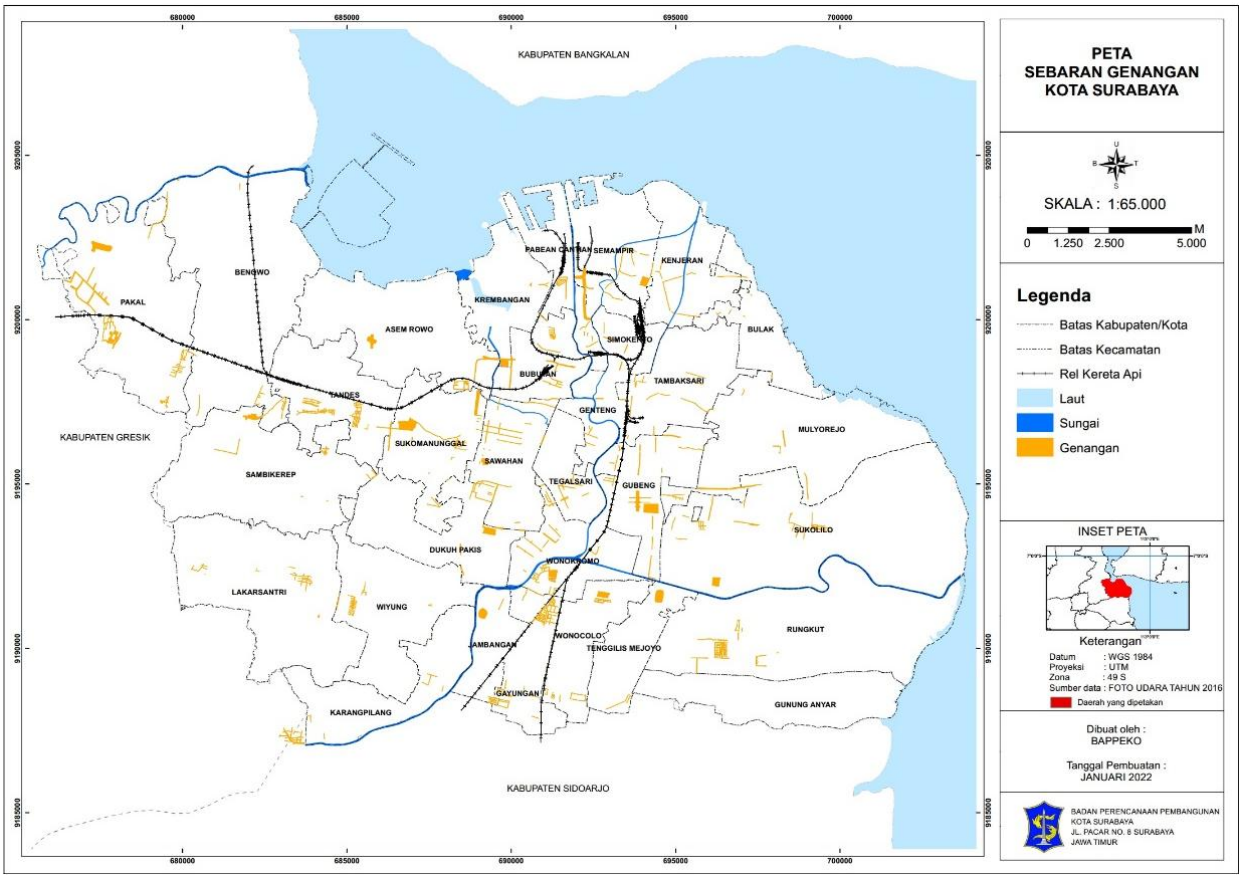
Sumber: (http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270)

Di samping itu Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya utara. Kawasan rawan genangan dan banjir rob di Kota Surabaya seperti dalam gambar peta sebagai berikut.



Gambar II.5 Peta Rawan Genangan Rob Wilayah Surabaya Utara

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2022

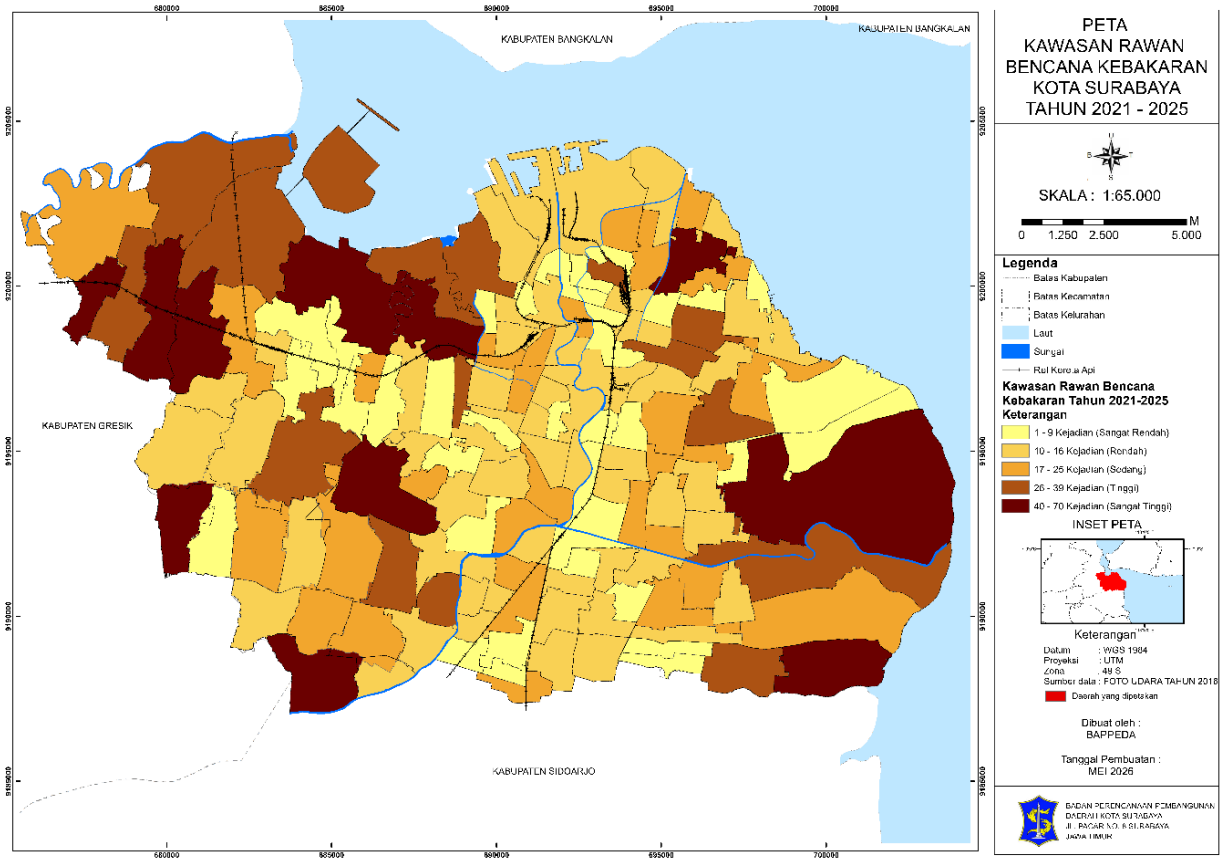


Gambar II.6 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2022

Kejadian kebakaran juga menjadi potensi bencana di Kota Surabaya yang merupakan jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan

penduduk, kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar II.7 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2026

Kajian Risiko Bencana (KRB) merupakan instrumen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berwawasan mitigasi bencana, sekaligus sebagai dasar penyusunan kebijakan pengurangan risiko bencana, peningkatan kesiapsiagaan, serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Berdasarkan pada hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2019 – 2023 yang mengintegrasikan analisis tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah terhadap berbagai potensi bencana, terdapat tujuh jenis bencana yang berpotensi terjadi, yaitu banjir, gempabumi, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, cuaca ekstrem, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan sebagaimana tabel terlampir.

Tabel II.4
Kelas Risiko Bencana di Kota Surabaya

No	Jenis Bencana	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Gempabumi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	Tanah Longsor	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
6	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh jenis bencana tersebut memiliki tingkat risiko tinggi, yang dipengaruhi oleh kombinasi tingkat bahaya dan kerentanan wilayah yang relatif tinggi. Kondisi geografis Kota Surabaya sebagai wilayah hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, dominasi kawasan dataran rendah, tingginya kepadatan penduduk, serta perkembangan kawasan perkotaan yang pesat menjadi faktor yang meningkatkan eksposur terhadap berbagai ancaman bencana.

Berdasarkan klasifikasi tingkat bahaya, bencana banjir dan cuaca ekstrem termasuk dalam kategori bahaya tinggi, sedangkan gempa bumi, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan berada pada kategori bahaya sedang. Meskipun demikian, tingginya tingkat kerentanan wilayah menyebabkan seluruh jenis bencana tersebut memiliki tingkat risiko yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel II.5
Kelas Risiko Per Bencana Per Kecamatan

Kecamatan	Banjir	Gempa bumi	Tanah Longsor	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Cuaca Ekstrim	Kekeringan	Kebakaran Hutan dan Lahan
Asemrowo	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Benowo	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Bubutan	Tinggi	Tinggi	Sedang		Tinggi	Tinggi	Sedang
Bulak	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Dukuh Pakis	Tinggi	Tinggi	Sedang		Tinggi	Tinggi	Sedang
Gayungan	Tinggi	Tinggi	Sedang		Tinggi	Tinggi	Sedang
Genteng	Tinggi	Tinggi	Sedang		Tinggi	Tinggi	Sedang
Gubeng	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Gunung Anyar	Tinggi	Sedang	Sedang		Tinggi	Sedang	Tinggi
Jambangan	Tinggi	Tinggi	Sedang		Tinggi	Tinggi	Tinggi
Karang Pilang	Tinggi	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Tinggi	Sedang

Kecamatan	Banjir	Gempa bumi	Tanah Longsor	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Cuaca Ekstrim	Kekeringan	Kebakaran Hutan dan Lahan
Kenjeran		Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Krembangan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Lakarsantri	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang			
Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang				
Mulyorejo	Tinggi	Sedang	Sedang		Tinggi	Tinggi	Tinggi
Pabean Cantian	Tinggi	Tinggi	Sedang		Tinggi	Tinggi	Sedang
Pakal	Tinggi	Sedang	Sedang		Tinggi	Tinggi	Sedang
Rungkut	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Sambikerep	Rendah	Sedang	Rendah		Sedang	Sedang	Sedang
Sawahan	Tinggi	Tinggi	Tinggi		Tinggi	Tinggi	Sedang
Semampir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Simokerto	Tinggi	Tinggi	Sedang		Tinggi	Tinggi	Sedang
Suko Manunggal	Tinggi	Tinggi	Sedang		Tinggi	Tinggi	Sedang
Sukolilo	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
Tambaksari	Tinggi	Tinggi	Sedang		Tinggi	Tinggi	Sedang
Tandes	Tinggi	Sedang	Sedang		Tinggi	Sedang	Sedang
Tegalsari	Tinggi	Tinggi	Sedang		Tinggi	Tinggi	Sedang
Tenggilis Mejoyo	Tinggi	Tinggi	Sedang		Tinggi	Tinggi	Sedang
Wiyung	Tinggi	Sedang	Sedang		Tinggi	Tinggi	Sedang
Wonocolo	Tinggi	Tinggi	Sedang		Tinggi	Tinggi	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Sementara itu, analisis per kecamatan menunjukkan bahwa ancaman banjir dan cuaca ekstrem merupakan potensi bencana yang paling dominan di sebagian besar wilayah Kota Surabaya. Selain itu, kecamatan-kecamatan di kawasan pesisir seperti Bulak, Kenjeran, Pabean Cantian, Semampir, dan Mulyorejo memiliki kerentanan terhadap gelombang ekstrem dan abrasi. Sementara itu, beberapa wilayah di bagian barat dan selatan kota seperti Karangpilang dan Wonokromo memiliki tingkat ancaman tanah longsor yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Adapun ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan masih ditemukan pada beberapa kecamatan yang memiliki kawasan lahan terbuka, tambak, maupun ruang terbuka non-terbangun.

Sejalan dengan dinamika pembangunan perkotaan dan dampak perubahan iklim yang semakin kompleks, Pemerintah Kota Surabaya saat ini sedang melakukan pemutakhiran Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagai dasar penyempurnaan identifikasi kawasan rawan bencana dan penetapan prioritas penanganan risiko bencana yang akan ditargetkan rilis pada tahun 2026 ini.

Sebagai upaya mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan

bermartabat kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan beberapa strategi dalam pengendalian, pengurangan, serta penanggulangan bencana kebakaran. Salah satu strategi efektif yang dilakukan dalam pengendalian dan pencegahan risiko bencana kebakaran adalah dengan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Selain itu, dalam rangka mengurangi kejadian bencana kebakaran pada bangunan gedung, perlu dilakukan proteksi terhadap bangunan gedung terutama pada wilayah dengan intensitas pemanfaatan bangunan yang cukup tinggi. Untuk itu, upaya aktif yang dilakukan adalah dengan melakukan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung, baik milik swasta maupun milik Pemerintah Kota Surabaya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana di Kota Surabaya.

Tabel II.6
Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Banjir / Pasang Air Laut	0	0	0	8	1
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0
3	Kebakaran Bangunan, Non Bangunan, dan Kendaraan	589	771	368	271	118
4	Gempa Bumi	0	0	0	0	0
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0	0	0	0	0
6	Cuaca Ekstrim / Angin Puting Beliung	0	0	0	67	319
7	Kekeringan	0	0	0	0	0
8	Tsunami	0	0	0	0	0
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	0	0	0	0	0
10	Likuifaksi	0	0	0	0	0
11	Kegagalan Teknologi	0	0	0	1	0
Total		**589**	**771**	**368**	**347**	**438**

Sumber: BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2026

Sesuai dengan tabel di atas dapat dilihat bahwa bencana gempa bumi, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, likuifaksi, serta kegagalan teknologi sepanjang tahun 2022-2026 hingga triwulan II, belum pernah terjadi di Kota Surabaya. Dalam masa peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau, telah tercatat kejadian angin puting beliung sampai dengan triwulan II tahun 2026 telah terjadi sebanyak 319 kali. Dari 118 kejadian kebakaran yang terjadi sampai dengan triwulan II tahun 2026 terdapat 61 kejadian kebakaran bangunan dan 57 kejadian kebakaran non bangunan yang seluruhnya memiliki waktu tanggap kurang dari atau sama dengan 15 menit.

Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan mitigasi bencana dengan melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kepada seluruh elemen masyarakat serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana. Terkait dengan tanggap darurat bencana, Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kapasitas *Command Center 112* dan menyediakan 10 lokasi posko terpadu dan 22 lokasi pos pantau yang dapat memaksimalkan penanganan kejadian kedaruratan sampai dengan 7 menit, serta melakukan kegiatan pasca bencana dengan memberikan bantuan logistik kepada korban bencana yang membutuhkan. Jumlah pos pantau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 34 lokasi disebabkan sebagian pos pantau sudah tidak aktif lagi karena keterbatasan jumlah personil yang ada (pergeseran penugasan di balai RW). Sehingga pos pantau yang masih aktif merupakan pos pantau yang wilayahnya paling sering terjadi kedaruratan.

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan tingkat risiko bencana tiap-tiap Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi-hazard) tersebut dengan tingkatan, seperti nilai 1 untuk rendah, 2 untuk sedang, dan 3 untuk tinggi. Berikut adalah kondisi kinerja historis Pemerintah Kota Surabaya melalui IRB selama 5 tahun.

Tabel II.7
Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Surabaya Tahun 2021–2025

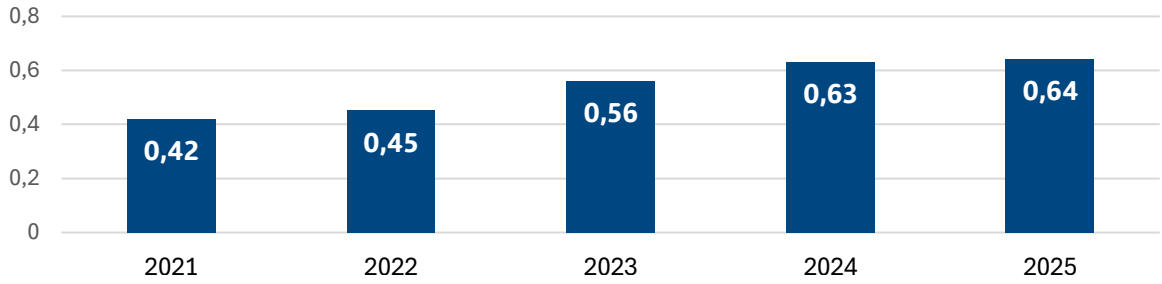
Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Risiko Bencana (IRB)	136,36	124,93	113,31	112,08*	96,76

Sumber: BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur, 2026
**) nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan H&V tahun 2021*

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Surabaya sejak tahun 2021 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2024, nilai IRB Kota Surabaya tercatat sebesar 112,08 dan termasuk dalam klasifikasi risiko sedang, kemudian kembali menurun menjadi 96,76 pada tahun 2025. Penurunan nilai IRB tersebut merupakan capaian yang positif karena indikator ini bersifat *lower is better*, sehingga semakin rendah nilai IRB menunjukkan semakin kecil tingkat risiko bencana yang dihadapi suatu wilayah sebagai hasil dari meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana serta upaya pengurangan risiko bencana. Meskipun demikian, penyelenggaraan urusan kebencanaan pada periode mendatang masih perlu terus diperkuat agar tren penurunan risiko bencana dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Tantangan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya potensi bencana sebagai dampak perubahan iklim, pertambahan penduduk, serta tekanan terhadap lingkungan perkotaan yang dapat memicu risiko bencana lingkungan. Selain itu, aspek tata kelola kebencanaan juga masih

perlu diperkuat, antara lain melalui peningkatan sinkronisasi dan sinergi kebijakan antar Perangkat Daerah dalam mendukung ketahanan daerah. Ketersediaan peralatan kebencanaan yang sesuai standar juga masih belum sepenuhnya mencukupi, sementara kompetensi aparatur dan perangkat kebencanaan dalam penanganan kedaruratan masih perlu ditingkatkan secara merata. Berbagai permasalahan dan tantangan tersebut menjadi isu penting yang perlu direspons melalui penguatan ketangguhan dan ketahanan kota secara berkelanjutan. Upaya yang akan dilakukan antara lain melalui pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat, penguatan kapasitas petugas Kelurahan Tangguh Bencana, serta monitoring berkala terhadap kesiapan dan kelayakan peralatan kebencanaan.

Selain berperan dalam mengurangi risiko bencana, peningkatan ketahanan daerah juga menjadi aspek penting untuk menggambarkan kemampuan daerah dalam bertahan, beradaptasi, dan pulih dari berbagai tantangan, baik yang bersifat alamiah, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Melalui Indeks Ketahanan Daerah, dapat dinilai sejauh mana kesiapan daerah dalam menghadapi bencana alam serta kemampuan daerah menjaga stabilitas ekonomi akibat dampak bencana tersebut. Daerah dengan tingkat ketahanan yang baik akan memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam melindungi masyarakat, menjaga keberlanjutan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, serta menekan kesenjangan sosial secara lebih efektif.



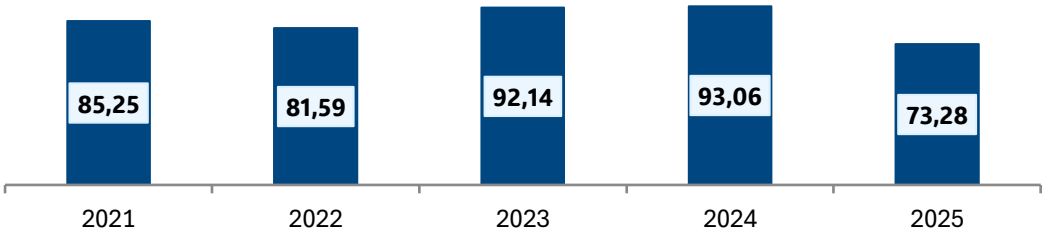
Gambar II.8 Indeks Ketahanan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2025

Sumber: BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur, 2026

Indeks Ketahanan Daerah Kota Surabaya dalam lima tahun terakhir, menunjukkan tren yang terus meningkat. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2025 dengan nilai sebesar 0,64. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki kapasitas yang semakin baik dalam menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari berbagai tantangan, baik berupa bencana alam, perubahan iklim, permasalahan sosial, maupun guncangan ekonomi. Peningkatan IKD tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan Kota Surabaya dalam merespons dinamika perubahan global sekaligus mempertahankan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Untuk menjaga dan memperkuat ketahanan daerah, diperlukan dukungan ketahanan pada berbagai sektor, salah satunya

ketahanan pangan. Ketahanan pangan daerah dapat diukur melalui indikator Indeks Ketahanan Pangan dan prevalensi ketidakcukupan pangan. Ketahanan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah, karena memastikan ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, ketahanan pangan juga berkontribusi terhadap penguatan ketahanan sosial dengan mengurangi potensi konflik yang dapat timbul akibat kelangkaan pangan maupun ketimpangan distribusi pangan. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan.



Gambar II.9 Indeks Ketahanan Pangan Kota Surabaya Tahun 2021-2025

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional, 2026

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Surabaya dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2021, IKP Kota Surabaya tercatat sebesar 85,25. Nilai tersebut sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 81,59. Selanjutnya, capaian IKP kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 92,14 dan mencapai 93,06 pada tahun 2024. Capaian tersebut dihitung berdasarkan metode IKP yang digunakan oleh Badan Pangan Nasional pada periode 2021–2024, yang mengukur ketahanan pangan melalui aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan dengan sejumlah indikator yang telah distandarisasi dan dibobotkan. Berdasarkan metode tersebut, kondisi ketahanan pangan Kota Surabaya berada pada kategori yang baik.

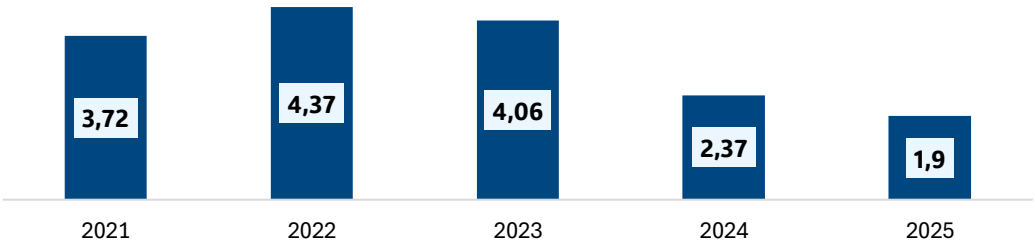
Pada tahun 2025, nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Surabaya tercatat sebesar 73,28. Nilai tersebut dihitung menggunakan metode IKP yang telah disempurnakan oleh Badan Pangan Nasional melalui perubahan indikator dan pembobotan yang digunakan dalam pengukuran aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Metode yang digunakan pada periode 2021–2024 menggunakan 9 indikator, sedangkan metode yang diterapkan mulai tahun 2025 menggunakan 12 indikator yang lebih komprehensif. Dengan demikian, capaian IKP

tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun 2021–2024 yang menggunakan metode sebelumnya. Perbedaan nilai antarperiode tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan perubahan kondisi ketahanan pangan daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan metode penghitungan yang digunakan.

Terlepas dari perubahan metode penghitungan tersebut, ketahanan pangan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi sosial ekonomi masyarakat, efektivitas kebijakan pangan dan pertanian, ketersediaan pasokan, serta stabilitas distribusi pangan. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan perlu terus diarahkan pada upaya menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi seluruh masyarakat guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Selain IKP, ketahanan pangan juga dapat dilihat melalui prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Indikator ini menggambarkan persentase penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan pangan secara optimal, baik dari sisi jumlah maupun kualitas gizi. Indikator ini penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menjadi sinyal perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah, antara lain melalui peningkatan ketersediaan pangan lokal, perbaikan distribusi dan akses pangan, penguatan cadangan pangan daerah, serta edukasi pola konsumsi pangan yang sehat, bergizi, beragam, dan seimbang. Dengan demikian, pengendalian ketidakcukupan konsumsi pangan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar II.10 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2021-2025
Sumber: BPS, 2026

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Surabaya selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung membaik. Pada tahun 2021, angkanya tercatat sebesar 3,72 persen dan meningkat menjadi 4,37 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, angka tersebut mulai menurun menjadi 4,06 persen pada tahun 2023, kemudian kembali turun cukup signifikan menjadi 2,37 persen pada tahun 2024, dan

mencapai titik terendah sebesar 1,90 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemenuhan konsumsi pangan masyarakat, meskipun tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti daya beli, stabilitas pasokan, distribusi pangan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2.1.1.4 Kondisi Lingkungan Hidup dan Infrastrukur Dasar

Kondisi lingkungan hidup dan ketersediaan infrastruktur dasar merupakan aspek penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur dasar dapat diukur melalui berbagai indikator, antara lain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), penurunan emisi gas rumah kaca secara kumulatif dan jumlah timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah. Selain itu, cakupan akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan dan akses sanitasi aman juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan dasar, kesehatan lingkungan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah dalam periode tertentu. IKLH disusun sebagai nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. Secara nasional, IKLH digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Melalui IKLH, dapat diketahui sejauh mana kualitas lingkungan masih mampu mendukung kehidupan manusia dan ekosistem, atau justru mengalami penurunan.

Data IKLH menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang lebih tepat, terarah, dan berbasis bukti. Hasil pengukuran IKLH juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi komponen lingkungan yang memerlukan perhatian lebih, sehingga upaya pengendalian pencemaran, pemulihan kualitas lingkungan, pengelolaan sampah, penyediaan air minum, serta sanitasi aman dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029. Pengukuran Indeks Kualitas Udara dilakukan pada beberapa lokasi yang mewakili karakteristik aktivitas perkotaan, antara lain kawasan dengan kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, permukiman, perkantoran, perdagangan, serta area sekolah. Dengan demikian, hasil

pemantauan tersebut diharapkan dapat merepresentasikan kondisi kualitas udara ambien di Kota Surabaya.

Sementara itu, Indeks Kualitas Lahan (IKL) atau indeks tutupan hutan pada dasarnya dihitung melalui perbandingan antara luas tutupan hutan dengan luas wilayah administratif. Namun, karena Kota Surabaya tidak memiliki kawasan hutan, maka perhitungan IKL menggunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai pendekatan dalam menggambarkan kualitas tutupan lahan perkotaan.

Kondisi kualitas udara, air, dan tutupan lahan di Kota Surabaya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jumlah kendaraan bermotor, aktivitas industri besar dan kecil, kepadatan permukiman, serta intensitas aktivitas perkotaan. Khusus untuk tutupan lahan, kualitasnya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lahan, luasan Ruang Terbuka Hijau, serta dukungan sistem persampahan dan sanitasi. Selain itu, terdapat perbedaan metode perhitungan antara IKLH tingkat nasional dan Provinsi Jawa Timur dengan IKLH tingkat kabupaten/kota, yaitu tidak dimasukkannya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dalam perhitungan IKLH kabupaten/kota. Berikut disajikan capaian nilai IKLH Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2021–2025.

Tabel II.8
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025*
IKLH Kota Surabaya	35,06	55,97	54,52	60,76	61,82
IKLH Provinsi Jawa Timur	67,70	69,92	69,59	71,14	73,43
IKLH Nasional	71,45	72,42	72,54	73,55	78,76

*Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2026. *) Angka sementara*

Tabel II.9
Indeks Penyusun IKLH Tahun 2021 – 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025*
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	35,06	55,97	54,52	60,76	61,82
Indeks Kualitas Air (IKA)	N/A	49,15	49,02	49,26	65,41
Indeks Kualitas Udara (IKU)	74,38	75,76	70,15	85,68	71,22
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	22,56	31,07	35,06	34,39	38,29

*Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2026. IKA tahun 2021 tidak masuk dalam perhitungan. *) Angka sementara*

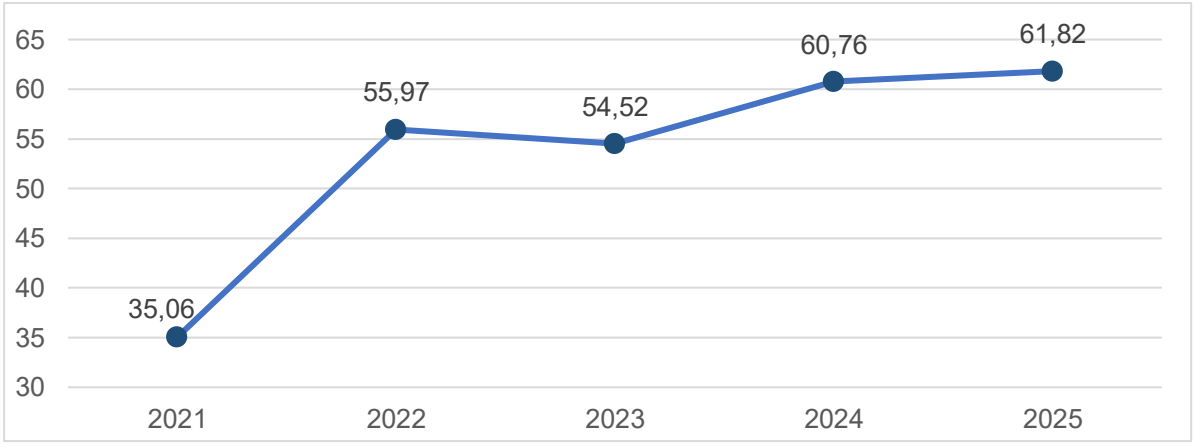
Berdasarkan data capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Surabaya pada periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang bervariasi pada setiap komponennya. Pada tahun 2021, diterapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sehingga nilai *baseline* IKLH di Indonesia ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini menyebabkan nilai IKA tidak masuk dalam perhitungan sehingga terjadi nilai IKLH tercatat cukup rendah di tahun 2021. Indeks Kualitas Air sampai dengan tahun 2025

relatif meningkat menjadi 65,41. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa revitalisasi sungai dan perluasan cakupan pengelolaan limbah domestik.

Indeks Kualitas Udara menunjukkan tren meningkat hingga tahun 2024 dari 74,38 pada tahun 2021, menjadi 85,68 pada tahun 2024. Namun mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2025 menjadi 71,22. Penurunan ini disebabkan meningkatnya emisi polutan dari sumber bergerak seiring pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, sehingga beban pencemar udara meningkat. Kemudian penggunaan transportasi umum juga belum optimal, sehingga peralihan moda dari kendaraan pribadi ke angkutan umum belum signifikan untuk menurunkan emisi.

Indeks Kualitas Lahan terus mengalami peningkatan dari 22,56 pada tahun 2021 menjadi 38,29 pada tahun 2025, peningkatan ini dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa keberhasilan mempertahankan ruang terbuka hijau dan pengendalian alih fungsi lahan. Namun Indeks Kualitas Lahan mengalami sedikit penurunan di tahun 2024 menjadi 34,39. Hal ini disebabkan tekanan urbanisasi yang tinggi sehingga kebutuhan terhadap kawasan permukiman dan pengembangan infrastruktur yang berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan berdampak pada nilai Indeks Kualitas Lahan.

Secara keseluruhan, kualitas lingkungan hidup Kota Surabaya masih menghadapi tantangan pada aspek air, udara, dan lahan. Meskipun berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan, infrastruktur hijau, dan partisipasi masyarakat telah mendorong perbaikan, tekanan dari limbah domestik dan industri, emisi kendaraan, berkurangnya lahan hijau, serta urbanisasi masih perlu dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengendalian pencemaran, penguatan ruang terbuka hijau, serta penerapan pembangunan berwawasan lingkungan secara terpadu.



Gambar II.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2021-2025

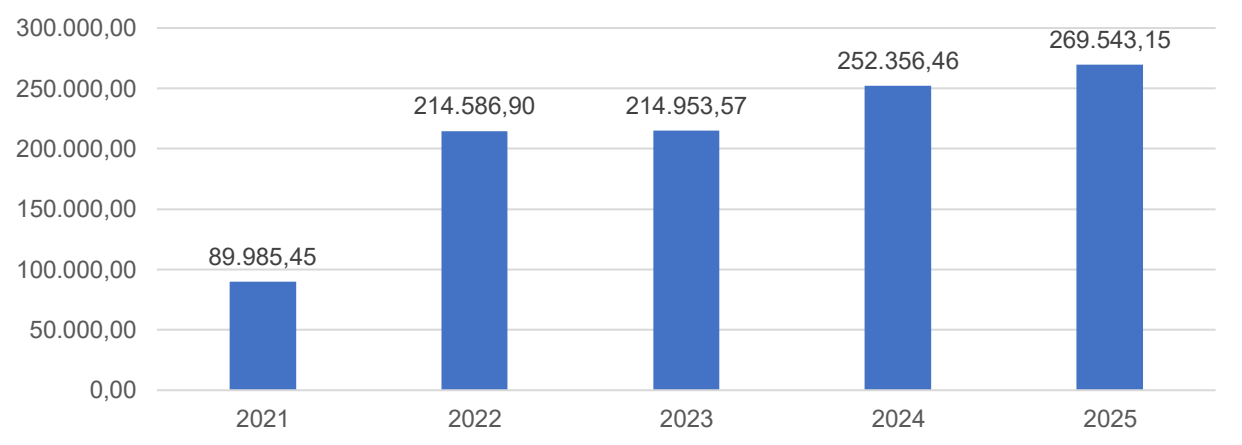
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2026. Tahun 2025 merupakan angka sementara

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Surabaya menunjukkan perkembangan fluktuatif, namun cenderung meningkat. Penurunan signifikan pada tahun 2021 dipengaruhi penerapan Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021, di mana baseline IKLH ditetapkan oleh Kementerian LHK dan nilai IKA belum masuk dalam perhitungan. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebesar 61,82.

Penurunan IKLH pada tahun 2023 disebabkan oleh turunnya IKA menjadi 49,02 dan IKU menjadi 70,15, meskipun IKL meningkat menjadi 35,06. Penurunan IKU dipengaruhi oleh kemarau panjang, peningkatan suhu dan debu, serta pertumbuhan jumlah kendaraan yang belum diimbangi pemanfaatan transportasi umum secara optimal. Sementara itu, penurunan IKA dipengaruhi oleh pencemaran dari limbah rumah tangga dan non-rumah tangga yang sulit terurai.

Dalam menekan emisi gas rumah kaca, Pemerintah Kota Surabaya terus mengoptimalkan perawatan ruang terbuka hijau, taman kota, dan kawasan mangrove sebagai penyerap karbon. Hasil analisis tahun 2024 menunjukkan kemampuan serapan karbon ekosistem mangrove mencapai 4.902,86 ton-C/Ha di pantai utara dan 8.020,13 ton-C/Ha di pantai timur. Selain itu, pengukuran pada 31 taman kota tahun 2022 menunjukkan total stok karbon sebesar 3.914,79 ton-C/m².

Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan inventarisasi emisi tahunan melalui aplikasi SIGN SMART Kementerian LHK, meliputi sektor limbah, energi, IPPU, dan AFOLU. Selain itu, program Perangkat Daerah yang berkontribusi terhadap penurunan emisi juga diinput dalam aplikasi AKSARA Bappenas untuk menghitung potensi penurunan emisi secara terukur.



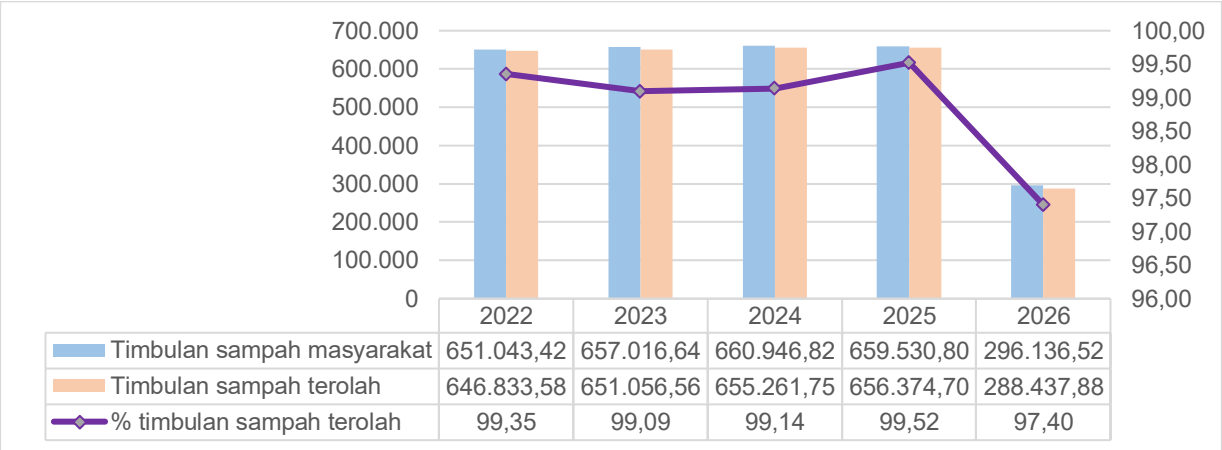
Gambar II.12 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif Kota Surabaya Tahun 2021-2025

Sumber: Aksara Bappenas, 2026

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif Kota Surabaya Tahun 2021–2025 menunjukkan tren meningkat. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2022,

dari 89.985,45 ton CO_2 eq pada tahun 2021 menjadi 214.586,90 ton CO_2 eq. Sedangkan pada tahun 2022–2025, peningkatan tetap berlanjut meskipun lebih moderat, mencapai 269.543,15 ton CO_2 eq pada akhir tahun 2025Capaian ini didorong oleh penguatan kebijakan lingkungan, perluasan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, efisiensi energi, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program daur ulang dan pengurangan sampah. Namun demikian, upaya penurunan emisi masih menghadapi tantangan, antara lain tingginya penggunaan kendaraan pribadi, keterbatasan infrastruktur hijau di beberapa wilayah, serta perlunya penguatan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan strategi berkelanjutan melalui sinergi kebijakan lingkungan, inovasi teknologi hijau, pengelolaan sampah terpadu, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Fasilitas pengolahan sampah juga berperan penting dalam menekan emisi dan mengurangi beban TPA. Pengelolaan sampah yang optimal tidak hanya mengurangi pencemaran air, udara, dan tanah, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.



	2022	2023	2024	2025	2026
Timbulan sampah masyarakat	651.043,42	657.016,64	660.946,82	659.530,80	296.136,52
Timbulan sampah terolah	646.833,58	651.056,56	655.261,75	656.374,70	288.437,88
% timbulan sampah terolah	99,35	99,09	99,14	99,52	97,40

Gambar II.13 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kota Surabaya (Ton/Tahun) Tahun 2022–2026 (TW II)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2026

Pada periode tahun 2022 hingga 2025, volume sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. Volume sampah terolah meningkat dari 646.833,58 ton/tahun pada tahun 2022 menjadi 651.056,56 ton/tahun pada tahun 2023, 655.261,75 ton/tahun pada tahun 2024, dan 656.374,70 ton/tahun pada tahun 2025. Adapun pada tahun 2026 sampai dengan Triwulan II, jumlah volume sampah yang terolah tercatat sebesar 288.437,88 ton. Capaian tersebut belum dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahunan pada periode sebelumnya karena data yang tersedia masih bersifat sementara dan baru mencerminkan realisasi hingga Triwulan II, sehingga volume sampah terolah

diperkirakan masih akan bertambah seiring dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah hingga akhir tahun 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin optimalnya pemanfaatan fasilitas pengolahan sampah dalam mendukung pengelolaan persampahan di Kota Surabaya seiring dengan meningkatnya aktivitas perkotaan.

Peningkatan volume sampah yang berhasil diolah tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam memperkuat pengelolaan sampah secara terpadu, mulai dari pengurangan sampah di sumber hingga peningkatan kapasitas pengolahan. Dari sisi *reduce*, Pemerintah Kota Surabaya melalui Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya telah mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, minimarket, dan supermarket, sehingga masyarakat didorong untuk membawa tas belanja sendiri atau menggunakan tas guna ulang. Sementara itu, dari sisi *reuse* dan *recycle*, Pemerintah Kota Surabaya terus menggalakkan program pemilahan sampah sejak lingkup rumah tangga melalui edukasi dan pendampingan kepada masyarakat agar sampah dipilah sesuai jenisnya sebelum diangkut ke fasilitas pengolahan melalui sosialisasi pada pelaksanaan Kampung Pancasila. Upaya tersebut menjadi bagian dari penerapan prinsip 3R *(Reduce, Reuse, Recycle)* yang bertujuan mengurangi timbulan sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Hingga Triwulan II Tahun 2026, volume sampah yang telah terolah mencapai 288.437,88 ton menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah tetap berjalan secara berkesinambungan pada tahun berjalan. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah akan terus dilakukan dengan didukung oleh peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan dan optimalisasi kelembagaan pengelolaan sampah..

Saat ini, Kota Surabaya telah memiliki fasilitas pengolahan sampah berupa 13 TPS 3R dan 27 rumah kompos yang berperan dalam mendukung pemanfaatan sampah secara lebih optimal. Selain itu, layanan pengumpulan sampah rumah tangga menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah yang lebih teratur, efektif, dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan, memperpanjang usia TPA, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya. Upaya pengelolaan sampah ini pada tahun 2027 akan diperkuat dengan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) tahap kedua dengan kapasitass 800 Ton perhari.



Gambar II.14 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kota Surabaya Tahun 2021-2025

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2026

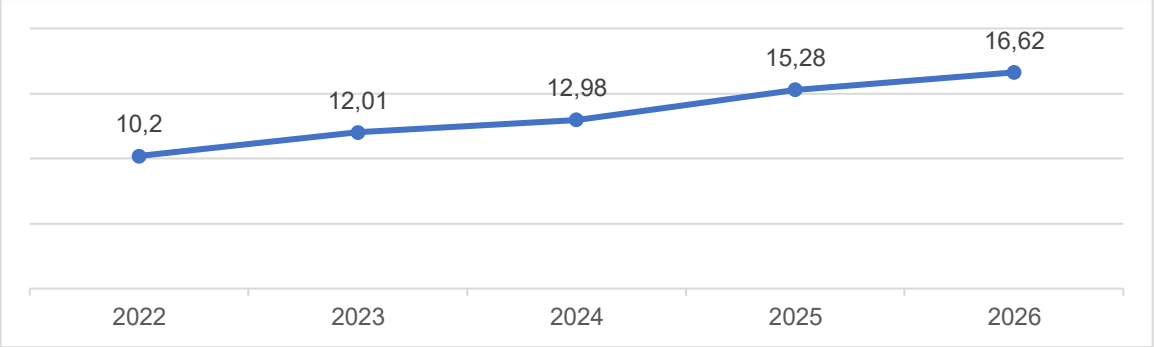
**) Jumlah rumah tangga didasarkan pada jumlah keluarga berdasarkan rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025*

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kota Surabaya menunjukkan capaian yang konsisten sebesar 100% selama periode 2021–2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh rumah tangga di Kota Surabaya telah memperoleh layanan pengumpulan sampah secara penuh tanpa mengalami perubahan selama lima tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa cakupan pelayanan persampahan telah mencapai target maksimal dan mampu dipertahankan secara berkelanjutan.

Konsistensi Kota Surabaya dalam mempertahankan capaian 100% tersebut mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga keberlangsungan layanan pengumpulan sampah kepada seluruh rumah tangga. Adapun tantangan penyelenggaraan persampahan tidak lagi berfokus pada perluasan cakupan layanan, melainkan pada upaya mempertahankan kualitas pelayanan sehingga pengelolaan persampahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Selain pengelolaan sampah, penyediaan akses sanitasi aman merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Akses sanitasi yang memenuhi standar berperan dalam mencegah pencemaran lingkungan akibat pengelolaan air limbah domestik yang tidak memadai, sekaligus mengurangi risiko timbulnya penyakit berbasis lingkungan. Oleh karena itu, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi aman menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat pelayanan sanitasi, yang mencerminkan persentase rumah tangga yang telah memiliki fasilitas pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Akses dikategorikan aman apabila rumah tangga memiliki jamban sehat dengan lumpur tinja yang disedot berkala minimal tiga tahun sekali dan dibuang ke IPLT, atau terhubung dengan SPALD-T. Perhitungan indikator menggunakan total rumah tangga Kota Surabaya berdasarkan jumlah NOP tahun 2023 sebanyak 577.832 rumah tangga. Capaian indikator dihitung berdasarkan persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi aman pada tahun berjalan terhadap total rumah tangga, kemudian diakumulasikan dengan capaian tahun sebelumnya. Dengan demikian, indikator ini menunjukkan perkembangan kumulatif peningkatan akses sanitasi aman di Kota Surabaya dari tahun ke tahun. Berikut ini merupakan grafik Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Surabaya Tahun 2022 hingga Triwulan II Tahun 2026.



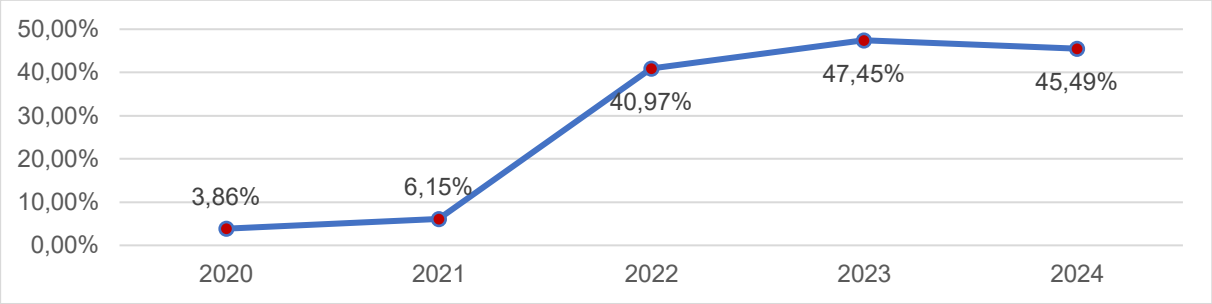
Gambar II.15 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Surabaya Tahun 2022-2026 (TW II)

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, 2026

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kota Surabaya menunjukkan tren meningkat sejak mulai dihitung pada tahun 2022. Capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sebesar 16,62%. Hal ini menunjukkan bahwa akses sanitasi aman semakin membaik, namun masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Upaya peningkatan akses sanitasi aman dilakukan melalui berbagai upaya di antaranya penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) sehingga penyedotan tidak hanya berdasar atas inisiatif masyarakat, tapi juga data rumah yang secara periodik sudah saatnya dilakukan penyedotan (periode penyedotan paling lama 3 tahun). Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya akan berkolaborasi dengan Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya untuk pengelolaan limbah domestik, serta secara bertahap akan menjadikannya operator pengelolaan limbah domestik. Dengan transformasi operator tersebut, diharapkan bisa dilakukan kerjasama dengan mitra truk swasta, sehingga armada yang mendukung penerapan LLTT lebih banyak. Upaya lain adalah sosialisasi dengan melibatkan kecamatan, kelurahan, RT/RW, dan kader lingkungan untuk edukasi pentingnya penyedotan berkala serta tentang penerapan LLTT. Dengan berbagai upaya di atas, Pemerintah Kota Surabaya optimis target 2027

untuk capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kota Surabaya dapat tercapai.

Selain sanitasi aman, akses air perpipaan juga berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Air perpipaan umumnya telah melalui proses pengolahan sehingga lebih aman digunakan dan dapat mencegah penyakit berbasis air, seperti diare dan kolera. Ketersediaan air bersih yang mudah diakses juga membantu efisiensi waktu dan biaya, serta memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Berikut ini merupakan akses rumah tangga terhadap air siap minum di Kota Surabaya.



Gambar II.16 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kota Surabaya Tahun 2020-2024

Sumber: Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, 2026

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan di Kota Surabaya menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Cakupan layanan meningkat dari 3,86% pada tahun 2020 menjadi 6,15% pada tahun 2021, kemudian naik signifikan menjadi 40,97% pada tahun 2022 dan 47,45% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, capaian tercatat 45,49%. Penurunan ini dipengaruhi adanya penambahan rumah tangga dengan pemasangan baru yang masih memerlukan *treatment* lanjutan pada jaringan perpipaan agar memenuhi kategori air siap minum. Sedangkan realisasi tahun 2025 masih dalam proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Perumda Air Minum Surya Sembada selaku BUMD yang menangani pengelolaan air minum di Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan dengan cara perbaikan jaringan (penggantian pipa yang sudah lama) guna meningkatkan kualitas air, pembangunan reservoir pelayanan, penyediaan pos desinfektan, rehab dan penambahan jaringan distribusi air minum serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), namun sampai dengan penyusunan dokumen RKPD 2027 belum terdapat rilis resmi atas realisasi kinerja tahun 2025.

2.1.1.5 Kondisi Demografis

Penduduk memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Apabila tidak dikelola dengan baik, penduduk dapat menjadi beban pembangunan, namun sebaliknya dapat menjadi modal potensial apabila didukung dengan kebijakan yang tepat. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Surabaya yang ber-NIK per 31 Desember 2025 sesuai DKB Semester II Tahun 2025 mencapai 3.003.860 jiwa yang tersebar di 31 kecamatan.

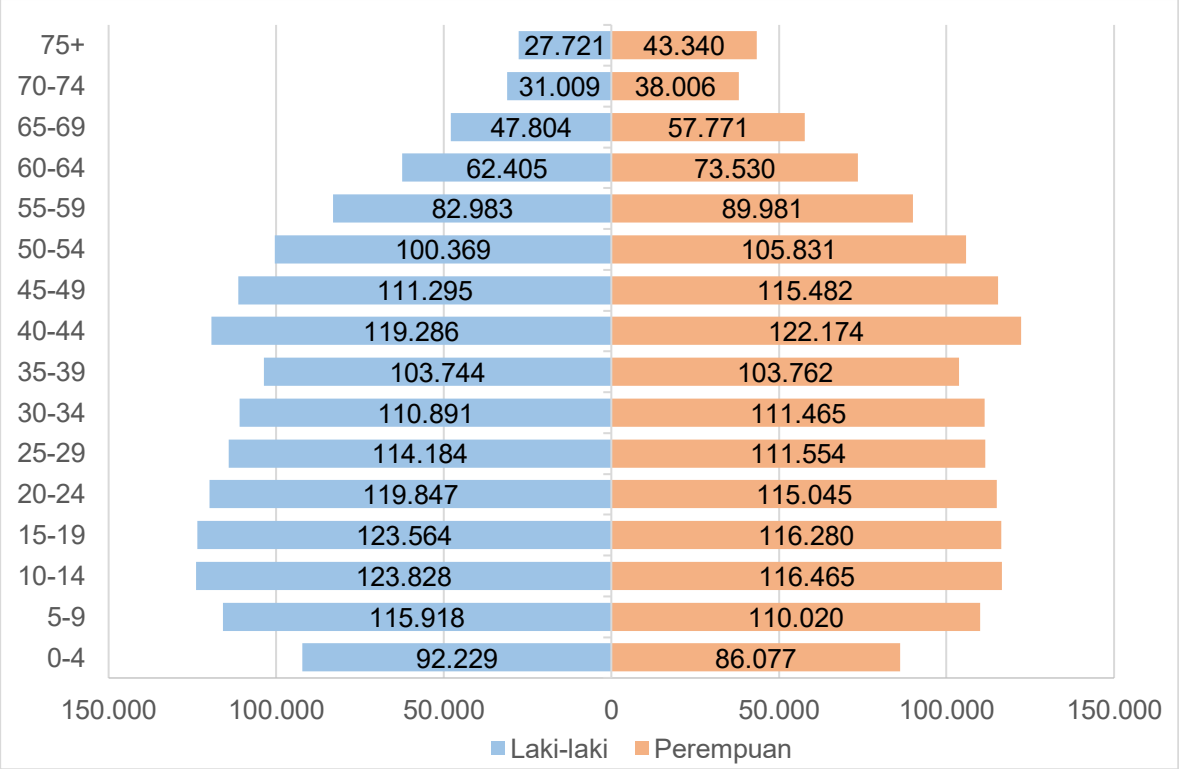
Perkembangan jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Dari sisi kepadatan, terdapat 7 kecamatan dengan kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km², yaitu Bubutan, Kenjeran, Sawahan, Semampir, Simokerto, Tambaksari, dan Tegalsari. Oleh karena itu, penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi, dan air bersih perlu diprioritaskan pada wilayah padat penduduk untuk meningkatkan kualitas sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Sementara itu, pembangunan pada wilayah berkepadatan sedang dan rendah diarahkan pada penguatan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi wilayah. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.10
Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)
1	Asem Rowo	15,0083	48.849	3.255	17	Pakal	18,5756	65.486	3.525
2	Benowo	26,6462	75.716	2.842	18	Rungkut	22,9428	123.956	5.403
3	Bubutan	3,906	95.522	24.455	19	Sambikerep	17,4166	69.584	3.995
4	Bulak	6,2363	48.118	7.716	20	Sawahan	7,1563	196.811	27.502
5	Dukuh Pakis	10,2708	59.185	5.762	21	Semampir	9,0671	181.769	20.047
6	Gayungan	5,9121	43.480	7.354	22	Simokerto	2,63	90.663	34.473
7	Genteng	4,0919	57.255	13.992	23	Sukolilo	30,1774	115.944	3.842
8	Gubeng	7,9291	131.164	16.542	24	Sukomanunggal	9,4023	102.681	10.921
9	Gunung Anyar	10,1527	62.669	6.173	25	Tambaksari	8,9657	225.939	25.200
10	Jambangan	4,1191	54.140	13.144	26	Tandes	9,9805	90.999	9.118
11	Karang Pilang	9,3896	75.164	8.005	27	Tegalsari	4,3334	96.237	22.208
12	Kenjeran	8,5193	186.189	21.855	28	Tenggilis Mejoyo	5,8085	58.645	10.096
13	Krembangan	8,6046	113.890	13.236	29	Wiyung	12,317	76.770	6.233
14	Lakarsantri	18,6939	65.497	3.504	30	Wonocolo	6,5445	79.530	12.152
15	Mulyorejo	17,3741	87.932	5.061	31	Wonokromo	8,2768	151.571	18.313
16	Pabean Cantian	5,4765	72.505	13.239	**Total**		**335,925**	**3.003.860**	**8.942**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026, diolah

Jumlah penduduk Kota Surabaya sesuai DKB Semester 2 Tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin, meliputi 1.516.783 jiwa atau 50,49% penduduk perempuan dan 1.487.077 jiwa atau 49,51% penduduk laki-laki. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, atau lebih dikenal sebagai piramida penduduk, dapat dilihat pada Gambar II.17.



Gambar II.17 Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2026, diolah

Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada tahun 2025 yaitu usia 4-6 tahun sebanyak 131.431 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 277.279 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 146.510 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 145.577 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.11
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2025

No	Kecamatan	4-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Asemrowo	2.646	5.059	2.483	2.555
2	Benowo	3.398	7.258	3.914	3.884
3	Bubutan	4.069	8.660	4.642	4.633
4	Bulak	2.355	4.664	2.499	2.480
5	Dukuh Pakis	2.387	5.348	2.820	2.789
6	Gayungan	1.728	3.949	2.089	2.120
7	Genteng	2.318	4.901	2.661	2.755
8	Gubeng	5.170	11.043	5.792	6.071
9	Gunung Anyar	2.755	5.819	3.030	2.947

No	Kecamatan	4-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
10	Jambangan	2.431	5.097	2.742	2.636
11	Karangpilang	3.269	6.767	3.491	3.535
12	Kenjeran	9.766	19.129	9.542	9.448
13	Krembangan	5.329	10.704	5.630	5.560
14	Lakarsantri	2.889	6.071	3.252	3.303
15	Mulyorejo	3.472	7.551	4.085	4.054
16	Pabean Cantian	3.319	6.742	3.528	3.544
17	Pakal	2.922	6.231	3.225	3.233
18	Rungkut	5.354	11.517	5.958	5.721
19	Sambikerep	3.015	6.264	3.509	3.339
20	Sawahan	8.072	17.441	9.569	9.550
21	Semampir	9.379	18.960	9.651	9.555
22	Simokerto	4.117	8.427	4.418	4.338
23	Sukolilo	4.836	10.783	5.552	5.456
24	Sukomanunggal	4.427	9.378	4.886	4.757
25	Tambaksari	9.298	20.338	11.002	10.838
26	Tandes	3.855	8.485	4.613	4.530
27	Tegalsari	3.902	8.631	4.596	4.517
28	Tenggilis Mejoyo	2.394	5.353	2.788	2.813
29	Wiyung	3.140	6.687	3.646	3.506
30	Wonocolo	3.415	7.152	3.815	3.783
31	Wonokromo	6.004	12.870	7.082	7.327
Jumlah		**131.431**	**277.279**	**146.510**	**145.577**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2026, diolah

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada tabel di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pada tabel berikut.

Tabel II.12
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama

Agama	2021	2022	2023	2024	2025
1. Islam	85,83%	85,99%	86,05%	86,08%	86,11%
2. Kristen	8,68%	8,59%	8,56%	8,54%	8,52%
3. Katholik	3,87%	3,83%	3,83%	3,83%	3,84%
4. Budha	1,37%	1,34%	1,32%	1,30%	1,29%
5. Hindu	0,22%	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%
6. Konghuchu	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
7. Lainnya	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Pada tahun 2025, penduduk Kota Surabaya didominasi oleh pemeluk agama Islam sebesar 86,11%, sedangkan 13,89% lainnya beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Keberagaman agama dan budaya ini perlu terus dijaga melalui penguatan toleransi kehidupan beragama dan sosial untuk mencegah potensi

konflik. Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu prasyarat penting bagi kelancaran pembangunan daerah.

Berdasarkan jenis pekerjaan, penduduk Kota Surabaya tersebar pada 81 jenis pekerjaan. Komposisi terbesar adalah penduduk dengan status belum/tidak bekerja sebesar 27,48%, diikuti karyawan swasta sebesar 25,25%, dan pelajar/mahasiswa sebesar 20,32%. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kebijakan pembangunan yang mendukung perluasan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penguatan layanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel II.13
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2025

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Belum/Tidak Bekerja	825.459	27,47994
2	Karyawan Swasta	758.507	25,25108
3	Pelajar/Mahasiswa	610.544	20,32531
4	Mengurus Rumah Tangga	504.297	16,78830
5	Wiraswasta	158.019	5,26053
6	Pegawai Negeri Sipil	33.765	1,12405
7	Guru	22.775	0,75819
8	Pensiunan	16.506	0,54949
9	Tentara Nasional Indonesia	10.297	0,34279
10	Pedagang	6.822	0,22711
11	Dokter	6.799	0,22634
12	Dosen	6.644	0,22118
13	Karyawan BUMN	6.429	0,21402
14	Buruh Harian Lepas	5.609	0,18673
15	Kepolisian RI	4.239	0,14112
16	Petani/Pekebun	3.498	0,11645
17	Perawat	3.047	0,10144
18	Pekerjaan Lainnya	2.931	0,09757
19	Perdagangan	2.676	0,08909
20	Karyawan Honorer	2.275	0,07574
21	Sopir	1.850	0,06159
22	Tukang Batu	1.359	0,04524
23	Nelayan/Perikanan	1.019	0,03392
24	Bidan	994	0,03309
25	Karyawan BUMD	700	0,02330
26	Pendeta	498	0,01658
27	Pembantu Rumah Tangga	490	0,01631
28	Tukang Jahit	479	0,01595
29	Apoteker	477	0,01588
30	Industri	473	0,01575
31	Mekanik	385	0,01282
32	Pelaut	344	0,01145
33	Buruh Tani/ Perkebunan	333	0,01109
34	Pengacara	283	0,00942
35	Transportasi	277	0,00922
36	Konstruksi	255	0,00849
37	Tukang Kayu	252	0,00839
38	Notaris	233	0,00776
39	Wartawan	224	0,00746
40	Konsultan	181	0,00603
41	Seniman	159	0,00529
42	Tukang Las/Pandai Besi	151	0,00503
43	Biarawati	149	0,00496
44	Arsitek	130	0,00433
45	Tukang Listrik	113	0,00376
46	Buruh Nelayan/ Perikanan	86	0,00286
47	Akuntan	85	0,00283
48	Juru Masak	75	0,00250
49	Penata Rias	74	0,00246
50	Ustadz/Mubaligh	71	0,00236
51	Psikiater/Psikolog	64	0,00213
52	Penata Rambut	59	0,00196
53	Tukang Sol Sepatu	52	0,00173
54	Peneliti	45	0,00150
55	Tukang Cukur	41	0,00136
56	Pastor	38	0,00127
57	Peternak	28	0,00093
58	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	20	0,00067
59	Pilot	19	0,00063
60	Penata Busana	17	0,00057
61	Perancang Busana	16	0,00053
62	Penterjemah	15	0,00050
63	Buruh Peternakan	15	0,00050
64	Imam Masjid	13	0,00043
65	Penyiar Radio	13	0,00043
66	Tabib	10	0,00033
67	Penyiar Televisi	9	0,00030
68	Anggota DPRD Provinsi	8	0,00027
69	Pialang	7	0,00023

No	Pekerjaan	Jumlah	%
70	Tukang Gigi	5	0,00017
71	Anggota DPR-RI	5	0,00017
72	Perangkat Desa	4	0,00013
73	Anggota Kabinet/ Kementerian	3	0,00010
74	Promotor Acara	3	0,00010
75	Kepala Desa	3	0,00010
76	Walikota	3	0,00010
77	Paranormal	2	0,00007
78	Gubernur	2	0,00007
79	Wakil Walikota	2	0,00007
80	Paraji	1	0,00003
81	Wakil Bupati	1	0,00003

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Berdasarkan Data DKB Semester II Tahun 2025, komposisi penduduk Kota Surabaya menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa proporsi terbesar adalah lulusan SMA/sederajat sebesar 33,68%. Selanjutnya, penduduk dengan status tidak/belum sekolah sebesar 20,20%, dan tamatan SD/sederajat sebesar 14,32%. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Surabaya telah memiliki pendidikan menengah, namun tetap diperlukan penguatan akses dan kualitas pendidikan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

Tabel II.14
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
Tidak/Belum Sekolah	606.732	20,20
Belum Tamat SD/sederajat	240.884	8,02
Tamat SD/sederajat	430.164	14,32
SMP/sederajat	329.480	10,97
SMA/sederajat	1.011.554	33,68
D1/D2	16.053	0,53
D3/Sarjana Muda	41.292	1,37
D4/S1	303.575	10,11
S2	22.328	0,74
S3	1.798	0,06
Total	**3.003.860**	**100,00**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Laju pertumbuhan penduduk merupakan persentase perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini mencerminkan dinamika kependudukan yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Laju pertumbuhan penduduk Kota Surabaya tahun 2025 disajikan pada tabel berikut..

Tabel II.15
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Surabaya Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun
1	Pakal	65.486	1,51%
2	Benowo	75.716	1,04%
3	Lakarsantri	65.497	0,74%
4	Sambikerep	69.584	0,74%
5	Bulak	48.118	0,58%

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun
6	Gunung Anyar	62.669	0,52%
7	Kenjeran	186.189	0,48%
8	Wiyung	76.770	0,35%
9	Rungkut	123.956	0,25%
10	Sukolilo	115.944	0,03%
11	Asemrowo	48.849	0,02%
12	Jambangan	54.140	-0,13%
13	Dukuh Pakis	59.185	-0,27%
14	Mulyorejo	87.932	-0,32%
15	Karang Pilang	75.164	-0,45%
16	Tambaksari	225.939	-0,48%
17	Tenggilis Mejoyo	58.645	-0,49%
18	Wonocolo	79.530	-0,63%
19	Semampir	181.769	-0,83%
20	Gayungan	43.480	-0,83%
21	Krembangan	113.890	-0,85%
22	Sawahan	196.811	-0,86%
23	Tandes	90.999	-0,86%
24	Gubeng	131.164	-0,92%
25	Bubutan	95.522	-1,22%
26	Wonokromo	151.571	-1,30%
27	Tegalsari	96.237	-1,31%
28	Sukomanunggal	102.681	-1,43%
29	Simokerto	90.663	-1,51%
30	Genteng	57.255	-1,65%
31	Pabean Cantian	72.505	-1,93%
Kota Surabaya		**3.003.860**	**-0,47%**

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2026

Pada tahun 2025, pertumbuhan penduduk tertinggi masih pada Kecamatan Pakal sebesar 1,51% yang diikuti Kecamatan Benowo sebesar 1,04%. Sedangkan penurunan jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2025 terjadi di Kecamatan Pabean Cantian sebesar 1,91% diikuti oleh Kecamatan Genteng (1,65%) dan Simokerto (1,51%).

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya menunjukkan tren yang positif pascapandemi Covid-19. Seiring dengan pulihnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha serta didukung berbagai upaya pemulihan ekonomi, perekonomian Kota Surabaya kembali tumbuh secara kuat. Pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan berbagai inovasi layanan ekonomi, termasuk melalui platform digital seperti e-Peken, turut mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Kota Surabaya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya selama periode 2022–2026 (Triwulan I) menunjukkan kinerja yang positif dan relatif stabil. Pada tahun 2022, perekonomian Kota Surabaya tumbuh sebesar 6,51% sebagai dampak dari semakin pulihnya aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada tahun 2023 sebesar 5,70%, meningkat menjadi 5,76% pada tahun 2024, dan kembali menguat hingga mencapai 5,87% pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kota Surabaya mampu mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian ekonomi global maupun nasional.

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang positif berlanjut pada Triwulan I Tahun 2026 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,28% *(year on year)*, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur maupun nasional pada periode yang sama. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya aktivitas konsumsi rumah tangga, perdagangan, jasa, serta industri pengolahan yang menjadi sektor utama pembentuk perekonomian daerah. Selain itu, besarnya kontribusi Kota Surabaya terhadap perekonomian Jawa Timur menunjukkan peran strategis kota ini sebagai pusat perdagangan dan jasa serta sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur

Tabel II.16
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2022 – 2026 (TW I)

Persentase Pertumbuhan Ekonomi	2022	2023	2024	2025	2026
Surabaya (%)	6,51	5,70	5,76	5,87	7,28
Jawa Timur (%)	5,34	4,95	4,93	5,11	5,96
Nasional (%)	5,31	5,05	5,03	5,33	5,61

Sumber data: BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya, 2026.

Kota Surabaya sebagai salah satu ibukota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.17.

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2026 sampai dengan triwulan I, terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif dengan kecepatan laju yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pada Triwulan I Tahun 2026, dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha pembentuk perekonomian Kota Surabaya, terdapat 14 (empat belas) lapangan usaha yang tumbuh positif, sedangkan 3 (tiga) lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif, yaitu Pertambangan dan Penggalian,

Pengadaan Listrik dan Gas, serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar sektor ekonomi Kota Surabaya masih mampu mempertahankan pertumbuhan positif pada awal tahun 2026.

Lapangan usaha yang mencatatkan laju pertumbuhan tertinggi pada Triwulan I Tahun 2026 adalah Jasa Lainnya sebesar 12,22%, diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,59%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,41%, serta Konstruksi sebesar 10,10%. Selain itu, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 9,52%, mencerminkan meningkatnya aktivitas pada sektor pelayanan dasar dan infrastruktur perkotaan.

Di sisi lain, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian masih mengalami kontraksi paling dalam, yaitu sebesar -63,22%, diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -8,23% serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar -3,93%. Kontraksi pada sektor pertambangan dan penggalian dipengaruhi oleh terbatasnya aktivitas eksploitasi sumber daya alam di Kota Surabaya yang struktur ekonominya didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan kegiatan perkotaan.

Tabel II.17
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2022 – 2026 (TW I)

Kategori	Uraian	2022	2023	2024	2025*	2026**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,46	0,51	-6,06	0,04	5,95
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,98	-6,54	1,54	-27,59	-63,22
C	Industri Pengolahan	6,55	3,34	5,48	7,85	6,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,03	30,84	5,87	4,62	-8,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,13	2,41	2,17	4,52	9,52
F	Konstruksi	6,40	5,02	7,01	5,21	10,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,95	5,48	4,13	3,34	6,64
H	Transportasi dan Pergudangan	14,14	11,21	8,99	8,09	8,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,48	7,83	7,40	8,30	11,59
J	Informasi dan Komunikasi	3,14	6,76	6,54	7,48	7,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,68	4,05	3,74	1,51	-3,93
L	Real Estate	4,07	2,42	2,38	2,48	3,25
M,N	Jasa Perusahaan	5,75	8,30	7,82	9,57	8,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,16	0,06	9,88	0,02	11,41
P	Jasa Pendidikan	0,08	4,47	5,13	5,53	1,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,62	3,97	5,67	6,58	8,12
R,S,T,U	Jasa lainnya	13,26	9,28	8,26	9,38	12,22
PDRB		**6,51**	**5,70**	**5,76**	**5,87**	**7,28**

*Sumber: BPS Kota Surabaya, 2026. *)data sangat sementara. **)data sangat sementara*

2.1.2.1.1.1 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun dan digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah. Perhitungan PDRB saat ini menggunakan tahun dasar 2010, menggantikan tahun dasar 2000, dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Perubahan tahun dasar tersebut berdampak pada peningkatan nilai nominal PDRB serta perubahan klasifikasi struktur perekonomian dari semula 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur dan perkembangan perekonomian daerah. Perubahan tersebut berdampak pada penyesuaian struktur ekonomi dan penghitungan nilai tambah ekonomi yang lebih menggambarkan kondisi perekonomian terkini.

Berdasarkan capaian PDRB Kota Surabaya tahun 2021–2025, perekonomian Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil serta peningkatan nilai PDRB dari tahun ke tahun. Kontribusi Kota Surabaya terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur juga menunjukkan tren yang cenderung meningkat, yaitu sebesar 24,4 persen pada tahun 2022, meningkat menjadi 24,6 persen pada tahun 2023 sempat menurun menjadi 24,3 persen. Pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 25,1 persen pada tahun 2025 dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2026 triwulan 1 dengan nilai PDRB sebesar 24,58. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki peran strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan motor penggerak utama perekonomian di Provinsi Jawa Timur.

Tabel II.18
Tren Nilai PDRB dan Kontribusi Kota Surabaya terhadap Provinsi Jawa Timur

Uraian	2022	2023	2024	2025*	2026**
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	6,51	5,70	5,76	5,87	7,28
Nilai PDRB ADHB Kota Surabaya (Triliun Rp)	655,62	715,29	770,10	830,54	218,33
Estimasi Kontribusi Terhadap PDRB Jawa Timur (%)	24,4	24,6	24,3	25,1	24,58

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2026. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Perekonomian Kota Surabaya menunjukkan kinerja yang positif selama periode 2022–2025. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap berada pada level yang tinggi, yaitu sebesar 6,51 persen pada tahun 2022, 5,70 persen pada tahun 2023, 5,76 persen pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 5,87 persen pada tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Surabaya juga terus mengalami peningkatan, dari

Rp655,62 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp715,29 triliun pada tahun 2023, Rp770,10 triliun pada tahun 2024, dan mencapai Rp830,54 triliun pada tahun 2025. Hingga Triwulan I Tahun 2026, nilai PDRB ADHB Kota Surabaya tercatat sebesar Rp218,33 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,28 persen.

Sebagai pusat kegiatan ekonomi di Jawa Timur, Kota Surabaya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian provinsi. Selama periode 2022–2026, kontribusi PDRB Kota Surabaya terhadap PDRB Jawa Timur relatif stabil pada kisaran 24–25 persen, yaitu sebesar 24,4 persen pada tahun 2022, 24,6 persen pada tahun 2023, 24,3 persen pada tahun 2024, meningkat menjadi 24,41 persen pada tahun 2025, dan sebesar 24,58 persen pada Triwulan I Tahun 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya tetap menjadi salah satu motor penggerak utama perekonomian Jawa Timur dengan peran yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp218.329.060 juta (data sangat sementara). Struktur perekonomian Kota Surabaya masih didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai tambah sebesar Rp59.230.420 juta atau memberikan kontribusi 27,13% terhadap total PDRB. Selanjutnya, Industri Pengolahan menjadi kontributor terbesar kedua dengan nilai sebesar Rp42.303.910 juta atau berkontribusi 19,38%, diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp38.054.270 juta atau 17,43%, Adapun rincian nilai dan kontribusi kategori PDRB Kota Surabaya sebagaimana terlampir pada tabel II.19.

Tabel II.19
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2022–2026 (TW I) (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2022		2023		2024		2025*		2026**	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	982.815,39	0,15	1.026.186,70	0,14	969.357,95	0,13	991.929,95	0,12	267.130	0,12
B	Pertambangan dan Penggalian	33.392,98	0,01	32.513,35	0,00	31.379,96	0,004	21.533,75	0,003	1.710	0
C	Industri Pengolahan	126.030.898,75	19,22	135.434.984,12	18,93	147.300.518,62	19,07	162.729.092,58	19,59	42.303.910	19,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.742.046,30	0,42	3.728.710,22	0,52	3.971.273,70	0,51	4.252.757,86	0,51	1.046.570	0,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	932.750,33	0,14	968.113,96	0,14	994.411,87	0,13	1.052.861,28	0,13	284.980	0,13
F	Konstruksi	61.408.502,94	9,37	64.940.579,25	9,08	70.335.981,63	9,11	74.592.572,17	8,98	18.929.380	8,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	184.610.467,40	28,16	201.432.925,47	28,16	214.341.080,16	27,75	224.014.991,79	26,97	59.230.420	27,13
H	Transportasi dan Pergudangan	36.260.418,47	5,53	42.834.312,86	5,99	47.529.709,19	6,15	52.000.913,94	6,26	13.751.800	6,3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	102.248.698,97	15,60	114.627.560,20	16,03	126.222.540,64	16,34	138.792.272,81	16,71	38.054.270	17,43
J	Informasi dan Komunikasi	36.541.720,23	5,57	39.290.062,52	5,49	42.170.987,10	5,46	45.377.656,56	5,46	11.958.220	5,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	33.950.422,52	5,18	35.852.303,70	5,01	37.509.068,51	4,86	38.792.360,18	4,67	9.758.310	4,47
L	Real Estate	16.599.139,83	2,53	17.213.531,88	2,41	17.731.558,74	2,30	18.476.494,74	2,22	4.696.680	2,15
M,N	Jasa Perusahaan	15.772.593,51	2,41	17.530.932,18	2,45	19.268.197,54	2,49	21.613.686,81	2,60	5.661.040	2,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.486.026,22	1,29	8.533.021,21	1,19	9.788.000,22	1,27	10.068.629,64	1,21	2.605.990	1,19
P	Jasa Pendidikan	14.866.084,13	2,27	15.784.480,73	2,21	16.838.454,88	2,18	18.014.525,66	2,17	4.580.470	2,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.508.115,81	0,84	5.958.216,19	0,83	6.374.976,68	0,83	6.981.226,74	0,84	1.835.830	0,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	8.642.127,81	1,32	10.106.272,69	1,41	11.114.817,11	1,44	12.769.841,59	1,54	3.362.360	1,54
Produk Domestik Regional Bruto		**655.616.221,58**	**100**	**715.294.707,23**	**100**	**772.493.614,50**	**100**	**830.543.348,04**	**100**	**218.329.06**	**100**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2026. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Tabel II.20
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2022–2026 (TW I) (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2022		2023		2024		2025		2026	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	573.236,82	0,13	576.177,55	0,13	541.237,84	0,11	541.453,53	0,11	142.740	0,11
B	Pertambangan dan Penggalian	19.094,55	0,01	17.844,90	0,00	18.120,26	0	13.121,34	0,00	1.020	0,00
C	Industri Pengolahan	84.567.579,11	19,5	87.395.736,59	19,04	92.182.283,14	19	99.420.315,21	19,34	25.566.310	19,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.661.665,76	0,38	2.174.083,24	0,47	2.301.731,69	0,47	2.408.127,78	0,47	569.010	0,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	680.003,79	0,16	696.386,15	0,15	711.522,48	0,15	743.665,52	0,14	196.610	0,15
F	Konstruksi	42.633.575,68	9,82	44.772.953,53	9,75	47.910.218,85	9,87	50.408.594,50	9,81	12.706.220	9,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	122.122.627,45	28,1	128.812.587,77	28,06	134.133.559,71	27,6	138.618.728,86	26,97	35.982.740	26,96
H	Transportasi dan Pergudangan	22.684.941,35	5,22	25.227.168,98	5,50	27.494.461,88	5,66	29.717.530,03	5,78	7.736.670	5,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62.076.385,35	14,3	66.936.110,99	14,58	71.889.162,06	14,8	77.855.811,31	15,15	21.270.140	15,94
J	Informasi dan Komunikasi	32.264.418,48	7,43	34.446.030,83	7,50	36.698.243,72	7,56	39.442.364,01	7,67	10.356.640	7,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.648.801,34	4,52	20.443.826,71	4,45	21.207.821,53	4,37	21.528.668,11	4,19	5.337.130	4,00
L	Real Estate	11.634.820,68	2,68	11.916.338,17	2,60	12.200.164,26	2,51	12.503.114,20	2,43	3.166.110	2,37
M,N	Jasa Perusahaan	9.490.093,03	2,19	10.278.169,10	2,24	11.082.009,45	2,28	12.143.095,74	2,36	3.122.640	2,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.756.347,15	1,1	4.759.414,54	1,04	5.229.776,89	1,08	5.230.999,21	1,02	1.336.540	1,00
P	Jasa Pendidikan	10.001.195,71	2,3	10.447.847,60	2,28	10.983.874,40	2,26	11.591.438,81	2,26	2.925.600	2,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.782.452,79	0,87	3.932.734,49	0,86	4.155.684,76	0,86	4.429.262,12	0,86	1.153.330	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.671.102,07	1,31	6.197.308,43	1,35	6.709.014,54	1,38	7.338.217,61	1,43	1.883.400	1,41
Produk Domestik Regional Bruto		**434.268.341,12**	**100**	**459.030.719,58**	**100**	**485.448.887,46**	**100**	**513.934.507,89**	**100**	**133.452.85**	**100**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2026. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Tabel II.21
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2021–2025

Kategori	Uraian	2022		2023		2025		2025*		2026**	
		ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,15	0,13	0,14	0,13	0,13	0,11	0,12	0,11	0,12	0,11
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0,01	0	0	0,004	0,004	0,003	0	0	0
C	Industri Pengolahan	19,22	19,47	18,93	19,04	19,07	18,99	19,59	19,34	19,38	19,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,42	0,38	0,52	0,47	0,51	0,47	0,51	0,47	0,48	0,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,16	0,14	0,15	0,13	0,15	0,13	0,14	0,13	0,15
F	Konstruksi	9,37	9,82	9,08	9,75	9,11	9,87	8,98	9,81	8,67	9,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,16	28,12	28,16	28,06	27,75	27,63	26,97	26,97	27,13	26,96
H	Transportasi dan Pergudangan	5,53	5,22	5,99	5,49	6,15	5,66	6,26	5,78	6,30	5,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,6	14,29	16,03	14,58	16,34	14,81	16,71	15,15	17,43	15,94
J	Informasi dan Komunikasi	5,57	7,43	5,49	7,5	5,46	7,56	5,46	7,67	5,48	7,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,18	4,52	5,01	4,45	4,86	4,37	4,67	4,19	4,47	4,00
L	Real Estate	2,53	2,68	2,41	2,6	2,3	2,51	2,22	2,43	2,15	2,37
M,N	Jasa Perusahaan	2,41	2,19	2,45	2,24	2,49	2,28	2,6	2,36	2,59	2,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,29	1,1	1,19	1,04	1,27	1,08	1,21	1,02	1,19	1,00
P	Jasa Pendidikan	2,27	2,3	2,21	2,28	2,18	2,26	2,17	2,26	2,10	2,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,84	0,87	0,83	0,86	0,83	0,86	0,84	0,86	0,84	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,32	1,31	1,41	1,35	1,44	1,38	1,54	1,43	1,54	1,41
Produk Domestik Regional Bruto		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

*Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2026. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Struktur PDRB Kota Surabaya pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa komposisi pembentuk perekonomian relatif stabil dibandingkan tahun 2025. Beberapa

lapangan usaha mengalami peningkatan kontribusi, terutama Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang meningkat dari 26,97% menjadi 27,13% (ADHB), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari 16,71% menjadi 17,43% (ADHB), serta Transportasi dan Pergudangan dari 6,26% menjadi 6,30% (ADHB). Pada sisi ADHK, kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga meningkat dari 15,15% menjadi 15,94%, sedangkan Informasi dan Komunikasi meningkat dari 7,67% menjadi 7,76%. Peningkatan kontribusi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan, konsumsi masyarakat, mobilitas, serta sektor jasa masih menjadi pendorong utama perekonomian Kota Surabaya pada awal tahun 2026.

Di sisi lain, beberapa lapangan usaha mengalami penurunan kontribusi, antara lain Industri Pengolahan dari 19,59% menjadi 19,38% (ADHB), Konstruksi dari 8,98% menjadi 8,67% (ADHB), Jasa Keuangan dan Asuransi dari 4,67% menjadi 4,47% (ADHB), serta Real Estate dari 2,22% menjadi 2,15% (ADHB). Meskipun demikian, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Kota Surabaya, diikuti Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Surabaya pada Triwulan I Tahun 2026 masih didominasi oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, dan jasa, yang mencerminkan karakteristik Kota Surabaya sebagai pusat perdagangan, industri, dan jasa di kawasan Indonesia bagian timur.

Sementara untuk kategori lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih konsisten memberikan kontribusi yang sangat kecil dan memiliki kecenderungan peran yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumya terhadap perekonomian Kota Surabaya. Hal tersebut dipengaruhi oleh konsekuensi dari transformasi ekonomi kota menuju kota metropolitan yang berbasis perdagangan, industri, dan jasa.Faktor keterbatasan lahan produktif menyebabkan kontribusi sektor ini hanya sekitar 0,11% terhadap PDRB Kota Surabaya saat ini. Meskipun demikian, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, penyediaan ruang hijau, pelestarian lingkungan, dan pengembangan pertanian perkotaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu pengembangan konsep ketahanan pangan perkotaan masif digerakkan melalui program pertanian perkotaan (*urban farming*) menjadi langkah strategis untuk mempertahankan eksistensi sektor ini.Selain itu adanya program pengembangan teknologi pertanian seperti pegembangan sarana dan prasarana pertanian, program pengeloaan perikanan budidya sekaligus program pengelolaan dan pemasaran sektor ini dilakukan guna memperkuat ketahanan

pangan dan mendukung terwujudnya pembangunan Kota Surabaya yang berkelanjutan di tengah dominasi sektor perdagangan dan jasa.

2.1.2.1.1.2 PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui PDRB per kapita, yaitu nilai PDRB pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama. Indikator ini sering digunakan sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima penduduk atas kontribusinya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB digunakan untuk melihat perkembangan nilai ekonomi per penduduk berdasarkan harga berlaku. Melalui perbandingan antar tahun, indikator ini dapat menunjukkan apakah kesejahteraan dan standar hidup masyarakat secara rata-rata mengalami peningkatan. Berikut disajikan rangkuman data PDRB per kapita Kota Surabaya tahun 2021–2025.

Tabel II.22
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya
Tahun 2021–2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025*
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)					
PDRB (Milyar Rp)	590.227,97	655.616,22	715.294,71	772.493,61	830.543,35
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	204,92	227,08	245,72	264,37	283,31
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)					
PDRB (Milyar Rp)	407.726,80	434.268,34	459.030,72	485.448,89	513.934,51
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	141,56	150,41	157,69	166,14	174,81
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (ribu orang)	2.880	2.887	2.911	2.922	2.940

*Sumber: BPS Kota Surabaya, 2026. *)data sementara. **)data sangat sementara.*

Pertumbuhan PDRB per kapita Kota Surabaya menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah. Pada tahun 2025, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp282,50 juta, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp264,37 juta. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian Kota Surabaya secara nominal, yang didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan, industri pengolahan, transportasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum yang menjadi sektor dominan dalam struktur ekonomi kota.

Dari sisi riil, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga tercermin dari PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang meningkat dari Rp166,14 juta

pada tahun 2024 menjadi Rp174,81 juta pada tahun 2025. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga, tetapi juga oleh peningkatan volume produksi barang dan jasa. Peningkatan ini berlangsung di tengah pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif terkendali, dari sekitar 2,92 juta jiwa pada tahun 2024 menjadi 2,94 juta jiwa pada tahun 2025, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih mampu meningkatkan rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan per penduduk.

Secara umum, peningkatan PDRB per kapita Kota Surabaya mencerminkan semakin kuatnya aktivitas ekonomi perkotaan yang didukung oleh peran Surabaya sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri di Provinsi Jawa Timur. Penguatan sektor jasa perkotaan, mobilitas ekonomi yang tinggi, serta meningkatnya aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2025 tetap tumbuh positif dan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara agregat.

2.1.2.1.2 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan umumnya diukur menggunakan Koefisien Gini. Nilai Koefisien Gini mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan semakin merata, sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan semakin tinggi. Berdasarkan kategorinya, ketimpangan tergolong tinggi apabila nilai gini 0,5 atau lebih, sedang pada rentang 0,30–0,49, dan rendah apabila kurang dari 0,30.

Selama lima tahun terakhir, Indeks Gini Kota Surabaya berada pada kisaran 0,3–0,4 sehingga termasuk kategori ketimpangan sedang. Dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan nasional, nilai gini Surabaya cenderung lebih tinggi, kecuali pada tahun 2020 dan 2021. Peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan masih perlu menjadi perhatian serius.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya menekan ketimpangan melalui pemerataan ekonomi, peningkatan produktivitas usaha masyarakat, perluasan kesempatan kerja, fasilitasi usaha, serta bantuan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran. Upaya ini penting agar pertumbuhan ekonomi dapat berdampak lebih merata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.23
Indeks Gini Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

Indeks Gini	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Surabaya	0,351	0,388	0,423	0,381	0,369
Jawa Timur	0,374	0,371	0,387	0,372	0,369
Nasional	0,384	0,384	0,388	0,379	0,375

Sumber data: BPS, 2026 (versi data Maret)

2.1.2.1.3 Kemiskinan

Garis kemiskinan menurut BPS merupakan nilai minimum rupiah yang dibutuhkan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan setara 2.100 kkal/kapita/hari serta kebutuhan dasar nonmakanan. Meskipun garis kemiskinan cenderung meningkat setiap tahun seiring inflasi, angka dan jumlah penduduk miskin diharapkan terus menurun.

Data kemiskinan yang disajikan pada tabel merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Susenas dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Untuk tingkat nasional dan provinsi, indikator kemiskinan dipublikasikan 2 kali dalam setahun berdasarkan hasil Susenas Maret dan September. Sementara itu, untuk tingkat kabupaten/kota, termasuk Kota Surabaya, data kemiskinan umumnya dipublikasikan berdasarkan hasil Susenas Maret karena ukuran sampel yang lebih memadai untuk menghasilkan estimasi pada level tersebut. Karena itu, dalam melakukan perbandingan data kemiskinan antarwilayah perlu memperhatikan periode rilis data yang digunakan.

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Kota Surabaya selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus membaik. Persentase penduduk miskin menurun dari 5,23 persen pada tahun 2021 menjadi 3,56 persen pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya semakin meningkat. Selain itu, tingkat kemiskinan Kota Surabaya juga berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional yang pada tahun 2025 masing-masing tercatat sebesar 9,30 persen dan 8,57 persen.

Sejalan dengan penurunan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 152,49 ribu jiwa dan berkurang menjadi 105,09 ribu jiwa pada tahun 2025. Dengan demikian, selama lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya berkurang sekitar 47,40 ribu jiwa. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup serta efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Di sisi lain, garis kemiskinan Kota Surabaya terus mengalami peningkatan, dari Rp611.466 per kapita per bulan pada tahun 2021 menjadi Rp775.597 per kapita per bulan pada tahun 2025. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Tingginya garis kemiskinan mencerminkan bahwa biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan di Kota Surabaya relatif lebih besar dibandingkan wilayah lain. Meskipun demikian, peningkatan garis kemiskinan tidak diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin, yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Surabaya masih mampu mengimbangi kenaikan kebutuhan hidup. Perkembangan selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.24
Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin
Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

Uraian	Lingkup	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Kemiskinan (persen)	Surabaya*	5,23	4,72	4,65	3,96	3,56
	Jawa Timur	10,59	10,49	10,35	9,56	9,30
	Nasional	9,71	9,57	9,36	8,57	8,25
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	Surabaya*	611.466	652.540	718.370	742.678	775.597
	Jawa Timur	445.139	487.908	507.286	547.751	558.029
	Nasional	486.168	535.547	550.458	595.242	641.443
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Surabaya*	152,489	138,21	136,37	116,62	105,09
	Jawa Timur	4.259,60	4.236,51	4.188,81	3.893,82	3.804,29
	Nasional	26.503,65	26.363,27	25.898,55	24.054,72	23.359,71

*Sumber: BPS, 2025 (versi data September). *)Kota Surabaya menggunakan data Maret 2025*

Program dan kegiatan lintas sektor Pemerintah Kota Surabaya diarahkan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan perumahan, serta peningkatan kapasitas ekonomi melalui pelatihan, pemberdayaan UKM, inkubasi, dan klinik usaha mandiri. Intervensi tersebut diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin secara berkelanjutan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran melalui kolaborasi berbagai intervensi. Upaya tersebut berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem di Kota Surabaya hingga mencapai 0% pada tahun 2024 dan tetap bertahan sampai tahun 2025 serta triwulan II tahun 2026.

Kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan PBB, yaitu penduduk dengan penghasilan sebesar 1,9 USD PPP per hari. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Surabaya menurun dari 35.020 jiwa atau 1,20% pada tahun 2021, menjadi 23.530 jiwa atau 0,80% pada tahun 2022, 7.572 jiwa atau 0,25% pada tahun 2023, hingga 0 jiwa pada tahun 2024 dan bertahan 0 jiwa pada tahun 2025

sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/359/436.1.2/2025 tentang Data Sasaran Keluraga Miskin Ekstrem di Kota Surabaya Tahun 2025. Salah satu kunci keberhasilan capaian ini adalah intervensi berbasis pemberdayaan ekonomi, termasuk pembukaan lapangan kerja padat karya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

2.1.2.1.4 Ketenagakerjaan

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, jumlah penduduk usia kerja di Kota Surabaya juga terus meningkat. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga masih menimbulkan pengangguran. Tingginya TPT pada tahun 2021 sebesar 9,68% dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19, keterbatasan lapangan kerja, tingginya urbanisasi, rendahnya keterampilan dan kesiapan kerja sebagian penduduk usia produktif, serta sistem kerja kontrak yang memengaruhi stabilitas tenaga kerja.

Kondisi ketenagakerjaan kemudian menunjukkan perbaikan, ditandai dengan penurunan TPT menjadi 4,91% pada tahun 2024 dan 4,84% pada tahun 2025. Penurunan ini didukung oleh pemulihan ekonomi, penguatan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, pemulihan sektor pariwisata, serta pelaksanaan program padat karya oleh Pemerintah Kota Surabaya. Berikut adalah rekapitulasi data tentang tingkat pengangguran terbuka tahun 2021–2025.

Tabel II.25
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	152.273	125.276	106.120	79.767	79.423
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.572.888	1.643.314	1.569.714	1.624.822	1.641.429
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	9,68	7,62	6,76	4,91	4,84

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2026

Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 1.572.888 menjadi 1.641.429 di tahun 2025. Sedangkan pada tahun 2021, adanya pandemi Covid-19 berdampak pada tingginya TPT Kota Surabaya di 9,68%. Rendahnya penyerapan tenaga kerja dan banyaknya karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja merupakan akibat dari terdampaknya perekonomian Kota Surabaya, Indonesia dan global secara umum karena pembatasan sosial dalam skala besar. Meski kondisi pandemi masih berlanjut di tahun 2022, namun TPT Kota Surabaya dapat diturunkan menjadi 7,62 persen di akhir tahun 2022, sehingga pada Perubahan

RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 dilakukan penyesuaian target menjadi 5% dari semula pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 sebesar 8,26%. Sementara itu, pada tahun 2025, TPT Kota Surabaya semakin menurun di angka 4,84%.

Tabel II.26
TPT Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021–2025

TPT	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Surabaya	9,68	7,62	6,76	4,91	4,84
Jawa Timur	5,74	5,49	4,88	4,19	3,88
Nasional	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85

Sumber data: BPS, 2025 (versi data November).

Dalam lima tahun terakhir, TPT Kota Surabaya menunjukkan tren menurun setelah sempat meningkat pada tahun 2020–2021 akibat pandemi COVID-19. Pada periode 2022–2025, TPT berhasil ditekan secara signifikan hingga mencapai 4,85% pada tahun 2025, lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi tahun 2019. Tren serupa juga terjadi pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional, meskipun dengan tingkat penurunan yang berbeda.

Penurunan TPT tersebut didukung oleh konsistensi Pemerintah Kota Surabaya dalam membuka lapangan kerja, khususnya bagi keluarga miskin dan rentan miskin melalui program padat karya. Hingga tahun 2025, program ini telah dilaksanakan di 125 lokasi yang tersebar di 26 kecamatan, mencakup 23 kategori usaha, dan menyerap 1.715 tenaga kerja. Selain itu, fasilitasi penyerapan tenaga kerja lokal juga dilakukan melalui program Arek Suroboyo Siap Kerja (ASSik), magang, bursa kerja, serta *Job Fair* Disabilitas *yang* mulai digelar pada tahun 2025.

Kesejahteraan tenaga kerja juga perlu diperkuat melalui perlindungan sosial, salah satunya melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Cakupan ini menggambarkan persentase tenaga kerja yang terdaftar dan aktif sebagai peserta jaminan sosial, meliputi jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian, dan kehilangan pekerjaan. Perlindungan tersebut penting untuk menjamin keamanan ekonomi pekerja terhadap risiko kecelakaan, usia lanjut, PHK, maupun kehilangan penghasilan. Data cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Kota Surabaya tahun 2021–2025 disajikan pada tabel berikut. Adapun cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kota Surabaya tahun 2021-2025 dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel II.27
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2021–2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Penduduk Bekerja	1.420.615	1.518.038	1.463.594	1.545.055	1.439.634

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
2.	Penduduk Bekerja di Surabaya yang Tercover Jamsostek	543.282	579.744	548.747	603.632	643.399
3.	Persentase Pekerja yang Ter-*cover* Jamsostek	38,24%	38,19%	37,49%	39,07%	44,69%

Sumber: BPS dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Surabaya, 2026

Cakupan kepesertaan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan di Kota Surabaya pada periode 2021–2024 mengalami fluktuasi pada kisaran 37,49% hingga 39,07%, kemudian meningkat signifikan menjadi 44,69% pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan adanya perluasan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang lebih progresif dan menjadi capaian tertinggi selama periode tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat lebih dari separuh pekerja yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi tantangan, terutama karena karakteristik Surabaya sebagai kota metropolitan dengan jumlah pekerja informal yang cukup besar, seperti pedagang kecil, pekerja lepas, pelaku usaha mikro, pengemudi ojek *online*, petani, dan nelayan.

Peningkatan tahun 2025 menunjukkan bahwa berbagai upaya Pemerintah Kota Surabaya mulai memberikan hasil, antara lain melalui perluasan kepesertaan bagi pekerja rentan, seperti Warga Pelayan Masyarakat sebanyak 21.369 orang, Kader Surabaya Hebat sebanyak 28.818 orang, serta bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan Bukan Penerima Upah sebanyak 24.935 orang. Selain itu, peningkatan sosialisasi dan kepatuhan perusahaan turut mendukung perluasan cakupan. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh lapisan pekerja di Kota Surabaya.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia idealnya diukur menggunakan Indeks Modal Manusia (IMM), yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia berdasarkan aspek kesehatan, pendidikan, dan produktivitas. Namun, karena realisasi IMM baru tersedia hingga tingkat provinsi, Kota Surabaya menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai proxy IMM. IPM atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan yang diwakili oleh umur harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta kesejahteraan melalui pengeluaran per kapita.

Pada tahun 2023, BPS melakukan pemutakhiran data komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemanfaatan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 yang sebelumnya masih menggunakan proyeksi penduduk berbasis Sensus Penduduk 2010. Pemutakhiran tersebut berdampak pada penyesuaian penghitungan IPM mulai tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya sehingga menghasilkan seri data yang lebih mencerminkan kondisi terkini. Secara umum, IPM Kota Surabaya terus menunjukkan peningkatan dari 82,94 pada tahun 2021 menjadi 85,65 pada tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,81 persen per tahun. Capaian tersebut menempatkan Kota Surabaya pada kategori IPM sangat tinggi dan menjadi yang tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Perkembangan IPM Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan nasional selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.28
Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
IPM Kota Surabaya	82,94	83,32	83,99	84,69	85,65
IPM Provinsi Jawa Timur	73,48	74,05	74,65	75,35	76,13
IPM Nasional	73,16	73,77	74,39	75,02	75,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026.

2.1.2.2.1.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur panjang dan hidup sehat dapat diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Pada tahun 2023, data UHH yang sebelumnya dihitung menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010, dimutakhirkan menggunakan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, sehingga mengakibatkan perubahan angka UHH sejak tahun 2020 hingga tahun-tahun berikutnya. Perkembangan UHH Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.29
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Umur Harapan Hidup (UHH)	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Surabaya (tahun)	75,43	75,62	75,82	76,02	76,34
Provinsi Jawa Timur (tahun)	74,28	74,57	74,87	75,07	75,36
Nasional (tahun)	73,46	73,7	73,93	74,15	74,47

Sumber: BPS, 2026.

UHH penduduk Kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar 75,43 tahun dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 75,62 tahun. Kemudian di tahun 2023, UHH penduduk Kota Surabaya kembali meningkat menjadi 75,82 tahun. Hingga pada tahun 2024 dan 2025 UHH penduduk Kota Surabaya terus meningkat menjadi berturut-turut 76,02 dan 76,34 tahun. Perkembangan yang positif ini tidak lepas dari komitmen

Pemerintah Kota Surabaya untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warganya melalui UHC (*universal health coverage*), yang didukung oleh para pemangku kepentingan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya, seperti rumah sakit, klinik, serta fasilitas kesehatan milik swasta lainnya. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita pra-*stunting*, balita *stunting* sehingga jumlah balita *stunting* aktif menurun dari tahun 2024 sebanyak 310 balita menjadi 305 balita pada tahun 2025, program 1 Puskesmas 1 Pediatri dan 1 Dokter Obgyn, pengembangan 177 Kampung ASI, termasuk pendampingan bagi ibu menyusui, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang diutamakan pada usia produktif dan usia lanjut dengan realisasi 1.333.371 orang atau sebesar 90,96% dari jumlah penduduk yang ditargetkan, serta pengembangan ruangan khusus pada RSUD serta Pemilahan khusus untuk Klinik Ibu dan Anak pada RS Eka Candrarini.

2.1.2.2.1.2 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan diukur melalui RLS (rata-rata lama sekolah) dan HLS (harapan lama sekolah). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (*mean years of schooling*) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir. Pada kondisi normal rata-rata lama sekolah di suatu wilayah diasumsikan tidak akan turun. Batas nilainya adalah minimum 0 dan maksimum 15 tahun adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.30
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2021	2022	2023	2024	2025
RLS Kota Surabaya (tahun)	10,50	10,51	10,70	10,89	11,15
RLS Provinsi Jawa Timur (tahun)	7,88	8,03	8,11	8,28	8,39
RLS Nasional (tahun)	8,54	8,69	8,77	8,85	9,07

Sumber: BPS, 2026

Harapan lama sekolah (*expected years of schooling)* menurut BPS adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.31
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2021–2025

Harapan Lama Sekolah (HLS)	2021	2022	2023	2024	2025
HLS Kota Surabaya (tahun)	14,81	14,83	14,85	14,87	14,88
HLS Provinsi Jawa Timur (tahun)	13,36	13,37	13,38	13,43	13,44
HLS Nasional (tahun)	13,08	13,10	13,15	13,21	13,30

Sumber: BPS, 2026

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Surabaya menunjukkan bahwa penduduk usia 7 tahun ke atas memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga melampaui jenjang menengah atau SMA, yaitu di atas Diploma-3 (D3), namun belum mencapai Diploma-4 (D4) atau Strata-1 (S1). Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Surabaya tahun 2025 meningkat sebesar 0,26 tahun atau 2,39% dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan periode 2021–2025 sebesar 1,23%. Faktor yang memengaruhi HLS dan RLS antara lain masih adanya penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena menikah, mengurus rumah tangga, merasa pendidikan sudah cukup, atau telah bekerja. Selain itu, migrasi penduduk masuk ke Kota Surabaya dengan latar belakang pendidikan di bawah SMA/sederajat untuk mencari peningkatan ekonomi juga turut memengaruhi capaian HLS dan RLS.

Meskipun terus meningkat, baik harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah masih perlu percepatan untuk terus ditingkatkan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong pemerataan dan perluasan akses pendidikan melalui BOPDA, BOS jenjang SD dan SMP, penyelenggaraan sekolah inklusi pada 1 PAUD, 283 SD negeri, dan 63 SMP negeri, pengembangan PAUD Holistik Integratif, Kejar Paket melalui SKB Negeri berbasis vokasi, serta dukungan 178 PKBM untuk penanganan anak putus sekolah. Upaya lain juga dilakukan melalui Sinau dan Ngaji Bareng Arek Suroboyo di 256 balai RW, Program Orang Tua Asuh, beasiswa penghafal kitab suci bagi 1.412 siswa, beasiswa SMA/SMK/MA bagi 14.858 siswa, beasiswa Pemuda Tangguh bagi 23.650 mahasiswa, serta Program Surabaya Mengajar yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Surabaya.

2.1.2.2.1.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Standar hidup layak merupakan salah satu dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan *(adjusted expenditure per capita)*. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga serta kebutuhan konsumsi antarwilayah.

Oleh karena itu, semakin tinggi nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan, semakin baik pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel II.32
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Pengeluaran Per Kapita	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Surabaya (Rp .000)	17.826	18.345	18.977	19.666	20.679
Provinsi Jawa Timur (Rp .000)	11.707	11.992	12.421	12.852	13.509
Nasional (Rp .000)	11.156	11.479	11.899	12.341	12.802

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2026

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 nilainya tercatat sebesar Rp17,83 juta per tahun, kemudian meningkat menjadi Rp18,35 juta pada tahun 2022, Rp18,98 juta pada tahun 2023, Rp19,67 juta pada tahun 2024, dan mencapai Rp20,68 juta per tahun pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat Surabaya terus mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pascapemulihan ekonomi.

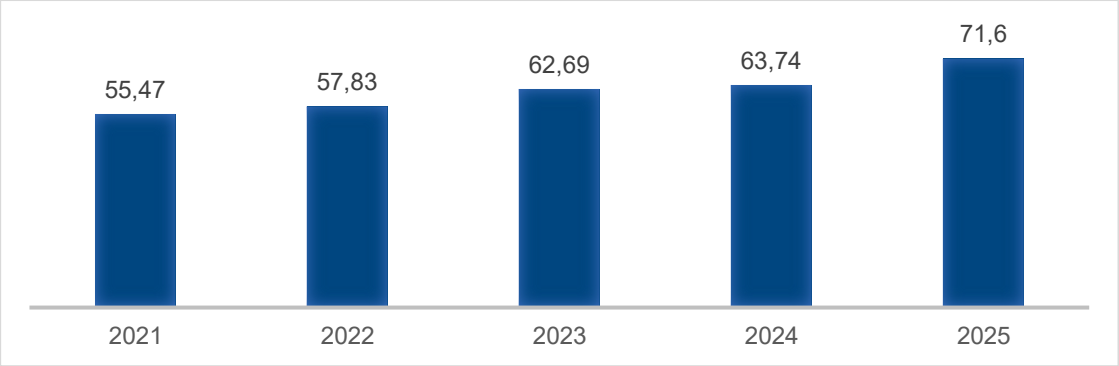
Apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kota Surabaya berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Pada tahun 2025, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kota Surabaya mencapai Rp20,68 juta per tahun, sedangkan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp13,51 juta dan nasional sebesar Rp12,80 juta per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat Surabaya relatif lebih baik dibandingkan rata-rata masyarakat di tingkat provinsi maupun nasional.

Tingginya pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kota Surabaya dipengaruhi oleh karakteristik Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, transportasi, logistik, serta berbagai aktivitas ekonomi perkotaan lainnya. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya kesempatan kerja yang lebih luas, peningkatan pendapatan masyarakat, serta akses yang lebih baik terhadap berbagai barang dan jasa. Di sisi lain, sebagai kota metropolitan, Surabaya juga memiliki tingkat konsumsi dan biaya hidup yang relatif lebih tinggi dibandingkan sebagian besar daerah lain. Namun demikian, indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan telah mempertimbangkan aspek perbedaan tingkat harga (purchasing power parity), sehingga nilai yang dihasilkan lebih mencerminkan kemampuan riil daya beli masyarakat dibandingkan sekadar besarnya pengeluaran nominal.

Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mendukung peningkatan kualitas hidup penduduk Kota Surabaya. Bersama dengan peningkatan pada dimensi kesehatan dan pendidikan, perkembangan pengeluaran per kapita yang disesuaikan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya, sekaligus mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah yang semakin inklusif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.2.2 Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga adalah indikator yang mengukur kualitas pembangunan keluarga berdasarkan berbagai aspek penting dalam kehidupan rumah tangga. Indeks ini dikembangkan oleh BKKBN sejak tahun 2020 untuk mengevaluasi sejauh mana keluarga di Indonesia memiliki ketahanan yang baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Indeks ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana keluarga telah mencapai kondisi sejahtera, mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, serta memiliki pola pengasuhan yang baik bagi anak-anak dan anggota keluarga lainnya. iBangga diukur berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu Ketenteraman, Kemandirian, dan Kebahagiaan. Skala pengukuran menggunakan nilai 0 hingga 100, dengan semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kondisi keluarga yang semakin baik. Indeks Pembangunan Keluarga berperan penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat secara luas karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kota Surabaya tahun 2021-2025 secara rinci dapat dilihat melalui grafik berikut.



Gambar II.18 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Surabaya Tahun 2021-2025

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2026

Grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kota Surabaya selama periode 2021–2025. Nilai iBangga meningkat dari 55,47 pada tahun 2021 menjadi 71,6 pada tahun 2025, yang

menunjukkan adanya perbaikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Peningkatan tersebut didukung oleh berbagai upaya pembangunan keluarga yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui Program Bangga Kencana dan pembangunan keluarga di Kota Surabaya. Berbagai intervensi dilakukan untuk memperkuat dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, antara lain melalui penyelenggaraan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), Sekolah Lansia Tangguh (SELANTANG), Kelas Remaja Kemangi, pembinaan Generasi Berencana (GenRe), penguatan Kampung Keluarga Berkualitas, serta peningkatan akses keluarga terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, sinergi lintas perangkat daerah, dukungan kader di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta pemanfaatan data keluarga sebagai dasar perencanaan program turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembangunan keluarga di Kota Surabaya.

Tren positif tersebut mencerminkan semakin baiknya kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga, sehingga mendukung terwujudnya keluarga yang lebih tenteram, mandiri, dan bahagia. Meskipun demikian, tantangan pembangunan keluarga masih perlu menjadi perhatian, terutama dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga di tengah dinamika sosial dan ekonomi, meningkatkan kualitas pengasuhan dan perlindungan anggota keluarga, serta memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui penguatan program pembangunan keluarga, peningkatan kolaborasi lintas sektor, dan optimalisasi pemberdayaan keluarga agar capaian iBangga dapat terus meningkat serta memberikan dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya.

2.1.2.2.3 Indeks Kesejahteraan Sosial

Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat melalui aspek pemenuhan kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi. Indeks ini menjadi gambaran kondisi kesejahteraan sosial masyarakat sekaligus menunjukkan tingkat inklusivitas pembangunan daerah, khususnya bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Berdasarkan capaian yang ada, Indeks Kesejahteraan Sosial Kota Surabaya memperoleh nilai sebesar 62,4 dengan kategori “Inklusif”, didukung oleh capaian aspek kebutuhan dasar sebesar 64,36, peranan sosial sebesar 75,05, dan keberdayaan ekonomi sebesar 51,79. Sementara itu, Indeks Kesejahteraan Sosial Penduduk Lanjut Usia tercatat sebesar 62,07 dengan kategori “Inklusif”, serta Indeks

Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas sebesar 61,19 dengan kategori yang sama. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sosial di Kota Surabaya telah mendorong peningkatan akses layanan dasar, partisipasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih inklusif.

Tabel II.33
Indeks Kesejahteraan Sosial Kota Surabaya Tahun 2025

Uraian	Kebutuhan Dasar	Peranan Sosial	Keberdayaan Ekonomi	Nilai	Kategori
Indeks Kesejahteraan Sosial	64,36	75,05	51,79	62,4	Inklusif
Indeks Kesejahteraan Sosial Penduduk Lanjut Usia	58,84	78,54	51,99	62,07	Inklusif
Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	66,52	59,25	59,2	61,19	Inklusif

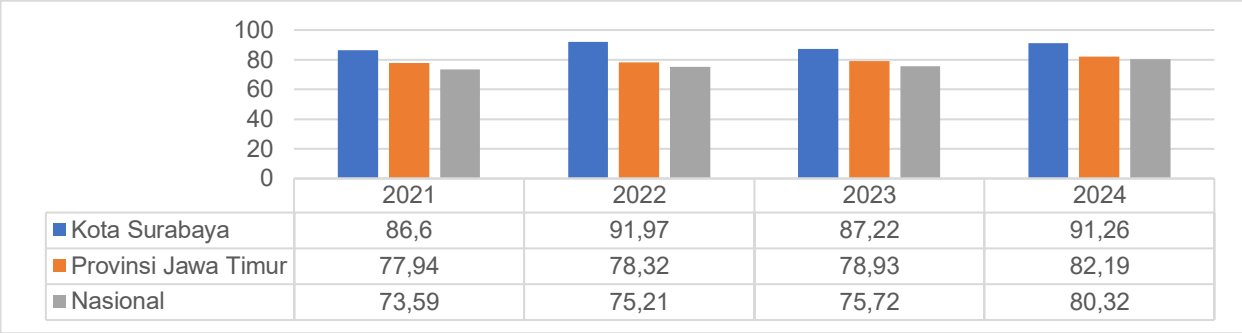
Sumber: Kementerian Sosial RI, 2026

Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, melalui penyediaan bantuan sosial, layanan kesehatan dan pendidikan, rehabilitasi sosial, peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan peran masyarakat dan komunitas melalui pembinaan kampung madani, pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan, pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, pelayanan ramah lansia dan disabilitas, hingga penguatan perlindungan sosial berbasis keluarga dan masyarakat. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang setara dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

2.1.2.2.4 Indeks Perlindungan Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan salah satu indeks komposit yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur capaian perlindungan khusus anak. Penghitungan IPKA mulai diinisiasi pada tahun 2019 untuk tingkat nasional dan provinsi, sedangkan penghitungan hingga tingkat kabupaten/kota baru mulai dilakukan sejak tahun 2022. Oleh karena itu, data IPKA Kota Surabaya untuk tahun 2020 belum tersedia karena penghitungan pada tingkat kabupaten/kota belum dilaksanakan. Selanjutnya, Kementerian PPPA menerbitkan *Booklet Data Indeks Perlindungan Anak Tahun 2024* pada akhir tahun 2025 yang menggunakan metodologi penghitungan baru sebagai penyempurnaan indikator IPA, IPHA, dan IPKA.

Penyempurnaan tersebut meliputi perubahan indikator penyusun, pembobotan, serta metode perhitungan untuk menghasilkan ukuran yang lebih relevan, konsisten, dan dapat dibandingkan antarwilayah. Dengan adanya perubahan metodologi tersebut, nilai IPKA Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan nilai IPKA pada tahun-tahun sebelumnya yang masih menggunakan metode lama. Adapun nilai IPKA tahun 2025 belum dirilis oleh Kementerian PPPA. Sebagaimana grafik terlampir, capaian IPKA Kota Surabaya selama tahun 2021–2024 selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional.

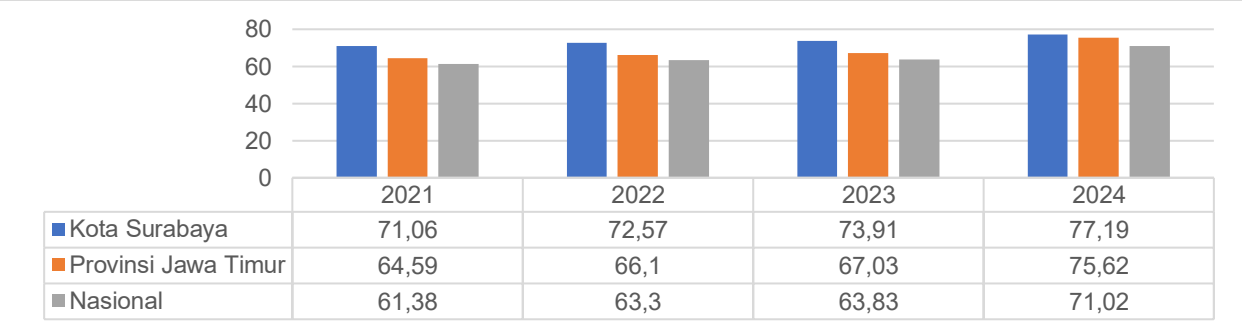


	2021	2022	2023	2024
Kota Surabaya	86,6	91,97	87,22	91,26
Provinsi Jawa Timur	77,94	78,32	78,93	82,19
Nasional	73,59	75,21	75,72	80,32

Gambar II.19 Indeks Perlindungan Khusus Anak Tahun 2021–2024

Sumber: Kementerian PPA RI, 2026, diolah

Nilai IPKA Kota Surabaya tercatat sebesar 86,60 pada tahun 2021, meningkat menjadi 91,97 pada tahun 2022, kemudian berada pada angka 87,22 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 91,26 pada tahun 2024. Pada tahun 2024, capaian tersebut menjadi yang tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam memperkuat perlindungan anak melalui berbagai program dan layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, seperti layanan pengaduan dan pendampingan korban kekerasan, konseling psikologis, pendampingan hukum, edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak, penguatan Kota Layak Anak, serta kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak.



	2021	2022	2023	2024
Kota Surabaya	71,06	72,57	73,91	77,19
Provinsi Jawa Timur	64,59	66,1	67,03	75,62
Nasional	61,38	63,3	63,83	71,02

Gambar II.20 Indeks Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun 2021–2024

Sumber: Kementerian PPA, 2026, diolah

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator untuk mengukur pemenuhan hak dan perlindungan anak, mencakup aspek hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, serta perlindungan khusus anak. Capaian IPA Kota Surabaya selama tahun 2021–2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, namun pada beberapa tahun relatif lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional. Nilai IPA Kota Surabaya tercatat sebesar 4,3 pada tahun 2021, menurun menjadi 2,5 pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 3,5 pada tahun 2023 dan 4,5 pada tahun 2024.

Upaya peningkatan IPA dilakukan secara lintas sektor melalui penguatan program Kota Layak Anak, layanan pengaduan dan pendampingan korban kekerasan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, edukasi pencegahan kekerasan dan perundungan di sekolah, penguatan PUSPAGA, serta pembinaan kampung ramah perempuan dan anak. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga memperkuat pemenuhan hak anak melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penyediaan ruang bermain ramah anak dan ruang terbuka hijau, layanan konseling dan pendampingan hukum, penanganan anak berhadapan dengan hukum, penguatan forum anak, serta kolaborasi dengan sekolah, puskesmas, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan komunitas.

2.1.2.2.5 Indeks Toleransi Umat Beragama

Indeks Toleransi Umat Beragama (ITUB) merupakan indikator yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengukur tingkat toleransi dan kerukunan antarumat beragama sebagai bagian dari implementasi Moderasi Beragama. Indeks ini mengukur tingkat penerimaan, penghormatan, dan sikap saling menghargai antarumat beragama dalam kehidupan sosial berdasarkan persepsi masyarakat terhadap kesediaan berinteraksi dengan pemeluk agama lain, penerimaan atas perbedaan praktik keagamaan, kebebasan beribadah, serta penolakan terhadap diskriminasi berbasis agama. ITUB menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kohesi sosial, stabilitas kehidupan beragama, dan efektivitas upaya pencegahan konflik sosial. Sebagai indikator yang relatif baru, deret waktu data ITUB masih terbatas dibandingkan dengan indikator pembangunan lainnya. Adapun nilai ITUB Kota Surabaya pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 0,960 dan ditargetkan meningkat menjadi 0,968 pada akhir tahun 2026. Target tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama sebagai fondasi penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Di Kota Surabaya, aspek toleransi dan harmoni sosial diukur melalui Indeks Harmoni Sosial. Indeks ini merupakan indikator komposit yang terdiri atas Indeks Budaya Lokal, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan, dan Indeks Kepedulian Sosial. Indeks Harmoni Sosial menggambarkan keselarasan antara nilai, keyakinan, dan perilaku masyarakat dalam menghormati perbedaan, memperkuat solidaritas, menjaga nilai kebangsaan, serta membangun kehidupan sosial yang inklusif dan harmonis.

Indeks Budaya Lokal menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap seni budaya, cagar budaya, dan kepedulian terhadap kegiatan bernilai kebangsaan. Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan mengukur pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, meliputi peningkatan pemahaman lingkungan hidup, penghargaan lingkungan, peran kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan, dan persentase rumah sehat. Sementara itu, Indeks Kepedulian Sosial menggambarkan partisipasi masyarakat dalam aspek sosial, kemanusiaan, toleransi beragama, dan kebangsaan.

Dengan demikian, Indeks Harmoni Sosial menjadi ukuran penting untuk melihat kualitas kehidupan masyarakat Surabaya yang majemuk, sekaligus memperkuat toleransi, kepedulian sosial, pelestarian budaya lokal, dan tanggung jawab lingkungan di tengah perkembangan modernisasi dan teknologi informasi. Data Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya mulai tersedia pada tahun 2022 sehingga belum memungkinkan dilakukan analisis tren jangka panjang maupun perbandingan dengan periode sebelum tahun tersebut. Oleh karena itu, tahun 2022 digunakan sebagai *baseline* dalam pemantauan perkembangan Indeks Harmoni Sosial pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel II.34
Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Harmoni Sosial	N/A	80,08	82,70	99,83	102,20
1.a	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	N/A	48,01	56,51	113,32	120,86
1.b	Indeks Kepedulian Sosial	N/A	97,67	97,86	97,98	97,99
1.c	Indeks Budaya Lokal	89,67	89,97	89,99	90,11	90,42

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Pencapaian Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya tahun 2025 sebesar 102,20 didukung oleh berbagai upaya Pemerintah Kota dalam memperkuat budaya lokal, kepedulian lingkungan, karakter kebangsaan, dan kerukunan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai event seni, budaya, dan sejarah, seperti Parade Juang, Festival Rujak Uleg, Peringatan Peristiwa Perobekan Bendera, Surabaya Heroic Track, Sekolah Kebangsaan, Surabaya Vaganza, Pemilihan Duta Wisata, Kya-Kya Festival, Cak dan Ning, Peringatan Hari Tari Sedunia, serta Sedekah

Bumi. Capaian tersebut juga didukung oleh edukasi lingkungan kepada pelajar, masyarakat, dan pelaku usaha, pembinaan bank sampah di 470 lokasi, pengembangan 40 kampung *zero waste*, serta penyelenggaraan lomba lingkungan seperti Surabaya Smart City, ECO School, ECO Campus, dan ECO Pesantren. Selain itu, penguatan karakter kebangsaan, ideologi Pancasila, dan kerukunan masyarakat dilakukan melalui forum kerukunan umat beragama, mediasi konflik keagamaan, sosialisasi anti narkotika, serta koordinasi operasi gabungan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Sejalan dengan upaya mengurangi potensi konflik, Pemerintah Kota Surabaya juga terus mendorong peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui penguatan Indeks Kepedulian Sosial. Indeks ini menggambarkan sinergi nilai sosial kemanusiaan, ketuhanan, budi pekerti, serta kepatuhan terhadap peraturan negara. Pada tahun 2027, pencapaian Indeks Toleransi Umat Beragama (ITUB) perlu terus diperkuat melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi pendidikan toleransi dan moderasi beragama sejak dini, dialog lintas agama, peningkatan literasi keberagaman, penegakan hukum yang adil dan nondiskriminatif, jaminan kebebasan beribadah, serta kebijakan publik yang sensitif terhadap keberagaman. Keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media juga penting untuk membangun narasi persatuan, meredam potensi konflik, serta menciptakan kehidupan umat beragama yang harmonis, aman, dan saling menghargai.

2.1.2.2.6 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang terdiri dari:

1. Komponen Pengungkit (*Enablers*), yaitu penilaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya antara lain dengan melakukan penataan unsur dan fungsi manajemen pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Komponen Hasil (*Results*), merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

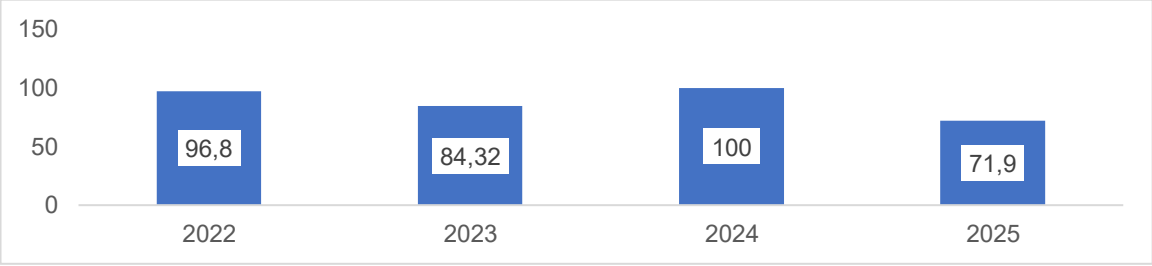
Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan penilaian BB (78,13). Sedangkan pada tahun 2021, hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi kembali memberikan nilai BB (78,38). Baru di tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan nilai A (80,14). Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mendapatkan nilai A- (95,12), sementara pada tahun 2024 Pemerintah Kota Surabaya juga berhasil mendapatkan nilai A- (100,67) dan pada tahun 2025 meningkat menjadi nilai A-(100,77). Meski mendapat A-, namun evaluasi terus dilakukan untuk mendorong perbaikan kinerja birokrasi.

2.1.2.2.7 Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan, semakin meningkat pula kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, skor literasi dan numerasi, serta proporsi penduduk berpendidikan tinggi.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan ukuran untuk menilai perkembangan literasi masyarakat di suatu daerah. Indeks ini menggambarkan akses masyarakat terhadap sumber daya literasi, kemampuan membaca dan menulis, ketersediaan bahan bacaan dan sumber informasi, partisipasi dalam kegiatan literasi, serta pemanfaatan literasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. IPLM mulai diimplementasikan pada tingkat kabupaten/kota sejak tahun 2021. Namun, publikasi nilai IPLM Kota Surabaya tahun 2021 belum tersedia secara resmi, sehingga penyajian deret waktu menggunakan data yang telah dipublikasikan oleh instansi berwenang. Capaian IPLM Kota Surabaya tahun 2022–2025 disajikan pada grafik berikut.



Gambar II.21 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022–2025

Sumber: Perpustakaan Nasional RI, 2026

IPLM Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2022, capaian IPLM sebesar 96,98, menurun menjadi 84,32 pada tahun 2023, meningkat menjadi 100 pada tahun 2024. Adapun capaian tersebut menjadikan Kota Surabaya sebagai kota yang meraih peringkat IPLM tertinggi se-Jawa Timur dengan nilai sempurna pada evaluasi metode lama. Capaian IPLM yang kemudian turun menjadi 71,90 pada tahun 2025 tidak sepenuhnya mencerminkan turunnya minat baca masyarakat, tetapi

lebih dipengaruhi oleh perubahan metode penilaian berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Penilaian dengan metode sebelumnya lebih menitikberatkan pada jumlah fasilitas perpustakaan dan koleksi buku, sementara metode baru lebih menekankan pada kinerja layanan, aktivitas literasi masyarakat, pemanfaatan layanan digital, keterlibatan komunitas, serta dampak nyata layanan perpustakaan.

Capaian literasi Kota Surabaya selama ini didukung oleh peran pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan komunitas dalam penyediaan bahan bacaan, pelatihan literasi digital, serta penguatan minat baca masyarakat. Peningkatan literasi berkontribusi terhadap kualitas sumber daya manusia, partisipasi sosial, pengurangan hoaks, dan penguatan demokrasi. Ke depan, Pemerintah Kota Surabaya perlu memperkuat transformasi layanan literasi digital, pengembangan perpustakaan digital, kegiatan literasi berbasis komunitas, kolaborasi dengan sekolah dan komunitas literasi, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain IPLM, kualitas pendidikan juga diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Literasi merupakan kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks untuk mengembangkan pengetahuan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Sementara itu, numerasi merupakan kemampuan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai konteks. Adapun persentase satuan pendidikan di Kota Surabaya yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi dan numerasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.35
Skor Literasi dan Numerasi Asesmen Nasional Tahun 2023–2025

No	Uraian	2023	2024	2025
1	Kemampuan literasi SD	88,29	86,25	81,93
2	Kemampuan numerasi SD	77,12	81,54	72,59
3	Kemampuan literasi SMP	91,23	93,7	94,51
4	Kemampuan numerasi SMP	88,29	90,92	90,03

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026

Berdasarkan Rapor Pendidikan 2025 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 17 Maret 2026, peserta didik jenjang SD dan SMP di Kota Surabaya telah mencapai standar kompetensi minimum literasi dan numerasi. Capaian tahun 2025 menunjukkan kemampuan literasi SD sebesar 81,93, numerasi SD sebesar 72,59, literasi SMP sebesar 94,51, dan numerasi SMP sebesar 90,03. Capaian ini juga melampaui

target yang ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peningkatan kemampuan literasi dilakukan melalui kolaborasi Dinas Pendidikan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, antara lain melalui program wajib baca 15 menit sebelum pelajaran, penyediaan sudut baca di kelas, penambahan koleksi buku perpustakaan sekolah, penguatan komunitas belajar guru, pendampingan bibit pendongeng dan penulis, serta lomba menulis buku dan cerpen. Sementara itu, peningkatan numerasi dilakukan melalui integrasi numerasi dalam pembelajaran nyata di berbagai mata pelajaran, simulasi asesmen numerasi, tantangan numerasi, serta penguatan komunitas belajar dan MGMP.

Sebagai kota besar dan pusat pendidikan di Jawa Timur, Surabaya perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikator pentingnya adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan tinggi, mulai jenjang Diploma hingga Strata 3. Meskipun memiliki banyak perguruan tinggi dan fasilitas pendidikan, jumlah penduduk yang melanjutkan hingga pendidikan tinggi masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan akses, motivasi, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan tinggi..

Tabel II.36
Proporsi Penduduk Kota Surabaya Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	18,43	16,73	20,42	20,05	21,42

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2026

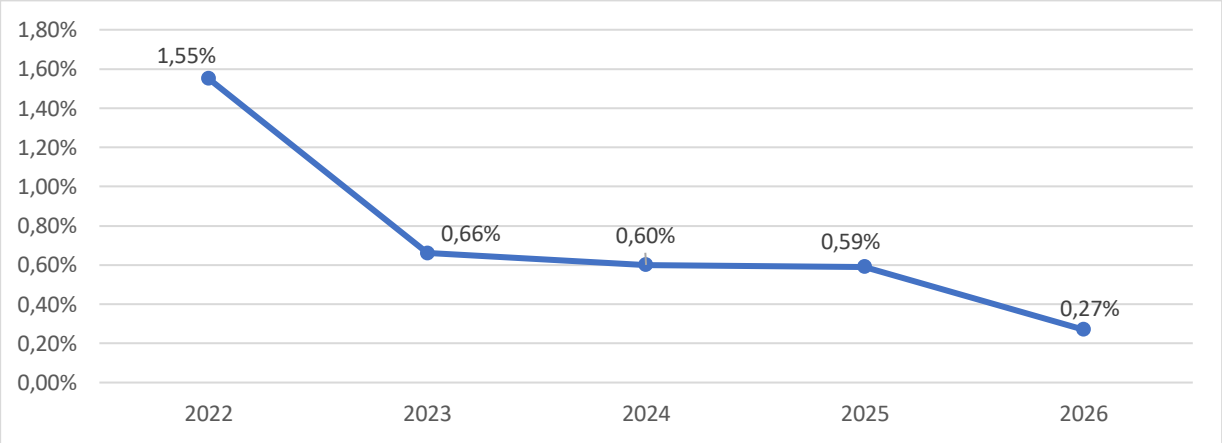
Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi pada periode 2021–2025 cenderung meningkat, dengan capaian tertinggi sebesar 21,42% pada tahun 2025 berdasarkan hasil Susenas BPS. Meskipun demikian, masih terdapat penduduk yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi karena beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan tinggi, merasa pendidikan yang dimiliki sudah cukup, menikah atau mengurus rumah tangga, serta telah bekerja.

2.1.2.2.8 Kesehatan

Kesejahteraan sosial dari aspek kesehatan dapat dilihat melalui peningkatan gizi masyarakat, khususnya balita, serta upaya menekan angka kematian bayi. Salah satu indikator penting dalam pemenuhan gizi adalah prevalensi balita stunting, yaitu kondisi

balita dengan panjang atau tinggi badan kurang dibandingkan usianya. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, penyakit pada bayi, serta kurangnya asupan gizi.

Prevalensi balita stunting di Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang semakin baik, menurun dari 1,55% pada tahun 2022 menjadi 0,27% pada tahun 2026 triwulan II. Capaian ini didukung oleh berbagai upaya pencegahan dan penanganan stunting, gizi buruk, dan gizi kurang yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kota Surabaya. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Kader Surabaya Hebat untuk monitoring dan pendampingan balita, penggunaan Aplikasi Sayang Warga untuk pendataan dan pemantauan perkembangan balita secara *real time,* serta pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi yang diberikan antara lain permakanan stunting satu kali sehari, pemberian PMT berupa susu sesuai resep dokter, serta pendampingan intensif oleh petugas gizi puskesmas agar tumbuh kembang dan status gizi balita dapat terus dipantau. Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan guna mewujudkan *zero stunting* di Kota Surabaya, seperti dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.22 Prevalensi Balita *Stunting* Tahun 2022–2026 (TW II)

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026

Di sisi lain, capaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel II.37
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	16	13	11	10	0
2	Kelahiran Hidup	40.012	39.891	36.208	35.849	17.412
3	AKI per 100.000 KH	39,99	32,59	30,38	27,89	0

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama periode 2022–2026. AKI menurun dari 39,99 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2022 menjadi 32,59 pada tahun 2023, kemudian kembali turun menjadi 30,38 pada tahun 2024 dan 27,89 pada tahun 2025. Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya jumlah kematian ibu melahirkan dari 16 kasus pada tahun 2022 menjadi 10 kasus pada tahun 2025. Sementara itu, pada Triwulan II Tahun 2026 belum tercatat kasus kematian ibu dari 17.412 kelahiran hidup sehingga AKI tercatat sebesar 0,00 per 100.000 kelahiran hidup. Namun demikian, capaian tahun 2026 tersebut masih bersifat sementara dan akan berkembang sesuai akumulasi data hingga akhir tahun.

Perbaikan kinerja pembangunan kesehatan ibu tersebut didukung oleh penguatan intervensi yang terintegrasi dan tepat sasaran. Pemerintah Kota Surabaya terus mengoptimalkan program 1 Puskesmas 1 Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (1P-1O) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, dan masa nifas. Selain itu, pelaksanaan program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dilakukan melalui pendampingan calon pengantin, ibu hamil, bayi, dan balita oleh Kader Surabaya Hebat (KSH) serta Tim Pendamping Keluarga (TPK). Upaya tersebut diperkuat dengan optimalisasi layanan dukungan nutrisi melalui pemberian makanan tambahan lokal bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) berisiko tinggi, pemberian permakanan bagi ibu hamil KEK, serta pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada remaja putri, calon pengantin, dan ibu hamil. Sinergi berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung penurunan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Kota Surabaya.

Tabel II.38
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah bayi lahir meninggal	174	161	146	144	48
2	Kelahiran Hidup	40.012	39.891	36.208	35.849	17.412
3	AKB per 1.000 KH	4,35	4,04	4,03	4,02	2,76

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan tren penurunan yang relatif konsisten selama periode 2022–2025. AKB menurun dari 4,35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2022 menjadi 4,04 pada tahun 2023, kemudian menjadi 4,03 pada tahun 2024 dan 4,02 pada tahun 2025. Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya jumlah kematian bayi dari 174 kasus pada tahun 2022 menjadi 144 kasus pada tahun 2025. Sementara itu, pada

Triwulan II Tahun 2026 tercatat 48 kasus kematian bayi dari 17.412kelahiran hidup, sehingga AKB mencapai 2,76 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian tersebut masih bersifat sementara karena merupakan akumulasi data hingga triwulan pertama tahun berjalan.

Menurunnya AKB menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak yang didukung oleh penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan neonatal, pemantauan tumbuh kembang bayi secara berkelanjutan, serta penguatan upaya promotif dan preventif melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Kota Surabaya juga terus mengoptimalkan pendampingan ibu hamil dan bayi melalui jejaring fasilitas kesehatan, Kader Surabaya Hebat (KSH), dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), sehingga risiko komplikasi selama masa kehamilan, persalinan, dan periode neonatal dapat dideteksi serta ditangani lebih dini.

Derajat kesehatan masyarakat juga dapat diukur melalui status gizi penduduk, khususnya balita. Kondisi gizi balita di Kota Surabaya secara umum menunjukkan perkembangan yang semakin baik, yang tercermin dari menurunnya prevalensi balita gizi buruk dari tahun ke tahun. Penurunan prevalensi gizi buruk tersebut mengindikasikan meningkatnya efektivitas intervensi perbaikan gizi, penguatan pemantauan pertumbuhan balita, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan gizi, serta optimalisasi program pencegahan stunting dan masalah gizi lainnya. Adapun perkembangan prevalensi balita gizi buruk di Kota Surabaya selama periode tahun 2021–2026 (Triwulan II) sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.39
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2021–2026 (TW II)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk	148	123	118	109	105	51
2	Jumlah balita yang ditimbang	148.720	126.113	149.899	142.254	138.102	133.435
3	Prevalensi balita gizi buruk (%)	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,04

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026

Tabel II.40
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2022–2026 (TW II)

No	Kecamatan	2022			2023			2024			2025			2026		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
1	Kec. Asemrowo	4	3.504	0,11%	0	3.523	0,00%	1	3.619	0,03%	0	3.391	0,00%	0	3.298	0,00%
2	Kec. Benowo	3	3.017	0,10%	6	5.112	0,02%	4	4.304	0,09%	7	4.052	0,17%	4	3.564	0,11%
3	Kec. Bubutan	5	4.212	0,12%	8	4.418	0,05%	2	5.191	0,04%	1	4.651	0,02%	1	4.126	0,02%
4	Kec. Bulak	4	2.458	0,16%	1	2.543	0,07%	2	2.196	0,09%	2	2.241	0,09%	1	2.517	0,04%
5	Kec. Dukuh Pakis	5	1.771	0,28%	3	2.505	0,05%	2	1.968	0,10%	2	1.818	0,11%	3	2.218	0,14%
6	Kec. Gayungan	3	1.501	0,20%	1	2.130	0,00%	1	2.244	0,04%	1	1.862	0,05%	1	2.150	0,05%
7	Kec. Genteng	1	2.850	0,04%	0	2.351	0,00%	2	2.051	0,10%	3	2.356	0,13%	1	2.472	0,04%
8	Kec. Gubeng	2	3.506	0,06%	3	5.950	0,04%	5	5.090	0,10%	0	4.994	0,00%	0	4.588	0,00%
9	Kec. Gunung Anyar	2	1.305	0,15%	2	2.543	0,00%	2	3.671	0,05%	2	3.566	0,06%	2	3.576	0,06%
10	Kec. Jambangan	0	1.838	0,00%	0	3.206	0,04%	1	2.705	0,04%	2	2.102	0,10%	4	2.570	0,16%
11	Kec. Karang Pilang	3	1.982	0,15%	3	4.050	0,49%	1	2.828	0,04%	0	4.112	0,00%	0	3.567	0,00%
12	Kec. Kenjeran	10	9.711	0,10%	8	10.884	0,03%	4	9.772	0,04%	5	9.751	0,05%	5	10.260	0,05%
13	Kec. Krembangan	11	6.068	0,18%	7	5.690	0,07%	4	5.854	0,07%	12	6.135	0,20%	2	5.275	0,04%
14	Kec. Lakarsantri	3	2.952	0,10%	3	3.722	0,09%	5	3.766	0,13%	4	3.572	0,11%	3	3.326	0,09%
15	Kec. Mulyorejo	1	2.158	0,05%	0	4.678	0,00%	4	4.363	0,09%	0	3.896	0,00%	0	3.605	0,00%
16	Kec. Pabean Cantian	2	3.980	0,05%	0	3.708	0,00%	1	3.323	0,03%	0	3.654	0,00%	0	3.204	0,00%
17	Kec. Pakal	2	3.793	0,05%	1	3.434	0,00%	2	3.608	0,06%	0	3.056	0,00%	0	2.691	0,00%
18	Kec. Rungkut	6	3.056	0,20%	12	5.146	0,16%	3	5.451	0,06%	2	5.742	0,03%	2	5.454	0,04%
19	Kec. Sambikerep	2	2.960	0,07%	4	3.995	0,1%	4	3.683	0,11%	5	3.517	0,14%	4	3.142	0,13%
20	Kec. Sawahan	3	10.046	0,03%	7	10.456	0,05%	5	8.459	0,06%	11	7.894	0,14%	3	7.920	0,04%
21	Kec. Semampir	12	8.537	0,14%	18	8.542	0,13%	7	9.195	0,08%	21	8.512	0,25%	9	8.631	0,10%
22	Kec. Simokerto	4	4.102	0,10%	5	4.254	0,1%	3	4.565	0,07%	6	4.242	0,14%	2	3.992	0,05%
23	Kec. Sukolilo	5	2.879	0,17%	1	5.190	0,03%	4	5.568	0,07%	0	4.914	0,00%	0	4.425	0,00%
24	Kec. Sukomanunggal	1	5.156	0,02%	0	5.340	0,02%	4	4.646	0,09%	0	4.437	0,00%	0	4.454	0,00%
25	Kec. Tambaksari	9	8.616	0,10%	8	10.103	0,05%	3	10.085	0,03%	9	10.580	0,09%	1	9.908	0,01%
26	Kec. Tandes	2	4.066	0,05%	0	4.951	0,00%	6	4.061	0,15%	2	4.040	0,05%	1	3.767	0,03%
27	Kec. Tegalsari	3	3.906	0,08%	1	5.187	0,00%	6	4.055	0,15%	0	3.625	0,00%	0	3.666	0,00%

No	Kecamatan	2022			2023			2024			2025			2026		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	0	2.376	0,00%	6	2.827	0,41%	1	2.620	0,04%	2	2.447	0,08%	1	2.335	0,04%
29	Kec. Wiyung	6	3.132	0,19%	5	3.214	0,23%	4	2.918	0,14%	3	2.834	0,11%	1	2.885	0,03%
30	Kec. Wonocolo	1	4.262	0,02%	0	4.082	0,00%	5	4.200	0,12%	0	3.996	0,00%	0	4.053	0,00%
31	Kec. Wonokromo	8	6.413	0,12%	5	6.165	0,06%	11	6.195	0,18%	3	6.113	0,05%	0	5.796	0,00%
Total		**123**	**126.113**	**0,10%**	**118**	**149.899**	**0,08%**	**109**	**142.254**	**0,08%**	**105**	**138.102**	**0,08%**	**51**	**133.435**	**0,04%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2026

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.41
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya
Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Capaian Pembangunan	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Grup Kesenian	806	715	911	915	915
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga	45	49	58	58	64
4	Jumlah Gedung Olahraga	5	5	5	5	5

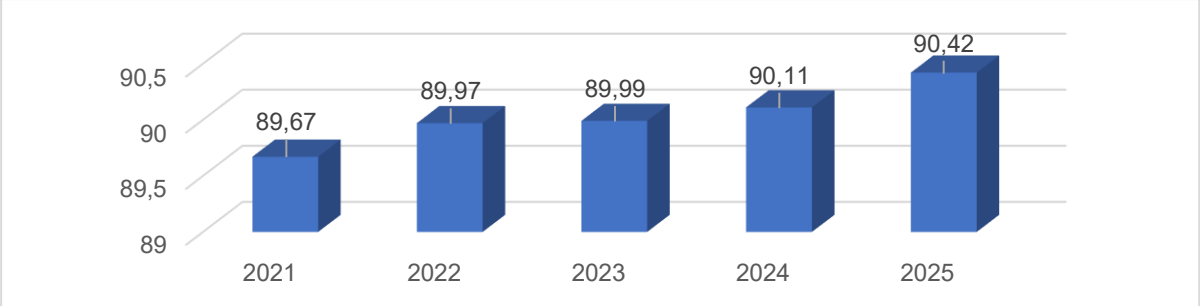
Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2026

Pembangunan seni, budaya, dan olahraga di Kota Surabaya terus menunjukkan perkembangan yang positif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat identitas budaya daerah. Hal tersebut tercermin dari jumlah grup kesenian yang meningkat dari 806 grup pada tahun 2022 menjadi 911 grup pada tahun 2024, kemudian bertambah menjadi 915 grup pada tahun 2025 dan tetap terjaga hingga Triwulan II Tahun 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya serta efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sementara itu, jumlah gedung kesenian tetap sebanyak 4 unit selama periode tersebut, yang mengindikasikan bahwa penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya lebih diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sarana yang telah tersedia.

Upaya pembinaan dan pelestarian seni budaya dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan, pembinaan komunitas seni, serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dan pertunjukan seni budaya. Pemerintah Kota Surabaya secara rutin menyelenggarakan berbagai agenda budaya sebagai media pelestarian budaya lokal sekaligus pengembangan ekonomi kreatif dan daya tarik pariwisata, di antaranya Festival Rujak Uleg, Parade Surabaya Juang, Sedekah Bumi, Festival Cipta Karya Tari, Festival Seni Lintas Budaya, Surabaya Vaganza, Night at The Museum, Surabaya Art & Culture Festival, serta Pemilihan Duta Wisata Cak dan Ning Surabaya. Berbagai kegiatan

tersebut menjadi wadah bagi pelaku seni untuk berekspresi, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal, serta memperkuat citra Kota Surabaya sebagai kota yang kreatif, berbudaya, dan memiliki daya saing di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pelestarian budaya lokal juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami, memiliki, dan peduli terhadap nilai budaya serta kebangsaan. Hal ini diukur melalui Indeks Budaya Lokal yang dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari survei tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal dan tingkat kepedulian terhadap kegiatan bernilai kebangsaan. Perkembangan Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya tahun 2021–2025 disajikan pada gambar berikut.



Gambar II.23 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Tahun 2021–2025

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Pencapaian Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya tahun 2025 sebesar 90,42%, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 89,67%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pembangunan kebudayaan daerah dalam memperkuat nilai budaya lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga identitas budaya Kota Surabaya di tengah dinamika pembangunan perkotaan. Sejalan dengan penyelarasan indikator pembangunan daerah terhadap kebijakan nasional, mulai tahun 2026–2030 pengukuran Indeks Budaya Lokal diperbarui menggunakan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK merupakan indikator komposit nasional yang mengukur pembangunan kebudayaan secara lebih menyeluruh, mencakup dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Dengan penggunaan IPK, Pemerintah Kota Surabaya memiliki dasar pengukuran yang lebih holistik, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional dalam merumuskan program kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pada aspek olahraga, terdapat 64 cabang olahraga prestasi yang dibina. Dukungan sarana olahraga dilakukan melalui keberadaan 5 gedung olahraga, yaitu Gelanggang Remaja, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo, gedung indoor Surabaya Sport Center, dan Gelora Pancasila. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya telah

membangun 635 lapangan olahraga yang tersebar di permukiman dan sekolah, mencakup berbagai cabang olahraga termasuk renang dan panjat tebing. Pembinaan atlet dilakukan melalui pendampingan, pemusatan latihan, kejuaraan tingkat kota seperti Piala Wali Kota, pengiriman atlet pada kejuaraan regional dan nasional, serta pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi.

Upaya tersebut sejalan dengan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) sebagaimana diatur dalam Permenpora Nomor 1 Tahun 2022, yang mencakup 9 dimensi, yaitu SDM olahraga, ruang terbuka olahraga, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi, dan performa. Dengan demikian, IPO menjadi ukuran komprehensif untuk menilai pembangunan olahraga, tidak hanya dari sisi prestasi, tetapi juga partisipasi masyarakat, kesehatan, ekonomi, dan kualitas hidup.

Capaian IPO juga menjadi bagian dari penghitungan Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya, dengan komposisi 50% berasal dari IPO dan 50% dari persentase pemuda berprestasi. Pemuda berprestasi dimaknai sebagai warga Surabaya usia 16–30 tahun yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik, seperti penerima Beasiswa Pemuda Tangguh dengan IPK minimal 3,5, Wirausaha Pemula Mandiri dengan omzet di atas Rp1.500.000 per bulan, serta pemenang Pemuda Pelopor tingkat kota.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa daya saing kota tidak hanya ditentukan oleh pembangunan olahraga, tetapi juga kualitas generasi mudanya. Olahraga membentuk disiplin, daya juang, dan kesehatan, sedangkan prestasi akademik, kewirausahaan, dan kepeloporan membentuk kecerdasan, kreativitas, serta kepedulian sosial. Pembinaan pemuda di Kota Surabaya dilakukan melalui Beasiswa Pemuda Tangguh, Pemuda Pelopor, Wirausaha Pemula, dan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja, yang diarahkan untuk membangun pemuda yang tangguh, produktif, mandiri, dan berintegritas.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu aspek yang dianalisis adalah capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perkembangan pemenuhan SPM Kota Surabaya tahun 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.42
Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	2021	2022	2023	2024	2025
BIDANG URUSAN PENDIDIKAN		**100%**	**98,54%**	**99,68%**	**100%**	**100%**
1	**Pendidikan Dasar Usia Dini**	100%	97,15%	99,34%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		17,15%	19,34%	20,00%	20,00%
2	**Pendidikan Dasar**	100%	99,83%	99,69%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		19,83%	19,69%	20,00%	20,00%
3	**Pendidikan Kesetaraan**	100%	98,65%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		18,65%	20,00%	20,00%	20,00%
BIDANG URUSAN KESEHATAN		**95,57%**	**98,44%**	**99,97%**	**100%**	**100%**
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	99,38%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	99,63%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**	91,59%	97,40%	99,65%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		77,94%	79,76%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		19,46%	19,46%	20,00%	20,00%
5	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
6	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**	88,33%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
7	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
8	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**	84,90%	96,17%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		76,17%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
9	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
10	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**	83,05%	88,04%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		68,04%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
11	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	100%	99,68%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		19,68%	19,68%	20,00%	20,00%

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	2021	2022	2023	2024	2025
12	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)**	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM		**99,11%**	**97,88%**	**97,88%**	**100%**	**100%**
1	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**	98,21%	98,49%	98,49%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		79,88%	79,88%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		18,61%	18,61%	20,00%	20,00%
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**	100%	97,28%	97,28%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		79,69%	79,69%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		17,59%	17,59%	20,00%	20,00%
BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	100%	100%	100%	100.00%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2	**Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		**99,71%**	**99,81%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	**Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota**	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	98,57%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
3	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
4	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
5	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	100%	99,03%	99,03%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		19,03%	19,03%	20,00%	20,00%
BIDANG URUSAN SOSIAL		**80,96%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**	72,73%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**	55,55%	100%	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	2021	2022	2023	2024	2025
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**	76,50%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2026.)Tahun 2021 menggunakan metode pengukuran lama.*

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan metode penilaian capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) antara tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari implementasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme pengukuran dan pelaporan capaian SPM secara lebih komprehensif. Mulai tahun 2022, capaian SPM dihitung berdasarkan dua komponen utama, yaitu pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80% dan pencapaian mutu layanan dasar dengan bobot 20%.

Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021–2025. Pada tahun 2025, seluruh bidang urusan wajib yang menjadi objek SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial telah mencapai capaian 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah mampu memenuhi target pelayanan dasar sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, baik dari aspek cakupan penerima layanan maupun mutu layanan dasar.

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sejumlah bidang urusan yang sempat belum mencapai target penuh, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial, berhasil ditingkatkan hingga mencapai capaian optimal pada tahun 2024 dan dapat dipertahankan pada tahun 2025. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem tata kelola, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, terutama dalam penguatan komunikasi

dan kerja sama antarperangkat daerah, baik di lingkungan internal Pemerintah Kota Surabaya maupun dengan instansi pemerintahan lainnya.

2.1.3.1.1 Pendidikan

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan pelayanan bidang pendidikan sebagai salah satu pelayanan dasar. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan menjadi instrumen untuk memastikan setiap warga negara memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel II.43
Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2021-2025

No.	Jenis Layanan SPM	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	97,15%	99,34%	100%	100%
2	Pendidikan Dasar	100%	99,83%	99,69%	100%	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	98,65%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2026

Berdasarkan capaian Tahun 2021–2025, pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada Tahun 2021, seluruh jenis layanan SPM, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan telah mencapai target sebesar 100 persen. Pada Tahun 2022, capaian layanan Pendidikan Anak Usia Dini menurun menjadi 97,15 persen, Pendidikan Dasar menjadi 99,83 persen, dan Pendidikan Kesetaraan menjadi 98,65 persen. Selanjutnya, capaian tersebut kembali meningkat pada Tahun 2023, hingga seluruh jenis layanan berhasil mencapai 100 persen pada Tahun 2024 dan mampu dipertahankan pada Tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya mampu menjaga konsistensi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan serta terus melakukan perbaikan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan.

Dalam rangka mempertahankan capaian tersebut, Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan satuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendataan dan pelaporan, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Selain itu, upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan juga terus dilakukan melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan dan pemenuhan layanan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan langkah tersebut, diharapkan capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan.

2.1.3.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Kinerja pelayanan pendidikan di Kota Surabaya diukur melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS menggambarkan proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikannya, sehingga mencerminkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.

Sementara itu, APM menunjukkan proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah sesuai jenjang pendidikan yang seharusnya, sehingga mencerminkan ketepatan partisipasi pendidikan. Kedua indikator ini saling melengkapi dalam menilai capaian pembangunan pendidikan, baik dari aspek pemerataan akses maupun kesesuaian layanan pendidikan dengan kelompok usia sasaran. Data APM per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.44
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Per Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa SD/MI yang berusia 7-12 tahun	APM	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa SMP/MTs yang berusia 13-15 tahun	APM
Asemrowo	5.059	4.840	95,67%	2.483	1.623	65,36%
Benowo	7.258	6.176	85,09%	3.914	3.313	84,64%
Bubutan	8.660	7.753	89,53%	4.642	1.447	31,17%
Bulak	4.664	5.014	107,50%	2.499	2.206	88,28%
Dukuh Pakis	5.348	4.848	90,65%	2.820	3.286	116,52%
Gayungan	3.949	4.105	103,95%	2.089	1.901	91,00%
Genteng	4.901	10.009	204,22%	2.661	4.195	157,65%
Gubeng	11.043	10.465	94,77%	5.792	4.473	77,23%
Gunung Anyar	5.819	5.269	90,55%	3.030	2.441	80,56%
Jambangan	5.097	4.264	83,66%	2.742	3.085	112,51%
Karangpilang	6.767	5.628	83,17%	3.491	2.686	76,94%
Kenjeran	19.129	18.203	95,16%	9.542	7.720	80,91%
Krembangan	10.704	9.939	92,85%	5.630	5.857	104,03%
Lakarsantri	6.071	7.885	129,88%	3.252	3.653	112,33%
Mulyorejo	7.551	8.279	109,64%	4.085	4.911	120,22%
Pabean Cantian	6.742	5.632	83,54%	3.528	1.570	44,50%
Pakal	6.231	6.738	108,14%	3.225	2.868	88,93%
Rungkut	11.517	10.967	95,22%	5.958	5.032	84,46%
Sambikerep	6.264	5.960	95,15%	3.509	3.611	102,91%
Sawahan	17.441	17.211	98,68%	9.569	8.765	91,60%
Semampir	18.960	18.385	96,97%	9.651	7.984	82,73%
Simokerto	8.427	7.338	87,08%	4.418	3.665	82,96%
Sukolilo	10.783	9.656	89,55%	5.552	6.031	108,63%
Sukomanunggal	9.378	8.233	87,79%	4.886	5.224	106,92%
Tambaksari	20.338	19.520	95,98%	11.002	13.095	119,02%
Tandes	8.485	8.909	105,00%	4.613	5.365	116,30%
Tegalsari	8.631	10.027	116,17%	4.596	8.829	192,10%
Tenggilis Mejoyo	5.353	4.214	78,72%	2.788	2.306	82,71%

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	Penduduk usia 7-12 tahun	Siswa SD/MI yang berusia 7-12 tahun	APM	Penduduk usia 13-15 tahun	Siswa SMP/MTs yang berusia 13-15 tahun	APM
Wiyung	6.687	5.789	86,57%	3.646	4.557	124,99%
Wonocolo	7.152	5.740	80,26%	3.815	4.245	111,27%
Wonokromo	12.870	9.940	77,23%	7.082	6.701	94,62%
Total	**277.279**	**266.936**	**96,27%**	**146.510**	**142.645**	**97,36%**

Sumber: Dinas Pendidikan, diolah, 2026

Tabel tersebut menunjukkan bahwa akses layanan pendidikan di Kota Surabaya sudah baik, namun pemerataan fasilitas pendidikan masih perlu diperkuat. Intervensi yang dilakukan antara lain melalui penyaluran dana BOS dan BOPDA bagi SD dan SMP negeri maupun swasta, serta pemberian beasiswa bagi anak usia sekolah berkebutuhan khusus pada SLB jenjang SD dan SMP/sederajat. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan pembangunan sekolah baru jenjang SD dan SMP negeri di beberapa lokasi untuk mendukung pemerataan layanan pendidikan di Kota Surabaya.

2.1.3.1.1.2 Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan (AL) dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir. AL untuk jenjang SD/MI tahun 2021 mencapai angka 100% dan konsisten sebesar 100% sampai dengan tahun 2025. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2021 sebesar 100%, dan konsisten sebesar 100% sampai dengan akhir tahun 2025. Perkembangan Angka Kelulusan jenjang pendidikan dasar Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.45
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Tahun 2021–2025

No.	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	AL SD/MI (persen)	100	100	100	100	100
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus	41.182	44.039	44.930	45.929	44.407
1.2	Jumlah Siswa SD/MI Kelas 6	41.182	44.039	44.930	45.929	44.407
2.	AL SMP/MTs (persen)	100	100	100	100	100
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus	37.413	38.131	40.218	38.709	34.706
2.2	Jumlah Siswa SMP/MTs Kelas 9	37.413	38.131	40.218	38.709	34.706

Sumber: Dinas Pendidikan, 2026

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah di jenjang masing-masing.

2.1.3.1.1.3 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah angka putus sekolah, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung untuk menempuh pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Pada tahun 2021 Angka Putus Sekolah di jenjang SD/MI sebesar 0% dan konsisten sampai dengan tahun 2025. Begitu pula dengan APS SMP/MTs pada tahun 2022 sebesar 0% dan konsisten sampai dengan tahun 2026 triwulan II. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Surabaya yang tidak ditangani dengan menyekolahkan kembali dan mendampingi hingga tuntas masa pendidikannya. Perkembangan Angka Putus Sekolah Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.46
Perkembangan Angka Putus Sekolah Tahun 2021–2026 (TW II)

No	Jenjang Pendidikan	2022	2023	2024	2025	2026
1.	APS SD/MI (persen)	0	0	0	0	0
1.1	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SD/MI	0	0	0	0	0
1.2	Jumlah Siswa SD/MI	313.505	321.128	292.229	292.475	247.363
2.	APS SMP/MTs (persen)	0	0	0	0	0
2.1	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs	0	0	0	0	0
2.2	Jumlah Siswa SMP/MTs	160.764	163.134	147.594	156.815	142.645

Sumber: Dinas Pendidikan, 2026

2.1.3.1.1.4 Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar

masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2026 sampai dengan triwulan II disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.47
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2026 (TW II)

Kecamatan	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Asemrowo	7	10	17	5.059	1:297	3	3	6	2.483	1:414
Benowo	14	5	19	7.258	1:382	4	2	6	3.914	1:652
Bubutan	28	2	30	8.660	1:288	8	0	8	4.642	1:580
Bulak	12	6	18	4.664	1:259	5	2	7	2.499	1:357
Dukuh Pakis	21	1	22	5.348	1:243	12	1	13	2.820	1:217
Gayungan	13	1	14	3.949	1:282	4	1	5	2.089	1:418
Genteng	20	1	21	4.901	1:233	12	0	12	2.661	1:222
Gubeng	25	5	30	11.043	1:368	13	0	13	5.792	1:445
Gununganyar	16	1	17	5.819	1:342	9	1	10	3.030	1:303
Jambangan	7	5	12	5.097	1:424	7	3	10	2.742	1:274
Karangpilang	12	3	15	6.767	1:451	9	0	9	3.491	1:388
Kenjeran	18	22	40	19.129	1:478	13	8	21	9.542	1:454
Krembangan	31	7	38	10.704	1:282	17	2	19	5.630	1:296
Lakarsantri	27	6	33	6.071	1:184	13	2	15	3.252	1:216
Mulyorejo	23	0	23	7.551	1:328	15	0	15	4.085	1:272
Pabean Cantian	14	4	18	6.742	1:375	6	0	6	3.528	1:588
Pakal	15	6	21	6.231	1:297	9	4	13	3.225	1:248
Rungkut	24	5	29	11.517	1:397	10	2	12	5.958	1:497
Sambikerep	17	6	23	6.264	1:272	16	4	20	3.509	1:175
Sawahan	41	0	41	17.441	1:425	13	1	14	9.569	1:684
Semampir	34	30	64	18.960	1:296	16	10	26	9.651	1:371
Simokerto	18	6	24	8.427	1:351	9	3	12	4.418	1:368
Sukolilo	32	1	33	10.783	1:327	17	2	19	5.552	1:292
Sukomanunggal	28	1	29	9.378	1:323	16	2	18	4.886	1:271
Tambaksari	36	10	46	20.338	1:442	17	3	20	11.002	1:550
Tandes	21	10	31	8.485	1:274	13	2	15	4.613	1:308
Tegalsari	28	2	30	8.631	1:278	9	0	9	4.596	1:511
Tenggilis Mejoyo	18	1	19	5.353	1:282	7	0	7	2.788	1:398
Wiyung	15	1	16	6.687	1:418	11	0	11	3.646	1:331
Wonocolo	18	2	20	7.152	1:358	8	1	9	3.815	1:424
Wonokromo	31	8	39	12.870	1:330	19	2	21	7.082	1:337
Total	**663**	**168**	**832**	**277.279**	**1:333**	**340**	**61**	**401**	**146.510**	**1:365**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2026

Data pada tabel menunjukkan bahwa kebutuhan ketersediaan sekolah jenjang SD dan SMP terus meningkat setiap tahun. Namun, rasio ketersediaan sekolah antarwilayah masih bervariasi. Pada jenjang SD/MI, rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Kenjeran

sebesar 1:478, sedangkan rasio terendah terdapat di Kecamatan Lakarsantri sebesar 1:184. Pada jenjang SMP/MTs, rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Sawahan sebesar 1:684, sedangkan rasio terendah terdapat di Kecamatan Sambikerep sebesar 1:175.

Wilayah dengan rasio ketersediaan sekolah tinggi cenderung menjadi tujuan penduduk usia sekolah dari kecamatan lain, sehingga dapat memengaruhi capaian APK dan APM di wilayah tersebut. Sementara itu, wilayah dengan rasio ketersediaan sekolah rendah perlu diarahkan pada penyediaan fasilitas pendidikan baru atau pengembangan daya tampung sekolah agar kebutuhan pendidikan penduduk usia sekolah dapat terpenuhi.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang tercermin dari akreditasi sekolah. Akreditasi menjadi instrumen untuk menilai kinerja sekolah sekaligus dasar pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas, serta inovasi layanan pendidikan. Akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat kualitas pendidikan mulai dari PAUD hingga SMP sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya tersebut dilakukan melalui pemerataan akses layanan pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta pengembangan PAUD Holistik Integratif yang mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak agar tumbuh kembang anak dapat berlangsung secara optimal sejak usia dini.

Tabel II.48
Jumlah PAUD Berkualitas di Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No	Jenjang Pendidikan	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah PAUD	2.664	2.647	2.881	2.631	2.595
2.	Jumlah PAUD Berkualitas	1.323	1.323	1.325	1.303	843
3.	Jumlah PAUD Terakreditasi	1.308	1.100	1.265	1.241	1.247

Sumber: Dinas Pendidikan, 2026

Jumlah PAUD di Kota Surabaya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 triwulan II mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 jumlah PAUD meningkat menjadi 2.881 lembaga dibandingkan tahun sebelumnya, lalu menjadi 2.631 pada tahun 2025 dan pada tahun 2026 Triwulan II menurun menjadi 2.595 lembaga. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya PAUD yang tidak lagi beroperasi, penggabungan lembaga, serta berakhirnya izin operasional PAUD. Sementara itu, jumlah PAUD berkualitas relatif stabil pada periode 2022–2025, namun pada tahun 2026 Triwulan II baru tercatat sejumlah 843

lembaga karena capaian tersebut masih bersifat sementara dan–dikarenakan masih terdapat PAUD yang sedang dalam proses penilaian kualitas maupun akreditasi. Adapun jumlah PAUD terakreditasi (lembaga TK) juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun seiring dengan proses evaluasi, pembaruan status akreditasi, dan penyesuaian data kelembagaan.

Penyelenggaraan PAUD di Kota Surabaya dilaksanakan secara kolaboratif melalui kegiatan *parenting*, pemantauan tumbuh kembang anak, serta peningkatan kapasitas pendidik melalui pelatihan dan pendampingan. Upaya ini diperkuat melalui Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif yang melibatkan lintas perangkat daerah, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, masyarakat, dan mitra terkait, sehingga mendorong terwujudnya layanan PAUD yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan.

Pada jenjang SD dan SMP, peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui monitoring akreditasi sekolah dengan target minimal akreditasi B. Kebijakan ini bertujuan memastikan terpenuhinya standar mutu layanan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan bagi satuan pendidikan yang masih berada pada kategori di bawahnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2025, terdapat 314 SMP/sederajat yang telah terakreditasi, terdiri atas 234 sekolah berakreditasi A, 78 sekolah berakreditasi B, dan 2 sekolah berakreditasi C. Sementara itu, pada jenjang SD/sederajat terdapat 647 sekolah yang telah terakreditasi dengan akreditasi A sejumlah 234, akreditasi B sejumlah 155, dan akreditasi C sejumlah 21. Masih adanya sekolah dengan akreditasi C perlu menjadi perhatian khusus untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Fluktuasi jumlah sekolah dan sekolah terakreditasi dipengaruhi oleh dinamika kelembagaan, seperti adanya sekolah swasta yang tutup, adanya *merger* sekolah, berakhirnya izin operasional sekolah, maupun penambahan sekolah swasta baru.

Tabel II.49
Data Akreditasi Sekolah Dinas Pendidikan Tahun 2026 (TW II)

Jenjang Sekolah	Akreditasi A	Akreditasi B	Akreditasi C	Total Terakreditasi
SMP / Sederajat	234	78	2	**314**
SD / Sederajat	471	155	21	**647**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2026

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan akreditasi sekolah guna memastikan kualitas mutu layanan pendidikan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan diantaranya adalah melakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan prioritas sasaran terhadap

sekolah yang belum akreditasi atau pun dalam proses peningkatan akreditasi. Dinas Pendidikan juga melakukan pendampingan secara intensif kepada sekolah terkait pemenuhan persyaratan akreditasi. Disamping itu juga dibarengi dengan fasilitasi permohonan kuota akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional untuk mengoptimalkan peningkatan akreditasi sekolah di Kota Surabaya.

Selain pendidikan formal, Kota Surabaya juga memiliki 44 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan 1 lembaga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2026, peserta pendidikan kesetaraan di SKB Negeri terdiri atas 3 peserta Paket A, 17 peserta Paket B, dan 67 peserta Paket C yang tersebar di berbagai kecamatan dan dijadwalkan mengikuti ujian pada pertengahan tahun.

2.1.3.1.1.1 Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan

Ketersediaan guru yang memenuhi standar kualifikasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan pada seluruh jenjang. Guru dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing. Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.50
Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2026 (TW II)

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	1	0	0	0	0	4	6	0	11
SD	14	1	17	0	2	2.539	412	1	2.986
SMP	0	0	0	1	0	711	230	1	943
Total	**15**	**1**	**17**	**1**	**2**	**3.254**	**648**	**2**	**3.940**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2026

Tabel II.51
Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2026 (TW II)

Jenjang	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Total
TK	383	20	52	30	1	4.029	139	1	4.655
SD	61	2	13	12	6	7.526	351	3	7.974
SMP	7	0	1	9	2	4.770	409	0	5.198
Total	**451**	**22**	**66**	**51**	**9**	**16.325**	**899**	**4**	**17.827**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2026

Pada tabel jumlah guru di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat sejumlah pengajar yang belum memenuhi kesesuaian akademik, sehingga masih sangat penting

bagi Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas para pengajar baik PNS maupun Non PNS di jenjang pendidikan TK, SD, maupun SMP.

Tabel II.52
Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2025

No	Jenjang	Guru Bersertifikat Pendidik			Jumlah Total Guru			Guru Yang Belum Sertifikasi		
		PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah	PNS	Non PNS	Jumlah
1	TK	10	2.618	2.628	11	4.655	4.666	1	2.037	2.038
2	SD	2.844	4.822	7.666	2.986	7.974	10.960	142	3.152	3.294
3	SMP	921	3.266	4.187	943	5.198	6.141	22	1.932	1.954
Jumlah		**3.775**	**10.706**	**14.481**	**3.940**	**17.827**	**21.767**	**165**	**7.121**	**7.286**

Sumber: Dinas Pendidikan, 2026

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa masih ada 7.286 guru yang belum tersertifikasi. Adapun jumlah tersebut terdiri dari 2.037 guru TK, 3.294 guru SD/MI/setara serta 1.954 guru SMP/MTs/setara. Hal ini disebabkan banyaknya guru Non PNS yang tidak dapat didaftarkan sertifikasi mengingat terbatasnya kuota sertifikasi guru dari Pemerintah Pusat dan syarat guru yang diajukan untuk sertifikasi diutakmakan adalah guru PNS.

2.1.3.1.1.2 Pendidikan Inklusi

Kota Surabaya memastikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, melalui penyelenggaraan sekolah inklusi di berbagai jenjang. Sekolah inklusi tersebut didukung dengan penyediaan guru pendamping khusus, penyesuaian kurikulum, serta penguatan sarana dan prasarana yang adaptif, sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran yang setara, ramah, dan nondiskriminatif bagi seluruh peserta didik. Adapun jumlah peserta didik inklusi adalah sebagai berikut.

Tabel II.53
Jumlah Peserta Didik Inklusi Di Kota Surabaya Tahun 2026 (TW II)

No	Jenjang Pendidikan	2026
1.	Jumlah penduduk usia 4-6 tahun penyandang disabilitas	1.732
1.1	Jumlah peserta didik inklusi di PKBM yang berusia 4-6 tahun	0
1.2	Jumlah peserta didik inklusi jenjang PAUD yang berusia 4-6 tahun	903
1.3	Jumlah peserta didik inklusi jenjang SD/MI yang berusia 4-6 tahun	0
2.	Jumlah penduduk usia 7-18 tahun penyandang disabilitas	10.035
2.1	Jumlah peserta didik inklusi di PKBM yang berusia 7-18 tahun	0
2.2	Jumlah peserta didik inklusi jenjang PAUD yang berusia 7-18 tahun	316
2.3	Jumlah peserta didik inklusi jenjang SD/MI yang berusia 7-18 tahun	3.105
2.4	Jumlah peserta didik inklusi jenjang SMP/MTs yang berusia 7-18 tahun	1.262
2.5	Jumlah peserta didik inklusi jenjang SMA/SMK/MA yang berusia 7-18 tahun	1.256

Sumber: Dinas Pendidikan, 2026

Seluruh SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Surabaya saat ini telah menerapkan pendidikan inklusif dengan menerima peserta didik penyandang disabilitas. Peserta didik disabilitas yang bersekolah di SDN maupun SMPN memperoleh pendampingan dan fasilitasi sesuai kebutuhan, serta didukung dalam proses penempatan sekolah berdasarkan domisili hingga keberlanjutan pendidikan pada jenjang berikutnya, termasuk transisi dari SD ke SMP.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat upaya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui peningkatan cakupan skrining, deteksi dini, penemuan kasus, pengobatan, serta edukasi kepada masyarakat. Jumlah kasus baru yang tercatat setiap tahun tidak hanya mencerminkan kondisi epidemiologis penyakit, tetapi juga dipengaruhi oleh intensitas penemuan kasus dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Adapun perkembangan jumlah kasus baru penyakit menular dan penyakit tidak menular di Kota Surabaya selama Tahun 2022–2026 (Triwulan II) disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.54
Jumlah Kasus Baru Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular
Tahun 2022–2026 (TW II)

No	Penyakit	2022	2023	2024	2025	2026
1.	TBC	8.218	10.987	12.096	11.016	5.380
2.	COVID-19	77.739	4.580	688	45	2
3.	HIV/AIDS	828	1.260	1.261	1.119	526
4.	Kusta	91	93	68	70	32
5.	DBD	195	191	231	222	177
6.	Hipertensi	740.719	761.441	738.280	247.793	134.743
7.	Diabetes Melitus	96.773	113.970	113.051	113.059	65.583

*Sumber: Dinas Kesehatan, 2026. Keterangan: *) berdasarkan temuan kasus baru sampai dengan TW II Tahun 2026*

Berdasarkan data jumlah kasus baru penyakit menular dan tidak menular selama periode 2022–2026 (Triwulan II), kondisi kesehatan masyarakat Kota Surabaya

menunjukkan dinamika yang beragam. Pada kelompok penyakit menular, kasus COVID-19 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 77.739 kasus pada tahun 2022 menjadi hanya 45 kasus pada tahun 2025 dan 2 kasus pada Triwulan II Tahun 2026. Kasus kusta juga cenderung menurun dari 91 kasus pada tahun 2022 menjadi 70 kasus pada tahun 2025, sementara kasus demam berdarah dengue (DBD) relatif fluktuatif. Di sisi lain, kasus TBC dan HIV/AIDS masih memerlukan perhatian khusus karena jumlah kasus yang ditemukan relatif tinggi, yang menunjukkan semakin optimalnya upaya deteksi dan penemuan kasus di masyarakat. Pada kelompok penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes melitus masih menjadi penyakit dengan jumlah kasus tertinggi, meskipun secara umum menunjukkan kecenderungan terkendali melalui berbagai upaya promotif dan preventif. Perkembangan tersebut didukung oleh pelaksanaan skrining kesehatan, deteksi dini, pengobatan, dan pencegahan penyakit yang dilakukan secara berkelanjutan melalui jaringan 63 puskesmas serta penguatan layanan kesehatan primer melalui 153 Integrasi Layanan Primer (ILP) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Upaya tersebut berperan penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, memperkuat pengendalian faktor risiko, serta mendukung penanganan penyakit menular dan tidak menular secara lebih komprehensif.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan UHH, melakukan berbagai upaya, yang salah satunya melalui layanan cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.55
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani Kurang Dari 24 Jam
Tahun 2022–2026 (TW II)

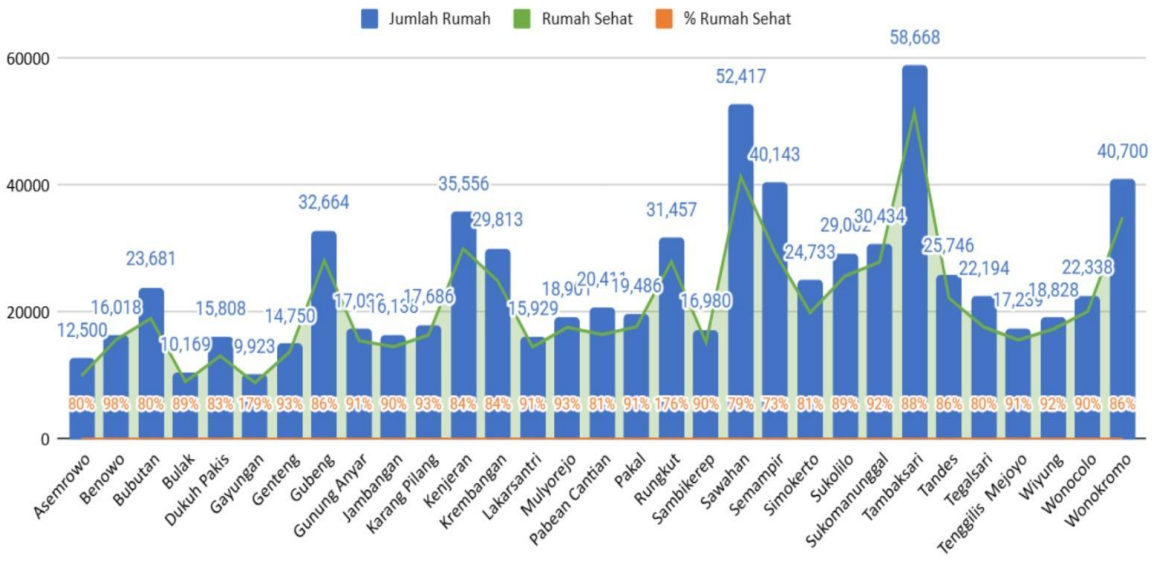
No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	154	153	153	153	153
2	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB	154	153	153	153	153
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2026

Kejadian Luar Biasa tahun 2021 adalah pandemi Covid-19 yang terjadi di Kota Surabaya. Sedangkan Kejadian Luar Biasa pada tahun 2023 sampai dengan 2026 adalah kasus Demam Berdarah, HIV serta penyakit menular lainnya yang terjadi di 153 kelurahan. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 sesuai Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2022-2026, target penanganan KLB telah ditingkatkan menjadi kurang dari 20 jam.

Kesehatan masyarakat juga diupayakan melalui terwujudnya rumah sehat. Kriteria rumah sehat yang digunakan meliputi tujuh kriteria, yaitu atap berplafon, dinding permanen (tembok/papan), jenis lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi cukup, pencahayaan alami cukup, dan tidak padat huni (lebih besar atau sama dengan 8 m^2/orang). Selain itu, sarana sanitasi seperti sarana air bersih, jamban, sarana pembuangan air limbah, sarana pembuangan sampah serta perilaku hidup sehat penghuni rumah menjadi pertimbangan dalam penilaian rumah sehat.

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Persentase rumah sehat dapat dilihat pada gambar di bawah dan diharapkan setiap tahun jumlah rumah sehat meningkat dan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.



Gambar II.24 Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Tahun 2025

Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2026

Pembentukan kelurahan siaga aktif dan pengembangan Pembinaan Terpadu (Bindu) juga menjadi upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan, secara mandiri. Pada tahun 2025 seluruh kelurahan memiliki Bindu. Persentase kelurahan siaga aktif kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.56
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2022–2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2025
1	Jumlah kelurahan siaga aktif	154	153	153	153	153
2	Jumlah kelurahan siaga	154	153	153	153	153
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Kelurahan siaga aktif mulai tahun 2022 hingga tahun 2026 konsisten terpenuhi di seluruh kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Hal ini didukung oleh adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Dinas Kesehatan dan Kecamatan/Kelurahan yang ada di Kota Surabaya, serta pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) oleh 63 Puskesmas di Kota Surabaya. Selain itu, integrasi layanan primer (ILP) telah diterapkan di seluruh Puskesmas di Kota Surabaya.

Tabel II.57
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan	42.019	41.893	37.295	36.941	17.627
2	Jumlah sasaran ibu nifas	42.014	41.885	37.187	36.818	34.049
3	Persentase (persen)	100,01	100,02	100,29	100,33	51,77

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026

Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas di Kota Surabaya selama periode 2022–2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian yang konsisten melebihi 100 persen, yaitu sebesar 100,01 persen pada tahun 2022, 100,02 persen pada tahun 2023, 100,29 persen pada tahun 2024, dan 100,33 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa jumlah ibu nifas yang memperoleh pelayanan kesehatan lebih besar dibandingkan sasaran yang ditetapkan, yang dapat dipengaruhi oleh pembaruan data sasaran, mobilitas penduduk, maupun adanya ibu nifas dari luar wilayah sasaran yang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan Kota Surabaya.

Sementara itu, hingga Triwulan II Tahun 2026, cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas mencapai 51,77 persen atau sebanyak 17.627 ibu nifas dari target sasaran sebanyak 34.049 ibu nifas. Capaian tersebut merupakan realisasi sementara hingga Triwulan II sehingga masih akan terus meningkat seiring berjalannya pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu nifas sepanjang tahun 2026. Keberhasilan ini didukung oleh pendampingan yang dilakukan oleh Kader Surabaya Hebat (KSH), pemantauan kesehatan ibu secara berkesinambungan sejak masa kehamilan, persalinan, hingga masa nifas, serta penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui kebijakan 1 Puskesmas 1 Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn). Sementara itu, pada

tahun 2026 hingga Triwulan II, cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas mencapai 26,80 persen atau sebanyak 9.128 ibu nifas yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan dari total sasaran 34.049 ibu nifas. Capaian tersebut masih relatif rendah karena pengukuran dilakukan pada awal tahun sehingga realisasi yang tercatat baru menggambarkan pelayanan sampai dengan Triwulan II dan diperkirakan akan terus meningkat seiring pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu nifas secara berkelanjutan hingga akhir tahun.

Tabel II.58
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar	41.931	37.349	40.590	30.426	17.411
2	Jumlah sasaran bayi	41.901	41.180	36.208	35.849	33.153
3	Cakupan kunjungan bayi (persen)	100,1	90,70	112,10	84,87	52,52

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026

Cakupan kunjungan bayi di Kota Surabaya selama periode 2022–2026 (Triwulan II) menunjukkan tren yang berfluktuasi, yaitu sebesar 100,10 persen pada tahun 2022, menurun menjadi 90,70 persen pada tahun 2023, meningkat menjadi 112,10 persen pada tahun 2024, kemudian kembali menurun menjadi 84,87 persen pada tahun 2025. Sementara itu, hingga Triwulan II tahun 2026 capaian kunjungan bayi tercatat sebesar 52,52 persen dengan jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 17.411 bayi dari total sasaran 33.153 bayi. Fluktuasi capaian tersebut dipengaruhi oleh adanya perbedaan antara jumlah sasaran yang ditetapkan berdasarkan proyeksi kelahiran dengan jumlah bayi baru lahir riil di wilayah kerja puskesmas. Pada beberapa puskesmas, jumlah bayi baru lahir yang ada di wilayahnya masih berada di bawah jumlah sasaran yang telah ditetapkan, namun seluruh bayi baru lahir sesuai kondisi riil yang ada tetap telah memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar. Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan akurasi data sasaran melalui pendataan yang lebih komprehensif dengan melibatkan kelurahan serta mengintegrasikan data pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. Selain itu, kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir juga terus diperkuat melalui peningkatan layanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), penguatan pelaksanaan Screening Hipotiroid Kongenital (SHK), serta optimalisasi program 1 Puskesmas 1 Dokter Spesialis Anak (Pediatri) guna memastikan setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel II.59
Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	123	118	109	105	51
2	Jumlah balita gizi buruk	123	118	109	105	51
3	Persentase (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2026

Berdasarkan data balita gizi buruk yang mendapat perawatan selama periode 2022–2026 (Triwulan II), seluruh balita yang teridentifikasi mengalami gizi buruk telah memperoleh perawatan dengan cakupan penanganan mencapai 100 persen setiap tahunnya. Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan menunjukkan tren menurun, dari 123 balita pada tahun 2022 menjadi 118 balita pada tahun 2023, 109 balita pada tahun 2024, dan 105 balita pada tahun 2025. Hingga Triwulan II Tahun 2026, tercatat sebanyak 51 balita gizi buruk dan seluruhnya telah memperoleh perawatan. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan seluruh balita yang teridentifikasi mengalami gizi buruk memperoleh penanganan sesuai standar, sehingga risiko komplikasi dan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dapat diminimalkan. Penanganan dilakukan melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi kepada keluarga, serta pendampingan oleh tenaga kesehatan dan kader di tingkat masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung perbaikan status gizi balita, pencegahan stunting, serta peningkatan kualitas kesehatan anak secara berkelanjutan.

Sejak tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pos Pelayanan Terpadu sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan dan pemenuhan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Transformasi ini memperluas fungsi Posyandu yang sebelumnya lebih berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan balita menjadi pusat pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat yang menjangkau seluruh kelompok usia dan siklus hidup masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara terpadu. Saat ini, Posyandu 6 SPM

tersebar di 1.360 rukun warga (RW). Penyelenggaraan Posyandu tersebut juga terintegrasi dengan Posyandu Keluarga (Posga) dan layanan Command Center 112.

Tabel II.60
Jumlah Posyandu Kota Surabaya Tahun 2022 – 2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah posyandu	2.731	2.682	2.676	2.676	2.145
2	Jumlah posyandu 6 SPM	N/A	N/A	N/A	N/A	1.360

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2026

Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar, utamanya pelayanan kesehatan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap. Pada tahun 2025, dari 63 Puskesmas induk, sebanyak 23 Puskesmas merupakan puskesmas rawat inap, dan terdapat puskesmas pembantu sebanyak 58 puskesmas. Jika ditinjau dari skala wilayah Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan semester II 2025 sejumlah 3.003.860 jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 47.680 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskesmas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kota Surabaya belum mencukupi, namun demikian pelayanan kesehatan tersebut juga didukung dengan adanya klinik sejumlah 579 unit yang terdiri dari 231 klinik utama dan 348 klinik pratama.

Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik tahun 2022 sampai tahun 2026 triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.61
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah puskesmas	63	63	63	63	63
2	Jumlah klinik	442	352	519	559	579
3	Jumlah pustu	59	58	58	58	58

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit di Kota Surabaya dapat dilihat di bawah ini.

Tabel II.62
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah Penduduk	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.003.860	3.003.860
2.	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi)	5	5	5	5	5
3.	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi	3	3	3	3	3
4.	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	7	7	7	7
5.	Rumah Sakit Daerah	2	2	3	3	3
6.	Rumah Sakit Swasta	43	43	48	48	51
Jumlah Rumah Sakit (Terakreditasi)		**60 (56)**	**60 (59)**	**66 (66)**	**66 (66)**	**69 (66)**
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk		**0,0209**	**0,0199**	**0,0219**	**0,0219**	**0,0229**

Sumber: Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada Tahun 2022, jumlah dokter sebanyak 8.158, dengan rasio 2,73 per 1000 penduduk. Kemudian pada tahun 2023, jumlah dokter sebanyak 6.970, dengan rasio 2,32 per 1000 penduduk. Serta tahun 2024 jumlah dokter sebanyak 7.446, dengan rasio 2,47 per 1.000 penduduk. Pada tahun 2025 jumlah dokter sebanyak 7.048, dengan rasio 2,34 per 1000 penduduk. Selain kecukupan kuantitas, kualitas SDM Kesehatan juga mutlak diperlukan dalam menunjang percepatan pembangunan kesehatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.63
Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penduduk	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.017.382	3.003.860
2	Jumlah dokter	8.113	8.158	6.970	7.446	7.048
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	2,73	2,73	2,32	2,47	2,34

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2026

Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah berupaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat diukur dengan Nilai Kepuasan Masyarakat dan Pencapaian SPM di 3 (tiga) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.64
Nilai Kepuasan Masyarakat dan Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

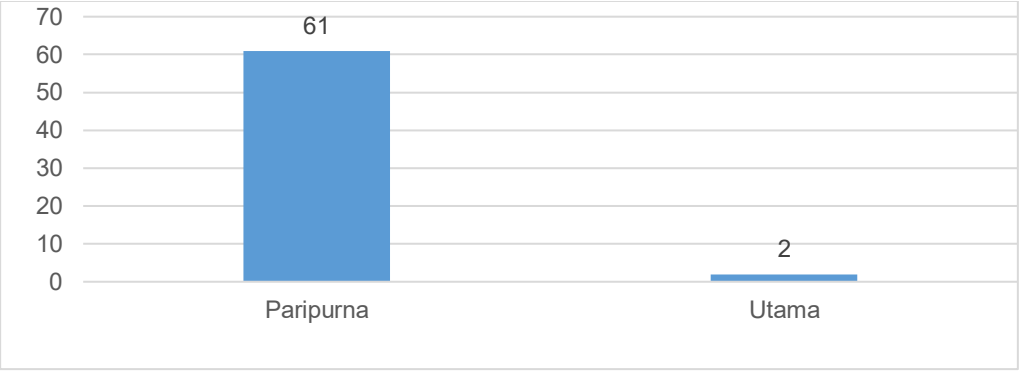
Instansi	2022	2023	2024	2025	2026
Nilai Kepuasan Masyarakat untuk RSUD Bhakti Dharma Husada	87,46	93,67	95,72	97,82	97,29

Instansi	2022	2023	2024	2025	2026
Nilai Kepuasan Masyarakat untuk RSUD dr. Mohamad Soewandhie	87,49	91,89	94,49	95,85	98,33
Nilai Kepuasan Masyarakat untuk RSUD Eka Candrarini	-	-	-	97,95	99,78
SPM RSUD Bhakti Dharma Husada	86,87	92,59	95,96	96,97	95,96
SPM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	84,85	91,57	86,87	88,89	88,89
SPM RSUD Eka Candrarini	-	-	-	-	96,97

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2026

Berdasarkan tabel pencapaian Nilai Kepuasan Masyarakat dan SPM pada RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD dr. Mohamad Soewandhie, kualitas pelayanan kesehatan secara umum masih tergolong baik, meskipun cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain proses renovasi gedung yang berdampak pada kelancaran pelayanan. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan stabilitas dan kualitas layanan ke depan.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga dilakukan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, puskesmas wajib terakreditasi. Pada tahun 2024, seluruh 63 puskesmas di Kota Surabaya telah terakreditasi. Sementara itu, RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada telah memperoleh akreditasi paripurna sejak tahun 2017 dan RSUD baru yakni RSUD Eka Candrarini juga telah mendapatkan akreditasi utama. Hasil akreditasi puskesmas Kota Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.25 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2025

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025 diolah

Selain peningkatan mutu layanan kesehatan, aksesibilitas pelayanan kesehatan juga terus diperkuat melalui pemberian jaminan kesehatan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan keluarga miskin. Berdasarkan data tahun 2022–2026 (Triwulan II), seluruh anggota keluarga miskin yang terdata telah memperoleh jaminan kesehatan dengan cakupan mencapai 100 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2022, berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 117 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022, istilah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam program jaminan kesehatan diperbarui menjadi anggota keluarga miskin (gakin). Sejalan dengan perubahan tersebut, jumlah anggota keluarga miskin yang tercakup dalam program jaminan kesehatan tercatat sebanyak 219.427 orang pada tahun 2022 dan seluruhnya telah mendapatkan jaminan kesehatan. Selanjutnya, jumlah anggota keluarga miskin yang memperoleh jaminan kesehatan tercatat sebanyak 193.786 orang pada tahun 2023, 70.243 orang pada tahun 2024, 63.466 orang pada tahun 2025, dan 61.982 orang pada Triwulan II Tahun 2026. Penurunan jumlah penerima manfaat tersebut sejalan dengan pemutakhiran dan verifikasi data keluarga miskin yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran program. Meskipun jumlah penerima mengalami perubahan, cakupan jaminan kesehatan tetap terjaga pada angka 100 persen, yang menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara menyeluruh. Capaian ini menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan yang berperan penting dalam mengurangi hambatan akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan, serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan. Perkembangan cakupan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.65
Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah anggota keluarga miskin	219.427	193.786	70.243	63.466	61.982
2	Jumlah anggota keluarga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	219.427	193.786	70.243	63.466	61.982
3	Persentase anggota keluarga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2026.

Selain menjamin akses layanan kesehatan bagi keluarga miskin, Pemerintah Kota Surabaya juga terus mendorong peningkatan cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kepesertaan aktif JKN mencakup berbagai segmen peserta, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), peserta mandiri, serta Bukan Pekerja (BP). Tingginya cakupan kepesertaan aktif JKN menunjukkan semakin luasnya perlindungan kesehatan yang diterima masyarakat dan semakin terbukanya akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Perkembangan cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.66
Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	97,99	101,84	99,30	100,17	83,26

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2026

Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Surabaya selama periode 2022–2026 (Triwulan II) menunjukkan capaian yang sangat baik dan secara umum telah memenuhi target Universal Health Coverage (UHC). Pada tahun 2022, cakupan kepesertaan aktif JKN mencapai 97,99%, meningkat menjadi 101,84% pada tahun 2023, kemudian sebesar 99,30% pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 100,17% pada tahun 2025. Sementara itu, hingga Triwulan II tahun 2026 capaian kepesertaan aktif JKN tercatat sebesar 83,26%.

Capaian pada tahun 2026 yang masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh kondisi kepesertaan yang bersifat dinamis, antara lain adanya peserta yang belum melakukan reaktivasi status kepesertaan, perubahan segmen kepesertaan, serta proses pemutakhiran data peserta JKN yang berlangsung secara berkala. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Surabaya terus berkomitmen meningkatkan cakupan kepesertaan aktif melalui penguatan koordinasi dengan penyelenggara JKN, pemutakhiran data kependudukan dan peserta secara berkelanjutan, serta perluasan akses jaminan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga mendorong masyarakat yang termasuk dalam kelompok desil 8 hingga desil 10 untuk berpartisipasi secara mandiri dalam pembiayaan jaminan kesehatan melalui pembayaran iuran BPJS Kesehatan, sebagai wujud gotong royong dalam mendukung keberlanjutan Program JKN. Tingginya cakupan kepesertaan aktif JKN menjadi faktor penting dalam mendukung kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penguatan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kota Surabaya.

Dalam rangka mewujudkan bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Pemerintah Kota Surabaya terus meningkatkan capaian kelurahan bebas BABS. Capaian tersebut meningkat dari 35% atau 54 kelurahan pada tahun 2017 menjadi 100% atau seluruh 153 kelurahan pada tahun 2023. Pada tahun 2025, Kota Surabaya meraih dua penghargaan tertinggi dari Kementerian Kesehatan RI, yaitu Kota Sehat Swasti Saba Wistara Paripurna dan STBM Paripurna Peringkat I Nasional. Capaian ini menjadikan

Surabaya sebagai kota pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memperoleh kedua predikat tersebut secara bersamaan pada Penganugerahan Kabupaten/Kota Sehat dan STBM Award 2025.

Selain sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan juga diarahkan untuk memastikan makanan olahan yang dijual di masyarakat memenuhi persyaratan kebersihan dan higiene sanitasi. Hasil pengawasan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) dan Tempat Pengolahan Pangan (TPP) selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.67
Tempat Pengolahan Makanan (TPM)/Tempat Pengolahan Pangan (TPP) Memenuhi Syarat Higienis Sanitasi Tahun 2021–2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah TPM	1.797	2.369	3.811	3.824	4.085
2	Jumlah TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	1.532	2.104	3.387	3.407	3.720
3	Persentase (%)	85,25	88,81	88,87	89,01	91,06

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2026

Adapun capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kota Surabaya Tahun 2023 hingga 2025 pada tabel di bawah ini, secara umum, mengalami peningkatan. Meski demikian, masih terdapat kendala terkait masih adanya balita yang tidak terlaporkan pelayanan kesehatannya dikarenakan domisili penduduk ber-KTP Surabaya tersebut yang berada di luar Kota Surabaya. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi dan himbauan bagi warga tersebut untuk menyesuaikan lokasi dokumen administrasi kependudukannya dengan domisili tetapnya saat ini.

Tabel II.68
Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2023–2025

No	Nama Indikator	2023			2024			2025		
		Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	43.881	44.057	100,40	37.187	37.506	100,86	36.818	37.039	100,60
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	41.885	41.893	100,02	37.187	37.295	100,29	36.818	36.941	100,33
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	39.891	41.804	104,80	36.208	37.952	104,82	35.849	36.658	102,26
4	Pelayanan kesehatan balita	164.508	164.023	99,71	152.252	152.609	100,23	148.716	149.578	100,58
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	330.258	398.238	120,58	396.102	398.643	100,64	391.296	392.443	100,29
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	2.041.119	2.155.512	105,60	1.923.364	2.161.327	112,37	1.926.441	1.959.584	101,72

No	Nama Indikator	2023			2024			2025		
		Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	314.690	326.681	103,81	378.637	378.637	100,00	395.999	399.039	100,77
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	744.436	761.441	102,28	727.432	738.280	101,49	246.179	247.793	100,66
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	104.362	113.970	109,21	101.979	113.051	110,86	111.477	113.059	101,42
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	5.580	5.766	103,33	5.552	5.849	105,35	5.570	5.974	107,25
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	63.879	89.139	139,15	78.502	108.826	138,63	78.234	112.012	143,18
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	52.741	66.001	125,14	49.485	63.442	128,20	49.962	67.264	134,63

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2026

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1 Pekerjaan Umum

Jalan merupakan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas masyarakat, konektivitas wilayah, dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kota. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya mengembangkan, membangun, dan memelihara jaringan jalan agar aksesibilitas kawasan semakin optimal serta terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional. Jalan dikategorikan dalam kondisi baik apabila masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum memerlukan perbaikan mendasar. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/250/436.1.2/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kota di Kota Surabaya, total panjang jalan kota tercatat 522,756 km dan relatif tetap pada periode 2022–2026.

Dari total panjang tersebut, jalan dalam kondisi baik meningkat dari 518,523 km pada tahun 2023 menjadi 518,731 km pada Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II. Persentasenya juga naik dari 99,19% menjadi 99,23%. Capaian ini menunjukkan konsistensi Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan melalui

pembangunan, pemeliharaan, serta penanganan titik *bottleneck* untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

Tabel II.69
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)	517,11	518,523	518,627	518,731	518,756
Panjang jalan (km)	522,756	522,756	522,756	522,756	522,756
Persentase jalan kondisi baik (%)	98,92	99,19	99,21	99,23	99,23

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, 2026

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, bidang pekerjaan umum juga berperan dalam penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan air minum layak di kawasan permukiman. Peningkatan layanan sanitasi dilakukan melalui pengelolaan air limbah domestik, baik dengan sistem terpusat maupun sistem setempat. Sementara itu, pemenuhan layanan air bersih dilakukan melalui kerja sama dengan Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.

Cakupan penduduk dengan akses air bersih terus meningkat, dari 98,27% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2023. Selain itu, Program Sanitasi dan Kebersihan Kota Surabaya juga didukung melalui pengembangan fasilitas umum, seperti toilet umum yang bersih dan mudah diakses, khususnya di area publik. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat dan nyaman, sekaligus mengurangi risiko penyakit akibat sanitasi yang buruk. Data cakupan penduduk dengan akses air bersih, sanitasi, dan air minum layak disajikan pada tabel berikut. Data cakupan penduduk dengan akses air bersih, sanitasi dan air minum layak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.70
Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak
Tahun 2022–2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
Cakupan Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak	99,62%	100,0%	100,0%	100,0%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak	99,85%	100,0%	100,0%	100,0%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Bersih	99,67%	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber: DSDABM dan Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, 2026

Adapun pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kota Surabaya Tahun 2025 sebesar 100% dengan rincian Jenis Layanan Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 100% dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik sebesar 100%. Secara umum, Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil mengupayakan pemenuhan kebutuhan dan mutu minimal layanan di bidang urusan Pekerjaan Umum. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian terhadap aspek mutu yaitu 1)

kuantitas kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dan pemenuhan kebutuhan jaringan perpipaan air minum, serta 2) adanya Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) juga telah terpenuhi 100%.

2.1.3.1.3.2 Penataan Ruang

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG, yang sebelumnya dikenal sebagai IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis PBG yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu PBG rumah tinggal, PBG non rumah tinggal serta PBG Reklame. Jumlah PBG yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.71
PBG yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2022 – 2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Rumah Tinggal	5.983	5.687	2.200	7.664	4.910
2	Non Rumah Tinggal	1.616	1.881	4.844	2.248	1.901
3	Reklame	105	53	32	75	66
Total		**7.704**	**7.621**	**7.076**	**9.987**	**6.877**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah PBG yang diterbitkan menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 7.704 PBG yang terdiri atas 5.983 PBG rumah tinggal, 1.616 PBG non rumah tinggal, dan 105 PBG reklame. Jumlah tersebut meningkat menjadi 7.621 PBG pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 7.076 PBG pada tahun 2024. Selanjutnya pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 9.987 PBG, didominasi oleh penerbitan PBG rumah tinggal sebanyak 7.664 izin. Hingga Triwulan II Tahun 2026 telah diterbitkan sebanyak 6.877 PBG yang terdiri atas 4.910 PBG rumah tinggal, 1.901 PBG non rumah tinggal, dan 66 PBG reklame.

Secara umum, tingginya jumlah penerbitan PBG rumah tinggal menunjukkan masih tingginya aktivitas pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Surabaya. Sementara itu, penerbitan PBG non rumah tinggal dan reklame mencerminkan dinamika perkembangan kegiatan ekonomi dan usaha di wilayah kota. Penerbitan PBG yang terus dilakukan secara terukur menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib, aman, dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Tabel II.72
Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai PBG Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah bangunan yang dikenakan sanksi administratif	150 persil	62 persil	92 persil	72 persil	42 persil

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2026

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfataan ruang kota dapat diindikasikan dengan jumlah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan. Penerbitan izin tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota. Jumlah izin bangunan yang diterbitkan di tahun 2026 sampai dengan Triwulan II sebanyak 5.490 bangunan dari 345.357 bangunan belum memiliki PBG. Sedangkan jumlah total bangunan yang sudah berizin PBG sebanyak 321.779, dari total 667.136 bangunan di Kota Surabaya, sehingga sekitar 48,23% bangunan di Kota Surabaya yang telah ber-PBG.

Hal ini menandakan masih rendahnya kesadaran penduduk kawasan permukiman non-siteplan dalam mengurus PBG, yang bisa disebabkan karena berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di mana retribusi PBG bangunan rumah tinggal naik 600% sehingga minat warga untuk mengurus PBG menurun. Selain itu, banyaknya bangunan dengan status kepemilikan tanah yang belum jelas/milik instansi lain juga menyebabkan ketidakjelasan pengurusan PBG dari bangunan tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi seperti:

1. Mendorong agar kelengkapan segera dipenuhi oleh pemohon;
2. Berkolaborasi dengan Kecamatan untuk mengadakan sosialisasi kepada warga terutama di permukiman non-siteplan terkait pengurusan PBG;
3. Melaksanakan pengawasan secara berkala pada koridor jalan arteri, kolektor dan lokal serta pengawasan penyelenggaran pembangunan pada koridor lingkungan;
4. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran denda administratif denda atas pelanggaran perda bangunan pada hari-hari tertentu;
5. Memberikan kemudahan dalam pembayaran retribusi PBG dengan cara mengangsur.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama akibat urbanisasi, berpotensi menimbulkan perluasan kawasan permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan perumahan dan permukiman umumnya berkaitan dengan rendahnya kualitas lingkungan, kelayakan bangunan rumah, serta keterbatasan sarana dan prasarana permukiman. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 188.45/433/436.1.2/2019, total luas penanganan kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman di Kota Surabaya sampai dengan tahun 2019 mencapai 145,89 Ha, sehingga Surabaya dinyatakan nol kumuh. Dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan program “Dandan Omah”, yaitu perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat. Sesuai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya, program ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian agar menjadi layak, sehat, dan aman melalui semangat kebersamaan, gotong royong, keswadayaan, dan kesetiakawanan sosial.

Pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni dilakukan dengan pendekatan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat atau *community-based development,* melalui pemberdayaan warga setempat. Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni terus meningkat setiap tahun, didukung oleh koordinasi yang baik dan pendampingan berkala dari Kelompok Teknis Perbaikan Rumah, kelurahan, dan perangkat daerah terkait.Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.73
Jumlah Rumah yang Terbangun dan Antriannya Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah antrian perbaikan rutilahu (per KK)	17.076	15.596	11.746	9.831	6.365
Jumlah antrian rumah susun (per KK)	12.990	12.999	11.455	10.485	10.231
Total antrian	**30.066**	**28.595**	**23.201**	**20.316**	**16.596**
Jumlah rumah tidak layak huni yang dilakukan pembangunan ulang menjadi layak huni (unit)	929	2.887	1.678	2.083	832
Jumlah unit rumah susun yang dibangun	10	7	9	10	1
Total pembangunan	**939**	**2.894**	**1.687**	**2.093**	**833**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, diolah 2026

Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal tempat tinggal yang layak dengan lingkungan yang sehat adalah melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pemenuhan kebutuhan perumahan yang kurang atau *backlog* di Kota Surabaya adalah sebanyak 10.231 unit, hal ini antara lain disebabkan karena terbatasnya ketersediaan lahan. Adapun upaya

yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam menanggulangi *backlog* adalah mengembangkan skema pembiayaan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung program rehabilitasi, peremajaan dan permukiman kembali serta pengadaan PSU perumahan dan kawasan permukiman; mengembangkan skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam menyediakan rumah susun milik atau sewa yang layak dan terjangkau, khususnya bagi keluarga miskin; dan mengaplikasikan prinsip subsidi silang untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan gedung Rusunawa melalui skema hunian campuran yang mana Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) baru tidak hanya dapat dihuni oleh masyarakat miskin saja, melainkan juga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah bahkan masyarakat berpenghasilan menengah.

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 85 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi. Pada tahun 2018, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 93 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi, hingga pada tahun 2023, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 109 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 24 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.74
Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa

No.	Nama Rusun	Alamat	Jumlah			Luas Lahan (m²)	Dibangun Tahun
			Blok	Lantai	Unit		
1	URIP SUMOHARJO	Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng	3	4	119	± 3.500	1983 (APBN)
2	DUPAK BANGUNREJO	Jalan Dupak Bangunsari RSS, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan	6	3	150	± 3.000	1992 (APBN)
3	SOMBO	Jalan Sombo, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto (Blok A, B, C, D, F, G, H, I & J)	8	4	474	± 41.044	1993 (APBN)
		Jalan Sombo, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto (Blok E & K)	2	5	180		2020 (APBD)
4	PENJARINGANSARI I	Jalan Penjaringansari Timur, Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap I)	3	4	225	± 32.350	1995 (APBN)
	PENJARINGANSARI II	Jalan Penjaringansari Timur, Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap II)	6	4	288		2003 (APBN)
	PENJARINGANSARI IV	Jalan Penjaringansari Timur, Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap IV)	2	5	64		2018 (APBD)

No.	Nama Rusun	Alamat	Jumlah			Luas Lahan (m²)	Dibangun Tahun
			Blok	Lantai	Unit		
5	PENJARINGANSARI III	Jalan Penjaringansari Timur, Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut (Tahap III)	2	5	99		2009 (APBN)
6	WARUGUNUNG	Jalan Mastrip, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang	10	5	566	± 29.845	1996 (APBD)
7	WONOREJO	Jalan Wonorejo, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut (Tahap I)	2	4	96	± 5.466	2003 (APBN)
		Jalan Wonorejo, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut (Tahap II)	4	4	192		2006 (APBN)
8	TANAH MERAH	Jalan Tanah Merah V, Kelurahan Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran (Tahap I)	4	5	192	± 28.810	2007 (APBN)
		Jalan Tanah Merah V, Kelurahan Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran (Tahap II)	4	5	196		2009 (APBN)
9	RANDU	Jalan Randu Agung, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran	6	5	288	± 44.290	2007 (APBN)
10	GRUDO	Jalan Grudo V/2, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari	2	5	99	± 5.000	2011 (APBN)
11	PESAPEN	Jalan Pesapen Selatan 27, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan	1	5	49	± 2.500	2011 (APBN)
12	JAMBANGAN I	Jalan Jambangan Baru Selatan, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan	1	5	49	± 2.977	2011 (APBN)
13	JAMBANGAN II	Jalan Jambangan Baru Selatan, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan	1	5	30		2017 (APBD)
14	SIWALANKERTO	Jalan Siwalankerto Selatan, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo (Tahap I)	2	5	99	± 8.000	2012 (APBN)
		Jalan Siwalankerto Selatan, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo (Tahap II)	2	5	64		2018 (APBD)
15	ROMOKALISARI	Jalan Romokalisari, Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap I)	4	5	198	± 25.000	2012 (APBN)
		Jalan Rusun Romokalisari, Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap II)	4	5	198		2013 (APBN)
		Jalan Rusun Romokalisari, Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo (Tahap III)	2	5	99		2014 (APBN)
16	BANDAREJO	Jalan Bandarejo Pasar, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo	2	5	99	± 4.320	2012 (APBN)
17	DUKUH MENANGGAL	Jalan Dukuh Menanggal XII, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan (Tahap I)	2	5	114	± 14.388	2016 (APBN)
		Jalan Dukuh Menanggal XII, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan (Tahap II)	2	4	60		2020 (APBN)

No.	Nama Rusun	Alamat	Jumlah			Luas Lahan (m²)	Dibangun Tahun
			Blok	Lantai	Unit		
18	KEPUTIH	Jalan Keputih Timur Tegal, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap I)	4	9	116	± 258.140	2016 (APBN)
		Jalan Keputih Timur Tegal, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap II)	2	5	70		2017 (APBN)
		Jalan Keputih Timur Tegal, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo (Tahap III)	2	4	58		2018 (APBN)
19	TAMBAK WEDI	Jalan Tambak Wedi, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran	2	5	70	-	2017 (APBN)
20	TAMBAK WEDI II	Jalan Tambak Wedi Tengah Timur I, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran	2	4	60	-	2020 (APBN)
21	INDRAPURA	Jalan Indrapura No. 135, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian	2	5	152	± 5.466	2019 (APBD)
22	BABAT JERAWAT	Jalan Pondok Benowo Indah, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal	2	5	100	± 4.129	2019 (APBD)
23	GUNUNGANYAR SAWAH	Jalan Gununganyar Sawah, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar	2	5	100	± 14.150	2019 (APBD)
		Jalan Gununganyar Sawah, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar (Blok B)	2	5	100		2021 (APBD)
24	PAKAL BENOWO	Jalan Kauman Baru, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal	2	5	96	± 29.900	2022 (APBD)
Jumlah			**109**		**5.209**		

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2026

Selain itu, dalam konteks pembangunan kota dan wilayah, PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) bukan sekadar pelengkap fisik atau pemanis kawasan. PSU adalah fondasi utama yang menentukan apakah sebuah permukiman layak huni, sehat, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut proses penyerahan aset PSU dari pengembang (*developer*) menjadi sangat penting agar Pemerintah Kota memiliki dasar hukum untuk memelihara atau memperbaiki fasilitas yang rusak di dalam permukiman tersebut. Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU secara historis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.75
Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU Tahun 2022-2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah permukiman yang sudah dilengkapi PSU (lokasi)	148	166	188	270	277
Jumlah permukiman keseluruhan (lokasi)	329	329	329	329	329
Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (%)	44,98	50,46	57,14	82,07	84,19

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2026

Pada tahun 2025, Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebesar 100% melalui pemenuhan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kota. Selain itu, keberhasilan ini juga ditunjukkan dengan cakupan penduduk yang yang memperoleh fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan sebesar 100%, serta cakupan pemenuhan penyediaan rumah layak huni juga tercapai 100%.

2.1.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan aspek penting dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan penyelenggaraan urusan ini diukur melalui Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas, yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, kesiapsiagaan perlindungan masyarakat, serta pemeliharaan stabilitas wilayah. Pada tahun 2024, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kota Surabaya mencapai 80,23 dan meningkat menjadi 80,30 pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas berjalan baik dan relatif stabil, didukung oleh sub urusan bencana, kebakaran, ketenteraman dan ketertiban umum, serta manajemen Satlinmas. Sesuai amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat perlindungan masyarakat melalui peningkatan kapasitas warga dalam menghadapi bencana, pemeliharaan keamanan lingkungan, penegakan peraturan daerah, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kesiapsiagaan kebencanaan, serta pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Tabel II.76
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kota Surabaya Tahun 2024–2025

Uraian	2024	2025
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	80,23	80,3
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	N/A	81,44*
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	N/A	80
Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	80,40	80,50
Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	80,05	80,10

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2026 diolah
**) Merupakan hasil rilis dari Kementerian Dalam Negeri*

Pada aspek kebencanaan, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana tahun 2025 mencapai 81,44 dan menjadi capaian tertinggi di antara komponen penyusun indeks. Capaian ini menunjukkan meningkatnya kapasitas daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Upaya yang dilakukan antara lain pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana, sosialisasi dan simulasi kebencanaan, identifikasi warga terdampak, KIE rawan bencana, optimalisasi informasi kebencanaan, respons cepat kedaruratan, aktivasi Command Center 112, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pada sub urusan kebakaran, indeks tahun 2025 mencapai 80,00. Capaian ini didukung oleh peningkatan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui penguatan sarana prasarana, armada, personel, serta inovasi percepatan waktu tanggap. Selain pemadaman, layanan juga mencakup penyelamatan dan evakuasi korban, pendataan dan verifikasi korban terdampak, inspeksi dan investigasi kejadian kebakaran, serta penerbitan surat keterangan korban kebakaran. Layanan *Call Center* 112 turut memperkuat efektivitas penanganan kedaruratan.

Pada aspek ketenteraman dan ketertiban umum, IPKKU meningkat dari 80,40 pada tahun 2024 menjadi 80,50 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Pemerintah Kota Surabaya melalui Satpol PP mengoptimalkan SPM bidang ketenteraman dan ketertiban umum melalui penegakan peraturan daerah, peningkatan sarana prasarana, penanganan unjuk rasa, patroli wilayah, pengamanan kegiatan masyarakat, serta operasi penertiban. Pada tahun 2025, pelayanan penegakan peraturan daerah telah diberikan kepada 1.296 orang.

Di samping itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang lebih profesional dan responsif, Pemerintah Kota Surabaya terus melaksanakan pengembangan kompetensi bagi aparatur Satpol PP dan anggota Satlinmas. Dari target peningkatan kapasitas SDM sejumlah 1.285 personil. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, sejumlah 826 anggota Satpol PP telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan 306 anggota Satlinmas telah memperoleh pembinaan dan pelatihan. Pengembangan kapasitas tersebut akan terus dilaksanakan secara bertahap hingga seluruh personel memperoleh peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas, khususnya dalam penegakan peraturan daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Sementara itu, Indeks Penyelenggaraan Manaemen Satlinmas meningkat dari 80,05 pada tahun 2024 menjadi 80,10 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan

perbaikan pengelolaan kelembagaan Satlinmas melalui pembinaan, pelatihan, peningkatan kompetensi, penguatan koordinasi kewilayahan, serta optimalisasi peran Satlinmas dalam pengamanan lingkungan, penanganan bencana, dan kegiatan kemasyarakatan.

Secara keseluruhan, capaian indikator Trantibumlinmas yang berada pada kisaran 80–81 poin menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Surabaya berjalan baik. Ke depan, Pemerintah Kota Surabaya perlu terus memperkuat integrasi layanan kebencanaan, keamanan, dan penyelamatan berbasis wilayah, meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat sarana prasarana, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Surabaya yang aman, tertib, tangguh bencana, dan berketahanan sosial.

2.1.3.1.5.1 Penegakan Perda

Salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ketenteraman masyarakat dilakukan melalui penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja Satpol PP difokuskan pada efektivitas pelaksanaan penegakan Perda, penanganan pelanggaran ketertiban umum, serta kontribusinya terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat dan terciptanya kondisi yang kondusif di wilayah Kota.

Tabel II.77
Lokasi Bebas Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2024	2024	2025	2026
Lokasi bebas pelanggaran Perda dan Perkada	92	98	104	110	110

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2026

Jumlah lokasi bebas pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah. Semakin banyak lokasi yang terbebas dari pelanggaran, semakin baik pula kualitas penegakan Perda dan Perkada serta kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Surabaya.

Berdasarkan Tabel II.77, jumlah lokasi bebas pelanggaran Perda dan Perkada menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2022–2025, yaitu dari 92 lokasi pada tahun 2022 menjadi 98 lokasi pada tahun 2023, 104 lokasi pada tahun 2024, dan mencapai 110 lokasi pada tahun 2025. Hingga Triwulan II Tahun 2026, capaian tersebut tetap dipertahankan pada 110 lokasi, yang menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga kondisi wilayah yang telah kondusif.

Peningkatan capaian tersebut didukung oleh penguatan upaya penegakan Perda dan Perkada melalui pelaksanaan patroli rutin, operasi penertiban secara terpadu, pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha, serta sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, Polri, perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan. Pendekatan preventif, persuasif, dan represif yang diterapkan secara proporsional telah mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sekaligus meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran.

Dipertahankannya jumlah lokasi bebas pelanggaran hingga Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa strategi penegakan tidak hanya berorientasi pada perluasan cakupan lokasi yang tertib, tetapi juga pada keberlanjutan hasil yang telah dicapai melalui pengawasan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan. Selanjutnya, penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran perlu terus dikembangkan untuk mendukung terciptanya ketenteraman, ketertiban umum, dan kepatuhan terhadap regulasi daerah secara berkelanjutan. Adapun data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.78
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	978	978	1.517	1.473	1.477
2	Jumlah penduduk	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.008.760	3.003.860
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	3,27	3,25	5,03	4,89	4,92

Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja, 2026

Berdasarkan data tahun 2022–2026 (TW II), jumlah personel Satpol PP Kota Surabaya pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, dari 1.517 orang menjadi 1.473 orang. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pegawai yang memasuki masa pensiun serta mutasi ke perangkat daerah lain. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk dari 5,03 pada tahun 2024 menjadi 4,89 pada tahun 2025. Sementara itu di tahun 2026 sampai dengan triwulan II ini, angka rasio tersebut dapat ditingkatkan menjadi 4,92 dengan penambahan 4 personil, serta update data jumlah penduduk sesuai rilis per 31 Desember 2025. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Surabaya tetap berupaya menjaga optimalisasi pelaksanaan tugas melalui penataan personel, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Tabel II.79
Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	10.736	13.102	21.805	19.735	9.981
2	Jumlah pelanggaran K3	13.261	16.420	26.817	20.409	9.981
3	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (%)	80,96	79,79	81,31	96,69	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2026

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2022, jumlah pelanggaran yang terjadi sebanyak 13.261 dan diselesaikan 80,96 persen. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024, jumlah pelanggaran kembali meningkat berturut-turut sebanyak 16.420 dan 26.817, yang dapat diselesaikan sebanyak 79,79 dan 81,31 persen. Kemudian di tahun 2025, jumlah pelanggaran dapat diselesaikan 96,69 persen dari 20.409 jumlah pelanggaran K3. Meningkatnya pelanggaran K3 di tahun 2022 dan 2023 disebabkan mulai normalnya aktivitas masyarakat dari dampak pandemi Covid-19, sehingga mulai banyak pelanggaran yang terjadi di tempat umum seperti berjualan asongan, kaki lima, maupun pengamen jalanan.

Selanjutnya pada tahun 2025, terjadi perbaikan kinerja yang cukup signifikan, dari 20.409 pelanggaran, berhasil diselesaikan sebanyak 96,70%. Sementara itu, pada tahun 2026 (TW II), seluruh pelanggaran yang tercatat sebanyak 9.981 kasus telah berhasil diselesaikan seluruhnya (100%). Hal ini menunjukkan efektivitas penanganan pelanggaran yang semakin optimal pada periode berjalan.

Selain itu, kinerja penegakan K3 juga tercermin melalui upaya pengamanan dan perlindungan kegiatan unjuk rasa. Mitigasi terhadap potensi tindakan anarkis dalam kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat terus dilakukan guna meminimalisir risiko kerusakan serta dampak yang merugikan masyarakat luas. Upaya ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Kota Surabaya.

Tabel II.80
Rasio Kejadian Unjuk Rasa Yang Mengarah Tindakan Anarkis
Tahun 2022–2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa	414	345	478	463	160
2	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa yang Mengarah Tindakan Anarkis	10	7	5	17	9

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2026

Dari tabel di atas, jumlah kejadian unjuk rasa di Kota Surabaya pada periode 2022–2026 sampai dengan triwulan II menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Peningkatan jumlah kejadian unjuk rasa serta kejadian yang mengarah anarkis pada tahun 2025 dipengaruhi oleh dinamika isu strategis di tingkat nasional yang berdampak hingga ke daerah, termasuk Kota Surabaya. Faktor tersebut diperkuat oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, tekanan sosial-ekonomi, serta percepatan mobilisasi melalui media sosial. Di sisi lain, optimalisasi sistem kewaspadaan dini turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah kejadian yang teridentifikasi dan tercatat.

Dalam periode tersebut, terdapat satu kejadian konflik yang tidak dapat dicegah sejak dini, yang dipicu oleh eskalasi aksi unjuk rasa di tingkat pusat/nasional yang berdampak hingga ke daerah. Kondisi ini memunculkan gelombang aksi yang berkembang cepat dan sulit diantisipasi secara optimal lintas wilayah. Dampaknya mengarah pada tindakan anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum, seperti pos polisi dan sarana pendukung lainnya.

Meskipun demikian, secara keseluruhan proporsi kejadian anarkis masih tergolong rendah, yaitu berada pada kisaran 1–4% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aksi unjuk rasa di Kota Surabaya berlangsung secara tertib dan dapat dikendalikan. Kondisi ini sekaligus mencerminkan efektivitas peran pemerintah daerah bersama aparat keamanan dalam melakukan pengamanan, pengawalan, serta pendekatan persuasif kepada massa aksi.

2.1.3.1.5.2 Penanganan Bencana Kebakaran

Pesatnya pembangunan dan meningkatnya arus urbanisasi berpotensi mendorong munculnya kawasan padat penduduk dengan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang belum memadai. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko bencana perkotaan, salah satunya kebakaran, yang umumnya dipicu oleh pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan, selain faktor penyebab bencana lainnya.

Tabel II.81
Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2022–2026 (TW II)

No	Penyebab	2022	2023	2024	2025	2026
1	Hubungan Listrik	219	95	71	70	30
2	Api Terbuka	212	247	91	60	23
3	Api Mekanis	0	0	0	1	0
4	Dalam Penyelidikan	158	429	205	140	65
5	Tidak Ada Keterangan	0	0	1	0	0
Total		**589**	**771**	**368**	**271**	**118**

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2026

Penyebab kebakaran di tahun 2025, dari total 271 kejadian, sebagian besarnya karena kelalaian manusia. Dari sumber api terbuka sebanyak 60 kejadian, sebagian besar disebabkan karena kelalaian dalam meninggalkan sisa pembakaran sampah atau terdapat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Sedangkan dari sumber listrik sebanyak 70 kejadian, sebagian besarnya karena konsleting listrik. Sampai dengan triwulan II tahun 2026, telah terjadi 118 kejadian kebakaran, dengan 65 kejadian di antaranya masih berstatus dalam penyelidikan.

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal, termasuk operasional *Command Center* 112 yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan segala kejadian kedaruratan sehingga pelayanan secara keseluruhan menjadi lebih baik. Sampai dengan triwulan II tahun 2026, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100% kejadian memiliki waktu tanggap di bawah waktu tanggap maksimal yang ditargetkan 15 menit. Sepanjang triwulan II tahun 2026, hanya 2 kejadian kebakaran dengan waktu tanggap 7 menit dan sisanya memiliki waktu tanggap yang lebih cepat. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.82
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Kota Surabaya
Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap maksimal 15 menit	589	771	368	271	118
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	589	771	368	271	118
3	Persentase penanganan waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, 2026

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya sampai dengan triwulan II tahun 2026 rata-rata di atas 95%, dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 22 unit (5 rayon dan 17 pos pemadam pembantu) didesain untuk dapat mencakup jumlah penduduk Kota Surabaya sesuai dengan waktu respon yang telah ditentukan.

Tabel II.83
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya
Tahun 2022–2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	86	86	86	96	96
2	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	21	21	21	22	22
3	Jumlah Penduduk	2.987.863	3.009.286	3.009.286	3.008.760	3.003.860
4	Cakupan Pelayanan WMK	95,6%	96%	96%	96%	96%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2026

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

1. Cakupan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) belum mencapai 100% karena masih terdapat wilayah yang tidak termasuk dalam cakupan langsung pos pelayanan, seperti di area mangrove Surabaya Timur dan lahan tambak di Surabaya Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang memiliki tingkat risiko kebakaran rendah, tidak ada permukiman, dan kepadatan aktivitas yang relatif terbatas. Meskipun demikian, apabila terjadi kejadian kebakaran pada wilayah tersebut, penanganan tetap dapat dilakukan oleh pos pemadam terdekat dengan *response time* kurang dari 15 menit sehingga secara fungsional cakupan layanan tetap terjaga dan mampu memenuhi standar waktu tanggap.
2. Ketersediaan tandon/sumur kebakaran juga memengaruhi cakupan pelayanan WMK. Sampai pada tahun 2025 tercatat 412 tandon dan 8 jaringan hidran yang dapat digunakan tersebar di Kota Surabaya. Dalam analisis cakupan pelayanan

tandon/sumur, digunakan radius 1.000 meter dari setiap titik. Maka, setiap tandon/sumur diharapkan mampu menjangkau area di sekitarnya dalam jarak maksimal satu kilometer. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana ketersediaan tandon/sumur mampu melayani kebutuhan pemadaman kebakaran secara optimal serta mengidentifikasi wilayah yang masih memerlukan penambahan tandon.

2.1.3.1.6 Sosial

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Bentuk penanganan yang diterima PPKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PPKS ke daerah asal, pemberian permakanan, pembinaan mental, pemberian beasiswa, dan pelayanan di 3 (tiga) UPTD Dinas Sosial, yaitu 1) UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PPKS hasil penertiban; 2) UPTD Kampung Anak negeri yang ada di Wonorejo (untuk anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar) dan di Kalijudan (untuk anak dengan kedisabilitasan dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi); 3) UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, serta Liponsos Babat Jerawat yang melayani dan menangani eks penderita kusta.

Tabel II.84
Penanganan PPKS Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah PPKS yang ada	64.933	54.916	24.583	26.865	27.536
2	Jumlah PPKS yang ditangani	34.180	25.562	11.861	26.443	26.385
3	Persentase PPKS yang ditangani (%)	52,63	46,55	48,25	98,43	95,82%

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2026

Penanganan Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Surabaya menunjukkan peningkatan efektivitas selama periode 2022–2025. Jumlah PPKS yang tercatat menurun dari 64.933 orang pada tahun 2022 menjadi 54.916 orang pada tahun 2023, kemudian 24.583 orang pada tahun 2024 dan 26.865 orang pada tahun 2025. Di sisi lain, persentase PPKS yang berhasil ditangani meningkat signifikan dari 52,63% pada tahun 2022 menjadi 98,43% pada tahun 2025. Hingga Triwulan II Tahun

2026, tercatat 27.536 PPKS, dengan 26.385 orang di antaranya telah memperoleh penanganan atau mencapai 95,82%.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PPKS melalui berbagai bentuk intervensi, seperti pelayanan di UPTD, pemenuhan kebutuhan dasar, pembinaan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan ke daerah asal bagi PPKS yang memenuhi kriteria. Meskipun demikian, masih terdapat kelompok PPKS yang memerlukan penanganan berkelanjutan, seperti lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa, sehingga diperlukan pelayanan sosial yang berkesinambungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka.Selain PPKS dari penduduk Kota Surabaya sebagaimana tabel di atas, di Kota Surabaya juga terdapat PPKS dari penduduk non Surabaya. Mayoritas PPKS ini merupakan pendatang dari luar Kota Surabaya. Tingginya mobilitas penduduk di sekitar Kota Surabaya menjadi salah satu penyebab banyaknya pendatang yang rentan menjadi PPKS, serta kemudian dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Surabaya terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait untuk melaksanakan reunifikasi atau pemulangan PPKS ke daerah asal. Jumlah PPKS dari penduduk non Surabaya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.85
PPKS Penduduk non Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah PPKS non Surabaya	1.409	419	516	1.475	563

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2026

Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra strategis dalam penanganan Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PSKS berperan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan sosial, mulai dari pendataan, pendampingan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, hingga reintegrasi sosial bagi PPKS. Selama periode 2022–2025, jumlah PSKS aktif di Kota Surabaya menunjukkan kecenderungan meningkat, dari 1.692 pada tahun 2022 menjadi 1.806 pada tahun 2024, sebelum sedikit menurun menjadi 1.723 pada tahun 2025. Hingga Triwulan II Tahun 2026, tercatat 830 PSKS aktif, yang merupakan data sementara dan masih berpotensi bertambah seiring dengan proses pendataan dan pembaruan data pada tahun berjalan. Adapun data terkait jumlah PSKS dapat dilihat dari berkurangnya PPKS. Jumlah PSKS aktif bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.86
PSKS Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Total PSKS	1.692	1.751	1.806	1.723	830
PSKS Aktif	1.692	1.751	1.806	1.723	830

Sumber: Dinas Sosial, 2026

Kota Surabaya telah mencapai keberhasilan signifikan dalam bidang sosial pada tahun 2025, dengan semua target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang urusan sosial mencapai 100%. Pencapaian ini mencakup berbagai program rehabilitasi sosial dasar yang diberikan kepada kelompok-kelompok rentan di luar panti sosial. Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial berhasil menjangkau seluruh penyandang disabilitas terlantar, memberikan dukungan dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial juga mencapai target 100%, memastikan bahwa semua anak terlantar menerima perawatan, pendidikan, dan dukungan sosial yang memadai. Upaya rehabilitasi bagi lanjut usia terlantar di luar panti sosial juga tidak ketinggalan, dengan pencapaian 100% yang menunjukkan bahwa setiap lanjut usia terlantar mendapatkan perhatian dan pelayanan yang layak. Program Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, juga telah berhasil sepenuhnya, memastikan bahwa mereka menerima bantuan sosial yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi hidup mereka. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan layanan sosial yang inklusif dan merata, serta memastikan bahwa semua warganya, terutama yang berada dalam kondisi paling rentan, mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib nonpelayanan dasar dilakukan terhadap indikator kinerja yang menggambarkan capaian pelaksanaan masing-masing urusan. Analisis ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan urusan wajib nonpelayanan dasar sebagai bagian dari gambaran umum kondisi daerah.

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas seiring dengan peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja. Relatif rendahnya jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 disebabkan adanya pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022

jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 1.643.314. Sementara itu, pada tahun 2023, rasio angkatan kerja berada pada angka sekitar 0,69 dengan komposisi jumlah angkatan kerja sebanyak 1.569.714 jiwa. Pada tahun 2024, rasio angkatan kerja berada pada angka sekitar 0,70 dengan komposisi jumlah angkatan kerja sebanyak 1.624.822 jiwa. Sedangkan di tahun 2025, rasio angkatan kerja kembali meningkat meski relatif sedikit, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 1.641.429 penduduk. Secara rinci, rasio angkatan kerja 15 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.87
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah angkatan kerja	1.572.888	1.643.314	1.569.714	1.624.822	1.641.429
2	Jumlah penduduk usia kerja	2.337.229	2.348.058	2.330.830	2.305.008	2.325.271
3	Rasio angkatan kerja	0,67	0,69	0,67	0,70	0,71

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2026

2.1.3.2.1.1 Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Permasalahan ketenagakerjaan masih menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja, terutama terkait hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Sengketa pekerja dengan pengusaha umumnya dipicu oleh pengaduan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan, ketidaksesuaian upah, serta penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak kerja. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, mediasi hubungan industrial, kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan, serta perlindungan hak-hak pekerja. Secara rinci, rasio jumlah sengketa pekerja-pengusaha terhadap jumlah perusahaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.88
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2022 – 2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha	120	176	182	219	101
2	Jumlah Sengketa Selesai	120	116	118	151	62
3	Jumlah Perusahaan	10.592	10.592	10.592	10.592	11.025
4	Rasio sengketa	1,13	1,66	1,72	2,07	0,91

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2026

Sengketa hubungan industrial di Kota Surabaya selama periode 2022 hingga Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas usaha dan hubungan ketenagakerjaan. Jumlah sengketa meningkat dari 120 kasus pada tahun 2022 menjadi 176 kasus pada tahun 2023, 182 kasus pada tahun 2024, dan mencapai 219 kasus pada tahun 2025. Peningkatan tersebut diikuti dengan

bertambahnya jumlah sengketa yang berhasil diselesaikan, yaitu dari 120 kasus pada tahun 2022 menjadi 151 kasus pada tahun 2025. Hingga Triwulan II Tahun 2026 tercatat 101 kasus sengketa, dengan 62 kasus telah berhasil diselesaikan.

Sejalan dengan peningkatan jumlah sengketa, rasio sengketa terhadap jumlah perusahaan juga mengalami kenaikan dari 1,13 pada tahun 2022 menjadi 2,07 pada tahun 2025. Meskipun demikian, rasio tersebut masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Kota Surabaya yang mencapai lebih dari 10 ribu perusahaan, sehingga menunjukkan bahwa sebagian besar hubungan industrial di Kota Surabaya tetap berjalan secara kondusif. Peningkatan jumlah sengketa juga dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran pekerja dan pengusaha dalam memanfaatkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara formal. Hingga Triwulan II Tahun 2026, rasio sengketa tercatat sebesar 0,91 pada 11.025 perusahaan. Namun, capaian tersebut belum dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya karena masih merupakan data hingga pertengahan tahun. Oleh karena itu, penguatan upaya pencegahan perselisihan, mediasi hubungan industrial, serta pembinaan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan perlu terus dilakukan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

2.1.3.2.1.2 Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi

Dalam data ketenagakerjaan, kontribusi terbesar berasal dari penduduk dengan pendidikan terakhir SMA maupun SMK, sehingga diperlukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja dengan upaya yang dilakukan adalah melalui Larasdikdudi (Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri), yaitu forum yang bertujuan meningkatkan kesesuaian antara kurikulum pendidikan (SMK/SMA) dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam penyiapan tenaga kerja yang siap pakai, pendampingan, FGD, serta pelatihan seperti *Training Needs Analysis* guna menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.89
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2024 – 2025

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	2024	2025
1	Tidak/belum pernah sekolah	11.134	15.880
2	Tidak/belum tamat SD		
3	Sekolah Dasar		
4	SMP	13.785	18.532
5	SMA	44.107	30.078
6	SMK		

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	2024	2025
7	Diploma I/II/III/Akademi	10.741	14.942
8	Universitas		

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2026

Sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Pemerintah Kota Surabaya memfasilitasi pencari kerja melalui pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, pemagangan, bimbingan *softskill*, bursa kerja, dan berbagai program peningkatan kapasitas lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Tabel II.90
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya
Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026*
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	7.291	7.760	7.853	7.880	2.503
2	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	7.291	7.760	7.853	8.664	2.503

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2026

Relatif rendahnya jumlah pencari kerja yang difasilitasi maupun ditempatkan disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang tahun 2020 dan juga di tahun 2021 yang berdampak pada turunnya permintaan tenaga kerja dari perusahaan. Namun pada tahun 2022 hingga 2025, kegiatan fasilitasi pencari kerja terus ditingkatkan pelaksanaannya oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, salah satunya dengan cara pendaftaran pada ASSIK. Dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya, pencari kerja diharapkan mampu dengan cepat menempati lowongan kerja yang ada, maupun membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal guna mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

Salah satu hal yang masih menjadi fokus Pemerintah Kota Surabaya adalah pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Data peserta yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai pasar kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.91
Penempatan Kerja Peserta Peningkatan Kompetensi Sesuai Pasar Kerja Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai pasar kerja	732	1.117	752	979	132

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2026

Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja di Kota Surabaya menunjukkan fluktuasi selama periode 2022–2026 (Triwulan II), yaitu sebanyak 732 orang pada tahun 2022, meningkat menjadi 1.117 orang pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 752 orang pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat menjadi 979 orang pada tahun 2025. Sementara itu, hingga Triwulan II tahun 2026 telah tercatat sebanyak 132 peserta yang memperoleh peningkatan kompetensi. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi serta fasilitasi sertifikasi kompetensi, baik bagi peserta pasca pelatihan maupun masyarakat umum yang membutuhkan pengakuan kompetensi sesuai dengan standar dan kebutuhan pasar kerja.

2.1.3.2.1.3 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan. Penerapan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, sekaligus memberikan jaminan keselamatan bagi pekerja. Persentase perusahaan yang menerapkan K3 menunjukkan peningkatan hingga tahun 2021. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran perusahaan terhadap pentingnya perlindungan tenaga kerja dan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Rekapitulasi persentase perusahaan yang menerapkan K3 disajikan pada tabel berikut. Data persentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.92
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2022–2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026*
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	8.573	7.560	3.032	8.945	11.022
2	Jumlah Perusahaan	10.592	10.592	10.592	10.592	11.025
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3	80,94	71,37	28,63	84,45	99,97

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2026, *) data TW II*

Pada tahun 2022 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 8.573 perusahaan atau 80,94% dari total perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 menurun menjadi 7.560 perusahaan atau 71,37% dari total perusahaan yang terdaftar selanjutnya pada tahun 2024 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 menjadi 3.032 perusahaan atau 28,63% dari total perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2026 sampai dengan TW II, sebanyak 99,97% dari total 11.025 perusahaan telah menerapkan K3.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak, Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak melalui perluasan akses perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan penguatan pemenuhan hak anak.

Keberhasilan upaya tersebut tercermin dari perkembangan indikator gender yang semakin baik, salah satunya Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Kota Surabaya meningkat dari 93,90 pada tahun 2021 menjadi 94,68 pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa kesenjangan kualitas hidup antara perempuan dan laki-laki semakin kecil, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.93
Indeks Ketimpangan, Pembangunan dan Pemberdayaan Gender
Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,206	0,230	0,128	0,171	0,151
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,90	94,21	94,36	94,53	94,68
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	82,82	83,20	85,29	76,40	77,92

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan tren perbaikan dengan menurun dari 0,171 pada tahun 2024 menjadi 0,151 pada tahun 2025, yang mengindikasikan berkurangnya ketimpangan gender dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Adapun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat dari 76,40 pada tahun 2024 menjadi 77,92 pada tahun 2025, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. Dari dimensi pembentuknya, capaian IKG dan IDG masih dipengaruhi oleh belum optimalnya representasi perempuan pada jabatan politik dan pengambilan keputusan strategis.

Tabel II.94
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pekerja Perempuan	584.865	632.797	629.533	663.493	677.951
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya	14.903	14.828	15.660	15.478	20.480
3	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota (%)	2,55	2,34	2,49	2,33	3,02

Sumber: BPS, BKPSDM, dan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2026

Perkembangan indikator gender tersebut didukung oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Jumlah perempuan yang bekerja di Kota Surabaya meningkat dari 584.865 orang pada tahun 2021 menjadi 677.951 orang pada tahun 2025.

Selain itu, jumlah perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya juga meningkat dari 14.903 orang pada tahun 2021 menjadi 20.480 orang pada tahun 2025. Kondisi tersebut mendorong peningkatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dari 2,55 persen menjadi 3,02 persen pada periode yang sama. Data tersebut menunjukkan semakin terbukanya akses perempuan terhadap kesempatan kerja dan ruang partisipasi dalam pembangunan daerah.

Tabel II.95
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah angkatan kerja perempuan	584.465	663.404	669.988	698.308	712.698
2.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	312.338	632.797	629.533	663.493	677.915
3.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53,43	95,38	93,96	95,01	95,12

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2026

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Surabaya menunjukkan perkembangan positif pascapandemi Covid-19. Pada tahun 2021, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 53,43%, kemudian meningkat signifikan menjadi 95,38% pada tahun 2022 dan tetap berada pada kisaran tinggi hingga mencapai 95,12% pada tahun 2025 atau setara dengan 677.915 perempuan. Kondisi ini menunjukkan semakin baiknya akses perempuan terhadap aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja, sekaligus meningkatnya kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah.

Capaian tersebut juga tercermin dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Kota Surabaya memperoleh nilai Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) sebesar 910,74 pada tahun 2023, yang menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), penguatan kelembagaan PUG, serta peningkatan kapasitas perangkat daerah. Sementara itu, proses verifikasi lapangan PPE tahun 2024 dan 2025 masih berlangsung. Selain itu, Kota Surabaya memperoleh skor Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) sebesar 356,44 pada tahun 2023. Namun, pada periode berikutnya capaian DRPLA tidak dirilis dalam bentuk nilai numerik tunggal oleh Kementerian PPPA karena penilaiannya merupakan akumulasi integratif dari berbagai indeks makro nasional, seperti IPG, IDG, APE, dan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pada aspek pemenuhan hak anak, Kota Surabaya secara konsisten mempertahankan capaian sangat baik melalui nilai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yaitu 890,50 pada tahun 2023, meningkat menjadi 895,17 pada tahun 2024, dan mencapai 892,50 pada tahun 2025. Capaian ini menjadikan Surabaya tetap

mempertahankan predikat Kategori Utama untuk ketujuh kalinya. Keberhasilan tersebut didukung oleh pengembangan Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Forum Anak Surabaya, ruang bermain ramah anak, perlindungan anak berbasis masyarakat, serta optimalisasi layanan UPTD PPA dalam pengaduan, pendampingan hukum, psikologis, dan rehabilitasi korban kekerasan.

Secara keseluruhan, peningkatan IPG dan IDG, penurunan IKG, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta tingginya capaian PPE, DRPLA, dan KLA menunjukkan bahwa pembangunan responsif gender dan pemenuhan hak anak di Kota Surabaya telah berjalan baik. Ke depan, penguatan keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi dan politik, perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta penciptaan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak perlu terus dilakukan untuk mendukung pembangunan yang setara dan berkelanjutan.

2.1.3.2.2.1 Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tabel II.96
KDRT Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Rumah Tangga	974.298	1.011.183	1.004.044	996.161	993.909
2	Jumlah KDRT	75	103	137	168	98
3	Rasio KDRT	1:12.991	1:9.817	1:7.329	1:5.929	1:10.142

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2026

Berdasarkan Tabel II.95, jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan selama periode 2022–2025. Jumlah kasus yang tercatat meningkat dari 75 kasus pada tahun 2022 menjadi 103 kasus pada tahun 2023, kemudian bertambah menjadi 137 kasus pada tahun 2024 dan mencapai 168 kasus pada tahun 2025. Hingga Triwulan II Tahun 2026, jumlah kasus yang tercatat sebanyak 98 kasus. Namun demikian, data tahun 2026 masih bersifat parsial sampai dengan Triwulan II sehingga belum dapat dibandingkan secara langsung dengan data tahunan sebelumnya.

Peningkatan jumlah kasus KDRT yang tercatat tidak serta-merta menunjukkan meningkatnya kejadian kekerasan di masyarakat. Fenomena KDRT sering diibaratkan sebagai fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), yaitu kondisi yang mana jumlah kasus yang terlaporkan belum sepenuhnya mencerminkan jumlah kejadian yang

sebenarnya. Meningkatnya jumlah laporan dapat dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan, meningkatnya keberanian korban dalam mengakses layanan pengaduan, serta semakin baiknya sistem pencatatan dan penanganan kasus.

Salah satu faktor yang turut mendukung peningkatan pelaporan adalah berdirinya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada tahun 2023. Keberadaan UPTD PPA memperkuat layanan penerimaan pengaduan, pendampingan korban, serta koordinasi dengan berbagai jejaring layanan. Selain itu, keberadaan konselor dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Balai RW turut memperluas akses masyarakat terhadap layanan konsultasi, edukasi, dan pengaduan hingga tingkat RW. Dengan semakin mudahnya akses terhadap layanan perlindungan, masyarakat diharapkan semakin berani melaporkan tindak kekerasan yang dialami maupun diketahui. Oleh karena itu, peningkatan jumlah laporan dapat dipandang sebagai salah satu indikator meningkatnya aksesibilitas layanan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan perempuan dan anak, di samping tetap menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk terus memperkuat upaya pencegahan KDRT.

Tabel II.97
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	192	264	342	400	228
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	192	264	342	400	228
3	Penyelesaian pengaduan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2026

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercermin melalui indikator penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana disajikan pada Tabel II.96. Jenis pengaduan yang ditangani meliputi kasus KDRT, non-KDRT, serta tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*). Selama periode 2022–2025, jumlah pengaduan yang diterima menunjukkan tren meningkat, yaitu dari 192 kasus pada tahun 2022 menjadi 264 kasus pada tahun 2023, meningkat menjadi 342 kasus pada tahun 2024, dan mencapai 400 kasus pada tahun 2025. Hingga Triwulan II Tahun 2026 telah tercatat sebanyak 228 pengaduan. Seluruh pengaduan yang diterima pada setiap tahun berhasil diselesaikan, sehingga tingkat penyelesaian pengaduan mencapai 100 persen secara konsisten selama periode 2022 hingga Triwulan II Tahun 2026.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan perlindungan yang komprehensif kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Penanganan kasus dilakukan melalui layanan yang terintegrasi, meliputi konseling, pelayanan medis melalui rujukan ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit, bantuan dan konsultasi hukum, serta pendampingan selama proses hukum di Kepolisian, Pengadilan Agama (PA), maupun Pengadilan Negeri (PN). Selain itu, korban juga memperoleh layanan psikososial berupa asesmen dan identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach* atau penjangkauan klien, sosialisasi, reintegrasi sosial, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan di *shelter* (rumah aman). Pemerintah Kota Surabaya juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai jejaring dan pemangku kepentingan dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak sebagai upaya meningkatkan efektivitas perlindungan sekaligus menekan terjadinya kasus kekerasan di masa mendatang.

Sementara itu, dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak, Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2020 terdapat 31 kecamatan sudah responsif gender dan 119 Kelurahan Ramah Anak. Sampai dengan tahun 2025, seluruh 31 kecamatan sudah Responsif Gender dan 153 Kelurahan Ramah Anak. Selain itu, dalam upaya mendukung pengarusutamaan gender, Pemerintah Kota Surabaya turut aktif dalam upaya pemberdayaan perempuan. Hal tersebut tercermin dalam beberapa program pelatihan atau pun pemberdayaan ekonomi yang ditujukan bagi perempuan.

Tabel II.98
Perempuan Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Kota Surabaya
Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah perempuan mengikuti pemberdayaan Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya	137	192	150	553	666
Jumlah perempuan mengikuti pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan UPPKA	14	68	80	89	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2026

Pemberdayaan Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain Sekolah Perempuan (SEKOPER) bagi perempuan dari keluarga miskin di 153 kelurahan yang mencakup pelatihan *beauty class*, *cooking class*, serta materi pengarusutamaan gender, lalu pelatihan *soft skill* bagi anggota Perkumpulan Ojol Perempuan Surabaya (POPSA) dan Wanita Tangguh Surabaya (WATASA), serta peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menyasar Organisasi Perempuan di Kota Surabaya.

Jumlah perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 137 orang lalu menjadi 192 orang pada tahun 2023, kemudian 150 orang pada tahun 2024 dan meningkat cukup signifikan menjadi 553 orang pada tahun 2025. Hingga Triwulan II Tahun 2026, jumlah perempuan yang telah mengikuti kegiatan pemberdayaan juga mengalami kenaikan mencapai 666 orang. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan program baru, yaitu Sekolah Perempuan (SEKOPER) serta pelatihan *softskill* bagi anggota POPSA dan WATASA yang baru mulai dilaksanakan pada tahun 2025.

Sementara itu, jumlah perempuan yang mengikuti pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan UPPKA juga menunjukkan peningkatan selama periode 2022–2025, yaitu dari 14 orang pada tahun 2022 menjadi 68 orang pada tahun 2023, 80 orang pada tahun 2024, dan 89 orang pada tahun 2025. Adapun hingga Triwulan II Tahun 2026, belum terdapat peserta yang tercatat karena pelaksanaan pelatihan UPPKA dijadwalkan pada bulan September. Oleh karena itu, capaian tahun 2026 masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui seiring dengan pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun.

2.1.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang ditunjukkan melalui kemampuan suatu daerah dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh penduduk. Sebagai kota metropolitan dengan keterbatasan lahan pertanian, Kota Surabaya sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain sehingga kelancaran distribusi dan stabilitas pasokan menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan pangan. Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut adalah ketersediaan pangan utama (beras) per kapita, yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah ketersediaan pangan utama dengan jumlah penduduk. Indikator ini memberikan gambaran mengenai kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan. Perkembangan ketersediaan pangan utama Kota Surabaya selama periode 2022–2026 (Triwulan II) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.99
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	629.700.570	348.867.348	607.346.940	55.365.543	56.520.330
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.008.760	3.003.860
Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	210,75	115,93	201,24	208,31	212,10

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dispendukcapil, 2026

Ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar 210,75 kg/kapita/th, sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 115,93 kg/kapita/th. Hal tersebut dikarenakan produksi beras dari daerah penghasil pangan menurun, dan ketersediaan pangan utama Kota Surabaya. Pada tahun 2024, terjadi pemulihan yang cukup signifikan dengan meningkatnya ketersediaan pangan per kapita menjadi 201,24 kg/kapita/tahun. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025 dengan ketersediaan pangan per kapita meningkat menjadi 208,31 kg/kapita/tahun. Sementara itu, pada tahun 2026 sampai dengan triwulan II, ketersediaan pangan utama tercatat sebesar 212,10 kg/kapita/tahun. Meskipun lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2025, angka ini masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil dibandingkan fluktuasi ekstrem yang terjadi pada tahun 2023.

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Tabel II.100
Pola Pangan Harapan Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Pola Pangan Harapan	94,48	94,16	94,34	95,53	96,31

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2026

Berdasarkan tabel di atas, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat. Pada tahun 2021, skor PPH sebesar 94,48 dan sedikit menurun menjadi 94,16 pada tahun 2022. Penurunan ini dipengaruhi oleh pergeseran pola konsumsi pangan masyarakat dari sumber energi karbohidrat, seperti padi-padian dan umbi-umbian, menuju sumber protein. Selanjutnya, skor PPH meningkat menjadi 94,34 pada tahun 2023, 95,53 pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 96,31 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin baik. Capaian tersebut

didukung oleh program edukasi dan kegiatan penerapan menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang mendorong masyarakat mengonsumsi pangan secara lebih sehat dan beragam. Selain ketahanan pangan, Pemerintah Kota Surabaya juga memberi perhatian pada keamanan pangan segar yang dikonsumsi masyarakat. Setiap tahun dilakukan survei dan pengambilan sampel pangan segar untuk memastikan pangan yang beredar aman dikonsumsi. Hasil pengambilan sampel pangan segar Kota Surabaya tahun 2022 hingga 2026 triwulan II disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.101
Keamanan Pangan Segar Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah sampel pangan segar	1.500	1.668	1.500	776	482
Jumlah sampel tidak memenuhi syarat keamanan	60	12	0	5	1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar 210,75 kg/kapita/tahun, sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 115,93 kg/kapita/tahun. Hal tersebut dikarenakan produksi beras dari daerah penghasil pangan menurun, sehingga memengaruhi ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya. Pada tahun 2024, terjadi pemulihan yang cukup signifikan dengan meningkatnya ketersediaan pangan per kapita menjadi 201,24 kg/kapita/tahun. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025 dengan ketersediaan pangan per kapita meningkat menjadi 208,31 kg/kapita/tahun. Sementara itu, hingga Triwulan II Tahun 2026, ketersediaan pangan utama tercatat sebesar 212,10 kg/kapita/tahun. Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2025, angka tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya masih relatif terjaga sehingga mampu mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Permasalahan utama urusan pangan di Kota Surabaya antara lain perlunya perluasan kerja sama penyediaan pangan dengan daerah penghasil untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, mengingat Surabaya sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Selain itu, optimalisasi urban farming juga perlu terus didorong melalui pemanfaatan teknologi, lahan aset pemerintah yang belum produktif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan generasi muda. Permasalahan lain adalah masih ditemukannya pangan segar dan makanan olahan yang belum memenuhi standar keamanan pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya perlu terus memperkuat edukasi kepada masyarakat, pengawasan pangan yang beredar, serta pemeriksaan sampel secara acak dan rutin untuk memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Seiring perkembangan pembangunan Kota Surabaya, kebutuhan penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung masyarakat semakin meningkat. Pembangunan tersebut mencakup sarana kegiatan masyarakat, jaringan jalan, drainase, serta fasilitas publik lainnya yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun, ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan masih terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah Kota melakukan pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan agar sarana, prasarana, dan fasilitas publik dapat tersedia secara terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki aset tidak bergerak berupa tanah yang tersebar di berbagai wilayah dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya. Upaya pengamanan aset terus dilakukan melalui inventarisasi, sertifikasi, serta pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan nama, dan patok batas.

Berdasarkan data Tahun 2022–2026 (Triwulan II), jumlah aset Pemerintah Kota Surabaya yang telah bersertifikat menunjukkan tren meningkat, dari 1.889 aset pada tahun 2022 menjadi 2.255 aset pada tahun 2023, 2.257 aset pada tahun 2024, 2.613 aset pada tahun 2025, dan mencapai 2.657 aset hingga Triwulan II Tahun 2026. Persentase aset yang telah bersertifikat juga meningkat dari 46,55 persen pada tahun 2022 menjadi 50,16 persen pada tahun 2023, 50,21 persen pada tahun 2024, dan 58,13 persen pada tahun 2025. Sementara itu, hingga Triwulan II Tahun 2026 persentase aset yang telah bersertifikat tercatat sebesar 56,21 persen. Penurunan persentase tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah total aset Pemerintah Kota Surabaya dari 4.495 aset pada tahun 2025 menjadi 4.727 aset pada Triwulan II Tahun 2026, sehingga meskipun jumlah aset yang telah bersertifikat meningkat, proporsi terhadap keseluruhan aset menjadi lebih rendah.

Tabel II.102
Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat
Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah aset pemerintah yang telah bersertifikat*	1.889	2.255	2.257	2.613	2.657
Total aset pemerintah*	4.058	4.495	4.495	4.495	4.727
Persentase aset pemerintah yang telah bersertifikat (%)	46,55	50,16	50,21	58,13	56,21

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026
**Total aset adalah aset tanah dan bangunan selain jalan dan saluran*

Luas tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum terdiri atas pengadaan untuk infrastruktur dan noninfrastruktur. Pengadaan tanah untuk

infrastruktur meliputi jalan, jembatan, dan saluran, sedangkan pengadaan noninfrastruktur antara lain dimanfaatkan untuk makam, lapangan olahraga, taman, serta berbagai fasilitas publik lainnya. Ke depan, Pemerintah Kota Surabaya akan terus mempercepat proses sertifikasi aset sebagai upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, serta meminimalkan potensi sengketa aset.

Sementara itu, luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang bersertifikat sampai dengan tahun 2022, luas lahan aset yang bersertifikat mencapai 18.905.062 m^2. Kemudian pada tahun 2023, luas lahan aset yang bersertifikat bertambah menjadi seluas 20.247.009 m^2 dan sampai dengan akhir tahun 2024 bertambah lagi menjadi seluas 20.913.708 m^2 lahan aset yang bersertifikat. Pada tahun 2025, akumulasi luas lahan aset tanah dan bangunan selain jalan dan saluran yang telah bersertifikat seluas 22.097.017 m^2, sementara pada tahun 2026 sampai dengan triwulan II, lahan aset bersertifikat milik Kota Surabaya adalah seluas 22.770.304 m^2. Data luas lahan aset Pemerintah Kota Surabaya tahun 2022 hingga tahun 2026 triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.103
Luas Lahan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Bersertifikat
Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Akumulasi Luas Lahan* Aset Bersertifikat (m^2)	18.905.062	20.247.009	20.913.708	22.097.017	22.770.304
Luas Lahan Aset (m^2)*	38.165.116	38.005.231	38.055.231	38.055.231	39.001.660
Persentase Luas Lahan Aset Bersertifikat (%)	49,53	53,20	54,95	58,06	58,38

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026
**Total aset adalah aset tanah dan bangunan selain jalan dan saluran*

Sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat ke depannya, terdapat peningkatan aktivitas pergerakan orang atau barang di Kota Surabaya. Aktivitas pergerakan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Untuk mendorong pengembangan perekonomian dan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kota Surabaya, diperlukan pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur bagi kepentingan umum seperti pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat, Jalan Lingkar Luar Timur, Kebun Raya Mangrove di Wonorejo dan Gunung Anyar, sarana prasarana pengelolaan sampah serta Ruang Terbuka hijau.

Untuk mewujudkan pembangunan sarana prasarana bagi kepentingan umum tersebut, perlu dilakukan pengadaan tanah. Hingga akhir tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya telah membebaskan lahan seluas 12,3 Ha untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan lahan seluas 11,8 Ha untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur.

Untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat dan Jalan Lingkar Luar Timur tidak terlepas dari kontribusi pengembang yang terkena rencana pembangunan tersebut. Adapun untuk RTH Kebun Raya Mangrove Wonorejo luas yang telah dibebaskan sebesar 7,1 Ha, Kebun Raya Mangrove Medokan Ayu luas yang telah dibebaskan sebesar 16 Ha dan untuk Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar sebesar 13,08 Ha. Lahan yang telah dibebaskan hingga akhir tahun 2020 untuk sarana kebersihan TPA Benowo seluas 22,6 Ha. Adapun lahan yang telah dibebaskan untuk lokasi makam Waru Gunung seluas 3,31 Ha.

Luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dibagi menjadi dua, yaitu untuk infrastruktur dan untuk non infrastruktur. Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur di antaranya pemanfaatan tanah untuk jalan, jembatan, dan saluran. Selanjutnya, luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur di antaranya pemanfaatan tanah untuk makam, lapangan olahraga, taman, dan lain-lain. Berikut adalah tabel luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur dan non infrastruktur.

Tabel II.104
Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur dan Non Infrastruktur Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur (Ha)	1,92	1,74	1,015	0,6408	0,1854
Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur (Ha)	0,78	0,82	1,263	1,6703	1,224

Sumber: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2026

Dari tabel di atas, realisasi luasan pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk infrastruktur cenderung menurun karena menyesuaikan skala prioritas pembangunan kota. Sedangkan realisasi luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk non infrastruktur cenderung fluktuatif, yang disebabkan adanya lokasi rencana yang masih dalam proses verifikasi dan validasi status tanah sehingga berpengaruh terhadap luasan yang dibebaskan.

Tabel II.105
Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021–2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	30	30	30	30	30
2.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	16	30	31	30	12
3.	Persentase Kasus yang Diselesaikan (%)	53,33	100	103,33	100	40

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026.

Kasus tanah yang tercatat merupakan sengketa terkait kepemilikan aset tanah Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani melalui proses peradilan. Kasus yang belum selesai pada tahun berjalan akan tetap dilanjutkan penanganannya pada tahun berikutnya. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah kasus tanah yang terdaftar cenderung stabil dalam periode 2022–2026, yaitu sebanyak 30 kasus setiap tahun. Sementara itu, jumlah kasus yang berhasil diselesaikan menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama pada tahun 2023 dan 2024 dengan masing-masing sebanyak 30 kasus dan 31 kasus, sehingga persentase penyelesaian mencapai 100 persen dan 103,33 persen. Persentase penyelesaian yang melebihi 100 persen pada tahun 2024 menunjukkan adanya penyelesaian kasus yang merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Hingga triwulan II tahun 2026, telah diselesaikan 12 kasus atau sebesar 30 persen dari total kasus yang terdaftar, yang mencerminkan upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengamankan dan mempertahankan aset daerah melalui penyelesaian sengketa tanah.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

2.1.3.2.5.1 Persampahan

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya sejak tahun 2021 hingga saat ini cenderung meningkat seiring bertambahnya penduduk dan aktivitasnya selepas pandemi Covid-19, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.106
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA
Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Volume Produksi Sampah (ton/hari)	1.792,72	1.800,04	1.810,43	1.810,81	1.802,31
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (ton/hari)	1.601	1.536,76	1.540,97	1.623,95	1.743,32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026

Volume produksi sampah di Kota Surabaya menunjukkan tren yang relatif meningkat selama periode 2022–2025, dari 1.792,72 ton per hari pada tahun 2022 menjadi 1.810,81 ton per hari pada tahun 2025, sedangkan pada Triwulan II tahun 2026 tercatat sebesar 1.802,31 ton per hari. Sementara itu, jumlah sampah yang ditangani di TPA mengalami fluktuasi, yaitu 1.601 ton per hari pada tahun 2022, menurun menjadi 1.536,76 ton per hari pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 1.540,97 ton per hari pada tahun 2024, 1.623,95 ton per hari pada tahun 2025, dan mencapai 1.743,32 ton per hari pada Triwulan II tahun 2026. Peningkatan volume produksi sampah

mengindikasikan bahwa upaya pengurangan sampah dari sumber masih perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat pengelolaan persampahan melalui peningkatan kapasitas dan pelayanan Tempat Penampungan Sementara (TPS), optimalisasi fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah sebelum diangkut ke TPA, serta pengembangan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai bagian dari strategi pengurangan timbulan sampah dan peningkatan efektivitas pengelolaan persampahan. Data terkait jumlah TPS tahun 2021 hingga Tahun 2026 Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.107
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2022 – 2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2025	2026
1	Jumlah Penduduk	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.003.860	3.003.860	3.003.860
2	Jumlah TPS (unit)	190	190	190	190	190	192
3	Jumlah TPS 3R	9	10	12	12	12	13

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026.

Jumlah TPS sebanyak 192 unit telah merata di setiap kelurahan di Kota Surabaya. Meski demikian, Pemerintah Kota Surabaya terus mengoptimalkan pembangunan maupun peningkatan kualitas operasional TPS 3R secara bertahap sebagai bentuk optimalisasi reduksi volume sampah yang masuk ke TPA.

Perlunya pengetahuan tentang peduli lingkungan oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan pada peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan. Kondisi lingkungan yang kurang baik akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan kebersihan jika dilihat pada tabel di bawah naik setiap tahunnya. Namun tetap diperlukan adanya peningkatan kerjasama dalam pengembangan pemasaran daur ulang maupun peningkatan gerakan terhadap pengelolaan sampah plastik.

Tabel II.108
Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan kebersihan	909	1.113	818	1.645	1.670	1.212

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026

2.1.3.2.5.2 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Selain pengelolaan persampahan, pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi aspek penting dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Keberadaan RTH, khususnya RTH publik, berperan dalam menjaga keseimbangan fungsi ekologis, sosial, dan estetika kota, sekaligus meningkatkan kualitas

lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran udara, peningkatan resapan air, mitigasi perubahan iklim, serta penyediaan ruang interaksi bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan dan pengelolaan RTH perlu dilakukan secara proporsional seiring dengan perkembangan pembangunan kawasan perkotaan.

Selama periode 2018–2025, luasan RTH publik Kota Surabaya menunjukkan tren yang relatif stabil dan terus meningkat berdasarkan metode penghitungan yang berlaku pada saat itu. Pada tahun 2025, luasan RTH publik tercatat sebesar 22,02 persen dari luas wilayah Kota Surabaya. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pembangunan kota yang berkelanjutan.

Namun demikian, mulai Tahun 2026 dilakukan penyesuaian metode penghitungan luasan RTH sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025–2045. Perubahan tersebut menyebabkan luasan RTH tidak lagi dihitung hanya berdasarkan luas fisik kawasan, tetapi menggunakan pendekatan tipologi ruang terbuka hijau, bobot fungsi ekologis, dan Faktor Harkat Bioekologis Indonesia (FHBI) sehingga menghasilkan nilai luasan RTH yang lebih mencerminkan kualitas fungsi ekologis masing-masing kawasan. Berdasarkan metode penghitungan terbaru tersebut, luas Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya pada Tahun 2026 mencapai 6.853 hektare atau 20,32 persen dari luas wilayah kota. Komposisi tersebut terdiri atas Tipologi A yang meliputi rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman RT, pemakaman, dan jalur hijau; Tipologi B yang meliputi kawasan perlindungan setempat dan ekosistem mangrove; serta Tipologi C berupa badan air sungai. Oleh karena adanya perubahan metode penghitungan tersebut, capaian persentase RTH Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel II.109
Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Surabaya

Zona/Tipologi		Kode	Luas (Ha)	Bobot	Luas*Bobot	FHBI	Jumlah
TIPOLOGI A (**19%**)							
A.1	Rimba Kota	RTH-1	1578	100%	1578	3	4.734
A.2	Taman Kota	RTH-2	406	100%	406	2,5	1.014
A.3	Taman Kecamatan	RTH-3	13	100%	13	2	26
A.4	Taman Kelurahan	RTH-4	42	100%	42	1,8	76
A.5	Taman RW	RTH-5	22	100%	22	1,6	35
A.6	Taman RT	RTH-6	1	100%	1	1,5	2
A.7	Pemakaman	RTH-7	388	100%	388	1,3	504

Zona/Tipologi		Kode	Luas (Ha)	Bobot	Luas*Bobot	FHBI	Jumlah
A.8	Jalur Hijau	RTH-8	119	100%	119	1,5	179
TIPOLOGI B (**1%**)							
B.2	Perlindungan Setempat	PD	225	50%	113	1	113
B.7	Ekosistem Mangrove	EM	306	20%	61	1	61
TIPOLOGI C (**0,32%**)							
C.3.c	Sungai (Badan Air)		543	20%	109	1	109
Luas RTH Kota Surabaya							6.853
Persentase RTH Kota Surabaya							**20,32%**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2026

Meskipun terjadi perubahan metode perhitungan, Pemerintah Kota Surabaya tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas, fungsi, dan pemerataan Ruang Terbuka Hijau di seluruh wilayah kota. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan dan pengelolaan RTH yang memperhatikan aspek ekologis, sosial, dan tata ruang, optimalisasi fungsi kawasan hijau sebagai paru-paru kota, serta penguatan kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

2.1.3.2.5.3 Kepatuhan Usaha Terhadap Aspek Lingkungan

Keberadaan industri dan tempat usaha yang terus berkembang di Kota Surabaya berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan, seperti pencemaran air, saluran drainase, udara, maupun kebisingan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan terhadap potensi pencemaran lingkungan menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Kota Surabaya.

Berdasarkan data pengaduan masyarakat, jumlah permasalahan lingkungan hidup yang tercatat bersifat fluktuatif. Pada tahun 2022 terdapat 44 kasus, meningkat menjadi 51 kasus pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 41 kasus pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 37 kasus pada tahun 2025. Sementara itu, hingga Triwulan II Tahun 2026 telah tercatat sebanyak 27 permasalahan lingkungan hidup. Jumlah tersebut belum dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahunan pada periode sebelumnya karena data tahun 2026 masih merupakan realisasi hingga Triwulan II dan berpotensi mengalami penambahan hingga akhir tahun.

Tabel II.110
Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah permasalahan lingkungan	44	51	41	37	27
2	Jumlah permasalahan lingkungan yang ditangani	44	51	41	37	27
3	Persentase permasalahan lingkungan yang ditangani (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026

Meskipun jumlah permasalahan lingkungan mengalami fluktuasi, seluruh permasalahan yang tercatat berhasil ditangani dengan tingkat penyelesaian mencapai 100 persen pada setiap periode. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat melalui pengawasan lingkungan, penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta koordinasi dengan instansi kewilayahan, perangkat daerah, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Dampak pencemaran lingkungan dapat menyebabkan penurunan kualitas ekosistem, pencemaran badan air, udara, dan tanah yang sebagian besar dipengaruhi oleh aktivitas industri maupun kegiatan domestik. Oleh karena itu, selain melakukan penanganan terhadap permasalahan yang muncul, Pemerintah Kota Surabaya juga terus memperkuat upaya pencegahan melalui pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup. Peningkatan ketaatan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap aspek lingkungan diharapkan dapat meminimalkan potensi pencemaran sekaligus meningkatkan efektivitas sistem pengawasan lingkungan. Perkembangan tingkat ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan di Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.111
Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Aspek Lingkungan Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah kegiatan usaha yang diawasi	254	241	254	254	240
Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi aspek administrasi dan teknis	129	122	120	168	147

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2026

2.1.3.2.5.4 Konservasi Energi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, konservasi energi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan energi. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konservasi energi merupakan upaya penghematan penggunaan energi, sedangkan konversi energi merupakan perubahan bentuk energi menjadi bentuk energi lain yang lebih bermanfaat. Pemerintah Kota Surabaya telah memulai upaya konversi dan konservasi energi melalui penerapan solar cell, pemasangan PJU LED, pemanfaatan gas

metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo, penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan, serta pembangunan kincir angin di beberapa lokasi.

Penerapan energi alternatif terbarukan juga telah dilakukan pada gedung Pemerintah Kota Surabaya, antara lain Terminal Intermoda Joyoboyo dan area Balai Kota, serta pada beberapa gedung swasta seperti Intiland Tower, Esa Sampoerna Center, dan Graha Wonokoyo. Meskipun demikian, penerapannya masih perlu dioptimalkan, baik di sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat secara lebih luas.

Tabel II.112
Penerapan Upaya Konservasi Energi Tahun 2022–2026 (TW II)

Penerapan Konservasi Energi	Satuan	Jumlah (titik) s.d. Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah PJU LED	Unit	96.252	105.846	105.846	117.344	123.366
Solar cell di gedung pemerintah	Lokasi	46	46	46	46	46
Warning Light (APIL) *Solar Cell*	Unit	21	21	21	21	21
Traffic Light (APIL) *Solar Cell*	Unit	77	77	77	77	77

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2026. *) data TW I*

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk melanjutkan upaya konversi dan konservasi energi dengan mendorong pihak swasta atau masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi. Untuk pengusahaan konservasi energi oleh kegiatan/usaha swasta sudah mulai didorong mulai tahun 2017, dengan 11 kegiatan/usaha yang diaudit di tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2023, setiap tahunnya menambahkan 11 kegiatan/usaha yang telah diaudit penerapan konservasi energinya. Tentunya hal ini masih jauh dari pengawasan yang menyeluruh dikarenakan jumlah kegiatan/usaha yang masih sedikit. Sehingga diharapkan ke depannya dapat meningkat.

Namun, dalam hal pemanfaatan energi terbarukan bagi sektor swasta masih belum mempunyai payung hukum. Karena itu, perlu diciptakan instrumen pendukung di antaranya berupa peraturan daerah dalam rangka mendorong percepatan dimulainya upaya pemanfaatan energi terbarukan ini oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden

Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.113
Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK
Tahun 2022–2026 (TW II)

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2022	2.251.947	2.204.168
2023	2.280.865	2.033.593
2024	2.251.964	2.241.808
2025	2.265.938	2.254.305
2026	2.248.979	2.243.895

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2026.

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

Tabel II.114
Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah kelahiran (berdasarkan data SIAK)	40.012	90.577	60.149	58.193	14.351
2	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	40.012	90.577	60.149	58.193	14.351
3	Jumlah kematian (berdasarkan data SIAK)	30.960	27.503	29.396	33.155	9.134
4	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	30.960	27.503	29.396	33.155	9.134

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026.

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh penduduk lahir berdasarkan data SIAK telah memperoleh akta kelahiran. Anak yang lahir di rumah sakit, puskesmas, dan beberapa bidan di Kota Surabaya yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan otomatis mendapatkan akta kelahiran. Sementara itu, anak yang lahir di luar Kota Surabaya atau di luar fasilitas kesehatan yang bekerja sama, pengurusan akta kelahirannya dilakukan secara mandiri. Pemerintah Kota Surabaya terus memberikan kemudahan layanan administrasi kependudukan melalui pelayanan publik di Siola, mobil layanan keliling, serta pelayanan di RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan ruang publik. Kemudahan serupa juga diberikan untuk pengurusan akta kematian melalui kantor kelurahan atau kecamatan.

Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk dilihat dari kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga Triwulan II tahun 2026, kepemilikan KIA mencapai 1.329.719 jiwa dari 1.439.327 anak wajib KIA. Sementara itu, kepemilikan IKD tercatat sebanyak 1.388.436 jiwa dari 4.493.128 jiwa yang telah

melakukan perekaman KTP elektronik. Dengan demikian, cakupan pelayanan pendaftaran penduduk mencapai 45,82%.

Adapun cakupan pelayanan pencatatan sipil pada Triwulan II tahun 2026 mencapai mencapai 94,49%, yang dihitung dari penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian terhadap jumlah pelaporan peristiwa terkait. Rinciannya meliputi 1.530.959 akta kelahiran, 591.648 akta kematian, 2.399.394 akta perkawinan, dan 141.095 akta perceraian yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan pembentukan keluarga berkualitas diwujudkan melalui pengendalian angka kelahiran serta pendampingan keluarga secara berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat ketahanan keluarga, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

2.1.3.2.7.1 Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/ melahirkan. Akseptor KB di Kota Surabaya seluruhnya telah menggunakan alat kontrasepsi modern.

Secara umum, rasio akseptor KB di Kota Surabaya tahun 2021 hingga 2025 mengalami fluktuasi, dengan rasio tertinggi dicapai pada tahun 2022 (93,41%). Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan cara perhitungan data PUS yang semula di tahun 2021 berupa sensus menjadi survei oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2022 dan seterusnya. Selain itu, naik dan turunnya rasio akseptor KB dipengaruhi oleh keadaan penduduk pada masa tersebut. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat juga memengaruhi keputusan pasangan untuk ber-KB. Sedangkan tahun 2025, peningkatan rasio akseptor KB tidak lepas dari keberhasilan peningkatan kesadaran ber-KB masyarakat melalui edukasi di berbagai media (*podcast*, media sosial dan cetak) termasuk *door-to-door* (Gropyokan KB), pelayanan KB (Bhakti Sosial KB), serta peran aktif kader. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.115
Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2021–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026*
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	325.405	370.601	496.405	497.522	497.522

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026*
2	Jumlah Akseptor KB/ mCPR	303.968	307.610	417.081	424.634	424.634
3	Rasio Akseptor KB (persen)	93,41	83,00	84,02	85,35	85,35

*Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Timur, 2026. *)Data bersumber dari DP3APPKB*

Sedangkan angka *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) untuk tahun 2020, 2021 belum dapat disajikan pada *web* resmi BPS Kota Surabaya. Namun, sejak tahun 2022, angka ASFR mulai dirilis oleh BKKBN. Angka ASFR secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.116
Angka ASFR Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Angka ASFR	18,9	8,7	10	5,8	11,9

Sumber: BKKBN, 2026

Age Specific Fertility Rate (ASFR) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup per 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu dalam satu tahun. Dalam dokumen ini, ASFR yang digunakan adalah pada kelompok umur 15–19 tahun, sehingga menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kelahiran pada remaja. Semakin rendah nilai ASFR, semakin baik kondisi pengendalian fertilitas pada kelompok usia tersebut.

Berdasarkan data BKKBN, angka ASFR Kota Surabaya selama periode 2021–2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. ASFR menurun dari 18,9 pada tahun 2021 menjadi 8,7 pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 10,0 pada tahun 2023, turun kembali menjadi 5,8 pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 11,9 pada tahun 2025. Meskipun terjadi kenaikan pada tahun 2025, secara umum angka ASFR masih lebih rendah dibandingkan tahun 2021, yang menunjukkan bahwa tingkat kelahiran pada kelompok usia remaja relatif masih terkendali. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan perilaku reproduksi remaja, tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, serta dinamika perkawinan usia muda. Capaian ini juga didukung oleh berbagai upaya Pemerintah Kota Surabaya bersama BKKBN melalui edukasi kesehatan reproduksi, Program Generasi Berencana (GenRe), pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Remaja (BKR), serta sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Ke depan, penguatan program-program tersebut perlu terus dilakukan untuk menjaga agar angka kelahiran pada kelompok usia remaja tetap rendah dan mendukung terwujudnya pembangunan kependudukan yang berkualitas.

2.1.3.2.7.2 Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan

Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.117
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	325.405	370.601	496.405	497.522	497.967
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	306.896	307.610	417.081	422.942	423.387
3	Cakupan Peserta KB Aktif	94,31	83,03	84,02	84,83	85,02

*Sumber: BKKBN Provinsi Jawa TImur, 2026 . *)Data capaian 2026 bersumber dari DP3APPKB.*

Dalam upaya pengendalian penduduk, salah satu indikator yang digunakan adalah cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif pada Pasangan Usia Subur (PUS), yaitu pasangan suami istri dengan istri berusia 15–49 tahun. Indikator ini menunjukkan persentase PUS yang aktif menggunakan alat atau metode kontrasepsi sebagai bagian dari upaya pengaturan kelahiran dan perencanaan keluarga. Berdasarkan Tabel II.117, cakupan peserta KB aktif di Kota Surabaya selama periode 2022 hingga Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Capaian sebesar 94,31% pada tahun 2022 menurun menjadi 83,03% pada tahun 2023, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 84,02% pada tahun 2024, 84,83% pada tahun 2025, dan 85,02% pada Triwulan II Tahun 2026. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai sasaran pelayanan KB. Meskipun demikian, jumlah peserta KB aktif terus meningkat dari 306.896 peserta pada tahun 2022 menjadi 423.387 peserta pada Triwulan II Tahun 2026, yang menunjukkan bahwa pelayanan dan akses terhadap program KB di Kota Surabaya terus mengalami peningkatan.

Program Keluarga Berencana (KB) bertujuan mewujudkan keluarga yang sejahtera melalui peningkatan kepesertaan masyarakat dalam ber-KB. Berdasarkan tabel di bawah ini, jumlah peserta KB aktif yang mengalami *drop out* kontrasepsi dan jumlah pasangan usia subur (PUS) dengan *unmet need* menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Sementara itu, jumlah PUS dengan usia istri kurang dari 20 tahun cenderung menurun, meskipun pada Triwulan II Tahun 2026 mengalami sedikit peningkatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan KB, memperkuat edukasi kepada pasangan usia subur, serta mengoptimalkan upaya pencegahan perkawinan usia dini guna meningkatkan keberhasilan program KB.

Tabel II.118
Partisipasi KB dari Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah peserta KB aktif yang *drop out* kontrasepsi	627	371	303	101	96

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
2	Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB	69.610	61.899	74.708	29.056	29.086
3	Jumlah pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun	204	29	26	21	25

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB, 2026

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator *Total Fertility Rate* (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah nak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.119
***Total Fertility Rate* (TFR) Kota Surabaya Tahun 2021–2025**

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Total Fertility Rate (TFR)	1,73	1,83	1,70	1,68	1,65

Sumber: BKKBN, 2026.

Berdasarkan Tabel II.119, TFR Kota Surabaya selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan menurun. Setelah mengalami peningkatan dari 1,73 pada tahun 2021 menjadi 1,83 pada tahun 2022, TFR kemudian menurun secara bertahap menjadi 1,70 pada tahun 2023, 1,68 pada tahun 2024, dan mencapai 1,65 pada tahun 2025. Tren penurunan tersebut menunjukkan bahwa tingkat fertilitas di Kota Surabaya semakin terkendali dan berada di bawah *replacement level fertility* (sekitar 2,1 anak per perempuan), yang mengindikasikan bahwa rata-rata jumlah kelahiran telah berada pada tingkat yang relatif rendah.

Kondisi tersebut mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam merencanakan keluarga, didukung oleh meningkatnya akses terhadap pelayanan Keluarga Berencana, penggunaan alat kontrasepsi, edukasi kesehatan reproduksi, serta berbagai program pembangunan keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama BKKBN. Penurunan TFR diharapkan dapat mendukung terwujudnya pertumbuhan penduduk yang lebih seimbang, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat upaya mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.

2.1.3.2.7.3 Pembentukan Keluarga Sejahtera

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana.Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera diperlukan peran aktif berbagai pihak, khususnya melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2019 terdapat 1.000 kelompok BKB, 233 kelompok BKR, dan 100 kelompok BKL yang aktif melaksanakan kegiatan. Seiring dengan pelaksanaan penataan dan evaluasi kelembagaan, dilakukan pemutakhiran data terhadap kelompok-kelompok yang aktif. Kelompok yang tidak aktif atau tidak melaksanakan kegiatan secara rutin dilakukan penggabungan dengan kelompok yang masih aktif sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Sebagai dampak dari penataan tersebut, pada tahun pada tahun 2025 tercatat sebanyak 627 kelompok BKB, 159 kelompok BKR, dan 294 kelompok BKL yang aktif melaksanakan kegiatan. Sementara pada tahun 2026 sampai dengan triwulan II tercatat sebanyak 629 kelompok BKB, 159 kelompok BKR, dan 293 kelompok BKL yang aktif melaksanakan kegiatan. Banyaknya jumlah kelompok BKB, BKR, dan BKL di Kota Surabaya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat pada setiap kelurahan, sehingga pembentukannya mempertimbangkan jumlah sasaran atau peserta pada masing-masing wilayah. Dengan demikian, setiap kelurahan dapat memiliki lebih dari satu kelompok sesuai dengan jumlah keluarga sasaran yang dilayani.

2.1.3.2.8 Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan diukur melalui indikator yang merepresentasikan tingkat kelancaran mobilitas masyarakat serta efektivitas pengelolaan sistem transportasi daerah. Rasio volume terhadap kapasitas jalan (volume to capacity ratio atau V/C ratio) merupakan indikator kinerja lalu lintas yang digunakan untuk mengukur tingkat kejenuhan ruas jalan dan menggambarkan kualitas pelayanan lalu lintas di Kota Surabaya. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian kemacetan, serta perencanaan pengembangan transportasi secara lebih terarah dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disajikan data rata-rata V/C ratio jalan di Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II).

Tabel II.120
Rata-rata V/C Ratio Jalan di Kota Surabaya Tahun 2022-2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Rata-rata V/C ratio	0,75	0,75	0,72	0,78	0,71

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2026

Rata-rata V/C Ratio *(Volume Capacity Ratio)* jalan di Kota Surabaya selama periode 2022 hingga Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan kondisi lalu lintas yang relatif terkendali dengan kecenderungan berfluktuasi. Nilai V/C Ratio tercatat sebesar 0,75 pada tahun 2022 dan 2023, menurun menjadi 0,72 pada tahun 2024, meningkat menjadi 0,78 pada tahun 2025, kemudian kembali menurun menjadi 0,71 pada Triwulan II Tahun 2026. Penurunan nilai V/C Ratio pada Triwulan II Tahun 2026 mengindikasikan adanya perbaikan tingkat pelayanan lalu lintas pada sebagian ruas jalan di Kota Surabaya.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa ruas jalan yang memiliki tingkat kejenuhan tinggi dengan nilai V/C Ratio di atas 0,90, seperti Jalan Menganti Wiyung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja jaringan jalan masih perlu terus dilakukan melalui penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas *(Traffic Management)*, pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi, serta pengendalian permintaan perjalanan *(Traffic Demand Management)* melalui peningkatan penggunaan transportasi umum dan pengurangan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

Kota Surabaya saat ini memiliki 14 terminal angkutan darat yang melayani bus dan/atau angkutan kota, namun jumlah armada angkutan darat (bus/angkot) terus menurun dari 1.999 unit (2020) menjadi 1.870 (2021), 1.051 (2022), 373 (2023), 176 (akhir 2024), 101 unit pada tahun 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh banyaknya armada bus dan angkutan kota yang tidak dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya tidak memperpanjang masa berlaku izin trayek, ketidakmampuan pemilik melakukan perawatan kendaraan, serta menurunnya minat masyarakat terhadap angkutan konvensional. Sebagai respons atas penyusutan armada konvensional tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan restrukturisasi layanan angkutan umum dengan mengalihkan fokus pada armada yang dikelola langsung oleh Pemkot dengan bentuk Trunk dan Feeder, yaitu Suroboyo Bus, Trans Semanggi Suroboyo, dan Wira-Wiri. Jumlah armada angkutan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya tercatat sebanyak 176 unit dengan rincian Suroboyo Bus sebanyak 28 unit, Trans Semanggi Surabaya sebanyak 17 unit, Bus Listrik sebanyak 12 unit, Bus Medium Diesel sebanyak 17 unit, dan Wira-Wiri sebanyak 102 unit, yang mencerminkan pergeseran pendekatan dari pengelolaan armada konvensional berbasis swasta menuju layanan terintegrasi yang dikelola langsung oleh Pemkot dengan standar operasional yang lebih

terukur dan andal. Rincian jumlah terminal dan angkutan darat di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.121
Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2022 – 2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Terminal Tipe A (Bus)	2	1	1	0	0
2	Jumlah Terminal Tipe B	1	1	1	1	1
3	Jumlah Terminal Tipe C	13	13	13	14	14
4	Jumlah Angkutan Darat	1.051	373	176	101	176(*)

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2026. *)Angkutan yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya.*

Untuk menjamin pemerataan layanan transportasi di seluruh wilayah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki 15 alternatif rute transportasi umum. Adapun rute dari feeder (wira-wiri) dan trunk (Suroboyo Bus, Trans Semanggi Surabaya, Bus Medium Diesel, dan Bus Listrik) ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel II.122
Layanan Transportasi Umum yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Surabaya

No.	Jenis Angkutan	Kode Rute	Nama Rute	Jumlah Unit
1.	Trunk	R1	Terminal Purabaya – Perak	28 unit
2.		R2	Kejawan Putih Tambak – UNESA	17 unit
3.		R4	Purabaya – UNAIR C – ITS (Bus Listrik)	12 unit
4.		R5	Benowo – Tunjungan (Bus Medium Diesel)	17 unit
5.	Feeder	FD02	Park and Ride Mayjend Sungkono - Balai Kota	5 unit
6.		FD03	Terminal Intermoda Joyoboyo - Kedung Anyar	14 unit
7.		FD04	SIER - Kota Lama	8 unit
8.		FD05	Mayjend Sungkono - Puspa Raya - HR Muhammad – BDH	8 unit
9.		FD06	Terminal Intermoda Joyoboyo – Lakarsantri	19 unit
10.		FD07	Terminal Bratang - Pasar Turi	7 unit
11.		FD08	Terminal Tambak Oso Wilangon - Unesa Lidah Wetan	4 unit
12.		FD09	Menaggal - Term. Manukan	12 unit
13.		FD10	Keputih – Bunguran	6 unit
14.		FD11	T. Bratang – Bulak	3 unit
15.		FD12	Purabaya – Kenpark	16 unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2026.

Dengan terbentuknya jaringan layanan terintegrasi yang mencakup 4 rute trunk dan 11 rute feeder sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas, Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya berfokus pada perluasan jangkauan layanan, tetapi juga pada peningkatan kualitas operasional angkutan umum. Salah satu indikator kualitas layanan yang dipantau secara berkelanjutan adalah rata-rata waktu tunggu (*headway*) kendaraan umum di terminal maupun halte, yang mencerminkan tingkat keandalan dan keteraturan

jadwal layanan. Rata-rata waktu tunggu angkutan kota menunjukkan kecenderungan meningkat, dari 12,61 menit (2021) menjadi 12,71 menit (2022), 14,00 menit (2023–2024), 15,79 menit (2025), hingga 17,27 menit pada triwulan II tahun 2026. Peningkatan waktu tunggu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, berkurangnya frekuensi operasional armada angkutan konvensional akibat penurunan jumlah kendaraan aktif, sehingga interval kedatangan antar kendaraan menjadi semakin jarang. Kedua, pertumbuhan volume kendaraan pribadi di Kota Surabaya yang terus meningkat turut memperpadat lalu lintas jalan, sehingga memperlambat pergerakan armada angkutan umum di lapangan. Berdasarkan data BPS dalam Jawa Timur Dalam Angka, jumlah kendaraan bermotor di Kota Surabaya tercatat sebanyak 1.855.253 unit pada tahun 2021 dan terus meningkat hingga mencapai 3.863.920 unit pada tahun 2025, yang berarti volume kendaraan di ruas jalan Kota Surabaya hampir berlipat ganda dalam kurun lima tahun. Kepadatan lalu lintas yang meningkat ini secara langsung berkontribusi pada ketidakpastian waktu tempuh armada dan memperpanjang interval kedatangan di halte maupun terminal. Ketiga, perlu dicermati bahwa angka waktu tunggu yang disajikan merupakan rata-rata agregat dari seluruh moda angkutan umum yang dipantau. Seiring bertambahnya jumlah rute dan armada angkutan umum yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya, perhitungan rata-rata menjadi semakin dipengaruhi oleh variasi waktu tunggu lintas moda dan rute. Rute-rute feeder dengan jangkauan lebih panjang atau frekuensi lebih rendah, misalnya, akan menarik rata-rata ke arah yang lebih tinggi meskipun rute trunk utama telah beroperasi dengan jadwal yang teratur dan terukur.

Sementara itu, rata-rata waktu tunggu bus menunjukkan pola yang berbeda, yaitu sempat memanjang dari 18,95 menit (2022), kemudian membaik secara bertahap menjadi 15,00 menit (2023–2024), 13,95 menit (2025), dan 12,50 menit pada triwulan II tahun 2026. Perbaikan waktu tunggu bus ini merupakan dampak positif dari penguatan layanan trunk yang dikelola Pemkot (Suroboyo Bus dan Trans Semanggi Suroboyo) dengan pengaturan jadwal yang lebih terstruktur dan teratur. Ke depan, pengelolaan *headway* yang konsisten pada kedua moda ini menjadi kunci untuk meningkatkan daya tarik angkutan umum dan mendorong perpindahan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Tabel II.123
Rata-rata Waktu Tunggu Angkutan Umum Kota Surabaya
Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Rata-rata waktu tunggu angkutan kota (menit)	12,71	14	14	15,79	17,27
Rata-rata waktu tunggu bus (menit)	18,95	15	15	13,95	12,5

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2026

Selain memperluas dan menata layanan, Pemerintah Kota Surabaya juga memantau *load factor* untuk memastikan kenyamanan sekaligus efisiensi operasional angkutan umum. *Load factor* adalah rasio jumlah penumpang terhadap kapasitas angkut (kursi/kapasitas kendaraan) pada periode tertentu, sehingga mencerminkan perbandingan permintaan (*demand*) dengan kapasitas yang tersedia. Semakin tinggi *load factor*, pemanfaatan armada cenderung makin efisien, tetapi bila terlalu tinggi dapat berisiko menurunkan kenyamanan karena kepadatan. Berdasarkan data, *load factor* angkutan kota meningkat konsisten dari 33,92% (2022), 44,86% (2023), dan melonjak ke 64,99% (2024), lalu berada pada 60,69% (2025) dan pada triwulan II tahun 2026 terjadi lonjakan yang sangat tinggi mencapai angka 84,47%.

Sementara itu, *load factor* bus berfluktuasi naik dari 57,45% (2022), sedikit turun ke 55,21% (2023) dan 45,31% (2024), kemudian meningkat kembali menjadi 64,63% (2025). Peningkatan *load factor* juga terjadi pada moda transportasi bus yang tercatat mencapai 79,91% pada triwulan II tahun 2026. Secara umum, tren ini menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan layanan pada periode terakhir, yang perlu diimbangi dengan pengaturan *headway*, kapasitas armada, dan kualitas layanan agar efisiensi tidak mengorbankan kenyamanan pengguna. Data terkait *load factor* kendaraan umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.124
Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Load factor angkutan kota (persen)	33,92	44,86	64,99	60,69	84,47
Load factor bus (persen)	57,45	55,21	45,31	64,63	79,91

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2026

Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk menjaga keberlanjutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum sebagai bagian dari penyediaan layanan publik yang aman, nyaman, dan andal. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan operasional, seperti penyediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi bus sekolah dan penyesuaian pembiayaan layanan melalui skema *Buy The Service* (BTS), tetapi juga diarahkan pada penguatan tata kelola transportasi berbasis teknologi informasi. Sebagai bagian dari transformasi digital, dilakukan pengadaan komputer, monitor, dan perangkat pendukung lainnya yang terintegrasi dengan *Surabaya Integrated Urban Transportation System* (SIUTS) sebagai pusat kendali operasional transportasi umum. Integrasi sistem tersebut memungkinkan pemantauan armada secara *real-time*, sehingga mendukung pengawasan posisi kendaraan, kepatuhan terhadap jadwal operasional, serta percepatan penanganan

apabila terjadi gangguan layanan di lapangan. Selain meningkatkan keandalan operasional, penguatan sistem ini menjadi fondasi bagi pengembangan transportasi publik yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan mobilitas masyarakat. Sistem tersebut juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta peningkatan kualitas pelayanan melalui penyediaan informasi operasional yang lebih akurat, responsif, dan adaptif terhadap dinamika lalu lintas perkotaan. Penguatan aspek operasional, pembiayaan, dan digitalisasi tersebut turut mendukung perluasan cakupan pelayanan transportasi umum di Kota Surabaya. Hal ini tercermin dari perkembangan jumlah rute dan armada angkutan umum yang dikelola melalui skema swakelola maupun *Buy The Service* (BTS) sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.125
Jumlah Rute dan Armada Layanan Angkutan Umum Kota Surabaya Berdasarkan Skema Pengelolaan Tahun 2023–2026 (TW II)

No	Keterangan	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah Rute (rute)	8	14	14	15
	Rute yang dikelola secara swakelola	7	8	8	8
	Rute yang dikelola menggunakan *Buy The Service*	1	6	6	7
2.	Jumlah Armada (unit)	80	159	175	176
	Jumlah armada yang dikelola secara swakelola	74	84	84	84
	Jumlah Armada yang dikelola menggunakan *Buy The Service*	6	75	91	92

Sumber: Dinas Perhubungan, 2026

Seiring dengan perkembangan kebutuhan mobilitas perkotaan dan transformasi digital layanan publik, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penguatan kualitas penyelenggaraan urusan perhubungan melalui peningkatan sarana, prasarana, dan sistem pendukung pelayanan transportasi. Upaya tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan aksesibilitas dan keandalan layanan transportasi umum, tetapi juga pada modernisasi sistem pelayanan, peningkatan keselamatan, serta optimalisasi penerimaan daerah.

Pada sektor perparkiran, transformasi layanan terus dilakukan melalui penerapan sistem parkir digital guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan parkir. Implementasi tersebut didukung dengan penyediaan berbagai infrastruktur pendukung, antara lain smartphone bagi petugas parkir, perangkat parkir *manless*, *printer thermal*, serta penguatan jaringan komunikasi pada titik-titik parkir. Pengembangan ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang terus memperluas penerapan transaksi non-tunai melalui QRIS pada layanan parkir sebagai bagian dari penguatan ekosistem kota cerdas (*smart city*). Penerapan parkir digital dimulai pada tahun 2026, sampai dengan triwulan 2 tahun 2026 di Seluruh Kota Surabaya

terdapat 1.564 titik lokasi parkir. Jumlah lokasi parkir yang telah menerapkan sistem parkir digital sebanyak 699 titik lokasi parkir dan juru parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan sebanyak 1.784 orang, di mana 699 orang telah menerapkan sistem parkir digital. Setiap juru parkir yang menerapkan sistem parkir digital dibekali peralatan seperti EDC, *Smartphone* NFC, Rompi, dan ID Card.

Pada layanan pengujian kendaraan bermotor, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan penyesuaian terhadap kebijakan nasional dengan mengimplementasikan penggunaan Kartu BLUe sebagai kartu pintar pengganti buku uji KIR konvensional sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan. Mulai tahun 2026, Kementerian Perhubungan menerapkan kebijakan *BLUe Full Cycle* dimana BLUe Fullcycle adalah penyempurnaan sistem BLUe yang mencakup seluruh alur digitalisasi mulai dari Pendaftaran, Pengujian, Pencetakan Dokumen Digital, hingga Pelaporan dan juga dilengkapi teknologi RFID untuk pelacakan dan verifikasi lebih mudah dan aman. Sebagai konsekuensi implementasi kebijakan tersebut, pemerintah daerah menyediakan Kartu *BLUe Full Cycle* sebagai bukti pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor sehingga pelayanan pengujian kendaraan menjadi lebih tertib, terdokumentasi secara digital, dan selaras dengan standar pelayanan nasional. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang wajib melakukan uji KIR di Kota Surabaya ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel II.126
Uji KIR Kendaraan Bermotor Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Kendaraan Wajib Melakukan Uji KIR	138.964	127.503	123.678	121.461	61.844
Jumlah Kendaraan Lulus Uji KIR	134.918	123.870	119.969	113.828	59.490
Jumlah Pemakaian Kartu BLUe	76.951	57.920	20.601	28.137	48.127

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2026

Selain itu, untuk memberikan kenyamanan demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

Tabel II.127
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	19.261	1.296	2.053	2.714	1.660

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2026

Selain memberikan kenyamanan dan keselamatan transportasi darat Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemasangan dan pemeliharaan peralatan informasi cuaca (*Weather Information Display*) yang dapat digunakan oleh nelayan-nelayan di pesisir Kota Surabaya sebagai pertimbangan ketika akan berlayar. Peralatan tersebut telah bekerja sama dengan BMKG untuk memberikan data cuaca secara riil yang bertujuan untuk menunjang keselamatan kepada nelayan. Pemasangan peralatan informasi cuaca (*Weather Information Display*) telah dilaksanakan pada tahun 2018 dipasang sejumlah 3 unit, kemudian pada tahun 2019 sejumlah 3 unit lagi sehingga menjadi 6 unit. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan pelatihan keselamatan kepada nelayan agar tetap menjaga keselamatan ketika berlayar.

Tabel II.128
***Weather Information Display* Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)**

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah *Weather Information Display*	6	6	6	6	6

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2026

Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan perhatian terhadap keselamatan perlintasan sebidang karena kondisi rel kereta api di Kota Surabaya akan menjadi jalur ganda (*double track*) secara keseluruhan yang akan meningkatkan frekuensi jadwal dari kereta api. Tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemeliharaan dan operasional perlintasan sebidang baru di wilayah Kecamatan Pakal. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Surabaya, jumlah lokasi perlintasan sebidang yang dioperasikan secara konsisten sebanyak 6 lokasi selama periode 2022–2026. Konsistensi operasional tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas pada titik perpotongan antara jalur kereta api dan jalan raya.

Tabel II.129
Operasional Perlintasan Sebidang Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Lokasi Perlintasan Sebidang yang dioperasikan	6	6	6	6	6

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2026

2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan pemerintahan berbasis digital pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Indeks ini penting karena menjadi ukuran keberhasilan transformasi digital pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Tabel II.130
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,16	3,69	4,49	4,54	4,78
Kategori SPBE	Sangat Baik	Sangat Baik	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2026

Capaian Indeks SPBE Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode 2021–2025, yaitu dari 3,16 pada tahun 2021 dengan kategori **"Sangat Baik"**, meningkat menjadi 4,49 pada tahun 2023 dan tetap terjaga pada tahun 2024 dengan kategori "Memuaskan". Bahkan, pada tahun 2024 Kota Surabaya tercatat sebagai pemerintah kota dengan capaian Indeks SPBE tertinggi se-Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2025, capaian indeks kembali meningkat menjadi 4,78 dan tetap berada pada kategori **"Memuaskan"**. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin optimalnya penerapan pemerintahan digital di Kota Surabaya melalui penguatan tata kelola, integrasi layanan elektronik, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital guna mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan, pengembangan dan integrasi layanan digital antar perangkat daerah, perluasan jaringan fiber optik, penguatan keamanan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi juga berperan penting dalam capaian Indeks SPBE.

Ke depan, Pemerintah Kota Surabaya akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan digital melalui peningkatan interoperabilitas sistem, integrasi layanan publik, penguatan keamanan siber, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga SPBE bertransformasi menjadi Pemerintahan Digital fokus dengan beralih dari sekadar pembangunan aplikasi dan infrastruktur (tata kelola internal) menjadi layanan terintegrasi yang berpusat pada kepuasan dan kebutuhan langsung masyarakat

Guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik serta memperluas jangkauan layanan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan fiber optik (FO). Berdasarkan data tahun 2022–2026 (Triwulan II), panjang jaringan fiber optik terjaga pada 285,93 kilometer selama periode 2022–2024, kemudian meningkat menjadi 311,198 kilometer pada tahun 2025 dan mencapai 341,023 kilometer pada Triwulan II Tahun 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya

dalam memperkuat konektivitas digital sebagai fondasi transformasi digital daerah, baik untuk mendukung layanan pemerintahan, pelayanan publik, maupun integrasi sistem informasi antarperangkat daerah. Selain melalui pengembangan jaringan fiber optik, perluasan jangkauan jaringan juga dilakukan melalui pemanfaatan berbagai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama dengan pihak ketiga guna memastikan ketersediaan akses jaringan yang semakin luas, andal, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Surabaya.

Tabel II.131
Jaringan *Fiber Optic* Kota Surabaya Tahun 2022 – 2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jaringan Fiber Optik (kilometer)	285,93	285,93	285,93	311,198	341,023

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

Pemerintah Kota Surabaya sejak awal telah memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat *http://www.surabaya.go.id*. Selain halaman utama, juga terdapat beberapa sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain menggunakan *website* resmi, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan aplikasi/sistem pelayanan perizinan sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah membangun 30 sistem informasi pelayanan perizinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perizinan. Sedangkan sejak tahun 2018 hingga tahun 2026 triwulan II, setiap tahunnya terdapat 10 sistem informasi pelayanan perizinan dan 5 sistem informasi pelayanan non perizinan yang terbangun. Karena masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kota terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK.

Tabel II.132
Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Daring
Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	10	10	10	10	10

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
2	Sistem Informasi Pelayanan Non Perizinan	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melaui peningkatan produktivitas usaha.

2.1.3.2.10.1 Koperasi

Jumlah anggota koperasi di Kota Surabaya menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 jumlah anggota koperasi tercatat sebanyak 153.809 orang. Pada tahun 2023 jumlah anggota menurun menjadi 150.327 orang seiring penggunaan sumber data yang berbeda, yaitu *Online Data System* (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2024 menjadi 147.666 orang dan tahun 2025 menjadi 136.845 orang. Hingga Triwulan II Tahun 2026, jumlah anggota koperasi kembali meningkat menjadi 138.885 orang atau bertambah sebanyak 2.040 anggota dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh bertambahnya anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang telah bergabung dan tercatat sebagai anggota koperasi serta penambahan anggota pada koperasi aktif lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pengembangan koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi. Secara rinci perkembangan jumlah anggota koperasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.133
Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah anggota koperasi	153.809	150.327	147.666	136.845	138.885

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2026

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan hasil yang positif, yang tercermin dari meningkatnya persentase koperasi aktif. Persentase koperasi aktif di Kota Surabaya menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun

jumlah koperasi mengalami penurunan pada tahun 2025. Jumlah koperasi tercatat sebanyak 2.002 unit pada tahun 2022, meningkat menjadi 2.009 unit pada tahun 2023 dan 2.019 unit pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 1.870 unit pada tahun 2025, serta meningkat kembali menjadi 1.880 unit pada triwulan II tahun 2026. Jumlah koperasi pada tahun 2025 dan 2026 tersebut telah mencakup Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang dibentuk pada tahun yang sama.

Sementara itu, jumlah koperasi aktif relatif stabil, yaitu 598 unit pada tahun 2022, 596 unit pada tahun 2023, meningkat menjadi 630 unit pada tahun 2024 dan tetap sebanyak 630 unit pada tahun 2025, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 627 unit pada triwulan II tahun 2026. Perubahan jumlah koperasi aktif tersebut dipengaruhi oleh adanya lima koperasi yang beralih pembinaan. Di sisi lain, terdapat dua koperasi baru yang telah memenuhi kriteria sebagai koperasi aktif sehingga jumlah koperasi aktif pada triwulan II tahun 2026 tercatat sebanyak 627 unit. Adapun sampai dengan triwulan II tahun 2026, terdapat 2 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang telah beroperasi aktif, yakni KKMP Tambaksari dan KKMP Semolowaru. Sementara KKMP lainnya masih berada pada tahap penguatan kelembagaan dan operasional sehingga belum memenuhi kriteria sebagai koperasi aktif dan belum diperhitungkan dalam jumlah koperasi aktif.

Kondisi tersebut mendorong peningkatan persentase koperasi aktif dari 29,87% pada tahun 2022 menjadi 33,69% pada tahun 2025, meskipun sedikit menurun menjadi 33,35% pada Triwulan II Tahun 2026. Penurunan persentase tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah koperasi secara keseluruhan menjadi 1.880 unit, sementara jumlah koperasi aktif menurun menjadi 627 unit sebagai dampak adanya lima koperasi yang beralih pembinaan. Meskipun demikian, proporsi koperasi aktif masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Penurunan jumlah koperasi pada tahun 2025 disebabkan oleh pembubaran koperasi yang sudah tidak aktif beroperasi sebagai hasil pengawasan dan pembinaan, termasuk evaluasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan pemenuhan kewajiban kelembagaan lainnya. Koperasi yang tidak melaksanakan RAT selama tiga tahun berturut-turut akan berstatus tidak aktif berdasarkan pendataan dalam Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi, sehingga dilakukan penyesuaian terhadap jumlah koperasi yang tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah koperasi lebih

mencerminkan penataan dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dibandingkan dengan penurunan aktivitas ekonomi koperasi di Kota Surabaya.

Tabel II.134
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah koperasi	2.002	2.009	2.019	1.870	1.880
2	Jumlah koperasi aktif	598	596	630	630	627
3	Persentase koperasi aktif (%)	29,87	29,67	31,20	33,69	33,35

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2026

Distribusi koperasi di Kota Surabaya masih didominasi oleh koperasi jasa, koperasi konsumen, dan koperasi simpan pinjam. Pada tahun 2025 terdapat 1.870 koperasi, dengan jumlah terbesar berasal dari koperasi jasa lainnya (774 koperasi), koperasi karyawan (287 koperasi), koperasi serba usaha (197 koperasi), KPRI (168 koperasi), dan koperasi simpan pinjam (111 koperasi). Jumlah koperasi tersebut telah mencakup Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang dibentuk pada tahun 2025 dan dalam klasifikasi jenis usaha dicatat sebagai bagian dari koperasi jasa lainnya. Hingga Triwulan II Tahun 2026 jumlah koperasi meningkat menjadi 1.880 unit dengan komposisi jenis usaha yang relatif stabil. Koperasi jasa lainnya tetap menjadi jenis koperasi dengan jumlah terbanyak, yaitu meningkat dari 774 unit pada tahun 2025 menjadi 785 unit pada Triwulan II Tahun 2026, sedangkan sebagian besar jenis koperasi lainnya relatif tetap atau hanya mengalami perubahan yang tidak signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perkoperasian di Kota Surabaya masih didominasi oleh sektor jasa, konsumsi, dan simpan pinjam. Secara rinci jumlah koperasi menurut jenis usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.135
Koperasi per Jenis Usaha di Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jasa Angkutan Darat	17	17	16	10	10
Jasa Angkutan Laut	0	0	0	0	0
Jasa Lain-Lain	681	693	688	774	785
KJKS	18	16	16	16	16
Kopinkra	7	7	7	3	3
Kopkar	377	372	369	287	286
Kopma	22	22	23	12	12
Koppas	15	16	19	13	13
Kopontren	23	23	23	11	11
Kopwan	142	142	145	143	143
KPRI	183	182	180	168	169
KSP	114	113	117	111	111
KSU	238	238	250	197	197

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
KUD	5	5	5	3	3
Pemuda	6	6	6	2	2
Pertanian	5	5	5	2	2
PK 5	26	26	26	22	22
Primkopabri	12	12	12	7	7
Primkopad	18	18	17	18	17
Primkopal	17	17	17	17	17
Primkopau	1	1	1	1	1
Primkoppol	11	11	11	8	8
Primkoptama	30	30	30	20	20
Profesi	26	27	26	17	17
Sekunder	1	1	0	0	0
Nelayan	5	5	5	4	4
Tenaga Kerja Bongkar	2	2	3	2	2
Koperasi Digital	-	-	1	1	1
Kopra	-	1	1	1	1
Kop Telkom	-	1	-	-	-
TOTAL	**2.002**	**2.009**	**2.019**	**1.870**	**1.880**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, 2026

Rasio volume usaha koperasi aktif menunjukkan tingkat produktivitas koperasi dalam menghasilkan aktivitas usaha. Pada tahun 2022 volume usaha koperasi aktif menurun menjadi Rp1.412 miliar seiring berkurangnya jumlah koperasi aktif menjadi 598 koperasi, namun rasio volume usaha meningkat menjadi 2,36. Selanjutnya pada tahun 2023 volume usaha koperasi aktif meningkat menjadi Rp1.419 miliar dengan rasio sebesar 2,38. Pada tahun 2024 volume usaha koperasi aktif kembali meningkat menjadi Rp1.421 miliar dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 630 koperasi, sehingga rasio volume usaha tercatat sebesar 2,25. Pada tahun 2025 volume usaha koperasi aktif meningkat menjadi Rp1.425 miliar dengan jumlah koperasi aktif yang tetap sebanyak 630 koperasi, sehingga rasio volume usaha meningkat menjadi 2,26. Hingga Triwulan II Tahun 2026 volume usaha koperasi aktif tercatat sebesar Rp1.426 miliar dengan rasio volume usaha sebesar 2,27. Secara rinci rasio volume usaha koperasi aktif terhadap jumlah koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut..

Tabel II.136
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2021–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Koperasi Aktif	598	596	630	630	627
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	1.412	1.419	1.421	1.425	1.426
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif	2,36	2,38	2,25	2,26	2,27

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2026

Meskipun jumlah anggota koperasi di Kota Surabaya menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir, kinerja koperasi aktif masih relatif terjaga yang tercermin dari stabilnya volume usaha koperasi. Oleh karena itu, penguatan peran koperasi terus dilakukan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sebagai model koperasi konsumen berbasis kelurahan yang mendukung pengendalian inflasi dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Program ini bertujuan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian lokal.

Sebagai implementasi program tersebut, pada tahun 2025 telah terbentuk 153 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Surabaya. Koperasi tersebut diarahkan untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging, ikan, dan komoditas strategis lainnya. Untuk mendukung operasional koperasi, Pemerintah Kota Surabaya juga mengembangkan sistem distribusi yang terintegrasi melalui pusat distribusi (*Distribution Center)* guna menjamin ketersediaan barang dan meningkatkan efisiensi penyaluran kebutuhan pokok kepada masyarakat.

Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyediaan kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kelembagaan koperasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Melalui peningkatan kapasitas pengurus, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, koperasi diharapkan mampu menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Surabaya.

Sejalan dengan upaya penguatan kelembagaan koperasi, produktivitas koperasi aktif di Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2022 produktivitas koperasi aktif tumbuh sebesar 34,23% yang dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah koperasi aktif dan volume usaha koperasi. Selanjutnya, produktivitas koperasi aktif kembali tumbuh positif pada periode 2023–2025 masing-masing sebesar 0,45%, 0,16%, dan 0,32%. Hingga Triwulan II Tahun 2026, pertumbuhan produktivitas koperasi aktif tercatat sebesar -15,32%. Secara rinci persentase pertumbuhan produktivitas koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.137
Pertumbuhan Produktivitas Koperasi Aktif Kota Surabaya
Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan produktivitas koperasi aktif (%)	(34,23)	0,45	0,16	0,32	(15,32)

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2026

2.1.3.2.10.2 Usaha Mikro dan Kecil

Perkembangan UMKM yang terus mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Kota Surabaya turut memperkuat fondasi perekonomian daerah. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha mikro melalui berbagai bentuk intervensi, meliputi pendampingan pengurusan merek bagi 250 usaha mikro, pendampingan sertifikasi halal bagi 550 usaha mikro, pelatihan bagi 904 usaha mikro, fasilitasi kemitraan atau kerja sama bagi 136 usaha mikro, fasilitasi pemasaran melalui pameran, bazar, dan gelar produk bagi 1.588 UMKM, serta pemasaran secara daring melalui e-Peken bagi 3.181 usaha mikro.

Intervensi tersebut dapat diberikan kepada UMKM yang baru memperoleh pembinaan maupun kepada UMKM yang sebelumnya telah menerima fasilitasi. UMKM yang sama dimungkinkan memperoleh lebih dari satu jenis intervensi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan level perkembangannya. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kapasitas usaha, legalitas dan standardisasi produk, perluasan akses pemasaran, penguatan kemitraan, serta peningkatan daya saing UMKM.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, berbagai program pembinaan dan pengembangan UMKM terus dilaksanakan, antara lain melalui pelatihan bagi 250 usaha mikro, fasilitasi pameran, bazar, dan gelar produk bagi 1.189 UMKM, serta pemasaran secara daring melalui e-Peken bagi 4.150 usaha mikro. Dengan demikian, jumlah penerima pada setiap bentuk fasilitasi menggambarkan jumlah intervensi yang diberikan dan tidak seluruhnya merupakan UMKM yang berbeda, karena satu UMKM dapat memperoleh beberapa intervensi sesuai dengan tahapan atau level pengembangan usahanya.Secara rinci pembinaan dan pengembangan UMKM yang dilakukan pada tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.138
Pembinaan dan Pengembangan UMKM Kota Surabaya Berdasarkan Intervensi
Tahun 2022–2026 (TW II)

Intervensi	2022	2023	2024	2025	2026
Merek	125	156	250	250	50
Halal	100	265	550	550	46

Intervensi	2022	2023	2024	2025	2026
Pelatihan UMKM	62	1.086	663	904	250
Fasilitas Kemitraan/Kerjasama	136	136	139	136	100
Pameran/Bazar/Gelar Produk	2.188	2.012	1.429	1.588	1189
Pemasaran Online Peken	2.752	2.945	3.181	3.181	4150
Total	**5.363**	**6.600**	**6.212**	**6.609**	**5.635**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2026

Dengan upaya tersebut di atas maka sebanyak 6.609 UMKM binaan yang naik kelas sampai dengan akhir Desember 2025 omsetnya mencapai Rp 60.100.000.000. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan UMKM akan diarahkan untuk memperluas cakupan penerima manfaat dengan mengutamakan UMKM yang belum pernah memperoleh intervensi, tanpa mengurangi pendampingan lanjutan bagi UMKM yang masih memerlukan penguatan kapasitas. Adapun detil upaya peningkatan UMKM naik kelas tersebut dilakukan dengan:

1. Penguatan produk yang dilakukan melalui fasilitasi pengurusan merek dan sertifikat halal, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas UMKM atas kualitas sebuah produk yang dihasilkan;
2. Peningkatan manajemen kelembagaan melalui pelatihan, yang akan meningkatkan kualitas SDM dan pengetahuan dalam mengelola dan mengembangkan UMKM;
3. Peningkatan permodalan dengan fasilitasi kemitraan dengan perbankan;
4. Peningkatan pemasaran dengan pameran/ bazar/ gelar produk dan pemasaran *online* e-Peken dan melaksanakan pelatihan pemasaran *online* dengan bekerjasama dengan *marketplace*/*platform* digital.

Sejalan dengan upaya pengembangan UMKM, Pemerintah Kota Surabaya mendorong transformasi usaha mikro dari sektor informal ke formal melalui fasilitasi legalitas usaha dan pendampingan perizinan. Indikator ini mulai diukur pada tahun 2026. Hingga Triwulan II 2026, sebanyak 10.311 dari 15.403 usaha mikro binaan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga capaian indikator mencapai 66,94%. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya legalitas usaha mikro yang membuka akses lebih luas terhadap pembiayaan, pendampingan, dan pengembangan usaha. Rincian capaian indikator disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.139
Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
Kota Surabaya Tahun 2021–2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	66,94

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2026

Selain mendorong peningkatan kapasitas UMKM yang telah ada, Pemerintah Kota Surabaya juga terus mengembangkan kewirausahaan sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan Wirausaha merupakan indikator baru yang mulai diukur pada Tahun 2026. Indikator ini mengukur pertambahan pelaku usaha mikro yang telah mengikuti pelatihan, workshop, atau pendampingan kewirausahaan serta masih aktif menjalankan usahanya.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, capaian pertumbuhan wirausaha tercatat sebesar 0,581 persen**.** Selama periode tersebut, terbentuk 90 pelaku usaha mikro baru melalui program pelatihan, workshop, dan pendampingan kewirausahaan. Penambahan tersebut meningkatkan jumlah usaha mikro binaan Dinkopdag menjadi 15.493 pelaku usaha**,** yang menunjukkan bertambahnya wirausaha hasil pembinaan yang masih aktif menjalankan usahanya. Mengingat indikator ini baru mulai diimplementasikan pada Tahun 2026, data capaian periode 2021–2025 belum tersedia. Secara rinci capaian indikator pertumbuhan wirausaha disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.140
Pertumbuhan Wirausaha di Kota Surabaya Tahun 2022 – 2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Wirausaha (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	0,581

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, 2026

2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan dunia usaha, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Dampak investasi terhadap perekonomian tidak hanya tercermin dari nilai investasi yang masuk, tetapi juga melalui *multiplier effect* yang dihasilkan, yaitu efek pengganda yang mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi, meningkatkan konsumsi masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi secara berkelanjutan. Investasi di Kota Surabaya terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang direalisasikan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*). Perkembangan realisasi investasi tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam

menggambarkan tingkat kepercayaan investor terhadap iklim usaha serta daya saing daerah.

Data penanaman modal dan perizinan pada subbab ini disajikan hingga Triwulan I Tahun 2026, mengingat data Triwulan II Tahun 2026 belum dipublikasikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada saat penyusunan dokumen RKPD. Berdasarkan jadwal rilis, data realisasi penanaman modal Triwulan II baru akan tersedia pada Agustus 2026, sehingga pembaruan data akan dilakukan setelah publikasi resmi diterbitkan. Selanjutnya, perkembangan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.141
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW I)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Proyek PMDN	63.360	147.254	90.136	108.315	3.562
Jumlah Proyek PMA	340	677	1.203	1.536	598
Total	**63.700**	**147.931**	**91.339**	**109.851**	**4.160**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2026

Penanaman Modal di Kota Surabaya menunjukkan bahwa investasi di Kota Surabaya pada tahun 2021 tercatat sejumlah 1.487 proyek. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah proyek PMA/PMDN adalah 63.700 proyek. Kemudian pada akhir tahun 2023 jumlah proyek PMA/PMDN meningkat menjadi 147.931 proyek, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 91.339 proyek, untuk kemudian meningkat kembali di tahun 2025 menjadi 109.851 proyek. Peningkatan signifikan jumlah proyek tersebut di antaranya disebabkan oleh mudahnya perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*) dan didukung oleh adanya layanan Klinik Investasi yang diinformasikan dan dilakukan secara masif sebagai komitmen Surabaya Ramah Investasi.

Sedangkan untuk nilai investasi PMA dan PMDN, pada tahun 2021 sebesar Rp29.215,06 Miliar dan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp34.897,81 Miliar dan Rp37.573,89 Miliar. Pada tahun 2024, nilai investasi PMA dan PMDN mencapai Rp40.476,06 Miliar. Pada Tahun 2025 proyek PMDN 108.315 proyek dan PMA 1536 Proyek.

Menurut jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibanding dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif Laporan realisasi penanaman modal di Kota Surabaya merupakan gambaran aktivitas investasi

yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan perizinan berusaha yang diterbitkan. Perkembangan jumlah proyek dan nilai investasi PMA/PMDN Kota Surabaya selama periode Tahun 2022 hingga Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada Tabel II.142 menunjukkan bahwa nilai investasi mengalami peningkatan secara konsisten hingga tahun 2025. Adapun capaian pada Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat disandingkan secara langsung dengan capaian tahunan pada periode sebelumnya, mengingat realisasi investasi bersifat kumulatif dan pada umumnya sebagian besar nilai investasi baru terealisasi pada Triwulan III dan Triwulan IV. Oleh karena itu, nilai investasi pada Triwulan I Tahun 2026 masih bersifat sementara dan diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun seiring dengan berjalannya pelaksanaan proyek investasi.

Tabel II.142
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW I)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1.1	Jumlah Proyek	63.700	147.931	91.339	109.851	4.160
1.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	34.897,81	37.573,89	40.476,06	43.605,37	9.151

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2026

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, yang dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel II.143
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2021–2026 (TW I)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah PMA/PMDN	30.304	70.817	91.339	109.851	4.160
2	Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan PMA/PMDN	92.707	199.420	247.713	294.546	7.220
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	3,06	2,81	2,71	2,68	1,74

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2026

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tahun 2021 hingga 2025, jumlah tenaga kerja yang terserap semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah proyek PMA/PMDN. Akan tetapi jika dilihat dari rasio daya serapnya, terjadi penurunan yang relatif kecil namun konsisten setiap tahunnya. Hal ini membuktikan salah satu tren perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga

mampu meningkatkan produktivitas secara lebih efisien, tanpa disertai penambahan tenaga kerja yang terlalu banyak.

2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya bersifat terbuka *(outdoor)* maupun tertutup *(indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya di antaranya adalah Lapangan Atletik THOR, Lapangan Softball dan Hockey Dharmawangsa, Gelora 10 Nopember, dan Gelora Bung Tomo. Sampai dengan tahun 2025, total lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya adalah sejumlah 635 lapangan yang berada di atas lahan fasilitas umum perumahan dan permukiman maupun di tanah aset milik Pemerintah Kota Surabaya. Rincian jumlah lapangan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

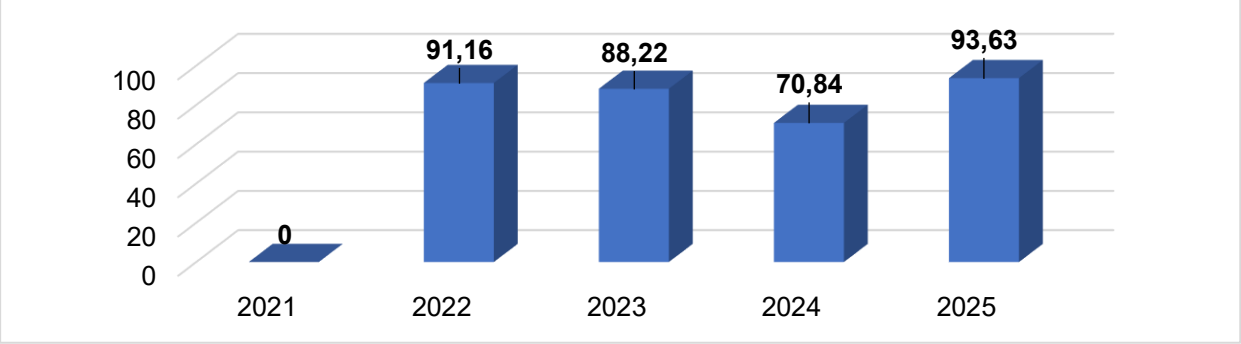
Tabel II.144
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022 – 2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026*
1	Jumlah lapangan olahraga	603	632	635	635	635
2	Jumlah penduduk	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.003.860	3.003.860
3	Rasio lapangan olahraga	1:4.955	1:4.762	1:4.753	1:4.731	1:4.731

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2026.

Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat Kota Surabaya khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang positif. Hal ini juga akan memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat Kota Surabaya secara umum dan dapat menumbuhkan bibit-bibit atlet olahraga secara khusus. Cakupan pembinaan olahraga di Kota Surabaya menyeluruh meliputi semua cabang olahraga prestasi dan induk olahraga rekreasi dan tradisional. Pembinaan olahraga tersebut bersinergi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surabaya dan juga dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). Di bawah komite tersebut bernaung cabang-cabang olahraga yang didukung Pemerintah Kota Surabaya, mulai dari kegiatan pembibitan, pelatihan rutin, pelatihan terpusat, pengiriman atlet untuk lomba, penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta memberikan penghargaan kepada atlet-atlet yang berprestasi. Pembibitan atlet muda dilaksanakan secara profesional di cabang olahraga masing-masing. Untuk meningkatkan kompetensi pelatih, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan kegiatan pelatihan untuk pelatih. Hal ini dilakukan agar proses pembibitan atlet terlaksana dengan baik dan berkualitas.

Pada tahun 2020, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 91,32%. Pada tahun 2021 tidak ada agenda kejuaraan olahraga dikarenakan pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2022 nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 91,16%. Pada tahun 2023, sejumlah 781 orang atlet mendapatkan pembinaan dari pemerintah kota, 689 orang atlet di antaranya berhasil menorehkan prestasi, sehingga nilai persentase atlet yang berprestasi menjadi 88,22%. Sejak tahun 2007 (Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur I) sampai dengan tahun 2023 (Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur VIII), Pemerintah Kota Surabaya selalu menjadi juara umum di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim). Hal ini dapat diraih tidak terlepas dari dukungan dan keseriusan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal pembangunan olahraga secara menyeluruh. Pada tahun 2024, dari total 1.430 atlet olahraga yang dibina, sejumlah 1.013 atlet berhasil menorehkan prestasi di kejuaraan tingkat regional, nasional serta internasional. Jika dilihat capaian persentase atlet berprestasi dari tahun 2023 ke tahun 2024 memang menurun, hal ini terjadi karena pada tahun 2024 tidak ada perhelatan Porprov Jatim. Namun di tahun penyelenggaraan Porprov Jatim, Tahun 2025, terdapat peningkatan yang signifikan dengan 93,63% dari 785 atlet olahraga yang dibina, mencatatkan prestasi.



Gambar II.26 Persentase Atlet Berprestasi

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2026

Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program dan kegiatan khusus terkait pembinaan kepemudaan diantaranya adalah pembentukan pemuda kader anti kenakalan remaja (anti narkoba dan peduli HIV AIDS). Sampai dengan tahun 2020 terdapat sejumlah 799 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Untuk tahun 2021 terdapat sejumlah 1.000 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja, dan terdapat tambahan 170 pemuda yang menjadi kader anti kenakalan remaja di tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah pemuda yang dibina menjadi kader anti kenakalan remaja sebanyak 777 orang. Kemudian pada tahun 2024, sebanyak 823 orang dibina menjadi kader anti kenakalan remaja.

Tabel II.145
Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pelatihan Wirausaha Kota Surabaya Tahun 2022-2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha (orang)	567	472	698	700	243

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2026.

Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha di Kota Surabaya selama periode 2022–2025 menunjukkan tren yang berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2022, sebanyak 567 pemuda mengikuti pelatihan wirausaha, kemudian menurun menjadi 472 pemuda pada tahun 2023. Selanjutnya, jumlah peserta meningkat secara signifikan menjadi 698 pemuda pada tahun 2024 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 700 pemuda pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam memperluas akses pengembangan kapasitas kewirausahaan bagi generasi muda sebagai upaya mendorong lahirnya wirausahawan baru yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

Sementara itu, hingga triwulan II tahun 2026 telah tercatat sebanyak 243 pemuda mengikuti pelatihan wirausaha. Capaian tersebut merupakan realisasi sementara hingga semester pertama, sehingga masih berpotensi meningkat seiring pelaksanaan pelatihan pada triwulan selanjutnya. Selain pemberian pelatihan, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan fasilitasi lanjutan berupa magang wirausaha dan pendampingan bagi peserta terpilih agar memiliki pengalaman praktis sebelum mengembangkan usaha secara mandiri. Melalui upaya tersebut, diharapkan semakin banyak wirausahawan muda yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta memperkuat daya saing perekonomian Kota Surabaya.

2.1.3.2.13 Statistik

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan berbasis data. Penilaian IPS mencakup beberapa aspek, antara lain tata kelola statistik, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, sumber daya manusia statistik, serta pemanfaatan data statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indeks ini penting karena menjadi tolok ukur kualitas pengelolaan data dan informasi pemerintah daerah dalam mewujudkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berbasis *evidence-based policy.* Adapun nilai dari Indeks Pembangunan Statistik Kota Surabaya sebagai berikut.

Tabel II.146
Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2023–2025

Uraian	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,41	2,73	2,98
Kategori Penilaian	Cukup Baik	Baik	Baik

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2026

Berdasarkan data Tahun 2023–2025, capaian Indeks Pembangunan Statistik Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan yang positif, yaitu dari 2,41 pada tahun 2023 dengan kategori "Cukup Baik", meningkat menjadi 2,73 pada tahun 2024 dengan kategori "Baik", dan kembali meningkat menjadi 2,98 pada tahun 2025 dengan kategori "Baik". Peningkatan tersebut menunjukkan semakin optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Surabaya melalui penguatan tata kelola data, peningkatan kualitas dan integrasi data statistik, pengembangan sistem informasi berbasis digital, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Kinerja urusan statistik dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya antara lain melalui pengumpulan dan pengelolaan data statistik sektoral di seluruh Perangkat Daerah yang dipublikasikan secara rutin setiap tahun. Data statistik sektoral yang dimaksud antara lain data sektor penduduk dan tenaga kerja, sektor sosial budaya, sektor keuangan, sektor industri dan sektor perdagangan Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun buku Statistik Sektoral Kota Surabaya sebagai bagian dari diseminasi dan informasi penyelenggaraan statistik sektoral yang dapat menjadi bahan rujukan dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Tabel II.147
Hasil Analisis Data yang Terpublikasi Tahun 2022–2025

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase hasil analisa data yang terpublikasi (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, 2026

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota, maka pada data yang dikumpulkan oleh Walidata, yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dilakukan analisis dan publikasi. Sampai dengan Tahun 2026 Triwulan II, telah dilakukan analisis dan publikasi data sebesar 100% yang terdiri dari data sektor penduduk dan tenaga kerja, sektor sosial budaya, sektor keuangan, sektor industri, dan

sektor perdagangan. Sebagai upaya mendukung pemenuhan kebutuhan perencanaan sektoral di masing-masing Perangkat Daerah, serta kebutuhan masyarakat akan informasi secara umum, Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengembangkan sistem terintegrasi antara *ePlanning* dan portal satu data (satudata.surabaya.go.id), yang di dalamnya mencakup *Open Data* dan Peta *Digital* serta Statistik Sektoral Kota Surabaya.

Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 maupun RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

2.1.3.2.14 Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian dilaksanakan untuk menjamin keamanan data, informasi, dan sistem elektronik yang mendukung pelayanan publik serta pemerintahan digital di Kota Surabaya. Seiring meningkatnya transformasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi, kebutuhan terhadap keamanan informasi yang andal menjadi semakin penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya secara berkala melakukan pengawasan, pemantauan, dan penguatan sistem keamanan informasi guna melindungi sistem elektronik yang digunakan oleh perangkat daerah serta memastikan layanan pemerintahan berjalan aman, terpercaya, dan berkelanjutan.

Tabel II.148
Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah serangan	240	270	160	240	120
2	Jumlah penanganan serangan	240	270	160	240	120
3	Persentase penanganan serangan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026.

Berdasarkan data serangan terhadap sistem keamanan informasi selama periode 2022–2026 (Triwulan II), seluruh insiden serangan siber yang terdeteksi berhasil ditangani dengan tingkat penanganan mencapai 100 persen setiap tahunnya. Jumlah serangan yang tercatat berfluktuasi, yaitu sebanyak 240 serangan pada tahun 2022, meningkat menjadi 270 serangan pada tahun 2023, menurun menjadi 160 serangan pada tahun 2024, kemudian kembali meningkat menjadi 240 serangan pada tahun 2025, sementara pada Triwulan II Tahun 2026 telah tercatat 120 serangan dan seluruhnya

berhasil ditangani. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan keamanan informasi dan respons terhadap insiden siber berjalan secara efektif sehingga mampu menjaga keberlangsungan layanan digital pemerintah daerah

Meskipun tingkat penanganan serangan siber telah mencapai 100%, tantangan keamanan siber terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas ancaman digital dan kebutuhan perlindungan sistem pemerintahan digital. Hal ini terlihat dari penurunan Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah dari 78,00% pada tahun 2024 menjadi 69,61% pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan respons terhadap insiden siber telah berjalan baik, namun masih diperlukan penguatan pada aspek tata kelola keamanan informasi, manajemen risiko, kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan kerentanan sistem, keberlangsungan layanan, serta modernisasi infrastruktur teknologi informasi. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat keamanan siber dan persandian melalui peningkatan kapasitas SDM, asesmen keamanan sistem elektronik, penguatan tata kelola keamanan informasi, pengembangan pusat data dan infrastruktur pendukung, peningkatan sistem pemantauan keamanan siber, serta koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kematangan keamanan siber dan sandi daerah serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman, andal, dan berkelanjutan.

2.1.3.2.15 Kebudayaan

Dalam mendukung pembangunan bidang kebudayaan, Pemerintah Kota Surabaya secara aktif menyelenggarakan dan memfasilitasi berbagai festival seni dan budaya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta. Kegiatan tersebut menjadi wadah pelestarian budaya lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan identitas budaya Kota Surabaya.

2.1.3.2.15.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Di sisi lain, banyaknya penyelenggaran festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya, Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan *stakeholder* untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.149
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya
Tahun 2022–2026 (TW II)

Tahun	2022	2023	2024	2025	2026*
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	454	521	497	601	14
Jumlah Kelompok Seni/Paguyuban yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	423	428	433	434	308
Jumlah Kelompok Seni yang dibina dan dikembangkan	423	428	433	434	308

*Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2026 *) data TW II*

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelenggarakan 454 festival seni dan budaya dengan melibatkan 423 kelompok seni. Jumlah penyelenggaraan festival meningkat menjadi 521 festival pada tahun 2023 dengan partisipasi 428 kelompok seni. Pada tahun 2024, jumlah festival yang diselenggarakan tercatat sebanyak 497 festival dengan 433 kelompok seni yang berpartisipasi. Selanjutnya, pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 601 festival seni dan budaya dengan melibatkan 434 kelompok seni. Sementara itu, hingga Triwulan II Tahun 2026, telah terselenggara 14 festival seni dan budaya yang diikuti oleh 308 kelompok seni. Jumlah tersebut merupakan capaian sementara hingga Triwulan II, sehingga masih berpotensi meningkat seiring pelaksanaan berbagai agenda festival seni dan budaya pada semester II Tahun 2026.

Peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam melestarikan seni budaya lokal sekaligus memperluas ruang ekspresi bagi para pelaku seni. Berbagai festival tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan daya tarik pariwisata, pemberdayaan komunitas seni, serta penguatan ekonomi kreatif. Untuk mendukung hal tersebut, promosi kegiatan seni dan budaya terus dilakukan secara masif melalui berbagai media, baik media cetak, media elektronik, maupun platform digital, termasuk media sosial Tourism Surabaya serta situs **tiketwisata.surabaya.go.id**, sehingga mampu menjangkau masyarakat dan wisatawan secara lebih luas.

2.1.3.2.15.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Untuk mendukung perkembangan seni dan budaya di Kota Surabaya Pemerintah Kota menyediakan gedung/tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/berekspresi antara lain di THP Kenjeran, Wisata Perahu Kalimas, Balai Pemuda, Balai Kota, Wisata Kota Lama, serta di Lokasi Wisata Tunjungan Romansa.

2.1.3.2.15.3 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di Kota Surabaya, pemerintah kota melakukan pengawasan dan upaya pelestarian bekerjasama dengan tenaga ahli di bidang cagar budaya. Pada tahun 2023 terdapat 286 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2024 jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya berkurang menjadi sejumlah 284 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Pada tahun 2024 terdapat 2 bangunan cagar budaya yang dievaluasi, dimana hasil dari evaluasi bersama Tim Ahli Cagar Budaya memutuskan status cagar budaya pada 2 bangunan tersebut dicabut. Pada tahun 2025 jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Surabaya tetap berjumlah 285 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Saat ini seluruh benda, situs, bangunan dan Kawasan ini dalam kondisi baik. Dalam upaya pelestarian seluruh benda, situs, bangunan dan Kawasan ini rutin diawasi oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surabaya. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga aktif melakukan revitalisasi kawasan cagar budaya menjadi destinasi wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Adapun kawasan yang sedang direvitalisasi antara lain kawasan kota lama terdiri dari zona eropa, zona pecinan dan zona arab. Dengan adanya revitalisasi ini tentu akan memberikan dampak positif khususnya bagi pemilik bangunan cagar budaya. Tujuan akhir yang akan dituju adalah terlestarikannya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel II.150
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya
Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026*
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	289	286	284	285	285
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	289	286	284	285	285
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)	100	100	100	100	100

*Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2026. *) data TW II*

Karya seni tidak hanya merepresentasikan nilai keindahan, tetapi juga menjadi media ekspresi, identitas, dan pelestarian budaya yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat, salah satunya melalui pagelaran seni dan budaya. Dalam rangka menjaga keberlanjutan ekosistem kesenian, Pemerintah Kota Surabaya secara konsisten melaksanakan pembinaan terhadap kelompok-kelompok seni. Pada periode 2022–2025, jumlah kelompok seni binaan Pemerintah Kota Surabaya tercatat tetap sebanyak 715

kelompok setiap tahunnya. Meskipun jumlah kelompok binaan tidak mengalami perubahan, kualitas kelompok seni menunjukkan perkembangan yang positif. Jumlah kelompok seni yang dinyatakan layak tampil meningkat secara bertahap, yaitu dari 423 kelompok pada tahun 2022 menjadi 428 kelompok pada tahun 2023, 433 kelompok pada tahun 2024, dan 434 kelompok pada tahun 2025. Sebaliknya, jumlah kelompok seni yang belum layak tampil menurun dari 292 kelompok pada tahun 2022 menjadi 287 kelompok pada tahun 2023, 282 kelompok pada tahun 2024, dan 281 kelompok pada tahun 2025. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kualitas penyajian kelompok seni binaan. Dengan demikian, semakin banyak kelompok seni yang memenuhi standar dan dinilai layak untuk menampilkan karya seni di hadapan masyarakat.

Selain peningkatan kualitas kelompok seni binaan, jumlah kelompok seni yang memiliki Tanda Daftar Kesenian sebagai bentuk pencatatan dan pengakuan administratif juga menunjukkan tren peningkatan. Jumlahnya meningkat dari 799 kelompok pada tahun 2022 menjadi 861 kelompok pada tahun 2023, 911 kelompok pada tahun 2024, dan mencapai 941 kelompok pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya kesadaran kelompok seni untuk memperoleh legalitas dan pengakuan administratif, sekaligus mencerminkan penguatan tata kelola serta pelestarian ekosistem kebudayaan di Kota Surabaya. Jumlah kelompok seni binaan berbeda dengan jumlah kelompok seni yang memiliki Tanda Daftar Kesenian karena kedua indikator tersebut mempunyai cakupan dan tujuan pengukuran yang berbeda. Kelompok seni binaan merupakan kelompok yang memperoleh pendampingan dan pembinaan secara langsung dari Pemerintah Kota Surabaya. Sementara itu, kelompok seni yang memiliki Tanda Daftar Kesenian mencakup seluruh kelompok seni yang telah terdaftar secara administratif, baik kelompok yang menjadi binaan Pemerintah Kota Surabaya maupun kelompok yang mendaftar secara mandiri atau memperoleh fasilitasi dari pihak lainnya. Oleh karena itu, jumlah kelompok seni yang memiliki Tanda Daftar Kesenian dapat lebih besar dibandingkan jumlah kelompok seni binaan. Adapun perkembangan jumlah kelompok seni binaan, kelompok seni layak tampil, serta kelompok seni yang telah memiliki Tanda Daftar Kesenian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.151
Kelompok Seni Binaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026*
Jumlah kelompok seni layak tampil	423	428	433	434	N/A
Jumlah kelompok seni belum layak tampil	292	287	282	281	N/A

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026*
Jumlah kelompok seni binaan	715	715	715	715	715
Jumlah kelompok seni yang memiliki tanda daftar kesenian (tersertifikasi)	799	861	911	941	941

*Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, 2026. *) data TW II*

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2022, perpustakaan terdiri atas perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan khusus, taman baca, dan sudut baca.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan layanan perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Puskesmas, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal yang tersebar secara merata; menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan dan TBM; menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM; menyelenggarakan perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan taman kota; melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/l*eaflet*, spanduk, *banner, billboard*, media cetak dan elektronik; melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan; melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan serta melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Perpustakaan Umum di Kota Surabaya milik Pemerintah Kota sampai dengan tahun 2026 berjumlah 2 perpustakaan yang didukung dengan 530 taman dan sudut baca masyarakat, serta 931 lokasi perpustakaan keliling. Selain itu, terdapat 11 unit Perpustakaan Milik Non Pemda Kota Surabaya yang turut mendukung penyediaan layanan perpustakaan bagi masyarakat. Data yang tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.152
Jumlah Perpustakaan dan Layanan Baca serta Kunjungan Layanan Baca
Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Perpustakaan Umum	2	2	2	2	2
1.a	Jumlah taman dan sudut baca (unit)	537	519	530	530	530
1.b	Jumlah perpustakaan keliling (Lokasi)	153	147	172	287	931
2	Jumlah Perpustakaan Sekolah	816	814	1.168	1.058	1.213
3	Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda Kota Surabaya (unit)	65	65	65	65	11
Total Layanan Baca		1.573	1.547	1.937	1.942	2.155
4	Jumlah Pengunjung Layanan Baca	413.336	691.554	689.850	498.752	412.025

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2026

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perpustakaan di Kota Surabaya menunjukkan kondisi yang relatif stabil selama periode 2022–2025, baik Perpustakaan Umum milik Pemerintah Kota maupun Perpustakaan Milik Non Pemda Kota Surabaya. Mulai tahun 2026, pendataan perpustakaan pemerintah daerah disesuaikan dengan mekanisme pendataan berdasarkan kewilayahan yang berlaku pada Perpustakaan Nasional. Penyesuaian tersebut menyebabkan cakupan data tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga hasilnya tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan data periode 2022–2025. Selain itu, jumlah lokasi layanan perpustakaan keliling pada triwulan II Tahun 2026 meningkat secara signifikan dari 287 lokasi pada tahun 2025 menjadi 931 lokasi. Peningkatan tersebut disebabkan oleh perluasan jangkauan layanan yang didukung oleh operasional 9 unit perpustakaan keliling yang terdiri atas 4 mobil perpustakaan keliling, 1 sepeda perpustakaan keliling, dan 4 mobil sewa yang beroperasi secara mobile setiap hari sehingga mampu menjangkau lebih banyak lokasi layanan di berbagai wilayah Kota Surabaya. Meskipun demikian, keberadaan Perpustakaan Umum, taman dan sudut baca masyarakat, layanan perpustakaan keliling, serta Perpustakaan Milik Non Pemda Kota Surabaya tetap berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan, meningkatkan budaya literasi, dan mendukung terwujudnya masyarakat yang gemar membaca.

Sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat Kota Surabaya, selain mengembangkan fasilitas perpustakaannya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya juga melakukan pembinaan serta sertifikasi pada tenaga perpustakaan di perpustakaan maupun TBM guna peningkatan kapasitas setiap tahunnya. Mulai tahun 2022 hingga 202 target tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya adalah

seluruhnya. Dari jumlah tenaga perpustakaan yang terus meningkat diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan pelayanan perpustakaan.

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Surabaya di bidang perpustakaan berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025–2029 adalah tingkat kegemaran membaca masyarakat. Dukungan terhadap peningkatan budaya literasi dilakukan melalui penyediaan koleksi perpustakaan yang memadai serta penyelenggaraan berbagai kegiatan literasi. Selain didukung oleh koleksi buku, kualitas layanan perpustakaan juga ditunjang oleh ketersediaan pustakawan.

Jumlah pustakawan tercatat sebanyak 4 orang pada tahun 2022 dan 2023, kemudian meningkat menjadi 24 orang pada tahun 2024. Pada tahun 2025 jumlah pustakawan menjadi 23 orang atau berkurang 1 orang dibandingkan tahun sebelumnya karena terdapat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak memperpanjang kontraknya. Hingga Triwulan II Tahun 2026 jumlah pustakawan tetap sebanyak 23 orang. Meskipun mengalami sedikit penurunan, jumlah pustakawan yang tersedia tetap mendukung penyelenggaraan layanan perpustakaan, pendampingan kegiatan literasi, serta pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah koleksi buku relatif stabil, yaitu sebanyak 541.781 eksemplar pada tahun 2022–2023 dan meningkat menjadi 570.317 eksemplar pada tahun 2026 hingga Triwulan II. Sementara itu, jumlah pengunjung layanan baca per bulan menunjukkan fluktuasi, dari 87.515 orang pada tahun 2022, menurun menjadi 73.690 orang pada tahun 2023, kemudian meningkat kembali menjadi 80.138 orang pada tahun 2024. Hingga Triwulan II tahun 2026, jumlah pengunjung tercatat sebanyak 68.670 orang per bulan, lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya karena data yang tersedia masih bersifat akumulatif hingga Triwulan II. Selain dipengaruhi oleh periode pengukuran, fluktuasi jumlah pengunjung juga dipengaruhi oleh perubahan pola perilaku masyarakat dalam mengakses informasi, meningkatnya pemanfaatan layanan digital, serta variasi intensitas kegiatan literasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Meskipun demikian, ketersediaan koleksi yang terus terjaga dan pengembangan layanan literasi diharapkan dapat terus meningkatkan minat baca masyarakat serta memperluas akses terhadap sumber informasi dan pengetahuan.

Tabel II.153
Perkembangan Koleksi, Pustakawan, dan Pengunjung Perpustakaan di Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Pustakawan	4	4	24	23	23
Jumlah koleksi buku (eksemplar)	541.781	541.781	543.281	543.281	570.317

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah pengunjung layanan baca per bulan (orang)	87.515	73.690	80.138	60.259	68.670

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2026

Mengacu pada sasaran pembangunan Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025–2029, peningkatan kualitas pembangunan manusia salah satunya dilakukan melalui penguatan minat baca masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya mendorong pengembangan minat dan budaya baca melalui peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan literasi, seperti Bercerita Surabaya, Lomba Bertutur atau Mendongeng bagi siswa SD/MI, bedah buku, festival budaya pustaka, dan pameran buku. Keberhasilan layanan perpustakaan sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, prosedur, ketersediaan koleksi, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Berdasarkan hasil survei Bidang Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025, nilai pelayanan mencapai 98,05. Survei tersebut dilaksanakan secara langsung kepada responden melalui pengisian kuesioner daring.

Pengembangan layanan perpustakaan dan kegiatan literasi turut mendukung peningkatan budaya baca masyarakat yang tercermin dalam Nilai Tingkat Kegemaran Membaca. Indikator ini menjadi ukuran penting untuk menilai efektivitas layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi, akses informasi, dan kualitas sumber belajar. Melalui pengukuran tersebut, Pemerintah Kota Surabaya dapat mengevaluasi program perpustakaan serta merumuskan strategi peningkatan literasi masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel II.154
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca di Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)	N/A	68,45	80,30	84,80	79,42

Sumber: Perpustakaan Nasional RI, 2026

Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Peningkatan capaian ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah kota dalam memperkuat layanan perpustakaan, memperluas akses koleksi buku, serta melaksanakan berbagai kegiatan literasi yang mendorong minat baca masyarakat dari berbagai kalangan. Penurunan nilai TKM pada tahun 2025 disebabkan perbedaan instrumen dan metode perhitungan. Di tahun 2025, TKM dinilai dengan menggunakan instrumen dan metodologi baru sesuai ketentuan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025. Meski menurun, Nilai TKM Kota Surabaya tahun 2025 ini mendapat predikat sebagai yang tertinggi di Indonesia. Ini menunjukkan efektivitas strategi peningkatan

literasi yang terintegrasi, sekaligus menegaskan komitmen Kota Surabaya dalam membangun budaya membaca sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan terhadap pembangunan pengetahuan berbasis masyarakat.

2.1.3.2.17 Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT.

Kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Kearsipan salah satunya diukur dari ketertiban Perangkat Daerah terhadap sistem tata kearsipan. Perangkat Daerah diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (*Filing Cabinet*, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

Data Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.155
Perkembangan Capaian Ketertiban Sistem Tata Kearsipan dan Ketersediaan Arsiparis di Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	78	70	70	69	68
2.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	78	70	70	69	68
3.	Persentase Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan (%)	100	100	100	100	100
4.	Jumlah Arsiparis	6	6	57	56	58

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2026

Persentase Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD, dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan mencapai 100% selama periode 2022–2025. Seluruh instansi yang mendapatkan pendampingan pada periode tersebut telah memenuhi ketentuan sistem tata kearsipan, dengan jumlah instansi yang didampingi

sebanyak 78 pada tahun 2022, 70 pada tahun 2023 dan 2024, serta 69 pada tahun 2025. Sementara itu, hingga Triwulan II tahun 2026 tercatat sebanyak 68 instansi yang menjadi sasaran pendampingan dan proses pembinaan masih berlangsung, sehingga capaian pada tahun 2026 bersifat sementara dan akan bertambah seiring pelaksanaan pendampingan pada triwulan berikutnya. Kondisi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga tertib administrasi kearsipan melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Selain itu, jumlah arsiparis menunjukkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan. Pada tahun 2022 dan 2023 terdapat 6 arsiparis, kemudian meningkat signifikan menjadi 57 arsiparis pada tahun 2024. Pada tahun 2025 jumlah arsiparis menjadi 56 orang, atau berkurang 1 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang memasuki masa pensiun. Selanjutnya, hingga Triwulan II Tahun 2026 jumlah arsiparis kembali meningkat menjadi 58 orang. Ketersediaan arsiparis yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan arsip di setiap perangkat daerah. Dengan jumlah arsiparis yang cukup, dokumen pemerintah dapat disimpan, dikelola, dan ditemukan kembali dengan lebih mudah sehingga pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik.

Dalam rangka menjamin keselamatan, keutuhan, dan keberlanjutan memori kolektif daerah, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan penyelamatan serta pelestarian arsip statis melalui kegiatan akuisisi, pengolahan, dan preservasi arsip. Akuisisi arsip statis merupakan proses penambahan khazanah arsip statis melalui penyerahan arsip beserta hak pengelolaannya dari Perangkat Daerah sebagai pencipta arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, pertanggungjawaban, serta nilai informasi jangka panjang tetap terpelihara dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi, bukti akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta warisan dokumenter daerah.

Tabel II.156
Arsip Statis yang Telah Dilakukan Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi
Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah arsip statis yang diakuisisi, pengolahan dan preservasi (arsip)	13.390	14.025	16.443	17.197	17.739
Total jumlah arsip statis	78.794	78.794	78.794	78.794	78.794

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya, 2026

Berdasarkan Tabel II.153, jumlah arsip statis yang telah diakuisisi, diolah, dan dipreservasi menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode Tahun 2022 hingga Triwulan II Tahun 2026. Pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 13.390 arsip, meningkat menjadi 14.025 arsip pada Tahun 2023, kemudian mencapai 16.443 arsip pada Tahun 2024, meningkat kembali menjadi 17.197 arsip pada Tahun 2025, dan hingga Triwulan II Tahun 2026 telah mencapai 17.739 arsip. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam memperkuat tata kelola kearsipan melalui penyelamatan arsip-arsip yang memiliki nilai permanen agar tetap terjaga keaslian, keamanan, dan aksesibilitasnya. Sementara itu, total khazanah arsip statis yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya tetap sebanyak 78.794 arsip selama periode tersebut, yang menjadi aset informasi dan memori kolektif daerah yang harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

2.1.3.3 Urusan Pilihan Pemerintahan

Analisis gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan kelautan dan perikanan di Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.157
Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah produksi perikanan tangkap	8.057,49	8.295,33	8.526,00	9.142,4	4.460,01
2.	Jumlah produksi perikanan budidaya	9.349,56	9.508,29	9.976,24	9.979,5	4.696,16
Jumlah		**17.407,05**	**17.803,62**	**18.502,24**	**19.121,9**	**9.156,16**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2026

Tabel di atas dapat menunjukkan perkembangan produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya, di Kota Surabaya selama periode tahun 2022 hingga tahun 2025 yang secara umum mengalami tren peningkatan. Total produksi perikanan meningkat dari 17.407,05 ton pada tahun 2022, menjadi sebesar 17.803,62 ton di tahun 2023. Peningkatan berlanjut pada tahun 2024 menjadi sebesar 18.502,24 ton, hingga mencapai 19.121,9 ton pada tahun 2025. Sementara itu, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, total produksi perikanan tercatat sebesar 9.156,16 ton yang terdiri atas produksi perikanan tangkap sebesar 4.460,01 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 4.696,16 ton. Hal ini dikarenakan adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam budidaya perikanan melalui pelatihan, fasilitasi sarana, dan pemasaran bagi pembudidaya ikan.

Di sektor perikanan tangkap, selain bergantung kepada kondisi cuaca, hasil tangkapan nelayan juga dipengaruhi oleh kondisi peralatan tangkap yang digunakan oleh nelayan. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk memenuhi sarana perikanan tangkap yang dibutuhkan oleh nelayan, mulai dari perahu, mesin perahu, alat tangkap serta alat pendukung lainnya seperti papan seluncur lumpur, tali, serta senter. Apabila cuaca tidak memungkinkan untuk melaut, nelayan juga diberikan keterampilan untuk pengolahan hasil laut yang dapat dijadikan produk turunan dari hasil tangkapan. Di sektor perikanan budidaya selain bantuan sarana dan prasarana, pembudiya perikanan juga rutin dibekali dengan pelatihan terkait penerapan teknologi tepat guna, agar hasil budidaya dapat maksimal. Masing-masing pembudidaya juga rutin mendapatkan pendampingan oleh penyuluh. Selain itu, Pemerintah Kota juga memfasilitasi pemasaran produk nelayan melalui ePeken.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Pada tahun 2022, kunjungan wisatawan sebanyak 14.237.215 kunjungan dengan perincian sebanyak 565.998 kunjungan wisatawan mancanegara dan sebanyak 13.671.217 kunjungan wisatawan nusantara. Sedangkan pada tahun 2023, kunjungan wisatawan sebanyak 17.425.476 kunjungan dengan perincian sebanyak 1.285.905 kunjungan wisatawan mancanegara dan sebanyak 16.139.571 kunjungan wisatawan nusantara. Peningkatan kunjungan wisatawan juga terjadi pada tahun 2024, dengan total 21.004.639 kunjungan wisatawan, yang terdiri atas 1.996.287 kunjungan wisatawan mancanegara dan 19.008.352 kunjungan wisatawan nusantara ke Kota Surabaya. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025 dengan total kunjungan wisatawan mencapai 25.658.589 kunjungan, yang terdiri atas 3.099.236 kunjungan wisatawan mancanegara dan 22.559.353 kunjungan wisatawan nusantara. Hingga Triwulan II Tahun 2026, jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 3.296.689 kunjungan, yang terdiri atas 19.019 kunjungan wisatawan mancanegara dan 3.277.670 kunjungan wisatawan nusantara. Data tersebut merupakan capaian sampai dengan Triwulan II sehingga belum dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahunan pada periode sebelumnya. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian Kota Surabaya serta menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Capaian jumlah kunjungan wisatawan pada periode tahun 2022–2025 merupakan akumulasi data yang dihimpun dari berbagai pintu masuk dan sumber informasi, meliputi Bandara Internasional Juanda, hotel dan penginapan, kunjungan kenegaraan, Pelabuhan Tanjung Perak, stasiun Kereta Api Indonesia (KAI), serta data dari *travel agent*. Sementara itu, hingga Triwulan II Tahun 2026, penghitungan jumlah kunjungan wisatawan hanya didasarkan pada data kunjungan yang tercatat pada Objek Daya Tarik Wisata (ODTW). Dengan demikian, terdapat perbedaan cakupan sumber data dan metode penghitungan antara periode tahun 2022–2025 dengan Triwulan II Tahun 2026, sehingga hasilnya tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Selain meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Surabaya juga menunjukkan kondisi yang relatif stabil, yaitu sebesar 1,46 hari pada tahun 2022, 1,48 hari pada tahun 2023, 1,47 hari pada tahun 2024, dan 1,49 hari pada tahun 2025. Lama tinggal tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik kunjungan wisata di Surabaya didominasi oleh wisata jangka pendek (short trip) selama satu hingga dua malam. Kondisi ini selaras dengan pengakuan Agoda yang menempatkan Surabaya sebagai salah satu destinasi terbaik di Asia untuk *short stay* atau *short getaway*, didukung oleh keberagaman destinasi wisata, wisata kuliner, kawasan heritage, serta penyelenggaraan berbagai event sepanjang tahun. Pengakuan tersebut semakin memperkuat posisi Surabaya sebagai destinasi wisata perkotaan yang ideal untuk perjalanan singkat sekaligus menjadi peluang bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas atraksi wisata sehingga dapat mendorong peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan di masa mendatang. Berikut tabel mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara serta rata-rata lama tinggal di Kota Surabaya. Berikut tabel mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.

Tabel II.158
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2021–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026*
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	565.998	1.285.905	1.996.287	3.099.236	19.019
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	13.671.217	16.139.571	19.008.352	22.559.353	3.277.670
Jumlah		**14.237.215**	**17.425.476**	**21.004.639**	**25.658.589**	**3.296.689**
Rata-rata Lama Tinggal		**1,46 hari**	**1,48 hari**	**1,47 hari**	**1,49 hari**	**N/A**

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, diolah, 2026.
**)Data kunjungan wisatawan pada tahun 2026 hanya bersumber dari Objek Daya Tarik Wisata karena data kunjungan hanya diperoleh di akhir tahun.*

Pariwisata merupakan integral pembangunan yang semakin dipertimbangkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Pengaruh pembangunan pariwisata terhadap perkembangan regional, terutama peningkatan percepatan pembangunan dan perekonomian wilayah cukup besar. Hal ini menyebabkan pembangunan pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas, khususnya di Surabaya.

Tabel II.159
Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026*
Jumlah ODTW yang berhasil dikembangkan	5	6	7	8	8

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, 2026

Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) sejak tahun 2021 mengalami penyesuaian makna, dari semula sebatas penambahan wahana baru menjadi peningkatan kualitas destinasi sesuai standar Sapta Pesona. Pada tahun 2021, terdapat 2 destinasi yang dikembangkan, yaitu Kampung Lawas Maspati dan Kawasan Tunjungan atau Tunjungan Romansa. Tahun 2022 bertambah 3 destinasi, yaitu Kota Lama Pecinan, Kampung Pecinan WKP, dan THP Kenjeran. Selanjutnya, pada tahun 2023 dikembangkan Wisata Perahu Kalimas, tahun 2024 Kampung Wethan Wonderland, dan pada tahun 2025 jumlah destinasi yang memenuhi standar Sapta Pesona meningkat menjadi 8 destinasi. Perluasan dan peningkatan kualitas destinasi ini turut menjaga daya tarik Surabaya bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2025, pajak hotel mencapai Rp359.648.681.742 atau 4,9% dari total PAD, pajak restoran sebesar Rp737.645.271.664 atau 10,05%, dan pajak hiburan sebesar Rp91.455.716.218 atau 1,25%. Secara keseluruhan, ketiga jenis pajak tersebut berkontribusi sebesar 16,20% terhadap total PAD Kota Surabaya tahun 2025 sebesar Rp7.336.473.180.444.

Pengembangan pariwisata juga didukung oleh sinergi dan kolaborasi antar *stakeholder*, baik pemerintah, pelaku usaha, komunitas, maupun masyarakat. Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam pengembangan destinasi, peningkatan kualitas layanan wisata, serta penguatan pariwisata yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Perkembangan kesepakatan *stakeholder* di bidang pariwisata Kota Surabaya sampai dengan tahun 2026 Triwulan II disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.160
Jumlah Kesepakatan Dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Akumulasi jumlah kesepakatan dengan *stakeholder* bidang pariwisata yang dilaksanakan	14	22	34	34	43

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, 2026

Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga fokus untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif di Kota Surabaya. Terdapat beberapa program kegiatan yang disiapkan untuk mewujudkan hal tersebut di antaranya pendampingan, fasilitasi kerjasama, fasilitasi sarana dan prasarana, branding dan promosi serta penyediaan ruang-ruang kreatif yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat Kota Surabaya seperti di Balai Pemuda, *coworking space* (koridor siola) serta di ruang-ruang terbuka kota yang tersebar di seluruh wilayah. *Event-event* pertunjukan hasil produk ekonomi kreatif juga rutin dilaksanakan untuk membantu branding dan promosi produk. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada, pada tahap awal Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan subsektor Film, Animasi, Video, Musik, *Fashion* serta Aplikasi untuk dikembangkan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga membantu memfasilitasi pelaku usaha kreatif untuk berkembang melalui kerja sama antar pihak baik itu pemerintah maupun swasta. Terdapat beberapa kesepakatan di Bidang Pariwisata yang berhasil dilaksanakan, tentunya kerjasama ini sangat berdampak bagi pelaku usaha kreatif.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan reaktivasi eks pusat perbelanjaan teknologi menjadi Surabaya Creative Hub, yang berlokasi di kawasan bekas Hi-Tech Mall Surabaya. Transformasi ini merupakan langkah strategis dalam menghidupkan kembali aset kota menjadi pusat aktivitas kreatif yang produktif dan inklusif. Surabaya Creative Hub dirancang sebagai ruang bersama (creative space) yang mewadahi komunitas, startup, pelaku UMKM kreatif, hingga subsektor berbasis digital untuk berkreasi, berjejaring, dan mengembangkan usaha. Kehadirannya menjadi simbol perubahan orientasi pembangunan kota—dari sekadar ruang komersial menjadi ruang kolaborasi dan inovasi.

Event pertunjukan dan pameran produk ekonomi kreatif juga rutin diselenggarakan sebagai media promosi sekaligus validasi pasar bagi karya anak-anak muda Surabaya. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif nasional, pada tahap awal Pemerintah Kota Surabaya memprioritaskan pengembangan subsektor Film, Animasi, Video, Musik, Fashion, serta Aplikasi. Pemilihan subsektor ini mempertimbangkan potensi talenta lokal, perkembangan industri digital, serta peluang pasar yang terus tumbuh. Dukungan tidak

hanya diberikan dalam bentuk fasilitas fisik, tetapi juga akses jejaring, *business matching*, hingga kolaborasi dengan sektor pariwisata.

Tabel II.1618
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Surabaya per Subsektor
Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026*
Subsektor Aplikasi	N/A	N/A	108	113	113
Subsektor IOT	N/A	N/A	58	62	62
Subsektor Desain Komunikasi Visual	N/A	N/A	6	6	6
Subsektor Desain Produk	N/A	N/A	5	5	5
Subsektor Fashion	N/A	N/A	394	411	411
Subsektor Film, Animasi dan Video	N/A	N/A	61	64	64
Subsektor Fotografi	N/A	N/A	4	4	4
Subsektor Game	N/A	N/A	11	12	12
Subsektor Kriya	N/A	N/A	257	269	269
Subsektor Kuliner	N/A	N/A	556	581	581
Subsektor Musik	N/A	N/A	229	241	241
Subsektor Seni Pertunjukan	N/A	N/A	309	324	324
Subsektor Seni Rupa	N/A	N/A	7	8	8
Jumlah Pelaku Kreatif	**N/A**	**N/A**	**1.872**	**1936**	**1936**

*Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata, 2026 *) data TW I*

Perkembangan ekonomi kreatif di Kota Surabaya terus menunjukkan arah yang positif seiring dengan meningkatnya perhatian Pemerintah Kota terhadap penguatan ekosistem ekonomi kreatif. Berdasarkan hasil pendataan, pada tahun 2024 terdapat 1.936 pelaku ekonomi kreatif yang tersebar pada 13 subsektor prioritas. Subsektor kuliner menjadi subsektor dengan jumlah pelaku terbanyak sebanyak 581 pelaku, diikuti subsektor fashion sebanyak 411 pelaku, seni pertunjukan sebanyak 324 pelaku, kriya sebanyak 269 pelaku, dan musik sebanyak 241 pelaku. Sementara itu, subsektor lain seperti aplikasi, film animasi dan video, IoT, game, desain komunikasi visual, desain produk, seni rupa, dan fotografi memiliki jumlah pelaku yang lebih sedikit namun tetap menunjukkan potensi untuk terus dikembangkan.

Komposisi tersebut menggambarkan bahwa ekonomi kreatif Kota Surabaya masih didominasi oleh subsektor yang berbasis budaya, gaya hidup, serta industri pendukung pariwisata. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung pengembangan Surabaya sebagai Kota Kreatif, sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta pengembangan inovasi dan kewirausahaan. Pemerintah Kota Surabaya juga aktif memfasilitasi kerja sama antara pelaku usaha kreatif dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun sektor swasta. Sejumlah kesepakatan di bidang pariwisata telah berhasil dilaksanakan dan memberikan dampak positif terhadap perluasan pasar serta

peningkatan nilai tambah produk kreatif lokal. Sinergi ini memperkuat posisi ekonomi kreatif sebagai motor penggerak ekonomi baru yang berbasis ide, kreativitas, dan inovasi.

2.1.3.3.3 Pertanian

Meskipun sektor pertanian bukan merupakan sektor utama pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, keberadaannya tetap memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, pemanfaatan lahan produktif, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perkotaan. Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari produktivitas dan hasil produksi pertanian, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.162
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	6.156,69	7.150,88	7.387,50	8.697,96	3.653,52
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	955,15	1.090,74	1.099,30	1.293,83	583,90
3.	Produktivitas (ton/ha)	6,45	6,56	6,72	6,72	6,26

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2026.

Sedangkan jumlah produksi padi dan bahan pangan utama lainnya di Kota Surabaya dari tahun 2022–2026 sampai dengan triwulan II, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.163
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya
Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	8.156,78	7.150,88	7.387,50	8.697,96	3.653,52
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	154,95	158,35	281,65	426,68	279,31
3.	Jumlah Produksi Cabai (ton)	37,48	32,10	56,68	21,25	79,86
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	151,55	480,61	144,68	227,16	98,73
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	10.111,78	9.717,68	10.715,25	10.894,66	4095,21

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2026.

Berdasarkan tabel di atas, produksi pertanian menurut jenis komoditas, seperti padi, jagung, cabai, sayur, dan buah, menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2023, peningkatan produksi terjadi pada komoditas jagung dan sayur, sedangkan padi, cabai, dan buah mengalami penurunan. Sementara itu, pada tahun 2024 peningkatan produksi terjadi pada komoditas padi, jagung, cabai, dan buah. Untuk menjamin kualitas dan kesehatan hewan ternak, Pemerintah Kota Surabaya menyediakan layanan pengobatan bagi hewan ternak. Selain itu, dalam rangka

meningkatkan mutu dan keamanan produk daging halal, Rumah Potong Hewan Pegirian telah memperoleh sertifikat halal. Pada tahun 2024, juga telah dibangun rumah potong hewan baru khusus babi di Banjarsugihan, Kecamatan Tandes. Ke depan, rumah potong hewan untuk sapi direncanakan dipindahkan ke kawasan Tambak Osowilangun dengan lahan yang lebih luas dan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang lebih lengkap. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan keamanan produk, sekaligus mendorong peningkatan omzet PD Rumah Potong Hewan Surabaya. Data intervensi pengobatan dan vaksinasi hewan ternak disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.164
Intervensi Hewan Ternak Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah ternak (ekor)	21.753	16.381	16.125	27.146	3.845
Jumlah ternak diintervensi (ekor)	19.509	14.666	14.606	24.670	3.504
Persentase ternak yang diintervensi (%)	89,68	89,53	90,58	90,88	91,13

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2026

Tabel di atas menunjukkan perkembangan intervensi terhadap hewan ternak di Kota Surabaya pada periode Tahun 2022–2026 (Triwulan II). Secara umum, cakupan hewan ternak yang diintervensi menunjukkan tren peningkatan, meskipun jumlah populasi ternak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2025, persentase ternak yang diintervensi mencapai 91,12%, sedangkan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 meningkat menjadi 91,13%, dengan jumlah ternak yang diintervensi sebanyak 3.504 ekor dari total populasi ternak sebanyak 3.845 ekor. Hal ini menunjukkan semakin optimalnya pelayanan kesehatan hewan dan pengendalian penyakit ternak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Secara keseluruhan, meskipun jumlah populasi ternak mengalami penurunan pada beberapa tahun, cakupan intervensi terhadap ternak di Kota Surabaya semakin optimal, yang tercermin dari meningkatnya persentase ternak yang diintervensi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas program pelayanan dan pengendalian kesehatan hewan yang dilakukan.

Di Kota Surabaya, kontribusi sektor pertanian dan peternakan memang relatif kecil, namun demikian sektor ini berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan penduduk dan menyediakan bahan baku bagi industri pengolahan makanan di Kota Surabaya, sehingga di masa mendatang tetap dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk memajukan sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi *urban farming*, penguatan kelembagaan pertanian, serta pengembangan investasi industri pengolahan hasil pertanian.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari 26%, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.165
Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No	Jenis Pasar Modern	2022	2023	2024	2025	2026
1	Toko Swalayan	679	679	762	1.054	1.054
2	Mall/Plaza	38	38	37	37	37
Total		**701**	**701**	**629**	**1.091**	**1.091**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, 2026

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu diimbangi dengan upaya pengendalian agar tetap menjaga keberlangsungan pasar tradisional dan usaha mikro kecil. Kehadiran pasar modern diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing UMKM melalui perluasan akses pasar dan penguatan kemitraan usaha. Pada tahun 2025 jumlah pasar modern tercatat sebanyak 1.091 unit yang terdiri atas 1.054 toko swalayan dan 37 mal/plaza. Peningkatan jumlah toko swalayan tersebut dipengaruhi oleh ekspansi usaha ritel modern melalui pola waralaba dan kemitraan yang semakin mendekatkan layanan perdagangan ke kawasan permukiman. Hingga Triwulan II Tahun 2026 jumlah pasar modern relatif stabil, menunjukkan bahwa sektor perdagangan modern masih menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi masyarakat Kota Surabaya.

Selain didukung oleh perkembangan pasar modern, aktivitas perdagangan di Kota Surabaya juga ditunjang oleh keberadaan pasar tradisional yang dikelola oleh PT Pasar Surya (Perseroda). Hingga tahun 2026 jumlah pasar yang dikelola tercatat sebanyak 67 pasar yang tersebar di wilayah selatan, timur, dan utara Kota Surabaya. Keberadaan pasar tradisional tersebut memiliki peran penting dalam menjaga distribusi barang kebutuhan pokok, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro dan pedagang tradisional.

Tabel II.166
Jumlah Pasar PT Pasar Surya (Perseroda) Tahun 2022–2026 (TW II)

Wilayah	2022	2023	2024	2025	2026
Selatan	17	17	17	17	17
Timur	22	22	22	22	22
Utara	28	28	28	28	28
Total	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**

Sumber: Sekretariat Daerah, 2026

Pada tahun 2025, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya mengalami transformasi kelembagaan menjadi PT Pasar Surya (Perseroda). Perubahan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Surya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pasar Surya. Transformasi ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Surabaya dalam memperkuat tata kelola perusahaan daerah agar lebih profesional, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan serta pengembangan sektor perdagangan dan perekonomian daerah.

Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, salah satunya adanya perubahan tugas dan fungsi pada Rumah Potong Hewan (RPH) yang sebelumnya hanya menyediakan jasa pemotongan, kini juga melakukan penjualan daging hasil pemotongan. Selain itu, perubahan bentuk hukum ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan usaha, memperluas peluang ekspansi bisnis, serta memperkuat daya saing perusahaan dalam mendukung pelayanan dan perekonomian daerah.

Seiring dengan berkembangnya aktivitas perdagangan dan industri di Kota Surabaya, jumlah usaha yang memiliki izin berlaku di Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 899 usaha berizin yang terdiri atas 691 usaha perdagangan dan 208 usaha industri. Jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai 96.163 usaha pada tahun 2024 yang terdiri atas 56.643 usaha perdagangan dan 39.520 usaha industri. Namun demikian, pada tahun 2025 jumlah usaha berizin tercatat sebanyak 67.900 usaha yang terdiri atas 48.790 usaha perdagangan dan 19.110 usaha industri. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan dan industri masih menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi di Kota Surabaya. Secara rinci jumlah usaha berdasarkan izin yang berlaku dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.167
Usaha Berdasarkan Izin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No	Jenis Perusahaan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Perdagangan	691	1.054	56.201	56.643	48.790
2	Industri	208	356	25.476	39.520	19.110
Total		**899**	**1.410**	**81.677**	**96.163**	**67.900**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2026

Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/*city logistic*.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

2.1.3.4.1.1 Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.168
Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	A	A	AA	AA
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	75,34	80,31	83,92	90,24	91,83

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2026

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, Pemerintah Kota Surabaya selalu mendapatkan predikat kinerja tingkat BB. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan predikat kinerja tingkat A. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mendapatkan predikat kinerja tingkat AA dan terus dipertahankan di tahun 2025 dengan nilai evaluasi SAKIP yang meningkat. Peningkatan ini diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Walikota dan Kepala Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses penyusunan rencana kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi. Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Wali kota maupun surat keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 hingga tahun 2025 Pemerintah Kota Surabaya menjalankan ketatalaksanaan pelaksanaan pemerintahan dengan berpedoman pada adanya *standard operational procedure* (SOP) pada setiap jenis pelayanan. Pada tahun 2021 sebanyak 361 jenis pelayanan, dan 215 jenis pelayanan atau 59,56 persen telah memiliki *standard operational procedure* (SOP). Kemudian pada tahun 2025 terdapat sebanyak 215 jenis pelayanan dan 150 jenis pelayanan atau 60,93 persen telah memiliki *standard operational procedure* (SOP).

Tabel II.169
Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2022 – 2026 (TW II)

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah jenis pelayanan	215	215	215	215	215
2.	Jumlah jenis pelayanan yang memiliki SOP	131	143	150	150	150
3.	Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP (%)	60,93	66,51	69,77	69,77	69,77

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2026

Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan dari 906 SOP pada tahun 2021 menjadi 2.187 SOP pada tahun 2025. Seiring dengan bertambahnya jumlah SOP, pelaksanaan evaluasi SOP juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021, sebanyak 68 SOP telah dievaluasi, kemudian meningkat menjadi 123 SOP pada tahun 2022 dan 556 SOP pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 sebanyak 550 SOP dievaluasi, serta meningkat kembali menjadi 610 SOP pada tahun 2025. Evaluasi SOP dilakukan sebagai upaya untuk memastikan efektivitas, kesesuaian proses kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus melakukan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penyelesaian rancangan produk hukum dan evaluasi terhadap produk hukum yang sudah ada. Produk hukum baru yang diselesaikan tiap tahunnya mencapai 100% terhadap rancangan produk hukum di tahun tersebut. Jumlah keseluruhan produk hukum baru yang bisa diselesaikan pada tahun 2022 hingga tahun 2026 (TW II) selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.170
Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah rancangan produk hukum	155	30	67	60	30
2.	Jumlah rancangan produk hukum yang diselesaikan	155	30	67	60	30
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2026

Selain itu, pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi hal yang penting dalam rangka mendukung pelayanan pada masyarakat sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Rekap kinerja BUMD Kota Surabaya sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.171
Rekap Hasil Audit Kinerja BUMD Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Nama BUMD	2021	2022	2023	2024	2025
Perumda Air Minum Surya Sembada	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
PT Pasar Surya (Perseroda)	WDP	WDP	WDP	N/A	WDP

Nama BUMD	2021	2022	2023	2024	2025
PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya	WTP	WTP	WTP	TMP	WTP
PT Rumah Potong Hewan Surabaya Perseroda	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
PT BPR Surya Artha Utama Perseroda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
PT Yekape Surabaya Perseroda	-	-	-	WTP	WTP

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2026

Dari data di atas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa BUMD milik Pemerintah Kota Surabaya yang kinerjanya belum maksimal. Beberapa BUMD yang telah memiiki kinerja baik yang ditunjukkan dengan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2025 antara lain Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, PD Taman Satwa KBS, PT Bank SAU (Surya Artha Utama) dan PT Yekape.

2.1.3.4.1.2 Pelayanan Publik

Keberhasilan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah diukur dari Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Indeks Pelayanan Publik menggambarkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dari sisi tata kelola, kebijakan, sarana prasarana, inovasi, serta sistem pelayanan yang dimiliki pemerintah daerah. Sementara itu, Hasil Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima secara langsung, meliputi aspek kemudahan prosedur, kecepatan pelayanan, sikap petugas, hingga kenyamanan layanan. Kedua indikator tersebut menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pelayanan publik serta komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik. Indeks ini penting sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan responsif kepada masyarakat. Adapun capaian indeks pelayanan publik Kota Surabaya sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.172
Capaian Indeks Pelayanan Publik Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pelayanan Publik	4,23	4,56	4,53	4,57	4,84

Sumber : Sekretariat Daerah, 2026

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kota Surabaya selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat, yaitu dari 4,23 pada tahun 2021 menjadi 4,56

pada tahun 2022, kemudian berada pada angka 4,53 pada tahun 2023, meningkat kembali menjadi 4,57 pada tahun 2024, dan mencapai 4,84 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan tata kelola pelayanan, pengembangan inovasi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kualitas sarana dan kompetensi aparatur guna mewujudkan pelayanan yang semakin prima bagi masyarakat.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.173
Survei Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata nilai SKM Pelayanan	88,37	90,76	95,82	97,21	98,43

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2026

Pelaksanaan *survey* kepuasan masyarakat telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada unit penyelenggara pelayanan adalah unit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (31 Kecamatan, 153 Kelurahan, 63 Puskesmas, 2 Rumah Sakit Umum Daerah, PTSP Surabaya Timur, PTSP Surabaya Pusat (Siola), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Laboratorium Kesehatan Daerah). Rata-rata nilai SKM sepanjang tahun 2025, mayoritas berada di atas nilai 90, yakni “Sangat Baik”. Meski demikian, nilai tersebut selalu naik dan turun setiap tahunnya. Artinya, masih dibutuhkan usaha yang lebih inovatif lagi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya dapat mencapai kategori “Sangat Baik”.

2.1.3.4.1.3 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan

kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

Pada tahun 2026 Triwulan II terdapat 9 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut sebanyak 9 MoU atau 100% terealisasi dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 6 MoU dan keseluruhan 6 MoU memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya

Tabel II.174
MoU Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga Tahun 2024–2026 (TW II)

No.	Uraian	2024	2025	2026
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	20	20	9
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga keseluruhan	20	20	9
3.	Persentase bidang MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2026

Tabel II.175
MoU Kerjasama Luar Negeri Tahun 2023–2026 (TW II)

No.	Uraian	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	11	12	3	6
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama luar negeri keseluruhan	11	12	3	6
3.	Persentase bidang MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2026

Dari beberapa Kerjasama tersebut, setiap tahunnya dilakukan evaluasi. Data jumlah kerjasama yg dievaluasi bisa dilihat di tabel berikut.

Tabel II.176
MoU Kerjasama Kota Surabaya yang Dievaluasi Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah kerjasama dievaluasi	36	31	31	32	15

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2026

2.1.3.4.1.4 Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Di samping menjalankan bisnis secara profesional, BUMD juga dituntut untuk dapat berkontribusi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan Pemerintah Kota Surabaya. Beberapa BUMD yang berkontribusi pada tahun 2021 – 2025, yakni:

1. Perumda Air Minum Surya Sembada memberikan kontribusi *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar Rp2.648.189.990 yang diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan dasar masyarakat, bantuan penyediaan

sarana air bersih dan sanitasi, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta dukungan terhadap program lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

2. PT BPR Surya Artha Utama Perseroda memberikan kontribusi CSR sebesar Rp193.558.000 yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial masyarakat, bantuan sarana pendukung lingkungan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial.
3. PT Yekape Surabaya Perseroda memberikan kontribusi CSR sebesar Rp1.062.872.800 yang diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan lingkungan permukiman, bantuan sarana prasarana umum, serta dukungan terhadap kegiatan pendidikan dan sosial masyarakat.
4. PT SIER memberikan kontribusi CSR sebesar Rp1.346.407.417 dalam bentuk dukungan pengembangan ekonomi masyarakat, pembinaan UMKM, bantuan lingkungan, peningkatan kualitas infrastruktur kawasan, serta kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Secara keseluruhan, kontribusi CSR Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya tersebut menjadi salah satu bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan pelayanan publik secara berkelanjutan.

2.1.3.4.2 Sekretariat DRPD

Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD merupakan indikator untuk mengukur kualitas layanan Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Layanan tersebut mencakup dukungan administrasi persidangan, fasilitasi rapat dan kegiatan kedewanan, penyediaan dokumen dan informasi, pelayanan keuangan, keprotokolan, serta dukungan sarana dan prasarana.

Indikator ini penting karena Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan administrasi dan fasilitasi kepada pimpinan dan anggota DPRD. Kualitas layanan yang baik akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas DPRD, memperkuat koordinasi legislatif dan eksekutif, serta mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. Dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, indikator ini merupakan indikator baru yang mulai digunakan sebagai instrumen pengukuran kinerja pelayanan internal kepada pemangku kepentingan utama Sekretariat DPRD. Berdasarkan data eksisting tahun 2025, tingkat kepuasan anggota DPRD

terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Surabaya mencapai 80%. Capaian ini menjadi baseline untuk mengukur peningkatan kualitas pelayanan pada tahun-tahun berikutnya. Ke depan, peningkatan capaian indikator dilakukan melalui perbaikan kualitas layanan administrasi dan fasilitasi kedewanan, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kapasitas aparatur, peningkatan koordinasi, serta penyediaan informasi yang lebih cepat dan akurat. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang semakin efektif, efisien, akuntabel, dan mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas DPRD.

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.5.1 Perencanaan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya Tahun 2025-2045 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024. Sedangkan untuk RPJMD, pada tahun 2025, telah disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2025-2029) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025. Dengan demikian, Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.177
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2022–2026

No.	Jenis Dokumen	2022	2023	2024	2025	2026
1	RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah.

Jumlah program pembangunan pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 adalah sebanyak 484 program.

Tabel II.178
Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2022–2026

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	123	123	123	123	148
2	Jumlah Program RKPD	124	124	124	124	148
3	Persentase penjabaran Program RPJMD dalam RKPD (%)	100*	100*	100*	100*	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2026
*Keterangan: *) Jumlah program sejak RKPD 2022-2025 menyesuaikan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020*

Penjabaran program RPJMD pada tabel di atas mengacu pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021–2026 untuk jumlah program pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Sedangkan jumlah program pada tahun 2026 telah disesuaikan dengan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025–2029. Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap penyesuaian arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD maupun program perangkat daerah. Penyesuaian dilakukan sebagai bentuk penyelarasan terhadap visi, misi, dan program kepala daerah pada periode pembangunan yang baru, sekaligus untuk menjawab dinamika dan tantangan pembangunan yang terus berkembang.

Selain itu, perubahan RPJMD juga berdampak pada penyesuaian target indikator kinerja daerah, sasaran pembangunan, tema pembangunan tahunan, hingga pengalokasian anggaran daerah agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah terbaru. Dengan demikian, kesinambungan

pembangunan daerah tetap terjaga meskipun terdapat perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program pembangunan Kota Surabaya pada periode 2022–2025 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan relatif stabil. Pada tahun 2022 capaian sebesar 99,21% meningkat menjadi 99,43% pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 99,04%. Selanjutnya, pada tahun 2025 capaian kembali meningkat menjadi 99,61%, yang menunjukkan perbaikan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Sementara itu capaian keberhasilan program pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2026 baru mencapai 49,51%.

Tabel II.179
Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Kota Surabaya
Tahun 2022–2026 (TW II)

Tahun	2022	2023	2024	2025	2026
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (%)	99,21	99,43	99,04	99,61	49,51

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2026

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Rata-rata penyerapan anggaran di tahun 2022 hingga 2025 cenderung fluktuatif menyesuaikan kebutuhan sehingga terdapat sisa lebih penggunaan anggaran.

Tabel II.180
Rata-rata Penyerapan Anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2022–2026 (TW II)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Rata-rata penyerapan anggaran kegiatan (%)	88,83	88,19	87,82	85,70	31,63

Sumber: Sekretariat Daerah, diolah, 2026

2.1.3.5.2 Keuangan

Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (IKPKD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Penilaian indeks ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, efektivitas belanja daerah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, kualitas pelaporan

keuangan, optimalisasi pendapatan daerah, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks ini penting karena menjadi gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik. Adapun capaian IKPKD Kota Surabaya sebagaimana berikut.

Tabel II.181
Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Struktur Pendapatan Daerah
Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	58,70	79,33	79,51	71,97	72,79
Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kontribusi PAD terhadap APBD (%)	54,69	55,27	59,13	59,70	69,53
Kontribusi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap APBD (%)	41,65	36,16	39,27	38,27	31,25

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, BPK RI, dan Badan Pendapatan Daerah, diolah, 2026

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, capaian Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (IKPKD) Kota Surabaya periode 2021–2025 menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang relatif baik. Nilai IKPKD yang dipublikasikan pada suatu tahun merupakan hasil evaluasi atas pengelolaan keuangan tahun sebelumnya. Nilai IKPKD Kota Surabaya tercatat sebesar 79,33 pada tahun 2021, meningkat menjadi 79,51 pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 71,97 pada tahun 2023 dan relatif stabil pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat menjadi 72,79 pada tahun 2025.

Meskipun belum kembali mencapai capaian tahun 2021–2022, peningkatan pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta penguatan sistem pengendalian internal dan pengawasan.

Upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah juga didukung oleh konsistensi Pemerintah Kota Surabaya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah, integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan, penerapan prinsip money follows program, serta penganggaran berbasis kinerja. Langkah ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran semakin berorientasi pada hasil dan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Selain itu, struktur pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang semakin baik. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD meningkat dari 59,70% pada

tahun 2024 menjadi 69,53% pada tahun 2025. Sebaliknya, kontribusi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menurun dari 38,27% menjadi 31,25% di tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kemandirian fiskal Kota Surabaya dan berkurangnya ketergantungan terhadap pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun sumber pendapatan lainnya.

2.1.3.5.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, diperlukan ASN yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berbasis prestasi kerja dan kompetensi. Faktor yang memengaruhi penyusunan pola karier PNS antara lain pendidikan formal, diklat, usia, masa kerja, golongan ruang, pangkat, tingkat jabatan, dan kompetensi. Pemerintah Kota Surabaya juga telah merumuskan sistem pengembangan pola karier pegawai yang saat ini dalam proses pengesahan menjadi peraturan kepala daerah. Penerapan manajemen ASN berbasis merit diukur melalui Indeks Sistem Merit. Penilaian ini sebelumnya dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan memperhatikan aspek perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan karier, manajemen kinerja, pengembangan kompetensi, penghargaan dan disiplin, perlindungan pegawai, serta sistem informasi kepegawaian.

Berdasarkan hasil penilaian KASN, Pemerintah Kota Surabaya memperoleh Nilai Sistem Merit sebesar 341,5 dengan Indeks 0,83 pada tahun 2022 dan masuk Kategori IV atau “Sangat Baik”. Pada tahun 2024, capaian tersebut meningkat menjadi Nilai Sistem Merit sebesar 393 dengan Indeks 0,96 dan tetap berada pada Kategori IV. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya semakin baik, objektif, profesional, dan berbasis kompetensi.

Mulai tahun 2025, seiring perubahan kebijakan nasional, penilaian Sistem Merit tidak lagi dilakukan oleh KASN, melainkan oleh Kementerian PAN-RB sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengukuran capaian Sistem Merit ke depan akan mengacu pada hasil penilaian Kementerian PAN-RB, dengan tetap berorientasi pada penguatan manajemen ASN yang profesional dan berbasis merit.

Selain penerapan Sistem Merit, pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan, baik off the job training maupun on the job training, guna mendukung peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Jumlah pegawai yang berkompeten di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang positif selama periode 2022 hingga Triwulan II Tahun 2026. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 5.003 pegawai berkompeten, kemudian sedikit menurun menjadi 4.844 pegawai pada tahun 2023. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi pascapandemi COVID-19 serta adanya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan memasuki masa purnatugas. Kondisi tersebut juga berdampak pada meningkatnya jumlah pegawai yang belum berkompeten dari 1.085 pegawai pada tahun 2022 menjadi 1.162 pegawai pada tahun 2023. Pada tahun 2024, jumlah pegawai berkompeten kembali meningkat menjadi 7.172 pegawai, seiring dengan semakin optimalnya penyelenggaraan program pengembangan kompetensi. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2025 menjadi 9.006 pegawai. Sementara itu, hingga Triwulan II Tahun 2026, jumlah pegawai yang telah berkompeten mencapai 23.175 pegawai, sedangkan pegawai yang belum berkompeten tercatat sebanyak 960 pegawai.

Tabel II.182
Jumlah Pegawai Yang Berkompeten Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah pegawai kompeten	5.003	4.844	7.172	9.006	23.175
2	Jumlah pegawai belum kompeten	1.085	1.162	553	895	960

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2026

Peningkatan jumlah pegawai yang berkompeten secara signifikan sampai denganTriwulan II Tahun 2026 dipengaruhi oleh semakin optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN serta bertambahnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang telah tercakup dalam pendataan kompetensi. Selain itu, adanya perluasan cakupan pendataan tersebut menyebabkan jumlah pegawai berkompeten meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, capaian Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat struktural juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan diklat struktural. Berdasarkan tabel berikut, masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat, sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara lebih terencana, komprehensif, dan berkelanjutan.

Tabel II.183
Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural
Tahun 2022 – 2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah pejabat struktural	1.197	1.233	1.169	1.402	1.159
2.	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	624	642	507	529	645
3.	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural (%)	52,13	52,07	43,37	37,73	55,65

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2026

Penurunan jumlah dan persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural pada periode 2022 sampai dengan tahun 2026 triwulan II dipengaruhi oleh dinamika kepegawaian, khususnya percepatan regenerasi jabatan struktural. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergantian pejabat sebagai bagian dari penataan organisasi dan pengembangan aparatur yang potensial. Pejabat yang baru diangkat sebagian besarnya berasal dari staf yang belum mengikuti diklat struktural pada saat pendataan dilakukan. Sementara itu, pejabat yang sebelumnya telah mengikuti diklat namun sudah tidak menjabat secara struktural tidak lagi diperhitungkan. Dengan demikian, penurunan angka tersebut lebih mencerminkan proses penataan dan regenerasi jabatan. Ke depan, pemenuhan diklat struktural bagi pejabat yang baru diangkat akan menjadi prioritas guna memastikan kesesuaian kompetensi jabatan.

2.1.3.5.4 Penelitian dan Pengembangan

Dalam pelaksanaan unsur penunjang penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, inovasi perangkat daerah memiliki peran penting dalam menyederhanakan prosedur, mempercepat pelayanan, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui sistem yang lebih cerdas dan terintegrasi. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menghadapi berbagai tantangan dinamis, seperti kemacetan, pengelolaan sampah, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, fungsi litbang diarahkan untuk menghasilkan inovasi berbasis data sebagai dasar kebijakan berbasis bukti atau *evidence-based policy,* sehingga permasalahan pembangunan dapat ditangani secara lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Tabel II.184
Inovasi Yang Diusulkan Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Surabaya
Tahun 2022–2025

No.	Pelaksana Inovasi	2022	2023	2024	2025
1.	Inovasi Perangkat Daerah	272	242	355	353
2.	Inovasi Masyarakat	101	61	142	357

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Berdasarkan jumlah judul inovasi yang diusulkan oleh PD dan masyarakat di atas, terdapat peningkatan yang signifikan dari usulan inovasi yang disampaikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk melibatkan warga dalam pembangunan, sehingga solusi yang muncul bersifat inklusif dan sesuai kebutuhan akar rumput. Inovasi yang berkelanjutan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai indeks inovasi daerah, yang pada gilirannya menarik investasi dan memperkuat ekonomi lokal.

2.1.3.6 Unsur Pengawasan

Salah satu tujuan utama dalam pelaksanaan unsur pengawasan adalah memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengukur tingkat integritas dan potensi risiko korupsi pada instansi pemerintah. Penilaian SPI dilakukan melalui persepsi internal pegawai, pengguna layanan, dan para ahli dengan menilai berbagai aspek, antara lain transparansi pelayanan, akuntabilitas pengelolaan anggaran, pengendalian gratifikasi, integritas dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, serta efektivitas upaya pencegahan korupsi di lingkungan instansi pemerintah. Hasil SPI menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan dan budaya integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tabel II.185
Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Survey Penilaian Integritas (SPI)	82,91	72,71	79,56	72,11	74,84
Kategori Penilaian	Terjaga	Rentan	Terjaga	Rentan	Waspada

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2026

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2026, nilai SPI Kota Surabaya selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2021, nilai SPI tercatat sebesar 82,91 dengan kategori “Terjaga”, kemudian menurun menjadi 72,71 pada tahun 2022 dengan kategori “Rentan”. Selanjutnya nilai SPI meningkat menjadi 79,56 pada tahun 2023 dan kembali berada pada kategori “Terjaga”, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 72,11 dengan kategori “Rentan”, serta meningkat menjadi 74,84 pada tahun 2025 dengan kategori “Waspada”. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penguatan integritas dan pencegahan korupsi di Kota Surabaya perlu terus diperkuat melalui peningkatan pengawasan internal, digitalisasi pelayanan publik, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penguatan pengendalian gratifikasi, peningkatan transparansi pengadaan barang dan

jasa, penguatan kanal pengaduan masyarakat, serta pembangunan budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Upaya menjaga integritas tersebut didukung melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu sistem pengendalian yang bertujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pemerintah daerah. Berikut merupakan tabel capaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Surabaya.

Tabel II.186
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,603	3,510	3,483	3,510	3,070

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa timur, 2026

Hasil evaluasi BPKP menunjukkan bahwa tingkat maturitas SPIP Kota Surabaya selama periode 2021–2025 berada pada Level 3 atau “Terdefinisi”. Hal ini menunjukkan bahwa unsur pengendalian intern telah dibangun dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2024, nilai maturitas SPIP meningkat menjadi 3,510 dari 3,483 pada tahun 2023, didukung oleh perbaikan pengelolaan risiko perangkat daerah, penguatan pengendalian intern, peningkatan kapabilitas pengawasan internal, serta pengendalian program prioritas seperti pengentasan kemiskinan dan penurunan *stunting*.

Namun, pada tahun 2025 nilai maturitas SPIP menurun menjadi 3,070. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa aspek yang masih perlu diperkuat, antara lain integrasi manajemen risiko dalam perencanaan, analisis tren risiko, pengelolaan risiko kemitraan, dokumentasi penguatan integritas dan pengendalian korupsi, penyempurnaan kebijakan antikorupsi, kapasitas SDM pengelola risiko, mekanisme perlindungan pelapor, serta pengendalian terhadap potensi penyalahgunaan anggaran. Temuan berulang terkait pengelolaan keuangan dan aset juga turut memengaruhi hasil evaluasi. Meskipun menurun, capaian SPIP Kota Surabaya tetap berada pada Level 3, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan dan mampu memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ke depan, Pemerintah Kota Surabaya perlu terus memperkuat manajemen risiko, pengendalian korupsi, dan pengawasan internal untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Penguatan integritas melalui SPI dan penerapan SPIP yang efektif juga mendukung kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini terlihat dari menurunnya pelanggaran tata kelola administrasi, dari 24 pelanggaran pada tahun 2020 menjadi nol pelanggaran sejak tahun 2022 hingga Triwulan II 2026. Capaian ini didukung oleh pengawasan sebelum pelaporan tata kelola administrasi serta pemanfaatan sistem informasi elektronik yang mempercepat dan mempermudah proses pengawasan.

Selain itu, pengawasan internal juga berperan dalam meningkatkan disiplin aparatur. Jumlah hukuman disiplin menunjukkan tren membaik, dari 45 kasus pada tahun 2023 menjadi 32 kasus pada tahun 2024, kemudian menjadi 28 kasus pada tahun 2025 dan menjadi 25 kasus pada triwulan II tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan internal telah memberikan dampak positif, meskipun optimalisasi pengawasan tetap diperlukan untuk menjaga kepatuhan aparatur dan mencegah pelanggaran disiplin di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Tabel II.187
Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

Jenis Hukuman Disiplin	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Hukuman Disiplin Ringan	2	5	4	8	8
Jumlah Hukuman Disiplin Sedang	2	19	11	4	0
Jumlah Hukuman Disiplin Berat	29	21	17	16	17
Total Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan	33	45	32	28	25

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2026

2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

Tahapan pelaksanaan pekerjaan penegasan batas wilayah pada tahun 2016–2019 meliputi sosialisasi pelaksanaan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan lalu dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pembuatan garis batas di atas peta serta penetapan ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Agar batas daerah tersebut dapat diterima oleh semua pihak maka harus didukung oleh dokumen otentik berupa peta batas daerah dan tanda fisik di lapangan berupa pilar tanda batas. Sedangkan pada tahun 2021 hingga akhir tahun 2025, penegasan batas wilayah dilakukan dengan mengukur dan menetapkan batas wilayah melalui Perwali. Data penegasan wilayah Tahun 2021 hingga 2025 sebagai berikut.

Tabel II.188
Penegasan Wilayah Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Kecamatan	31	31	31	31	31

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Sudah dilakukan penegasan wilayah	16	22	25	27	29

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 2026

2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

2.1.3.8.1 Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Ormas yang telah terdaftar selanjutnya memperoleh pembinaan dan pengawasan agar keberadaan serta perannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal.

Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Tabel II.189
Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Ormas Aktif	27	26	10	21	99
2	Jumlah Ormas Terdaftar	104	213	252	252	301

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2026.

Berdasarkan Tabel II.185, pada Triwulan II Tahun 2026 jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terdaftar meningkat menjadi 301 ormas dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah Ormas aktif mencapai 99 ormas. Peningkatan jumlah Ormas terdaftar menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pencatatan keberadaan di Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bentuk tertib administrasi dan pemenuhan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, peningkatan jumlah Ormas aktif didukung oleh pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan, salah satunya melalui kegiatan dialog interaktif bersama Ormas sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Penetapan status Ormas aktif didasarkan pada masih berlakunya masa kepengurusan sesuai Surat Keputusan (SK) kepengurusan serta pencatatan keberadaan Ormas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang masih berlaku.

Pemerintah Kota Surabaya terus melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Ormas dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi serta menjaga keberlangsungan peran Ormas dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk pemberdayaan dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengamanatkan pemerintah untuk melakukan pemberdayaan Ormas guna meningkatkan kinerja dan keberlangsungan organisasi sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.

2.1.3.8.2 Penanganan Potensi Konflik

Lingkungan yang damai, aman, dan tertib merupakan kebutuhan penting masyarakat karena berpengaruh langsung terhadap kualitas kehidupan sosial dan keberlanjutan pembangunan. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pengawasan terhadap potensi konflik di masyarakat sebagai upaya menjaga stabilitas daerah, mencegah gangguan ketenteraman, serta memperkuat kerukunan sosial. Pada tahun 2026, hingga Triwulan II, dari 160 potensi konflik yang ada, semuanya dapat ditangani

sehingga tidak ada yang menjadi konflik atau kerusuhan. Selengkapnya perkembangan pengawasan potensi konflik disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.190
Jumlah Potensi Konflik Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah potensi konflik	403	309	196	107	160
2	Jumlah konflik	5	5	2	3	0

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2026.

Guna mengurangi risiko potensi konflik ini, pelibatan tim kewaspadaan dini penting dalam memetakan potensi konflik, dan didukung penuh oleh partisipasi masyarakat sangat signifikan dalam mewujudkan kerukunan antar elemen di masyarakat. Selain itu, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kerukunan masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap potensi konflik sosial yang dapat mempengaruhi ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pemantauan tersebut dilakukan melalui pengumpulan informasi kewaspadaan dini, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta fasilitasi penyelesaian potensi konflik yang terjadi di masyarakat.

Tabel II.191
Jumlah Potensi Konflik Umat Beragama Kota Surabaya Tahun 2022–2026 (TW II)

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah potensi konflik umat beragama (kejadian)	3	2	2	2	2
2	Jumlah potensi konflik umat beragama yang difasilitasi (kejadian)	3	2	2	2	2

*Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2026. *)*

Berdasarkan data tahun 2022–2026 (Triwulan II), jumlah potensi konflik umat beragama di Kota Surabaya menunjukkan tren yang relatif rendah dan cenderung menurun, dari 3 kejadian pada tahun 2022 menjadi 2 kejadian pada periode 2023 sampai dengan Triwulan II tahun 2026. Seluruh potensi konflik yang teridentifikasi telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah Kota Surabaya, sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme deteksi dini, komunikasi, koordinasi, dan mediasi antar pemangku kepentingan berjalan dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Surabaya. Dalam pelaksanaannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) secara aktif menindaklanjuti laporan, keluhan, maupun informasi terkait potensi konflik melalui kegiatan sosialisasi, dialog, dan mediasi yang melibatkan kecamatan, kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Upaya tersebut berkontribusi dalam menjaga kondusivitas wilayah, memperkuat toleransi

antarumat beragama, serta mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan inklusif di Kota Surabaya. Selain itu Bakesbangpol menggandeng tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat terkait nilai-nilai sosial, kemanusiaan, keagamaan. Bakesbangpol juga memberikan sosialisasi kepada pengurus tempat ibadah di kelurahan terkait tata cara pendirian rumah ibadah sebagai bentuk upaya proaktif mengurangi potensi konflik umat beragama. Selain itu adanya kerjasama dengan masyarakat, BNN dan Tim P4GN lainnya dalam menangani peredaran narkotika termasuk sosialisasi di Kelurahan dan Kecamatan, Penyelenggaraan Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba), dan Operasi gabungan pada tempat hiburan serta patroli asuhan rembulan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Surabaya, antara lain keterbatasan sistem kewaspadaan dini dalam menghimpun data lapangan secara real time, sehingga potensi konflik terkadang teridentifikasi setelah eskalasi mulai terjadi. Selain itu, tingginya mobilitas penduduk dan heterogenitas latar belakang masyarakat juga berpotensi memicu gesekan sosial, terutama di wilayah dengan kepadatan serta intensitas interaksi sosial dan ekonomi yang tinggi.

2.1.3.8.3 Reformasi Hukum Daerah

Reformasi hukum daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan akuntabel. Reformasi ini mencakup pembentukan produk hukum yang berkualitas, penataan dan harmonisasi regulasi, penguatan dokumentasi dan informasi hukum, peningkatan kepatuhan hukum, serta penyelesaian permasalahan hukum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong reformasi hukum melalui penyusunan produk hukum daerah yang sesuai ketentuan, sinkronisasi regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, evaluasi peraturan yang tidak lagi relevan, serta optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Selain itu, peningkatan layanan bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyelesaian permasalahan hukum juga terus dilakukan untuk mendukung efektivitas pemerintahan daerah.

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi hukum pada pemerintah daerah, meliputi aspek penataan regulasi, penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta penguatan budaya hukum.

Indikator ini tergolong relatif baru karena penilaian IRH bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mulai diperkenalkan secara nasional melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, data historis indikator ini belum tersedia pada periode sebelum implementasi penilaian tersebut.

Nlai Indeks Reformasi Hukum Kota Surabaya mulai tercatat pada tahun 2023 sebesar 66,11, sementara pada tahun 2024 mengalami peningkatan pesat menjadi 96,98 dan kembali meningkat menjadi 97,62 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin baiknya kualitas tata kelola hukum daerah, yang ditandai dengan penguatan harmonisasi regulasi, pengelolaan dokumentasi hukum yang lebih optimal, serta peningkatan kualitas layanan hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Capaian tersebut juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung agenda reformasi birokrasi melalui penguatan sistem hukum yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Tabel II.192
Indeks Reformasi Hukum Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	66,11	96,98	97,62

Sumber: Sekretariat Daerah, 2026.

Penguatan reformasi hukum daerah didukung melalui optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya sebagai sarana penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi, mudah diakses, dan transparan. Melalui portal JDIH, Pemerintah Kota Surabaya menyediakan berbagai dokumen hukum, antara lain peraturan daerah, peraturan wali kota, keputusan wali kota, naskah akademik, kajian hukum, risalah pembahasan, rancangan peraturan, serta dokumen pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan JDIH diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 111 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Surabaya. Regulasi ini mengatur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendokumentasian, dan penyebarluasan produk hukum daerah secara digital, guna memastikan informasi hukum tersedia secara lengkap, akurat, cepat, dan mudah diakses. Berdasarkan data portal JDIH Kota Surabaya, produk hukum yang terdokumentasi didominasi oleh Peraturan Wali Kota sebesar 69%, diikuti Peraturan Daerah sebesar 20%, dan Keputusan Wali Kota sebesar 11%. Selain itu, JDIH juga terus memperbarui publikasi produk hukum tahun 2025–2026, yang menunjukkan bahwa pengelolaan dokumentasi hukum daerah berjalan aktif dan berkelanjutan.

Pengembangan JDIH menjadi bagian penting dari Reformasi Hukum Daerah karena mendukung transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan regulasi. Melalui digitalisasi layanan hukum dan integrasi dengan JDIHN, Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong tata kelola hukum yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis teknologi informasi.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara tinggi dan berkelanjutan, sekaligus mampu bersaing pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Daya saing tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kapasitas daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, inovasi, kesempatan kerja, iklim investasi, ketahanan ekonomi, dan infrastruktur wilayah.

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan metropolitan terbesar di Indonesia, Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam penguatan daya saing regional dan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong pembangunan berbasis inovasi, digitalisasi, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengukuran daya saing daerah dilakukan melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dikembangkan oleh BRIN. IDSD mengadopsi pendekatan Global Competitiveness Index yang disesuaikan dengan karakteristik pembangunan daerah di Indonesia, mencakup 4 komponen utama dan 12 pilar, antara lain institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi.

Berdasarkan hasil kajian Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2026, capaian IDSD Kota Surabaya menunjukkan tren positif. Skor IDSD meningkat dari 4,06 pada tahun 2022–2023 menjadi 4,14 pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 4,24 pada tahun 2025 atau meningkat 4,43% selama periode kajian. Pada tahun 2025, Kota Surabaya menempati peringkat pertama IDSD di Provinsi Jawa Timur dan termasuk kelompok kota dengan daya saing tinggi secara nasional.



Gambar II.27 Indeks Daya Saing Daerah Kota Surabaya Tahun 2022–2025

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2026

Peningkatan daya saing Kota Surabaya didukung oleh capaian tinggi pada Pilar Adopsi TIK, Pasar Produk, dan Ukuran Pasar yang menunjukkan kuatnya transformasi digital dan aktivitas ekonomi perkotaan. Selain itu, Pilar Infrastruktur dan Keterampilan juga mengalami peningkatan selama periode pengukuran.

Tabel II.193
Rekapitulasi Capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Surabaya Tahun 2022–2025

Komponen	Pilar	2022	2023	2024	2025
Lingkungan Pendukung	Pilar 1 – Institusi	±4,12	±4,32	±4,08	±4,47
	Pilar 2 – Infrastruktur	±3,10	±3,69	±4,10	±3,85
	Pilar 3 – Adopsi TIK	5,00	5,00	5,00	5,00
	Pilar 4 – Stabilitas Ekonomi Makro	±4,05	3,39	±4,10	4,47
Sumber Daya Manusia	Pilar 5 – Kesehatan	±4,15	±4,16	±4,16	±4,17
	Pilar 6 – Keterampilan	3,95	±4,10	±4,08	4,33
Pasar	Pilar 7 – Pasar Produk	5,00	5,00	5,00	5,00
	Pilar 8 – Pasar Tenaga Kerja	2,94	±3,00	±3,05	3,13
	Pilar 9 – Sistem Keuangan	±4,20	±4,28	±4,35	±4,40
	Pilar 10 – Ukuran Pasar	5,00	5,00	5,00	5,00
Ekosistem Inovasi	Pilar 11 – Dinamisme Bisnis	5,00	±4,50	±3,90	3,39

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2026

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa masih terdapat beberapa tantangan, terutama pada Pilar Pasar Tenaga Kerja yang meningkat dari 2,94 pada tahun 2022 menjadi 3,13 pada tahun 2025, namun masih relatif rendah dibandingkan kota besar lainnya. Pilar Stabilitas Ekonomi Makro juga sempat turun hingga 3,39 pada tahun 2023 sebelum meningkat menjadi 4,47 pada tahun 2025. Di sisi lain, Pilar Dinamisme Bisnis menurun dari 5,00 menjadi 3,39, sedangkan Pilar Kapabilitas Inovasi turun dari 4,74 menjadi 4,46 pada periode yang sama.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan beberapa rekomendasi program strategis, antara lain pengembangan *Early Warning System*

(EWS), *Training Need Analysis* (TNA), penguatan pendekatan *Triple Helix*, dan intervensi mentalitas produktif guna mendukung peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Konsumsi

Tabel II.194
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga Perkapita				Total	
	Makanan	%	Non Makanan	%		
2021	810.743	41,52	1.141.846	54,48	1.952.589	100%
2022	819.124	41,60	1.149.824	58,40	1.968.948	100%
2023	948.701	38,79	1.497.216	61,21	2.445.917	100%
2024	1.061.448	40,79	1.541.008	59,21	2.602.456	100%
2025	1.145.921	39,45	1.759.084	60,55	2.905.005	100%

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2026

Berdasarkan tabel di atas, konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Surabaya terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Total konsumsi rumah tangga meningkat dari 1.952.589 pada tahun 2021 menjadi 2.905.005 pada tahun 2025. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, konsumsi non makanan memiliki proporsi lebih besar dibandingkan konsumsi makanan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2025, konsumsi non makanan mencapai 1.759.084 (60,55%), lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan sebesar 1.145.921 (39,45%). Dominannya pengeluaran non makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya cenderung meningkat. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan makanan, tetapi juga semakin mampu memenuhi kebutuhan non makanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Adapun data produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana berikut.

Tabel II.195
Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Angkatan Kerja (orang)	1.572.888	1.643.314	1.569.714	1.624.822	1.641.429
PDRB (Juta Rp)	590.227.116	655.616.222	715.294.707	772.493.614	830.543.350
Produktivitas (Juta Rp per orang)	375,25	398,96	455,68	475,43	505,99

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2026

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota surabaya maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB yang

menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan pergudangan.

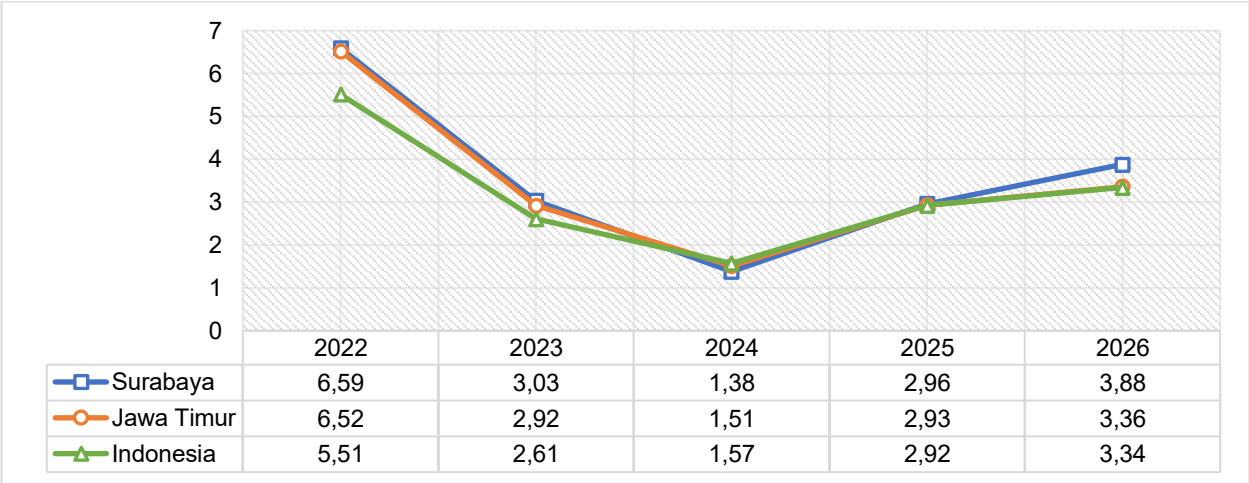
Tabel II.196
Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan
Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai PDRB ADHK (miliar rupiah)	19.874,94	22.684,94	25.217,17	27.494,46	29.717,53
Laju Pertumbuhan (persen)	2,04	14,14	11,16	9,03	8,09

Sumber : BPS Kota Surabaya diolah, 2026

2.1.4.1.2 Tingkat Inflasi

Inflasi Kota Surabaya pada bulan Juni (TW II) tahun 2026 tercatat sebesar 3,88% year-on-year, meningkat dibandingkan bulan Juni tahun 2025 yang sebesar 1,94%. Capaian inflasi ini sedikit lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan sebesar 2,5 ± 1%. Inflasi Kota Surabaya pada TW II tahun 2026 juga sedikit melampaui tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 3,36% maupun nasional sebesar 3,34%. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik, seperti ketidakpastian geopolitik yang berdampak pada kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok, fluktuasi nilai tukar rupiah yang memengaruhi harga barang impor, penyesuaian harga komoditas strategis, serta meningkatnya permintaan masyarakat pada periode tertentu.



	2022	2023	2024	2025	2026
Surabaya	6,59	3,03	1,38	2,96	3,88
Jawa Timur	6,52	2,92	1,51	2,93	3,36
Indonesia	5,51	2,61	1,57	2,92	3,34

Gambar II.28
Inflasi Kota Surabaya (*year-to-date*) Tahun 2022–2026 (TW II)
Sumber: BPS Kota Surabaya, April 2026

Bila dibandingkan dengan kondisi Provinsi Jawa Timur dan nasional, pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun cenderung sejalan dengan perkembangan inflasi di tingkat provinsi maupun nasional sebagaimana tergambar pada grafik di atas. Dalam beberapa tahun terakhir, inflasi Kota Surabaya relatif masih berada pada rentang yang terkendali meskipun sempat mengalami peningkatan akibat tekanan harga komoditas dan faktor musiman.

Peningkatan inflasi pada tahun 2022 dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa kenaikan harga komoditas global, gangguan rantai pasok, serta peningkatan harga energi yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri. Namun demikian, pada tahun 2023 hingga tahun 2025 laju inflasi Kota Surabaya berhasil lebih terkendali melalui berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), antara lain melalui pemantauan harga bahan pokok, operasi pasar, penguatan kerja sama antar daerah, menjaga kelancaran distribusi barang, serta pengendalian ekspektasi masyarakat.

Pada Triwulan II Tahun 2026, kondisi inflasi Kota Surabaya masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan terkendali. Pengendalian inflasi didukung oleh terjaganya pasokan bahan pangan strategis, stabilitas distribusi barang dan jasa, serta sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan instansi terkait. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Surabaya tetap perlu melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap komoditas utama penyumbang inflasi, khususnya bahan pangan dan komoditas yang dipengaruhi faktor musiman, guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.

2.1.4.1.3 Akses Keuangan Daerah

Peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha juga menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan sekaligus meningkatkan daya saing koperasi serta usaha mikro dan kecil di Kota Surabaya. Kemudahan akses terhadap layanan keuangan formal memungkinkan pelaku usaha memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing. Dalam rangka mengukur tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengembangkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai indikator akses masyarakat terhadap layanan perbankan dan lembaga pembiayaan di daerah.

Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong peningkatan akses keuangan melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan, fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM, serta sinergi dengan berbagai lembaga keuangan dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan formal sehingga dapat mendukung pertumbuhan usaha dan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah. Penguatan akses keuangan juga menjadi semakin penting mengingat koperasi dan UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan penggerak ekonomi lokal di Kota Surabaya.

Mengingat IKAD merupakan indikator yang baru diterapkan secara nasional pada tahun 2025, capaian tahun 2025 menjadi *baseline* dalam mengukur perkembangan akses keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya. Pada tanggal 22 Juni 2026, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melalui surat nomor: 12597/Dt.03.03/PP.03.01/06/2026 perihal Penyampaian Capaian dan Target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merilis nilai IKAD Kota Surabaya sebesar 6,79% pada tahun 2025. Ini menunjukkan komitmen daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Ke depan, peningkatan akses pembiayaan, perluasan jangkauan layanan keuangan, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan perlu terus didorong guna mendukung pengembangan koperasi dan UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian Kota Surabaya.

2.1.4.1.4 Kinerja Pengelolaan Zakat

Indeks Zakat Nasional merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan zakat secara nasional maupun daerah, meliputi aspek pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, kelembagaan, pelaporan, serta dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Indeks ini menjadi salah satu tolok ukur efektivitas pengelolaan zakat dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel II.197
Capaian Indeks Zakat Nasional Kota Surabaya Tahun 2023–2025

Uraian	2023	2024	2025
Indeks Zakat Nasional	0,48	0,68	0,72

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2026

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2026, capaian Indeks Zakat Nasional Kota Surabaya menunjukkan tren peningkatan dari 0,48 pada tahun 2023 menjadi 0,68 pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 0,72 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin baiknya kinerja pengelolaan zakat di Kota Surabaya melalui penguatan kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat. Implementasi kolaborasi tersebut antara lain diwujudkan melalui pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, beasiswa pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu, bantuan kesehatan dan pengobatan, bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, hingga program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha dan pelatihan UMKM bagi masyarakat prasejahtera. Selain itu, zakat juga dimanfaatkan untuk mendukung

penanganan keadaan darurat dan kegiatan sosial kemasyarakatan, sehingga pengelolaan zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya secara berkelanjutan.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Indeks Infrastruktur Kota

Indeks Infrastruktur Kota mengukur keberhasilan dalam peningkatan kualitas infrastruktur kota. Indeks Infrastruktur Kota menggambarkan implementasi penataan ruang kota yang terintegrasi melalui penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota yang terdiri dari tiga komponen, yaitu Indeks Kebinamargaan dan Pematusan, Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan serta Indeks Penyelenggaraan Transportasi.

Pola perhitungan Indeks Infrastruktur Kota pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah dilakukan evaluasi dan perbaikan pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan diperlukan penyesuaian komponen perhitungan untuk mengakomodir aspek infrastruktur kota yang masih perlu ditingkatkan pada periode 2021-2026. Sehingga formulasi perhitungan antara tahun 2021 dengan tahun 2022 berbeda, dan capaiannya tidak dapat disejajarkan.

Tabel II.198
Indeks Infrastruktur Kota Surabaya Tahun 2022–2025

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Infrastruktur Kota	0,67	0,75	0,81	0,85
1.a	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,78	0,81	0,83	0,87
1.b	Indeks Keciptakayaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,53	0,67	0,82	0,82
1.c	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,67	0,74	0,78	0,85

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Pada tahun 2025, Indeks Infrastruktur Kota Surabaya meningkat menjadi 0,85. Dari aspek kebinamargaan dan pematusan, capaian ini didukung oleh peningkatan kualitas jalan melalui pembangunan pedestrian, pelaksanaan overlay, pembangunan jalan baru, serta optimalisasi kinerja jalan. Pelaksanaan overlay meningkat dari 2.072 ruas jalan pada tahun 2022 menjadi 2.780 ruas pada tahun 2023, 3.537 ruas pada tahun 2024, dan 4.499 ruas pada tahun 2025. Pemerintah Kota Surabaya juga melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat ruas Raya Sememi–Simpang Romokalisari serta pelebaran Jalan Wiyung.

Penanganan genangan juga menjadi faktor penting dalam peningkatan indeks. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi drainase, penambahan rumah

pompa, pemasangan stasiun hujan, serta pengerukan saluran primer, sekunder, dan tersier secara rutin. Jumlah titik genangan berhasil diturunkan dari 250 titik pada tahun 2022 menjadi 215 titik pada tahun 2023, 192 titik pada tahun 2024, dan 168 titik pada tahun 2025.

Dari aspek keciptakaryaan, penataan ruang, dan pertanahan, Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong penyediaan hunian layak melalui pembangunan rumah susun dan Program Dandan Omah. Jumlah rumah susun meningkat dari 105 blok pada tahun 2022 menjadi 109 blok hingga tahun 2025. Sementara itu, rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui Program Dandan Omah terealisasi sebanyak 929 unit pada tahun 2022, 2.887 unit pada tahun 2023, 1.678 unit pada tahun 2024, dan 2.083 unit pada tahun 2025. Pemerintah Kota juga memfasilitasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan untuk mendukung peningkatan layanan publik. Pada bidang penataan ruang, pelayanan penataan ruang dan bangunan telah dilaksanakan secara terintegrasi dan berbasis teknologi.

Meskipun demikian, Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang, dan Pertanahan pada tahun 2025 tetap sebesar 0,82 atau sama dengan capaian tahun 2024 sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya Indeks Penataan Ruang dari 0,32 pada tahun 2024 menjadi 0,31 pada tahun 2025. Beberapa faktor yang memengaruhi capaian tersebut antara lain masih banyaknya pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belum melengkapi persyaratan administrasi, menurunnya pengembangan kawasan perumahan baru akibat perlambatan sektor properti dan semakin terbatasnya ketersediaan lahan di Kota Surabaya, masih rendahnya kesadaran masyarakat di kawasan permukiman non-*site plan* dalam mengurus perizinan bangunan, serta dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebabkan kenaikan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah tinggal sehingga memengaruhi minat masyarakat dalam mengurus perizinan. Selain itu, masih terdapat bangunan dengan status kepemilikan tanah yang belum jelas atau berada di atas tanah milik instansi lain sehingga menghambat proses penataan dan legalisasi bangunan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan percepatan penyelesaian persyaratan administrasi perizinan, meningkatkan sosialisasi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui kolaborasi dengan kecamatan, melaksanakan pengawasan penyelenggaraan bangunan secara berkala pada koridor jalan maupun kawasan permukiman, serta memberikan berbagai

kemudahan bagi masyarakat melalui kebijakan keringanan, pengurangan, pembebasan, maupun penundaan pembayaran denda administratif serta skema pembayaran retribusi secara bertahap. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan penataan ruang dan penyelenggaraan bangunan gedung sehingga mendukung peningkatan kualitas penataan ruang dan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan.

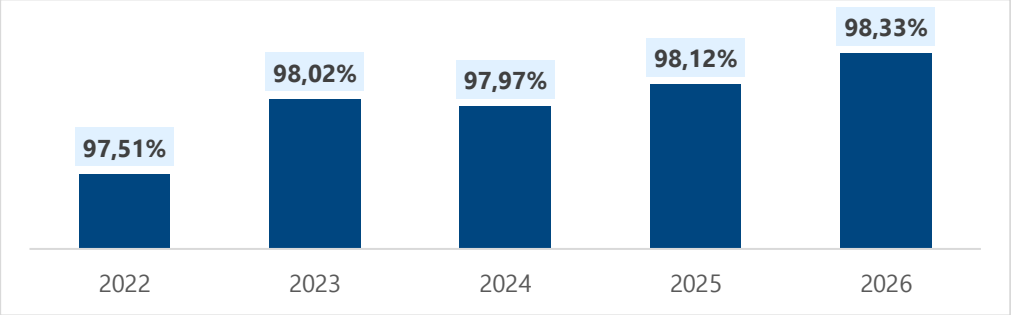
Dari aspek transportasi, peningkatan indeks didukung oleh pengembangan layanan angkutan umum perkotaan berbasis trunk dan feeder. Layanan trunk meliputi Suroboyo Bus, Trans Semanggi Suroboyo, bus listrik, dan bus medium diesel, sedangkan layanan feeder Wira-Wiri beroperasi dengan 102 unit pada 10 rute. Struktur layanan ini bertujuan memperluas cakupan pelayanan serta memperkuat konektivitas first mile dan last mile. Peningkatan pemanfaatan angkutan umum juga didukung melalui sosialisasi penggunaan transportasi publik dan aplikasi GOBIS, baik melalui media sosial maupun kegiatan tatap muka seperti Car Free Day, termasuk pelibatan kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Selain itu, penguatan manajemen lalu lintas dan koordinasi dengan PT KAI DAOP VIII Surabaya serta PT Pelindo turut mendukung integrasi antarmoda di stasiun dan Pelabuhan Tanjung Perak.

Pada tahun 2026, sejalan dengan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025–2029, Indeks Infrastruktur Kota disesuaikan menjadi Indeks Kualitas Pembangunan Infrastruktur. Indeks ini dihitung berdasarkan lima komponen, yaitu Indeks Kebinamargaan dan Pematusan, Indeks Keciptakaryaan, Indeks Bangunan Gedung dan Penataan Ruang, Indeks Tata Kelola Pengadaan Lahan, serta Indeks Penyelenggaraan Perhubungan. Penambahan komponen tata kelola pengadaan lahan menjadi perubahan mendasar dalam penilaian indeks karena berperan penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur kota. Realisasi indikator ini pada tahun 2025 mencapai 0,80.

2.1.4.2.2 Akses Hunian Bagi Rumah Tangga

Perkotaan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas hidup masyarakat serta daya saing daerah adalah persentase rumah tangga dengan akses hunian layak. Hunian layak mencakup aspek kepemilikan rumah yang aman, akses terhadap sarana dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta lingkungan yang sehat dan nyaman. Ketersediaan hunian layak tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi faktor utama dalam mendukung produktivitas ekonomi, investasi, dan

pembangunan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang memenuhi standar kelayakan.



Gambar II.29 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kota Surabaya Tahun 2022-2026 (TW II)

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surabaya, 2026

Pada tahun 2022, angka tersebut berada di level 97,51%, kemudian melonjak signifikan pada 2023 menjadi 98,02%—angka tertinggi dalam periode ini—sebelum sedikit terkoreksi ke 97,97% pada tahun 2024. Setelah itu, peningkatan terus berlanjut hingga triwulan II tahun 2026, rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di Kota Surabaya mencapai 98,33%.

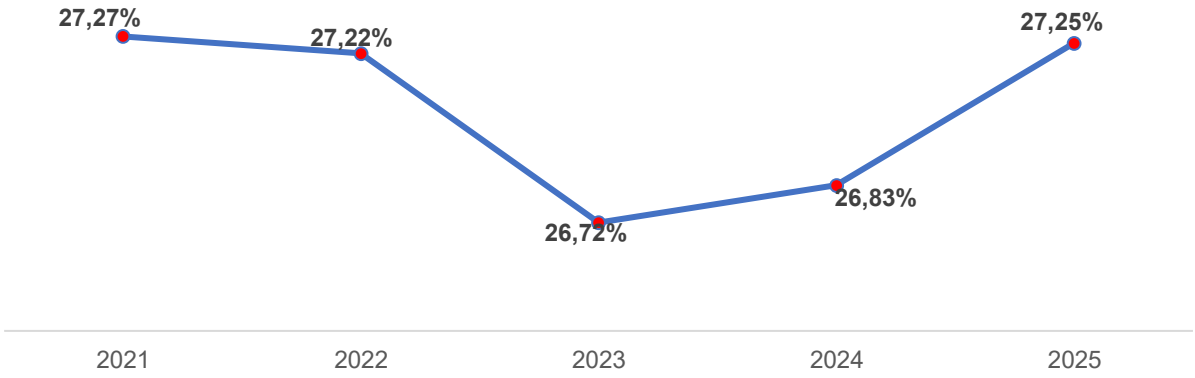
Peningkatan signifikan pada tahun 2023 mencerminkan keberhasilan implementasi program nasional dan daerah seperti bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dan peningkatan kualitas permukiman berbasis kampung. Sedangkan peningkatan yang stabil sejak tahun tersebut juga didukung oleh jumlah perbaikan rumah tidak layak huni yang terus bertambah setiap tahunnya, total sebanyak 7.506 unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki sejak tahun 2023 hingga Triwulan II Tahun 2026 ini.

Surabaya sebagai kota metropolitan dengan kepadatan tinggi menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan hunian layak dengan akses terhadap pekerjaan, transportasi umum, dan layanan dasar. Oleh karena itu, capaian tinggi dalam indikator ini perlu dijaga melalui pendekfatan regeneratif, misalnya penataan kawasan kumuh terintegrasi, penyediaan hunian vertikal terjangkau, dan kolaborasi dengan pihak swasta melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Ini sejalan dengan strategi prioritas pembangunan berbasis keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan warga. Dukungan fiskal dari Belanja Modal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dan sinergi program dari Kementerian PUPR juga menjadi faktor penting untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian akses hunian layak ke depan.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB menunjukkan nilai investasi yang dialokasikan untuk pengadaan aset-aset produktif, seperti bangunan, mesin, dan sarana produksi lainnya, yang berdampak pada peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi jangka panjang. Dengan mengamati persentase PMTB terhadap PDRB, pemerintah daerah dan pelaku ekonomi dapat menilai seberapa besar porsi investasi yang dialokasikan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan strategi peningkatan iklim investasi di Kota Surabaya.



Gambar II.30 Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2025

Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Surabaya menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit penurunan pada periode Tahun 2021–2023, dari 27,27% pada tahun 2021, 27,22% pada tahun 2022, dan 26,72% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, persentase PMTB mulai meningkat menjadi 26,83% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi 27,25%. Kondisi ini menunjukkan bahwa proporsi investasi jangka panjang terhadap total output ekonomi masih belum optimal. Penurunan PMTB dapat mengindikasikan kehati-hatian investor serta terbatasnya perluasan kapasitas produktif, terutama pada aset tetap seperti infrastruktur, bangunan, mesin, dan peralatan. Jika tidak diperkuat, pelemahan PMTB dapat berdampak pada stagnasi kapasitas produksi, perlambatan pertumbuhan PDRB, terbatasnya penyerapan tenaga kerja, serta berkurangnya potensi penerimaan pajak daerah.

Oleh karena itu, penguatan PMTB perlu diarahkan melalui peningkatan investasi swasta maupun skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Pemerintah Kota

Surabaya perlu terus memperbaiki iklim investasi melalui insentif fiskal yang selektif, penyediaan infrastruktur kawasan industri dan logistik, kemudahan perizinan digital, serta promosi investasi pada sektor unggulan seperti manufaktur, teknologi, ekonomi hijau, dan ekonomi kreatif. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat daya saing Surabaya sebagai destinasi investasi jangka panjang yang produktif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penguatan PMTB perlu diarahkan melalui peningkatan investasi swasta maupun skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Pemerintah Kota Surabaya perlu terus memperbaiki iklim investasi melalui insentif fiskal yang selektif, penyediaan infrastruktur kawasan industri dan logistik, kemudahan perizinan digital, serta promosi investasi pada sektor unggulan seperti manufaktur, teknologi, ekonomi hijau, dan ekonomi kreatif. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat daya saing Surabaya sebagai destinasi investasi jangka panjang yang produktif dan berkelanjutan.

2.1.4.3.2 Indeks Harmoni Indonesia

Dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan daerah, Kota Surabaya memperoleh nilai Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) sebesar 7,31 pada pengukuran perdana Kementerian Dalam Negeri tahun 2025. Nilai tersebut menempatkan Surabaya dalam kategori “Sangat Baik” dan berada di atas standar acuan nasional sebesar 6,5. Atas capaian ini, Kota Surabaya menerima Penghargaan IHaI Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri sebagai apresiasi atas keberhasilan menjaga harmoni sosial, toleransi, dan kohesi masyarakat.

Capaian IHaI didukung oleh kinerja seluruh dimensi penyusun indeks, yaitu Dimensi Sosial sebesar 7,32, Dimensi Keberagamaan sebesar 7,51, Dimensi Budaya sebesar 7,33, dan Dimensi Ekonomi sebesar 7,10. Hasil ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Surabaya relatif harmonis, inklusif, dan mampu menjadikan keberagaman sebagai modal sosial pembangunan. Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai upaya Pemerintah Kota Surabaya bersama pemangku kepentingan, antara lain melalui fasilitasi FKUB dan Forum Pembauran Kebangsaan, dialog lintas agama, suku, dan budaya, pembinaan organisasi kemasyarakatan, penguatan wawasan kebangsaan, serta deteksi dini potensi konflik bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Pemerintah Kota juga memperkuat harmoni melalui kegiatan budaya, peringatan hari besar keagamaan, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, serta peningkatan partisipasi publik melalui Musrenbang dan forum lainnya.

Sebagai indikator baru tingkat nasional, capaian IHaI tahun 2025 menjadi baseline bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam menyusun kebijakan pembangunan berikutnya.

Peningkatan indeks ke depan diarahkan pada penguatan dimensi ekonomi, disertai upaya mempertahankan capaian dimensi sosial, keberagamaan, dan budaya agar pembangunan Surabaya semakin inklusif, harmonis, dan berkelanjutan. Sebelum menggunakan IHaI, Pemerintah Kota Surabaya menggunakan Indeks Harmoni Sosial sebagai indikator komposit yang terdiri atas Indeks Budaya Lokal, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan, dan Indeks Kepedulian Sosial. Indeks ini menggambarkan keselarasan nilai, keyakinan, perilaku, solidaritas, kepedulian sosial, pelestarian budaya lokal, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kehidupan sosial yang harmonis.

Indeks Budaya Lokal mengukur pemahaman masyarakat terhadap seni budaya, cagar budaya, dan kepedulian terhadap kegiatan bernilai kebangsaan. Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan mengukur pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, antara lain melalui peningkatan pemahaman lingkungan hidup, penghargaan lingkungan, peran kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan, dan persentase rumah sehat. Sementara itu, Indeks Kepedulian Sosial menggambarkan partisipasi masyarakat dalam aspek sosial, kemanusiaan, toleransi beragama, dan kebangsaan. Ketiga aspek tersebut menjadi penting dalam memperkuat kualitas kehidupan sosial masyarakat Surabaya di tengah modernisasi dan perkembangan teknologi informasi.

Data Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya mulai tersedia pada tahun 2022 sehingga belum memungkinkan dilakukan analisis tren jangka panjang maupun perbandingan dengan periode sebelum tahun tersebut. Oleh karena itu, tahun 2022 digunakan sebagai *baseline* dalam pemantauan perkembangan Indeks Harmoni Sosial pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel II.199
Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Harmoni Sosial	N/A	80,08	82,70	99,83	102,20
1.a	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	N/A	48,01	56,51	113,32	120,86
1.b	Indeks Kepedulian Sosial	N/A	97,67	97,86	97,98	97,99
1.c	Indeks Budaya Lokal	89,67	89,97	89,99	90,11	90,42

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2025

Pencapaian Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya tahun 2025 sebesar 102,20 didukung oleh upaya Pemerintah Kota dalam memperkuat budaya lokal, kepedulian lingkungan, karakter kebangsaan, dan kerukunan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai event seni, budaya, dan sejarah, seperti Parade Juang, Festival Rujak Uleg, Peringatan Peristiwa Perobekan Bendera, Surabaya Heroic

Track, Sekolah Kebangsaan, Surabaya Vaganza, Pemilihan Duta Wisata, Kya-Kya Festival, Cak dan Ning, Peringatan Hari Tari Sedunia, serta Sedekah Bumi.

Capaian tersebut juga didukung oleh edukasi lingkungan kepada pelajar, masyarakat melalui satgas lingkungan pada kampung pancasila, dan pelaku usaha, termasuk pembinaan bank sampah di 470 lokasi, pengembangan 40 kampung zero waste, serta penyelenggaraan lomba lingkungan seperti *Surabaya Smart City, ECO School, ECO Campus*, dan ECO Pesantren. Selain itu, penguatan karakter kebangsaan, ideologi Pancasila, dan kerukunan masyarakat dilakukan melalui forum kerukunan umat beragama, mediasi konflik keagamaan, sosialisasi anti narkotika, serta koordinasi operasi gabungan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Sejalan dengan upaya mengurangi potensi konflik, Pemerintah Kota Surabaya juga terus mendorong peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui penguatan Indeks Kepedulian Sosial. Indeks ini menggambarkan sinergi nilai sosial kemanusiaan, ketuhanan, budi pekerti, serta kepatuhan terhadap peraturan negara dalam kehidupan bermasyarakat.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Partisipasi Angkatan Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.200
Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah lulusan D4/S1	287.516	290.887	297.446	301.325	303.575
2	Jumlah lulusan S2	19.976	20.615	21.304	21.961	22.328
3	Jumlah lulusan S3	1.412	1.518	1.617	1.732	1.798
4	Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3	308.904	313.020	320.367	325.018	327.701
5	Jumlah penduduk	2.970.952	2.987.863	3.009.286	3.018.022	3.003.860
6	Rasio lulusan D4/S1/S2/S3	0,104	0,105	0,106	0,108	0,109

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Daya saing SDM salah satunya tercermin pada pemerataan gender dan tingkat pendidikan dalam angkatan kerja, yakni penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja Kota Surabaya pada tahun 2025 sejumlah 1.641.429 orang atau sebesar

70,59% sedikit meningkat dibanding tahun 2024 sejumlah 1.624.822 orang atau sebesar 70,49%. Peningkatan ini diperkirakan karena dua hal, yang pertama karena peningkatan jumlah penduduk 15 tahun ke atas umumnya ini akan diikuti dengan kenaikan angkatan kerja. Yang kedua, karena adanya pergeseran (utamanya dari perempuan yang mengurus rumah tangga) dari kelompok bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja.

Berdasarkan gender, partisipasi angkatan kerja perempuan semakin meningkat setiap tahunnya, dan mencapai 60,16% pada tahun 2025, terdapat peningkatan dari tahun 2024 yang sebesar 59,48%. Sementara partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 81,42% pada tahun 2025, menurun dari tahun 2024 yakni sebesar 81,95%. Semakin tinggi partisipasi perempuan untuk bekerja menunjukkan semakin berkurangnya kesenjangan antara peranan laki-laki dan perempuan yang berarti pengarusutamaan gender pada sektor ketenagakerjaan semakin baik.

Tabel II.201
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah angkatan kerja	1.572.888	1.643.314	1.569.714	1.624.822	1.641.429
2	Jumlah penduduk usia kerja	2.337.229	2.348.058	2.283.993	2.305.008	2.325.271
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,30	69,99	68,73	70,49	70,59
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki	81,69	85,07	80,25	81,92	81,42
5	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	53,44	55,46	57,61	59,48	60,16

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Semakin baik tingkat pendidikan dari penduduk yang bekerja, semakin tinggi nilai produktivitas. Pada tahun 2025, sebesar 18,39% penduduk bekerja di Kota Surabaya berpendidikan tinggi; 50,42% berpendidikan menengah atas, dan sisanya tersebar pada lulusan SMP dan SD atau kurang sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.202
Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Surabaya Tahun 2021–2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah lulusan SD ke bawah	255.077	238.468	245.250	311.017	247.586
2	Jumlah lulusan SMP	185.909	213.754	198.479	193.210	212.756
3	Jumlah lulusan SMA	319.721	392.352	342.080	368.673	397.160
4	Jumlah lulusan SMK	309.413	314.112	337.375	332.406	390.284
5	Jumlah lulusan perguruan tinggi	350.495	359.352	340.410	339.749	287.211

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya semakin menurun secara signifikan mencapai 4,84% pada tahun 2025 dibanding tahun 2022 yakni sebesar

7,62%. Penganggur terbuka yang dimaksud terdiri dari orang yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel II.203
TPT Kota Surabaya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021–2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pengangguran	152.273	125.276	106.120	79.767	79.432
2	Tingkat penggangguran terbuka (TPT) (%)	9,68	7,62	6,76	4,91	4,84
3	TPT laki-laki (%)	10,77	9,66	7,30	4,85	4,81
4	TPT perempuan (%)	8,07	4,61	6,04	4,99	4,88

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Ditinjau dari tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan sebagaimana tabel di bawah, pengangguran mengalami penurunan pada tahun 2025 pada tingkat pendidikan SMP, SMA dan SMK. Sedangkan peningkatan tingkat pengangguran pada tingkat pendidikan SD dan Perguruan Tinggi disebabkan oleh perkembangan teknologi yang mulai dapat menggantikan tenaga kerja berpendidikan rendah untuk SD, dan adanya ketidakcocokan antara kebutuhan lulusan sarjana di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri yang ada, seperti industri kreatif dan teknologi yang semakin berkembang di Kota Surabaya.

Tabel II.204
TPT Kota Surabaya Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase pengangguran terbuka lulusan SD ke bawah	8,13	1,54	5,34	3,46	4,91
2	Persentase pengangguran terbuka lulusan SMP	9,45	12,92	7,54	6,66	5,73
3	Persentase pengangguran terbuka lulusan SMA	11,55	12,09	8,85	6,28	4,67
4	Persentase pengangguran terbuka lulusan SMK	11,31	5,18	8,19	5,52	4,63
5	Persentase pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi	7.66	4,95	3,62	3,06	4,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan tersebut, antara lain semakin tingginya tingkat pendidikan angkatan kerja dan meratanya gender dalam partisipasi angkatan kerja yang berdampak pada semakin turunnya tingkat pengangguran terbuka terutama pada tingkat pendidikan tinggi, daya saing daerah sektor ketenagakerjaan Kota Surabaya dapat diproyeksikan semakin baik dan berkualitas pada periode ke depan. Kunci utama dalam daya saing sumber daya manusia adalah perbaikan kualitas pendidikan yang mampu membuka akses terhadap berbagai kesempatan dan potensi pekerjaan, bukan hanya pada pasar kerja formal melainkan juga informal yang justru mampu menciptakan lowongan pekerjaan.

Dari data di atas menunjukkan bahwa struktur angkatan kerja di Kota Surabaya berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tertinggi berada pada tingkat pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas. Tertinggi selanjutnya yakni berada pada tingkat pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi. Sebagaimana selayaknya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang semakin baik pula. Artinya, semakin baik tingkat pendidikan dari penduduk yang bekerja, maka semakin tinggi nilai produktivitas yang bisa dihasilkan, begitu sebaliknya. Sehingga besarnya proporsi jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tertinggi pada jenjang sekolah menengah atas dan perguruan tinggi di Kota Surabaya tersebut menjadi potensi tenaga kerja yang berdaya saing di pasar kerja. Ditambah lagi, untuk meningkatkan tenaga kerja di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya mengadakan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk memenuhi tuntutan dan standar pasar tenaga kerja yang terus berkembang pesat.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel II.205
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	675.558	686.916	678.456	666.337	644.537
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	193.749	208.815	220.805	231.656	245.651
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	869.307	895.731	899.261	897.993	890.188
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	2.101.645	2.092.132	2.110.025	2.120.029	2.113.672
5	Rasio ketergantungan	0,414	0,428	0,426	0,424	0,421

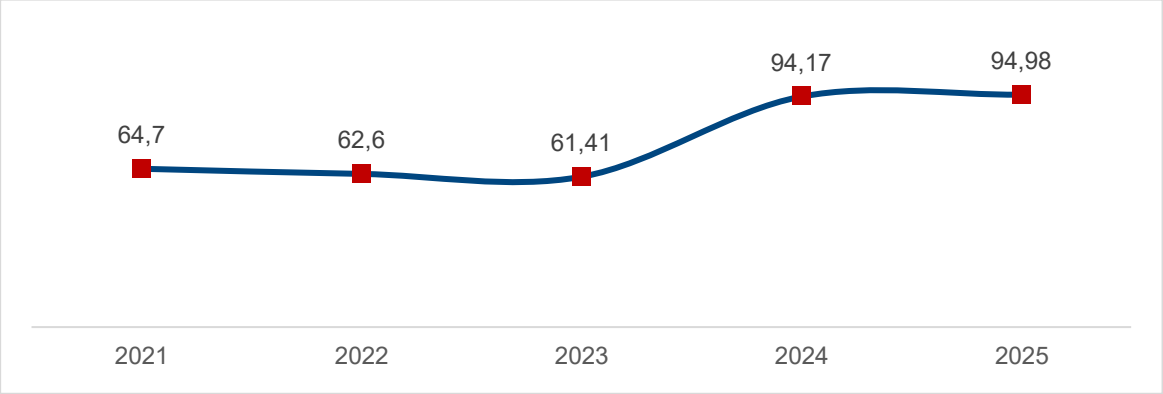
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk Surabaya pada tahun 2025 sesuai DKB Semester 2 Tahun 2025, antara lain kelompok usia non produktif, yakni penduduk dengan usia kurang dari 15 tahun dan usia lebih dari 64 tahun terdapat penurunan sebesar 7.805 jiwa bila dibandingkan dengan data tahun 2024. Begitupun, jumlah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) menurun sebesar 6.357 jiwa dari tahun 2024. Sehingga rasio ketergantungan sedikit turun menjadi sebesar 0,421 yang artinya, setiap 100 orang yang berusia produktif/bekerja mempunyai tanggungan sebanyak 42 hingga 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dengan demikian, program-program di tahun 2026 dan 2027 perlu

dioptimalkan untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas SDM pada kelompok usia produktif.

2.1.4.4.2 Indeks Inovasi Daerah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), inovasi, serta produktivitas ekonomi memegang peranan penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kreativitas dan adaptasi suatu daerah terhadap perkembangan zaman adalah Indeks Inovasi Daerah. Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan instrumen evaluasi komprehensif yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengembangkan kebijakan, teknologi, dan pendekatan baru dalam mendukung efisiensi layanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Inovasi daerah berperan dalam mempercepat digitalisasi layanan publik, mendorong lahirnya industri kreatif, serta memperkuat sektor ekonomi berbasis teknologi. Oleh karena itu, peningkatan indeks inovasi menjadi salah satu prioritas bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan teknologi.



Gambar II.31 Indeks Inovasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2021–2025

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2026

Pada tahun 2024, Indeks Inovasi Daerah Kota Surabaya meningkat signifikan menjadi 94,17 dan mencapai angka 94,98 pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam mendorong ekosistem inovasi melalui penguatan infrastruktur digital, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi, serta pengembangan riset di berbagai sektor pembangunan.

Salah satu sektor unggulan yang berpotensi diperkuat melalui inovasi adalah transportasi dan pergudangan. Sektor ini merupakan Produk Unggulan Daerah (PUD) Kota Surabaya yang berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya sebagai penopang aktivitas distribusi regional dan nasional. Penguatan riset dan inovasi

pada sektor ini dapat diarahkan melalui pengembangan platform digital pelacakan barang, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam manajemen armada, serta sistem informasi geografis untuk optimalisasi rute distribusi.

Potensi tersebut dapat diperkuat melalui kolaborasi triple helix antara Pemerintah Kota Surabaya, perguruan tinggi, dan pelaku industri logistik. Dengan strategi riset yang berbasis kebutuhan lokal, sektor transportasi dan pergudangan tidak hanya menjadi penopang ekonomi, tetapi juga mendorong transformasi menuju sistem logistik yang lebih efisien, cerdas, ramah lingkungan, dan berdaya saing.

2.1.8 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam pembangunan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang berkolaborasi dengan kebijakan perencanaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun capaian TPB di Kota Surabaya pada tahun 2024, adalah sebagai berikut.

Tabel II.206
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Surabaya Tahun 2024

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Tercapai	Akan Tercapai	Belum Terlaksana	Tidak Ada Data	Bukan Kewenangan
1	Tanpa Kemiskinan	26	16	8	-	1	1
2	Tanpa Kelaparan	10	5	1	-	4	-
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	33	15	10	-	8	-
4	Pendidikan Berkualitas	18	11	3	-	-	4
5	Kesetaraan Gender	15	7	3	-	4	1

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Tercapai	Akan Tercapai	Belum Terlaksana	Tidak Ada Data	Bukan Kewenangan
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	14	12	-	-	2	-
7	Energi Bersih dan Terjangkau	6	-	-	-	-	6
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	18	9	-	-	9	-
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	11	3	1	-	5	2
10	Berkurangnya Kesenjangan	7	3	1	-	3	-
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	12	10	1	-	1	-
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertangung Jawab	6	3	-	-	3	-
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	1	1	-	-	-
14	Ekosistem Lautan	2	-	-	-	-	2
15	Ekosistem Daratan	3	2	-	-	-	1
16	Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh	23	12	6	-	5	-
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	16	10	1	3	2	-
Total		**222**	**119**	**36**	**3**	**47**	**17**

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya, 2026

Mengacu tabel di atas, sebanyak 119 indikator dari 222 indikator atau sebesar 54% indikator TPB masuk dalam kategori sudah mencapai target. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung pencapaian TPB melalui program pembangunan dan kegiatan prioritas utamanya di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ekonomi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025

Pada tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum rata-rata mampu mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dan fleksibilitas penyelenggara pemerintahan kota cukup tinggi dari semua elemen, dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang ada. Fungsi dan peran birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan dasar masih tetap dapat dipertahankan dengan baik.

2.2.1.1 Kinerja Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mampu mencatat kinerja yang baik, dengan angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan ini mencapai 99,13% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Adapun rincian capaian per bidang urusan sebagai berikut:

1) Pendidikan sebesar 96,38%;
2) Kesehatan sebesar 99,68%;
3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 98,96%;
4) Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 100%;
5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar 99,94%;
6) Sosial sebesar 100%.

2.2.1.2 Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Secara umum, kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar mencapai 99,68% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Adapun rincian capaian per bidang urusan sebagai berikut:

1) Tenaga Kerja sebesar 100%;
2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 99,97%;
3) Pangan sebesar 100%;
4) Pertanahan sebesar 100%;
5) Lingkungan Hidup sebesar 100%;
6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 100%;
7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 100%;
8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 100%;
9) Perhubungan sebesar 100%;
10) Komunikasi dan Informatika sebesar 100%;
11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar 98,73%;
12) Penanaman Modal sebesar 100%;
13) Kepemudaan dan Olahraga sebesar 100%;
14) Statistik sebesar 100%;
15) Persandian sebesar 100%;
16) Kebudayaan sebesar 99,92%;
17) Perpustakaan sebesar 100%;
18) Kearsipan sebesar 100%.

2.2.1.3 Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

Secara umum, kinerja Urusan Pilihan menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan pemerintahan pilihan mencapai 100% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Adapun rincian capaian per bidang urusan sebagai berikut:

1) Kelautan dan Perikanan sebesar 100%;
2) Pariwisata sebesar 100%;
3) Pertanian sebesar 100%;
4) Perdagangan sebesar 100%;
5) Perindustrian sebesar 100%.

2.2.1.4 Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terlaksana dengan baik, dengan angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 99,87% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Rincian capaian Bidang Urusan Sekretariat Daerah sebesar 99,88% dan Bidang Urusan Sekretariat DPRD sebesar 99,71%.

2.2.1.5 Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan secara umum menunjukkan kinerja yang baik, dengan angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 98,05% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Rincian capaian per bidang urusan sebagai berikut:

1) Perencanaan sebesar 100%;
2) Keuangan sebesar 100%;
3) Kepegawaian sebesar 92,22%;
4) Pendidikan dan Pelatihan sebesar 100%;
5) Penelitian dan Pengembangan sebesar 100%.

2.2.1.6 Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Secara umum, kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan menunjukkan kinerja yang baik, dengan angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan mencapai 99,78% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.1.7 Kinerja Unsur Kewilayahan

Kinerja Unsur Kewilayahan yang meliputi Urusan Kecamatan terlaksana dengan baik, melalui angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 99,71% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.1.8 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja Unsur Pemerintahan Umum yang meliputi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik telah terlaksana dengan baik, melalui angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pemerintahan Umum mencapai 99,89% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Kategori **Sangat Tinggi**.

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2026 serta realisasi tahun pertama RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025–2029 yang bersumber dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah disajikan pada Lampiran II. Evaluasi tersebut mencakup realisasi capaian target kinerja keluaran (output) subkegiatan, realisasi target kinerja program, serta tingkat pencapaian indikator pembangunan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Triwulan II Tahun 2026 dilakukan berdasarkan hasil pengisian Modul Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Dalev) pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh seluruh Perangkat Daerah. Data yang diinput oleh masing-masing Perangkat Daerah selanjutnya diverifikasi dan dianalisis sebagai dasar penilaian terhadap tingkat capaian kinerja program dan subkegiatan serta realisasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026. Berbeda dengan pelaksanaan evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan sistem monitoring dan evaluasi internal Pemerintah Kota Surabaya, mulai Tahun 2026 proses pengukuran dan pelaporan kinerja mengacu pada Modul SIPD Dalev sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Perubahan mekanisme ini menyebabkan adanya penyesuaian pada cakupan indikator, struktur pelaporan, dan metode perhitungan capaian kinerja, sehingga hasil evaluasi Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Hasil penelaahan terhadap monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026 mencakup penilaian terhadap 484 (empat ratus delapan puluh empat) indikator program dan 1.997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) indikator subkegiatan. Berdasarkan target kinerja tahunan, rata-rata capaian kinerja hingga Triwulan II mencapai 49,51%, sehingga berada pada kategori Sangat Rendah.

Capaian tersebut dipengaruhi oleh karakteristik target kinerja dan tahapan pelaksanaan program pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Surabaya Tahun

2025–2029. Sebagian besar indikator program dan subkegiatan direncanakan mencapai target optimal pada Triwulan III dan Triwulan IV, seiring dengan selesainya tahapan persiapan, pengadaan barang dan jasa, proses administrasi, serta pelaksanaan kegiatan yang bersifat bertahap. Selain itu, terdapat sejumlah indikator yang bersifat kumulatif sehingga capaian kinerja akan meningkat secara signifikan pada akhir tahun anggaran setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dan hasilnya dapat diukur. Oleh karena itu, capaian Triwulan II belum dapat digunakan sebagai indikator akhir keberhasilan kinerja perangkat daerah dan masih memerlukan pemantauan secara berkelanjutan pada triwulan berikutnya.

Tabel II.207
Rekapitulasi Capaian PD pada Evaluasi Hasil RKPD Kota Surabaya sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

No	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata capaaian kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Program	Ind Sub Kegiatan	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	2.193.939.380.187,00	84,67	35,2	891.439.781.618,00	40,63
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.163.136.807.193,00	99,07	96,27	461.050.644.036,00	39,64
3	1.02.0.00.0.00.01.0001	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	2.670.019.310,00	0	75	9.127.672,00	0,34
4	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan	123.585.000,00	0	50	19.519.650,00	15,79
5	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Asemrowo	4.072.701.645,00	0	59,03	690.013.731,00	16,94
6	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Balas Klumprik	1.649.145.158,00	0	61,57	263.340.350,00	15,97
7	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Balongsari	4.143.543.093,00	0	58,44	551.635.356,00	13,31
8	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Bangkingan	1.920.642.975,00	0	58,12	248.655.769,00	12,95
9	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Banyu Urip	4.871.841.045,00	0	55,02	1.043.914.472,00	21,43
10	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Benowo	5.712.449.808,00	0	58,68	671.156.916,00	11,75
11	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Bulak Banteng	3.753.028.924,00	0	59,57	795.016.423,00	21,18
12	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Dr. Soetomo	4.252.544.924,00	0	56,08	610.580.118,00	14,36
13	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Dukuh Kupang	5.298.743.741,00	0	53,86	834.587.880,00	15,75
14	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Dupak	2.849.845.857,00	0	51,94	531.211.199,00	18,64
15	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Gading	8.823.374.261,00	0	52,27	896.526.289,00	10,16
16	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Gayungan	3.961.850.787,00	0	100	518.229.377,00	13,08
17	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Gundih	3.352.558.002,00	0	100	418.825.260,00	12,49
18	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Gunung Anyar	3.883.068.128,00	0	100	652.193.502,00	16,8
19	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Jagir	5.689.917.493,00	0	100	900.577.093,00	15,83
20	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Jemursari	2.326.445.463,00	0	60,66	338.534.977,00	14,55
21	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Jeruk	2.740.551.991,00	0	58,64	346.815.340,00	12,65
22	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Kalijudan	3.384.895.895,00	0	48,42	426.518.439,00	12,6
23	1.02.0.00.0.00.01.0021	Puskesmas Kalirungkut	3.972.494.929,00	0	56,62	514.449.612,00	12,95
24	1.02.0.00.0.00.01.0022	Puskesmas Kebonsari	4.795.428.414,00	0	100	770.954.610,00	16,08
25	1.02.0.00.0.00.01.0023	Puskesmas Kedungdoro	3.700.292.728,00	0	100	476.703.177,00	12,88
26	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Kedurus	5.754.763.736,00	0	59,65	821.442.463,00	14,27
27	1.02.0.00.0.00.01.0025	Puskesmas Kenjeran	3.657.834.673,00	0	54,7	515.058.543,00	14,08
28	1.02.0.00.0.00.01.0026	Puskesmas Keputih	2.858.347.370,00	0	59,06	490.542.450,00	17,16
29	1.02.0.00.0.00.01.0027	Puskesmas Ketabang	2.376.873.720,00	0	60,23	327.860.253,00	13,79
30	1.02.0.00.0.00.01.0028	Puskesmas Klampis Ngasem	2.416.539.130,00	0	57,94	453.550.513,00	18,77
31	1.02.0.00.0.00.01.0029	Puskesmas Krembangan Selatan	4.495.993.135,00	0	59,83	758.230.635,00	16,86
32	1.02.0.00.0.00.01.0030	Puskesmas Lidah Kulon	2.913.053.198,00	0	58,58	419.903.614,00	14,41
33	1.02.0.00.0.00.01.0031	Puskesmas Lontar	3.855.981.526,00	0	100	494.454.768,00	12,82
34	1.02.0.00.0.00.01.0032	Puskesmas Made	1.937.024.078,00	0	100	396.177.650,00	20,45

No	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata capaaian kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Program	Ind Sub Kegiatan	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
35	1.02.0.00.0.00.01.0033	Puskesmas Manukan Kulon	5.347.950.935,00	0	55,98	849.726.931,00	15,89
36	1.02.0.00.0.00.01.0034	Puskesmas Medokan Ayu	4.926.781.970,00	0	53,09	861.124.532,00	17,48
37	1.02.0.00.0.00.01.0035	Puskesmas Menur	3.471.550.933,00	0	53,41	753.915.471,00	21,72
38	1.02.0.00.0.00.01.0036	Puskesmas Mojo	5.473.599.529,00	0	52,42	719.848.555,00	13,15
39	1.02.0.00.0.00.01.0037	Puskesmas Moro Krembangan	4.239.471.570,00	0	59,47	630.676.102,00	14,88
40	1.02.0.00.0.00.01.0038	Puskesmas Mulyorejo	4.099.694.443,00	0	58,2	776.764.874,00	18,95
41	1.02.0.00.0.00.01.0039	Puskesmas Ngagel Rejo	4.574.429.639,00	0	57,85	556.675.362,00	12,17
42	1.02.0.00.0.00.01.0040	Puskesmas Pacar Keling	4.621.909.647,00	0	57,47	636.517.244,00	13,77
43	1.02.0.00.0.00.01.0041	Puskesmas Pakis	2.928.067.180,00	0	96,18	540.887.113,00	18,47
44	1.02.0.00.0.00.01.0042	Puskesmas Pegirian	4.229.605.428,00	0	59,18	513.484.398,00	12,14
45	1.02.0.00.0.00.01.0043	Puskesmas Peneleh	3.797.435.146,00	0	59,9	467.565.787,00	12,31
46	1.02.0.00.0.00.01.0044	Puskesmas Perak Timur	6.144.987.751,00	0	58,03	804.913.721,00	13,1
47	1.02.0.00.0.00.01.0045	Puskesmas Pucangsewu	4.189.828.344,00	0	54,68	637.200.611,00	15,21
48	1.02.0.00.0.00.01.0046	Puskesmas Putat Jaya	3.825.916.733,00	0	55,44	579.706.526,00	15,15
49	1.02.0.00.0.00.01.0047	Puskesmas Rangkah	5.971.677.222,00	0	56,07	752.045.060,00	12,59
50	1.02.0.00.0.00.01.0048	Puskesmas Sawahan	4.328.154.806,00	0	52,28	577.016.860,00	13,33
51	1.02.0.00.0.00.01.0049	Puskesmas Sawah Pulo	2.928.034.339,00	0	57,07	415.617.926,00	14,19
52	1.02.0.00.0.00.01.0050	Puskesmas Sememi	8.255.452.170,00	0	52,06	873.449.185,00	10,58
53	1.02.0.00.0.00.01.0051	Puskesmas Sidosermo	3.232.000.100,00	0	100	495.310.124,00	15,33
54	1.02.0.00.0.00.01.0052	Puskesmas Sidotopo	4.401.216.679,00	0	57,16	501.134.842,00	11,39
55	1.02.0.00.0.00.01.0053	Puskesmas Sidotopo Wetan	8.560.167.797,00	0	62,09	1.084.466.325,00	12,67
56	1.02.0.00.0.00.01.0054	Puskesmas Simolawang	4.699.497.900,00	0	60,16	524.809.436,00	11,17
57	1.02.0.00.0.00.01.0055	Puskesmas Simomulyo	5.692.679.348,00	0	55,87	866.074.136,00	15,21
58	1.02.0.00.0.00.01.0056	Puskesmas Siwalankerto	2.565.828.972,00	0	58,15	429.824.684,00	16,75
59	1.02.0.00.0.00.01.0057	Puskesmas Tambak Wedi	2.621.768.468,00	0	49,49	286.894.924,00	10,94
60	1.02.0.00.0.00.01.0058	Puskesmas Tambakrejo	4.391.317.567,00	0	56,71	658.128.355,00	14,99
61	1.02.0.00.0.00.01.0059	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	5.926.236.867,00	0	96,3	1.436.608.590,00	24,24
62	1.02.0.00.0.00.01.0060	Puskesmas Tanjungsari	2.926.040.889,00	0	57,36	508.009.619,00	17,36
63	1.02.0.00.0.00.01.0061	Puskesmas Tembok Dukuh	4.591.844.800,00	0	55,55	579.780.182,00	12,63
64	1.02.0.00.0.00.01.0062	Puskesmas Tenggilis	4.360.415.167,00	0	56,53	637.620.811,00	14,62
65	1.02.0.00.0.00.01.0063	Puskesmas Wiyung	4.951.501.878,00	0	58,56	702.789.254,00	14,19
66	1.02.0.00.0.00.01.0064	Puskesmas Wonokromo	3.189.913.523,00	0	59,17	504.476.737,00	15,81
67	1.02.0.00.0.00.01.0065	Puskesmas Wonokusumo	7.634.923.931,00	0	59,18	880.971.426,00	11,54
68	1.02.0.00.0.00.61.0000	RSUD Bhakti Dharma Husada	300.161.033.969,00	100	69,52	90.436.549.120,00	30,13
69	1.02.0.00.0.00.62.0000	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	422.334.928.317,00	100	100	130.498.840.515,00	30,9
70	1.02.0.00.0.00.63.0000	RSUD Eka Candrarini	214.819.929.179,00	100	82,55	62.938.030.411,00	29,3
71	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	2.355.293.357.927,00	86,44	65,51	350.891.466.341,00	14,9
72	1.04.1.03.2.10.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	451.859.797.968,00	60,53	34,28	102.742.425.245,00	22,74
73	1.04.1.03.2.10.01.0001	UPTD Rumah Susun	20.151.491.595,00	0	100	6.603.512.555,00	32,77
74	1.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45.936.245.188,00	87,36	44,89	18.772.401.979,00	40,87
75	1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	151.933.501.314,00	100	65,35	56.631.669.785,00	37,27
76	1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	153.733.582.774,00	100	57,17	58.971.009.679,00	38,36
77	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	68.204.664.909,00	99,07	82,51	25.653.106.436,00	37,61

No	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata capaaian kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Program	Ind Sub Kegiatan	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
78	1.06.0.00.0.00.01.0001	UPTD Griya Werda dan Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat	8.945.403.825,00	0	100	3.332.656.241,00	37,26
79	1.06.0.00.0.00.01.0002	UPTD Kampung Anak Negeri	18.653.095.853,00	0	66,18	3.900.445.805,00	20,91
80	1.06.0.00.0.00.01.0003	UPTD Liponsos Keputih	15.370.629.423,00	0	92,85	5.429.796.672,00	35,33
81	2.07.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	36.763.696.443,00	57,34	42,43	14.044.889.556,00	38,2
82	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	57.067.909.591,00	37,6	61,07	19.676.298.514,00	34,48
83	2.09.3.25.3.27.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	46.897.318.615,00	80,41	47,31	17.450.438.042,00	37,21
84	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	713.281.529.042,00	100	55,45	295.203.735.495,00	41,39
85	2.11.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pemakaman	21.291.058.191,00	0	100	6.171.844.947,00	28,99
86	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.774.591.121,00	100	54,92	28.443.758.829,00	46,8
87	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	453.664.138.961,00	82,48	44,69	131.495.664.296,00	28,99
88	2.15.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pengelolaan Transportasi Umum	220.975.584.895,00	100	96,23	84.743.262.246,00	38,35
89	2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Parkir Tepi Jalan Umum	35.596.667.754,00	100	75	13.644.617.557,00	38,33
90	2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	128.598.181.119,00	30,43	53,88	36.310.909.879,00	28,24
91	2.17.3.30.0.00.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	53.880.829.896,00	51,33	54,96	23.258.568.197,00	43,17
92	2.17.3.30.0.00.01.0001	UPTD Metrologi Legal	0	71,86	0	0	0
93	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.868.669.998,00	57,48	38,77	10.322.349.695,00	45,14
94	2.22.2.19.3.26.01.0000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	292.610.520.902,00	44,78	50,24	46.187.066.008,00	15,78
95	2.22.2.19.3.26.01.0001	UPTD Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya	10.176.605.934,00	0	70,14	2.775.717.320,00	27,28
96	2.22.2.19.3.26.01.0002	UPTD Pengelolaan Obyek Wisata	6.657.822.651,00	0	100	2.252.599.244,00	33,83
97	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	44.872.922.143,00	77,68	79,84	20.733.834.359,00	46,21
98	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	349.423.269.705,00	58,74	39,44	136.566.314.730,00	39,08
99	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	233.538.959.143,00	80,28	80,15	94.722.415.971,00	40,56
100	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	39.453.325.259,00	94,48	66,88	15.809.948.251,00	40,07
101	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan Daerah	82.064.758.941,00	58	60,25	36.353.086.298,00	44,3
102	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	229.280.289.507,00	31,42	36,87	43.260.673.989,00	18,87
103	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.277.365.588,00	56,9	100	13.960.924.603,00	44,64
104	5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	46.012.161.818,00	67,98	35,32	6.826.130.628,00	14,84
105	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	32.366.084.948,00	58,83	54,96	15.719.770.243,00	48,57
106	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kec. Asemrowo	23.819.528.259,00	75,46	39,88	10.447.567.184,00	43,86
107	7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Asemrowo	4.480.691.132,00	0	0	478.159.581,00	10,67

No	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata capaaian kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Program	Ind Sub Kegiatan	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
108	7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Genting Kalianak	2.315.365.792,00	0	0	221.716.214,00	9,58
109	7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Tambak Sarioso	2.415.004.302,00	0	0	147.424.470,00	6,1
110	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kec. Benowo	29.137.967.541,00	60,6	41,28	13.395.098.068,00	45,97
111	7.01.0.00.0.00.02.0001	Kelurahan Kandangan	3.673.352.218,00	0	0	775.138.247,00	21,1
112	7.01.0.00.0.00.02.0002	Kelurahan Romokalisari	3.048.607.855,00	0	0	477.099.464,00	15,65
113	7.01.0.00.0.00.02.0003	Kelurahan Sememi	5.197.579.824,00	0	0	894.660.225,00	17,21
114	7.01.0.00.0.00.02.0004	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	2.600.247.927,00	0	0	256.308.625,00	9,86
115	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kec. Bubutan	33.607.535.788,00	60,52	41,82	15.213.004.060,00	45,27
116	7.01.0.00.0.00.03.0001	Kelurahan Alun-Alun Contong	2.816.362.407,00	0	0	266.798.391,00	9,47
117	7.01.0.00.0.00.03.0002	Kelurahan Bubutan	4.167.602.593,00	0	0	546.242.526,00	13,11
118	7.01.0.00.0.00.03.0003	Kelurahan Gundih	5.361.673.867,00	0	0	702.211.875,00	13,1
119	7.01.0.00.0.00.03.0004	Kelurahan Jepara	4.188.793.309,00	0	0	736.694.599,00	17,59
120	7.01.0.00.0.00.03.0005	Kelurahan Tembok Dukuh	5.250.558.898,00	0	0	752.898.146,00	14,34
121	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kec. Bulak	26.028.442.761,00	59,92	41,62	12.227.876.349,00	46,98
122	7.01.0.00.0.00.04.0001	Kelurahan Bulak	3.308.847.974,00	0	0	1.127.462.356,00	34,07
123	7.01.0.00.0.00.04.0002	Kelurahan Kedung Cowek	2.276.517.897,00	0	0	712.590.153,00	31,3
124	7.01.0.00.0.00.04.0003	Kelurahan Kenjeran	2.231.461.714,00	0	0	296.996.748,00	13,31
125	7.01.0.00.0.00.04.0004	Kelurahan Sukolilo Baru	2.802.925.346,00	0	0	632.682.986,00	22,57
126	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kec. Dukuh Pakis	28.109.662.184,00	59,97	56,75	12.838.755.728,00	45,67
127	7.01.0.00.0.00.05.0001	Kelurahan Dukuh Kupang	3.723.979.724,00	0	0	442.712.265,00	11,89
128	7.01.0.00.0.00.05.0002	Kelurahan Dukuh Pakis	4.338.038.888,00	0	0	490.953.100,00	11,32
129	7.01.0.00.0.00.05.0003	Kelurahan Gunungsari	2.918.070.933,00	0	0	260.031.376,00	8,91
130	7.01.0.00.0.00.05.0004	Kelurahan Pradah Kalikendal	3.465.867.745,00	0	0	441.447.025,00	12,74
131	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kec. Gayungan	27.571.577.032,00	60,15	38,9	13.024.081.020,00	47,24
132	7.01.0.00.0.00.06.0001	Kelurahan Dukuh Menanggal	2.653.618.076,00	0	0	363.415.353,00	13,7
133	7.01.0.00.0.00.06.0002	Kelurahan Gayungan	4.182.662.046,00	0	0	554.478.443,00	13,26
134	7.01.0.00.0.00.06.0003	Kelurahan Ketintang	4.843.708.109,00	0	0	1.197.831.472,00	24,73
135	7.01.0.00.0.00.06.0004	Kelurahan Menanggal	2.325.227.594,00	0	0	340.704.923,00	14,65
136	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kec. Genteng	31.691.731.446,00	60,13	38,26	14.812.446.957,00	46,74
137	7.01.0.00.0.00.07.0001	Kelurahan Embong Kaliasin	3.587.949.265,00	0	0	544.342.185,00	15,17
138	7.01.0.00.0.00.07.0002	Kelurahan Genteng	2.628.654.400,00	0	0	394.473.827,00	15,01
139	7.01.0.00.0.00.07.0003	Kelurahan Kapasari	3.347.545.715,00	0	0	517.243.634,00	15,45
140	7.01.0.00.0.00.07.0004	Kelurahan Ketabang	2.754.922.629,00	0	0	362.482.768,00	13,16
141	7.01.0.00.0.00.07.0005	Kelurahan Peneleh	3.425.647.693,00	0	0	617.107.894,00	18,01
142	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kec. Gubeng	40.290.150.710,00	60,33	42,99	17.979.562.196,00	44,63
143	7.01.0.00.0.00.08.0001	Kelurahan Airlangga	3.787.247.745,00	0	0	813.683.096,00	21,48
144	7.01.0.00.0.00.08.0002	Kelurahan Baratajaya	3.435.321.710,00	0	0	512.066.688,00	14,91
145	7.01.0.00.0.00.08.0003	Kelurahan Gubeng	2.786.878.548,00	0	0	429.468.731,00	15,41
146	7.01.0.00.0.00.08.0004	Kelurahan Kertajaya	4.080.231.358,00	0	0	711.623.557,00	17,44
147	7.01.0.00.0.00.08.0005	Kelurahan Mojo	4.930.555.626,00	0	0	895.989.001,00	18,17
148	7.01.0.00.0.00.08.0006	Kelurahan Pucang Sewu	2.926.946.844,00	0	0	903.542.581,00	30,87
149	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kec. Gunung Anyar	28.357.189.539,00	62,95	45,39	13.379.109.209,00	47,18
150	7.01.0.00.0.00.09.0001	Kelurahan Gunung Anyar	2.972.374.456,00	0	33,33	824.851.482,00	27,75
151	7.01.0.00.0.00.09.0002	Kelurahan Gunung Anyar Tambak	2.914.461.534,00	0	0	913.607.767,00	31,35
152	7.01.0.00.0.00.09.0003	Kelurahan Rungkut Menanggal	2.711.538.669,00	0	0	693.762.143,00	25,59
153	7.01.0.00.0.00.09.0004	Kelurahan Rungkut Tengah	2.718.475.660,00	0	0	482.491.086,00	17,75
154	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kec. Jambangan	30.155.807.007,00	59,73	40,1	14.230.404.903,00	47,19
155	7.01.0.00.0.00.10.0001	Kelurahan Jambangan	4.214.567.215,00	0	0	1.552.765.066,00	36,84
156	7.01.0.00.0.00.10.0002	Kelurahan Karah	3.474.144.505,00	0	0	1.094.264.493,00	31,5

No	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata capaaian kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Program	Ind Sub Kegiatan	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
157	7.01.0.00.0.00.10.0003	Kelurahan Kebonsari	2.776.810.796,00	0	0	292.843.500,00	10,55
158	7.01.0.00.0.00.10.0004	Kelurahan Pagesangan	2.680.171.324,00	0	0	276.147.301,00	10,3
159	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kec. Karangpilang	28.594.331.923,00	60,13	35,83	13.285.734.182,00	46,46
160	7.01.0.00.0.00.11.0001	Kelurahan Karang Pilang	2.222.667.620,00	0	0	406.329.655,00	18,28
161	7.01.0.00.0.00.11.0002	Kelurahan Kebraon	3.851.456.012,00	0	0	809.216.625,00	21,01
162	7.01.0.00.0.00.11.0003	Kelurahan Kedurus	3.524.067.317,00	0	0	920.317.796,00	26,12
163	7.01.0.00.0.00.11.0004	Kelurahan Waru Gunung	3.739.820.276,00	0	0	540.800.280,00	14,46
164	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kec. Kenjeran	34.493.435.987,00	60,17	40,95	15.973.591.128,00	46,31
165	7.01.0.00.0.00.12.0001	Kelurahan Bulak Banteng	3.619.019.503,00	0	0	1.592.489.958,00	44
166	7.01.0.00.0.00.12.0002	Kelurahan Sidotopo Wetan	6.222.165.572,00	0	0	1.162.039.165,00	18,68
167	7.01.0.00.0.00.12.0003	Kelurahan Tambak Wedi	3.358.619.503,00	0	0	1.167.807.639,00	34,77
168	7.01.0.00.0.00.12.0004	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	6.180.165.570,00	0	0	1.054.235.103,00	17,06
169	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kec. Krembangan	35.081.131.690,00	60,06	39,42	16.037.609.963,00	45,72
170	7.01.0.00.0.00.13.0001	Kelurahan Dupak	3.753.677.864,00	0	0	921.217.397,00	24,54
171	7.01.0.00.0.00.13.0002	Kelurahan Kemayoran	5.432.125.666,00	0	0	571.456.199,00	10,52
172	7.01.0.00.0.00.13.0003	Kelurahan Krembangan Selatan	4.188.736.928,00	0	0	450.992.121,00	10,77
173	7.01.0.00.0.00.13.0004	Kelurahan Morokrembangan	4.832.287.092,00	0	0	568.524.170,00	11,77
174	7.01.0.00.0.00.13.0005	Kelurahan Perak Barat	4.329.251.385,00	0	0	533.394.255,00	12,32
175	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kec. Lakarsantri	33.924.907.554,00	60,21	42,72	16.195.096.438,00	47,74
176	7.01.0.00.0.00.14.0001	Kelurahan Bangkingan	2.657.553.951,00	0	0	352.243.086,00	13,25
177	7.01.0.00.0.00.14.0002	Kelurahan Jeruk	2.387.289.848,00	0	0	263.247.135,00	11,03
178	7.01.0.00.0.00.14.0003	Kelurahan Lakarsantri	3.689.241.224,00	0	0	240.597.314,00	6,52
179	7.01.0.00.0.00.14.0004	Kelurahan Lidah Kulon	3.456.044.117,00	0	0	506.071.551,00	14,64
180	7.01.0.00.0.00.14.0005	Kelurahan Lidah Wetan	2.890.772.877,00	0	0	210.526.494,00	7,28
181	7.01.0.00.0.00.14.0006	Kelurahan Sumurwelut	2.934.721.643,00	0	0	336.779.309,00	11,48
182	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kec. Mulyorejo	36.526.736.064,00	60,02	40,49	16.748.605.740,00	45,85
183	7.01.0.00.0.00.15.0001	Kelurahan Dukuh Sutorejo	3.532.880.101,00	0	0	1.476.738.284,00	41,8
184	7.01.0.00.0.00.15.0002	Kelurahan Kalijudan	4.596.244.371,00	0	0	1.878.688.062,00	40,87
185	7.01.0.00.0.00.15.0003	Kelurahan Kalisari	4.245.051.095,00	0	0	818.901.360,00	19,29
186	7.01.0.00.0.00.15.0004	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	2.642.680.267,00	0	0	1.355.365.029,00	51,29
187	7.01.0.00.0.00.15.0005	Kelurahan Manyar Sabrangan	3.535.059.044,00	0	0	752.201.035,00	21,28
188	7.01.0.00.0.00.15.0006	Kelurahan Mulyorejo	3.593.749.009,00	0	0	714.849.515,00	19,89
189	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kec. Pabean Cantian	30.099.798.733,00	60,08	41,41	13.835.215.641,00	45,96
190	7.01.0.00.0.00.16.0001	Kelurahan Bongkaran	2.901.139.037,00	0	0	484.661.986,00	16,71
191	7.01.0.00.0.00.16.0002	Kelurahan Krembangan Utara	4.250.187.566,00	0	0	634.340.388,00	14,92
192	7.01.0.00.0.00.16.0003	Kelurahan Nyamplungan	3.249.368.637,00	0	0	519.894.762,00	16
193	7.01.0.00.0.00.16.0006	Kelurahan Tanjung Perak	5.476.150.479,00	0	0	1.025.341.495,00	18,72
194	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kec. Pakal	29.195.794.183,00	71,86	38,36	12.901.828.176,00	44,19
195	7.01.0.00.0.00.17.0001	Kelurahan Babat Jerawat	4.555.598.987,00	0	0	991.866.526,00	21,77
196	7.01.0.00.0.00.17.0002	Kelurahan Benowo	3.910.726.421,00	0	0	456.249.724,00	11,67
197	7.01.0.00.0.00.17.0003	Kelurahan Pakal	3.706.421.791,00	0	33,33	1.750.021.913,00	47,22
198	7.01.0.00.0.00.17.0004	Kelurahan Sumberejo	4.503.288.070,00	0	0	651.105.711,00	14,46
199	7.01.0.00.0.00.18.0000	Kec. Rungkut	41.128.638.885,00	59,37	38,9	18.537.554.862,00	45,07
200	7.01.0.00.0.00.18.0001	Kelurahan Kalirungkut	4.068.468.404,00	0	0	589.300.763,00	14,48
201	7.01.0.00.0.00.18.0002	Kelurahan Kedung Baruk	3.365.570.565,00	0	0	546.296.425,00	16,23
202	7.01.0.00.0.00.18.0003	Kelurahan Medokan Ayu	4.447.111.545,00	0	0	895.865.736,00	20,14
203	7.01.0.00.0.00.18.0004	Kelurahan Penjaringansari	3.170.898.178,00	0	0	557.539.934,00	17,58
204	7.01.0.00.0.00.18.0005	Kelurahan Rungkut Kidul	3.084.926.237,00	0	0	390.716.944,00	12,67
205	7.01.0.00.0.00.18.0006	Kelurahan Wonorejo	2.518.617.754,00	0	0	462.396.516,00	18,36
206	7.01.0.00.0.00.19.0000	Kec. Sambikerep	27.537.046.416,00	65,66	43,44	12.808.696.043,00	46,51
207	7.01.0.00.0.00.19.0001	Kelurahan Beringin	2.683.880.303,00	0	0	468.641.292,00	17,46
208	7.01.0.00.0.00.19.0002	Kelurahan Lontar	5.143.940.303,00	0	0	1.309.841.082,00	25,46

No	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata capaaian kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Program	Ind Sub Kegiatan	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
209	7.01.0.00.0.00.19.0003	Kelurahan Made	3.135.409.343,00	0	25	1.249.570.530,00	39,85
210	7.01.0.00.0.00.19.0004	Kelurahan Sambikerep	4.025.410.706,00	0	28,57	1.857.781.947,00	46,15
211	7.01.0.00.0.00.20.0000	Kec. Sawahan	50.853.022.699,00	60,27	42,37	22.876.444.050,00	44,99
212	7.01.0.00.0.00.20.0001	Kelurahan Banyu Urip	4.821.324.526,00	0	0	1.151.103.087,00	23,88
213	7.01.0.00.0.00.20.0002	Kelurahan Kupang Krajan	4.865.609.307,00	0	0	727.034.824,00	14,94
214	7.01.0.00.0.00.20.0003	Kelurahan Pakis	5.257.382.632,00	0	0	742.169.576,00	14,12
215	7.01.0.00.0.00.20.0004	Kelurahan Petemon	4.945.805.072,00	0	0	758.624.564,00	15,34
216	7.01.0.00.0.00.20.0005	Kelurahan Putat Jaya	5.654.411.088,00	0	0	691.373.352,00	12,23
217	7.01.0.00.0.00.20.0006	Kelurahan Sawahan	4.865.211.331,00	0	0	1.091.846.406,00	22,44
218	7.01.0.00.0.00.21.0000	Kec. Semampir	41.574.677.466,00	60,31	38,38	18.298.749.595,00	44,01
219	7.01.0.00.0.00.21.0001	Kelurahan Ampel	3.613.460.913,00	0	0	611.042.613,00	16,91
220	7.01.0.00.0.00.21.0002	Kelurahan Pegirian	5.228.658.107,00	0	0	904.784.383,00	17,3
221	7.01.0.00.0.00.21.0003	Kelurahan Sidotopo	4.693.225.187,00	0	0	992.847.837,00	21,15
222	7.01.0.00.0.00.21.0004	Kelurahan Ujung	4.809.727.876,00	0	0	1.103.577.305,00	22,94
223	7.01.0.00.0.00.21.0005	Kelurahan Wonokusumo	6.106.656.686,00	0	0	1.888.044.688,00	30,92
224	7.01.0.00.0.00.22.0000	Kec. Simokerto	31.978.461.209,00	60,11	36,67	15.024.472.539,00	46,98
225	7.01.0.00.0.00.22.0001	Kelurahan Kapasan	3.798.293.187,00	0	0	839.129.764,00	22,09
226	7.01.0.00.0.00.22.0002	Kelurahan Sidodadi	3.669.428.217,00	0	0	936.959.158,00	25,53
227	7.01.0.00.0.00.22.0003	Kelurahan Simokerto	3.516.511.536,00	0	0	766.945.914,00	21,81
228	7.01.0.00.0.00.22.0004	Kelurahan Simolawang	4.094.024.993,00	0	0	565.123.692,00	13,8
229	7.01.0.00.0.00.22.0005	Kelurahan Tambakrejo	3.999.983.077,00	0	0	519.162.235,00	12,98
230	7.01.0.00.0.00.23.0000	Kec. Sukolilo	42.048.618.082,00	61,38	39,59	18.469.022.599,00	43,92
231	7.01.0.00.0.00.23.0001	Kelurahan Gebang Putih	2.704.026.181,00	0	0	255.570.805,00	9,45
232	7.01.0.00.0.00.23.0002	Kelurahan Keputih	3.908.659.698,00	0	0	628.404.215,00	16,08
233	7.01.0.00.0.00.23.0003	Kelurahan Klampis Ngasem	3.827.465.432,00	0	0	435.458.963,00	11,38
234	7.01.0.00.0.00.23.0004	Kelurahan Medokan Semampir	4.034.864.454,00	0	0	424.014.283,00	10,51
235	7.01.0.00.0.00.23.0005	Kelurahan Menur Pumpungan	3.532.807.135,00	0	0	681.460.799,00	19,29
236	7.01.0.00.0.00.23.0006	Kelurahan Nginden Jangkungan	2.812.847.741,00	0	0	407.931.110,00	14,5
237	7.01.0.00.0.00.23.0007	Kelurahan Semolowaru	3.053.655.183,00	0	8,33	871.503.447,00	28,54
238	7.01.0.00.0.00.24.0000	Kec. Sukomanunggal	37.266.750.268,00	60,08	37,99	16.426.751.954,00	44,08
239	7.01.0.00.0.00.24.0001	Kelurahan Putat Gede	3.227.532.037,00	0	0	217.717.669,00	6,75
240	7.01.0.00.0.00.24.0002	Kelurahan Simomulyo	4.126.488.716,00	0	0	485.430.012,00	11,76
241	7.01.0.00.0.00.24.0003	Kelurahan Simomulyo Baru	4.157.824.102,00	0	0	720.884.488,00	17,34
242	7.01.0.00.0.00.24.0004	Kelurahan Sonokwijenan	3.206.625.761,00	0	0	299.117.475,00	9,33
243	7.01.0.00.0.00.24.0005	Kelurahan Sukomanunggal	2.737.015.685,00	0	0	291.667.046,00	10,66
244	7.01.0.00.0.00.24.0006	Kelurahan Tanjungsari	3.329.000.439,00	0	0	464.451.752,00	13,95
245	7.01.0.00.0.00.25.0000	Kec. Tambaksari	56.530.822.923,00	56,55	37,37	25.329.339.321,00	44,81
246	7.01.0.00.0.00.25.0001	Kelurahan Dukuh Setro	3.705.092.387,00	0	0	390.243.246,00	10,53
247	7.01.0.00.0.00.25.0002	Kelurahan Gading	3.979.816.116,00	0	0	696.505.403,00	17,5
248	7.01.0.00.0.00.25.0003	Kelurahan Kapasmadya Baru	5.035.629.642,00	0	0	1.291.083.258,00	25,64
249	7.01.0.00.0.00.25.0004	Kelurahan Pacarkeling	4.238.705.044,00	0	0	663.465.150,00	15,65
250	7.01.0.00.0.00.25.0005	Kelurahan Pacarkembang	5.264.156.140,00	0	0	641.923.532,00	12,19
251	7.01.0.00.0.00.25.0006	Kelurahan Ploso	4.448.287.965,00	0	0	754.520.117,00	16,96
252	7.01.0.00.0.00.25.0007	Kelurahan Rangkah	3.726.228.729,00	0	0	507.825.312,00	13,63
253	7.01.0.00.0.00.25.0008	Kelurahan Tambaksari	4.770.177.837,00	0	0	650.409.964,00	13,63
254	7.01.0.00.0.00.26.0000	Kec. Tandes	40.355.351.186,00	67,77	39,24	18.930.545.840,00	46,91
255	7.01.0.00.0.00.26.0001	Kelurahan Balongsari	3.756.212.645,00	0	25	1.110.799.896,00	29,57
256	7.01.0.00.0.00.26.0002	Kelurahan Banjar Sugihan	3.469.562.003,00	0	100	903.035.966,00	26,03
257	7.01.0.00.0.00.26.0003	Kelurahan Karangpoh	4.372.900.881,00	0	0	862.589.304,00	19,73
258	7.01.0.00.0.00.26.0004	Kelurahan Manukan Kulon	4.827.171.311,00	0	0	1.472.903.328,00	30,51
259	7.01.0.00.0.00.26.0005	Kelurahan Manukan Wetan	2.666.120.725,00	0	100	1.242.043.639,00	46,59
260	7.01.0.00.0.00.26.0006	Kelurahan Tandes	2.734.655.753,00	0	25	984.799.135,00	36,01

No	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata capaaian kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Program	Ind Sub Kegiatan	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
261	7.01.0.00.0.00.27.0000	Kec. Tegalsari	34.824.599.296,00	67,95	41,59	15.123.783.646,00	43,43
262	7.01.0.00.0.00.27.0001	Kelurahan Dr. Soetomo	4.976.912.886,00	0	2,5	690.159.222,00	13,87
263	7.01.0.00.0.00.27.0002	Kelurahan Kedungdoro	5.247.269.783,00	0	0	1.135.178.544,00	21,63
264	7.01.0.00.0.00.27.0003	Kelurahan Keputran	3.764.444.658,00	0	5,56	874.590.062,00	23,23
265	7.01.0.00.0.00.27.0004	Kelurahan Tegalsari	3.436.227.866,00	0	0	882.881.299,00	25,69
266	7.01.0.00.0.00.27.0005	Kelurahan Wonorejo	3.917.509.415,00	0	5,56	1.096.663.387,00	27,99
267	7.01.0.00.0.00.28.0000	Kec. Tenggilis Mejoyo	26.738.034.918,00	65,08	36,1	12.239.613.983,00	45,78
268	7.01.0.00.0.00.28.0001	Kelurahan Kendangsari	2.492.094.718,00	0	0	504.791.254,00	20,26
269	7.01.0.00.0.00.28.0002	Kelurahan Kutisari	3.454.795.608,00	0	0	426.755.542,00	12,35
270	7.01.0.00.0.00.28.0003	Kelurahan Panjang Jiwo	3.801.730.087,00	0	0	490.377.442,00	12,9
271	7.01.0.00.0.00.28.0004	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	3.281.062.709,00	0	50	716.802.322,00	21,85
272	7.01.0.00.0.00.29.0000	Kec. Wiyung	27.442.308.563,00	65,97	41,05	12.823.287.157,00	46,73
273	7.01.0.00.0.00.29.0001	Kelurahan Babatan	3.557.154.689,00	0	0	788.297.144,00	22,16
274	7.01.0.00.0.00.29.0002	Kelurahan Balas Klumprik	2.913.946.561,00	0	0	643.985.722,00	22,1
275	7.01.0.00.0.00.29.0003	Kelurahan Jajar Tunggal	3.845.296.481,00	0	25	393.218.518,00	10,23
276	7.01.0.00.0.00.29.0004	Kelurahan Wiyung	4.091.838.705,00	0	22,22	1.756.114.774,00	42,92
277	7.01.0.00.0.00.30.0000	Kec. Wonocolo	34.624.440.430,00	64,86	39,71	16.762.883.157,00	48,41
278	7.01.0.00.0.00.30.0001	Kelurahan Bendul Merisi	4.784.051.560,00	0	0	723.024.479,00	15,11
279	7.01.0.00.0.00.30.0002	Kelurahan Jemur Wonosari	3.413.702.748,00	0	0	1.044.155.962,00	30,59
280	7.01.0.00.0.00.30.0003	Kelurahan Margorejo	2.346.219.122,00	0	6,25	604.115.171,00	25,75
281	7.01.0.00.0.00.30.0004	Kelurahan Sidosermo	2.911.434.685,00	0	0	708.794.124,00	24,35
282	7.01.0.00.0.00.30.0005	Kelurahan Siwalankerto	3.887.207.902,00	0	0	938.592.470,00	24,15
283	7.01.0.00.0.00.31.0000	Kec. Wonokromo	46.048.283.233,00	60,32	38,79	20.354.110.046,00	44,2
284	7.01.0.00.0.00.31.0001	Kelurahan Darmo	4.026.915.210,00	0	0	503.544.598,00	12,5
285	7.01.0.00.0.00.31.0002	Kelurahan Jagir	3.852.021.931,00	0	0	859.327.704,00	22,31
286	7.01.0.00.0.00.31.0003	Kelurahan Ngagel	3.739.827.446,00	0	0	481.112.230,00	12,86
287	7.01.0.00.0.00.31.0004	Kelurahan Ngagel Rejo	6.147.398.303,00	0	0	932.525.460,00	15,17
288	7.01.0.00.0.00.31.0005	Kelurahan Sawunggaling	4.934.810.856,00	0	0	1.312.610.248,00	26,6
289	7.01.0.00.0.00.31.0006	Kelurahan Wonokromo	5.544.293.265,00	0	0	937.395.128,00	16,91
290	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	88.689.642.685,00	93,92	56,25	37.609.978.911,00	42,41
1	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	2.193.939.380.187,00	84,67	35,2	891.439.781.618,00	40,63
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.163.136.807.193,00	99,07	96,27	461.050.644.036,00	39,64
3	1.02.0.00.0.00.01.0001	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	2.670.019.310,00	0	75	9.127.672,00	0,34
4	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan	123.585.000,00	0	50	19.519.650,00	15,79
5	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Asemrowo	4.072.701.645,00	0	59,03	690.013.731,00	16,94
6	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Balas Klumprik	1.649.145.158,00	0	61,57	263.340.350,00	15,97
	JUMLAH		**12.839.824.904.968,00**	**67,72**	**31,3**	**4.061.104.738.876,00**	**31,63**

Sumber: Modul SIPD Dalev, 2026

Adapun telah dilakukan pemetaan terhadap perangkat daerah dengan capaian tertinggi dan capaian terendah sebagaimana terlampir. 5 (lima) Perangkat Daerah dengan capaian tertinggi sebagai berikut :

1. RSUD dr. Mohamad Soewandhie, dengan capaian 100%;
2. Dinas Kesehatan, dengan capaian 97,67%;
3. RSUD Eka Candrarini, dengan capaian 91,28%;
4. Dinas Sosial, dengan capaian 90,79%;
5. RSUD Bhakti Dharma Husada, dengan capaian 84,76%

Tingginya capaian Perangkat Daerah tersebut didorong oleh:

1) Ketersediaan sumber daya yang memadai.
   Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai mendukung kelancaran pelaksanaan program dan pelayanan. Hal ini terutama terlihat pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan ketiga RSUD yang memiliki karakteristik pelayanan publik secara langsung, sehingga dukungan sumber daya tersebut berkontribusi terhadap optimalnya pencapaian target kinerja.
2) Tata kelola dan sistem kerja yang efektif. Penerapan standar operasional prosedur (SOP), pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi, serta pengelolaan proses bisnis yang baik meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan. Pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan ketiga RSUD, kondisi tersebut mendukung penyelenggaraan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan yang berlaku.
3) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala memastikan setiap program dan subkegiatan berjalan sesuai target, jadwal, dan rencana kerja yang telah ditetapkan. Kondisi ini tercermin dari realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah mencapai sekitar 75% hingga 100% terhadap target akhir tahun.
4) Komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta ketiga RSUD, peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan akreditasi, penguatan tata kelola pelayanan, serta peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan sehingga mendukung pencapaian indikator kinerja.
5) Komunikasi dan koordinasi yang efektif. Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah, instansi vertikal, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya mendukung pelaksanaan program secara terpadu. Sinergi tersebut mempercepat.

Sementara, 5 (lima) Perangkat Daerah dengan capaian terendah sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan capaian 34,15%;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan capaian 42,16%;
3. Kecamatan Tambaksari, dengan capaian 46,96%;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permuk;iman serta Pertanahan, dengan capaian 47,41%;
5. Kecamatan Rungkut, dengan capaian 48,03%.

Rendahnya capaian Perangkat Daerah tersebut disebabkan oleh:

1) Pelaksanaan program masih berada pada tahapan awal. Pada Triwulan II, sebagian program dan subkegiatan masih berada pada tahap persiapan, penyesuaian jadwal pelaksanaan, serta pemenuhan persyaratan administrasi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar output kegiatan belum dapat direalisasikan secara optimal pada Triwulan II dan pencapaiannya baru akan meningkat pada triwulan-triwulan berikutnya.
2) Adanya penyesuaian mekanisme pelaksanaan pembangunan fisik Dana Kelurahan. Tahun 2026 merupakan masa transisi pelaksanaan pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Kelurahan, dimana pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas), tidak lagi melalui penyedia sebagaimana mekanisme pada tahun-tahun sebelumnya. Perubahan mekanisme tersebut memerlukan proses adaptasi, termasuk pembentukan dan kesiapan Pokmas di masing-masing kelurahan. Pada beberapa wilayah, proses identifikasi dan pembentukan Pokmas yang memenuhi persyaratan masih memerlukan waktu sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik.
3) Pelaksanaan kegiatan masih dalam proses pengadaan dan penyelesaian administrasi. Sebagian program dan subkegiatan masih berada pada tahap pengadaan barang dan jasa, penyusunan dokumen pendukung, maupun penyelesaian administrasi lainnya. Kondisi ini mengakibatkan realisasi output maupunBerdasarkan pada monitoring evaluasi capaian indikator kinerja belum dapat tercapai secara optimal hingga akhir Triwulan II.
4) Karakteristik indikator yang memerlukan koordinasi lintas pihak dan partisipasi masyarakat. Beberapa indikator kinerja di tingkat kecamatan sangat bergantung pada koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis, kelurahan, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, pencapaiannya memerlukan proses koordinasi, pelaksanaan kegiatan, dan waktu yang lebih panjang sehingga realisasi kinerja pada Triwulan II masih relatif rendah dibandingkan target akhir tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya Triwulan II Tahun 2026, beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan selanjutnya adalah:

1) Terkait pekerjaan yang masih dalam proses persiapan dan/atau kontrak di Triwulan II, Perangkat Daerah untuk:
   - Melakukan pemantauan atas perkembangan tahap persiapan, memastikan seluruh persyaratan pelaksanaan di TW III dan IV telah dipenuhi serta

melakukan monitoring secara rutin untuk memastikan target dapat tercapai tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan.

- Intensif melakukan koordinasi dengan pemangku kegiatan/sub kegiatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penyerapan anggaran, seperti Pemerintah Pusat / Kementerian terkait dan Badan Pendapatan Daerah untuk memastikan rencana penyerapan anggaran tidak terkendala dan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan.
- Secara aktif melakukan evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan untuk memastikan laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun di Triwulan IV dapat memberikan informasi dan rekomendasi yang berkualitas untuk pelaksanaan di tahun berikutnya.

2) Terkait pelaksanaan pembangunan fisik Dana Kelurahan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas), Perangkat Daerah bersama kecamatan dan kelurahan agar:
   - Mempercepat pembentukan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas Pokmas sehingga pelaksanaan pembangunan fisik tidak mengalami keterlambatan.
   - Memastikan seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi sebelum pelaksanaan kegiatan.
3) Terkait kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, Perangkat Daerah agar meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung percepatan pencapaian target kinerja.
4) Perangkat Daerah agar melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran serta segera menindaklanjuti setiap kendala yang dihadapi agar target tahunan dapat tercapai.
5) Perangkat Daerah agar memastikan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, serta proyeksi target kinerja merupakan data yang mutakhir, akurat, dan sesuai dengan kondisi eksisting sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran.

2.3 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah kondisi kesenjangan antara capaian pembangunan yang telah diwujudkan dengan target atau kondisi ideal yang diharapkan. Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan daerah, permasalahan

pembangunan tidak hanya bersumber dari hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025, tetapi juga dari isu dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Gambaran permasalahan tersebut dapat diperoleh melalui pemanfaatan big data dari berbagai platform digital, seperti media sosial, berita daring, kanal pengaduan masyarakat, *Google Trends, Google Alerts,* dan media monitoring. Dengan demikian, identifikasi permasalahan pembangunan menjadi lebih komprehensif, aktual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berikut disajikan analisis tren permasalahan yang berkembang di masyarakat pada periode tahun 2025 sampai dengan 2026, berdasarkan hasil pengumpulan data dari berbagai platform digital dengan dukungan pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI).*

Tabel II.208
Rekapitulasi Tren Permasalahan di Kota Surabaya Tahun 2026

No.	Klaster Isu Paling Banyak Muncul	Platform	Indikasi dari Sosial Media/Jejak Publik	Bentuk Keluhan Masyarakat	Sentimen	Intensitas
1	Parkir liar, pungutan parkir, dan jukir tidak resmi	Instagram, Facebook, berita online, komentar publik	Isu parkir liar muncul paling dominan dalam pembacaan komentar publik Suara Surabaya dengan proporsi 41%. Pada 2026 juga muncul kasus laporan warga di Mulyosari terkait tarif tidak sesuai, QRIS bukan milik Pemkot, dan parkir di pedestrian.	Tarif parkir tidak sesuai, jukir tidak resmi, pemalakan, parkir di trotoar, QRIS pribadi, serta kurangnya pengawasan titik parkir.	Negatif	**Sangat tinggi**
2	Banjir, genangan, dan drainase	Instagram, berita online, kanal resmi Pemkot, komentar publik	Isu banjir dan drainase muncul sebagai isu besar kedua dengan proporsi 31% dalam pembacaan komentar publik. Pemkot juga menyebut sampah di saluran sebagai salah satu masalah utama penanganan banjir.	Genangan saat hujan, saluran tersumbat, titik banjir berulang, drainase belum optimal, serta kebutuhan respons cepat saat hujan deras.	Negatif	**Tinggi**
3	Sampah liar, sampah di saluran, dan perilaku buang sampah sembarangan	Instagram, kanal resmi Pemkot, berita online	Unggahan publik dan kanal resmi banyak menyoroti pembuangan sampah sembarangan, rencana CCTV,	Sampah menumpuk, sampah menyumbat saluran, TPS/lingkungan kotor, bau, serta perilaku buang sampah	Negatif	**Tinggi**

No.	Klaster Isu Paling Banyak Muncul	Platform	Indikasi dari Sosial Media/Jejak Publik	Bentuk Keluhan Masyarakat	Sentimen	Intensitas
			sidang tipiring, serta imbauan agar warga tidak membuang sampah ke saluran air.	sembarangan yang memperparah banjir.		
4	Keamanan ruang jalan: curanmor, begal, dan premanisme	Berita online, komentar publik, Facebook publik	Dalam pembacaan komentar publik, kriminalitas dan curanmor muncul sekitar 19%. Isu ini sering dikaitkan dengan lemahnya ketertiban ruang jalan dan parkir liar.	Kehilangan kendaraan, rasa tidak aman di ruang jalan/parkiran, kebutuhan CCTV, penerangan, patroli, dan penguatan keamanan lingkungan.	Negatif	**Sedang–tinggi**
5	Jalan rusak, trotoar/pedestrian terganggu, dan kualitas ruang jalan	Instagram, berita online, komentar publik	Isu jalan rusak dan pedestrian muncul sekitar 13% dalam pembacaan komentar publik. Keluhan sering beririsan dengan parkir liar, banjir, dan kemacetan.	Jalan berlubang, trotoar rusak/dipakai parkir, pedestrian tidak nyaman, serta risiko keselamatan pengguna jalan.	Negatif	**Sedang–tinggi**
6	Kemacetan lokal dan ketidaktertiban lalu lintas	Berita online, komentar publik, Instagram publik	Kemacetan muncul sekitar 7% dalam pembacaan komentar publik, tetapi sering menjadi dampak turunan dari parkir liar, jalan rusak, aktivitas pasar, dan penggunaan badan jalan.	Macet di titik tertentu, hambatan akibat parkir tepi jalan, aktivitas ruang jalan yang tidak tertib, dan lambatnya mobilitas harian.	Negatif	**Sedang**
7	Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) : validasi data, domisili, dan pemahaman sistem	Kanal resmi Pemkot, berita online, Instagram publik	Pada uji coba SPMB 2026, posko Dispendik dipadati ribuan orang tua untuk verifikasi dan konsultasi. Persoalan yang muncul berkaitan dengan validasi dokumen, domisili, dan pemahaman jalur penerimaan.	Data belum tervalidasi, dokumen kependudukan, domisili anak, alur pendaftaran, dan pilihan sekolah negeri.	Netral–negatif	**Sedang–tinggi**
8	Digitalisasi layanan publik yang belum sepenuhnya mudah dipahami	Kanal resmi, berita online, Instagram publik	Isu ini tampak dalam kebutuhan konsultasi teknis SPMB dan pemanfaatan posko layanan. Meskipun sistem disebut	Kebingungan menggunakan sistem, kekhawatiran salah input, kebutuhan pendampingan, serta	Netral–negatif	**Sedang**

No.	Klaster Isu Paling Banyak Muncul	Platform	Indikasi dari Sosial Media/Jejak Publik	Bentuk Keluhan Masyarakat	Sentimen	Intensitas
			berjalan stabil, banyak warga tetap membutuhkan pendampingan pengisian data.	perbedaan literasi digital antarwarga/orang tua.		
9	Ketertiban ruang kota dan penggunaan fasilitas publik	Instagram, Facebook, berita online	Parkir di pedestrian, sampah liar, kendaraan di ruang publik, dan aktivitas tidak tertib di ruang jalan muncul berulang sebagai satu ekosistem keluhan. Aspek keamanan dan kenyamanan ruang jalan menempati lebih dari 70% ruang batin publik.	Ruang publik kurang nyaman, trotoar tidak steril, badan jalan terganggu, serta penertiban belum konsisten.	Negatif	**Tinggi**
10	Penerimaan kebijakan parkir digital/QRIS	Instagram, kanal resmi Pemkot, berita online	Pemkot memperluas layanan parkir digital pada 2026 dan mendorong penggunaan QRIS resmi. Di sisi lain, muncul kasus QRIS bukan milik pemerintah kota serta polemik penerapan parkir digital.	Kebingungan membedakan QRIS resmi dan tidak resmi, tarif parkir, kejelasan titik parkir digital, serta kekhawatiran praktik jukir liar tetap berjalan.	Campuran: netral–negatif	**Sedang**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, data diolah 2026

Berdasarkan gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta analisis isu pada media sosial menggunakan *big data*, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Surabaya.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Masih diperlukan percepatan penanganan kemiskinan agar jumlah penduduk miskin dapat terus menurun secara berkelanjutan;
2. Masih diperlukan penanganan pengangguran terbuka melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, dan penguatan penyerapan tenaga kerja;
3. Masih terdapat kesenjangan pendapatan masyarakat yang perlu diturunkan melalui pemerataan ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat;

4. Masih diperlukan pengendalian inflasi daerah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat;
5. Masih diperlukan penguatan ketahanan pangan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan masyarakat;
6. Masih diperlukan optimalisasi jaringan drainase untuk mengurangi titik genangan dan mencegah terjadinya banjir;
7. Masih diperlukan peningkatan sarana prasarana, sistem jaringan jalan, dan utilitas perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
8. Masih ditemukan balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting, serta ibu hamil kurang energi kronis yang perlu ditangani secara terpadu untuk menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan stunting;
9. Masih diperlukan percepatan eliminasi penyakit menular, seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, dan kusta, serta penguatan pencegahan penyakit degeneratif.
10. Masih diperlukan optimalisasi kualitas pelayanan dan pemerataan fasilitas serta sarana prasarana kesehatan utamanya layanan kesehatan primer;
11. Masih diperlukan peningkatan harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pemerataan kualitas pendidikan untuk memperkuat daya saing sumber daya manusia;
12. Masih diperlukan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan;
13. Masih diperlukan peningkatan penyediaan dan pengelolaan lingkungan perumahan serta kawasan permukiman yang layak huni;
14. Masih diperlukan peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Surabaya melalui pengendalian pencemaran, pengelolaan persampahan, dan optimalisasi ruang terbuka hijau;
15. Masih diperlukan peningkatan pemberdayaan pemuda serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal di masyarakat;
16. Masih diperlukan pengembangan dan inovasi berkelanjutan dalam pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
17. Masih diperlukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan digitalisasi layanan parkir;
18. Masih diperlukan penguatan kerja sama antardaerah dan antarlembaga untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Pendidikan

1. Kualitas dan pemerataan kompetensi tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan untuk mendukung mutu pembelajaran pada seluruh jenjang pendidikan;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan masih belum merata, termasuk ketersediaan buku teks dan nonteks penunjang literasi-numerasi serta kebutuhan rehabilitasi prasarana sekolah;
3. Kualitas layanan PAUD/TK masih perlu diperkuat melalui peningkatan kompetensi pendidik, pengembangan pembelajaran digital, serta penguatan transisi PAUD-SD;
4. Masih terdapat satuan pendidikan yang perlu ditingkatkan akreditasinya agar seluruh sekolah di Kota Surabaya mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan terstandar;
5. Masih terdapat Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang belum terakreditasi, sehingga perlu penguatan pendampingan akreditasi dan peningkatan kualitas layanan pendidikan nonformal;
6. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya masih perlu ditingkatkan agar kualitas sumber daya manusia semakin kompetitif dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan kota;
7. Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya masih relatif stagnan, sehingga diperlukan penguatan akses dan keberlanjutan pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi;
8. Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, khususnya pada jenjang SD, masih perlu ditingkatkan sebagai fondasi kualitas pendidikan dasar;
9. Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan tinggi masih relatif rendah, sehingga perlu peningkatan akses, motivasi, dan dukungan keberlanjutan pendidikan ke jenjang diploma dan perguruan tinggi;
10. Pemerataan kualitas pendidikan antarwilayah masih perlu diperkuat, terutama pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan kebutuhan layanan pendidikan yang terus meningkat.

2.3.2.2 Kesehatan

1. Pencegahan dan penanganan penyakit menular masih perlu ditingkatkan, terutama terhadap TBC, HIV/AIDS, DBD, dan potensi kejadian luar biasa,

melalui penguatan skrining, penemuan kasus, dan percepatan inisiasi pengobatan;

2. Pengendalian penyakit tidak menular masih menjadi tantangan, terutama hipertensi, diabetes melitus, kanker, dan obesitas, sehingga diperlukan penguatan deteksi dini, edukasi pola hidup sehat, dan layanan pengobatan berkelanjutan;
3. Derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan, meskipun IPM Kota Surabaya telah mencapai 85,65 pada tahun 2025, karena masih terdapat kasus kematian ibu, kematian bayi, serta balita dengan status gizi buruk;
4. Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi masih perlu diperkuat secara berkelanjutan untuk menurunkan risiko Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
5. Cakupan pelayanan kesehatan bayi pada beberapa wilayah masih belum optimal akibat ketidaksesuaian proyeksi sasaran dengan kondisi riil serta belum meratanya akses pelayanan kesehatan bayi;
6. Pemantauan tumbuh kembang balita masih perlu diperkuat, mengingat masih terdapat balita dengan status gizi buruk meskipun seluruhnya telah memperoleh perawatan;
7. Ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan agar sesuai standar pelayanan kesehatan;
8. Pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Kota Surabaya masih perlu diperkuat, termasuk melalui pembangunan rumah sakit di wilayah Surabaya Timur sebagai upaya pemerataan layanan rumah sakit milik pemerintah;
9. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada rumah sakit daerah masih perlu ditingkatkan, terutama melalui optimalisasi sumber daya, sarana prasarana, dan kualitas pelayanan rumah sakit;
10. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan masih perlu diperkuat melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, workshop, dan seminar;
11. Ketersediaan tenaga kesehatan masih perlu dijaga, ditunjukkan dengan menurunnya jumlah dokter dari 7.446 orang pada tahun 2024 menjadi 7.048 orang pada tahun 2025;
12. Pemanfaatan teknologi informasi kesehatan masih perlu dioptimalkan untuk mempermudah akses pelayanan, antara lain melalui penguatan e-Health,

Aplikasi Sayang Warga, Pemantauan Wilayah Setempat, dan integrasi dengan sistem Pemerintah Kota Surabaya;

13. Sistem rujukan berjenjang masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan mutu fasilitas kesehatan dan penguatan koordinasi dengan mitra layanan kesehatan di Kota Surabaya;
14. Keberlanjutan jaminan kesehatan semesta masih perlu dijaga, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan, melalui dukungan pembiayaan Universal Health Coverage serta bantuan iuran PBPU Pemerintah Daerah;
15. Perlindungan kesehatan bagi keluarga miskin masih perlu dipertahankan, mengingat sampai tahun 2026 triwulan II masih terdapat 61.982 anggota keluarga miskin yang memerlukan jaminan kesehatan;
16. Kesiapsiagaan kesehatan masyarakat masih perlu diperkuat karena seluruh 153 kelurahan memiliki potensi kejadian luar biasa yang memerlukan penanganan cepat dan terintegrasi;
17. Layanan kesehatan berbasis masyarakat masih perlu disesuaikan dan dioptimalkan seiring berkurangnya jumlah posyandu akibat penggabungan layanan;
18. Pengawasan higiene sanitasi pangan masih perlu diperkuat karena masih terdapat Tempat Pengolahan Makanan/Pangan yang belum memenuhi syarat higiene sanitasi;
19. Pengawasan terhadap produk makanan dan minuman industri rumah tangga masih perlu ditingkatkan melalui pemeriksaan dan pemantauan PIRT secara lebih optimal;
20. Mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan fasilitas, SDM, teknologi informasi, sistem rujukan, pembiayaan kesehatan, serta pengawasan kesehatan lingkungan dan pangan.

2.3.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Kepatuhan terhadap perizinan bangunan gedung masih perlu ditingkatkan, ditunjukkan dengan masih adanya bangunan yang belum memiliki IMB/PBG atau tidak sesuai dengan ketentuan perizinan;
2. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan bangunan gedung masih perlu diperkuat untuk mencegah pelanggaran perizinan dan ketidaksesuaian bangunan;

3. Masih terdapat persil bangunan yang dikenakan sanksi administratif akibat ketidaksesuaian bangunan, sehingga diperlukan penguatan monitoring dan penegakan ketentuan bangunan gedung;
4. Genangan masih terjadi di beberapa titik Kota Surabaya akibat curah hujan tinggi dan belum optimalnya fungsi sebagian jaringan drainase;
5. Konektivitas sistem drainase masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas saluran dan mempercepat penanganan genangan;
6. Penyediaan layanan air bersih masih menghadapi kendala pada beberapa lokasi, terutama terkait lahan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya;
7. Koordinasi penyediaan layanan air bersih bersama Perumda Air Minum Surya Sembada masih perlu diperkuat, termasuk melalui penyediaan master meter pada wilayah yang terkendala akses jaringan;
8. Penerapan teknologi energi alternatif terbarukan dan konservasi energi pada gedung pemerintah maupun swasta masih perlu dioptimalkan;
9. Kinerja jaringan jalan masih perlu ditingkatkan, terutama pada ruas dengan rasio volume terhadap kapasitas atau V/C ratio yang belum optimal;
10. Manajemen dan rekayasa lalu lintas masih perlu diperkuat untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan kelancaran mobilitas perkotaan;
11. Pemeliharaan infrastruktur jalan secara berkelanjutan masih diperlukan untuk mempertahankan kualitas jaringan jalan, mengingat masih terdapat 4,13 km jalan yang belum berada dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2026 triwulan II;
12. Ketahanan infrastruktur jalan terhadap beban lalu lintas dan perkembangan kawasan perkotaan masih perlu ditingkatkan, meskipun persentase jalan dalam kondisi baik telah mencapai 99,23% pada tahun 2026 triwulan II.

2.3.2.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Kualitas infrastruktur permukiman masih perlu ditingkatkan, terutama melalui pembenahan dan rehabilitasi jalan lingkungan, saluran lingkungan, serta sarana dan prasarana permukiman;
2. Kualitas lingkungan permukiman dan rumah layak huni masih perlu ditingkatkan melalui percepatan perbaikan rumah tidak layak huni;
3. Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman masih perlu diperkuat, khususnya akses air layak minum dan sanitasi layak;

4. Penyediaan sanitasi layak masih perlu dioptimalkan melalui kolaborasi dengan pihak swasta, termasuk melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR;
5. Penyediaan air layak minum masih menghadapi tantangan, terutama terkait kebutuhan peremajaan jaringan pipa distribusi yang sudah berusia tua;
6. Ketersediaan lahan untuk penyediaan perumahan di Kota Surabaya masih terbatas, sehingga perlu optimalisasi pemanfaatan aset tanah pemerintah untuk pembangunan hunian layak;
7. Penyediaan hunian layak dan terjangkau di kawasan perkotaan masih perlu diperkuat melalui optimalisasi pemanfaatan 109 lokasi Rusunawa yang tersebar di Kota Surabaya;
8. Keterbatasan lahan perkotaan menuntut penguatan pengembangan hunian vertikal sebagai alternatif penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

2.3.2.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Pelanggaran peraturan daerah yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masih terjadi, sehingga diperlukan penguatan sosialisasi regulasi melalui media informasi yang menarik, mudah dipahami, dan menjangkau masyarakat secara luas;
2. Pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat masih terjadi, dengan 9.981 pelanggaran K3 hingga Triwulan II Tahun 2026. Meskipun seluruh pelanggaran telah diselesaikan (100%), upaya pencegahan dan pengendalian perlu terus diperkuat agar jumlah pelanggaran dapat terus ditekan;
3. Potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat masih perlu diantisipasi, mengingat hingga Triwulan II Tahun 2026 telah terjadi 9 kejadian unjuk rasa;
4. Kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur Satpol PP dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) masih perlu ditingkatkan agar mampu mendukung pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat secara profesional, responsif, dan sesuai dengan perkembangan regulasi serta dinamika kondisi di lapangan;

5. Risiko kebakaran masih menjadi tantangan perkotaan, ditunjukkan dengan masih terjadinya 118 kejadian kebakaran pada tahun 2026 sampai dengan triwulan II;
6. Pencegahan kebakaran masih perlu diperkuat, mengingat kejadian kebakaran pada tahun 2026 sebagian besar disebabkan oleh hubungan arus listrik dan api terbuka yang berkaitan dengan faktor perilaku, kelalaian, serta rendahnya kesadaran masyarakat;
7. Edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan secara rutin, terutama pada kawasan permukiman padat dan wilayah dengan risiko kebakaran tinggi;
8. Ketahanan daerah terhadap risiko bencana masih perlu ditingkatkan, meskipun Indeks Risiko Bencana menurun dari 112,08 menjadi 96,76 pada tahun 2025, karena Indeks Ketahanan Daerah baru mencapai 0,64;
9. Kesiapsiagaan terhadap potensi bencana gempa bumi masih perlu diperkuat, terutama dengan adanya temuan potensi sumber gempa tektonik dari pergerakan Sesar Kendeng ke arah barat hingga Jawa Tengah;
10. Perencanaan mitigasi bencana masih perlu diperkuat seiring meningkatnya risiko akibat perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi;
11. Sistem pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana masih perlu dioptimalkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat dan ketahanan wilayah;
12. Koordinasi lintas perangkat daerah, aparat keamanan, relawan, dan masyarakat masih perlu diperkuat dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, pencegahan kebakaran, serta kesiapsiagaan bencana.

2.3.2.6 Sosial

1. Kualitas pemutakhiran data keluarga miskin masih perlu ditingkatkan secara berkala agar intervensi perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dapat lebih tepat sasaran;
2. Integrasi data pekerjaan dan pendapatan warga miskin dalam sistem Padat Karya masih perlu diperkuat untuk mendukung validitas data dan efektivitas penanganan kemiskinan;
3. Pelaksanaan musyawarah kelurahan secara rutin masih perlu dioptimalkan sebagai forum verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data keluarga miskin bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat kelurahan;

4. Kesenjangan pendapatan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, meskipun Indeks Gini Kota Surabaya menurun dari 0,381 pada tahun 2024 menjadi 0,369 pada tahun 2025;
5. Penanganan kemiskinan masih perlu diperkuat, meskipun angka kemiskinan Kota Surabaya menurun dari 3,96% atau 116,62 ribu jiwa pada tahun 2024 menjadi 3,56% atau 105,09 ribu jiwa pada tahun 2025;
6. Peningkatan garis kemiskinan dari Rp742.678 menjadi Rp775.597 per kapita per bulan menunjukkan perlunya penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan;
7. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mencapai 27.536 orang hingga Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan masih besarnya kebutuhan layanan sosial dan intervensi kesejahteraan bagi masyarakat rentan;
8. Masih terdapat 563 PPKS non-Surabaya hingga Triwulan II Tahun 2026, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi penanganan permasalahan sosial antardaerah;
9. Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial masih perlu dioptimalkan melalui pelatihan, pembinaan, pemberian apresiasi, serta penguatan forum komunikasi antar-PSKS;
10. Layanan sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas masih perlu diperkuat agar kelompok rentan memperoleh akses perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan yang lebih inklusif;
11. Keberadaan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2025 masih perlu dioptimalkan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan.

2.3.2.7 Tenaga Kerja

1. Perluasan kesempatan kerja masih perlu ditingkatkan untuk menurunkan pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat;
2. Fasilitasi pembentukan wirausaha baru masih perlu diperkuat, terutama melalui pelatihan produksi, pengelolaan usaha, manajemen usaha, permodalan, dan pemasaran;

3. Ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja masih terjadi, ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah pengangguran lulusan SMA/SMK sebanyak 30.078 orang pada tahun 2025;
4. Efektivitas penempatan tenaga kerja masih perlu ditingkatkan, mengingat masih terdapat 784 pencari kerja yang belum berhasil ditempatkan dari total 8.664 pencari kerja yang difasilitasi pada tahun 2025;
5. Optimalisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja masih menjadi tantangan, seiring meningkatnya jumlah penduduk usia kerja dari 2.305.008 orang pada tahun 2024 menjadi 2.352.271 orang pada tahun 2025, sementara TPAK hanya meningkat dari 70,49% menjadi 70,59%;
6. Partisipasi angkatan kerja perempuan masih perlu ditingkatkan, ditunjukkan dengan TPAK perempuan sebesar 60,16% yang masih lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki sebesar 81,42% pada tahun 2025;
7. Perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial masih belum optimal, sehingga diperlukan penguatan pembinaan terkait hubungan industrial, syarat kerja, dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi perusahaan, pekerja, dan serikat pekerja/serikat buruh;
8. Cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan masih perlu diperluas, ditunjukkan dengan baru 44,69% pekerja yang terlindungi program Jamsostek pada tahun 2025;
9. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum mencakup seluruh perusahaan, ditunjukkan dengan masih terdapat sekitar 3 perusahaan yang belum menerapkan K3 dari total 11.025 perusahaan pada tahun 2026 Triwulan II;
10. Hubungan industrial yang harmonis masih perlu diperkuat, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah sengketa pekerja dan pengusaha dari 182 kasus pada tahun 2024 menjadi 219 kasus pada tahun 2025.

2.3.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pemahaman dan penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan agar perspektif gender semakin terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada seluruh aspek pembangunan masih perlu diperkuat, termasuk melalui peningkatan kapasitas perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dan RW responsif gender;

3. Kesenjangan gender dalam pembangunan masih perlu terus dikurangi, ditunjukkan dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Surabaya tahun 2025 sebesar 0,151 yang masih belum mencapai target yang ditetapkan;
4. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung pencapaian Kelurahan/Kampung Layak Anak masih perlu dioptimalkan melalui penjaringan aspirasi dalam Musrenbang serta pelibatan Forum Anak Surabaya, LSM pemerhati anak, dan APSAI;
5. Upaya pencegahan dan penanganan permasalahan perempuan dan anak masih perlu diperkuat, terutama terhadap kasus perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, dan bentuk kekerasan lainnya;
6. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan pembangunan, ditunjukkan dengan meningkatnya kasus KDRT dari 137 kasus pada tahun 2024 menjadi 168 kasus pada tahun 2025 dan telah mencapai 98 kasus pada triwulan 2 tahun 2026;
7. Kebutuhan layanan perlindungan perempuan dan anak masih cukup tinggi, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pengaduan dari 342 kasus pada tahun 2024 menjadi 400 kasus pada tahun 2025, meskipun seluruh pengaduan telah berhasil diselesaikan. Adapun pada tahun 2026 sampai dengan triwulan II sudah tercatat 228 layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan;
8. Layanan konseling, pengaduan, pendampingan, dan pemulihan korban kekerasan masih perlu terus diperkuat melalui optimalisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta PUSPAGA hingga tingkat RW;
9. Kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak masih perlu ditingkatkan agar pencegahan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan korban dapat dilakukan secara lebih cepat, terpadu, dan berkelanjutan.

2.3.2.9 Pangan

1. Keamanan pangan segar dan makanan olahan masih perlu diperkuat karena masih ditemukan bahan pangan yang belum memenuhi syarat keamanan pangan;
2. Kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang layak, sehat, dan aman masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi keamanan pangan secara berkelanjutan;

3. Pengawasan pangan yang beredar di masyarakat masih perlu diperkuat melalui pemeriksaan dan pengambilan sampel secara rutin di pasar tradisional, toko swalayan, dan pasar modern;
4. Kerja sama penyediaan pangan dengan daerah penghasil masih perlu diperluas untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kota Surabaya;
5. Pemantauan ketersediaan stok dan harga pangan pokok masih perlu dilakukan secara berkala untuk mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah;
6. Potensi *urban farming* di masyarakat masih perlu dioptimalkan sebagai bagian dari upaya peningkatan ketahanan pangan perkotaan;
7. Pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Surabaya sebagai lahan produktif untuk budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan masih perlu diperkuat;
8. Ketahanan ketersediaan pangan masih perlu dijaga seiring jumlah penduduk Kota Surabaya yang mencapai 3,01 juta jiwa pada tahun 2025, meskipun ketersediaan pangan utama telah mencapai 208,31 kg/kapita/tahun;
9. Kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan, ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan sebesar 96,30 pada tahun 2025 yang belum mencapai skor ideal 100.

2.3.2.10 Pertanahan

1. Perencanaan kebutuhan lahan pembangunan masih perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi kebutuhan ruang perkotaan dan pengembangan infrastruktur di masa mendatang;
2. Pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum masih perlu dilakukan secara bertahap untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik;
3. Legalisasi aset daerah masih perlu dipercepat, ditunjukkan dengan baru 2.657 aset atau 56,21% dari total 4.727 aset Pemerintah Kota Surabaya yang telah bersertifikat hingga Triwulan II Tahun 2026;
4. Pengamanan hukum atas aset daerah masih perlu diperkuat, mengingat masih terdapat 2.070 aset atau 43,79% aset Pemerintah Kota Surabaya yang belum bersertifikat hingga Triwulan II Tahun 2026;
5. Tertib administrasi dan kepastian hukum aset daerah masih perlu ditingkatkan, ditunjukkan dengan persentase luas lahan aset yang telah bersertifikat baru mencapai 58,38% pada tahun 2026 Triwulan II;

6. Pengelolaan aset pertanahan masih perlu ditingkatkan secara menyeluruh melalui percepatan sertifikasi, pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan penguatan basis data aset daerah;
7. Pengamanan fisik aset daerah masih perlu diperkuat melalui pemasangan pagar, papan nama, dan patok batas pada aset tanah milik Pemerintah Kota Surabaya;
8. Sinergi dengan pihak terkait, seperti Kantor Pertanahan dan Kejaksaan, masih perlu dioptimalkan untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi serta penanganan aset yang bermasalah.

2.3.2.11 Lingkungan Hidup

1. Kualitas lingkungan hidup Kota Surabaya masih perlu ditingkatkan, ditunjukkan dengan nilai IKLH tahun 2025 sebesar 61,82 yang masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 73,43 dan nasional sebesar 78,76;
2. Pengendalian pencemaran lingkungan masih perlu diperkuat, terutama terhadap permasalahan limbah, kebisingan, dan polusi udara yang bersumber dari kegiatan usaha maupun aktivitas transportasi;
3. Kepatuhan pelaku usaha terhadap aspek administrasi dan teknis lingkungan masih belum optimal, ditunjukkan dengan baru 147 dari 240 kegiatan usaha yang diawasi telah memenuhi ketentuan administrasi dan teknis lingkungan pada tahun 2026;
4. Koordinasi pengawasan kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan masih perlu diperkuat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup;
5. Pengelolaan persampahan masih perlu dioptimalkan, meskipun volume produksi sampah menurun dari 1.810,81 ton per hari pada tahun 2025 menjadi 1.802,31 ton per hari hingga Triwulan II Tahun 2026;
6. Ketergantungan terhadap penanganan sampah di TPA masih tinggi, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah sampah yang ditangani di TPA dari 1.623,95 ton per hari pada tahun 2025 menjadi 1.743,32 ton per hari hingga Triwulan II Tahun 2026;
7. Fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R masih perlu ditingkatkan, baik melalui penambahan kapasitas maupun pengembangan lokasi baru;

8. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan pengurangan sampah dari sumber masih perlu diperkuat melalui pembinaan dan edukasi berkelanjutan;
9. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik tercatat sebesar 6.853 hektare hingga Triwulan II Tahun 2026, lebih rendah dibandingkan 7.367,09 hektare pada tahun 2025, yang dipengaruhi oleh penyesuaian metode perhitungan sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025;
10. Penataan Ruang Terbuka Hijau masih perlu dioptimalkan, termasuk melalui diversifikasi jenis pohon dan tanaman untuk meningkatkan efektivitas penyerapan polutan;
11. Ancaman perubahan iklim dan peningkatan emisi dari aktivitas perkotaan masih menjadi tantangan, sehingga upaya penurunan emisi gas rumah kaca perlu terus diperkuat;
12. Penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan masih perlu dioptimalkan pada sektor pemerintahan dan kawasan perkotaan, meskipun jumlah PJU LED meningkat dari 117.344 unit pada tahun 2025 menjadi 123.366 unit pada tahun 2026 Triwulan II;
13. Pemanfaatan energi baru terbarukan dan infrastruktur hemat energi berbasis solar cell masih perlu diperluas, mengingat pemanfaatannya pada gedung pemerintah masih sebanyak 46 lokasi serta baru tersedia 21 warning light dan 77 traffic light berbasis solar cell hingga Triwulan II tahun 2026;
14. Kolaborasi dengan pelaku usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, pengurangan emisi, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Surabaya;

2.3.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara daring masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan pelayanan kepada masyarakat;
2. Pemerataan akses layanan administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi Sentra Pelayanan Publik dan Mal Pelayanan Publik yang tersebar di berbagai wilayah Kota Surabaya;
3. Cakupan kepemilikan KTP berbasis NIK masih perlu ditingkatkan agar seluruh penduduk wajib KTP memiliki identitas kependudukan yang sah, meskipun

pada tahun 2026 Triwulan II telah tercatat 2.243.895 penduduk memiliki KTP dari 2.248.979 penduduk wajib KTP;

4. Percepatan perekaman dan penerbitan KTP masih perlu dilakukan untuk menjangkau penduduk yang belum memiliki KTP, termasuk kelompok rentan dan penduduk dengan mobilitas tinggi;
5. Pelaporan dan pencatatan kelahiran masih perlu dioptimalkan guna mendukung akurasi data kependudukan dan pemenuhan hak sipil anak;
6. Kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian masih perlu ditingkatkan untuk mencegah ketidaksesuaian data administrasi kependudukan;
7. Integrasi data dan koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat agar setiap peristiwa kelahiran dan kematian dapat tercatat secara lengkap, tepat waktu, dan terintegrasi dalam sistem administrasi kependudukan;

2.3.2.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Cakupan peserta KB baru masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kampanye, edukasi perencanaan keluarga, dan peningkatan aksesibilitas pelayanan KB;
2. Akses Pasangan Usia Subur terhadap Metode Kontrasepsi Jangka Panjang masih perlu diperluas untuk mendukung perencanaan keluarga yang lebih sehat dan berkelanjutan;
3. Keberlanjutan penggunaan kontrasepsi masih perlu diperkuat, ditunjukkan dengan masih adanya peserta KB aktif yang mengalami drop out kontrasepsi sebanyak 101 peserta pada tahun 2025 dan 96 peserta pada Triwulan II tahun 2026;
4. Pemahaman remaja dan keluarga terhadap perencanaan kehidupan berkeluarga masih perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Bina Keluarga Remaja, serta kampanye Generasi Berencana;
5. Pencegahan perkawinan dan kehamilan pada usia terlalu muda masih perlu diperkuat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas keluarga dan kesehatan ibu serta anak;
6. Peran Institusi Masyarakat Pedesaan/kelurahan dalam mendukung penyuluhan KB masih perlu diperkuat, khususnya dalam membantu tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB di tingkat wilayah;

7. Pembinaan kelompok kegiatan keluarga, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera, masih perlu dioptimalkan untuk mendukung ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. Akses dan kualitas layanan KB berbasis wilayah masih perlu ditingkatkan agar pelayanan kontrasepsi, konseling, dan edukasi keluarga berencana dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata;
9. Sinergi antara pemerintah, kader, penyuluh KB, fasilitas kesehatan, dan masyarakat masih perlu diperkuat untuk meningkatkan partisipasi KB, mencegah drop out kontrasepsi, dan mendukung pembangunan keluarga berkualitas.

2.3.2.14 Perhubungan

1. Pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan wilayah sekitar Surabaya masih perlu diperkuat untuk mendukung konektivitas antarkawasan dan mobilitas masyarakat secara lebih efektif;
2. Koordinasi dengan instansi penyelenggara transportasi di dalam maupun sekitar wilayah Kota Surabaya masih perlu dioptimalkan agar sistem transportasi publik dapat saling terhubung dan terintegrasi;
3. Kualitas dan kuantitas layanan angkutan umum masih perlu ditingkatkan, termasuk melalui penambahan koridor, peningkatan jumlah armada, dan penguatan layanan angkutan umum perkotaan dengan skema Buy The Service;
4. Meskipun load factor angkutan kota meningkat dari 60,69% pada tahun 2025 menjadi 84,47% hingga Triwulan II Tahun 2026, upaya peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik perlu terus dipertahankan;
5. Keselamatan dan ketertiban lalu lintas masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat kejadian kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran sebagian pengguna jalan dalam berlalu lintas;
6. Pembinaan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat dan pelajar masih perlu diperkuat untuk meningkatkan budaya tertib berlalu lintas;
7. Penyediaan fasilitas keselamatan transportasi perlu terus ditingkatkan, meskipun hingga Triwulan II Tahun 2026 telah dilakukan pemasangan 1.660 unit rambu-rambu setelah pada tahun 2025 terpasang 2.714 unit;

8. Pengelolaan transportasi perkotaan masih perlu diperkuat secara terpadu untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, memperbaiki kualitas layanan angkutan umum, dan mendorong peralihan masyarakat ke transportasi publik.

2.3.2.15 Komunikasi dan Informatika

1. Infrastruktur digital Pemerintah Kota Surabaya masih perlu diperkuat agar semakin andal, aman, dan mampu mendukung layanan publik yang kontinu, cepat, dan terpercaya;
2. Integrasi layanan digital pemerintahan masih perlu dioptimalkan, meskipun Indeks SPBE Kota Surabaya meningkat dari 4,49 pada tahun 2024 menjadi 4,78 pada tahun 2025;
3. Interoperabilitas data antarperangkat daerah masih perlu diperkuat agar pemanfaatan data dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien;
4. Pengembangan jaringan fiber optik masih perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas pemerintahan digital, meskipun panjang jaringan telah meningkat dari 311,198 km pada tahun 2025 menjadi 341,023 km pada tahun 2026 triwulan II;
5. Keamanan informasi dan perlindungan data pemerintahan masih perlu diperkuat seiring meningkatnya ketergantungan layanan publik terhadap sistem digital;
6. Kompetensi sumber daya manusia pengelola teknologi informasi masih perlu ditingkatkan agar mampu mendukung pengembangan, pemeliharaan, keamanan, dan integrasi sistem pemerintahan digital;
7. Tata kelola pemerintahan digital masih perlu diperkuat untuk memastikan layanan berbasis teknologi informasi berjalan konsisten, aman, terstandar, dan berkelanjutan.

2.3.2.16 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Pengelolaan Sentra Wisata Kuliner masih perlu dioptimalkan, terutama pada lokasi yang kurang strategis dan belum mampu menarik minat pengunjung secara maksimal;
2. Revitalisasi dan rebranding Sentra Wisata Kuliner masih perlu diperkuat untuk meningkatkan daya tarik, kualitas layanan, dan keberlanjutan usaha para pelaku UMKM kuliner;

3. Kapasitas pelaku usaha di Sentra Wisata Kuliner masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek cita rasa, penyajian, pengelolaan usaha, dan pemasaran digital;
4. Penguatan kelembagaan koperasi masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, kepatuhan kelembagaan, dan keberlanjutan usaha koperasi. Meskipun jumlah koperasi meningkat menjadi 1.880 unit pada Triwulan II Tahun 2026 setelah penataan kelembagaan pada tahun 2025, pembinaan terhadap koperasi agar tetap aktif dan sehat masih perlu terus ditingkatkan;
5. Produktivitas dan daya saing koperasi aktif masih perlu ditingkatkan, ditunjukkan dengan pertumbuhan produktivitas koperasi aktif yang mengalami kontraksi sebesar 15,32% pada Triwulan II Tahun 2026;
6. Daya saing UMKM lokal masih perlu ditingkatkan dalam menghadapi persaingan usaha, perkembangan teknologi digital, dan masuknya produk impor;
7. Kapasitas pelaku UMKM masih perlu diperkuat melalui pelatihan manajemen usaha, peningkatan kualitas produk, branding, pemasaran digital, dan perluasan akses pasar;
8. Legalitas dan standardisasi produk UMKM masih perlu ditingkatkan melalui fasilitasi sertifikasi halal, sertifikasi merek, BPOM, PIRT, dan pemenuhan standar produk lainnya;
9. Pemanfaatan kanal pemasaran digital dan promosi produk UMKM masih perlu dioptimalkan, termasuk melalui e-Peken, event pameran, gelar produk, Surabaya Kriya Gallery, dan kemitraan dengan perguruan tinggi serta pemangku kepentingan lainnya;
10. Pembinaan dan pengembangan UMKM masih perlu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya, meskipun hingga Triwulan II Tahun 2026 telah dilakukan pembinaan terhadap 5.635 UMKM melalui berbagai bentuk intervensi.

2.3.2.17 Penanaman Modal

1. Iklim investasi daerah masih perlu diperkuat untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal dan mendorong pertumbuhan realisasi investasi yang berkelanjutan;

2. Peningkatan realisasi investasi belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi penyerapan tenaga kerja, ditunjukkan dengan menurunnya rasio daya serap tenaga kerja dari 2,71 pada tahun 2024 menjadi 2,68 pada tahun 2025;
3. Kualitas investasi yang masuk masih perlu diarahkan agar lebih berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2.18 Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi untuk semua cabang olahraga. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga terstandar terus diupayakan sebagai prioritas yang mendukung peningkatan daya saing atlet daerah dengan memperhatikan kebutuhan kesiapan atlet dan juga event olahraga nasional terutama pada cabang olahraga yang diperlombakan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan lapangan olahraga di kawasan pemukiman salah satunya dengan melakukan pemeliharaan/revitalisasi dan mendorong giat aktivitas dan lomba olahraga di tingkat kecamatan;
3. Masih belum tersedianya sistem untuk *database* atlet dan pelatih olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;
4. Belum tersusunnya Dokumen Desain Olahraga Daerah dengan melibatkan akademisi dan praktisi yang ada di daerah.
5. Perlunya penguatan sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan dan berbasis regenerasi, khususnya dalam rangka mempersiapkan Surabaya sebagai tuan rumah dan meraih juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027;
6. Perlunya pengembangan Surabaya sebagai kota olahraga dan destinasi *sport tourism* yang berdampak nyata bagi perekonomian daerah;
7. Perlunya peningkatan jaminan kesejahteraan atlet berprestasi, baik saat aktif maupun pascapensiun;
8. Perlunya pengembangan cabang olahraga baru dan e-sport sebagai bagian dari ekosistem olahraga kota yang inklusif dan relevan bagi generasi muda;
9. Sistem pembinaan dan regenerasi atlet masih perlu diperkuat untuk menjaga keberlanjutan prestasi olahraga daerah, meskipun persentase atlet berprestasi meningkat dari 70,84% pada tahun 2024 menjadi 93,63% pada tahun 2025;

10. Pengembangan organisasi dan komunitas olahraga masih perlu diperkuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan generasi muda dalam kegiatan olahraga positif.

2.3.2.19 Statistik

1. Perlunya optimalisasi portal satu data yang terbuka melalui penyediaan fungsi sebagai titik akses tunggal (*single access point*) bagi publik dan instansi pemerintah untuk mengakses sistem Satu Data dan Satu Peta yang telah divalidasi dan terintegrasi;
2. Perlunya optimalisasi sistem data terintegrasi yang memenuhi standar keamanan informasi untuk menyimpan dan mengolah data terintegrasi;
3. Publikasi hasil analisis data yang telah mencapai 100% perlu didukung dengan optimalisasi pemanfaatan *data analytics*, integrasi data lintas sektor, dan pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk mendukung transformasi digital dan *smart city*.

2.3.2.20 Persandian

1. Perlunya optimalisasi sistem keamanan siber melalui pengembangan kapabilitas persandian, baik dari aspek infrastruktur maupun kompetensi SDM di bidang teknologi informasi dan keamanan siber untuk mengantisipasi serangan siber yang semakin tinggi serta melindungi aset data dan infrastruktur digital;
2. Perlunya optimalisasi sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung interoperabilitas yang optimal antar Perangkat Daerah melalui evaluasi keamanan informasi yang rutin dan penerapan perbaikan yang konsisten;
3. Ancaman terhadap keamanan informasi daerah masih perlu diantisipasi secara berkelanjutan, ditunjukkan dengan masih terjadinya 240 serangan terhadap sistem keamanan informasi pada tahun 2025 dan 120 serangan pada Triwulan II Tahun 2026;
4. Risiko keamanan siber masih perlu dimitigasi, mengingat hingga Triwulan II Tahun 2026 telah tercatat 120 kasus serangan siber dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah hingga akhir tahun, meskipun seluruh serangan berhasil ditangani (100%);
5. Penurunan Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah dari 78,00% pada tahun 2024 menjadi 69,61% pada tahun 2025 mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas keamanan siber,

termasuk modernisasi infrastruktur teknologi informasi dan penguatan tata kelola keamanan informasi.

2.3.2.21 Kebudayaan

1. Masih terbatasnya kesempatan bagi pelaku seni dan budaya untuk tampil di ruang publik, yang diupayakan antara lain dengan mendorong partisipasi pelaku seni dan budaya dalam setiap kegiatan seremonial, seni dan budaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu juga melalui penyediaan dan pengembangan ruang-ruang publik seperti taman dan tempat wisata yang menjadi ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya. Pemerintah Kota Surabaya juga mendorong pihak-pihak swasta dalam pelibatan pelaku seni lokal untuk tampil pada event yang dilaksanakan di hotel, restoran dan tempat publik lainnya;
2. Belum optimalnya pemanfaatan obyek dan situs cagar budaya, sehingga perlu dilakukan antara lain pengembangan dan revitalisasi kawasan wisata serta melakukan pendekatan kepada potensi pemodal/pengusaha untuk memanfaatkan bangunan cagar budaya;
3. Perlunya penguatan pelestarian seni dan budaya tradisional di tengah arus globalisasi dan budaya populer, mengingat generasi muda kini lebih terpapar budaya asing melalui media sosial dan platform digital sehingga budaya lokal seperti ludruk, tari remo, dan kesenian tradisional lainnya kalah pamor. Upaya yang perlu ditempuh antara lain melalui penguatan Rumah Kreatif di Balai Pemuda sebagai benteng pelestarian budaya lokal yang menghidupkan kembali seni tradisional seperti ludruk, karawitan, dan tari Jawa, sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda sebagai agen perubahan budaya;
4. Perlunya percepatan digitalisasi dokumentasi dan promosi warisan budaya lokal Kota Surabaya, mengingat masih banyak tradisi dan seni lokal yang belum terdokumentasi secara baik dalam bentuk digital untuk keperluan edukasi maupun promosi. Hal ini perlu ditindaklanjuti melalui pemanfaatan platform digital dan media sosial sebagai sarana dokumentasi, promosi, serta edukasi budaya secara lebih sistematis;
5. Perlunya penguatan regulasi dan implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya yang lebih efektif, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, yang menekankan peran aktif Pemerintah Daerah dalam survei, perlindungan,

dan pemanfaatan cagar budaya, namun implementasi di lapangan masih membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;

6. Perlunya upaya pengakuan dan perlindungan warisan budaya takbenda (WBTB) Kota Surabaya secara lebih aktif dan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan bahwa penetapan WBTB bukan sekadar pengakuan administratif, tetapi juga amanah untuk memastikan praktik budaya tetap lestari, berkembang, dan diwariskan kepada generasi penerus, termasuk mendorong pendataan, perlindungan, pengembangan, dan promosi tradisi serta budaya lokal agar tetap hidup dan relevan;
7. Perlunya mendorong inovasi budaya berbasis komunitas yang lebih merata di seluruh wilayah kota, mengingat melalui Inovboyo 2025 telah lahir berbagai inovasi budaya berbasis kecamatan seperti Kampung Parikan untuk melestarikan seni budaya parikan Ludruk, Kampung Wisata Heritage Peneleh, dan Kampung Batik Ecoprint, namun potensi ini perlu diperluas dan dikuatkan agar tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu saja;
8. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal masih perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas budaya masyarakat, ditunjukkan dengan Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya yang pada tahun 2025 mencapai 90,42, meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 90,11;
9. Internalisasi nilai budaya lokal kepada generasi muda masih perlu ditingkatkan untuk menjaga keberlanjutan budaya daerah, ditunjukkan dengan kenaikan Indeks Budaya Lokal yang relatif terbatas dari 90,11 pada tahun 2024 menjadi 90,42 pada tahun 2025;
10. Optimalisasi kontribusi festival seni dan budaya terhadap penguatan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata masih perlu ditingkatkan, dengan penyelenggaraan 14 festival seni dan budaya hingga Triwulan II Tahun 2026 yang masih berpotensi bertambah hingga akhir tahun;
11. Pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pendidikan, pelestarian sejarah, dan pengembangan wisata budaya, ditunjukkan dengan terdapat 285 benda, situs, dan kawasan cagar budaya pada tahun 2026 Triwulan II;
12. Pembinaan dan pendampingan kelompok seni masih perlu ditingkatkan, ditunjukkan dengan masih terdapat 281 kelompok seni yang belum layak tampil dari total 715 kelompok seni binaan pada tahun 2025;

13. Kapasitas dan kompetensi pelaku seni budaya masih perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas pertunjukan seni, ditunjukkan dengan baru 434 kelompok seni yang dinyatakan layak tampil dari total 715 kelompok seni binaan pada tahun 2025;

2.3.2.22 Perpustakaan

1. Perlunya optimalisasi pemanfaatan Perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat untuk meningkatkan minat baca masyarakat, melalui pengembangan sistem layanan perpustakaan yang modern dan terintegrasi memperkuat layanan literasi informasi, penyediaan akses pengetahuan pembangunan daerah, pengelolaan arsip dan data yang mudah diakses masyarakat, serta edukasi literasi digital guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota;
2. Pembangunan literasi masyarakat masih perlu diperkuat, ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang menurun dari 100 pada tahun 2024 menjadi 71,9 pada tahun 2025, seiring perubahan metode penilaian yang lebih menitikberatkan pada pemanfaatan layanan dan aktivitas literasi masyarakat;
3. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas literasi masih perlu ditingkatkan, ditunjukkan dengan tersedianya 530 taman baca dan sudut baca pada tahun 2026 sampai dengan triwulan II yang perlu didukung dengan peningkatan aktivitas literasi masyarakat;
4. Pemanfaatan layanan baca masyarakat masih perlu ditingkatkan, mengingat hingga Triwulan II Tahun 2026 jumlah pengunjung baru mencapai 412.025 orang dan masih berpotensi bertambah hingga akhir tahun;
5. Penguatan program literasi masyarakat masih diperlukan untuk menjaga tren peningkatan budaya membaca yang sebelumnya meningkat dari 68,45 pada tahun 2022 menjadi 84,80 pada tahun 2024, namun menurun menjadi 79,42 pada tahun 2025.

2.3.2.23 Kearsipan

1. Perlunya optimalisasi kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan, melalui sertifikasi kompetensi;
2. Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum optimal, sehingga pemerintah kota mengembangkan sistem layanan kearsipan yang modern dan

terintegrasi, serta menyempurnakan regulasi dan SOP pengelolaan kearsipan;

3. Digitalisasi dan preservasi arsip jangka panjang masih perlu diperkuat, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah arsip statis yang diakuisisi dari 17.197 arsip pada tahun 2025 menjadi 17.739 arsip hingga Triwulan II Tahun 2026.

2.3.2.24 Kelautan dan Perikanan

1. Perlunya optimalisasi pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan, melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, yang tidak hanya sebatas pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya namun juga sekaligus pendampingan dari tenaga penyuluh;
2. Perlunya pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan pendapatan nelayan, melalui pemberian bantuan intervensi kepada keluarga nelayan untuk dapat mengolah hasil perikanan menjadi produk jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Keluarga nelayan yang dibina menjadi pelaku usaha UMKM tersebut juga mendapatkan fasilitas pemasaran di Sentra Ikan Bulak dan Romokalisari (Romokalisari *Adventure Land*);
3. Produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap masih perlu diperkuat untuk menjaga tren peningkatan produksi. Produksi perikanan laut meningkat dari 8.526,00 ton pada tahun 2024 menjadi 9.142,40 ton pada tahun 2025, sedangkan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar 4.460,01 ton
4. Ketahanan sektor perikanan laut terhadap perubahan cuaca, iklim, dan tekanan lingkungan masih perlu ditingkatkan untuk menjaga keberlanjutan produksi perikanan daerah;
5. Efisiensi pengelolaan usaha budidaya perikanan masih perlu diperkuat untuk mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perikanan, ditunjukkan dengan kenaikan produksi tambak yang hanya sebesar 3,26 ton pada tahun 2025;
6. Peningkatan produksi perikanan perlu diimbangi dengan penguatan hilirisasi dan pemasaran hasil perikanan agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pelaku usaha perikanan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya total produksi perikanan dari 18.502,24 ton pada tahun 2024 menjadi

19.121,90 ton pada tahun 2025, sedangkan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar 9.156,16 ton.

7. Penguatan rantai pasok dan distribusi hasil perikanan masih diperlukan untuk mendukung penyerapan hasil produksi yang terus meningkat setiap tahun;
8. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sektor perikanan masih perlu ditingkatkan untuk menjaga keberlanjutan peningkatan produksi perikanan daerah.

2.3.2.25 Pariwisata

1. Perlunya optimalisasi upaya peningkatan kunjungan di objek wisata, melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta integrasi dengan kawasan wisata lain;
2. Perlunya optimalisasi kawasan wisata dan integrasi antar kawasan wisata, melalui melalui penambahan destinasi wisata baru di kawasan kota lama yang pengembangan dan pengintegrasian antar zonanya masih akan terus dilakukan hingga 5 tahun ke depan;
3. Perlunya optimalisasi kerjasama dengan *stakeholder* bidang pariwisata, melalui kerjasama dengan kelompok sadar wisata dan komunitas lokal seperti Bersukaria *Walk* dan Surabaya *Walking Tour by Roodebrug*, serta perusahaan, melalui *creating shared value* (CSV) untuk mengembangkan wisata rakyat yang dapat dijangkau masyarakat.
4. Perlunya penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang merata di seluruh wilayah kota, melalui pengembangan Simpul Kreatif di 31 kecamatan sebagai wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk menyalurkan ide-ide inovatif dan menghasilkan produk bernilai ekonomis, mengingat potensi tersebut belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal;
5. Perlunya percepatan transformasi digital bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM sektor pariwisata, mengingat pelaku usaha masih menghadapi tantangan terkait legalitas, manajemen, digitalisasi, akses pembiayaan, dan ekonomi sirkular, sehingga dibutuhkan pendampingan yang lebih intensif dan menyeluruh;
6. Perlunya diversifikasi produk wisata kota menuju segmen yang lebih luas dan bernilai tinggi, termasuk pengembangan wisata MICE (*Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions*) dan *Medical Tourism* sejalan dengan peran Surabaya sebagai Superhub Megapolitan, guna meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan;

7. Perlunya penguatan pengembangan kampung tematik sebagai destinasi wisata berbasis komunitas yang berkelanjutan, mengingat Surabaya telah memiliki 44 Kampung Tematik yang tersebar di seluruh kota, namun pengelolaan dan manajemen operasionalnya perlu terus ditingkatkan agar produk UMKM semakin dikenal luas;
8. Perlunya integrasi event budaya dan pariwisata dengan sektor ekonomi kreatif secara lebih terstruktur, sebagaimana tercermin dalam penyelenggaraan perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) yang mengintegrasikan sektor pariwisata, UMKM, dan industri kreatif dalam satu rangkaian event besar, namun masih memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor yang lebih sistematis dan berkelanjutan;
9. Peningkatan kunjungan wisatawan perlu terus didorong melalui penguatan promosi, penyelenggaraan event, serta peningkatan kualitas destinasi dan layanan pariwisata, mengingat hingga Triwulan II Tahun 2026 baru tercatat 3.039.483 kunjungan wisatawan;
10. Kesiapan destinasi wisata dalam mengakomodasi kunjungan wisatawan mancanegara masih perlu diperkuat, mengingat hingga Triwulan II Tahun 2026 tercatat 18.604 kunjungan wisatawan mancanegara dan capaian tersebut masih akan berkembang hingga akhir tahun;
11. Optimalisasi manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan masih perlu ditingkatkan agar memberikan dampak yang lebih luas terhadap pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif daerah, mengingat hingga Triwulan II Tahun 2026 tercatat 3.277.670 kunjungan wisatawan nusantara dan capaian tersebut masih akan berkembang hingga akhir tahun;
12. Pengembangan daya tarik wisata masih perlu ditingkatkan untuk mengimbangi pertumbuhan kunjungan wisatawan, ditunjukkan dengan jumlah objek daya tarik wisata yang berhasil dikembangkan baru mencapai 8 destinasi pada tahun 2026;
13. Diversifikasi destinasi wisata masih perlu diperkuat guna meningkatkan pilihan atraksi wisata bagi wisatawan, ditunjukkan dengan penambahan ODTW yang hanya meningkat dari 7 destinasi pada tahun 2024 menjadi 8 destinasi pada tahun 2025;
14. Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya, sejarah, dan ekonomi kreatif masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Kota Surabaya.

2.3.2.26 Pertanian

1. Perlunya optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya pertanian *(urban farming),* peternakan dan perikanan, melalui Program Penyuluhan Pertanian untuk meningkatkan kapasitas pembudidaya, tenaga pendamping maupun penyuluh;
2. Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan. Untuk itu, dilakukan optimalisasi klinik hewan yang beroperasi untuk menangani kesehatan hewan ternak di masyarakat;
3. Perlunya pencegahan dan penanganan terhadap dampak munculnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, melalui peran aktif veteriner pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang didukung juga oleh klinik hewan;
4. Peningkatan produksi tanaman pangan masih perlu didukung melalui peningkatan produktivitas lahan. Hal ini ditunjukkan dengan produksi tanaman pangan yang meningkat dari 7.387,50 ton pada tahun 2024 menjadi 8.697,96 ton pada tahun 2025 seiring bertambahnya luas areal tanam dari 1.099,30 ha menjadi 1.293,83 ha. Namun, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 produktivitas tanaman pangan tercatat sebesar 6,26 ton/ha, lebih rendah dibandingkan produktivitas tahun 2025 sebesar 6,72 ton/ha;
5. Ketahanan sektor pertanian terhadap keterbatasan lahan perkotaan masih menjadi tantangan, ditunjukkan dengan terbatasnya luas areal tanaman pangan. Pada tahun 2025 luas areal tanaman pangan mencapai 1.293,83 ha, sedangkan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 luas areal yang dimanfaatkan tercatat sebesar 583,90 ha;
6. Peningkatan produksi padi masih perlu didukung oleh peningkatan produktivitas lahan dan efisiensi budidaya. Produksi padi meningkat dari 7.387,50 ton pada tahun 2024 menjadi 8.697,96 ton pada tahun 2025, namun produktivitas lahan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menurun menjadi 6,26 ton/ha dari 6,72 ton/ha pada tahun 2025;
7. Peningkatan produksi jagung perlu diimbangi dengan penguatan pemasaran dan hilirisasi hasil pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya produksi jagung sebesar 51,5% dari 281,65 ton pada tahun 2024 menjadi 426,68 ton pada tahun 2025, sedangkan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 produksi telah mencapai 279,31 ton;

8. Produksi cabai masih menunjukkan fluktuasi antartahun, sehingga stabilitas produksi komoditas hortikultura masih menjadi tantangan. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan produksi cabai yang cukup signifikan dari 56,68 ton pada tahun 2024 menjadi 21,25 ton pada tahun 2025 atau turun sekitar 62,5%;
9. Peningkatan produksi sayuran perlu didukung dengan penguatan rantai pasok dan pemasaran hasil pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya produksi sayuran dari 144,68 ton pada tahun 2024 menjadi 227,16 ton pada tahun 2025, sedangkan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 produksi telah mencapai 98,73 ton;
10. Nilai tambah dan daya saing komoditas buah masih perlu diperkuat melalui pengembangan pascapanen dan pemasaran hasil pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan produksi buah yang mencapai 10.894,66 ton pada tahun 2025, sedangkan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 produksi telah mencapai 4.095,21 ton;
11. Pengendalian penyakit hewan dan peningkatan produktivitas peternakan masih perlu diperkuat untuk meningkatkan cakupan intervensi kesehatan ternak. Persentase ternak sehat yang diintervensi mencapai 91,12% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 91,13% sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, namun masih terdapat 341 ekor ternak yang belum mendapatkan intervensi kesehatan.

2.3.2.27 Perdagangan

1. Meningkatnya persaingan usaha sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, serta masuknya produk-produk impor dari luar negeri yang berpengaruh pada sektor perdagangan. Untuk itu Pemerintah kota Surabaya berupaya untuk meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional, salah satunya melalui kemitraan dengan universitas dan *stakeholder* terkait memberikan berbagai macam pelatihan baik tentang produk sampai pemasaran *digital*, serta memfasilitasi promosi produk UMKM melalui ePeken, *event* pameran, gelar produk, dan pemasaran melalui SKG (Sentra Kriya Galeri), meningkatkan kualitas dan *branding* produk UMKM dengan menggencarkan program sertifikasi halal, baik itu secara regular maupun *self-declare* bagi UMKM dan fasilitasi sertifikasi merk BPPOM dan PIRT;

2. Perlunya optimalisasi pengelolaan pasar tradisional, melalui pemenuhan sarana prasarana di beberapa pasar untuk menuju pasar ber-SNI Pasar Rakyat, serta pasar pangan aman berbasis komunitas;
3. Perlunya sistem informasi dan fluktuasi harga dan ketersediaan terutama bahan pokok penting untuk mencegah *panic buying* di masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi;
4. Pengendalian inflasi daerah masih perlu diperkuat, ditunjukkan dengan inflasi Kota Surabaya sebesar 3,88% pada tahun 2026 yang lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34%;
5. Stabilitas pasokan dan distribusi komoditas strategis masih perlu dijaga untuk mengendalikan tekanan inflasi daerah yang meningkat pada tahun 2025;
6. Pengawasan terhadap perkembangan pasar modern masih perlu diperkuat agar pertumbuhannya tetap selaras dengan tata ruang dan struktur perdagangan daerah, ditunjukkan dengan bertambahnya 292 toko swalayan dalam satu tahun;
7. Daya saing pasar rakyat terhadap perkembangan pasar modern masih perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas infrastruktur, pengelolaan, dan pelayanan pasar;
8. Modernisasi tata kelola pasar rakyat masih perlu diperkuat pasca transformasi kelembagaan dari PD Pasar Surya menjadi PT Pasar Surya (Perseroda) pada tahun 2025;
9. Peningkatan kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar rakyat masih perlu dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat berbelanja di pasar tradisional;
10. Iklim usaha dan investasi masih perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha, ditunjukkan dengan berkurangnya 28.263 usaha berizin pada tahun 2025;
11. Daya saing sektor industri masih perlu ditingkatkan, ditunjukkan dengan penurunan jumlah usaha industri berizin yang cukup signifikan dari 39.520 usaha pada tahun 2024 menjadi 19.110 usaha pada tahun 2025;
12. Penguatan sektor perdagangan dan industri masih diperlukan untuk menjaga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, ditunjukkan dengan menurunnya jumlah usaha perdagangan dan industri yang memiliki izin berlaku pada tahun 2025.

2.3.2.28 Sekretariat Daerah

1. Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik untuk memenuhi harapan masyarakat;
2. Masih adanya kecamatan yang batas wilayahnya perlu penegasan yang sah. Untuk itu, dilakukan penegasan batas pada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Krembangan, dan Asemrowo akan diselesaikan pada tahun 2026;
3. Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan kota dan kondisi masyarakat, melalui evaluasi secara bertahap terhadap produk hukum yang telah ditetapkan maupun diundangkan;
4. Dari total 2.187 SOP yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2025, sebanyak 610 SOP telah dievaluasi, yang mengindikasikan perlunya percepatan evaluasi dan pemutakhiran SOP secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan regulasi;
5. Masih terdapat BUMD yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu PT Pasar Surya dan PT Rumah Potong Hewan, yang mengindikasikan perlunya penguatan tata kelola perusahaan, pengendalian internal, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

2.3.2.29 Perencanaan

1. Masih diperlukannya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, melalui pengembangan aplikasi ePlanning;
2. Masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan data dan evaluasi, melalui evaluasi atas penyelenggaraan data dan informasi perencanaan.

2.3.2.30 Keuangan

1. Kurang optimalnya realisasi pendapatan daerah. Untuk itu, dilakukan percepatan implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, khususnya untuk pajak dan retribusi daerah dengan menggalakkan pembayaran melalui kanal-kanal *digital*, termasuk penerapan kebijakan parkir digital serta pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui *internet banking* dan *virtual account* serta kanal-kanal pembayaran *digital* lainnya;

2. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Untuk itu, dilakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan menggali potensi yang ada melalui pemasangan alat pemantauan pajak secara elektronik;
3. Belum validnya pendataan obyek pajak/retribusi yang dinamis. Untuk itu, dilakukan pendataan ulang *database* pajak daerah dengan menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Belum optimalnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dikarenakan petunjuk teknis yang terlambat dan perubahan petunjuk teknis atau kebijakan pada tahun berjalan. Untuk itu, dilakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait pendapatan dan belanja transfer;
5. Penyerapan anggaran masih perlu dioptimalkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah;
6. Kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran masih perlu diperkuat untuk mencegah deviasi pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan efektivitas belanja daerah;
7. Pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pendapatan daerah, optimalisasi belanja, percepatan digitalisasi transaksi, serta peningkatan akuntabilitas dan kinerja fiskal daerah.

2.3.2.31 Kepegawaian

1. Perlunya optimalisasi sistem merit dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara, melalui pengembangan evaluasi kinerja dan karir ASN berbasis *talent pool* elektronik, *awarding*, serta absensi *online*;
2. Perlunya penyusunan analisa beban kerja dan analisa jabatan secara berkala, melalui pengembangan *talent pool* elektronik;
3. Optimalisasi penerapan manajemen talenta ASN, yang terintegrasi dan berbasis data kinerja, kompetensi, serta potensi ASN secara menyeluruh;
4. Penguatan peran pembinaan, pengawasan, serta sinergi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pembinaan disiplin ASN;
5. Pengembangan kompetensi aparatur perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh ASN memiliki kompetensi yang sesuai, meskipun jumlah pegawai kompeten telah meningkat menjadi 23.175 orang hingga Triwulan II Tahun 2026.

2.3.2.32 Pendidikan dan Pelatihan

1. Perlunya optimalisasi pengembangan kompetensi pegawai, melalui pengembangan e-learning, balai diklat terakreditasi, serta aplikasi perencanaan dan dampak diklat;
2. Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN yang berbasis kebutuhan organisasi dan individu (gap kompetensi dalam mendukung transformasi digital dan inovasi pelayanan publik).
3. Pengembangan kompetensi pejabat struktural masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, meskipun persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural meningkat dari 37,73% pada tahun 2025 menjadi 55,65% hingga Triwulan II Tahun 2026;
4. Masih terdapat 514 pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural pada tahun 2026 sampai dengan triwulan II, sehingga pengembangan kompetensi ASN belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan organisasi.
5. Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan kompetensi ASN masih perlu diperkuat untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, mudah diakses, dan berkelanjutan.

2.3.2.33 Penelitian dan Pengembangan

1. Masih adanya hasil penelitian dan pengembangan yang belum dimanfaatkan/ditindaklanjuti. Untuk itu, dilakukan finalisasi *longlist* dan *shortlist* permasalahan yang dapat menjadi topik penelitian oleh PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan/atau PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di Kota Surabaya, serta dibangun basis data/direktori penelitian terkait Kota Surabaya yang bersumber dari hasil penelitian yang masih relevan;
2. Perlunya penguatan kelembagaan bidang urusan penelitian dan pengembangan, antara lain melalui:
   a. koordinasi untuk segera menindaklanjuti MoU dengan PTN dan/atau PTS pada ruang lingkup Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Perjanjian Kerjasama terkait kolaborasi riset dan inovasi serta berbagi pakai data.
   b. pengembangan sistem informasi sehingga siap terintegrasi dengan sistem informasi lainnya dalam rangka merintis iklim berbagi-pakai infrastruktur, sumber daya, maupun hasil riset dan inovasi antar pemangku kepentingan.
3. Peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Surabaya dari 4,06 pada tahun 2022 menjadi 4,24 pada tahun 2025 mengindikasikan perlunya upaya

berkelanjutan untuk memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, infrastruktur, dan iklim investasi.

2.3.2.34 Inspektorat Daerah

1. Perlunya optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk itu, selain dilakukan pengembangan WBS (whistleblowing system) yang melibatkan aduan masyarakat, juga dibentuk sekretariat bersama penyuluh anti KKN;
2. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah. Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan e-Audit telah disediakan aplikasi e-Audit sebagai media pengawasan oleh APIP dan e-consulting sebagai kanal bagi Perangkat Daerah untuk berkonsultasi pada APIP terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
3. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi peraturan terkait disiplin pegawai secara rutin bekerja sama dengan BKPSDM sebagai upaya penanganan pelaku tindak indisipliner;
4. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Surabaya periode 2021–2025 yang berfluktuasi dan berada pada kategori Terjaga, Rentan, hingga Waspada mengindikasikan perlunya penguatan budaya integritas, pencegahan korupsi, dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel;
5. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menurun dari 3,603 pada tahun 2021 menjadi 3,070 pada tahun 2025 mengindikasikan perlunya penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, dan efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.2.35 Kecamatan

1. Masih adanya kecamatan yang batas wilayahnya perlu penegasan yang sah. Untuk itu, dilakukan penegasan batas pada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Krembangan, dan Asemrowo akan diselesaikan pada tahun 2026;
2. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia utamanya pemberi pelayanan langsung bagi masyarakat, melalui upaya peningkatan kapasitas;
3. Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antar personil di Kecamatan dan Kelurahan, melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi sistem informasi yang

dapat memudahkan dalam melaksanakan koordinasi antara personil di Kecamatan dan Kelurahan;

4. Perlunya optimalisasi pelaksanaan Dana Kelurahan, dengan melibatkan segala unsur masyarakat, baik perwakilan unsur lembaga kemasyarakatan maupun perwakilan masyarakat rentan, seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan difabel.

2.3.2.36 Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Masih adanya potensi konflik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk itu diperlukan adanya Tim Kewaspadaan Dini untuk memetakan potensi konflik, serta perlu didukung pemenuhan kebutuhan dan koordinasi dari para petugas pengamanan;
2. Potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat masih perlu diantisipasi, ditunjukkan dengan masih terjadinya 160 aksi unjuk rasa pada tahun 2026 sampai dengan triwulan II.
3. Upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama perlu terus diperkuat untuk mencegah berkembangnya potensi konflik sosial berbasis keagamaan, ditunjukkan dengan masih terdapat 2 potensi konflik umat beragama pada tahun 2026 sampai dengan triwulan II yang memerlukan fasilitasi penyelesaian.

BAB III
KERANGKA EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Konflik di kawasan Timur Tengah masih menjadi sumber utama ketidakpastian global. Beberapa resiko tersebut tercermin pada kenaikan harga energi dan komoditas, peningkatan sengketa dagang dan gangguan rantai pasok global, serta pengetatan likuiditas global akibat kebijakan moneter negara maju. Melihat kondisi tersebut, beberapa lembaga internasional seperti IMF, OECD, dan World Bank memproyeksikan perlambatan ekonomi global pada 2026. Berdasarkan data lembaga ekonomi *International Monetary Fund* (IMF), pada tahun 2026 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tumbuh cenderung stagnan sebesar 3,1 persen. Bahkan, World Bank melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 lebih kecil yakni sebesar 2,6 persen di tahun 2026.

Ditengah dinamika ekonomi, perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja yang solid. Artinya, ketahanan eksternal indonesia cukup kuat menghadapi perekonomian global yang cukup dinamis.Hal tersebut ditunjukkan oleh semua komponen penyusun PDB Nasional masih tumbuh positif di tahun 2025. Berdasarkan rilis BPS, perekonomian Nasional pada tahun 2025 tumbuh 5,11 persen, yang tumbuh meningkat dibanding tahun 2024 yakni sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan ekonomi masih didorong oleh konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Untuk Ekspor barang dan jasa pada tahun 2025 tumbuh 7,03 persen, sementara ekspor jasa karena peningkatan kunjungan wisman. Sementara untuk PMTB tumbuh 5,09 persen pada tahun 2025, didukung oleh mesin dan peralatan karena impor barang modal jenis mesin, produksi industri mesin, serta belanja pemerintah untuk peralatan dan mesin.

Pemerintah telah menyusun kerangka perekonomian tahun 2026 yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan (RKP) tahun 2026, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) menargetkan perekonomian Nasional pada tahun 2026 tumbuh pada kisaran 5,2 – 5,8 persen. Dari sisi pengeluaran, peluang besarnya investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Konsumsi masyarakat juga diperkirakan tumbuh positif. Sementara dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi diperkirakan didorong oleh

sektor-sektor potensial yang mengalami pertumbuhan positif. Bappenas juga menargetkan sasaran indikator pembangunan lainnya di tahun 2026. Indikator ketenagakerjaan yang diwakilkan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan di kisaran 4,44 – 4,96 persen. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan ditargetkan turun di kisaran 6,5 – 7,5 persen.

Selain itu, Pemerintah telah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Pemutakhiran Tahun 2026 yang merupakan dokumen negara yang memiliki peran strategis dalam memberikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal. Di tengah gejolak global yang dinamis dan tantangan struktural domestik, kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan **"Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"** menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah berkomitmen memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan melalui 8 (delapan) strategi untuk mendukung agenda pembangunan: (i)ketahanan pangan; (ii)ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Sejalan dengan nasional, perekonomian Jawa Timur pada tahun 2025 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 Jawa Timur tercatat tumbuh sebesar 5,33 persen, dimana lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Ekonomi Jawa Timur ditopang oleh tiga sektor utama yaitu industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 31,32 persen, Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,55 persen dan pertanian sebesar 10,74 persen. Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, perbaikan konsumsi pemerintah, serta lebih tingginya ekspor barang dan jasa menopang perekonomian Jawa Timur tetap berdaya tahan. Lebih tingginya konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan utamanya ditopang oleh peningkatan konsumsi ritel subkomponen makanan minuman dan barang. Disamping itu peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga turut tecermin dari peningkatan pertumbuhan transaksi nontunai dan transaksi e–commerce Dari sisi lapangan usaha (LU), akselerasi kinerja perekonomian terutama didukung oleh peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian dan Akomodasi Makan Minum. Momentum capaian kinerja ekonomi pada tahun 2025 semakin memberikan optimisme ekonomi Jawa Timur akan terus tumbuh positif di

tahun 2026 dan 2027. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan ekonomi yang dirumuskan dalam kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Timur, antara lain:

(1) Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus
(2) Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat
(3) Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro.
(4) Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk.
(5) Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan
(6) Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi.
(7) Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produkproduk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan.
(8) Menjaga iklim investasi melalui melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi.
(9) Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy dan ekonomi biru/blue economy dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
(10) Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan

Selaras arah kebijakan pembangunan Nasional dan Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya juga berupaya melakukan penyelarasan prioritas pembangunan di tahun 2026, dimana arah kebijakan ekonomi berfokus pada tema

pembangunan”***Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur”*** dengan prioritas sebagai berikut : (a) Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan yang adil dan inklusif, (b) Pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif, (c) Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, (d) Reformasi birokrasi berbasis digital, dan (e) Harmonisasi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kinerja perekonomian Kota Surabaya secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,87 persen meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 sebesar 5,76 persen. Akselerasi ekonomi Kota Surabaya ditunjang oleh kinerja konsumsi rumah tangga investasi, dan net ekspor. Konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi terutama didukung oleh peningkatan konsumsi ritel, transaksi nontunai, dan transaksi pembelian e-*commerce.* Sementara investasi mengalami pertumbuhan didukung laporan data Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu menunjukkan pada tahun 2025 realiasasi investasi Kota Surabaya sebesar Rp43.605.370.337.380,00 yang meningkat dibanding realisasi periode sebelumnya sebesar Rp40.475.632.071.594,00 atau mengalami peningkatan sebesar 3,71 persen dibanding tahun 2024. Baiknya kinerja investasi Kota Surabaya juga tercermin dari komponen pembentukan modal tetap bruto yant tumbuh sebesar 6,41 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 6,20 persen.

Dari sisi sektoral, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif dengan kecepatan laju yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pada tahun 2025 dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha pembentuk perekonomian Kota Surabaya, terdapat 16 (enam belas) lapangan usaha yang tumbuh positif, dan 1 (satu) lapangan usaha yang masih terkontraksi yakni lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Seperti yang terangkum dalam grafik batang, lapangan usaha yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi selama tahun 2025 yakni jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 9,57 persen, diikuti oleh lapangan usaha jasa lainnya yang tumbuh 9,38 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi berikutnya yakni diatas 8 persen yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan yang masing-masing tumbuh sebesar 8,30 persen dan 8,09 persen.

Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, optimisme juga ditunjukkan oleh kinerja makro lainnya yakni kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan. Untuk kinerja

pembangunan manusia, pada tahun 2025 nilai IPM Kota Surabaya sebesar 85,65 meningkat dibanding tahun 2024 yang sebesar 84,69. Selain itu, data kemiskinan juga menunjukkan penurunan seiring membaiknya kondisi perekonomian di Kota Surabaya. Jumlah penduduk miskin semakin berkurang menjadi 3,56 persen di tahun 2025 yang mulanya mencapai 3,96 persen di tahun 2024. Sementara indikator ketenagakerjaan yakni tingkat pengangguran Kota Surabaya yang mengalami penurunan yang mulanya sebesar 4,91 persen pada tahun 2024 menjadi 4,84 persen di tahun 2025. Kinerja ketimpangan pendapatan yang tercermin dari indikator Indeks gini juga mengalami perbaikan positif, pada tahun 2025 indeks gini Kota Surabaya sebesar 0,369 menurun dibanding tahun 2024 sebesar 0,381.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Kota Surabaya

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Peningkatan ekonomi yang terus berlanjut salah satunya ditunjukkan oleh peningkatan nilai PDRB dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dikontribusi oleh akumulatif meningkatnya nilai tambah hampir seluruh komponen pembentuk PDRB. Perkembangan perekonomian Kota Surabaya tahun 2021 hingga tahun triwulan I tahun 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel III.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya
Tahun 2020 s/d Tw I 2026 (dalam juta)**

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025*	Tw I 2026**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	917.595,42	982.815,39	1.026.186,70	969.357,95	991.929,95	267.130,00
B	Pertambangan dan Penggalian	32.761,34	33.392,98	32.513,35	31.379,96	21.533,75	1.710,00
C	Industri Pengolahan	113.535.139,44	126.030.898,75	135.434.984,12	147.302.541,52	162.729.092,58	42.303.910,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.417.167,25	2.742.046,30	3.728.710,22	3.970.550,80	4.252.757,86	1.046.570,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	872.320,90	932.750,33	968.113,96	994.411,87	1.052.861,28	284.980,00
F	Konstruksi	55.273.538,87	61.408.502,94	64.940.579,25	70.335.981,63	74.592.572,17	18.929.380,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	163.509.913,19	184.610.467,40	201.432.925,47	214.341.080,16	224.014.991,79	59.230.420,00
H	Transportasi dan Pergudangan	30.518.851,24	36.260.418,47	42.834.312,86	47.529.709,19	52.000.913,94	13.751,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	91.418.079,71	102.248.698,97	114.627.560,20	126.222.540,64	138.792.272,81	38.054.270,00
J	Informasi dan Komunikasi	35.273.340,84	36.541.720,23	39.290.062,52	42.170.987,10	45.377.656,56	11.958.220,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	30.560.741,63	33.950.422,52	35.852.303,70	37.509.068,51	38.792.360,18	9.758.310,00
L	Real Estate	15.790.323,11	16.599.139,83	17.213.531,88	17.731.558,74	18.476.494,74	4.696.680,00
M,N	Jasa Perusahaan	14.543.157,97	15.772.593,51	17.530.932,18	19.268.197,54	21.613.686,81	5.661.040,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.310.975,30	8.486.026,22	8.533.021,21	9.788.000,22	10.068.629,64	2.605.990,00
P	Jasa Pendidikan	14.692.371,72	14.866.084,13	15.784.480,73	16.838.454,88	18.014.525,66	4.580.470,00

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025*	Tw I 2026**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.220.638,17	5.508.115,81	5.958.216,19	6.374.976,68	6.981.226,74	1.835.830,00
R,S,T, U	Jasa lainnya	7.340.199,70	8.642.127,81	10.106.272,69	11.114.817,11	12.769.841,59	3.362.360,00
	Produk Domestik Regional Bruto	**590.227.115,79**	**655.616.221,58**	**715.294.707,23**	**772.493.614,49**	**830.543.348,04**	**218.829.060,00**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026
*Catatan: *) data sementara **)data sangat sementara*

Perekonomian Kota Surabaya terus tumbuh positif, sebagaimana terangkum pada Tabel III.1. Pertumbuhan yang positif ditunjukkan oleh capaian realisasi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). Pada tahun 2021 nilai PDRB ADHB Kota Surabaya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2025. Pada tahun 2021 PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar Rp590.227.115,79 juta dan hingga akhir tahun 2025 menghasilkan nilai tambah sebesar Rp830.543.348,04 juta. Dari sisi sektoral, perekonomian Kota Surabaya dikontribusi oleh peningkatan dari semua lapangan usaha pembentuknya terkecuali lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati tiga terbesar pemberi kontribusi tertinggi bagi perekonomian Kota Surabaya hingga saat ini. Terkait pekembangan terkini, pada tahun 2025, PDRB ADHB untuk lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai sektor yang merupakan sektor terbesar menghasilkan nilai tambah sebesar Rp224.014.991,79 juta. Lapangan usaha yang berkontribusi tinggi selanjutnya yaitu Industri Pengolahan dan diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai tambah yang dihasilkan pada tahun 2024 masing masing sebesar Rp162.729.092,58 juta dan sebesar Rp138.792.272,81 juta. Berdasarkan rilis BPS Kota Surabaya terkini, perekonomian Kota Surabaya pada triwulan I 2026 secara berlaku menghasilkan nilai tambah ekonomi sebesar Rp218.829.060,00 juta. Sama seperti kinerja tahunan, perekonomian Kota Surabaya secara triwulanan dikontribusi oleh lapangan usaha utama yakni Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, industri pengolahan dan penyediaan akomodasi makan minum.

Selaras dengan realisasi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Surabaya yang mengalami peningkatan, hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Pada Tabel III.2, nilai PDRB ADHK Kota Surabaya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 nilai PDRB ADHK Kota Surbaya sebesar Rp407.725.825,13 juta meningkat menjadi sebesar Rp513.934.507,89 juta di tahun 2025. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan nilai tambah sebesar 138.618.728,86 juta pada tahun 2025. Sementara lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan nilai tambah sebesar Rp 99.420.315,21 juta. Perekonomian Kota Surabaya berdasarkan harga konstan

pada triwulan I 2026 menghasilkan nilai tambah ekonomi sebesar Rp133.452.850,00 juta.

Tabel III.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Tahun 2021 s/d Tw I 2026 (dalam Juta)**

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025*	Tw I 2026**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	554.054,69	573.236,82	576.177,55	541.237,84	541.453,53	142.740,00
B	Pertambangan dan Penggalian	19.479,83	19.094,55	17.844,90	18.120,26	13.121,34	1.020,00
C	Industri Pengolahan	79.366.597,57	84.567.579,11	87.392.236,59	92.182.283,14	99.420.315,21	25.566.310,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.538.145,94	1.661.665,76	2.174.083,24	2.301.731,69	2.408.127,78	569.010,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	665.833,73	680.003,79	696.386,15	711.522,48	743.665,52	196.610,00
F	Konstruksi	40.070.071,57	42.633.575,68	44.772.953,53	47.910.218,85	50.408.594,50	12.706.220,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	114.183.332,32	122.122.627,45	128.814.587,77	134.133.559,71	138.618.728,86	35.982.740,00
H	Transportasi dan Pergudangan	19.874.938,33	22.684.941,35	25.217.168,98	27.494.461,88	29.717.530,03	7.736.670,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57.221.633,11	62.076.385,35	66.946.110,99	71.889.162,06	77.855.811,31	21.270.140,00
J	Informasi dan Komunikasi	31.281.790,23	32.264.418,48	34.446.030,83	36.698.243,72	39.442.364,01	10.356.640,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.324.709,68	19.648.801,34	20.445.326,71	21.207.821,53	21.528.668,11	5.337.130,00
L	Real Estate	11.179.684,13	11.634.820,68	11.916.338,17	12.200.164,26	12.503.114,20	3.166.110,00
M,N	Jasa Perusahaan	8.974.255,48	9.490.093,03	10.278.169,10	11.082.009,45	12.143.095,74	3.122.640,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.748.920,17	4.756.347,15	4.759.414,54	5.229.776,89	5.230.999,21	1.336.540,00
P	Jasa Pendidikan	9.993.042,98	10.001.195,71	10.447.847,60	10.983.874,40	11.591.438,81	2.925.600,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.722.145,29	3.782.452,79	3.932.734,49	4.155.684,76	4.429.262,12	1.153.330,00

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025*	Tw I 2026**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.007.190,09	5.671.102,07	6.197.308,43	6.709.014,54	7.338.217,61	1.883.400,00
	Produk Domestik Regional Bruto	**407.725.825,13**	**434.268.341,12**	**459.030.719,58**	**485.448.887,46**	**513.934.507,89**	**133.452.850,00**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeda Surabaya, diolah,2026
*Catatan: *) data sementara **)data sangat sementara*

Berdasarkan kontribusi sektor pembentuk perekonomian Kota Surabaya, struktur perekonomian Kota Surabaya memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Peran sektor tersier dalam menopang perekonomian Kota Surabaya dilihat dari peranan sektor Perdagangan dan Jasa. Kondisi ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2024 yang banyak tantangan dan ketidakpastian selaras dengan perekonomian pusat dan global, membuat beberapa peran sektor lapangan usaha Kota Surabaya juga melambat. Kondisi itu ditunjukkan oleh dua sektor terbesar Kota Surabaya yakni lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2024 lapangan usaha ini memberikan peranan terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar 27,63 persen, sedikit mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 28,06 persen. Hal yang sama juga dialami oleh kinerja lapangan usaha Industri Pengolahan yang pada tahun 2024 memberikan kontribusi sebesar 18,99 persen yang sebelumnya sebesar 19,04 persen. Artinya selama tahun 2024, peran Industri Pengolahan turun sebesar 0,05 persen. Melemahnya kinerja perdagangan besar maupun kecil tersebut berdampak terhadap kinerja lapangan usaha Industri Pengolahan.

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang memiliki kecendurangan terus meningkat. Sejak tahun 2021 hingga 2024 lapangan usaha ini terus meningkat. Pada tahun 2021 kontribusinya sebesar 14,03 persen dan meningkat di tahun 2022 sebesar 14,29 persen. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi sebesar 14,81 persen. Tingginya peran lapangan usaha ini didorong oleh banyaknya aktivitas event maupun hiburan sehingga banyak hotel maupun restoran, cafe, rumah makan yang tumbuh di Kota Surabaya.

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan kontribusi, yang pada tahun 2023 sebesar 5,49 persen menjadi 5,66 persen. Meningkatnya peran lapangan usaha transportasi dan pergudangan terhadap perekonomian Kota Surabaya selaras dengan Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa memiliki tingkat mobilitas penduduk tinggi secara otomotis membuat lapangan usaha transportasi dan pergudangan tumbuh tinggi. Hal itu dikarenakan transportasi menjadi moda penggerak aktivitas masyarakat dan perekonomian Kota Surabaya.

Tabel III.3
Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021s/d Tw I 2026*(dalam %)

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025*	Tw I 2026**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,14	0,13	0,13	0,11	0,11	0,11
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	19,47	19,47	19,04	18,99	19,34	19,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,38	0,38	0,47	0,47	0,47	0,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,15
F	Konstruksi	9,83	9,82	9,75	9,87	9,81	9,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28	28,12	28,06	27,63	26,97	26,96
H	Transportasi dan Pergudangan	4,87	5,22	5,49	5,66	5,78	5,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,03	14,29	14,58	14,81	15,15	15,94
J	Informasi dan Komunikasi	7,67	7,43	7,50	7,56	7,67	7,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,74	4,52	4,45	4,37	4,19	4,00
L	Real Estate	2,74	2,68	2,60	2,51	2,43	2,37
M,N	Jasa Perusahaan	2,2	2,19	2,24	2,28	2,36	2,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,16	1,10	1,04	1,08	1,02	1,00
P	Jasa Pendidikan	2,45	2,30	2,28	2,26	2,26	2,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,91	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,23	1,31	1,35	1,38	1,43	1,41
	Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeda Surabaya, diolah, 2026
*Catatan: *) data sementara*

b. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2025 masih memiliki performa yang kuat. Berdasarkan rilis BPS, perekonomian Kota Surabaya tumbuh sebesar 5,87 persen. pertumbuhan ekonomi tersebut capaiannya lebih tinggi dibanding periode tahun sebelumnya sebesar 5,76 persen. Ditengah ketidakpastian ekonomi yang tinggi, dengan berbagai resiko akibat ketidakpastian global yang berkepanjangan, tekanan pasar barang akibat meningkatnya kebijakan proteksionisme, yang akhinya mengkoreksi pasar keuangan menjadi resiko yang dihadapi selama tahun 2025. Masih kuatnya

perekonomian Kota Surabaya di tahun 2025 didorong oleh fundamental perekonomian Kota Surabaya yang menunjukkan kinerja positif di tahun 2025. Pertama, kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terus menunjukkan performa baik, dimana selama ini menjadi komponen penyumbang perekonomian Kota Surabaya utama dari sisi pengeluaran. Kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2025 tumbuh lebih tinggi yakni sebesar 5,40 persen. Kinerja positif dari pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut juga dikonfimasi oleh indikator daya beli masyarakat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yakni indeks penjualan eceran riil Kota Surabaya dan transaksi non tunai (transaksi penggunaan QRIS) yang mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2024.

Tabel III.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2020 - Tw I 2026**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	-4,85
2021	4,29
2022	6,51
2023	5,70
2024	5,76
2025*	5,87
Tw I 2026**	7,28

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeda Surabaya, diolah, 2026
**) data sementara **) data sangat sementara*

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang positif disumbang oleh kinerja investasi yang meningkat. Berdasarkan laporan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu menunjukkan pada tahun 2025 realisasi investasi Kota Surabaya sebesar Rp43.605.370.337.380,00 yang meningkat dibanding realisasi periode sebelumnya sebesar Rp.40.476.063.552.547,00. Artinya pada tahun 2025 kinerja investasi Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesar 7,73 persen dibanding tahun 2024. Baiknya kinerja investasi Kota Surabaya juga tercermin dari komponen pembentukan modal tetap bruto yant tumbuh sebesar 6,41 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 6,20 persen. Berbagai kemudahan izin perizinan investasi dan inovasi-inovasi pelayanan investasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk membantu pelaku usaha mendapatkan informasi terkait

potensi investasi di Kota Surabaya, juga memberikan pendampingan pengurusan perizinan dan menyelesaikan permasalahan dalam investasi kenyataannya berhasil mendorong kinerja investasi Kota Surabaya meningkat dibandingkan sebelumnya. Kemudahan pelayanan investasi dan inovasi investasi seperti Surabaya Single Window Alfa (SSWALFA), klinik investasi, Inovasi Pesona Buaya (Pendampingan, Sinergi dan Sosialisasi Perizinan Berusaha untuk UMK Surabaya) dan lainnya. Dengan capaian tersebut, investasi di Kota Surabaya dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) seperti menurunkan tingkat kemiskinan dan menyerap tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Surabaya mengalami penurunan, yakni pada tahun 2024 TPT Kota Surabaya sebesar 4,91 persen menurun menjadi sebesar 4,84 persen di tahun 2025.

Dari sisi sektoral, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif dengan kecepatan laju yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pada tahun 2025 dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha pembentuk perekonomian Kota Surabaya, terdapat 16 (enam belas) lapangan usaha yang tumbuh positif, dan 1 (satu) lapangan usaha yang masih terkontraksi yakni lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Seperti yang terangkum dalam grafik batang, lapangan usaha yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi selama tahun 2025 yakni jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 9,57 persen, diikuti oleh lapangan usaha jasa lainnya yang tumbuh 9,38 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi berikutnya yakni diatas 8 persen yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan yang masing-masing tumbuh sebesar 8,30 persen dan 8,09 persen.

Berdasarkan data rilis BPS per Juni 2026, perekonomian Kota Surabaya triwulan I 2026 secara year on year tumbuh sebesar 7,28 persen. Kenaikan konsumsi rumah tangga masih menjadi penyokong terbesar pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dari sisi pemintaan. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh tumbuhnya konsumsi ritel serta konsumsi makanan dan minuman yang tetap tinggi. Aktivitas konsumsi selama periode ini juga didorong tingginya aktivitas masyarakat selama momen -momen besar keagamaan seperti Ramadan, perayaan Imlek, libur Nyepi, dan hari raya Idulfitri. Disampin itu, perekonomian Kota Surabaya yang terus meningkat juga didukung oleh kinerja ekspor yang masih positif. Sementara dari sisi sektoral, lapangan usaha jasa lainnya menjadi pendorong tertinggi tumbuhnya perekonomian Kota Surabaya selama triwulan I 2026 yakni sebesar 12,22 persen. Selanjutnya lapangan usaha yang berkontribusi besar yakni penyediaan akomodasi

dan makan minum yang tumbuh sebesar 11,59 persen diikuti lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 11,41 persen dan kotruksi sebesar 10,10 persen. Sementara lapangan usaha utama Kota Surabaya yakni perdagangan besar, eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 6,64 persen.

c. Tingkat Inflasi

Berdasarkan data rilis Badan Pusat statistik Kota Surabaya, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,96 persen. Meskipun angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2024 yang sebesar 1,38 persen, tingkat inflasi Kota Surabaya tahun 2025 masih berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5 persen ± 1 persen, Inflasi Kota Surabaya yang terjadi pada tahun 2025 secara *year on year* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,02 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,04 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,17 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin sebesar 0,00 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,09 persen; kelompok transportasi sebesar 0,38 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,01 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,15 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 0,13 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,01 persen. Satu kelompok pengeluaran mengalami deflasi, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,04 persen.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi kelompok tertinggi yang menyumbang inflasi Kota Surabaya secara yoy di tahun 2025 sebesar 1,02 persen. Kelompok ini menjadi penyumbang inflasi Kota Surabaya setiap harinya disebabkan karena tingginya ketergantungan Kota Surabaya dalam pemenuhan bahan makanan dengan daerah penghasil menjadi salah satu faktornya. Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah peningkatan permintaan terhadap komoditas bahan pokok selama momen momen tertentu seperi hari besar keagamaan maupun momen natal dan tahun baru. Di samping itu, jumlah penduduk kota surabaya yang besar juga menjadi faktor meningkatnya permintaan sehingga adanya gejolak harga pada kelompok ini pastinya akan berpengaruh terhadap inflasi Kota Surabaya. Komoditas utama yang menyumbang inflasi yoy tahun 2025 dari kelompok ini yakni beras sebesar 0,24 persen; cabai rawit sebesar 0,16

persen; daging ayam ras sebesar 0,15 persen; bawang merah sebesar 0,05 persen; minyak goreng, Sigaret Kretek Mesin (SKM), santan jadi, dan cabai merah masing-masing sebesar 0,04 persen.

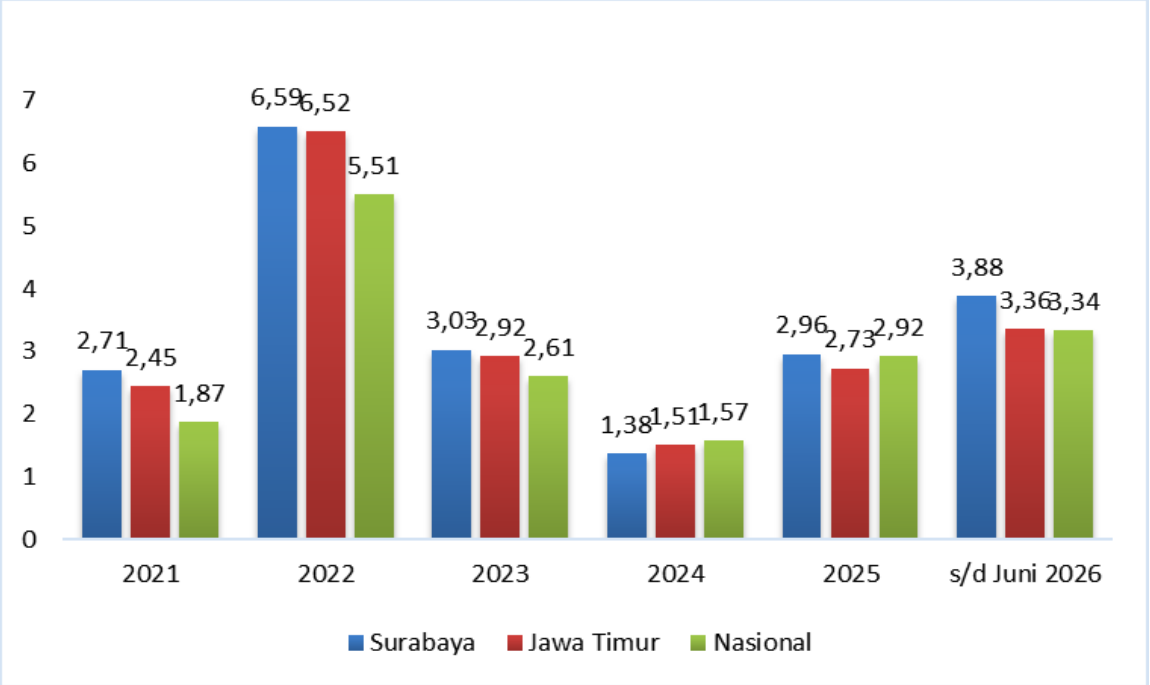
Selanjutnya, perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok penyumbang utama inflasi selama tahun 2025 sebesar 1,01 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu emas perhiasan sebesar 0,92 persen. Komoditas emas perhiasan senantiasa mengalami kenaikan harga dalam 11 bulan terakhir. Peningkatan permintaan akan komoditas ini merupakan respons dari masyarakat khususnya investor untuk mencari perlindungan pada logam *safe haven* di tengah ketidakstabilan ekonomi sehingga emas perhiasan dianggap sebagai *saving asset* yang paling aman.

Pada tahun 2025 kelompok transportasi menjadi komoditas yang menyumbang inflasi terbesar ketiga di Kota Surabaya. Kenaikan tersebut terjadi pada komoditas angkutan udara dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain disebabkan karena momen situasional sehingga tarif angkutan udara meningkat khususnya pada momen liburan dan lebaran hari raya Idulfitri. Faktor lainnya yakni disebabkan oleh meningkatnya biaya perawatan pesawat, sulitnya memperoleh suku cadang pesawat, dan kebijakan perubahan atas batas atas dan batas bawah oleh pemerintah pusat, serta faktor fluktuasinya nilai tukar dolar AS yang sebagian besar komponen biaya operasional menggunakan mata uang dolar.

Selain mengalami inflasi, terdapat kelompok jenis barang dan jasa menjadi penahan laju inflasi selama tahun 2025 yakni kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan. Kelompok ini menyumbang deflasi pada tahun 202 sebesar -0,14 persen yang cenderung dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif internet hingga 50 persen yang diberlakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama operator seluler selama periode Lebaran dan Nyepi 2025 berlaku sejak Maret hingga April 2025.

Perkembangan terkini fluktuasi harga, inflasi Kota Surabaya hingga bulan Juni 2026 tercatat sebesar 3,88 persen secara year on year. Berdasarkan kelompok penyumbangnya, inflasi Kota Surabaya secara yoy paling besar dikontribusi oleh kelompok transportasi dengan andil 1,20 persen. Selanjutnya Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,02 persen diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,79 persen. berdasarkan jenis komoditasnya, kenaikan harga angkutan udara dan bensin menjadi pemicu

utama meningkatnya inflasi dari kelompok transportasi. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik dan terbatasnya pasokan global. Disamping itu, tarif angkutan udara dipengaruhi oleh permintaan dikarenakan momentum libur sekolah, meskipun sudah terdapat insentif PPN untuk pesawat ekonomi selama libur sekolah. Untuk kelompok makanan, minuman dikontribusi oleh kenaikan harga komoditas daging sapi, beras dan bawang merah. Kenaikan harga daging sapi disebabkan oleh terbatasnya pasokan sapi potong dan meningkatnya biaya distribusi serta penyesuaian operasiona akibat relokasi Rumah Potong Hewan. Sementara untuk komoditas beras dan bawang merah mengalami inflasi disebabkan oleh selain ketersediaan terbatas akibat menurunnya cadangan pada sentra-sentra produksi serta juga akibat cuaca ekstrem dan hama. Selanjutnya untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dominan dikontribusi oleh kenaikan harga emas perhiasan yang terus mengalami perubahan harga yang dinami akibat pengaruh meningkatnya harga emas dunia.



Gambar III.1
Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2021 – s/d Juni 2026 (persen)
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, 2026, diolah

d. Investasi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang tetap kuat. Salah satunya dikontribusi oleh komponen investasi. Peran investasi penting untuk menstimulus perekonomian Kota Surabaya sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatan produktivitas serta kapasitas produksi,

yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki faktor pengganda yang tinggi.

Tabel III.5
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya Tahun 2020 –Tahun 2025

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2020	Rp 16.356.162.161.751	Rp 1.258.527.150.916
2021	Rp 26.367.999.200.000	Rp 2.847.062.089.925
2022	Rp 32.358.848.797.025	Rp 2.538.962.173.433
2023	Rp 34.606.105.385.355	Rp 2.967.781.840.000
2024	Rp 36.798.029.302.547	Rp 3.678.034.250.000
2025	Rp 40.351.371.203.935	Rp 3.253.999.133.445

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, 2026

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya, nilai total investasi di Kota Surabaya selama 5 tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana terangkum dalam tabel di atas. Total realisasi investasi Kota Surabaya pada tahun 2025 sebesar Rp 43.605.370.337.380,00. Investasi dari dalam negeri atau PMDN pada tahun 2025 masih merupakan penyumbang utama terhadap investasi total Kota Surabaya dengan kontribusi sebesar 92,53 persen atau setara dengan Rp40.351.371.203.935,00. Berdasarkan bidang usahanya, urutan tertinggi bersumber dari bidang usaha industri kertas dan percetakan, diikuti oleh perdagangan dan reparasi, industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, serta transportasi, gudang dan telekomunikasi. Sementara realisasi investasi dari penanaman modal asing atau PMA di Kota Surabaya pada tahun 2025 mencapai Rp3.253.999.133.445,00 atau 7,46 persen terhadap total investasi di Kota Surabaya. Nilai investasi asing terbesar dikontribusikan oleh sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi. Sektor lain yang turut mendominasi nilai investasi asing diantaranya perdagangan dan reparasi; industri makanan dan minuman; jasa lainnya; industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya; dan bidang usaha lainnya.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Ditengah kondisi ekonomi yang moderat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya selama 5 tahun terus konsisten mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2025 TPT Kota Surabaya sebesar 4,84 persen, atau turun sebesar 0,07 persen. tren yang terus menurun. Meskipun penurunan realisasi TPT tidak cukup signifikan namun demikian jika dilihat dari nilai penurunan yang terus terjadi hingga tahun 2025 merupakan kinerja yang terbaik ditengah perekonomian yang tidak kondusif saat Ini. Penurunan tersebut juga merupakan hasil efektivitas kebijakan yang diterapkan di Kota Surabaya sehingga membuat penduduk angkatan kerja yang sebelumnya terdorong keluar dari pasar kerja, dapat kembali terserap menjadi penduduk bekerja.

Berdasarkan jenis kelamin, TPT Kota Surabaya pada tahun 2025 lebih besar dikontribusi oleh pengangguran perempuan sebesar 4,88 persen sementara TPT laki-laki sebesar 4,81 persen. Jika ditinjau dari pendidikan yang ditamatkan, TPT Kota Surabaya tertinggi terjadi pada tingkat pendidikan yang ditamatkan sekolah menengah pertama, sementara TPT paling rendah berada pada tingkat pendidikan perguruan tinggi.

Tabel III.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya
Tahun 2020 - 2025

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2020	9,79%
2021	9,68%
2022	7,62%
2023	6,76%
2024	4,91%
2025	4,84%

Sumber data: BPS Jawa Timur, 2026

3.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2026 dan 2027

Pada tahun 2026 perekonomian dunia masih dalam tren melamban diiringi dengan ketidakpastian yang meningkat. Belum meredanya dampak perekonomian akibat ketegangan geopolitik dan hambatan perdagangan internasional akibat kebijakan penetapan tarif Amerika Serikat, Konflik di kawasan Timur Tengah menambah tekanan ketidakpastian ekonomi global yakni minyak, gas dan komoditas penting lainnya. Penutupan Selat Hormuz mendorong lonjakan harga komoditas internasional. Berdasarkan kondisi tersebut, dampak dari konflik ini memberikan rentetan imbas baik secara langsung maupun tidak

langsung. Secara langsung, tertutupnya jalur perdagangan minyak selama ini secara otomatis akan mengganggu ketersediaan pasokan minyak dan gas serta arus pengiriman dan perdagangan. Dampak sekunder yang dihasilkan yakni meningkatnya volatilitas harga komoditas dipasar internasional. Tekanan-tekanan ini tentunya akan memberikan dampak rambatan yang pada konsekuensinya akan menganggu stabilitas makroekonomi termasuk meningkatnya inflasi, kebijakan moneter yang ketat (nilai kurs mata uang), melambatnya pertumbuhan ekonomi global serta meningkatnya ketidakstabilan pasar keuangan.

Ditengah tekanan ekonomi saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 masih diyakini tumbuh kuat dan semakin mengarah pada tingkat kapasitas yang optimal. Pada tahun 2026 pertumbuhan ekonomi Nasional yang tertuang dalam dokumen RKP Nasional 2027 diperkirakan masih dalam target pertumbuhan 5,1 persen . Selanjutnya pada tahun 2027 pertumbuhan ekonomi Nasional ditargetkan tumbuh sebesar 5,9 – 7,5 persen. Masih optimisnya ekonomi nasional didorong oleh pertumbuhan yang berkualitas melalui paket kebijakan terintegrasi, meliputi stabilitas makro ekonomi, perlindungan daya beli, penguatan tabungan dan pembiayaan domestik, percepatan investasi dan belanja produktif, perbaikan iklim usaha, peningkatan produktivitas serta tata kelola dan kualitas sumber daya manusia. Melalui strategi tersebut, perekonomian domestic diharapkan tidak hanya berdaya tahan terhadap tekanan eksternal tetapi juga mampu membangun kapasitas pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Melihat perkembangan terkini, pada tahun 2026 dan 2027 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya juga diperkirakan optimis tumbuh lebih kuat dibanding kondisi sebelumnya. Masih kuatnya kinerja ekonomi Kota Surabaya selama ini dipengaruhi faktor fundamental Kota Surabaya seperti kuatnya tingkat konsumsi yang menjadi komponer terbesar yang berkontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diikuti oleh investasi dan ekspor. Dari sisi sektoral, lapangan usaha dominan Kota Surabaya yakni lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih diperkirakan menjadi sektor yang berkontribusi besar menghasilkan nilai tambah terhadap perekonomian Kota Surabaya.

Dari sisi perkembangan harga, inflasi Kota Surabaya pada akhir tahun 2025 berdasarkan rilis BPS Kota Surabaya secara year on year (y-on-y) sebesar

2,96 persen. Jika dibandingkan pada tahun 2024, Kota Surabaya mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 1,38 persen. Sementara untuk tahun 2026 dan 2027, inflasi Kota Surabaya diperkirakan diperkirakan pada kisaran 2,5 ± 1 persen. Perkiraan tersebut juga selaras dengan target sasaran pembangunan Nasional tahun 2026 dan 2027.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Surabaya Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah di tengah dinamika kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan efisiensi belanja negara yang ditempuh Pemerintah Pusat pada periode 2025–2026, antara lain melalui penyesuaian postur TKD dan refocusing belanja Kementerian/Lembaga, berimplikasi terhadap ruang fiskal daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Oleh karena itu, kebijakan keuangan daerah Kota Surabaya tidak hanya bersifat adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional, tetapi juga diarahkan sebagai langkah rekalibrasi fiskal secara strategis. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kemandirian fiskal daerah dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penajaman prioritas belanja untuk memastikan keberlanjutan capaian pembangunan utama, serta percepatan pemanfaatan skema pembiayaan alternatif di luar APBN dan APBD guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, elain itu kebijakan keuangan daerah mengacu pada :

A. Reformasi Struktural yang telah dilakukan Pemerintah Pusat adalah reformasi regulasi pada tingkat undang-undang meliputi :
    1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)
    2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
B. Regulasi teknis untuk menindaklanjuti UU HKPD, Pemerintah Pusat telah menerbitkan :
    1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas dasar Tenaga Listrik yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah atas konsumsi tenaga listrik
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah yang mengatur teknis Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) mulai dari Perencanaan, pengalokasian, hingga monitoring dan evaluasi serta pengawasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang merupakan integrasi dari berbagai amanat pengaturan dalam UU HKPD yaitu sinergi kebijakan fiskal nasional, pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan oleh daerah yang didukung dengan penyajian dan konsolidasi informasi keuangan, monev pendanaan desentralisasi

C. Regulasi teknis untuk menindaklanjuti UU HKPD, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan :
   1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Timur
   2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

D. Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan prestasi kerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Pemerintah Kota Surabaya dalam penyusuan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah berpedoman pada :
   1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
   3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
   4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
   5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900..1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Walikota Nomor Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2045
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029

E. Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah
2. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah
3. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Perizinan Tertentu
4. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha
5. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Umum

F. Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan diversifikasi pembiayaan

daerah untuk pembangunan dengan berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Paraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2026 ditetapkan secara realistis, adaptif, dan berbasis digital. Kebijakan ini disusun berdasarkan evaluasi kondisi ekonomi masyarakat serta penyesuaian terhadap regulasi terbaru agar target yang ditetapkan dapat dicapai dengan optimal. Strategi utama yang dilakukan adalah memperkuat digitalisasi sistem melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada seluruh jenis layanan untuk meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah.

Arah kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2026 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain

pendapatan yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek terdiri dari:

1. Kebijakan Pajak Daerah:
   a. meningkatkan sinergi pelaksanaan kebijakan fiskal daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui:

      i. pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
      ii. sinergi pemungutan opsen PKB dan opsen BBNKB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui mekanisme *role sharing* dan *cost sharing*;
      iii. pembaruan dan perluasan basis data pajak daerah, baik subjek pajak maupun objek pajak;
      iv. peningkatan pendapatan pajak daerah melalui kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (OP4D) dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
   b. meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan pajak daerah agar lebih terarah, efisien, dan sinergis melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
2. Kebijakan Retribusi Daerah:
   a. meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan retribusi daerah agar lebih terarah, efisien, dan sinergis melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
   b. melakukan pembaruan dan perluasan basis data retribusi daerah, baik subjek retribusi maupun objek retribusi;
   c. melakukan peninjauan ulang terhadap tarif retribusi yang sudah tidak relevan;
   d. melakukan sinkronisasi data antar perangkat daerah untuk mendukung pemantauan perizinan dan retribusi daerah;

e. menambah layanan publik melalui inovasi, khususnya pada sektor kesehatan, pariwisata, serta pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang berpotensi meningkatkan pendapatan retribusi daerah.

3. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan optimalisasi koordinasi dan pengawasan kepada BUMD:
   a. meningkatkan sinergi, koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi program serta kegiatan BUMD dalam rangka menghasilkan inovasi guna meningkatkan pendapatan, pelayanan kepada masyarakat, dan kemanfaatan umum melalui diversifikasi usaha dan investasi;
   b. melaksanakan restrukturisasi BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sumber daya manusia, dan model bisnis, yang meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan melalui penataan aspek keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur, serta penguatan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan publik;
   c. menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya melalui peningkatan digitalisasi dan transparansi transaksi keuangan.

4. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
   a. optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil untuk optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan objek lainnya;
   c. koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kota Surabaya.

2. Kebijakan Pendapatan Transfer
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur dana transfer dari Pemerintah Pusat. Potensi dana transfer dari pemerintah pusat pada

APBD Kota Surabaya menyesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam peraturan tersebut;

b. Peningkatan pendapatan transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan adanya opsen yaitu tambahan pajak menurut persentase tertentu untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

c. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;

d. Penganggaran dana transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Terhadap dana perimbangan ini, kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peranan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.

3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Hibah sebagaimana pada Pasal 46 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

b. Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dana yang berasal dari APBD yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh

daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada Pasal 46 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berdasarkan data pendapatan daerah Kota Surabaya sebagaimana terlihat pada Tabel III.7.

Tabel III.7
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2023 s.d Tahun 2027

Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Audited)	Realisasi Tahun 2024 (Audited)	Realisasi Tahun 2025 (Audited)	Target Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026	Proyeksi Target Tahun 2027*
Pendapatan Asli Daerah						
Pajak Daerah	4.562.879.779.487	4.784.138.321.218	5.968.955.234.566	6.696.137.892.920	6.664.431.343.846	6.758.379.983.819
Retribusi Daerah	289.382.181.469	349.581.167.459	895.299.270.402	525.238.447.814	538.610.286.792	1.086.448.149.572
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	152.380.733.841	195.348.090.465	104.628.017.610	199.451.819.857	199.451.819.857	230.937.460.488
Lain-Lain PAD yang sah	767.175.835.656	785.318.328.456	367.590.657.864	777.838.994.642	791.763.511.802	319.372.378.270
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**5.771.818.530.453**	**6.114.385.907.599**	**7.336.473.180.444**	**8.198.667.155.233**	**8.194.256.962.297**	**8.395.137.972.149**
Pendapatan Transfer						
Transfer Pemerintah Pusat	**2.595.300.604.262**	**2.856.076.818.326**	**2.889.309.692.922**	**2.205.495.786.000**	**2.205.495.786.000**	**2.265.254.217.450**
Dana Bagi Hasil	568.678.807.909	625.566.044.000	617.067.915.700	243.316.901.000	243.316.901.000	243.316.901.000
Dana Alokasi Umum	1.231.078.009.543	1.410.856.698.070	1.464.254.515.720	1.200.740.433.000	1.200.740.433.000	1.200.740.433.000
Dana Alokasi Khusus	765.020.063.810	778.221.035.256	778.787.399.502	761.438.452.000	821.196.883.450	821.196.883.450
Dana Insentif Daerah	30.523.723.000	-	-	-	-	-
Insentif Fiskal	-	41.433.041.000	29.199.862.000	-	-	-
Transfer Antar - Daerah	**1.237.660.629.691**	**1.063.985.529.627**	**408.502.674.082**	**434.351.440.463**	**434.351.440.463**	**434.351.440.463**
Pendapatan Bagi Hasil Provinsi	1.224.592.229.691	1.060.948.129.627	405.523.274.082	434.351.440.463	434.351.440.463	434.351.440.463
Pendapatan Bantuan Keuangan	13.068.400.000	3.037.400.000	2.979.400.000	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer	**3.832.961.233.953**	**3.920.062.347.953**	**3.297.812.367.004**	**2.639.847.226.463**	**2.639.847.226.463**	**2.699.605.657.913**
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah						
Pendapatan Hibah	-	-	-	60.399.027.701	168.398.378.901	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	**60.399.027.701**	**168.398.378.901**	-
Jumlah Pendapatan	**9.604.779.764.406**	**10.034.448.255.552**	**10.634.285.547.447**	**10.898.913.409.397**	**11.002.502.567.661**	**11.094.743.630.062**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah dan PD Penghasil Pendapatan. 2026
Catatan: *)Proyeksi Target Tahun 2027 mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2027 Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya Per Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada Tabel III.8

Tabel III.8
Realisasi. Target dan Proyeksi Per PD Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2023 s.d Tahun 2027

No	Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2023 (Audited)	Realisasi Tahun 2024 (Audited)	Realisasi Tahun 2025 (Audited)	Target Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026	Target Tahun 2027
1	Badan Pendapatan Daerah	4.573.798.966.702	4.795.260.275.199	5.974.481.391.146	6.696.137.892.920	6.664.431.343.846	6.758.379.983.819
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.157.105.095.160	4.254.119.499.024	3.588.337.472.191	3.089.626.170.196	3.197.625.521.396	3.137.484.865.518
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	112.508.222.727	81.235.816.770	108.230.473.403	153.790.456.649	153.790.456.649	177.595.375.807
4	Dinas Perhubungan	53.146.932.313	49.678.698.624	61.460.378.743	106.902.227.704	113.465.582.990	114.355.107.571
5	Dinas Lingkungan Hidup	84.916.831.126	143.865.269.849	139.232.242.198	125.063.100.500	130.400.743.392	133.453.346.392
6	Dinas Kesehatan	162.772.987.076	220.298.008.264	217.284.227.109	179.577.625.200	179.777.625.200	187.192.395.079
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	720.894.000	741.960.000	1.511.977.000	1.106.973.416	1.106.973.416	1.254.000.000
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.722.815.600	8.024.126.200	9.583.034.400	10.858.518.434	10.858.518.434	10.890.163.124
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	2.479.038.640	12.577.600	8.574.880	-	-	-
10	Dinas Kebudayaan. Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	11.751.091.061	15.575.893.771	17.066.929.441	16.798.069.800	16.798.069.800	16.506.500.000
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	586.749.000	1.760.249.880	2.433.727.918	1.371.185.000	1.371.185.000	1.564.176.236
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	597.510.000	525.500.000	437.500.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000
13	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	270.202.075.903	288.035.149.456	301.665.067.174	300.577.963.476	300.577.963.476	301.665.000.000
14	RSUD Bhakti Dharma Husada	166.541.999.598	174.175.281.713	190.727.190.476	177.604.511.200	190.799.869.160	200.648.207.720
15	RSUD Eka Candrarini	-	-	20.047.606.119	35.875.000.000	37.875.000.000	50.000.000.000
16	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	928.555.500	1.139.949.200	1.777.755.250	2.413.968.596	2.413.968.596	2.463.968.596
17	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	849.746.306	849.746.306	930.540.200
JUMLAH		**9.604.779.764.406**	**10.034.448.255.552**	**10.634.285.547.447**	**10.898.913.409.397**	**11.002.502.567.661**	**11.094.743.630.062**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah dan PD Penghasil Pendapatan. 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. maka Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi dengan potensi daerah. PAD sebagai salah satu sumber daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah. Retribusi Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2025 terealisasi sebesar Rp10.634.285.547.447,00 atau 91,19 persen dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan meliputi 2 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dengan rincian:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 meliputi realisasi pajak daerah sebesar Rp5.968.955.234.566,00 atau 86,26 persen; retribusi daerah sebesar Rp895.299.270.402,00 atau 190,24 persen; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp104.628.017.610,00 atau 49,81 persen; dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp367.590.657.864,00 atau 51,04 persen dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah. retribusi daerah. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian:

a. Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.968.955.234.566,00 atau 86,26 persen. Pajak Daerah secara umum belum mencapai target di tahun 2025. namun Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk meningkatkan pajak daerah. dengan menetapkan:

1. Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor : 100.3.3.3/40/436.1.2/2025 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda dan/atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Permberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran dan/atau Kekurangan Pembayaran dan/atau Angsuran Pajak Barang dan Jasa Tertentu serta Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dalam Rangka Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya Ke 732;
2. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/41/436.1.2/2025 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Masyarakat dalam Rangka Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke 732;
3. Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor : 100.3.3.3/88/436.1.2/2025 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Dan/Atau Bunga atas Keterlambatan Penyampaian Surat Permberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran dan/atau Kekurangan Pembayaran dan/atau Angsuran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dalam Rangka Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 80;
4. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/129/436.1.2/2025 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80;
5. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/231/436.1.2/2025 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Bunga dan/atau Denda Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Pahlawan;

6. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/145/436.1.2/2025 tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80;
7. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/246/436.1.2/2025 tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan;
8. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/277/436.1.2/2025 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Surabaya *Holiday Super Sale*;

Selain memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran Pajak Daerah. permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah adalah:

1. Lokasi objek pajak PBJT Jasa Parkir belum seluruhnya terpasang alat perekam pajak daring sehingga proses pengawasan dan integrasi pelaporan pajak parkir belum terlaksana secara optimal;
2. Jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) relatif besar belum terbayarkan karena data Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama tidak jelas atau tidak ditemukan;
3. Pergeseran minat masyarakat dalam melakukan pengiklanan via media sosial karena dirasa lebih efektif dan lebih masif sehingga menurunkan potensi pemasangan reklame;
4. Pemungutan pajak PBJT Tenaga Listrik yang dilakukan oleh penyedia listrik (PLN) belum maksimal karena pemungutan pajak berdasarkan pembayaran langganan listrik oleh konsumen bukan dari jumlah konsumsi tenaga listrik sebenarnya.
5. Pemutakhiran data untuk mengatasi tingginya dinamika perubahan terhadap objek pajak dan wajib pajak yang belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana.
6. Wajib Pajak cenderung kurang memanfaatkan layanan dan fasilitas pembayaran pajak secara daring melalui beragam kanal mengakibatkan pelaksanaan pemungutan pajak masih belum dapat optimal

b. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2025 sebesar Rp895.299.270.402,00 atau 190,24 persen dari target Rp470.616.199.330,00 meliputi capaian dari retribusi jasa umum sebesar Rp673.027.927.758,00 atau 315,12 persen; retribusi jasa usaha sebesar Rp154.434.752146,00 atau 92,84 persen; dan retribusi perizinan tertentu sebesar Rp67.836.590.498,00 atau 74,80 persen.

Pada tahun 2025. selain kebijakan pengurangan pajak daerah. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan keringanan pembayaran retribusi dengan menetapkan:

1. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Memperingati Hari Kartini;
2. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Kebun Raya Mangrove. Adventure Land Romokalisari. dan Hutan Kota pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Meskipun Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran Retribusi Daerah. masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi daerah. antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan tercapai 34,40 persen dikarenakan belum optimalnya pengawasan dan berkurangnya titik parkir;
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir tercapai 65,99 persen meningkat 16,52 persen dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 49,47 persen. dikarenakan adanya peningkatan keterisian pada 53 lokasi titik parkir baru yang dikelola Dinas Perhubungan;
3. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tercapai 70,50 persen, meningkat dibanding tahun lalu sebesar 32,45 persen sebagai hasil optimalisasi percepatan pelayanan dan penguatan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung, melalui percepatan tindak lanjut penyelesaian berkas permohonan PBG, penguatan pendataan dan pengawasan bangunan wajib SLF serta tempat usaha bersama Kecamatan dan Kelurahan, serta pengendalian bangunan pada koridor jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Peningkatan capaian tersebut juga didukung melalui kolaborasi sosialisasi pelayanan PBG bersama Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat, pelayanan pengurusan PBG rumah tinggal sederhana di Balai RW, peningkatan kapasitas Kecamatan dan Kelurahan melalui pelatihan dan pendampingan, serta penyederhanaan persyaratan PBG dan sinkronisasi proses pelayanan guna mendorong peningkatan kepemilikan PBG secara terpadu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 sebesar Rp104.628.017.610,00 atau 49,81 persen. Dividen yang diperoleh sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan laba tahun buku 2024 sesuai RUPS/Laporan Keuangan BUMD.

Secara rinci Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi :

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN yaitu dari PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER) tercapai Rp17.900.000.000,00 atau 114,20 persen dari target;
2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tercapai Rp66.016.603.006,00 atau 37,61 persen dari target Rp175.550.898.104,00 meliputi:
   - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tercapai Rp20.153.827.859,00 atau 85,68 persen dari target terdiri dari:
     - PT BPR Surya Artha Utama Perseroda tercapai Rp2.682.735.327,00 atau 101,36 persen dari target
     - PT BPD Jawa Timur tercapai Rp17.465.809.532,00 atau 83,69 persen dari target
     - PT BPR Jawa Timur tercapai Rp5.283.000,00 atau 81,09 persen dari target
   - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) tercapai Rp67.064.660,00 atau 0,83 persen dari target Rp8.045.212.294,00. Realisasi ini bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada

Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan. Selain itu, terdapat beberapa catatan pada BUMD Aneka Usaha antara lain:

- PT BPR Surya Artha Utama Perseroda tidak terdapat realisasi dikarenakan hasil audit atas Laporan Keuangan PD Pasar Surya Tahun 2024 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang menjadi basis perhitungan pembagian laba, terbit pada bulan 27 Nopember 2025 dan disampaikan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada bulan 10 Maret 2026. Berdasarkan hasil RUPS PT Pasar Surya Perseroda tersebut, bagian laba yang dibagikan untuk Pemerintah Kota Surabaya sebagai dividen sebesar 55 persen atau Rp766.212.593,00 akan dibayarkan dan dikembalikan kembali ke PT Pasar Surya sebagai penyertaan modal dalam rangka revitalisasi pasar.
- PT Surya Karsa Utama tidak terdapat realisasi dividen dikarenakan saat ini PT Surya Karsa Utama dalam proses pembubaran melalui likuidasi sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Desember 2023.
- Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya mengalami kerugian berdasarkan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor :100.3.3.3/164/436.1.2/2025 Tentang Penolakan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Tahun 2024 sebagaimana Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Kebun Binatang Surabaya Tahun 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Wawan Hermansyah Nomor 00007/2.1217/AU.2/05/1534-1/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025

- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) yaitu dari Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada (PDAM Surya Sembada) tercapai Rp45.795.710.487,00 atau 31,81 persen dari target Rp143.983.807.096,00 berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor No.100.3.3.3/103/436.1.2/2025 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024.

- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta yaitu PT YEKAPE Surabaya tercapai Rp20.711.414.604,00 atau 109,88 persen dari target Rp18.849.037.518,00 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 April 2025 yang telah disahkan Akta Notaris Zaki Kusnandar, SH., M.Kn tanggal 19 Mei 2025.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2025 sebesar Rp367.590.657864,00 atau 51,04 persen dari target yang telah ditetapkan.

2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer tahun 2025 sebesar Rp3.297.812.367.003,00 atau 98,71 persen dari target yang telah ditetapkan.

Pendapatan transfer Tahun 2025 meliputi:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tercapai Rp2.889.309.692.922,00 atau 99,41 persen dari target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.906.436.149.000,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:
   a. Insentif Fiskal tercapai sebesar Rp29.199.862.000,00 atau 100,00 persen dari target Insentif Fiskal sebesar Rp29.199.862.000,00.
   b. Dana Bagi Hasil tercapai sebesar Rp617.067.915.700,00 atau 95,54 persen dari target Dana Bagi Hasil sebesar Rp645.889.040.000,00.
   c. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tercapai Rp11.631.578.252,00 atau 87,46 persen dari target Rp13.300.000.000,00
   d. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tercapai Rp767.155.821.250,00 atau 101,78 persen dari target Rp753.729.645.000,00.
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah tercapai Rp408.502.674.081.- atau 94,05 persen dari target Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari:
   a. Pendapatan Bagi Hasil tercapai Rp405.523.274.081.- atau 93,37 persen dari target Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp434.333.759.463,00.
   b. Bantuan Keuangan tercapai Rp2.979.400.000.-. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/99/013/2025

tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, total pagu bantuan keuangan khusus adalah sebesar Rp3.047.400.000,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan Lain-lain seluruh penerimaan kas umum daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer yang berasal dari hibah, dana darurat, atau penerimaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum kebijakan belanja diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung ***"Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur"*** serta memperhatikan surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/4502/KSP/70-74/07/2025 tanggal 10 Juli 2025 perihal Pencegahan Korupsi Terkait Tata Kelola Hibah dan surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/3714/KSP.00/70-74/06/2025 tanggal 5 Juni 2025 perihal Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Pemutakhiran Tahun 2026**.** Secara umum kebijakan belanja Daerah tahun 2026 yaitu :

1. Menyusun belanja nonprioritas secara efektif dan efisien khususnya belanja barang operasional yang dapat digantikan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif;
2. Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi sosial ekonomi;
3. Pemanfaatan belanja operasi dan modal sesuai dengan tema dan arah kebijakan dalam RKPD Kota Surabaya Tahun 2026;
4. Reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan;
5. Penguatan mekanisme sewa dan Kerjasama Operasi (KSO);

6. Peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah melalui sinkronisasi dengan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026;
7. Mengarahkan alokasi belanja untuk mendukung pencapaian *output* yang terukur;
8. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan pendanaan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
9. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang. barang. maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;
10. Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri. terutama dalam pengadaan barang/jasa dalam negeri

Selain itu. belanja daerah memperhatikan hal-hal khusus lain. sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal Pasal 146 Ayat (1) bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD. Pengaturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total belanja bertujuan untuk mendorong struktur belanja daerah semakin efisien dan produktif. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026, total belanja pegawai sebesar Rp3.310.420.139.195,00 dan Tunjangan Guru melalui TKD sebesar Rp278.977.712.000,00 sehingga belanja Pegawai setelah dikurangi Tunjangan Guru melalui TKD sebesar Rp3.031.442.427.195,00 atau 23,23 persen;
2. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20 persen dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan. Pemenuhan belanja wajib pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jumlah alokasi anggaran fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 adalah sebesar Rp

2.459.563.908.896,00 atau 18,85 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian alokasi belanja beasiswa kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan jumlah penerima bantuan beasiswa sesuai dengan kriteria di Tahun 2026;

3. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal 147 ayat (1) bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KMK.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. jumlah belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp 5.609.860.424.952,00 atau 42,99 persen.
4. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal.

Melalui belanja yang berkualitas tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian dan menjawab tantangan pembangunan serta mendukung pencapaian target pembangunan. Penyusunan struktur belanja daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga. belanja subsidi. belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah. belanja peralatan dan mesin. belanja bangunan dan gedung. belanja jalan. belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya

dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Adapun kebijakan belanja Daerah tersebut diimplementasikan dengan:

1. Penguatan Kapasitas Surabaya dilakukan dengan terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang unggul berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan secara komprehensif melalui pembangunan SDM Indonesia yang sehat. produktif. terampil. inovatif. dan sejahtera. Pemerintah Kota secara konsisten mendorong penguatan reformasi struktural untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berdaya saing. pelayanan kesehatan yang berkualitas. serta perlindungan sosial yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Di bidang pendidikan, alokasi anggaran diupayakan dapat mencapai sebesar minimal 20 persen dari APBD yang diharapkan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. Di bidang kesehatan belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mewujudkan ***"health for all",*** melalui belanja yang ditekankan pada upaya promotif dan preventif sebagai strategi jangka menengah dan jangka panjang untuk mencegah dan/atau mengurangi balita stunting. kematian Ibu serta kematian Bayi dan Balita;
2. Untuk mewujudkan SDM yang sejahtera. Pemerintah Kota juga mendorong penguatan program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan sinergis melalui penerapan satu data. Langkah ini diambil agar program tersebut efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan ***mengurangi*** kesenjangan;
3. Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas. ***reformasi*** birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kualitas implementasi reformasi birokrasi ditandai dengan efisiensi birokrasi. kualitas pelayanan publik yang terstandarisasi. serta pemerintahan yang baik. bersih. dan berwibawa. Oleh karena itu. pengelolaan belanja pegawai menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional. berintegritas. dan produktif. Secara umum. kebijakan belanja pegawai pada tahun 2026 akan terus melanjutkan proses reformasi birokrasi menuju adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) untuk mendorong produktivitas;

4. Efisiensi belanja barang seiring dengan optimasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan dilakukan melalui digitalisasi birokrasi. terutama pada komponen belanja barang yang mengalami pertumbuhan tinggi pada periode sebelumnya. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2026 akan difokuskan pada ***penghematan*** atau efisiensi belanja barang non-operasional yang dialihkan ke belanja yang lebih produktif. efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat-rapat di luar kantor dengan memanfaatkan TIK. penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat termasuk bantuan pemerintah. serta sinergi kebijakan belanja antara pusat dan daerah. Selain itu. kebijakan ini juga mencakup penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian anggaran serta optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
5. Belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Belanja modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. peningkatan produktivitas perekonomian *dan* peningkatan daya saing. Dengan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan. jembatan. transportasi dan instalasi teknologi tinggi. APBD dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu. pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan memperhatikan keselarasan antarprogram dan prinsip belanja berkualitas (*spending better*);
6. Pengalihan Belanja dari APBD kepada opsi pembiayaan selain APBD dengan kerjasama melalui *creating shared value* (CSV) dengan Perusahaan. KPBU maupun *Corporate Social Responsibility (*CSR) serta Kerjasama Operasi (KSO);
7. Sebagai bagian dari *penyelarasan* dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Pemutakhiran Tahun 2026. kebijakan belanja daerah diarahkan pada :
   a. Pemanfaatan belanja sesuai dengan dengan tema dan arah kebijakan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 yaitu ***"Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur"***
   b. Pemenuhan kebutuhan minimum pemerintahan (antara lain gaji dan

tunjangan. belanja barang dan operasional kantor. belanja wajib yang bersifat mandatory antara lain anggaran pendidikan dan infrastruktur)

c. Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri. terutama dalam pengadaan barang/jasa dalam negeri
d. Pengalokasikan belanja untuk melaksanakan fokus pembangunan yaitu mengurangi kemiskinan. mengurangi pengangguran. mengurangi AKI dan AKB. mengurangi stunting. meningkatkan pembangunan manusia. menurunkan kesenjangan. dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

8. Sebagai upaya tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. dalam penyusunan alokasi belanja pada RKPD Tahun 2026 Pemerintah Daerah juga melakukan :
   a. Pengalokasian belanja secara selektif. efektif. dan efisien untuk kegiatan yang bersifat seremonial. kajian. studi banding. percetakan. publikasi. seminar/*focus group discussion*. dan belanja perjalanan dinas.
   b. Memfokuskan alokasi belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pad atahun anggaran sebelumnya
   c. Mengarahkan belanja untuk mendukung pencapaian output yang terukur
9. Pengalokasian Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan sebagai dana cadangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah.
10. Guna menjamin kelancaran penyelesaian kegiatan/proyek prioritas yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran serta mencegah risiko terjadinya proyek mangkrak akibat keterbatasan waktu atau anggaran tahunan. maka pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran atau pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. dapat dilaksanakan melalui metode kegiatan tahun jamak/*multiyears.* Selanjutnya kegiatan tahun jamak dianggarkan berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS serta perlu memperhatikan ketentuan bahwa jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak/*multiyears* tidak melampaui akhir tahun

masa jabatan Kepala Daerah berakhir. kecuali kegiatan yang merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data realisasi Tahun 2023. target Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta proyeksi Tahun 2026 dan Tahun 2027. maka belanja daerah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel III.9.

Tabel III.9
Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Surabaya
Tahun 2023 s.d Tahun 2027

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Audited)	Realisasi Tahun 2024 (Audited)	Realisasi Tahun 2025 (Audited)	Target Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026	Target Tahun 2027*
2	**BELANJA**						
2.1	**Belanja Operasi**						
2.1.1	Belanja pegawai	2.540.673.580.810	2.871.477.429.285	3.070.762.831.564	3.380.291.517.259	3.310.420.139.195	3.418.777.840.922
2.1.2	Belanja barang dan jasa	4.835.931.638.916	4.768.556.407.351	5.001.810.070.173	5.719.306.153.919	5.975.314.611.722	5.777.903.057.402
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	4.883.609.874	125.506.599.742	80.087.972.321	134.036.083.531
2.1.4	Belanja Subsidi	-	23.212.862.862	94.249.922.980	131.296.378.002	132.006.257.401	166.260.539.410
2.1.5	Belanja hibah	404.050.361.625	432.667.414.836	319.691.632.680	370.525.043.740	370.525.043.740	346.525.043.740
2.1.6	Belanja bantuan sosial	78.223.729.100	4.287.200.000	1.052.800.000	46.032.195.000	44.359.347.500	14.761.567.500
	Jumlah Belanja Operasi	**7.858.879.310.451**	**8.100.201.314.334**	**8.492.450.867.271**	**9.772.957.887.662**	**9.912.713.371.879**	**9.858.264.132.505**
2.2	**Belanja Modal**						
2.2.1	Belanja tanah	90.286.694.348	243.584.204.453	245.424.758.451	507.303.768.709	639.494.240.709	160.426.954.036
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	285.845.343.961	226.624.123.848	269.235.490.761	305.184.178.472	364.732.273.377	255.049.029.228
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	365.424.112.763	657.767.071.308	312.961.615.881	286.515.299.175	359.323.177.810	336.312.631.666
2.2.4	Belanja jalan. irigasi dan jaringan	921.720.212.895	762.164.782.711	1.222.751.186.183	1.794.083.803.592	1.740.827.559.814	2.117.452.572.953
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	8.619.452.218	679.876.173	1.021.057.147	2.275.200.640	2.195.227.440	2.202.177.440
2.2.6	Belanja aset lainnya	0	6.421.936.175	5.829.065.552	1.350.415.518	398.842.102	3.056.905.590
	Jumlah Belanja Modal	**1.671.895.816.185**	**1.897.241.994.668**	**2.057.223.173.975**	**2.896.712.666.106**	**4.889.968.495.888**	**2.870.500.270.913**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**						
2.3.1	Belanja tidak terduga	12.815.776.299	597.526.380	521.729.039	62.155.000.000	29.233.455.530	70.000.000.000
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	**12.815.776.299**	**597.526.380**	**521.729.039**	**62.155.000.000**	**29.233.455.530**	**70.000.000.000**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Audited)	Realisasi Tahun 2024 (Audited)	Realisasi Tahun 2025 (Audited)	Target Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026	Target Tahun 2027*
2.4	**Belanja Transfer**						
2.4.1	Belanja bagi hasil	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja bantuan keuangan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Transfer	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Belanja	**9.543.590.902.935**	**9.998.040.835.382**	**10.550.195.770.285**	**12.731.825.553.768**	**13.048.918.148.661**	**12.802.764.403.418**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bappeda. diolah tahun 2026

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan :.

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Paraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 163. Pasal 166. Pasal 168 dan Pasal 180 pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

Arah kebijakan pembiayaan Tahun Anggaran 2026 meliputi :

1. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan *sustainable*;
2. Optimalisasi peran BUMN. *Special Mission Vehicle* (SMV). Badan Layanan Umum (BLU) dan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional. serta kesiapan teknis operasional;
3. Memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan *fiscal buffer* secara handal dan efisien. serta menjaga kolaborasi kebijakan fiskal. moneter. dan sektor keuangan;
4. Meningkatkan akses pembiayaan bagi kelompok rentan dan UMKM;
5. Alternatif pembiayaan berupa pinjaman daerah yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur produktif. yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Pembayaran utang pokok pinjaman daerah yang digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Penyertaan modal bagi BUMD.

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit. APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan surplus. APBD dapat

digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD. pelampauan penerimaan pendapatan transfer. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. pelampauan penerimaan pembiayaan. penghematan belanja. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya;
2. Pencairan dana cadangan yang digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam tahun anggaran berkenaan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan pinjaman daerah/pembiayaan utang daerah yang digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2026. Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk dapat memperkuat posisi sebagai *superhub* yang berkelanjutan sehingga memanfaatkan diversifikasi pembiayaan daerah. dengan alternatif sebagai berikut:

1. Pinjaman Daerah yang bersumber dari :
   a. Pemerintah
   b. Pemerintah Daerah Lainnya
   c. Lembaga Keuangan bank; dan atau
   d. Lembaga keuangan bukan bank
2. Obligasi Daerah. yakni surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Sukuk Daerah. yakni surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. untuk:
   a. pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah

b. pengelolaan portofolio utang Daerah
c. penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah kota Surabaya tahun 2026 diarahkan sebesar sebesar Rp 10.000.000.000,00 untuk penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama dan pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp 3.397.027.680,00 Sedangkan bunga atas pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan alternatif berada pada pos belanja bunga yang dialokasikan pada Sub Kegiatan Penatausaahan Pembiayaan Daerah.

Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2023 – 2027) terlihat seperti yang terdapat pada Tabel III.10.

Tabel III.10
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2023 s.d Tahun 2027

No	Uraian	Realisasi TA. 2023 (Audited)	Realisasi TA. 2024 (Audited)	Realisasi TA. 2025 (Audited)	Target TA. 2026	Perubahan RKPD TA. 2026	Target TA. 2027
3	**PENERIMAAN**						
3.1	**Penerimaan Daerah**						
3.1.1	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	156.690.767.646	207.879.629.117	234.441.444.727	263.996.494.318	516.896.958.627	395.913.192.885
3.1.2	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	220.586.212.934	1.592.915.650.053	1.542.915.650.053	1.566.011.380.155
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**156.690.767.646**	**207.879.629.117**	**455.027.657.661**	**1.856.912.144.371**	**2.059.812.608.680**	**1.961.924.573.040**
3.2	**Pengeluaran Daerah**						
3.2	Penyertaan modal	10.000.000.000	9.929.481.387	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	13.825.515.000
3.2.2	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	-	-	12.220.476.197	14.000.000.000	3.397.027.680	240.078.284.684
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**10.000.000.000**	**9.929.481.387**	**22.220.476.197**	**24.000.000.000**	**13.397.027.680**	**253.903.799.684**
Jumlah Pembiayaan Netto		**146.690.767.646**	**197.950.147.730**	**432.807.181.464**	**1.832.912.144.371**	**2.046.415.581.000**	**1.708.020.773.356**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2026

3.2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan daerah. pemerintah daerah telah menyusun program-program perencanaan. baik perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Namun demikian. jika dilihat dari sisi fiskal daerah. kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya masih cukup rentan. Mengingat besarnya rencana program pembangunan Pemerintah Kota Surabaya baik infrastruktur maupun non infrastruktur. anggaran belanja yang dikeluarkan selalu meningkat setiap tahunnya dan lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diterima. Oleh karena itu. tidak dapat bergantung sepenuhnya terhadap APBD yang tersedia sehingga mengharuskan Pemerintah Kota Surabaya untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari sumber lainnya.

Alternatif kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut: (1) *fiscal engineering* yaitu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk mampu membangun kemandirian fiskal dengan konsep *expenditure reform* melalui perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan *cost recovery*; (2) *creative financing* yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran sektor swasta dalam melalui beberapa skema yakni skema kerja sama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui sinergi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kerja sama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya. antara lain yakni:

1. Kemitraan Pembiayaan Daerah antara Pemerintah dan swasta. melalui
   a. Peningkatan kerja sama swasta dan pemerintah melalui kerja sama pemerintah swasta (KPS) / *Public Private Partnership* (PPP). Bentuk kerja sama KPS dapat dilakukan dengan berbagai skema kerja sama seperti *Build-Operate-Transfer* (BOT). *Build-Transfer-Operate* (BTO). maupun bentuk lainnya.
   b. Optimalisasi partisipasi dunia usaha sebagai bagian dari pemangku kepentingan untuk berperan dan terlibat aktif dalam program pembangunan melalui tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR).

kerjasama dengan perusahaan dalam intervensi program dengan menawarkan value bagi Perusahaan atau dikenal dengan *Creating Shared Value (*CSV). Pembiayaan pembangunan di Kota Surabaya melalui CSR mapun CSV dipandang potensial untuk dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Potensi tersebut didukung oleh tingginya peran sektor industri pengolahan yang merupakan sektor kedua dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Forum CSR Kota Surabaya telah dibentuk sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

2. Pengembangan kerja sama antar daerah. Kerja sama daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya tersebut meliputi kerja sama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan. Kerja sama antara daerah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas guna mendorong pembangunan suatu daerah.
3. Kerja sama kemitraan dengan lembaga non pemerintah baik lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional. diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung program prioritas daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi maupun ilmu pengetahuan guna menunjang pembangunan daerah.
4. Pengembangan kerja sama melalui pinjaman maupun hibah luar negeri yang digunakan pada bidang-bidang strategis utamanya untuk pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada perekonomian daerah.
5. Pembiayaan lain dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan mendukung pencapaian visi dan misi Presiden-Wakil Presiden dan program strategis nasional sebagaimana telah tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 mengacu pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, berpedoman pada visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yaitu “**Tranformasi Surabaya Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan**”. Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang dikenal dengan Panca Darma Karya Surabaya sebagai berikut:

1. Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan;
2. Mempercepat Transformasi Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter;
3. Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
4. Memantapkan Ketahanan Daerah Melalui Infrastruktur yang Berkelanjutan;
5. Harmonisasi Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial..

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Tabel IV.1.

Tabel IV.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	KETERANGAN
Visi : Transformasi Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan						
Misi 1 : Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan	Transformasi Sektor Ekonomi Unggulan yang Berdaya Saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,87	5,80%	5,80%	target tahun 2026 tetap dengan pertimbangan situasi geopolitik yang berpengaruh pada ekspor luar negeri
		PDRB Per Kapita	283,31 juta rupiah	289,29 juta rupiah	289,29 juta rupiah	target tahun 2026 tetap dengan pertimbangan situasi geopolitik yang berpengaruh pada ekspor luar negeri
	Meningkatnya Efisiensi Investasi Daerah	ICOR	4,70%	4,77%	4,77%	target tahun 2026 tetap dengan pertimbangan situasi geopolitik yang berpengaruh pada naiknya harga dan semakin tingginya biaya investasi yang dikeluarkan
		Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,25%	24,80%	24,80%	target tahun 2026 tetap dengan pertimbangan situasi geopolitik yang berpengaruh pada naiknya harga dan semakin tingginya biaya investasi yang dikeluarkan
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	16,71%	16,67%	16,72%	diproyeksikan naik dengan bertambahnya kunjungan ke Surabaya serta pendirian restoran dan usaha makan minum di Kota Surabaya
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	19,59%	19,10%	19,59%	diproyeksikan akan naik rasionya seiring investasi manufaktur
		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26,97%	28,13%	27,15%	diproyeksikan berkurang dengan situasi geopolitik yang mengakibatkan perubahan pada ekspor dan transaksi suku cadang kendaraan
	Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	73,28	85	73,78	Penyesuaian target pada tahun 2026 dikarenakan adanya perubahan formulasi berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 301.2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemutakhiran Metodologi dalam Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah Kabupaten/Kota .

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	KETERANGAN
		Tingkat Inflasi	2,96%	2,50%	3,50%	Kenaikan harga pada sektor yang tidak dapat dikendalikan/intervensi oleh Pemerintah Kota,bulan februari inflasi mencapai
	Meningkatnya Kontribusi Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84%	4,47%	4,47%	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	60,16%	61,02%	61,02%	
Misi 2 : Mempercepat Transformasi Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	85,65	85,77	85,77	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,34 Tahun	76,50 Tahun	76,50 Tahun	
	Meratanya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,88 Tahun	15,01 Tahun	15,01 Tahun	
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,15 Tahun	11,34 Tahun	11,34 Tahun	
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Keolahragaan	Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga	0,453	0,466	0,466	
Misi 3 : Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan	Indeks Reformasi Birokrasi	100,77	96,11	96,11	Target lebih rendah dari realiasi tahun 2025 karena adanya penyesuaian indikator penyusun SPBE menjadi Pemdi
	Meningkatnya Manajemen Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	94,98	94,5	95,23	

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	KETERANGAN
	Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintahan Digital	4,78	1,83	1,83	adanya penyesuaian indikator penyusun SPBE menjadi Pemdi
	Meningkatnya Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	72,79	81,78	81,78	
	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Sistem Merit	28,33%	28,49%	28,49%	
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Nilai SAKIP Kota Surabaya	91,83	90,39	91,85	
		Indeks Pelayanan Publik	4,84	4,61	4,85	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	98,06%	97,25%	98,08%	
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	74,84	78,4	78,4	
Misi 4 : Memantapkan Ketahanan Daerah Melalui Pembangunan	Meningkatnya Keseimbangan dan Kesinambungan Pembangunan yang Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	71,9	67,96	73,00	

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	KETERANGAN
Infrastruktur yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kulitas Lingkungan Hidup Perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,82 poin	61,53 poin	61,53 poin	• Terdapat penyesuaian formulasi perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respons terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, yang berlaku untuk perhitungan target 2026 sehingga dengan kriteria baru diproyeksikan akan ada penurunan pada IKLH Kota Surabaya
		Penurunan Emisi GRK Kumulatif	269.543,14 Ton CO_2 eq	245.816,22 Ton CO_2 eq	269.543,14 Ton CO_2 eq	Perubahan target Tahun 2026 didasarkan pada hasil rilis penurunan Emisi GRK Kumulatif di website Aksara
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kualitas Pembangunan Infrastruktur	0,8	0,69	0,81	
	Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Risiko Bencana	96,76	107,5	96,76	
Misi 5 : Harmonisasi Sosial Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Tingkat Kemiskinan	3,56%	3,48%	3,48%	
		Rasio Gini	0,369	0,375	0,375	target tahun 2026 tetap dengan pertimbangan situasi geopolitik yang berpengaruh tabungan masyarakat
	Terciptanya Masyarakat Maju dan Berbudaya dalam Mewujudkan Kondusifitas Wilayah	Indeks Harmoni Indonesia	7,31	7,33	7,33	
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	62,4	58,1	62,4	

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	KETERANGAN
	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Skor Predikat Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA)	356,44	361	361	
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,151	0,119	0,119	
	Meningkatnya Keharmonisan dan Kerukunan Umat Beragama	Indeks Toleransi Umat Beragama	0,96	0,968	0,968	
		Indeks Penyelenggaraan Tratibumlinmas	80,3	80,71	80,71	
	Terwujudnya Mayarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,90%	57,40%	57,40%	

Keterangan :
Penyesuaian target pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi Tahun 2025

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 serta penelaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026 diselaraskan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 serta visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

4.2.1 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kota Surabaya yang diselaraskan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN Tahun 2025-2029 serta Nawa Bhakti Satya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2025-2029. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2026, memperhatikan strategi dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Visi pembangunan "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**", dilaksanakan melalui 8 (delapan) misi yang dikenal sebagai Asta Cita.



Gambar IV.1
Visi dan Misi dalam RPJMN Tahun 2025-2029
Sumber : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025

Delapan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita sebagai prioritas pembangunan nasional memuat 17 (tujuh belas) program prioritas pembangunan Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor, sebagai berikut :

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi serta digitalisasi;

9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritime untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang merupakan tahun kedua pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tema RKP Tahun 2026 adalah "***Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif***" dengan sasaran pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, serta peningkatan sumber daya manusia berkualitas. Sasaran pembangunan pada RKP Pemutakhiran Tahun 2026 yang ingin dicapai yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,8 – 6,3%
2. GNI per kapita 5.870 dolar US
3. Penurunan Intensitas Emisi GRK 37,14%
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,67
5. Tingkat Kemiskinan 6,5 – 7,5%
6. Rasio Gini 0,377 – 0,380
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,44 – 4,96%
8. Kemiskinan Ekstrem 0,0 – 0,5%

9. Indeks Modal Manusia 0,57

Untuk membangun dasar yang kokoh guna mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 dan mencapai target pembangunan tahun 2026, prioritas nasional yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Dalam rangka mewujudkan konsistensi dengan tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029, pemerintah melakukan pembangunan kewilayahan guna mengurangi ketimpangan pembangunan antara kawasan timur Indonesia dan kawasan barat Indonesia. Fokus pembangunan kewilayahan pada tahun 2026 yaitu pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah seperti penuntasan rencana tata ruang, perluasan pendaftaran dan sertifikasi tanah, penataan otonomi daerah, penyediaan data dan informasi geospasial dasar, dan penguatan fondasi keuangan daerah.

Pembangunan wilayah Jawa pada tahun 2026 diarahkan menjadi "**Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan**" melalui :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa Bagian Utara sebagai pusat ekonomi dan budaya yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan bertumpu pada industri berteknologi tinggi, ekonomi kreatif, serta penghasil produk berorientasi ekspor;
2. akselerasi pemerataan pembangunan Wilayah Jawa Bagian Selatan sebagai pusat pengembangan ekonomi skala lokal dengan bertumpu pada peningkatan produktivitas pertanian dan pariwisata inklusif;
3. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan berdaya saing didukung dengan sumber daya manusia yang unggul dan sistem infrastruktur transportasi yang terintegrasi;
4. peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, serta peningkatan sarana prasarana dan kapasitas masyarakat dalam upaya penguatan ketahanan bencana.

Highlight intervensi kewilayahan dan sarana prasarana Pulau Jawa Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
2. Pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DK Jakarta dan Jawa Timur;
3. Penurunan biaya logistik guna meningkatkan keunggulan komparatif investasi di Jawa, antara lain melalui lanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan *hub* utama Jawa (Tanjung Priok dan Tanjung Perak), serta pengembangan konektivitas udara melalui peningkatan infrastruktur dan layanan bandara *hub* dan *feeder* di Wilayah Jawa;
4. Pengelolaan *urban governance* pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya, termasuk pengembangan infrastruktur perkotaan (antara lain: transportasi, sumber daya air dan air minum, persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;

5. Pengembangan perguruan tinggi riset *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM) bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu global *brain hub*;
6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green, gray, dan social infrastructure*), terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, dan banjir;
7. Pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset berupa redistribusi tanah dan penataan akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat;
8. Pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi;
9. Penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat;
10. Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (PTCK);
11. Pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif;
12. Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
13. Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir

dengan target indikator sasaran pembangunan untuk Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,7% - 6,3%
2. PDRB per kapita 86,0 juta rupiah – 88,6 juta rupiah
3. Kontribusi PDRB Provinsi 14,2%
4. Tingkat Kemiskinan 7,5% - 8,0%
5. Rasio Gini 0,363 -0,373
6. Indeks Modal Manusia 0,65
7. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 1,00% – 2,17%
8. IKLH Daerah 74,25
9. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,85% - 4,00%

Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 memperhatikan strategi dan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Visi pembangunan

Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yaitu *"**Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045***". Visi pembangunan tersebut dicapai melalui misi pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang disebut sebagai Nawa Bhakti Satya, yaitu :

1. Jatim Sejahtera, Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan
2. Jatim Kerja, Memperluas lapangan kerja yang berkualitas
3. Jatim Akses, Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan
4. Jatim Agro, Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan
5. Jatim Cerdas, Memperkuat akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan
6. Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan
7. Jatim Berkah Amanah, Memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif
8. Jatim Harmoni, Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif
9. Jatim Lestari, Menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan dalam milestone di bawah ini :



Gambar IV.2
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 diarahkan sesuai dengan tema sesuai dengan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yaitu "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi**". Tema dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, dijabarkan pada prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Jatim Sejahtera : Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan
2. Jatim Kerja : Memperluas lapangan kerja yang berkualitas
3. Jatim Akses : Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan
4. Jatim Agro : Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan
5. Jatim Cerdas : Memperkuat akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan
6. Jatim Sehat : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan
7. Jatim Berkah-Amanah : Memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif
8. Jatim Harmoni : Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif
9. Jatim Lestari : Menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan sasaran pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur yang ingin dicapai di Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya perlindungan sosial yang adapatif
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian perdesaan
3. Meningkatnya kesemapatan kerja dan kewirausahaan daerah
4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah
5. Meningkatnya kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan
6. Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan
7. Meningkatnya akses layanan kesehatan yang berkualitas
8. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintaan yang melayani dan berintegritas
9. Terwujudnya masyarakat yang harmonis dan toleran
10. Terwujudnya masyarakat yang inklusif
11. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
12. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana

Target indikator makro yang ingin dicapai Provinsi Jawa Timur pada Perubahan RKPD Tahun 2026 yaitu :

1. Tingkat kemiskinan 7,95% - 9,10%
2. Rasio gini 0,370 - 0,380
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,70% – 4,48%
4. Pertumbuhan Ekonomi 4,90% - 5,40%
5. Indeks Pembangunan Manusia 75,80 – 76,40
6. Indeks Kesalehan Sosial 76,40 – 77,90
7. Indeks Ketimpangan Gender 0,315 – 0,332
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 74,08 – 74,25

Arahan pembangungan wilayah Kota Surabaya Tahun 2026 mempedomani RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yaitu :

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi serta jasa perusahaan) berdaya saing tinggi dan mendorong investasi pada sektor potensial (pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, jasa keuangan dan asuransi, real estate, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial)

2. Perluasan *coverage* jaringan transportasi melalui penyediaan feeder dan penguatan tata kelola kelembagaan transportasi publik terintegrasi serta didukung dengan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda, dan penguatan integrasi perencanaan penggunaan lahan dan sistem transportasi publik massal di kawasan GKS+
3. Peningkatan konektivitas jalan menuju/dari kawasan strategis pariwisata, kawasan industri dan ekonomi kreatif melalui penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa
4. Pemenuhan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman melalui peningkatan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni terjangkau dan berkelanjutan, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, akses rumah tangga terhadap sanitasi aman, akses rumah tangga terhadap layanan penuh pengumpulan sampah dan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta tetap memastikan pemenuhan akses sanitasi layak terhadap masyarakat, dan penanganan terhadap kawasan kumuh
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan
6. Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Pembangunan rendah karbon merupakan strategi kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki peran startegis dalam medukung kebijakan nasional dan provinsi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan katahanan terhadap perubahan iklim. Sektor-sektor prioritas yang berkontribusi terhadap emisi GRK yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota diantaranya pertanian, transportasi, energi, serta pengelolaan sampah dan air limbah. Pelaksanaan aksi pembangunan karbon perlu diiringi dengan penguatan kerjasama pentahelix sebagai bentuk kolaborasi berbagai sektor dalam rangka mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana gelombang pasang, banjir, kebakaran hutand an lahan, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, dan likuefaksi.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap *longlist* permasalahan pembangunan dari evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta dengan mempertimbangkan perkembangan isu global, isu nasional, Asta Cita, dan isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur, maka isu strategis pembangunan Kota Surabaya dirumuskan sebagai agenda utama yang perlu dijawab secara terpadu, lintas sektor, dan berkelanjutan. Rumusan isu strategis ini tidak hanya menggambarkan permasalahan yang masih dihadapi Kota Surabaya, tetapi juga menunjukkan arah kebijakan yang perlu diperkuat agar pembangunan kota semakin produktif, inklusif, humanis, tangguh, dan berkelanjutan.

1. **Penguatan daya saing ekonomi daerah yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan**

Kota Surabaya memiliki peran strategis sebagai pusat perdagangan, jasa, industri, logistik, pendidikan, kesehatan, dan simpul ekonomi Indonesia bagian timur. Struktur ekonomi kota yang kuat perlu terus dijaga agar mampu beradaptasi terhadap dinamika global, perubahan rantai pasok, perkembangan teknologi digital, dan persaingan ekonomi antarwilayah. Meskipun pertumbuhan ekonomi Surabaya menunjukkan kinerja yang baik, tantangan utama yang masih perlu dihadapi adalah bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut semakin berkualitas, mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat produktivitas sektor unggulan, serta memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh kelompok masyarakat.

Penguatan daya saing ekonomi daerah perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi investasi, penguatan produktivitas sektor perdagangan, industri, jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, perikanan, koperasi, dan UMKM. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas produk, legalitas usaha, sertifikasi, akses pembiayaan, digitalisasi pemasaran, dan perluasan akses pasar. Di sisi lain, penguatan investasi perlu diarahkan agar tidak hanya meningkatkan nilai realisasi investasi, tetapi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah ekonomi lokal, dan penguatan rantai pasok daerah.

Isu ini juga mencakup perlunya perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan pelatihan berbasis kebutuhan industri, fasilitasi kewirausahaan, serta peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi Surabaya perlu diarahkan tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan, tetapi juga untuk menciptakan ekonomi kota yang inklusif, adaptif terhadap perubahan, berbasis inovasi, dan berkelanjutan.

2. Penguatan ketahanan pangan, stabilitas harga, dan daya beli masyarakat

Sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat konsumsi yang tinggi, Surabaya memiliki ketergantungan terhadap pasokan pangan dari daerah penghasil di Jawa Timur dan wilayah lainnya. Kondisi ini menjadikan ketahanan pangan sebagai isu strategis, terutama dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Dinamika harga pangan, gangguan distribusi, perubahan iklim, serta fluktuasi produksi di daerah pemasok dapat berdampak langsung terhadap inflasi dan daya beli masyarakat Surabaya.

Penguatan ketahanan pangan perlu dilakukan melalui kerja sama antardaerah, pemantauan stok dan harga kebutuhan pokok, penguatan distribusi pangan, pengendalian inflasi, serta peningkatan daya saing pasar rakyat. Selain itu, pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming juga perlu terus dioptimalkan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas, memanfaatkan lahan terbatas secara produktif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan sehat.

Keamanan pangan juga menjadi bagian penting dalam isu ini. Pengawasan terhadap pangan segar, pangan hewani, dan makanan olahan perlu diperkuat untuk memastikan pangan yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi. Dengan demikian, penguatan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga dengan kualitas konsumsi, pengendalian harga, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing

Kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Surabaya sebagai kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Pembangunan SDM perlu dilakukan secara menyeluruh sejak usia dini, usia sekolah, usia produktif, hingga lanjut usia. Tantangan yang masih dihadapi meliputi pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan literasi dan numerasi, akses pendidikan tinggi, kualitas tenaga pendidik, kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pada bidang kesehatan, penguatan SDM perlu didukung oleh peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, penguatan fasilitas kesehatan primer dan rujukan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan ibu dan

anak, percepatan penurunan stunting, serta pemantauan tumbuh kembang balita. Tantangan kesehatan masyarakat di kota besar juga semakin kompleks karena dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, mobilitas tinggi, pola hidup, kualitas lingkungan, serta perubahan demografi. Oleh karena itu, layanan kesehatan perlu semakin promotif, preventif, responsif, dan berbasis data.

Pada bidang pendidikan, peningkatan kualitas SDM perlu diarahkan pada pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan, peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, penguatan literasi dan numerasi, peningkatan akses pendidikan tinggi, serta penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri menjadi penting agar penduduk usia produktif Surabaya dapat terserap dalam lapangan kerja yang layak dan mampu bersaing dalam ekonomi modern.

Isu ini juga mencakup pengembangan kepemudaan, olahraga, dan pemberdayaan pemuda produktif. Pemuda perlu didorong menjadi aktor pembangunan melalui kewirausahaan, inovasi, prestasi olahraga, kepemimpinan, literasi digital, dan kegiatan positif berbasis komunitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM Surabaya perlu diarahkan untuk membentuk masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, adaptif, berkarakter, dan berdaya saing.

4. **Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, digital, inovatif, dan berintegritas**

Kompleksitas pembangunan kota metropolitan menuntut tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, responsif, transparan, dan berbasis data. Surabaya perlu terus memperkuat kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut pembangunan agar setiap program dan kegiatan benar-benar berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat. Akuntabilitas kinerja tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen dan capaian output, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan, meningkatkan kualitas layanan, dan mewujudkan sasaran pembangunan.

Penguatan tata kelola perlu didukung oleh implementasi Satu Data, riset dan inovasi daerah, pengembangan e-Planning STREAM, e-Monev, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, integrasi data lintas perangkat daerah, keamanan siber, persandian, serta pemanfaatan big data dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan digital harus diarahkan bukan sekadar pada pembangunan aplikasi,

tetapi pada penyederhanaan proses bisnis, integrasi layanan, interoperabilitas data, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Isu ini juga mencakup penguatan akuntabilitas keuangan, optimalisasi pendapatan daerah, kualitas belanja, pengelolaan aset daerah, profesionalitas aparatur sipil negara, sistem merit, administrasi kependudukan, kearsipan digital, pelayanan publik, pengendalian risiko, dan integritas birokrasi. Dengan tata kelola yang kuat, Pemerintah Kota Surabaya diharapkan mampu bekerja lebih efektif, efisien, bersih, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

5. **Penguatan infrastruktur, permukiman, mobilitas, dan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan**

Sebagai kota metropolitan yang terus tumbuh, Surabaya menghadapi tekanan terhadap infrastruktur, permukiman, transportasi, dan lingkungan hidup. Peningkatan aktivitas ekonomi, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, peningkatan kendaraan, dan kebutuhan ruang perkotaan menuntut penyediaan infrastruktur yang berkualitas, aman, merata, dan berkelanjutan. Infrastruktur kota tidak hanya berfungsi sebagai penunjang aktivitas masyarakat, tetapi juga menjadi prasyarat untuk meningkatkan daya saing ekonomi, kualitas hidup, dan ketahanan kota.

Isu ini mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan, peningkatan kualitas drainase, pengendalian genangan, penyediaan air bersih, sanitasi layak, akses air minum, pengelolaan perumahan dan permukiman, perbaikan rumah tidak layak huni, serta penyediaan hunian layak dan terjangkau. Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan juga menuntut pengembangan hunian vertikal dan optimalisasi aset pemerintah untuk kepentingan publik.

Dari sisi mobilitas, Surabaya perlu memperkuat sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas angkutan umum, memperbaiki waktu tunggu, meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Integrasi transportasi dengan kawasan sekitar Surabaya juga menjadi penting dalam konteks pengembangan kawasan metropolitan.

Pada aspek lingkungan hidup, Surabaya masih perlu memperkuat pengelolaan sampah, peningkatan fasilitas 3R, pengurangan ketergantungan pada TPA, peningkatan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air dan udara, penurunan emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan

lingkungan perkotaan harus diarahkan untuk mewujudkan Surabaya yang nyaman, sehat, rendah emisi, tangguh terhadap perubahan iklim, dan berkelanjutan.

6. **Penguatan ketahanan sosial, perlindungan kelompok rentan, kesetaraan gender, dan kesiapsiagaan wilayah**

Pembangunan Kota Surabaya perlu memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat memperoleh perlindungan, kesempatan, dan akses layanan yang setara. Meskipun berbagai indikator sosial menunjukkan perbaikan, masih terdapat kelompok miskin, rentan, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan, anak, serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, penguatan ketahanan sosial menjadi isu strategis untuk memastikan pembangunan berjalan inklusif dan berkeadilan.

Isu ini mencakup penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan, pemutakhiran data keluarga miskin, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, penanganan PPKS, penguatan PSKS, pelayanan sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta peningkatan akses layanan bagi kelompok rentan. Perlindungan sosial perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan, tetapi juga pada pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat. Kesetaraan gender dan perlindungan anak juga menjadi bagian penting dalam isu ini. Pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, pencegahan kekerasan, penguatan PUSPAGA, UPTD PPA, serta pengembangan kelurahan/kampung layak anak perlu terus diperkuat.

Selain itu, ketahanan sosial juga berkaitan dengan kesiapsiagaan wilayah terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban umum, kebakaran, dan bencana. Surabaya perlu memperkuat penegakan peraturan daerah, edukasi ketertiban masyarakat, pencegahan kebakaran, mitigasi bencana, kesiapsiagaan masyarakat, serta respons kedaruratan yang cepat dan terintegrasi. Dengan demikian, isu ini diarahkan untuk membangun masyarakat yang terlindungi, setara, aman, tangguh, dan mampu beradaptasi terhadap risiko sosial maupun kebencanaan.

7. **Penguatan harmoni sosial, karakter masyarakat, seni budaya, dan kerukunan umat beragama**

Surabaya merupakan kota besar dengan masyarakat yang beragam dari sisi agama, etnis, budaya, latar belakang sosial, dan asal daerah. Keberagaman ini merupakan modal sosial yang penting, namun juga perlu dikelola agar tetap menjadi kekuatan dalam pembangunan kota. Oleh karena itu, harmoni sosial, toleransi, kerukunan

umat beragama, karakter masyarakat, dan kohesi sosial perlu terus diperkuat. Isu ini mencakup penguatan kerukunan umat beragama, toleransi, stabilitas sosial, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pemeliharaan ketenteraman masyarakat, penguatan nilai kebangsaan, serta peningkatan partisipasi warga dalam kehidupan sosial. Harmoni sosial menjadi fondasi penting agar pembangunan dapat berjalan dalam suasana yang aman, damai, inklusif, dan saling menghargai.

Selain itu, Surabaya memiliki kekayaan seni budaya, sejarah, dan identitas kota yang perlu terus dilestarikan. Pelestarian seni budaya lokal, perlindungan cagar budaya, pengembangan festival budaya, peningkatan literasi budaya, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis komunitas menjadi bagian penting dalam menjaga karakter Surabaya sebagai kota perjuangan, kota budaya, dan kota yang terbuka terhadap perubahan. Penguatan harmoni sosial juga perlu diarahkan untuk membentuk karakter masyarakat yang toleran, gotong royong, peduli lingkungan, disiplin, kreatif, dan memiliki kebanggaan terhadap identitas kotanya. Dengan demikian, pembangunan Surabaya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga pada penguatan nilai, budaya, karakter, dan kohesi sosial masyarakat.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Kota Surabaya

Tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026 berdasarkan arah kebijakan dan tema arah kebijakan pada rencana fokus pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, memperhatikan tema pembangunan tahun 2026 nasional dan Provinsi Jawa Timur serta saran masukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2026, dan hasil evaluasi kinerja triwulan II serta Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Tahunan Kota Surabaya Tahun 2026-2030 yang termuat pada Peraturan Daerah RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, maka tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026 *yaitu "**Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur***". Adapun Prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026, diarahkan sebagai berikut :

1. ***Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan yang adil dan inklusif***

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan melalui peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan serta pendidikan. Di bidang

kesehatan, pendekatan dilakukan secara menyeluruh melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dengan fokus pada penurunan angka kematian ibu, kematian bayi, serta stunting. Sementara itu, di bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan bermutu untuk menghasilkan generasi berkarakter dan berdaya saing tinggi

2. ***Pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif***

   Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peningkatan efisiensi investasi untuk mendorong penyediaan lapangan kerja yang layak dan pengurangan pengangguran, penguatan sektor unggulan Surabaya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat serta terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat

3. ***Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan***

   Infrastruktur menjadi tulang punggung pembangunan kota, yang tidak hanya difokuskan pada peningkatan konektivitas dan mobilitas, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi, memperkuat ketahanan wilayah, dan menjadi modal jangka panjang dalam memastikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik sekaligus menjaga keseimbangan ekologis serta ketahanan atas risiko bencana.

4. ***Reformasi birokrasi berbasis digital***

   Pemerintah Kota Surabaya menempatkan reformasi birokrasi sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transformasi birokrasi diarahkan melalui digitalisasi sistem pemerintahan untuk menciptakan layanan yang cepat, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Digitalisasi bukan hanya alat bantu, melainkan menjadi roh dari pelayanan publik yang adaptif dan modern

5. ***Harmonisasi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat***

   Pembangunan sosial diarahkan untuk memperkuat kohesi sosial dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Kesenjangan, baik dalam bentuk sosial maupun ekonomi, diatasi melalui penguatan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta layanan sosial yang inklusif. Dengan membangun solidaritas dan rasa keadilan, pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang rukun, inklusif, dan sejahtera.

Selanjutnya, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat utama bagi terciptanya ruang hidup yang nyaman dan produktif. Oleh karena itu, penguatan sistem deteksi dini, peningkatan kapasitas lembaga keamanan, serta sinergi antara aparat dan masyarakat terus diperkuat. Pendekatan kolaboratif dan berbasis komunitas dikedepankan guna mencegah potensi konflik sosial dan meningkatkan ketanggapan terhadap gangguan kamtibmas. Penerapan teknologi informasi dalam sistem keamanan lingkungan juga didorong sebagai bagian dari tata kelola kota yang adaptif dan partisipatif.

Tema dan prioritas pembangunan Kota Surabaya diselaraskan dengan tema dan prioritas dalam RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.



Gambar IV.3
Penyelarasan Tema Pembangunan Tahun 2026

Selain penyelarasan tema dengan arah kebijakan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, penyelarasan prioritas juga dilakukan dengan Astacita Presiden serta Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel IV.2
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (PN 1)	Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif. (PP 7)	Reformasi Birokrasi Berbasis Digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	7	Layanan	
					Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	12	Dokumen	
					Penyediaan Akses Internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	58	62	Perangkat Daerah	Penyesuaian target dengan memperhitungkan layanan untuk RSUD sebanyak 3 RSUD
					Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	58	62	Perangkat Daerah	Penyesuaian target dengan memperhitungkan layanan untuk RSUD sebanyak 3 RSUD
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	2	2	Dokumen	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85969	85969	Dokumen	
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	404543	404543	Dokumen	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	12	Laporan	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Administrasi Kependudukan	Kependudukan					
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70748	70748	Dokumen	
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3050	3050	Laporan	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	6	6	Dokumen	
		Harmonisasi Sosial, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	320	320	Orang	
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2)	Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan (PP 4)	Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Ekstraksi Garam	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	105	105	Pelaku Usaha	
					Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1768	1768	Pelaku Usaha	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	38	38	Kelompok	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
					Pelatihan					
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	63	63	Unit	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	65	65	Unit	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	45	45	Unit Usaha	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	180	180	Pelaku Usaha	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4	4	Laporan	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	96	96	Unit	
	Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (PP 9)	Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	350	350	Dokumen	
					Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang	Dinas Lingkungan Hidup	475	475	Badan Usaha	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
					diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	47	47	Pengaduan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Dinas Lingkungan Hidup	14600	36500	Ton	Usulan perubahan output subkegiatan dengan berdasarkan pada capaian rata-rata periode Januari s.d. Mei 2026
					Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup	568047	592760	Ton	Berdasarkan capaian rata-rata sampah tertangani di TPA Benowo perhari
					Penanganan sampah melalui pengangkutan	Dinas Lingkungan Hidup	568047	568047	Ton	
					Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	85	85,611	Persentase	Berdasarkan pada capaian rata-rata pengumpulan sampah periode Januari s.d. Mei 2026
					Penyediaan Sarana dan Prasarana	Dinas Lingkungan Hidup	231	231	Unit	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
					Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	Dokumen	
				Penyimpanan sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Dinas Lingkungan Hidup	350	350	Dokumen	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	Dokumen	
					Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	3	3	Lokasi	
					Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	Paket	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
					Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Dinas Lingkungan Hidup	3	3	Dokumen	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12	12	Dokumen	
					Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1725	1725	Orang	
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN3)	Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas (PP 2)	Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	720	720	Orang	
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4	4	Dokumen	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	250	250	Orang	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12	12	Dokumen	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	4	4	Produk	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Pemberdayaan dan Perlindungan	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan	153	153	Unit Usaha	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
			PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Perdagangan				
					Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	20	20	Kelompok Masyarakat	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	10	10	Unit Usaha	
					Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	200	200	Unit Usaha	
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	160	160	Orang	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	153	153	Orang	
	Jatim Akses, Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra	Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	0,8	1,7	KM	Adanya penambahan lokasi jalan yang dilebarkan menuju standar, yang semula 1 lokasi menjadi 4 lokasi
					Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya	11,7	11,7	KM	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
	aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan (PP 3)					Air dan Bina Marga				
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	40	160	KM	Adanya penambahan jumlah jalan yang dipelihara
					Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	11,7	11,7	KM	
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	70	75	Dokumen	Terdapat penambahan dokumen perencaaan jalan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	6	6	Dokumen	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	199	199	Unit	
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Jatim Cerdas, Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan (PP 5)	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan yang Adil dan Inklusif	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan	2355	2355	Satuan Pendidikan	
					Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan	3	3	Paket	
					Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	2479	2479	Satuan Pendidikan	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan	219	219	Peserta Didik	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN 4)					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan	84669	84669	Satuan Pendidikan	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan	3	3	Unit	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	40	40	Satuan Pendidikan	
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	2	2	Paket	
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	30	30	Satuan Pendidikan	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	90	90	Peserta Didik	
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	40	40	Peserta Didik	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	17	17	Unit	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	652	652	Satuan Pendidikan	
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	51050	51050	Peserta Didik	
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	3	3	Paket	
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	592	691	Satuan Pendidikan	Penyesuaian terhadap jumlah sekolah penerima BOS dalam aplikasi Markas
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	32513	30034	Peserta Didik	Penyesuaian terhadap jumlah peserta didik dengan status keluarga miskin dan pramiskin
					Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	652	652	Satuan Pendidikan	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	155	155	Unit	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	450	450	Orang	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	4	4	Unit	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	330	330	Satuan Pendidikan	
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	2220	3250	Peserta Didik	Penyesuaian jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan	2	2	Paket	
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	272	271	Satuan Pendidikan	Penyesuaian terhadap jumlah sekolah penerima BOS dalam aplikasi Markas
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	16362	16362	Peserta Didik	
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	34579	34579	Satuan Pendidikan	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	18	18	Unit	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	260	260	Lokus	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17305	84000	Eksemplar	Mempertimbangkan proyeksi koleksi perpustakaan yang

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
				Kabupaten/Kota	Masyarakat					dimanfaatkan masyarakat sampai akhir tahun dengan memperhatikan capaian sampai dengan bulan Mei 2026 yang telah mencapai 47.174 eksemplar
					Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	240	240	Perpustakaan	
					Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	100	Perpustakaan	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Sekretariat Daerah	21000	21000	Keluarga	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	23820	23820	Orang	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
	Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan (PP 6)	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan yang Adil dan Inklusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	768	768	Dokumen	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	1	1	Unit	
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	876	876	Unit	
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	6	49	Unit	Penyesuaian jumlah unit alkes yang diadakan sesuai kebutuhan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada	103	119	Unit	Penyesuaian jumlah unit alkes yang diadakan sesuai kebutuhan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Eka Candrarini	588	788	Unit	Penyesuaian jumlah unit alkes yang diadakan sesuai kebutuhan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	5	5	Paket	
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan	RSUD Eka Candrarini	5	5	Paket	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
					Minuman di Fasilitas Kesehatan					
					Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	3	1	Unit	Penyesuaian proyeksi usulan pendirian Rumah Sakit sampai dengan akhir Desember hanya ada 1 yaitu di RS Mitra Keluarga Tandes
					Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada	1	1	Unit	
					Pengembangan Rumah Sakit	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	1	1	Unit	
					Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Eka Candrarini	1	1	Unit	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	2	2	Unit	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	10	10	Unit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	768	768	Dokumen	
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	1	1	Paket	
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	12	12	Dokumen	
					Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Dinas Kesehatan	756	756	Dokumen	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	12	12	Dokumen	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	181238	130418	Orang	Penyesuaian target disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
										Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/920/2025 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2026-2030
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	35139	33153	Orang	Penyesuaian target disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/920/2025 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2026-2030
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	36468	34049	Orang	Penyesuaian target disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/920/2025 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2026-2030
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	73328	68478	Orang	Penyesuaian target disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/920/2025 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2026-2030
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	12	12	Dokumen	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	768	768	Dokumen	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
					Lingkungan					
					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dinas Kesehatan	10	10	Orang	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	11646	11104	Orang	Penyesuaian target disesuaikan dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor KJ.05.01/B.III/148/2026 Tanggal 9 Februari 2026 Tentang Pemberitahuan Angka Sasaran ODGJ Berat dan Depresi Tahun 2026
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Dinas Kesehatan	320	320	Orang	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	49728	49728	Orang	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	1068	1068	Orang	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	133478	123248	Orang	Penyesuaian target disesuaikan dengan Surat Edaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 400.7.8/3523/102.3/2026 Tentang Penyampaian Target Estimasi Kasus Tuberkulosis Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2026
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	472640	413791	Orang	Penyesuaian target disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/920/2

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
										025 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2026-2030
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	452473	384510	Orang	Penyesuaian target disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/920/2025 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2026-2030
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	1926446	1928295	Orang	Penyesuaian target disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/920/2025 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2026-2030
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	111482	113587	Orang	Penyesuaian target disesuaikan dengan estimasi penderita diabetes mellitus terhadap jumlah sasaran usia 15+ tahun pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/920/2025 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2026-2030
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	246184	248261	Orang	Penyesuaian target disesuaikan dengan estimasi penderita hipertensi terhadap jumlah sasaran usia 15+ tahun

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
										pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/920/2025 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2026-2030
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dinas Kesehatan	756	756	Dokumen	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	12	12	Dokumen	
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	12	12	Dokumen	
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	768	768	Dokumen	
					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	12	12	Dokumen	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	299	299	Orang	
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	126	126	Orang	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	64	64	Unit Kerja	
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Bhakti Dharma Husada	1	1	Unit Kerja	
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	1	1	Unit Kerja	
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Eka Candrarini	1	1	Unit Kerja	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	180	180	Unit	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1	laporan	
					Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1	laporan	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	3	Unit	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	57	57	Satuan Pendidikan	
	Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan (PP 1)	Harmonisasi Sosial, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	340	62	Orang	Adanya pengalihan pagu anggaran yang bersumber dari DBHCHT yang semula di Dinas Sosial dialihkan ke Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	24152	24152	Orang	
					Pendataan Fakir Miskin Cakupan	Dinas Sosial	65578	65578	Orang	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
					Daerah Kabupaten/Kota					
	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif (PP 8)	Harmonisasi Sosial, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	58	59	Lembaga	Terdapat penambahan jumlah Perangkat Daerah yang didampingi yaitu BRIDA
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	610	610	Orang	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	120	150	Orang	Penyesuaian dengan penanganan keluarga yang melakukan konseling/ konsultasi di Puspaga
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50	208	Orang	Penyesuaian target sasaran untuk Satgas PKBM, Satgas PPA, LSM Pemerhati Perempuan dan anak
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	150	264	Orang	Penyesuaian Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Pendampingan oleh UPTD PPA

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
				Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penduduk dan Keluarga Berencana				
					Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	150	264	Orang	Penyesuaian Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan oleh UPTD PPA
					Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33	50	Orang	Penyesuaian Jumlah Anak Korban Kekerasan dan Anak Berhadapan Hukum yang mendapatkan Fasilitasi Rumah Perlindungan
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	184	184	Lembaga	
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20	120	Orang	Penyesuaian jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan pendampingan oleh UPTD PPA
					Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20	120	Orang	Penyesuaian jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan pengaduan oleh UPTD PPA
					Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	6	36	Orang	Penyesuaian jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rumah perlindungan dan

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
						Penduduk dan Keluarga Berencana				ditangani oleh UPTD PPA
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN 5)	Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan (PP 4)	Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	4	Dokumen	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	3	Dokumen	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	60	60	Orang	
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2	2	Dokumen	
					Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2	2	Lokasi	
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2	2	Unit	
					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	12	12	Laporan	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Pembinaan Terhadap Pengelola	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan	611	611	Dokumen	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
			DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Distribusi Perdagangan	Perdagangan				
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	50	50	Pelaku Usaha	
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan (PN 6)	Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan (PP 1)	Harmonisasi Sosial, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	153	153	Kelompok	
					Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	6	Unit	
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	1	1	Laporan	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
					dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 7)	Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif (PP 7)	Reformasi Birokrasi Berbasis Digital	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	66	66	Laporan	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	25	25	Kegiatan	
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	10	10	Perangkat Daerah	
		Harmonisasi Sosial, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	690	690	Orang	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15	15	Orang	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
			PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Penanganan Konflik Sosial	Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44	44	Laporan	
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (PN 8)	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif (PP 8)	Harmonisasi Sosial, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	690	690	Orang	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	9	9	Dokumen	
					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	12	12	Laporan	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
					Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					
					Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja	12	12	Laporan	
					Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	12	12	Laporan	
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	12	12	Laporan	
					Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	12	12	Laporan	
					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	4	4	Laporan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	2	2	Objek	
					Pembinaan Sumber	Dinas Kebudayaan,	20	20	Orang	

Prioritas Nasional	Prioritas Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Target		Satuan	Keterangan
							APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		
					Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata				
	Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (PP9)	Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1750	1750	Kawasan	
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31	31	Kawasan	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup	275,9	275,9	Ha	
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup	125	125	Unit	
					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	14	14	Unit	

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Penyelarasan Subkegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan Astacita Presiden disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.3
Penyelarasan Subkegiatan Kota Surabaya dengan Asta cita Presiden Tahun 2026

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
1	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Dokumen	-	1	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						yang dilaksanakan					
2	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	37574	16362	16362	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
3	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempu	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	-	450	450	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			an, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
5	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	45	90	90	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			disabilitas.											
6	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	Unit	1	1	1	
7	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana,	Unit	1	1	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p					
8	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah	Unit	1	1	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p					
9	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	5	5	5	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
10	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyand	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	5	5	5	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			ang disabilitas.											
11	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	768	768	768	
12	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHAT	Memperkuat pembangunan sumber	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	Dokumen	12	12	12	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		AN	daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Kesehatan Masyarakat					
13	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehat	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	12	12	12	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			an, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
14	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguat	Kesehatan Untuk Semua	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	-	126	126	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			an peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
23	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	1	
24	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru											
27	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	10	2240	2240	
28	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkemban	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	-	10	10	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		MAN	, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.					gnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						
30	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	-	12	15	
31	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	-	1	1	
32	1.05	URUSAN PEMERIN	Memperkuat	Terwujudnya manajemen	1.05.03	PROGRAM PENANGGUL	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		TAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar		ANGAN BENCANA		Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun					
33	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	-	12	12	
34	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN	Memperkuat penyelar	Terwujudnya manajemen bencana yang	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasa	Jumlah Laporan Hasil Binwas	Laporan	-	12	12	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	asan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar		BENCANA		n Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					
35	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawala	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	12	12	12	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
								n						
36	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	12	12	12	
37	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	12	12	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
38	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	12	12	
39	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	-	1	1	
40	1.05	URUSAN	Memper	Terwujudnya	1.05.04	PROGRAM	1.05.04.2.01	Penyusuna	Jumlah	Dokumen	-	1	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	kuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar		PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	.0013	n Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)					
41	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	12	459	459	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
42	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	12	459	459	
43	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja	Orang	-	486	486	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.					Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya					
44	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilita	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	-	486	486	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			s.											
45	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2229	340	62	
46	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempu	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2229	340	62	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			an, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
47	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	24152	24152	
48	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	24152	24152	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
49	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	720	720	720	
50	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA	Memperkuat pembangunan sumber	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	Orang	720	720	720	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		KERJA	daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja		KERJA		Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Berbasis Kompetensi pada Tahun					
51	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	220	230	230	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			pemberantasan kemiskinan.											
52	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	220	230	230	
53	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Membangun dari desa dan dari	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial	Orang	-	25650	25650	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		TENAGA KERJA	bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	an dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja				Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					
54	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	-	25650	25650	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			Z), dan penyandang disabilitas.											
55	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	-	58	59	
56	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN	Memperkuat pemban	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM	jumlah SDM lembaga masyarakat,	Orang	-	610	610	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perempuan, dan Perlindungan Anak		GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan					
57	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidik	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenanga	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan	Kegiatan	-	2	2	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			an, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					n Kabupaten/ Kota	KtA tingkatKab/Kota					
58	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	150	264	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
62	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	-	15	15	
64	2.1	URUSAN PEMERIN	Melanjutkan	Terwujudnya pemerataan	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBU	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam	Jumlah Berita Acara	Berita Acara	-	1	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		TAHAN BIDANG PERTANAHAN	pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah		SI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		rangka Penataan Aset Reforma Agraria	dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.					
65	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas	Lokasi	-	3	3	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)					
66	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	-	3	3	
67	2.11	URUSAN PEMERIN	Memantapkan	Lingkungan Hidup	2.11.03	PROGRAM PENGENDALI	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji	Jumlah pengambilan	Paket	-	1	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		TAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Berkualitas		AN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		dan pengujian parameter kualitas lingkungan	contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan					
68	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	-	1	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.											
69	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	570129	568047	568047	
70	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	570129	568047	568047	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.											
71	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	-	85	85,611	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			biru											
72	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	-	85	85,611	
73	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTS	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA,	Ton	-	14600	36500	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					a, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan					
74	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	-	14600	36500	
75	2.11	URUSAN	Memant	Lingkungan	2.11.11	PROGRAM	2.11.11.2.01	Penangana	jumlah	Ton	650430	568047	592760	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	apkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Hidup Berkualitas		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	.0020	n sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional					
76	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarum	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	650430	568047	592760	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			at beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.											
77	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan		40	40	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
78	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	-	1	1	
80	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	-	3050	3050	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		PENCATATAN SIPIL	teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kependudukan berbasis digital										
85	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
86	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	;-	3	3	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
87	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	;-	1	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
88	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan	Kelompok	57	153	153	
89	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2500	2500	2500	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
90	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2500	2500	2500	
91	2.15	URUSAN	Melanjut	Terwujudnya	2.15.02	PROGRAM	2.15.02.2.03	Rehabilitasi	Jumlah	Unit	12	14	14	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	kan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	.0011	dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara					
92	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	12	14	14	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			produksi melalui peran aktif koperasi.											
97	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	-	1	1	
98	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	-	1	1	
99	2.16	URUSAN	Memper	Terakselerasin	2.16.02	PROGRAM	2.16.02.2.01	Pelayanan	Jumlah	Permoho	36	30	30	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	kuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	ya transformasi pemerintah digital di daerah		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	.0017	Informasi Publik	permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	nan				
100	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	36	30	30	
101	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	-	12	12	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			narkoba, judi, dan penyelu dupan.											
102	2.16	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	Memper kokoh ideologi Pancasil a, demokra si, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasin ya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLA AN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 .0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomen dasi	-	12	12	
103	2.16	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	Memper kuat reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memper kuat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	Terakselerasin ya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLA AN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 .0021	Pengelolaa n Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	34	17	18	
104	2.16	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	Memper kokoh ideologi Pancasil a, demokra si, dan hak asasi	Terakselerasin ya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLA AN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 .0021	Pengelolaa n Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan	Media	34	17	18	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			manusia (HAM).						media berbayar sesuai kriteria/juknis					
105	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	7	7	7	
106	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	7	7	7	
107	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Memperkuat reformasi politik,	Terakselerasinya transformasi pemerintah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIK	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubun	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung	Aplikasi	-	10	10	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	digital di daerah		A		g Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah					
108	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	-	10	10	
109	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	-	58	62	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			judi, dan penyelu dupan.											
110	2.16	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	Memper kokoh ideologi Pancasil a, demokra si, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasin ya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLA AN APLIKASI INFORMATIK A	2.16.03.2.02 .0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatk an akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangka t Daerah	-	58	62	
111	2.16	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	Memper kuat reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memper kuat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	Terakselerasin ya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLA AN APLIKASI INFORMATIK A	2.16.03.2.02 .0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelengg araan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelengga raan Kabupaten/K ota Cerdas	Dokumen	-	6	6	
112	2.16	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA	Memper kokoh ideologi Pancasil a, demokra si, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasin ya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLA AN APLIKASI INFORMATIK A	2.16.03.2.02 .0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelengg araan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelengga raan Kabupaten/K ota Cerdas	Dokumen	-	6	6	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
113	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	-	20	20	
114	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	-	153	153	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
115	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	9	10	10	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
116	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	-	160	160	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			.											
117	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	-	5	5	
118	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan	Kegiatan Usaha	2960	3060	3060	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
									Berusaha					
119	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	500	700	700	
122	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan	Orang	700	2214	2214	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		OLAHRAGA	(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	olahraga				kabupaten/kota	Pengembangan					
124	2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	-	62	62	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			judi, dan penyelu dupan.											
125	2.2	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG STATISTI K	Memper kuat reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memper kuat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggara an Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENG GARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 .0019	Peningkata n Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	-	81	81	
126	2.21	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG PERSAND IAN	Memant apkan sistem pertahan an keaman an negara dan mendoro ng kemandi rian bangsa melalui swasem bada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENG GARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANA N INFORMASI	2.21.02.2.01 .0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunaka n Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangka t Daerah	-	58	62	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			ekonomi hijau, dan ekonomi biru											
127	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	-	58	62	
128	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang	Dokumen	-	1	1	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar					
129	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar	Dokumen	-	1	1	
130	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	2	2	2	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
131	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragam	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	2	2	2	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			a untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.											
132	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	-	20	20	
133	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN	Memperkuat penyelar	Peningkatan Indeks Pemajuan	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya	Jumlah Peserta Pembinaan	Orang	-	20	20	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		BIDANG KEBUDAYAAN	asan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kebudayaan (IPK)		KEBUDAYAAN		Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					
136	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	-	4	4	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
137	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	-	4	4	
138	2.23	URUSAN PEMERIN	Memperkuat	Meningkatnya Kegemaran	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustaka	Jumlah perpustakaa	Perpustakaan	200	100	100	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		TAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membaca dan Literasi Masyarakat		PERPUSTAKAAN		an Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	n umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan					
139	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional	Perpustakaan	200	100	100	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						Perpustakaan					
140	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generas	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	-	17305	84000	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			i milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
141	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	-	17305	84000	
142	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan,	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian	Orang	-	6	6	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	dan pendaftaran naskah kuno					
143	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	-	6	6	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.											
144	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	-	2	2	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			disabilitas.											
145	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	-	2	2	
146	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	66	68	68	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.											
147	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Penggunaa	100	1200	5000	
150	3.25	URUSAN PEMERIN	Memantapkan	Terwujudnya Tata Kelola	3.25.03	PROGRAM PENGELOLA	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan	Jumlah Sarana dan	Unit	-	65	65	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
		TAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan		AN PERIKANAN TANGKAP		Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil					
153	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	1768	1768	1768	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru											
154	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	-	105	105	
157	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	-	60	60	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
159	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2	2	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
160	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	-	2	2	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			koperasi .											
166	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi .	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02 .0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	-	4	4	
170	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 .0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	-	35,975	35,975	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru											
172	3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	-	2	2	
173	3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	-	50	50	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.											
175	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	-	1	1	
176	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	12	12	12	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			tambah di dalam negeri.											
177	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u	Dokumen	12	1	1	
178	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan	Dokumen	-	12	12	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			nilai tambah di dalam negeri.					berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi,					
182	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	-	118	118	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
								Politik di Daerah						
183	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	-	118	118	
184	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Orang	-	118	118	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			BUDAYA POLITIK		Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan					
185	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	-	30	30	
186	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaya	Orang	-	30	30	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK RENBANG 2025	TARGET APBD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026	KET.
			manusia (HAM).	Pancasila				Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	an Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
187	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	-	30	30	

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Asta Cita Presiden mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins* sebagai berikut :

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Dalam mendukung Asta Cita, Presiden telah menetapkan Program Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Strategis Nasional menjadi acuan dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Berikut disampaikan penyelarasan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2026 dengan Program Strategis Nasional dapat dilihat pada tabel IV.4

Tabel IV.4
Keselarasan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dengan Program Strategis Nasional Tahun 2026

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	Perubahan RKPD 2026		KETERANGAN
Pengentasan Kemiskinan	*Penanggulangan Kemiskinan*	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	
	Sekolah Rakyat	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	Perubahan RKPD 2026		KETERANGAN
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial	
	Pembangunan 3 Juta Rumah	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
Ketahanan Pangan	***Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)***			Di Surabaya tidak ada wilayah irigasi
Ketahanan Pangan	***Pendayagunaan Penyuluh Pertanian***	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
Ketahanan Pangan	***Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah***	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	Perubahan RKPD 2026		KETERANGAN
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	
Ketahanan Pangan	***Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)***	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
		Pengembangan Prasarana Pertanian		
		Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
Kesehatan untuk semua	***Stunting***	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	63 Puskesmas	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	63 Puskesmas	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63 Puskesmas	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	Perubahan RKPD 2026		KETERANGAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	63 Puskesmas	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	63 Puskesmas	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	63 Puskesmas	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting	Dinas Pemberdayaan	

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	Perubahan RKPD 2026		KETERANGAN
		(Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
		Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan	
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan	
	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
		Peningkatan Pelayanan BLUD		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	63 Puskesmas	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP		

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	Perubahan RKPD 2026		KETERANGAN
		Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	63 Puskesmas	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	
	Jaminan Kesehatan Nasional	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
	Penuntasan TBC	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	63 Puskesmas	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	
	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Rumah Sakit	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
Perluasan Akses Pendidikan	***Pembangunan dan Revitalisasi PAUD***	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan	
Perluasan Akses Pendidikan	***Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah***	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	Perubahan RKPD 2026		KETERANGAN
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	
Perluasan Akses Pendidikan	***Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran***			SMA merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Perluasan Akses Pendidikan	***Makan Bergizi Gratis***	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	
Pertumbuhan Ekonomi	***Pengendalian Inflasi***	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	Perubahan RKPD 2026		KETERANGAN
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
Pertumbuhan Ekonomi	***Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih***	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang		

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	Perubahan RKPD 2026		KETERANGAN
		Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
Pertumbuhan Ekonomi	***Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)***	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Badan Pendapatan Daerah	
		Penagihan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	Perubahan RKPD 2026		KETERANGAN
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Pertumbuhan Ekonomi	***Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)***	**PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		
		Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
		Job Fair/Bursa Kerja		
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI		

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	Perubahan RKPD 2026		KETERANGAN
		PARIWISATA		
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROYEK / KEGIATAN	Perubahan RKPD 2026		KETERANGAN
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
		Pengelolaan Sampah		
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penanganan sampah melalui pengangkutan	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Kota Surabaya melakukan kolaborasi lintas perangkat daerah dengan mengoordinasikan peran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam pendataan lembaga pendidikan, fasilitasi koordinasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, serta melakukan pemantauan pelaksanaan program di lapangan. Dinas Kesehatan melaksanakan pelatihan bagi penyedia makanan, skrining kesehatan siswa, pengujian kandungan gizi makanan, dan pemberian rekomendasi menu yang seimbang dan sesuai kebutuhan. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup memastikan pengelolaan dan pengangkutan limbah makanan dari sekolah berlangsung dengan baik dan ramah lingkungan.

Pemerintah Kota memastikan pelaksanaan program dilakukan secara terstandar melalui penetapan dokumen keputusan tim pelaksana, pedoman operasional pelaksanaan di sekolah, serta pemanfaatan sistem pendataan pendidikan yang terintegrasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Menu makanan yang disajikan telah memenuhi prinsip makanan sehat dan bergizi, mendukung pembentukan kebiasaan positif anak-anak dalam kerangka 7 (tujuh) kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yaitu: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, bermasyarakat, gemar belajar, dan tidur tepat waktu.

Program ini tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga menjangkau kelompok rentan lainnya seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemerintah Kota Surabaya siap menjadi percontohan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang mencakup peningkatan gizi, pembentukan karakter, pemberdayaan pelaku usaha lokal, serta pelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih yang merupakan salah satu proyek strategis nasional melalui fasilitasi pembentukan 153 Koperasi Kelurahan Merah Putih sampai dengan berbadan hukum. Koperasi yang difasilitasi tersebut dapat berupa pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, ataupun revitalisasi koperasi yang tidak aktif. Tahapan yang dilakukan meliputi identifikasi potensi sumber daya tiap wilayah, identifikasi koperasi eksting dan potensial, koordinasi dengan pemangku wilayah dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan persiapan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Selanjutnya,

pengembangan usaha koperasi tersebut terutama difokuskan pada perdagangan sembako untuk dapat menjadi operator Kios TPID, padat karya jahit dan paving, serta pemasok barang toko kelontong. Diharapkan dengan terbentuknya Koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di 153 kelurahan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian pada level *grassroot* sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja secara makro.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membentuk arah pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dalam upaya menciptakan daerah yang maju dan berkelanjutan, sektor ekonomi kreatif. menjadi salah satu pilar penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Ekonomi kreatif tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga menjadi wadah ekspresi budaya, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengintegrasikan pengembangan ekonomi kreatif ke dalam program prioritas daerah. Hal ini dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang adaptif, penguatan ekosistem kreatif, serta penyediaan infrastruktur dan dukungan pembiayaan yang memadai. Fokus pembangunan diarahkan pada subsektor unggulan yang memiliki potensi lokal, seperti kuliner, fesyen, kriya, musik, film, seni pertunjukan, dan aplikasi digital.

Pemerintah Kota Surabaya juga mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha kreatif, komunitas, akademisi, dan sektor swasta, dalam menciptakan ruang kreatif (*creative hub*), inkubator bisnis, serta platform pemasaran digital yang dapat memperluas akses pasar bagi produk-produk kreatif lokal. Inisiatif ini turut memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, khususnya bagi generasi muda. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pendekatan ekonomi kreatif juga diharapkan mampu mendorong pelestarian budaya lokal dan pemanfaatan sumber daya secara bijak. Pengembangan produk kreatif yang berakar pada kearifan lokal menjadi kunci dalam menjaga identitas budaya sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi.

4.2.3 Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026

Pencapaian sasaran pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026 dijabarkan dalam tabel IV.5 di bawah ini yang memuat indikator sasaran beserta target yang ingin dicapai pada perubahan RKPD Tahun 2026 dari setiap indikator sasaran tersebut.

Tabel IV.5
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	KETERANGAN
Misi 1 : Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan	Transformasi Sektor Ekonomi Unggulan yang Berdaya Saing					
	Meningkatnya Efisiensi Investasi Daerah	ICOR	4,70%	4,77%	4,77%	target tahun 2026 tetap dengan pertimbangan situasi geopolitik yang berpengaruh pada naiknya harga dan semakin tingginya biaya investasi yang dikeluarkan
		Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,25%	24,80%	24,80%	target tahun 2026 tetap dengan pertimbangan situasi geopolitik yang berpengaruh pada naiknya harga dan semakin tingginya biaya investasi yang dikeluarkan
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	16,71%	16,67%	16,72%	diproyeksikan naik dengan bertambahnya kunjungan ke Surabaya serta pendirian restoran dan usaha makan minum di Kota Surabaya
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	19,59%	19,10%	19,59%	diproyeksikan akan naik rasionya seiring investasi manufaktur
		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26,97%	28,13%	27,15%	diproyeksikan berkurang dengan situasi geopolitik yang mengakibatkan perubahan pada ekspor dan transaksi suku cadang kendaraan
	Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	73,28	85	73,78	Penyesuaian target pada tahun 2026 dikarenakan adanya perubahan formulasi berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 301.2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemutakhiran Metodologi dalam Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah Kabupaten/Kota .
		Tingkat Inflasi	2,96%	2,50%	3,50%	Kenaikan harga pada sektor yang tidak dapat dikendalikan/intervensi oleh Pemerintah Kota,bulan februari inflasi

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	KETERANGAN
						mencapai
	Meningkatnya Kontribusi Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84%	4,47%	4,47%	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	60,16%	61,02%	61,02%	
Misi 2 : Mempercepat Transformasi Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas					
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,34 Tahun	76,50 Tahun	76,50 Tahun	
	Meratanya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,88 Tahun	15,01 Tahun	15,01 Tahun	
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,15 Tahun	11,34 Tahun	11,34 Tahun	
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Keolahragaan	Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga	0,453	0,466	0,466	
Misi 3 : Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan					
	Meningkatnya Manajemen Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	94,98	94,5	95,23	
	Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintahan Digital	4,78	1,83	1,83	adanya penyesuaian indikator penyusun SPBE menjadi Pemdi

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	KETERANGAN
	Meningkatnya Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	72,79	81,78	81,78	
	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Sistem Merit	28,33%	28,49%	28,49%	
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Nilai SAKIP Kota Surabaya	91,83	90,39	91,85	
		Indeks Pelayanan Publik	4,84	4,61	4,85	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	98,06%	97,25%	98,08%	
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	74,84	78,4	78,4	
Misi 4 : Memantapkan Ketahanan Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Meningkatnya Keseimbangan dan Kesinambungan Pembangunan yang Berkelanjutan					
	Meningkatnya Kulitas Lingkungan Hidup Perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,82 poin	61,53 poin	61,53 poin	- Terdapat penyesuaian formulasi perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respons terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, yang berlaku untuk perhitungan target 2026 sehingga dengan kriteria baru diproyeksikan akan ada penurunan pada IKLH Kota Surabaya
		Penurunan Emisi GRK Kumulatif	269.543,14 Ton CO_2 eq	245.816,22 Ton CO_2 eq	269.543,14 Ton CO_2 eq	Perubahan target Tahun 2026 didasarkan pada hasil rilis penurunan Emisi GRK Kumulatif di website Aksara

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	KETERANGAN
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kualitas Pembangunan Infrastruktur	0,8	0,69	0,81	
	Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Risiko Bencana	96,76	107,5	96,76	
Misi 5 : Harmonisasi Sosial Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif					
	Terciptanya Masyarakat Maju dan Berbudaya dalam Mewujudkan Kondusifitas Wilayah					
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	62,4	58,1	62,4	
	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Skor Predikat Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA)	356,44	361	361	
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,151	0,119	0,119	
	Meningkatnya Keharmonisan dan Kerukunan Umat Beragama	Indeks Toleransi Umat Beragama	0,96	0,968	0,968	
		Indeks Penyelenggaraan Tratibumlinmas	80,3	80,71	80,71	
	Terwujudnya Mayarakat yang	Indeks Pembangunan	56,90%	57,40%	57,40%	

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	KETERANGAN
	Berkarakter dan Berbudaya	Kebudayaan				

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Tabel IV.6
Indikator Kinerja DaerahTahun 2026

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
A	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Sasaran Kota & Tujuan PD	73,28	85	73,78	Indeks	Penyesuaian target pada tahun 2026 dikarenakan adanya perubahan formulasi berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 301.2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemutakhiran Metodologi dalam Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah Kabupaten/Kota .
2.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	-	1.9 (lower is better)	3	2,37	%	Target Prevalence of Undernourishment (PoU) Kota Surabaya Tahun 2026 ditetapkan membaik melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan, peningkatan akses pangan bagi masyarakat rentan, penguatan cadangan pangan, urban farming, serta edukasi konsumsi pangan B2SA. Penurunan PoU mendukung peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) karena mencerminkan semakin baiknya akses dan pemanfaatan pangan. Namun, target ketahanan pangan Tahun 2026 disesuaikan dengan formulasi baru berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 301.2 Tahun 202 tentang Petunjuk Teknis Pemutakhiran Metodologi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota.
3.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Sasaran PD	45,49**	82,69	82,69	%	Realisasi pada tahun 2024 sebesar 45,49% sedangkan realisasi tahun 2025 belum dilakukan rilis capaian kinerja oleh Perumda Air Minum Surya Sembada karena menunggu hasil audit BPKP
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)(a)	Sasaran Kota & Tujuan PD	61,82	61,53	61,53	Poin	Terdapat penyesuaian formulasi perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respons terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, yang berlaku untuk perhitungan target 2026 sehingga dengan kriteria baru diproyeksikan akan ada penurunan pada IKLH Kota Surabaya
5.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Sasaran PD	15,28	38,02	38,02	%	
6.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Program PD	99,52	95	99,64	%	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
	7.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Program PD	100	100	100	%	
	8.	Penurunan emisi GRK kumulatif	Sasaran Kota	269.543,14	245.816,22	269.543,14	Ton CO_2 eq	Perubahan target Tahun 2026 didasarkan pada hasil rilis penurunan Emisi GRK Kumulatif di website Aksara
	9.	Indeks Risiko Bencana	Sasaran Kota	96.76 (lower is better)	107,5	96,76	Indeks	
	10.	Indeks Ketahanan Daerah	Tujuan PD	0,64	0,64	0,64	Indeks	
	11.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Sasaran PD	-0,47	0,28	0,28	%	
B	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
	1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Tujuan Kota	5,87	5,8	5,8	%	target tahun 2026 dan 2027 tetap dengan pertimbangan situasi geopolitik yang berpengaruh pada ekspor luar negeri
	2.	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita	Tujuan Kota	283,31	289,29	289,29	Rp Juta	target tahun 2026 dan 2027 tetap dengan pertimbangan situasi geopolitik yang berpengaruh pada ekspor luar negeri
	3.	Indeks Pembangunan Manusia	Tujuan Kota	85,65	85,77	85,77	Indeks	
	4.	Indeks Reformasi Birokrasi	Tujuan Kota	100,77	96,11	96,11	Indeks	adanya penyesuaian indikator penyusun SPBE menjadi Pemdi
	5.	Tingkat Kemiskinan	Tujuan Kota	3,56	3,48	3,48	%	
	6.	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	-	0	0,22	0	%	
	7.	Rasio Gini	Tujuan Kota	0,369	0,375	0,375	Angka	target tahun 2026 dan 2027 tetap dengan pertimbangan situasi geopolitik yang berpengaruh tabungan masyarakat
	8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Sasaran Kota & Tujuan PD	4,84	4,47	4,47	%	
	9.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Sasaran Kota & Tujuan PD	76,34	76,5	76,5	Tahun	
	10.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Program PD	4,02	4,01	4,01	per 1.000 kelahiran hidup	
	11.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	Sasaran PD	0,594	0,598	0,594	%	
	12.	Rata-rata Lama Sekolah	Sasaran Kota & Tujuan PD	11,15	11,34	11,34	Tahun	
	13.	Harapan Lama Sekolah	Sasaran Kota & Tujuan PD	14,88	15,01	15,01	Tahun	
	14.	Skor Kemampuan Literasi SD	Program PD	81,93	74,37	82,03	Nilai	
	15.	Skor Kemampuan Literasi SMP	Program PD	94,51	86,21	94,61	Nilai	
	16.	Skor Kemampuan Numerasi SD	Program PD	72,59	63,79	72,69	Nilai	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
17.	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Program PD	90,03	74,68	90,13	Nilai	
18.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tujuan PD	71,9	100	73,9	Nilai	penyesuaian formulasi perhitungan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia
19.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program PD	44,69	60,78	60,78	%	
20.	Indeks Toleransi Umat Beragama	Sasaran Kota	0,96	0,968	0,968	Nilai	
21.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Sasaran Kota & Tujuan PD	56,9	57,4	57,4	%	
22.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Sasaran PD	91,26	87,47	91,3	Indeks	
23.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Sasaran PD	77,19	73,96	77,25	Indeks	
24.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Sasaran PD	94,68	96,27	96,27	Indeks	
25.	Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Sasaran Kota & Tujuan PD	0,453	0,466	0,466	Indeks	
26.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	-	21,42	11,97	21,42	%	
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
1.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Tujuan Kota	71,90	67,96	73,00	Indeks	Kenaikan disebabkan peningkatan realisasi indikator penyusun yakni indeks risiko bencana (IRB) dan indeks kualitas pembangunan infrastruktur
2.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Program PD	6,79	6,85	6,81	Indeks	Berdasarkan pada surat Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas tanggal 22 Juni 2026 nomor : 12597/Dt.03.03/PP.03.01/06/2026 perihal Penyampaian Capaian dan Target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dalam rangka Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2027, bahwa realisasi IKAD kota Surabaya Tahun 2025 sebesar 6,79 dan target tahun 2027 ditetapkan 6,82 maka pada tahun 2026 target disesuaikan menjadi 6,81
3.	Indeks Harmoni Indonesia	Tujuan Kota	7,31	7,33	7,33	Indeks	
4.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Sasaran Kota & Tujuan PD	16,71	16,67	16,72	%	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
5.	Rasio PDRB Industri Pengolahan		Sasaran Kota & Tujuan PD	19,59	19,1	19,59	%	
6.	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		Sasaran Kota & Tujuan PD	26,97	28,13	27,15	%	
7.	ICOR		Sasaran Kota	4,7	4,77	4,77	%	
8.	Pembentukan Modal Tetap Bruto		Sasaran Kota	27,25	24,8	24,8	%	
9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		Sasaran Kota	60,16	61,02	61,02	%	
10.	Indeks Inovasi Daerah		Sasaran Kota & Tujuan PD	94,98	94,5	95,23	Angka	
11.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Sasaran PD	98,12	98,64	98,64	%	
12.	Tingkat Inflasi		Sasaran Kota & Tujuan PD	2.96 (lower is better)	2,5	3.5	%	Kenaikan harga pada sektor yang tidak dapat dikendalikan/intervensi oleh Pemerintah Kota
13.	Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi		-	24,41	24,34	24,34	%	Perkembangan hilirisasi pada Gresik dan Bojonegoro akan mempengaruhi proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi
14.	Indeks Zakat Nasional (IZN)		-	0,72	0,696	0,72	Poin	
D	**ASPEK LAYANAN UMUM**							
Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	Indeks Kualitas Pembangunan Infrastruktur		Sasaran Kota	0,80	0,69	0,81	Indeks	Kenaikan disebabkan peningkatan realisasi indikator penyusunnya yakni indeks bangunan gedung dan penataan ruang, indeks keciptakaryaan, dan indeks tata kelola pengadaan lahan. kenaikan terjadi karena penyesuaian DO dan formulasi masing2 indikator tersebut.
	1.1.	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	Tujuan PD	0,87	0,88	0,88	Indeks	Tidak ada perubahan
	1.2.	Indeks Bangunan Gedung dan Penataan Ruang	Tujuan PD	0,7363	0,4157	0,7377	Indeks	Kenaikan disebabkan peningkatan realisasi indikator penyusunnya yakni Persentase Ketepatan Implementasi Pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang [Sasaran Perangkat Daerah], Persentase Bangunan yang ber IMB/PBG [Program], dan Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik [Program]. Kenaikan terjadi karena penyesuaian DO dan formulasi masing2 indikator tersebut.

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
1.3. Indeks Keciptakaryaan	Tujuan PD	0,969	0,487	0,971	Indeks	Kenaikan disebabkan peningkatan realisasi indikator penyusunnya yakniPersentase Penyediaan Rumah Layak Huni [Program] dan Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) [Sasaran Perangkat Daerah]. Kenaikan terjadi karena penyesuaian DO dan formulasi masing2 indikator tersebut.
2 Jumlah Unit Rumah Baru yang terbangun	-	2.093	1.200	2.250	Lokasi	Program nasional
3 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Sasaran Kota	80,3	80,71	80,71	Indeks	
3.1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Tujuan PD	81,44	78,43	81,44	Indeks	
3.2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Tujuan PD	80	80	80	Indeks	
3.3. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Tujuan PD	80,5	80,91	80,91	Indeks	
3.4. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	Tujuan PD	80,1	80,5	80,5	Indeks	
4 Indeks Kesejahteraan Sosial	Sasaran Kota & Tujuan PD	62,4	58,1	62,4	Indeks	
5 Jumlah Sekolah Rakyat	-	1	2	2	Unit	
6 Persentase Siswa dan Santri yang Mendapatkan Bantuan Makanan Bergizi	-	22,18	4,94	22,27	%	
7 Persentase Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang Memenuhi SNP Sarpras	-	75,99	92,82	92,82	%	
8 Persentase Madrasah, Satuan Pendidikan Umum dan Satuan Pendidikan Keagamaan yang Memenuhi SNP Sarpras	-	89,52	81,74	89,61	%	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
9	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	Program PD	100,17	98,7	99,3	%	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1	Skor Predikat Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA)	Sasaran Kota	356.44**	361	361	Skor	
1.1.	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Tujuan PD	896	897	897	Nilai	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Sasaran Kota	0.151 (lower is better)	0,119	0,119	Indeks	
2.1.	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Tujuan PD	911	912	912	Nilai	
3	Persentase Ibu Hamil dan Menyusui yang Mendapatkan Bantuan Makanan Bergizi	-	76,42	16,57	76,45	%	
4	Persentase Anak Balita yang Mendapatkan Bantuan Makanan Bergizi	-	14,35	7,2	14,39	%	
5	Jumlah pengelolaan cadangan pangan beras	-	155,56	157,47	157,47	Ton	
6	Indeks Tata Kelola Pengadaan Lahan	Tujuan PD	0,783	0,082	0,876	indeks	
7	Cakupan layanan pencatatan sipil	Tujuan PD	99,56	100	100	%	
8	Cakupan layanan pendaftaran kependudukan	Tujuan PD	43,87	50	50	%	
9	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Tujuan PD	71,6	65,9	71,7	Indeks	
10	Indeks Penyelenggaraan Perhubungan	Tujuan PD	0,713	0,726	0,726	Indeks	
11	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintahan Digital	Sasaran Kota & Tujuan PD	4,78	1,83	1,83	Indeks	adanya penyesuaian indikator penyusun SPBE menjadi Pemdi
12	Jumlah koperasi merah putih	-	153	153	153	Koperasi	program nasional

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
13	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	Tujuan PD	6,49	6,3	6,3	%	
14	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Sasaran PD	43,6	43,33	44,26	Triliyun Rupiah	menyesuaikan peningkatan investasi nasional
15	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Tujuan PD	2,98	3,02	3,02	Poin	
16	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Tujuan PD	69,61	79	79	%	
17	Persentase arsip daerah yang siap dimanfaatkan oleh stakeholder	Tujuan PD	53,36	54,36	54,36	%	
Layanan Urusan Pilihan							
1	Hasil produksi sektor pertanian	Tujuan PD	20.267,71	18.609,93	18.609,93	ton	Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 500.6.4.1/11979/436.7.9/2026, luas lahan sawah Kota Surabaya menurun dari 626,15 ha menjadi 494,96 ha akibat alih fungsi lahan dan pengembangan kawasan, terutama di Kecamatan Lakarsantri, Sambikerep, dan Wiyung. Dengan keterbatasan potensi peningkatan produksi, target dipertahankan melalui pengembangan urban farming, pemanfaatan lahan pekarangan dan nonproduktif, penyediaan sarana pertanian, serta penerapan teknologi budidaya yang efisien dan adaptif untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.
2	Hasil Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan	Tujuan PD	19.121,9	19.298,97	19.298,97	ton	Peningkatan target didukung melalui penerapan teknologi budidaya yang efektif, mitigasi dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, serta penyediaan sarana dan prasarana perikanan. Selain itu, pembuatan pakan pelet mandiri didorong untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan produksi perikanan budidaya.
Penunjang Urusan							
1	Indeks Kualitas Perencanaan	Tujuan PD	97	97	97	Indeks	
2	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Sasaran Kota	72,79	81,78	81,78	Indeks	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
	2.1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Tujuan PD	WTP	WTP	WTP	Nilai	
	2.2.	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Daerah	Tujuan PD	69,53	60,38	64,27	%	adanya pinjaman daerah pada tahun 2026 dan 2027 sehingga rasio PAD terhadap APBD mengalami penyesuaian
	2.3.	Persentase kontribusi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap APBD Daerah	Tujuan PD	31,25	25,98	21,17	%	adanya pinjaman daerah pada tahun 2026 dan 2027 sehingga rasio pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap APBD mengalami penyesuaian
3		Indeks Sistem Merit	Sasaran Kota	31,25	28,49	28,49	%	
	3.1.	Nilai Maturitas penyelenggaraan sistem merit	Tujuan PD	0,72	0,82	0,82	nilai	
4		Nilai SAKIP Kota Surabaya	Sasaran Kota & Tujuan PD	91,83	90,39	91,85	Nilai	
5		Indeks Pelayanan Publik	Sasaran Kota & Tujuan PD	4,84	4,61	4,85	Indeks	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Sasaran Kota & Tujuan PD	98,06	97,25	98,08	%	
7		Indeks Reformasi Hukum	Program PD	97,62	97,2	97,2	nilai	
8		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Tujuan PD	80	80	80	%	
9		Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Sasaran Kota & Tujuan PD	74,84	78,4	78,4	Nilai	
	9.1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tujuan PD	3,07	3,6	3,35	Nilai	
10		Indeks Wawasan Kebangsaan serta Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Tujuan PD	3,48	3,49	3,49	Nilai	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI							
A	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**							

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
1	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun	Program PD	88,96	91.88	91.88	%	
2	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	Program PD	99,55	99.93	99.93	%	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Program PD	100	100	100	%	
4	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Program PD	78,63	79.04	79.04	%	
5	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Program PD	87,32	87.82	87.82	%	
6	Iklim Inklusivitas SD	Program PD	59,56	66.07	66.07	Nilai	
7	Iklim Inklusivitas SMP	Program PD	65,15	68.21	68.21	Nilai	
8	Iklim Keamanan SD	Program PD	75,45	78.8	78.8	Nilai	
9	Iklim Keamanan SMP	Program PD	74,87	77.58	77.58	Nilai	
10	Iklim Kebhinekaan SD	Program PD	69,84	77.77	77.77	Nilai	
11	Iklim Kebhinekaan SMP	Program PD	71,04	75.71	75.71	Nilai	
B	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**						
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Sasaran PD	27,89	30,18	27,70		
2	Angka Kematian Balita	Sasaran PD	4,85	4,82	4,82		
3	Insidensi Tuberkulosis	Sasaran PD	353	410	322		
4	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Program PD	90,8	90.9	90.9		
5	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Program PD	50	65	65		
6	Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Program PD	100	100	100		
7	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Kegiatan PD	100	100	100		

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Kegiatan PD	100	100	100		
9	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar	Kegiatan PD	100	100	100		
10	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	Kegiatan PD	100	100	100	%	
11	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	Kegiatan PD	100	100	100	%	
12	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kegiatan PD	100	100	100	%	
13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	Kegiatan PD	100	100	100	%	
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kegiatan PD	100	100	100	%	
15	Persentase Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Kegiatan PD	100	100	100	%	
16	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	Kegiatan PD	100	100	100	%	
17	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Kegiatan PD	100	100	100	%	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
18	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Kegiatan PD	100	100	100	%	
C	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
1	Persentase penurunan luas genangan	Sasaran PD	27.81	38.79	38.79	%	
2	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sasaran PD	100	100	100	%	
3	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan yang layak dan aman	Program PD	0	3	3	%	
4	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Program PD	2,3	1	2,4	%	
5	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Program PD	100	100	100	%	
6	Tingkat kemantapan jalan	Program PD	99.23	99.24	99.24	%	
7	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkompeten	Program PD	100	100	100	%	
8	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	Program PD	72,28	75	75	%	
D	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**						

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
1	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Sasaran PD	82,07	84.49	84.49	%	
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program PD	100	100	100	%	
3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Program PD	100	100	100	%	
4	Persentase penyediaan rumah layak huni	Program PD	135,25	100	100	%	
					0		
E	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**						
1	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Sasaran PD	100	100	100	%	
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program PD	100	100	100	%	
3	Persentase PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	Program PD	100	100	100	%	
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap kurang dari 15 menit	Program PD	100	100	100	%	
5	Persentase kegiatan pembinaan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan PD	100	100	100	%	
6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kegiatan PD	100	100	100	%	

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
7	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan PD	0.126	0.115	0,126	%	
8	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Sub Kegiatan PD	23.577	17.500	20.000	Orang	disesuaikan dengan realisasi sampai dengan TW II Tahun 2026
9	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Sub Kegiatan PD	0	1	1	Dokumen	
10	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Sub Kegiatan PD	0	1	1	Dokumen	
11	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Sub Kegiatan PD	5	5	3.517	Unit	Adanya perbaikan cara penghitungan sesuai dengan jumlah unit peralatan yang diadakan
12	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Sub Kegiatan PD	12	12	12	Dokumen	
F	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**						
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program PD	100	100	100	%	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program PD	100	100	100	%	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program PD	100	100	100	%	
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program PD	100	100	100	%	
5	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	Program PD	100	100	100	%	
6	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program PD	97,92	100	100	%	
7	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	Program PD	100	100	100	%	
8	Persentase Korban Bencana Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program PD	100	100	100	%	
9	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di UPTD Griya Wreda dan Liponsos Kusta Babat Jerawat	Kegiatan PD	100	100	100	%	
10	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	Kegiatan PD	100	100	100	%	
11	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di UPTD Liponsos Keputih	Kegiatan PD	100	100	100	%	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
12	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Kegiatan PD	93	100	100	%	
13	Jumlah PSKS yang memenuhi standar kompetensi	Kegiatan PD	0	299	299	Orang	
14	Pesentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Kegiatan PD	77	79	79	%	
15	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Sub Kegiatan PD	71.833	65.578	65.578	Orang	
G	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**						
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Sasaran PD	15.17	15.56	15.56	%	
2	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap	Sasaran PD	23.02	50	50	%	
3	Persentase peserta pelatihan dan sertifikasi yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja	Program PD	41	41.5	41.5	%	
4	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Program PD	32,18	32.96	32.96	%	
H	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
1	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Sasaran PD	100	100	100	%	
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Sasaran PD	100	100	100	%	
3	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program PD	91	100	100	%	
I	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**						
1	Skor Pola Pangan Harapan	Program PD	96,31	95.35	96,31	Nilai	
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program PD	0	0	0	%	
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program PD	99,36	97.91	99,36	%	
J	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**						
1	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penataan Aset dan Akses Reforma	Program PD	0	100	100	%	
	Sekretariat daerah						
1	Presentase pelaksanaan Kegiatan Pendataan Pilar Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Program PD	100	100	100	%	
	Keuangan						
1	Persentase register tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	Program PD	14,98	16.01	16.01	%	
K	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**						
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Sasaran PD	91	92	92	Poin	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Program PD	61,76	60	62	%	
L	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
1	Persentase dokumen pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	Program PD	100	95	100	%	
2	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	Program PD	100	95	100	%	
3	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Sub Kegiatan PD	2	2	2	Dokumen	
M	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
1	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Program PD	11,9	5.8	10,3	kelahiran hidup per 1000 perempuan	
2	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Program PD	1.68	1.68	1.68	%	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Program PD	13,2	14.5	13	%	
4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Kegiatan PD	82,5	84.02	84,02	%	
N	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**						

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
1	Persentase angkutan umum (trunk dan feeder) dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan dan tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Program PD	100	100	100	%	
2	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Program PD	21:21	21:21	21:21	Rasio	
3	Persentase Jalan Kota yang terpenuhi dan terpasang kelengkapannya	Kegiatan PD	100	100	100	%	
O	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**						
1	Rata-rata nilai kematangan indikator SPBE/Pemerintahan Digital	Sasaran PD	4.78	1.68	1,68	Nilai	penyesuaian dari SPBE menjadi Pemdi
2	Indeks Keterbukaan Informasi	Sasaran PD	99.9	90.5	93	Indeks	Indikator self assesment yang ditetapkan setiap tahunnya mengalami penyesuaian
3	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Program PD	5	1	1	Level	Penyesuaian parameter dari SPBE ke Pemdi
4	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Program PD	0	71	71		
5	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Sub Kegiatan PD	58	58	62		
6	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Sub Kegiatan PD	58	58	62		

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
7	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan PD	10	10	10		Indikator ini mulai tahun 2027 mengalami penghapusan karena pemutakhiran nomenklatur diganti dengan indikator kegiatan yaitu "Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)"
P	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**						
1	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Koperasi Aktif	Sasaran PD	0,3	0.3	0.3	%	
2	Pertumbuhan Wirausaha	Program PD	0	1	1	%	
3	Persentase Usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Kegiatan PD	0	64.92	64.92	%	
Q	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**						
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program PD	102,1	100	100		
R	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan**						
1	Indeks Pembangunan Olahraga	Sasaran PD	0,427	0.432	0.432	Indeks	
2	Persentase Pemuda Berprestasi	Sasaran PD	48	50	50	%	
3	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Program PD	5	7	7	%	
4	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Program PD	7	9	9	%	
S	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**						
1	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	Sasaran PD	100	100	100	%	
T	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**						

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
1	Persentase potensi serangan terhadap sistem keamanan informasi yang diantisipasi	Sasaran PD	100	100	100	%	
U	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**						
1	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Sasaran PD	100	100	100	%	
2	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan sesuai dengan kaidahnya	Sasaran PD	93.98	92.04	93,98	%	
3	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	Program PD	90	100	100		
V	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**						
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Sasaran PD	79,42	100,00	81,42	Nilai	Penyesuaian formulasi perhitungan sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025.
W	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**						
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Sasaran PD	99,29	92,20	94,30	Nilai	perubahan metode perhitungan sesuai dengan Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan atas Penyelenggaraan Kearsipan
X	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**						
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program PD	2	3	3		
2	Persentase produk kreatif yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual	Program PD	0	100	100		
Y	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**						
1	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Program PD	100	100	100	%	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
Z	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**						
1	Persentase Pelaku usaha yang menggunakan Alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah / legal dalam transaksi perdagangan	Sasaran PD	96.43	85	96,5	%	
AA	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**						
1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Sasaran PD	1,59	1.55	1,59	Rp Triliun	
2	Kontribusi Ekspor Produk Industri Non Migas terhadap total ekspor	Sasaran PD	64,5	62.9	64,5	%	
3	Persentase Industri Kecil Menengah yang patuh	Program PD	23	25	25	%	
4	Persentase kepatuhan penyampaian data industri kecil menengah	Program PD	76	81	81	%	
AB	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**						
1	Produksi Perikanan Tangkap	Sasaran PD	9.142,40	9,434.56	9,434.56	ton	
2	Produksi Perikanan Budidaya	Sasaran PD	9.979,50	9,864.41	9.979	ton	
AC	**Perencanaan**						
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung oleh Program Daerah	Sasaran PD	100	100	100	%	
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program PD	100	100	100	%	
AD	**Keuangan**						
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Sasaran PD	68,99	69.91	69.91	%	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
2	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program PD	70	70	70	%	
3	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program PD	12,68	2.56	2.56	%	
4	Persentase Penurunan SILPA	Program PD	-120,48	6.68	6.68	%	
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Kegiatan PD	40	40	40	%	
6	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Kegiatan PD	30	30	30	%	
AE	**Kepegawaian**						
1	Indeks Kinerja Pegawai	Sasaran PD	75	75	75,3	%	
AF	**Pendidikan dan Pelatihan**						
1	Persentase pegawai yang sesuai standar kompetensi jabatan	Sasaran PD	58	70	70	%	
2	Persentase pegawai yang memenuhi standar 20 jam pelatihan (20JP)	Sasaran PD	52	60	60	%	
AG	**Penelitian dan Pengembangan**						
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Program PD	0	100	100	%	
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan/atau Badan Usaha di Daerah	Program PD	0	100	100	%	
AH	**Sekretariat Daerah**						
1	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Program PD	15,54	17.14	17.14	Nilai	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Level Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Perubahan Target 2026	Satuan	Keterangan
2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Program PD	28,12	28.75	28.75	Nilai	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Program PD	40	40	40	Nilai	
AI	**Sekretariat DPRD**						
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Sasaran PD	100	100	100	%	
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Program PD	52,5	52.5	52,5	%	
AJ	**Fungsi Pengawasan**						
1	Persentase Hasil Pengawasan BPK-RI yang ditindaklanjuti dan diverifikasi oleh BPK-RI dengan status sesuai	Sasaran PD	98,65	98,40	98,40	%	
2	Nilai Kapabilitas APIP	Sasaran PD	2,56	3,41	3,08	Nilai	

Sumber: RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 dan Laporan Evaluasi RKPD TW IV Tahun 2025, 2026 diolah

Keterangan :
***) Menggunakan nilai indikator terakhir yang tersedia dan telah dirilis secara resmi oleh instansi/lembaga pengampu data*
(a) : Instrumen/formulasi penilaian mengalami perubahan mulai tahun 2026 sehingga target disesuaikan.

4.2.4 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/3714/KSP.00/70-74/06/2025 tanggal 5 Juni 2025 perihal Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 bahwa :
   a. Usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat, anggota DPRD, dan Perangkat Daerah disampaikan secara transparan, sesuai tahapan waktu, tidak ada benturan kepentingan maupun intervensi pihak tertentu, dan penetapannya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
   b. Tidak memaksakan pelaksanaan program apabila tidak sesuai dengan RPJMD, menghindari praktik penggelembungan anggaran (penguatan aspek regulasi dan penyusunan standar harga), penyalahgunaan anggaran, serta menghindari pengaturan alokasi anggaran per anggota DPRD dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat;
   c. Setiap proses dan hasil perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan APBD harus terdokumentasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI).
2. Hasil koordinasi Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi pada kegiatan Koordinasi Terkait Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah Sektor Tertentu dan Melalui IPKD MCSP tanggal 11 November 2025 di Jakarta yang ditindaklanjuti berupa koordinasi APIP Kota Surabaya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Surabaya, Sekretariat DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya.

maka usulan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2026 dilakukan *refocusing* untuk kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Surabaya.

4.2.5 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan menjaga mutu pelayanan dasar melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pembentukan tim penerapan Standar Pelayanan Minimal melalui Keputusan Wali kota Surabaya Nomor 188.45/169/436.1.2/2022 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Surabaya. Tim dimaksud memiliki tugas salah satunya yaitu menyusun rencana aksi penerapan SPM serta melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di Kota Surabaya. Selain itu, SPM juga diintegrasikan sejak penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, baik di tingkat kota maupun Perangkat Daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan pemenuhan belanja wajib dan pemenuhan alokasi belanja minimal pada urusan wajib pelayanan dasar (*mandatory spending*) yang meningkat di bandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, maka diharapkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar yang berkualitas di Kota Surabaya dapat terpenuhi. Dukungan terhadap pencapaian SPM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.7
Standar Pelayanan Minimal pada RKPD Tahun 2026

No	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET		SATUAN	ANGGARAN	
								APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		APBD 2026	Perubahan RKPD 2026
SPM Bidang Pendidikan												
1	Angka Partisipasi Sekolah	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17	17	Unit	37.568.548.244	27.910.948.997
2					1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	155	155	Unit	13.931.240.896	16.921.098.811
3					1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	32513	30034	Peserta Didik	193.091.077.482	190.322.816.682
4				1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	4	Unit	71.693.979.346	72.161.979.346
5					1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18	18	Unit	10.182.318.574	12.921.010.374
6					1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16362	16362	Peserta Didik	129.183.654.553	127.551.509.353
7				1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	219	219	Peserta Didik	8.505.901.536	7.872.652.136
8					1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	3	Unit	2.482.124.131	2.482.124.131

No	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET		SATUAN	ANGGARAN	
								APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		APBD 2026	Perubahan RKPD 2026
9					1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	90	90	Peserta Didik	6.823.033.081	5.452.938.953
10				1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40	40	Satuan Pendidikan	671.048.800	641.948.400
11					1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	40	40	Peserta Didik	99.960.612.403	97.986.330.240
12	Literasi dan Numerasi	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	51050	51050	Peserta Didik	1.105.309.800	1.105.309.800
13					1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135	3135	Orang	446.565.662	446.565.662
14					1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	652	652	Satuan Pendidikan	158.840.000	158.840.000
15					1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	1	Dokumen	63.254.216	63.254.216
16					1.01.02.2.01.0050 -	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi	Jumlah Satuan Pendidikan yang	652	652	Satuan Pendidikan	300.080.000	342.909.000

No	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET		SATUAN	ANGGARAN	
								APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		APBD 2026	Perubahan RKPD 2026
					Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Peserta Didik	Menyelenggarakan Proses Belajar					
17				1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013	1013	Orang	404.711.000	404.711.000
18					1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	330	330	Satuan Pendidikan	191.400.000	191.400.000
19					1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	34579	34579	Satuan Pendidikan	310.287.000	310.287.000
20					1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	450	450	Orang	27.092.880	27.092.880
21			1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	2	Dokumen	540.979.843	6.284.417.923
22					1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian	1	1	Laporan	39.371.880.000	41.567.880.000

No	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET		SATUAN	ANGGARAN	
								APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		APBD 2026	Perubahan RKPD 2026
					Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
23	Kekhususan PAUD	1.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2600	2600	Orang	4.991.750.000	3.771.750.000
24					1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355	2355	Satuan Pendidikan	989.086.560	1.622.586.560
SPM Bidang Kesehatan												
25	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.02.0.00.0.00.0 1.0046 - Puskesmas Putat Jaya	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73328	68478	Orang	4.496.549.200	3.846.581.200
26	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36468	34049	Orang	117.700.000	117.700.000
27	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	35139	33153	Orang	6.671.701.147	6.604.023.827

No	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET		SATUAN	ANGGARAN	
								APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		APBD 2026	Perubahan RKPD 2026
			PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Standar					
28	Pelayanan Kesehatan Balita	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	181238	130418	Orang	2.458.468.489	2.458.468.489
29	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1.02.0.00.0.00.01.0008 - Puskesmas Benowo	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	452473	384510	Orang	938.216.100	255.390.000
30	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1926446	1928295	Orang	1.476.753.124	1.476.753.124
31	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	472640	413791	Orang	37.200.000	37.200.000
32	Pelayanan Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas	1.02.02 -	1.02.02.2.02 - Penyediaan	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan	Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Penderita Hipertensi yang	246184	248261	Orang	168.119.600	168.119.600

No	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET		SATUAN	ANGGARAN	
								APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		APBD 2026	Perubahan RKPD 2026
	Penderita Hipertensi	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					
33	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	111482	113587	Orang	84.810.400	84.810.400
34	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1.02.0.00.0.00.01.0007 - Puskesmas Banyu Urip	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11646	11104	Orang	695.264.135	690.044.135
35	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	1.02.0.00.0.00.01.0039 - Puskesmas Ngagel Rejo	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	133478	123248	Orang	13.225.383.600	13.808.000.600
36	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	49728	49728	Orang	738.647.800	1.562.267.300

No	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET		SATUAN	ANGGARAN	
								APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		APBD 2026	Perubahan RKPD 2026
	manusia (Human Immunodeficiency Virus)											
SPM Bidang Pekerjaan Umum												
37	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2	2	Dokumen	499.748.050	499.748.050
38	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5900	13920	Unit	10.904.074.421	11.670.896.619
SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat												
39	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/ Kota	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12	12	Dokumen	147.489.600	147.489.600
40					1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian	12	12	Laporan	351.937.822	366.016.822

No	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET		SATUAN	ANGGARAN	
								APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		APBD 2026	Perubahan RKPD 2026
					kepala daerah		pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani					
41					1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	820	820	Orang	1.114.883.070	1.114.883.070
42				1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12	12	Laporan	3.956.723.671	3.866.478.871
43				1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4	4	Laporan	136.900.500	136.900.500
44	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1662	3517	Unit	849.825.822	1.903.953.306
45					1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	1	Dokumen	143.587.500	143.587.500
46	Pelayanan penyelamatan dan	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penanggulangan	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULA	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan,	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan,	17500	20000	Orang	22.412.803.514	22.967.018.706

No	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET		SATUAN	ANGGARAN	
								APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		APBD 2026	Perubahan RKPD 2026
	evakuasi korban bencana	Bencana Daerah	NGAN BENCANA	dan Evakuasi Korban Bencana	Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana					
47					1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000	1000	Orang	2.631.050.420	2.571.041.300
48	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	2	Laporan	4.738.535.172	3.452.656.600
49					1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2	2	Dokumen	8.698.299.792	9.064.103.287
50				1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1050	1900	Orang	866.469.217	879.565.085
SPM Bidang Sosial												
51	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandan	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	795	970	Orang	160.595.400	160.595.400

No	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET		SATUAN	ANGGARAN	
								APBD 2026	Perubahan RKPD 2026		APBD 2026	Perubahan RKPD 2026
	g Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Keluarga	Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
52		1.06.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Kampung Anak Negeri	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	2.326	2441	Orang	42.969.129.101	36.058.663.677

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen dalam pencapaian target SPM pada Tahun 2026 melalui beberapa strategi sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan sehingga seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan;
2. Penguatan kualitas pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga SMP/sederajat sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, termasuk di dalamnya penyediaan tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi;
3. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka pemerataan layanan cakupan kesehatan tingkat dasar guna meningkatkan Angka Harapan Hidup;
4. Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, layanan kesehatan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi dan balita gizi buruk, layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, serta optimalisasi fungsi Posyandu 6 SPM di tingkat RW;
5. Penyediaan akses sanitasi di kawasan permukiman melalui pengelolaan air limbah domestik;
6. Penyediaan layanan air bersih dan air minum layak di kawasan permukiman melalui kerjasama dengan Perumda Air Minum Surya Sembada;
7. Optimalisasi penegakan peraturan daerah, penanganan unjuk rasa, pelaksanaan patroli wilayah serta operasi penertiban;
8. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM satlinmas dan Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
9. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran di wilayah pemukiman dan area yang memiliki kepadatan aktivitas penduduk;
10. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pemadam kebakaran dalam rangka penanganan waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit;
11. Peningkatan kualitas pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup;
12. Optimalisasi peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra strategis dalam penanganan PPKS.

4.2.6 Dukungan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam pembangunan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026, Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk mendukung pencapaian target TPB dengan menyelaraskan indikator utama pembangunan daerah Kota Surabaya di Tahun 2026 dengan Indikator Capaian TPB beserta strategi dan program yang akan dilaksanakan di Tahun 2026, yang dapat dilihat pada tabel IV.7 di bawah ini.

Tabel IV.8
Penyelarasan Indikator Capaian TPB dengan Program RKPD Tahun 2026

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
Angka Harapan Hidup	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	1. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan: Implementasi teknologi pengolahan air, peningkatan efisiensi penggunaan air, dan perlindungan sumber daya air. 2. Pengembangan Infrastruktur Air: Investasi dalam infrastruktur air, seperti pembangunan reservoir dan jaringan distribusi air bersih. 3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Kampanye kesadaran untuk penggunaan air yang efisien dan upaya konservasi air. 4. Kebijakan dan Regulasi: Pembuatan kebijakan yang mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan dan adil. 1. Peningkatan Produksi Pangan Lokal • Pengembangan Pertanian Perkotaan: Promosikan pertanian perkotaan dengan memanfaatkan lahan kosong dan teknologi pertanian modern seperti hidroponik dan akuaponik untuk meningkatkan produksi pangan lokal. • Dukungan untuk Petani: Berikan insentif dan bantuan teknis kepada petani lokal untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi pangan. • Penggunaan Teknologi Pertanian: Adopsi teknologi modern dalam pertanian seperti penggunaan benih unggul, irigasi cerdas, dan pertanian presisi untuk meningkatkan hasil panen. 2. Penguatan Jaringan Distribusi dan Logistik	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 5. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) 8. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 9. Program Penanganan Kerawanan Pangan

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. 2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. 3.8.1 Cakupan pelayanan kesehatan essensial. 3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan. 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per	• Penguatan Infrastruktur Logistik: Investasi dalam infrastruktur logistik untuk memastikan distribusi pangan yang efisien dan tepat waktu ke seluruh kecamatan. • Pemantauan Ketersediaan Pangan: Implementasi sistem pemantauan ketersediaan dan harga pangan secara real-time untuk mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan pangan dengan cepat. 3. Diversifikasi Sumber Pangan • Promosi Konsumsi Pangan Alternatif: Edukasi masyarakat tentang manfaat dan cara mengonsumsi sumber pangan alternatif selain beras, seperti umbi- umbian, jagung, dan lainya. • Pengembangan Produk Pangan Lokal: Dorong pengembangan dan konsumsi produk pangan lokal yang beragam untuk mengurangi ketergantungan pada beras. 4. Peningkatan Ketahanan Pangan • Program Lumbung Pangan: Mengembangkan dan memperkuat lumbung pangan komunitas untuk menyimpan cadangan pangan yang dapat digunakan saat terjadi kekurangan. • Sistem Perlindungan Sosial: Program bantuan sosial dan subsidi pangan untuk kelompok rentan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai. 5. Kolaborasi dan Kemitraan • Kemitraan dengan Sektor Swasta: Melibatkan sektor swasta dalam upaya peningkatan produksi dan distribusi pangan melalui investasi dan	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	1000 penduduk. 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 3.b.1 Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan. 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita. 8.1.1.(a) PDB per kapita. 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja. 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 10.1.1* Koefisien Gini. 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). • Kerjasama Antar Daerah: Bangun kerjasama dengan daerah lain yang memiliki surplus pangan untuk mengatasi defisit pangan di Surabaya. 1. Pengembangan Transportasi Umum Terintegrasi Pengembangan transportasi umum terintegrasi bertujuan untuk mengurangi polusi udara dari sektor transportasi, sehingga hal tersebut dapat secara signifikan meningkatkan indeks kualitas udara. 2. Penyediaan RTH Perkotaan Penyediaan RTH Perkotaan berupa taman, median jalan, RTH vertikal, dan RTH bangunan Gedung (green building), hal ini untuk menyerap polutan udara. 3. Kolaborasi Pemerintah dengan Badan Usaha Kolaborasi pemerintah dan swasta dalam rangka pengurangan polutan udara melalui kemitraan pembangunan infrastruktur hijau, penerapan kebijakan green and low carbon city, dan upaya pengurangan polutan udara lainnya. 4. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kualitas Udara Monitoring dan evaluasi indekas kualitas udara dengan melakukan pengukuran indeks kualitas udara rutin dan uji emisi kendaraan secara berkala. 5. Melakukan Upaya Daur Ulang Sampah Melakukan upaya daur ulang sampah di tiap tingkatan untuk mengurangi emisi akibat pembakaran sampah. 6. Koordinasi Antar Instansi Koordinasi antar instansi baik pemerintah dan swasta untuk peningkatan indeks kualitas udara.	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		7. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran penting masyarakat dalam meningkatkan indeks kualitas udara seperti menanam vegetasi di lingkungan rumah, penggunaan transportasi umum, penggunaan energi yang ramah lingkungan, dsb.	
		1. Restorasi Kualitas Air Sungai Restorasi kualitas air sungai melalui metode peningkatan kualitas air sungai berbasis teknologi, ekologi, ekologi engineering, dan sosial ekologi engineering. 2. Perhitungan Daya Tampung Pencemaran Sungai Perlu dilakukan perhitungan daya tamping beban pencemaran sungai berdasarkan peruntukan air sungai per segmen sehingga dapat ditentukan beban pencemaran maksimum yang diperbolehkan bagi masing-masing sumber pencemar. Daya tamping sungai dapat digunakan sebagai dasar penetapan izin lokasi dan izin lingkunagn bagi usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari air sungai. 3. Rencana Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Daerah Aliran Sungai Penyusunan rencana induk pengelolaan sumber daya air berbasis DAS digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan secara terpadu dan terkoordinir khususnya terkait pengelolaan sumber daya air. 4. Pemantauan Kualitas Limbah Air Sungai Pemantauan berkala kualitas limbah dan air sungai untuk menentukan arah kebijakan pengendaliaan	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		dan penanggulangan pencemaran air sungai. 5. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Peningkatan koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air. Peningkatan koordinasi antar instansi dapat dilakukan melalui penerapan prinsip pengendalian pencemaran air terhadap rencana usaha/kegiatan yang mengajukan perizinan. 6. Pengetatan Perijinan Pembuangan Air Limbah Pengetatan perijinan pembuangan air limbah melalui penetapan kriteria baku lingkungan dan pengenaan pajak pembuangan limbah terhadap jenis limbah tertentu. 7. Penerapan Kuota Air Limbah Industri dan Usaha Penerapan kuota pembuangan air limbah industry berdasarkan lokasi izin usaha dan daya tampung pencemaran sungai. 8. Penetapan Kelas Air Sungai Penetapan kelas air sungai dengan tujuan penentuan aktivitas yang sesuai dengan kualitas dan daya tampung pencemaran sungai. 9. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan indeks kualitas air melalui upaya sederhana seperti penggunaan air dengan bijak, tidak mencemari sungai dengan polutan/limbah rumah tangga, penggunaan detergen ramah lingkungan, dsb.	
		1. Pengembangan Sistem Trasnportasi Umum Yang Terintegrasi Pegurangan penggunaan kendaraan bermotor	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		dengan menciptakan sistem transportasi umum yang terintegrasi serta jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman untuk mendukung pengembangan sistem transportasi umum. 2. Penyediaan RTH Yang Cukup Penyediaan RTH di lingkungan perumahan dan permukiman untuk mengurangi emisi gas karbon. 3. Pengembangan Kawasan TOD Pengembangan kawasan TOD untuk mempermudah akses kawasan terhadap transportasi umum yang berkelanjutan. 4. Penguatan Kerjasama Antar Pemerintah/Swasta Penguatan kerjasama antar pemerintah/swasta dalam mendukung pemenuhan RTH dan penyediaan transportasi umum, baik antar pemerintah daerah kota dengan pemerintah kabupaten/kota di sekitarnya, pemerintah daerah kota dengan pemerintah pusat/pemerintah provinsi serta pemerintah daerah kota dengan pihak swasta. 5. Pengembangan Konsep Green City dan Low Carbon Pengembangan kota melalui perencanaan pembangunan terintegrasi sehingga pengembangan kota dapat saling terintegrasi antara konsep green city dan low carbon.	
		1. Pengembangan Sistem Trasnportasi Umum Yang Terintegrasi Pegurangan penggunaan kendaraan bermotor dengan menciptakan sistem transportasi umum yang terintegrasi serta jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman untuk mendukung pengembangan	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		sistem transportasi umum. 2. Penyediaan RTH Yang Cukup Penyediaan RTH di lingkungan perumahan dan permukiman untuk mengurangi emisi gas karbon. 3. Pengembangan Kawasan TOD Pengembangan kawasan TOD untuk mempermudah akses kawasan terhadap transportasi umum yang berkelanjutan. 4. Penguatan Kerjasama Antar Pemerintah/Swasta Penguatan kerjasama antar pemerintah/swasta dalam mendukung pemenuhan RTH dan penyediaan transportasi umum, baik antar pemerintah daerah kota dengan pemerintah kabupaten/kota di sekitarnya, pemerintah daerah kota dengan pemerintah pusat/pemerintah provinsi serta pemerintah daerah kota dengan pihak swasta. 5. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara Secara Rutin Melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas udara untuk perumusan kebijakan. 6. Pengembangan Konsep Green City dan Low Carbon Pengembangan kota melalui perencanaan pembangunan terintegrasi sehingga pengembangan kota dapat saling terintegrasi antara konsep green city dan low carbon.	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	1. Pengaturan Kebijakan: Menetapkan peraturan dan kebijakan yang ketat terkait penggunaan lahan, termasuk peraturan zonasi, perizinan, dan insentif-disinsentif untuk praktik-praktik ramah lingkungan. 2. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Melibatkan	1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2. PROGRAM PENGELOLAAN

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan insentif bagi praktik-praktik berkelanjutan seperti agroforestri, pelestarian flora dan fauna, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. 3. Pengembangan Alternatif Ekonomi: Membantu komunitas lokal untuk mengembangkan sumber penghidupan alternatif yang tidak merusak ekosistem, seperti pariwisata berkelanjutan atau produksi pertanian organik. 4. Pemantauan dan Penegakan Hukum: Menerapkan sistem pemantauan yang efektif dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati, termasuk sanksi yang tegas bagi pelanggar. 5. Pendidikan dan Kampanye Kesadaran: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi ekosistem dan dampak negatif dari alih fungsi lahan, pembuangan sampah sembarangan, dan penggunaan alat dan bahan berbahaya untuk pertanian & perikanan, serta mendorong partisipasi dalam upaya konservasi. 6. Kolaborasi Antarstakeholder: Mendorong kerjasama antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk merancang dan melaksanakan program-program konservasi ekosistem dan perlindungan terhadap kehidupan flora dan fauna yang holistik dan berkelanjutan.	KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 3. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 5. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	1. Pengembangan Transportasi Umum Terintegrasi Pengembangan transportasi umum terintegrasi bertujuan untuk mengurangi polusi udara dari sektor	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	transportasi, sehingga hal tersebut dapat secara signifikan meningkatkan indeks kualitas udara. 2. Penyediaan RTH Perkotaan Penyediaan RTH Perkotaan berupa taman, median jalan, RTH vertikal, dan RTH bangunan Gedung (green building), hal ini untuk menyerap polutan udara. 3. Kolaborasi Pemerintah dengan Badan Usaha Kolaborasi pemerintah dan swasta dalam rangka pengurangan polutan udara melalui kemitraan pembangunan infrastruktur hijau, penerapan kebijakan green and low carbon city, dan upaya pengurangan polutan udara lainnya. 4. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kualitas Udara Monitoring dan evaluasi indekas kualitas udara dengan melakukan pengukuran indeks kualitas udara rutin dan uji emisi kendaraan secara berkala. 5. Melakukan Upaya Daur Ulang Sampah Melakukan upaya daur ulang sampah di tiap tingkatan untuk mengurangi emisi akibat pembakaran sampah. 6. Koordinasi Antar Instansi Koordinasi antar instansi baik pemerintah dan swasta untuk peningkatan indeks kualitas udara. 7. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran penting masyarakat dalam meningkatkan indeks kualitas udara seperti menanam vegetasi di lingkungan rumah, penggunaan transportasi umum, penggunaan energi yang ramah lingkungan, dsb.	
		1. Restorasi Kualitas Air Sungai Restorasi kualitas air	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		sungai melalui metode peningkatan kualitas air sungai berbasis teknologi, ekologi, ekologi engineering, dan sosial ekologi engineering. 2. Perhitungan Daya Tampung Pencemaran Sungai Perlu dilakukan perhitungan daya tamping beban pencemaran sungai berdasarkan peruntukan air sungai per segmen sehingga dapat ditentukan beban pencemaran maksimum yang diperbolehkan bagi masing-masing sumber pencemar. Daya tamping sungai dapat digunakan sebagai dasar penetapan izin lokasi dan izin lingkunagn bagi usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari air sungai. 3. Rencana Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Daerah Aliran Sungai Penyusunan rencana induk pengelolaan sumber daya air berbasis DAS digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan secara terpadu dan terkoordinir khususnya terkait pengelolaan sumber daya air. 4. Pemantauan Kualitas Limbah Air Sungai Pemantauan berkala kualitas limbah dan air sungai untuk menentukan arah kebijakan pengendaliaan dan penanggulangan pencemaran air sungai. 5. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Peningkatan koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air. Peningkatan koordinasi antar instansi dapat dilakukan melalui penerapan prinsip pengendalian pencemaran air terhadap rencana usaha/kegiatan yang mengajukan perizinan.	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		6. Pengetatan Perijinan Pembuangan Air Limbah Pengetatan perijinan pembuangan air limbah melalui penetapan kriteria baku lingkungan dan pengenaan pajak pembuangan limbah terhadap jenis limbah tertentu. 7. Penerapan Kuota Air Limbah Industri dan Usaha Penerapan kuota pembuangan air limbah industry berdasarkan lokasi izin usaha dan daya tampung pencemaran sungai. 8. Penetapan Kelas Air Sungai Penetapan kelas air sungai dengan tujuan penentuan aktivitas yang sesuai dengan kualitas dan daya tampung pencemaran sungai. 9. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan indeks kualitas air melalui upaya sederhana seperti penggunaan air dengan bijak, tidak mencemari sungai dengan polutan/limbah rumah tangga, penggunaan detergen ramah lingkungan, dsb.	
		1. Melakukan Reboisasi dan Pelestarian Kawasan Lindung Melakukan upaya reboisasi pada lahan kritis dan kurang bervegetasi di tanah aset pemerintah kota serta melakukan upaya pelestarian (khususnya reboisasi dan penataan) pada Kawasan lindung seperti sempadan sungai, sempadan pantai, Kawasan mangrove, pemakaman, dsb) **2.** Melakukan Upaya Pelestarian Flora dan Fauna Langka di Kota Surabaya Melakukan upaya pelestarian flora dan fauna langka	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		di Kota Surabaya dengan pelestarian habitat bagi flora dan fauna seperti Buaya Muara, Kucing Bakau, dsb) **3.** Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Khususnya Hutan Kota Pengadaan ruang terbuka hijau khususnya hutan kota di sekitar Kawasan budidaya padat untuk mendukung fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi. **4.** Memberlakukan AMDAL Pemberlakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) seperti pembangunan infrastruktur untuk mencegah kerusakan lingkungan dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. **5.** Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi Meningkatkan koordinasi antar instansi baik pemerintah dan swasta dalam rangka peningkatan indeks kualitas lahan. **6.** Meningkatan Kesadaran Masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan indeks kualitas lahan melalui upaya sederhana seperti penanaman vegetasi di lingkungan rumah, penerapan program pekerangan rumah lestari, penataan lingkungan dengan konsep penanaman vegetasi, dsb.	
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d)	**1.** Penguatan Tata Kelola dan Pembiayaan Program seperti USAID IUWASH Tangguh berupaya memperkuat tata kelola dan pembiayaan sektor WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) dan PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air), yang merupakan langkah penting untuk meningkatkan akses sanitasi.	1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3. PROGRAM PENGELOLAAN

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat 6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan IPLT 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	**2.** Meningkatkan Akses bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Fokus pada peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi yang aman dan berketahanan iklim bagi masyarakat berpenghasilan rendah di area perkotaan adalah prioritas **3.** Pengembangan Infrastruktur yang Sesuai Pengembangan infrastruktur sanitasi seperti Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. **4.** Perubahan Perilaku Masyarakat Peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung pencapaian akses sanitasi yang aman. **5.** Kerjasama dan Pendanaan Pengembangan kerjasama antar lembaga dan pola pendanaan yang inovatif juga menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat pembangunan sanitasi. **6.** Peningkatan Kapasitas Institusi Meningkatkan keterampilan dan kapasitas petugas di sektor WASH dan PSDA untuk mendukung layanan pengelolaan sanitasi yang efektif. **7.** Pemantauan kualitas lingkungan Melakukan pemantauan kualitas dan pengukuran air tanah dan permukaan untuk melihat Tingkat pencemaran. Hal ini untuk menilai Tingkat pencemaran akibat sampah dan sanitasi perkotaan. **8.** Implementasi SSK (Stategi Sanitasi Kota) Surabaya tahun 2022-2026	DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	1. Masterplan Persampahan Menyusun masterplan persampahan yang menjadi acuan pengelolaan sampah bagi berbagai komponen terkait. 2. Peningkatan Tata Kelola: Memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, memperkuat partisipasi publik serta produsen dalam implementasi bisnis hijau. 3. Menambah fasilitas pengolahan sampah menambah jumlah fasilitas persampahan meliputi TPST dan TPS3R untuk meningkatkan jumlah sampah yang dikelola per hari. 4. Pelibatan Masyarakat dan Swasta Mendorong keterlibatan masyarakat dan sektor swasta secara terpadu untuk mendukung keberhasilan pengelolaan sampah. Baik terlibat langsung seperti di bank sampah maupun dalam hal pendanaan melalui investasi bidang persampahan. 5. Insentif Pengelolaan Sampah Menerapkan insentif untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sampah, seperti pengurangan pajak atau subsidi untuk praktik daur ulang. 6. Edukasi masyarakat Mengubah mindset masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan melalui sosialisasi dan kampanye pengurangan sampah dari Tingkat rumah tangga. 7. Mengembangkan potensi ekonomi sirkular bidang persampahan dari lingkup rumah tangga.	1. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		8. Penegakan Hukum Memastikan regulasi terkait pengelolaan sampah dipatuhi dan ditegakkan oleh semua pihak	
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	1. Masterplan Persampahan: Menyusun masterplan persampahan yang menjadi acuan pengelolaan sampah bagi berbagai komponen terkait. 2. Peningkatan Tata Kelola: Memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, memperkuat partisipasi publik serta produsen dalam implementasi bisnis hijau. 3. Menambah fasilitas pengolahan sampah menambah jumlah fasilitas persampahan meliputi TPST dan TPS3R untuk meningkatkan jumlah sampah yang dikelola per hari. 4. Pelibatan Masyarakat dan Swasta: Mendorong keterlibatan masyarakat dan sektor swasta secara terpadu untuk mendukung keberhasilan pengelolaan sampah. Baik terlibat langsung seperti di bank sampah maupun dalam hal pendanaan melalui investasi bidang persampahan.Insentif Pengelolaan Sampah Menerapkan insentif untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sampah, seperti pengurangan pajak atau subsidi untuk praktik daur ulang. 5. Edukasi masyarakat Mengubah mindset masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan melalui sosialisasi dan kampanye pengurangan sampah dari Tingkat rumah tangga. 6. Mengembangkan potensi ekonomi sirkular bidang	1. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHA 2. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		persampahan dari lingkup rumah tangga. 7. Penegakan Hukum Memastikan regulasi terkait pengelolaan sampah dipatuhi dan ditegakkan oleh semua pihak	
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). 14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	1. Peningkatan Produksi Pangan Lokal • Pengembangan Pertanian Perkotaan: Promosikan pertanian perkotaan dengan memanfaatkan lahan kosong dan teknologi pertanian modern seperti hidroponik dan akuaponik untuk meningkatkan produksi pangan lokal. • Dukungan untuk Petani: Berikan insentif dan bantuan teknis kepada petani lokal untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi pangan. • Penggunaan Teknologi Pertanian: Adopsi teknologi modern dalam pertanian seperti penggunaan benih unggul, irigasi cerdas, dan pertanian presisi untuk meningkatkan hasil panen. 2. Penguatan Jaringan Distribusi dan Logistik • Penguatan Infrastruktur Logistik: Investasi dalam infrastruktur logistik untuk memastikan distribusi pangan yang efisien dan tepat waktu ke seluruh kecamatan. • Pemantauan Ketersediaan Pangan: Implementasi sistem pemantauan ketersediaan dan harga pangan secara real-time untuk mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan pangan dengan cepat. 3. Diversifikasi Sumber Pangan • Promosi Konsumsi Pangan Alternatif: Edukasi	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	masyarakat tentang manfaat dan cara mengonsumsi sumber pangan alternatif selain beras, seperti umbi- umbian, jagung, dan lainya. • Pengembangan Produk Pangan Lokal: Dorong pengembangan dan konsumsi produk pangan lokal yang beragam untuk mengurangi ketergantungan pada beras. 4. Peningkatan Ketahanan Pangan • Program Lumbung Pangan: Mengembangkan dan memperkuat lumbung pangan komunitas untuk menyimpan cadangan pangan yang dapat digunakan saat terjadi kekurangan. • Sistem Perlindungan Sosial: Program bantuan sosial dan subsidi pangan untuk kelompok rentan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai. 5. Kolaborasi dan Kemitraan • Kemitraan dengan Sektor Swasta: Melibatkan sektor swasta dalam upaya peningkatan produksi dan distribusi pangan melalui investasi dan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). • Kerjasama Antar Daerah: Bangun kerjasama dengan daerah lain yang memiliki surplus pangan untuk mengatasi defisit pangan di Surabaya.	
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa	1. Pengembangan Sumber Air: Melakukan investasi dalam pengembangan sumber-sumber air baru seperti peningkatan kapasitas penyediaan air dari sumber alami, pengembangan infrastruktur penyimpanan air, dan peningkatan efisiensi penggunaan air. 2. **Promosi Konservasi Air**: Melakukan kampanye	8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 9. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 10. Program Pembinaan Dan

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	penyadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan penggunaan yang efisien. Ini dapat melibatkan penyuluhan tentang praktik-praktik hemat air di rumah tangga, industri, dan sektor-sektor lainnya. 3. **Peningkatan Infrastruktur Sanitasi**: Meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak seperti toilet dan fasilitas cuci tangan. Infrastruktur sanitasi yang memadai dapat membantu mencegah penyebaran penyakit terkait air dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. 4. **Peningkatan Akses Terhadap Teknologi**: Mengembangkan dan memperluas akses terhadap teknologi untuk mengatasi masalah air seperti sistem pengolahan air bersih, teknologi hemat air, dan sistem monitoring untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan air. 5. **Kemitraan dan Kolaborasi**: Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil untuk mengatasi masalah air secara bersama-sama. Kolaborasi ini dapat meliputi pembagian sumber daya, pendanaan proyek-proyek infrastruktur, dan pembangunan kapasitas. 6. **Pendidikan dan Pelatihan**: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang praktik- praktik kebersihan, kesehatan, dan konservasi air. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal di sekolah-sekolah dan pelatihan- pelatihan komunitas. 7. **Kebijakan dan Regulasi**: Mengembangkan dan	Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 11. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 12. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan, termasuk regulasi tentang penggunaan air, standar sanitasi, dan perlindungan sumber air. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi dampak dari ketidakcapaian indikator TPB terkait akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan di Kota Surabaya, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.	
		1. Restorasi Kualitas Air Sungai Restorasi kualitas air sungai melalui metode peningkatan kualitas air sungai berbasis teknologi, ekologi, ekologi engineering, dan sosial ekologi engineering. 2. Perhitungan Daya Tampung Pencemaran Sungai Perlu dilakukan perhitungan daya tamping beban pencemaran sungai berdasarkan peruntukan air sungai per segmen sehingga dapat ditentukan beban pencemaran maksimum yang diperbolehkan bagi masing-masing sumber pencemar. Daya tamping sungai dapat digunakan sebagai dasar penetapan izin lokasi dan izin lingkunagn bagi usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari air sungai. 3. Rencana Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Daerah Aliran Sungai Penyusunan rencana induk pengelolaan sumber daya air berbasis DAS digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan secara terpadu dan terkoordinir khususnya terkait	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		pengelolaan sumber daya air. 4. Pemantauan Kualitas Limbah Air Sungai Pemantauan berkala kualitas limbah dan air sungai untuk menentukan arah kebijakan pengendaliaan dan penanggulangan pencemaran air Sungai. 5. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Peningkatan koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air. Peningkatan koordinasi antar instansi dapat dilakukan melalui penerapan prinsip pengendalian pencemaran air terhadap rencana usaha/kegiatan yang mengajukan perizinan. 6. Pengetatan Perijinan Pembuangan Air Limbah Pengetatan perijinan pembuangan air limbah melalui penetapan kriteria baku lingkungan dan pengenaan pajak pembuangan limbah terhadap jenis limbah tertentu. 7. Penerapan Kuota Air Limbah Industri dan Usaha Penerapan kuota pembuangan air limbah industry berdasarkan lokasi izin usaha dan daya tampung pencemaran sungai. 8. Penetapan Kelas Air Sungai Penetapan kelas air sungai dengan tujuan penentuan aktivitas yang sesuai dengan kualitas dan daya tampung pencemaran sungai. 9. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan indeks kualitas air melalui upaya sederhana seperti penggunaan air dengan bijak, tidak mencemari sungai dengan polutan/limbah rumah tangga, penggunaan detergen ramah	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		lingkungan, dsb.	
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	1. Pengembangan Sumber Air: Melakukan investasi dalam pengembangan sumber-sumber air baru seperti peningkatan kapasitas penyediaan air dari sumber alami, pengembangan infrastruktur penyimpanan air, dan peningkatan efisiensi penggunaan air. 2. **Promosi Konservasi Air**: Melakukan kampanye penyadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan penggunaan yang efisien. Ini dapat melibatkan penyuluhan tentang praktik-praktik hemat air di rumah tangga, industri, dan sektor-sektor lainnya. 3. **Peningkatan Infrastruktur Sanitasi**: Meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak seperti toilet dan fasilitas cuci tangan. Infrastruktur sanitasi yang memadai dapat membantu mencegah penyebaran penyakit terkait air dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. 4. **Peningkatan Akses Terhadap Teknologi**: Mengembangkan dan memperluas akses terhadap teknologi untuk mengatasi masalah air seperti sistem pengolahan air bersih, teknologi hemat air, dan sistem monitoring untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan air. 5. **Kemitraan dan Kolaborasi**: Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil untuk mengatasi masalah air secara bersama-sama. Kolaborasi ini dapat meliputi pembagian sumber daya, pendanaan proyek-	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		proyek infrastruktur, dan pembangunan kapasitas. 6. **Pendidikan dan Pelatihan**: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang praktik- praktik kebersihan, kesehatan, dan konservasi air. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal di sekolah-sekolah dan pelatihan-pelatihan komunitas. 7. **Kebijakan dan Regulasi**: Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan, termasuk regulasi tentang penggunaan air, standar sanitasi, dan perlindungan sumber air. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi dampak dari ketidakcapaian indikator TPB terkait akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan di Kota Surabaya, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.	
Indeks Risiko Bencana	1.5.1* Jumlah korban mening gal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Telah tertuang dalam Dokumen Penanggulangan Bencana Kota Surabaya	1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Penanganan Bencana

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		
Persentase penurunan intensitas emisi GRK	1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	1. Penyediaan RTH Yang Cukup Penyediaan RTH di lingkungan perumahan dan permukiman untuk mengurangi emisi gas karbon. 2. Pengembangan Kawasan TOD Pengembangan kawasan TOD untuk mempermudah akses kawasan terhadap transportasi umum yang berkelanjutan. 3. Penguatan Kerjasama Antar Pemerintah/Swasta Penguatan kerjasama antar pemerintah/swasta dalam mendukung pemenuhan RTH dan	1. Program Penanganan Bencana 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan 11.6.1 Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan 11.7.1 Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. 12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) 12.5.1 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca	penyediaan transportasi umum, baik antar pemerintah daerah kota dengan pemerintah kabupaten/kota di sekitarnya, pemerintah daerah kota dengan pemerintah pusat/pemerintah provinsi serta pemerintah daerah kota dengan pihak swasta 4. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara Secara Rutin Melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas udara untuk perumusan kebijakan. 5. Pengembangan Konsep Green City dan Low Carbon Pengembangan kota melalui perencanaan pembangunan terintegrasi sehingga pengembangan kota dapat saling terintegrasi antara konsep green city dan low carbon. 1. Menambah fasilitas pengolahan sampah menambah jumlah fasilitas persampahan meliputi TPST dan TPS3R untuk meningkatkan jumlah sampah yang dikelola per hari. 2. Insentif Pengelolaan Sampah Menerapkan insentif untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sampah, seperti pengurangan pajak atau subsidi untuk praktik daur ulang. 3. Edukasi masyarakat Mengubah mindset masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan melalui sosialisasi dan kampanye pengurangan sampah dari Tingkat rumah tangga. 4. Mengembangkan potensi ekonomi sirkular bidang persampahan dari lingkup rumah tangga.	Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
	(GRK) 14.5.1 Jumlah luas kawasan konservasi perairan 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan 15.2.1.(d) Jumlah kesatuan pengelolaan hutan 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	1. Pengembangan Kawasan TOD Pengembangan kawasan TOD untuk mempermudah akses kawasan terhadap transportasi umum yang berkelanjutan. 2. Penyediaan RTH Yang Cukup Penyediaan RTH di lingkungan perumahan dan permukiman untuk mengurangi emisi gas karbon. 3. Dukungan Kebijakan Perubahan Iklim Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan kota. 4. Memperkuat Edukasi Terkait Perubahan Iklim Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan ikim 5. Pengembangan Konsep Green City dan Low Carbon Pengembangan kota melalui perencanaan pembangunan terintegrasi sehingga pengembangan kota dapat saling terintegrasi antara konsep green city dan low carbon.	
	13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	1. Penyediaan RTH Yang Cukup Penyediaan RTH di lingkungan perumahan dan permukiman untuk mengurangi emisi gas karbon. 2. Pengembangan Kawasan TOD Pengembangan kawasan TOD untuk mempermudah akses kawasan terhadap transportasi umum yang berkelanjutan. 3. Penguatan Kerjasama Antar Pemerintah/Swasta Penguatan kerjasama antar pemerintah/swasta	

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN TPB	STRATEGI	PROGRAM RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2026
		dalam mendukung pemenuhan RTH dan penyediaan transportasi umum, baik antar pemerintah daerah kota dengan pemerintah kabupaten/kota di sekitarnya, pemerintah daerah kota dengan pemerintah pusat/pemerintah provinsi serta pemerintah daerah kota dengan pihak swasta. 4. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara Secara Rutin Melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas udara untuk perumusan kebijakan 5. Pengembangan Konsep Green City dan Low Carbon Pengembangan kota melalui perencanaan pembangunan terintegrasi sehingga pengembangan kota dapat saling terintegrasi antara konsep green city dan low carbon.	

Sumber: Bappeda Kota Surabaya, diolah, 2026

4.2.7 Inovasi Pembangunan Tahun 2026

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peranan inovasi daerah ini sangat penting dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya telah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi, melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Sesuai dengan tema RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 ***"Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur",*** pada tahun 2026 dilaksanakan beberapa inovasi unggulan guna mendukung pencapaian tema dan prioritas pembangunan tahun 2026, antara lain :

1. ***Surabaya Medical Tourism*** **(SMS)** sebagai upaya memperkuat transformasi Kota Surabaya sebagai kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan serta merupakan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Wisata Medis di Rumah Sakit. Upaya ini tidak hanya mendukung transformasi sektor kesehatan dan pariwisata, tetapi juga sejalan dengan misi pembangunan inklusif yang mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan *Medical Tourism* juga diharapkan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian SDGs, khususnya dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja layak, dan pembangunan ekonomi inklusif. Melalui penguatan integrasi layanan kesehatan dan pariwisata, *Medical Tourism* diharapkan menjadi lokomotif baru pembangunan ekonomi Surabaya, serta memperkuat citra kota ini sebagai destinasi unggulan di tingkat regional.
2. **1 Balai RW 1 Tenaga Kesehatan** merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan akses layanan kesehatan bagi warga dengan menempatkan satu tenaga kesehatan di setiap Balai RW. Program ini mencakup

1.179 Balai RW di seluruh Surabaya dan menyediakan layanan kesehatan dasar seperti konsultasi, skrining, dan pengobatan. Untuk pemenuhan tenaga kesehatan, Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan Civitas Akademika juga organisasi profesi seperti, Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Program ini juga bertujuan untuk mengurangi antrean di Puskesmas dengan memberikan pemeriksaan rutin di tingkat komunitas, sehingga masyarakat bisa mendapatkan perawatan cepat, mudah serta dekat dengan tempat tinggal masing-masing warga.

3. **1 Kelurahan 1 Ambulans** merupakan program yang bertujuan untuk memastikan setiap kelurahan di Surabaya memiliki minimal satu ambulans yang siap siaga untuk memberikan layanan kesehatan darurat dengan cepat dan tepat. Ambulans ini tersedia untuk kebutuhan antar-jemput pasien secara gratis, dengan waktu tanggap darurat yang ditargetkan sekitar 15 menit, yang diharapkan akan terus ditingkatkan kedepannya.
4. **1P1P (*One Puskesmas One Pediatrician*)** merupakan inovasi yang menugaskan minimal satu dokter spesialis anak (*pediatrician*) untuk menjadi pendamping setiap puskesmas di Kota Surabaya. Inovasi ini memastikan bahwa setiap anak, khususnya balita dengan risiko atau status stunting, mendapatkan pemeriksaan dan pendampingan yang lebih terarah dan profesional. Dengan keberadaan dokter spesialis anak di tingkat pelayanan primer, proses deteksi dini, diagnosis, serta intervensi medis terhadap balita stunting menjadi lebih cepat, akurat, dan berkelanjutan. Ini juga mempermudah rujukan apabila anak memerlukan perawatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
5. **1P1O (*One Puskesmas One Obgyn*)** merupakan inovasi yang menugaskan satu dokter spesialis obstetri dan ginekologi untuk mendampingi setiap puskesmas guna memberikan pelayanan khusus bagi ibu hamil, terutama yang berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan kekurangan energi kronis (KEK). Hal ini penting karena kondisi kesehatan ibu selama hamil sangat menentukan kualitas tumbuh kembang janin. Melalui 1P1O, ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin, pemantauan status gizi, serta edukasi menyeluruh seputar kehamilan sehat.
6. **Integrasi Layanan Primer (ILP)** melalui 1 Kelurahan 1 Pustu ILP dan Posyandu Keluarga. Program Integrasi Layanan Primer (ILP) merupakan inisiatif Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mendekatkan dan menyatukan berbagai

layanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Melalui ILP, pelayanan kesehatan tidak lagi terfragmentasi berdasarkan program, melainkan terintegrasi berdasarkan siklus kehidupan individu, mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Pemerintah Kota Surabaya telah mengembangkan 1 Puskesmas Pembantu ILP di tiap-tiap kelurahan dan Posyandu Keluarga. Selain itu, dilakukan juga optimalisasi peran Kader Surabaya Hebat yang telah dibekali dengan pelatihan Kompetensi Dasar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dasar di posyandu keluarga serta home visit. Tujuan utama dari inisiatif ini antara lain adalah untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas di tingkat Balai RW serta menekankan pada upaya pencegahan dan promosi kesehatan untuk mengurangi beban penyakit.

7. ***Sinau dan Ngaji Bareng*** di Balai RW. Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk menyediakan ruang belajar dan kegiatan keagamaan bagi anak-anak di lingkungan sekitar mereka. Dengan memanfaatkan Balai RW sebagai pusat kegiatan, program ini mendekatkan akses pendidikan informal dan spiritual kepada anak-anak Kota Surabaya. Kegiatan ini meliputi pendampingan belajar untuk siswa SD dan SMP serta pengajaran agama melalui kegiatan mengaji. Program ini juga bertujuan untuk menyediakan ruang aman dan produktif bagi anak-anak. Pelaksanaan program ini melibatkan mahasiswa yang berkolaborasi dengan tutor dan guru serta masyarakat. Program ini diharapkan dapat terus mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam bidang pendidikan dan pembinaan generasi muda.
8. Optimalisasi ***Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)*** di Balai RW. Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Kota Surabaya untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program ini menyediakan layanan konseling dan edukasi keluarga langsung di tingkat RW, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pelaksanaan program ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan relawan. Mahasiswa dari berbagai universitas di Surabaya dilibatkan sebagai fasilitator setelah mengikuti pelatihan khusus. Kelas parenting rutin diadakan setiap hari Selasa pukul 15.00 WIB. Dengan pendekatan yang berbasis komunitas, program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan, anak-anak dan keluarga di Kota Surabaya.

9. ***Surabaya Creative hub****,* merupakan salah satu rencana pengembangan ekonomi kreatif Kota Surabaya dengan memanfaatkan bangunan ex Hi Tech Mall Surabaya, dan nantinya akan dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi kreatif dari berbagai sektor sehingga menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan dan memiliki nilai keberlanjutan.
10. Pengembangan 17 kampung tematik wisata. Program ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Surabaya yang berdampak pada perputaran uang di masyarakat dan menciptakan peluang bertambahnya lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
11. Pengembangan kawasan wisata Kota Lama Surabaya akan terus berlanjut di tahun 2026 sebagai bagian dari upaya strategis untuk mengoptimalkan potensi historis, budaya, dan ekonomi yang dimilikinya. Kawasan ini menyimpan jejak sejarah kota Surabaya yang sangat berharga dan memiliki daya tarik tersendiri. Meskipun berbagai penataan telah dilakukan, kawasan Kota Lama masih memiliki banyak potensi yang dapat dioptimalkan, baik dari sisi pelestarian bangunan cagar budaya, penguatan narasi sejarah, hingga pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan kreatif dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan selanjutnya akan difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur pendukung wisata, aktivasi ruang-ruang interaktif, serta kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kawasan Kota Lama sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Surabaya, mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan inklusif bagi pelaku UMKM, komunitas seni, serta sektor jasa dan kuliner.
12. ***Surabaya Experience Hub,*** merupakan pariwisata yang terintegrasi yang bertujuan menghadirkan pengalaman pariwisata perkotaan yang lengkap dengan memadukan kampung wisata tematik dan destinasi wisata serta mengoptimalkan layanan wisata yang telah tersedia seperti pembuatan narasi di Museum sepuluh Nopember dengan huruf *braille* untuk pengunjung disabilitas, kerjasama dengan pihak *cruise* dan travel biro untuk mendatangkan kapal *cruise* yang merupakan salah satu perwujudan sinergi dengan pihak swasta sehingga dapat menyajikan tampilan wisatanya dan jadwal event, serta menjadikan Gelora Bung Tomo sebagai destinasi wisata baru (*sport tourism*) bekerjasama dengan Persebaya.

13. Pengembangan 153 Kampung Sayur binaan merupakan inovasi baru yang sebelumnya belum terimplementasi secara merata di seluruh kelurahan. Program ini diadakan dalam rangka pemenuhan ketahanan pangan daerah sehingga diharapkan akan terjadi pemenuhan pangan alternatif dan dengan didukung diversifikasi pangan di kewilayahan, dapat memberikan efek ketercukupan pangan berbasis kewilayahan.
14. Kampung Pancasila dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Surabaya. Dengan berbasis Rukun Warga, Kampung Pancasila diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya, seperti layanan kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, kegiatan sosial dan ekonomi, pengelolaan lingkungan dan sampah, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Kampung Pancasila merupakan fase akhir dari Kampung Madani dimana Kampung tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya dengan mengedepankan prinsip gotong-royong, keswadayaan dan kemandirian warga yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, Kampung Pancasila akan didukung oleh satuan tugas yang beranggotakan unsur masyarakat sebagai ujung tombak agen perwujudan Kampung Pancasila yang Aman, Sehat, Madani, Ramah Anak dan Perempuan, serta Tangguh Bencana.
15. Digitalisasi pemetaan kawasan rawan keamanan kota dalam upaya penekanan jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, serta mencegah adanya gangguan keamanan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memetakan tingkat kerawanan ganguan ketentraman dan ketertiban di kawasan Kota Surabaya. Proses bisnisnya dimulai dari petugas Satpol PP melakukan input data gangguan kemamanan berdasarkan jenis, waktu, lokasi, kronologi, pelaku serta korban berdasarkan kasus yang telah terjadi selama ini. Kemudian sistem akan menyimpan data dan melakukan analisis tingkat gangguan keamanan di masing-masing wilayah serta menyajikan informasi tingkat gangguan keamanan dalam bentuk peta digital. Dari peta digital tersebutlah akan dijadikan sebagai dasar Satpol PP menyusun rencana penanganan serta sebagai dasar dalam menentukan prioritas operasi pengendalian dan penertiban.
16. Surabaya *investment week*, merupakan kegiatan promosi investasi strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah, perusahaan, atau asosiasi untuk memperkenalkan berbagai peluang investasi kepada calon investor. Kegiatan ini bertujuan untuk menarik minat investor dengan menyajikan informasi mendalam

terkait proyek investasi unggulan, sektor prioritas, serta kebijakan pendukung yang ditawarkan oleh pemerintah daerah secara tatap muka.

17. Call center siaga perizinan, merupakan jalur pelayanan perizinan untuk Mall Pelayanan Publik (MPP) maupun seluruh Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kota Surabaya melalui satu panggilan telepon.
18. Pengembangan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penapisan jenis perizinan kegiatan usaha yang bertujuan memberikan bantuan kepada pelaku usaha untuk menguraikan jenis perizinan yang perlu dilengkapi beserta persyaratan dasar perizinannya dengan memanfaatkan AI.
19. Program bapak asuh di Sentra Wisata Kuliner (SWK) merupakan upaya untuk meningkatkan transaksi usaha di SWK. Program ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan bimbingan dalam mengelola usaha meliputi manajemen keuangan, promosi, pemasaran, dan peningkatan kualitas produk yang ditawarkan, cara meningkatkan daya tarik bagi pelanggan, cara meningkatkan pendapatan bagi pedagang SWK sehingga usaha dapat bertahan dan berkelanjutan.
20. Pemanfaatan Lahan Aset yang dikembangkan menjadi eduwisata Pertanian/Perikanan. Inovasi ini dilakukan dengan memanfaatkan aset *idle* yang selanjutnya menyediakan obyek eduwisata baru yang mendukung adanya kecukupan pangan daerah. Eduwisata juga menjadi potensi daerah yang akan menjadi solusi pendukung dalam edukasi kepada Masyarakat dan wisata alternatif.
21. SITARUBOYO adalah Sistem Informasi Tata Ruang Suroboyo yang bertujuan untuk menyediakan informasi tata ruang, peruntukkan lahan dan persebaran fasilitas publik. Aplikasi ini merupakan platform digital yang memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi tertentu dengan mudah dan cepat guna memperoleh informasi peruntukan lahan. Selain itu, SITARUBOYO juga menyediakan data terkait bangunan di Kota Surabaya, baik yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun yang belum. Akses ke SITARUBOYO sangat praktis, yaitu pengguna cukup membuka internet browser pada perangkat PC atau laptop, tanpa perlu instalasi tambahan. Dengan tampilan yang *user-friendly* dan fitur pencarian yang responsif, SITARUBOYO menjadi pilihan utama dalam mendapatkan informasi tata ruang dan bangunan di Surabaya.

22. Aplikasi Wargaku merupakan inovasi layanan publik dari Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Aplikasi Wargaku memungkinkan warga untuk mengajukan pengaduan, memperoleh layanan, menyampaikan kritik, saran, permohonan informasi kepada Pemerintah Kota Surabaya.
23. Aplikasi Kantorku adalah sebuah platform *Single Sign On* (SSO) yang merupakan portal untuk mengakses berbagai aplikasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi-aplikasi tersebut dengan sekali login. Secara keseluruhan, aplikasi Kantorku terus berupaya untuk menjadi solusi perkantoran yang inovatif dan efektif, dengan terus mengembangkan fitur-fitur baru dan meningkatkan integrasi dengan berbagai layanan publik.
24. Portal Satu Data Surabaya merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data di tingkat daerah. Sebuah platform terintegrasi yang menyatukan, mengelola, dan mendistribusikan data dari berbagai Perangkat Daerah dalam satu sistem yang terstandarisasi. Portal ini memungkinkan pemerintah, akademisi, masyarakat, serta sektor swasta untuk mengakses data yang valid, terkini, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, penelitian, maupun pengambilan keputusan strategis.
25. Pengembangan aplikasi angkutan umum berupa integrasi aplikasi pembayaran pada transportasi umum yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan Provinsi Jawa Timur dengan sistem pembayaran transportasi umum di Kota Surabaya untuk memudahkan penumpang mengetahui rute angkutan umum di Kota Surabaya tanpa perlu berganti-ganti aplikasi.
26. Pembuatan ***Ducting Utilitas*** merupakan upaya penataan jaringan infrastruktur bawah tanah untuk menampung kabel listrik, telekomunikasi, pipa air, dan utilitas lainnya secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan meningkatkan estetika kota, keselamatan publik, serta efisiensi pemeliharaan infrastruktur. Dengan sistem ducting, jaringan utilitas menjadi lebih rapi, terlindungi, dan mudah diakses tanpa perlu penggalian berulang. Proyek ini membutuhkan perencanaan matang, koordinasi antar instansi, serta dukungan regulasi agar pelaksanaannya efektif dan berkelanjutan.

27. Pembuatan ***Road Long Storage*** merupakan strategi penanganan banjir dan pengelolaan air permukaan di kawasan jalan dengan membangun ruang penyimpanan air jangka panjang di bawah badan jalan atau di sisi jalur lalu lintas. Sistem ini berfungsi menampung limpasan air hujan agar tidak langsung masuk ke saluran kota, sehingga mengurangi risiko genangan dan mendukung pengendalian debit puncak saat hujan lebat. Selain itu, *Road Long Storage* juga dapat dimanfaatkan untuk konservasi air dan mendukung infiltrasi air ke tanah. Penerapannya memerlukan perencanaan teknis yang matang dan integrasi dengan sistem drainase eksisting.
28. Peningkatan jalan dengan *Rigid Pavement*, *Overlay*, dan Pavingisasi merupakan upaya strategis dalam memperbaiki kualitas infrastruktur transportasi guna mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Rigid pavement* digunakan pada ruas jalan dengan beban lalu lintas tinggi untuk ketahanan jangka panjang. *Overlay* diterapkan pada jalan aspal yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, dengan menambahkan lapisan baru di atas permukaan lama untuk memperpanjang umur layanan. Sementara itu, pavingisasi digunakan pada jalan lingkungan atau permukiman untuk meningkatkan aksesibilitas serta mengurangi debu dan genangan air. Kombinasi ketiga metode ini disesuaikan dengan kondisi eksisting dan kebutuhan teknis masing-masing ruas jalan, guna menciptakan jaringan jalan yang lebih kuat, aman, dan nyaman.
29. **Pedang Lilin** merupakan pengembangan pelayanan administrasi kependudukan berupa pengiriman dokumen adminduk melalui ojek online. Layanan ini bertujuan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat untuk pengambilan dokumen adminduknya (KTP/KIA)
30. Pengembangan Sistem Peringatan Dini berupa pemasangan alat *Early Warning System* /EWS di wilayah aliran sungai Kali Surabaya, sebagai upaya pengurangan risiko bencana banjir.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

Rencana Program pada Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026, yang mempertimbangkan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, program prioritas nasional dalam RKP Tahun 2026, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Surabaya sampai dengan triwulan II Tahun 2026 serta hasil evaluasi capaian Renja Perangkat Daerah Kota Surabaya sampai dengan triwulan II Tahun 2026.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2026, tidak terdapat penambahan program maupun kegiatan, namun terdapat penambahan 10 (sepuluh) subkegiatan baru yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai tindak lanjut atas :

1. Surat Sekretaris Kementerian PPPA Nomor: B-242/Setmen.Birorenkeu/PR.04.01/11/2025 tanggal 3 November 2025 perihal Pemberitahuan Kode Sub Kegiatan DAK Non Fisik PPA TA 2026, serta surat Sekretaris Kementerian PPPA Nomor: B-268/Setmen.Birorenkeu/PR.04/12/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penginputan Rencana Penggunaan Dana Dana Pelayanan PPA TA 2026 pada Aplikasi ALAMANDA;
2. Berita Acara Pembahasan Pemetaan DAK Non Fisik Jenis Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Tahun 2026 yang ditandatangani oleh perwakilan Perpustakaan Nasional dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 9 Desember 2025.

Ringkasan perubahan pendanaan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 disajikan dalam tabel V.1

Tabel V.1

Perubahan Pendanaan per Perangkat Daerah Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	SELISIH	KETERANGAN
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.277.365.588	32.828.768.998	1.551.403.410	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN sampai akhir tahun
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	88.689.642.685	89.420.907.417	731.264.732	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN sampai akhir tahun
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44.580.149.742	47.094.839.240	2.514.689.498	Penambahan belanja jasa operasional operasional kantor dan pemenuhan belanja jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
4	Badan Pendapatan Daerah	82.064.758.941	84.092.382.317	2.027.623.376	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN sampai akhir tahun
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	282.201.833.977	189.176.961.696	- 93.024.872.281	Penyesuaian belanja bunga sesuai dengan besaran nilai pinjaman daerah
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	39.453.325.259	39.596.406.780	143.081.521	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN sampai akhir tahun
7	Badan Riset dan Inovasi Daerah	46.012.161.818	23.298.188.771	- 22.713.973.047	Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan ASN sampai akhir tahun
8	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	309.444.949.487	196.606.380.191	- 112.838.569.296	Penyesuaian belanja beasiswa kepada mahasiswa Perguruan Tinggi sesuai dengan

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	SELISIH	KETERANGAN
					jumlah penerima beasiswa eksisting di Tahun 2026
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.774.591.121	62.664.007.885	1.889.416.764	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN sampai akhir tahun
10	Dinas Kesehatan	1.434.452.089.001	1.356.052.768.022	- 78.399.320.979	Penyesuaian belanja gaji jasa tenaga Non ASN, jaminan kesehatan, dan obat sesuai kebutuhan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	46.880.703.735	45.662.552.740	- 1.218.150.995	Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan ASN sampai akhir tahun
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	128.598.181.119	127.852.595.716	- 745.585.403	Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan ASN sampai akhir tahun
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	53.849.334.816	54.978.251.389	1.128.916.573	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN sampai akhir tahun
14	Dinas Lingkungan Hidup	597.220.295.341	811.603.689.609	214.383.394.268	Penambahan biaya pengolahan sampah di TPA Benowo serta penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan
15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	151.933.501.314	143.398.402.187	- 8.535.099.127	Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan ASN sampai akhir tahun
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga	57.067.909.591	58.614.986.024	1.547.076.433	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN sampai akhir tahun

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	SELISIH	KETERANGAN
	Berencana				
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.868.669.998	23.995.277.700	1.126.607.702	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
18	Dinas Pendidikan	2.193.939.380.187	2.190.203.123.353	- 3.736.256.834	Penyesuaian belanja honorarium tenaga pendidik sesuai dengan jumlah eksisting
19	Dinas Perhubungan	707.871.993.238	747.729.086.815	39.857.093.577	Penambahan kebutuhan perlengkapan jalan dan rehabilitasi prasarana jalan, pemenuhan operasional angkutan, serta pemenuhan belanja gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	35.105.425.323	39.064.653.166	3.959.227.843	Penambahan belanja yang bersumber dari SILPA DBHCHT Tahun 2025, pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN dan gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	44.872.922.143	47.758.237.083	2.885.314.940	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN sampai akhir tahun
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	452.211.289.563	552.308.375.617	100.097.086.054	Penambahan kebutuhan rehabilitasi gedung pemerintah, venue untuk kegiatan Porprov, dan sarana

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	SELISIH	KETERANGAN
					penunjang fasilitas umum di Kota Surabaya
23	Dinas Sosial	112.832.065.130	103.084.012.419	- 9.748.052.711	Penyesuaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga di liponsos
24	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	2.355.293.357.927	2.487.819.878.426	132.526.520.499	Penambahan untuk penanganan genangan, pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta pemeliharaan dan operasional rumah pompa
25	Inspektorat	32.366.084.948	34.410.430.347	2.044.345.399	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN sampai akhir tahun
26	Kec. Asemrowo	33.030.589.485	33.901.191.531	870.602.046	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
27	Kec. Benowo	43.657.755.365	45.144.870.142	1.487.114.777	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
28	Kec. Bubutan	55.392.526.862	57.165.813.752	1.773.286.890	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
29	Kec. Bulak	36.648.195.692	37.894.515.304	1.246.319.612	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
30	Kec. Dukuh Pakis	42.555.619.474	44.077.317.980	1.521.698.506	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	SELISIH	KETERANGAN
					serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
31	Kec. Gayungan	41.576.792.857	43.877.336.790	2.300.543.933	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
32	Kec. Genteng	47.436.451.148	50.198.848.990	2.762.397.842	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
33	Kec. Gubeng	62.237.332.541	63.391.741.300	1.154.408.759	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
34	Kec. Gunung Anyar	39.674.039.858	42.146.107.344	2.472.067.486	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
35	Kec. Jambangan	43.301.500.847	44.979.957.944	1.678.457.097	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
36	Kec. Karangpilang	41.932.343.148	43.034.398.802	1.102.055.654	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
37	Kec. Kenjeran	53.873.406.135	56.472.277.337	2.598.871.202	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	SELISIH	KETERANGAN
38	Kec. Krembangan	57.617.210.625	60.157.166.445	2.539.955.820	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
39	Kec. Lakarsantri	51.940.531.214	54.331.527.783	2.390.996.569	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
40	Kec. Mulyorejo	58.672.399.951	60.734.816.600	2.062.416.649	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
41	Kec. Pabean Cantian	45.976.644.452	48.062.995.682	2.086.351.230	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
42	Kec. Pakal	45.871.829.452	46.438.231.324	566.401.872	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
43	Kec. Rungkut	61.784.231.568	64.089.540.508	2.305.308.940	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
44	Kec. Sambikerep	42.525.687.071	44.485.785.667	1.960.098.596	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
45	Kec. Sawahan	81.262.766.655	84.084.475.390	2.821.708.735	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	SELISIH	KETERANGAN
					tenaga Non ASN sampai akhir tahun
46	Kec. Semampir	66.026.406.235	68.513.502.033	2.487.095.798	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
47	Kec. Simokerto	51.056.702.219	53.792.083.539	2.735.381.320	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
48	Kec. Sukolilo	65.922.943.906	67.213.383.295	1.290.439.389	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
49	Kec. Sukomanunggal	58.051.237.008	59.282.840.476	1.231.603.468	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
50	Kec. Tambaksari	91.698.916.783	94.632.025.796	2.933.109.013	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
51	Kec. Tandes	62.181.974.504	65.558.449.121	3.376.474.617	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
52	Kec. Tegalsari	56.166.963.904	57.573.280.277	1.406.316.373	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
53	Kec. Tenggilis				Pemenuhan

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	SELISIH	KETERANGAN
	Mejoyo	39.767.718.040	40.859.324.634	1.091.606.594	belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
54	Kec. Wiyung	41.850.544.999	43.543.588.558	1.693.043.559	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
55	Kec. Wonocolo	51.967.056.447	55.705.090.667	3.738.034.220	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
56	Kec. Wonokromo	74.293.550.244	75.997.487.454	1.703.937.210	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun
57	RSUD Bhakti Dharma Husada	300.161.033.969	349.742.490.050	49.581.456.081	Penambahan belanja BLUD yang bersumber dari SILPA BLUD Tahun 2025 dan adanya penambahan pendapatan BLUD Tahun 2026
58	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	422.334.928.317	457.196.404.563	34.861.476.246	Penambahan belanja BLUD yang bersumber dari SILPA BLUD Tahun 2025
59	RSUD Eka Candrarini	214.819.929.179	224.299.712.602	9.479.783.423	Penambahan belanja BLUD yang bersumber dari SILPA BLUD Tahun 2025
60	Satuan Polisi Pamong Praja	153.733.582.774	131.850.250.622	- 21.883.332.152	Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan ASN serta gaji jasa tenaga Non ASN sampai akhir tahun

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	SELISIH	KETERANGAN
61	Sekretariat Daerah	349.423.269.705	354.803.320.001	5.380.050.296	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN sampai akhir tahun
62	Sekretariat DPRD	233.538.959.143	234.370.834.450	831.875.307	Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN sampai akhir tahun

Rencana program dan kegiatan pada dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 beserta tolok ukur Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Lampiran III tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026.

5.2 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan hasil analisa keuangan tahun 2026 dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 2025 serta regulasi dan kondisi terkini. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026 disajikan dalam Tabel V.2 tentang Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2026.

Tabel V.2
Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Surabaya Tahun 2026

NO	URAIAN	APBD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026
1	**PENERIMAAN**	**12,755,825,553,768**	**13,062,315,176,341**
1.1	**PENDAPATAN**	**10,898,913,409,397**	**11,002,502,567,661**
1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8,198,667,155,233	8,194,256,962,297
	a Pajak Daerah	6,696,137,892,920	6,664,431,343,846
	b Retribusi Daerah	525,238,447,814	538,610,286,792
	c Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	199,451,819,857	199,451,819,857
	d Lain-Lain PAD yang sah	777,838,994,642	791,763,511,802
1.1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2,639,847,226,463	2,639,847,226,463
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2,205,495,786,000	2,205,495,786,000
	a 1) Dana Perimbangan	2,205,495,786,000	2,205,495,786,000
	b 2) Insentif Fiskal	-	-
	Transfer Antar – Daerah	434,351,440,463	434,351,440,463
	a 1) Pendapatan Bagi Hasil	434,351,440,463	434,351,440,463
	b 2) Bantuan Keuangan	-	-
1.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-
	a Pendapatan Hibah	-	-
	b Pendapatan Dana Darurat	-	-
	c Pendapatan Lainnya	-	-

NO	URAIAN	APBD Tahun 2026	Perubahan RKPD Tahun 2026
1.2	**PEMBIAYAAN**	**1,856,912,144,371**	**2,059,812,608,680**
1.2.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1,856,912,144,371	**2,059,812,608,680**
	a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	263,996,494,318	516,896,958,627
	b Penerimaan Pembiayaan Alternatif	1,592,915,650,053	1,542,915,650,053
2	**PENGELUARAN**	**12,755,825,553,768**	**13,062,315,176,341**
2.1	**BELANJA**	**12.731.825.553.768**	**13,048,918,148,661**
2.1.1	BELANJA OPERASI	9,772,957,887,662	9,912,713,371,879
	a Belanja Pegawai	3,380,291,517,259	3,310,420,139,195
	b Belanja Barang dan Jasa	5,719,306,153,919	5,975,314,611,722
	c Belanja Bunga	125,506,599,742	80,087,972,321
	d Belanja Subsidi	131,296,378,002	132,006,257,401
	e Belanja Hibah	370,525,043,740	370,525,043,740
	f Belanja Bantuan Sosial	46,032,195,000	44,359,347,500
2.1.2	BELANJA MODAL	2,896,712,666,106	3,106,971,321,252
	a Belanja Modal Tanah	507,303,768,709	639,494,240,709
	b Belanja Modal Peralatan dan Mesin	305,184,178,472	364,732,273,377
	c Belanja Modal Gedung dan Bangunan	286,515,299,175	359,323,177,810
	d Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,794,083,803,592	1,740,827,559,814
	e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,275,200,640	2,195,227,440
	f Belanja Modal Aset Lainnya	1,350,415,518	398,842,102
2.1.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	62,155,000,000	29,233,455,530
	a Belanja Tidak Terduga	62,155,000,000	29,233,455,530
2.1.4	BELANJA TRANSFER	-	-
	a Belanja Bagi Hasil	-	-
	b Belanja Bantuan Keuangan	-	-
2.2	**PEMBIAYAAN**	**24,000,000,000**	**13,397,027,680**
2.2.1	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24,000,000,000	13,397,027,680
	a Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	14,000,000,000	3,397,027,680
	b Penyertaan Modal	10,000,000,000	10,000,000,000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (diolah tahun 2026).

Kerangka pendanaan sebagaimana telah dicantumkan pada tabel V.2 disusun dengan memperhatikan pemenuhan alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal 146 Ayat (1) bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh%) dari total belanja APBD. Pengaturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari total belanja bertujuan untuk mendorong struktur belanja daerah semakin efisien dan produktif. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026, total belanja

pegawai sebesar Rp3.310.420.139.195.- dan Tunjangan Guru melalui TKD sebesar Rp278.977.712.000.- sehingga belanja Pegawai setelah dikurangi Tunjangan Guru melalui TKD sebesar Rp3.031.442.427.195.- atau 23.23%;

2. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan. Pemenuhan belanja wajib pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jumlah alokasi anggaran fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 adalah sebesar Rp2.459.563.908.896.- atau 18.85%. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian alokasi belanja beasiswa kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan jumlah penerima bantuan beasiswa sesuai dengan kriteria di Tahun 2026;
3. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal 147 ayat (1) bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh%) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KMK.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. jumlah belanja infrastruktur pelayanan publik pada Perubahan RKPD Tahun 2026 sebesar Rp5.609.860.424.952.- atau 42.99%.
4. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bahwa anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan. Pada Perubahan RKPD Tahun 2026 alokasi belanja Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp 580.315.084.714,- dan alokasi DAK sebesar Rp 761.438.452.000,- sehingga jumlah belanja Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar 5%.

BAB VI
PENUTUP

6.1. KESIMPULAN SUBSTANSIAL

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan memuat visi, misi, tema pembangunan, tujuan, sasaran, isu strategis, arah kebijakan, dan program Pemerintah Kota Surabaya. Dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 telah memperhatikan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 dan program strategis nasional serta strategi dan araha kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Surabaya sampai dengan triwulan II Tahun 2026 serta hasil evaluasi capaian Renja Perangkat Daerah Kota Surabaya sampai dengan triwulan II Tahun 2026. Selain itu, RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 berpedoman pada prioritas nasional sesuai Asta Cita sebagaimana tercantum pada RPJMN Tahun 2025-2029, prioritas Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam Nawa Bhakti Satya, serta visi dan misi Kota Surabaya Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026 disesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam mendukung pencapaian visi misi Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

Visi misi Kepala Daerah terpilih untuk periode jabatan tahun 2025-2030 adalah *"**Transformasi Surabaya menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan**"*, yang kemudian dijabarkan dalam 5 misi yakni :

1. Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan;
2. Mempercepat Transformasi Penciptaan SDM Unggul & Berkarakter;
3. Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
4. Memantapkan Ketahanan Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan;
5. Harmonisasi Sosial Masyarakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan tema RKP Tahun 2026 adalah "**Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**", tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi**", serta saran masukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2026, serta Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Tahunan Kota Surabaya Tahun 2026-2030 yang termuat pada Peraturan Daerah RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, maka Tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026 yaitu "***Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur***". Adapun Prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026 yang disebut dengan Panca Darma Karya, diarahkan sebagai berikut :

1. ***Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan yang adil dan inklusif***

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan melalui peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan serta pendidikan. Di bidang kesehatan, pendekatan dilakukan secara menyeluruh melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dengan fokus pada penurunan angka kematian ibu, kematian bayi, serta stunting. Sementara itu, di bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan bermutu untuk menghasilkan generasi berkarakter dan berdaya saing tinggi

2. ***Pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif***

   Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peningkatan efisiensi investasi untuk mendorong penyediaan lapangan kerja yang layak dan pengurangan pengangguran, penguatan sektor unggulan Surabaya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat serta terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat

3. ***Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan***

   Infrastruktur menjadi tulang punggung pembangunan kota, yang tidak hanya difokuskan pada peningkatan konektivitas dan mobilitas, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung

aktivitas ekonomi, memperkuat ketahanan wilayah, dan menjadi modal jangka panjang dalam memastikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik sekaligus menjaga keseimbangan ekologis serta ketahanan atas risiko bencana.

4. ***Reformasi birokrasi berbasis digital***

   Pemerintah Kota Surabaya menempatkan reformasi birokrasi sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transformasi birokrasi diarahkan melalui digitalisasi sistem pemerintahan untuk menciptakan layanan yang cepat, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Digitalisasi bukan hanya alat bantu, melainkan menjadi roh dari pelayanan publik yang adaptif dan modern

5. ***Harmonisasi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat***

   Pembangunan sosial diarahkan untuk memperkuat kohesi sosial dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Kesenjangan, baik dalam bentuk sosial maupun ekonomi, diatasi melalui penguatan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta layanan sosial yang inklusif. Dengan membangun solidaritas dan rasa keadilan, pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang rukun, inklusif, dan sejahtera. Selanjutnya, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat utama bagi terciptanya ruang hidup yang nyaman dan produktif. Oleh karena itu, penguatan sistem deteksi dini, peningkatan kapasitas lembaga keamanan, serta sinergi antara aparat dan masyarakat terus diperkuat. Pendekatan kolaboratif dan berbasis komunitas dikedepankan guna mencegah potensi konflik sosial dan meningkatkan ketanggapan terhadap gangguan kamtibmas. Penerapan teknologi informasi dalam sistem keamanan lingkungan juga didorong sebagai bagian dari tata kelola kota yang adaptif dan partisipatif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Tahun 2026 sebesar Rp 8.198.667.155.233,- dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp 8.194.256.962.297,-. Jumlah pendapatan transfer pada Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap sama seperti pada APBD Tahun 2026 yaitu sebesar Rp 2.639.847.226.463,- Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan di APBD Tahun 2026 sebesar Rp 1.856.912.144.371,- berubah menjadi sebesar Rp 2.059.812.608.680 pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Secara umum kebijakan belanja diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif utuk mendukung ***"Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur".*** Total belanja semula pada APBD Tahun 2026 sebesar Rp 12.731.825.553.768,- dan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi sebesar Rp 13.048.918.148.661,-. Pada APBD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak terdapat alokasi untuk belanja transfer, sedangkan untuk jumlah pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun 2026 semula sebesar Rp 24.000.000.000 berubah menjadi sebesar Rp 13.397.027.680,- pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

6.2. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikantercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah, meliputi : Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Adapun ruang lingkup pengendalian dan evaluasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahunan adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan tahunan Kota Surabaya mencakup sinkronisasi visi, misi, dan tema pembangunan Kota Surabaya dengan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045, Perda RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029, RKP Pemerintah Pusat dan RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perumusan isu strategis, arah kebijakan, program prioritas, kebutuhan pendanaan pagu indikatif, dan indikator kinerja Daerah. Pengendalian tersebut dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali kota.
2. Pengendalian pelaksanaan RKPD mencakup program pembangunan Daerah dan program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Pengendalian pelaksanaan dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan

RKPD Tahun 2026. Pemantauan dan supervisi yang dilaksanakan harus dapat menjamin :

a. Program pembangunan pada RKPD Tahun 2026 telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah; dan
b. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan pada RKPD Tahun 2026 telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan tahunan telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

3. Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan tema pembangunan tahunan Kota Surabaya. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa tema pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan dapat dicapai untuk mewujudkan misi pembangunan jangka menengah daerah. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.

6.3. PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2026, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2026 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 ini berpedoman pada prioritas nasional sesuai Asta Cita sebagaimana tercantum pada RPJMN Tahun 2025-2029, prioritas Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam Nawa Bhakti Satya, serta visi dan misi Kota Surabaya Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026 disesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam mendukung pencapaian visi misi Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka telah dilaksanakan hal-hal yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yaitu RKPD Kota Surabaya Tahun 2026 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

WALI KOTA SURABAYA

ERI CAHYADI

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR : 34 TAHUN 2026
TANGGAL : 22 JULI 2026

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026 Kota Surabaya

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			11.189.580.022.204		2.057.764.973.529		2.193.939.380.187		286.727.758.615		604.712.023.003						891.439.781.618	35,2	40,63		891.439.781.618	34,33	7,97		
		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.557.201.088.610		1.081.490.858.749		1.064.234.591.568		200.312.491.017		324.452.527.650						524.765.018.667	39,84	49,31		524.765.018.667	37,98	9,44	Dinas Pendidikan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang pendidikan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	95,22		96,95		95,11		96,93		97,25						97,25		102,25		97,25		102,13			
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.024.161.664		1.271.769.200		1.340.876.614		144.300.000		661.800.000						806.100.000	50	60,12		806.100.000	50	16,04		
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		10		8		1		3						4		50		4		50			
		1.01.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.024.161.664		1.271.769.200		1.340.876.614		144.300.000		661.800.000						806.100.000	50	60,12		806.100.000	50	16,04		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		10		8		1		3						4		50		4		50			
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.493.489.909.214		1.070.844.750.722		1.053.451.176.640		199.181.260.972		321.699.445.262						520.880.706.234	99,95	49,45		520.880.706.234	99,95	9,48		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8172		8.464		8172		8.168		8.168						8.168		99,95		8.168		99,95			
		1.01.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.493.489.909.214		1.070.844.750.722		1.053.451.176.640		199.181.260.972		321.699.445.262						520.880.706.234	99,95	49,45		520.880.706.234	99,95	9,48		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8172		8.464		8172		8.168		8.168						8.168		99,95		8.168		99,95			
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.712.520.013		374.417.892		522.919.536		9.470.520		121.020.100						130.490.620	25	24,95		130.490.620	25	2,28		
			Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		12		0		3						3		25		3		25			
		1.01.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.712.520.013		374.417.892		522.919.536		9.470.520		121.020.100						130.490.620	25	24,95		130.490.620	25	2,28		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		12		0		3						3		25		3		25			
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			14.324.525.336		2.191.215.724		1.739.850.458		57.097.290		250.476.050						307.573.340	39,09	17,68		307.573.340	27,94	2,15		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	705		467		504		35		162						197		39,09		197		27,94			
		1.01.01.2.07.001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			14.324.525.336		2.191.215.724		1.739.850.458		57.097.290		250.476.050						307.573.340	39,09	17,68		307.573.340	27,94	2,15		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	705		467		504		35		162						197		39,09		197		27,94			
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38.649.972.383		6.808.705.211		7.179.768.320		920.362.235		1.719.786.238						2.640.148.473	12,5	36,77		2.640.148.473	12,5	6,83		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		4		4		0		1						1		25		1		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			11.043.801.921		1.876.510.273		1.959.995.234		-		412.085.055						412.085.055	25	21,02		412.085.055	25	3,73		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		4		4		0		1						1		25		1		25			
		1.01.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			27.606.170.462		4.932.194.938		5.219.773.086		920.362.235		1.307.701.183						2.228.063.418	0	42,69		2.228.063.418	0	8,07		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
	Meratanya Kualitas Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			5.432.735.345.714		935.900.634.980		1.089.791.928.776		80.364.717.598		270.981.282.153						351.345.999.751	34,98	32,24		351.345.999.751	34,23	6,47	Dinas Pendidikan	
			Meningkatnya kualitas lingkungan pembelajaran di satuan pendidikan	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	76,07		59,56		66,07		0		59,56						59,56		90,15		59,56		78,3			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standart nasional sarana dan prasarana pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Persentase daya tampung satuan pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk usia sekolah (7-12) (%)	84,63		84,53		84,55		89,26		88,77						88,77		104,99		88,77		104,89			
				Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	77,81		65,15		68,21		0		65,12						65,12		95,47		65,12		83,69			
				Persentase daya tampung satuan pendidikan SMP/MTs terhadap jumlah penduduk usia sekolah (13-15) (%)	80,38		80,17		80,21		81,76		79,9						79,9		99,61		79,9		99,4			
				Iklim Keamanan SD (Nilai)	82,4		75,45		78,8		0		75,45						75,45		95,75		75,45		91,57			
				Iklim Keamanan SMP (Nilai)	83,58		74,87		77,58		0		74,87						74,87		96,51		74,87		89,58			
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			237.862.720.636		38.760.119.121		58.117.508.334		942.677.788		3.001.202.219						3.943.880.007	17,2	6,79		3.943.880.007	16,36	1,66		
			Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah Dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	17		17		17		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	163		156		155		35		45						80		51,61		80		49,08			
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			129.646.593.674		15.013.774.724		37.568.548.244		-		14.700.000						14.700.000	0	0,04		14.700.000	0	0,01		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	17		17		17		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			31.177.912.000		10.705.956.485		6.617.719.194		-		5.600.000						5.600.000	0	0,08		5.600.000	0	0,02		
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			77.038.214.962		13.040.387.912		13.931.240.896		942.677.788		2.980.902.219						3.923.580.007	51,61	28,16		3.923.580.007	49,08	5,09		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	163		156		155		35		45						80		51,61		80		49,08			
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			589.234.920.382		43.336.694.606		128.160.469.023		587.831.989		2.032.432.468						2.620.264.457	24,07	2,04		2.620.264.457	18,52	0,44		
			Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	18		19		18		0		4						4		22,22		4		22,22			
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	3		2		2		0		1						1		50		1		33,33			
		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			491.735.358.929		28.321.432.781		71.693.979.346		-		19.900.000						19.900.000	0	0,03		19.900.000	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			53.343.158.332		11.426.695.154		10.182.318.574		587.831.989		1.984.932.468						2.572.764.457	22,22	25,27		2.572.764.457	22,22	4,82		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	18		19		18		0		4						4		22,22		4		22,22			
		1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			44.156.403.121		3.588.566.671		46.284.171.103		-		27.600.000						27.600.000	50	0,06		27.600.000	33,33	0,06		
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	3		2		2		0		1						1		50		1		33,33			
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			4.321.623.479		1.014.611.779		2.613.668.648		-		20.800.000						20.800.000	83,33	0,8		20.800.000	83,33	0,48		
			Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	3		4		3		0		2						2		66,67		2		66,67			
				Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	3		3		3		2		1						3		100		3		100			
		1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			449.428.037		207.905.275		131.544.517		-		17.800.000						17.800.000	66,67	13,53		17.800.000	66,67	3,96		
			Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	3		4		3		0		2						2		66,67		2		66,67			
		1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			89.700.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			3.782.495.442		806.706.504		2.482.124.131		-		3.000.000						3.000.000	100	0,12		3.000.000	100	0,08		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	3		3		3		2		1						3		100		3		100			
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			3.848.666.598		478.226.455		770.478.025		-		15.000.000						15.000.000	100	1,95		15.000.000	100	0,39		
			Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah Nonformal	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	2		2		2		1		1						2		100		2		100			
		1.01.02.2.04.004 0	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			3.848.666.598		478.226.455		770.478.025		-		15.000.000						15.000.000	100	1,95		15.000.000	100	0,39		
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	2		2		2		1		1						2		100		2		100			
			Meningkatnya kualitas kompetensi siswa	Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	93		97,36		92,37		94,42		94,29						94,29		102,08		94,29		101,39			
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	96,52		96,01		96,22		96,04		96,35						96,35		100,14		96,35		99,82			
				Skor Kemampuan Literasi SD (Nilai)	84,37		81,93		74,37		0		81,93						81,93		110,17		81,93		97,11			
				Persentase anak usia 7-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (%)	63,27		63,27		63,27		42,54		59,18						59,18		93,54		59,18		93,54			
				Skor Kemampuan Literasi SMP (Nilai)	90,61		94,51		86,21		0		94,51						94,51		109,63		94,51		104,3			
				Skor Kemampuan Numerasi SD (Nilai)	75,39		72,59		63,79		0		72,59						72,59		113,8		72,59		96,29			
				Skor Kemampuan Numerasi SMP (Nilai)	80,68		90,03		74,68		0		90,03						90,03		120,55		90,03		111,59			
				Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun (%)	100		99,55		99,93		0		97,6						97,6		97,67		97,6		97,6			
				Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun (%)	100		100		100		0		97,6						97,6		97,6		97,6		97,6			
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			2.088.606.567.561		385.057.405.111		393.560.551.698		31.687.124.318		117.788.846.636						149.475.970.954	12,45	37,98		149.475.970.954	12,45	7,16		
			Meningkatnya penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik jenjang SD	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	652		259		652		0		283						283		43,4		283		43,4			
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	652		644		652		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.002 8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			1.081.971.632		157.542.400		158.840.000		-		5.600.000						5.600.000	43,4	3,53		5.600.000	43,4	0,52		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	652		259		652		0		283						283		43,4		283		43,4			
		1.01.02.2.01.005 0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			2.114.598.400		331.202.800		300.080.000		-		28.075.000						28.075.000	0	9,36		28.075.000	0	1,33		
			Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	652		644		652		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan gratis bagi anak usia sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	592		592		592		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	32513		31.915		32513		0		6.125						6.125		18,84		6.125		18,84			
		1.01.02.2.01.002 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			1.079.663.081.998		204.718.678.888		199.947.300.000		-		72.181.322.191						72.181.322.191	0	36,1		72.181.322.191	0	6,69		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	592		592		592		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.003 9	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			8.168.266.400		-		63.254.216		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.005 4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			997.578.649.131		179.849.981.023		193.091.077.482		31.687.124.318		45.573.849.445						77.260.973.763	18,84	40,01		77.260.973.763	18,84	7,74		
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	32513		31.915		32513		0		6.125						6.125		18,84		6.125		18,84			
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.315.940.108.100		227.247.074.218		252.804.191.553		19.440.752.222		77.383.894.788						96.824.647.010	7,69	38,3		96.824.647.010	7,69	7,36		
			Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan gratis bagi anak usia jenjang SMP	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	16362		16.120		16362		0		5.031						5.031		30,75		5.031		30,75			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	272		270		272		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			676.962.583.630		101.385.220.718		129.183.654.553		19.440.752.222		28.853.959.377						48.294.711.599	30,75	37,38		48.294.711.599	30,75	7,13		
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	16362		16.120		16362		0		5.031						5.031		30,75		5.031		30,75			
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			635.464.149.995		125.154.232.600		123.118.850.000		-		48.493.360.411						48.493.360.411	0	39,39		48.493.360.411	0	7,63		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	272		270		272		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik jenjang SMP	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	330		317		330		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	34707		34.706		34579		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			1.086.824.475		191.743.400		191.400.000		-		29.600.000						29.600.000	0	15,46		29.600.000	0	2,72		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	330		317		330		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			2.426.550.000		515.877.500		310.287.000		-		6.975.000						6.975.000	0	2,25		6.975.000	0	0,29		
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	34707		34.706		34579		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 4-6 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (%)	15,45		14,82		14,87		60,62		52,14						52,14		350,64		52,14		337,48			
				Persentase lembaga PAUD berkualitas (%)	90,01		96,69		89,93		80,79		74,61						74,61		82,96		74,61		82,89			
				Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun (%)	100		88,96		91,88		0		98,84						98,84		107,58		98,84		98,84			
				Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan (%)	100		115,38		100		100		97,73						97,73		97,73		97,73		97,73			
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100		100		100,00		100		100						100		100		100		100			
				Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	80,69		78,63		79,04		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			672.168.204.064		125.364.224.485		132.675.558.901		11.214.474.381		44.934.213.037						56.148.687.418	37,55	42,32		56.148.687.418	37	8,35		
			Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia jenjang PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	229		210		219		55		55						110		50,23		110		48,03			
				Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	2355		2.461		2355		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	2479		2.245		2479		1.239		0						1.239		49,98		1.239		49,98			
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	84669		88.878		84669		0		42.334						42.334		50		42.334		50			
		1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			23.193.751.519		4.300.276.582		8.505.901.536		758.500.000		1.935.211.000						2.693.711.000	50,23	31,67		2.693.711.000	48,03	11,61		
			Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	229		210		219		55		55						110		50,23		110		48,03			
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			2.260.720.852		302.760.050		989.086.560		90.514.781		150.507.010						241.021.791	0	24,37		241.021.791	0	10,66		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	2355		2.461		2355		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			293.212.400.000		58.114.007.853		55.186.980.000		-		27.471.294.127						27.471.294.127	49,98	49,78		27.471.294.127	49,98	9,37		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	2479		2.245		2479		1.239		0						1.239		49,98		1.239		49,98			
		1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			353.501.331.693		62.647.180.000		67.993.590.805		10.365.459.600		15.377.200.900						25.742.660.500	50	37,86		25.742.660.500	50	7,28		
			Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	84669		88.878		84669		0		42.334						42.334		50		42.334		50			
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			490.456.415.182		107.294.837.793		112.479.584.284		16.453.097.400		25.296.176.505						41.749.273.905	50	37,12		41.749.273.905	49,22	8,51		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan bagi anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	90		40		90		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	40		153		40		0		40						40		100		40		100			
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	32		25		30		15		0						15		50		15		46,88			
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	40		90		40		0		20						20		50		20		50			
		1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			38.507.125.245		5.433.149.170		6.823.033.081		439.211.200		1.357.417.500						1.796.628.700	0	26,33		1.796.628.700	0	4,67		
			Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	90		40		90		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			365.116.600		70.200.000		671.048.800		71.191.400		112.387.100						183.578.500	100	27,36		183.578.500	100	50,28		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	40		153		40		0		40						40		100		40		100			
		1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			26.364.550.000		4.997.434.444		5.024.890.000		-		2.342.106.905						2.342.106.905	50	46,61		2.342.106.905	46,88	8,88		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	32		25		30		15		0						15		50		15		46,88			
		1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			425.219.623.337		96.794.054.179		99.960.612.403		15.942.694.800		21.484.265.000						37.426.959.800	50	37,44		37.426.959.800	50	8,8		
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	40		90		40		0		20						20		50		20		50			
			Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terkait peningkatan karir, kompetensi dan kualifikasi	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan peningkatan karir, kompetensi dan kualifikasi (%)	90		80		83,5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			4.792.532.170		742.559.450		446.565.662		7.180.800		33.600.000						40.780.800	50,05	9,13		40.780.800	50,05	0,85		
			Terlaksananya Peningkatan Karir, Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	3135		4.191		3135		0		1.569						1.569		50,05		1.569		50,05			
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			4.792.532.170		742.559.450		446.565.662		7.180.800		33.600.000						40.780.800	50,05	9,13		40.780.800	50,05	0,85		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	3135		4.191		3135		0		1.569						1.569		50,05		1.569		50,05			
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			191.869.880		549.177.300		431.803.880		8.659.200		36.377.500						45.036.700	25,77	10,43		45.036.700	25,77	23,47		
			Terlaksananya Peningkatan Karir, Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1013		1.545		1013		0		522						522		51,53		522		51,53			
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	450		0		450		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		549.177.300		404.711.000		8.659.200		36.377.500						45.036.700	51,53	11,13		45.036.700	51,53	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1013		1.545		1013		0		522						522		51,53		522		51,53			
		1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			191.869.880		-		27.092.880		-		-						-	0	0		-	0	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	450		0		450		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			14.563.779.115		2.520.700.000		4.991.750.000		-		5.600.000						5.600.000	36,42	0,11		5.600.000	36,42	0,04		
			Terlaksananya Peningkatan Karir, Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	2600		3.813		2600		501		446						947		36,42		947		36,42			
		1.01.02.2.03.001 6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			14.563.779.115		2.520.700.000		4.991.750.000		-		5.600.000						5.600.000	36,42	0,11		5.600.000	36,42	0,04		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	2600		3.813		2600		501		446						947		36,42		947		36,42			
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			323.827.924		47.600.000		90.293.500		-		5.600.000						5.600.000	0	6,2		5.600.000	0	1,73		
			Terlaksananya Peningkatan Karir, Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	150		285		150		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.001 5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			323.827.924		47.600.000		90.293.500		-		5.600.000						5.600.000	0	6,2		5.600.000	0	1,73		
			Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	150		285		150		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya minat dan bakat siswa	Persentase siswa SD SMP yang berprestasi TK provinsi (%)	0,69		0,58		0,60		0,31		0,85						0,85		141,67		0,85		123,19			
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			10.424.110.623		1.329.926.872		1.105.309.800		11.592.000		94.308.000						105.900.000	53,52	9,58		105.900.000	53,52	1,02		
			Meningkatnya prestasi siswa jenjang SD di tingkat Kota	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	51050		71.117		51050		3.426		23.895						27.321		53,52		27.321		53,52			
		1.01.02.2.01.002 5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			10.424.110.623		1.329.926.872		1.105.309.800		11.592.000		94.308.000						105.900.000	53,52	9,58		105.900.000	53,52	1,02		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	51050		71.117		51050		3.426		23.895						27.321		53,52		27.321		53,52			
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		2.157.477.790		1.544.195.468		11.327.500		333.231.000						344.558.500	128,96	22,31		344.558.500	128,96	0		
			Meningkatnya prestasi siswa jenjang SMP di tingkat Kota	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	2220		2.576		2220		1.467		1.396						2.863		128,96		2.863		128,96			
		1.01.02.2.02.003 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			-		2.157.477.790		1.544.195.468		11.327.500		333.231.000						344.558.500	128,96	22,31		344.558.500	128,96	0		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	2220		2.576		2220		1.467		1.396						2.863		128,96		2.863		128,96			
	Meratanya Kualitas Pendidikan	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**199.643.587.880**		**40.373.479.800**		**39.912.859.843**		**6.050.550.000**		**9.278.213.200**						**15.328.763.200**	**25**	**38,41**		**15.328.763.200**	**25**	**7,68**	Dinas Pendidikan	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	89,82		87,32		87,82		0		0						0		0		0		0			
				Prosentase jumlah guru yang mendapat jumlah jam mengajar di sekolah (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	81,77		69,84		77,77		0		69,84						69,84		89,8		69,84		85,41			
				Persentase guru yang mendapat pengembangan karir (%)	60		25,44		35		0		0						0		0		0		0			
				Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	79,71		71,04		75,71		0		71,04						71,04		93,83		71,04		89,12			
				Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan			199.643.587.880		40.373.479.800		39.912.859.843		6.050.550.000		9.278.213.200						15.328.763.200	25	38,41		15.328.763.200	25	7,68		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya minimal Pendidik SD dan SMP	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1		446		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan			2.873.587.880		228.629.800		540.979.843		550.000		40.913.200						41.463.200	50	7,66		41.463.200	50	1,44		
			Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan			196.770.000.000		40.144.850.000		39.371.880.000		6.050.000.000		9.237.300.000						15.287.300.000	0	38,83		15.287.300.000	0	7,77		
			Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1		446		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**14.517.063.327.890**		**2.012.238.025.462**		**2.371.767.980.466**		**288.573.496.683**		**501.166.623.262**						**789.740.119.945**	**70,65**	**33,3**		**789.740.119.945**	**63,68**	**5,44**		
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.547.897.495.477**		**436.461.556.703**		**568.116.307.529**		**106.629.950.150**		**129.843.613.128**						**236.473.563.278**	**76,58**	**41,62**		**236.473.563.278**	**77,62**	**6,67**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesehatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	90		90,79		89,96		90,63		91,48						91,48		101,69		91,48		101,64			
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			264.257.600		-		81.767.520		-		16.131.000						16.131.000	33,33	19,73		16.131.000	37,5	6,1		
			Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		9		2		1						3		33,33		3		37,5			
		1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			264.257.600		-		81.767.520		-		16.131.000						16.131.000	33,33	19,73		16.131.000	37,5	6,1		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		9		2		1						3		33,33		3		37,5			
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.749.454.332.504		331.561.618.991		443.017.017.596		89.512.666.711		104.854.413.980						194.367.080.691	111,87	43,87		194.367.080.691	111,87	7,07		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2191		2.463		2191		2.451		2.451						2.451		111,87		2.451		111,87			
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.749.454.332.504		331.561.618.991		443.017.017.596		89.512.666.711		104.854.413.980						194.367.080.691	111,87	43,87		194.367.080.691	111,87	7,07		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2191		2.463		2191		2.451		2.451						2.451		111,87		2.451		111,87			
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			16.542.153.678		385.742.760		702.862.612		-		38.850.000						38.850.000	111,11	5,53		38.850.000	111,11	0,23		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		10		9		0		10						10		111,11		10		111,11			
		1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			16.542.153.678		385.742.760		702.862.612		-		38.850.000						38.850.000	111,11	5,53		38.850.000	111,11	0,23		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		10		9		0		10						10		111,11		10		111,11			
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			781.636.751.695		104.514.194.952		124.314.659.801		17.117.283.439		24.934.218.148						42.051.501.587	50	33,83		42.051.501.587	50	5,38		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			781.636.751.695		104.514.194.952		124.314.659.801		17.117.283.439		24.934.218.148						42.051.501.587	50	33,83		42.051.501.587	50	5,38		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.385.661.063.456**		**574.487.078.493**		**591.750.335.661**		**114.803.483.810**		**109.679.913.448**						**224.483.397.258**	**105,92**	**37,94**		**224.483.397.258**	**107,69**	**5,12**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana fasilitas	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar (%)	83		78		79		76,51		78,79						78,79		99,73		78,79		94,93			
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.405.124.977.050		22.561.266.581		21.379.738.645		39.765.750		1.678.011.822						1.717.777.572	319,05	8,03		1.717.777.572	319,05	0,12		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	0		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	4		3		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	13		6		13		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	70		30		70		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	33		33		33		283		454						737		2233,33		737		2233,33			
				Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			352.619.996.137		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas			80.074.307.499		9.241.985.275		9.499.999.955		-		701.743.999						701.743.999	0	7,39		701.743.999	0	0,88			
			Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	0		2		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			261.470.000		209.100.000		69.870.000		-		31.600.000						31.600.000	0	45,23		31.600.000	0	12,09			
			Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	4		3		4		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			44.611.043.478		4.437.010.249		5.864.215.425		-		911.021.400						911.021.400	0	15,54		911.021.400	0	2,04			
			Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	13		6		13		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			4.074.818.909		203.940.300		339.802.789		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			309.151.034.193		4.461.524.849		3.965.890.612		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	70		30		70		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			22.479.686.905		4.007.705.908		1.639.959.864		39.765.750		33.646.423						73.412.173	2233,33	4,48		73.412.173	2233,33	0,33			
			Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	33		33		33		283		454						737		2233,33		737		2233,33			
		1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit			591.852.619.929		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	98,41		0		95,45		95,24		95,24						95,24		99,78		95,24		96,78			
				Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	76		66		68		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.464.367.696		178.519.000		333.644.000		-		30.900.000						30.900.000	75	9,26		30.900.000	75	1,25		
			Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			626.219.476		85.600.000		116.600.000		-		13.400.000						13.400.000	50	11,49		13.400.000	50	2,14		
			Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	63		63		63		63		63						63		100		63		100			
		1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			1.838.148.220		92.919.000		217.044.000		-		17.500.000						17.500.000	100	8,06		17.500.000	100	0,95		
			Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	63		63		63		63		63						63		100		63		100			
			Meningkatnya cakupan pembiayaan peserta jaminan kesehatan daerah	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	80		0		80		82,71		83,26						83,26		104,08		83,26		104,08			
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	98,7		98		98,70		96,19		95,8						95,8		97,06		95,8		97,06			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.754.557.564.502		520.272.220.785		493.518.734.635		114.509.463.230		106.269.660.830						220.779.124.060	50	44,74		220.779.124.060	50	8,02		
			Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau			4.236.835.503		409.326.600		688.837.520		31.886.030		128.955.030						160.841.060	50	23,35		160.841.060	50	3,8		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			1.606.209.829		231.433.585		286.843.936		12.600.000		100.300.000						112.900.000	50	39,36		112.900.000	50	7,03		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dalam pemberian pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			2.748.714.519.170		519.631.460.600		492.543.053.179		114.464.977.200		106.040.405.800						220.505.383.000	50	44,77		220.505.383.000	50	8,02		
			Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kualitas obat dan perbekalan kesehatan	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) (Persentase)	100		0		100,00		100		100						100		100		100		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			144.950.630.480		22.931.056.257		22.917.667.281		2.899.600		25.942.806						28.842.406	100	0,13		28.842.406	100	0,02		
			Meningkatnya kualitas obat dan perbekalan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	5		5		5		3		2						5		100		5		100			
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas			144.950.630.480		22.931.056.257		22.917.667.281		2.899.600		25.942.806						28.842.406	100	0,13		28.842.406	100	0,02		
			Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	5		5		5		3		2						5		100		5		100			
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	11,4		0		12,20		30,77		2,22						2,22		181,8		2,22		180,53			
				Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	46		36		38		4,21		10,34						10,34		27,21		10,34		22,48			
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,55		0		0,59		0,25		0,44						0,44		125,42		0,44		120			
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	21,3		21,8		21,7		13,7		13,57						13,57		137,47		13,57		136,29			
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	91,5		90,8		90,90		90,14		90,19						90,19		99,22		90,19		98,57			
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	90		76		79		19,82		40,77						40,77		51,61		40,77		45,3			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			40.476.006.107		6.039.900.320		41.043.440.584		172.287.000		1.276.854.500						1.449.141.500	48,43	3,53		1.449.141.500	54,39	3,58		
			Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	192646		1.796.303		192644		312.545		344.063						656.608		34,08		656.608		34,08			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			8.376.385.125		1.198.015.748		1.476.753.124		-		119.166.400						119.166.400	34,08	8,07		119.166.400	34,08	1,42		
			Terlaksanaya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	192646		1.796.303		192644		312.545		344.063						656.608		34,08		656.608		34,08			
			Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	246204		238.167		246184		54.066		61.370						115.436		46,89		115.436		46,89			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	111502		82.636		111482		24.971		20.507						45.478		40,79		45.478		40,79			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	41047		95.316		66739		18.177		39.533						57.710		86,47		57.710		140,59			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	48792		54.529		49728		13.625		27.599						27.599		55,5		27.599		56,56			
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1013		719		1647		237		237						474		28,78		474		46,79			
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	205		988		205		234		0						234		114,15		234		114,15			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			849.002.960		80.854.800		168.119.600		-		7.391.600						7.391.600	46,89	4,4		7.391.600	46,89	0,87		
			Terlaksanaya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	246204		238.167		246184		54.066		61.370						115.436		46,89		115.436		46,89			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			351.091.450		48.472.000		84.810.400		-		-						-	40,79	0		-	40,79	0		
			Terlaksanaya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	111502		82.636		111482		24.971		20.507						45.478		40,79		45.478		40,79			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.116.160.036		820.429.100		12.855.120.600		72.320.000		165.027.600						237.347.600	86,47	1,85		237.347.600	140,59	7,62		
			Terlaksanaya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	41047		95.316		66739		18.177		39.533						57.710		86,47		57.710		140,59			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			2.905.010.434		372.040.000		1.332.647.800		35.257.000		134.251.000						169.508.000	55,5	12,72		169.508.000	56,56	5,84		
			Terlaksanaya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	48792		54.529		49728		13.625		27.599						27.599		55,5		27.599		56,56			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			6.238.501.835		697.008.960		1.045.518.001		-		-						-	28,78	0		-	46,79	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1013		719		1647		237		237						474		28,78		474		46,79			
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			5.374.121.715		748.781.136		898.867.200		-		-						-	114,15	0		-	114,15	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	205		988		205		234		0						234		114,15		234		114,15			
			Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	5974		7.166		5823		1.632		2.122						3.754		64,47		3.754		62,84			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			3.127.905.641		490.680.590		540.194.135		-		180.858.000						180.858.000	64,47	33,48		180.858.000	62,84	5,78		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	5974		7.166		5823		1.632		2.122						3.754		64,47		3.754		62,84			
			Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	10		10		10		1		1						1		10		1		10			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			903.090.194		141.108.500		228.789.000		18.082.000		46.252.000						64.334.000	50	28,12		64.334.000	50	7,12		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			3.973.007.624		536.480.486		934.812.824		1.696.000		111.276.000						112.972.000	50	12,08		112.972.000	50	2,84		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			5.066.767.974		878.729.000		21.445.107.900		44.932.000		511.724.400						556.656.400	0	2,6		556.656.400	0	10,99		
			Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			194.961.119		27.300.000		32.700.000		-		907.500						907.500	10	2,78		907.500	10	0,47		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	10		10		10		1		1						1		10		1		10			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	92		90		90,50		99,69		97,92						197,61		218,35		197,61		214,79			
				Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita (%)	1,62		2,12		2,02		2,01		2,02						2,02		100		2,02		75,31			
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,97		4,02		4,01		0,81		1,45						1,45		163,84		1,45		163,48			
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	100		100		100		12,31		21,87						34,18		34,18		34,18		34,18			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			38.087.517.621		2.504.115.550		12.557.110.516		79.068.230		398.543.490						477.611.720	43	3,8		477.611.720	41,72	1,25		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	35434		37.154		36664		8.388		11.692						20.080		54,77		20.080		56,67			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	35248		36.650		36468		6.955		6.946						13.901		38,12		13.901		39,44			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	33919		30.426		35139		4.942		5.066						10.008		28,48		10.008		29,51			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	779117		391.142		472640		99.219		111.730						210.949		44,63		210.949		27,08			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.295.455.259		394.400.440		480.845.200		64.804.230		117.618.490						182.422.720	54,77	37,94		182.422.720	56,67	5,54		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	35434		37.154		36664		8.388		11.692						20.080		54,77		20.080		56,67			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			702.182.899		109.620.000		117.700.000		-		-						-	38,12	0		-	39,44	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	35248		36.650		36468		6.955		6.946						13.901		38,12		13.901		39,44			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			11.073.836.872		111.500.000		6.604.023.827		14.000.000		29.500.000						43.500.000	28,48	0,66		43.500.000	29,51	0,39		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	33919		30.426		35139		4.942		5.066						10.008		28,48		10.008		29,51			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			715.977.064		40.000.000		37.200.000		-		7.400.000						7.400.000	44,63	19,89		7.400.000	27,08	1,03		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	779117		391.142		472640		99.219		111.730						210.949		44,63		210.949		27,08			
			Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			267.914.693		41.470.000		44.885.000		-		22.780.000						22.780.000	50	50,75		22.780.000	50	8,5		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			4.318.620.156		571.189.750		1.653.918.680		264.000		180.292.500						180.556.500	50	10,92		180.556.500	50	4,18		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1.958.206.878		182.201.220		283.339.320		-		5.600.000						5.600.000	50	1,98		5.600.000	50	0,29		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	173022		269.159		181238		86.672		68.222						68.222		37,64		68.222		39,43			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12		12		12		1		3						4		33,33		4		33,33			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			15.510.198.633		1.018.364.140		2.458.468.489		-		3.000.000						3.000.000	37,64	0,12		3.000.000	39,43	0,02		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	173022		269.159		181238		86.672		68.222						68.222		37,64		68.222		39,43			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			245.125.167		35.370.000		876.730.000		-		32.352.500						32.352.500	33,33	3,69		32.352.500	33,33	13,2		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12		12		12		1		3						4		33,33		4		33,33			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**13.116.368.014**		**1.735.400.000**		**2.348.007.500**		**20.356.000**		**32.630.500**						**52.986.500**	**18,89**	**2,26**		**52.986.500**	**35,43**	**0,4**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya mutu dan distribusi SDM kesehatan	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah			2.035.653.762		-		387.269.500		20.356.000		27.030.500						47.386.500	3,92	12,24		47.386.500	50,79	2,33		
			Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan yang sesuai kebutuhan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	126		0		1632		0		64						64		3,92		64		50,79			
		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			2.035.653.762		-		387.269.500		20.356.000		27.030.500						47.386.500	3,92	12,24		47.386.500	50,79	2,33		
			Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	126		0		1632		0		64						64		3,92		64		50,79			
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah			11.080.714.252		1.735.400.000		1.960.738.000		-		5.600.000						5.600.000	33,86	0,29		5.600.000	20,06	0,05		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pembinaan SDM Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	319		206		189		0		64						64		33,86		64		20,06			
		1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah			11.080.714.252		1.735.400.000		1.960.738.000		-		5.600.000						5.600.000	33,86	0,29		5.600.000	20,06	0,05		
			Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	319		206		189		0		64						64		33,86		64		20,06			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**3.042.004.128**		**440.478.350**		**218.827.763**		-		**5.600.000**						**5.600.000**	**48**	**2,56**		**5.600.000**	**48**	**0,18**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya keamanan pangan olahan	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	100		0		100,00		0		0						0		0		0		0			
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah			3.042.004.128		440.478.350		218.827.763		-		5.600.000						5.600.000	48	2,56		5.600.000	48	0,18		
			Meningkatnya kualitas pemeriksaan sampel makanan minuman industri rumah tangga dan siap saji	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	150		151		150		51		21						72		48		72		48			
		1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan			3.042.004.128		440.478.350		218.827.763		-		5.600.000						5.600.000	48	2,56		5.600.000	48	0,18		
			Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	150		151		150		51		21						72		48		72		48			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.177.549.513**		**411.650.000**		**703.328.740**		**4.597.500**		**30.499.500**						**35.097.000**	**50**	**4,99**		**35.097.000**	**50**	**0,84**	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	80		0		65		89,62		91,01						91,01		140,02		91,01		113,76			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			4.177.549.513		411.650.000		703.328.740		4.597.500		30.499.500						35.097.000	50	4,99		35.097.000	50	0,84		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			4.177.549.513		411.650.000		703.328.740		4.597.500		30.499.500						35.097.000	50	4,99		35.097.000	50	0,84		
			Terlaksanaya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.277.712.939**		**939.272.250**		**2.538.075.310**		-		-						-	**100**	**0**		-	**100**	**0**	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			11.277.712.939		939.272.250		2.538.075.310		-		-						-	100	0		-	100	0		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di Laboratuirum Kesehatan Masyarakat (Labkesda)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			11.277.712.939		939.272.250		2.538.075.310		-		-						-	100	0		-	100	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**690.012.503**		**195.169.028**		**131.944.000**		-		**9.127.672**						**9.127.672**	**50**	**6,92**		**9.127.672**	**50**	**1,32**	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		50				50			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			690.012.503		195.169.028		131.944.000		-		9.127.672						9.127.672	50	6,92		9.127.672	50	1,32		
			Terpenuhinya operasional fasilitas kesehatan lainnya pada Labkesda	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			690.012.503		195.169.028		131.944.000		-		9.127.672						9.127.672	50	6,92		9.127.672	50	1,32		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			-		**58.624.050**		**123.585.000**		**6.651.140**		**12.868.510**						**19.519.650**	**50**	**15,79**		**19.519.650**	**50**	**0**	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		50				50			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		58.624.050		123.585.000		6.651.140		12.868.510						19.519.650	50	15,79		19.519.650	50	0		
			Terpenuhinya operasional fasilitas kesehatan lainnya pada IFK	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-		58.624.050		123.585.000		6.651.140		12.868.510						19.519.650	50	15,79		19.519.650	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.837.657.989**		**2.575.808.327**		**2.751.992.053**		-		**610.191.291**						**610.191.291**	**100**	**22,17**		**610.191.291**	**100**	**4,41**	Puskesmas Asemrowo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			13.837.657.989		2.575.808.327		2.751.992.053		-		610.191.291						610.191.291	100	22,17		610.191.291	100	4,41		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Asemrowo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			13.837.657.989		2.575.808.327		2.751.992.053		-		610.191.291						610.191.291	100	22,17		610.191.291	100	4,41		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**7.544.936.018**		**1.141.347.852**		**1.305.654.992**		**18.331.500**		**61.490.940**						**79.822.440**	**56,36**	**6,11**		**79.822.440**	**60,31**	**1,06**	Puskesmas Asemrowo	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		56,67				63,99			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			952.241.351		147.723.100		37.652.000		-		6.624.000						6.624.000	56,67	17,59		6.624.000	63,99	0,7		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Asemrowo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7030		6.862		7745		1.298		4.580						5.878		75,89		5.878		83,61			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	96		137		92		31		17						48		52,17		48		50			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	646		1.089		1046		319		329						648		61,95		648		100,31			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			7.658.399		1.200.000		660.000		-		-						-	75,89	0		-	83,61	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7030		6.862		7745		1.298		4.580						5.878		75,89		5.878		83,61			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			32.021.251		5.040.000		1.980.000		-		360.000						360.000	52,17	18,18		360.000	50	1,12		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	96		137		92		31		17						48		52,17		48		50			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			126.852.533		19.872.000		16.420.000		-		5.544.000						5.544.000	61,95	33,76		5.544.000	100,31	4,37		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	646		1.089		1046		319		329						648		61,95		648		100,31			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			50.949.787		6.752.800		8.682.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			727.163.375		113.673.300		9.360.000		-		720.000						720.000	50	7,69		720.000	50	0,1		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			7.596.006		1.185.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		56,06				56,64			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.592.694.667		993.624.752		1.268.002.992		18.331.500		54.866.940						73.198.440	56,06	5,77		73.198.440	56,64	1,11		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Asemrowo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	599		764		623		257		281						538		86,36		538		89,82			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		69.696.000		-		4.356.000						4.356.000	86,36	6,25		4.356.000	89,82	1,05		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	599		764		623		257		281						538		86,36		538		89,82			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.926.462.612		301.784.506		289.057.400		-		2.579.940						2.579.940	50	0,89		2.579.940	50	0,13		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			20.480.126		3.210.000		2.640.000		-		780.000						780.000	50	29,55		780.000	50	3,81		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			4.171.924.641		614.227.246		904.602.092		18.331.500		47.151.000						65.482.500	50	7,24		65.482.500	50	1,57		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			48.713.237		7.623.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			9.191.087		1.440.000		1.320.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**19.467.911**		**3.010.000**		**15.054.600**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Asemrowo	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			19.467.911		3.010.000		15.054.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Asemrowo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			19.467.911		3.010.000		15.054.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.120.825.790**		**1.041.914.917**		**1.018.414.524**		-		**240.933.850**						**240.933.850**	**100**	**23,66**		**240.933.850**	**100**	**4,7**	Puskesmas Balas Klumprik	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			5.120.825.790		1.041.914.917		1.018.414.524		-		240.933.850						240.933.850	100	23,66		240.933.850	100	4,7		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Balasklumprik	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			5.120.825.790		1.041.914.917		1.018.414.524		-		240.933.850						240.933.850	100	23,66		240.933.850	100	4,7		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.419.929.369**		**686.668.757**		**622.790.834**		-		**22.406.500**						**22.406.500**	**59,33**	**3,6**		**22.406.500**	**62,06**	**0,51**	Puskesmas Balas Klumprik	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		64,46				69,63			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			517.469.235		78.259.800		24.794.000		-		791.000						791.000	64,46	3,19		791.000	69,63	0,15		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2042		2.081		2249		378		1.006						1.384		61,54		1.384		67,78			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	34		49		30		13		21						34		113,33		34		100			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	193		285		312		102		91						193		61,86		193		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			6.701.100		1.050.000		690.000		-		-						-	61,54	0		-	67,78	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2042		2.081		2249		378		1.006						1.384		61,54		1.384		67,78			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.579.777		1.980.000		360.000		-		-						-	113,33	0		-	100	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	34		49		30		13		21						34		113,33		34		100			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			107.702.090		15.290.000		14.760.000		-		791.000						791.000	61,86	5,36		791.000	100	0,73		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	193		285		312		102		91						193		61,86		193		100			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			18.577.037		2.342.800		2.794.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			365.467.048		56.592.000		5.640.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			6.442.183		1.005.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		54,21				54,49			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.902.460.134		608.408.957		597.996.834		-		21.615.500						21.615.500	54,21	3,61		21.615.500	54,49	0,55		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Balas Klumprik	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	182		168		186		79		61						140		75,27		140		76,92			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			147.883.720		23.232.000		23.232.000		-		-						-	75,27	0		-	76,92	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	182		168		186		79		61						140		75,27		140		76,92			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.471.609.066		229.656.600		163.634.200		-		2.724.000						2.724.000	50	1,66		2.724.000	50	0,19		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.550.000		-		540.000						540.000	50	21,18		540.000	50	30,23		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.248.793.053		350.175.357		407.343.134		-		18.351.500						18.351.500	50	4,51		18.351.500	50	0,82		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			23.196.780		3.630.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			9.191.087		1.440.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**30.158.689**		**4.690.000**		**7.939.800**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Balas Klumprik	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			30.158.689		4.690.000		7.939.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Balasklumprik	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			30.158.689		4.690.000		7.939.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.145.429.943**		**2.396.590.514**		**2.614.323.809**		-		**512.267.856**						**512.267.856**	**100**	**19,59**		**512.267.856**	**100**	**3,9**	Puskesmas Balongsari	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			13.145.429.943		2.396.590.514		2.614.323.809		-		512.267.856						512.267.856	100	19,59		512.267.856	100	3,9		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Balongsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			13.145.429.943		2.396.590.514		2.614.323.809		-		512.267.856						512.267.856	100	19,59		512.267.856	100	3,9		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.924.286.726**		**805.169.669**		**1.511.841.484**		-		**39.367.500**						**39.367.500**	**55,69**	**2,6**		**39.367.500**	**57,25**	**0,66**	Puskesmas Balongsari	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		58,61				61,33			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.032.114.855		153.682.800		61.527.000		-		4.130.000						4.130.000	58,61	6,71		4.130.000	61,33	0,4		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Balongsari	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4774		3.425		5259		649		1.999						2.648		50,35		2.648		55,47			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	59		143		55		15		51						66		120		66		111,86			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	482		713		780		124		120						244		31,28		244		50,62			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			8.041.320		1.260.000		4.860.000		-		-						-	50,35	0		-	55,47	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4774		3.425		5259		649		1.999						2.648		50,35		2.648		55,47			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			22.872.322		3.600.000		3.600.000		-		600.000						600.000	120	16,67		600.000	111,86	2,62		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	59		143		55		15		51						66		120		66		111,86			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			117.660.320		18.432.000		14.160.000		-		1.250.000						1.250.000	31,28	8,83		1.250.000	50,62	1,06		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	482		713		780		124		120						244		31,28		244		50,62			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			50.758.534		360.000		8.742.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			820.234.526		128.253.300		29.340.000		-		2.280.000						2.280.000	50	7,77		2.280.000	50	0,28		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12.547.833		1.777.500		825.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		52,77				53,17			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.892.171.871		651.486.869		1.450.314.484		-		35.237.500						35.237.500	52,77	2,43		35.237.500	53,17	0,72		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Balongsari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	439		464		455		108		195						303		66,59		303		69,02			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		69.696.000		-		-						-	66,59	0		-	69,02	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	439		464		455		108		195						303		66,59		303		69,02			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.138.995.835		164.553.456		288.230.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			18.374.694		2.880.000		2.670.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.225.610.119		404.112.413		1.087.380.784		-		35.234.500						35.234.500	50	3,24		35.234.500	50	1,09		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			62.631.305		9.801.000		687.500		-		3.000						3.000	50	0,44		3.000	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			30.636.954		4.800.000		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**25.576.927**		**3.994.640**		**17.377.800**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Balongsari	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			25.576.927		3.994.640		17.377.800		-		-						-	50	0		-	50	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Balongsari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			25.576.927		3.994.640		17.377.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.284.000.279**		**1.026.123.955**		**1.050.866.179**		-		**224.033.269**						**224.033.269**	**100**	**21,32**		**224.033.269**	**100**	**4,24**	Puskesmas Bangkingan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			5.284.000.279		1.026.123.955		1.050.866.179		-		224.033.269						224.033.269	100	21,32		224.033.269	100	4,24		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Bangkingan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			5.284.000.279		1.026.123.955		1.050.866.179		-		224.033.269						224.033.269	100	21,32		224.033.269	100	4,24		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.560.419.840**		**607.403.162**		**858.279.596**		-		**24.622.500**						**24.622.500**	**55,31**	**2,87**		**24.622.500**	**57,32**	**0,54**	Puskesmas Bangkingan	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		60,75				64,6			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			759.924.870		116.373.000		34.368.000		-		2.486.000						2.486.000	60,75	7,23		2.486.000	64,6	0,33		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Bangkingan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1982		2.016		2183		206		1.200						1.406		64,41		1.406		70,94			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	34		34		30		21		10						31		103,33		31		91,18			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	200		298		323		74		77						151		46,75		151		75,5			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			8.424.239		1.320.000		3.540.000		-		-						-	64,41	0		-	70,94	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatari Sesuai Standar (Orang)	1982		2.016		2183		206		1.200						1.406		64,41		1.406		70,94			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			11.436.161		1.800.000		1.800.000		-		-						-	103,33	0		-	91,18	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	34		34		30		21		10						31		103,33		31		91,18			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			111.532.178		16.116.000		14.160.000		-		2.486.000						2.486.000	46,75	17,56		2.486.000	75,5	2,23		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	200		298		323		74		77						151		46,75		151		75,5			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			35.241.544		4.770.000		5.588.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			586.271.653		91.422.000		8.730.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			7.019.095		945.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		49,86				50,05			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.800.494.970		491.030.162		823.911.596		-		22.136.500						22.136.500	49,86	2,69		22.136.500	50,05	0,58		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Bangkingan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	179		206		183		52		38						90		49,18		90		50,28			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			295.767.440		46.464.000		46.464.000		-		5.808.000						5.808.000	49,18	12,5		5.808.000	50,28	1,96		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	179		206		183		52		38						90		49,18		90		50,28			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.210.650.050		187.688.550		147.859.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.520.000		-		3.000						3.000	50	0,12		3.000	50	0,17		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.235.130.747		247.656.612		625.830.296		-		16.325.500						16.325.500	50	2,61		16.325.500	50	0,73		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			51.032.915		7.986.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			6.127.390		960.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**24.813.301**		**3.730.000**		**11.497.200**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**50**	**0**	Puskesmas Bangkingan	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			24.813.301		3.730.000		11.497.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Bangkingan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			24.813.301		3.730.000		11.497.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**18.771.119.658**		**3.043.746.343**		**3.733.144.161**		**-**		**989.567.172**						**989.567.172**	**100**	**26,51**		**989.567.172**	**100**	**5,27**	Puskesmas Banyu Urip	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			18.771.119.658		3.043.746.343		3.733.144.161		-		989.567.172						989.567.172	100	26,51		989.567.172	100	5,27		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Banyu Urip	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			18.771.119.658		3.043.746.343		3.733.144.161		-		989.567.172						989.567.172	100	26,51		989.567.172	100	5,27		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.576.669.711**		**1.098.343.461**		**1.125.384.684**		**-**		**54.347.300**						**54.347.300**	**51,68**	**4,83**		**54.347.300**	**55,52**	**0,83**	Puskesmas Banyu Urip	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		52,29				59,61			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			742.692.379		113.504.000		44.298.000		-		2.712.000						2.712.000	52,29	6,12		2.712.000	59,61	0,37		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8608		7.906		9484		1.114		3.906						5.020		52,93		5.020		58,32			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	128		120		120		12		41						53		44,17		53		41,41			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	880		1.605		1425		351		599						950		66,67		950		107,95			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			7.275.479		1.140.000		1.260.000		-		-						-	52,93	0		-	58,32	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8608		7.906		9484		1.114		3.906						5.020		52,93		5.020		58,32			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			20.585.090		3.240.000		2.250.000		-		-						-	44,17	0		-	41,41	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	128		120		120		12		41						53		44,17		53		41,41			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			104.446.514		16.362.000		16.720.000		-		2.712.000						2.712.000	66,67	16,22		2.712.000	107,95	2,6		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	880		1.605		1425		351		599						950		66,67		950		107,95			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			36.006.555		2.792.000		5.948.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			560.677.085		87.832.500		16.470.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			13.701.656		2.137.500		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		51,07				51,42			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.833.977.332		984.839.461		1.081.086.684		-		51.635.300						51.635.300	51,07	4,78		51.635.300	51,42	0,89		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	755		757		783		261		181						442		56,45		442		58,54			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			295.767.440		46.464.000		46.464.000		-		5.082.000						5.082.000	56,45	10,94		5.082.000	58,54	1,72		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	755		757		783		261		181						442		56,45		442		58,54			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.207.985.783		344.012.925		183.362.800		-		9.198.300						9.198.300	50	5,02		9.198.300	50	0,42		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.233.024.994		579.147.536		846.772.384		-		37.355.000						37.355.000	50	4,41		37.355.000	50	1,16		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			46.393.559		7.260.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			49.019.128		7.680.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**18.390.686**		**2.890.000**		**13.312.200**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Banyu Urip	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			18.390.686		2.890.000		13.312.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Banyu Urip	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			18.390.686		2.890.000		13.312.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**17.233.327.912**		**3.131.515.785**		**3.427.312.736**		-		**6.184.124.510**						**6.184.124.510**	**100**	**180,44**		**6.184.124.510**	**100**	**35,88**	Puskesmas Benowo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			17.233.327.912		3.131.515.785		3.427.312.736		-		6.184.124.510						6.184.124.510	100	180,44		6.184.124.510	100	35,88		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Benowo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			17.233.327.912		3.131.515.785		3.427.312.736		-		6.184.124.510						6.184.124.510	100	180,44		6.184.124.510	100	35,88		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**8.007.676.069**		**1.137.795.126**		**2.262.423.172**		-		**52.744.465**						**52.744.465**	**55,96**	**2,33**		**52.744.465**	**59,26**	**0,66**	Puskesmas Benowo	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		58,71				64,91			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			999.605.464		143.042.700		80.796.000		-		2.260.000						2.260.000	58,71	2,8		2.260.000	64,91	0,23		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Benowo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8495		8.306		9359		1.805		4.167						5.972		63,81		5.972		70,3			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	128		106		120		49		48						97		80,83		97		75,78			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	802		16.575		1300		378		371						749		57,62		749		93,39			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			22.975.198		3.540.000		11.280.000		-		-						-	63,81	0		-	70,3	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8495		8.306		9359		1.805		4.167						5.972		63,81		5.972		70,3			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			16.010.625		2.520.000		1.800.000		-		-						-	80,83	0		-	75,78	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	128		106		120		49		48						97		80,83		97		75,78			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			105.404.037		16.159.000		13.560.000		-		2.260.000						2.260.000	57,62	16,67		2.260.000	93,39	2,14		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	802		16.575		1300		378		371						749		57,62		749		93,39			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			72.778.123		5.302.000		11.356.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			764.889.747		113.981.700		40.050.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			17.547.734		1.540.000		2.750.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		53,2				53,61			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.008.070.605		994.752.426		2.181.627.172		-		50.484.465						50.484.465	53,2	2,31		50.484.465	53,61	0,72		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Benowo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	671		695		695		129		352						481		69,21		481		71,68			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			480.622.091		75.504.000		75.504.000		-		-						-	69,21	0		-	71,68	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	671		695		695		129		352						481		69,21		481		71,68			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.042.243.382		274.856.846		615.143.100		-		12.946.965						12.946.965	50	2,1		12.946.965	50	0,63		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			26.413.620		4.140.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			4.304.730.483		617.811.580		1.485.392.572		-		37.537.500						37.537.500	50	2,53		37.537.500	50	0,87		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			92.787.119		14.520.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			61.273.910		7.920.000		2.200.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**26.340.555**		**3.520.000**		**22.713.900**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Benowo	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			26.340.555		3.520.000		22.713.900		-		-						-	50	0		-	50	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Benowo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			26.340.555		3.520.000		22.713.900		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.165.227.775**		**2.519.736.610**		**2.419.384.132**		-		**753.279.423**						**753.279.423**	**100**	**31,14**		**753.279.423**	**100**	**6,19**	Puskesmas Bulak Banteng	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			12.165.227.775		2.519.736.610		2.419.384.132		-		753.279.423						753.279.423	100	31,14		753.279.423	100	6,19		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			12.165.227.775		2.519.736.610		2.419.384.132		-		753.279.423						753.279.423	100	31,14		753.279.423	100	6,19		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.980.159.115**		**1.053.669.259**		**1.322.035.392**		-		**41.737.000**						**41.737.000**	**57**	**3,16**		**41.737.000**	**61,23**	**0,6**	Puskesmas Bulak Banteng	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		63,96				72,12			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			909.461.454		142.227.300		55.304.000		-		4.850.000						4.850.000	63,96	8,77		4.850.000	72,12	0,53		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5336		4.991		5879		1.487		2.071						3.558		60,52		3.558		66,68			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	75		104		71		15		53						68		95,77		68		90,67			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	485		763		785		252		356						608		77,45		608		125,36			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			8.615.699		1.350.000		1.500.000		-		-						-	60,52	0		-	66,68	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatari Sesuai Standar (Orang)	5336		4.991		5879		1.487		2.071						3.558		60,52		3.558		66,68			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			22.872.322		3.600.000		2.700.000		-		330.000						330.000	95,77	12,22		330.000	90,67	1,44		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	75		104		71		15		53						68		95,77		68		90,67			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			111.532.178		17.472.000		13.860.000		-		4.520.000						4.520.000	77,45	32,61		4.520.000	125,36	4,05		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	485		763		785		252		356						608		77,45		608		125,36			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			21.637.085		3.132.000		3.514.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			739.419.659		115.833.300		33.180.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			5.384.511		840.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		50,04				50,35			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.070.697.661		911.441.959		1.266.731.392		-		36.887.000						36.887.000	50,04	2,91		36.887.000	50,35	0,61		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	547		577		567		147		138						285		50,26		285		52,1			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			147.883.720		23.232.000		14.520.000		-		726.000						726.000	50,26	5		726.000	52,1	0,49		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	547		577		567		147		138						285		50,26		285		52,1			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.743.846.787		273.153.879		316.414.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12.632.602		1.980.000		2.550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			4.135.478.532		608.246.080		932.009.292		-		36.161.000						36.161.000	50	3,88		36.161.000	50	0,87		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			23.196.780		3.630.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			7.659.240		1.200.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**20.995.165**		**3.250.000**		**11.609.400**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Bulak Banteng	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			20.995.165		3.250.000		11.609.400		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Bulak Banteng	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			20.995.165		3.250.000		11.609.400		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.045.683.507**		**2.673.455.964**		**2.594.486.536**		-		**546.001.160**						**546.001.160**	**100**	**21,04**		**546.001.160**	**100**	**4,19**	Puskesmas Dr. Soetomo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			13.045.683.507		2.673.455.964		2.594.486.536		-		546.001.160						546.001.160	100	21,04		546.001.160	100	4,19		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			13.045.683.507		2.673.455.964		2.594.486.536		-		546.001.160						546.001.160	100	21,04		546.001.160	100	4,19		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.338.506.048**		**946.198.242**		**1.642.132.588**		-		**64.578.958**						**64.578.958**	**52,93**	**3,93**		**64.578.958**	**56,84**	**1,02**	Puskesmas Dr. Soetomo	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		55,25				62,74			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.252.157.334		194.982.000		49.117.000		-		4.100.000						4.100.000	55,25	8,35		4.100.000	62,74	0,33		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7361		6.956		8111		3.357		2.448						5.805		71,57		5.805		78,86			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	118		91		110		17		32						49		44,55		49		41,53			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	791		1.192		1283		284		555						839		65,39		839		106,07			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			34.462.798		5.400.000		2.280.000		-		-						-	71,57	0		-	78,86	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7361		6.956		8111		3.357		2.448						5.805		71,57		5.805		78,86			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			28.590.402		4.500.000		2.700.000		-		-						-	44,55	0		-	41,53	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	118		91		110		17		32						49		44,55		49		41,53			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			149.833.064		23.472.000		13.860.000		-		1.130.000						1.130.000	65,39	8,15		1.130.000	106,07	0,75		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	791		1.192		1283		284		555						839		65,39		839		106,07			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			55.348.605		7.494.000		8.772.000		-		120.000						120.000	50	1,37		120.000	50	0,22		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			953.634.595		149.391.000		20.130.000		-		2.850.000						2.850.000	50	14,16		2.850.000	50	0,3		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			30.287.870		4.725.000		1.375.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		50,6				50,95			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.086.348.714		751.216.242		1.593.015.588		-		60.478.958						60.478.958	50,6	3,8		60.478.958	50,95	1,19		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	616		696		640		178		165						343		53,59		343		55,68			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		69.696.000		-		12.342.000						12.342.000	53,59	17,71		12.342.000	55,68	2,97		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	616		696		640		178		165						343		53,59		343		55,68			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.500.508.413		235.059.093		196.014.200		-		15.433.458						15.433.458	50	7,87		15.433.458	50	1,03		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		360.000						360.000	50	13,33		360.000	50	20,15		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.023.348.592		427.874.149		1.322.267.888		-		32.343.500						32.343.500	50	2,45		32.343.500	50	1,07		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			83.508.407		13.068.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			61.273.910		9.600.000		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**26.026.958**		**2.770.000**		**15.925.800**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Dr. Soetomo	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			26.026.958		2.770.000		15.925.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Dr. Soetomo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			26.026.958		2.770.000		15.925.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**18.197.527.487**		**3.674.957.561**		**3.619.069.865**		-		**798.800.380**						**798.800.380**	**100**	**22,07**		**798.800.380**	**100**	**4,39**	Puskesmas Dukuh Kupang	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			18.197.527.487		3.674.957.561		3.619.069.865		-		798.800.380						798.800.380	100	22,07		798.800.380	100	4,39		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			18.197.527.487		3.674.957.561		3.619.069.865		-		798.800.380						798.800.380	100	22,07		798.800.380	100	4,39		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.156.002.634**		**1.063.360.643**		**1.662.296.076**		-		**35.787.500**						**35.787.500**	**50,34**	**2,15**		**35.787.500**	**53,27**	**0,58**	Puskesmas Dukuh Kupang	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		47,94				53,38			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			944.935.772		146.806.000		48.666.000		-		3.552.000						3.552.000	47,94	7,3		3.552.000	53,38	0,38		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7863		6.544		8664		136		2.715						2.851		32,91		2.851		36,26			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	123		56		115		16		44						60		52,17		60		48,78			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	827		1.236		1341		398		307						705		52,57		705		85,25			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			16.465.559		2.580.000		13.380.000		-		720.000						720.000	32,91	5,38		720.000	36,26	4,37		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7863		6.544		8664		136		2.715						2.851		32,91		2.851		36,26			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			13.723.393		2.160.000		2.160.000		-		-						-	52,17	0		-	48,78	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	123		56		115		16		44						60		52,17		60		48,78			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			113.064.214		17.712.000		14.520.000		-		-						-	52,57	0		-	85,25	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	827		1.236		1341		398		307						705		52,57		705		85,25			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			75.073.159		10.600.000		11.476.000		-		2.232.000						2.232.000	50	19,45		2.232.000	50	2,97		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			707.379.053		110.814.000		6.030.000		-		600.000						600.000	50	9,95		600.000	50	0,08		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			19.230.394		2.940.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		52,74				53,16			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.211.066.862		916.554.643		1.613.630.076		-		32.235.500						32.235.500	52,74	2		32.235.500	53,16	0,62		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	835		670		867		184		392						576		66,44		576		68,98			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			480.622.091		75.504.000		92.928.000		-		-						-	66,44	0		-	68,98	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	835		670		867		184		392						576		66,44		576		68,98			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.819.852.034		284.329.352		300.620.200		-		4.966.500						4.966.500	50	1,65		4.966.500	50	0,27		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			22.776.963		3.570.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.795.203.907		538.655.291		1.214.494.376		-		27.269.000						27.269.000	50	2,25		27.269.000	50	0,98		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			74.229.695		11.616.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			18.382.172		2.880.000		2.200.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**26.340.555**		**4.125.200**		**17.377.800**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Dukuh Kupang	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			26.340.555		4.125.200		17.377.800		-		-						-	50	0		-	50	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Dukuh Kupang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			26.340.555		4.125.200		17.377.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.423.498.223**		**2.225.001.257**		**2.072.994.165**		-		**488.709.112**						**488.709.112**	**100**	**23,58**		**488.709.112**	**100**	**4,69**	Puskesmas Dupak	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			10.423.498.223		2.225.001.257		2.072.994.165		-		488.709.112						488.709.112	100	23,58		488.709.112	100	4,69		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Dupak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			10.423.498.223		2.225.001.257		2.072.994.165		-		488.709.112						488.709.112	100	23,58		488.709.112	100	4,69		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.594.706.421**		**836.649.398**		**770.980.992**		-		**42.502.087**						**42.502.087**	**48,1**	**5,51**		**42.502.087**	**51,15**	**0,76**	Puskesmas Dupak	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		46,09				51,9			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			508.375.085		79.252.000		24.544.000		-		5.060.000						5.060.000	46,09	20,62		5.060.000	51,9	1		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Dupak	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3788		3.015		4173		408		381						789		18,91		789		20,83			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	48		115		44		8		13						21		47,73		21		43,75			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	316		476		511		176		130						306		59,88		306		96,84			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			7.658.399		1.200.000		1.260.000		-		30.000						30.000	18,91	2,38		30.000	20,83	0,39		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3788		3.015		4173		408		381						789		18,91		789		20,83			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			14.867.009		2.340.000		1.080.000		-		180.000						180.000	47,73	16,67		180.000	43,75	1,21		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	48		115		44		8		13						21		47,73		21		43,75			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			109.617.135		17.172.000		13.740.000		-		4.550.000						4.550.000	59,88	33,11		4.550.000	96,84	4,15		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	316		476		511		176		130						306		59,88		306		96,84			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			17.238.266		2.308.000		2.614.000		-		30.000						30.000	50	1,15		30.000	50	0,17		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			349.763.686		54.792.000		5.190.000		-		270.000						270.000	50	5,2		270.000	50	0,08		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			9.230.590		1.440.000		660.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		50,11				50,4			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.086.331.336		757.397.398		746.436.992		-		37.442.087						37.442.087	50,11	5,02		37.442.087	50,4	0,74		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Dupak	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	294		294		304		80		74						154		50,66		154		52,38			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			147.883.720		23.232.000		23.232.000		-		-						-	50,66	0		-	52,38	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	294		294		304		80		74						154		50,66		154		52,38			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.842.214.083		282.237.769		250.486.300		-		6.010.087						6.010.087	50	2,4		6.010.087	50	0,33		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			9.378.749		1.470.000		2.670.000		-		750.000						750.000	50	28,09		750.000	50	8		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.057.530.614		445.867.629		468.811.192		-		30.682.000						30.682.000	50	6,54		30.682.000	50	1		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			23.196.780		3.630.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			6.127.390		960.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**18.390.686**		**2.890.000**		**5.870.700**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**50**	**0**	Puskesmas Dupak	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			18.390.686		2.890.000		5.870.700		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Dupak	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			18.390.686		2.890.000		5.870.700		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.759.610.892**		**3.662.025.403**		**4.128.609.353**		**-**		**685.431.688**						**685.431.688**	**100**	**16,6**		**685.431.688**	**100**	**3,3**	Puskesmas Gading	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			20.759.610.892		3.662.025.403		4.128.609.353		-		685.431.688						685.431.688	100	16,6		685.431.688	100	3,3		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Gading	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			20.759.610.892		3.662.025.403		4.128.609.353		-		685.431.688						685.431.688	100	16,6		685.431.688	100	3,3		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**8.738.014.927**		**1.807.839.436**		**4.681.017.108**		**22.385.000**		**188.709.601**						**211.094.601**	**48,48**	**4,51**		**211.094.601**	**52,45**	**2,42**	Puskesmas Gading	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		49,2				56,91			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			912.407.751		127.237.700		34.157.000		-		6.315.000						6.315.000	49,2	18,49		6.315.000	56,91	0,69		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Gading	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12613		11.437		13898		1.122		6.683						7.805		56,16		7.805		61,88			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	132		53		179		21		79						100		55,87		100		75,76			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1276		1.956		2071		370		317						687		33,17		687		53,84			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			7.275.479		990.000		3.030.000		-		-						-	56,16	0		-	61,88	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12613		11.437		13898		1.122		6.683						7.805		56,16		7.805		61,88			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			22.300.515		1.080.000		1.800.000		-		-						-	55,87	0		-	75,76	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	132		53		179		21		79						100		55,87		100		75,76			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			138.342.798		20.202.000		16.870.000		-		3.729.000						3.729.000	33,17	22,1		3.729.000	53,84	2,7		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1276		1.956		2071		370		317						687		33,17		687		53,84			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			56.304.870		7.712.000		7.872.000		-		2.586.000						2.586.000	50	32,85		2.586.000	50	4,59		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			663.424.956		94.621.200		3.210.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			24.759.133		2.632.500		1.375.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		47,76				47,99			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.825.607.176		1.680.601.736		4.646.860.108		22.385.000		182.394.601						204.779.601	47,76	4,41		204.779.601	47,99	2,62		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Gading	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1043		1.008		1083		76		320						396		36,57		396		37,97			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		69.696.000		-		4.356.000						4.356.000	36,57	6,25		4.356.000	37,97	1,05		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1043		1.008		1083		76		320						396		36,57		396		37,97			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.456.644.265		377.850.928		1.183.065.200		-		109.936.101						109.936.101	50	9,29		109.936.101	50	4,48		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			13.206.811		2.070.000		2.700.000		-		480.000						480.000	50	17,78		480.000	50	3,63		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			4.865.778.693		1.223.748.808		3.389.061.408		22.385.000		67.622.500						90.007.500	50	2,66		90.007.500	50	1,85		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			55.672.271		8.712.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			18.382.172		2.880.000		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**30.608.721**		**2.465.000**		**13.747.800**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Gading	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			30.608.721		2.465.000		13.747.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Gading	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			30.608.721		2.465.000		13.747.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.793.145.242**		**2.554.236.012**		**2.743.139.491**		-		**465.223.979**						**465.223.979**	**100**	**16,96**		**465.223.979**	**100**	**3,37**	Puskesmas Gayungan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			13.793.145.242		2.554.236.012		2.743.139.491		-		465.223.979						465.223.979	100	16,96		465.223.979	100	3,37		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Gayungan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			13.793.145.242		2.554.236.012		2.743.139.491		-		465.223.979						465.223.979	100	16,96		465.223.979	100	3,37		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.852.244.276**		**783.858.053**		**1.200.144.396**		-		**53.005.398**						**53.005.398**	**145,36**	**4,42**		**53.005.398**	**56,99**	**0,91**	Puskesmas Gayungan	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		57,23				63,5			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.014.655.621		144.169.600		56.211.000		-		3.390.000						3.390.000	57,23	6,03		3.390.000	63,5	0,33		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Gayungan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5779		5.603		6367		642		2.839						3.481		54,67		3.481		60,24			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	88		73		85		36		34						70		82,35		70		79,55			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	604		926		978		210		341						551		56,34		551		91,23			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			19.911.838		3.120.000		8.580.000		-		-						-	54,67	0		-	60,24	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5779		5.603		6367		642		2.839						3.481		54,67		3.481		60,24			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			15.438.818		2.430.000		4.860.000		-		-						-	82,35	0		-	79,55	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	88		73		85		36		34						70		82,35		70		79,55			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			113.064.214		17.712.000		13.920.000		-		3.390.000						3.390.000	56,34	24,35		3.390.000	91,23	3		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	604		926		978		210		341						551		56,34		551		91,23			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			66.275.524		2.338.000		11.476.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			769.677.357		113.844.600		15.450.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			30.287.870		4.725.000		1.925.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		233,5				50,47			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.837.588.655		639.688.453		1.143.933.396		-		49.615.398						49.615.398	233,5	4,34		49.615.398	50,47	1,03		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Gayungan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	545		559		565		134		154						288		50,97		288		52,84			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			480.622.091		70.785.000		46.464.000		-		16.335.000						16.335.000	50,97	35,16		16.335.000	52,84	3,4		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	545		559		565		134		154						288		50,97		288		52,84			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.382.163.324		216.321.718		413.498.100		-		12.695.898						12.695.898	50	3,07		12.695.898	50	0,92		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.895.811.046		340.222.735		678.823.796		-		20.584.500						20.584.500	50	3,03		20.584.500	50	0,71		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			64.950.984		10.164.000		687.500		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			12.254.782		1.920.000		1.760.000		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**17.245.246**		**2.530.000**		**18.566.900**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Gayungan	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			17.245.246		2.530.000		18.566.900		-		-						-	50	0		-	50	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Gayungan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			17.245.246		2.530.000		18.566.900		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.858.740.720**		**2.049.116.414**		**1.960.676.882**		-		**361.480.567**						**361.480.567**	**100**	**18,44**		**361.480.567**	**100**	**3,67**	Puskesmas Gundih	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			9.858.740.720		2.049.116.414		1.960.676.882		-		361.480.567						361.480.567	100	18,44		361.480.567	100	3,67		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Gundih	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			9.858.740.720		2.049.116.414		1.960.676.882		-		361.480.567						361.480.567	100	18,44		361.480.567	100	3,67		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.921.489.183**		**782.764.670**		**1.378.205.920**		-		**57.344.693**						**57.344.693**	**142,1**	**4,16**		**57.344.693**	**53,08**	**0,97**	Puskesmas Gundih	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		48,5				53,43			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			986.558.984		119.622.300		55.068.000		-		3.732.000						3.732.000	48,5	6,78		3.732.000	53,43	0,38		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Gundih	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5482		4.576		6039		129		1.018						1.147		18,99		1.147		20,92			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	82		52		78		22		34						56		71,79		56		68,29			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	568		937		920		239		223						462		50,22		462		81,34			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			12.253.438		1.920.000		9.690.000		-		-						-	18,99	0		-	20,92	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatari Sesuai Standar (Orang)	5482		4.576		6039		129		1.018						1.147		18,99		1.147		20,92			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			22.872.322		2.340.000		3.600.000		-		-						-	71,79	0		-	68,29	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	82		52		78		22		34						56		71,79		56		68,29			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			106.170.054		15.006.000		13.740.000		-		2.712.000						2.712.000	50,22	19,74		2.712.000	81,34	2,55		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	568		937		920		239		223						462		50,22		462		81,34			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			34.476.532		4.286.400		5.198.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			803.190.632		94.944.900		22.290.000		-		1.020.000						1.020.000	50	4,58		1.020.000	50	0,13		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			7.596.006		1.125.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		235,69				52,73			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.934.930.199		663.142.370		1.323.137.920		-		53.612.693						53.612.693	235,69	4,05		53.612.693	52,73	1,09		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Gundih	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	485		502		502		99		223						322		64,14		322		66,39			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			295.767.440		46.464.000		52.272.000		-		2.904.000						2.904.000	64,14	5,56		2.904.000	66,39	0,98		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	485		502		502		99		223						322		64,14		322		66,39			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.584.955.176		248.270.568		324.450.800		-		22.622.193						22.622.193	50	6,97		22.622.193	50	1,43		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.520.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.003.051.526		360.404.802		942.107.620		-		28.086.500						28.086.500	50	2,98		28.086.500	50	0,94		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			37.114.847		5.808.000		687.500		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			12.254.782		1.920.000		1.100.000		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**21.758.792**		**2.560.000**		**13.675.200**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**50**	**0**	Puskesmas Gundih	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			21.758.792		2.560.000		13.675.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Gundih	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			21.758.792		2.560.000		13.675.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.670.082.959**		**2.771.950.726**		**2.718.665.232**		**-**		**612.841.542**						**612.841.542**	**100**	**22,54**		**612.841.542**	**100**	**4,48**	Puskesmas Gunung Anyar	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			13.670.082.959		2.771.950.726		2.718.665.232		-		612.841.542						612.841.542	100	22,54		612.841.542	100	4,48		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			13.670.082.959		2.771.950.726		2.718.665.232		-		612.841.542						612.841.542	100	22,54		612.841.542	100	4,48		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.459.509.383**		**959.519.719**		**1.147.133.996**		**-**		**39.351.960**						**39.351.960**	**145,51**	**3,43**		**39.351.960**	**56,97**	**0,61**	Puskesmas Gunung Anyar	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		57,48				63,4			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			977.244.674		133.183.700		41.881.000		-		2.150.000						2.150.000	57,48	5,13		2.150.000	63,4	0,22		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8195		7.031		9029		467		3.402						3.869		42,85		3.869		47,21			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	127		80		119		33		77						110		92,44		110		86,61			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	818		1.468		1326		369		421						790		59,58		790		96,58			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			11.487.600		1.800.000		3.180.000		-		-						-	42,85	0		-	47,21	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8195		7.031		9029		467		3.402						3.869		42,85		3.869		47,21			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			35.452.099		2.190.000		2.700.000		-		-						-	92,44	0		-	86,61	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	127		80		119		33		77						110		92,44		110		86,61			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			115.362.267		17.772.000		14.640.000		-		1.130.000						1.130.000	59,58	7,72		1.130.000	96,58	0,98		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	818		1.468		1326		369		421						790		59,58		790		96,58			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			66.084.271		2.098.400		10.126.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			724.099.304		105.460.800		7.110.000		-		1.020.000						1.020.000	50	14,35		1.020.000	50	0,14		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			24.759.133		3.862.500		4.125.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		233,54				50,54			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.482.264.709		826.336.019		1.105.252.996		-		37.201.960						37.201.960	233,54	3,37		37.201.960	50,54	0,68		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	785		764		816		205		213						418		51,23		418		53,25			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			480.622.091		75.141.000		92.928.000		-		-						-	51,23	0		-	53,25	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	785		764		816		205		213						418		51,23		418		53,25			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.782.780.850		277.466.567		456.579.100		-		8.814.960						8.814.960	50	1,93		8.814.960	50	0,49		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		-		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.112.208.691		457.312.452		550.158.396		-		28.387.000						28.387.000	50	5,16		28.387.000	50	0,91		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			74.229.695		11.616.000		687.500		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			30.636.954		4.800.000		2.200.000		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**20.995.165**		**2.890.000**		**17.268.900**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Gunung Anyar	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			20.995.165		2.890.000		17.268.900		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Gunung Anyar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			20.995.165		2.890.000		17.268.900		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.553.488.635**		**3.816.388.686**		**4.087.616.375**		-		**847.233.093**						**847.233.093**	**100**	**20,73**		**847.233.093**	**100**	**4,12**	Puskesmas Jagir	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			20.553.488.635		3.816.388.686		4.087.616.375		-		847.233.093						847.233.093	100	20,73		847.233.093	100	4,12		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Jagir	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			20.553.488.635		3.816.388.686		4.087.616.375		-		847.233.093						847.233.093	100	20,73		847.233.093	100	4,12		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**7.553.518.124**		**991.710.077**		**1.587.573.218**		-		**53.344.000**						**53.344.000**	**145,81**	**3,36**		**53.344.000**	**57,03**	**0,71**	Puskesmas Jagir	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		58,03				63,49			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			862.402.726		125.871.000		39.347.000		-		2.812.000						2.812.000	58,03	7,15		2.812.000	63,49	0,33		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Jagir	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7761		7.165		8551		1.407		2.074						3.481		40,71		3.481		44,85			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	125		272		112		37		70						107		95,54		107		85,6			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	865		1.414		1403		376		493						869		61,94		869		100,46			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			14.550.958		2.280.000		3.960.000		-		-						-	40,71	0		-	44,85	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7761		7.165		8551		1.407		2.074						3.481		40,71		3.481		44,85			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			32.021.251		5.040.000		1.800.000		-		300.000						300.000	95,54	16,67		300.000	85,6	0,94		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	125		272		112		37		70						107		95,54		107		85,6			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			119.192.355		17.622.000		17.620.000		-		1.882.000						1.882.000	61,94	10,68		1.882.000	100,46	1,58		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	865		1.414		1403		376		493						869		61,94		869		100,46			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			51.906.052		420.000		9.402.000		-		90.000						90.000	50	0,96		90.000	50	0,17		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			627.713.211		97.854.000		5.190.000		-		540.000						540.000	50	10,4		540.000	50	0,09		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			17.018.899		2.655.000		1.375.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		233,59				50,57			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.691.115.398		865.839.077		1.548.226.218		-		50.532.000						50.532.000	233,59	3,26		50.532.000	50,57	0,76		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Jagir	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	661		578		685		116		237						353		51,53		353		53,4			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			360.466.567		56.628.000		104.544.000		-		16.335.000						16.335.000	51,53	15,63		16.335.000	53,4	4,53		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	661		578		685		116		237						353		51,53		353		53,4			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.925.752.540		296.503.449		435.831.100		-		7.128.000						7.128.000	50	1,64		7.128.000	50	0,37		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			28.710.457		4.470.000		2.700.000		-		330.000						330.000	50	12,22		330.000	50	1,15		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			4.301.299.747		496.516.628		1.003.913.618		-		26.739.000						26.739.000	50	2,66		26.739.000	50	0,62		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			62.631.305		9.801.000		687.500		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			12.254.782		1.920.000		550.000		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**21.445.195**		**2.770.000**		**14.727.900**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Jagir	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			21.445.195		2.770.000		14.727.900		-		-						-	50	0		-	50	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Jagir	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			21.445.195		2.770.000		14.727.900		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.411.367.822**		**1.466.464.387**		**1.473.950.676**		-		**302.881.091**						**302.881.091**	**100**	**20,55**		**302.881.091**	**100**	**4,09**	Puskesmas Jemursari	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			7.411.367.822		1.466.464.387		1.473.950.676		-		302.881.091						302.881.091	100	20,55		302.881.091	100	4,09		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Jemursari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			7.411.367.822		1.466.464.387		1.473.950.676		-		302.881.091						302.881.091	100	20,55		302.881.091	100	4,09		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.925.466.932**		**724.354.575**		**843.248.187**		-		**35.653.886**						**35.653.886**	**58,27**	**4,23**		**35.653.886**	**61,93**	**0,72**	Puskesmas Jemursari	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		52,5				59,04			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			630.402.993		98.200.500		34.109.000		-		2.440.000						2.440.000	52,5	7,15		2.440.000	59,04	0,39		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Jemursari	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2835		2.656		3122		720		1.710						2.430		77,83		2.430		85,71			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	45		39		41		8		5						13		31,71		13		28,89			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	289		505		467		131		128						259		55,46		259		89,62			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			5.743.799		900.000		1.200.000		-		-						-	77,83	0		-	85,71	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatari Sesuai Standar (Orang)	2835		2.656		3122		720		1.710						2.430		77,83		2.430		85,71			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			14.867.009		2.340.000		1.440.000		-		-						-	31,71	0		-	28,89	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	45		39		41		8		5						13		31,71		13		28,89			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			113.064.214		17.712.000		14.640.000		-		2.440.000						2.440.000	55,46	16,67		2.440.000	89,62	2,16		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	289		505		467		131		128						259		55,46		259		89,62			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			20.107.061		2.652.000		2.764.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			463.976.926		72.624.000		13.350.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12.643.984		1.972.500		715.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		64,03				64,82			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.295.063.939		626.154.075		809.139.187		-		33.213.886						33.213.886	64,03	4,1		33.213.886	64,82	0,77		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Jemursari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	226		368		234		123		191						314		134,19		314		138,94			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			147.883.720		23.232.000		23.232.000		-		-						-	134,19	0		-	138,94	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	226		368		234		123		191						314		134,19		314		138,94			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.563.603.064		244.927.908		241.209.400		-		16.316.886						16.316.886	50	6,76		16.316.886	50	1,04		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			7.847.524		1.230.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.534.982.321		350.383.167		540.760.287		-		16.897.000						16.897.000	50	3,12		16.897.000	50	0,67		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			16.237.746		2.541.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			24.509.564		3.840.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**21.758.792**		**3.370.000**		**9.246.600**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Jemursari	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			21.758.792		3.370.000		9.246.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Jemursari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			21.758.792		3.370.000		9.246.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.272.682.627**		**1.383.940.573**		**1.446.369.379**		-		**320.095.840**						**320.095.840**	**100**	**22,13**		**320.095.840**	**100**	**4,4**	Puskesmas Jeruk	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			7.272.682.627		1.383.940.573		1.446.369.379		-		320.095.840						320.095.840	100	22,13		320.095.840	100	4,4		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Jeruk	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			7.272.682.627		1.383.940.573		1.446.369.379		-		320.095.840						320.095.840	100	22,13		320.095.840	100	4,4		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.795.890.674**		**671.730.204**		**1.283.048.412**		-		**26.719.500**						**26.719.500**	**55,91**	**2,08**		**26.719.500**	**58,54**	**0,46**	Puskesmas Jeruk	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		58,64				63,53			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			964.577.740		139.261.700		31.518.000		-		4.394.000						4.394.000	58,64	13,94		4.394.000	63,53	0,46		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Jeruk	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2525		2.422		2781		502		1.283						1.785		64,19		1.785		70,69			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	39		102		35		15		15						30		85,71		30		76,92			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	243		638		391		88		115						203		51,92		203		83,54			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			7.466.939		1.170.000		3.240.000		-		-						-	64,19	0		-	70,69	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2525		2.422		2781		502		1.283						1.785		64,19		1.785		70,69			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			13.723.393		2.160.000		900.000		-		-						-	85,71	0		-	76,92	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	39		102		35		15		15						30		85,71		30		76,92			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			126.852.533		18.132.000		14.100.000		-		3.164.000						3.164.000	51,92	22,44		3.164.000	83,54	2,49		
			Terlaksanaya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	243		638		391		88		115						203		51,92		203		83,54			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			38.301.590		2.462.800		5.108.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			770.060.367		114.241.900		7.620.000		-		1.230.000						1.230.000	50	16,14		1.230.000	50	0,16		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			8.172.918		1.095.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		53,18				53,56			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.831.312.934		532.468.504		1.251.530.412		-		22.325.500						22.325.500	53,18	1,78		22.325.500	53,56	0,46		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Jeruk	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	241		247		249		64		108						172		69,08		172		71,37			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			295.767.440		46.464.000		46.464.000		-		4.356.000						4.356.000	69,08	9,38		4.356.000	71,37	1,47		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	241		247		249		64		108						172		69,08		172		71,37			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.049.633.179		129.368.413		209.130.800		-		-						-	50	0		-	50	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.610.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.422.501.476		347.613.091		991.538.112		-		17.969.500						17.969.500	50	1,81		17.969.500	50	0,53		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			37.114.847		5.808.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			24.509.564		2.940.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**18.008.873**		**2.770.000**		**11.134.200**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Jeruk	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			18.008.873		2.770.000		11.134.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Jeruk	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			18.008.873		2.770.000		11.134.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.103.381.418**		**1.953.670.413**		**2.208.207.303**		-		**403.598.139**						**403.598.139**	**100**	**18,28**		**403.598.139**	**100**	**3,63**	Puskesmas Kalijudan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			11.103.381.418		1.953.670.413		2.208.207.303		-		403.598.139						403.598.139	100	18,28		403.598.139	100	3,63		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kalijudan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			11.103.381.418		1.953.670.413		2.208.207.303		-		403.598.139						403.598.139	100	18,28		403.598.139	100	3,63		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.901.700.380**		**804.405.580**		**1.160.399.792**		-		**22.920.300**						**22.920.300**	**43,99**	**1,98**		**22.920.300**	**45,39**	**0,47**	Puskesmas Kalijudan	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		43,37				46,07			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			824.966.077		123.073.900		50.127.000		-		2.136.000						2.136.000	43,37	4,26		2.136.000	46,07	0,26		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Kalijudan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5625		5.869		6197		984		2.190						3.174		51,22		3.174		56,43			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	92		45		88		15		19						34		38,64		34		36,96			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	624		1.500		1011		80		126						206		20,38		206		33,01			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			9.190.079		1.440.000		4.860.000		-		540.000						540.000	51,22	11,11		540.000	56,43	5,88		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5625		5.869		6197		984		2.190						3.174		51,22		3.174		56,43			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			13.723.393		2.160.000		270.000		-		180.000						180.000	38,64	66,67		180.000	36,96	1,31		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	92		45		88		15		19						34		38,64		34		36,96			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			113.064.214		17.712.000		13.860.000		-		1.416.000						1.416.000	20,38	10,22		1.416.000	33,01	1,25		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	624		1.500		1011		80		126						206		20,38		206		33,01			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			55.348.605		4.818.400		7.542.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			619.938.130		95.706.000		22.770.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			13.701.656		1.237.500		825.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		44,61				44,72			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.076.734.303		681.331.680		1.110.272.792		-		20.784.300						20.784.300	44,61	1,87		20.784.300	44,72	0,51		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Kalijudan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	666		431		690		0		122						122		17,68		122		18,32			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		56.628.000		-		-						-	17,68	0		-	18,32	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	666		431		690		0		122						122		17,68		122		18,32			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.408.437.495		217.899.951		543.951.200		-		4.225.800						4.225.800	50	0,78		4.225.800	50	0,3		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			16.843.468		2.640.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.173.030.509		385.668.729		504.656.092		-		16.558.500						16.558.500	50	3,28		16.558.500	50	0,76		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			48.713.237		7.623.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			13.786.630		2.160.000		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**20.681.568**		**3.250.000**		**16.288.800**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Kalijudan	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			20.681.568		3.250.000		16.288.800		-		-						-	50	0		-	50	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Kalijudan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			20.681.568		3.250.000		16.288.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.030.695.717**		**2.453.428.063**		**2.591.505.809**		-		**476.694.112**						**476.694.112**	**100**	**18,39**		**476.694.112**	**100**	**3,66**	Puskesmas Kalirungkut	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			13.030.695.717		2.453.428.063		2.591.505.809		-		476.694.112						476.694.112	100	18,39		476.694.112	100	3,66		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kalirungkut	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			13.030.695.717		2.453.428.063		2.591.505.809		-		476.694.112						476.694.112	100	18,39		476.694.112	100	3,66		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**7.513.541.067**		**819.051.381**		**1.367.168.720**		-		**37.755.500**						**37.755.500**	**53,55**	**2,76**		**37.755.500**	**57,23**	**0,5**	Puskesmas Kalirungkut	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		54,66				61,61			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			799.771.751		117.793.500		31.467.000		-		3.132.000						3.132.000	54,66	9,95		3.132.000	61,61	0,39		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6782		6.714		7472		993		4.154						5.147		68,88		5.147		75,89			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	109		94		101		23		25						48		47,52		48		44,04			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	726		1.136		1176		292		432						724		61,56		724		99,72			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			10.338.839		1.290.000		1.140.000		-		-						-	68,88	0		-	75,89	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6782		6.714		7472		993		4.154						5.147		68,88		5.147		75,89			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			21.728.706		2.400.000		1.350.000		-		420.000						420.000	47,52	31,11		420.000	44,04	1,93		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	109		94		101		23		25						48		47,52		48		44,04			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			149.833.064		21.753.000		16.120.000		-		2.712.000						2.712.000	61,56	16,82		2.712.000	99,72	1,81		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	726		1.136		1176		292		432						724		61,56		724		99,72			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			3.060.048		360.000		8.442.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			578.994.485		87.603.000		2.490.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			35.816.609		4.387.500		1.925.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		52,44				52,85			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.713.769.316		701.257.881		1.335.701.720		-		34.623.500						34.623.500	52,44	2,59		34.623.500	52,85	0,52		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	687		637		713		191		270						461		64,66		461		67,1			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		52.272.000		-		13.068.000						13.068.000	64,66	25		13.068.000	67,1	3,14		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	687		637		713		191		270						461		64,66		461		67,1			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.759.288.518		270.744.586		521.105.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			4.414.529.476		354.515.295		757.286.620		-		21.555.500						21.555.500	50	2,85		21.555.500	50	0,49		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			48.713.237		7.623.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			73.528.693		2.760.000		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**36.335.924**		**3.430.000**		**13.820.400**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**50**	**0**	Puskesmas Kalirungkut	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			36.335.924		3.430.000		13.820.400		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Kalirungkut	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			36.335.924		3.430.000		13.820.400		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.661.232.054**		**3.151.709.314**		**3.313.536.022**		**-**		**722.072.674**						**722.072.674**	**100**	**21,79**		**722.072.674**	**100**	**4,33**	Puskesmas Kebonsari	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			16.661.232.054		3.151.709.314		3.313.536.022		-		722.072.674						722.072.674	100	21,79		722.072.674	100	4,33		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kebonsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.661.232.054		3.151.709.314		3.313.536.022		-		722.072.674						722.072.674	100	21,79		722.072.674	100	4,33		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.941.543.567**		**930.714.665**		**1.464.260.492**		**-**		**48.881.936**						**48.881.936**	**143,1**	**3,34**		**48.881.936**	**54,45**	**0,7**	Puskesmas Kebonsari	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		50,66				56,28			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			967.210.837		141.685.300		38.266.000		-		2.712.000						2.712.000	50,66	7,09		2.712.000	56,28	0,28		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Kebonsari	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7399		6.746		8153		1.046		3.531						4.577		56,14		4.577		61,86			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	112		56		104		25		24						49		47,12		49		43,75			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	725		1.081		1174		383		212						595		50,68		595		82,07			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			16.657.019		1.020.000		1.170.000		-		-						-	56,14	0		-	61,86	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7399		6.746		8153		1.046		3.531						4.577		56,14		4.577		61,86			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			17.154.242		1.560.000		1.800.000		-		-						-	47,12	0		-	43,75	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	112		56		104		25		24						49		47,12		49		43,75			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			109.617.135		17.112.000		16.120.000		-		2.712.000						2.712.000	50,68	16,82		2.712.000	82,07	2,47		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	725		1.081		1174		383		212						595		50,68		595		82,07			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			66.658.029		4.510.000		11.146.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			736.355.587		114.243.300		6.930.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			20.768.825		3.240.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		235,55				52,63			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.974.332.730		789.029.365		1.425.994.492		-		46.169.936						46.169.936	235,55	3,24		46.169.936	52,63	0,77		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Kebonsari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	692		799		719		150		305						455		63,28		455		65,75			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			480.622.091		75.504.000		75.504.000		-		14.520.000						14.520.000	63,28	19,23		14.520.000	65,75	3,02		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	692		799		719		150		305						455		63,28		455		65,75			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.846.178.805		270.564.936		484.641.100		-		9.407.936						9.407.936	50	1,94		9.407.936	50	0,51		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.577.730.727		432.251.429		861.969.092		-		22.242.000						22.242.000	50	2,58		22.242.000	50	0,62		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			64.950.984		10.164.000		687.500		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			3.063.695		270.000		492.800		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**24.813.301**		**2.650.000**		**17.631.900**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Kebonsari	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			24.813.301		2.650.000		17.631.900		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Kebonsari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			24.813.301		2.650.000		17.631.900		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.224.121.912**		**2.429.427.372**		**2.629.973.832**		-		**436.840.710**						**436.840.710**	**100**	**16,61**		**436.840.710**	**100**	**3,3**	Puskesmas Kedungdoro	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			13.224.121.912		2.429.427.372		2.629.973.832		-		436.840.710						436.840.710	100	16,61		436.840.710	100	3,3		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kedungdoro	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			13.224.121.912		2.429.427.372		2.629.973.832		-		436.840.710						436.840.710	100	16,61		436.840.710	100	3,3		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.091.154.103**		**787.886.583**		**1.057.914.196**		-		**39.862.467**						**39.862.467**	**147,07**	**3,77**		**39.862.467**	**60,92**	**0,65**	Puskesmas Kedungdoro	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		58,5				69,18			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			761.467.654		110.990.100		41.503.000		-		1.356.000						1.356.000	58,5	3,27		1.356.000	69,18	0,18		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5581		5.219		6149		848		2.119						2.967		48,25		2.967		53,16			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	85		91		81		20		23						43		53,09		43		50,59			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	577		1.129		934		509		422						931		99,68		931		161,35			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			4.212.120		660.000		4.020.000		-		-						-	48,25	0		-	53,16	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5581		5.219		6149		848		2.119						2.967		48,25		2.967		53,16			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			19.441.474		900.000		3.060.000		-		-						-	53,09	0		-	50,59	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	85		91		81		20		23						43		53,09		43		50,59			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			109.617.135		17.172.000		16.420.000		-		1.356.000						1.356.000	99,68	8,26		1.356.000	161,35	1,24		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	577		1.129		934		509		422						931		99,68		931		161,35			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			35.432.797		4.950.000		5.168.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			583.437.387		86.003.100		11.790.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			9.326.741		1.305.000		1.045.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		235,63				52,66			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.329.686.449		676.896.483		1.016.411.196		-		38.506.467						38.506.467	235,63	3,79		38.506.467	52,66	0,72		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	470		545		486		167		143						310		63,79		310		65,96			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			295.767.440		46.464.000		46.464.000		-		-						-	63,79	0		-	65,96	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	470		545		486		167		143						310		63,79		310		65,96			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.664.226.052		205.964.892		333.963.300		-		8.327.467						8.327.467	50	2,49		8.327.467	50	0,5		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.300.154.728		414.006.991		631.496.396		-		30.179.000						30.179.000	50	4,78		30.179.000	50	0,91		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			37.114.847		5.385.600		687.500		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			30.636.954		4.800.000		1.100.000		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**21.758.792**		**2.634.000**		**12.404.700**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Kedungdoro	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			21.758.792		2.634.000		12.404.700		-		-						-	50	0		-	50	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Kedungdoro	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			21.758.792		2.634.000		12.404.700		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**18.613.318.045**		**3.305.602.464**		**3.701.761.048**		-		**683.582.963**						**683.582.963**	**100**	**18,47**		**683.582.963**	**100**	**3,67**	Puskesmas Kedurus	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			18.613.318.045		3.305.602.464		3.701.761.048		-		683.582.963						683.582.963	100	18,47		683.582.963	100	3,67		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kedurus	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			18.613.318.045		3.305.602.464		3.701.761.048		-		683.582.963						683.582.963	100	18,47		683.582.963	100	3,67		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.968.745.550**		**973.862.375**		**2.035.189.288**		-		**137.859.500**						**137.859.500**	**57,09**	**6,77**		**137.859.500**	**60,79**	**1,98**	Puskesmas Kedurus	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		60,83				67,75			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			958.458.617		143.700.500		43.216.000		-		1.386.000						1.386.000	60,83	3,21		1.386.000	67,75	0,14		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Kedurus	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9851		15.644		10854		7.085		5.542						12.627		116,33		12.627		128,18			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	167		114		159		29		46						75		47,17		75		44,91			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1030		1.604		1669		256		603						859		51,47		859		83,4			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			10.338.839		1.620.000		4.620.000		-		-						-	116,33	0		-	128,18	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatari Sesuai Standar (Orang)	9851		15.644		10854		7.085		5.542						12.627		116,33		12.627		128,18			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			42.313.797		1.710.000		540.000		-		-						-	47,17	0		-	44,91	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	167		114		159		29		46						75		47,17		75		44,91			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			108.468.107		16.992.000		16.120.000		-		1.386.000						1.386.000	51,47	8,6		1.386.000	83,4	1,28		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1030		1.604		1669		256		603						859		51,47		859		83,4			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			74.690.654		10.185.200		10.456.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			703.416.826		110.193.300		10.380.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			19.230.394		3.000.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		53,35				53,82			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.010.286.933		830.161.875		1.991.973.288		-		136.473.500						136.473.500	53,35	6,85		136.473.500	53,82	2,27		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Kedurus	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	898		1.007		934		134		521						655		70,13		655		72,94			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			480.622.091		75.504.000		75.504.000		-		14.520.000						14.520.000	70,13	19,23		14.520.000	72,94	3,02		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	898		1.007		934		134		521						655		70,13		655		72,94			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.133.772.628		289.096.850		935.791.600		-		93.324.000						93.324.000	50	9,97		93.324.000	50	4,37		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.313.748.701		452.710.025		976.586.188		-		28.629.500						28.629.500	50	2,93		28.629.500	50	0,86		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			74.229.695		11.616.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			6.127.390		960.000		704.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**18.008.873**		**2.830.000**		**17.813.400**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**50**	**0**	Puskesmas Kedurus	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			18.008.873		2.830.000		17.813.400		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Kedurus	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			18.008.873		2.830.000		17.813.400		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.370.650.519**		**2.194.506.537**		**2.460.237.993**		**-**		**442.547.134**						**442.547.134**	**100**	**17,99**		**442.547.134**	**100**	**3,58**	Puskesmas Kenjeran	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			12.370.650.519		2.194.506.537		2.460.237.993		-		442.547.134						442.547.134	100	17,99		442.547.134	100	3,58		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kenjeran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			12.370.650.519		2.194.506.537		2.460.237.993		-		442.547.134						442.547.134	100	17,99		442.547.134	100	3,58		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.099.624.110**		**891.236.999**		**1.180.690.780**		**-**		**72.511.409**						**72.511.409**	**51,31**	**6,14**		**72.511.409**	**54,27**	**1,19**	Puskesmas Kenjeran	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		53,21				58,83			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			861.197.305		126.905.200		34.736.000		-		5.498.000						5.498.000	53,21	15,83		5.498.000	58,83	0,64		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Kenjeran	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6603		6.241		7276		324		5.995						6.319		86,85		6.319		95,7			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	95		43		91		21		15						36		39,56		36		37,89			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	624		975		1011		221		212						433		42,83		433		69,39			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			10.338.839		1.620.000		1.920.000		-		-						-	86,85	0		-	95,7	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6603		6.241		7276		324		5.995						6.319		86,85		6.319		95,7			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			17.154.242		2.700.000		1.350.000		-		300.000						300.000	39,56	22,22		300.000	37,89	1,75		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	95		43		91		21		15						36		39,56		36		37,89			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			106.170.054		16.632.000		14.040.000		-		5.198.000						5.198.000	42,83	37,02		5.198.000	69,39	4,9		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	624		975		1011		221		212						433		42,83		433		69,39			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			64.362.993		2.218.000		11.116.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			657.882.818		102.910.200		5.760.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			5.288.359		825.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		49,42				49,7			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.238.426.805		764.331.799		1.145.954.780		-		67.013.409						67.013.409	49,42	5,85		67.013.409	49,7	1,28		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Kenjeran	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	558		513		578		161		108						269		46,54		269		48,21			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			480.622.091		75.504.000		75.504.000		-		14.520.000						14.520.000	46,54	19,23		14.520.000	48,21	3,02		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	558		513		578		161		108						269		46,54		269		48,21			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.265.429.233		196.814.260		289.823.100		-		13.152.909						13.152.909	50	4,54		13.152.909	50	1,04		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.413.295.663		479.642.539		776.800.180		-		39.340.500						39.340.500	50	5,06		39.340.500	50	1,15		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			74.229.695		11.616.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			3.063.695		480.000		440.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**20.995.165**		**3.250.000**		**16.905.900**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Kenjeran	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			20.995.165		3.250.000		16.905.900		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Kenjeran	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			20.995.165		3.250.000		16.905.900		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.029.396.728**		**2.184.664.002**		**2.193.493.449**		-		**462.561.174**						**462.561.174**	**100**	**21,09**		**462.561.174**	**100**	**4,19**	Puskesmas Keputih	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			11.029.396.728		2.184.664.002		2.193.493.449		-		462.561.174						462.561.174	100	21,09		462.561.174	100	4,19		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Keputih	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			11.029.396.728		2.184.664.002		2.193.493.449		-		462.561.174						462.561.174	100	21,09		462.561.174	100	4,19		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.356.953.233**		**849.462.093**		**654.185.021**		-		**27.981.276**						**27.981.276**	**56,41**	**4,28**		**27.981.276**	**61,69**	**0,44**	Puskesmas Keputih	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		62,27				72,5			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			760.384.206		113.304.000		34.133.000		-		3.005.000						3.005.000	62,27	8,8		3.005.000	72,5	0,4		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Keputih	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8453		5.420		9312		2.862		2.307						5.169		55,51		5.169		61,15			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	81		577		77		15		41						56		72,73		56		69,14			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	510		1.605		827		359		430						789		95,41		789		154,71			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			4.595.039		720.000		2.280.000		-		-						-	55,51	0		-	61,15	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8453		5.420		9312		2.862		2.307						5.169		55,51		5.169		61,15			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			26.303.170		4.080.000		3.600.000		-		180.000						180.000	72,73	5		180.000	69,14	0,68		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	81		577		77		15		41						56		72,73		56		69,14			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			103.872.001		13.560.000		13.860.000		-		2.825.000						2.825.000	95,41	20,38		2.825.000	154,71	2,72		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	510		1.605		827		359		430						789		95,41		789		154,71			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			31.798.990		4.464.000		5.078.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			585.065.176		89.475.000		8.490.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			8.749.830		1.005.000		825.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		50,54				50,88			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.596.569.027		736.158.093		620.052.021		-		24.976.276						24.976.276	50,54	4,03		24.976.276	50,88	0,45		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Keputih	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	492		551		511		148		124						272		53,23		272		55,28			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			295.767.440		45.056.000		46.464.000		-		-						-	53,23	0		-	55,28	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	492		551		511		148		124						272		53,23		272		55,28			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.834.065.232		250.412.587		244.706.100		-		4.949.276						4.949.276	50	2,02		4.949.276	50	0,27		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		-		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.407.877.247		431.935.506		324.394.421		-		20.027.000						20.027.000	50	6,17		20.027.000	50	0,59		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			41.754.203		6.534.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			15.318.477		2.220.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**17.558.843**		**2.710.000**		**10.668.900**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Keputih	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			17.558.843		2.710.000		10.668.900		-		-						-	50	0		-	50	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Keputih	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			17.558.843		2.710.000		10.668.900		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.471.905.464**		**1.623.051.562**		**1.684.867.232**		-		**316.515.253**						**316.515.253**	**100**	**18,79**		**316.515.253**	**100**	**3,74**	Puskesmas Ketabang	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			8.471.905.464		1.623.051.562		1.684.867.232		-		316.515.253						316.515.253	100	18,79		316.515.253	100	3,74		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Ketabang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			8.471.905.464		1.623.051.562		1.684.867.232		-		316.515.253						316.515.253	100	18,79		316.515.253	100	3,74		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.692.225.996**		**595.553.874**		**684.393.388**		-		**11.345.000**						**11.345.000**	**57,77**	**1,66**		**11.345.000**	**62,14**	**0,24**	Puskesmas Ketabang	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		65,71				74,18			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			641.918.304		95.757.200		26.528.000		-		-						-	65,71	0		-	74,18	0		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Ketabang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2538		2.430		2795		171		1.874						2.045		73,17		2.045		80,58			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	42		29		38		22		11						33		86,84		33		78,57			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	267		1.836		431		165		198						363		84,22		363		135,96			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			16.082.638		2.520.000		2.880.000		-		-						-	73,17	0		-	80,58	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatari Sesuai Standar (Orang)	2538		2.430		2795		171		1.874						2.045		73,17		2.045		80,58			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			11.436.161		1.800.000		450.000		-		-						-	86,84	0		-	78,57	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	42		29		38		22		11						33		86,84		33		78,57			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			111.915.187		17.532.000		13.860.000		-		-						-	84,22	0		-	135,96	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	267		1.836		431		165		198						363		84,22		363		135,96			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			31.798.990		183.200		5.378.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			450.878.023		70.632.000		2.310.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			19.807.305		3.090.000		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		49,83				50,1			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.050.307.692		499.796.674		657.865.388		-		11.345.000						11.345.000	49,83	1,72		11.345.000	50,1	0,28		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Ketabang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	239		265		247		68		53						121		48,99		121		50,63			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			295.767.440		45.056.000		40.656.000		-		-						-	48,99	0		-	50,63	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	239		265		247		68		53						121		48,99		121		50,63			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.357.128.097		209.216.555		147.424.900		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.357.022.846		239.207.119		465.406.988		-		11.345.000						11.345.000	50	2,44		11.345.000	50	0,48		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			32.475.491		5.082.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			6.127.390		960.000		990.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**19.154.314**		**3.010.000**		**7.613.100**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**50**	**0**	Puskesmas Ketabang	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			19.154.314		3.010.000		7.613.100		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Ketabang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			19.154.314		3.010.000		7.613.100		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.731.269.308**		**1.790.360.079**		**1.736.448.738**		**-**		**426.862.536**						**426.862.536**	**100**	**24,58**		**426.862.536**	**100**	**4,89**	Puskesmas Klampis Ngasem	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			8.731.269.308		1.790.360.079		1.736.448.738		-		426.862.536						426.862.536	100	24,58		426.862.536	100	4,89		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			8.731.269.308		1.790.360.079		1.736.448.738		-		426.862.536						426.862.536	100	24,58		426.862.536	100	4,89		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.375.181.598**		**638.456.027**		**666.052.192**		**-**		**26.687.977**						**26.687.977**	**55,1**	**4,01**		**26.687.977**	**58,67**	**0,61**	Puskesmas Klampis Ngasem	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		59,7				66,38			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			796.032.951		122.033.500		55.268.000		-		1.320.000						1.320.000	59,7	2,39		1.320.000	66,38	0,17		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3236		3.277		3564		100		2.319						2.419		67,87		2.419		74,75			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	52		51		48		17		20						37		77,08		37		71,15			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	338		605		547		151		195						346		63,25		346		102,37			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			6.126.720		960.000		3.120.000		-		-						-	67,87	0		-	74,75	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3236		3.277		3564		100		2.319						2.419		67,87		2.419		74,75			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			14.867.009		2.250.000		4.320.000		-		540.000						540.000	77,08	12,5		540.000	71,15	3,63		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	52		51		48		17		20						37		77,08		37		71,15			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			117.660.320		18.432.000		13.860.000		-		-						-	63,25	0		-	102,37	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	338		605		547		151		195						346		63,25		346		102,37			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			37.919.085		5.460.000		5.468.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			589.412.326		90.304.000		26.850.000		-		780.000						780.000	50	2,91		780.000	50	0,13		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			30.047.491		4.627.500		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		50,49				50,97			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.579.148.647		516.422.527		610.784.192		-		25.367.977						25.367.977	50,49	4,15		25.367.977	50,97	0,71		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	328		414		340		147		118						265		77,94		265		80,79			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			295.767.440		46.464.000		63.888.000		-		-						-	77,94	0		-	80,79	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	328		414		340		147		118						265		77,94		265		80,79			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.200.545.409		162.309.760		165.916.800		-		10.707.477						10.707.477	25	6,45		10.707.477	25	0,89		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		300.000						300.000	50	11,11		300.000	50	16,79		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.028.616.046		302.069.767		377.041.892		-		14.360.500						14.360.500	50	3,81		14.360.500	50	0,71		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			37.114.847		2.904.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			15.318.477		2.400.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**19.467.911**		**3.010.000**		**14.038.200**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Klampis Ngasem	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			19.467.911		3.010.000		14.038.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Klampis Ngasem	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			19.467.911		3.010.000		14.038.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**15.233.831.559**		**2.986.799.874**		**3.029.658.879**		-		**707.382.867**						**707.382.867**	**100**	**23,35**		**707.382.867**	**100**	**4,64**	Puskesmas Krembangan Selatan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			15.233.831.559		2.986.799.874		3.029.658.879		-		707.382.867						707.382.867	100	23,35		707.382.867	100	4,64		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Krembangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			15.233.831.559		2.986.799.874		3.029.658.879		-		707.382.867						707.382.867	100	23,35		707.382.867	100	4,64		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.599.112.851**		**847.523.602**		**1.451.315.956**		-		**50.847.768**						**50.847.768**	**57,3**	**3,5**		**50.847.768**	**62,45**	**0,91**	Puskesmas Krembangan Selatan	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		61,31				71,17			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			800.509.263		120.191.800		47.667.000		-		960.000						960.000	61,31	2,01		960.000	71,17	0,12		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Krembangan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6151		5.569		6777		1.421		3.675						5.096		75,2		5.096		82,85			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	92		87		88		21		28						49		55,68		49		53,26			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	640		960		1037		621		281						902		86,98		902		140,94			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			15.699.719		2.400.000		7.560.000		-		-						-	75,2	0		-	82,85	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6151		5.569		6777		1.421		3.675						5.096		75,2		5.096		82,85			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			32.021.251		5.040.000		5.040.000		-		840.000						840.000	55,68	16,67		840.000	53,26	2,62		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	92		87		88		21		28						49		55,68		49		53,26			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			110.766.161		17.172.000		14.640.000		-		-						-	86,98	0		-	140,94	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	640		960		1037		621		281						902		86,98		902		140,94			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			51.141.040		4.496.800		7.902.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			580.304.375		89.433.000		11.700.000		-		120.000						120.000	50	1,03		120.000	50	0,02		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			10.576.717		1.650.000		825.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		53,29				53,72			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.798.603.588		727.331.802		1.403.648.956		-		49.887.768						49.887.768	53,29	3,55		49.887.768	53,72	1,04		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Krembangan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	488		491		506		100		253						353		69,76		353		72,34			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		69.696.000		-		-						-	69,76	0		-	72,34	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	488		491		506		100		253						353		69,76		353		72,34			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.604.119.681		243.579.890		371.841.700		-		19.899.268						19.899.268	50	5,35		19.899.268	50	1,24		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.712.742.801		408.113.912		957.073.756		-		29.988.500						29.988.500	50	3,13		29.988.500	50	1,11		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			48.713.237		7.623.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			15.318.477		2.400.000		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**20.681.568**		**3.250.000**		**15.018.300**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Krembangan Selatan	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			20.681.568		3.250.000		15.018.300		-		-						-	50	0		-	50	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Krembangan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			20.681.568		3.250.000		15.018.300		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.817.453.557**		**1.924.278.318**		**1.952.465.814**		-		**397.349.156**						**397.349.156**	**100**	**20,35**		**397.349.156**	**100**	**4,05**	Puskesmas Lidah Kulon	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			9.817.453.557		1.924.278.318		1.952.465.814		-		397.349.156						397.349.156	100	20,35		397.349.156	100	4,05		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			9.817.453.557		1.924.278.318		1.952.465.814		-		397.349.156						397.349.156	100	20,35		397.349.156	100	4,05		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.424.362.158**		**652.148.135**		**949.997.684**		-		**22.554.458**						**22.554.458**	**55,85**	**2,37**		**22.554.458**	**59,88**	**0,42**	Puskesmas Lidah Kulon	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		63,26				71,08			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			791.747.305		118.813.500		30.358.000		-		1.921.000						1.921.000	63,26	6,33		1.921.000	71,08	0,24		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4187		3.966		4612		876		2.835						3.711		80,46		3.711		88,63			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	63		126		59		38		8						46		77,97		46		73,02			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	405		9.284		654		165		300						465		71,1		465		114,81			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			21.060.598		3.300.000		2.880.000		-		-						-	80,46	0		-	88,63	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatari Sesuai Standar (Orang)	4187		3.966		4612		876		2.835						3.711		80,46		3.711		88,63			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			17.154.242		2.700.000		2.700.000		-		-						-	77,97	0		-	73,02	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	63		126		59		38		8						46		77,97		46		73,02			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			105.787.045		16.572.000		13.860.000		-		1.921.000						1.921.000	71,1	13,86		1.921.000	114,81	1,82		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	405		9.284		654		165		300						465		71,1		465		114,81			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			37.536.580		840.000		5.318.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			594.295.689		93.099.000		4.500.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			15.913.151		2.302.500		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		48,44				48,69			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.632.614.853		533.334.635		919.639.684		-		20.633.458						20.633.458	48,44	2,24		20.633.458	48,69	0,45		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	325		362		337		88		49						137		40,65		137		42,15			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			295.767.440		46.464.000		46.464.000		-		-						-	40,65	0		-	42,15	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	325		362		337		88		49						137		40,65		137		42,15			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.517.835.504		197.540.859		183.726.300		-		9.890.958						9.890.958	50	5,38		9.890.958	50	0,65		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.744.921.949		277.732.776		684.961.884		-		10.742.500						10.742.500	50	1,57		10.742.500	50	0,39		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			32.475.491		5.082.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			39.828.041		6.240.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**21.376.978**		**3.345.200**		**10.589.700**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Lidah Kulon	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			21.376.978		3.345.200		10.589.700		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Lidah Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			21.376.978		3.345.200		10.589.700		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.744.036.901**		**2.222.810.082**		**2.335.618.950**		-		**424.026.129**						**424.026.129**	**100**	**18,15**		**424.026.129**	**100**	**3,61**	Puskesmas Lontar	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			11.744.036.901		2.222.810.082		2.335.618.950		-		424.026.129						424.026.129	100	18,15		424.026.129	100	3,61		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Lontar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			11.744.036.901		2.222.810.082		2.335.618.950		-		424.026.129						424.026.129	100	18,15		424.026.129	100	3,61		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.529.912.480**		**1.065.211.907**		**1.509.954.376**		-		**70.428.639**						**70.428.639**	**144,78**	**4,66**		**70.428.639**	**56,38**	**1,08**	Puskesmas Lontar	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		56,77				63,02			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			893.323.002		136.421.300		24.908.000		-		1.400.000						1.400.000	56,77	5,62		1.400.000	63,02	0,16		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Lontar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7045		6.931		7761		686		4.113						4.799		61,83		4.799		68,12			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	109		40		101		22		49						71		70,3		71		65,14			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	699		1.104		1134		371		292						663		58,47		663		94,85			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			17.231.399		2.700.000		540.000		-		-						-	61,83	0		-	68,12	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7045		6.931		7761		686		4.113						4.799		61,83		4.799		68,12			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			18.719.332		-		450.000		-		150.000						150.000	70,3	33,33		150.000	65,14	0,8		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	109		40		101		22		49						71		70,3		71		65,14			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			103.872.001		16.272.000		13.560.000		-		1.130.000						1.130.000	58,47	8,33		1.130.000	94,85	1,09		
			Terlaksanannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	699		1.104		1134		371		292						663		58,47		663		94,85			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			45.569.204		6.696.000		5.528.000		-		120.000						120.000	50	2,17		120.000	50	0,26		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			693.075.586		108.435.800		3.180.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			14.855.480		2.317.500		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		232,79				49,74			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.636.589.478		928.790.607		1.485.046.376		-		69.028.639						69.028.639	232,79	4,65		69.028.639	49,74	1,22		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Lontar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	568		500		588		145		130						275		46,77		275		48,42			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			295.767.440		46.464.000		63.888.000		-		9.438.000						9.438.000	46,77	14,77		9.438.000	48,42	3,19		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	568		500		588		145		130						275		46,77		275		48,42			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.869.443.918		292.588.307		324.348.800		-		19.926.139						19.926.139	50	6,14		19.926.139	50	1,07		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			21.437.142		3.360.000		2.700.000		-		1.350.000						1.350.000	50	50		1.350.000	50	6,3		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.411.338.097		580.336.300		1.092.432.076		-		38.314.500						38.314.500	50	3,51		38.314.500	50	1,12		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			32.475.491		5.082.000		687.500		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			6.127.390		960.000		990.000		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**16.986.122**		**2.655.200**		**10.408.200**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Lontar	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			16.986.122		2.655.200		10.408.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Lontar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			16.986.122		2.655.200		10.408.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.289.919.607**		**1.467.591.517**		**1.449.797.418**		-		**363.289.171**						**363.289.171**	**100**	**25,06**		**363.289.171**	**100**	**4,98**	Puskesmas Made	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			7.289.919.607		1.467.591.517		1.449.797.418		-		363.289.171						363.289.171	100	25,06		363.289.171	100	4,98		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Made	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			7.289.919.607		1.467.591.517		1.449.797.418		-		363.289.171						363.289.171	100	25,06		363.289.171	100	4,98		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.745.503.896**		**591.457.307**		**476.092.460**		-		**32.888.479**						**32.888.479**	**152,24**	**6,91**		**32.888.479**	**63,4**	**0,69**	Puskesmas Made	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		60,25				65,17			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			754.035.818		115.905.000		32.108.000		-		3.612.000						3.612.000	60,25	11,25		3.612.000	65,17	0,48		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Made	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2011		1.991		2214		480		690						1.170		52,85		1.170		58,18			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	34		56		30		4		26						30		100		30		88,24			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	204		357		329		97		96						193		58,66		193		94,61			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			8.041.320		1.260.000		1.440.000		-		60.000						60.000	52,85	4,17		60.000	58,18	0,75		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2011		1.991		2214		480		690						1.170		52,85		1.170		58,18			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			11.436.161		1.800.000		900.000		-		-						-	100	0		-	88,24	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	34		56		30		4		26						30		100		30		88,24			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			149.833.064		23.472.000		13.740.000		-		2.772.000						2.772.000	58,66	20,17		2.772.000	94,61	1,85		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	204		357		329		97		96						193		58,66		193		94,61			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			35.241.544		3.450.000		5.408.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			540.253.139		84.633.000		9.960.000		-		780.000						780.000	50	7,83		780.000	50	0,14		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			9.230.590		1.290.000		660.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		244,23				61,62			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.991.468.078		475.552.307		443.984.460		-		29.276.479						29.276.479	244,23	6,59		29.276.479	61,62	0,73		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Made	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	213		412		221		147		108						255		115,38		255		119,72			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			295.767.440		46.464.000		46.464.000		-		2.904.000						2.904.000	115,38	6,25		2.904.000	119,72	0,98		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	213		412		221		147		108						255		115,38		255		119,72			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.177.433.743		183.943.384		158.934.800		-		12.106.479						12.106.479	50	7,62		12.106.479	50	1,03		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.610.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.456.431.717		235.467.923		234.188.160		-		14.266.000						14.266.000	50	6,09		14.266.000	50	0,58		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			32.475.491		5.082.000		687.500		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			27.573.259		4.320.000		1.100.000		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**25.263.331**		**3.970.000**		**11.134.200**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Made	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			25.263.331		3.970.000		11.134.200		-		-						-	50	0		-	50	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Made	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			25.263.331		3.970.000		11.134.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.803.001.498**		**4.074.858.316**		**4.137.238.747**		-		**818.662.431**						**818.662.431**	**100**	**19,79**		**818.662.431**	**100**	**3,94**	Puskesmas Manukan Kulon	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			20.803.001.498		4.074.858.316		4.137.238.747		-		818.662.431						818.662.431	100	19,79		818.662.431	100	3,94		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			20.803.001.498		4.074.858.316		4.137.238.747		-		818.662.431						818.662.431	100	19,79		818.662.431	100	3,94		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.355.484.688**		**915.131.156**		**1.195.875.388**		-		**31.064.500**						**31.064.500**	**52,81**	**2,6**		**31.064.500**	**56,24**	**0,49**	Puskesmas Manukan Kulon	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		55,35				61,88			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.028.016.793		149.992.100		35.592.000		-		1.130.000						1.130.000	55,35	3,17		1.130.000	61,88	0,11		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8130		6.742		8958		402		6.080						6.482		72,36		6.482		79,73			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	118		66		110		22		36						58		52,73		58		49,15			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	791		1.314		1282		286		445						731		57,02		731		92,41			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			10.721.760		780.000		780.000		-		-						-	72,36	0		-	79,73	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatari Sesuai Standar (Orang)	8130		6.742		8958		402		6.080						6.482		72,36		6.482		79,73			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			18.297.857		2.880.000		1.350.000		-		-						-	52,73	0		-	49,15	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	118		66		110		22		36						58		52,73		58		49,15			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			105.787.045		14.990.000		15.820.000		-		1.130.000						1.130.000	57,02	7,14		1.130.000	92,41	1,07		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	791		1.314		1282		286		445						731		57,02		731		92,41			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			49.419.764		6.564.000		8.292.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			824.559.973		121.868.100		8.250.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			19.230.394		2.910.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		50,27				50,61			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.327.467.895		765.139.056		1.160.283.388		-		29.934.500						29.934.500	50,27	2,58		29.934.500	50,61	0,56		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	688		784		715		199		170						369		51,61		369		53,63			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		65.340.000		-		-						-	51,61	0		-	53,63	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	688		784		715		199		170						369		51,61		369		53,63			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.790.799.984		279.721.843		294.088.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.041.708.940		408.252.213		796.367.688		-		29.934.500						29.934.500	50	3,76		29.934.500	50	0,98		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			69.590.339		10.890.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			7.659.240		660.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**17.245.246**		**2.710.000**		**14.836.800**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**50**	**0**	Puskesmas Manukan Kulon	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			17.245.246		2.710.000		14.836.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Manukan Kulon	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			17.245.246		2.710.000		14.836.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**19.858.579.250**		**3.938.461.829**		**3.949.414.874**		**-**		**812.160.534**						**812.160.534**	**100**	**20,56**		**812.160.534**	**100**	**4,09**	Puskesmas Medokan Ayu	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			19.858.579.250		3.938.461.829		3.949.414.874		-		812.160.534						812.160.534	100	20,56		812.160.534	100	4,09		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			19.858.579.250		3.938.461.829		3.949.414.874		-		812.160.534						812.160.534	100	20,56		812.160.534	100	4,09		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.615.128.386**		**818.866.791**		**962.167.296**		**-**		**48.963.998**						**48.963.998**	**49,43**	**5,09**		**48.963.998**	**52,62**	**0,74**	Puskesmas Medokan Ayu	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		48,88				54,93			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			994.765.351		145.499.800		45.947.000		-		4.756.000						4.756.000	48,88	10,35		4.756.000	54,93	0,48		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9180		9.172		10115		799		3.949						4.748		46,94		4.748		51,72			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	142		80		134		25		31						56		41,79		56		39,44			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	899		4.098		1458		452		343						795		54,53		795		88,43			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			7.658.399		1.020.000		6.840.000		-		-						-	46,94	0		-	51,72	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9180		9.172		10115		799		3.949						4.748		46,94		4.748		51,72			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			44.601.029		7.020.000		900.000		-		-						-	41,79	0		-	39,44	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	142		80		134		25		31						56		41,79		56		39,44			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			138.266.196		21.660.000		16.120.000		-		2.560.000						2.560.000	54,53	15,88		2.560.000	88,43	1,85		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	899		4.098		1458		452		343						795		54,53		795		88,43			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			67.971.300		2.312.800		8.442.000		-		2.196.000						2.196.000	50	26,01		2.196.000	50	3,23		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			719.922.592		111.267.000		12.270.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			16.345.835		2.220.000		1.375.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		49,99				50,31			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.620.363.035		673.366.991		916.220.296		-		44.207.998						44.207.998	49,99	4,83		44.207.998	50,31	0,79		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	729		667		757		0		378						378		49,93		378		51,85			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		69.696.000		-		-						-	49,93	0		-	51,85	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	729		667		757		0		378						378		49,93		378		51,85			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.931.832.007		209.592.279		264.688.200		-		16.321.998						16.321.998	50	6,17		16.321.998	50	0,84		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.170.594.343		382.469.712		576.798.596		-		27.886.000						27.886.000	50	4,83		27.886.000	50	0,88		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			69.590.339		10.890.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			30.636.954		4.800.000		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**19.467.911**		**3.010.000**		**15.199.800**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Medokan Ayu	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			19.467.911		3.010.000		15.199.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Medokan Ayu	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			19.467.911		3.010.000		15.199.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksanaya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.780.500.785**		**2.289.848.326**		**2.541.747.789**		-		**693.803.173**						**693.803.173**	**100**	**27,3**		**693.803.173**	**100**	**5,43**	Puskesmas Menur	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			12.780.500.785		2.289.848.326		2.541.747.789		-		693.803.173						693.803.173	100	27,3		693.803.173	100	5,43		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Menur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			12.780.500.785		2.289.848.326		2.541.747.789		-		693.803.173						693.803.173	100	27,3		693.803.173	100	5,43		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.116.082.678**		**854.604.347**		**913.514.344**		-		**60.112.298**						**60.112.298**	**49,82**	**6,58**		**60.112.298**	**52,42**	**0,98**	Puskesmas Menur	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		51,16				56,16			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.088.140.349		163.145.000		56.327.000		-		3.340.000						3.340.000	51,16	5,93		3.340.000	56,16	0,31		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Menur	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6567		6.167		7236		456		2.797						3.253		44,96		3.253		49,54			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	100		116		96		51		13						64		66,67		64		64			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	688		1.142		1114		165		340						505		45,33		505		73,4			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			22.975.198		3.600.000		9.360.000		-		-						-	44,96	0		-	49,54	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6567		6.167		7236		456		2.797						3.253		44,96		3.253		49,54			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			25.159.554		3.960.000		3.960.000		-		1.080.000						1.080.000	66,67	27,27		1.080.000	64	4,29		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	100		116		96		51		13						64		66,67		64		64			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			113.447.223		17.772.000		14.160.000		-		2.260.000						2.260.000	45,33	15,96		2.260.000	73,4	1,99		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	688		1.142		1114		165		340						505		45,33		505		73,4			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			61.086.194		4.232.000		8.502.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			836.338.133		130.296.000		19.080.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			29.134.047		3.285.000		1.265.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		48,47				48,69			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.027.942.329		691.459.347		857.187.344		-		56.772.298						56.772.298	48,47	6,62		56.772.298	48,69	1,13		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Menur	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	375		417		387		126		32						158		40,83		158		42,13			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		63.888.000		52.272.000		-		7.986.000						7.986.000	40,83	15,28		7.986.000	42,13	1,92		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	375		417		387		126		32						158		40,83		158		42,13			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.211.262.871		188.993.990		285.512.200		-		22.919.298						22.919.298	50	8,03		22.919.298	50	1,89		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			17.609.081		2.100.000		2.700.000		-		1.500.000						1.500.000	50	55,56		1.500.000	50	8,52		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.298.238.597		423.187.357		514.365.644		-		24.367.000						24.367.000	50	4,74		24.367.000	50	0,74		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			69.590.339		10.890.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			15.318.477		2.400.000		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**26.408.771**		**3.490.000**		**16.288.800**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Menur	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			26.408.771		3.490.000		16.288.800		-		-						-	50	0		-	50	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Menur	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			26.408.771		3.490.000		16.288.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**19.129.996.695**		**3.356.187.880**		**3.804.516.553**		-		**636.553.085**						**636.553.085**	**100**	**16,73**		**636.553.085**	**100**	**3,33**	Puskesmas Mojo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			19.129.996.695		3.356.187.880		3.804.516.553		-		636.553.085						636.553.085	100	16,73		636.553.085	100	3,33		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Mojo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			19.129.996.695		3.356.187.880		3.804.516.553		-		636.553.085						636.553.085	100	16,73		636.553.085	100	3,33		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**7.511.537.806**		**1.006.328.755**		**1.646.986.176**		-		**83.295.470**						**83.295.470**	**48,65**	**5,06**		**83.295.470**	**50,84**	**1,11**	Puskesmas Mojo	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		45,27				49,24			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.093.059.205		157.792.400		96.077.000		-		13.025.000						13.025.000	45,27	13,56		13.025.000	49,24	1,19		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Mojo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10217		9.196		11258		126		3.158						3.284		29,17		3.284		32,14			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	157		164		154		36		52						88		57,14		88		56,05			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1121		1.718		1818		197		445						642		35,31		642		57,27			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			27.761.697		4.350.000		9.360.000		-		1.800.000						1.800.000	29,17	19,23		1.800.000	32,14	6,48		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10217		9.196		11258		126		3.158						3.284		29,17		3.284		32,14			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			42.313.797		6.660.000		6.660.000		-		1.740.000						1.740.000	57,14	26,13		1.740.000	56,05	4,11		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	157		164		154		36		52						88		57,14		88		56,05			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			131.448.639		16.489.000		17.620.000		-		2.825.000						2.825.000	35,31	16,03		2.825.000	57,27	2,15		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1121		1.718		1818		197		445						642		35,31		642		57,27			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			53.818.581		2.972.800		8.622.000		-		120.000						120.000	50	1,39		120.000	50	0,22		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			812.957.358		123.458.100		52.440.000		-		6.540.000						6.540.000	50	12,47		6.540.000	50	0,8		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			24.759.133		3.862.500		1.375.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		52,03				52,43			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.418.478.601		848.536.355		1.550.909.176		-		70.270.470						70.270.470	52,03	4,53		70.270.470	52,43	1,09		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Mojo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	940		1.034		976		190		417						607		62,19		607		64,57			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		58.080.000		56.628.000		-		5.808.000						5.808.000	62,19	10,26		5.808.000	64,57	1,4		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	940		1.034		976		190		417						607		62,19		607		64,57			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.085.010.003		274.327.522		382.839.200		-		23.695.470						23.695.470	50	6,19		23.695.470	50	1,14		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.765.681.141		492.354.833		1.106.404.476		-		40.767.000						40.767.000	50	3,68		40.767.000	50	1,08		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			76.549.372		11.979.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			73.528.693		11.520.000		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**26.026.958**		**4.090.000**		**22.096.800**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**50**	**0**	Puskesmas Mojo	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			26.026.958		4.090.000		22.096.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Mojo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			26.026.958		4.090.000		22.096.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.754.895.962**		**2.444.139.172**		**2.536.655.578**		**-**		**514.611.100**						**514.611.100**	**100**	**20,29**		**514.611.100**	**100**	**4,03**	Puskesmas Moro Krembangan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			12.754.895.962		2.444.139.172		2.536.655.578		-		514.611.100						514.611.100	100	20,29		514.611.100	100	4,03		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Moro	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			12.754.895.962		2.444.139.172		2.536.655.578		-		514.611.100						514.611.100	100	20,29		514.611.100	100	4,03		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**7.657.576.403**		**1.170.612.009**		**1.693.569.392**		**25.112.500**		**90.952.502**						**116.065.002**	**56,88**	**6,85**		**116.065.002**	**61,02**	**1,52**	Puskesmas Moro Krembangan	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		60,37				68,22			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			560.028.240		76.612.000		36.534.000		-		2.987.000						2.987.000	60,37	8,18		2.987.000	68,22	0,53		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Moro	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6497		6.258		7158		905		3.012						3.917		54,72		3.917		60,29			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	95		12		91		30		47						77		84,62		77		81,05			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	635		834		1028		147		602						749		72,86		749		117,95			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			6.509.639		510.000		3.180.000		-		-						-	54,72	0		-	60,29	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6497		6.258		7158		905		3.012						3.917		54,72		3.917		60,29			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			28.590.402		4.500.000		2.250.000		-		-						-	84,62	0		-	81,05	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	95		12		91		30		47						77		84,62		77		81,05			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			126.852.533		19.032.000		16.120.000		-		2.712.000						2.712.000	72,86	16,82		2.712.000	117,95	2,14		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	635		834		1028		147		602						749		72,86		749		117,95			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			21.445.832		-		2.614.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			367.880.004		52.020.000		11.820.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			8.749.830		550.000		550.000		-		275.000						275.000	50	50		275.000	50	3,14		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		53,4				53,82			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.097.548.163		1.094.000.009		1.657.035.392		25.112.500		87.965.502						113.078.002	53,4	6,82		113.078.002	53,82	1,59		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Moro	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	668		665		692		129		358						487		70,38		487		72,9			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			147.883.720		23.232.000		23.232.000		-		-						-	70,38	0		-	72,9	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	668		665		692		129		358						487		70,38		487		72,9			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.406.165.582		352.347.409		492.652.400		-		35.653.002						35.653.002	50	7,24		35.653.002	50	1,48		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			14.738.035		2.310.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			4.466.567.647		711.559.600		1.137.213.492		25.112.500		52.312.500						77.425.000	50	6,81		77.425.000	50	1,73		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			16.237.746		2.541.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			45.955.433		2.010.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**20.681.568**		**2.710.000**		**9.246.600**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Moro Krembangan	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			20.681.568		2.710.000		9.246.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Moro Krembangan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			20.681.568		2.710.000		9.246.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.172.955.533**		**2.901.850.782**		**3.216.429.047**		-		**722.283.354**						**722.283.354**	**100**	**22,46**		**722.283.354**	**100**	**4,47**	Puskesmas Mulyorejo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			16.172.955.533		2.901.850.782		3.216.429.047		-		722.283.354						722.283.354	100	22,46		722.283.354	100	4,47		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Mulyorejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.172.955.533		2.901.850.782		3.216.429.047		-		722.283.354						722.283.354	100	22,46		722.283.354	100	4,47		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.870.286.882**		**835.992.696**		**868.065.596**		-		**54.481.520**						**54.481.520**	**55,4**	**6,28**		**54.481.520**	**60,42**	**0,93**	Puskesmas Mulyorejo	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		62,41				72,18			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			964.510.878		122.060.100		45.522.000		-		3.400.000						3.400.000	62,41	7,47		3.400.000	72,18	0,35		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5525		5.085		6086		100		3.441						3.541		58,18		3.541		64,09			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	85		83		81		51		10						61		75,31		61		71,76			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	574		872		929		558		287						845		90,96		845		147,21			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			16.082.638		1.920.000		6.660.000		-		-						-	58,18	0		-	64,09	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5525		5.085		6086		100		3.441						3.541		58,18		3.541		64,09			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			18.297.857		1.920.000		2.880.000		-		-						-	75,31	0		-	71,76	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	85		83		81		51		10						61		75,31		61		71,76			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			131.448.639		19.122.000		13.860.000		-		1.204.000						1.204.000	90,96	8,69		1.204.000	147,21	0,92		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	574		872		929		558		287						845		90,96		845		147,21			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			49.611.017		2.426.000		8.292.000		-		2.196.000						2.196.000	50	26,48		2.196.000	50	4,43		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			719.311.693		93.349.600		12.180.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			29.759.034		3.322.500		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		48,4				48,67			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.905.776.004		713.932.596		822.543.596		-		51.081.520						51.081.520	48,4	6,21		51.081.520	48,67	1,04		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	500		558		520		141		69						210		40,38		210		42			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		64.977.000		69.696.000		-		6.897.000						6.897.000	40,38	9,9		6.897.000	42	1,66		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	500		558		520		141		69						210		40,38		210		42			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.686.799.401		259.965.460		258.097.200		-		24.919.520						24.919.520	50	9,66		24.919.520	50	1,48		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		-		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.737.235.497		378.967.136		489.712.896		-		19.265.000						19.265.000	50	3,93		19.265.000	50	0,7		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			48.713.237		7.623.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			15.318.477		2.400.000		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**19.467.911**		**2.830.000**		**15.199.800**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Mulyorejo	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			19.467.911		2.830.000		15.199.800		-		-						-	50	0		-	50	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Mulyorejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			19.467.911		2.830.000		15.199.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.061.675.416**		**2.472.028.274**		**2.597.666.959**		-		**512.178.388**						**512.178.388**	**100**	**19,72**		**512.178.388**	**100**	**3,92**	Puskesmas Ngagel Rejo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			13.061.675.416		2.472.028.274		2.597.666.959		-		512.178.388						512.178.388	100	19,72		512.178.388	100	3,92		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			13.061.675.416		2.472.028.274		2.597.666.959		-		512.178.388						512.178.388	100	19,72		512.178.388	100	3,92		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**7.763.145.909**		**1.032.217.973**		**1.959.457.480**		-		**44.496.974**						**44.496.974**	**54,99**	**2,27**		**44.496.974**	**59,4**	**0,57**	Puskesmas Ngagel Rejo	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		58,95				67,41			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			798.029.376		119.301.400		73.143.000		-		8.460.000						8.460.000	58,95	11,57		8.460.000	67,41	1,06		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7139		6.466		7867		1.972		3.183						5.155		65,53		5.155		72,21			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	114		84		106		18		46						64		60,38		64		56,14			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	773		1.274		1253		439		536						975		77,81		975		126,13			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			13.019.278		2.040.000		5.340.000		-		-						-	65,53	0		-	72,21	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatari Sesuai Standar (Orang)	7139		6.466		7867		1.972		3.183						5.155		65,53		5.155		72,21			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			25.159.554		3.960.000		3.960.000		-		720.000						720.000	60,38	18,18		720.000	56,14	2,86		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	114		84		106		18		46						64		60,38		64		56,14			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			134.512.710		17.005.000		14.160.000		-		-						-	77,81	0		-	126,13	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	773		1.274		1253		439		536						975		77,81		975		126,13			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			41.935.398		5.786.400		5.648.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			564.172.042		88.350.000		42.660.000		-		7.740.000						7.740.000	50	18,14		7.740.000	50	1,37		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			19.230.394		2.160.000		1.375.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		51,03				51,38			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.965.116.533		912.916.573		1.886.314.480		-		36.036.974						36.036.974	51,03	1,91		36.036.974	51,38	0,52		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	686		808		712		210		190						400		56,18		400		58,31			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			295.767.440		46.464.000		46.464.000		-		-						-	56,18	0		-	58,31	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	686		808		712		210		190						400		56,18		400		58,31			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.943.858.474		288.582.408		577.918.800		-		6.430.974						6.430.974	50	1,11		6.430.974	50	0,33		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			4.640.546.286		564.575.165		1.257.444.180		-		29.606.000						29.606.000	50	2,35		29.606.000	50	0,64		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			46.393.559		7.260.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			36.764.346		5.760.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**20.995.165**		**2.710.000**		**17.305.200**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**50**	**0**	Puskesmas Ngagel Rejo	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			20.995.165		2.710.000		17.305.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Ngagel Rejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			20.995.165		2.710.000		17.305.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**15.305.390.561**		**2.693.574.530**		**3.043.890.319**		**-**		**573.128.328**						**573.128.328**	**100**	**18,83**		**573.128.328**	**100**	**3,74**	Puskesmas Pacar Keling	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			15.305.390.561		2.693.574.530		3.043.890.319		-		573.128.328						573.128.328	100	18,83		573.128.328	100	3,74		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Pacar Keling	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			15.305.390.561		2.693.574.530		3.043.890.319		-		573.128.328						573.128.328	100	18,83		573.128.328	100	3,74		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**7.336.227.005**		**938.091.120**		**1.562.408.128**		**-**		**63.388.916**						**63.388.916**	**54,55**	**4,06**		**63.388.916**	**57,32**	**0,86**	Puskesmas Pacar Keling	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		49,72				54,56			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.011.116.803		138.703.800		56.673.000		-		1.356.000						1.356.000	49,72	2,39		1.356.000	54,56	0,13		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Pacarkeling	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8343		7.734		9192		1.627		4.788						6.415		69,79		6.415		76,89			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	128		139		120		30		17						47		39,17		47		36,72			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	863		1.156		1398		193		357						550		39,34		550		63,73			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			25.847.099		4.050.000		2.550.000		-		-						-	69,79	0		-	76,89	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8343		7.734		9192		1.627		4.788						6.415		69,79		6.415		76,89			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			28.590.402		2.040.000		1.800.000		-		-						-	39,17	0		-	36,72	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	128		139		120		30		17						47		39,17		47		36,72			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			146.002.975		22.872.000		16.720.000		-		1.356.000						1.356.000	39,34	8,11		1.356.000	63,73	0,93		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	863		1.156		1398		193		357						550		39,34		550		63,73			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			53.984.333		7.624.800		6.518.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			738.134.663		99.912.000		28.260.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			18.557.331		2.205.000		825.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		59,38				60,08			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.325.110.202		799.387.320		1.505.735.128		-		62.032.916						62.032.916	59,38	4,12		62.032.916	60,08	0,98		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Pacarkeling	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	612		918		636		225		451						676		106,29		676		110,46			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			295.767.440		46.464.000		46.464.000		-		4.356.000						4.356.000	106,29	9,38		4.356.000	110,46	1,47		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	612		918		636		225		451						676		106,29		676		110,46			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.724.659.632		269.218.260		326.380.800		-		28.559.916						28.559.916	50	8,75		28.559.916	50	1,66		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			18.566.096		2.910.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			4.221.341.303		470.655.060		1.128.402.828		-		29.117.000						29.117.000	50	2,58		29.117.000	50	0,69		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			46.393.559		7.260.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			18.382.172		2.880.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**18.704.284**		**2.530.000**		**15.611.200**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Pacar Keling	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			18.704.284		2.530.000		15.611.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Pacar Keling	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			18.704.284		2.530.000		15.611.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.355.803.683**		**2.197.296.955**		**2.258.408.288**		-		**476.223.628**						**476.223.628**	**100**	**21,09**		**476.223.628**	**100**	**4,19**	Puskesmas Pakis	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			11.355.803.683		2.197.296.955		2.258.408.288		-		476.223.628						476.223.628	100	21,09		476.223.628	100	4,19		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Pakis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			11.355.803.683		2.197.296.955		2.258.408.288		-		476.223.628						476.223.628	100	21,09		476.223.628	100	4,19		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.162.960.298**		**666.733.175**		**661.682.792**		-		**64.663.485**						**64.663.485**	**53,88**	**9,77**		**64.663.485**	**58,87**	**1,25**	Puskesmas Pakis	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		57,94				67,63			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			903.758.800		139.391.000		26.634.000		-		1.716.000						1.716.000	57,94	6,44		1.716.000	67,63	0,19		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Pakis	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4798		4.388		5285		417		3.233						3.650		69,06		3.650		76,07			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	73		64		69		19		10						29		42,03		29		39,73			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	505		819		817		400		307						707		86,54		707		140			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			8.041.320		930.000		1.320.000		-		-						-	69,06	0		-	76,07	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4798		4.388		5285		417		3.233						3.650		69,06		3.650		76,07			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			19.441.474		3.060.000		900.000		-		300.000						300.000	42,03	33,33		300.000	39,73	1,54		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	73		64		69		19		10						29		42,03		29		39,73			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			109.617.135		17.022.000		13.860.000		-		1.356.000						1.356.000	86,54	9,78		1.356.000	140	1,24		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	505		819		817		400		307						707		86,54		707		140			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			18.194.531		2.492.000		3.634.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			737.887.623		114.237.000		5.820.000		-		60.000						60.000	50	1,03		60.000	50	0,01		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			10.576.717		1.650.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		49,81				50,12			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.259.201.498		527.342.175		635.048.792		-		62.947.485						62.947.485	49,81	9,91		62.947.485	50,12	1,48		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Pakis	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	434		410		450		111		109						220		48,89		220		50,69			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			147.883.720		23.232.000		23.232.000		-		-						-	48,89	0		-	50,69	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	434		410		450		111		109						220		48,89		220		50,69			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.692.947.592		255.538.874		269.061.900		-		34.247.985						34.247.985	50	12,73		34.247.985	50	2,02		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.378.068.501		242.356.301		338.817.392		-		28.699.500						28.699.500	50	8,47		28.699.500	50	1,21		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			23.196.780		3.630.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			15.318.477		2.310.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**17.940.656**		**2.590.000**		**7.976.100**		**-**		**-**						**-**	**600**	**0**		**-**	**50**	**0**	Puskesmas Pakis	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		600				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			17.940.656		2.590.000		7.976.100		-		-						-	600	0		-	50	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Pakis	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			17.940.656		2.590.000		7.976.100		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.600.853.880**		**2.651.050.601**		**2.704.897.160**		-		**472.212.157**						**472.212.157**	**100**	**17,46**		**472.212.157**	**100**	**3,47**	Puskesmas Pegirian	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			13.600.853.880		2.651.050.601		2.704.897.160		-		472.212.157						472.212.157	100	17,46		472.212.157	100	3,47		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Pegirian	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			13.600.853.880		2.651.050.601		2.704.897.160		-		472.212.157						472.212.157	100	17,46		472.212.157	100	3,47		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.451.169.956**		**772.092.897**		**1.516.187.668**		-		**41.272.241**						**41.272.241**	**56,55**	**2,72**		**41.272.241**	**61,28**	**0,64**	Puskesmas Pegirian	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		65,21				74,46			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			472.595.691		70.747.500		32.094.000		-		2.712.000						2.712.000	65,21	8,45		2.712.000	74,46	0,57		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Pegirian	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4557		4.293		5020		925		2.231						3.156		62,87		3.156		69,26			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	65		73		61		25		30						55		90,16		55		84,62			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	429		709		695		161		452						613		88,2		613		142,89			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			11.487.600		1.800.000		2.820.000		-		-						-	62,87	0		-	69,26	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatari Sesuai Standar (Orang)	4557		4.293		5020		925		2.231						3.156		62,87		3.156		69,26			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			22.872.322		3.600.000		1.800.000		-		-						-	90,16	0		-	84,62	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	65		73		61		25		30						55		90,16		55		84,62			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			108.085.099		16.932.000		16.120.000		-		2.712.000						2.712.000	88,2	16,82		2.712.000	142,89	2,51		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	429		709		695		161		452						613		88,2		613		142,89			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			22.019.589		300.000		2.704.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			301.111.986		47.050.500		8.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			7.019.095		1.065.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		47,89				48,11			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.978.574.265		701.345.397		1.484.093.668		-		38.560.241						38.560.241	47,89	2,6		38.560.241	48,11	0,64		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Pegirian	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	339		312		351		89		42						131		37,32		131		38,64			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			147.883.720		23.232.000		23.232.000		-		-						-	37,32	0		-	38,64	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	339		312		351		89		42						131		37,32		131		38,64			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.950.056.156		303.261.641		246.670.400		-		13.442.241						13.442.241	50	5,45		13.442.241	50	0,69		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.460.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.819.630.853		365.303.756		1.210.493.768		-		25.118.000						25.118.000	50	2,08		25.118.000	50	0,66		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			25.516.457		3.993.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			33.700.651		5.280.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**20.995.165**		**3.272.000**		**8.520.600**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**50**	**0**	Puskesmas Pegirian	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			20.995.165		3.272.000		8.520.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Pegirian	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			20.995.165		3.272.000		8.520.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.904.433.602**		**2.256.457.912**		**2.367.518.166**		**-**		**418.028.287**						**418.028.287**	**100**	**17,66**		**418.028.287**	**100**	**3,51**	Puskesmas Peneleh	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			11.904.433.602		2.256.457.912		2.367.518.166		-		418.028.287						418.028.287	100	17,66		418.028.287	100	3,51		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Peneleh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			11.904.433.602		2.256.457.912		2.367.518.166		-		418.028.287						418.028.287	100	17,66		418.028.287	100	3,51		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.776.139.425**		**831.787.469**		**1.411.813.180**		**-**		**49.537.500**						**49.537.500**	**57,38**	**3,51**		**49.537.500**	**60,01**	**0,86**	Puskesmas Peneleh	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		66,26				71,26			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			861.064.196		128.776.400		65.942.000		-		2.220.000						2.220.000	66,26	3,37		2.220.000	71,26	0,26		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Peneleh	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4969		11.153		5474		4.092		2.518						6.610		120,75		6.610		133,02			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	80		85		76		23		46						69		90,79		69		86,25			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	544		1.260		880		162		155						317		36,02		317		58,27			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			17.614.319		2.760.000		7.260.000		-		-						-	120,75	0		-	133,02	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4969		11.153		5474		4.092		2.518						6.610		120,75		6.610		133,02			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			27.446.786		4.320.000		4.320.000		-		-						-	90,79	0		-	86,25	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	80		85		76		23		46						69		90,79		69		86,25			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			107.702.090		16.872.000		13.740.000		-		-						-	36,02	0		-	58,27	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	544		1.260		880		162		155						317		36,02		317		58,27			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			49.611.017		2.398.400		7.872.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			642.344.149		99.876.000		31.650.000		-		2.220.000						2.220.000	50	7,01		2.220.000	50	0,35		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			16.345.835		2.550.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		48,51				48,77			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.915.075.229		703.011.069		1.345.871.180		-		47.317.500						47.317.500	48,51	3,52		47.317.500	48,77	0,96		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Peneleh	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	495		530		514		48		163						211		41,05		211		42,63			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		69.696.000		-		-						-	41,05	0		-	42,63	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	495		530		514		48		163						211		41,05		211		42,63			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.379.903.692		213.583.848		273.715.200		-		22.176.000						22.176.000	50	8,1		22.176.000	50	1,61		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.055.662.484		414.140.221		998.082.480		-		25.141.500						25.141.500	50	2,52		25.141.500	50	0,82		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			55.672.271		8.712.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			6.127.390		960.000		990.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**21.445.195**		**3.370.000**		**18.103.800**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Peneleh	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			21.445.195		3.370.000		18.103.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Peneleh	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			21.445.195		3.370.000		18.103.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**19.831.763.409**		**3.323.555.687**		**3.944.081.819**		-		**712.958.875**						**712.958.875**	**100**	**18,08**		**712.958.875**	**100**	**3,6**	Puskesmas Perak Timur	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			19.831.763.409		3.323.555.687		3.944.081.819		-		712.958.875						712.958.875	100	18,08		712.958.875	100	3,6		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Perak Timur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			19.831.763.409		3.323.555.687		3.944.081.819		-		712.958.875						712.958.875	100	18,08		712.958.875	100	3,6		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**8.688.656.537**		**1.143.966.585**		**2.182.003.532**		-		**91.951.846**						**91.951.846**	**55,2**	**4,21**		**91.951.846**	**60,25**	**1,06**	Puskesmas Perak Timur	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		61,36				71,18			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			878.321.050		132.830.000		53.861.000		-		1.356.000						1.356.000	61,36	2,52		1.356.000	71,18	0,15		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Perak Timur	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10206		9.423		11245		2.282		3.096						5.378		47,83		5.378		52,69			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	142		153		144		59		64						123		85,42		123		86,62			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1043		2.131		1692		626		811						1.437		84,93		1.437		137,78			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			11.487.600		1.740.000		5.700.000		-		-						-	47,83	0		-	52,69	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10206		9.423		11245		2.282		3.096						5.378		47,83		5.378		52,69			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			37.739.332		5.940.000		5.400.000		-		-						-	85,42	0		-	86,62	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	142		153		144		59		64						123		85,42		123		86,62			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			117.660.320		18.432.000		16.720.000		-		1.356.000						1.356.000	84,93	8,11		1.356.000	137,78	1,15		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1043		2.131		1692		626		811						1.437		84,93		1.437		137,78			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			66.658.029		6.650.000		10.156.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			631.074.113		98.830.500		15.060.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			13.701.656		1.237.500		825.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		49,05				49,32			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.810.335.487		1.011.136.585		2.128.142.532		-		90.595.846						90.595.846	49,05	4,26		90.595.846	49,32	1,16		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Perak Timur	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	875		792		908		144		258						402		44,27		402		45,94			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			480.622.091		75.504.000		75.504.000		-		-						-	44,27	0		-	45,94	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	875		792		908		144		258						402		44,27		402		45,94			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.046.069.672		316.159.247		549.601.600		-		52.821.846						52.821.846	50	9,61		52.821.846	50	2,58		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			20.671.529		3.240.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			5.127.468.590		595.017.338		1.497.449.432		-		37.086.500						37.086.500	50	2,48		37.086.500	50	0,72		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			74.229.695		11.616.000		687.500		-		687.500						687.500	50	100		687.500	50	0,93		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			61.273.910		9.600.000		2.200.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**27.554.212**		**4.165.000**		**18.902.400**		-		**3.000**						**3.000**	**50**	**0,02**		**3.000**	**50**	**0,01**	Puskesmas Perak Timur	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			27.554.212		4.165.000		18.902.400		-		3.000						3.000	50	0,02		3.000	50	0,01		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Perak Timur	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			27.554.212		4.165.000		18.902.400		-		3.000						3.000	50	0,02		3.000	50	0,01		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.317.532.893**		**3.206.593.262**		**3.245.182.160**		-		**615.413.811**						**615.413.811**	**100**	**18,96**		**615.413.811**	**100**	**3,77**	Puskesmas Pucangsewu	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			16.317.532.893		3.206.593.262		3.245.182.160		-		615.413.811						615.413.811	100	18,96		615.413.811	100	3,77		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Pucang Sewu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.317.532.893		3.206.593.262		3.245.182.160		-		615.413.811						615.413.811	100	18,96		615.413.811	100	3,77		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.476.040.370**		**869.199.164**		**929.627.884**		-		**21.786.800**						**21.786.800**	**51,29**	**2,34**		**21.786.800**	**54,28**	**0,4**	Puskesmas Pucangsewu	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		53,5				59,19			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			960.731.191		149.239.400		47.902.000		-		375.000						375.000	53,5	0,78		375.000	59,19	0,04		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Pucang Sewu	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6830		6.105		7525		415		4.700						5.115		67,97		5.115		74,89			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	112		15		104		31		24						55		52,88		55		49,11			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	759		1.265		1229		241		375						616		50,12		616		81,16			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			10.721.760		1.680.000		6.960.000		-		-						-	67,97	0		-	74,89	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatari Sesuai Standar (Orang)	6830		6.105		7525		415		4.700						5.115		67,97		5.115		74,89			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			35.452.099		5.580.000		5.400.000		-		-						-	52,88	0		-	49,11	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	112		15		104		31		24						55		52,88		55		49,11			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			106.170.054		16.632.000		16.420.000		-		375.000						375.000	50,12	2,28		375.000	81,16	0,35		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	759		1.265		1229		241		375						616		50,12		616		81,16			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			52.288.557		7.148.000		7.602.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			728.695.410		113.924.400		9.870.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			27.403.311		4.275.000		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		49,09				49,38			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.515.309.179		719.959.764		881.725.884		-		21.411.800						21.411.800	49,09	2,43		21.411.800	49,38	0,47		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Pucangsewu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	521		483		541		133		108						241		44,55		241		46,26			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		56.628.000		-		-						-	44,55	0		-	46,26	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	521		483		541		133		108						241		44,55		241		46,26			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.569.280.544		234.821.170		220.558.700		-		4.225.800						4.225.800	50	1,92		4.225.800	50	0,27		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		-		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.466.519.582		410.126.594		600.161.684		-		17.186.000						17.186.000	50	2,86		17.186.000	50	0,7		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			55.672.271		8.712.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			6.127.390		960.000		990.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**20.681.568**		**2.650.000**		**15.018.300**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**50**	**0**	Puskesmas Pucangsewu	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			20.681.568		2.650.000		15.018.300		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Pucang Sewu	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			20.681.568		2.650.000		15.018.300		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.751.035.119**		**2.254.563.305**		**2.535.887.745**		**-**		**529.358.125**						**529.358.125**	**100**	**20,87**		**529.358.125**	**100**	**4,15**	Puskesmas Putat Jaya	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			12.751.035.119		2.254.563.305		2.535.887.745		-		529.358.125						529.358.125	100	20,87		529.358.125	100	4,15		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Putat Jaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			12.751.035.119		2.254.563.305		2.535.887.745		-		529.358.125						529.358.125	100	20,87		529.358.125	100	4,15		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**7.844.074.736**		**1.041.536.633**		**1.281.508.388**		**-**		**50.348.401**						**50.348.401**	**52,19**	**3,93**		**50.348.401**	**56,22**	**0,64**	Puskesmas Putat Jaya	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		55,65				62,08			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			812.985.708		121.734.000		32.794.000		-		3.617.000						3.617.000	55,65	11,03		3.617.000	62,08	0,44		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6618		2.080		7291		508		4.064						4.572		62,71		4.572		69,08			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	95		66		91		39		20						59		64,84		59		62,11			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	643		993		1042		297		290						587		56,33		587		91,29			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			7.658.399		1.200.000		2.520.000		-		-						-	62,71	0		-	69,08	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6618		2.080		7291		508		4.064						4.572		62,71		4.572		69,08			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			30.877.634		4.830.000		2.520.000		-		1.080.000						1.080.000	64,84	42,86		1.080.000	62,11	3,5		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	95		66		91		39		20						59		64,84		59		62,11			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			108.468.107		16.932.000		16.870.000		-		2.537.000						2.537.000	56,33	15,04		2.537.000	91,29	2,34		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	643		993		1042		297		290						587		56,33		587		91,29			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			19.342.048		540.000		2.674.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			636.062.803		96.582.000		7.110.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			10.576.717		1.650.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		48,72				50,35			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.031.089.028		919.802.633		1.248.714.388		-		46.731.401						46.731.401	48,72	3,74		46.731.401	50,35	0,66		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	637		676		784		166		166						332		42,35		332		52,12			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			147.883.720		23.232.000		23.232.000		-		-						-	42,35	0		-	52,12	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	637		676		784		166		166						332		42,35		332		52,12			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.068.622.273		312.740.208		394.397.400		-		20.845.901						20.845.901	50	5,29		20.845.901	50	1,01		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		-		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			4.774.281.350		577.800.425		827.147.488		-		25.885.500						25.885.500	50	3,13		25.885.500	50	0,54		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			23.196.780		3.630.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			15.318.477		2.400.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**21.445.195**		**3.370.000**		**8.520.600**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Putat Jaya	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			21.445.195		3.370.000		8.520.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Putat Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			21.445.195		3.370.000		8.520.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**17.909.061.248**		**3.248.533.777**		**3.561.700.562**		-		**678.848.625**						**678.848.625**	**100**	**19,06**		**678.848.625**	**100**	**3,79**	Puskesmas Rangkah	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			17.909.061.248		3.248.533.777		3.561.700.562		-		678.848.625						678.848.625	100	19,06		678.848.625	100	3,79		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Rangkah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			17.909.061.248		3.248.533.777		3.561.700.562		-		678.848.625						678.848.625	100	19,06		678.848.625	100	3,79		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**7.042.717.214**		**1.146.754.119**		**2.391.509.860**		-		**73.196.435**						**73.196.435**	**52,91**	**3,06**		**73.196.435**	**56,04**	**1,04**	Puskesmas Rangkah	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		55,2				61,12			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			950.411.269		144.153.200		61.392.000		-		2.712.000						2.712.000	55,2	4,42		2.712.000	61,12	0,29		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9361		8.349		10314		2.625		4.998						7.623		73,91		7.623		81,43			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	146		118		138		52		27						79		57,25		79		54,11			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	982		1.315		1592		340		457						797		50,06		797		81,16			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			20.677.677		3.120.000		5.160.000		-		-						-	73,91	0		-	81,43	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9361		8.349		10314		2.625		4.998						7.623		73,91		7.623		81,43			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			46.888.261		4.110.000		1.800.000		-		-						-	57,25	0		-	54,11	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	146		118		138		52		27						79		57,25		79		54,11			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			115.362.267		18.072.000		16.720.000		-		2.712.000						2.712.000	50,06	16,22		2.712.000	81,16	2,35		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	982		1.315		1592		340		457						797		50,06		797		81,16			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			49.611.017		6.594.000		7.752.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			699.795.477		109.617.200		28.860.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			18.076.570		2.640.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		50,63				50,96			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.092.305.945		1.002.600.919		2.330.117.860		-		70.484.435						70.484.435	50,63	3,02		70.484.435	50,96	1,16		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Rangkah	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	436		428		452		135		108						243		53,76		243		55,73			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		69.696.000		-		-						-	53,76	0		-	55,73	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	436		428		452		135		108						243		53,76		243		55,73			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.698.015.827		265.988.988		498.721.200		-		36.174.435						36.174.435	50	7,25		36.174.435	50	2,13		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		-		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.884.012.670		656.781.931		1.756.663.160		-		34.310.000						34.310.000	50	1,95		34.310.000	50	0,88		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			69.590.339		10.890.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			22.977.717		3.600.000		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**21.445.195**		**3.130.000**		**18.466.800**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Rangkah	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			21.445.195		3.130.000		18.466.800		-		-						-	50	0		-	50	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Rangkah	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			21.445.195		3.130.000		18.466.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**15.308.688.333**		**2.740.180.405**		**3.044.546.170**		-		**526.222.232**						**526.222.232**	**100**	**17,28**		**526.222.232**	**100**	**3,44**	Puskesmas Sawahan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			15.308.688.333		2.740.180.405		3.044.546.170		-		526.222.232						526.222.232	100	17,28		526.222.232	100	3,44		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sawahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			15.308.688.333		2.740.180.405		3.044.546.170		-		526.222.232						526.222.232	100	17,28		526.222.232	100	3,44		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.541.964.841**		**971.747.546**		**1.272.655.936**		-		**50.794.628**						**50.794.628**	**48,5**	**3,99**		**50.794.628**	**51,54**	**0,92**	Puskesmas Sawahan	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		49,29				55,16			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			752.916.269		115.271.600		35.428.000		-		2.360.000						2.360.000	49,29	6,66		2.360.000	55,16	0,31		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6949		6.171		7656		795		1.943						2.738		35,76		2.738		39,4			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	112		78		104		40		15						55		52,88		55		49,11			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	767		1.333		1242		307		402						709		57,09		709		92,44			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			13.785.120		2.160.000		1.680.000		-		-						-	35,76	0		-	39,4	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatari Sesuai Standar (Orang)	6949		6.171		7656		795		1.943						2.738		35,76		2.738		39,4			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			40.026.565		6.300.000		6.300.000		-		600.000						600.000	52,88	9,52		600.000	49,11	1,5		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	112		78		104		40		15						55		52,88		55		49,11			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			113.064.214		17.712.000		14.040.000		-		1.220.000						1.220.000	57,09	8,69		1.220.000	92,44	1,08		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	767		1.333		1242		307		402						709		57,09		709		92,44			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			42.509.156		4.625.600		5.348.000		-		60.000						60.000	50	1,12		60.000	50	0,14		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			524.300.820		81.474.000		6.960.000		-		480.000						480.000	50	6,9		480.000	50	0,09		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			19.230.394		3.000.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		47,71				47,92			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.789.048.572		856.475.946		1.237.227.936		-		48.434.628						48.434.628	47,71	3,91		48.434.628	47,92	1,01		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Sawahan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	573		529		593		139		76						215		36,26		215		37,52			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			295.767.440		46.464.000		46.464.000		-		8.712.000						8.712.000	36,26	18,75		8.712.000	37,52	2,95		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	573		529		593		139		76						215		36,26		215		37,52			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.073.610.121		301.703.806		296.416.300		-		15.008.628						15.008.628	50	5,06		15.008.628	50	0,72		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.365.363.634		499.813.140		889.970.136		-		24.714.000						24.714.000	50	2,78		24.714.000	50	1,04		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			46.393.559		7.260.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			6.127.390		960.000		990.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**21.445.195**		**3.250.000**		**10.952.700**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**50**	**0**	Puskesmas Sawahan	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			21.445.195		3.250.000		10.952.700		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Sawahan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			21.445.195		3.250.000		10.952.700		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.498.314.836**		**1.810.350.892**		**1.888.996.459**		**-**		**371.870.426**						**371.870.426**	**100**	**19,69**		**371.870.426**	**100**	**3,92**	Puskesmas Sawah Pulo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			9.498.314.836		1.810.350.892		1.888.996.459		-		371.870.426						371.870.426	100	19,69		371.870.426	100	3,92		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			9.498.314.836		1.810.350.892		1.888.996.459		-		371.870.426						371.870.426	100	19,69		371.870.426	100	3,92		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.808.193.947**		**822.576.258**		**1.021.442.280**		**-**		**43.747.500**						**43.747.500**	**54,08**	**4,28**		**43.747.500**	**59,41**	**0,75**	Puskesmas Sawah Pulo	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		58,02				68,42			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.094.156.278		169.526.000		90.744.000		-		3.216.000						3.216.000	58,02	3,54		3.216.000	68,42	0,29		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5139		4.907		5660		2.321		1.615						3.936		69,54		3.936		76,59			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	68		43		64		15		8						23		35,94		23		33,82			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	463		686		750		429		266						695		92,67		695		150,11			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			29.867.757		4.680.000		7.920.000		-		180.000						180.000	69,54	2,27		180.000	76,59	0,6		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5139		4.907		5660		2.321		1.615						3.936		69,54		3.936		76,59			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			21.728.706		3.420.000		1.800.000		-		-						-	35,94	0		-	33,82	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	68		43		64		15		8						23		35,94		23		33,82			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			110.766.161		17.352.000		16.120.000		-		1.386.000						1.386.000	92,67	8,6		1.386.000	150,11	1,25		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	463		686		750		429		266						695		92,67		695		150,11			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			18.577.037		2.322.000		2.794.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			900.091.873		139.704.500		61.560.000		-		1.650.000						1.650.000	50	2,68		1.650.000	50	0,18		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			13.124.744		2.047.500		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		50,13				50,4			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.714.037.669		653.050.258		930.698.280		-		40.531.500						40.531.500	50,13	4,35		40.531.500	50,4	0,86		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	372		909		384		97		98						195		50,78		195		52,42			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			147.883.720		23.232.000		26.136.000		-		3.993.000						3.993.000	50,78	15,28		3.993.000	52,42	2,7		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	372		909		384		97		98						195		50,78		195		52,42			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.411.858.351		216.260.295		235.486.400		-		10.395.000						10.395.000	50	4,41		10.395.000	50	0,74		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			16.077.856		2.520.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.084.384.008		402.607.963		665.138.380		-		26.143.500						26.143.500	50	3,93		26.143.500	50	0,85		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			23.196.780		3.630.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			30.636.954		4.800.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**21.758.792**		**3.370.000**		**17.595.600**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Sawah Pulo	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			21.758.792		3.370.000		17.595.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Sawah Pulo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			21.758.792		3.370.000		17.595.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**19.145.496.471**		**3.577.823.087**		**3.807.599.102**		-		**798.600.587**						**798.600.587**	**100**	**20,97**		**798.600.587**	**100**	**4,17**	Puskesmas Sememi	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			19.145.496.471		3.577.823.087		3.807.599.102		-		798.600.587						798.600.587	100	20,97		798.600.587	100	4,17		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sememi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			19.145.496.471		3.577.823.087		3.807.599.102		-		798.600.587						798.600.587	100	20,97		798.600.587	100	4,17		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**8.051.193.468**		**1.327.009.922**		**4.426.426.168**		**21.593.000**		**53.255.598**						**74.848.598**	**48,24**	**1,69**		**74.848.598**	**51,67**	**0,93**	Puskesmas Sememi	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		52,13				58,87			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.024.049.210		159.047.800		60.021.000		-		7.736.000						7.736.000	52,13	12,89		7.736.000	58,87	0,76		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10042		10.159		11065		1.317		4.460						5.777		52,21		5.777		57,53			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	149		96		141		26		44						70		49,65		70		46,98			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	941		1.461		1525		361		568						929		60,92		929		98,72			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			27.761.697		4.350.000		2.550.000		-		90.000						90.000	52,21	3,53		90.000	57,53	0,32		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10042		10.159		11065		1.317		4.460						5.777		52,21		5.777		57,53			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			44.601.029		7.020.000		1.800.000		-		240.000						240.000	49,65	13,33		240.000	46,98	0,54		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	149		96		141		26		44						70		49,65		70		46,98			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			103.872.001		16.272.000		16.120.000		-		5.876.000						5.876.000	60,92	36,45		5.876.000	98,72	5,66		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	941		1.461		1525		361		568						929		60,92		929		98,72			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			75.073.159		10.360.000		11.236.000		-		60.000						60.000	50	0,53		60.000	50	0,08		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			761.251.162		119.253.300		27.600.000		-		1.470.000						1.470.000	50	5,33		1.470.000	50	0,19		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			11.490.162		1.792.500		715.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		44,35				44,46			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.027.144.258		1.167.962.122		4.366.405.168		21.593.000		45.519.598						67.112.598	44,35	1,54		67.112.598	44,46	0,96		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Sememi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1091		1.133		1135		0		183						183		16,12		183		16,77			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			480.622.091		75.504.000		75.504.000		-		-						-	16,12	0		-	16,77	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1091		1.133		1135		0		183						183		16,12		183		16,77			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.205.535.886		342.407.424		758.583.100		-		6.367.098						6.367.098	50	0,84		6.367.098	50	0,29		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		1.200.000						1.200.000	50	44,44		1.200.000	50	67,17		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			4.265.057.782		738.171.698		3.527.830.568		21.593.000		37.952.500						59.545.500	50	1,69		59.545.500	50	1,4		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			64.950.984		10.164.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			9.191.087		1.440.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**18.322.470**		**2.830.000**		**21.426.900**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Sememi	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			18.322.470		2.830.000		21.426.900		-		-						-	50	0		-	50	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Sememi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			18.322.470		2.830.000		21.426.900		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.892.694.079**		**1.858.526.860**		**1.967.429.424**		-		**423.156.691**						**423.156.691**	**100**	**21,51**		**423.156.691**	**100**	**4,28**	Puskesmas Sidosermo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			9.892.694.079		1.858.526.860		1.967.429.424		-		423.156.691						423.156.691	100	21,51		423.156.691	100	4,28		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sidosermo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			9.892.694.079		1.858.526.860		1.967.429.424		-		423.156.691						423.156.691	100	21,51		423.156.691	100	4,28		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**7.147.705.646**		**1.027.745.792**		**1.251.730.376**		-		**72.153.433**						**72.153.433**	**137,41**	**5,76**		**72.153.433**	**54,77**	**1,01**	Puskesmas Sidosermo	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		227,63				62,12			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			814.483.936		120.151.000		24.734.000		-		5.586.000						5.586.000	227,63	22,58		5.586.000	62,12	0,69		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5561		5.301		6125		730		1.648						2.378		38,82		2.378		42,76			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	85		48		9		29		29						58		644,44		58		68,24			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	572		905		120		475		164						639		532,5		639		111,71			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			13.019.278		2.040.000		2.160.000		-		-						-	38,82	0		-	42,76	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatari Sesuai Standar (Orang)	5561		5.301		6125		730		1.648						2.378		38,82		2.378		42,76			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			10.864.353		690.000		270.000		-		-						-	644,44	0		-	68,24	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	85		48		9		29		29						58		644,44		58		68,24			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			107.702.090		16.872.000		13.560.000		-		4.746.000						4.746.000	532,5	35		4.746.000	111,71	4,41		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	572		905		120		475		164						639		532,5		639		111,71			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			57.261.134		2.728.000		2.614.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			613.714.237		95.961.000		5.250.000		-		840.000						840.000	50	16		840.000	50	0,14		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			11.922.844		1.860.000		880.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		47,2				47,42			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.333.221.710		907.594.792		1.226.996.376		-		66.567.433						66.567.433	47,2	5,43		66.567.433	47,42	1,05		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Sidosermo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	501		937		521		112		61						173		33,21		173		34,53			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		52.272.000		-		6.534.000						6.534.000	33,21	12,5		6.534.000	34,53	1,57		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	501		937		521		112		61						173		33,21		173		34,53			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.682.703.529		263.317.237		333.632.700		-		32.922.433						32.922.433	50	9,87		32.922.433	50	1,96		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			4.151.663.874		565.963.555		837.154.176		-		27.111.000						27.111.000	50	3,24		27.111.000	50	0,65		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			76.549.372		11.979.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			4.595.543		720.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**17.245.246**		**2.530.000**		**12.840.300**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**50**	**0**	Puskesmas Sidosermo	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			17.245.246		2.530.000		12.840.300		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Sidosermo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			17.245.246		2.530.000		12.840.300		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.892.299.990**		**2.611.202.096**		**2.762.859.091**		**-**		**478.425.842**						**478.425.842**	**100**	**17,32**		**478.425.842**	**100**	**3,44**	Puskesmas Sidotopo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			13.892.299.990		2.611.202.096		2.762.859.091		-		478.425.842						478.425.842	100	17,32		478.425.842	100	3,44		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sidotopo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			13.892.299.990		2.611.202.096		2.762.859.091		-		478.425.842						478.425.842	100	17,32		478.425.842	100	3,44		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**9.097.673.279**		**1.176.061.344**		**1.627.762.388**		**-**		**22.709.000**						**22.709.000**	**54,18**	**1,4**		**22.709.000**	**59,21**	**0,25**	Puskesmas Sidotopo	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		58,79				68,54			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			705.733.108		109.394.500		27.158.000		-		2.786.000						2.786.000	58,79	10,26		2.786.000	68,54	0,39		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7358		12.004		8108		1.017		2.445						3.462		42,7		3.462		47,05			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	99		69		95		32		33						65		68,42		65		65,66			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	692		1.158		1122		491		537						1.028		91,62		1.028		148,55			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			9.955.919		1.560.000		420.000		-		-						-	42,7	0		-	47,05	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7358		12.004		8108		1.017		2.445						3.462		42,7		3.462		47,05			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			32.021.251		5.040.000		900.000		-		300.000						300.000	68,42	33,33		300.000	65,66	0,94		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	99		69		95		32		33						65		68,42		65		65,66			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			81.708.555		12.800.000		16.720.000		-		2.486.000						2.486.000	91,62	14,87		2.486.000	148,55	3,04		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	692		1.158		1122		491		537						1.028		91,62		1.028		148,55			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			36.006.555		4.760.000		5.528.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			538.108.290		83.997.000		2.490.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			7.932.538		1.237.500		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		49,57				49,87			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8.391.940.171		1.066.666.844		1.600.604.388		-		19.923.000						19.923.000	49,57	1,24		19.923.000	49,87	0,24		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Sidotopo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	640		494		664		162		153						315		47,44		315		49,22			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			295.767.440		46.464.000		23.232.000		-		-						-	47,44	0		-	49,22	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	640		494		664		162		153						315		47,44		315		49,22			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.762.648.335		275.951.268		318.603.800		-		1.386.000						1.386.000	50	0,44		1.386.000	50	0,08		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			14.355.230		2.250.000		2.670.000		-		300.000						300.000	50	11,24		300.000	50	2,09		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			6.263.584.520		733.301.576		1.254.861.088		-		18.237.000						18.237.000	50	1,45		18.237.000	50	0,29		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			46.393.559		7.260.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			9.191.087		1.440.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**20.613.351**		**3.190.000**		**10.595.200**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Sidotopo	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			20.613.351		3.190.000		10.595.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Sidotopo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			20.613.351		3.190.000		10.595.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**29.124.314.805**		**5.581.742.619**		**5.792.156.661**		-		**1.029.389.325**						**1.029.389.325**	**100**	**17,77**		**1.029.389.325**	**100**	**3,53**	Puskesmas Sidotopo Wetan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			29.124.314.805		5.581.742.619		5.792.156.661		-		1.029.389.325						1.029.389.325	100	17,77		1.029.389.325	100	3,53		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			29.124.314.805		5.581.742.619		5.792.156.661		-		1.029.389.325						1.029.389.325	100	17,77		1.029.389.325	100	3,53		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**8.365.172.284**		**1.269.949.526**		**2.760.579.536**		-		**55.077.000**						**55.077.000**	**59,94**	**2**		**55.077.000**	**64,04**	**0,66**	Puskesmas Sidotopo Wetan	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		64,64				72,32			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			530.826.527		78.121.500		30.269.000		-		4.698.000						4.698.000	64,64	15,52		4.698.000	72,32	0,89		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9059		8.887		9981		847		7.280						8.127		81,42		8.127		89,71			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	128		591		120		38		66						104		86,67		104		81,25			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	848		1.127		1374		275		683						958		69,72		958		112,97			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			12.061.978		1.890.000		1.320.000		-		-						-	81,42	0		-	89,71	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9059		8.887		9981		847		7.280						8.127		81,42		8.127		89,71			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			42.313.797		6.660.000		1.800.000		-		600.000						600.000	86,67	33,33		600.000	81,25	1,42		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	128		591		120		38		66						104		86,67		104		81,25			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			113.064.214		17.712.000		16.120.000		-		4.098.000						4.098.000	69,72	25,42		4.098.000	112,97	3,62		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	848		1.127		1374		275		683						958		69,72		958		112,97			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			24.697.130		1.380.000		3.094.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			330.756.870		49.654.500		7.110.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			7.932.538		825.000		825.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		55,25				55,76			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.834.345.757		1.191.828.026		2.730.310.536		-		50.379.000						50.379.000	55,25	1,85		50.379.000	55,76	0,64		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	854		817		886		196		526						722		81,49		722		84,54			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			147.883.720		23.232.000		23.232.000		-		-						-	81,49	0		-	84,54	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	854		817		886		196		526						722		81,49		722		84,54			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.656.120.818		413.532.403		690.916.400		-		5.082.000						5.082.000	50	0,74		5.082.000	50	0,19		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		-		2.700.000		-		150.000						150.000	50	5,56		150.000	50	8,4		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			5.004.613.995		751.316.623		2.012.294.636		-		45.147.000						45.147.000	50	2,24		45.147.000	50	0,9		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			20.877.101		3.267.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			3.063.695		480.000		480.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**18.417.922**		**2.890.000**		**7.431.600**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Sidotopo Wetan	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			18.417.922		2.890.000		7.431.600		-		-						-	50	0		-	50	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Sidotopo Wetan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			18.417.922		2.890.000		7.431.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.677.253.333**		**2.279.783.556**		**2.521.214.244**		-		**476.861.891**						**476.861.891**	**100**	**18,91**		**476.861.891**	**100**	**3,76**	Puskesmas Simolawang	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			12.677.253.333		2.279.783.556		2.521.214.244		-		476.861.891						476.861.891	100	18,91		476.861.891	100	3,76		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Simolawang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			12.677.253.333		2.279.783.556		2.521.214.244		-		476.861.891						476.861.891	100	18,91		476.861.891	100	3,76		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.329.956.895**		**1.005.178.002**		**2.166.731.456**		-		**47.947.545**						**47.947.545**	**57,68**	**2,21**		**47.947.545**	**62,28**	**0,76**	Puskesmas Simolawang	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		64,69				73,56			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.052.222.258		158.572.800		47.968.000		-		3.620.000						3.620.000	64,69	7,55		3.620.000	73,56	0,34		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5280		5.262		5816		477		3.073						3.550		61,04		3.550		67,23			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	76		90		72		34		33						67		93,06		67		88,16			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	531		1.089		859		370		352						722		84,05		722		135,97			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			25.272.718		3.960.000		5.760.000		-		-						-	61,04	0		-	67,23	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatari Sesuai Standar (Orang)	5280		5.262		5816		477		3.073						3.550		61,04		3.550		67,23			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			19.441.474		1.800.000		1.800.000		-		180.000						180.000	93,06	10		180.000	88,16	0,93		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	76		90		72		34		33						67		93,06		67		88,16			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			119.192.355		18.672.000		13.860.000		-		1.190.000						1.190.000	84,05	8,59		1.190.000	135,97	1		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	531		1.089		859		370		352						722		84,05		722		135,97			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			42.891.662		1.740.000		6.668.000		-		510.000						510.000	50	7,65		510.000	50	1,19		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			832.299.305		130.353.300		18.780.000		-		1.740.000						1.740.000	50	9,27		1.740.000	50	0,21		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			13.124.744		2.047.500		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		50,67				51			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.277.734.637		846.605.202		2.118.763.456		-		44.327.545						44.327.545	50,67	2,09		44.327.545	51	0,84		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Simolawang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	491		602		509		113		162						275		54,03		275		56,01			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			295.767.440		46.464.000		46.464.000		-		7.260.000						7.260.000	54,03	15,63		7.260.000	56,01	2,45		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	491		602		509		113		162						275		54,03		275		56,01			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.291.214.418		199.581.019		262.998.800		-		10.166.545						10.166.545	50	3,87		10.166.545	50	0,79		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.670.000		-		630.000						630.000	50	23,6		630.000	50	35,27		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.607.296.482		587.499.183		1.804.843.156		-		26.271.000						26.271.000	50	1,46		26.271.000	50	0,73		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			51.032.915		7.986.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			30.636.954		4.800.000		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**24.049.672**		**3.010.000**		**11.552.200**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**50**	**0**	Puskesmas Simolawang	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			24.049.672		3.010.000		11.552.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Simolawang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			24.049.672		3.010.000		11.552.200		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**23.471.869.092**		**4.461.751.389**		**4.668.015.156**		**-**		**808.639.636**						**808.639.636**	**100**	**17,32**		**808.639.636**	**100**	**3,45**	Puskesmas Simomulyo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			23.471.869.092		4.461.751.389		4.668.015.156		-		808.639.636						808.639.636	100	17,32		808.639.636	100	3,45		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Simomulyo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			23.471.869.092		4.461.751.389		4.668.015.156		-		808.639.636						808.639.636	100	17,32		808.639.636	100	3,45		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**8.255.020.404**		**1.106.566.024**		**1.009.847.192**		**-**		**57.434.500**						**57.434.500**	**52,68**	**5,69**		**57.434.500**	**58,88**	**0,7**	Puskesmas Simomulyo	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		55,08				67,16			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			863.616.226		133.853.600		38.332.000		-		2.786.000						2.786.000	55,08	7,27		2.786.000	67,16	0,32		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10722		10.240		11814		3.400		5.620						9.020		76,35		9.020		84,13			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	103		279		149		51		82						133		89,26		133		129,13			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1062		1.668		1722		298		389						687		39,9		687		64,69			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			1.914.601		300.000		2.760.000		-		-						-	76,35	0		-	84,13	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10722		10.240		11814		3.400		5.620						9.020		76,35		9.020		84,13			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			20.585.090		3.240.000		2.700.000		-		-						-	89,26	0		-	129,13	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	103		279		149		51		82						133		89,26		133		129,13			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			58.855.694		9.220.000		17.620.000		-		2.666.000						2.666.000	39,9	15,13		2.666.000	64,69	4,53		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1062		1.668		1722		298		389						687		39,9		687		64,69			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			49.993.522		6.842.800		7.782.000		-		-						-	25	0		-	25	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			713.758.065		111.813.300		6.810.000		-		120.000						120.000	50	1,76		120.000	50	0,02		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			18.509.254		2.437.500		660.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		50,28				50,61			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.391.404.178		972.712.424		971.515.192		-		54.648.500						54.648.500	50,28	5,63		54.648.500	50,61	0,74		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Simomulyo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	945		971		981		277		230						507		51,68		507		53,65			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		69.696.000		-		8.712.000						8.712.000	51,68	12,5		8.712.000	53,65	2,09		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	945		971		981		277		230						507		51,68		507		53,65			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.531.472.291		369.521.125		390.453.000		-		-						-	50	0		-	50	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			4.342.695.406		521.997.299		506.328.692		-		45.936.500						45.936.500	50	9,07		45.936.500	50	1,06		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			76.549.372		11.979.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			22.977.717		3.600.000		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**20.995.165**		**3.250.000**		**14.817.000**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Simomulyo	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			20.995.165		3.250.000		14.817.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Simomulyo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			20.995.165		3.250.000		14.817.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.478.288.041**		**1.766.421.997**		**1.686.136.580**		-		**407.809.220**						**407.809.220**	**100**	**24,19**		**407.809.220**	**100**	**4,81**	Puskesmas Siwalankerto	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			8.478.288.041		1.766.421.997		1.686.136.580		-		407.809.220						407.809.220	100	24,19		407.809.220	100	4,81		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Siwalankerto	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			8.478.288.041		1.766.421.997		1.686.136.580		-		407.809.220						407.809.220	100	24,19		407.809.220	100	4,81		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.680.921.596**		**783.037.971**		**871.716.292**		-		**22.015.464**						**22.015.464**	**55,35**	**2,53**		**22.015.464**	**60,45**	**0,39**	Puskesmas Siwalankerto	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		61,05				70,94			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			928.889.193		144.717.300		26.984.000		-		2.576.000						2.576.000	61,05	9,55		2.576.000	70,94	0,28		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2258		2.715		2487		833		759						1.592		64,01		1.592		70,5			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	38		49		34		10		9						19		55,88		19		50			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	243		413		391		236		141						377		96,42		377		155,14			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			12.061.978		1.890.000		1.320.000		-		-						-	64,01	0		-	70,5	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2258		2.715		2487		833		759						1.592		64,01		1.592		70,5			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.579.777		1.980.000		1.440.000		-		-						-	55,88	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	38		49		34		10		9						19		55,88		19		50			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			126.852.533		19.872.000		14.460.000		-		2.576.000						2.576.000	96,42	17,81		2.576.000	155,14	2,03		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	243		413		391		236		141						377		96,42		377		155,14			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			18.959.543		2.592.000		2.764.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			744.781.782		116.493.300		6.120.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			13.653.580		1.890.000		880.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		49,64				49,96			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.752.032.403		638.320.671		844.732.292		-		19.439.464						19.439.464	49,64	2,3		19.439.464	49,96	0,41		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	199		221		207		53		46						99		47,83		99		49,75			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			147.883.720		23.232.000		31.944.000		-		-						-	47,83	0		-	49,75	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	199		221		207		53		46						99		47,83		99		49,75			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.232.250.108		192.321.094		244.386.900		-		6.240.464						6.240.464	50	2,55		6.240.464	50	0,51		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.310.151.021		413.102.577		564.463.892		-		13.199.000						13.199.000	50	2,34		13.199.000	50	0,4		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			23.196.780		3.630.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			36.764.346		5.760.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**20.995.165**		**3.250.000**		**7.976.100**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Siwalankerto	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			20.995.165		3.250.000		7.976.100		-		-						-	50	0		-	50	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Siwalankerto	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			20.995.165		3.250.000		7.976.100		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.078.687.840**		**1.421.764.150**		**1.407.788.276**		-		**242.371.424**						**242.371.424**	**100**	**17,22**		**242.371.424**	**100**	**3,42**	Puskesmas Tambak Wedi	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			7.078.687.840		1.421.764.150		1.407.788.276		-		242.371.424						242.371.424	100	17,22		242.371.424	100	3,42		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			7.078.687.840		1.421.764.150		1.407.788.276		-		242.371.424						242.371.424	100	17,22		242.371.424	100	3,42		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.650.882.147**		**729.410.332**		**1.205.459.592**		-		**44.523.500**						**44.523.500**	**45,24**	**3,69**		**44.523.500**	**46,46**	**0,79**	Puskesmas Tambak Wedi	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		40,35				42,52			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			591.672.304		91.820.200		31.054.000		-		4.068.000						4.068.000	40,35	13,1		4.068.000	42,52	0,69		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2961		3.026		3260		58		630						688		21,1		688		23,24			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	43		33		39		10		8						18		46,15		18		41,86			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	250		339		403		0		100						100		24,81		100		40			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			8.424.239		1.320.000		570.000		-		-						-	21,1	0		-	23,24	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatari Sesuai Standar (Orang)	2961		3.026		3260		58		630						688		21,1		688		23,24			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.579.777		1.980.000		2.700.000		-		-						-	46,15	0		-	41,86	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	43		33		39		10		8						18		46,15		18		41,86			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			90.390.090		14.160.000		14.280.000		-		4.068.000						4.068.000	24,81	28,49		4.068.000	40	4,5		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	250		339		403		0		100						100		24,81		100		40			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			25.462.143		3.118.000		3.094.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			447.277.740		70.068.000		9.420.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			7.538.315		1.174.200		990.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		50,13				50,41			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.059.209.843		637.590.132		1.174.405.592		-		40.455.500						40.455.500	50,13	3,44		40.455.500	50,41	0,8		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	244		251		252		74		54						128		50,79		128		52,46			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			147.883.720		23.232.000		23.232.000		-		4.356.000						4.356.000	50,79	18,75		4.356.000	52,46	2,95		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	244		251		252		74		54						128		50,79		128		52,46			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.614.522.188		252.546.221		326.063.400		-		19.305.000						19.305.000	50	5,92		19.305.000	50	1,2		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		-		2.520.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.264.205.301		356.987.911		821.352.692		-		16.794.500						16.794.500	50	2,04		16.794.500	50	0,51		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			18.557.424		2.904.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			12.254.782		1.920.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**20.995.165**		**3.281.800**		**8.520.600**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**50**	**0**	Puskesmas Tambak Wedi	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			20.995.165		3.281.800		8.520.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Tambak Wedi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			20.995.165		3.281.800		8.520.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.208.875.884**		**2.899.652.320**		**3.223.572.779**		**-**		**628.212.357**						**628.212.357**	**100**	**19,49**		**628.212.357**	**100**	**3,88**	Puskesmas Tambakrejo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			16.208.875.884		2.899.652.320		3.223.572.779		-		628.212.357						628.212.357	100	19,49		628.212.357	100	3,88		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tambakrejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.208.875.884		2.899.652.320		3.223.572.779		-		628.212.357						628.212.357	100	19,49		628.212.357	100	3,88		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.744.795.450**		**889.372.089**		**1.152.000.488**		**-**		**29.915.998**						**29.915.998**	**53,66**	**2,6**		**29.915.998**	**56,43**	**0,44**	Puskesmas Tambakrejo	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		58,49				63,8			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			838.371.671		123.192.000		44.467.000		-		2.992.000						2.992.000	58,49	6,73		2.992.000	63,8	0,36		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7480		6.706		8242		921		4.023						4.944		59,99		4.944		66,1			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	115		156		107		30		66						96		89,72		96		83,48			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	780		1.152		1266		257		392						649		51,26		649		83,21			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			9.573.000		900.000		1.980.000		-		60.000						60.000	59,99	3,03		60.000	66,1	0,63		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7480		6.706		8242		921		4.023						4.944		59,99		4.944		66,1			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			36.595.716		5.760.000		1.800.000		-		300.000						300.000	89,72	16,67		300.000	83,48	0,82		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	115		156		107		30		66						96		89,72		96		83,48			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			136.044.746		19.332.000		16.420.000		-		1.732.000						1.732.000	51,26	10,55		1.732.000	83,21	1,27		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	780		1.152		1266		257		392						649		51,26		649		83,21			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			49.228.511		4.230.000		7.482.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			594.381.865		91.402.500		15.960.000		-		900.000						900.000	50	5,64		900.000	50	0,15		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12.547.833		1.567.500		825.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		48,82				49,06			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.906.423.779		766.180.089		1.107.533.488		-		26.923.998						26.923.998	48,82	2,43		26.923.998	49,06	0,46		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	478		375		494		98		114						212		42,91		212		44,35			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		69.696.000		-		4.356.000						4.356.000	42,91	6,25		4.356.000	44,35	1,05		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	478		375		494		98		114						212		42,91		212		44,35			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.729.717.508		195.127.704		385.073.700		-		151.998						151.998	50	0,04		151.998	50	0,01		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		-		2.700.000		-		150.000						150.000	50	5,56		150.000	50	8,4		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.688.006.131		494.660.385		647.726.288		-		22.266.000						22.266.000	50	3,44		22.266.000	50	0,6		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			55.672.271		8.712.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			15.318.477		2.340.000		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**25.576.927**		**3.894.000**		**15.744.300**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Tambakrejo	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			25.576.927		3.894.000		15.744.300		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Tambakrejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			25.576.927		3.894.000		15.744.300		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**23.637.754.145**		**5.093.435.777**		**4.701.005.879**		-		**1.363.512.098**						**1.363.512.098**	**100**	**29**		**1.363.512.098**	**100**	**5,77**	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			23.637.754.145		5.093.435.777		4.701.005.879		-		1.363.512.098						1.363.512.098	100	29		1.363.512.098	100	5,77		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tanah Kali	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			23.637.754.145		5.093.435.777		4.701.005.879		-		1.363.512.098						1.363.512.098	100	29		1.363.512.098	100	5,77		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**8.032.195.570**		**1.079.726.297**		**1.215.984.388**		-		**73.096.492**						**73.096.492**	**99,85**	**6,01**		**73.096.492**	**58,54**	**0,91**	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		54,27				62,87			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			894.433.800		139.735.500		36.214.000		-		6.474.000						6.474.000	54,27	17,88		6.474.000	62,87	0,72		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8792		8.945		9687		2.615		2.398						5.013		51,75		5.013		57,02			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	101		149		118		26		54						80		67,8		80		79,21			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	811		1.342		1316		201		537						738		56,08		738		91			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			11.487.600		1.800.000		2.580.000		-		-						-	51,75	0		-	57,02	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	8792		8.945		9687		2.615		2.398						5.013		51,75		5.013		57,02			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			25.159.554		3.960.000		2.700.000		-		-						-	67,8	0		-	79,21	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	101		149		118		26		54						80		67,8		80		79,21			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			111.532.178		17.472.000		16.870.000		-		5.574.000						5.574.000	56,08	33,04		5.574.000	91	5		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	811		1.342		1316		201		537						738		56,08		738		91			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			18.385.784		2.484.000		3.094.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			721.282.274		112.992.000		10.530.000		-		900.000						900.000	50	8,55		900.000	50	0,12		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			6.586.410		1.027.500		440.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		145,42				54,2			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.137.761.770		939.990.797		1.179.770.388		-		66.622.492						66.622.492	145,42	5,65		66.622.492	54,2	0,93		
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Tanah Kali	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	766		731		794		203		373						576		72,54		576		75,2			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			166.369.185		26.136.000		31.944.000		-		5.808.000						5.808.000	72,54	18,18		5.808.000	75,2	3,49		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	766		731		794		203		373						576		72,54		576		75,2			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.005.384.983		313.779.461		338.154.400		-		24.707.492						24.707.492	50	7,31		24.707.492	50	1,23		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		-		2.610.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			4.919.300.097		593.057.136		805.824.488		-		36.107.000						36.107.000	50	4,48		36.107.000	50	0,73		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			26.538.905		4.138.200		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			18.382.172		2.880.000		550.000		-		-						-	600	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		1		3		3						6		600		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**19.917.940**		**3.130.000**		**9.246.600**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			19.917.940		3.130.000		9.246.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			19.917.940		3.130.000		9.246.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.251.090.360**		**1.896.662.154**		**2.038.706.205**		-		**469.218.621**						**469.218.621**	**100**	**23,02**		**469.218.621**	**100**	**4,58**	Puskesmas Tanjungsari	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			10.251.090.360		1.896.662.154		2.038.706.205		-		469.218.621						469.218.621	100	23,02		469.218.621	100	4,58		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tanjungsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			10.251.090.360		1.896.662.154		2.038.706.205		-		469.218.621						469.218.621	100	23,02		469.218.621	100	4,58		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.958.110.965**		**620.943.623**		**872.497.884**		-		**38.790.998**						**38.790.998**	**54,42**	**4,45**		**38.790.998**	**56,62**	**0,78**	Puskesmas Tanjungsari	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		59,42				63,62			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			995.167.163		152.847.000		38.437.000		-		6.730.000						6.730.000	59,42	17,51		6.730.000	63,62	0,68		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3313		3.081		3648		587		1.429						2.016		55,26		2.016		60,85			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	56		445		50		38		13						51		102		51		91,07			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	376		588		609		159		141						300		49,26		300		79,79			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			6.892.559		1.080.000		3.060.000		-		-						-	55,26	0		-	60,85	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3313		3.081		3648		587		1.429						2.016		55,26		2.016		60,85			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			9.148.929		1.440.000		1.440.000		-		-						-	102	0		-	91,07	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	56		445		50		38		13						51		102		51		91,07			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			105.787.045		16.572.000		13.860.000		-		2.380.000						2.380.000	49,26	17,17		2.380.000	79,79	2,25		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	376		588		609		159		141						300		49,26		300		79,79			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			56.496.122		7.316.000		8.742.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			792.083.375		123.986.500		9.960.000		-		4.350.000						4.350.000	50	43,67		4.350.000	50	0,55		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			24.759.133		2.452.500		1.375.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		49,41				49,63			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.962.943.802		468.096.623		834.060.884		-		32.060.998						32.060.998	49,41	3,84		32.060.998	49,63	0,81		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	291		315		299		83		56						139		46,49		139		47,77			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		69.696.000		-		8.712.000						8.712.000	46,49	12,5		8.712.000	47,77	2,09		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	291		315		299		83		56						139		46,49		139		47,77			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			957.750.734		116.980.060		175.668.200		-		3.941.998						3.941.998	50	2,24		3.941.998	50	0,41		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			13.015.407		1.260.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			2.515.986.883		275.084.563		584.781.184		-		19.407.000						19.407.000	50	3,32		19.407.000	50	0,77		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			55.672.271		8.712.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			4.595.543		720.000		528.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**20.872.474**		**3.280.000**		**14.836.800**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Tanjungsari	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			20.872.474		3.280.000		14.836.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			20.872.474		3.280.000		14.836.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.092.272.842**		**2.783.287.675**		**3.200.383.115**		-		**518.936.710**						**518.936.710**	**100**	**16,21**		**518.936.710**	**100**	**3,22**	Puskesmas Tembok Dukuh	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			16.092.272.842		2.783.287.675		3.200.383.115		-		518.936.710						518.936.710	100	16,21		518.936.710	100	3,22		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			16.092.272.842		2.783.287.675		3.200.383.115		-		518.936.710						518.936.710	100	16,21		518.936.710	100	3,22		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**7.915.028.648**		**1.022.804.182**		**1.377.895.385**		-		**60.843.472**						**60.843.472**	**52,31**	**4,42**		**60.843.472**	**55,02**	**0,77**	Puskesmas Tembok Dukuh	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		52,91				57,96			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			949.108.287		147.892.800		36.590.000		-		4.032.000						4.032.000	52,91	11,02		4.032.000	57,96	0,42		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7704		7.095		8488		1.247		3.339						4.586		54,03		4.586		59,53			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	118		161		110		41		32						73		66,36		73		61,86			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	799		1.275		1296		250		360						610		47,07		610		76,35			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			13.210.738		2.070.000		5.040.000		-		-						-	54,03	0		-	59,53	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7704		7.095		8488		1.247		3.339						4.586		54,03		4.586		59,53			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			37.739.332		5.940.000		4.500.000		-		-						-	66,36	0		-	61,86	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	118		161		110		41		32						73		66,36		73		61,86			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			116.128.285		18.192.000		15.960.000		-		3.432.000						3.432.000	47,07	21,5		3.432.000	76,35	2,96		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	799		1.275		1296		250		360						610		47,07		610		76,35			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6.502.600		900.000		1.290.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			761.825.676		119.343.300		8.700.000		-		600.000						600.000	50	6,9		600.000	50	0,08		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			13.701.656		1.447.500		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		51,71				52,08			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.965.920.361		874.911.382		1.341.305.385		-		56.811.472						56.811.472	51,71	4,24		56.811.472	52,08	0,82		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	584		587		606		87		278						365		60,23		365		62,5			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		69.696.000		-		13.068.000						13.068.000	60,23	18,75		13.068.000	62,5	3,14		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	584		587		606		87		278						365		60,23		365		62,5			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.601.973.356		223.495.258		453.995.700		-		9.378.972						9.378.972	50	2,07		9.378.972	50	0,59		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			25.839.412		4.050.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			4.782.960.936		560.225.124		813.676.185		-		34.364.500						34.364.500	50	4,22		34.364.500	50	0,72		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			62.631.305		9.801.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			76.592.388		12.000.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**18.008.873**		**2.830.000**		**13.566.300**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Tembok Dukuh	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			18.008.873		2.830.000		13.566.300		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Tembok Dukuh	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			18.008.873		2.830.000		13.566.300		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**14.357.379.870**		**2.757.795.063**		**2.855.352.787**		-		**598.437.811**						**598.437.811**	**100**	**20,96**		**598.437.811**	**100**	**4,17**	Puskesmas Tenggilis	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			14.357.379.870		2.757.795.063		2.855.352.787		-		598.437.811						598.437.811	100	20,96		598.437.811	100	4,17		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tenggilis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			14.357.379.870		2.757.795.063		2.855.352.787		-		598.437.811						598.437.811	100	20,96		598.437.811	100	4,17		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**7.319.767.352**		**1.066.731.159**		**1.486.522.980**		-		**39.183.000**						**39.183.000**	**53,45**	**2,64**		**39.183.000**	**57,72**	**0,54**	Puskesmas Tenggilis	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		56,27				64,45			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.086.769.927		148.003.900		47.291.000		-		4.030.000						4.030.000	56,27	8,52		4.030.000	64,45	0,37		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Tenggilis	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7708		7.246		8492		1.248		5.611						6.859		80,77		6.859		88,99			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	107		100		114		25		27						52		45,61		52		48,6			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	807		1.279		1307		417		383						800		61,21		800		99,13			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			20.677.677		3.240.000		5.700.000		-		-						-	80,77	0		-	88,99	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7708		7.246		8492		1.248		5.611						6.859		80,77		6.859		88,99			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			37.739.332		5.940.000		1.800.000		-		-						-	45,61	0		-	48,6	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	107		100		114		25		27						52		45,61		52		48,6			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			110.766.161		8.976.000		15.720.000		-		2.260.000						2.260.000	61,21	14,38		2.260.000	99,13	2,04		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	807		1.279		1307		417		383						800		61,21		800		99,13			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			83.870.794		9.728.800		12.076.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			808.956.830		118.056.600		10.620.000		-		1.770.000						1.770.000	50	16,67		1.770.000	50	0,22		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			24.759.133		2.062.500		1.375.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		50,63				50,98			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.232.997.425		918.727.259		1.439.231.980		-		35.153.000						35.153.000	50,63	2,44		35.153.000	50,98	0,56		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Tenggilis	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	594		645		617		158		174						332		53,81		332		55,89			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			480.622.091		75.504.000		75.504.000		-		-						-	53,81	0		-	55,89	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	594		645		617		158		174						332		53,81		332		55,89			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.517.922.504		220.212.616		396.966.600		-		7.969.500						7.969.500	50	2,01		7.969.500	50	0,53		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		5.400.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			4.133.751.893		607.255.643		959.969.880		-		27.183.500						27.183.500	50	2,83		27.183.500	50	0,66		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			92.787.119		14.520.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			6.127.390		960.000		704.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**25.576.927**		**2.710.000**		**18.539.400**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Tenggilis	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			25.576.927		2.710.000		18.539.400		-		-						-	50	0		-	50	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Tenggilis	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			25.576.927		2.710.000		18.539.400		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**17.742.207.514**		**3.200.394.245**		**3.528.517.190**		-		**664.971.782**						**664.971.782**	**100**	**18,85**		**664.971.782**	**100**	**3,75**	Puskesmas Wiyung	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			17.742.207.514		3.200.394.245		3.528.517.190		-		664.971.782						664.971.782	100	18,85		664.971.782	100	3,75		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Wiyung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			17.742.207.514		3.200.394.245		3.528.517.190		-		664.971.782						664.971.782	100	18,85		664.971.782	100	3,75		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.833.901.930**		**738.391.981**		**1.408.147.888**		-		**37.817.472**						**37.817.472**	**55,83**	**2,69**		**37.817.472**	**58,69**	**0,55**	Puskesmas Wiyung	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		59,75				65,09			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			979.277.445		145.730.100		35.882.000		-		1.354.000						1.354.000	59,75	3,77		1.354.000	65,09	0,14		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Wiyung	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	7603		6.979		8377		633		5.170						5.803		69,27		5.803		76,33			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	124		112		116		62		42						104		89,66		104		83,87			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	813		1.584		1318		360		293						653		49,54		653		80,32			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			22.975.198		3.030.000		1.320.000		-		-						-	69,27	0		-	76,33	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatari Sesuai Standar (Orang)	7603		6.979		8377		633		5.170						5.803		69,27		5.803		76,33			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			19.441.474		1.650.000		540.000		-		-						-	89,66	0		-	83,87	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	124		112		116		62		42						104		89,66		104		83,87			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			104.446.514		16.362.000		13.740.000		-		994.000						994.000	49,54	7,23		994.000	80,32	0,95		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	813		1.584		1318		360		293						653		49,54		653		80,32			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			50.567.281		6.538.800		7.842.000		-		30.000						30.000	50	0,38		30.000	50	0,06		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			768.145.322		116.431.800		11.340.000		-		330.000						330.000	50	2,91		330.000	50	0,04		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			13.701.656		1.717.500		1.100.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		51,91				52,29			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.854.624.485		592.661.881		1.372.265.888		-		36.463.472						36.463.472	51,91	2,66		36.463.472	52,29	0,62		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Wiyung	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	687		758		713		208		230						438		61,43		438		63,76			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			415.922.964		65.340.000		69.696.000		-		4.356.000						4.356.000	61,43	6,25		4.356.000	63,76	1,05		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	687		758		713		208		230						438		61,43		438		63,76			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.493.221.370		173.813.100		570.429.200		-		11.136.972						11.136.972	50	1,95		11.136.972	50	0,75		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		-		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.858.784.907		340.218.781		727.103.188		-		20.970.500						20.970.500	50	2,88		20.970.500	50	0,54		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			69.590.339		10.890.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			15.318.477		2.400.000		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**18.008.873**		**2.830.000**		**14.836.800**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**50**	**0**	Puskesmas Wiyung	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			18.008.873		2.830.000		14.836.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Wiyung	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			18.008.873		2.830.000		14.836.800		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.616.975.885**		**2.113.626.347**		**2.310.349.435**		**-**		**474.167.737**						**474.167.737**	**100**	**20,52**		**474.167.737**	**100**	**4,08**	Puskesmas Wonokromo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			11.616.975.885		2.113.626.347		2.310.349.435		-		474.167.737						474.167.737	100	20,52		474.167.737	100	4,08		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Wonokromo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			11.616.975.885		2.113.626.347		2.310.349.435		-		474.167.737						474.167.737	100	20,52		474.167.737	100	4,08		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.443.055.879**		**682.450.460**		**869.954.488**		**-**		**30.309.000**						**30.309.000**	**56,53**	**3,48**		**30.309.000**	**60,61**	**0,68**	Puskesmas Wonokromo	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		59,11				66,77			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			743.433.569		115.245.500		47.359.000		-		1.130.000						1.130.000	59,11	2,39		1.130.000	66,77	0,15		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Wonokromo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5354		4.937		5898		724		2.271						2.995		50,78		2.995		55,94			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	80		16		76		17		45						62		81,58		62		77,5			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	564		957		914		361		300						661		72,32		661		117,2			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			16.848.478		2.640.000		10.500.000		-		-						-	50,78	0		-	55,94	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5354		4.937		5898		724		2.271						2.995		50,78		2.995		55,94			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			26.303.170		3.720.000		3.600.000		-		-						-	81,58	0		-	77,5	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	80		16		76		17		45						62		81,58		62		77,5			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			121.107.400		18.972.000		14.160.000		-		1.130.000						1.130.000	72,32	7,98		1.130.000	117,2	0,93		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	564		957		914		361		300						661		72,32		661		117,2			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			20.489.566		2.852.000		3.004.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			544.983.299		85.374.000		15.270.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			13.701.656		1.687.500		825.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		53,95				54,44			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.699.622.310		567.204.960		822.595.488		-		29.179.000						29.179.000	53,95	3,55		29.179.000	54,44	0,79		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Wonokromo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	497		506		517		114		267						381		73,69		381		76,66			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			147.883.720		23.232.000		31.944.000		-		5.808.000						5.808.000	73,69	18,18		5.808.000	76,66	3,93		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	497		506		517		114		267						381		73,69		381		76,66			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.732.759.530		198.402.578		226.819.400		-		-						-	50	0		-	50	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.786.428		275.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.751.935.758		335.074.382		559.894.588		-		23.371.000						23.371.000	50	4,17		23.371.000	50	1,33		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			16.237.746		2.541.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			49.019.128		7.680.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**21.758.792**		**2.874.000**		**9.609.600**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Wonokromo	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			21.758.792		2.874.000		9.609.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Wonokromo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			21.758.792		2.874.000		9.609.600		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.321.176.347**		**3.191.183.648**		**4.041.097.536**		-		**750.718.926**						**750.718.926**	**100**	**18,58**		**750.718.926**	**100**	**3,69**	Puskesmas Wonokusumo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang																		100				100			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			20.321.176.347		3.191.183.648		4.041.097.536		-		750.718.926						750.718.926	100	18,58		750.718.926	100	3,69		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Wonokusumo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			20.321.176.347		3.191.183.648		4.041.097.536		-		750.718.926						750.718.926	100	18,58		750.718.926	100	3,69		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**8.891.489.234**		**1.430.251.860**		**3.585.487.295**		**32.560.000**		**97.692.500**						**130.252.500**	**56,54**	**3,63**		**130.252.500**	**64,53**	**1,46**	Puskesmas Wonokusumo	
			Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular																		60,28				76,87			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			945.807.189		147.357.900		46.034.000		-		1.626.000						1.626.000	60,28	3,53		1.626.000	76,87	0,17		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10409		7.993		11616		69		7.875						7.944		68,39		7.944		76,32			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	105		104		150		36		85						121		80,67		121		115,24			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	825		1.509		1576		373		614						987		62,63		987		119,64			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			19.623.673		3.060.000		10.920.000		-		-						-	68,39	0		-	76,32	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10409		7.993		11616		69		7.875						7.944		68,39		7.944		76,32			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			34.325.375		5.400.000		2.700.000		-		-						-	80,67	0		-	115,24	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	105		104		150		36		85						121		80,67		121		115,24			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			113.390.546		17.772.000		16.870.000		-		1.356.000						1.356.000	62,63	8,04		1.356.000	119,64	1,2		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	825		1.509		1576		373		614						987		62,63		987		119,64			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			19.189.940		2.334.000		3.514.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			744.887.394		116.564.400		10.380.000		-		270.000						270.000	50	2,6		270.000	50	0,04		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			14.390.261		2.227.500		1.650.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat																		52,8				52,2			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.945.682.045		1.282.893.960		3.539.453.295		32.560.000		96.066.500						128.626.500	52,8	3,63		128.626.500	52,2	1,62		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	965		1.016		913		337		273						610		66,81		610		63,21			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			147.986.947		23.232.000		31.944.000		-		-						-	66,81	0		-	63,21	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	965		1.016		913		337		273						610		66,81		610		63,21			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.261.027.939		348.557.553		832.007.900		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			16.628.794		2.580.000		2.700.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			5.450.616.801		897.694.407		2.671.563.895		32.560.000		96.066.500						128.626.500	50	4,81		128.626.500	50	2,36		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			23.355.934		3.630.000		687.500		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			46.065.630		7.200.000		550.000		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**30.081.144**		**4.690.000**		**8.339.100**		-		-						-	**50**	**0**		-	**50**	**0**	Puskesmas Wonokusumo	
			Meningkatnya kesadaran hidup sehat di masyarakat																		50				50			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			30.081.144		4.690.000		8.339.100		-		-						-	50	0		-	50	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Wonokusumo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			30.081.144		4.690.000		8.339.100		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.369.664.826.136**		**230.501.831.705**		**254.448.377.574**		**16.280.344.950**		**72.998.168.271**						**89.278.513.221**	**98,14**	**35,09**		**89.278.513.221**	**54,64**	**6,52**	RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD pada RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase capaian SPM RSUD Bhakti Dharma Husada (%)	96,02		96,97		95,98		95,96		95,96						95,96		99,98		95,96		99,94			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			916.958.757.600		165.854.909.904		177.604.511.200		-		54.137.290.783						54.137.290.783	100	30,48		54.137.290.783	20	5,9		
			Meningkatnya pelayanan dan penunjang BLUD RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			916.958.757.600		165.854.909.904		177.604.511.200		-		54.137.290.783						54.137.290.783	100	30,48		54.137.290.783	20	5,9		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesehatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Bhakti Dharma Husada (%)	92,81		99		92,41		98,66		98,77						98,77		106,88		98,77		106,42			
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			452.706.068.536		64.646.921.801		76.843.866.374		16.280.344.950		18.860.877.488						35.141.222.438	96,27	45,73		35.141.222.438	89,27	7,76		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	550		490		510		491		491						491		96,27		491		89,27			
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			452.706.068.536		64.646.921.801		76.843.866.374		16.280.344.950		18.860.877.488						35.141.222.438	96,27	45,73		35.141.222.438	89,27	7,76		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	550		490		510		491		491						491		96,27		491		89,27			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**573.533.324.424**		**39.546.422.873**		**45.712.656.395**		-		**1.158.035.899**						**1.158.035.899**	**40,91**	**2,53**		**1.158.035.899**	**28,13**	**0,2**	RSUD Bhakti Dharma Husada	
			Meningkatnya kualitas sarana prasarana pada RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase Sarana Prasarana rumah sakit sesuai standar dalam kondisi baik (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			27.764.165.582		14.361.379.347		32.787.040.175		-		973.535.899						973.535.899	81,82	2,97		973.535.899	56,25	3,51		
			Terpenuhinya sarana prasarana pada RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	16		19		11		0		9						9		81,82		9		56,25			
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			27.764.165.582		14.361.379.347		32.787.040.175		-		973.535.899						973.535.899	81,82	2,97		973.535.899	56,25	3,51		
			Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	16		19		11		0		9						9		81,82		9		56,25			
			Meningkatnya Kualitas SDM pada RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase ketersediaan SDM pada RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan standar (%)	92		89		89,5		89,47		89,47						89,47		99,97		89,47		97,25			
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			545.769.158.842		25.185.043.526		12.925.616.220		-		184.500.000						184.500.000	0	1,43		184.500.000	0	0,03		
			Terpenuhinya SDM pada RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit			545.769.158.842		25.185.043.526		12.925.616.220		-		184.500.000						184.500.000	0	1,43		184.500.000	0	0,03		
			Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.152.056.008.607**		**392.002.405.115**		**418.177.587.321**		**26.840.680.738**		**103.262.559.777**						**130.103.240.515**	**100,06**	**31,11**		**130.103.240.515**	**100,06**	**6,05**	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Persentase Capaian SPM RSUD dr. Mohamad Soewandhie (%)	89,89		88,89		88,89		88,89		88,89						88,89		100		88,89		98,89			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.447.870.324.910		283.995.810.893		300.577.963.476		-		72.708.740.851						72.708.740.851	100	24,19		72.708.740.851	100	5,02		
			Meningkatnya pelayanan dan penunjang BLUD RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.447.870.324.910		283.995.810.893		300.577.963.476		-		72.708.740.851						72.708.740.851	100	24,19		72.708.740.851	100	5,02		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesehatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Dokter Mohamad Soewandhie (%)	91,8		93,63		91,4		94,99		95,33						95,33		104,3		95,33		103,85			
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			704.185.683.697		108.006.594.222		117.599.623.845		26.840.680.738		30.553.818.926						57.394.499.664	100,13	48,81		57.394.499.664	100,13	8,15		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	799		804		799		800		800						800		100,13		800		100,13			
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			704.185.683.697		108.006.594.222		117.599.623.845		26.840.680.738		30.553.818.926						57.394.499.664	100,13	48,81		57.394.499.664	100,13	8,15		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	799		804		799		800		800						800		100,13		800		100,13			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**39.467.481.502**		-		**4.157.340.996**		-		**395.600.000**						**395.600.000**	**100**	**9,52**		**395.600.000**	**100**	**1**	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
			Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan SDM pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Persentase Sarana Prasarana rumah sakit sesuai standar dalam kondisi baik (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase ketersediaan SDM pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan standar (%)	93,5		89		89,5		94,73		94,74						94,74		105,85		94,74		101,33			
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			39.467.481.502		-		4.157.340.996		-		395.600.000						395.600.000	100	9,52		395.600.000	100	1		
			Terpenuhinya sarana prasarana dan SDM pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit			39.467.481.502		-		4.157.340.996		-		395.600.000						395.600.000	100	9,52		395.600.000	100	1		
			Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**794.937.701.464**		**50.503.615.457**		**149.148.374.448**		**20.764.399.525**		**32.210.972.236**						**52.975.371.761**	**83,53**	**35,52**		**52.975.371.761**	**56,94**	**6,66**	RSUD Eka Candrarini	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesehatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Eka Candrarini (%)	85,5		96,04		85,1		98,84		98,83						98,83		116,13		98,83		115,59			
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			383.676.935.249		44.079.140.653		93.190.305.793		18.531.973.661		23.962.921.483						42.494.895.144	100,59	45,6		42.494.895.144	100,81	11,08		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	475		477		476		479		478,83						478,83		100,59		478,83		100,81			
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			383.676.935.249		44.079.140.653		93.190.305.793		18.531.973.661		23.962.921.483						42.494.895.144	100,59	45,6		42.494.895.144	100,81	11,08		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	475		477		476		479		478,83						478,83		100,59		478,83		100,81			
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			177.915.416.215		-		20.083.068.655		2.232.425.864		4.059.414.373						6.291.840.237	50	31,33		6.291.840.237	50	3,54		
			Meningkatnya Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			177.915.416.215		-		20.083.068.655		2.232.425.864		4.059.414.373						6.291.840.237	50	31,33		6.291.840.237	50	3,54		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD pada RSUD	Persentase Capaian SPM RSUD Eka Candrarini (%)	96,96		94,94		95,95		96,97		96,97						96,97		101,06		96,97		100,01			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			233.345.350.000		6.424.474.804		35.875.000.000		-		4.188.636.380						4.188.636.380	100	11,68		4.188.636.380	20	1,8		
			Meningkatnya pelayanan dan penunjang BLUD RSUD Eka Candrarini	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			233.345.350.000		6.424.474.804		35.875.000.000		-		4.188.636.380						4.188.636.380	100	11,68		4.188.636.380	20	1,8		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	5		1		1		1		1						1		100		1		20			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**319.644.236.010**		**59.361.905.391**		**65.671.554.731**		**3.103.050.870**		**6.859.607.780**						**9.962.658.650**	**81,58**	**15,17**		**9.962.658.650**	**651,11**	**3,12**	RSUD Eka Candrarini	
			Meningkatnya kualitas sarana prasarana pada RSUD Eka Candrarini	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase Sarana Prasarana rumah sakit sesuai standar dalam kondisi baik (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			316.524.236.010		59.361.905.391		63.161.419.026		3.103.050.870		6.609.581.981						9.712.632.851	72,36	15,38		9.712.632.851	926,67	3,07		
			Terpenuhinya sarana prasarana pada RSUD Eka Candrarini	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	15		392		588		15		248						263		44,73		263		1753,33			
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	5		5		5		4		5						5		100		5		100			
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			235.522.793.001		48.516.182.586		38.661.561.256		13.042.500		1.804.599.508						1.817.642.008	44,73	4,7		1.817.642.008	1753,33	0,77		
			Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	15		392		588		15		248						263		44,73		263		1753,33			
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			81.001.443.009		10.845.722.805		24.499.857.770		3.090.008.370		4.804.982.473						7.894.990.843	100	32,22		7.894.990.843	100	9,75		
			Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	5		5		5		4		5						5		100		5		100			
			Meningkatnya kualitas SDM pada RSUD Eka Candrarini	Persentase ketersediaan SDM pada RSUD Eka Candrarini sesuai dengan standar (%)	89		81		82		84,21		84,21						84,21		102,7		84,21		94,62			
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			3.120.000.000		-		2.510.135.705		-		250.025.799						250.025.799	100	9,96		250.025.799	100	8,01		
			Terpenuhinya SDM pada RSUD Eka Candrarini	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1		0		1		1		1						1		100		1		100			
		1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit			3.120.000.000		-		2.510.135.705		-		250.025.799						250.025.799	100	9,96		250.025.799	100	8,01		
			Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1		0		1		1		1						1		100		1		100			
		1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**9.834.814.884.744**		**1.344.199.948.883**		**2.593.889.415.968**		**100.789.118.381**		**289.178.816.041**						**389.967.934.422**	**47,95**	**15,03**		**389.967.934.422**	**68,09**	**3,97**		
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**836.021.955.725**		**137.297.340.169**		**152.329.612.830**		**14.568.026.521**		**40.411.724.974**						**54.979.751.495**	**81,79**	**36,09**		**54.979.751.495**	**90,82**	**6,58**	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sumber daya air dan bina marga	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak (%)	98		99,13		95,5		99,11		99,41						99,41		104,09		99,41		101,44			
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			205.639.663.669		30.015.135.091		33.473.542.249		1.652.168.301		10.743.306.396						12.395.474.697	51,16	37,03		12.395.474.697	51,16	6,03		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pengelolaan alat berat dan alat angkut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	227		227		227		39		72						111		48,9		111		48,9			
				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	73		73		73		12		27						39		53,42		39		53,42			
		1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			92.613.134.897		14.517.606.664		16.499.669.994		1.287.528.317		6.147.285.974						7.434.814.291	48,9	45,06		7.434.814.291	48,9	8,03		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	227		227		227		39		72						111		48,9		111		48,9			
		1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			113.026.528.772		15.497.528.427		16.973.872.255		364.639.984		4.596.020.422						4.960.660.406	53,42	29,23		4.960.660.406	53,42	4,39		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	73		73		73		12		27						39		53,42		39		53,42			
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekreteriatan pada dinas sumber daya air dan bina marga	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	94,16		94,57		93,36		96,37		96,12						96,12		102,96		96,12		102,08			
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			786.283.501		150.800.000		175.201.200		-		18.600.000						18.600.000	33,33	10,62		18.600.000	37,5	2,37		
			Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		9		2		1						3		33,33		3		37,5			
		1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			786.283.501		150.800.000		175.201.200		-		18.600.000						18.600.000	33,33	10,62		18.600.000	37,5	2,37		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		9		2		1						3		33,33		3		37,5			
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			271.510.683.976		47.442.876.918		53.556.837.866		12.159.328.375		14.604.312.148						26.763.640.523	205,08	49,97		26.763.640.523	205,08	9,86		
			Terlaksananya pelayanan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	197		212		197		202		202						404		205,08		404		205,08			
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			271.510.683.976		47.442.876.918		53.556.837.866		12.159.328.375		14.604.312.148						26.763.640.523	205,08	49,97		26.763.640.523	205,08	9,86		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	197		212		197		202		202						404		205,08		404		205,08			
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			31.920.952.984		4.100.208.180		5.915.692.587		641.461.695		1.018.089.732						1.659.551.427	100	28,05		1.659.551.427	100	5,2		
			Terlaksananya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		4		3		0		3						3		100		3		100			
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.920.952.984		4.100.208.180		5.915.692.587		641.461.695		1.018.089.732						1.659.551.427	100	28,05		1.659.551.427	100	5,2		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		4		3		0		3						3		100		3		100			
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			326.164.371.595		55.588.319.980		59.208.338.928		115.068.150		14.027.416.698						14.142.484.848	50	23,89		14.142.484.848	100	4,34		
			Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		8		6		0		3						3		50		3		100			
		1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			326.164.371.595		55.588.319.980		59.208.338.928		115.068.150		14.027.416.698						14.142.484.848	50	23,89		14.142.484.848	100	4,34		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		8		6		0		3						3		50		3		100			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**376.697.095.169**		**77.160.057.681**		**84.989.021.800**		**8.600.831.306**		**19.694.801.323**						**28.295.632.629**	**48,59**	**33,29**		**28.295.632.629**	**47,99**	**7,51**	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan genangan	Persentase rumah pompa yang beroperasi dan berfungsi baik (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			376.697.095.169		77.160.057.681		84.989.021.800		8.600.831.306		19.694.801.323						28.295.632.629	48,59	33,29		28.295.632.629	47,99	7,51		
			Meningkatnya operasional dan fungsi rumah pompa	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	323		293		319		68		87						155		48,59		155		47,99			
		1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir			376.697.095.169		77.160.057.681		84.989.021.800		8.600.831.306		19.694.801.323						28.295.632.629	48,59	33,29		28.295.632.629	47,99	7,51		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	323		293		319		68		87						155		48,59		155		47,99			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**4.575.838.095**		-		**499.748.050**		-		**31.600.000**						**31.600.000**	**0**	**6,32**		**31.600.000**	**0**	**0,69**	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan yang layak dan aman (%)	6,27		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			4.575.838.095		-		499.748.050		-		31.600.000						31.600.000	0	6,32		31.600.000	0	0,69		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terpadu	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			4.575.838.095		-		499.748.050		-		31.600.000						31.600.000	0	6,32		31.600.000	0	0,69		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**57.393.996.456**		**5.244.403.352**		**11.187.641.348**		**1.472.088.848**		**1.570.177.575**						**3.042.266.423**	**116,16**	**27,19**		**3.042.266.423**	**116,16**	**5,3**	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	3,55		17,72		1		0,67		1,35						1,35		135		1,35		38,03			
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			48.688.578.104		5.244.403.352		10.904.074.421		1.472.088.848		1.564.577.575						3.036.666.423	132,32	27,85		3.036.666.423	132,32	6,24		
			Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Terpadu	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	5900		96		5900		3.918		3.889						7.807		132,32		7.807		132,32			
		1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			48.688.578.104		5.244.403.352		10.904.074.421		1.472.088.848		1.564.577.575						3.036.666.423	132,32	27,85		3.036.666.423	132,32	6,24		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	5900		96		5900		3.918		3.889						7.807		132,32		7.807		132,32			
			Meningkatnya kinerja layanan pengolahan limbah domestik	Persentase limbah domestik yang dilakukan pengolahan pada unit olah (%)	27,5		0		17,5		19,34		19,28						19,28		110,17		19,28		70,11			
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			8.705.418.352		-		283.566.927		-		5.600.000						5.600.000	100	1,97		5.600.000	100	0,06		
			Terwujudnya pengolahan limbah domestik yang terpusat	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1		0		1		0		1						1		100		1		100			
		1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			8.705.418.352		-		283.566.927		-		5.600.000						5.600.000	100	1,97		5.600.000	100	0,06		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1		0		1		0		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**4.326.162.914.221**		**785.235.613.536**		**1.083.670.768.506**		**15.038.014.161**		**27.935.111.830**						**42.973.125.991**	**32,19**	**3,97**		**42.973.125.991**	**33,9**	**0,99**	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Meningkatnya sistem drainase perkotaan yang terintegrasi dan efektif	Persentase sarana dan prasarana drainase baik primer maupun sekunder yang berfungsi dengan baik dan siap operasional (%)	88,75		88,16		87,5		92,89		92,9						92,9		106,17		92,9		104,68			
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah			4.319.049.619.896		785.235.613.536		1.082.423.817.364		14.984.299.164		27.816.192.370						42.800.491.534	29,22	3,95		42.800.491.534	31,22	0,99		
			Meningkatnya Fungsi Optimal Saluran Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	6		17		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	30		30		30		19		30						49		163,33		49		163,33			
		1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			636.905.899.048		141.824.636.095		121.379.666.949		380.586.377		609.147.891						989.734.268	0	0,82		989.734.268	0	0,16		
			Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	6		17		12		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan			594.399.116.427		83.151.241.719		79.515.104.951		14.372.614.014		20.439.914.469						34.812.528.483	163,33	43,78		34.812.528.483	163,33	5,86		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	30		30		30		19		30						49		163,33		49		163,33			
			Tersedianya Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pembangunan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis (Sistem Drainase Perkotaan)	6		23		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	25		55		50		0		6						6		12		6		24			
		1.03.06.2.01.0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			83.292.587.836		8.319.900.877		22.935.448.925		50.175.840		77.181.765						127.357.605	0	0,56		127.357.605	0	0,15		
			Terbinanya secara Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis (Sistem Drainase Perkotaan)	6		23		12		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			10.788.362.245		20.072.148.678		13.311.094.892		29.146.791		711.490.301						740.637.092	12	5,56		740.637.092	24	6,87		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	25		55		50		0		6						6		12		6		24			
			Meningkatnya Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan dan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	2500		10.829,9		7500		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	10		6		22		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan			879.666.259.118		204.008.755.063		74.282.965.037		66.280.320		374.854.400						441.134.720	0	0,59		441.134.720	0	0,05		
			Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	2500		10.829,9		7500		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			2.113.997.395.222		327.858.931.104		770.999.536.610		85.495.822		5.603.603.544						5.689.099.366	0	0,74		5.689.099.366	0	0,27		
			Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	10		6		22		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya pemenuhan kapasitas kolam tampung/long storage sesuai rekomendasi teknis dan keberfungsian pintu	Persentase kolam tampung/long storage yang kapasitasnya sesuai rekomendasi teknis (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah			7.113.294.325		-		1.246.951.142		53.714.997		118.919.460						172.634.457	50	13,84		172.634.457	50	2,43		
			Meningkatnya pengawasan pembangunan sistem drainase di Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	240		240		240		60		60						120		50		120		50			
		1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan			7.113.294.325		-		1.246.951.142		53.714.997		118.919.460						172.634.457	50	13,84		172.634.457	50	2,43		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	240		240		240		60		60						120		50		120		50			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**3.071.674.102.943**		**16.153.694.808**		**1.022.616.565.393**		**56.417.902.269**		**165.151.187.534**						**221.569.089.803**	**84,96**	**21,67**		**221.569.089.803**	**170,38**	**7,21**	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
			Meningkatnya kemantapan jalan	Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki (%)	21,2		20,3		21		5,68		10,05						10,05		47,86		10,05		47,41			
				Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	99,28		99,23		99,24		99,23		99,24						99,24		100		99,24		99,96			
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			2.448.455.891.371		16.153.694.808		566.538.283.957		8.430.028.586		38.009.395.147						46.439.423.733	70,84	8,2		46.439.423.733	106,96	1,9		
			Meningkatnya Pembangunan jalan, jembatan, dan kelengkapannya	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	21		115		70		23		9						32		45,71		32		152,38			
				Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	3.5		28,25		11.7		0		1,89						1,89		16,15		1,89		54			
				Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	3.5		28,25		11.7		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis			29.008.138.960		16.153.694.808		8.449.820.348		1.440.042.228		1.947.101.941						3.387.144.169	45,71	40,09		3.387.144.169	152,38	11,68		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	21		115		70		23		9						32		45,71		32		152,38			
		1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan			1.899.497.798.203		-		445.190.809.525		68.212.185		14.825.813.614						14.894.025.799	16,15	3,35		14.894.025.799	54	0,78		
			Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	3.5		28,25		11.7		0		1,89						1,89		16,15		1,89		54			
		1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa			30.534.743.080		-		11.788.783.060		90.256.841		129.350.740						219.607.581	0	1,86		219.607.581	0	0,72		
			Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	3.5		28,25		11.7		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya pemeliharaan rutin jalan, jembatan, dan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	40		199,54		40		42,96		45,63						88,59		221,47		88,59		221,47			
		1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan			489.415.211.128		-		101.108.871.024		6.831.517.332		21.107.128.852						27.938.646.184	221,47	27,63		27.938.646.184	221,47	5,71		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	40		199,54		40		42,96		45,63						88,59		221,47		88,59		221,47			
			Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase rekomendasi Penyelenggaraan Jalan yang telah dilakukan pengawasan / pengendalian (%)	9		9,24		9		0,271		4,01						4,01		44,56		4,01		44,56			
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			623.218.211.572		-		456.078.281.436		47.987.873.683		127.141.792.387						175.129.666.070	113,2	38,4		175.129.666.070	297,2	28,1		
			Meningkatnya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	10		65,48		10		3,79		9,65						13,44		134,4		13,44		134,4			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.03.10.2.01.0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa			4.284.957.700		-		973.240.012		55.495.684		302.123.354						357.619.038	134,4	36,75		357.619.038	134,4	8,35		
			Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	10		65,48		10		3,79		9,65						13,44		134,4		13,44		134,4			
			Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	0.2		0,99		1		0,39		0,53						0,92		92		0,92		460			
		1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar			618.933.253.872		-		455.105.041.424		47.932.377.999		126.839.669.033						174.772.047.032	92	38,4		174.772.047.032	460	28,24		
			Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	0.2		0,99		1		0,39		0,53						0,92		92		0,92		460			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**1.128.488.567.516**		**317.575.573.320**		**231.348.022.455**		**4.192.742.179**		**31.781.685.056**						**35.974.427.235**	**21,92**	**15,55**		**35.974.427.235**	**20,34**	**3,19**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	94,37		91,01		91,39		17,45		36,65						36,65		40,1		36,65		38,84			
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			1.107.156.793.986		314.242.945.294		226.762.989.551		3.527.789.315		30.948.784.342						34.476.573.657	28,23	15,2		34.476.573.657	25,07	3,11		
			Terlaksananya pemeliharaan dan pembangunan gedung daerah	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	148		165		100		0		9						9		9		9		6,08			
				Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	165		171		161		38		42						80		49,69		80		48,48			
				Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	63		69		50		2		13						13		26		13		20,63			
		1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			900.554.707.075		275.922.455.008		185.213.518.696		860.760.414		16.446.441.070						17.307.201.484	9	9,34		17.307.201.484	6,08	1,92		
			Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	148		165		100		0		9						9		9		9		6,08			
		1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah			177.305.956.110		30.821.214.774		36.002.986.755		2.581.228.901		12.401.753.896						14.982.982.797	49,69	41,62		14.982.982.797	48,48	8,45		
			Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	165		171		161		38		42						80		49,69		80		48,48			
		1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan			29.296.130.801		7.499.275.512		5.546.484.100		85.800.000		2.100.589.376						2.186.389.376	26	39,42		2.186.389.376	20,63	7,46		
			Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	63		69		50		2		13						13		26		13		20,63			
			Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang bangunan	Persentase bangunan yang ber IMB/PBG (%)	2,18		2,12		2,01		0,85		1,59						1,59		79,1		1,59		72,94			
				Persentase penyelesaian perizinan bangunan (%)	83		89,57		83		86,92		83,77						83,77		100,93		83,77		100,93			
				Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota (%)	80		72,28		75		18,95		29,37						29,37		39,16		29,37		36,71			
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			21.331.773.530		3.332.628.026		4.585.032.904		664.952.864		832.900.714						1.497.853.578	15,62	32,67		1.497.853.578	15,62	7,02		
			Meningkatnya pelayanan tata bangunan gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti			11.510.004.245		1.787.388.395		2.214.980.437		240.076.558		384.955.390						625.031.948	0	28,22		625.031.948	0	5,43		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya pengawasan bangunan berizin	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	2124		2.657		2124		463		532						995		46,85		995		46,85			
		1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung			2.113.000.000		182.800.000		568.186.163		99.116.764		82.875.560						181.992.324	0	32,03		181.992.324	0	8,61		
			Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung			7.708.769.285		1.362.439.631		1.801.866.304		325.759.542		365.069.764						690.829.306	46,85	38,34		690.829.306	46,85	8,96		
			Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	2124		2.657		2124		463		532						995		46,85		995		46,85			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**2.861.398.627**		**527.427.118**		**498.198.443**		**44.478.656**		**102.780.353**						**147.259.009**	**40**	**29,56**		**147.259.009**	**40**	**5,15**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkompeten (%)	100		100		100		0		40						40		40		40		40			
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			2.861.398.627		527.427.118		498.198.443		44.478.656		102.780.353						147.259.009	40	29,56		147.259.009	40	5,15		
			Meningkatnya pembinaan kepada pelaku jasa konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	20		14		20		0		8						8		40		8		40			
		1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi			2.861.398.627		527.427.118		498.198.443		44.478.656		102.780.353						147.259.009	40	29,56		147.259.009	40	5,15		
			Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	20		14		20		0		8						8		40		8		40			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**30.939.015.992**		**5.005.838.899**		**6.749.837.143**		**455.034.441**		**2.499.747.396**						**2.954.781.837**	**0**	**43,78**		**2.954.781.837**	**0**	**9,55**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan	Persentase kepatuhan terhadap implementasi perencanaan dan pelaksaaan pemanfaatan tata ruang (%)	96		96		96		38,37		46,78						46,78		48,73		46,78		48,73			
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			16.072.684.162		3.568.764.596		1.570.610.479		137.160.399		235.725.228						372.885.627	0	23,74		372.885.627	0	2,32		
			Meningkatnya perencanaan tata ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		3		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			15.322.684.162		3.568.764.596		803.810.479		134.160.399		235.725.228						369.885.627	0	46,02		369.885.627	0	2,41		
			Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		3		2		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota			750.000.000		-		766.800.000		3.000.000		-						3.000.000	0	0,39		3.000.000	0	0,4		
			Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			3.000.000.000		-		3.017.960.080		3.000.000		1.791.510.726						1.794.510.726	0	59,46		1.794.510.726	0	59,82		
			Meningkatnya sinkronisasi penyelenggaraan tata ruang	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota			3.000.000.000		-		3.017.960.080		3.000.000		1.791.510.726						1.794.510.726	0	59,46		1.794.510.726	0	59,82		
			Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			11.866.331.830		1.437.074.303		2.161.266.584		314.874.042		472.511.442						787.385.484	0	36,43		787.385.484	0	6,64		
			Meningkatnya pelayanan tata ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			5.383.872.145		670.347.702		1.010.378.004		179.785.439		224.353.977						404.139.416	0	40		404.139.416	0	7,51		
			Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			6.482.459.685		766.726.601		1.150.888.580		135.088.603		248.157.465						383.246.068	0	33,3		383.246.068	0	5,91		
			Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**893.621.794.769**		**69.906.752.526**		**172.886.099.854**		**21.700.418.489**		**43.395.469.903**						**65.095.888.392**	**64,74**	**37,65**		**65.095.888.392**	**57,66**	**7,28**		
		1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**208.873.604.561**		**31.684.549.159**		**39.150.708.901**		**7.960.518.308**		**10.425.682.975**						**18.386.201.283**	**56,82**	**46,96**		**18.386.201.283**	**50,81**	**8,8**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang perumahan dan kawasan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	98		96,13		96		97,21		97,09						97,09		101,14		97,09		99,07			
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			182.000.000		63.788.000		26.483.840		10.400.000		-						10.400.000	37,5	39,27		10.400.000	37,5	5,71		
			Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		8		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			182.000.000		63.788.000		26.483.840		10.400.000		-						10.400.000	37,5	39,27		10.400.000	37,5	5,71		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		8		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			160.091.929.083		27.732.165.423		31.592.516.012		7.427.920.994		8.921.002.483						16.348.923.477	95,75	51,75		16.348.923.477	95,75	10,21		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	110		110		110		107		105,33						105,33		95,75		105,33		95,75			
		1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			160.091.929.083		27.732.165.423		31.592.516.012		7.427.920.994		8.921.002.483						16.348.923.477	95,75	51,75		16.348.923.477	95,75	10,21		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	110		110		110		107		105,33						105,33		95,75		105,33		95,75			
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			36.599.582.487		3.213.771.943		5.711.577.018		371.303.734		1.256.488.071						1.627.791.805	62,5	28,5		1.627.791.805	38,46	4,45		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13		15		8		1		4						5		62,5		5		38,46			
		1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			36.599.582.487		3.213.771.943		5.711.577.018		371.303.734		1.256.488.071						1.627.791.805	62,5	28,5		1.627.791.805	38,46	4,45		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13		15		8		1		4						5		62,5		5		38,46			
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.000.092.991		674.823.793		1.820.132.031		150.893.580		248.192.421						399.086.001	31,51	21,93		399.086.001	31,51	3,33		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	73		88		73		0		23						23		31,51		23		31,51			
		1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.000.092.991		674.823.793		1.820.132.031		150.893.580		248.192.421						399.086.001	31,51	21,93		399.086.001	31,51	3,33		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	73		88		73		0		23						23		31,51		23		31,51			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			**547.537.371.785**		**20.313.987.660**		**112.150.202.195**		**11.551.332.556**		**28.054.474.897**						**39.605.807.453**	**23,55**	**35,31**		**39.605.807.453**	**5,96**	**7,23**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Persentase penyediaan rumah layak huni (%)	100		132,55		100		13,42		36,97						36,97		36,97		36,97		36,97			
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			547.537.371.785		20.313.987.660		112.150.202.195		11.551.332.556		28.054.474.897						39.605.807.453	23,55	35,31		39.605.807.453	5,96	7,23		
			Meningkatnya pembangunan dan /atau rehabilitasi permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	8178		2.083		2240		302		529						831		37,1		831		10,16			
				Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	57		10		10		0		1						1		10		1		1,75			
		1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman			465.577.117.547		20.313.987.660		96.567.831.914		10.526.128.719		25.917.269.799						36.443.398.518	37,1	37,74		36.443.398.518	10,16	7,83		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	8178		2.083		2240		302		529						831		37,1		831		10,16			
		1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya			81.960.254.238		-		15.582.370.281		1.025.203.837		2.137.205.098						3.162.408.935	10	20,29		3.162.408.935	1,75	3,86		
			Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	57		10		10		0		1						1		10		1		1,75			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**7.389.891.388**		**1.419.093.432**		**1.433.697.163**		**231.906.939**		**268.460.162**						**500.367.101**	**104,17**	**34,9**		**500.367.101**	**101,92**	**6,77**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	
			Meningkatnya kualitas PSU perumahan	Persentase PSU yang diserahkan (%)	100		68,16		71,51		69,83		72,07						72,07		100,78		72,07		72,07			
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			7.389.891.388		1.419.093.432		1.433.697.163		231.906.939		268.460.162						500.367.101	104,17	34,9		500.367.101	101,92	6,77		
			Meningkatnya Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dari pengembang secara administrasi dan fisik	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	6		18		6		6		3						9		150		9		150			
				Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	13		18		12		3		4						7		58,33		7		53,85			
		1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			1.352.929.625		1.419.093.432		288.367.235		46.200.000		-						46.200.000	150	16,02		46.200.000	150	3,41		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	6		18		6		6		3						9		150		9		150			
		1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			6.036.961.763		-		1.145.329.928		185.706.939		268.460.162						454.167.101	58,33	39,65		454.167.101	53,85	7,52		
			Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	13		18		12		3		4						7		58,33		7		53,85			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**129.820.927.035**		**16.489.122.275**		**20.151.491.595**		**1.956.660.686**		**4.646.851.869**						**6.603.512.555**	**100**	**32,77**		**6.603.512.555**	**100**	**5,09**	UPTD Rumah Susun	
			Meningkatnya pemanfaatan rumah susun sewa																		100				100			
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			129.820.927.035		16.489.122.275		20.151.491.595		1.956.660.686		4.646.851.869						6.603.512.555	100	32,77		6.603.512.555	100	5,09		
			Meningkatnya pengelolaan rumah susun sederhana sewa	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	109		109		109		109		109						109		100		109		100			
		1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			129.820.927.035		16.489.122.275		20.151.491.595		1.956.660.686		4.646.851.869						6.603.512.555	100	32,77		6.603.512.555	100	5,09		
			Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	109		109		109		109		109						109		100		109		100			
		1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**1.934.573.973.104**		**292.511.738.483**		**351.603.329.276**		**54.717.587.938**		**79.657.493.505**						**134.375.081.443**	**55,07**	**38,22**		**134.375.081.443**	**623,67**	**6,95**		
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**87.974.030.332**		**14.647.594.494**		**16.609.480.691**		**2.938.842.908**		**4.136.310.442**						**7.075.153.350**	**50**	**42,6**		**7.075.153.350**	**48,66**	**8,04**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	96,4		98,6		96,20		98,93		98,95						98,95		102,86		98,95		102,65			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			786.088.599		-		156.355.200		-		7.800.000						7.800.000	37,5	4,99		7.800.000	37,5	0,99		
			Tersusunnya dokumen perencanaan, pendanaan, dan evaluasi kinerja Badan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			786.088.599		-		156.355.200		-		7.800.000						7.800.000	37,5	4,99		7.800.000	37,5	0,99		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			61.471.266.656		10.513.911.064		12.129.700.336		2.810.963.011		3.428.701.231						6.239.664.242	100	51,44		6.239.664.242	100	10,15		
			Terpenuhinya pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37		37		37		37		37						37		100		37		100			
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			61.471.266.656		10.513.911.064		12.129.700.336		2.810.963.011		3.428.701.231						6.239.664.242	100	51,44		6.239.664.242	100	10,15		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37		37		37		37		37						37		100		37		100			
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			15.362.735.802		2.485.590.027		2.722.025.454		-		421.735.656						421.735.656	12,5	15,49		421.735.656	7,14	2,75		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan perkantoran pada Badan Penanggulangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14		14		8		1		0						1		12,5		1		7,14			
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.362.735.802		2.485.590.027		2.722.025.454		-		421.735.656						421.735.656	12,5	15,49		421.735.656	7,14	2,75		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14		14		8		1		0						1		12,5		1		7,14			
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.353.939.275		1.648.093.403		1.601.399.701		127.879.897		278.073.555						405.953.452	50	25,35		405.953.452	50	3,92		
			Tersedianya jasa penunjang umum yang mendukung operasional kegiatan pada Badan Penanggulangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			10.353.939.275		1.648.093.403		1.601.399.701		127.879.897		278.073.555						405.953.452	50	25,35		405.953.452	50	3,92		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**134.282.988.175**		**25.476.243.054**		**29.326.764.497**		**4.254.697.984**		**7.442.550.645**						**11.697.248.629**	**42,84**	**39,89**		**11.697.248.629**	**2367,19**	**8,71**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Meningkatnya Kapasitas Kawasan dalam Pencegahan	Persentase kawasan siap siaga bencana (%)	100		100		100		12		21,64						21,64		21,64		21,64		21,64			
				Persentase peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya mitigasi bencana (%)	100		99,83		100		100		100						100		100		100		100			
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			10.980.028.394		1.605.896.050		3.215.830.742		5.236.000		1.115.503.670						1.120.739.670	26,81	34,85		1.120.739.670	5252,59	10,21		
			Terlaksananya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1850		1.753		1750		350		497						847		48,4		847		45,78			
		1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			4.619.931.600		1.122.021.438		846.536.048		5.236.000		89.991.500						95.227.500	48,4	11,25		95.227.500	45,78	2,06		
			Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1850		1.753		1750		350		497						847		48,4		847		45,78			
			Meningkatnya tata kelola mitigasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota			914.700.874		-		143.587.500		-		3.000.000						3.000.000	0	2,09		3.000.000	0	0,33		
			Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			312.000.000		-		170.300.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya penyebaran informasi rawan bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	5		5		1662		568		480						1.048		63,06		1.048		20960			
				Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	153		31		31		4		3						7		22,58		7		4,58			
		1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			3.569.096.320		244.548.452		1.819.888.122		-		1.011.312.170						1.011.312.170	63,06	55,57		1.011.312.170	20960	28,34		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	5		5		1662		568		480						1.048		63,06		1.048		20960			
		1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			1.564.299.600		239.326.160		235.519.072		-		11.200.000						11.200.000	22,58	4,76		11.200.000	4,58	0,72		
			Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	153		31		31		4		3						7		22,58		7		4,58			
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			3.504.394.945		-		698.119.821		131.924.970		191.196.380						323.121.350	50	46,28		323.121.350	50	9,22		
			Terlaksananya kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			3.504.394.945		-		698.119.821		131.924.970		191.196.380						323.121.350	50	46,28		323.121.350	50	9,22		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100		100		100,00		100		100						100		100		100		100			
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			12.770.872.205		1.654.061.140		2.631.050.420		75.557.700		379.469.400						455.027.100	75,6	17,29		455.027.100	75,6	3,56		
			Meningkatnya pemenuhan bantuan logistik bagi korban bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1000		2.406		1000		407		349						756		75,6		756		75,6			
		1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			12.770.872.205		1.654.061.140		2.631.050.420		75.557.700		379.469.400						455.027.100	75,6	17,29		455.027.100	75,6	3,56		
			Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1000		2.406		1000		407		349						756		75,6		756		75,6			
			Meningkatnya Kompetensi Aparatur dalam Upaya Mitigasi Bencana	Persentase aparatur yang meningkat kompetensinya dalam mitigasi dan penanganan bencana (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			1.650.000.000		-		368.960.000		-		28.400.000						28.400.000	42,45	7,7		28.400.000	42,45	1,72		
			Optimalnya pembinaan dan pengawasan petugas dalam penanggulangan bencana	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	349		349		349		90		90						180		51,58		180		51,58			
				Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	90		0		90		0		30						30		33,33		30		33,33			
		1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			896.919.550		-		267.692.000		-		25.400.000						25.400.000	51,58	9,49		25.400.000	51,58	2,83		
			Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	349		349		349		90		90						180		51,58		180		51,58			
		1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota			753.080.450		-		101.268.000		-		3.000.000						3.000.000	33,33	2,96		3.000.000	33,33	0,4		
			Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	90		0		90		0		30						30		33,33		30		33,33			
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana dengan waktu respon <= 7 menit (%)	100		99,49		100		99,76		99,65						99,65		99,65		99,65		99,65			
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			105.377.692.631		22.216.285.864		22.412.803.514		4.041.979.314		5.727.981.195						9.769.960.509	83,89	43,59		9.769.960.509	83,89	9,27		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	17500		23.577		17500		6.573		8.107						14.680		83,89		14.680		83,89			
		1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			105.377.692.631		22.216.285.864		22.412.803.514		4.041.979.314		5.727.981.195						9.769.960.509	83,89	43,59		9.769.960.509	83,89	9,27		
			Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	17500		23.577		17500		6.573		8.107						14.680		83,89		14.680		83,89			
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**500.100.415.227**		**59.052.512.886**		**99.347.432.077**		**19.155.572.079**		**23.336.787.710**						**42.492.359.789**	**84**	**42,77**		**42.492.359.789**	**84**	**8,5**	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	97,9		96,51		97,70		98,8		98,62						98,62		100,94		98,62		100,74			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			260.000.000		-		52.358.400		-		5.200.000						5.200.000	37,5	9,93		5.200.000	37,5	2		
			Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			260.000.000		-		52.358.400		-		5.200.000						5.200.000	37,5	9,93		5.200.000	37,5	2		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			479.691.520.414		56.894.967.111		94.497.875.256		18.981.020.685		22.866.507.481						41.847.528.166	98,48	44,28		41.847.528.166	98,48	8,72		
			Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	726		717		726		715		715						715		98,48		715		98,48			
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			479.691.520.414		56.894.967.111		94.497.875.256		18.981.020.685		22.866.507.481						41.847.528.166	98,48	44,28		41.847.528.166	98,48	8,72		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	726		717		726		715		715						715		98,48		715		98,48			
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.304.208.089		244.940.128		1.798.036.313		34.021.500		141.841.350						175.862.850	150	9,78		175.862.850	150	4,09		
			Tersedianya laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		2		3						3		150		3		150			
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.304.208.089		244.940.128		1.798.036.313		34.021.500		141.841.350						175.862.850	150	9,78		175.862.850	150	4,09		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		2		3						3		150		3		150			
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.844.686.724		1.912.605.647		2.999.162.108		140.529.894		323.238.879						463.768.773	50	15,46		463.768.773	50	2,93		
			Tersedianya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			15.844.686.724		1.912.605.647		2.999.162.108		140.529.894		323.238.879						463.768.773	50	15,46		463.768.773	50	2,93		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**275.070.873.257**		**82.126.003.180**		**52.586.069.237**		**2.396.488.944**		**11.742.821.052**						**14.139.309.996**	**54,7**	**26,89**		**14.139.309.996**	**79,89**	**5,14**	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Meningkatnya kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	Persentase petugas pemadam kebakaran yang kompetensinya meningkat (%)	88,5		86		86,5		89,99		89,99						89,99		104,03		89,99		101,68			
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam			4.797.153.315		570.582.308		942.073.094		18.205.200		91.856.886						110.062.086	0	11,68		110.062.086	0	2,29		
			Meningkatnya pelatihan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	20		15		16		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			4.797.153.315		570.582.308		942.073.094		18.205.200		91.856.886						110.062.086	0	11,68		110.062.086	0	2,29		
			Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	20		15		16		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas penanggulangan dan penyelamatan kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap kurang dari 15 menit (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam			263.782.790.027		80.810.714.998		49.942.355.220		2.355.439.944		11.369.072.366						13.724.512.310	62,74	27,48		13.724.512.310	120,92	5,2		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
				Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	905		805		2891		604		869						1.473		50,95		1.473		162,76			
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			18.222.908.498		14.997.892.271		4.738.535.172		460.223.581		715.806.487						1.176.030.068	100	24,82		1.176.030.068	100	6,45		
			Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
		1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			43.562.671.366		7.442.862.273		8.698.299.792		1.279.327.313		2.457.211.703						3.736.539.016	100	42,96		3.736.539.016	100	8,58		
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
		1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)			208.000.000		-		213.000.000		-		3.000.000						3.000.000	0	1,41		3.000.000	0	1,44		
			Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			201.789.210.163		58.369.960.454		36.292.520.256		615.889.050		8.193.054.176						8.808.943.226	50,95	24,27		8.808.943.226	162,76	4,37		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	905		805		2891		604		869						1.473		50,95		1.473		162,76			
			Meningkatnya kualitas sistem proteksi kebakaran pada	Persentase gedung dengan hasil laik fungsi (%)	34		51,85		30		75,29		56,49						56,49		188,3		56,49		166,15			
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			3.565.516.915		338.408.774		835.171.706		-		136.062.450						136.062.450	47,06	16,29		136.062.450	45,28	3,82		
			Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran bangunan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	530		506		510		85		155						240		47,06		240		45,28			
		1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			3.565.516.915		338.408.774		835.171.706		-		136.062.450						136.062.450	47,06	16,29		136.062.450	45,28	3,82		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	530		506		510		85		155						240		47,06		240		45,28			
			Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kejadian kebakaran	Persentase kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kejadian kebakaran (%)	78		92		70		95,14		98,54						98,54		140,77		98,54		126,33			
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			2.925.413.000		406.297.100		866.469.217		22.843.800		145.829.350						168.673.150	84,86	19,47		168.673.150	71,28	5,77		
			Terlaksananya simulasi pencegahan kebakaran dan penyelamatan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1250		1.964		1050		247		644						891		84,86		891		71,28			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi			2.925.413.000		406.297.100		866.469.217		22.843.800		145.829.350						168.673.150	84,86	19,47		168.673.150	71,28	5,77		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1250		1.964		1050		247		644						891		84,86		891		71,28			
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**687.875.918.847**		**55.974.928.806**		**102.750.749.476**		**19.155.072.552**		**23.066.302.098**						**42.221.374.650**	**59,91**	**41,09**		**42.221.374.650**	**58,87**	**6,14**	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	98,8		97,97		98		98,3		98,7						98,7		100,71		98,7		99,9			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			200.526.640		-		40.216.000		-		3.900.000						3.900.000	37,5	9,7		3.900.000	33,33	1,94		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9		9		8		2		1						3		37,5		3		33,33			
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			200.526.640		-		40.216.000		-		3.900.000						3.900.000	37,5	9,7		3.900.000	33,33	1,94		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9		9		8		2		1						3		37,5		3		33,33			
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			494.719.490.280		54.101.814.743		97.414.740.056		18.975.351.473		22.170.915.837						41.146.267.310	99,2	42,24		41.146.267.310	99,2	8,32		
			Meningkatnya ketepatan waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	838		849		838		833,67		831,33						831,33		99,2		831,33		99,2			
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			494.719.490.280		54.101.814.743		97.414.740.056		18.975.351.473		22.170.915.837						41.146.267.310	99,2	42,24		41.146.267.310	99,2	8,32		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	838		849		838		833,67		831,33						831,33		99,2		831,33		99,2			
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			179.242.574.818		1.873.114.063		2.946.727.018		49.195.470		512.930.724						562.126.194	52,94	19,08		562.126.194	52,94	0,31		
			Meningkatnya pelayanan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	17		17		17		4		5						9		52,94		9		52,94			
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			179.242.574.818		1.873.114.063		2.946.727.018		49.195.470		512.930.724						562.126.194	52,94	19,08		562.126.194	52,94	0,31		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	17		17		17		4		5						9		52,94		9		52,94			
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.713.327.109		-		2.349.066.402		130.525.609		378.555.537						509.081.146	50	21,67		509.081.146	50	3,71		
			Meningkatnya ketersediaan barang jasa dan pelayanan umum perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.713.327.109		-		2.349.066.402		130.525.609		378.555.537						509.081.146	50	21,67		509.081.146	50	3,71		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Keharmonisan dan Kerukunan Umat Beragama	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**249.269.747.266**		**55.234.456.063**		**50.982.833.298**		**6.816.913.471**		**9.932.721.558**						**16.749.635.029**	**56,07**	**32,85**		**16.749.635.029**	**52,57**	**6,72**	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			33.990.636.633		3.915.079.492		6.405.760.137		379.806.629		636.666.391						1.016.473.020	50	15,87		1.016.473.020	50	2,99		
			Terlaksananya Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	4		6		4		1		1						2		50		2		50			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			6.276.317.941		613.796.850		621.986.714		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	4		6		4		1		1						2		50		2		50			
		1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			22.316.010.748		2.547.798.692		3.956.723.671		259.734.329		437.752.191						697.486.520	50	17,63		697.486.520	50	3,13		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			5.398.307.944		753.483.950		1.827.049.752		120.072.300		198.914.200						318.986.500	50	17,46		318.986.500	50	5,91		
			TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kapasitas SDM penegak peraturan	Persentase PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)			686.053.280		147.759.200		136.900.500		9.100.000		14.700.000						23.800.000	50	17,38		23.800.000	50	3,47		
			Meningkatnya pembinaan SDM penegak peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	4		4		4		1		1						2		50		2		50			
		1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			686.053.280		147.759.200		136.900.500		9.100.000		14.700.000						23.800.000	50	17,38		23.800.000	50	3,47		
			Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	4		4		4		1		1						2		50		2		50			
			Meningkatnya layanan terhadap Warga Negara dampak dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.098.254.158		349.528.500		499.427.422		11.500.000		107.240.800						118.740.800	50	23,78		118.740.800	50	5,66		
			Meningkatnya Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			738.947.950		122.888.000		147.489.600		5.400.000		44.340.800						49.740.800	50	33,72		49.740.800	50	6,73		
			Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peturan kepala daerah			1.359.306.208		226.640.500		351.937.822		6.100.000		62.900.000						69.000.000	50	19,61		69.000.000	50	5,08		
			Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kapasitas SDM Satlinmas	Persentase Satlinmas yang meningkat kapasitasnya (%)	100		0		100		0		100						100		100		100		100			
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.355.400.136		-		468.299.428		3.000.000		37.445.000						40.445.000	60	8,64		40.445.000	25	1,72		
			Meningkatnya pembinaan SDM Satlinmas	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	12		0		5		0		3						3		60		3		25			
		1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			2.355.400.136		-		468.299.428		3.000.000		37.445.000						40.445.000	60	8,64		40.445.000	25	1,72		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	12		0		5		0		3						3		60		3		25			
			Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			204.761.804.009		50.822.088.871		42.357.562.741		6.334.712.313		9.025.238.888						15.359.951.201	50	36,26		15.359.951.201	50	7,5		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan			186.413.949.009		48.354.340.371		37.781.442.741		5.767.075.913		8.537.914.888						14.304.990.801	50	37,86		14.304.990.801	50	7,67		
			Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban			18.347.855.000		2.467.748.500		4.576.120.000		567.636.400		487.324.000						1.054.960.400	50	23,05		1.054.960.400	50	5,75		
			Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kapasitas SDM Satpol PP	Persentase SDM Satpol PP yang meningkat kapasitasnya (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.377.599.050		-		1.114.883.070		78.794.529		111.430.479						190.225.008	100,73	17,06		190.225.008	100,73	3,54		
			Meningkatnya pembinaan SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	820		1.461		820		281		826						826		100,73		826		100,73			
		1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja			5.377.599.050		-		1.114.883.070		78.794.529		111.430.479						190.225.008	100,73	17,06		190.225.008	100,73	3,54		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	820		1.461		820		281		826						826		100,73		826		100,73			
		1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**399.678.340.475**		**31.864.019.806**		**111.173.794.010**		**15.002.535.300**		**23.313.469.854**						**38.316.005.154**	**83,69**	**34,46**		**38.316.005.154**	**81,28**	**9,59**		
		1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**105.675.380.939**		**17.814.591.117**		**20.610.472.357**		**3.908.396.209**		**5.660.077.017**						**9.568.473.226**	**66,89**	**46,43**		**9.568.473.226**	**57,96**	**9,05**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang sosial	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	96,41		96,95		94,81		97,85		97,56						97,56		102,9		97,56		101,19			
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			39.263.934		-		7.336.000		-		5.917.900						5.917.900	37,5	80,67		5.917.900	37,5	15,07		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			39.263.934		-		7.336.000		-		5.917.900						5.917.900	37,5	80,67		5.917.900	37,5	15,07		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			93.155.608.583		15.683.537.842		18.384.860.653		3.623.108.102		5.113.728.811						8.736.836.913	94,34	47,52		8.736.836.913	94,34	9,38		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53		52		53		49		50						50		94,34		50		94,34			
		1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			93.155.608.583		15.683.537.842		18.384.860.653		3.623.108.102		5.113.728.811						8.736.836.913	94,34	47,52		8.736.836.913	94,34	9,38		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53		52		53		49		50						50		94,34		50		94,34			
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.032.744.397		651.605.805		462.559.807		7.104.000		84.943.022						92.047.022	85,71	19,9		92.047.022	50	1,83		
			Meningkatnya Kualitas Penyediaan Administrasi Umum Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		7		2		6						6		85,71		6		50			
		1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.032.744.397		651.605.805		462.559.807		7.104.000		84.943.022						92.047.022	85,71	19,9		92.047.022	50	1,83		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		7		2		6						6		85,71		6		50			
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.447.764.025		1.479.447.470		1.755.715.897		278.184.107		455.487.284						733.671.391	50	41,79		733.671.391	50	9,85		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Kantor Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.447.764.025		1.479.447.470		1.755.715.897		278.184.107		455.487.284						733.671.391	50	41,79		733.671.391	50	9,85		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**34.802.148.142**		**760.086.091**		**7.027.028.491**		**1.319.462.060**		**1.476.817.935**						**2.796.279.995**	**75,51**	**39,79**		**2.796.279.995**	**75,13**	**8,03**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	100		100		100		64,81		96,07						96,07		96,07		96,07		96,07			
				Persentase Lembaga Kepahlawanan yang aktif (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			34.802.148.142		760.086.091		7.027.028.491		1.319.462.060		1.476.817.935						2.796.279.995	75,51	39,79		2.796.279.995	75,13	8,03		
			Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	463		458		459		121		286						407		88,67		407		87,9			
				Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	486		606		486		103		200						303		62,35		303		62,35			
		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan			3.856.340.463		760.086.091		766.480.902		37.004.052		131.645.960						168.650.012	88,67	22		168.650.012	87,9	4,37		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	463		458		459		121		286						407		88,67		407		87,9			
		1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota			30.945.807.679		-		6.260.547.589		1.282.458.008		1.345.171.975						2.627.629.983	62,35	41,97		2.627.629.983	62,35	8,49		
			Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	486		606		486		103		200						303		62,35		303		62,35			
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**40.797.341.145**		**3.601.410.983**		**12.612.268.939**		**1.519.346.520**		**2.536.670.167**						**4.056.016.687**	**104,87**	**32,16**		**4.056.016.687**	**98,72**	**9,94**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan			804.631.270		106.125.650		160.595.400		5.994.000		35.809.770						41.803.770	61,64	26,03		41.803.770	61,64	5,2		
			Meningkatnya reunifikasi keluarga bagi PPKS	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	795		891		795		199		291						490		61,64		490		61,64			
		1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			804.631.270		106.125.650		160.595.400		5.994.000		35.809.770						41.803.770	61,64	26,03		41.803.770	61,64	5,2		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	795		891		795		199		291						490		61,64		490		61,64			
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar			39.992.709.875		3.495.285.333		12.451.673.539		1.513.352.520		2.500.860.397						4.014.212.917	119,28	32,24		4.014.212.917	111,09	10,04		
			Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS melalui layanan kedaruratan, alat bantu, dan asistensi rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4716		7.082		4716		1.832		1.833						3.665		77,71		3.665		77,71			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	439		590		300		107		126						233		77,67		233		53,08			
				Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1335		3.221		1335		397		2.306						2.703		202,47		2.703		202,47			
		1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan			20.655.654.119		3.495.285.333		3.783.710.858		558.022.020		862.050.974						1.420.072.994	77,71	37,53		1.420.072.994	77,71	6,87		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4716		7.082		4716		1.832		1.833						3.665		77,71		3.665		77,71			
		1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu			5.403.648.205		-		1.298.509.301		-		548.913.173						548.913.173	77,67	42,27		548.913.173	53,08	10,16		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	439		590		300		107		126						233		77,67		233		53,08			
		1.06.04.2.02.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan			13.933.407.551		-		7.369.453.380		955.330.500		1.089.896.250						2.045.226.750	202,47	27,75		2.045.226.750	202,47	14,68		
			Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1335		3.221		1335		397		2.306						2.703		202,47		2.703		202,47			
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**158.206.636.509**		**8.396.696.301**		**25.893.701.185**		**2.605.991.818**		**6.027.013.941**						**8.633.005.759**	**63,69**	**33,34**		**8.633.005.759**	**63,69**	**5,46**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100		97,92		100		86,42		90,77						90,77		90,77		90,77		90,77			
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			158.206.636.509		8.396.696.301		25.893.701.185		2.605.991.818		6.027.013.941						8.633.005.759	63,69	33,34		8.633.005.759	63,69	5,46		
			Tersedianya data Keluarga Miskin yang mutakhir dan akurat	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	65578		71.833		65578		65.785		65.785						65.785		100,32		65.785		100,32			
				Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	680		680		340		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	24152		26.730		24152		20.873		21.922						21.922		90,77		21.922		90,77			
		1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			28.221.263.498		4.667.783.946		5.568.758.561		905.381.947		1.387.059.074						2.292.441.021	100,32	41,17		2.292.441.021	100,32	8,12		
			Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	65578		71.833		65578		65.785		65.785						65.785		100,32		65.785		100,32			
		1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			19.186.840.039		3.728.912.355		249.593.838		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	680		680		340		0		0						0		0		0		0			
		1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			110.798.532.972		-		20.075.348.786		1.700.609.871		4.639.954.867						6.340.564.738	90,77	31,58		6.340.564.738	90,77	5,72		
			Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	24152		26.730		24152		20.873		21.922						21.922		90,77		21.922		90,77			
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**275.526.600**		-		**60.640.700**		-		**7.040.900**						**7.040.900**	**108,47**	**11,61**		**7.040.900**	**108,47**	**2,56**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			275.526.600		-		60.640.700		-		7.040.900						7.040.900	108,47	11,61		7.040.900	108,47	2,56		
			Meningkatnya peran serta pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial dalam penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	59		59		59		60		64						64		108,47		64		108,47			
		1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			275.526.600		-		60.640.700		-		7.040.900						7.040.900	108,47	11,61		7.040.900	108,47	2,56		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	59		59		59		60		64						64		108,47		64		108,47			
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			**13.214.938.114**		**1.291.235.314**		**2.000.553.237**		**241.324.328**		**350.965.541**						**592.289.869**	**100**	**29,61**		**592.289.869**	**100**	**4,48**	Dinas Sosial	
			Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola Dalam Kondisi Baik (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			13.214.938.114		1.291.235.314		2.000.553.237		241.324.328		350.965.541						592.289.869	100	29,61		592.289.869	100	4,48		
			Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional di Kota Surabaya	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	7		7		7		7		7						7		100		7		100			
		1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			13.214.938.114		1.291.235.314		2.000.553.237		241.324.328		350.965.541						592.289.869	100	29,61		592.289.869	100	4,48		
			Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	7		7		7		7		7						7		100		7		100			
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**46.706.369.026**		-		**8.945.403.825**		**1.491.105.539**		**1.841.550.702**						**3.332.656.241**	**109,8**	**37,26**		**3.332.656.241**	**109,8**	**7,14**	UPTD Griya Werda dan Lingkungan Pondok Sosial Kusta Bahat	
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial																		109,8				109,8			
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan			46.706.369.026		-		8.945.403.825		1.491.105.539		1.841.550.702						3.332.656.241	109,8	37,26		3.332.656.241	109,8	7,14		
			Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar di UPTD	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	255		293		255		244		280						280		109,8		280		109,8			
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			46.706.369.026		-		8.945.403.825		1.491.105.539		1.841.550.702						3.332.656.241	109,8	37,26		3.332.656.241	109,8	7,14		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	255		293		255		244		280						280		109,8		280		109,8			
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			-		-		**18.653.095.853**		**1.562.763.833**		**2.337.681.972**						**3.900.445.805**	**66,18**	**20,91**		**3.900.445.805**	**83,78**	**0**	UPTD Kampung Anak Negeri	
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial																		66,18				83,78			
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan			-		-		18.653.095.853		1.562.763.833		2.337.681.972						3.900.445.805	66,18	20,91		3.900.445.805	83,78	0		
			Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar di UPTD	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	376		336		476		305		315						315		66,18		315		83,78			
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			-		-		18.653.095.853		1.562.763.833		2.337.681.972						3.900.445.805	66,18	20,91		3.900.445.805	83,78	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	376		336		476		305		315						315		66,18		315		83,78			
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			-		-		**15.370.629.423**		**2.354.144.993**		**3.075.651.679**						**5.429.796.672**	**92,85**	**35,33**		**5.429.796.672**	**92,85**	**0**	UPTD Liponsos Keputih	
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial																		92,85				92,85			
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan			-		-		15.370.629.423		2.354.144.993		3.075.651.679						5.429.796.672	92,85	35,33		5.429.796.672	92,85	0		
			Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar di UPTD	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1595		1.935		1595		1.064		1.481						1.481		92,85		1.481		92,85			
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			-		-		15.370.629.423		2.354.144.993		3.075.651.679						5.429.796.672	92,85	35,33		5.429.796.672	92,85	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1595		1.935		1595		1.064		1.481						1.481		92,85		1.481		92,85			
		2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**177.725.245.116**		**33.264.014.247**		**35.616.273.083**		**5.712.346.651**		**8.027.242.501**						**13.739.589.152**	**48,97**	**38,58**		**13.739.589.152**	**38,53**	**7,73**		
		2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**88.833.428.692**		**15.653.001.983**		**17.427.356.693**		**3.987.347.803**		**5.001.776.987**						**8.989.124.790**	**52,63**	**51,58**		**8.989.124.790**	**52,63**	**10,12**	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang tenaga kerja	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	95		98,02		93,5		98,25		98,03						98,03		104,84		98,03		103,19			
		2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			374.400.000		-		97.344.000		-		5.200.000						5.200.000	12,5	5,34		5.200.000	12,5	1,39		
			Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			374.400.000		-		97.344.000		-		5.200.000						5.200.000	12,5	5,34		5.200.000	12,5	1,39		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			79.827.338.775		14.104.969.175		15.749.741.311		3.765.287.553		4.641.932.355						8.407.219.908	98	53,38		8.407.219.908	98	10,53		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		50		50		49		49						49		98		49		98			
		2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			79.827.338.775		14.104.969.175		15.749.741.311		3.765.287.553		4.641.932.355						8.407.219.908	98	53,38		8.407.219.908	98	10,53		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		50		50		49		49						49		98		49		98			
		2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.631.689.917		1.548.032.808		1.580.271.382		222.060.250		354.644.632						576.704.882	50	36,49		576.704.882	50	6,68		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			703.190.485		116.619.840		54.554.400		-		-						-	50	0		-	50	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.928.499.432		1.431.412.968		1.525.716.982		222.060.250		354.644.632						576.704.882	50	37,8		576.704.882	50	7,27		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Kontribusi Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**41.096.804.885**		**11.550.116.572**		**9.022.228.725**		**240.508.847**		**1.039.837.623**						**1.280.346.470**	**29,31**	**14,19**		**1.280.346.470**	**15,72**	**3,12**	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya kesesuaian pelatihan dan sertifikasi dengan kebutuhan pasar kerja	Persentase peserta pelatihan dan sertifikasi yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja (%)	43,5		41		41,5		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			29.873.210.168		8.642.234.500		6.861.948.924		54.800.000		679.862.400						734.662.400	33,61	10,71		734.662.400	6,44	2,46		
			Meningkatnya kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	3760		928		720		112		242						242		33,61		242		6,44			
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			29.873.210.168		8.642.234.500		6.861.948.924		54.800.000		679.862.400						734.662.400	33,61	10,71		734.662.400	6,44	2,46		
			Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	3760		928		720		112		242						242		33,61		242		6,44			
			Meningkatnya produktivitas kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	36,29		32,18		32,96		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			11.223.594.717		2.907.882.072		2.160.279.801		185.708.847		359.975.223						545.684.070	25	25,26		545.684.070	25	4,86		
			Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui sertifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	4		4		4		1		1						1		25		1		25			
		2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			11.223.594.717		2.907.882.072		2.160.279.801		185.708.847		359.975.223						545.684.070	25	25,26		545.684.070	25	4,86		
			Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	4		4		4		1		1						1		25		1		25			
	Meningkatnya Kontribusi Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**9.453.431.429**		**1.779.252.399**		**2.243.253.339**		**130.442.660**		**512.911.255**						**643.353.915**	**38,22**	**28,68**		**643.353.915**	**30,47**	**6,81**	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya akses tenaga kerja terserap ke sektor formal	Persentase pencari kerja terserap ke sektor formal (%)	46,4		18,31		40,00		20,88		28,33						28,33		70,83		28,33		61,06			
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			3.090.655.943		605.425.669		588.906.963		49.434.726		149.873.946						199.308.672	46,47	33,84		199.308.672	36,68	6,45		
			Meningkatnya pelayanan antar kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2200		2.057		2075		200		1.064						1.064		51,28		1.064		48,36			
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2000		1.200		1200		100		500						500		41,67		500		25			
		2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja			469.659.528		94.400.000		60.860.000		-		5.600.000						5.600.000	51,28	9,2		5.600.000	48,36	1,19		
			Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2200		2.057		2075		200		1.064						1.064		51,28		1.064		48,36			
		2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			2.620.996.415		511.025.669		528.046.963		49.434.726		144.273.946						193.708.672	41,67	36,68		193.708.672	25	7,39		
			Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2000		1.200		1200		100		500						500		41,67		500		25			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			1.130.524.000		108.560.240		185.504.800		-		5.600.000						5.600.000	22,4	3,02		5.600.000	18,67	0,5		
			Meningkatnya akses pekerjaan melalui Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	300		260		250		51		56						56		22,4		56		18,67			
		2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			1.130.524.000		108.560.240		185.504.800		-		5.600.000						5.600.000	22,4	3,02		5.600.000	18,67	0,5		
			Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	300		260		250		51		56						56		22,4		56		18,67			
		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			1.858.952.610		325.717.908		404.370.590		37.356.986		76.232.403						113.589.389	33,33	28,09		113.589.389	25	6,11		
			Meningkatnya kompetensi CPMI/PMI	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	400		436		300		50		100						100		33,33		100		25			
		2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			1.858.952.610		325.717.908		404.370.590		37.356.986		76.232.403						113.589.389	33,33	28,09		113.589.389	25	6,11		
			Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	400		436		300		50		100						100		33,33		100		25			
			Meningkatnya akses tenaga kerja terserap ke sektor informal	Persentase tenaga kerja terserap ke sektor informal (%)	11,6		4,58		10,00		1,37		3,33						3,33		33,3		3,33		28,71			
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			3.373.298.876		739.548.582		1.064.470.986		43.650.948		281.204.906						324.855.854	42,4	30,52		324.855.854	35,33	9,63		
			Meningkatnya kemampuan kewirausahaan melalui padat karya	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	300		295		250		20		106						106		42,4		106		35,33			
		2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			3.373.298.876		739.548.582		1.064.470.986		43.650.948		281.204.906						324.855.854	42,4	30,52		324.855.854	35,33	9,63		
			Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	300		295		250		20		106						106		42,4		106		35,33			
	Meningkatnya Kontribusi Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**38.341.580.110**		**4.281.643.293**		**6.923.434.326**		**1.354.047.341**		**1.472.716.636**						**2.826.763.977**	**64,66**	**40,83**		**2.826.763.977**	**44,45**	**7,37**	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya perlindungan bagi tenaga kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	68,58		58,78		60,78		43,04		65,25						65,25		107,35		65,25		95,14			
				Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama (%)	21,08		15,18		16,06		14,82		15,28						15,28		95,14		15,28		72,49			
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi			3.724.815.930		2.374.839.399		790.182.310		98.691.606		106.021.406						204.713.012	52,83	25,91		204.713.012	30,57	5,5		
			Meningkatnya perusahaan yang menyampaikan data ketenagakerjaan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta			3.556.815.930		2.333.439.399		739.402.310		98.691.606		100.421.406						199.113.012	50	26,93		199.113.012	50	5,6		
			Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	1150		301		230		58		70						128		55,65		128		11,13			
		2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			168.000.000		41.400.000		50.780.000		-		5.600.000						5.600.000	55,65	11,03		5.600.000	11,13	3,33		
			Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	1150		301		230		58		70						128		55,65		128		11,13			
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah			34.616.764.180		1.906.803.894		6.133.252.016		1.255.355.735		1.366.695.230						2.622.050.965	72,54	42,75		2.622.050.965	53,7	7,57		
			Menurunnya permasalahan ketenagakerjaan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	100		68		60		21		18						39		65		39		39			
				Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	110		151		110		24		38						62		56,36		62		56,36			
				Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	37554		24.935		25650		24.683		24.691						24.691		96,26		24.691		65,75			
		2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak			1.413.535.945		355.312.526		284.583.389		12.102.183		22.830.511						34.932.694	65	12,28		34.932.694	39	2,47		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	100		68		60		21		18						39		65		39		39			
		2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang			1.633.474.635		303.596.968		346.248.627		12.199.952		118.079.119						130.279.071	56,36	37,63		130.279.071	56,36	7,98		
			Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	110		151		110		24		38						62		56,36		62		56,36			
		2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			31.569.753.600		1.247.894.400		5.502.420.000		1.231.053.600		1.225.785.600						2.456.839.200	96,26	44,65		2.456.839.200	65,75	7,78		
			Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	37554		24.935		25650		24.683		24.691						24.691		96,26		24.691		65,75			
		2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**148.949.528.868**		**-**		**28.014.720.866**		**4.665.292.063**		**7.403.319.513**						**12.068.611.576**	**93,78**	**43,08**		**12.068.611.576**	**116,05**	**8,1**		
		2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**87.478.177.312**		**-**		**16.930.194.708**		**3.747.255.796**		**4.936.734.826**						**8.683.990.622**	**55,98**	**51,29**		**8.683.990.622**	**55,63**	**9,93**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang pemberdayaan perempuan dan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	98,3		99,71		98,26		99,9		99,89						99,89		101,66		99,89		101,62			
		2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.978.056		-		14.192.576		-		4.900.000						4.900.000	12,5	34,53		4.900.000	11,11	8,75		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9		9		8		2		1						1		12,5		1		11,11			
		2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			55.978.056		-		14.192.576		-		4.900.000						4.900.000	12,5	34,53		4.900.000	11,11	8,75		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9		9		8		2		1						1		12,5		1		11,11			
		2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			73.376.056.688		-		14.482.012.020		3.442.355.683		4.377.676.479						7.820.032.162	111,43	54		7.820.032.162	111,43	10,66		
			Meningkatnya ketepatan waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		38		35		39		39						39		111,43		39		111,43			
		2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			73.376.056.688		-		14.482.012.020		3.442.355.683		4.377.676.479						7.820.032.162	111,43	54		7.820.032.162	111,43	10,66		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		38		35		39		39						39		111,43		39		111,43			
		2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			11.642.697.903		-		482.487.546		10.916.295		60.024.137						70.940.432	50	14,7		70.940.432	50	0,61		
			Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		18		12		3		3						6		50		6		50			
		2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.642.697.903		-		482.487.546		10.916.295		60.024.137						70.940.432	50	14,7		70.940.432	50	0,61		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		18		12		3		3						6		50		6		50			
		2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.403.444.665		-		1.951.502.566		293.983.818		494.134.210						788.118.028	50	40,39		788.118.028	50	32,79		
			Meningkatnya ketersediaan barang jasa dan pelayanan umum perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		6		12		3		3						6		50		6		50			
		2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.403.444.665		-		1.951.502.566		293.983.818		494.134.210						788.118.028	50	40,39		788.118.028	50	32,79		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		6		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**16.801.687.268**		**-**		**2.926.717.726**		**124.288.390**		**541.618.620**						**665.907.010**	**71,07**	**22,75**		**665.907.010**	**71,07**	**3,96**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	
			Meningkatnya pengarusutamaan gender dan peran pemberdayaan perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	100		91		100		0		0						0		0		0		0			
				Persentase organisasi perempuan yang berperan aktif dalam pemberdayaan gender (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			3.835.959.072		-		742.273.211		62.777.914		181.686.731						244.464.645	101,72	32,93		244.464.645	101,72	6,37		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	58		58		58		59		0						59		101,72		59		101,72			
		2.08.02.2.01.001 1	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			3.835.959.072		-		742.273.211		62.777.914		181.686.731						244.464.645	101,72	32,93		244.464.645	101,72	6,37		
			terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	58		58		58		59		0						59		101,72		59		101,72			
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan			2.762.714.165		-		418.736.023		46.660.476		97.542.125						144.202.601	61,48	34,44		144.202.601	61,48	5,22		
			Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dalam mendorong partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	610		610		610		195		180						375		61,48		375		61,48			
		2.08.02.2.02.000 9	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi			2.762.714.165		-		418.736.023		46.660.476		97.542.125						144.202.601	61,48	34,44		144.202.601	61,48	5,22		
			Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	610		610		610		195		180						375		61,48		375		61,48			
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			10.203.014.031		-		1.765.708.492		14.850.000		262.389.764						277.239.764	50	15,7		277.239.764	50	2,72		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.08.02.2.03.000 9	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan			10.203.014.031		-		1.765.708.492		14.850.000		262.389.764						277.239.764	50	15,7		277.239.764	50	2,72		
			terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**9.155.455.342**		-		**1.807.872.055**		**193.931.144**		**472.175.589**						**666.106.733**	**152,5**	**36,84**		**666.106.733**	**203,33**	**7,28**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan dalam waktu <= 12 jam (%)	100		100		100		100		100						200		200		200		200			
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			208.360.275		-		37.004.400		-		14.682.317						14.682.317	0	39,68		14.682.317	0	7,05		
			Terlaksananya advokasi dan pencegahan KtP dan TPPO	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	184		184		184		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.01.000 6	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan			208.360.275		-		37.004.400		-		14.682.317						14.682.317	0	39,68		14.682.317	0	7,05		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	184		184		184		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan			6.720.852.744		-		1.385.620.028		171.895.392		368.133.150						540.028.542	244	38,97		540.028.542	406,67	8,04		
			Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		24		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatan/Kota (Orang)	0		0		24		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	6		37		6		13		14						27		450		27		450			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	20		121		20		30		47						77		385		77		385			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	20		121		20		30		47						77		385		77		385			
		2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban			-		-		5.040.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		24		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		70.386.000		-		23.704.000						23.704.000	0	33,68		23.704.000	0	0		
			Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatan/Kota (Orang)	0		0		24		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			2.071.781.251		-		380.413.141		43.473.392		105.297.144						148.770.536	450	39,11		148.770.536	450	7,18		
			Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	6		37		6		13		14						27		450		27		450			
		2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			4.078.679.351		-		906.968.295		128.422.000		224.878.726						353.300.726	385	38,95		353.300.726	385	8,66		
			Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	20		121		20		30		47						77		385		77		385			
		2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			570.392.142		-		22.812.592		-		14.253.280						14.253.280	385	62,48		14.253.280	385	2,5		
			Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	20		121		20		30		47						77		385		77		385			
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.226.242.323		-		385.247.627		22.035.752		89.360.122						111.395.874	0	28,92		111.395.874	0	5		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	184		184		184		0		0						0		0		0		0			
				jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	50		50		50		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan			1.862.519.493		-		350.943.627		22.035.752		89.360.122						111.395.874	0	31,74		111.395.874	0	5,98		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	184		184		184		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			363.722.830		-		34.304.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	50		50		50		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**7.442.863.142**		-		**1.307.225.377**		**122.679.659**		**311.465.093**						**434.144.752**	**87,5**	**33,21**		**434.144.752**	**87,5**	**5,83**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan	Persentase keluarga yang memiliki akses dan mendapat layanan konseling/konsultasi Puspaga (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah			7.442.863.142		-		1.307.225.377		122.679.659		311.465.093						434.144.752	87,5	33,21		434.144.752	87,5	5,83		
			Tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	120		120		120		38		67						105		87,5		105		87,5			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota			7.442.863.142		-		1.307.225.377		122.679.659		311.465.093						434.144.752	87,5	33,21		434.144.752	87,5	5,83		
			Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	120		120		120		38		67						105		87,5		105		87,5			
	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			**1.554.607.935**		-		**229.286.451**		**26.926.577**		**53.455.444**						**80.382.021**	**0**	**35,06**		**80.382.021**	**0**	**5,17**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data terpilah gender dan anak dalam perencanaan program atau kegiatan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah			1.554.607.935		-		229.286.451		26.926.577		53.455.444						80.382.021	0	35,06		80.382.021	0	5,17		
			Tersedianya Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota			1.554.607.935		-		229.286.451		26.926.577		53.455.444						80.382.021	0	35,06		80.382.021	0	5,17		
			Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**12.398.674.571**		-		**1.614.717.959**		**84.049.453**		**176.616.295**						**260.665.748**	**0**	**16,14**		**260.665.748**	**0**	**2,1**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	
			Meningkatnya peran kelurahan dalam pemenuhan hak dan	Persentase Kelurahan Layak Anak (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan			12.398.674.571		-		1.614.717.959		84.049.453		176.616.295						260.665.748	0	16,14		260.665.748	0	2,1		
			Terlaksananya Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	153		153		153		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah			12.398.674.571		-		1.614.717.959		84.049.453		176.616.295						260.665.748	0	16,14		260.665.748	0	2,1		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	153		153		153		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**14.118.063.298**		-		**3.198.706.590**		**366.161.044**		**911.253.646**						**1.277.414.690**	**86,72**	**39,94**		**1.277.414.690**	**138,75**	**9,05**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan sesuai standar pelayanan dalam waktu <= 12 jam (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			386.085.584		-		64.995.600		-		12.055.264						12.055.264	50	18,55		12.055.264	50	3,12		
			Meningkatnya peran lembaga dalam advokasi pencegahan KtA	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
		2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan			386.085.584		-		64.995.600		-		12.055.264						12.055.264	50	18,55		12.055.264	50	3,12		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat			13.558.800.544		-		3.098.654.990		366.161.044		899.198.382						1.265.359.426	107,29	40,84		1.265.359.426	214,59	9,33		
			Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	150		279		150		69		82						151		100,67		151		100,67			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		24		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	33		31		33		69		77						146		442,42		146		442,42			
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	150		279		150		69		82						151		100,67		151		100,67			
				Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		24		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		12		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			5.548.245.607		-		1.198.665.460		140.492.900		234.108.178						374.601.078	100,67	31,25		374.601.078	100,67	6,75		
			Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	150		279		150		69		82						151		100,67		151		100,67			
		2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		71.184.600		-		23.994.400						23.994.400	0	33,71		23.994.400	0	0		
			layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		24		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			6.901.449.059		-		1.623.108.698		225.668.144		590.348.404						816.016.548	442,42	50,27		816.016.548	442,42	11,82		
			Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	33		31		33		69		77						146		442,42		146		442,42			
		2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			1.109.105.878		-		184.121.002		-		48.413.150						48.413.150	100,67	26,29		48.413.150	100,67	4,37		
			Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	150		279		150		69		82						151		100,67		151		100,67			
		2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan			-		-		13.440.000		-		2.334.250						2.334.250	0	17,37		2.334.250	0	0		
			Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		24		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		8.135.230		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		12		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat			173.177.170		-		35.056.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	50		50		50		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah			173.177.170		-		35.056.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	50		50		50		0		0						0		0		0		0			
		2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**134.709.404.806**		**21.244.646.846**		**26.366.904.559**		**4.786.655.374**		**6.360.185.049**						**11.146.840.423**	**50,07**	**42,28**		**11.146.840.423**	**44,36**	**8,27**		
		2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**126.057.809.609**		**20.753.420.268**		**24.928.531.632**		**4.670.127.722**		**6.136.648.191**						**10.806.775.913**	**53,05**	**43,35**		**10.806.775.913**	**43,05**	**8,57**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang pangan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	94,8		97,18		94,60		96,69		97,09						97,09		102,63		97,09		102,42			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			312.000.000		-		70.170.000		-		7.800.000						7.800.000	37,5	11,12		7.800.000	37,5	2,5		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			312.000.000		-		70.170.000		-		7.800.000						7.800.000	37,5	11,12		7.800.000	37,5	2,5		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			108.681.355.220		17.831.916.233		21.440.327.898		4.277.436.492		5.357.267.957						9.634.704.449	74,68	44,94		9.634.704.449	74,68	8,87		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	79		73		79		59		59						59		74,68		59		74,68			
		2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			108.681.355.220		17.831.916.233		21.440.327.898		4.277.436.492		5.357.267.957						9.634.704.449	74,68	44,94		9.634.704.449	74,68	8,87		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	79		73		79		59		59						59		74,68		59		74,68			
		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.064.454.389		2.921.504.035		3.418.033.734		392.691.230		771.580.234						1.164.271.464	50	34,06		1.164.271.464	30	6,82		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa serta terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.011.222.506		413.144.430		794.725.504		69.196.124		135.003.451						204.199.575	50	25,69		204.199.575	10	6,78		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			14.053.231.883		2.508.359.605		2.623.308.230		323.495.106		636.576.783						960.071.889	50	36,6		960.071.889	50	6,83		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**3.483.798.661**		-		**452.094.926**		**23.623.054**		**39.135.975**						**62.759.029**	**50**	**13,88**		**62.759.029**	**50**	**1,8**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	95,5		96,31		95,35		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			3.483.798.661		-		452.094.926		23.623.054		39.135.975						62.759.029	50	13,88		62.759.029	50	1,8		
			Meningkatnya Cakupan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
		2.09.03.2.04.0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			3.483.798.661		-		452.094.926		23.623.054		39.135.975						62.759.029	50	13,88		62.759.029	50	1,8		
			Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
	Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**2.405.424.625**		-		**557.789.102**		**33.487.930**		**85.050.375**						**118.538.305**	**46,67**	**21,25**		**118.538.305**	**46,67**	**4,93**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatnya ketahanan daerah dari kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			2.405.424.625		-		557.789.102		33.487.930		85.050.375						118.538.305	46,67	21,25		118.538.305	46,67	4,93		
			Meningkatnya efektivitas upaya penanganan dan pencegahan kerawanan pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	15		15		15		3		4						7		46,67		7		46,67			
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			2.405.424.625		-		557.789.102		33.487.930		85.050.375						118.538.305	46,67	21,25		118.538.305	46,67	4,93		
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	15		15		15		3		4						7		46,67		7		46,67			
	Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**2.762.371.911**		**491.226.578**		**428.488.899**		**59.416.668**		**99.350.508**						**158.767.176**	**41,67**	**37,05**		**158.767.176**	**41,67**	**5,75**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatnya mutu dan keamanan bahan pangan segar	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	97,99		97,9		97,91		100		99,63						99,63		101,76		99,63		101,67			
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			2.762.371.911		491.226.578		428.488.899		59.416.668		99.350.508						158.767.176	41,67	37,05		158.767.176	41,67	5,75		
			Meningkatnya upaya pengawasan keamanan pangan segar	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	36		36		36		6		9						15		41,67		15		41,67			
		2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			2.762.371.911		491.226.578		428.488.899		59.416.668		99.350.508						158.767.176	41,67	37,05		158.767.176	41,67	5,75		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	36		36		36		6		9						15		41,67		15		41,67			
		2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**442.666.400.498**		**98.984.744.534**		**60.529.131.668**		**207.002.631**		**4.966.578.696**						**5.173.581.327**	**50**	**8,55**		**5.173.581.327**	**50**	**1,17**		
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**			**441.414.236.358**		**98.984.744.534**		**60.261.069.854**		**204.002.631**		**4.966.578.696**						**5.170.581.327**	**100**	**8,58**		**5.170.581.327**	**100**	**1,17**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	
			Meningkatnya ketepatan waktu pengadaan tanah bagi pembagunan untuk kepentingan umum	Presentase Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	500		100		100		0		100						100		100		100		20			
		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			441.414.236.358		98.984.744.534		60.261.069.854		204.002.631		4.966.578.696						5.170.581.327	100	8,58		5.170.581.327	100	1,17		
			Tersedianya luas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		3		1		0		1						1		100		1		100			
		2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh			441.414.236.358		98.984.744.534		60.261.069.854		204.002.631		4.966.578.696						5.170.581.327	100	8,58		5.170.581.327	100	1,17		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		3		1		0		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**			**1.252.164.140**		**-**		**268.061.814**		**3.000.000**		**-**						**3.000.000**	**0**	**1,12**		**3.000.000**	**0**	**0,24**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	
			Optimalnya fasilitasi penataan akses pada obyek reforma agraria pada kewenangan Kota	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penataan Aset dan Akses Reforma (%)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee			1.252.164.140		-		268.061.814		3.000.000		-						3.000.000	0	1,12		3.000.000	0	0,24		
			Terlaksananya redistribusi tanah untuk kepentingan umum	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria			1.252.164.140		-		268.061.814		3.000.000		-						3.000.000	0	1,12		3.000.000	0	0,24		
			Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**3.037.472.028.846**		**536.141.690.053**		**734.572.587.233**		**102.584.795.103**		**198.790.785.339**						**301.375.580.442**	**61,74**	**41,03**		**301.375.580.442**	**60,09**	**9,92**		
		2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**319.622.365.253**		**53.329.458.914**		**62.906.959.066**		**11.787.551.523**		**15.188.776.990**						**26.976.328.513**	**57,77**	**42,88**		**26.976.328.513**	**57,77**	**8,44**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang lingkungan hidup	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	89		95,31		87		95,79		95,82						95,82		110,14		95,82		107,66			
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			208.000.000		-		42.480.000		-		13.000.000						13.000.000	37,5	30,6		13.000.000	37,5	6,25		
			Meningkatnya efektifitas penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			208.000.000		-		42.480.000		-		13.000.000						13.000.000	37,5	30,6		13.000.000	37,5	6,25		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			249.197.753.572		43.600.757.238		49.158.822.238		11.110.219.888		13.214.020.871						24.324.240.759	95,58	49,48		24.324.240.759	95,58	9,76		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	181		182		181		172		173						173		95,58		173		95,58			
		2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			249.197.753.572		43.600.757.238		49.158.822.238		11.110.219.888		13.214.020.871						24.324.240.759	95,58	49,48		24.324.240.759	95,58	9,76		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	181		182		181		172		173						173		95,58		173		95,58			
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			67.340.936.752		9.241.961.207		13.172.420.377		595.778.051		1.841.106.880						2.436.884.931	50	18,5		2.436.884.931	50	3,62		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			67.340.936.752		9.241.961.207		13.172.420.377		595.778.051		1.841.106.880						2.436.884.931	50	18,5		2.436.884.931	50	3,62		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.875.674.929		486.740.469		533.236.451		81.553.584		120.649.239						202.202.823	48	37,92		202.202.823	48	7,03		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pengelolaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50		50		50		12		12						24		48		24		48			
		2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.875.674.929		486.740.469		533.236.451		81.553.584		120.649.239						202.202.823	48	37,92		202.202.823	48	7,03		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50		50		50		12		12						24		48		24		48			
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**32.196.774.803**		**1.169.846.337**		**6.694.626.617**		**233.950.490**		**511.694.304**						**745.644.794**	**25**	**11,14**		**745.644.794**	**25**	**2,32**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kualitas mutu air dan udara	Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik (%)	40,65		70,83		40,61		50		59,69						59,69		146,98		59,69		146,84			
				Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu (%)	92		96,71		88		100		100						100		113,64		100		108,7			
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			32.196.774.803		1.169.846.337		6.694.626.617		233.950.490		511.694.304						745.644.794	25	11,14		745.644.794	25	2,32		
			Meningkatnya pencegahan pencemaran air dan udara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	3		3		3		3		3						3		100		3		100			
				Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan			7.930.877.025		1.169.846.337		1.535.323.727		34.191.735		230.879.375						265.071.110	0	17,26		265.071.110	0	3,34		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			19.118.078.643		-		4.130.180.663		53.747.251		137.285.034						191.032.285	100	4,63		191.032.285	100	1		
			Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	3		3		3		3		3						3		100		3		100			
		2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah			2.581.003.135		-		517.156.627		24.399.904		48.019.895						72.419.799	0	14		72.419.799	0	2,81		
			Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan			2.566.816.000		-		511.965.600		121.611.600		95.510.000						217.121.600	0	42,41		217.121.600	0	8,46		
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**524.732.308.224**		**85.395.174.171**		**94.639.191.986**		**12.965.074.625**		**20.391.506.371**						**33.356.580.996**	**100,02**	**35,25**		**33.356.580.996**	**100**	**6,36**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan RTH perkotaan	Persentase RTH publik perkotaan lingkup kewenangan Kabupaten/Kota (%)	20,32		20,32		20,32		20,32		20,32						20,32		100		20,32		100			
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			524.732.308.224		85.395.174.171		94.639.191.986		12.965.074.625		20.391.506.371						33.356.580.996	100,02	35,25		33.356.580.996	100	6,36		
			Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	275,98		275,88		275,90		275,99		275,99						275,99		100,03		275,99		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	125		125		125		125		125						125		100		125		100			
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			475.462.026.539		75.880.112.549		86.222.522.468		12.122.705.084		18.682.714.848						30.805.419.932	100,03	35,73		30.805.419.932	100	6,48		
			Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	275,98		275,88		275,90		275,99		275,99						275,99		100,03		275,99		100			
		2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati			49.270.281.685		9.515.061.622		8.416.669.518		842.369.541		1.708.791.523						2.551.161.064	100	30,31		2.551.161.064	100	5,18		
			Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	125		125		125		125		125						125		100		125		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**12.719.511.531**		**1.971.998.835**		**15.512.632.311**		**1.275.713.029**		**9.390.009.129**						**10.665.722.158**	**22**	**68,76**		**10.665.722.158**	**20,81**	**83,85**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penanganan B3 dan limbah B3 pada rumah tangga	Volume penanganan limbah B3 pada Rumah Tangga (Kg/Ha/Tahun)	9.993		0		6826		2201,7		4259,72						4.259,72		62,4		4.259,72		42,63			
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			11.332.946.901		1.971.998.835		15.284.379.371		1.241.435.747		9.334.967.900						10.576.403.647	0	69,2		10.576.403.647	0	93,32		
			Meningkatnya kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan			11.332.946.901		1.971.998.835		15.284.379.371		1.241.435.747		9.334.967.900						10.576.403.647	0	69,2		10.576.403.647	0	93,32		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya efektivitas pelayanan kegiatan/usaha terhadap penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase ketepatan waktu rincian teknis/standard teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang telah dinilai (%)	90		100		80		100		100						100		125		100		111,11			
		2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3			1.386.564.630		-		228.252.940		34.277.282		55.041.229						89.318.511	44	39,13		89.318.511	41,62	6,44		
			Meningkatnya rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	370		304		350		55		99						154		44		154		41,62			
		2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan			1.386.564.630		-		228.252.940		34.277.282		55.041.229						89.318.511	44	39,13		89.318.511	41,62	6,44		
			Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	370		304		350		55		99						154		44		154		41,62			
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**10.411.553.744**		**1.266.139.232**		**1.797.304.283**		**199.660.262**		**304.257.452**						**503.917.714**	**48,53**	**28,04**		**503.917.714**	**37,61**	**4,84**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	60		80		60		61,06		61,25						61,25		102,08		61,25		102,08			
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh			10.411.553.744		1.266.139.232		1.797.304.283		199.660.262		304.257.452						503.917.714	48,53	28,04		503.917.714	37,61	4,84		
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	450		325		350		62		106						168		48		168		37,33			
				Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	615		272		475		113		120						233		49,05		233		37,89			
		2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			5.388.710.404		855.464.052		993.216.080		153.305.239		230.611.114						383.916.353	48	38,65		383.916.353	37,33	7,12		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	450		325		350		62		106						168		48		168		37,33			
		2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan			5.022.843.340		410.675.180		804.088.203		46.355.023		73.646.338						120.001.361	49,05	14,92		120.001.361	37,89	2,39		
			Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	615		272		475		113		120						233		49,05		233		37,89			
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**27.460.194.557**		**1.187.016.470**		**3.792.255.926**		**106.401.233**		**461.699.641**						**568.100.874**	**60,13**	**14,98**		**568.100.874**	**56,16**	**2,07**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Kapasitas Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup (%)	100		37,66		48		65,08		71,04						71,04		148		71,04		71,04			
				Persentase Kampung Zero Waste (%)	100		35,34		52,90		40,78		40,82						40,82		77,16		40,82		40,82			
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat			27.460.194.557		1.187.016.470		3.792.255.926		106.401.233		461.699.641						568.100.874	60,13	14,98		568.100.874	56,16	2,07		
			Terwujudnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	12		12		12		1		5						6		50		6		50			
				Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	1945		1.670		1725		630		582						1.212		70,26		1.212		62,31			
		2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			23.847.869.587		665.202.014		1.792.648.794		70.094.685		334.410.072						404.504.757	50	22,56		404.504.757	50	1,7		
			Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	12		12		12		1		5						6		50		6		50			
		2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			3.612.324.970		521.814.456		1.999.607.132		36.306.548		127.289.569						163.596.117	70,26	8,18		163.596.117	62,31	4,53		
			Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	1945		1.670		1725		630		582						1.212		70,26		1.212		62,31			
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**3.409.934.679**		-		**440.568.893**		**23.587.361**		**45.949.155**						**69.536.516**	**38,3**	**15,78**		**69.536.516**	**39,13**	**2,04**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			3.409.934.679		-		440.568.893		23.587.361		45.949.155						69.536.516	38,3	15,78		69.536.516	39,13	2,04		
			Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	46		37		47		9		18						18		38,3		18		39,13			
		2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			3.409.934.679		-		440.568.893		23.587.361		45.949.155						69.536.516	38,3	15,78		69.536.516	39,13	2,04		
			Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	46		37		47		9		18						18		38,3		18		39,13			
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**1.992.611.145.232**		**377.922.986.772**		**527.497.989.960**		**73.358.540.986**		**148.959.362.944**						**222.317.903.930**	**77,84**	**42,15**		**222.317.903.930**	**76,54**	**11,16**	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya proporsi sampah rumah tangga yang dikelola	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	100		100		100,00		100		100						100		100		100		100			
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			992.996.199.803		185.083.400.973		197.176.464.281		32.158.568.747		54.915.620.478						87.074.189.225	61,76	44,16		87.074.189.225	61,52	8,77		
			Meningkatnya pengumpulan dan pengangkutan sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	580480		520.631,52		568047		135.387,4		123.689,26						129.538,33		22,8		129.538,33		22,32			
				Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	85		340		85		85,611		85,61						85,611		100,72		85,611		100,72			
		2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan			989.060.519.803		185.083.400.973		93.649.197.091		14.492.001.224		28.670.137.897						43.162.139.121	22,8	46,09		43.162.139.121	22,32	4,36		
			Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	580480		520.631,52		568047		135.387,4		123.689,26						129.538,33		22,8		129.538,33		22,32			
		2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah			3.935.680.000		-		103.527.267.190		17.666.567.523		26.245.482.581						43.912.050.104	100,72	42,42		43.912.050.104	100,72	1115,74		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	85		340		85		85,611		85,61						85,611		100,72		85,611		100,72			
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	95		99,52		95,00		94,96		97,4						97,4		102,53		97,4		102,53			
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			999.614.945.429		192.839.585.799		330.321.525.679		41.199.972.239		94.043.742.466						135.243.714.705	88,55	40,94		135.243.714.705	86,56	13,53		
			Meningkatnya Pemanfaatan Sampah, Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan, dan Penanganan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	235		231		231		231		232						232		100,43		232		98,72			
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	15000		10.384,79		14600		11.015,09		9.271,87						20.286,96		138,95		20.286,96		135,25			
				jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	580480		592.744,91		568047		156.898,99		149.272,58						149.272,58		26,28		149.272,58		25,72			
		2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			253.248.412.557		37.251.044.608		64.171.719.868		963.092.273		4.566.193.328						5.529.285.601	100,43	8,62		5.529.285.601	98,72	2,18		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	235		231		231		231		232						232		100,43		232		98,72			
		2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU			484.400.224		-		127.523.055.411		3.091.890.561		52.653.995.724						55.745.886.285	138,95	43,71		55.745.886.285	135,25	11508,23		
			Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	15000		10.384,79		14600		11.015,09		9.271,87						20.286,96		138,95		20.286,96		135,25			
		2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			745.882.132.648		155.588.541.191		138.626.750.400		37.144.989.405		36.823.553.414						73.968.542.819	26,28	53,36		73.968.542.819	25,72	9,92		
			Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	580480		592.744,91		568047		156.898,99		149.272,58						149.272,58		26,28		149.272,58		25,72			
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**114.308.240.823**		**13.899.069.322**		**21.291.058.191**		**2.634.315.594**		**3.537.529.353**						**6.171.844.947**	**200**	**28,99**		**6.171.844.947**	**200**	**5,4**	UPTD Pemakaman	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan RTH perkotaan																		200				200			
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			114.308.240.823		13.899.069.322		21.291.058.191		2.634.315.594		3.537.529.353						6.171.844.947	200	28,99		6.171.844.947	200	5,4		
			Terlaksananya pengelolaan makam sesuai kewenangan	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	14		14		14		14		14						28		200		28		200			
		2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya			114.308.240.823		13.899.069.322		21.291.058.191		2.634.315.594		3.537.529.353						6.171.844.947	200	28,99		6.171.844.947	200	5,4		
			Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	14		14		14		14		14						28		200		28		200			
		2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**306.039.335.899**		**49.580.607.033**		**60.774.591.121**		**13.115.929.279**		**15.327.829.550**						**28.443.758.829**	**54,92**	**46,8**		**28.443.758.829**	**57,8**	**9,29**		
		2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**257.327.345.305**		**44.538.095.388**		**50.858.400.696**		**11.728.405.694**		**12.899.677.757**						**24.628.083.451**	**64,47**	**48,42**		**24.628.083.451**	**74,23**	**9,57**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang administrasi kependudukan dan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	94		96,78		93,25		97,28		97,24						97,24		104,28		97,24		103,45			
		2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			78.000.000		14.300.000		15.600.000		-		2.600.000						2.600.000	37,5	16,67		2.600.000	37,5	3,33		
			Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			78.000.000		14.300.000		15.600.000		-		2.600.000						2.600.000	37,5	16,67		2.600.000	37,5	3,33		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			209.419.953.201		37.556.725.824		41.299.132.422		9.701.463.115		11.698.457.028						21.399.920.143	103,73	51,82		21.399.920.143	142,74	10,22		
			Meningkatnya ketepatan waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	117		171		161		167		167						167		103,73		167		142,74			
		2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			209.419.953.201		37.556.725.824		41.299.132.422		9.701.463.115		11.698.457.028						21.399.920.143	103,73	51,82		21.399.920.143	142,74	10,22		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	117		171		161		167		167						167		103,73		167		142,74			
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			32.492.141.325		4.755.710.640		6.649.965.493		1.685.567.190		639.069.430						2.324.636.620	66,67	34,96		2.324.636.620	66,67	7,15		
			Meningkatnya ketepatan waktu ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		3		1		2						2		66,67		2		66,67			
		2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			32.492.141.325		4.755.710.640		6.649.965.493		1.685.567.190		639.069.430						2.324.636.620	66,67	34,96		2.324.636.620	66,67	7,15		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		3		1		2						2		66,67		2		66,67			
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.337.250.779		2.211.358.924		2.893.702.781		341.375.389		559.551.299						900.926.688	50	31,13		900.926.688	50	5,87		
			Meningkatnya ketersediaan barang jasa dan pelayanan umum perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			15.337.250.779		2.211.358.924		2.893.702.781		341.375.389		559.551.299						900.926.688	50	31,13		900.926.688	50	5,87		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**22.269.697.575**		**2.684.862.961**		**4.660.886.104**		**695.547.072**		**1.129.716.626**						**1.825.263.698**	**49,24**	**39,16**		**1.825.263.698**	**49,24**	**8,2**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu (%)	95		100		95		100		100						100		105,26		100		105,26			
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			19.155.944.698		2.684.862.961		4.113.685.822		630.961.564		983.526.126						1.614.487.690	48,09	39,25		1.614.487.690	48,09	8,43		
			Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	404543		483.941		404543		89.580		103.891						193.471		47,82		193.471		47,82			
				Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	85969		115.636		85969		19.324		22.248						41.572		48,36		41.572		48,36			
		2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			11.497.679.144		2.684.862.961		2.648.950.908		410.912.551		626.241.483						1.037.154.034	47,82	39,15		1.037.154.034	47,82	9,02		
			Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	404543		483.941		404543		89.580		103.891						193.471		47,82		193.471		47,82			
		2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			7.658.265.554		-		1.464.734.914		220.049.013		357.284.643						577.333.656	48,36	39,42		577.333.656	48,36	7,54		
			Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	85969		115.636		85969		19.324		22.248						41.572		48,36		41.572		48,36			
			Meningkatnya kualitas pelayanan proaktif perekaman KTP dan aktivasi IKD	Persentase pelayanan proaktif perekaman KTP dan aktivasi IKD yang selesai tepat waktu (%)	95		100		95		100		100						100		105,26		100		105,26			
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			3.113.752.877		-		547.200.282		64.585.508		146.190.500						210.776.008	50	38,52		210.776.008	50	6,77		
			Terselenggaranya pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	40		40		40		10		10						20		50		20		50			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	10		17		10		0		10						10		100		10		100			
		2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan			1.334.689.696		-		188.426.802		18.992.200		52.088.300						71.080.500	50	37,72		71.080.500	50	5,33		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	40		40		40		10		10						20		50		20		50			
		2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			327.093.110		-		82.624.422		9.091.222		16.517.361						25.608.583	0	30,99		25.608.583	0	7,83		
			Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk			1.451.970.071		-		276.149.058		36.502.086		77.584.839						114.086.925	100	41,31		114.086.925	100	7,86		
			Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	10		17		10		0		10						10		100		10		100			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**14.768.021.577**		**2.249.143.934**		**2.869.521.940**		**479.412.616**		**784.128.811**						**1.263.541.427**	**57,37**	**44,03**		**1.263.541.427**	**58,06**	**8,56**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang selesai tepat waktu (%)	95		100		95		100		100						100		105,26		100		105,26			
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			11.366.442.096		2.249.143.934		2.257.389.491		411.945.047		619.414.650						1.031.359.697	66,57	45,69		1.031.359.697	67,96	9,07		
			Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	69302		91.471		70748		21.466		25.634						47.100		66,57		47.100		67,96			
		2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			11.366.442.096		2.249.143.934		2.257.389.491		411.945.047		619.414.650						1.031.359.697	66,57	45,69		1.031.359.697	67,96	9,07		
			Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	69302		91.471		70748		21.466		25.634						47.100		66,57		47.100		67,96			
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			3.401.579.481		-		612.132.449		67.467.569		164.714.161						232.181.730	48,16	37,93		232.181.730	48,16	6,83		
			Terselenggaranya pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	3050		3.562		3050		689		780						1.469		48,16		1.469		48,16			
		2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			3.401.579.481		-		612.132.449		67.467.569		164.714.161						232.181.730	48,16	37,93		232.181.730	48,16	6,83		
			Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	3050		3.562		3050		689		780						1.469		48,16		1.469		48,16			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**11.081.803.346**		-		**2.267.302.381**		**212.563.897**		**498.306.356**						**710.870.253**	**50**	**31,35**		**710.870.253**	**50**	**6,41**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya kemudahan layanan administrasi kependudukan	Rata-rata waktu tanggap gangguan layanan administrasi kependudukan (Jam)	24		2,61		24		0,17		0,45						0,45		198,13		0,45		198,13			
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			11.081.803.346		-		2.267.302.381		212.563.897		498.306.356						710.870.253	50	31,35		710.870.253	50	6,41		
			Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			7.407.125.584		-		1.521.801.277		111.153.132		331.693.226						442.846.358	50	29,1		442.846.358	50	5,98		
			Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan			3.674.677.762		-		745.501.104		101.410.765		166.613.130						268.023.895	50	35,95		268.023.895	50	7,29		
			Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**592.468.096**		**108.504.750**		**118.480.000**		-		**16.000.000**						**16.000.000**	**50**	**13,5**		**16.000.000**	**50**	**2,7**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan (%)	100		100		100		0		100						100		100		100		100			
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			592.468.096		108.504.750		118.480.000		-		16.000.000						16.000.000	50	13,5		16.000.000	50	2,7		
			Tersusunnya informasi profil kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			592.468.096		108.504.750		118.480.000		-		16.000.000						16.000.000	50	13,5		16.000.000	50	2,7		
			Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
		2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**146.569.436.364**		-		**29.053.188.725**		**599.922.449**		**7.007.764.489**						**7.607.686.938**	**20,57**	**26,19**		**7.607.686.938**	**22,83**	**5,19**		
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**3.053.392.283**		-		**711.671.472**		-		**40.490.000**						**40.490.000**	**25**	**5,69**		**40.490.000**	**25,45**	**1,33**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	5,8		11,9		5,80		0		0						0		0		0		0			
				Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	1,68		1,68		1,68		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam			1.436.280.705		-		310.849.072		-		34.890.000						34.890.000	50	11,22		34.890.000	50,89	2,43		
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	56		0		57		0		57						57		100		57		101,79			
		2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			735.524.718		-		104.499.072		-		5.200.000						5.200.000	0	4,98		5.200.000	0	0,71		
			Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang			700.755.987		-		206.350.000		-		29.690.000						29.690.000	100	14,39		29.690.000	101,79	4,24		
			Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	56		0		57		0		57						57		100		57		101,79			
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.617.111.578		-		400.822.400		-		5.600.000						5.600.000	0	1,4		5.600.000	0	0,35		
			Terlaksananya koordinasi pemetaan data perkiraan dalam rangka pengendalian	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			1.063.500.000		-		91.800.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			553.611.578		-		309.022.400		-		5.600.000						5.600.000	0	1,81		5.600.000	0	1,01		
			Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**41.047.400.949**		-		**5.047.026.942**		**370.957.930**		**2.429.053.915**						**2.800.011.845**	**27,97**	**55,48**		**2.800.011.845**	**31,08**	**6,82**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,5		5,84		14,50		0		0						0		0		0		0			
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	18		20,5		20,00		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya			2.825.000.000		-		605.264.100		329.670		246.580.988						246.910.658	0	40,79		246.910.658	0	8,74		
			Terlaksananya kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.01.001 0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			-		-		30.000.000		-		13.320.000						13.320.000	0	44,4		13.320.000	0	0		
			Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.01.001 1	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam)			2.325.000.000		-		474.990.500		-		195.442.400						195.442.400	0	41,15		195.442.400	0	8,41		
			Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.01.001 2	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			500.000.000		-		100.273.600		329.670		37.818.588						38.148.258	0	38,04		38.148.258	0	7,63		
			Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			4.534.323.413		-		571.312.974		50.137.356		222.214.712						272.352.068	50	47,67		272.352.068	50	6,01		
			Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2214		1.566		2214		2.214		2.214						2.214		100		2.214		100			
				Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.02.000 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			2.142.000.000		-		51.634.440		-		20.644.800						20.644.800	100	39,98		20.644.800	100	0,96		
			Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2214		1.566		2214		2.214		2.214						2.214		100		2.214		100			
		2.14.03.2.02.000 7	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk			2.392.323.413		-		519.678.534		50.137.356		201.569.912						251.707.268	0	48,44		251.707.268	0	10,52		
			Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah			30.219.619.696		-		3.295.394.868		314.815.904		1.819.172.215						2.133.988.119	26,56	64,76		2.133.988.119	26,56	7,06		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terkendalinya pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1950		1.950		1950		521		1.033						1.554		79,69		1.554		79,69			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan			4.303.594.696		-		420.680.868		42.018.404		66.027.215						108.045.619	0	25,68		108.045.619	0	2,51		
			Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			25.848.525.000		-		2.861.214.000		272.797.500		1.753.145.000						2.025.942.500	79,69	70,81		2.025.942.500	79,69	7,84		
			Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1950		1.950		1950		521		1.033						1.554		79,69		1.554		79,69			
		2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan			67.500.000		-		13.500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam			3.468.457.840		-		575.055.000		5.675.000		141.086.000						146.761.000	50	25,52		146.761.000	50	4,23		
			Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	153		31		153		153		153						153		100		153		100			
		2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas			1.644.457.840		-		324.455.000		4.675.000		86.586.000						91.261.000	0	28,13		91.261.000	0	5,55		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			1.824.000.000		-		250.600.000		1.000.000		54.500.000						55.500.000	100	22,15		55.500.000	100	3,04		
			Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	153		31		153		153		153						153		100		153		100			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**102.468.643.132**		-		**23.294.490.311**		**228.964.519**		**4.538.220.574**						**4.767.185.093**	**7,47**	**20,46**		**4.767.185.093**	**8,71**	**4,65**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga	Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	67,8		71,2		59,8		0		0						0		0		0		0			
				Median Usia Kawin Pertama (MUKP) (Tahun)	22,8		21,9		22,45		0		0						0		0		0		0			
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	91,7		86,1		88,6		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			32.727.643.132		-		8.682.090.311		228.964.519		2.486.660.574						2.715.625.093	10,46	31,28		2.715.625.093	13,07	8,3		
			Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan kesejahteraan keluarga	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	10		10		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	0		0		155		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	153		308		153		0		80						80		52,29		80		52,29			
		2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			1.082.844.000		-		154.674.016		22.320.000		-						22.320.000	0	14,43		22.320.000	0	2,06		
			Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan			8.505.682.444		-		3.070.728.738		58.178.946		1.340.667.089						1.398.846.035	0	45,55		1.398.846.035	0	16,45		
			Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan			600.000.000		-		138.000.000		-		3.000.000						3.000.000	0	2,17		3.000.000	0	0,5		
			Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	10		10		6		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL			-		-		63.115.560		-		25.238.400						25.238.400	0	39,99		25.238.400	0	0		
			Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	0		0		155		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja			22.539.116.688		-		5.255.571.997		148.465.573		1.117.755.085						1.266.220.658	52,29	24,09		1.266.220.658	52,29	5,62		
			Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	153		308		153		0		80						80		52,29		80		52,29			
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam			69.741.000.000		-		14.612.400.000		-		2.051.560.000						2.051.560.000	0	14,04		2.051.560.000	0	2,94		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil			33.210.000.000		-		3.321.000.000		-		842.350.000						842.350.000	0	25,36		842.350.000	0	2,54		
			Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca			36.531.000.000		-		11.291.400.000		-		1.209.210.000						1.209.210.000	0	10,71		1.209.210.000	0	3,31		
			Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**3.389.348.321.121**		**572.134.045.753**		**710.236.391.610**		**89.964.133.473**		**139.919.410.626**						**229.883.544.099**	**52,88**	**32,37**		**229.883.544.099**	**58,96**	**6,78**		
		2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**357.381.268.186**		**62.579.107.471**		**70.410.693.256**		**13.205.871.202**		**17.471.543.001**						**30.677.414.203**	**61,77**	**43,57**		**30.677.414.203**	**85,98**	**8,58**	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekreteriatan pada bidang perhubungan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	92		95,7		92		96,82		96,71						96,71		105,12		96,71		105,12			
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			264.720.916		-		52.743.610		-		23.400.000						23.400.000	37,5	44,37		23.400.000	37,5	8,84		
			Terpenuhinya ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			264.720.916		-		52.743.610		-		23.400.000						23.400.000	37,5	44,37		23.400.000	37,5	8,84		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			296.117.218.811		51.031.347.659		58.398.664.297		12.349.943.179		14.957.412.656						27.307.355.835	92,92	46,76		27.307.355.835	91,02	9,22		
			Terpenuhinya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	245		242		240		223		223						223		92,92		223		91,02			
		2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			296.117.218.811		51.031.347.659		58.398.664.297		12.349.943.179		14.957.412.656						27.307.355.835	92,92	46,76		27.307.355.835	91,02	9,22		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	245		242		240		223		223						223		92,92		223		91,02			
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			21.365.000.000		3.244.751.939		3.916.281.400		435.995.715		876.520.056						1.312.515.771	66,67	33,51		1.312.515.771	15,38	6,14		
			Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik pada Dinas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13		13		3		1		1						2		66,67		2		15,38			
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			21.365.000.000		3.244.751.939		3.916.281.400		435.995.715		876.520.056						1.312.515.771	66,67	33,51		1.312.515.771	15,38	6,14		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13		13		3		1		1						2		66,67		2		15,38			
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39.634.328.459		8.303.007.873		8.043.003.949		419.932.308		1.614.210.289						2.034.142.597	50	25,29		2.034.142.597	200	5,13		
			Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		3		12		3		3						6		50		6		200			
		2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			39.634.328.459		8.303.007.873		8.043.003.949		419.932.308		1.614.210.289						2.034.142.597	50	25,29		2.034.142.597	200	5,13		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		3		12		3		3						6		50		6		200			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**1.578.793.327.061**		**316.585.058.157**		**377.827.661.666**		**39.672.002.058**		**59.106.565.801**						**98.778.567.859**	**46,8**	**26,14**		**98.778.567.859**	**51,2**	**6,26**	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya kualitas prasarana jalan	Persentase jalan kota yang terpenuhi prasarana jalannya (%)	98		90		92		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			1.116.622.304.435		231.095.189.352		294.795.116.281		30.488.902.043		37.503.728.439						67.992.630.482	54,95	23,06		67.992.630.482	80,28	6,09		
			Terselenggaranya prasarana jalan di Kota Surabaya	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	1000		6.022		10000		497		242						739		7,39		739		73,9			
				Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	142344		117.344		120344		123.366		123.366						123.366		102,51		123.366		86,67			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			389.440.627.224		97.643.937.653		150.524.116.876		361.419.046		6.652.505.368						7.013.924.414	7,39	4,66		7.013.924.414	73,9	1,8		
			Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	1000		6.022		10000		497		242						739		7,39		739		73,9				
		2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			727.181.677.211		133.451.251.699		144.270.999.405		30.127.482.997		30.851.223.071						60.978.706.068	102,51	42,27		60.978.706.068	86,67	8,39		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	142344		117.344		120344		123.366		123.366						123.366		102,51		123.366		86,67				
			Meningkatnya kualitas kelaikan kendaraan dalam kota	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan (%)	96		93,72		94		96,78		96,19						96,19		102,33		96,19		100,2				
				Persentase Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan pada ruas jalan yang rawan pelanggaran (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100				
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			33.867.120.983		7.153.515.044		6.487.742.499		1.038.592.430		1.737.325.620						2.775.918.050	0	42,79		2.775.918.050	0	8,2		
			Terpenuhinya kendaraan bermotor yang lulus uji KIR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	33		34		33		0		0						0		0		0		0				
		2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			33.867.120.983		7.153.515.044		6.487.742.499		1.038.592.430		1.737.325.620						2.775.918.050	0	42,79		2.775.918.050	0	8,2		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	33		34		33		0		0						0		0		0		0				
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			163.628.245.048		29.818.232.938		26.027.186.489		4.356.949.330		6.986.377.485						11.343.326.815	50	43,58		11.343.326.815	50	6,93		
			Terlaksananya pengawasan dan pengendalian jenis sarana angkutan jalan di Kota Surabaya	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50				
		2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			163.628.245.048		29.818.232.938		26.027.186.489		4.356.949.330		6.986.377.485						11.343.326.815	50	43,58		11.343.326.815	50	6,93		
			Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50				
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase angkutan umum (trunk dan feeder) dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan dan tersertifikasi sistem manajemen keselamatan (%)	100		100		100		33,33		33,33						33,33		33,33		33,33		33,33				
				Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota (Rasio)	21:21		21:21		21:21		21:21		21:21						21:21		100		21:21		100				
				Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya (%)	55		54,83		53		76,51		77,83						77,83		146,85		77,83		141,51				
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			76.302.648.689		15.965.764.824		13.823.089.766		2.367.798.181		4.148.327.782						6.516.125.963	100	47,14		6.516.125.963	100	8,54		
			Pengelolaan terminal angkutan umum Tipe C di Kota Surabaya	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	14		14		14		14		14						14		100		14		100				
		2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			76.302.648.689		15.965.764.824		13.823.089.766		2.367.798.181		4.148.327.782						6.516.125.963	100	47,14		6.516.125.963	100	8,54		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	14		14		14		14		14						14		100		14		100				
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah			8.561.733.375		1.391.527.940		1.701.022.343		115.844.178		732.255.793						848.099.971	50	49,86		848.099.971	50	9,91		
			Optimalisasi operasional layanan angkutan umum di Kota Surabaya melalui peningkatan kapasitas awak angkutan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2		2		2		0		1						1		50		1		50				
		2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar			8.561.733.375		1.391.527.940		1.701.022.343		115.844.178		732.255.793						848.099.971	50	49,86		848.099.971	50	9,91		
			Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2		2		2		0		1						1		50		1		50				
		2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			8.540.971.975		1.428.952.102		1.674.168.011		33.340.431		227.186.945						260.527.376	16,67	15,56		260.527.376	10	3,05		
			Tercapainya penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		4		6		0		1						1		16,67		1		10				
		2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			8.540.971.975		1.428.952.102		1.674.168.011		33.340.431		227.186.945						260.527.376	16,67	15,56		260.527.376	10	3,05		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		4		6		0		1						1		16,67		1		10			
			Meningkatnya kualitas lalu lintas	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota (Km/Jam)	45		48,52		45		0		48,85						48,85		108,56		48,85		108,56			
				Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio <= 0,90 (%)	90		96,43		90		0		100						100		111,11		100		111,11			
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			163.497.248.186		28.157.467.547		31.923.198.733		1.097.348.411		7.396.811.846						8.494.160.257	58,2	26,61		8.494.160.257	58,2	5,2		
			Terselenggaranya perlengkapan jalan di Kota Surabaya	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2500		2.714		2500		0		1.660						1.660		66,4		1.660		66,4			
				Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	9000		9.000		9000		2.250		2.250						4.500		50		4.500		50			
		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			53.764.150.000		7.928.168.232		10.207.025.123		-		2.153.631.263						2.153.631.263	66,4	21,1		2.153.631.263	66,4	4,01		
			Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2500		2.714		2500		0		1.660						1.660		66,4		1.660		66,4			
		2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			109.733.098.186		20.229.299.315		21.716.173.610		1.097.348.411		5.243.180.583						6.340.528.994	50	29,2		6.340.528.994	50	5,78		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	9000		9.000		9000		2.250		2.250						4.500		50		4.500		50			
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			7.773.054.370		1.574.408.410		1.396.137.544		173.227.054		374.551.891						547.778.945	25	39,24		547.778.945	25	7,05		
			Terlaksananya implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kota Surabaya	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	4		8		4		0		1						1		25		1		25			
		2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			7.773.054.370		1.574.408.410		1.396.137.544		173.227.054		374.551.891						547.778.945	25	39,24		547.778.945	25	7,05		
			Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	4		8		4		0		1						1		25		1		25			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**5.572.385.520**		**715.897.562**		**1.107.640.348**		-		**143.629.480**						**143.629.480**	**0**	**12,97**		**143.629.480**	**0**	**2,58**	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi Perairan	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat pemahaman Keselamatan Transportasi	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			5.572.385.520		715.897.562		1.107.640.348		-		143.629.480						143.629.480	0	12,97		143.629.480	0	2,58		
			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Keselamatan Perairan di Wilayah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		2.15.03.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1			5.572.385.520		715.897.562		1.107.640.348		-		143.629.480						143.629.480	0	12,97		143.629.480	0	2,58		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**2.15.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**			**24.058.481.493**		**4.942.015.676**		**4.318.143.691**		**744.368.363**		**1.151.684.391**						**1.896.052.754**	**0**	**43,91**		**1.896.052.754**	**0**	**7,88**	Dinas Perhubungan	
			Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi Kereta Api	Persentase Petugas Jaga Lintasan Kereta Api yang melaksanakan Upaya Pencegahan Kecelakaan	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			24.058.481.493		4.942.015.676		4.318.143.691		744.368.363		1.151.684.391						1.896.052.754	0	43,91		1.896.052.754	0	7,88		
			Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Perkeretaapian di Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		2.15.05.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian			24.058.481.493		4.942.015.676		4.318.143.691		744.368.363		1.151.684.391						1.896.052.754	0	43,91		1.896.052.754	0	7,88		
			Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**69.078.444.675**		**11.714.065.015**		**13.815.936.872**		-		**2.587.822.727**						**2.587.822.727**	**100**	**18,73**		**2.587.822.727**	**100**	**3,75**	UPTD Pengelolaan Transportasi Umum	
			Meningkatnya Tata Kelola Transportasi Umum Kota Surabaya	Persentase kepatuhan pelayanan transportasi umum (%)	70		60		62		0		94,58						94,58		152,55		94,58		135,11			
		2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			69.078.444.675		11.714.065.015		13.815.936.872		-		2.587.822.727						2.587.822.727	100	18,73		2.587.822.727	100	3,75		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Optimalisasi penyusunan laporan kegiatan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			69.078.444.675		11.714.065.015		13.815.936.872		-		2.587.822.727						2.587.822.727	100	18,73		2.587.822.727	100	3,75		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**1.184.579.525.754**		**163.728.556.014**		**207.159.648.023**		**30.454.434.142**		**51.701.005.377**						**82.155.439.519**	**92,46**	**39,66**		**82.155.439.519**	**73,31**	**6,94**	UPTD Pengelolaan Transportasi Umum	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat																		92,46				73,31			
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah			1.184.579.525.754		163.728.556.014		207.159.648.023		30.454.434.142		51.701.005.377						82.155.439.519	92,46	39,66		82.155.439.519	73,31	6,94		
			Optimalisasi operasional layanan angkutan umum di Kota Surabaya melalui cakupan layanan angkutan umum	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	251		183		199		184		184						184		92,46		184		73,31			
		2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah			1.184.579.525.754		163.728.556.014		207.159.648.023		30.454.434.142		51.701.005.377						82.155.439.519	92,46	39,66		82.155.439.519	73,31	6,94		
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	251		183		199		184		184						184		92,46		184		73,31			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**79.845.451.607**		**11.869.345.858**		**17.383.882.684**		**-**		**4.093.878.760**						**4.093.878.760**	**100**	**23,55**		**4.093.878.760**	**100**	**5,13**	UPTD Parkir Tepi Jalan Umum	
			Meningkatnya Tata Kelola Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya	Persentase kepatuhan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir (%)	85		80		80		94,63		96,16						96,16		120,2		96,16		113,13			
		2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			79.845.451.607		11.869.345.858		17.383.882.684		-		4.093.878.760						4.093.878.760	100	23,55		4.093.878.760	100	5,13		
			Optimalisasi penyusunan laporan kegiatan BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
		2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			79.845.451.607		11.869.345.858		17.383.882.684		-		4.093.878.760						4.093.878.760	100	23,55		4.093.878.760	100	5,13		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		1		1						1		100		1		100			
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**90.039.436.825**		**-**		**18.212.785.070**		**5.887.457.708**		**3.663.281.089**						**9.550.738.797**	**50**	**52,44**		**9.550.738.797**	**50**	**10,61**	UPTD Parkir Tepi Jalan Umum	
			Meningkatnya Kualitas sistem perparkiran	Persentase peningkatan pengelolaan titik parkir (%)	16		11		12		16,37		16,37						16,37		136,42		16,37		102,31			
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			90.039.436.825		-		18.212.785.070		5.887.457.708		3.663.281.089						9.550.738.797	50	52,44		9.550.738.797	50	10,61		
			Tersusunnya dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam Sistem Pelayanan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			90.039.436.825		-		18.212.785.070		5.887.457.708		3.663.281.089						9.550.738.797	50	52,44		9.550.738.797	50	10,61		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**623.555.696.160**		**84.819.994.683**		**120.155.493.917**		**5.660.879.932**		**28.967.317.033**						**34.628.196.965**	**63,44**	**28,82**		**34.628.196.965**	**65,18**	**5,55**		
		2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**102.121.125.146**		**16.072.800.975**		**19.831.494.425**		**3.731.872.520**		**5.225.069.178**						**8.956.941.698**	**59,25**	**45,17**		**8.956.941.698**	**72,65**	**8,77**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang komunikasi dan informatika	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	93,36		96,49		93,36		95,28		95,73						95,73		102,54		95,73		102,54			
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			339.633.200		-		25.791.200		-		13.660.000						13.660.000	37,5	52,96		13.660.000	37,5	4,02		
			Meningkatnya efektifitas penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Komunikasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			339.633.200		-		25.791.200		-		13.660.000						13.660.000	37,5	52,96		13.660.000	37,5	4,02		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			90.658.114.912		14.229.861.753		17.889.693.426		3.549.341.941		4.840.783.809						8.390.125.750	103,64	46,9		8.390.125.750	103,64	9,25		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		58		55		57		57						57		103,64		57		103,64			
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			90.658.114.912		14.229.861.753		17.889.693.426		3.549.341.941		4.840.783.809						8.390.125.750	103,64	46,9		8.390.125.750	103,64	9,25		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		58		55		57		57						57		103,64		57		103,64			
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.605.558.147		1.442.443.262		1.576.894.969		182.530.579		348.931.419						531.461.998	71,43	33,7		531.461.998	125	6,99		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		7		1		5						5		71,43		5		125			
		2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.605.558.147		1.442.443.262		1.576.894.969		182.530.579		348.931.419						531.461.998	71,43	33,7		531.461.998	125	6,99		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		7		1		5						5		71,43		5		125			
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.517.818.887		400.495.960		339.114.830		-		21.693.950						21.693.950	24,44	6,4		21.693.950	24,44	0,62		
			Meningkatnya pengelolaan sarana perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	90		90		90		10		12						22		24,44		22		24,44			
		2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.517.818.887		400.495.960		339.114.830		-		21.693.950						21.693.950	24,44	6,4		21.693.950	24,44	0,62		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	90		90		90		10		12						22		24,44		22		24,44			
	Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**85.856.522.516**		**15.986.322.854**		**20.838.729.652**		**763.478.089**		**2.568.266.882**						**3.331.744.971**	**55,55**	**15,99**		**3.331.744.971**	**50,74**	**3,88**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan dan permohonan informasi publik (%)	92,5		100		90,5		100		100						100		110,5		100		108,11			
				Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	75		0		71,00		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			85.856.522.516		15.986.322.854		20.838.729.652		763.478.089		2.568.266.882						3.331.744.971	55,55	15,99		3.331.744.971	50,74	3,88		
			Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	68		68		68		13		20						33		48,53		33		48,53			
				Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	30		54		30		8		14						22		73,33		22		73,33			
				Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	22		44		17		17		18						18		105,88		18		81,82			
		2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			10.036.052.609		1.290.073.350		1.470.308.176		168.197.198		294.730.609						462.927.807	48,53	31,49		462.927.807	48,53	4,61		
			Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	68		68		68		13		20						33		48,53		33		48,53			
		2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa			247.000.000		-		49.592.192		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			9.424.581.381		993.008.197		1.731.567.803		23.510.554		73.215.706						96.726.260	73,33	5,59		96.726.260	73,33	1,03		
			Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	30		54		30		8		14						22		73,33		22		73,33			
		2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			1.914.000.000		-		362.640.000		-		2.600.000						2.600.000	50	0,72		2.600.000	50	0,14		
			Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			64.234.888.526		13.703.241.307		17.224.621.481		571.770.337		2.197.720.567						2.769.490.904	105,88	16,08		2.769.490.904	81,82	4,31		
			Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	22		44		17		17		18						18		105,88		18		81,82			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**435.578.048.498**		**52.760.870.854**		**79.485.269.840**		**1.165.529.323**		**21.173.980.973**						**22.339.510.296**	**70,47**	**28,11**		**22.339.510.296**	**70,47**	**5,13**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan teknologi digital	Rata-rata nilai tingkat kematangan aspek teknologi digital (Nilai)	2,25		5		1,75		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			410.605.464.689		51.533.420.260		75.099.058.288		611.162.974		20.303.673.789						20.914.836.763	87,93	27,85		20.914.836.763	87,93	5,09		
			Meningkatnya pengelolaan pusat data dan jaringan intra	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	58		58		58		59		62						62		106,9		62		106,9			
				Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	58		58		58		59		62						62		106,9		62		106,9			
		2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			233.087.712.740		51.533.420.260		32.953.965.620		526.229.619		9.813.183.495						10.339.413.114	106,9	31,38		10.339.413.114	106,9	4,44		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	58		58		58		59		62						62		106,9		62		106,9			
		2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			51.296.204.425		-		5.350.856.311		29.634.024		97.081.422						126.715.446	50	2,37		126.715.446	50	0,25		
			Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet			126.221.547.524		-		36.794.236.357		55.299.331		10.393.408.872						10.448.708.203	106,9	28,4		10.448.708.203	106,9	8,28		
			Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	58		58		58		59		62						62		106,9		62		106,9			
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Level)	3		5		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			24.972.583.809		1.227.450.594		4.386.211.552		554.366.349		870.307.184						1.424.673.533	60	32,48		1.424.673.533	60	5,7		
			Meningkatnya tata kelola teknologi digital	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	7		7		7		7		7						7		100		7		100			
				Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	10		10		10		10		10						10		100		10		100			
				Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	12		0		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	6		6		6		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi			6.015.297.479		1.227.450.594		1.220.855.429		81.445.829		178.996.860						260.442.689	100	21,33		260.442.689	100	4,33		
			Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	7		7		7		7		7						7		100		7		100			
		2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi			1.069.331.335		-		214.706.267		18.233.422		39.395.396						57.628.818	100	26,84		57.628.818	100	5,39		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	10		10		10		10		10						10		100		10		100			
		2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			15.416.040.138		-		2.543.484.883		441.769.519		590.022.425						1.031.791.944	50	40,57		1.031.791.944	50	6,69		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan			1.314.448.177		-		194.391.637		12.917.579		41.892.503						54.810.082	50	28,2		54.810.082	50	4,17		
			Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	12		0		12		3		3						6		50		6		50			
		2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			1.157.466.680		-		212.773.336		-		20.000.000						20.000.000	0	9,4		20.000.000	0	1,73		
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	6		6		6		0		0						0		0		0		0			
		2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**192.106.054.408**		**33.450.130.175**		**38.378.189.048**		**7.623.577.802**		**10.318.308.231**						**17.941.886.033**	**60,79**	**46,75**		**17.941.886.033**	**68,59**	**9,34**		
		2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**160.472.033.387**		**28.631.301.291**		**31.771.915.054**		**6.991.078.626**		**8.732.278.164**						**15.723.356.790**	**52,07**	**49,49**		**15.723.356.790**	**53,4**	**9,8**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang koperasi, usaha kecil, dan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	94,63		95,73		94,23		96,12		96,19						96,19		102,08		96,19		101,65			
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			549.900.000		-		34.767.680		-		7.800.000						7.800.000	12,5	22,43		7.800.000	12,5	1,42		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			549.900.000		-		34.767.680		-		7.800.000						7.800.000	12,5	22,43		7.800.000	12,5	1,42		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			146.599.373.473		26.075.999.718		28.924.458.562		6.663.327.208		8.149.215.230						14.812.542.438	95,79	51,21		14.812.542.438	101,11	10,1		
			Meningkatnya ketepatan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	90		96		95		91		91						91		95,79		91		101,11			
		2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			146.599.373.473		26.075.999.718		28.924.458.562		6.663.327.208		8.149.215.230						14.812.542.438	95,79	51,21		14.812.542.438	101,11	10,1		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	90		96		95		91		91						91		95,79		91		101,11			
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.322.759.914		2.555.301.573		2.812.688.812		327.751.418		575.262.934						903.014.352	50	32,11		903.014.352	50	6,78		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.457.417.000		233.118.891		283.625.196		-		26.269.500						26.269.500	50	9,26		26.269.500	50	1,8		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya efektivitas pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			11.865.342.914		2.322.182.682		2.529.063.616		327.751.418		548.993.434						876.744.852	50	34,67		876.744.852	50	7,39		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**4.701.273.125**		**672.084.878**		**880.946.310**		**109.322.940**		**194.906.404**						**304.229.344**	**50,12**	**34,53**		**304.229.344**	**50,12**	**6,47**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (%)	90		99,28		86		19,48		48,46						48,46		56,35		48,46		53,84			
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah			4.701.273.125		672.084.878		880.946.310		109.322.940		194.906.404						304.229.344	50,12	34,53		304.229.344	50,12	6,47		
			Meningkatnya koperasi yang patuh tata kelola	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	421		415		421		84		127						211		50,12		211		50,12			
		2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah			4.701.273.125		672.084.878		880.946.310		109.322.940		194.906.404						304.229.344	50,12	34,53		304.229.344	50,12	6,47		
			Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	421		415		421		84		127						211		50,12		211		50,12			
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**2.071.480.000**		**160.510.000**		**432.295.200**		-		**187.600.000**						**187.600.000**	**100**	**43,4**		**187.600.000**	**119,53**	**9,06**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
																											Perdagangan	
			Meningkatnya koperasi berkinerja baik	Persentase koperasi yang memiliki kinerja baik (%)	81		62,89		78		0		39,19						39,19		50,24		39,19		48,38			
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.071.480.000		160.510.000		432.295.200		-		187.600.000						187.600.000	100	43,4		187.600.000	119,53	9,06		
			Meningkatnya SDM perkoperasian yang menerapkan pengetahuan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	128		103		153		0		153						153		100		153		119,53			
		2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			2.071.480.000		160.510.000		432.295.200		-		187.600.000						187.600.000	100	43,4		187.600.000	119,53	9,06		
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	128		103		153		0		153						153		100		153		119,53			
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			**3.342.456.427**		-		**1.009.945.832**		**47.931.986**		**268.344.786**						**316.276.772**	**77,5**	**31,32**		**316.276.772**	**117,5**	**9,46**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Meningkatnya kemampuan pengembangan usaha koperasi	Persentase koperasi yang dapat mengembangkan usahanya (%)	10		10		10		0		2,14						2,14		21,4		2,14		21,4			
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.342.456.427		-		1.009.945.832		47.931.986		268.344.786						316.276.772	77,5	31,32		316.276.772	117,5	9,46		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berkoperasi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	20		11		20		0		11						11		55		11		55			
				Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	85		83		153		0		153						153		100		153		180			
		2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi			721.949.285		-		363.933.809		23.544.304		36.535.975						60.080.279	55	16,51		60.080.279	55	8,32		
			Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	20		11		20		0		11						11		55		11		55			
		2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			2.620.507.142		-		646.012.023		24.387.682		231.808.811						256.196.493	100	39,66		256.196.493	180	9,78		
			Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	85		83		153		0		153						153		100		153		180			
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**14.192.935.222**		**2.618.969.150**		**2.772.284.788**		**390.328.709**		**634.232.665**						**1.024.561.374**	**55,42**	**36,96**		**1.024.561.374**	**51,67**	**7,22**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki akses sumber daya produktif (%)	27		40,26		25		0		0						0		0		0		0			
				Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	1,2		0		1		0,19		0,58						0,58		58		0,58		48,33			
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan			2.621.499.606		413.042.597		600.419.113		24.387.682		68.872.117						93.259.799	53,13	15,53		93.259.799	47,5	3,56		
			Meningkatnya pendampingan dan kemitraan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	200		136		200		0		100						100		50		100		50			
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	200		0		160		30		60						90		56,25		90		45			
		2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			1.519.366.406		413.042.597		362.643.113		24.387.682		60.232.117						84.619.799	50	23,33		84.619.799	50	5,57		
			Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	200		136		200		0		100						100		50		100		50			
		2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan			1.102.133.200		-		237.776.000		-		8.640.000						8.640.000	56,25	3,63		8.640.000	45	0,78		
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	200		0		160		30		60						90		56,25		90		45			
			Meningkatnya okupansi sentra usaha	Persentase sentra usaha yang meningkat okupansinya (%)	39		26,67		39		8,89		24,44						24,44		62,67		24,44		62,67			
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan			11.571.435.616		2.205.926.553		2.171.865.675		365.941.027		565.360.548						931.301.575	60	42,88		931.301.575	60	8,05		
			Meningkatnya Giat di Sentra Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	10		10		10		2		4						6		60		6		60			
		2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			11.571.435.616		2.205.926.553		2.171.865.675		365.941.027		565.360.548						931.301.575	60	42,88		931.301.575	60	8,05		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	10		10		10		2		4						6		60		6		60			
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**7.325.876.247**		**1.367.264.856**		**1.510.801.864**		**84.915.541**		**300.946.212**						**385.861.753**	**49,8**	**25,54**		**385.861.753**	**49,8**	**5,27**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Meningkatnya skala kinerja UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat skala kinerja usahanya (%)	11,83		88,08		6,64		2,01		4,09						4,09		61,6		4,09		34,57			
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			7.325.876.247		1.367.264.856		1.510.801.864		84.915.541		300.946.212						385.861.753	49,8	25,54		385.861.753	49,8	5,27		
			Meningkatnya usaha mikro yang bertransformasi dari	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	500		500		500		149		100						249		49,8		249		49,8			
		2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro			7.325.876.247		1.367.264.856		1.510.801.864		84.915.541		300.946.212						385.861.753	49,8	25,54		385.861.753	49,8	5,27		
			Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	500		500		500		149		100						249		49,8		249		49,8			
		2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**112.652.364.755**		**20.047.724.592**		**22.868.669.998**		**4.164.072.031**		**6.158.277.664**						**10.322.349.695**	**38,77**	**45,14**		**10.322.349.695**	**37,61**	**9,16**		
		2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**82.584.319.636**		**14.304.697.904**		**16.581.421.086**		**3.404.529.887**		**4.710.006.947**						**8.114.536.834**	**59,38**	**48,94**		**8.114.536.834**	**58,18**	**9,83**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang penanaman modal	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	95,12		96,97		94,92		97,12		97,14						97,14		102,34		97,14		102,12			
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			78.181.680		-		15.891.668		-		5.200.000						5.200.000	37,5	32,72		5.200.000	37,5	6,65		
			Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			78.181.680		-		15.891.668		-		5.200.000						5.200.000	37,5	32,72		5.200.000	37,5	6,65		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			65.266.903.979		10.266.624.134		12.879.530.557		3.039.340.927		3.759.797.554						6.799.138.481	100	52,79		6.799.138.481	95,24	10,42		
			Meningkatnya ketepatan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42		39		40		40		40						40		100		40		95,24			
		2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			65.266.903.979		10.266.624.134		12.879.530.557		3.039.340.927		3.759.797.554						6.799.138.481	100	52,79		6.799.138.481	95,24	10,42		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42		39		40		40		40						40		100		40		95,24			
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.239.233.977		4.038.073.770		3.685.998.861		365.188.960		945.009.393						1.310.198.353	50	35,55		1.310.198.353	50	7,6		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			707.398.200		108.470.200		126.649.400		-		6.900.000						6.900.000	50	5,45		6.900.000	50	0,98		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			16.531.835.777		3.929.603.570		3.559.349.461		365.188.960		938.109.393						1.303.298.353	50	36,62		1.303.298.353	50	7,88		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Efisiensi Investasi Daerah	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**2.728.211.356**		**547.923.739**		**547.993.122**		**54.279.991**		**110.078.470**						**164.358.461**	**0**	**29,99**		**164.358.461**	**0**	**6,02**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	
			Terealisasinya rencana nilai investasi oleh investor	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100		102,1		100,00		0		0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			2.728.211.356		547.923.739		547.993.122		54.279.991		110.078.470						164.358.461	0	29,99		164.358.461	0	6,02		
			Meningkatnya kesesuaian usaha dengan peta potensi dan peluang usaha	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			2.728.211.356		547.923.739		547.993.122		54.279.991		110.078.470						164.358.461	0	29,99		164.358.461	0	6,02		
			Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya Efisiensi Investasi Daerah	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**3.831.571.735**		**651.730.460**		**694.396.215**		**24.735.838**		**101.157.517**						**125.893.355**	**33,33**	**18,13**		**125.893.355**	**33,33**	**3,29**	Dinas Penanaman	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
																											Modal dan Pelayanan	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	7		4,6		5,00		0		0						0		0		0		0			
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			3.831.571.735		651.730.460		694.396.215		24.735.838		101.157.517						125.893.355	33,33	18,13		125.893.355	33,33	3,29		
			Intensifikasi Kegiatan Promosi Investasi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		3		3		0		1						1		33,33		1		33,33			
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			3.831.571.735		651.730.460		694.396.215		24.735.838		101.157.517						125.893.355	33,33	18,13		125.893.355	33,33	3,29		
			Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		3		3		0		1						1		33,33		1		33,33			
	Meningkatnya Efisiensi Investasi Daerah	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**19.045.510.898**		**3.646.872.741**		**4.138.788.532**		**572.966.200**		**1.018.122.981**						**1.591.089.181**	**45,28**	**38,44**		**1.591.089.181**	**42,02**	**8,35**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	
			Meningkatnya efektivitas pelayanan penanaman modal	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan			19.045.510.898		3.646.872.741		4.138.788.532		572.966.200		1.018.122.981						1.591.089.181	45,28	38,44		1.591.089.181	42,02	8,35		
			Meningkatnya pelayanan penerbitan perizinan non berusaha dan non perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	15000		14.918		14000		2.346		3.850						6.196		44,26		6.196		41,31			
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara			14.998.071.355		2.896.214.706		3.105.008.960		465.745.133		742.288.722						1.208.033.855	44,26	38,91		1.208.033.855	41,31	8,05		
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	15000		14.918		14000		2.346		3.850						6.196		44,26		6.196		41,31			
			Meningkatnya pelayanan penerbitan perizinan berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	13000		12.274		12000		2.218		3.338						5.556		46,3		5.556		42,74			
		2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			4.047.439.543		750.658.035		1.033.779.572		107.221.067		275.834.259						383.055.326	46,3	37,05		383.055.326	42,74	9,46		
			Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	13000		12.274		12000		2.218		3.338						5.556		46,3		5.556		42,74			
	Meningkatnya Efisiensi Investasi Daerah	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**3.796.054.355**		**781.226.440**		**790.797.708**		**94.603.033**		**194.819.246**						**289.422.279**	**26,3**	**36,6**		**289.422.279**	**25,4**	**7,62**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100		100		100,00		0		0						0		0		0		0			
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			3.796.054.355		781.226.440		790.797.708		94.603.033		194.819.246						289.422.279	26,3	36,6		289.422.279	25,4	7,62		
			Meningkatnya kualitas pendampingan terhadap penyampaian LKPM dan penyelesaian permasalahan pelaku usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	7		5		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	315		280		295		0		97						97		32,88		97		30,79			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	3100		2.980		3060		502		906						1.408		46,01		1.408		45,42			
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			693.636.420		-		161.471.925		25.157.034		35.845.227						61.002.261	0	37,78		61.002.261	0	8,79		
			Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	7		5		5		0		0						0		0		0		0			
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			647.438.640		161.411.500		127.443.810		-		24.970.000						24.970.000	32,88	19,59		24.970.000	30,79	3,86		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	315		280		295		0		97						97		32,88		97		30,79			
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			2.454.979.295		619.814.940		501.881.973		69.445.999		134.004.019						203.450.018	46,01	40,54		203.450.018	45,42	8,29		
			Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	3100		2.980		3060		502		906						1.408		46,01		1.408		45,42			
Meningkatnya Efisiensi Investasi Daerah		**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**666.696.775**		**115.273.308**		**115.273.335**		**12.957.082**		**24.092.503**						**37.049.585**	**25**	**32,14**		**37.049.585**	**25**	**5,56**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	
			Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100		105		100,00		100		100						100		100		100		100			
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			666.696.775		115.273.308		115.273.335		12.957.082		24.092.503						37.049.585	25	32,14		37.049.585	25	5,56		
			Terlaksananya pemutakhiran data investasi secara berkala	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	4		4		4		0		1						1		25		1		25			
		2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha			666.696.775		115.273.308		115.273.335		12.957.082		24.092.503						37.049.585	25	32,14		37.049.585	25	5,56		
			Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	4		4		4		0		1						1		25		1		25			
		2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**713.103.718.018**		**146.605.840.630**		**244.012.723.085**		**10.907.399.850**		**17.528.229.609**						**28.435.629.459**	**43,92**	**11,65**		**28.435.629.459**	**35,14**	**3,99**		
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Keolahragaan		**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**324.734.155.789**		**54.084.889.245**		**194.694.438.813**		**8.996.203.507**		**11.309.129.824**						**20.305.333.331**	**63,08**	**10,43**		**20.305.333.331**	**46,7**	**6,25**	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir (Persentase)	15		5		7,00		0		0						0		0		0		0			
				Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (Persentase)	17		7		9,00		0		0						0		0		0		0			
				Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	36		26,29		28,00		0		0						0		0		0		0			
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota			324.734.155.789		54.084.889.245		194.694.438.813		8.996.203.507		11.309.129.824						20.305.333.331	63,08	10,43		20.305.333.331	46,7	6,25		
			Meningkatnya kualitas pembinaan kepemudaan	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	700		700		700		0		243						243		34,71		243		34,71			
				Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	5500		5.874		3500		5.067		6.305						6.305		180,14		6.305		114,64			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	10		10		10		0		2						2		20		2		20			
				Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	859		831		859		0		150						150		17,46		150		17,46			
		2.19.02.2.01.001 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota			3.740.761.976		675.037.530		745.264.267		23.843.224		53.393.468						77.236.692	34,71	10,36		77.236.692	34,71	2,06		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	700		700		700		0		243						243		34,71		243		34,71			
		2.19.02.2.01.001 2	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi			307.619.666.630		51.277.493.701		191.228.403.476		8.738.832.995		10.879.388.328						19.618.221.323	180,14	10,26		19.618.221.323	114,64	6,38		
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	5500		5.874		3500		5.067		6.305						6.305		180,14		6.305		114,64			
		2.19.02.2.01.001 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat			2.435.432.292		422.258.452		496.569.201		47.471.361		73.172.589						120.643.950	20	24,3		120.643.950	20	4,95		
			Terlaksanaya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	10		10		10		0		2						2		20		2		20			
		2.19.02.2.01.001 5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor			10.938.294.891		1.710.099.562		2.224.201.869		186.055.927		303.175.439						489.231.366	17,46	22		489.231.366	17,46	4,47		
			Terlaksanaya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	859		831		859		0		150						150		17,46		150		17,46			
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Keolahragaan	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**388.369.562.229**		**92.520.951.385**		**49.318.284.272**		**1.911.196.343**		**6.219.099.785**						**8.130.296.128**	**24,75**	**16,49**		**8.130.296.128**	**23,57**	**2,09**	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Meningkatnya prasarana olahraga yang termanfaatkan	Persentase prasarana olahraga yang termanfaatkan (%)	100		65		75,00		100		100						100		133,33		100		100			
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah			120.376.750.068		8.751.363.245		6.018.990.627		60.000.000		289.458.946						349.458.946	0	5,81		349.458.946	0	0,29		
			Meningkatnya sebaran prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	71		74		10		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.01.000 5	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan			120.376.750.068		8.751.363.245		6.018.990.627		60.000.000		289.458.946						349.458.946	0	5,81		349.458.946	0	0,29		
			Terlaksanaya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	71		74		10		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			85.143.054.175		19.290.827.939		27.808.478.499		1.672.708.334		3.725.052.813						5.397.761.147	49,5	19,41		5.397.761.147	47,15	6,34		
			Meningkatnya kegiatan pemasyarakatan olahraga rekreasi	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	4		7		4		0		2						2		50		2		50			
				Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	447		393		404		90		108						198		49,01		198		44,3			
		2.19.03.2.05.000 7	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			15.274.731.236		1.251.291.950		5.242.781.698		-		117.125.000						117.125.000	50	2,23		117.125.000	50	0,77		
			Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	4		7		4		0		2						2		50		2		50			
		2.19.03.2.05.000 9	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan			69.868.322.939		18.039.535.989		22.565.696.801		1.672.708.334		3.607.927.813						5.280.636.147	49,01	23,4		5.280.636.147	44,3	7,56		
			Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	447		393		404		90		108						198		49,01		198		44,3			
			Meningkatnya atlet berprestasi	Persentase Atlet Berprestasi (%)	77,8		72		73,16		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			182.849.757.986		64.478.760.201		15.490.815.146		178.488.009		2.204.588.026						2.383.076.035	0	15,38		2.383.076.035	0	1,3		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya cabang olahraga prestasi yang dibina	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2414		785		2214		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			182.849.757.986		64.478.760.201		15.490.815.146		178.488.009		2.204.588.026						2.383.076.035	0	15,38		2.383.076.035	0	1,3		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2414		785		2214		0		0						0		0		0		0			
		2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**3.832.149.410**		-		**538.932.899**		**34.049.527**		**66.775.560**						**100.825.087**	**0**	**18,71**		**100.825.087**	**0**	**2,63**		
	Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**3.832.149.410**		-		**538.932.899**		**34.049.527**		**66.775.560**						**100.825.087**	**0**	**18,71**		**100.825.087**	**0**	**2,63**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik daerah	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			3.832.149.410		-		538.932.899		34.049.527		66.775.560						100.825.087	0	18,71		100.825.087	0	2,63		
			Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	88		80,82		76		0		0						0		0		0		0			
				Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	74		83,56		62		0		0						0		0		0		0			
				Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	93		89,83		81		0		0						0		0		0		0			
		2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional			2.431.937.410		-		377.063.699		34.049.527		61.575.560						95.625.087	0	25,36		95.625.087	0	3,93		
			Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	88		80,82		76		0		0						0		0		0		0			
		2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia			1.010.212.000		-		77.072.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	74		83,56		62		0		0						0		0		0		0			
		2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral			390.000.000		-		84.797.200		-		5.200.000						5.200.000	0	6,13		5.200.000	0	1,33		
			Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	93		89,83		81		0		0						0		0		0		0			
		2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**34.975.227.278**		-		**7.903.754.303**		**919.848.926**		**662.038.901**						**1.581.887.827**	**53,45**	**20,01**		**1.581.887.827**	**53,45**	**4,52**		
	Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**34.975.227.278**		-		**7.903.754.303**		**919.848.926**		**662.038.901**						**1.581.887.827**	**53,45**	**20,01**		**1.581.887.827**	**53,45**	**4,52**	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya Tata Kelola Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			34.975.227.278		-		7.903.754.303		919.848.926		662.038.901						1.581.887.827	53,45	20,01		1.581.887.827	53,45	4,52		
			Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	58		58		58		59		62						62		106,9		62		106,9			
				Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			32.907.007.133		-		7.297.811.684		884.168.782		607.245.826						1.491.414.608	106,9	20,44		1.491.414.608	106,9	4,53		
			Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	58		58		58		59		62						62		106,9		62		106,9			
		2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			2.068.220.145		-		605.942.619		35.680.144		54.793.075						90.473.219	0	14,93		90.473.219	0	4,37		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**221.813.856.127**		**41.315.215.361**		**48.992.067.975**		**6.815.398.299**		**11.493.142.841**						**18.308.541.140**	**60,32**	**37,37**		**18.308.541.140**	**55,61**	**8,25**		
		2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**129.360.314.244**		**22.618.827.253**		**25.795.263.664**		**5.726.084.181**		**7.217.557.173**						**12.943.641.354**	**53,13**	**50,18**		**12.943.641.354**	**53,13**	**10,01**	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kebudayaan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	94,75		95,21		94,35		95,09		95,44						95,44		101,16		95,44		100,73			
		2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			137.295.162		-		25.897.500		-		7.800.000						7.800.000	37,5	30,12		7.800.000	37,5	5,68		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		3						3		37,5		3		37,5			
		2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			137.295.162		-		25.897.500		-		7.800.000						7.800.000	37,5	30,12		7.800.000	37,5	5,68		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		3						3		37,5		3		37,5			
		2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			120.466.254.869		21.000.907.010		24.022.788.949		5.554.374.960		6.871.615.331						12.425.990.291	100	51,73		12.425.990.291	100	10,31		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	82		83		82		82		82						82		100		82		100			
		2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			120.466.254.869		21.000.907.010		24.022.788.949		5.554.374.960		6.871.615.331						12.425.990.291	100	51,73		12.425.990.291	100	10,31		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	82		83		82		82		82						82		100		82		100			
		2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.756.764.213		1.617.920.243		1.746.577.215		171.709.221		338.141.842						509.851.063	37,5	29,19		509.851.063	37,5	5,82		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa serta terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
		2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.720.738.999		253.840.446		369.657.403		-		18.892.353						18.892.353	50	5,11		18.892.353	50	1,1		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.036.025.214		1.364.079.797		1.376.919.812		171.709.221		319.249.489						490.958.710	25	35,66		490.958.710	25	6,98		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
	Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**23.521.860.327**		**6.289.655.325**		**8.649.510.319**		-		**1.918.404.580**						**1.918.404.580**	**50**	**22,18**		**1.918.404.580**	**25**	**8,16**	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (%)	100		90		100		20		40						40		40		40		40			
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			23.521.860.327		6.289.655.325		8.649.510.319		-		1.918.404.580						1.918.404.580	50	22,18		1.918.404.580	25	8,16		
			Meningkatnya upaya pelestarian budaya daerah	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	4		2		2		2		2						2		100		2		50			
				Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	60		20		20		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			22.612.083.057		6.289.655.325		8.450.932.119		-		1.892.004.580						1.892.004.580	100	22,39		1.892.004.580	50	8,37		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	4		2		2		2		2						2		100		2		50			
		2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			909.777.270		-		198.578.200		-		26.400.000						26.400.000	0	13,29		26.400.000	0	2,9		
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	60		20		20		0		0						0		0		0		0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**7.801.823.955**		**991.434.194**		**1.579.652.671**		**25.782.488**		**248.719.674**						**274.502.162**	**126,21**	**17,38**		**274.502.162**	**110,33**	**3,52**	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			7.801.823.955		991.434.194		1.579.652.671		25.782.488		248.719.674						274.502.162	126,21	17,38		274.502.162	110,33	3,52		
			Meningkatnya kualitas pembinaan kesenian daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	1113		1.446		973		1.057		1.228						1.228		126,21		1.228		110,33			
		2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			7.801.823.955		991.434.194		1.579.652.671		25.782.488		248.719.674						274.502.162	126,21	17,38		274.502.162	110,33	3,52		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	1113		1.446		973		1.057		1.228						1.228		126,21		1.228		110,33			
	Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**5.475.156.633**		**1.122.888.483**		**1.362.314.968**		-		**5.600.000**						**5.600.000**	**50**	**0,41**		**5.600.000**	**50**	**0,1**	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai sejarah lokal	Persentase masyarakat yang memahami nilai sejarah lokal (%)	82		78		79		0		81,62						81,62		103,32		81,62		99,54			
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.475.156.633		1.122.888.483		1.362.314.968		-		5.600.000						5.600.000	50	0,41		5.600.000	50	0,1		
			Meningkatnya kualitas pembinaan sejarah lokal	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	4		4		4		1		1						2		50		2		50			
		2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			5.475.156.633		1.122.888.483		1.362.314.968		-		5.600.000						5.600.000	50	0,41		5.600.000	50	0,1		
			Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	4		4		4		1		1						2		50		2		50			
	Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**5.901.317.145**		**1.024.381.165**		**1.428.720.419**		**108.666.217**		**282.009.507**						**390.675.724**	**37,59**	**27,34**		**390.675.724**	**37,59**	**6,62**	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Meningkatnya cagar budaya yang dimanfaatkan	Persentase Cagar Budaya yang termanfaatkan (%)	91,61		93,98		89,16		23,16		43,75						43,75		49,07		43,75		47,76			
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			5.901.317.145		1.024.381.165		1.428.720.419		108.666.217		282.009.507						390.675.724	37,59	27,34		390.675.724	37,59	6,62		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	285		280		285		79		64						143		50,18		143		50,18			
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	4		1		4		0		1						1		25		1		25			
		2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			4.709.737.225		1.024.381.165		1.173.080.419		108.666.217		265.009.507						373.675.724	50,18	31,85		373.675.724	50,18	7,93		
			Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	285		280		285		79		64						143		50,18		143		50,18			
		2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya			1.191.579.920		-		255.640.000		-		17.000.000						17.000.000	25	6,65		17.000.000	25	1,43		
			Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	4		1		4		0		1						1		25		1		25			
	Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**49.753.383.823**		**9.268.028.941**		**10.176.605.934**		**954.865.413**		**1.820.851.907**						**2.775.717.320**	**70,14**	**27,28**		**2.775.717.320**	**70,14**	**5,58**	UPTD Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya	
			Meningkatnya kunjungan ke museum	Persentase peningkatan kunjungan ke museum (%)	8		3		4		0		0						0		0		0		0			
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			49.753.383.823		9.268.028.941		10.176.605.934		954.865.413		1.820.851.907						2.775.717.320	70,14	27,28		2.775.717.320	70,14	5,58		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	1101		1.101		1101		270		520						520		47,23		520		47,23			
				Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	6		8		6		0		2						2		33,33		2		33,33			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	9		9		9		9		9						9		100		9		100			
		2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu			2.306.421.302		425.938.308		528.335.556		-		-						-	47,23	0		-	47,23	0		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	1101		1.101		1101		270		520						520		47,23		520		47,23			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			4.076.005.297		800.654.225		669.749.100		-		-						-	33,33	0		-	33,33	0		
			Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	6		8		6		0		2						2		33,33		2		33,33			
		2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			1.217.733.260		150.880.300		101.915.344		-		-						-	100	0		-	100	0		
			Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
		2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			42.153.223.964		7.890.556.108		8.876.605.934		954.865.413		1.820.851.907						2.775.717.320	100	31,27		2.775.717.320	100	6,58		
			Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	9		9		9		9		9						9		100		9		100			
		2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**203.345.976.997**		**19.620.259.187**		**41.449.938.788**		**8.242.421.581**		**11.052.601.080**						**19.295.022.661**	**72,6**	**46,55**		**19.295.022.661**	**69,45**	**9,49**		
		2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**113.116.722.507**		**18.701.365.835**		**23.672.631.624**		**5.200.694.568**		**6.448.606.397**						**11.649.300.965**	**59,76**	**49,21**		**11.649.300.965**	**52,26**	**10,3**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang perpustakaan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	98,09		99,17		98,09		99,23		99,25						99,25		101,18		99,25		101,18			
		2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			112.176.472		-		33.260.000		-		9.980.000						9.980.000	37,5	30,01		9.980.000	37,5	8,9		
			Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			112.176.472		-		33.260.000		-		9.980.000						9.980.000	37,5	30,01		9.980.000	37,5	8,9		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			96.718.248.382		16.794.380.911		19.877.771.415		4.723.273.932		5.718.111.794						10.441.385.726	101,54	52,53		10.441.385.726	101,54	10,8		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65		69		65		66		66						66		101,54		66		101,54			
		2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			96.718.248.382		16.794.380.911		19.877.771.415		4.723.273.932		5.718.111.794						10.441.385.726	101,54	52,53		10.441.385.726	101,54	10,8		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65		69		65		66		66						66		101,54		66		101,54			
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.872.539.368		67.007.985		340.569.067		15.491.160		46.000.720						61.491.880	50	18,06		61.491.880	20	3,28		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		4		0		2						2		50		2		20			
		2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.872.539.368		67.007.985		340.569.067		15.491.160		46.000.720						61.491.880	50	18,06		61.491.880	20	3,28		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		4		0		2						2		50		2		20			
		2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.413.758.285		1.839.976.939		3.421.031.142		461.929.476		674.513.883						1.136.443.359	50	33,22		1.136.443.359	50	7,88		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			14.413.758.285		1.839.976.939		3.421.031.142		461.929.476		674.513.883						1.136.443.359	50	33,22		1.136.443.359	50	7,88		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Meratanya Kualitas Pendidikan	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**89.974.789.565**		**918.893.352**		**17.724.237.164**		**3.041.727.013**		**4.603.994.683**						**7.645.721.696**	**111,9**	**43,14**		**7.645.721.696**	**110,98**	**8,5**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (%)	100		57,7		65,70		0		0						0		0		0		0			
				Persentase anggota perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan (%)	5,9		5,4		5,5		10,99		10,74						10,74		195,27		10,74		182,03			
				Persentase masyarakat yang dihasilkan menjadi pegiat literasi (%)	100		28,57		42,85		63,38		35,71						35,71		83,34		35,71		35,71			
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			87.014.990.636		472.362.021		16.413.309.947		2.978.635.847		4.414.888.657						7.393.524.504	124,98	45,05		7.393.524.504	124,89	8,5		
			Meningkatnya kualitas perpustakaan dan layanan baca	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	240		240		621		240		0						240		38,65		240		100			
				Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	307		50		307		0		100						100		32,57		100		32,57			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	21305		16.305		17305		25.510		31.369						56.879		328,69		56.879		266,97			
				Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	500		547		500		0		500						500		100		500		100			
		2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar			448.075.000		37.500.000		95.692.200		5.600.000		8.400.000						14.000.000	38,65	14,63		14.000.000	100	3,12		
			Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	240		240		621		240		0						240		38,65		240		100			
		2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			80.137.677.921		210.168.000		15.203.060.947		2.911.194.041		4.121.883.468						7.033.077.509	32,57	46,26		7.033.077.509	32,57	8,78		
			Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	307		50		307		0		100						100		32,57		100		32,57			
		2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat			5.077.710.860		-		863.500.557		21.972.500		222.450.180						244.422.680	328,69	28,31		244.422.680	266,97	4,81		
			Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	21305		16.305		17305		25.510		31.369						56.879		328,69		56.879		266,97			
		2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.351.526.855		224.694.021		251.056.243		39.869.306		62.155.009						102.024.315	100	40,64		102.024.315	100	7,55		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	500		547		500		0		500						500		100		500		100			
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.959.798.929		446.531.331		1.310.927.217		63.091.166		189.106.026						252.197.192	59,62	19,24		252.197.192	55,36	8,52		
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berliterasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	280		255		260		62		93						155		59,62		155		55,36			
		2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			2.959.798.929		446.531.331		1.310.927.217		63.091.166		189.106.026						252.197.192	59,62	19,24		252.197.192	55,36	8,52		
			Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	280		255		260		62		93						155		59,62		155		55,36			
Meratanya Kualitas Pendidikan		**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			**254.464.925**		-		**53.070.000**		-		-						-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase naskah kuno yang dilestarikan (%)	100		37,5		50		0		0						0		0		0		0			
		2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			254.464.925		-		53.070.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya pelestarian naskah kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	10		5		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			97.138.285		-		4.052.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	10		5		6		0		0						0		0		0		0			
		2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan			157.326.640		-		49.018.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**16.002.925.400**		**3.135.761.711**		**3.422.983.355**		**653.695.720**		**785.115.978**						**1.438.811.698**	**95,78**	**42,03**		**1.438.811.698**	**84,11**	**8,99**		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**16.002.925.400**		**3.135.761.711**		**3.422.983.355**		**653.695.720**		**785.115.978**						**1.438.811.698**	**95,78**	**42,03**		**1.438.811.698**	**84,11**	**8,99**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Meningkatnya pengelolaan arsip pada SIKN melalui JIKN	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (%)	28,55		11,93		15,25		13,89		15,05						15,05		98,69		15,05		52,71			
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			2.751.951.873		456.277.142		577.767.573		22.623.102		113.475.673						136.098.775	168,9	23,56		136.098.775	155,23	4,95		
			Pelaksanaan dokumentasi arsip dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	1200		5.478		1200		1.544		1.993						3.537		294,75		3.537		294,75			
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	630		130		230		61		38						99		43,04		99		15,71			
		2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			1.757.841.992		290.777.142		401.476.583		17.023.102		85.075.673						102.098.775	294,75	25,43		102.098.775	294,75	5,81		
			Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	1200		5.478		1200		1.544		1.993						3.537		294,75		3.537		294,75			
		2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			994.109.881		165.500.000		176.290.990		5.600.000		28.400.000						34.000.000	43,04	19,29		34.000.000	15,71	3,42		
			Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	630		130		230		61		38						99		43,04		99		15,71			
			Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian arsip	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (%)	34,89		30,55		30,78		30,51		30,75						30,75		99,9		30,75		88,13			
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			4.681.725.389		857.685.230		940.418.632		312.057.720		148.419.910						460.477.630	49,94	48,97		460.477.630	49,94	9,84		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	1666		880		1666		416		416						832		49,94		832		49,94			
		2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			4.681.725.389		857.685.230		940.418.632		312.057.720		148.419.910						460.477.630	49,94	48,97		460.477.630	49,94	9,84		
			Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	1666		880		1666		416		416						832		49,94		832		49,94			
		2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			7.301.995.444		1.580.034.306		1.664.261.811		280.689.244		459.659.853						740.349.097	91,16	44,49		740.349.097	60,17	10,14		
			Meningkatnya pengelolaan arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	600		300		396		242		119						361		91,16		361		60,17			
		2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			7.301.995.444		1.580.034.306		1.664.261.811		280.689.244		459.659.853						740.349.097	91,16	44,49		740.349.097	60,17	10,14		
			Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	600		300		396		242		119						361		91,16		361		60,17			
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan kearsipan unit kerja	Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan (%)	100		89,54		36,48		9,68		15,71						15,71		43,06		15,71		15,71			
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			1.267.252.694		241.765.033		240.535.339		38.325.654		63.560.542						101.886.196	0	42,36		101.886.196	0	8,04		
			Meningkatnya kualitas pengawasan kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	68		67		68		0		0						0		0		0		0			
		2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			1.267.252.694		241.765.033		240.535.339		38.325.654		63.560.542						101.886.196	0	42,36		101.886.196	0	8,04		
			Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	68		67		68		0		0						0		0		0		0			
		3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**20.902.578.373**		**2.661.376.578**		**5.002.377.928**		**421.341.618**		**768.482.060**						**1.189.823.678**	**35,93**	**23,79**		**1.189.823.678**	**35,6**	**5,69**		
	Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**5.293.544.480**		-		**1.182.880.075**		**82.093.586**		**116.078.188**						**198.171.774**	**0**	**16,75**		**198.171.774**	**0**	**3,74**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatnya nelayan yang memiliki sarana prasarana memadai	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai (%)	45		51,47		45		0		0						0		0		0		0			
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			5.293.544.480		-		1.182.880.075		82.093.586		116.078.188						198.171.774	0	16,75		198.171.774	0	3,74		
			Meningkatnya upaya pemberdayaan nelayan kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	65		65		65		0		0						0		0		0		0			
		3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil			5.293.544.480		-		1.182.880.075		82.093.586		116.078.188						198.171.774	0	16,75		198.171.774	0	3,74		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	65		65		65		0		0						0		0		0		0			
	Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**5.439.124.166**		**896.612.630**		**1.329.379.329**		**94.176.161**		**211.421.133**						**305.597.294**	**19,74**	**22,99**		**305.597.294**	**18,75**	**5,62**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pembudidaya perikanan yang konsisten berproduksi	Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan (Orang)	50		36		40		35		37						37		92,5		37		74			
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			1.452.274.462		206.983.905		492.831.087		-		48.600.000						48.600.000	39,47	9,86		48.600.000	37,5	3,35		
			Meningkatnya upaya pemberdayaan pembudidaya perikanan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	40		35		38		0		15						15		39,47		15		37,5			
		3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta			1.452.274.462		206.983.905		492.831.087		-		48.600.000						48.600.000	39,47	9,86		48.600.000	37,5	3,35		
			Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	40		35		38		0		15						15		39,47		15		37,5			
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			3.986.849.704		689.628.725		836.548.242		94.176.161		162.821.133						256.997.294	0	30,72		256.997.294	0	6,45		
			Meningkatnya upaya pendampingan pembudidaya perikanan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	63		65		63		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.986.849.704		689.628.725		836.548.242		94.176.161		162.821.133						256.997.294	0	30,72		256.997.294	0	6,45		
			Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	63		65		63		0		0						0		0		0		0			
	Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**1.839.059.752**		**120.038.130**		**365.620.600**		-		**10.782.400**						**10.782.400**	**38,04**	**2,95**		**10.782.400**	**38,04**	**0,59**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase Kepatuhan Nelayan Perikanan Tangkap (%)	95		95		95		15,86		47,59						47,59		50,09		47,59		50,09			
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat			1.839.059.752		120.038.130		365.620.600		-		10.782.400						10.782.400	38,04	2,95		10.782.400	38,04	0,59		
			Meningkatnya upaya pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	1768		1.768		1768		280		560						840		47,51		840		47,51			
				Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya (Pelaku Usaha)	105		105		105		0		30						30		28,57		30		28,57			
		3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			659.413.600		120.038.130		131.272.600		-		10.782.400						10.782.400	47,51	8,21		10.782.400	47,51	1,64		
			Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	1768		1.768		1768		280		560						840		47,51		840		47,51			
		3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam			1.179.646.152		-		234.348.000		-		-						-	28,57	0		-	28,57	0		
			Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya (Pelaku Usaha)	105		105		105		0		30						30		28,57		30		28,57			
	Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**8.330.849.975**		**1.644.725.818**		**2.124.497.924**		**245.071.871**		**430.200.339**						**675.272.210**	**100**	**31,79**		**675.272.210**	**100**	**8,11**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatnya kualitas pemasaran hasil usaha perikanan	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang aktif (%)	75		75		75		75		75						75		100		75		100			
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			8.330.849.975		1.644.725.818		2.124.497.924		245.071.871		430.200.339						675.272.210	100	31,79		675.272.210	100	8,11		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan sentra pemasaran hasil perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	180		180		180		180		180						180		100		180		100			
		3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			8.330.849.975		1.644.725.818		2.124.497.924		245.071.871		430.200.339						675.272.210	100	31,79		675.272.210	100	8,11		
			Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	180		180		180		180		180						180		100		180		100			
		3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**55.102.130.425**		**5.337.643.779**		**16.440.158.427**		**1.057.171.936**		**3.414.040.037**						**4.471.211.973**	**55,09**	**27,2**		**4.471.211.973**	**48,76**	**8,11**		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**7.180.320.470**		**977.163.077**		**1.706.488.366**		**43.633.622**		**201.160.017**						**244.793.639**	**49,58**	**14,34**		**244.793.639**	**45**	**3,41**	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Meningkatnya kunjungan wisatawan di Destinasi Wisata Kota Surabaya	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke destinasi Pariwisata Kota Surabaya (%)	7		2		3		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			1.287.147.400		-		267.106.302		22.823.704		53.109.006						75.932.710	73,33	28,43		75.932.710	55	5,9		
			Meningkatnya kualitas SDM stakeholder bidang pariwisata	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	80		80		60		20		24						44		73,33		44		55			
		3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelola Kawasan Strategis		1.287.147.400		-		267.106.302		22.823.704		53.109.006						75.932.710	73,33	28,43		75.932.710	55	5,9		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	80		80		60		20		24						44		73,33		44		55			
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			5.893.173.070		977.163.077		1.439.382.064		20.809.918		148.051.011						168.860.929	41,67	11,73		168.860.929	41,67	2,87		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi pariwisata daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	2		2		2		2		0						2		100		2		100			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	12		60		12		3		3						3		25		3		25			
		3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			740.000.000		137.600.000		148.000.000		-		21.200.000						21.200.000	0	14,32		21.200.000	0	2,86		
			Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			4.544.043.870		759.363.077		1.168.397.064		20.809.918		113.051.011						133.860.929	100	11,46		133.860.929	100	2,95		
			Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	2		2		2		2		0						2		100		2		100			
		3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			609.129.200		80.200.000		122.985.000		-		13.800.000						13.800.000	25	11,22		13.800.000	25	2,27		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	12		60		12		3		3						3		25		3		25			
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**11.466.202.983**		**3.060.060.327**		**6.453.766.225**		**99.723.017**		**1.474.928.895**						**1.574.651.912**	**63,33**	**24,4**		**1.574.651.912**	**55,88**	**13,73**	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	7		2		3		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			11.466.202.983		3.060.060.327		6.453.766.225		99.723.017		1.474.928.895						1.574.651.912	63,33	24,4		1.574.651.912	55,88	13,73		
			Meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata daerah	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	340		2		300		80		110						190		63,33		190		55,88			
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			11.466.202.983		3.060.060.327		6.453.766.225		99.723.017		1.474.928.895						1.574.651.912	63,33	24,4		1.574.651.912	55,88	13,73		
			Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	340		2		300		80		110						190		63,33		190		55,88			
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**			**393.360.240**		-		**116.283.200**		-		**5.600.000**						**5.600.000**	**50**	**4,82**		**5.600.000**	**28,57**	**1,42**	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Meningkatnya produk ekonomi kreatif yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk kreatif yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (%)	100		0		100		0		100						100		100		100		100			
		3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ			393.360.240		-		116.283.200		-		5.600.000						5.600.000	50	4,82		5.600.000	28,57	1,42		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya intensitas kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	7		0		4		0		2						2		50		2		28,57			
		3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual			393.360.240		-		116.283.200		-		5.600.000						5.600.000	50	4,82		5.600.000	28,57	1,42		
			Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	7		0		4		0		2						2		50		2		28,57			
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**6.888.311.783**		**1.300.420.375**		**1.505.797.985**		**141.719.010**		**251.848.168**						**393.567.178**	**29,09**	**26,14**		**393.567.178**	**25,6**	**5,71**	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Meningkatnya produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	Persentase pertumbuhan produk ekonomi kreatif (%)	12,5		0		25,00		0		0						0		0		0		0			
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			6.888.311.783		1.300.420.375		1.505.797.985		141.719.010		251.848.168						393.567.178	29,09	26,14		393.567.178	25,6	5,71		
			Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	250		220		220		34		30						64		29,09		64		25,6			
		3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			6.888.311.783		1.300.420.375		1.505.797.985		141.719.010		251.848.168						393.567.178	29,09	26,14		393.567.178	25,6	5,71		
			Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	250		220		220		34		30						64		29,09		64		25,6			
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**29.173.934.949**		**-**		**6.657.822.651**		**772.096.287**		**1.480.502.957**						**2.252.599.244**	**100**	**33,83**		**2.252.599.244**	**100**	**7,72**	UPTD Pengelolaan Obyek Wisata	
			Meningkatnya kunjungan wisatawan di Destinasi Wisata																		100				100			
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			29.173.934.949		-		6.657.822.651		772.096.287		1.480.502.957						2.252.599.244	100	33,83		2.252.599.244	100	7,72		
			Meningkatnya kunjungan ke THP Kenjeran dan Wisata Air Kalimas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
		3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata			29.173.934.949		-		6.657.822.651		772.096.287		1.480.502.957						2.252.599.244	100	33,83		2.252.599.244	100	7,72		
			Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
		3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**76.002.969.331**		**5.992.780.313**		**15.528.036.128**		**1.721.793.913**		**3.391.980.028**						**5.113.773.941**	**53,42**	**32,93**		**5.113.773.941**	**50,21**	**6,73**		
	Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**20.564.598.782**		**3.215.193.215**		**4.703.237.357**		**418.569.781**		**1.000.600.393**						**1.419.170.174**	**37,5**	**30,17**		**1.419.170.174**	**37,5**	**6,9**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatnya produksi hortikultura pertanian perkotaan	Produksi Hortikultura Pertanian Perkotaan (Ton)	8,74		8,23		8,33		7,81		20,17						20,17		242,14		20,17		230,78			
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			12.338.297.555		1.813.930.629		2.622.831.461		211.656.791		568.838.185						780.494.976	25	29,76		780.494.976	25	6,33		
			Meningkatnya upaya pendampingan dan pembinaan budidaya pertanian perkotaan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4		4		4		0		1						1		25		1		25			
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			12.338.297.555		1.813.930.629		2.622.831.461		211.656.791		568.838.185						780.494.976	25	29,76		780.494.976	25	6,33		
			Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4		4		4		0		1						1		25		1		25			
			Meningkatnya kualitas peternakan	Persentase sarana prasarana peternakan yang terstandarisasi (%)	100		100		100		25		50						50		50		50		50			
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah			8.226.301.227		1.401.262.586		2.080.405.896		206.912.990		431.762.208						638.675.198	50	30,7		638.675.198	50	7,76		
			Meningkatnya upaya pendampingan dan pembinaan budidaya peternakan	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			8.226.301.227		1.401.262.586		2.080.405.896		206.912.990		431.762.208						638.675.198	50	30,7		638.675.198	50	7,76		
			Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**34.833.493.415**		**-**		**6.370.957.372**		**803.040.996**		**1.365.991.271**						**2.169.032.267**	**0,1**	**34,05**		**2.169.032.267**	**0,1**	**6,23**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatnya produksi pertanian pada prasarana pertanian milik	Produksi pertanian pada lahan aset (Ton)	16		14		14		3,7		7,87						7,87		56,21		7,87		49,19			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			34.833.493.415		-		6.370.957.372		803.040.996		1.365.991.271						2.169.032.267	0,1	34,05		2.169.032.267	0,1	6,23		
			Meningkatnya usaha pengembangan prasarana	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	35975		35,975		35975		35,98		35,98						35,98		0,1		35,98		0,1			
		3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian			34.833.493.415		-		6.370.957.372		803.040.996		1.365.991.271						2.169.032.267	0,1	34,05		2.169.032.267	0,1	6,23		
			Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	35975		35,975		35975		35,98		35,98						35,98		0,1		35,98		0,1			
	Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**9.960.442.930**		**1.758.778.136**		**2.286.213.565**		**221.518.000**		**489.899.933**						**711.417.933**	**51,11**	**31,12**		**711.417.933**	**45,64**	**7,14**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatnya kualitas produksi peternakan dan pengendalian kesehatan hewan	Pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan (Unit Usaha)	12		14		8		2		4						4		50		4		33,33			
				Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah			3.109.090.427		1.593.165.456		640.390.633		47.960.278		70.252.665						118.212.943	50	18,46		118.212.943	50	3,8		
			Meningkatnya upaya pengendalian kesehatan hewan	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.109.090.427		1.593.165.456		640.390.633		47.960.278		70.252.665						118.212.943	50	18,46		118.212.943	50	3,8		
			Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.759.465.091		-		1.545.976.612		173.557.722		410.994.768						584.552.490	50	37,81		584.552.490	50	12,28		
			Meningkatnya kualitas pelayanan jasa laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			4.759.465.091		-		1.545.976.612		173.557.722		410.994.768						584.552.490	50	37,81		584.552.490	50	12,28		
			Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			2.091.887.412		165.612.680		99.846.320		-		8.652.500						8.652.500	53,33	8,67		8.652.500	36,92	0,41		
			Meningkatnya upaya pengawasan unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	65		40		45		12		12						24		53,33		24		36,92			
		3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan			2.091.887.412		165.612.680		99.846.320		-		8.652.500						8.652.500	53,33	8,67		8.652.500	36,92	0,41		
			Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	65		40		45		12		12						24		53,33		24		36,92			
	Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**10.644.434.204**		**1.018.808.962**		**2.167.627.834**		**278.665.136**		**535.488.431**						**814.153.567**	**99,48**	**37,56**		**814.153.567**	**94,81**	**7,65**	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase penyuluh yang memenuhi standar kompetensi (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			10.644.434.204		1.018.808.962		2.167.627.834		278.665.136		535.488.431						814.153.567	99,48	37,56		814.153.567	94,81	7,65		
			Meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	106		93		96		93		95						95		98,96		95		89,62			
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			5.266.647.824		1.018.808.962		1.148.664.939		180.114.379		310.329.218						490.443.597	100	42,7		490.443.597	100	9,31		
			Terlaksanaya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1		1		1		0		1						1		100		1		100			
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			5.377.786.380		-		1.018.962.895		98.550.757		225.159.213						323.709.970	98,96	31,77		323.709.970	89,62	6,02		
			Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	106		93		96		93		95						95		98,96		95		89,62			
		3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**80.022.405.540**		**13.932.417.312**		**15.502.640.848**		**2.229.243.723**		**3.087.438.441**						**5.316.682.164**	**49,58**	**34,3**		**5.316.682.164**	**49,26**	**6,64**		
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**5.219.945.095**		**844.787.174**		**1.054.964.789**		**80.467.592**		**200.068.490**						**280.536.082**	**57,18**	**26,59**		**280.536.082**	**57,18**	**5,37**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perdagangan	Persentase kepatuhan pelaku usaha. (%)	92,5		87		90,00		93,33		89,37						89,37		99,3		89,37		96,62			
		3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			1.438.272.550		265.951.390		287.509.100		23.610.832		60.835.975						84.446.807	56,44	29,37		84.446.807	56,44	5,87		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pembinaan / pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	450		455		450		90		164						254		56,44		254		56,44			
	3.30.02.2.01.0001		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui			1.438.272.550		265.951.390		287.509.100		23.610.832		60.835.975						84.446.807	56,44	29,37		84.446.807	56,44	5,87		
			Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	450		455		450		90		164						254		56,44		254		56,44			
	3.30.02.2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang			1.391.747.555		195.691.825		275.597.983		22.834.954		45.755.256						68.590.210	80,63	24,89		68.590.210	80,63	4,93		
			Terlaksananya pengawasan gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	160		415		160		76		53						129		80,63		129		80,63			
	3.30.02.2.02.0001		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			1.391.747.555		195.691.825		275.597.983		22.834.954		45.755.256						68.590.210	80,63	24,89		68.590.210	80,63	4,93		
			Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	160		415		160		76		53						129		80,63		129		80,63			
	3.30.02.2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri			596.974.995		97.582.466		118.019.235		11.389.352		21.704.503						33.093.855	50	28,04		33.093.855	50	5,54		
			Meningkatnya tindak lanjut atas pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)	24		27		24		6		6						12		50		12		50			
	3.30.02.2.03.0002		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam			596.974.995		97.582.466		118.019.235		11.389.352		21.704.503						33.093.855	50	28,04		33.093.855	50	5,54		
			Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)	24		27		24		6		6						12		50		12		50			
	3.30.02.2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri			304.000.000		41.400.000		60.800.000		-		9.500.000						9.500.000	50	15,63		9.500.000	50	3,13		
			Meningkatnya tindak lanjut atas pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri (Dokumen)	24		25		24		6		6						12		50		12		50			
	3.30.02.2.04.0002		Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri			304.000.000		41.400.000		60.800.000		-		9.500.000						9.500.000	50	15,63		9.500.000	50	3,13		
			Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri (Dokumen)	24		25		24		6		6						12		50		12		50			
	3.30.02.2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung			1.475.949.995		244.161.493		292.438.471		22.632.454		59.272.756						81.905.210	56	28,01		81.905.210	56	5,55		
			Meningkatnya verifikasi persetujuan teknis penjual langsung minuman beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	50		64		50		16		12						28		56		28		56			
	3.30.02.2.05.0001		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C			1.475.949.995		244.161.493		292.438.471		22.632.454		59.272.756						81.905.210	56	28,01		81.905.210	56	5,55		
			Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	50		64		50		16		12						28		56		28		56			
	3.30.02.2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi			13.000.000		-		20.600.000		-		3.000.000						3.000.000	50	14,56		3.000.000	50	23,08		
			Meningkatnya koordinasi terkait penerbitan Surat Keterangan Asal dengan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	2		0		2		0		1						1		50		1		50			
	3.30.02.2.07.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA			13.000.000		-		20.600.000		-		3.000.000						3.000.000	50	14,56		3.000.000	50	23,08		
			Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	2		0		2		0		1						1		50		1		50			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**27.583.642.175**		**5.038.094.266**		**5.312.131.137**		**801.344.676**		**1.333.719.117**						**2.135.063.793**	**49,26**	**40,19**		**2.135.063.793**	**49,26**	**7,74**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Meningkatnya omset pelaku usaha perdagangan	Persentase peningkatan omset pelaku usaha perdagangan (%)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			27.583.642.175		5.038.094.266		5.312.131.137		801.344.676		1.333.719.117						2.135.063.793	49,26	40,19		2.135.063.793	49,26	7,74		
			Meningkatnya sarana distribusi perdagangan yang terstandarisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	611		611		611		150		151						301		49,26		301		49,26			
		3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			27.583.642.175		5.038.094.266		5.312.131.137		801.344.676		1.333.719.117						2.135.063.793	49,26	40,19		2.135.063.793	49,26	7,74		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	611		611		611		150		151						301		49,26		301		49,26			
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**3.612.809.621**		**773.553.788**		**738.439.471**		**59.729.884**		**179.303.701**						**239.033.585**	**45,83**	**32,37**		**239.033.585**	**45,83**	**6,62**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga	Persentase ketersediaan komoditas bapokting (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			3.612.809.621		773.553.788		738.439.471		59.729.884		179.303.701						239.033.585	45,83	32,37		239.033.585	45,83	6,62		
			Terlaksananya Operasi Pasar dan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12		12		12		3		2						5		41,67		5		41,67			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam			2.187.490.863		513.997.463		441.888.053		36.219.330		89.537.226						125.756.556	41,67	28,46		125.756.556	41,67	5,75		
			Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12		12		12		3		2						5		41,67		5		41,67			
		3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1.425.318.758		259.556.325		296.551.418		23.510.554		89.766.475						113.277.029	50	38,2		113.277.029	50	7,95		
			Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**			**15.951.835.074**		**-**		**2.531.173.378**		**430.648.428**		**15.379.040**						**446.027.468**	**0**	**17,62**		**446.027.468**	**0**	**2,8**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Usaha Mikro yang memiliki kemampuan ekspor (%)	2,39		0,77		2,01		0		0						0		0		0		0			
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat			15.951.835.074		-		2.531.173.378		430.648.428		15.379.040						446.027.468	0	17,62		446.027.468	0	2,8		
			Meningkatnya transaksi/pemesanan Usaha Mikro skala nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	50		40		50		0		0						0		0		0		0			
		3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional			15.951.835.074		-		2.531.173.378		430.648.428		15.379.040						446.027.468	0	17,62		446.027.468	0	2,8		
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	50		40		50		0		0						0		0		0		0			
		3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**-**		**-**		**763.662.918**		**67.029.612**		**195.152.042**						**262.181.654**	**51,48**	**34,33**		**262.181.654**	**0**	**0**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			-		-		763.662.918		67.029.612		195.152.042						262.181.654	51,48	34,33		262.181.654	0	0		
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	0		0		24290		5.616		7.230						12.846		52,89		12.846		0			
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	0		0		1222		305		307						612		50,08		612		0			
		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			-		-		655.488.360		55.606.510		173.368.789						228.975.299	52,89	34,93		228.975.299	0	0		
			Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	0		0		24290		5.616		7.230						12.846		52,89		12.846		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			-		-		108.174.558		11.423.102		21.783.253						33.206.355	50,08	30,7		33.206.355	0	0		
			Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	0		0		1222		305		307						612		50,08		612		0			
Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan		**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			**24.460.009.003**		**6.653.401.446**		**5.102.269.155**		**790.023.531**		**1.163.816.051**						**1.953.839.582**	**57,51**	**38,29**		**1.953.839.582**	**57,51**	**7,99**	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Meningkatnya cakupan pemasaran usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang meningkat cakupan pemasarannya (%)	7		7		7		2,8		3,9						3,9		55,71		3,9		55,71			
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			24.460.009.003		6.653.401.446		5.102.269.155		790.023.531		1.163.816.051						1.953.839.582	57,51	38,29		1.953.839.582	57,51	7,99		
			Meningkatnya transaksi/pemesanan Usaha Mikro skala lokal	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	5220		5.360		5220		1.502		1.500						3.002		57,51		3.002		57,51			
		3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			24.460.009.003		6.653.401.446		5.102.269.155		790.023.531		1.163.816.051						1.953.839.582	57,51	38,29		1.953.839.582	57,51	7,99		
			Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	5220		5.360		5220		1.502		1.500						3.002		57,51		3.002		57,51			
Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan		**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**3.194.164.572**		**622.580.638**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**49,45**	**0**	UPTD Metrologi Legal	
			Meningkatnya Pelayanan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sesuai teknis kemetrologian	Persentase Alat UTTP yang Memenuhi syarat teknis kemetrologian (%)	92,84		92,34		92,44		30,2		66,43						66,43		71,86		66,43		71,55			
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			3.194.164.572		622.580.638		-		-		-						-	0	0		-	49,45	0		
			Meningkatnya Pengawasan dan Pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	26310		24.420		0		5.616		7.230						12.846		0		12.846		48,83			
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	1222		1.221		0		305		307						612		0		612		50,08			
		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			2.679.270.473		514.361.922		-		-		-						-	0	0		-	48,83	0		
			Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	26310		24.420		0		5.616		7.230						12.846		0		12.846		48,83			
		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			514.894.099		108.218.716		-		-		-						-	0	0		-	50,08	0		
			Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	1222		1.221		0		305		307						612		0		612		50,08			
		3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**5.829.813.601**		**1.193.572.820**		**1.147.423.360**		**50.203.131**		**255.097.273**						**305.300.404**	**25**	**26,61**		**305.300.404**	**25**	**5,24**		
Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan		**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**2.965.758.435**		**742.652.463**		**623.543.960**		**25.900.996**		**164.889.598**						**190.790.594**	**16,67**	**30,6**		**190.790.594**	**16,67**	**6,43**	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya pelaku usaha industri kecil menengah yang berorientasi ekspor	Persentase pelaku usaha industri kecil menengah yang memiliki kemampuan ekspor (%)	32		22		24,00		0		11,22						11,22		46,75		11,22		35,06			
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			2.965.758.435		742.652.463		623.543.960		25.900.996		164.889.598						190.790.594	16,67	30,6		190.790.594	16,67	6,43		
			Meningkatnya pendampingan peningkatan kualitas produk dan akses kemitraan pelaku	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			806.747.400		-		216.309.480		12.943.914		44.373.995						57.317.909	0	26,5		57.317.909	0	7,1		
			Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			565.463.635		117.237.500		112.925.000		-		46.200.000						46.200.000	0	40,91		46.200.000	0	8,17		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			1.593.547.400		625.414.963		294.309.480		12.957.082		74.315.603						87.272.685	50	29,65		87.272.685	50	5,48		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			**1.536.336.971**		**199.420.357**		**280.879.400**		**24.302.135**		**50.607.675**						**74.909.810**	**25**	**26,67**		**74.909.810**	**25**	**4,88**	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya pelaku usaha industri kecil menengah yang	Persentase Industri Kecil Menengah yang patuh (%)	33		23		25		5,63		16,73						16,73		66,92		16,73		50,7			
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin			1.536.336.971		199.420.357		280.879.400		24.302.135		50.607.675						74.909.810	25	26,67		74.909.810	25	4,88		
			Meningkatnya pengawasan terhadap pelaku usaha industri kecil menengah	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1		12		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	12		0		12		3		6						6		50		6		50			
		3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan			808.465.292		199.420.357		137.539.700		12.102.183		28.054.953						40.157.136	0	29,2		40.157.136	0	4,97		
			Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1		12		12		0		0						0		0		0		0			
		3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan			727.871.679		-		143.339.700		12.199.952		22.552.722						34.752.674	50	24,24		34.752.674	50	4,77		
			Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	12		0		12		3		6						6		50		6		50			
	Meningkatnya Produktivitas PDRB Sektor Unggulan	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**1.327.718.195**		**251.500.000**		**243.000.000**		-		**39.600.000**						**39.600.000**	**50**	**16,3**		**39.600.000**	**50**	**2,98**	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya kepatuhan penyampaian data pelaku usaha industri kecil menengah	Persentase kepatuhan penyampaian data industri kecil menengah (%)	100		76		81,00		28,17		39,1						39,1		48,27		39,1		39,1			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			1.327.718.195		251.500.000		243.000.000		-		39.600.000						39.600.000	50	16,3		39.600.000	50	2,98		
			Meningkatnya pelaporan operasional pelaku usaha industri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup			1.327.718.195		251.500.000		243.000.000		-		39.600.000						39.600.000	50	16,3		39.600.000	50	2,98		
			Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**3.264.727.496.189**		**285.672.017.244**		**349.423.269.705**		**52.982.254.456**		**83.584.060.274**						**136.566.314.730**	**39,44**	**39,08**		**136.566.314.730**	**39,44**	**4,18**		
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima baoi Masvarakat	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.266.155.318.570**		**224.933.101.687**		**217.256.250.182**		**34.537.012.549**		**52.582.294.338**						**87.119.306.887**	**59,86**	**40,1**		**87.119.306.887**	**59,86**	**6,88**	Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa penunjang	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang/Jasa Penunjang Tepat Waktu (%)	100		100		100		100		100						200		200		200		200			
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			48.830.350.616		15.499.129.921		9.354.870.673		2.115.889.000		2.525.649.000						4.641.538.000	67,86	49,62		4.641.538.000	67,86	9,51		
			Terlaksananya pengadaan barang/jasa penunjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	532		1.673		532		172		189						361		67,86		361		67,86			
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			48.830.350.616		15.499.129.921		9.354.870.673		2.115.889.000		2.525.649.000						4.641.538.000	67,86	49,62		4.641.538.000	67,86	9,51		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	532		1.673		532		172		189						361		67,86		361		67,86			
			Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan dan organisasi	Persentase kematangan perangkat daerah pada level 5 (%)	100		75		85		0		0						0		0		0		0			
				Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori sangat baik (%)	98		97		97,20		98,6		100						198,6		204,32		198,6		202,65			
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			7.195.525.912		1.392.867.090		1.522.815.977		54.531.268		242.527.204						297.058.472	0	19,51		297.058.472	0	4,13		
			Meningkatnya kualitas penataan organisasi Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			4.087.282.777		687.998.917		823.567.350		30.204.691		130.968.413						161.173.104	0	19,57		161.173.104	0	3,94		
			Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			3.108.243.135		704.868.173		699.248.627		24.326.577		111.558.791						135.885.368	0	19,43		135.885.368	0	4,37		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Persentase rekomendasi Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			780.000.000		-		17.467.712		-		7.800.000						7.800.000	12,5	44,65		7.800.000	12,5	1		
			Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			780.000.000		-		17.467.712		-		7.800.000						7.800.000	12,5	44,65		7.800.000	12,5	1		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			4.201.224.016		781.430.097		704.219.317		11.355.602		92.060.753						103.416.355	100	14,69		103.416.355	100	2,46		
			Terselenggaranya pendampingan penerapan akuntabilitas dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2		2		2		2		0						2		100		2		100			
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			4.201.224.016		781.430.097		704.219.317		11.355.602		92.060.753						103.416.355	100	14,69		103.416.355	100	2,46		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2		2		2		2		0						2		100		2		100			
			Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan dan kerumahtanggaan bagi KDH dan WKDH	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			68.609.821.847		10.572.848.460		13.421.578.471		1.800.122.280		2.098.482.141						3.898.604.421	100	29,05		3.898.604.421	100	5,68		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan serta biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
				Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
		4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.027.474.672		221.948.460		1.385.109.036		50.122.280		348.482.141						398.604.421	100	28,78		398.604.421	100	38,79		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
		4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			67.582.347.175		10.350.900.000		12.036.469.435		1.750.000.000		1.750.000.000						3.500.000.000	100	29,08		3.500.000.000	100	5,18		
			Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			105.955.637.566		16.901.052.585		10.615.070.791		1.333.421.625		1.668.626.709						3.002.048.334	50	28,28		3.002.048.334	50	2,83		
			Meningkatnya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			102.415.700.844		16.524.935.053		10.110.824.776		1.313.679.511		1.620.146.805						2.933.826.316	50	29,02		2.933.826.316	50	2,86		
			Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			3.539.936.722		376.117.532		504.246.015		19.742.114		48.479.904						68.222.018	50	13,53		68.222.018	50	1,93		
			Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	99		100		95		97,1		97,4						97,4		102,53		97,4		98,38			
				Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			400.336.413.340		68.844.529.441		79.005.500.342		18.585.867.878		23.110.907.839						41.696.775.717	147,77	52,78		41.696.775.717	147,77	10,42		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	157		236		157		232		232						232		147,77		232		147,77			
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			400.336.413.340		68.844.529.441		79.005.500.342		18.585.867.878		23.110.907.839						41.696.775.717	147,77	52,78		41.696.775.717	147,77	10,42		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	157		236		157		232		232						232		147,77		232		147,77			
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			630.246.345.273		110.941.244.093		102.614.726.899		10.635.824.896		22.836.240.692						33.472.065.588	50	32,62		33.472.065.588	50	5,31		
			Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			11.938.493.600		1.915.338.758		2.156.796.716		273.922.365		644.125.514						918.047.879	50	42,57		918.047.879	50	7,69		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.323.816.565		3.123.417.636		64.844.519.926		7.675.795.231		15.823.991.032						23.499.786.263	50	36,24		23.499.786.263	50	128,25		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			599.984.035.108		105.902.487.699		35.613.410.257		2.686.107.300		6.368.124.146						9.054.231.446	50	25,42		9.054.231.446	50	1,51		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**1.894.937.037.688**		**45.610.880.139**		**111.691.511.581**		**16.395.952.467**		**27.303.192.539**						**43.699.145.006**	**24,33**	**39,12**		**43.699.145.006**	**24,33**	**2,31**	Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya Kolaborasi Kerja Sama di berbagai Sektor	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama yang Optimal (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			7.445.169.294		1.002.524.567		1.382.150.911		51.152.869		261.446.019						312.598.888	0	22,62		312.598.888	0	4,2		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan dan Evaluasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			3.131.847.761		459.365.619		569.285.612		51.152.869		188.453.619						239.606.488	0	42,09		239.606.488	0	7,65		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			2.260.829.983		285.572.775		385.125.267		-		21.400.000						21.400.000	0	5,56		21.400.000	0	0,95		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			2.052.491.550		257.586.173		427.740.032		-		51.592.400						51.592.400	0	12,06		51.592.400	0	2,51		
			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kesejahteraan Rakyat	Persentase intervensi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan secara tepat sasaran (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			1.817.331.161.504		34.973.461.493		90.148.024.624		15.944.635.015		25.637.496.830						41.582.131.845	15,65	46,13		41.582.131.845	15,65	2,29		
			Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	608340		588.936		594000		3		3						6		0,00		6		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	21000		21.000		21000		9.858		9.858						9.858		46,94		9.858		46,94			
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			197.947.955.998		34.973.461.493		39.073.303.569		7.116.031.154		9.515.125.040						16.631.156.194	0	42,56		16.631.156.194	0	8,4		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			1.314.197.705.849		-		1.273.396.367		94.877.058		190.536.742						285.413.800	0,00	22,41		285.413.800	0	0,02		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	608340		588.936		594000		3		3						6		0,00		6		0			
		4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			305.185.499.657		-		49.801.324.688		8.733.726.803		15.931.835.048						24.665.561.851	46,94	49,53		24.665.561.851	46,94	8,08		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	21000		21.000		21000		9.858		9.858						9.858		46,94		9.858		46,94			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Kebijakan dan Regulasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	98		97		97,20		0		0						0		0		0		0			
				Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)	88		86		86		0		0						0		0		0		0			
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			22.598.745.818		2.576.914.985		3.342.680.190		168.218.565		486.007.895						654.226.460	50	19,57		654.226.460	50	2,89		
			Meningkatnya efektifitas penyusunan produk hukum daerah oleh Pemerintah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	60		60		60		15		15						30		50		30		50			
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	60		60		60		15		15						30		50		30		50			
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			15.999.563.875		1.740.442.769		2.174.662.583		111.986.056		361.111.989						473.098.045	50	21,76		473.098.045	50	2,96		
			Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	60		60		60		15		15						30		50		30		50			
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			6.599.181.943		836.472.216		1.168.017.607		56.232.509		124.895.906						181.128.415	50	15,51		181.128.415	50	2,74		
			Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	60		60		60		15		15						30		50		30		50			
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan	Kinerja SPM (Nilai)	97,83		97,33		97,43		0		0						0		0		0		0			
				Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Nilai)	3,6		3,57		3,2		0		0						0		0		0		0			
				Persentase jenis data yang telah disajikan pada aplikasi Basis Data Kewilayahan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Presentase pelaksanaan Kegiatan Pendataan Pilar Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			39.716.438.943		5.126.005.442		15.243.582.059		146.022.698		669.384.922						815.407.620	33,33	5,35		815.407.620	33,33	2,05		
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	2		2		2		2		0						2		100		2		100			
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			11.612.221.728		1.846.220.253		8.051.538.369		-		210.602.000						210.602.000	0	2,62		210.602.000	0	1,81		
			Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			18.588.039.723		1.717.589.017		5.697.239.478		55.579.834		207.654.466						263.234.300	0	4,62		263.234.300	0	1,42		
			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			9.516.177.492		1.562.196.172		1.494.804.212		90.442.864		251.128.456						341.571.320	100	22,85		341.571.320	100	3,59		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	2		2		2		2		0						2		100		2		100			
			Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum	Persentase Keberhasilan Pemberian Bantuan Hukum kepada Perangkat Daerah (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			7.845.522.129		1.931.973.652		1.575.073.797		85.923.320		248.856.873						334.780.193	45	21,25		334.780.193	45	4,27		
			Meningkatnya efektifitas penanganan permasalahan hukum oleh Pemerintah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	20		20		20		3		6						9		45		9		45			
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			7.845.522.129		1.931.973.652		1.575.073.797		85.923.320		248.856.873						334.780.193	45	21,25		334.780.193	45	4,27		
			Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	20		20		20		3		6						9		45		9		45			
	Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**103.635.139.931**		**15.128.035.418**		**20.475.507.942**		**2.049.289.440**		**3.698.573.397**						**5.747.862.837**	**30,08**	**28,07**		**5.747.862.837**	**30,08**	**5,55**	Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan BUMD	Persentase Terlaksananya Siklus Koordinasi Bidang Perekonomian dan Evaluasi BUMD (%)	100		100		100		33,3		66,6						99,9		99,9		99,9		99,9			
				Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	6,87		6,85		6,85		0		0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			11.059.279.251		1.512.880.423		1.958.750.000		480.400.000		383.927.700						864.327.700	0	44,13		864.327.700	0	7,82		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Perekonomian sesuai dengan Rekomendasi yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			7.473.480.105		976.517.862		1.251.740.000		368.400.000		318.400.000						686.800.000	0	54,87		686.800.000	0	9,19		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			3.585.799.146		536.362.561		707.010.000		112.000.000		65.527.700						177.527.700	0	25,11		177.527.700	0	4,95		
			Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			343.200.000		-		51.842.880		-		630.360						630.360	0	1,22		630.360	0	0,18		
			Meningkatnya Efektifitas Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			343.200.000		-		51.842.880		-		630.360						630.360	0	1,22		630.360	0	0,18		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan dan Pembangunan	Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya >= 75% (%)	85,5		85,63		85,5		0,15		1,01						1,16		1,36		1,16		1,36			
				Tingkat Kematangan UKPBJ (Nilai)	40		40		40		0		40						40		100		40		100			
				Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (%)	19,29		16,61		17,14		0		0						0		0		0		0			
				Persentase capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (%)	76		76		76		6,7		21,8						28,5		37,5		28,5		37,5			
				Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Nilai)	30		0		28,75		0		28,5						28,5		99,13		28,5		95			
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			45.630.269.518		7.803.005.122		9.123.043.499		678.452.124		1.145.491.838						1.823.943.962	46,88	19,99		1.823.943.962	46,88	4		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	16		16		16		2		5						7		43,75		7		43,75			
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			12.624.636.872		2.095.276.765		2.627.765.029		139.602.427		315.355.679						454.958.106	50	17,31		454.958.106	50	3,6		
			Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			33.005.632.646		5.707.728.357		6.495.278.470		538.849.697		830.136.159						1.368.985.856	43,75	21,08		1.368.985.856	43,75	4,15		
			Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	16		16		16		2		5						7		43,75		7		43,75			
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			32.032.036.861		3.794.253.921		6.480.952.869		716.666.172		1.132.602.725						1.849.268.897	42,33	28,53		1.849.268.897	42,33	5,77		
			Meningkatnya Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Menunjang Proses	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	20		25		20		6		6						12		60		12		60			
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	300		358		300		96		105						201		67		201		67			
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			22.802.972.161		3.633.253.921		5.205.179.310		674.636.353		991.775.725						1.666.412.078	60	32,01		1.666.412.078	60	7,31		
			Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	20		25		20		6		6						12		60		12		60			
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			7.696.064.700		-		969.173.559		32.729.819		104.027.000						136.756.819	0	14,11		136.756.819	0	1,78		
			Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			1.533.000.000		161.000.000		306.600.000		9.300.000		36.800.000						46.100.000	67	15,04		46.100.000	67	3,01		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	300		358		300		96		105						201		67		201		67			
			Tersedianya data harga bahan pokok penting yang akurat dan dapat diakses untuk mendukung pengambilan keputusan	Persentase penyediaan data harga bahan pokok penting yang akurat dan dapat diakses untuk mendukung pengambilan keputusan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			14.570.354.301		2.017.895.952		2.860.918.694		173.771.144		1.035.920.774						1.209.691.918	50	42,28		1.209.691.918	50	8,3		
			Meningkatnya kebijakan di bidang perekonomian sesuai dengan rekomendasi TPID	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			14.570.354.301		2.017.895.952		2.860.918.694		173.771.144		1.035.920.774						1.209.691.918	50	42,28		1.209.691.918	50	8,3		
			Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**1.042.014.589.545**		**194.983.046.900**		**233.538.959.143**		**44.099.418.115**		**50.622.997.856**						**94.722.415.971**	**80,15**	**40,56**		**94.722.415.971**	**80,15**	**9,09**		
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**731.289.144.349**		**117.090.850.649**		**150.873.414.537**		**23.522.686.750**		**28.909.442.470**						**52.432.129.220**	**66,36**	**34,75**		**52.432.129.220**	**66,36**	**7,17**	Sekretariat DPRD	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Sekretariat DPRD	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	93		92,95		93		94,7		94,3						94,3		101,4		94,3		101,4			
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			79.616.000		-		15.923.200		-		-						-	37,5	0		-	37,5	0		
			Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			79.616.000		-		15.923.200		-		-						-	37,5	0		-	37,5	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			75.123.683.972		12.807.770.701		14.819.563.581		3.241.624.450		4.070.440.923						7.312.065.373	100	49,34		7.312.065.373	100	9,73		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		52		50		50		50						50		100		50		100			
		4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			75.123.683.972		12.807.770.701		14.819.563.581		3.241.624.450		4.070.440.923						7.312.065.373	100	49,34		7.312.065.373	100	9,73		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		52		50		50		50						50		100		50		100			
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			151.013.422.158		28.609.631.590		31.326.742.283		4.449.055.328		6.873.874.799						11.322.930.127	100	36,14		11.322.930.127	100	7,5		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11		11		11		11		11						11		100		11		100			
		4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			151.013.422.158		28.609.631.590		31.326.742.283		4.449.055.328		6.873.874.799						11.322.930.127	100	36,14		11.322.930.127	100	7,5		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11		11		11		11		11						11		100		11		100			
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25.010.780.465		5.112.116.918		10.193.165.148		331.872.718		869.251.353						1.201.124.071	22,86	11,78		1.201.124.071	22,86	4,8		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	105		204		105		8		16						24		22,86		24		22,86			
		4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.010.780.465		5.112.116.918		10.193.165.148		331.872.718		869.251.353						1.201.124.071	22,86	11,78		1.201.124.071	22,86	4,8		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	105		204		105		8		16						24		22,86		24		22,86			
			Meningkatnya ketepatan fasilitasi perjalanan dinas DPRD	Persentase perjalanan dinas DPRD yang difasilitasi (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			204.480.114.698		19.241.958.587		39.205.297.465		2.529.734.076		3.987.969.948						6.517.704.024	66,67	16,62		6.517.704.024	66,67	3,19		
			Terlaksananya protokol dan komunikasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	96		96		96		26		38						64		66,67		64		66,67			
		4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			204.480.114.698		19.241.958.587		39.205.297.465		2.529.734.076		3.987.969.948						6.517.704.024	66,67	16,62		6.517.704.024	66,67	3,19		
			Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	96		96		96		26		38						64		66,67		64		66,67			
			Meningkatnya ketepatan layanan pendukung terhadap DPRD	Persentase pelaksanaan layanan pendukung DPRD yang difasilitasi (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			272.610.284.300		50.753.934.196		54.522.056.860		12.960.803.642		13.049.586.937						26.010.390.579	100	47,71		26.010.390.579	100	9,54		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	50		50		50		50		50						50		100		50		100			
		4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			272.610.284.300		50.753.934.196		54.522.056.860		12.960.803.642		13.049.586.937						26.010.390.579	100	47,71		26.010.390.579	100	9,54		
			Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	50		50		50		50		50						50		100		50		100			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			2.971.242.756		565.438.657		790.666.000		9.596.536		58.318.510						67.915.046	37,5	8,59		67.915.046	37,5	2,29		
			Meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian laporan perjalanan dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	8		11		8		1		2						3		37,5		3		37,5			
		4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			2.971.242.756		565.438.657		790.666.000		9.596.536		58.318.510						67.915.046	37,5	8,59		67.915.046	37,5	2,29		
			Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	8		11		8		1		2						3		37,5		3		37,5			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima baoi Masyarakat	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**310.725.445.196**		**77.892.196.251**		**82.665.544.606**		**20.576.731.365**		**21.713.555.386**						**42.290.286.751**	**99,44**	**51,16**		**42.290.286.751**	**99,44**	**13,61**	Sekretariat DPRD	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi DPRD dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	53,6		52,5		52,5		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			4.608.541.052		758.965.637		1.712.412.034		85.547.700		70.200.000						155.747.700	0	9,1		155.747.700	0	3,38		
			Terlaksananya Pembahasan dan Pengesahan Raperda dan/atau Rancangan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	6		8		6		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			4.608.541.052		758.965.637		1.712.412.034		85.547.700		70.200.000						155.747.700	0	9,1		155.747.700	0	3,38		
			Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	6		8		6		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			16.798.191.671		3.552.587.630		4.955.648.791		211.401.250		337.867.050						549.268.300	30,56	11,08		549.268.300	30,56	3,27		
			Terfasilitasinya Rapat terkait Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	36		44		36		7		4						11		30,56		11		30,56			
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			16.798.191.671		3.552.587.630		4.955.648.791		211.401.250		337.867.050						549.268.300	30,56	11,08		549.268.300	30,56	3,27		
			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	36		44		36		7		4						11		30,56		11		30,56			
			Meningkatnya ketepatan fasilitasi tugas dan fungsi utama DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			137.502.722.510		28.639.716.295		27.754.139.085		4.537.405.275		7.608.318.516						12.145.723.791	200	43,76		12.145.723.791	200	8,83		
			Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	2		13		2		2		4						6		300		6		300			
				Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	4		4		4		4		4						4		100		4		100			
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			3.071.610.070		596.000.000		1.125.000.000		127.000.055		183.000.000						310.000.055	300	27,56		310.000.055	300	10,09		
			Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	2		13		2		2		4						6		300		6		300			
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			134.431.112.440		28.043.716.295		26.629.139.085		4.410.405.220		7.425.318.516						11.835.723.736	100	44,45		11.835.723.736	100	8,8		
			Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	4		4		4		4		4						4		100		4		100			
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			151.815.989.963		44.940.926.689		48.243.344.696		15.742.377.140		13.697.169.820						29.439.546.960	66,67	61,02		29.439.546.960	66,67	19,39		
			Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	150		150		150		50		50						100		66,67		100		66,67			
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			151.815.989.963		44.940.926.689		48.243.344.696		15.742.377.140		13.697.169.820						29.439.546.960	66,67	61,02		29.439.546.960	66,67	19,39		
			Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	150		150		150		50		50						100		66,67		100		66,67			
		5.01	**PERENCANAAN**			**202.326.396.124**		**32.958.882.663**		**39.453.325.259**		**6.646.934.132**		**9.163.014.119**						**15.809.948.251**	**66,88**	**40,07**		**15.809.948.251**	**66,88**	**7,81**		
		5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**165.354.103.434**		**26.903.617.001**		**31.891.722.527**		**6.393.639.233**		**8.035.244.134**						**14.428.883.367**	**45,63**	**45,24**		**14.428.883.367**	**45,63**	**8,73**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang perencanaan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	96,07		97,91		95,69		98,18		98,5						98,5		102,94		98,5		102,53			
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			902.500.000		184.400.000		179.800.000		-		73.300.000						73.300.000	12,5	40,77		73.300.000	12,5	8,12		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			902.500.000		184.400.000		179.800.000		-		73.300.000						73.300.000	12,5	40,77		73.300.000	12,5	8,12		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			142.789.610.367		23.985.739.350		27.512.654.691		5.924.784.464		7.297.663.371						13.222.447.835	120	48,06		13.222.447.835	120	9,26		
			Meningkatnya ketepatan waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65		78		65		78		78						78		120		78		120			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			142.789.610.367		23.985.739.350		27.512.654.691		5.924.784.464		7.297.663.371						13.222.447.835	120	48,06		13.222.447.835	120	9,26		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65		78		65		78		78						78		120		78		120			
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			21.661.993.067		2.733.477.651		4.199.267.836		468.854.769		664.280.763						1.133.135.532	25	26,98		1.133.135.532	25	5,23		
			Meningkatnya ketersediaan barang jasa dan pelayanan umum perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
		5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.074.837.181		239.040.629		469.230.178		177.255.900		67.073.135						244.329.035	25	52,07		244.329.035	25	6		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			17.587.155.886		2.494.437.022		3.730.037.658		291.598.869		597.207.628						888.806.497	25	23,83		888.806.497	25	5,05		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**10.434.195.150**		**1.384.448.520**		**2.202.709.704**		**54.971.324**		**312.774.003**						**367.745.327**	**10**	**16,7**		**367.745.327**	**10**	**3,52**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Persentase hasil analisa data dan evaluasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			5.085.198.375		1.028.376.981		1.066.850.452		27.380.322		170.356.130						197.736.452	0	18,53		197.736.452	0	3,89		
			Terjaganya ketepatan penyusunan perencanaan pendanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3		3		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			5.085.198.375		1.028.376.981		1.066.850.452		27.380.322		170.356.130						197.736.452	0	18,53		197.736.452	0	3,89		
			Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3		3		2		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			5.348.996.775		356.071.539		1.135.859.252		27.591.002		142.417.873						170.008.875	20	14,97		170.008.875	20	3,18		
			Terjaganya ketepatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5		4		5		2		1						1		20		1		20			
		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			5.348.996.775		356.071.539		1.135.859.252		27.591.002		142.417.873						170.008.875	20	14,97		170.008.875	20	3,18		
			Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5		4		5		2		1						1		20		1		20			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**26.538.097.540**		**4.670.817.142**		**5.358.893.028**		**198.323.575**		**814.995.982**						**1.013.319.557**	**100**	**18,91**		**1.013.319.557**	**100**	**3,82**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	98,83		98,56		98,63		98,29		97,44						97,44		98,79		97,44		98,59			
				Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	99		85		90,00		100		100						100		111,11		100		101,01			
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			7.752.557.129		1.533.460.619		1.553.554.979		72.354.030		290.201.322						362.555.352	100	23,34		362.555.352	100	4,68		
			Terjaganya ketepatan perencanaan Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	2		2		2		0		2						2		100		2		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	2		2		2		0		2						2		100		2		100			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			3.993.823.774		759.465.106		761.734.971		33.482.784		138.887.156						172.369.940	100	22,63		172.369.940	100	4,32		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	2		2		2		0		2						2		100		2		100			
		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			3.758.733.355		773.995.513		791.820.008		38.871.246		151.314.166						190.185.412	100	24,02		190.185.412	100	5,06		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	2		2		2		0		2						2		100		2		100			
			Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	98,83		98,56		98,63		96,05		97,37						97,37		98,72		97,37		98,52			
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	99		85		90,00		100		100						100		111,11		100		101,01			
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			8.963.948.981		1.301.615.725		1.800.619.763		37.218.758		210.896.090						248.114.848	100	13,78		248.114.848	100	2,77		
			Terjaganya ketepatan perencanaan Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	2		2		2		0		2						2		100		2		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	2		2		2		0		2						2		100		2		100			
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			4.367.873.021		618.316.430		859.271.234		11.423.102		84.503.253						95.926.355	100	11,16		95.926.355	100	2,2		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	2		2		2		0		2						2		100		2		100			
		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			4.596.075.960		683.299.295		941.348.529		25.795.656		126.392.837						152.188.493	100	16,17		152.188.493	100	3,31		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	2		2		2		0		2						2		100		2		100			
			Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	98,83		98,56		98,63		99,66		98,63						98,63		100		98,63		99,8			
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	99		85		90,00		100		100						100		111,11		100		101,01			
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			9.821.591.430		1.835.740.798		2.004.718.286		88.750.787		313.898.570						402.649.357	100	20,09		402.649.357	100	4,1		
			Terjaganya ketepatan perencanaan Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	2		2		2		0		2						2		100		2		100			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2		2		2		0		2						2		100		2		100			
		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			3.748.644.105		674.204.576		748.928.821		50.037.551		143.691.019						193.728.570	100	25,87		193.728.570	100	5,17		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	2		2		2		0		2						2		100		2		100			
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			6.072.947.325		1.161.536.222		1.255.789.465		38.713.236		170.207.551						208.920.787	100	16,64		208.920.787	100	3,44		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2		2		2		0		2						2		100		2		100			
		5.02	**KEUANGAN**			**1.492.396.079.372**		**142.487.867.297**		**311.345.048.448**		**33.649.549.064**		**45.964.211.223**						**79.613.760.287**	**45,44**	**25,57**		**79.613.760.287**	**45,06**	**5,33**		
	Meningkatnya Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**273.994.783.008**		**46.868.673.538**		**54.788.151.132**		**11.639.713.906**		**14.681.198.505**						**26.320.912.411**	**57,34**	**48,04**		**26.320.912.411**	**57,34**	**9,61**	Badan Pendapatan Daerah	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya efektivitas perangkat daerah dalam pengelolaan dan penerapan kebijakan retribusi daerah	Persentase PD yang capaian retribusinya meningkat (%)	85,71		75		71,43		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			1.201.553.521		239.684.031		257.992.210		30.377.824		68.018.619						98.396.443	50	38,14		98.396.443	50	8,19		
			Terlaksananya implementasi rekomendasi strategis kebijakan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
		5.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			1.201.553.521		239.684.031		257.992.210		30.377.824		68.018.619						98.396.443	50	38,14		98.396.443	50	8,19		
			Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang keuangan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	96,22		96,33		96		96,7		96,81						96,81		100,84		96,81		100,61			
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			902.500.000		-		222.532.000		-		57.400.000						57.400.000	37,5	25,79		57.400.000	37,5	6,36		
			Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			902.500.000		-		222.532.000		-		57.400.000						57.400.000	37,5	25,79		57.400.000	37,5	6,36		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			230.472.343.735		39.118.852.832		45.699.965.058		10.546.071.543		12.747.126.178						23.293.197.721	99,22	50,97		23.293.197.721	99,22	10,11		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	128		130		128		127		127						127		99,22		127		99,22			
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			230.472.343.735		39.118.852.832		45.699.965.058		10.546.071.543		12.747.126.178						23.293.197.721	99,22	50,97		23.293.197.721	99,22	10,11		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	128		130		128		127		127						127		99,22		127		99,22			
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41.418.385.752		7.510.136.675		8.607.661.864		1.063.264.539		1.808.653.708						2.871.918.247	50	33,36		2.871.918.247	50	6,93		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran serta meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.803.597.300		2.023.384.354		2.711.655.582		340.020.625		389.571.415						729.592.040	50	26,91		729.592.040	50	6,18		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			29.614.788.452		5.486.752.321		5.896.006.282		723.243.914		1.419.082.293						2.142.326.207	50	36,34		2.142.326.207	50	7,23		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**1.928.121.296**		**392.199.103**		**428.687.600**		**56.007.629**		**111.397.146**						**167.404.775**	**50**	**39,05**		**167.404.775**	**50**	**8,68**	Badan Pendapatan Daerah	
			Optimalisasi tata kelola dana transfer	Persentase kesesuaian penyaluran dana transfer sesuai dengan ketentuan peraturan undangan (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1.928.121.296		392.199.103		428.687.600		56.007.629		111.397.146						167.404.775	50	39,05		167.404.775	50	8,68		
			Terjagannya kesesuaian pelaporan penyaluran pendapatan transfer	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	4		4		4		1		1						2		50		2		50			
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan			1.928.121.296		392.199.103		428.687.600		56.007.629		111.397.146						167.404.775	50	39,05		167.404.775	50	8,68		
			Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	4		4		4		1		1						2		50		2		50			
	Meningkatnya Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**94.498.143.954**		**25.100.568.449**		**26.847.920.209**		**3.919.450.719**		**5.945.318.393**						**9.864.769.112**	**65,21**	**36,74**		**9.864.769.112**	**64,49**	**10,44**	Badan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya pajak daerah pada sektor Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame, PPJ, Air Tanah	Persentase Capaian Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame, PPJ, Air Tanah (%)	98,81		93,04		98,77		21,29		44,85						44,85		45,41		44,85		45,39			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			52.005.315.616		13.590.907.869		14.127.258.741		2.209.243.897		2.654.014.728						4.863.258.625	50	34,42		4.863.258.625	50	9,35		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			32.700.179.334		6.477.360.931		11.061.189.450		1.178.284.202		1.836.777.665						3.015.061.867	50	27,26		3.015.061.867	50	9,22		
			Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			19.305.136.282		7.113.546.938		3.066.069.291		1.030.959.695		817.237.063						1.848.196.758	50	60,28		1.848.196.758	50	9,57		
			Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya pajak daerah pada sektor pajak PBB, BPHTB	Persentase Capaian PBB, BPHTB (%)	88,53		84,02		88,49		14,5		48,52						48,52		54,83		48,52		54,81			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			40.978.952.680		7.746.489.170		9.039.866.987		1.073.735.468		2.389.735.159						3.463.470.627	88,02	38,31		3.463.470.627	86,22	8,45		
			Terlaksananya Kepatuhan Wajib Pajak	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	21221		24.240		20615		4.763		21.221						25.984		126,04		25.984		122,44			
		5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah			24.136.551.112		4.672.540.608		5.487.272.248		652.949.452		1.409.890.208						2.062.839.660	126,04	37,59		2.062.839.660	122,44	8,55		
			Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	21221		24.240		20615		4.763		21.221						25.984		126,04		25.984		122,44			
			Terlaksananya Pembayaran Piutang PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			16.842.401.568		3.073.948.562		3.552.594.739		420.786.016		979.844.951						1.400.630.967	50	39,43		1.400.630.967	50	8,32		
			Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
			Meningkatnya capaian retribusi daerah	Persentase capaian retribusi daerah (%)	84,6		190,3		84,56		17,46		39,68						39,68		46,93		39,68		46,9			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1.513.875.658		3.763.171.410		3.680.794.481		636.471.354		901.568.506						1.538.039.860	50	41,79		1.538.039.860	50	101,6		
			Terlaksananya Kegiatan Monev Pendapatan Bukan Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	4		4		4		1		1						2		50		2		50			
		5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			1.513.875.658		3.763.171.410		3.680.794.481		636.471.354		901.568.506						1.538.039.860	50	41,79		1.538.039.860	50	101,6		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	4		4		4		1		1						2		50		2		50			
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**210.230.845.029**		**31.926.028.312**		**55.793.168.120**		**8.348.274.258**		**10.626.663.229**						**18.974.937.487**	**54,85**	**34,01**		**18.974.937.487**	**54,85**	**9,03**	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang keuangan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	96,23		96,24		94,63		96,93		96,84						96,84		102,34		96,84		100,63			
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			110.597.087		-		15.131.200		5.200.000		-						5.200.000	12,5	34,37		5.200.000	12,5	4,7		
			Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			110.597.087		-		15.131.200		5.200.000		-						5.200.000	12,5	34,37		5.200.000	12,5	4,7		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			193.189.892.485		29.425.392.766		52.025.953.333		7.966.425.590		9.923.910.259						17.890.335.849	106,9	34,39		17.890.335.849	106,9	9,26		
			Meningkatnya ketepatan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	87		94		87		93		93						93		106,9		93		106,9			
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			193.189.892.485		29.425.392.766		52.025.953.333		7.966.425.590		9.923.910.259						17.890.335.849	106,9	34,39		17.890.335.849	106,9	9,26		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	87		94		87		93		93						93		106,9		93		106,9			
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.930.355.457		2.500.635.546		3.752.083.587		376.648.668		702.752.970						1.079.401.638	50	28,77		1.079.401.638	50	6,38		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.005.981.681		322.702.160		496.712.900		-		82.998.259						82.998.259	50	16,71		82.998.259	50	2,76		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			13.924.373.776		2.177.933.386		3.255.370.687		376.648.668		619.754.711						996.403.379	50	30,61		996.403.379	50	7,16		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**740.486.538.743**		**11.545.751.027**		**141.608.559.331**		**4.767.665.150**		**6.578.405.880**						**11.346.071.030**	**18,41**	**8,01**		**11.346.071.030**	**18,19**	**1,53**	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Kesesuaian Alokasi Mandatory Spending (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			17.750.928.168		3.429.101.961		3.847.573.382		472.071.608		637.032.678						1.109.104.286	0	28,83		1.109.104.286	0	6,25		
			Terjaminnya kualitas penyusunan penganggaran	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			5.670.247.000		1.173.282.885		1.160.078.560		207.146.000		216.446.000						423.592.000	0	36,51		423.592.000	0	7,47		
			Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			1.416.307.675		316.096.730		351.251.300		9.300.000		87.900.000						97.200.000	0	27,67		97.200.000	0	6,86		
			Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran			3.417.301.605		700.491.817		852.019.107		54.217.120		95.437.826						149.654.946	0	17,56		149.654.946	0	4,38		
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang			7.247.071.888		1.239.230.529		1.484.224.415		201.408.488		237.248.852						438.657.340	0	29,55		438.657.340	0	6,05		
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	70		70		70		0		0						0		0		0		0			
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	4		120,48		6,68		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			500.300.030.727		6.435.433.201		127.162.668.112		3.782.309.376		4.300.547.743						8.082.857.119	34,98	6,36		8.082.857.119	34,25	1,62		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	244		244		244		58		59						117		47,95		117		47,95			
				Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			3.236.093.728		566.331.112		658.499.087		111.383.783		174.998.163						286.381.946	47,95	43,49		286.381.946	47,95	8,85		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	244		244		244		58		59						117		47,95		117		47,95			
		5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah			492.268.237.567		4.883.609.874		125.506.599.742		3.549.163.049		3.871.335.218						7.420.498.267	0	5,91		7.420.498.267	0	1,51		
			Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	104440		123.181		100440		21.274		35.969						57.243		56,99		57.243		54,81			
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi			4.795.699.432		985.492.215		997.569.283		121.762.544		254.214.362						375.976.906	56,99	37,69		375.976.906	54,81	7,84		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	104440		123.181		100440		21.274		35.969						57.243		56,99		57.243		54,81			
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			215.500.000.000		521.729.039		9.233.455.530		388.154.110		1.301.027.165						1.689.181.275	0	18,29		1.689.181.275	0	0,78		
			Terjaminnya ketepatan penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			2.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
			Terjaminnya ketepatan realisasi dana darurat dan mendesak sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			213.000.000.000		521.729.039		9.233.455.530		388.154.110		1.301.027.165						1.689.181.275	0	18,29		1.689.181.275	0	0,79		
			Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100		100		100,00		100		100						100		100		100		100			
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			6.935.579.848		1.159.486.826		1.364.862.307		125.130.056		339.798.294						464.928.350	79,17	34,06		464.928.350	79,17	6,7		
			Terjaminnya kualitas pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	24		24		24		9		10						19		79,17		19		79,17			
		5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			6.935.579.848		1.159.486.826		1.364.862.307		125.130.056		339.798.294						464.928.350	79,17	34,06		464.928.350	79,17	6,7		
			Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	24		24		24		9		10						19		79,17		19		79,17			
	Meningkatnya Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**171.257.647.342**		**26.654.646.868**		**31.878.562.056**		**4.918.437.402**		**8.021.228.070**						**12.939.665.472**	**59,4**	**40,59**		**12.939.665.472**	**58,28**	**7,56**	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	2,94		12,68		2,56		0		0						0		0		0		0			
				Persentase Aset Produktif (%)	6,8		5,8		6,00		0		0						0		0		0		0			
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			131.029.871.856		19.117.501.990		23.669.108.723		3.917.773.448		6.052.066.410						9.969.839.858	64,55	42,12		9.969.839.858	62,69	7,61		
			Terlaksananya Pendataan, Pelaporan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	61		60		60		61		62						62		103,33		62		101,64			
		5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			26.631.953.936		1.242.778.065		5.332.218.822		764.746.675		1.297.740.326						2.062.487.001	103,33	38,68		2.062.487.001	101,64	7,74		
			Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	61		60		60		61		62						62		103,33		62		101,64			
			Meningkatnya Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	7679		7.816		7679		1.969		1.980						3.949		51,43		3.949		51,43			
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan			100.831.516.520		17.874.723.925		17.585.039.726		3.106.118.173		4.592.624.784						7.698.742.957	51,43	43,78		7.698.742.957	51,43	7,64		
			Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	7679		7.816		7679		1.969		1.980						3.949		51,43		3.949		51,43			
			Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	20		17		18		2		5						7		38,89		7		35			
		5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah			3.566.401.400		-		751.850.175		46.908.600		161.701.300						208.609.900	38,89	27,75		208.609.900	35	5,85		
			Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	20		17		18		2		5						7		38,89		7		35			
			Meningkatnya pengamanan aset daerah	Persentase register tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang (%)	85,02		14,98		16,01		2,58		7,85						7,85		49,03		7,85		9,23			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			40.227.775.486		7.537.144.878		8.209.453.333		1.000.663.954		1.969.161.660						2.969.825.614	51,67	36,18		2.969.825.614	51,67	7,38		
			Meningkatnya Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	4		4		4		1		1						2		50		2		50			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	30		30		30		7		9						16		53,33		16		53,33			
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			32.023.874.770		6.022.541.239		5.966.062.813		738.393.955		1.434.884.201						2.173.278.156	50	36,43		2.173.278.156	50	6,79		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	4		4		4		1		1						2		50		2		50			
		5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			8.203.900.716		1.514.603.639		2.243.390.520		262.269.999		534.277.459						796.547.458	53,33	35,51		796.547.458	53,33	9,71		
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	30		30		30		7		9						16		53,33		16		53,33			
		5.03	**KEPEGAWAIAN**			**131.566.011.587**		**22.473.461.701**		**25.940.166.023**		**4.881.907.822**		**6.700.085.196**						**11.581.993.018**	**9679,57**	**44,65**		**11.581.993.018**	**52,24**	**8,8**		
		5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**101.476.234.261**		**17.979.666.716**		**20.514.429.252**		**4.492.166.284**		**5.808.216.662**						**10.300.382.946**	**74,78**	**50,21**		**10.300.382.946**	**58,12**	**10,15**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kepegawaian	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	94,18		94,31		94,18		90,34		92,85						92,85		98,59		92,85		98,59			
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			439.945.406		-		136.025.000		10.500.000		20.900.000						31.400.000	37,5	23,08		31.400.000	37,5	7,14		
			Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			439.945.406		-		136.025.000		10.500.000		20.900.000						31.400.000	37,5	23,08		31.400.000	37,5	7,14		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			94.632.096.559		16.690.773.166		18.677.442.199		4.355.052.058		5.529.504.327						9.884.556.385	111,63	52,92		9.884.556.385	111,63	10,45		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43		50		43		48		48						48		111,63		48		111,63			
		5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			94.632.096.559		16.690.773.166		18.677.442.199		4.355.052.058		5.529.504.327						9.884.556.385	111,63	52,92		9.884.556.385	111,63	10,45		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43		50		43		48		48						48		111,63		48		111,63			
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.525.950.028		841.196.847		358.685.978		-		18.615.250						18.615.250	100	5,19		18.615.250	33,33	0,53		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		15		5		3		5						5		100		5		33,33			
		5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.525.950.028		841.196.847		358.685.978		-		18.615.250						18.615.250	100	5,19		18.615.250	33,33	0,53		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		15		5		3		5						5		100		5		33,33			
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.878.242.268		447.696.703		1.342.276.075		126.614.226		239.197.085						365.811.311	50	27,25		365.811.311	50	12,71		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		4		4		1		1						2		50		2		50			
		5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.878.242.268		447.696.703		1.342.276.075		126.614.226		239.197.085						365.811.311	50	27,25		365.811.311	50	12,71		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		4		4		1		1						2		50		2		50			
	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**30.089.777.326**		**4.493.794.985**		**5.425.736.771**		**389.741.538**		**891.868.534**						**1.281.610.072**	**13948,36**	**23,62**		**1.281.610.072**	**49,62**	**4,26**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan ASN	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah (%)	100		98,28		100		96,61		96,61						96,61		96,61		96,61		96,61			
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			7.891.702.634		922.679.400		1.290.821.999		78.800.000		87.500.000						166.300.000	0	12,88		166.300.000	0	2,11		
			Meningkatnya pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			1.407.672.400		230.866.460		255.836.150		31.600.000		21.300.000						52.900.000	0	20,68		52.900.000	0	3,76		
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			5.253.830.234		502.612.940		806.785.849		23.600.000		38.900.000						62.500.000	0	7,75		62.500.000	0	1,19		
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian			1.230.200.000		189.200.000		228.200.000		23.600.000		27.300.000						50.900.000	0	22,3		50.900.000	0	4,14		
			Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya ketepatan waktu dalam pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Yang Tepat Waktu (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			7.810.480.288		1.567.297.573		1.404.538.668		148.289.600		294.834.400						443.124.000	41800	31,55		443.124.000	97,21	5,67		
			Meningkatnya pelayanan mutasi dan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	430		1.796		1		606		648						1.254		125400		1.254		291,63			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			2.649.081.500		522.937.626		484.162.700		69.089.600		101.734.400						170.824.000	0	35,28		170.824.000	0	6,45		
			Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			2.182.398.788		389.559.947		359.075.968		23.600.000		29.600.000						53.200.000	125400	14,82		53.200.000	291,63	2,44		
			Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	430		1.796		1		606		648						1.254		125400		1.254		291,63			
		5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN			2.979.000.000		654.800.000		561.300.000		55.600.000		163.500.000						219.100.000	0	39,03		219.100.000	0	7,35		
			Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kinerja dan disiplin ASN	Persentase ASN yang berkinerja minimal baik (%)	97		98,86		96		0		0						0		0		0		0			
				Persentase PNS yang telah mengikuti asesmen (%)	32		22,14		28,00		0		0						0		0		0		0			
				Persentase ASN yang disiplin (%)	97		98		97		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			14.387.594.404		2.003.818.012		2.730.376.104		162.651.938		509.534.134						672.186.072	45,09	24,62		672.186.072	51,66	4,67		
			Meningkatnya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	6257		7.660		7169		9.697		0						9.697		135,26		9.697		154,98			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			3.918.543.417		657.571.591		710.411.438		100.688.888		124.536.984						225.225.872	135,26	31,7		225.225.872	154,98	5,75		
			Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	6257		7.660		7169		9.697		0						9.697		135,26		9.697		154,98			
		5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			6.162.500.000		685.530.000		1.232.500.000		26.600.000		191.610.000						218.210.000	0	17,7		218.210.000	0	3,54		
			Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			4.306.550.987		660.716.421		787.464.666		35.363.050		193.387.150						228.750.200	0	29,05		228.750.200	0	5,31		
			Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
		5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**23.094.747.506**		**3.842.941.518**		**5.337.199.565**		**101.352.782**		**2.277.578.803**						**2.378.931.585**	**37,05**	**44,57**		**2.378.931.585**	**36,08**	**10,3**		
	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**23.094.747.506**		**3.842.941.518**		**5.337.199.565**		**101.352.782**		**2.277.578.803**						**2.378.931.585**	**37,05**	**44,57**		**2.378.931.585**	**36,08**	**10,3**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai	Persentase ASN yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning (%)	97		100		97		100		100						100		103,09		100		103,09			
		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			9.817.532.329		1.773.127.028		1.950.996.980		71.552.782		252.538.803						324.091.585	24,1	16,61		324.091.585	22,16	3,3		
			Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	2482		2.232		2282		200		350						550		24,1		550		22,16			
		5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi			9.817.532.329		1.773.127.028		1.950.996.980		71.552.782		252.538.803						324.091.585	24,1	16,61		324.091.585	22,16	3,3		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	2482		2.232		2282		200		350						550		24,1		550		22,16			
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			13.277.215.177		2.069.814.490		3.386.202.585		29.800.000		2.025.040.000						2.054.840.000	50	60,68		2.054.840.000	50	15,48		
			Meningkatnya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	4		4		4		1		1						2		50		2		50			
		5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan			13.277.215.177		2.069.814.490		3.386.202.585		29.800.000		2.025.040.000						2.054.840.000	50	60,68		2.054.840.000	50	15,48		
			Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	4		4		4		1		1						2		50		2		50			
		5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**151.657.571.806**		**-**		**46.012.161.818**		**2.637.382.669**		**4.188.747.959**						**6.826.130.628**	**35,32**	**14,84**		**6.826.130.628**	**27,52**	**4,5**		
		5.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**96.341.925.581**		**-**		**34.260.064.371**		**2.055.133.948**		**2.883.010.351**						**4.938.144.299**	**35,1**	**14,41**		**4.938.144.299**	**33,23**	**5,13**	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang penelitian dan pengembangan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	96,07		0		95,69		99,32		99,46						99,46		103,94		99,46		103,53			
		5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			902.500.000		-		87.000.000		-		17.700.000						17.700.000	12,5	20,34		17.700.000	12,5	1,96		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		0		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			902.500.000		-		87.000.000		-		17.700.000						17.700.000	12,5	20,34		17.700.000	12,5	1,96		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		0		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			84.367.068.638		-		32.406.872.421		1.755.271.361		2.638.293.822						4.393.565.183	27,88	13,56		4.393.565.183	20,42	5,21		
			Meningkatnya ketepatan waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	71		0		52		11		14,5						14,5		27,88		14,5		20,42			
		5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			84.367.068.638		-		32.406.872.421		1.755.271.361		2.638.293.822						4.393.565.183	27,88	13,56		4.393.565.183	20,42	5,21		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	71		0		52		11		14,5						14,5		27,88		14,5		20,42			
		5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.072.356.943		-		1.766.191.950		299.862.587		227.016.529						526.879.116	50	29,83		526.879.116	50	4,76		
			Meningkatnya ketersediaan barang jasa dan pelayanan umum perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		3		3						6		50		6		50			
		5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.846.445.765		-		774.670.996		251.010.440		104.784.000						355.794.440	50	45,93		355.794.440	50	12,5		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		3		3						6		50		6		50			
		5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			8.225.911.178		-		991.520.954		48.852.147		122.232.529						171.084.676	50	17,25		171.084.676	50	2,08		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		3		3						6		50		6		50			
	Meningkatnya Manajemen Riset dan Inovasi	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**			**22.225.399.999**		**-**		**11.752.097.447**		**582.248.721**		**1.305.737.608**						**1.887.986.329**	**35,39**	**16,07**		**1.887.986.329**	**27,88**	**8,49**	Badan Riset dan Inovasi Daerah	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pemanfaatan riset dalam pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100		0		100,00		100		0						100		100		100		100			
		5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			13.974.300.000		-		3.578.500.000		-		226.000.000						226.000.000	82,58	6,32		226.000.000	60,42	1,62		
			Terlaksananya penyusunan riset berbasis bukti	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	4		0		1		2		0						2		200		2		50			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	16		0		22		1		9						10		45,45		10		62,5			
				Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	2		0		2		0		1						1		50		1		50			
		5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset			902.500.000		-		178.100.000		-		33.600.000						33.600.000	200	18,87		33.600.000	50	3,72		
			Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	4		0		1		2		0						2		200		2		50			
		5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			10.353.200.000		-		2.714.100.000		-		78.300.000						78.300.000	45,45	2,88		78.300.000	62,5	0,76		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	16		0		22		1		9						10		45,45		10		62,5			
		5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			1.068.600.000		-		232.500.000		-		62.100.000						62.100.000	50	26,71		62.100.000	50	5,81		
			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	2		0		2		0		1						1		50		1		50			
			Terlaksananya pemantauan penyelenggaraan riset	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	2		0		2		0		1						1		50		1		50			
				Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)	1		0		1		1		0						1		100		1		100			
				Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	2		0		2		0		1						1		50		1		50			
		5.05.03.2.01.0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			325.000.000		-		161.600.000		-		12.000.000						12.000.000	50	7,43		12.000.000	50	3,69		
			Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	2		0		2		0		1						1		50		1		50			
		5.05.03.2.01.0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			883.000.000		-		172.200.000		-		-						-	100	0		-	100	0		
			Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)	1		0		1		1		0						1		100		1		100			
		5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah			442.000.000		-		120.000.000		-		40.000.000						40.000.000	50	33,33		40.000.000	50	9,05		
			Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	2		0		2		0		1						1		50		1		50			
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan/atau Badan Usaha di Daerah (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi			8.251.099.999		-		8.173.597.447		582.248.721		1.079.737.608						1.661.986.329	0	20,33		1.661.986.329	0	20,14		
			Terlaksananya difusi inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (Laporan)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual			626.934.689		-		41.200.000		-		2.400.000						2.400.000	0	5,83		2.400.000	0	0,38		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.02.0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi			1.417.700.000		-		151.600.000		-		26.300.000						26.300.000	0	17,35		26.300.000	0	1,86		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.02.0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi			941.900.000		-		48.860.000		-		19.800.000						19.800.000	0	40,52		19.800.000	0	2,1		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.02.0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah			-		-		7.294.446.817		582.248.721		918.837.608						1.501.086.329	0	20,58		1.501.086.329	0	0		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (Laporan)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
			Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi			1.698.765.310		-		240.790.630		-		14.000.000						14.000.000	0	5,81		14.000.000	0	0,82		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi			1.821.000.000		-		207.400.000		-		47.400.000						47.400.000	0	22,85		47.400.000	0	2,6		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.02.0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah			1.092.200.000		-		99.800.000		-		34.100.000						34.100.000	0	34,17		34.100.000	0	3,12		
			Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		5.05.03.2.02.0016	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi			652.600.000		-		89.500.000		-		16.900.000						16.900.000	0	18,88		16.900.000	0	2,59		
			Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
	Meningkatnya Manajemen Riset dan Inovasi	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**			**33.090.246.226**		-		-		-		-						-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	UPTD Kebun Raya Mangrove	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam																		0				0			
		5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi			33.090.246.226		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya edukasi dan diseminasi terkait Mangrove	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.05.03.2.02.0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah			33.090.246.226		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**162.242.755.541**		**27.539.860.247**		**32.366.084.948**		**6.838.422.414**		**8.881.347.829**						**15.719.770.243**	**54,96**	**48,57**		**15.719.770.243**	**54,47**	**9,69**		
		6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**139.413.623.921**		**24.385.010.247**		**28.427.319.948**		**6.468.322.414**		**8.154.347.829**						**14.622.670.243**	**59,38**	**51,44**		**14.622.670.243**	**59,38**	**10,49**	Inspektorat	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Inspektorat	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	96		98,43		95,30		98,97		99,01						99,01		103,89		99,01		103,14			
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			67.210.654		-		13.000.000		-		13.000.000						13.000.000	37,5	100		13.000.000	37,5	19,34		
			Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			67.210.654		-		13.000.000		-		13.000.000						13.000.000	37,5	100		13.000.000	37,5	19,34		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			129.301.980.025		22.883.605.219		25.842.100.760		6.193.007.507		7.696.733.440						13.889.740.947	100	53,75		13.889.740.947	100	10,74		
			Terlaksananya penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53		54		53		53		53						53		100		53		100			
		6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			129.301.980.025		22.883.605.219		25.842.100.760		6.193.007.507		7.696.733.440						13.889.740.947	100	53,75		13.889.740.947	100	10,74		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53		54		53		53		53						53		100		53		100			
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.961.724.658		148.066.700		462.028.100		64.099.170		17.328.450						81.427.620	50	17,62		81.427.620	50	2,75		
			Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		3		2		1		1						1		50		1		50			
		6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.961.724.658		148.066.700		462.028.100		64.099.170		17.328.450						81.427.620	50	17,62		81.427.620	50	2,75		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		3		2		1		1						1		50		1		50			
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.082.708.584		1.353.338.328		2.110.191.088		211.215.737		427.285.939						638.501.676	50	30,26		638.501.676	50	9,01		
			Terlaksananya penyediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.082.708.584		1.353.338.328		2.110.191.088		211.215.737		427.285.939						638.501.676	50	30,26		638.501.676	50	9,01		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**12.303.969.840**		**1.701.200.000**		**2.078.915.000**		**194.300.000**		**380.400.000**						**574.700.000**	**49,55**	**27,64**		**574.700.000**	**49,55**	**4,67**	Inspektorat	
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase pengawasan keuangan dan kinerja yang telah selesai (%)	100		100		100		63,16		75,61						75,61		75,61		75,61		75,61			
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			6.766.819.920		684.850.000		1.034.985.000		94.200.000		189.500.000						283.700.000	49,22	27,41		283.700.000	49,22	4,19		
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan oleh APIP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	66		65		66		12		18						30		45,45		30		45,45			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	7		7		7		2		3						5		71,43		5		71,43			
		6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			2.529.566.000		225.900.000		273.000.000		27.900.000		60.400.000						88.300.000	45,45	32,34		88.300.000	45,45	3,49		
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	66		65		66		12		18						30		45,45		30		45,45			
		6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			1.870.628.280		232.650.000		339.360.000		27.900.000		54.500.000						82.400.000	71,43	24,28		82.400.000	71,43	4,4		
			Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	7		7		7		2		3						5		71,43		5		71,43			
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja oleh APIP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	10		10		10		1		2						3		30		3		30			
		6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			535.908.000		-		148.600.000		10.500.000		26.100.000						36.600.000	50	24,63		36.600.000	50	6,83		
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
		6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			1.830.717.640		226.300.000		274.025.000		27.900.000		48.500.000						76.400.000	30	27,88		76.400.000	30	4,17		
			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	10		10		10		1		2						3		30		3		30			
			Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kerugian negara/daerah dan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaporkan (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			4.171.023.280		756.750.000		784.430.000		55.800.000		128.600.000						184.400.000	45	23,51		184.400.000	45	4,42		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	5		5		5		1		1						2		40		2		40			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	20		20		20		5		5						10		50		10		50			
		6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			1.605.876.640		273.900.000		296.100.000		27.900.000		61.000.000						88.900.000	40	30,02		88.900.000	40	5,54		
			Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	5		5		5		1		1						2		40		2		40			
		6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			2.565.146.640		482.850.000		488.330.000		27.900.000		67.600.000						95.500.000	50	19,56		95.500.000	50	3,72		
			Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	20		20		20		5		5						10		50		10		50			
			Meningkatnya Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	Persentase Pemenuhan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI (%)	100		100		100		0		50						50		50		50		50			
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			1.366.126.640		259.600.000		259.500.000		44.300.000		62.300.000						106.600.000	60	41,08		106.600.000	60	7,8		
			Terlaksananya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	20		20		20		0		12						12		60		12		60			
		6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			1.366.126.640		259.600.000		259.500.000		44.300.000		62.300.000						106.600.000	60	41,08		106.600.000	60	7,8		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	20		20		20		0		12						12		60		12		60			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**10.525.161.780**		**1.453.650.000**		**1.859.850.000**		**175.800.000**		**346.600.000**						**522.400.000**	**58,33**	**28,09**		**522.400.000**	**56,94**	**4,96**	Inspektorat	
			Meningkatnya Pendampingan, Asistensi, Evaluasi, serta Verifikasi terkait Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan (%)	100		100		100		0		100						100		100		100		100			
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			1.798.699.000		307.350.000		318.025.000		36.300.000		56.300.000						92.600.000	101,64	29,12		92.600.000	101,64	5,15		
			Terlaksananya penyelenggaraan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	61		66		61		0		62						62		101,64		62		101,64			
		6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			1.798.699.000		307.350.000		318.025.000		36.300.000		56.300.000						92.600.000	101,64	29,12		92.600.000	101,64	5,15		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	61		66		61		0		62						62		101,64		62		101,64			
			Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Reformasi Birokrasi, dan Pembangunan Zona Integritas	Persentase Perangkat Daerah dan Unit Layanan Publik yang Meningkat Menjadi Zona Integritas WBK (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Persentase Perangkat Daerah dan Unit Layanan Publik yang Meningkat Menjadi Zona Integritas WBBM (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
				Persentase Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang terpenuhi dengan nilai > 90 (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			5.925.462.780		678.600.000		1.014.625.000		83.700.000		167.500.000						251.200.000	46,67	24,76		251.200.000	46,67	4,24		
			Terlaksananya pendampingan dan asistensi di bidang reformasi birokasi, pemberantasan korupsi dan penegakan integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	10		10		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	25		25		25		2		8						10		40		10		40			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	12		12		12		6		6						12		100		12		100			
		6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			1.301.550.000		235.600.000		244.300.000		27.900.000		57.800.000						85.700.000	0	35,08		85.700.000	0	6,58		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	10		10		10		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			2.792.792.780		208.600.000		471.625.000		27.900.000		51.800.000						79.700.000	40	16,9		79.700.000	40	2,85		
			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	25		25		25		2		8						10		40		10		40			
		6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			1.831.120.000		234.400.000		298.700.000		27.900.000		57.900.000						85.800.000	100	28,72		85.800.000	100	4,69		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	12		12		12		6		6						12		100		12		100			
			Meningkatnya Pendampingan, Asistensi, Evaluasi, serta Verifikasi terkait Akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan Pemerintah Daerah yang telah sesuai dengan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang disusun (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			2.801.000.000		467.700.000		527.200.000		55.800.000		122.800.000						178.600.000	54,17	33,88		178.600.000	50	6,38		
			Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan terkait urusan pemerintah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4		4		4		1		2						3		75		3		75			
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4		4		3		1		0						1		33,33		1		25			
		6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			1.532.750.000		241.500.000		290.900.000		27.900.000		63.700.000						91.600.000	75	31,49		91.600.000	75	5,98		
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4		4		4		1		2						3		75		3		75			
		6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			1.268.250.000		226.200.000		236.300.000		27.900.000		59.100.000						87.000.000	33,33	36,82		87.000.000	25	6,86		
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4		4		3		1		0						1		33,33		1		25			
		7.01	**KECAMATAN**			**7.047.182.555.300**		**1.131.028.622.734**		**1.645.951.868.689**		**234.721.374.709**		**364.295.886.117**						**599.017.260.826**	**21,93**	**36,39**		**599.017.260.826**	**20,17**	**8,5**		
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**95.304.181.909**		**15.908.774.972**		**18.593.060.459**		**3.683.312.499**		**4.931.436.085**						**8.614.748.584**	**30,38**	**46,33**		**8.614.748.584**	**29,57**	**9,04**	Kec. Asemrowo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	97,1		97,51		97,08		99,44		98,86						98,86		101,83		98,86		101,81			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.932.000		-		1.308.000						1.308.000	37,5	33,27		1.308.000	37,5	9,57		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.932.000		-		1.308.000						1.308.000	37,5	33,27		1.308.000	37,5	9,57		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			79.277.471.438		13.159.100.359		15.643.123.459		3.188.265.209		4.212.393.008						7.400.658.217	84	47,31		7.400.658.217	80,77	9,34		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52		46		50		42		42						42		84		42		80,77			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			79.277.471.438		13.159.100.359		15.643.123.459		3.188.265.209		4.212.393.008						7.400.658.217	84	47,31		7.400.658.217	80,77	9,34		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52		46		50		42		42						42		84		42		80,77			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			15.575.913.296		2.672.357.363		2.855.870.600		495.047.290		708.266.341						1.203.313.631	0	42,13		1.203.313.631	0	7,73		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		17		18		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.575.913.296		2.672.357.363		2.855.870.600		495.047.290		708.266.341						1.203.313.631	0	42,13		1.203.313.631	0	7,73		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		17		18		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			437.130.720		77.317.250		90.134.400		-		9.468.736						9.468.736	0	10,51		9.468.736	0	2,17		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		4		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			437.130.720		77.317.250		90.134.400		-		9.468.736						9.468.736	0	10,51		9.468.736	0	2,17		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		4		4		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**370.620.000**		**45.659.200**		**73.542.600**		**2.251.800**		**18.385.650**						**20.637.450**	**50**	**28,06**		**20.637.450**	**50**	**5,57**	Kec. Asemrowo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat		Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			370.620.000		45.659.200		73.542.600		2.251.800		18.385.650						20.637.450	50	28,06		20.637.450	50	5,57		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			370.620.000		45.659.200		73.542.600		2.251.800		18.385.650						20.637.450	50	28,06		20.637.450	50	5,57		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**4.996.696.000**		**716.100.000**		**1.075.124.200**						**1.791.224.200**	**48,77**	**35,85**		**1.791.224.200**	**48,77**	**1492,69**	Kec. Asemrowo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		50		50		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		4.996.696.000		716.100.000		1.075.124.200						1.791.224.200	48,77	35,85		1.791.224.200	48,77	1492,69		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	10580		0		10580		10.320		10.320						10.320		97,54		10.320		97,54			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		4.401.696.000		716.100.000		1.075.124.200						1.791.224.200	97,54	40,69		1.791.224.200	97,54	2985,37		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	10580		0		10580		10.320		10.320						10.320		97,54		10.320		97,54			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	85		0		85		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		595.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	85		0		85		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**631.056.986**		-		**156.229.200**		-		**20.956.950**						**20.956.950**	**50**	**13,41**		**20.956.950**	**50**	**3,32**	Kec. Asemrowo	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			631.056.986		-		156.229.200		-		20.956.950						20.956.950	50	13,41		20.956.950	50	3,32		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	6		6		6		1		2						3		50		3		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			631.056.986		-		156.229.200		-		20.956.950						20.956.950	50	13,41		20.956.950	50	3,32		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	6		6		6		1		2						3		50		3		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**23.684.584.558**		**4.164.960.587**		**4.480.691.132**		**192.499.892**		**285.659.689**						**478.159.581**	**0**	**10,67**		**478.159.581**	**0**	**2,02**	Kelurahan Asemrowo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.932.197.603		1.169.788.394		1.180.800.000		192.499.892		285.659.689						478.159.581	0	40,49		478.159.581	0	4,81		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Asemrowo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		2		2		0		0						0		0		0		0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.932.197.603		1.169.788.394		1.180.800.000		192.499.892		285.659.689						478.159.581	0	40,49		478.159.581	0	4,81		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan prasarana wilayah	Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya (%)	100		15		20		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.752.386.955		2.995.172.193		3.299.891.132		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			13.752.386.955		2.995.172.193		3.299.891.132		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		0		2		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**12.170.323.232**		**1.473.582.954**		**2.315.365.792**		**45.714.068**		**176.002.146**						**221.716.214**	**0**	**9,58**		**221.716.214**	**0**	**1,82**	Kelurahan Genting Kalianak	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.361.471.583		295.416.999		719.430.136		45.714.068		67.949.191						113.663.259	0	15,8		113.663.259	0	3,38		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.361.471.583		295.416.999		719.430.136		45.714.068		67.949.191						113.663.259	0	15,8		113.663.259	0	3,38		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.808.851.649		1.178.165.955		1.595.935.656		-		108.052.955						108.052.955	0	6,77		108.052.955	0	1,23		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.808.851.649		1.178.165.955		1.595.935.656		-		108.052.955						108.052.955	0	6,77		108.052.955	0	1,23		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		2		2		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**12.694.055.973**		**1.728.726.905**		**2.415.004.302**		**59.267.973**		**88.156.497**						**147.424.470**	**0**	**6,1**		**147.424.470**	**0**	**1,16**	Kelurahan Tambak Sarioso	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.664.353.842		396.076.182		617.895.940		59.267.973		88.156.497						147.424.470	0	23,86		147.424.470	0	4,02		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.664.353.842		396.076.182		617.895.940		59.267.973		88.156.497						147.424.470	0	23,86		147.424.470	0	4,02		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.029.702.131		1.332.650.723		1.797.108.362		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			9.029.702.131		1.332.650.723		1.797.108.362		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**112.192.129.103**		**18.931.980.636**		**21.694.696.448**		**4.620.064.653**		**6.102.519.665**						**10.722.584.318**	**32,56**	**49,42**		**10.722.584.318**	**32,56**	**9,56**	Kec. Benowo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	94,22		95,67		94,18		97,23		97						97		102,99		97		102,95			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		1.300.000						1.300.000	37,5	32,96		1.300.000	37,5	10		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		1.300.000						1.300.000	37,5	32,96		1.300.000	37,5	10		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			93.230.844.776		15.929.486.947		18.396.162.478		4.103.820.057		5.290.437.370						9.394.257.427	92,73	51,07		9.394.257.427	92,73	10,08		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		53		55		49		51						51		92,73		51		92,73			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			93.230.844.776		15.929.486.947		18.396.162.478		4.103.820.057		5.290.437.370						9.394.257.427	92,73	51,07		9.394.257.427	92,73	10,08		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		53		55		49		51						51		92,73		51		92,73			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			18.463.557.913		2.926.506.302		3.180.164.370		516.244.596		798.302.898						1.314.547.494	0	41,34		1.314.547.494	0	7,12		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		7		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.463.557.913		2.926.506.302		3.180.164.370		516.244.596		798.302.898						1.314.547.494	0	41,34		1.314.547.494	0	7,12		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		7		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			484.726.414		75.987.387		114.425.600		-		12.479.397						12.479.397	0	10,91		12.479.397	0	2,57		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			484.726.414		75.987.387		114.425.600		-		12.479.397						12.479.397	0	10,91		12.479.397	0	2,57		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**581.256.000**		**53.996.800**		**121.022.293**		**3.207.600**		**28.831.950**						**32.039.550**	**50**	**26,47**		**32.039.550**	**50**	**5,51**	Kec. Benowo	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			581.256.000		53.996.800		121.022.293		3.207.600		28.831.950						32.039.550	50	26,47		32.039.550	50	5,51		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		198		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			581.256.000		53.996.800		121.022.293		3.207.600		28.831.950						32.039.550	50	26,47		32.039.550	50	5,51		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		198		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**7.175.092.800**		**1.049.436.600**		**1.568.809.600**						**2.618.246.200**	**49,99**	**36,49**		**2.618.246.200**	**49,99**	**2181,87**	Kec. Benowo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		50		50		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		7.175.092.800		1.049.436.600		1.568.809.600						2.618.246.200	49,99	36,49		2.618.246.200	49,99	2181,87		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	15000		0		15000		14.998		14.998						14.998		99,99		14.998		99,99			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		6.230.092.800		1.049.436.600		1.568.809.600						2.618.246.200	99,99	42,03		2.618.246.200	99,99	4363,74		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	15000		0		15000		14.998		14.998						14.998		99,99		14.998		99,99			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	135		0		135		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		945.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0			
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	135		0		135		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**873.125.250**		-		**147.156.000**		-		**22.228.000**						**22.228.000**	**50**	**15,11**		**22.228.000**	**50**	**2,55**	Kec. Benowo	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			873.125.250		-		147.156.000		-		22.228.000						22.228.000	50	15,11		22.228.000	50	2,55		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			873.125.250		-		147.156.000		-		22.228.000						22.228.000	50	15,11		22.228.000	50	2,55		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**19.188.346.005**		**2.814.220.319**		**3.673.352.218**		**145.669.999**		**629.468.248**						**775.138.247**	**0**	**21,1**		**775.138.247**	**0**	**4,04**	Kelurahan Kandangan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.968.965.153		853.741.498		1.538.900.229		145.669.999		214.316.463						359.986.462	0	23,39		359.986.462	0	4,52		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kandangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		3		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.968.965.153		853.741.498		1.538.900.229		145.669.999		214.316.463						359.986.462	0	23,39		359.986.462	0	4,52		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		3		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.219.380.852		1.960.478.821		2.134.451.989		-		415.151.785						415.151.785	0	19,45		415.151.785	0	3,7		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		9		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.219.380.852		1.960.478.821		2.134.451.989		-		415.151.785						415.151.785	0	19,45		415.151.785	0	3,7		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		9		0		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**16.024.484.395**		**1.876.803.673**		**3.048.607.855**		**45.244.540**		**431.854.924**						**477.099.464**	**0**	**15,65**		**477.099.464**	**0**	**2,98**	Kelurahan Romokalisari	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			2.354.478.038		287.450.740		447.932.056		45.244.540		67.816.810						113.061.350	0	25,24		113.061.350	0	4,8		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Romokalisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.354.478.038		287.450.740		447.932.056		45.244.540		67.816.810						113.061.350	0	25,24		113.061.350	0	4,8		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.670.006.357		1.589.352.933		2.600.675.799		-		364.038.114						364.038.114	0	14		364.038.114	0	2,66		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			13.670.006.357		1.589.352.933		2.600.675.799		-		364.038.114						364.038.114	0	14		364.038.114	0	2,66		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		3		3		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**27.473.309.594**		**3.221.345.546**		**5.197.579.824**		**201.591.457**		**693.068.768**						**894.660.225**	**0**	**17,21**		**894.660.225**	**0**	**3,26**	Kelurahan Sememi	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.714.928.948		1.194.843.534		1.975.730.227		201.591.457		299.170.103						500.761.560	0	25,35		500.761.560	0	4,27		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sememi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			11.714.928.948		1.194.843.534		1.975.730.227		201.591.457		299.170.103						500.761.560	0	25,35		500.761.560	0	4,27		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		3		3		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			15.758.380.646		2.026.502.012		3.221.849.597		-		393.898.665						393.898.665	0	12,23		393.898.665	0	2,5		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		6		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			15.758.380.646		2.026.502.012		3.221.849.597		-		393.898.665						393.898.665	0	12,23		393.898.665	0	2,5		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		6		10		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**13.667.757.322**		**1.454.247.816**		**2.600.247.927**		**38.824.000**		**217.484.625**						**256.308.625**	**0**	**9,86**		**256.308.625**	**0**	**1,88**	Kelurahan Tambak Oso Wilangun	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.171.972.772		339.090.000		603.457.863		38.824.000		57.324.000						96.148.000	0	15,93		96.148.000	0	3,03		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tambak Oso Wilangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.171.972.772		339.090.000		603.457.863		38.824.000		57.324.000						96.148.000	0	15,93		96.148.000	0	3,03		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.495.784.550		1.115.157.816		1.996.790.064		-		160.160.625						160.160.625	0	8,02		160.160.625	0	1,53		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.495.784.550		1.115.157.816		1.996.790.064		-		160.160.625						160.160.625	0	8,02		160.160.625	0	1,53		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**120.133.602.635**		**19.984.199.511**		**23.474.574.476**		**5.098.717.798**		**6.634.941.493**						**11.733.659.291**	**34,38**	**49,98**		**11.733.659.291**	**34,38**	**9,77**	Kec. Bubutan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	96,3		98,67		96,14		99,38		98,63						98,63		102,59		98,63		102,42			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.944.000		-		2.600.000						2.600.000	37,5	65,92		2.600.000	37,5	19,02		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.944.000		-		2.600.000						2.600.000	37,5	65,92		2.600.000	37,5	19,02		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			94.615.117.998		15.757.526.761		18.672.370.679		4.352.451.481		5.431.028.384						9.783.479.865	100	52,4		9.783.479.865	100	10,34		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	47		47		47		47		47						47		100		47		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			94.615.117.998		15.757.526.761		18.672.370.679		4.352.451.481		5.431.028.384						9.783.479.865	100	52,4		9.783.479.865	100	10,34		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	47		47		47		47		47						47		100		47		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			25.100.943.182		4.149.163.551		4.682.146.181		746.266.317		1.187.227.109						1.933.493.426	0	41,3		1.933.493.426	0	7,7		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		15		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.100.943.182		4.149.163.551		4.682.146.181		746.266.317		1.187.227.109						1.933.493.426	0	41,3		1.933.493.426	0	7,7		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		15		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			403.875.000		77.509.199		116.113.616		-		14.086.000						14.086.000	0	12,13		14.086.000	0	3,49		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		5		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			403.875.000		77.509.199		116.113.616		-		14.086.000						14.086.000	0	12,13		14.086.000	0	3,49		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		5		1		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**1.041.524.445**		**166.348.800**		**201.090.112**		**6.642.000**		**47.451.150**						**54.093.150**	**50**	**26,9**		**54.093.150**	**50**	**5,19**	Kec. Bubutan	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			1.041.524.445		166.348.800		201.090.112		6.642.000		47.451.150						54.093.150	50	26,9		54.093.150	50	5,19		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.041.524.445		166.348.800		201.090.112		6.642.000		47.451.150						54.093.150	50	26,9		54.093.150	50	5,19		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**9.784.715.200**		**1.365.249.200**		**2.035.062.800**						**3.400.312.000**	**48,51**	**34,75**		**3.400.312.000**	**48,51**	**2833,59**	Kec. Bubutan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	62,74		62,54		62,58		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		9.784.715.200		1.365.249.200		2.035.062.800						3.400.312.000	48,51	34,75		3.400.312.000	48,51	2833,59		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	20680		0		20680		20.064		20.064						20.064		97,02		20.064		97,02			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		8.244.715.200		1.365.249.200		2.035.062.800						3.400.312.000	97,02	41,24		3.400.312.000	97,02	5667,19		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	20680		0		20680		20.064		20.064						20.064		97,02		20.064		97,02			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	220		0		220		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.540.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	220		0		220		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**804.825.000**		-		**147.156.000**		-		**24.939.619**						**24.939.619**	**50**	**16,95**		**24.939.619**	**50**	**3,1**	Kec. Bubutan	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			804.825.000		-		147.156.000		-		24.939.619						24.939.619	50	16,95		24.939.619	50	3,1		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			804.825.000		-		147.156.000		-		24.939.619						24.939.619	50	16,95		24.939.619	50	3,1		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.683.726.026**		**1.378.597.635**		**2.816.362.407**		**78.642.230**		**188.156.161**						**266.798.391**	**0**	**9,47**		**266.798.391**	**0**	**1,82**	Kelurahan Alun-Alun Contong	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.023.444.544		476.310.075		1.196.705.061		78.642.230		117.754.440						196.396.670	0	16,41		196.396.670	0	1,96		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Alun-Alun Contong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.023.444.544		476.310.075		1.196.705.061		78.642.230		117.754.440						196.396.670	0	16,41		196.396.670	0	1,96		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			4.660.281.482		902.287.560		1.619.657.346		-		70.401.721						70.401.721	0	4,35		70.401.721	0	1,51		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		4		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.660.281.482		902.287.560		1.619.657.346		-		70.401.721						70.401.721	0	4,35		70.401.721	0	1,51		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		4		0		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**22.828.788.344**		**3.412.672.646**		**4.167.602.593**		**349.617.256**		**196.625.270**						**546.242.526**	**0**	**13,11**		**546.242.526**	**0**	**2,39**	Kelurahan Bubutan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.473.862.443		1.166.881.460		1.295.401.471		133.239.174		196.625.270						329.864.444	0	25,46		329.864.444	0	3,15		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Bubutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.473.862.443		1.166.881.460		1.295.401.471		133.239.174		196.625.270						329.864.444	0	25,46		329.864.444	0	3,15		
			Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12.354.925.901		2.245.791.186		2.872.201.122		216.378.082		-						216.378.082	0	7,53		216.378.082	0	1,75		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		6		9		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			12.354.925.901		2.245.791.186		2.872.201.122		216.378.082		-						216.378.082	0	7,53		216.378.082	0	1,75		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		6		9		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**28.182.719.229**		**4.608.173.848**		**5.361.673.867**		**204.814.785**		**497.397.090**						**702.211.875**	**0**	**13,1**		**702.211.875**	**0**	**2,49**	Kelurahan Gundih	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.500.041.839		1.365.510.779		1.364.458.045		204.814.785		302.959.185						507.773.970	0	37,21		507.773.970	0	4,84		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Gundih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.500.041.839		1.365.510.779		1.364.458.045		204.814.785		302.959.185						507.773.970	0	37,21		507.773.970	0	4,84		
			Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			17.682.677.390		3.242.663.069		3.997.215.822		-		194.437.905						194.437.905	0	4,86		194.437.905	0	1,1		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		7		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			17.682.677.390		3.242.663.069		3.997.215.822		-		194.437.905						194.437.905	0	4,86		194.437.905	0	1,1		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		7		10		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**22.017.673.709**		**3.671.499.092**		**4.188.793.309**		**221.261.305**		**515.433.294**						**736.694.599**	**0**	**17,59**		**736.694.599**	**0**	**3,35**	Kelurahan Jepara	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.287.439.851		1.315.000.000		1.410.658.680		221.261.305		331.257.774						552.519.079	0	39,17		552.519.079	0	4,89		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Jepara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			11.287.439.851		1.315.000.000		1.410.658.680		221.261.305		331.257.774						552.519.079	0	39,17		552.519.079	0	4,89		
			Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.730.233.858		2.356.499.092		2.778.134.629		-		184.175.520						184.175.520	0	6,63		184.175.520	0	1,72		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		5		0		0		0						0		0		0		0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.730.233.858		2.356.499.092		2.778.134.629		-		184.175.520						184.175.520	0	6,63		184.175.520	0	1,72		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		5		0		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**27.598.662.448**		**2.666.881.730**		**5.250.558.898**		**230.450.641**		**522.447.505**						**752.898.146**	**0**	**14,34**		**752.898.146**	**0**	**2,73**	Kelurahan Tembok Dukuh	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			18.865.241.847		1.831.456.684		2.380.289.903		230.450.641		339.952.417						570.403.058	0	23,96		570.403.058	0	3,02		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			18.865.241.847		1.831.456.684		2.380.289.903		230.450.641		339.952.417						570.403.058	0	23,96		570.403.058	0	3,02		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.733.420.601		835.425.046		2.870.268.995		-		182.495.088						182.495.088	0	6,36		182.495.088	0	2,09		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		7		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.733.420.601		835.425.046		2.870.268.995		-		182.495.088						182.495.088	0	6,36		182.495.088	0	2,09		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		7		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**114.483.957.035**		**19.979.548.993**		**22.245.598.868**		**4.887.171.635**		**6.111.797.864**						**10.998.969.499**	**33,38**	**49,44**		**10.998.969.499**	**33,38**	**9,61**	Kec. Bulak	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	99,41		99,02		99,37		98,67		98,95						98,95		99,58		98,95		99,54			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		2.671.680		-		1.300.000						1.300.000	37,5	48,66		1.300.000	37,5	10		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		2.671.680		-		1.300.000						1.300.000	37,5	48,66		1.300.000	37,5	10		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			89.569.353.100		15.640.264.454		17.673.280.959		4.117.142.174		5.017.483.985						9.134.626.159	96	51,69		9.134.626.159	96	10,2		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		50		50		48		48						48		96		48		96			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			89.569.353.100		15.640.264.454		17.673.280.959		4.117.142.174		5.017.483.985						9.134.626.159	96	51,69		9.134.626.159	96	10,2		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		50		50		48		48						48		96		48		96			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			24.304.553.489		4.279.793.459		4.512.692.389		770.029.461		1.082.466.029						1.852.495.490	0	41,05		1.852.495.490	0	7,62		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11		11		11		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			24.304.553.489		4.279.793.459		4.512.692.389		770.029.461		1.082.466.029						1.852.495.490	0	41,05		1.852.495.490	0	7,62		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11		11		11		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			597.050.446		59.491.080		56.953.840		-		10.547.850						10.547.850	0	18,52		10.547.850	0	1,77		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			597.050.446		59.491.080		56.953.840		-		10.547.850						10.547.850	0	18,52		10.547.850	0	1,77		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**472.884.000**		**66.848.800**		**95.162.293**		**1.706.400**		**21.636.450**						**23.342.850**	**50**	**24,53**		**23.342.850**	**50**	**4,94**	Kec. Bulak	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			472.884.000		66.848.800		95.162.293		1.706.400		21.636.450						23.342.850	50	24,53		23.342.850	50	4,94		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			472.884.000		66.848.800		95.162.293		1.706.400		21.636.450						23.342.850	50	24,53		23.342.850	50	4,94		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**3.596.102.400**		**476.850.400**		**713.450.400**						**1.190.300.800**	**49,71**	**33,1**		**1.190.300.800**	**49,71**	**991,92**	Kec. Bulak	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	91		87,5		88,5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		3.596.102.400		476.850.400		713.450.400						1.190.300.800	49,71	33,1		1.190.300.800	49,71	991,92		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	6840		0		6840		6.801		6.801						6.801		99,43		6.801		99,43			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		2.861.102.400		476.850.400		713.450.400						1.190.300.800	99,43	41,6		1.190.300.800	99,43	1983,83		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	6840		0		6840		6.801		6.801						6.801		99,43		6.801		99,43			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	105		0		105		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		735.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	105		0		105		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**886.011.286**		-		**91.579.200**		-		**15.263.200**						**15.263.200**	**50**	**16,67**		**15.263.200**	**50**	**1,72**	Kec. Bulak	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			886.011.286		-		91.579.200		-		15.263.200						15.263.200	50	16,67		15.263.200	50	1,72		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			886.011.286		-		91.579.200		-		15.263.200						15.263.200	50	16,67		15.263.200	50	1,72		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**17.272.391.955**		**2.793.484.838**		**3.308.847.974**		**136.003.291**		**991.459.065**						**1.127.462.356**	**0**	**34,07**		**1.127.462.356**	**0**	**6,53**	Kelurahan Bulak	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.242.776.453		1.221.254.414		1.693.824.072		136.003.291		201.516.193						337.519.484	0	19,93		337.519.484	0	3,65		
			Meningkatnya Inovasi unggulan Kelurahan Bulak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.242.776.453		1.221.254.414		1.693.824.072		136.003.291		201.516.193						337.519.484	0	19,93		337.519.484	0	3,65		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.029.615.502		1.572.230.424		1.615.023.902		-		789.942.872						789.942.872	0	48,91		789.942.872	0	9,84		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		9		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.029.615.502		1.572.230.424		1.615.023.902		-		789.942.872						789.942.872	0	48,91		789.942.872	0	9,84		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		9		3		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**12.476.125.934**		**1.685.404.582**		**2.276.517.897**		**39.403.350**		**673.186.803**						**712.590.153**	**0**	**31,3**		**712.590.153**	**0**	**5,71**	Kelurahan Kedung Cowek	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			2.740.521.785		302.296.530		314.887.718		39.403.350		57.669.820						97.073.170	0	30,83		97.073.170	0	3,54		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.740.521.785		302.296.530		314.887.718		39.403.350		57.669.820						97.073.170	0	30,83		97.073.170	0	3,54		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.735.604.149		1.383.108.052		1.961.630.179		-		615.516.983						615.516.983	0	31,38		615.516.983	0	6,32		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		10		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			9.735.604.149		1.383.108.052		1.961.630.179		-		615.516.983						615.516.983	0	31,38		615.516.983	0	6,32		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		10		3		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**11.729.295.836**		**1.636.293.607**		**2.231.461.714**		**62.252.106**		**234.744.642**						**296.996.748**	**0**	**13,31**		**296.996.748**	**0**	**2,53**	Kelurahan Kenjeran	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.727.368.638		485.659.476		556.092.054		62.252.106		93.682.148						155.934.254	0	28,04		155.934.254	0	4,18		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kenjeran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.727.368.638		485.659.476		556.092.054		62.252.106		93.682.148						155.934.254	0	28,04		155.934.254	0	4,18		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.001.927.198		1.150.634.131		1.675.369.660		-		141.062.494						141.062.494	0	8,42		141.062.494	0	1,76		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		6		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.001.927.198		1.150.634.131		1.675.369.660		-		141.062.494						141.062.494	0	8,42		141.062.494	0	1,76		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		6		3		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.733.096.419**		**2.331.422.417**		**2.802.925.346**		**104.998.102**		**527.684.884**						**632.682.986**	**0**	**22,57**		**632.682.986**	**0**	**4,29**	Kelurahan Sukolilo Baru	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.554.791.463		901.858.199		1.151.687.461		104.998.102		156.255.832						261.253.934	0	22,68		261.253.934	0	3,46		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.554.791.463		901.858.199		1.151.687.461		104.998.102		156.255.832						261.253.934	0	22,68		261.253.934	0	3,46		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.178.304.956		1.429.564.218		1.651.237.885		-		371.429.052						371.429.052	0	22,49		371.429.052	0	5,17		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		9		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			7.178.304.956		1.429.564.218		1.651.237.885		-		371.429.052						371.429.052	0	22,49		371.429.052	0	5,17		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		9		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**109.153.167.409**		**18.917.704.633**		**21.386.445.984**		**4.640.684.985**		**5.956.795.393**						**10.597.480.378**	**63,63**	**49,55**		**10.597.480.378**	**63,63**	**9,71**	Kec. Dukuh Pakis	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	98,89		97,46		98,29		98,44		98,14						98,14		99,85		98,14		99,24			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.932.000		-		-						-	37,5	0		-	37,5	0		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.932.000		-		-						-	37,5	0		-	37,5	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			88.335.764.899		15.445.830.866		17.446.100.585		4.034.726.584		5.006.418.138						9.041.144.722	92	51,82		9.041.144.722	92	10,23		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		50		50		46		46						46		92		46		92			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			88.335.764.899		15.445.830.866		17.446.100.585		4.034.726.584		5.006.418.138						9.041.144.722	92	51,82		9.041.144.722	92	10,23		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		50		50		46		46						46		92		46		92			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			20.236.873.085		3.389.376.367		3.819.159.385		605.958.401		943.026.530						1.548.984.931	100	40,56		1.548.984.931	100	7,65		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		2		0		2						2		100		2		100			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.236.873.085		3.389.376.367		3.819.159.385		605.958.401		943.026.530						1.548.984.931	100	40,56		1.548.984.931	100	7,65		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		2		0		2						2		100		2		100			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			567.529.425		82.497.400		117.254.014		-		7.350.725						7.350.725	25	6,27		7.350.725	25	1,3		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		4		4		0		1						1		25		1		25			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			567.529.425		82.497.400		117.254.014		-		7.350.725						7.350.725	25	6,27		7.350.725	25	1,3		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		4		4		0		1						1		25		1		25			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**703.430.604**		**76.588.800**		**130.383.000**		-		**30.478.950**						**30.478.950**	**50**	**23,38**		**30.478.950**	**50**	**4,33**	Kec. Dukuh Pakis	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			703.430.604		76.588.800		130.383.000		-		30.478.950						30.478.950	50	23,38		30.478.950	50	4,33		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			703.430.604		76.588.800		130.383.000		-		30.478.950						30.478.950	50	23,38		30.478.950	50	4,33		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		1		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		**-**		**6.460.148.000**		**883.160.800**		**1.317.519.000**						**2.200.679.800**	**49,76**	**34,07**		**2.200.679.800**	**49,76**	**1833,9**	Kec. Dukuh Pakis	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	79,89		65,5		68,32		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		6.460.148.000		883.160.800		1.317.519.000						2.200.679.800	49,76	34,07		2.200.679.800	49,76	1833,9		
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	155		0		155		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.085.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	155		0		155		0		0						0		0		0		0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	12600		0		12600		12.540		12.540						12.540		99,52		12.540		99,52			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		5.375.148.000		883.160.800		1.317.519.000						2.200.679.800	99,52	40,94		2.200.679.800	99,52	3667,8		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	12600		0		12600		12.540		12.540						12.540		99,52		12.540		99,52			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**802.477.334**		-		**132.685.200**		-		**10.116.600**						**10.116.600**	**50**	**7,62**		**10.116.600**	**50**	**1,26**	Kec. Dukuh Pakis	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			802.477.334		-		132.685.200		-		10.116.600						10.116.600	50	7,62		10.116.600	50	1,26		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	6		6		6		1		2						3		50		3		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			802.477.334		-		132.685.200		-		10.116.600						10.116.600	50	7,62		10.116.600	50	1,26		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	6		6		6		1		2						3		50		3		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masvarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**19.862.460.808**		**2.931.774.164**		**3.723.979.724**		**276.777.356**		**165.934.909**						**442.712.265**	**0**	**11,89**		**442.712.265**	**0**	**2,23**	Kelurahan Dukuh Kupang	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12.122.447.424		658.858.777		1.058.280.699		109.783.406		165.934.909						275.718.315	0	26,05		275.718.315	0	2,27		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12.122.447.424		658.858.777		1.058.280.699		109.783.406		165.934.909						275.718.315	0	26,05		275.718.315	0	2,27		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.740.013.384		2.272.915.387		2.665.699.025		166.993.950		-						166.993.950	0	6,26		166.993.950	0	2,16		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		2		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			7.740.013.384		2.272.915.387		2.665.699.025		166.993.950		-						166.993.950	0	6,26		166.993.950	0	2,16		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		2		3		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masvarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**22.802.157.501**		**3.376.060.740**		**4.338.038.888**		**98.036.552**		**392.916.548**						**490.953.100**	**0**	**11,32**		**490.953.100**	**0**	**2,15**	Kelurahan Dukuh Pakis	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.080.767.142		595.505.169		712.729.076		98.036.552		145.513.088						243.549.640	0	34,17		243.549.640	0	4,79		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5.080.767.142		595.505.169		712.729.076		98.036.552		145.513.088						243.549.640	0	34,17		243.549.640	0	4,79		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			17.721.390.359		2.780.555.571		3.625.309.812		-		247.403.460						247.403.460	0	6,82		247.403.460	0	1,4		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		2		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			17.721.390.359		2.780.555.571		3.625.309.812		-		247.403.460						247.403.460	0	6,82		247.403.460	0	1,4		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		2		0		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**15.338.339.451**		**1.351.760.884**		**2.918.070.933**		**97.774.015**		**162.257.361**						**260.031.376**	**0**	**8,91**		**260.031.376**	**0**	**1,7**	Kelurahan Gunungsari	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.257.920.163		669.041.282		1.591.132.234		97.774.015		149.831.910						247.605.925	0	15,56		247.605.925	0	2,67		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Gunungsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.257.920.163		669.041.282		1.591.132.234		97.774.015		149.831.910						247.605.925	0	15,56		247.605.925	0	2,67		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.080.419.288		682.719.602		1.326.938.699		-		12.425.451						12.425.451	0	0,94		12.425.451	0	0,2		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		2		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			6.080.419.288		682.719.602		1.326.938.699		-		12.425.451						12.425.451	0	0,94		12.425.451	0	0,2		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		2		3		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.217.739.453**		**2.485.516.180**		**3.465.867.745**		**113.264.988**		**328.182.037**						**441.447.025**	**0**	**12,74**		**441.447.025**	**0**	**2,42**	Kelurahan Pradah Kalikendal	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.594.995.111		676.025.898		1.266.612.663		113.264.988		168.985.837						282.250.825	0	22,28		282.250.825	0	3,72		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.594.995.111		676.025.898		1.266.612.663		113.264.988		168.985.837						282.250.825	0	22,28		282.250.825	0	3,72		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.622.744.342		1.809.490.282		2.199.255.082		-		159.196.200						159.196.200	0	7,24		159.196.200	0	1,5		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.622.744.342		1.809.490.282		2.199.255.082		-		159.196.200						159.196.200	0	7,24		159.196.200	0	1,5		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**115.578.253.909**		**20.524.017.238**		**22.671.234.308**		**5.008.210.268**		**6.496.271.652**						**11.504.481.920**	**28,21**	**50,74**		**11.504.481.920**	**27,96**	**9,95**	Kec. Gayungan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	96,53		97,06		96,50		97,16		97,21						97,21		100,74		97,21		100,7			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.932.000		-		1.300.000						1.300.000	37,5	33,06		1.300.000	37,5	10		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.932.000		-		1.300.000						1.300.000	37,5	33,06		1.300.000	37,5	10		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			95.750.076.731		17.187.588.095		18.891.139.482		4.425.596.066		5.613.580.692						10.039.176.758	75,34	53,14		10.039.176.758	74,32	10,48		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	74		59		73		54		55						55		75,34		55		74,32			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			95.750.076.731		17.187.588.095		18.891.139.482		4.425.596.066		5.613.580.692						10.039.176.758	75,34	53,14		10.039.176.758	74,32	10,48		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	74		59		73		54		55						55		75,34		55		74,32			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			19.338.817.178		3.251.903.043		3.662.435.131		582.614.202		867.476.460						1.450.090.662	0	39,59		1.450.090.662	0	7,5		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		17		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.338.817.178		3.251.903.043		3.662.435.131		582.614.202		867.476.460						1.450.090.662	0	39,59		1.450.090.662	0	7,5		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		17		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			476.360.000		84.526.100		113.727.695		-		13.914.500						13.914.500	0	12,23		13.914.500	0	2,92		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		4		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			476.360.000		84.526.100		113.727.695		-		13.914.500						13.914.500	0	12,23		13.914.500	0	2,92		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		4		5		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**653.388.000**		**44.859.200**		**136.078.724**		**2.122.200**		**32.710.500**						**34.832.700**	**50**	**25,6**		**34.832.700**	**50**	**5,33**	Kec. Gayungan	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			653.388.000		44.859.200		136.078.724		2.122.200		32.710.500						34.832.700	50	25,6		34.832.700	50	5,33		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			653.388.000		44.859.200		136.078.724		2.122.200		32.710.500						34.832.700	50	25,6		34.832.700	50	5,33		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**4.596.751.200**		**581.000.000**		**878.092.800**						**1.459.092.800**	**49,18**	**31,74**		**1.459.092.800**	**49,18**	**1215,91**	Kec. Gayungan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		50		50		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		4.596.751.200		581.000.000		878.092.800						1.459.092.800	49,18	31,74		1.459.092.800	49,18	1215,91		
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	150		0		150		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.050.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	150		0		150		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	8520		0		8520		8.380		8.380						8.380		98,36		8.380		98,36			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		3.546.751.200		581.000.000		878.092.800						1.459.092.800	98,36	41,14		1.459.092.800	98,36	2431,82		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	8520		0		8520		8.380		8.380						8.380		98,36		8.380		98,36			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**729.708.000**		-		**167.512.800**		-		**25.673.600**						**25.673.600**	**50**	**15,33**		**25.673.600**	**50**	**3,52**	Kec. Gayungan	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			729.708.000		-		167.512.800		-		25.673.600						25.673.600	50	15,33		25.673.600	50	3,52		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			729.708.000		-		167.512.800		-		25.673.600						25.673.600	50	15,33		25.673.600	50	3,52		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksanaya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**20.673.656.965**		**2.357.317.932**		**2.653.618.076**		**89.881.310**		**273.534.043**						**363.415.353**	**0**	**13,7**		**363.415.353**	**0**	**1,76**	Kelurahan Dukuh Menanggal	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.646.774.192		969.615.308		677.459.153		89.881.310		134.691.093						224.572.403	0	33,15		224.572.403	0	3,38		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6.646.774.192		969.615.308		677.459.153		89.881.310		134.691.093						224.572.403	0	33,15		224.572.403	0	3,38		
			Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			14.026.882.773		1.387.702.624		1.976.158.923		-		138.842.950						138.842.950	0	7,03		138.842.950	0	0,99		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9		5		9		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			14.026.882.773		1.387.702.624		1.976.158.923		-		138.842.950						138.842.950	0	7,03		138.842.950	0	0,99		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9		5		9		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima baci Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**22.037.945.776**		**3.603.055.869**		**4.182.662.046**		**365.884.542**		**188.593.901**						**554.478.443**	**0**	**13,26**		**554.478.443**	**0**	**2,52**	Kelurahan Gayungan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.748.116.828		852.335.100		1.120.859.603		117.838.526		175.823.174						293.661.700	0	26,2		293.661.700	0	2,73		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Gayungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.748.116.828		852.335.100		1.120.859.603		117.838.526		175.823.174						293.661.700	0	26,2		293.661.700	0	2,73		
			Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.289.828.948		2.750.720.769		3.061.802.443		248.046.016		12.770.727						260.816.743	0	8,52		260.816.743	0	2,31		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		7		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.289.828.948		2.750.720.769		3.061.802.443		248.046.016		12.770.727						260.816.743	0	8,52		260.816.743	0	2,31		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		7		2		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima baci Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.655.012.612**		**3.056.192.667**		**4.843.708.109**		**114.920.149**		**1.082.911.323**						**1.197.831.472**	**0**	**24,73**		**1.197.831.472**	**0**	**8,17**	Kelurahan Ketintang	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.101.861.755		709.777.176		1.091.450.540		114.920.149		173.244.485						288.164.634	0	26,4		288.164.634	0	4,72		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Ketintang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6.101.861.755		709.777.176		1.091.450.540		114.920.149		173.244.485						288.164.634	0	26,4		288.164.634	0	4,72		
			Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.553.150.857		2.346.415.491		3.752.257.569		-		909.666.838						909.666.838	0	24,24		909.666.838	0	10,64		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		8		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.553.150.857		2.346.415.491		3.752.257.569		-		909.666.838						909.666.838	0	24,24		909.666.838	0	10,64		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		8		8		0		0						0		0		0		0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**16.181.899.929**		**2.351.715.970**		**2.325.227.594**		**96.223.607**		**244.481.316**						**340.704.923**	**0**	**14,65**		**340.704.923**	**0**	**2,11**	Kelurahan Menanggal	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.371.544.349		725.794.453		839.331.962		96.223.607		143.347.688						239.571.295	0	28,54		239.571.295	0	2,86		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Menanggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0	0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			8.371.544.349		725.794.453		839.331.962		96.223.607		143.347.688						239.571.295	0	28,54		239.571.295	0	2,86		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0	0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.810.355.580		1.625.921.517		1.485.895.632		-		101.133.628						101.133.628	0	6,81		101.133.628	0	1,29		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		7		6		0		0						0	0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			7.810.355.580		1.625.921.517		1.485.895.632		-		101.133.628						101.133.628	0	6,81		101.133.628	0	1,29		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		7		6		0		0						0	0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**125.552.746.680**		**22.843.455.741**		**24.674.975.334**		**5.605.746.479**		**7.194.334.794**						**12.800.081.273**	**25,63**	**51,87**		**12.800.081.273**	**25,63**	**10,19**	Kec. Genteng	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	97,78		98,77		97,70		98,29		98,34						98,34	100,66		98,34		100,57			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.944.000		1.300.000		-						1.300.000	12,5	32,96		1.300.000	12,5	9,51		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1	12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.944.000		1.300.000		-						1.300.000	12,5	32,96		1.300.000	12,5	9,51		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1	12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.089.131.625		18.293.885.131		19.750.082.181		4.815.538.501		5.993.350.507						10.808.889.008	90	54,73		10.808.889.008	90	10,8		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		57		60		54		54						54	90		54		90			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100.089.131.625		18.293.885.131		19.750.082.181		4.815.538.501		5.993.350.507						10.808.889.008	90	54,73		10.808.889.008	90	10,8		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		57		60		54		54						54	90		54		90			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			24.822.120.797		4.513.947.585		4.814.943.131		784.363.858		1.193.790.577						1.978.154.435	0	41,08		1.978.154.435	0	7,97		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11		11		11		0		0						0	0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			24.822.120.797		4.513.947.585		4.814.943.131		784.363.858		1.193.790.577						1.978.154.435	0	41,08		1.978.154.435	0	7,97		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11		11		11		0		0						0	0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			627.827.803		35.623.025		106.006.022		4.544.120		7.193.710						11.737.830	0	11,07		11.737.830	0	1,87		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		5		0		0						0	0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			627.827.803		35.623.025		106.006.022		4.544.120		7.193.710						11.737.830	0	11,07		11.737.830	0	1,87		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		5		0		0						0	0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**1.632.806.400**		**73.949.600**		**262.966.912**		**5.896.800**		**61.823.250**						**67.720.050**	**50**	**25,75**		**67.720.050**	**50**	**4,15**	Kec. Genteng	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100	100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			1.632.806.400		73.949.600		262.966.912		5.896.800		61.823.250						67.720.050	50	25,75		67.720.050	50	4,15		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6	50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.632.806.400		73.949.600		262.966.912		5.896.800		61.823.250						67.720.050	50	25,75		67.720.050	50	4,15		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**6.621.344.000**		**739.251.000**		**1.138.144.494**						**1.877.395.494**	**51,79**	**28,35**		**1.877.395.494**	**51,79**	**1564,5**	Kec. Genteng	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		50		50		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		6.621.344.000		739.251.000		1.138.144.494						1.877.395.494	51,79	28,35		1.877.395.494	51,79	1564,5		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	10740		0		10740		11.125		11.125						11.125		103,58		11.125		103,58			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		4.486.344.000		739.251.000		1.095.491.600						1.834.742.600	103,58	40,9		1.834.742.600	103,58	3057,9		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	10740		0		10740		11.125		11.125						11.125		103,58		11.125		103,58			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	305		0		305		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		2.135.000.000		-		42.652.894						42.652.894	0	2		42.652.894	0	71,09		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	305		0		305		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**643.860.000**		-		**132.445.200**		**30.959.340**		**36.290.800**						**67.250.140**	**50**	**50,78**		**67.250.140**	**50**	**10,44**	Kec. Genteng	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			643.860.000		-		132.445.200		30.959.340		36.290.800						67.250.140	50	50,78		67.250.140	50	10,44		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			643.860.000		-		132.445.200		30.959.340		36.290.800						67.250.140	50	50,78		67.250.140	50	10,44		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.739.440.028**		**3.077.636.912**		**3.587.949.265**		**151.519.465**		**392.822.720**						**544.342.185**	**0**	**15,17**		**544.342.185**	**0**	**2,9**	Kelurahan Embong Kaliasin	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.377.978.268		952.983.337		1.177.336.973		151.519.465		227.341.048						378.860.513	0	32,18		378.860.513	0	4,04		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.377.978.268		952.983.337		1.177.336.973		151.519.465		227.341.048						378.860.513	0	32,18		378.860.513	0	4,04		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.361.461.760		2.124.653.575		2.410.612.292		-		165.481.672						165.481.672	0	6,86		165.481.672	0	1,77		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		9		66		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			9.361.461.760		2.124.653.575		2.410.612.292		-		165.481.672						165.481.672	0	6,86		165.481.672	0	1,77		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		9		66		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**13.817.071.076**		**2.136.879.359**		**2.628.654.400**		**117.851.447**		**276.622.380**						**394.473.827**	**0**	**15,01**		**394.473.827**	**0**	**2,85**	Kelurahan Genteng	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.344.446.141		751.155.775		1.184.523.505		117.851.447		175.151.238						293.002.685	0	24,74		293.002.685	0	3,99		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Genteng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.344.446.141		751.155.775		1.184.523.505		117.851.447		175.151.238						293.002.685	0	24,74		293.002.685	0	3,99		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.472.624.935		1.385.723.584		1.444.130.895		-		101.471.142						101.471.142	0	7,03		101.471.142	0	1,57		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		6		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			6.472.624.935		1.385.723.584		1.444.130.895		-		101.471.142						101.471.142	0	7,03		101.471.142	0	1,57		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		6		4		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**17.595.799.993**		**2.879.331.933**		**3.347.545.715**		**175.792.302**		**341.451.332**						**517.243.634**	**0**	**15,45**		**517.243.634**	**0**	**2,94**	Kelurahan Kapasari	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.168.400.373		968.174.996		1.443.302.012		162.924.538		242.129.367						405.053.905	0	28,06		405.053.905	0	3,98		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kapasari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.168.400.373		968.174.996		1.443.302.012		162.924.538		242.129.367						405.053.905	0	28,06		405.053.905	0	3,98		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.427.399.620		1.911.156.937		1.904.243.703		12.867.764		99.321.965						112.189.729	0	5,89		112.189.729	0	1,51		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		7		13		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			7.427.399.620		1.911.156.937		1.904.243.703		12.867.764		99.321.965						112.189.729	0	5,89		112.189.729	0	1,51		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		7		13		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.480.778.368**		**2.150.856.794**		**2.754.922.629**		**145.034.200**		**217.448.568**						**362.482.768**	**0**	**13,16**		**362.482.768**	**0**	**2,5**	Kelurahan Ketabang	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.448.393.139		958.977.691		1.102.801.429		145.034.200		217.448.568						362.482.768	0	32,87		362.482.768	0	4,29		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Ketabang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			8.448.393.139		958.977.691		1.102.801.429		145.034.200		217.448.568						362.482.768	0	32,87		362.482.768	0	4,29		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.032.385.229		1.191.879.103		1.652.121.200		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		4		27		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			6.032.385.229		1.191.879.103		1.652.121.200		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		4		27		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.102.329.646**		**2.693.354.806**		**3.425.647.693**		**204.382.038**		**412.725.856**						**617.107.894**	**0**	**18,01**		**617.107.894**	**0**	**3,41**	Kelurahan Peneleh	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat		Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.829.717.013		1.211.933.591		1.422.647.880		204.382.038		302.742.816						507.124.854	0	35,65		507.124.854	0	4,29		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Peneleh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			11.829.717.013		1.211.933.591		1.422.647.880		204.382.038		302.742.816						507.124.854	0	35,65		507.124.854	0	4,29		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.272.612.633		1.481.421.215		2.002.999.813		-		109.983.040						109.983.040	0	5,49		109.983.040	0	1,75		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		3		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			6.272.612.633		1.481.421.215		2.002.999.813		-		109.983.040						109.983.040	0	5,49		109.983.040	0	1,75		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		3		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**141.861.747.661**		**25.280.142.342**		**27.679.582.025**		**6.000.306.577**		**7.563.375.969**						**13.563.682.546**	**36,4**	**49**		**13.563.682.546**	**39,29**	**9,56**	Kec. Gubeng	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	96,82		97,32		96,61		98,14		98,22						98,22		101,67		98,22		101,45			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.944.000		-		1.300.000						1.300.000	12,5	32,96		1.300.000	12,5	9,51		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		2		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.944.000		-		1.300.000						1.300.000	12,5	32,96		1.300.000	12,5	9,51		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		2		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			110.491.262.505		19.932.487.178		21.802.841.459		5.056.056.899		6.091.549.576						11.147.606.475	96,43	51,13		11.147.606.475	108	10,09		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		59		56		54		54						54		96,43		54		108			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			110.491.262.505		19.932.487.178		21.802.841.459		5.056.056.899		6.091.549.576						11.147.606.475	96,43	51,13		11.147.606.475	108	10,09		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		59		56		54		54						54		96,43		54		108			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			30.564.965.815		5.199.111.764		5.766.480.022		944.249.678		1.452.449.223						2.396.698.901	16,67	41,56		2.396.698.901	16,67	7,84		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		8		6		0		1						1		16,67		1		16,67			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.564.965.815		5.199.111.764		5.766.480.022		944.249.678		1.452.449.223						2.396.698.901	16,67	41,56		2.396.698.901	16,67	7,84		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		8		6		0		1						1		16,67		1		16,67			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			791.852.886		148.543.400		106.316.544		-		18.077.170						18.077.170	20	17		18.077.170	20	2,28		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		6		5		0		1						1		20		1		20			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			791.852.886		148.543.400		106.316.544		-		18.077.170						18.077.170	20	17		18.077.170	20	2,28		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		6		5		0		1						1		20		1		20			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**1.196.424.000**		**113.648.000**		**236.964.331**		**7.776.000**		**60.983.850**						**68.759.850**	**50**	**29,02**		**68.759.850**	**50**	**5,75**	Kec. Gubeng	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			1.196.424.000		113.648.000		236.964.331		7.776.000		60.983.850						68.759.850	50	29,02		68.759.850	50	5,75		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.196.424.000		113.648.000		236.964.331		7.776.000		60.983.850						68.759.850	50	29,02		68.759.850	50	5,75		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**12.223.239.200**		**1.736.972.000**		**2.589.512.600**						**4.326.484.600**	**49,16**	**35,4**		**4.326.484.600**	**49,16**	**3605,4**	Kec. Gubeng	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		12.223.239.200		1.736.972.000		2.589.512.600						4.326.484.600	49,16	35,4		4.326.484.600	49,16	3605,4		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	25000		0		25000		24.580		24.580						24.580		98,32		24.580		98,32			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		10.403.239.200		1.736.972.000		2.589.512.600						4.326.484.600	98,32	41,59		4.326.484.600	98,32	7210,81		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	25000		0		25000		24.580		24.580						24.580		98,32		24.580		98,32			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	260		0		260		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.820.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	260		0		260		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**987.252.000**		-		**150.365.154**		-		**20.635.200**						**20.635.200**	**50**	**13,72**		**20.635.200**	**50**	**2,09**	Kec. Gubeng	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar kelurahan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			987.252.000		-		150.365.154		-		20.635.200						20.635.200	50	13,72		20.635.200	50	2,09		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			987.252.000		-		150.365.154		-		20.635.200						20.635.200	50	13,72		20.635.200	50	2,09		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**19.900.778.311**		**3.159.250.804**		**3.787.247.745**		**175.537.782**		**638.145.314**						**813.683.096**	**0**	**21,48**		**813.683.096**	**0**	**4,09**	Kelurahan Airlangga	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.641.248.367		1.035.068.484		1.087.028.572		175.537.782		258.967.529						434.505.311	0	39,97		434.505.311	0	5,03		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Airlangga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			8.641.248.367		1.035.068.484		1.087.028.572		175.537.782		258.967.529						434.505.311	0	39,97		434.505.311	0	5,03		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		5		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.259.529.944		2.124.182.320		2.700.219.173		-		379.177.785						379.177.785	0	14,04		379.177.785	0	3,37		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.259.529.944		2.124.182.320		2.700.219.173		-		379.177.785						379.177.785	0	14,04		379.177.785	0	3,37		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		8		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.491.759.458**		**3.125.092.133**		**3.435.321.710**		**300.598.125**		**211.468.563**						**512.066.688**	**0**	**14,91**		**512.066.688**	**0**	**2,77**	Kelurahan Baratajaya	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.361.069.727		843.148.353		1.455.776.961		141.033.206		211.468.563						352.501.769	0	24,21		352.501.769	0	3,4		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Baratajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.361.069.727		843.148.353		1.455.776.961		141.033.206		211.468.563						352.501.769	0	24,21		352.501.769	0	3,4		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.130.689.731		2.281.943.780		1.979.544.749		159.564.919		-						159.564.919	0	8,06		159.564.919	0	1,96		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.130.689.731		2.281.943.780		1.979.544.749		159.564.919		-						159.564.919	0	8,06		159.564.919	0	1,96		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.648.749.176**		**2.446.683.771**		**2.786.878.548**		**108.296.199**		**321.172.532**						**429.468.731**	**0**	**15,41**		**429.468.731**	**0**	**2,93**	Kelurahan Gubeng	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.395.516.093		661.115.878		772.968.829		108.296.199		160.203.140						268.499.339	0	34,74		268.499.339	0	4,98		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Gubeng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5.395.516.093		661.115.878		772.968.829		108.296.199		160.203.140						268.499.339	0	34,74		268.499.339	0	4,98		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.253.233.083		1.785.567.893		2.013.909.719		-		160.969.392						160.969.392	0	7,99		160.969.392	0	1,74		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			9.253.233.083		1.785.567.893		2.013.909.719		-		160.969.392						160.969.392	0	7,99		160.969.392	0	1,74		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**21.447.036.430**		**3.595.007.773**		**4.080.231.358**		**195.284.412**		**516.339.145**						**711.623.557**	**0**	**17,44**		**711.623.557**	**0**	**3,32**	Kelurahan Kertajaya	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.239.117.692		1.162.267.361		1.198.403.224		195.284.412		290.521.144						485.805.556	0	40,54		485.805.556	0	4,74		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kertajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		2		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.239.117.692		1.162.267.361		1.198.403.224		195.284.412		290.521.144						485.805.556	0	40,54		485.805.556	0	4,74		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		2		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.207.918.738		2.432.740.412		2.881.828.134		-		225.818.001						225.818.001	0	7,84		225.818.001	0	2,01		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.207.918.738		2.432.740.412		2.881.828.134		-		225.818.001						225.818.001	0	7,84		225.818.001	0	2,01		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**25.916.620.125**		**4.019.780.992**		**4.930.555.626**		**275.834.508**		**620.154.493**						**895.989.001**	**0**	**18,17**		**895.989.001**	**0**	**3,46**	Kelurahan Mojo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			14.182.625.596		1.738.927.883		2.228.985.978		275.834.508		416.232.887						692.067.395	0	31,05		692.067.395	0	4,88		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Mojo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		13		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			14.182.625.596		1.738.927.883		2.228.985.978		275.834.508		416.232.887						692.067.395	0	31,05		692.067.395	0	4,88		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		13		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.733.994.529		2.280.853.109		2.701.569.648		-		203.921.606						203.921.606	0	7,55		203.921.606	0	1,74		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		5		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.733.994.529		2.280.853.109		2.701.569.648		-		203.921.606						203.921.606	0	7,55		203.921.606	0	1,74		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		5		12		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**15.384.994.154**		**2.065.050.201**		**2.926.946.844**		**290.598.146**		**612.944.435**						**903.542.581**	**0**	**30,87**		**903.542.581**	**0**	**5,87**	Kelurahan Pucang Sewu	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.495.775.419		765.471.011		789.530.322		129.013.205		191.616.069						320.629.274	0	40,61		320.629.274	0	4,94		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6.495.775.419		765.471.011		789.530.322		129.013.205		191.616.069						320.629.274	0	40,61		320.629.274	0	4,94		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.889.218.735		1.299.579.190		2.137.416.522		161.584.941		421.328.366						582.913.307	0	27,27		582.913.307	0	6,56		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		3		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.889.218.735		1.299.579.190		2.137.416.522		161.584.941		421.328.366						582.913.307	0	27,27		582.913.307	0	6,56		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		3		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**108.639.916.972**		**19.357.949.541**		**21.245.498.333**		**4.688.924.372**		**6.237.100.275**						**10.926.024.647**	**40,5**	**51,43**		**10.926.024.647**	**31,04**	**10,06**	Kec. Gunung Anyar	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100		96,99		100		96,63		96,87						96,87		96,87		96,87		96,87			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.944.000		-		-						-	37,5	0		-	7,5	0		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40		9		8		2		1						3		37,5		3		7,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.944.000		-		-						-	37,5	0		-	7,5	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40		9		8		2		1						3		37,5		3		7,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			81.543.645.973		14.720.348.534		16.090.934.172		3.908.429.677		5.019.999.180						8.928.428.857	112,5	55,49		8.928.428.857	104,65	10,95		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43		45		40		45		45						45		112,5		45		104,65			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			81.543.645.973		14.720.348.534		16.090.934.172		3.908.429.677		5.019.999.180						8.928.428.857	112,5	55,49		8.928.428.857	104,65	10,95		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43		45		40		45		45						45		112,5		45		104,65			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			26.575.362.049		4.576.385.872		5.043.079.169		780.494.695		1.190.080.645						1.970.575.340	2	39,07		1.970.575.340	2	7,42		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100		30		100		0		2						2		2		2		2			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.575.362.049		4.576.385.872		5.043.079.169		780.494.695		1.190.080.645						1.970.575.340	2	39,07		1.970.575.340	2	7,42		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100		30		100		0		2						2		2		2		2			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			507.242.495		61.215.135		107.540.992		-		27.020.450						27.020.450	10	25,13		27.020.450	10	5,33		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		6		10		0		1						1		10		1		10			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			507.242.495		61.215.135		107.540.992		-		27.020.450						27.020.450	10	25,13		27.020.450	10	5,33		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		6		10		0		1						1		10		1		10			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**594.828.030**		**37.106.400**		**125.272.806**		**2.365.200**		**33.165.292**						**35.530.492**	**50**	**28,36**		**35.530.492**	**50**	**5,97**	Kec. Gunung Anyar	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	99,4		99,28		99,30		100		100						100		100,7		100		100,6			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			594.828.030		37.106.400		125.272.806		2.365.200		33.165.292						35.530.492	50	28,36		35.530.492	50	5,97		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			594.828.030		37.106.400		125.272.806		2.365.200		33.165.292						35.530.492	50	28,36		35.530.492	50	5,97		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**6.804.923.200**		**951.751.200**		**1.430.562.000**						**2.382.313.200**	**50,57**	**35,01**		**2.382.313.200**	**50,57**	**1985,26**	Kec. Gunung Anyar	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	50		50		50		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		6.804.923.200		951.751.200		1.430.562.000						2.382.313.200	50,57	35,01		2.382.313.200	50,57	1985,26		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	13940		0		13940		14.099		14.099						14.099		101,14		14.099		101,14			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		5.789.923.200		951.751.200		1.430.562.000						2.382.313.200	101,14	41,15		2.382.313.200	101,14	3970,52		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	13940		0		13940		14.099		14.099						14.099		101,14		14.099		101,14			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	145		0		145		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.015.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	145		0		145		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**966.421.615**		-		**181.495.200**		-		**35.240.870**						**35.240.870**	**50**	**19,42**		**35.240.870**	**50**	**3,65**	Kec. Gunung Anyar	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			966.421.615		-		181.495.200		-		35.240.870						35.240.870	50	19,42		35.240.870	50	3,65		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			966.421.615		-		181.495.200		-		35.240.870						35.240.870	50	19,42		35.240.870	50	3,65		
			Terlaksanaya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**15.503.776.607**		**2.137.177.626**		**2.972.374.456**		**149.513.452**		**675.338.030**						**824.851.482**	**33,33**	**27,75**		**824.851.482**	**4,17**	**5,32**	Kelurahan Gunung Anyar	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah																		0				0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Kecamatan dalam peningkatan inovasi																									
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.449.113.060		887.705.760		1.440.000.000		149.513.452		222.244.330						371.757.782	0	25,82		371.757.782	0	4,99		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.449.113.060		887.705.760		1.440.000.000		149.513.452		222.244.330						371.757.782	0	25,82		371.757.782	0	4,99		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		33,33				8,33			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.054.663.547		1.249.471.866		1.532.374.456		-		453.093.700						453.093.700	33,33	29,57		453.093.700	8,33	5,63		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		12		3		0		1						1		33,33		1		8,33			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.054.663.547		1.249.471.866		1.532.374.456		-		453.093.700						453.093.700	33,33	29,57		453.093.700	8,33	5,63		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		12		3		0		1						1		33,33		1		8,33			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**15.319.367.262**		**1.894.496.332**		**2.914.461.534**		**112.584.900**		**801.022.867**						**913.607.767**	**0**	**31,35**		**913.607.767**	**0**	**5,96**	Kelurahan Gunung Anyar Tambak	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.918.591.771		737.668.180		927.056.072		112.584.900		169.171.200						281.756.100	0	30,39		281.756.100	0	4,07		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6.918.591.771		737.668.180		927.056.072		112.584.900		169.171.200						281.756.100	0	30,39		281.756.100	0	4,07		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.400.775.491		1.156.828.152		1.987.405.462		-		631.851.667						631.851.667	0	31,79		631.851.667	0	7,52		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		2		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.400.775.491		1.156.828.152		1.987.405.462		-		631.851.667						631.851.667	0	31,79		631.851.667	0	7,52		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		2		0		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.304.140.888**		**2.390.237.366**		**2.711.538.669**		**81.537.331**		**612.224.812**						**693.762.143**	**0**	**25,59**		**693.762.143**	**0**	**4,85**	Kelurahan Rungkut Menanggal	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			4.181.934.966		685.945.634		795.600.000		81.537.331		122.279.486						203.816.817	0	25,62		203.816.817	0	4,87		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			4.181.934.966		685.945.634		795.600.000		81.537.331		122.279.486						203.816.817	0	25,62		203.816.817	0	4,87		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.122.205.922		1.704.291.732		1.915.938.669		-		489.945.326						489.945.326	0	25,57		489.945.326	0	4,84		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		11		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.122.205.922		1.704.291.732		1.915.938.669		-		489.945.326						489.945.326	0	25,57		489.945.326	0	4,84		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		11		4		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.289.201.125**		**1.982.784.153**		**2.718.475.660**		**119.871.862**		**362.619.224**						**482.491.086**	**0**	**17,75**		**482.491.086**	**0**	**3,38**	Kelurahan Rungkut Tengah	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.171.980.941		1.048.184.852		1.087.553.972		119.871.862		179.608.074						299.479.936	0	27,54		299.479.936	0	4,85		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6.171.980.941		1.048.184.852		1.087.553.972		119.871.862		179.608.074						299.479.936	0	27,54		299.479.936	0	4,85		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.117.220.184		934.599.301		1.630.921.688		-		183.011.150						183.011.150	0	11,22		183.011.150	0	2,25		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		6		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.117.220.184		934.599.301		1.630.921.688		-		183.011.150						183.011.150	0	11,22		183.011.150	0	2,25		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		6		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**114.388.139.215**		**20.412.385.406**		**22.208.872.714**		**5.040.262.959**		**6.367.090.444**						**11.407.353.403**	**34,38**	**51,36**		**11.407.353.403**	**26,88**	**9,97**	Kec. Jambangan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	98,59		97,15		98,59		97,38		97,24						97,24		98,63		97,24		98,63			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		1.300.000						1.300.000	37,5	32,96		1.300.000	7,5	10		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40		9		8		2		1						3		37,5		3		7,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		1.300.000						1.300.000	37,5	32,96		1.300.000	7,5	10		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40		9		8		2		1						3		37,5		3		7,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			96.390.634.309		17.330.961.450		19.046.281.829		4.512.115.088		5.520.704.964						10.032.820.052	100	52,68		10.032.820.052	100	10,41		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		59		55		55		55						55		100		55		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			96.390.634.309		17.330.961.450		19.046.281.829		4.512.115.088		5.520.704.964						10.032.820.052	100	52,68		10.032.820.052	100	10,41		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		59		55		55		55						55		100		55		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			17.339.187.406		3.004.889.305		3.096.755.614		528.147.871		833.545.980						1.361.693.851	0	43,97		1.361.693.851	0	7,85		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		8		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.339.187.406		3.004.889.305		3.096.755.614		528.147.871		833.545.980						1.361.693.851	0	43,97		1.361.693.851	0	7,85		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		8		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			645.317.500		76.534.651		61.891.271		-		11.539.500						11.539.500	0	18,64		11.539.500	0	1,79		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		5		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			645.317.500		76.534.651		61.891.271		-		11.539.500						11.539.500	0	18,64		11.539.500	0	1,79		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		5		10		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**584.572.800**		**44.282.400**		**115.247.893**		**2.721.600**		**27.396.900**						**30.118.500**	**50**	**26,13**		**30.118.500**	**50**	**5,15**	Kec. Jambangan	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			584.572.800		44.282.400		115.247.893		2.721.600		27.396.900						30.118.500	50	26,13		30.118.500	50	5,15		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			584.572.800		44.282.400		115.247.893		2.721.600		27.396.900						30.118.500	50	26,13		30.118.500	50	5,15		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**7.647.980.800**		**1.102.617.000**		**1.645.661.600**						**2.748.278.600**	**41,65**	**35,93**		**2.748.278.600**	**41,65**	**2290,23**	Kec. Jambangan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	75		25		25		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		7.647.980.800		1.102.617.000		1.645.661.600						2.748.278.600	41,65	35,93		2.748.278.600	41,65	2290,23		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	16000		0		16000		13.271		13.327						13.327		83,29		13.327		83,29			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		6.737.980.800		1.102.617.000		1.645.661.600						2.748.278.600	83,29	40,79		2.748.278.600	83,29	4580,46		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	16000		0		16000		13.271		13.327						13.327		83,29		13.327		83,29			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	130		0		130		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		910.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	130		0		130		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**966.675.450**		-		**183.705.600**		-		**44.654.400**						**44.654.400**	**50**	**24,31**		**44.654.400**	**50**	**4,62**	Kec. Jambangan	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			966.675.450		-		183.705.600		-		44.654.400						44.654.400	50	24,31		44.654.400	50	4,62		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		360		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			966.675.450		-		183.705.600		-		44.654.400						44.654.400	50	24,31		44.654.400	50	4,62		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		360		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**22.033.149.826**		**2.851.327.855**		**4.214.567.215**		**85.509.340**		**1.467.255.726**						**1.552.765.066**	**0**	**36,84**		**1.552.765.066**	**0**	**7,05**	Kelurahan Jambangan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.964.167.256		805.195.233		777.000.000		85.509.340		124.691.181						210.200.521	0	27,05		210.200.521	0	5,3		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Jambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	35		2		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.964.167.256		805.195.233		777.000.000		85.509.340		124.691.181						210.200.521	0	27,05		210.200.521	0	5,3		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	35		2		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			18.068.982.570		2.046.132.622		3.437.567.215		-		1.342.564.545						1.342.564.545	0	39,06		1.342.564.545	0	7,43		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		7		7		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			18.068.982.570		2.046.132.622		3.437.567.215		-		1.342.564.545						1.342.564.545	0	39,06		1.342.564.545	0	7,43		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		7		7		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.586.734.822**		**2.647.972.967**		**3.474.144.505**		**144.771.390**		**949.493.103**						**1.094.264.493**	**0**	**31,5**		**1.094.264.493**	**0**	**5,89**	Kelurahan Karah	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.092.884.771		860.249.469		986.444.800		144.771.390		215.977.754						360.749.144	0	36,57		360.749.144	0	3,97		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Karah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12		1		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.092.884.771		860.249.469		986.444.800		144.771.390		215.977.754						360.749.144	0	36,57		360.749.144	0	3,97		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12		1		12		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.493.850.051		1.787.723.498		2.487.699.705		-		733.515.349						733.515.349	0	29,49		733.515.349	0	7,73		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		9		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			9.493.850.051		1.787.723.498		2.487.699.705		-		733.515.349						733.515.349	0	29,49		733.515.349	0	7,73		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		9		12		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.595.829.764**		**1.982.063.205**		**2.776.810.796**		**69.080.853**		**223.762.647**						**292.843.500**	**0**	**10,55**		**292.843.500**	**0**	**2,01**	Kelurahan Kebonsari	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.510.176.181		409.689.418		461.612.000		69.080.853		102.431.038						171.511.891	0	37,15		171.511.891	0	4,89		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kebonsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.510.176.181		409.689.418		461.612.000		69.080.853		102.431.038						171.511.891	0	37,15		171.511.891	0	4,89		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.085.653.583		1.572.373.787		2.315.198.796		-		121.331.609						121.331.609	0	5,24		121.331.609	0	1,09		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.085.653.583		1.572.373.787		2.315.198.796		-		121.331.609						121.331.609	0	5,24		121.331.609	0	1,09		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.087.860.952**		**1.838.043.212**		**2.680.171.324**		**68.321.059**		**207.826.242**						**276.147.301**	**0**	**10,3**		**276.147.301**	**0**	**1,96**	Kelurahan Pagesangan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.106.834.373		424.833.342		1.007.760.542		68.321.059		101.827.841						170.148.900	0	16,88		170.148.900	0	2,79		
			Meningkatnya Inovasi pembangunan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6.106.834.373		424.833.342		1.007.760.542		68.321.059		101.827.841						170.148.900	0	16,88		170.148.900	0	2,79		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.981.026.579		1.413.209.870		1.672.410.782		-		105.998.401						105.998.401	0	6,34		105.998.401	0	1,33		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			7.981.026.579		1.413.209.870		1.672.410.782		-		105.998.401						105.998.401	0	6,34		105.998.401	0	1,33		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**112.866.927.986**		**20.255.306.986**		**21.964.210.923**		**5.019.077.112**		**6.159.951.820**						**11.179.028.932**	**29,13**	**50,9**		**11.179.028.932**	**29,13**	**9,9**	Kec. Karangpilang	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	96,9		96,44		96,81		96,87		97,44						97,44		100,65		97,44		100,56			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.932.000		-		-						-	12,5	0		-	12,5	0		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.932.000		-		-						-	12,5	0		-	12,5	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			91.105.876.474		16.387.981.649		17.976.161.913		4.346.354.114		5.161.627.262						9.507.981.376	104	52,89		9.507.981.376	104	10,44		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		53		50		52		52						52		104		52		104			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			91.105.876.474		16.387.981.649		17.976.161.913		4.346.354.114		5.161.627.262						9.507.981.376	104	52,89		9.507.981.376	104	10,44		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		53		50		52		52						52		104		52		104			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			21.206.490.262		3.790.586.883		3.889.990.610		672.722.998		986.777.918						1.659.500.916	0	42,66		1.659.500.916	0	7,83		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	19		19		19		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			21.206.490.262		3.790.586.883		3.889.990.610		672.722.998		986.777.918						1.659.500.916	0	42,66		1.659.500.916	0	7,83		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	19		19		19		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			541.561.250		76.738.454		94.126.400		-		11.546.640						11.546.640	0	12,27		11.546.640	0	2,13		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	29		14		29		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			541.561.250		76.738.454		94.126.400		-		11.546.640						11.546.640	0	12,27		11.546.640	0	2,13		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	29		14		29		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**663.388.000**		**86.141.200**		**124.345.800**		-		**29.898.450**						**29.898.450**	**50**	**24,04**		**29.898.450**	**50**	**4,51**	Kec. Karangpilang	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			663.388.000		86.141.200		124.345.800		-		29.898.450						29.898.450	50	24,04		29.898.450	50	4,51		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			663.388.000		86.141.200		124.345.800		-		29.898.450						29.898.450	50	24,04		29.898.450	50	4,51		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**6.347.824.000**		**817.600.000**		**1.233.439.600**						**2.051.039.600**	**35,08**	**32,31**		**2.051.039.600**	**35,08**	**1709,2**	Kec. Karangpilang	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		6.347.824.000		817.600.000		1.233.439.600						2.051.039.600	35,08	32,31		2.051.039.600	35,08	1709,2		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	18360		0		18360		12.880		12.880						12.880		70,15		12.880		70,15			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		5.332.824.000		817.600.000		1.233.439.600						2.051.039.600	70,15	38,46		2.051.039.600	70,15	3418,4		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	18360		0		18360		12.880		12.880						12.880		70,15		12.880		70,15			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	145		0		145		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.015.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	145		0		145		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**1.378.899.000**		-		**157.951.200**		-		**25.767.200**						**25.767.200**	**50**	**16,31**		**25.767.200**	**50**	**1,87**	Kec. Karangpilang	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat		Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			1.378.899.000		-		157.951.200		-		25.767.200						25.767.200	50	16,31		25.767.200	50	1,87		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			1.378.899.000		-		157.951.200		-		25.767.200						25.767.200	50	16,31		25.767.200	50	1,87		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**12.071.311.187**		**1.693.962.355**		**2.222.667.620**		**210.741.150**		**195.588.505**						**406.329.655**	**0**	**18,28**		**406.329.655**	**0**	**3,37**	Kelurahan Karang Pilang	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.223.024.934		385.845.977		440.868.160		65.028.325		96.384.753						161.413.078	0	36,61		161.413.078	0	5,01		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Karang Pilang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.223.024.934		385.845.977		440.868.160		65.028.325		96.384.753						161.413.078	0	36,61		161.413.078	0	5,01		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.848.286.253		1.308.116.378		1.781.799.460		145.712.825		99.203.752						244.916.577	0	13,75		244.916.577	0	2,77		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		7		7		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.848.286.253		1.308.116.378		1.781.799.460		145.712.825		99.203.752						244.916.577	0	13,75		244.916.577	0	2,77		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		7		7		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**20.244.518.050**		**3.056.713.370**		**3.851.456.012**		**193.848.205**		**615.368.420**						**809.216.625**	**0**	**21,01**		**809.216.625**	**0**	**4**	Kelurahan Kebraon	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			16.519.734.469		1.334.158.189		2.396.813.134		193.848.205		285.299.156						479.147.361	0	19,99		479.147.361	0	2,9		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kebraon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			16.519.734.469		1.334.158.189		2.396.813.134		193.848.205		285.299.156						479.147.361	0	19,99		479.147.361	0	2,9		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.724.783.581		1.722.555.181		1.454.642.878		-		330.069.264						330.069.264	0	22,69		330.069.264	0	8,86		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	13		6		13		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.724.783.581		1.722.555.181		1.454.642.878		-		330.069.264						330.069.264	0	22,69		330.069.264	0	8,86		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	13		6		13		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.523.655.528**		**2.650.617.872**		**3.524.067.317**		**352.018.896**		**568.298.900**						**920.317.796**	**0**	**26,12**		**920.317.796**	**0**	**4,97**	Kelurahan Kedurus	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.236.243.894		1.065.185.499		1.310.634.216		171.723.816		255.742.105						427.465.921	0	32,62		427.465.921	0	4,63		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kedurus	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.236.243.894		1.065.185.499		1.310.634.216		171.723.816		255.742.105						427.465.921	0	32,62		427.465.921	0	4,63		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.287.411.634		1.585.432.373		2.213.433.101		180.295.080		312.556.795						492.851.875	0	22,27		492.851.875	0	5,31		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9		9		13		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			9.287.411.634		1.585.432.373		2.213.433.101		180.295.080		312.556.795						492.851.875	0	22,27		492.851.875	0	5,31		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9		9		13		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**19.657.723.952**		**3.198.269.135**		**3.739.820.276**		**46.461.198**		**494.339.082**						**540.800.280**	**0**	**14,46**		**540.800.280**	**0**	**2,75**	Kelurahan Waru Gunung	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			2.368.501.628		274.343.888		450.600.000		46.461.198		69.030.318						115.491.516	0	25,63		115.491.516	0	4,88		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Waru Gunung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.368.501.628		274.343.888		450.600.000		46.461.198		69.030.318						115.491.516	0	25,63		115.491.516	0	4,88		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			17.289.222.324		2.923.925.247		3.289.220.276		-		425.308.764						425.308.764	0	12,93		425.308.764	0	2,46		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			17.289.222.324		2.923.925.247		3.289.220.276		-		425.308.764						425.308.764	0	12,93		425.308.764	0	2,46		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**113.686.052.784**		**19.574.469.579**		**21.406.870.494**		**4.905.622.138**		**6.314.595.740**						**11.220.217.878**	**34,38**	**52,41**		**11.220.217.878**	**34,38**	**9,87**	Kec. Kenjeran	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	97,4		99		97,32		97,76		98,13						98,13		100,83		98,13		100,75			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			115.956.064		-		3.944.000		-		-						-	37,5	0		-	37,5	0		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			115.956.064		-		3.944.000		-		-						-	37,5	0		-	37,5	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			84.596.410.734		15.191.062.573		16.928.253.924		4.141.039.627		5.190.863.983						9.331.903.610	100	55,13		9.331.903.610	100	11,03		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	47		49		47		47		47						47		100		47		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			84.596.410.734		15.191.062.573		16.928.253.924		4.141.039.627		5.190.863.983						9.331.903.610	100	55,13		9.331.903.610	100	11,03		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	47		49		47		47		47						47		100		47		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			28.299.023.225		4.316.590.116		4.393.386.170		764.582.511		1.117.070.157						1.881.652.668	0	42,83		1.881.652.668	0	6,65		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		16		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			28.299.023.225		4.316.590.116		4.393.386.170		764.582.511		1.117.070.157						1.881.652.668	0	42,83		1.881.652.668	0	6,65		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		16		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			674.662.761		66.816.890		81.286.400		-		6.661.600						6.661.600	0	8,2		6.661.600	0	0,99		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			674.662.761		66.816.890		81.286.400		-		6.661.600						6.661.600	0	8,2		6.661.600	0	0,99		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**187.188.000**		**125.968.800**		**180.199.093**		-		**41.042.700**						**41.042.700**	**50**	**22,78**		**41.042.700**	**50**	**21,93**	Kec. Kenjeran	

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat		Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			187.188.000		125.968.800		180.199.093		-		41.042.700						41.042.700	50	22,78		41.042.700	50	21,93		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			187.188.000		125.968.800		180.199.093		-		41.042.700						41.042.700	50	22,78		41.042.700	50	21,93		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**12.791.339.200**		**1.877.400.000**		**2.816.658.400**						**4.694.058.400**	**45,04**	**36,7**		**4.694.058.400**	**45,04**	**3911,72**	Kec. Kenjeran	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		12.791.339.200		1.877.400.000		2.816.658.400						4.694.058.400	45,04	36,7		4.694.058.400	45,04	3911,72		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	30060		0		30060		27.080		27.080						27.080		90,09		27.080		90,09			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		11.461.339.200		1.877.400.000		2.816.658.400						4.694.058.400	90,09	40,96		4.694.058.400	90,09	7823,43		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	30060		0		30060		27.080		27.080						27.080		90,09		27.080		90,09			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	950		0		190		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.330.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	950		0		190		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**894.493.580**		-		**115.027.200**		-		**18.272.150**						**18.272.150**	**50**	**15,89**		**18.272.150**	**50**	**2,04**	Kec. Kenjeran	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			894.493.580		-		115.027.200		-		18.272.150						18.272.150	50	15,89		18.272.150	50	2,04		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			894.493.580		-		115.027.200		-		18.272.150						18.272.150	50	15,89		18.272.150	50	2,04		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.169.588.135**		**3.161.301.528**		**3.619.019.503**		**346.452.819**		**1.246.037.139**						**1.592.489.958**	**0**	**44**		**1.592.489.958**	**0**	**8,76**	Kelurahan Bulak Banteng	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.060.400.000		1.051.106.173		1.081.315.200		171.081.709		252.738.526						423.820.235	0	39,19		423.820.235	0	8,38		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5.060.400.000		1.051.106.173		1.081.315.200		171.081.709		252.738.526						423.820.235	0	39,19		423.820.235	0	8,38		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.109.188.135		2.110.195.355		2.537.704.303		175.371.110		993.298.613						1.168.669.723	0	46,05		1.168.669.723	0	8,91		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		7		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			13.109.188.135		2.110.195.355		2.537.704.303		175.371.110		993.298.613						1.168.669.723	0	46,05		1.168.669.723	0	8,91		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		7		8		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**31.422.209.293**		**5.071.173.675**		**6.222.165.572**		**338.155.573**		**823.883.592**						**1.162.039.165**	**0**	**18,68**		**1.162.039.165**	**0**	**3,7**	Kelurahan Sidotopo Wetan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.387.200.000		2.021.213.811		2.073.600.000		338.155.573		504.886.693						843.042.266	0	40,66		843.042.266	0	8,12		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.387.200.000		2.021.213.811		2.073.600.000		338.155.573		504.886.693						843.042.266	0	40,66		843.042.266	0	8,12		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			21.035.009.293		3.049.959.864		4.148.565.572		-		318.996.899						318.996.899	0	7,69		318.996.899	0	1,52		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	14		11		14		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			21.035.009.293		3.049.959.864		4.148.565.572		-		318.996.899						318.996.899	0	7,69		318.996.899	0	1,52		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	14		11		14		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**17.027.088.135**		**2.430.661.910**		**3.358.619.503**		**237.747.114**		**930.060.525**						**1.167.807.639**	**0**	**34,77**		**1.167.807.639**	**0**	**6,86**	Kelurahan Tambak Wedi	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.868.800.000		755.799.118		787.200.000		126.485.377		189.023.073						315.508.450	0	40,08		315.508.450	0	8,16		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.868.800.000		755.799.118		787.200.000		126.485.377		189.023.073						315.508.450	0	40,08		315.508.450	0	8,16		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.158.288.135		1.674.862.792		2.571.419.503		111.261.737		741.037.452						852.299.189	0	33,15		852.299.189	0	6,48		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			13.158.288.135		1.674.862.792		2.571.419.503		111.261.737		741.037.452						852.299.189	0	33,15		852.299.189	0	6,48		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**31.212.209.291**		**4.886.444.546**		**6.180.165.570**		**327.476.803**		**726.758.300**						**1.054.235.103**	**0**	**17,06**		**1.054.235.103**	**0**	**3,38**	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.122.000.000		1.952.530.332		2.451.608.933		327.476.803		487.978.344						815.455.147	0	33,26		815.455.147	0	8,06		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.122.000.000		1.952.530.332		2.451.608.933		327.476.803		487.978.344						815.455.147	0	33,26		815.455.147	0	8,06		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			21.090.209.291		2.933.914.214		3.728.556.637		-		238.779.956						238.779.956	0	6,4		238.779.956	0	1,13		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			21.090.209.291		2.933.914.214		3.728.556.637		-		238.779.956						238.779.956	0	6,4		238.779.956	0	1,13		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**118.254.376.998**		**20.152.057.851**		**22.765.521.119**		**5.155.368.365**		**6.468.478.506**						**11.623.846.871**	**28,77**	**51,06**		**11.623.846.871**	**28,77**	**9,83**	Kec. Krembangan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	97,44		97,13		97,44		97,93		97,74						97,74		100,31		97,74		100,31			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.932.000		-		-						-	37,5	0		-	37,5	0		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.932.000		-		-						-	37,5	0		-	37,5	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			87.830.610.408		15.173.477.826		17.334.008.295		4.314.936.181		5.248.236.462						9.563.172.643	77,59	55,17		9.563.172.643	77,59	10,89		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58		44		58		45		45						45		77,59		45		77,59			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			87.830.610.408		15.173.477.826		17.334.008.295		4.314.936.181		5.248.236.462						9.563.172.643	77,59	55,17		9.563.172.643	77,59	10,89		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58		44		58		45		45						45		77,59		45		77,59			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			29.885.116.590		4.896.169.562		5.370.017.124		840.432.184		1.208.832.154						2.049.264.338	0	38,16		2.049.264.338	0	6,86		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13		15		13		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			29.885.116.590		4.896.169.562		5.370.017.124		840.432.184		1.208.832.154						2.049.264.338	0	38,16		2.049.264.338	0	6,86		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13		15		13		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			525.650.000		82.410.463		57.563.700		-		11.409.890						11.409.890	0	19,82		11.409.890	0	2,17		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		5		6		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			525.650.000		82.410.463		57.563.700		-		11.409.890						11.409.890	0	19,82		11.409.890	0	2,17		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		5		6		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima baci Masvarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**982.332.000**		**99.508.000**		**202.191.712**		**6.982.200**		**48.740.400**						**55.722.600**	**50**	**27,56**		**55.722.600**	**50**	**5,67**	Kec. Krembangan	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			982.332.000		99.508.000		202.191.712		6.982.200		48.740.400						55.722.600	50	27,56		55.722.600	50	5,67		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			982.332.000		99.508.000		202.191.712		6.982.200		48.740.400						55.722.600	50	27,56		55.722.600	50	5,67		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima baci Masvarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		**-**		**11.977.098.400**		**1.734.172.000**		**2.596.604.400**						**4.330.776.400**	**50,12**	**36,16**		**4.330.776.400**	**50,12**	**3608,98**	Kec. Krembangan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	70		70		70		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		11.977.098.400		1.734.172.000		2.596.604.400						4.330.776.400	50,12	36,16		4.330.776.400	50,12	3608,98		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	25320		0		25320		25.380		25.380						25.380		100,24		25.380		100,24			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		10.437.098.400		1.734.172.000		2.596.604.400						4.330.776.400	100,24	41,49		4.330.776.400	100,24	7217,96		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	25320		0		25320		25.380		25.380						25.380		100,24		25.380		100,24			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	220		0		220		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.540.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	220		0		220		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**804.150.000**		-		**136.320.459**		-		**27.264.092**						**27.264.092**	**50**	**20**		**27.264.092**	**50**	**3,39**	Kec. Krembangan	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			804.150.000		-		136.320.459		-		27.264.092						27.264.092	50	20		27.264.092	50	3,39		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			804.150.000		-		136.320.459		-		27.264.092						27.264.092	50	20		27.264.092	50	3,39		
			Terlaksanaya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**19.610.563.988**		**3.066.703.143**		**3.753.677.864**		**172.043.225**		**749.174.172**						**921.217.397**	**0**	**24,54**		**921.217.397**	**0**	**4,7**	Kelurahan Dupak	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.778.559.132		1.210.677.624		1.931.478.634		172.043.225		257.764.612						429.807.837	0	22,25		429.807.837	0	3,12		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Dupak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			13.778.559.132		1.210.677.624		1.931.478.634		172.043.225		257.764.612						429.807.837	0	22,25		429.807.837	0	3,12		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.832.004.856		1.856.025.519		1.822.199.230		-		491.409.560						491.409.560	0	26,97		491.409.560	0	8,43		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.832.004.856		1.856.025.519		1.822.199.230		-		491.409.560						491.409.560	0	26,97		491.409.560	0	8,43		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		3		3		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**28.553.037.029**		**4.522.250.108**		**5.432.125.666**		**176.978.696**		**394.477.503**						**571.456.199**	**0**	**10,52**		**571.456.199**	**0**	**2**	Kelurahan Kemayoran	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.432.692.492		1.121.360.587		1.153.411.575		176.978.696		264.026.973						441.005.669	0	38,23		441.005.669	0	4,68		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kemayoran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.432.692.492		1.121.360.587		1.153.411.575		176.978.696		264.026.973						441.005.669	0	38,23		441.005.669	0	4,68		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			19.120.344.537		3.400.889.521		4.278.714.091		-		130.450.530						130.450.530	0	3,05		130.450.530	0	0,68		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		4		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			19.120.344.537		3.400.889.521		4.278.714.091		-		130.450.530						130.450.530	0	3,05		130.450.530	0	0,68		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		4		5		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**22.602.577.351**		**3.340.546.062**		**4.188.736.928**		**170.269.076**		**280.723.045**						**450.992.121**	**0**	**10,77**		**450.992.121**	**0**	**2**	Kelurahan Krembangan Selatan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			19.505.406.638		1.055.274.726		2.507.792.487		170.269.076		255.176.190						425.445.266	0	16,96		425.445.266	0	2,18		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7		1		7		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			19.505.406.638		1.055.274.726		2.507.792.487		170.269.076		255.176.190						425.445.266	0	16,96		425.445.266	0	2,18		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7		1		7		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.097.170.713		2.285.271.336		1.680.944.441		-		25.546.855						25.546.855	0	1,52		25.546.855	0	0,82		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		6		6		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			3.097.170.713		2.285.271.336		1.680.944.441		-		25.546.855						25.546.855	0	1,52		25.546.855	0	0,82		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		6		6		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**25.400.088.430**		**3.096.076.846**		**4.832.287.092**		**227.180.225**		**341.343.945**						**568.524.170**	**0**	**11,77**		**568.524.170**	**0**	**2,24**	Kelurahan Morokrembangan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			18.756.075.259		1.982.635.862		3.568.284.442		227.180.225		341.343.945						568.524.170	0	15,93		568.524.170	0	3,03		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Morokrembangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5		1		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			18.756.075.259		1.982.635.862		3.568.284.442		227.180.225		341.343.945						568.524.170	0	15,93		568.524.170	0	3,03		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5		1		5		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.644.013.171		1.113.440.984		1.264.002.650		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		3		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			6.644.013.171		1.113.440.984		1.264.002.650		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		3		5		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima baoi Masvarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**22.755.967.498**		**3.192.969.423**		**4.329.251.385**		**253.440.225**		**279.954.030**						**533.394.255**	**0**	**12,32**		**533.394.255**	**0**	**2,34**	Kelurahan Perak Barat	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.826.958.823		1.019.757.274		1.290.724.525		162.143.326		242.604.620						404.747.946	0	31,36		404.747.946	0	4,12		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Perak Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5		1		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.826.958.823		1.019.757.274		1.290.724.525		162.143.326		242.604.620						404.747.946	0	31,36		404.747.946	0	4,12		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5		1		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12.929.008.675		2.173.212.149		3.038.526.860		91.296.899		37.349.410						128.646.309	0	4,23		128.646.309	0	1		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		4		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			12.929.008.675		2.173.212.149		3.038.526.860		91.296.899		37.349.410						128.646.309	0	4,23		128.646.309	0	1		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		4		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**144.170.663.001**		**24.849.095.156**		**27.664.044.823**		**6.243.470.778**		**7.898.077.060**						**14.141.547.838**	**35,71**	**51,12**		**14.141.547.838**	**35,71**	**9,81**	Kec. Lakarsantri	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	97,3		97,84		97,26		98,36		98,28						98,28		101,05		98,28		101,01			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.944.000		-		1.596.000						1.596.000	37,5	40,47		1.596.000	37,5	11,68		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.944.000		-		1.596.000						1.596.000	37,5	40,47		1.596.000	37,5	11,68		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			118.694.476.738		20.931.851.749		23.419.912.966		5.535.530.148		6.834.030.542						12.369.560.690	92,86	52,82		12.369.560.690	92,86	10,42		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		68		70		65		65						65		92,86		65		92,86			
		7.01.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			118.694.476.738		20.931.851.749		23.419.912.966		5.535.530.148		6.834.030.542						12.369.560.690	92,86	52,82		12.369.560.690	92,86	10,42		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		68		70		65		65						65		92,86		65		92,86			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			24.867.460.738		3.853.094.197		4.104.205.873		707.940.630		1.039.235.168						1.747.175.798	12,5	42,57		1.747.175.798	12,5	7,03		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		8		8		0		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			24.867.460.738		3.853.094.197		4.104.205.873		707.940.630		1.039.235.168						1.747.175.798	12,5	42,57		1.747.175.798	12,5	7,03		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		8		8		0		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			595.059.070		64.149.210		135.981.984		-		23.215.350						23.215.350	0	17,07		23.215.350	0	3,9		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		7		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			595.059.070		64.149.210		135.981.984		-		23.215.350						23.215.350	0	17,07		23.215.350	0	3,9		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		7		3		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**89.305.068**		**130.275.399**		**151.953.931**		**3.321.000**		**42.565.200**						**45.886.200**	**50**	**30,2**		**45.886.200**	**50**	**51,38**	Kec. Lakarsantri	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			89.305.068		130.275.399		151.953.931		3.321.000		42.565.200						45.886.200	50	30,2		45.886.200	50	51,38		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			89.305.068		130.275.399		151.953.931		3.321.000		42.565.200						45.886.200	50	30,2		45.886.200	50	51,38		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**5.911.076.800**		**793.782.800**		**1.184.372.000**						**1.978.154.800**	**49,44**	**33,47**		**1.978.154.800**	**49,44**	**1648,46**	Kec. Lakarsantri	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		50		50		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		5.911.076.800		793.782.800		1.184.372.000						1.978.154.800	49,44	33,47		1.978.154.800	49,44	1648,46		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	11400		0		11400		11.250		11.273						11.273		98,89		11.273		98,89			
		7.01.03.2.06.000 2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		4.791.076.800		793.782.800		1.184.372.000						1.978.154.800	98,89	41,29		1.978.154.800	98,89	3296,92		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	11400		0		11400		11.250		11.273						11.273		98,89		11.273		98,89			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	160		0		160		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.120.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	160		0		160		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**953.991.214**		-		**197.832.000**		-		**29.507.600**						**29.507.600**	**50**	**14,92**		**29.507.600**	**50**	**3,09**	Kec. Lakarsantri	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			953.991.214		-		197.832.000		-		29.507.600						29.507.600	50	14,92		29.507.600	50	3,09		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			953.991.214		-		197.832.000		-		29.507.600						29.507.600	50	14,92		29.507.600	50	3,09		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**13.848.976.611**		**2.324.817.317**		**2.657.553.951**		**75.902.871**		**276.340.215**						**352.243.086**	**0**	**13,25**		**352.243.086**	**0**	**2,54**	Kelurahan Bangkingan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.705.555.893		449.692.178		547.626.622		75.902.871		113.093.803						188.996.674	0	34,51		188.996.674	0	5,1		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Bangkingan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.705.555.893		449.692.178		547.626.622		75.902.871		113.093.803						188.996.674	0	34,51		188.996.674	0	5,1		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.143.420.718		1.875.125.139		2.109.927.329		-		163.246.412						163.246.412	0	7,74		163.246.412	0	1,61		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		8		7		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.143.420.718		1.875.125.139		2.109.927.329		-		163.246.412						163.246.412	0	7,74		163.246.412	0	1,61		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		8		7		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**12.548.379.699**		**1.880.775.071**		**2.387.289.848**		**54.006.838**		**209.240.297**						**263.247.135**	**0**	**11,03**		**263.247.135**	**0**	**2,1**	Kelurahan Jeruk	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			4.414.929.712		321.596.066		619.143.911		54.006.838		80.383.135						134.389.973	0	21,71		134.389.973	0	3,04		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Jeruk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			4.414.929.712		321.596.066		619.143.911		54.006.838		80.383.135						134.389.973	0	21,71		134.389.973	0	3,04		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.133.449.987		1.559.179.005		1.768.145.937		-		128.857.162						128.857.162	0	7,29		128.857.162	0	1,58		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		8		13		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.133.449.987		1.559.179.005		1.768.145.937		-		128.857.162						128.857.162	0	7,29		128.857.162	0	1,58		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		8		13		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**19.402.005.996**		**1.557.554.124**		**3.689.241.224**		**46.144.323**		**194.452.991**						**240.597.314**	**0**	**6,52**		**240.597.314**	**0**	**1,24**	Kelurahan Lakarsantri	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			2.343.952.015		302.002.647		539.685.710		46.144.323		68.896.341						115.040.664	0	21,32		115.040.664	0	4,91		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Lakarsantri	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.343.952.015		302.002.647		539.685.710		46.144.323		68.896.341						115.040.664	0	21,32		115.040.664	0	4,91		
			Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			17.058.053.981		1.255.551.477		3.149.555.514		-		125.556.650						125.556.650	0	3,99		125.556.650	0	0,74		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			17.058.053.981		1.255.551.477		3.149.555.514		-		125.556.650						125.556.650	0	3,99		125.556.650	0	0,74		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		1		1		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.166.103.238**		**2.715.467.527**		**3.456.044.117**		**144.554.202**		**361.517.349**						**506.071.551**	**0**	**14,64**		**506.071.551**	**0**	**2,79**	Kelurahan Lidah Kulon	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.326.270.683		871.135.290		923.215.680		144.554.202		214.410.381						358.964.583	0	38,88		358.964.583	0	4,9		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.326.270.683		871.135.290		923.215.680		144.554.202		214.410.381						358.964.583	0	38,88		358.964.583	0	4,9		
			Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.839.832.555		1.844.332.237		2.532.828.437		-		147.106.968						147.106.968	0	5,81		147.106.968	0	1,36		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		13		13		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.839.832.555		1.844.332.237		2.532.828.437		-		147.106.968						147.106.968	0	5,81		147.106.968	0	1,36		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		13		13		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**15.194.851.901**		**2.406.624.254**		**2.890.772.877**		**81.541.278**		**128.985.216**						**210.526.494**	**0**	**7,28**		**210.526.494**	**0**	**1,39**	Kelurahan Lidah Wetan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			4.109.397.633		527.303.267		769.600.459		81.541.278		128.985.216						210.526.494	0	27,36		210.526.494	0	5,12		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			4.109.397.633		527.303.267		769.600.459		81.541.278		128.985.216						210.526.494	0	27,36		210.526.494	0	5,12		
			Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.085.454.268		1.879.320.987		2.121.172.418		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	14		5		3		0		0						0		0		0		0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.085.454.268		1.879.320.987		2.121.172.418		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	14		5		3		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**15.466.460.602**		**2.572.953.616**		**2.934.721.643**		**43.368.189**		**293.411.120**						**336.779.309**	**0**	**11,48**		**336.779.309**	**0**	**2,18**	Kelurahan Sumurwelut	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			2.185.581.396		257.776.435		265.800.000		43.368.189		64.414.254						107.782.443	0	40,55		107.782.443	0	4,93		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sumurwelut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.185.581.396		257.776.435		265.800.000		43.368.189		64.414.254						107.782.443	0	40,55		107.782.443	0	4,93		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		4		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.280.879.206		2.315.177.181		2.668.921.643		-		228.996.866						228.996.866	0	8,58		228.996.866	0	1,72		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	15		2		14		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			13.280.879.206		2.315.177.181		2.668.921.643		-		228.996.866						228.996.866	0	8,58		228.996.866	0	1,72		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	15		2		14		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**147.144.734.923**		**25.302.839.452**		**28.637.142.133**		**6.288.805.281**		**8.072.238.309**						**14.361.043.590**	**34,38**	**50,15**		**14.361.043.590**	**34,38**	**9,76**	Kec. Mulyorejo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	97,45		97,3		97,03		97,07		97,15						97,15		100,12		97,15		99,69			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.693.850		-		3.944.000		-		1.300.000						1.300.000	37,5	32,96		1.300.000	37,5	9,49		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.693.850		-		3.944.000		-		1.300.000						1.300.000	37,5	32,96		1.300.000	37,5	9,49		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			116.785.562.634		20.554.966.698		23.043.997.279		5.444.634.134		6.670.958.828						12.115.592.962	95,45	52,58		12.115.592.962	95,45	10,37		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	66		66		66		63		63						63		95,45		63		95,45			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			116.785.562.634		20.554.966.698		23.043.997.279		5.444.634.134		6.670.958.828						12.115.592.962	95,45	52,58		12.115.592.962	95,45	10,37		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	66		66		66		63		63						63		95,45		63		95,45			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			29.634.848.329		4.658.938.312		5.416.642.113		844.171.147		1.389.152.431						2.233.323.578	4,55	41,23		2.233.323.578	4,55	7,54		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	22		18		22		0		1						1		4,55		1		4,55			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			29.634.848.329		4.658.938.312		5.416.642.113		844.171.147		1.389.152.431						2.233.323.578	4,55	41,23		2.233.323.578	4,55	7,54		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	22		18		22		0		1						1		4,55		1		4,55			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			710.630.110		88.934.442		172.558.741		-		10.827.050						10.827.050	0	6,27		10.827.050	0	1,52		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		5		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			710.630.110		88.934.442		172.558.741		-		10.827.050						10.827.050	0	6,27		10.827.050	0	1,52		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		5		3		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**227.154.080**		**80.430.400**		**232.111.531**		**5.605.200**		**55.904.850**						**61.510.050**	**50**	**26,5**		**61.510.050**	**50**	**27,08**	Kec. Mulyorejo	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			227.154.080		80.430.400		232.111.531		5.605.200		55.904.850						61.510.050	50	26,5		61.510.050	50	27,08		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			227.154.080		80.430.400		232.111.531		5.605.200		55.904.850						61.510.050	50	26,5		61.510.050	50	27,08		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**7.450.232.800**		**922.038.000**		**1.378.432.600**						**2.300.470.600**	**43,2**	**30,88**		**2.300.470.600**	**43,2**	**1917,06**	Kec. Mulyorejo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	87,5		87,5		87,5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		7.450.232.800		922.038.000		1.378.432.600						2.300.470.600	43,2	30,88		2.300.470.600	43,2	1917,06		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	15580		0		15580		13.460		13.460						13.460		86,39		13.460		86,39			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		5.595.232.800		922.038.000		1.378.432.600						2.300.470.600	86,39	41,11		2.300.470.600	86,39	3834,12		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	15580		0		15580		13.460		13.460						13.460		86,39		13.460		86,39			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	265		0		265		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.855.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	265		0		265		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**1.083.715.795**		-		**207.249.600**		-		**25.581.500**						**25.581.500**	**50**	**12,34**		**25.581.500**	**50**	**2,36**	Kec. Mulyorejo	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			1.083.715.795		-		207.249.600		-		25.581.500						25.581.500	50	12,34		25.581.500	50	2,36		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			1.083.715.795		-		207.249.600		-		25.581.500						25.581.500	50	12,34		25.581.500	50	2,36		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.449.978.411**		**2.945.612.765**		**3.532.880.101**		**610.707.432**		**866.030.852**						**1.476.738.284**	**0**	**41,8**		**1.476.738.284**	**0**	**8**	Kelurahan Dukuh Sutorejo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.733.201.117		970.480.165		1.224.987.604		135.007.772		201.743.662						336.751.434	0	27,49		336.751.434	0	5		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6.733.201.117		970.480.165		1.224.987.604		135.007.772		201.743.662						336.751.434	0	27,49		336.751.434	0	5		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.716.777.294		1.975.132.600		2.307.892.497		475.699.660		664.287.190						1.139.986.850	0	49,4		1.139.986.850	0	9,73		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		4		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.716.777.294		1.975.132.600		2.307.892.497		475.699.660		664.287.190						1.139.986.850	0	49,4		1.139.986.850	0	9,73		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		4		1		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**24.159.370.343**		**4.021.664.668**		**4.596.244.371**		**98.940.703**		**1.779.747.359**						**1.878.688.062**	**0**	**40,87**		**1.878.688.062**	**0**	**7,78**	Kelurahan Kalijudan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.128.469.310		585.295.834		951.418.611		98.940.703		146.425.709						245.366.412	0	25,79		245.366.412	0	4,78		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kalijudan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5.128.469.310		585.295.834		951.418.611		98.940.703		146.425.709						245.366.412	0	25,79		245.366.412	0	4,78		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			19.030.901.033		3.436.368.834		3.644.825.760		-		1.633.321.650						1.633.321.650	0	44,81		1.633.321.650	0	8,58		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		20		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			19.030.901.033		3.436.368.834		3.644.825.760		-		1.633.321.650						1.633.321.650	0	44,81		1.633.321.650	0	8,58		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		20		1		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**22.371.320.229**		**3.103.833.217**		**4.245.051.095**		**147.617.943**		**671.283.417**						**818.901.360**	**0**	**19,29**		**818.901.360**	**0**	**3,66**	Kelurahan Kalisari	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.511.426.327		1.052.927.861		1.429.025.280		147.617.943		221.507.297						369.125.240	0	25,83		369.125.240	0	4,91		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kalisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.511.426.327		1.052.927.861		1.429.025.280		147.617.943		221.507.297						369.125.240	0	25,83		369.125.240	0	4,91		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			14.859.893.902		2.050.905.356		2.816.025.815		-		449.776.120						449.776.120	0	15,97		449.776.120	0	3,03		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		14		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			14.859.893.902		2.050.905.356		2.816.025.815		-		449.776.120						449.776.120	0	15,97		449.776.120	0	3,03		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		14		1		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**13.890.795.641**		**453.744.247**		**2.642.680.267**		**58.504.249**		**1.296.860.780**						**1.355.365.029**	**0**	**51,29**		**1.355.365.029**	**0**	**9,76**	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.309.378.992		356.372.299		628.970.093		58.504.249		87.497.929						146.002.178	0	23,21		146.002.178	0	4,41		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.309.378.992		356.372.299		628.970.093		58.504.249		87.497.929						146.002.178	0	23,21		146.002.178	0	4,41		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.581.416.649		97.371.948		2.013.710.174		-		1.209.362.851						1.209.362.851	0	60,06		1.209.362.851	0	11,43		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.581.416.649		97.371.948		2.013.710.174		-		1.209.362.851						1.209.362.851	0	60,06		1.209.362.851	0	11,43		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.581.431.651**		**2.700.331.492**		**3.535.059.044**		**142.795.532**		**609.405.503**						**752.201.035**	**0**	**21,28**		**752.201.035**	**0**	**4,05**	Kelurahan Manyar Sabrangan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.234.810.566		908.860.731		1.192.806.910		142.795.532		213.287.253						356.082.785	0	29,85		356.082.785	0	4,92		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Manyar Sabrangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.234.810.566		908.860.731		1.192.806.910		142.795.532		213.287.253						356.082.785	0	29,85		356.082.785	0	4,92		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.346.621.085		1.791.470.761		2.342.252.134		-		396.118.250						396.118.250	0	16,91		396.118.250	0	3,49		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		6		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.346.621.085		1.791.470.761		2.342.252.134		-		396.118.250						396.118.250	0	16,91		396.118.250	0	3,49		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		6		0		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima baci Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.889.925.387**		**2.562.782.231**		**3.593.749.009**		**165.131.711**		**549.717.804**						**714.849.515**	**0**	**19,89**		**714.849.515**	**0**	**3,78**	Kelurahan Mulyorejo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.831.350.185		994.263.101		1.355.469.027		165.131.711		242.788.350						407.920.061	0	30,09		407.920.061	0	3,77		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.831.350.185		994.263.101		1.355.469.027		165.131.711		242.788.350						407.920.061	0	30,09		407.920.061	0	3,77		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.058.575.202		1.568.519.130		2.238.279.982		-		306.929.454						306.929.454	0	13,71		306.929.454	0	3,81		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		11		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.058.575.202		1.568.519.130		2.238.279.982		-		306.929.454						306.929.454	0	13,71		306.929.454	0	3,81		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		11		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**117.310.932.144**		**20.548.660.665**		**22.385.467.640**		**4.993.737.110**		**6.425.372.589**						**11.419.109.699**	**32,44**	**51,01**		**11.419.109.699**	**31,04**	**9,73**	Kec. Pabean Cantian	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	98,7		98,21		98,2		98,31		98,61						98,61		100,42		98,61		99,91			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.000.000		-		3.932.000		-		1.300.000						1.300.000	12,5	33,06		1.300.000	12,5	5,91		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			22.000.000		-		3.932.000		-		1.300.000						1.300.000	12,5	33,06		1.300.000	12,5	5,91		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			88.558.543.507		15.729.806.136		17.474.675.538		4.115.856.126		5.150.100.635						9.265.956.761	83,93	53,03		9.265.956.761	78,33	10,46		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		51		56		47		47						47		83,93		47		78,33			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			88.558.543.507		15.729.806.136		17.474.675.538		4.115.856.126		5.150.100.635						9.265.956.761	83,93	53,03		9.265.956.761	78,33	10,46		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		51		56		47		47						47		83,93		47		78,33			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			28.008.976.476		4.747.494.750		4.794.508.102		877.880.984		1.262.286.302						2.140.167.286	33,33	44,64		2.140.167.286	33,33	7,64		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		6		6		0		2						2		33,33		2		33,33			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			28.008.976.476		4.747.494.750		4.794.508.102		877.880.984		1.262.286.302						2.140.167.286	33,33	44,64		2.140.167.286	33,33	7,64		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		6		6		0		2						2		33,33		2		33,33			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			721.412.161		71.359.779		112.352.000		-		11.685.652						11.685.652	0	10,4		11.685.652	0	1,62		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		5		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			721.412.161		71.359.779		112.352.000		-		11.685.652						11.685.652	0	10,4		11.685.652	0	1,62		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		5		4		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**1.105.211.495**		**71.982.000**		**220.331.893**		**5.977.800**		**53.430.300**						**59.408.100**	**50**	**26,96**		**59.408.100**	**50**	**5,38**	Kec. Pabean Cantian	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			1.105.211.495		71.982.000		220.331.893		5.977.800		53.430.300						59.408.100	50	26,96		59.408.100	50	5,38		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.105.211.495		71.982.000		220.331.893		5.977.800		53.430.300						59.408.100	50	26,96		59.408.100	50	5,38		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**7.387.556.800**		**934.638.800**		**1.404.028.400**						**2.338.667.200**	**50,76**	**31,66**		**2.338.667.200**	**50,76**	**1948,89**	Kec. Pabean Cantian	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		7.387.556.800		934.638.800		1.404.028.400						2.338.667.200	50,76	31,66		2.338.667.200	50,76	1948,89		
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	250		0		250		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.750.000.000		-		4.440.000						4.440.000	0	0,25		4.440.000	0	7,4		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	250		0		250		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	13460		0		13460		13.665		13.665						13.665		101,52		13.665		101,52			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		5.637.556.800		934.638.800		1.399.588.400						2.334.227.200	101,52	41,4		2.334.227.200	101,52	3890,38		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	13460		0		13460		13.665		13.665						13.665		101,52		13.665		101,52			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**731.702.930**		-		**106.442.400**		-		**18.030.642**						**18.030.642**	**50**	**16,94**		**18.030.642**	**50**	**2,46**	Kec. Pabean Cantian	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			731.702.930		-		106.442.400		-		18.030.642						18.030.642	50	16,94		18.030.642	50	2,46		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			731.702.930		-		106.442.400		-		18.030.642						18.030.642	50	16,94		18.030.642	50	2,46		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksanaya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.030.767.189**		**1.715.075.746**		**2.901.139.037**		**134.675.193**		**349.986.793**						**484.661.986**	**0**	**16,71**		**484.661.986**	**0**	**3,45**	Kelurahan Bongkaran	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.022.387.213		877.589.496		1.114.420.090		134.675.193		200.699.675						335.374.868	0	30,09		335.374.868	0	3,35		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Bongkaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.022.387.213		877.589.496		1.114.420.090		134.675.193		200.699.675						335.374.868	0	30,09		335.374.868	0	3,35		
			Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			4.008.379.976		837.486.250		1.786.718.947		-		149.287.118						149.287.118	0	8,36		149.287.118	0	3,72		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.008.379.976		837.486.250		1.786.718.947		-		149.287.118						149.287.118	0	8,36		149.287.118	0	3,72		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**23.438.954.748**		**4.240.269.083**		**4.250.187.566**		**173.009.988**		**461.330.400**						**634.340.388**	**0**	**14,92**		**634.340.388**	**0**	**2,71**	Kelurahan Krembangan Utara	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.431.502.202		1.176.529.771		1.689.928.561		173.009.988		256.273.111						429.283.099	0	25,4		429.283.099	0	4,12		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.431.502.202		1.176.529.771		1.689.928.561		173.009.988		256.273.111						429.283.099	0	25,4		429.283.099	0	4,12		
			Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.007.452.546		3.063.739.312		2.560.259.005		-		205.057.289						205.057.289	0	8,01		205.057.289	0	1,58		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			13.007.452.546		3.063.739.312		2.560.259.005		-		205.057.289						205.057.289	0	8,01		205.057.289	0	1,58		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**17.079.749.019**		**2.557.089.424**		**3.249.368.637**		**145.240.305**		**374.654.457**						**519.894.762**	**0**	**16**		**519.894.762**	**0**	**3,04**	Kelurahan Nyamplungan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.081.677.049		1.126.210.798		1.221.384.108		145.240.305		216.114.623						361.354.928	0	29,59		361.354.928	0	3,98		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Nyamplungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.081.677.049		1.126.210.798		1.221.384.108		145.240.305		216.114.623						361.354.928	0	29,59		361.354.928	0	3,98		
			Terlaksanaya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.998.071.970		1.430.878.626		2.027.984.529		-		158.539.834						158.539.834	0	7,82		158.539.834	0	1,98		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			7.998.071.970		1.430.878.626		2.027.984.529		-		158.539.834						158.539.834	0	7,82		158.539.834	0	1,98		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**29.126.981.910**		**4.191.568.739**		**5.476.150.479**		**331.355.019**		**693.986.476**						**1.025.341.495**	**0**	**18,72**		**1.025.341.495**	**0**	**3,52**	Kelurahan Tanjung Perak	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan [illegible]																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			20.932.073.274		2.325.765.574		2.834.381.804		331.355.019		492.635.863						823.990.882	0	29,07		823.990.882	0	3,94		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tanjung Perak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			20.932.073.274		2.325.765.574		2.834.381.804		331.355.019		492.635.863						823.990.882	0	29,07		823.990.882	0	3,94		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan [illegible]																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.194.908.636		1.865.803.165		2.641.768.675		-		201.350.613						201.350.613	0	7,62		201.350.613	0	2,46		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.194.908.636		1.865.803.165		2.641.768.675		-		201.350.613						201.350.613	0	7,62		201.350.613	0	2,46		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**111.505.286.799**		**18.581.065.682**		**21.529.545.490**		**4.558.854.977**		**5.701.554.949**						**10.260.409.926**	**27,29**	**47,66**		**10.260.409.926**	**27,29**	**9,2**	Kec. Pakal	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	97,49		97,44		97,45		97,82		97,94						97,94		100,5		97,94		100,46			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		-						-	37,5	0		-	37,5	0		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		-						-	37,5	0		-	37,5	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			84.835.935.621		14.185.121.789		16.741.522.181		3.797.010.535		4.574.797.143						8.371.807.678	71,67	50,01		8.371.807.678	71,67	9,87		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		45		60		43		43						43		71,67		43		71,67			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			84.835.935.621		14.185.121.789		16.741.522.181		3.797.010.535		4.574.797.143						8.371.807.678	71,67	50,01		8.371.807.678	71,67	9,87		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60		45		60		43		43						43		71,67		43		71,67			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			25.979.863.428		4.289.817.191		4.652.575.309		761.844.442		1.115.425.607						1.877.270.049	0	40,35		1.877.270.049	0	7,23		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		20		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.979.863.428		4.289.817.191		4.652.575.309		761.844.442		1.115.425.607						1.877.270.049	0	40,35		1.877.270.049	0	7,23		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		20		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			676.487.750		106.126.702		131.504.000		-		11.332.199						11.332.199	0	8,62		11.332.199	0	1,68		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	19		6		19		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			676.487.750		106.126.702		131.504.000		-		11.332.199						11.332.199	0	8,62		11.332.199	0	1,68		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	19		6		19		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**725.688.000**		**69.548.800**		**149.908.693**		**3.709.800**		**35.977.500**						**39.687.300**	**50**	**26,47**		**39.687.300**	**50**	**5,47**	Kec. Pakal	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		0		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			725.688.000		69.548.800		149.908.693		3.709.800		35.977.500						39.687.300	50	26,47		39.687.300	50	5,47		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			725.688.000		69.548.800		149.908.693		3.709.800		35.977.500						39.687.300	50	26,47		39.687.300	50	5,47		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**7.377.768.800**		**1.033.826.000**		**1.544.826.000**						**2.578.652.000**	**48,86**	**34,95**		**2.578.652.000**	**48,86**	**2148,88**	Kec. Pakal	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	92		0		88		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		7.377.768.800		1.033.826.000		1.544.826.000						2.578.652.000	48,86	34,95		2.578.652.000	48,86	2148,88		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	14940		0		14940		14.600		14.600						14.600		97,72		14.600		97,72			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		6.187.768.800		1.033.826.000		1.544.826.000						2.578.652.000	97,72	41,67		2.578.652.000	97,72	4297,75		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	14940		0		14940		14.600		14.600						14.600		97,72		14.600		97,72			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	170		0		170		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.190.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	170		0		170		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**691.384.500**		-		**138.571.200**		-		**23.078.950**						**23.078.950**	**50**	**16,65**		**23.078.950**	**50**	**3,34**	Kec. Pakal	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		0		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			691.384.500		-		138.571.200		-		23.078.950						23.078.950	50	16,65		23.078.950	50	3,34		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		0		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			691.384.500		-		138.571.200		-		23.078.950						23.078.950	50	16,65		23.078.950	50	3,34		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		0		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**23.825.724.854**		**3.876.816.676**		**4.555.598.987**		**231.339.756**		**760.526.770**						**991.866.526**	**0**	**21,77**		**991.866.526**	**0**	**4,16**	Kelurahan Babat Jerawat	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.700.431.562		1.388.245.956		1.523.148.862		231.339.756		346.830.410						578.170.166	0	37,96		578.170.166	0	4,94		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5		5		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			11.700.431.562		1.388.245.956		1.523.148.862		231.339.756		346.830.410						578.170.166	0	37,96		578.170.166	0	4,94		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5		5		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12.125.293.292		2.488.570.720		3.032.450.125		-		413.696.360						413.696.360	0	13,64		413.696.360	0	3,41		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	33		8		6		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			12.125.293.292		2.488.570.720		3.032.450.125		-		413.696.360						413.696.360	0	13,64		413.696.360	0	3,41		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	33		8		6		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**20.556.062.796**		**2.828.636.913**		**3.910.726.421**		**88.922.938**		**367.326.786**						**456.249.724**	**0**	**11,67**		**456.249.724**	**0**	**2,22**	Kelurahan Benowo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			4.743.310.851		837.274.535		902.400.000		88.922.938		132.928.812						221.851.750	0	24,58		221.851.750	0	4,68		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Benowo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		4		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			4.743.310.851		837.274.535		902.400.000		88.922.938		132.928.812						221.851.750	0	24,58		221.851.750	0	4,68		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		4		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			15.812.751.945		1.991.362.378		3.008.326.421		-		234.397.974						234.397.974	0	7,79		234.397.974	0	1,48		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	20		6		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			15.812.751.945		1.991.362.378		3.008.326.421		-		234.397.974						234.397.974	0	7,79		234.397.974	0	1,48		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	20		6		0		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**19.482.170.543**		**3.264.542.143**		**3.706.421.791**		**74.103.000**		**1.675.918.913**						**1.750.021.913**	**33,33**	**47,22**		**1.750.021.913**	**33,33**	**8,98**	Kelurahan Pakal	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.923.323.602		447.669.538		736.279.866		74.103.000		111.000.000						185.103.000	0	25,14		185.103.000	0	4,72		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Pakal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.923.323.602		447.669.538		736.279.866		74.103.000		111.000.000						185.103.000	0	25,14		185.103.000	0	4,72		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		66,67				66,67			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			15.558.846.941		2.816.872.605		2.970.141.925		-		1.564.918.913						1.564.918.913	66,67	52,69		1.564.918.913	66,67	10,06		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		7		6		0		4						4		66,67		4		66,67			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			15.558.846.941		2.816.872.605		2.970.141.925		-		1.564.918.913						1.564.918.913	66,67	52,69		1.564.918.913	66,67	10,06		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		7		6		0		4						4		66,67		4		66,67			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**24.105.341.488**		**3.688.551.363**		**4.503.288.070**		**94.790.735**		**556.314.976**						**651.105.711**	**0**	**14,46**		**651.105.711**	**0**	**2,7**	Kelurahan Sumberejo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			4.901.000.707		566.915.897		928.964.280		94.790.735		142.618.616						237.409.351	0	25,56		237.409.351	0	4,84		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sumberejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6		6		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			4.901.000.707		566.915.897		928.964.280		94.790.735		142.618.616						237.409.351	0	25,56		237.409.351	0	4,84		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6		6		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			19.204.340.781		3.121.635.466		3.574.323.790		-		413.696.360						413.696.360	0	11,57		413.696.360	0	2,15		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		4		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			19.204.340.781		3.121.635.466		3.574.323.790		-		413.696.360						413.696.360	0	11,57		413.696.360	0	2,15		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		4		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**149.293.602.896**		**25.333.186.246**		**28.508.840.554**		**6.322.834.059**		**8.066.207.703**						**14.389.041.762**	**27,8**	**50,47**		**14.389.041.762**	**27,8**	**9,64**	Kec. Rungkut	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100		96,08		100		96,92		96,87						96,87		96,87		96,87		96,87			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		-						-	37,5	0		-	37,5	0		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		-						-	37,5	0		-	37,5	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			114.061.052.803		19.406.806.114		22.506.872.594		5.274.044.337		6.508.396.492						11.782.440.829	73,68	52,35		11.782.440.829	73,68	10,33		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	76		62		76		56		56						56		73,68		56		73,68			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			114.061.052.803		19.406.806.114		22.506.872.594		5.274.044.337		6.508.396.492						11.782.440.829	73,68	52,35		11.782.440.829	73,68	10,33		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	76		62		76		56		56						56		73,68		56		73,68			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			34.716.342.093		5.860.727.326		5.882.231.960		1.048.789.722		1.542.550.822						2.591.340.544	0	44,05		2.591.340.544	0	7,46		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		27		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			34.716.342.093		5.860.727.326		5.882.231.960		1.048.789.722		1.542.550.822						2.591.340.544	0	44,05		2.591.340.544	0	7,46		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		27		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			503.208.000		65.652.806		115.792.000		-		15.260.389						15.260.389	0	13,18		15.260.389	0	3,03		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		11		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			503.208.000		65.652.806		115.792.000		-		15.260.389						15.260.389	0	13,18		15.260.389	0	3,03		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		11		5		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**2.048.942.390**		**120.698.400**		**322.464.331**		**8.051.400**		**78.281.100**						**86.332.500**	**50**	**26,77**		**86.332.500**	**50**	**4,21**	Kec. Rungkut	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			2.048.942.390		120.698.400		322.464.331		8.051.400		78.281.100						86.332.500	50	26,77		86.332.500	50	4,21		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.048.942.390		120.698.400		322.464.331		8.051.400		78.281.100						86.332.500	50	26,77		86.332.500	50	4,21		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		**-**		**12.095.970.400**		**1.607.200.000**		**2.423.220.000**						**4.030.420.000**	**50**	**33,32**		**4.030.420.000**	**50**	**3358,68**	Kec. Rungkut	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		12.095.970.400		1.607.200.000		2.423.220.000						4.030.420.000	50	33,32		4.030.420.000	50	3358,68		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	21960		0		21960		21.960		21.960						21.960		100		21.960		100			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		9.505.970.400		1.607.200.000		2.423.220.000						4.030.420.000	100	42,4		4.030.420.000	100	6717,37		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	21960		0		21960		21.960		21.960						21.960		100		21.960		100			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	370		0		370		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		2.590.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	370		0		370		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**769.149.000**		-		**201.363.600**		-		**31.760.600**						**31.760.600**	**50**	**15,77**		**31.760.600**	**50**	**4,13**	Kec. Rungkut	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			769.149.000		-		201.363.600		-		31.760.600						31.760.600	50	15,77		31.760.600	50	4,13		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			769.149.000		-		201.363.600		-		31.760.600						31.760.600	50	15,77		31.760.600	50	4,13		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**21.265.206.480**		**3.446.421.030**		**4.068.468.404**		**221.899.552**		**367.401.211**						**589.300.763**	**0**	**14,48**		**589.300.763**	**0**	**2,77**	Kelurahan Kalirungkut	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.028.672.778		1.306.330.167		1.355.400.000		221.899.552		326.792.616						548.692.168	0	40,48		548.692.168	0	4,98		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kalirungkut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			11.028.672.778		1.306.330.167		1.355.400.000		221.899.552		326.792.616						548.692.168	0	40,48		548.692.168	0	4,98		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.236.533.702		2.140.090.863		2.713.068.404		-		40.608.595						40.608.595	0	1,5		40.608.595	0	0,4		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.236.533.702		2.140.090.863		2.713.068.404		-		40.608.595						40.608.595	0	1,5		40.608.595	0	0,4		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**17.690.544.527**		**2.424.192.897**		**3.365.570.565**		**130.673.893**		**415.622.532**						**546.296.425**	**0**	**16,23**		**546.296.425**	**0**	**3,09**	Kelurahan Kedung Baruk	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.591.435.957		773.862.900		788.400.000		130.673.893		193.811.898						324.485.791	0	41,16		324.485.791	0	4,92		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6.591.435.957		773.862.900		788.400.000		130.673.893		193.811.898						324.485.791	0	41,16		324.485.791	0	4,92		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.099.108.570		1.650.329.997		2.577.170.565		-		221.810.634						221.810.634	0	8,61		221.810.634	0	2		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10		10		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.099.108.570		1.650.329.997		2.577.170.565		-		221.810.634						221.810.634	0	8,61		221.810.634	0	2		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10		10		1		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**23.375.479.219**		**3.126.836.924**		**4.447.111.545**		**266.156.138**		**629.709.598**						**895.865.736**	**0**	**20,14**		**895.865.736**	**0**	**3,83**	Kelurahan Medokan Ayu	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.375.253.536		1.578.686.237		1.594.200.000		266.156.138		394.666.788						660.822.926	0	41,45		660.822.926	0	4,94		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			13.375.253.536		1.578.686.237		1.594.200.000		266.156.138		394.666.788						660.822.926	0	41,45		660.822.926	0	4,94		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.000.225.683		1.548.150.687		2.852.911.545		-		235.042.810						235.042.810	0	8,24		235.042.810	0	2,35		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		4		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.000.225.683		1.548.150.687		2.852.911.545		-		235.042.810						235.042.810	0	8,24		235.042.810	0	2,35		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		4		0		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**16.667.282.507**		**2.763.317.246**		**3.170.898.178**		**320.062.090**		**237.477.844**						**557.539.934**	**0**	**17,58**		**557.539.934**	**0**	**3,35**	Kelurahan Penjaringansari	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.362.777.460		1.233.213.706		1.417.335.598		160.071.496		237.477.844						397.549.340	0	28,05		397.549.340	0	4,25		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Penjaringansari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.362.777.460		1.233.213.706		1.417.335.598		160.071.496		237.477.844						397.549.340	0	28,05		397.549.340	0	4,25		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.304.505.047		1.530.103.540		1.753.562.580		159.990.594		-						159.990.594	0	9,12		159.990.594	0	2,19		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		4		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			7.304.505.047		1.530.103.540		1.753.562.580		159.990.594		-						159.990.594	0	9,12		159.990.594	0	2,19		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		4		12		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**16.215.385.744**		**2.143.978.605**		**3.084.926.237**		**151.606.282**		**239.110.662**						**390.716.944**	**0**	**12,67**		**390.716.944**	**0**	**2,41**	Kelurahan Rungkut Kidul	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.291.004.604		907.803.217		1.103.652.091		151.606.282		226.289.554						377.895.836	0	34,24		377.895.836	0	4,56		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			8.291.004.604		907.803.217		1.103.652.091		151.606.282		226.289.554						377.895.836	0	34,24		377.895.836	0	4,56		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.924.381.140		1.236.175.388		1.981.274.146		-		12.821.108						12.821.108	0	0,65		12.821.108	0	0,16		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			7.924.381.140		1.236.175.388		1.981.274.146		-		12.821.108						12.821.108	0	0,65		12.821.108	0	0,16		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**13.308.343.363**		**1.923.052.540**		**2.518.617.754**		**142.986.190**		**319.410.326**						**462.396.516**	**0**	**18,36**		**462.396.516**	**0**	**3,47**	Kelurahan Wonorejo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator		Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
												I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Akuntabel dan Pelayanan Prima baoi Masyarakat		Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan prestasi																			0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				7.215.887.784		870.986.866		883.600.000		142.986.190		212.226.266						355.212.456	0	40,2		355.212.456	0	4,92		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Wonorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.215.887.784		870.986.866		883.600.000		142.986.190		212.226.266						355.212.456	0	40,2		355.212.456	0	4,92		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan																			0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				6.092.455.579		1.052.065.674		1.635.017.754		-		107.184.060						107.184.060	0	6,56		107.184.060	0	1,76		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10		5		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				6.092.455.579		1.052.065.674		1.635.017.754		-		107.184.060						107.184.060	0	6,56		107.184.060	0	1,76		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10		5		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**106.028.658.078**		**18.489.145.491**		**20.356.007.323**		**4.682.900.812**								**10.547.798.393**	**36,88**	**51,82**		**10.547.798.393**	**36,88**	**9,95**	Kec. Sambikerep	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	97,48		99,33		97,46		99,13		99,4						99,4		101,99		99,4		101,97			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			39.000.000		-		3.944.000		-		1.300.000						1.300.000	37,5	32,96		1.300.000	37,5	3,33		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			39.000.000		-		3.944.000		-		1.300.000						1.300.000	37,5	32,96		1.300.000	37,5	3,33		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			82.158.040.646		14.382.469.506		16.212.969.169		3.954.169.580		4.802.229.862						8.756.399.442	110	54,01		8.756.399.442	110	10,66		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40		43		40		44		44						44		110		44		110			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			82.158.040.646		14.382.469.506		16.212.969.169		3.954.169.580		4.802.229.862						8.756.399.442	110	54,01		8.756.399.442	110	10,66		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40		43		40		44		44						44		110		44		110			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			23.200.501.432		4.030.769.533		4.007.590.154		728.731.232		1.050.799.569						1.779.530.801	0	44,4		1.779.530.801	0	7,67		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		11		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			23.200.501.432		4.030.769.533		4.007.590.154		728.731.232		1.050.799.569						1.779.530.801	0	44,4		1.779.530.801	0	7,67		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		11		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			631.116.000		75.906.452		131.504.000		-		10.568.150						10.568.150	0	8,04		10.568.150	0	1,67		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		5		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			631.116.000		75.906.452		131.504.000		-		10.568.150						10.568.150	0	8,04		10.568.150	0	1,67		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		5		4		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima baoi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**1.253.812.731**		**79.798.800**		**167.303.893**		**4.244.400**		**40.308.300**						**44.552.700**	**50**	**26,63**		**44.552.700**	**50**	**3,55**	Kec. Sambikerep	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			1.253.812.731		79.798.800		167.303.893		4.244.400		40.308.300						44.552.700	50	26,63		44.552.700	50	3,55		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.253.812.731		79.798.800		167.303.893		4.244.400		40.308.300						44.552.700	50	26,63		44.552.700	50	3,55		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**6.823.655.200**		**877.473.600**		**1.314.322.200**						**2.191.795.800**	**50**	**32,12**		**2.191.795.800**	**50**	**1826,5**	Kec. Sambikerep	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		50		50		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		6.823.655.200		877.473.600		1.314.322.200						2.191.795.800	50	32,12		2.191.795.800	50	1826,5		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	12840		0		12840		12.754		12.840						12.840		100		12.840		100			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		5.493.655.200		877.473.600		1.314.322.200						2.191.795.800	100	39,9		2.191.795.800	100	3652,99		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	12840		0		12840		12.754		12.840						12.840		100		12.840		100			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	190		0		190		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.330.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	190		0		190		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**823.174.210**		-		**190.080.000**		-		**24.549.150**						**24.549.150**	**50**	**12,92**		**24.549.150**	**50**	**2,98**	Kec. Sambikerep	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			823.174.210		-		190.080.000		-		24.549.150						24.549.150	50	12,92		24.549.150	50	2,98		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			823.174.210		-		190.080.000		-		24.549.150						24.549.150	50	12,92		24.549.150	50	2,98		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**17.666.786.523**		**3.169.141.167**		**2.683.880.303**		**46.500.000**		**422.141.292**						**468.641.292**	**0**	**17,46**		**468.641.292**	**0**	**2,65**	Kelurahan Beringin	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			2.309.267.308		279.000.000		506.288.480		46.500.000		69.750.000						116.250.000	0	22,96		116.250.000	0	5,03		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Beringin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.309.267.308		279.000.000		506.288.480		46.500.000		69.750.000						116.250.000	0	22,96		116.250.000	0	5,03		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			15.357.519.215		2.890.141.167		2.177.591.823		-		352.391.292						352.391.292	0	16,18		352.391.292	0	2,29		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		16		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			15.357.519.215		2.890.141.167		2.177.591.823		-		352.391.292						352.391.292	0	16,18		352.391.292	0	2,29		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		16		2		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**27.144.313.164**		**4.224.008.381**		**5.143.940.303**		**226.514.945**		**1.083.326.137**						**1.309.841.082**	**0**	**25,46**		**1.309.841.082**	**0**	**4,83**	Kelurahan Lontar	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12.488.617.005		1.375.303.896		1.471.800.002		226.514.945		342.828.349						569.343.294	0	38,68		569.343.294	0	4,56		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Lontar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12.488.617.005		1.375.303.896		1.471.800.002		226.514.945		342.828.349						569.343.294	0	38,68		569.343.294	0	4,56		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			14.655.696.159		2.848.704.485		3.672.140.301		-		740.497.788						740.497.788	0	20,17		740.497.788	0	5,05		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		12		9		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			14.655.696.159		2.848.704.485		3.672.140.301		-		740.497.788						740.497.788	0	20,17		740.497.788	0	5,05		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		12		9		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**16.480.741.532**		**2.585.518.929**		**3.135.409.343**		**80.413.178**		**1.169.157.352**						**1.249.570.530**	**25**	**39,85**		**1.249.570.530**	**5**	**7,58**	Kelurahan Made	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			4.498.534.145		486.903.322		597.011.756		80.413.178		119.150.000						199.563.178	0	33,43		199.563.178	0	4,44		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Made	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			4.498.534.145		486.903.322		597.011.756		80.413.178		119.150.000						199.563.178	0	33,43		199.563.178	0	4,44		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		50				10			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.982.207.387		2.098.615.607		2.538.397.587		-		1.050.007.352						1.050.007.352	50	41,36		1.050.007.352	10	8,76		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10		13		2		0		1						1		50		1		10			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.982.207.387		2.098.615.607		2.538.397.587		-		1.050.007.352						1.050.007.352	50	41,36		1.050.007.352	10	8,76		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10		13		2		0		1						1		50		1		10			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**17.479.451.115**		**2.083.693.401**		**4.025.410.706**		**197.000.000**		**1.660.781.947**						**1.857.781.947**	**28,57**	**46,15**		**1.857.781.947**	**14,29**	**10,63**	Kelurahan Sambikerep	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.161.534.283		1.187.602.826		1.221.600.000		197.000.000		297.961.601						494.961.601	0	40,52		494.961.601	0	4,87		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sambikerep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.161.534.283		1.187.602.826		1.221.600.000		197.000.000		297.961.601						494.961.601	0	40,52		494.961.601	0	4,87		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		28,57				28,57			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.317.916.832		896.090.575		2.803.810.706		-		1.362.820.346						1.362.820.346	28,57	48,61		1.362.820.346	28,57	18,62		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		8		7		0		2						2		28,57		2		28,57			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			7.317.916.832		896.090.575		2.803.810.706		-		1.362.820.346						1.362.820.346	28,57	48,61		1.362.820.346	28,57	18,62		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		8		7		0		2						2		28,57		2		28,57			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**150.539.653.582**		**26.325.237.576**		**28.223.549.899**		**6.446.270.444**		**8.217.569.806**						**14.663.840.250**	**36,6**	**51,96**		**14.663.840.250**	**36,6**	**9,74**	Kec. Sawahan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	96,22		96,72		96,20		97,45		97,49						97,49		101,34		97,49		101,32			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.932.000		-		150.000						150.000	37,5	3,81		150.000	37,5	1,15		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.932.000		-		150.000						150.000	37,5	3,81		150.000	37,5	1,15		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						3		37,5		3		37,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			114.593.297.017		20.700.700.066		22.678.720.293		5.508.081.395		6.767.543.179						12.275.624.574	98,39	54,13		12.275.624.574	98,39	10,71		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62		65		62		61		61						61		98,39		61		98,39			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			114.593.297.017		20.700.700.066		22.678.720.293		5.508.081.395		6.767.543.179						12.275.624.574	98,39	54,13		12.275.624.574	98,39	10,71		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62		65		62		61		61						61		98,39		61		98,39			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			35.454.625.565		5.550.740.353		5.449.429.241		938.189.049		1.439.861.377						2.378.050.426	10,53	43,64		2.378.050.426	10,53	6,71		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	19		10		19		0		2						2		10,53		2		10,53			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.454.625.565		5.550.740.353		5.449.429.241		938.189.049		1.439.861.377						2.378.050.426	10,53	43,64		2.378.050.426	10,53	6,71		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	19		10		19		0		2						2		10,53		2		10,53			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			478.731.000		73.797.157		91.468.365		-		10.015.250						10.015.250	0	10,95		10.015.250	0	2,09		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		6		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			478.731.000		73.797.157		91.468.365		-		10.015.250						10.015.250	0	10,95		10.015.250	0	2,09		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		6		3		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**1.600.363.658**		**200.613.600**		**313.956.000**		**10.157.400**		**78.489.000**						**88.646.400**	**50**	**28,24**		**88.646.400**	**50**	**5,54**	Kec. Sawahan	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			1.600.363.658		200.613.600		313.956.000		10.157.400		78.489.000						88.646.400	50	28,24		88.646.400	50	5,54		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.600.363.658		200.613.600		313.956.000		10.157.400		78.489.000						88.646.400	50	28,24		88.646.400	50	5,54		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**22.056.758.400**		**3.249.511.400**		**4.835.153.600**						**8.084.665.000**	**46,27**	**36,65**		**8.084.665.000**	**46,27**	**6737,22**	Kec. Sawahan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		50		50		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		22.056.758.400		3.249.511.400		4.835.153.600						8.084.665.000	46,27	36,65		8.084.665.000	46,27	6737,22		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	49880		0		49880		46.160		46.160						46.160		92,54		46.160		92,54			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		19.536.758.400		3.249.511.400		4.835.153.600						8.084.665.000	92,54	41,38		8.084.665.000	92,54	13474,44		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	49880		0		49880		46.160		46.160						46.160		92,54		46.160		92,54			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	360		0		360		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		2.520.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	360		0		360		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**654.599.520**		-		**258.758.400**		-		**39.292.400**						**39.292.400**	**50**	**15,18**		**39.292.400**	**50**	**6**	Kec. Sawahan	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			654.599.520		-		258.758.400		-		39.292.400						39.292.400	50	15,18		39.292.400	50	6		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			654.599.520		-		258.758.400		-		39.292.400						39.292.400	50	15,18		39.292.400	50	6		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**25.222.465.580**		**3.857.801.602**		**4.821.324.526**		**220.397.199**		**930.705.888**						**1.151.103.087**	**0**	**23,88**		**1.151.103.087**	**0**	**4,56**	Kelurahan Banyu Urip	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12.168.811.238		1.780.802.406		1.386.600.000		220.397.199		324.428.126						544.825.325	0	39,29		544.825.325	0	4,48		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Banyu Urip	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12.168.811.238		1.780.802.406		1.386.600.000		220.397.199		324.428.126						544.825.325	0	39,29		544.825.325	0	4,48		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.053.654.342		2.076.999.196		3.434.724.526		-		606.277.762						606.277.762	0	17,65		606.277.762	0	4,64		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	18		11		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			13.053.654.342		2.076.999.196		3.434.724.526		-		606.277.762						606.277.762	0	17,65		606.277.762	0	4,64		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	18		11		2		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**25.575.240.938**		**4.419.175.451**		**4.865.609.307**		**153.974.843**		**573.059.981**						**727.034.824**	**0**	**14,94**		**727.034.824**	**0**	**2,84**	Kelurahan Kupang Krajan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.824.570.626		1.060.110.317		961.800.000		153.974.843		227.484.081						381.458.924	0	39,66		381.458.924	0	4,88		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.824.570.626		1.060.110.317		961.800.000		153.974.843		227.484.081						381.458.924	0	39,66		381.458.924	0	4,88		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			17.750.670.312		3.359.065.134		3.903.809.307		-		345.575.900						345.575.900	0	8,85		345.575.900	0	1,95		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	14		20		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			17.750.670.312		3.359.065.134		3.903.809.307		-		345.575.900						345.575.900	0	8,85		345.575.900	0	1,95		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	14		20		0		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**28.556.937.752**		**4.219.684.347**		**5.257.382.632**		**221.453.087**		**520.716.489**						**742.169.576**	**0**	**14,12**		**742.169.576**	**0**	**2,6**	Kelurahan Pakis	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah																		0				0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Kecamatan dalam peningkatan inovasi																									
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.467.206.286		1.460.500.283		1.775.111.121		221.453.087		328.375.689						549.828.776	0	30,97		549.828.776	0	4,79		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Pakis	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		5		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			11.467.206.286		1.460.500.283		1.775.111.121		221.453.087		328.375.689						549.828.776	0	30,97		549.828.776	0	4,79		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		5		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			17.089.731.466		2.759.184.064		3.482.271.511		-		192.340.800						192.340.800	0	5,52		192.340.800	0	1,13		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10		20		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			17.089.731.466		2.759.184.064		3.482.271.511		-		192.340.800						192.340.800	0	5,52		192.340.800	0	1,13		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10		20		0		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**25.996.776.224**		**3.627.568.478**		**4.945.805.072**		**306.261.694**		**452.362.870**						**758.624.564**	**0**	**15,34**		**758.624.564**	**0**	**2,92**	Kelurahan Petemon	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			15.472.528.613		2.349.007.663		2.277.548.127		306.261.694		452.362.870						758.624.564	0	33,31		758.624.564	0	4,9		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Petemon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			15.472.528.613		2.349.007.663		2.277.548.127		306.261.694		452.362.870						758.624.564	0	33,31		758.624.564	0	4,9		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.524.247.611		1.278.560.815		2.668.256.945		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9		13		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.524.247.611		1.278.560.815		2.668.256.945		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9		13		0		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**29.721.442.231**		**4.678.634.288**		**5.654.411.088**		**277.870.029**		**413.503.323**						**691.373.352**	**0**	**12,23**		**691.373.352**	**0**	**2,33**	Kelurahan Putat Jaya	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			14.649.387.569		1.648.941.556		2.048.137.656		277.870.029		413.503.323						691.373.352	0	33,76		691.373.352	0	4,72		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Putat Jaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			14.649.387.569		1.648.941.556		2.048.137.656		277.870.029		413.503.323						691.373.352	0	33,76		691.373.352	0	4,72		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			15.072.054.662		3.029.692.732		3.606.273.432		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10		13		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			15.072.054.662		3.029.692.732		3.606.273.432		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10		13		0		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**25.573.149.044**		**4.245.999.691**		**4.865.211.331**		**311.045.594**		**780.800.812**						**1.091.846.406**	**0**	**22,44**		**1.091.846.406**	**0**	**4,27**	Kelurahan Sawahan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.940.805.027		1.010.294.998		1.020.902.880		167.965.037		250.061.912						418.026.949	0	40,95		418.026.949	0	4,68		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sawahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			8.940.805.027		1.010.294.998		1.020.902.880		167.965.037		250.061.912						418.026.949	0	40,95		418.026.949	0	4,68		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			16.632.344.017		3.235.704.693		3.844.308.451		143.080.557		530.738.900						673.819.457	0	17,53		673.819.457	0	4,05		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		16		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			16.632.344.017		3.235.704.693		3.844.308.451		143.080.557		530.738.900						673.819.457	0	17,53		673.819.457	0	4,05		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		16		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**133.013.620.560**		**22.660.476.726**		**24.932.649.353**		**5.446.647.608**		**7.211.517.087**						**12.658.164.695**	**26,76**	**50,77**		**12.658.164.695**	**26,76**	**9,52**	Kec. Semampir	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	96,66		96,95		95,92		97,95		97,39						97,39		101,53		97,39		100,76			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		-						-	12,5	0		-	12,5	0		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		-						-	12,5	0		-	12,5	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			99.091.550.397		17.252.148.312		19.553.888.044		4.604.583.422		5.844.946.453						10.449.529.875	94,55	53,44		10.449.529.875	94,55	10,55		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		54		55		52		52						52		94,55		52		94,55			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			99.091.550.397		17.252.148.312		19.553.888.044		4.604.583.422		5.844.946.453						10.449.529.875	94,55	53,44		10.449.529.875	94,55	10,55		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		54		55		52		52						52		94,55		52		94,55			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			33.114.991.403		5.286.857.524		5.226.669.109		842.064.186		1.344.502.634						2.186.566.820	0	41,83		2.186.566.820	0	6,6		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		15		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			33.114.991.403		5.286.857.524		5.226.669.109		842.064.186		1.344.502.634						2.186.566.820	0	41,83		2.186.566.820	0	6,6		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		15		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			794.078.760		121.470.890		148.148.200		-		22.068.000						22.068.000	0	14,9		22.068.000	0	2,78		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		10		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			794.078.760		121.470.890		148.148.200		-		22.068.000						22.068.000	0	14,9		22.068.000	0	2,78		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		10		3		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**254.706.263**		**203.608.000**		**315.066.112**		**10.303.200**		**76.736.700**						**87.039.900**	**50**	**27,63**		**87.039.900**	**50**	**34,17**	Kec. Semampir	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			254.706.263		203.608.000		315.066.112		10.303.200		76.736.700						87.039.900	50	27,63		87.039.900	50	34,17		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		31		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			254.706.263		203.608.000		315.066.112		10.303.200		76.736.700						87.039.900	50	27,63		87.039.900	50	34,17		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		31		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		**-**		**16.162.976.000**		**2.234.769.000**		**3.291.445.000**						**5.526.214.000**	**50**	**34,19**		**5.526.214.000**	**50**	**4605,18**	Kec. Semampir	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		16.162.976.000		2.234.769.000		3.291.445.000						5.526.214.000	50	34,19		5.526.214.000	50	4605,18		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	350		0		350		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		2.450.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	350		0		350		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	33300		0		33300		33.300		33.300						33.300		100		33.300		100			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		13.712.976.000		2.234.769.000		3.291.445.000						5.526.214.000	100	40,3		5.526.214.000	100	9210,36		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	33300		0		33300		33.300		33.300						33.300		100		33.300		100			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**1.210.975.560**		-		**163.986.001**		-		**27.331.000**						**27.331.000**	**50**	**16,67**		**27.331.000**	**50**	**2,26**	Kec. Semampir	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			1.210.975.560		-		163.986.001		-		27.331.000						27.331.000	50	16,67		27.331.000	50	2,26		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			1.210.975.560		-		163.986.001		-		27.331.000						27.331.000	50	16,67		27.331.000	50	2,26		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.937.948.045**		**2.673.362.250**		**3.613.460.913**		**218.974.425**		**392.068.188**						**611.042.613**	**0**	**16,91**		**611.042.613**	**0**	**3,23**	Kelurahan Ampel	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12.103.010.688		1.400.049.253		1.715.170.061		218.974.425		327.718.270						546.692.695	0	31,87		546.692.695	0	4,52		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Ampel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12.103.010.688		1.400.049.253		1.715.170.061		218.974.425		327.718.270						546.692.695	0	31,87		546.692.695	0	4,52		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.834.937.357		1.273.312.997		1.898.290.852		-		64.349.918						64.349.918	0	3,39		64.349.918	0	0,94		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		3		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			6.834.937.357		1.273.312.997		1.898.290.852		-		64.349.918						64.349.918	0	3,39		64.349.918	0	0,94		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		3		2		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**27.483.544.697**		**3.798.017.866**		**5.228.658.107**		**222.613.387**		**682.170.996**						**904.784.383**	**0**	**17,3**		**904.784.383**	**0**	**3,29**	Kelurahan Pegirian	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.658.492.511		1.422.379.266		1.659.393.054		222.613.387		334.967.092						557.580.479	0	33,6		557.580.479	0	4,08		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Pegirian	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			13.658.492.511		1.422.379.266		1.659.393.054		222.613.387		334.967.092						557.580.479	0	33,6		557.580.479	0	4,08		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.825.052.186		2.375.638.600		3.569.265.053		-		347.203.904						347.203.904	0	9,73		347.203.904	0	2,51		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		7		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			13.825.052.186		2.375.638.600		3.569.265.053		-		347.203.904						347.203.904	0	9,73		347.203.904	0	2,51		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		7		3		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**24.669.133.373**		**3.229.156.724**		**4.693.225.187**		**226.496.000**		**766.351.837**						**992.847.837**	**0**	**21,15**		**992.847.837**	**0**	**4,02**	Kelurahan Sidotopo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.054.309.745		1.488.198.600		1.402.708.010		226.496.000		338.970.000						565.466.000	0	40,31		565.466.000	0	4,33		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sidotopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			13.054.309.745		1.488.198.600		1.402.708.010		226.496.000		338.970.000						565.466.000	0	40,31		565.466.000	0	4,33		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.614.823.628		1.740.958.124		3.290.517.177		-		427.381.837						427.381.837	0	12,99		427.381.837	0	3,68		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		5		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.614.823.628		1.740.958.124		3.290.517.177		-		427.381.837						427.381.837	0	12,99		427.381.837	0	3,68		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		5		2		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**25.281.509.777**		**3.869.814.984**		**4.809.727.876**		**270.883.840**		**832.693.465**						**1.103.577.305**	**0**	**22,94**		**1.103.577.305**	**0**	**4,37**	Kelurahan Ujung	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			14.183.738.265		1.664.155.809		1.707.061.949		270.883.840		405.928.034						676.811.874	0	39,65		676.811.874	0	4,77		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Ujung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			14.183.738.265		1.664.155.809		1.707.061.949		270.883.840		405.928.034						676.811.874	0	39,65		676.811.874	0	4,77		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.097.771.512		2.205.659.175		3.102.665.927		-		426.765.431						426.765.431	0	13,75		426.765.431	0	3,85		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		8		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.097.771.512		2.205.659.175		3.102.665.927		-		426.765.431						426.765.431	0	13,75		426.765.431	0	3,85		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		8		5		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**32.098.593.664**		**4.259.914.591**		**6.106.656.686**		**383.508.647**		**1.504.536.041**						**1.888.044.688**	**0**	**30,92**		**1.888.044.688**	**0**	**5,88**	Kelurahan Wonokusumo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			19.629.233.202		2.399.208.109		2.360.083.500		383.508.647		573.015.207						956.523.854	0	40,53		956.523.854	0	4,87		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			19.629.233.202		2.399.208.109		2.360.083.500		383.508.647		573.015.207						956.523.854	0	40,53		956.523.854	0	4,87		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12.469.360.462		1.860.706.482		3.746.573.186		-		931.520.834						931.520.834	0	24,86		931.520.834	0	7,47		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		6		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			12.469.360.462		1.860.706.482		3.746.573.186		-		931.520.834						931.520.834	0	24,86		931.520.834	0	7,47		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		6		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**121.232.047.412**		**20.909.009.870**		**23.274.855.359**		**5.338.651.787**		**6.840.826.352**						**12.179.478.139**	**23,35**	**52,33**		**12.179.478.139**	**23,35**	**10,05**	Kec. Simokerto	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	97,36		96,97		97,32		97,69		97,87						97,87		100,57		97,87		100,52			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		1.450.000						1.450.000	12,5	36,76		1.450.000	12,5	11,15		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		1.450.000						1.450.000	12,5	36,76		1.450.000	12,5	11,15		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			98.932.971.893		17.244.432.586		19.521.955.820		4.724.121.254		5.928.561.742						10.652.682.996	80,88	54,57		10.652.682.996	80,88	10,77		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	68		55		68		55		55						55		80,88		55		80,88			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			98.932.971.893		17.244.432.586		19.521.955.820		4.724.121.254		5.928.561.742						10.652.682.996	80,88	54,57		10.652.682.996	80,88	10,77		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	68		55		68		55		55						55		80,88		55		80,88			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			21.732.492.864		3.587.498.034		3.665.873.779		614.530.533		902.114.610						1.516.645.143	0	41,37		1.516.645.143	0	6,98		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		9		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			21.732.492.864		3.587.498.034		3.665.873.779		614.530.533		902.114.610						1.516.645.143	0	41,37		1.516.645.143	0	6,98		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		9		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			553.582.655		77.079.250		83.081.760		-		8.700.000						8.700.000	0	10,47		8.700.000	0	1,57		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		14		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			553.582.655		77.079.250		83.081.760		-		8.700.000						8.700.000	0	10,47		8.700.000	0	1,57		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		14		4		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**1.052.911.663**		**77.417.600**		**205.286.400**		**5.767.200**		**51.321.600**						**57.088.800**	**50**	**27,81**		**57.088.800**	**50**	**5,42**	Kec. Simokerto	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			1.052.911.663		77.417.600		205.286.400		5.767.200		51.321.600						57.088.800	50	27,81		57.088.800	50	5,42		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		3		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.052.911.663		77.417.600		205.286.400		5.767.200		51.321.600						57.088.800	50	27,81		57.088.800	50	5,42		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		3		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		**-**		**8.367.192.000**		**1.108.884.600**		**1.657.690.000**						**2.766.574.600**	**50**	**33,06**		**2.766.574.600**	**50**	**2305,48**	Kec. Simokerto	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		50		50		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		8.367.192.000		1.108.884.600		1.657.690.000						2.766.574.600	50	33,06		2.766.574.600	50	2305,48		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	16100		0		16100		16.100		16.100						16.100		100		16.100		100			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		6.687.192.000		1.108.884.600		1.657.690.000						2.766.574.600	100	41,37		2.766.574.600	100	4610,96		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	16100		0		16100		16.100		16.100						16.100		100		16.100		100			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	240		0		240		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.680.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	240		0		240		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**844.217.350**		-		**131.127.450**		-		**21.331.000**						**21.331.000**	**50**	**16,27**		**21.331.000**	**50**	**2,53**	Kec. Simokerto	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			844.217.350		-		131.127.450		-		21.331.000						21.331.000	50	16,27		21.331.000	50	2,53		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			844.217.350		-		131.127.450		-		21.331.000						21.331.000	50	16,27		21.331.000	50	2,53		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**19.845.076.782**		**3.288.633.466**		**3.798.293.187**		**132.666.294**		**706.463.470**						**839.129.764**	**0**	**22,09**		**839.129.764**	**0**	**4,23**	Kelurahan Kapasan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.145.158.252		1.269.564.682		1.580.311.210		132.666.294		199.478.766						332.145.060	0	21,02		332.145.060	0	4,08		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kapasan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		4		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			8.145.158.252		1.269.564.682		1.580.311.210		132.666.294		199.478.766						332.145.060	0	21,02		332.145.060	0	4,08		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		4		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.699.918.530		2.019.068.784		2.217.981.977		-		506.984.704						506.984.704	0	22,86		506.984.704	0	4,33		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		5		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.699.918.530		2.019.068.784		2.217.981.977		-		506.984.704						506.984.704	0	22,86		506.984.704	0	4,33		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		5		4		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**19.287.720.167**		**3.190.712.277**		**3.669.428.217**		**114.500.000**		**822.459.158**						**936.959.158**	**0**	**25,53**		**936.959.158**	**0**	**4,86**	Kelurahan Sidodadi	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.054.779.444		943.299.000		1.532.396.505		114.500.000		171.831.000						286.331.000	0	18,69		286.331.000	0	3,55		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sidodadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		6		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			8.054.779.444		943.299.000		1.532.396.505		114.500.000		171.831.000						286.331.000	0	18,69		286.331.000	0	3,55		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		6		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.232.940.723		2.247.413.277		2.137.031.712		-		650.628.158						650.628.158	0	30,45		650.628.158	0	5,79		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		7		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.232.940.723		2.247.413.277		2.137.031.712		-		650.628.158						650.628.158	0	30,45		650.628.158	0	5,79		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		7		0		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.483.939.855**		**2.691.799.102**		**3.516.511.536**		**205.704.023**		**561.241.891**						**766.945.914**	**0**	**21,81**		**766.945.914**	**0**	**4,15**	Kelurahan Simokerto	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.640.701.667		1.687.142.436		1.856.733.852		205.704.023		304.696.673						510.400.696	0	27,49		510.400.696	0	4,8		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Simokerto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.640.701.667		1.687.142.436		1.856.733.852		205.704.023		304.696.673						510.400.696	0	27,49		510.400.696	0	4,8		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.843.238.188		1.004.656.666		1.659.777.684		-		256.545.218						256.545.218	0	15,46		256.545.218	0	3,27		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		3		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			7.843.238.188		1.004.656.666		1.659.777.684		-		256.545.218						256.545.218	0	15,46		256.545.218	0	3,27		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		3		4		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**21.519.540.307**		**2.995.242.142**		**4.094.024.993**		**151.877.400**		**413.246.292**						**565.123.692**	**0**	**13,8**		**565.123.692**	**0**	**2,63**	Kelurahan Simolawang	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.515.655.159		992.187.742		1.190.419.833		151.877.400		226.384.200						378.261.600	0	31,78		378.261.600	0	3,6		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Simolawang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.515.655.159		992.187.742		1.190.419.833		151.877.400		226.384.200						378.261.600	0	31,78		378.261.600	0	3,6		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.003.885.148		2.003.054.400		2.903.605.160		-		186.862.092						186.862.092	0	6,44		186.862.092	0	1,7		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		8		40		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.003.885.148		2.003.054.400		2.903.605.160		-		186.862.092						186.862.092	0	6,44		186.862.092	0	1,7		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		8		40		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**21.548.217.102**		**2.947.115.572**		**3.999.983.077**		**152.685.221**		**366.477.014**						**519.162.235**	**0**	**12,98**		**519.162.235**	**0**	**2,41**	Kelurahan Tambakrejo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.871.559.370		2.052.748.573		2.068.280.044		152.685.221		224.723.438						377.408.659	0	18,25		377.408.659	0	3,47		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		7		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.871.559.370		2.052.748.573		2.068.280.044		152.685.221		224.723.438						377.408.659	0	18,25		377.408.659	0	3,47		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		7		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.676.657.732		894.366.999		1.931.703.033		-		141.753.576						141.753.576	0	7,34		141.753.576	0	1,33		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		20		22		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.676.657.732		894.366.999		1.931.703.033		-		141.753.576						141.753.576	0	7,34		141.753.576	0	1,33		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		20		22		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**164.692.384.416**		**28.124.458.196**		**31.746.392.333**		**6.668.492.230**		**8.564.576.839**						**15.233.069.069**	**26,8**	**47,98**		**15.233.069.069**	**29,47**	**9,25**	Kec. Sukolilo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	97,26		95,98		97,26		96,71		96,51						96,51		99,23		96,51		99,23			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.944.000		-		-						-	0	0		-	37,5	0		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		0		2		1						3		0		3		37,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.944.000		-		-						-	0	0		-	37,5	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		0		2		1						3		0		3		37,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			127.456.957.176		22.182.426.148		25.150.256.246		5.584.547.302		6.995.720.984						12.580.268.286	70,79	50,02		12.580.268.286	70,79	9,87		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	89		71		89		63		63						63		70,79		63		70,79			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			127.456.957.176		22.182.426.148		25.150.256.246		5.584.547.302		6.995.720.984						12.580.268.286	70,79	50,02		12.580.268.286	70,79	9,87		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	89		71		89		63		63						63		70,79		63		70,79			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			36.303.302.092		5.848.393.591		6.435.471.124		1.071.249.098		1.560.339.325						2.631.588.423	6,67	40,89		2.631.588.423	6,67	7,25		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		15		15		0		1						1		6,67		1		6,67			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			36.303.302.092		5.848.393.591		6.435.471.124		1.071.249.098		1.560.339.325						2.631.588.423	6,67	40,89		2.631.588.423	6,67	7,25		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		15		15		0		1						1		6,67		1		6,67			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			918.458.693		93.638.457		156.720.963		12.695.830		8.516.530						21.212.360	2,94	13,54		21.212.360	2,94	2,31		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	34		15		34		0		1						1		2,94		1		2,94			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			918.458.693		93.638.457		156.720.963		12.695.830		8.516.530						21.212.360	2,94	13,54		21.212.360	2,94	2,31		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	34		15		34		0		1						1		2,94		1		2,94			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat		**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**293.586.830**		**42.128.800**		**292.847.349**		**7.144.200**		**70.730.550**						**77.874.750**	**50**	**26,59**		**77.874.750**	**50**	**26,53**	Kec. Sukolilo	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			293.586.830		42.128.800		292.847.349		7.144.200		70.730.550						77.874.750	50	26,59		77.874.750	50	26,53		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		60		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			293.586.830		42.128.800		292.847.349		7.144.200		70.730.550						77.874.750	50	26,59		77.874.750	50	26,53		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		60		12		3		3						6		50		6		50			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat		**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**9.827.883.200**		**1.241.339.800**		**1.855.202.000**						**3.096.541.800**	**48,36**	**31,51**		**3.096.541.800**	**48,36**	**2580,45**	Kec. Sukolilo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		9.827.883.200		1.241.339.800		1.855.202.000						3.096.541.800	48,36	31,51		3.096.541.800	48,36	2580,45		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	335		0		335		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		2.345.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	335		0		335		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	18280		0		18280		17.680		17.680						17.680		96,72		17.680		96,72			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		7.482.883.200		1.241.339.800		1.855.202.000						3.096.541.800	96,72	41,38		3.096.541.800	96,72	5160,9		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	18280		0		18280		17.680		17.680						17.680		96,72		17.680		96,72			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**1.400.655.813**		-		**181.495.200**		**21.614.490**		**39.922.490**						**61.536.980**	**50**	**33,91**		**61.536.980**	**50**	**4,39**	Kec. Sukolilo	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			1.400.655.813		-		181.495.200		21.614.490		39.922.490						61.536.980	50	33,91		61.536.980	50	4,39		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			1.400.655.813		-		181.495.200		21.614.490		39.922.490						61.536.980	50	33,91		61.536.980	50	4,39		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.093.249.916**		**2.216.361.029**		**2.704.026.181**		**71.508.008**		**184.062.797**						**255.570.805**	**0**	**9,45**		**255.570.805**	**0**	**1,81**	Kelurahan Gebang Putih	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.554.008.361		553.136.350		1.079.462.280		71.508.008		107.104.566						178.612.574	0	16,55		178.612.574	0	3,22		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Gebang Putih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		4		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5.554.008.361		553.136.350		1.079.462.280		71.508.008		107.104.566						178.612.574	0	16,55		178.612.574	0	3,22		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		4		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.539.241.555		1.663.224.679		1.624.563.901		-		76.958.231						76.958.231	0	4,74		76.958.231	0	0,9		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		8		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.539.241.555		1.663.224.679		1.624.563.901		-		76.958.231						76.958.231	0	4,74		76.958.231	0	0,9		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		8		8		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**20.619.698.712**		**2.699.217.106**		**3.908.659.698**		**122.485.970**		**505.918.245**						**628.404.215**	**0**	**16,08**		**628.404.215**	**0**	**3,05**	Kelurahan Keputih	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.063.132.990		730.171.110		1.343.738.880		122.485.970		183.151.261						305.637.231	0	22,75		305.637.231	0	4,33		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Keputih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.063.132.990		730.171.110		1.343.738.880		122.485.970		183.151.261						305.637.231	0	22,75		305.637.231	0	4,33		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.556.565.722		1.969.045.996		2.564.920.818		-		322.766.984						322.766.984	0	12,58		322.766.984	0	2,38		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		9		6		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			13.556.565.722		1.969.045.996		2.564.920.818		-		322.766.984						322.766.984	0	12,58		322.766.984	0	2,38		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		9		6		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**20.118.415.685**		**2.757.236.234**		**3.827.465.432**		**126.682.756**		**308.776.207**						**435.458.963**	**0**	**11,38**		**435.458.963**	**0**	**2,16**	Kelurahan Klampis Ngasem	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.329.670.796		859.433.435		1.204.200.000		126.682.756		187.413.928						314.096.684	0	26,08		314.096.684	0	4,96		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6.329.670.796		859.433.435		1.204.200.000		126.682.756		187.413.928						314.096.684	0	26,08		314.096.684	0	4,96		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.788.744.889		1.897.802.799		2.623.265.432		-		121.362.279						121.362.279	0	4,63		121.362.279	0	0,88		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		18		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			13.788.744.889		1.897.802.799		2.623.265.432		-		121.362.279						121.362.279	0	4,63		121.362.279	0	0,88		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		18		3		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**21.208.573.079**		**3.460.522.748**		**4.034.864.454**		**146.471.197**		**277.543.086**						**424.014.283**	**0**	**10,51**		**424.014.283**	**0**	**2**	Kelurahan Medokan Semampir	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.673.188.365		876.655.997		1.147.799.302		146.471.197		219.203.041						365.674.238	0	31,86		365.674.238	0	4,77		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		4		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.673.188.365		876.655.997		1.147.799.302		146.471.197		219.203.041						365.674.238	0	31,86		365.674.238	0	4,77		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		4		4		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.535.384.714		2.583.866.751		2.887.065.152		-		58.340.045						58.340.045	0	2,02		58.340.045	0	0,43		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		5		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			13.535.384.714		2.583.866.751		2.887.065.152		-		58.340.045						58.340.045	0	2,02		58.340.045	0	0,43		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		5		5		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.569.594.878**		**2.910.515.604**		**3.532.807.135**		**143.646.097**		**537.814.702**						**681.460.799**	**0**	**19,29**		**681.460.799**	**0**	**3,67**	Kelurahan Menur Pumpungan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.272.656.132		858.587.554		1.383.600.000		143.646.097		213.153.909						356.800.006	0	25,79		356.800.006	0	4,91		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.272.656.132		858.587.554		1.383.600.000		143.646.097		213.153.909						356.800.006	0	25,79		356.800.006	0	4,91		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.296.938.746		2.051.928.050		2.149.207.135		-		324.660.793						324.660.793	0	15,11		324.660.793	0	2,87		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		7		7		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.296.938.746		2.051.928.050		2.149.207.135		-		324.660.793						324.660.793	0	15,11		324.660.793	0	2,87		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		7		7		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.785.251.786**		**1.748.980.805**		**2.812.847.741**		**153.394.743**		**254.536.367**						**407.931.110**	**0**	**14,5**		**407.931.110**	**0**	**2,76**	Kelurahan Nginden Jangkungan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.333.210.051		921.259.368		1.432.017.522		153.394.743		230.116.367						383.511.110	0	26,78		383.511.110	0	3,71		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		4		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.333.210.051		921.259.368		1.432.017.522		153.394.743		230.116.367						383.511.110	0	26,78		383.511.110	0	3,71		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		4		4		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			4.452.041.735		827.721.437		1.380.830.219		-		24.420.000						24.420.000	0	1,77		24.420.000	0	0,55		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.452.041.735		827.721.437		1.380.830.219		-		24.420.000						24.420.000	0	1,77		24.420.000	0	0,55		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**16.051.014.811**		**2.182.553.493**		**3.053.655.183**		**179.613.135**		**691.890.312**						**871.503.447**	**8,33**	**28,54**		**871.503.447**	**50**	**5,43**	Kelurahan Semolowaru	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.114.185.413		1.075.505.853		1.140.564.307		179.613.135		263.724.270						443.337.405	0	38,87		443.337.405	0	4,86		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Semolowaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.114.185.413		1.075.505.853		1.140.564.307		179.613.135		263.724.270						443.337.405	0	38,87		443.337.405	0	4,86		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		16,67				100			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.936.829.398		1.107.047.640		1.913.090.876		-		428.166.042						428.166.042	16,67	22,38		428.166.042	100	6,17		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		13		12		0		2						2		16,67		2		100			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			6.936.829.398		1.107.047.640		1.913.090.876		-		428.166.042						428.166.042	16,67	22,38		428.166.042	100	6,17		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		13		12		0		2						2		16,67		2		100			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**137.699.729.744**		**23.183.009.748**		**26.555.867.668**		**5.449.109.354**		**7.192.381.700**						**12.641.491.054**	**25,96**	**47,6**		**12.641.491.054**	**26,31**	**9,18**	Kec. Sukomanunggal	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	97,29		97,38		97,29		97,3		97,7						97,7		100,42		97,7		100,42			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.932.000		-		-						-	11,11	0		-	12,5	0		
			Terlaksananya proses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		9		2		1						1		11,11		1		12,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.932.000		-		-						-	11,11	0		-	12,5	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		9		2		1						1		11,11		1		12,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			104.186.969.675		17.823.071.294		20.561.038.913		4.508.911.125		5.775.014.384						10.283.925.509	92,73	50,02		10.283.925.509	92,73	9,87		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		54		55		51		51						51		92,73		51		92,73			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			104.186.969.675		17.823.071.294		20.561.038.913		4.508.911.125		5.775.014.384						10.283.925.509	92,73	50,02		10.283.925.509	92,73	9,87		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		54		55		51		51						51		92,73		51		92,73			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			32.672.751.391		5.287.848.799		5.847.723.774		940.198.229		1.409.369.516						2.349.567.745	0	40,18		2.349.567.745	0	7,19		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		8		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			32.672.751.391		5.287.848.799		5.847.723.774		940.198.229		1.409.369.516						2.349.567.745	0	40,18		2.349.567.745	0	7,19		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		8		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			826.342.223		72.089.655		143.172.981		-		7.997.800						7.997.800	0	5,59		7.997.800	0	0,97		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		6		6		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			826.342.223		72.089.655		143.172.981		-		7.997.800						7.997.800	0	5,59		7.997.800	0	0,97		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		6		6		0		0						0		0		0		0			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat		**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**253.666.273**		**76.159.200**		**157.593.600**		**5.232.600**		**39.398.400**						**44.631.000**	**50**	**28,32**		**44.631.000**	**50**	**17,59**	Kec. Sukomanunggal	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			253.666.273		76.159.200		157.593.600		5.232.600		39.398.400						44.631.000	50	28,32		44.631.000	50	17,59		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		60		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			253.666.273		76.159.200		157.593.600		5.232.600		39.398.400						44.631.000	50	28,32		44.631.000	50	17,59		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		60		12		3		3						6		50		6		50			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat		**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**10.368.124.800**		**1.492.944.800**		**2.224.131.600**						**3.717.076.400**	**50,05**	**35,85**		**3.717.076.400**	**50,05**	**3097,56**	Kec. Sukomanunggal	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	60		60		60		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		10.368.124.800		1.492.944.800		2.224.131.600						3.717.076.400	50,05	35,85		3.717.076.400	50,05	3097,56		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	21540		0		21540		21.560		21.560						21.560		100,09		21.560		100,09			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		9.108.124.800		1.492.944.800		2.224.131.600						3.717.076.400	100,09	40,81		3.717.076.400	100,09	6195,13		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	21540		0		21540		21.560		21.560						21.560		100,09		21.560		100,09			
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	180		0		180		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.260.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	180		0		180		0		0						0		0		0		0			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat		**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**1.260.177.563**		-		**185.164.200**		-		**23.553.500**						**23.553.500**	**50**	**12,72**		**23.553.500**	**50**	**1,87**	Kec. Sukomanunggal	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			1.260.177.563		-		185.164.200		-		23.553.500						23.553.500	50	12,72		23.553.500	50	1,87		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			1.260.177.563		-		185.164.200		-		23.553.500						23.553.500	50	12,72		23.553.500	50	1,87		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**16.844.968.676**		**2.597.324.582**		**3.227.532.037**		**128.490.284**		**89.227.385**						**217.717.669**	**0**	**6,75**		**217.717.669**	**0**	**1,29**	Kelurahan Putat Gede	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.166.278.880		301.925.500		857.482.752		51.328.000		76.420.000						127.748.000	0	14,9		127.748.000	0	2,07		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Putat Gede	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6.166.278.880		301.925.500		857.482.752		51.328.000		76.420.000						127.748.000	0	14,9		127.748.000	0	2,07		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.678.689.796		2.295.399.082		2.370.049.285		77.162.284		12.807.385						89.969.669	0	3,8		89.969.669	0	0,84		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.678.689.796		2.295.399.082		2.370.049.285		77.162.284		12.807.385						89.969.669	0	3,8		89.969.669	0	0,84		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**21.690.180.299**		**2.274.843.148**		**4.126.488.716**		**124.773.340**		**360.656.672**						**485.430.012**	**0**	**11,76**		**485.430.012**	**0**	**2,24**	Kelurahan Simomulyo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.228.484.559		744.684.605		1.273.546.949		124.773.340		185.933.351						310.706.691	0	24,4		310.706.691	0	4,3		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Simomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.228.484.559		744.684.605		1.273.546.949		124.773.340		185.933.351						310.706.691	0	24,4		310.706.691	0	4,3		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			14.461.695.740		1.530.158.543		2.852.941.767		-		174.723.321						174.723.321	0	6,12		174.723.321	0	1,21		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			14.461.695.740		1.530.158.543		2.852.941.767		-		174.723.321						174.723.321	0	6,12		174.723.321	0	1,21		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		3		3		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**21.854.889.383**		**3.127.466.426**		**4.157.824.102**		**228.322.900**		**492.561.588**						**720.884.488**	**0**	**17,34**		**720.884.488**	**0**	**3,3**	Kelurahan Simomulyo Baru	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.864.584.721		1.351.487.550		2.257.200.000		228.322.900		339.774.800						568.097.700	0	25,17		568.097.700	0	4,79		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			11.864.584.721		1.351.487.550		2.257.200.000		228.322.900		339.774.800						568.097.700	0	25,17		568.097.700	0	4,79		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.990.304.662		1.775.978.876		1.900.624.102		-		152.786.788						152.786.788	0	8,04		152.786.788	0	1,53		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		6		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			9.990.304.662		1.775.978.876		1.900.624.102		-		152.786.788						152.786.788	0	8,04		152.786.788	0	1,53		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		6		10		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**16.855.078.421**		**1.995.501.512**		**3.206.625.761**		**91.627.192**		**207.490.283**						**299.117.475**	**0**	**9,33**		**299.117.475**	**0**	**1,77**	Kelurahan Sonokwijenan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.963.695.902		552.116.160		1.134.574.425		91.627.192		136.744.640						228.371.832	0	20,13		228.371.832	0	3,83		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5.963.695.902		552.116.160		1.134.574.425		91.627.192		136.744.640						228.371.832	0	20,13		228.371.832	0	3,83		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.891.382.519		1.443.385.352		2.072.051.336		-		70.745.643						70.745.643	0	3,41		70.745.643	0	0,65		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		10		6		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.891.382.519		1.443.385.352		2.072.051.336		-		70.745.643						70.745.643	0	3,41		70.745.643	0	0,65		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		10		6		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.400.050.899**		**1.898.876.358**		**2.737.015.685**		**81.991.200**		**209.675.846**						**291.667.046**	**0**	**10,66**		**291.667.046**	**0**	**2,03**	Kelurahan Sukomanunggal	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.831.566.680		488.509.900		1.500.705.130		81.991.200		121.499.400						203.490.600	0	13,56		203.490.600	0	3,49		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5.831.566.680		488.509.900		1.500.705.130		81.991.200		121.499.400						203.490.600	0	13,56		203.490.600	0	3,49		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.568.484.219		1.410.366.458		1.236.310.555		-		88.176.446						88.176.446	0	7,13		88.176.446	0	1,03		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		4		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.568.484.219		1.410.366.458		1.236.310.555		-		88.176.446						88.176.446	0	7,13		88.176.446	0	1,03		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		4		5		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**17.551.950.031**		**2.032.046.409**		**3.329.000.439**		**108.302.067**		**356.149.685**						**464.451.752**	**0**	**13,95**		**464.451.752**	**0**	**2,65**	Kelurahan Tanjungsari	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.644.688.771		647.719.888		886.265.358		108.302.067		161.900.021						270.202.088	0	30,49		270.202.088	0	4,79		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5.644.688.771		647.719.888		886.265.358		108.302.067		161.900.021						270.202.088	0	30,49		270.202.088	0	4,79		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.907.261.260		1.384.326.521		2.442.735.081		-		194.249.664						194.249.664	0	7,95		194.249.664	0	1,63		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		6		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.907.261.260		1.384.326.521		2.442.735.081		-		194.249.664						194.249.664	0	7,95		194.249.664	0	1,63		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4		6		4		0		0						0		0		0		0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**185.045.307.231**		**31.950.931.995**		**35.283.228.555**		**7.675.215.726**		**9.993.681.095**						**17.668.896.821**	**24,73**	**50,08**		**17.668.896.821**	**23,13**	**9,55**	Kec. Tambaksari	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	97,96		97,85		97,92		98,85		98,85						98,85		100,95		98,85		100,91			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		-						-	11,11	0		-	12,5	0		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		9		2		1						1		11,11		1		12,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		-						-	11,11	0		-	12,5	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		9		2		1						1		11,11		1		12,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			139.265.459.571		24.522.112.650		27.481.022.797		6.429.813.959		8.076.571.909						14.506.385.868	87,8	52,79		14.506.385.868	80	10,42		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	90		78		82		72		72						72		87,8		72		80			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			139.265.459.571		24.522.112.650		27.481.022.797		6.429.813.959		8.076.571.909						14.506.385.868	87,8	52,79		14.506.385.868	80	10,42		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	90		78		82		72		72						72		87,8		72		80			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			45.216.812.660		7.293.889.873		7.657.069.758		1.245.401.767		1.896.474.586						3.141.876.353	0	41,03		3.141.876.353	0	6,95		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		28		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.216.812.660		7.293.889.873		7.657.069.758		1.245.401.767		1.896.474.586						3.141.876.353	0	41,03		3.141.876.353	0	6,95		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		28		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			550.035.000		134.929.472		141.192.000		-		20.634.600						20.634.600	0	14,61		20.634.600	0	3,75		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		50		7		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			550.035.000		134.929.472		141.192.000		-		20.634.600						20.634.600	0	14,61		20.634.600	0	3,75		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		50		7		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**1.839.980.000**		**151.800.800**		**356.023.968**		**12.166.200**		**86.192.100**						**98.358.300**	**50**	**27,63**		**98.358.300**	**50**	**5,35**	Kec. Tambaksari	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		81,82						81,82		81,82		81,82		81,82			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			1.839.980.000		151.800.800		356.023.968		12.166.200		86.192.100						98.358.300	50	27,63		98.358.300	50	5,35		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.839.980.000		151.800.800		356.023.968		12.166.200		86.192.100						98.358.300	50	27,63		98.358.300	50	5,35		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**20.649.981.600**		**2.983.949.600**		**4.456.006.400**						**7.439.956.000**	**50,02**	**36,03**		**7.439.956.000**	**50,02**	**6199,96**	Kec. Tambaksari	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		20.649.981.600		2.983.949.600		4.456.006.400						7.439.956.000	50,02	36,03		7.439.956.000	50,02	6199,96		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	46480		0		46480		46.502		46.502						46.502		100,05		46.502		100,05			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		17.919.981.600		2.983.949.600		4.456.006.400						7.439.956.000	100,05	41,52		7.439.956.000	100,05	12399,93		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	46480		0		46480		46.502		46.502						46.502		100,05		46.502		100,05			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas SDM Pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	390		0		390		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		2.730.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	390		0		390		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**1.232.060.250**		-		**241.588.800**		**60.336.000**		**61.792.200**						**122.128.200**	**50**	**50,55**		**122.128.200**	**50**	**9,91**	Kec. Tambaksari	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			1.232.060.250		-		241.588.800		60.336.000		61.792.200						122.128.200	50	50,55		122.128.200	50	9,91		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			1.232.060.250		-		241.588.800		60.336.000		61.792.200						122.128.200	50	50,55		122.128.200	50	9,91		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**19.355.182.760**		**2.857.234.448**		**3.705.092.387**		**157.316.934**		**232.926.312**						**390.243.246**	**0**	**10,53**		**390.243.246**	**0**	**2,02**	Kelurahan Dukuh Setro	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.871.091.113		944.206.513		986.975.999		157.316.934		232.926.312						390.243.246	0	39,54		390.243.246	0	4,96		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.871.091.113		944.206.513		986.975.999		157.316.934		232.926.312						390.243.246	0	39,54		390.243.246	0	4,96		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.484.091.647		1.913.027.935		2.718.116.388		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		7		7		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.484.091.647		1.913.027.935		2.718.116.388		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		7		7		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**20.919.220.931**		**2.782.311.307**		**3.979.816.116**		**223.489.303**		**473.016.100**						**696.505.403**	**0**	**17,5**		**696.505.403**	**0**	**3,33**	Kelurahan Gading	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.281.132.257		1.492.254.053		1.523.055.440		223.489.303		333.297.319						556.786.622	0	36,56		556.786.622	0	4,94		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Gading	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			11.281.132.257		1.492.254.053		1.523.055.440		223.489.303		333.297.319						556.786.622	0	36,56		556.786.622	0	4,94		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.638.088.674		1.290.057.254		2.456.760.676		-		139.718.781						139.718.781	0	5,69		139.718.781	0	1,45		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		4		11		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			9.638.088.674		1.290.057.254		2.456.760.676		-		139.718.781						139.718.781	0	5,69		139.718.781	0	1,45		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		4		11		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**26.468.923.672**		**3.891.335.056**		**5.035.629.642**		**211.682.123**		**1.079.401.135**						**1.291.083.258**	**0**	**25,64**		**1.291.083.258**	**0**	**4,88**	Kelurahan Kapasmadya Baru	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.848.961.131		1.263.838.872		1.527.937.658		211.682.123		449.128.021						660.810.144	0	43,25		660.810.144	0	6,09		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.848.961.131		1.263.838.872		1.527.937.658		211.682.123		449.128.021						660.810.144	0	43,25		660.810.144	0	6,09		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			15.619.962.541		2.627.496.184		3.507.691.984		-		630.273.114						630.273.114	0	17,97		630.273.114	0	4,04		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		3		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			15.619.962.541		2.627.496.184		3.507.691.984		-		630.273.114						630.273.114	0	17,97		630.273.114	0	4,04		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		3		8		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**22.280.026.184**		**3.307.250.482**		**4.238.705.044**		**194.239.000**		**469.226.150**						**663.465.150**	**0**	**15,65**		**663.465.150**	**0**	**2,98**	Kelurahan Pacarkeling	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.312.717.224		1.129.024.000		1.368.421.569		194.239.000		289.722.500						483.961.500	0	35,37		483.961.500	0	4,69		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Pacarkeling	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.312.717.224		1.129.024.000		1.368.421.569		194.239.000		289.722.500						483.961.500	0	35,37		483.961.500	0	4,69		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.967.308.960		2.178.226.482		2.870.283.475		-		179.503.650						179.503.650	0	6,25		179.503.650	0	1,5		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		12		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.967.308.960		2.178.226.482		2.870.283.475		-		179.503.650						179.503.650	0	6,25		179.503.650	0	1,5		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		12		12		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**27.670.134.019**		**4.753.683.388**		**5.264.156.140**		**257.032.472**		**384.891.060**						**641.923.532**	**0**	**12,19**		**641.923.532**	**0**	**2,32**	Kelurahan Pacarkembang	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			14.793.308.497		1.543.503.327		1.579.480.000		257.032.472		384.891.060						641.923.532	0	40,64		641.923.532	0	4,34		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Pacarkembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			14.793.308.497		1.543.503.327		1.579.480.000		257.032.472		384.891.060						641.923.532	0	40,64		641.923.532	0	4,34		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12.876.825.522		3.210.180.061		3.684.676.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9		11		11		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			12.876.825.522		3.210.180.061		3.684.676.140		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9		11		11		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**23.381.662.869**		**3.660.111.874**		**4.448.287.965**		**224.888.105**		**529.632.012**						**754.520.117**	**0**	**16,96**		**754.520.117**	**0**	**3,23**	Kelurahan Ploso	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat		Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.661.690.441		1.345.287.900		1.389.265.408		224.888.105		336.948.118						561.836.223	0	40,44		561.836.223	0	4,82		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Ploso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			11.661.690.441		1.345.287.900		1.389.265.408		224.888.105		336.948.118						561.836.223	0	40,44		561.836.223	0	4,82		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.719.972.428		2.314.823.974		3.059.022.557		-		192.683.894						192.683.894	0	6,3		192.683.894	0	1,64		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		13		11		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.719.972.428		2.314.823.974		3.059.022.557		-		192.683.894						192.683.894	0	6,3		192.683.894	0	1,64		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		13		11		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**20.180.429.916**		**2.712.063.899**		**3.726.228.729**		**128.155.293**		**379.670.019**						**507.825.312**	**0**	**13,63**		**507.825.312**	**0**	**2,52**	Kelurahan Rangkah	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.506.283.434		792.826.350		830.516.447		128.155.293		191.904.862						320.060.155	0	38,54		320.060.155	0	4,92		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Rangkah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6.506.283.434		792.826.350		830.516.447		128.155.293		191.904.862						320.060.155	0	38,54		320.060.155	0	4,92		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.674.146.482		1.919.237.549		2.895.712.282		-		187.765.157						187.765.157	0	6,48		187.765.157	0	1,37		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		9		9		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			13.674.146.482		1.919.237.549		2.895.712.282		-		187.765.157						187.765.157	0	6,48		187.765.157	0	1,37		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		9		9		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**25.073.621.779**		**4.809.115.474**		**4.770.177.837**		**184.237.989**		**466.171.975**						**650.409.964**	**0**	**13,63**		**650.409.964**	**0**	**2,59**	Kelurahan Tambaksari	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.306.855.266		1.148.513.592		1.239.528.000		184.237.989		274.140.595						458.378.584	0	36,98		458.378.584	0	4,93		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tambaksari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.306.855.266		1.148.513.592		1.239.528.000		184.237.989		274.140.595						458.378.584	0	36,98		458.378.584	0	4,93		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			15.766.766.513		3.660.601.882		3.530.649.837		-		192.031.380						192.031.380	0	5,44		192.031.380	0	1,22		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9		9		9		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			15.766.766.513		3.660.601.882		3.530.649.837		-		192.031.380						192.031.380	0	5,44		192.031.380	0	1,22		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9		9		9		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**150.792.955.229**		**26.982.475.254**		**29.084.620.986**		**6.720.017.694**		**8.557.076.246**						**15.277.093.940**	**28,91**	**52,53**		**15.277.093.940**	**29,26**	**10,13**	Kec. Tandes	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	97,6		96,25		97,2		96,77		96,85						96,85		99,64		96,85		99,23			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		-						-	11,11	0		-	12,5	0		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		9		2		1						1		11,11		1		12,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		-						-	11,11	0		-	12,5	0		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		9		2		1						1		11,11		1		12,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			120.641.084.159		21.749.744.188		23.804.526.774		5.813.411.724		7.166.437.559						12.979.849.283	94,52	54,53		12.979.849.283	94,52	10,76		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	73		71		73		69		69						69		94,52		69		94,52			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			120.641.084.159		21.749.744.188		23.804.526.774		5.813.411.724		7.166.437.559						12.979.849.283	94,52	54,53		12.979.849.283	94,52	10,76		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	73		71		73		69		69						69		94,52		69		94,52			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			29.523.208.070		5.113.925.119		5.166.713.662		906.605.970		1.368.031.692						2.274.637.662	10	44,02		2.274.637.662	10	7,7		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		10		0		1						1		10		1		10			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			29.523.208.070		5.113.925.119		5.166.713.662		906.605.970		1.368.031.692						2.274.637.662	10	44,02		2.274.637.662	10	7,7		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		10		10		0		1						1		10		1		10			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			615.663.000		118.805.947		109.436.550		-		22.606.995						22.606.995	0	20,66		22.606.995	0	3,67		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		6		6		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			615.663.000		118.805.947		109.436.550		-		22.606.995						22.606.995	0	20,66		22.606.995	0	3,67		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		6		6		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**1.253.934.363**		**157.794.400**		**223.050.800**		**5.977.800**		**54.390.150**						**60.367.950**	**50**	**27,06**		**60.367.950**	**50**	**4,81**	Kec. Tandes	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			1.253.934.363		157.794.400		223.050.800		5.977.800		54.390.150						60.367.950	50	27,06		60.367.950	50	4,81		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.253.934.363		157.794.400		223.050.800		5.977.800		54.390.150						60.367.950	50	27,06		60.367.950	50	4,81		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**10.825.406.400**		**1.457.161.800**		**2.096.432.600**						**3.553.594.400**	**49,13**	**32,83**		**3.553.594.400**	**49,13**	**2961,33**	Kec. Tandes	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	90		65		70		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		10.825.406.400		1.457.161.800		2.096.432.600						3.553.594.400	49,13	32,83		3.553.594.400	49,13	2961,33		
			Meningkatnya kualitas SDM pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	255		0		255		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.785.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	255		0		255		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	21740		0		21740		21.360		21.360						21.360		98,25		21.360		98,25			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		9.040.406.400		1.457.161.800		2.096.432.600						3.553.594.400	98,25	39,31		3.553.594.400	98,25	5922,66		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	21740		0		21740		21.360		21.360						21.360		98,25		21.360		98,25			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**1.333.032.000**		-		**222.273.000**		-		**39.489.550**						**39.489.550**	**50**	**17,77**		**39.489.550**	**50**	**2,96**	Kec. Tandes	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			1.333.032.000		-		222.273.000		-		39.489.550						39.489.550	50	17,77		39.489.550	50	2,96		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			1.333.032.000		-		222.273.000		-		39.489.550						39.489.550	50	17,77		39.489.550	50	2,96		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**20.796.703.311**		**2.596.299.256**		**3.756.212.645**		**95.911.311**		**1.014.888.585**						**1.110.799.896**	**25**	**29,57**		**1.110.799.896**	**25**	**5,34**	Kelurahan Balongsari	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.102.853.356		894.982.843		1.754.618.900		95.911.311		140.955.328						236.866.639	0	13,5		236.866.639	0	2,6		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Balongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.102.853.356		894.982.843		1.754.618.900		95.911.311		140.955.328						236.866.639	0	13,5		236.866.639	0	2,6		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		50				50			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.693.849.955		1.701.316.413		2.001.593.745		-		873.933.257						873.933.257	50	43,66		873.933.257	50	7,47		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		8		2		0		1						1		50		1		50			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.693.849.955		1.701.316.413		2.001.593.745		-		873.933.257						873.933.257	50	43,66		873.933.257	50	7,47		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		8		2		0		1						1		50		1		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.237.157.686**		**2.877.015.981**		**3.469.562.003**		**78.877.293**		**824.158.673**						**903.035.966**	**100**	**26,03**		**903.035.966**	**50**	**4,95**	Kelurahan Banjar Sugihan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.958.570.439		548.967.925		503.885.100		78.877.293		115.260.113						194.137.406	0	38,53		194.137.406	0	4,9		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.958.570.439		548.967.925		503.885.100		78.877.293		115.260.113						194.137.406	0	38,53		194.137.406	0	4,9		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		5		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		200				100			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			14.278.587.247		2.328.048.056		2.965.676.903		-		708.898.560						708.898.560	200	23,9		708.898.560	100	4,96		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		9		1		0		2						2		200		2		100			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			14.278.587.247		2.328.048.056		2.965.676.903		-		708.898.560						708.898.560	200	23,9		708.898.560	100	4,96		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		9		1		0		2						2		200		2		100			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**22.985.403.590**		**3.226.328.914**		**4.372.900.881**		**141.425.515**		**721.163.789**						**862.589.304**	**0**	**19,73**		**862.589.304**	**0**	**3,75**	Kelurahan Karangpoh	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.055.044.132		835.589.689		1.139.020.090		141.425.515		209.061.128						350.486.643	0	30,77		350.486.643	0	4,97		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Karangpoh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.055.044.132		835.589.689		1.139.020.090		141.425.515		209.061.128						350.486.643	0	30,77		350.486.643	0	4,97		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			15.930.359.458		2.390.739.225		3.233.880.791		-		512.102.661						512.102.661	0	15,84		512.102.661	0	3,21		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		5		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			15.930.359.458		2.390.739.225		3.233.880.791		-		512.102.661						512.102.661	0	15,84		512.102.661	0	3,21		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		5		1		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**25.373.198.202**		**3.978.957.742**		**4.827.171.311**		**301.276.336**		**1.171.626.992**						**1.472.903.328**	**0**	**30,51**		**1.472.903.328**	**0**	**5,8**	Kelurahan Manukan Kulon	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			15.343.222.932		1.806.695.075		1.853.645.653		301.276.336		445.669.174						746.945.510	0	40,3		746.945.510	0	4,87		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			15.343.222.932		1.806.695.075		1.853.645.653		301.276.336		445.669.174						746.945.510	0	40,3		746.945.510	0	4,87		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.029.975.270		2.172.262.667		2.973.525.658		-		725.957.818						725.957.818	0	24,41		725.957.818	0	7,24		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		7		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.029.975.270		2.172.262.667		2.973.525.658		-		725.957.818						725.957.818	0	24,41		725.957.818	0	7,24		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		7		1		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.014.006.389**		**2.003.477.133**		**2.666.120.725**		**91.798.628**		**1.150.245.011**						**1.242.043.639**	**250**	**46,59**		**1.242.043.639**	**250**	**8,86**	Kelurahan Manukan Wetan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			4.658.158.330		543.931.033		592.200.000		91.798.628		136.284.865						228.083.493	0	38,51		228.083.493	0	4,9		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Manukan Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			4.658.158.330		543.931.033		592.200.000		91.798.628		136.284.865						228.083.493	0	38,51		228.083.493	0	4,9		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		1		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		500				500			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.355.848.059		1.459.546.100		2.073.920.725		-		1.013.960.146						1.013.960.146	500	48,89		1.013.960.146	500	10,84		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		10		1		0		5						5		500		5		500			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			9.355.848.059		1.459.546.100		2.073.920.725		-		1.013.960.146						1.013.960.146	500	48,89		1.013.960.146	500	10,84		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		10		1		0		5						5		500		5		500			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.374.249.010**		**1.978.548.100**		**2.734.655.753**		**101.484.636**		**883.314.499**						**984.799.135**	**25**	**36,01**		**984.799.135**	**25**	**6,85**	Kelurahan Tandes	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		50				50			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.093.382.331		601.760.865		969.000.000		101.484.636		171.874.565						273.359.201	50	28,21		273.359.201	50	5,37		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tandes	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		2		0		1						1		50		1		50			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5.093.382.331		601.760.865		969.000.000		101.484.636		171.874.565						273.359.201	50	28,21		273.359.201	50	5,37		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		1		2		0		1						1		50		1		50			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.280.866.679		1.376.787.235		1.765.655.753		-		711.439.934						711.439.934	0	40,29		711.439.934	0	7,67		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		5		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			9.280.866.679		1.376.787.235		1.765.655.753		-		711.439.934						711.439.934	0	40,29		711.439.934	0	7,67		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		5		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**120.883.923.494**		**20.317.076.222**		**23.709.101.184**		**4.973.554.151**		**6.365.193.295**						**11.338.747.446**	**33,18**	**47,82**		**11.338.747.446**	**33,18**	**9,38**	Kec. Tegalsari	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	95,45		96,05		95,41		97,05		96,82						96,82		101,48		96,82		101,44			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		-						-	12,5	0		-	12,5	0		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		-						-	12,5	0		-	12,5	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			93.791.577.578		15.957.128.705		18.508.498.684		4.235.894.843		5.273.907.765						9.509.802.608	102,22	51,38		9.509.802.608	102,22	10,14		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45		49		45		46		46						46		102,22		46		102,22			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			93.791.577.578		15.957.128.705		18.508.498.684		4.235.894.843		5.273.907.765						9.509.802.608	102,22	51,38		9.509.802.608	102,22	10,14		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45		49		45		46		46						46		102,22		46		102,22			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			26.575.720.916		4.292.863.442		5.081.549.700		737.659.308		1.080.110.730						1.817.770.038	3,7	35,77		1.817.770.038	3,7	6,84		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	27		27		27		0		1						1		3,7		1		3,7			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.575.720.916		4.292.863.442		5.081.549.700		737.659.308		1.080.110.730						1.817.770.038	3,7	35,77		1.817.770.038	3,7	6,84		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	27		27		27		0		1						1		3,7		1		3,7			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			503.625.000		67.084.075		115.108.800		-		11.174.800						11.174.800	14,29	9,71		11.174.800	14,29	2,22		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		7		7		0		1						1		14,29		1		14,29			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			503.625.000		67.084.075		115.108.800		-		11.174.800						11.174.800	14,29	9,71		11.174.800	14,29	2,22		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		7		7		0		1						1		14,29		1		14,29			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**884.340.000**		**83.585.600**		**213.236.512**		**5.896.800**		**51.445.800**						**57.342.600**	**50**	**26,89**		**57.342.600**	**50**	**6,48**	Kec. Tegalsari	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			884.340.000		83.585.600		213.236.512		5.896.800		51.445.800						57.342.600	50	26,89		57.342.600	50	6,48		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			884.340.000		83.585.600		213.236.512		5.896.800		51.445.800						57.342.600	50	26,89		57.342.600	50	6,48		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**10.695.012.000**		**1.486.320.800**		**2.209.291.200**						**3.695.612.000**	**50**	**34,55**		**3.695.612.000**	**50**	**3079,68**	Kec. Tegalsari	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		50		50		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		10.695.012.000		1.486.320.800		2.209.291.200						3.695.612.000	50	34,55		3.695.612.000	50	3079,68		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas SDM pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	240		0		240		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.680.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	240		0		240		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	21140		0		21140		21.140		21.140						21.140		100		21.140		100			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		9.015.012.000		1.486.320.800		2.209.291.200						3.695.612.000	100	40,99		3.695.612.000	100	6159,35		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	21140		0		21140		21.140		21.140						21.140		100		21.140		100			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**993.738.000**		-		**207.249.600**		-		**32.081.600**						**32.081.600**	**50**	**15,48**		**32.081.600**	**50**	**3,23**	Kec. Tegalsari	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		96,64						96,64		96,64		96,64		96,64			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			993.738.000		-		207.249.600		-		32.081.600						32.081.600	50	15,48		32.081.600	50	3,23		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			993.738.000		-		207.249.600		-		32.081.600						32.081.600	50	15,48		32.081.600	50	3,23		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**26.098.789.115**		**3.954.272.275**		**4.976.912.886**		**196.903.102**		**493.256.120**						**690.159.222**	**2,5**	**13,87**		**690.159.222**	**4,17**	**2,64**	Kelurahan Dr. Soetomo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.829.198.581		1.669.578.567		1.536.329.011		184.062.791		274.204.661						458.267.452	0	29,83		458.267.452	0	3,87		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			11.829.198.581		1.669.578.567		1.536.329.011		184.062.791		274.204.661						458.267.452	0	29,83		458.267.452	0	3,87		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		5				8,33			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			14.269.590.534		2.284.693.708		3.440.583.875		12.840.311		219.051.459						231.891.770	5	6,74		231.891.770	8,33	1,63		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		12		20		0		1						1		5		1		8,33			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			14.269.590.534		2.284.693.708		3.440.583.875		12.840.311		219.051.459						231.891.770	5	6,74		231.891.770	8,33	1,63		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		12		20		0		1						1		5		1		8,33			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**27.581.373.781**		**4.176.582.120**		**5.247.269.783**		**173.510.553**		**961.667.991**						**1.135.178.544**	**0**	**21,63**		**1.135.178.544**	**0**	**4,12**	Kelurahan Kedungdoro	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.278.156.423		1.034.128.086		1.469.932.186		173.510.553		256.548.938						430.059.491	0	29,26		430.059.491	0	4,64		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kedungdoro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.278.156.423		1.034.128.086		1.469.932.186		173.510.553		256.548.938						430.059.491	0	29,26		430.059.491	0	4,64		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			18.303.217.358		3.142.454.034		3.777.337.597		-		705.119.053						705.119.053	0	18,67		705.119.053	0	3,85		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	36		32		29		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			18.303.217.358		3.142.454.034		3.777.337.597		-		705.119.053						705.119.053	0	18,67		705.119.053	0	3,85		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	36		32		29		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**19.787.157.794**		**1.762.165.437**		**3.764.444.658**		**116.415.927**		**758.174.135**						**874.590.062**	**5,56**	**23,23**		**874.590.062**	**10**	**4,42**	Kelurahan Keputran	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.315.394.204		689.639.174		726.000.000		116.415.927		172.598.288						289.014.215	0	39,81		289.014.215	0	3,1		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Keputran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.315.394.204		689.639.174		726.000.000		116.415.927		172.598.288						289.014.215	0	39,81		289.014.215	0	3,1		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		11,11				20			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.471.763.590		1.072.526.263		3.038.444.658		-		585.575.847						585.575.847	11,11	19,27		585.575.847	20	5,59		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	20		15		36		0		4						4		11,11		4		20			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.471.763.590		1.072.526.263		3.038.444.658		-		585.575.847						585.575.847	11,11	19,27		585.575.847	20	5,59		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	20		15		36		0		4						4		11,11		4		20			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.061.942.513**		**2.586.334.272**		**3.436.227.866**		**292.771.473**		**590.109.826**						**882.881.299**	**0**	**25,69**		**882.881.299**	**0**	**4,89**	Kelurahan Tegalsari	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.504.118.748		778.228.045		1.079.789.868		127.191.322		187.412.747						314.604.069	0	29,14		314.604.069	0	4,19		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tegalsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.504.118.748		778.228.045		1.079.789.868		127.191.322		187.412.747						314.604.069	0	29,14		314.604.069	0	4,19		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.557.823.765		1.808.106.227		2.356.437.998		165.580.151		402.697.079						568.277.230	0	24,12		568.277.230	0	5,38		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		14		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.557.823.765		1.808.106.227		2.356.437.998		165.580.151		402.697.079						568.277.230	0	24,12		568.277.230	0	5,38		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		14		12		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**20.591.716.441**		**3.018.867.327**		**3.917.509.415**		**308.004.341**		**788.659.046**						**1.096.663.387**	**5,56**	**27,99**		**1.096.663.387**	**7,14**	**5,33**	Kelurahan Wonorejo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.980.927.419		1.233.033.582		1.818.255.335		180.820.370		269.106.718						449.927.088	0	24,74		449.927.088	0	4,1		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Wonorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.980.927.419		1.233.033.582		1.818.255.335		180.820.370		269.106.718						449.927.088	0	24,74		449.927.088	0	4,1		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		11,11				14,29			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.610.789.022		1.785.833.745		2.099.254.080		127.183.971		519.552.328						646.736.299	11,11	30,81		646.736.299	14,29	6,73		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	14		12		18		0		2						2		11,11		2		14,29			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			9.610.789.022		1.785.833.745		2.099.254.080		127.183.971		519.552.328						646.736.299	11,11	30,81		646.736.299	14,29	6,73		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	14		12		18		0		2						2		11,11		2		14,29			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**107.560.359.331**		**18.498.216.073**		**20.804.229.785**		**4.439.136.194**		**5.766.648.639**						**10.205.784.833**	**22,19**	**49,06**		**10.205.784.833**	**22,19**	**9,49**	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	96,6		97,1		96,04		98,08		97,755						97,755		101,79		97,755		101,2			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.932.000		-		1.300.000						1.300.000	12,5	33,06		1.300.000	12,5	10		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.932.000		-		1.300.000						1.300.000	12,5	33,06		1.300.000	12,5	10		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			87.243.678.157		15.142.579.447		17.234.988.424		3.861.139.505		4.896.778.146						8.757.917.651	76,27	50,81		8.757.917.651	76,27	10,04		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	59		49		59		45		45						45		76,27		45		76,27			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			87.243.678.157		15.142.579.447		17.234.988.424		3.861.139.505		4.896.778.146						8.757.917.651	76,27	50,81		8.757.917.651	76,27	10,04		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	59		49		59		45		45						45		76,27		45		76,27			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			19.820.239.174		3.305.800.092		3.447.883.761		577.996.689		859.670.522						1.437.667.211	0	41,7		1.437.667.211	0	7,25		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		23		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			19.820.239.174		3.305.800.092		3.447.883.761		577.996.689		859.670.522						1.437.667.211	0	41,7		1.437.667.211	0	7,25		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		23		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			483.442.000		49.836.534		117.425.600		-		8.899.971						8.899.971	0	7,58		8.899.971	0	1,84		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		5		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			483.442.000		49.836.534		117.425.600		-		8.899.971						8.899.971	0	7,58		8.899.971	0	1,84		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		5		4		0		0						0		0		0		0			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima baoi Masvarakat		**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**594.197.522**		**26.868.800**		**112.227.533**		-		**25.724.250**						**25.724.250**	**50**	**22,92**		**25.724.250**	**50**	**4,33**	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	97,5		96,15		96,50		100		100						100		103,63		100		102,56			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			594.197.522		26.868.800		112.227.533		-		25.724.250						25.724.250	50	22,92		25.724.250	50	4,33		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			594.197.522		26.868.800		112.227.533		-		25.724.250						25.724.250	50	22,92		25.724.250	50	4,33		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima baoi Masvarakat		**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**5.683.006.400**		**790.300.000**		**1.194.712.800**						**1.985.012.800**	**50**	**34,93**		**1.985.012.800**	**50**	**1654,18**	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		5.683.006.400		790.300.000		1.194.712.800						1.985.012.800	50	34,93		1.985.012.800	50	1654,18		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas SDM pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	125		0		125		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		875.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	125		0		125		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	11440		0		11440		11.440		11.440						11.440		100		11.440		100			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		4.808.006.400		790.300.000		1.194.712.800						1.985.012.800	100	41,29		1.985.012.800	100	3308,35		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	11440		0		11440		11.440		11.440						11.440		100		11.440		100			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**633.129.000**		-		**138.571.200**		-		**23.092.100**						**23.092.100**	**50**	**16,66**		**23.092.100**	**50**	**3,65**	Kec. Tenggilis Mejoyo	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			633.129.000		-		138.571.200		-		23.092.100						23.092.100	50	16,66		23.092.100	50	3,65		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			633.129.000		-		138.571.200		-		23.092.100						23.092.100	50	16,66		23.092.100	50	3,65		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**12.979.268.525**		**1.643.319.184**		**2.492.094.718**		**85.766.774**		**419.024.480**						**504.791.254**	**0**	**20,26**		**504.791.254**	**0**	**3,89**	Kelurahan Kendangsari	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.773.805.034		510.169.332		561.600.000		85.766.774		127.478.089						213.244.863	0	37,97		213.244.863	0	3,15		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kendangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6.773.805.034		510.169.332		561.600.000		85.766.774		127.478.089						213.244.863	0	37,97		213.244.863	0	3,15		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.205.463.491		1.133.149.852		1.930.494.718		-		291.546.391						291.546.391	0	15,1		291.546.391	0	4,7		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		5		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			6.205.463.491		1.133.149.852		1.930.494.718		-		291.546.391						291.546.391	0	15,1		291.546.391	0	4,7		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		5		1		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**20.932.933.913**		**3.031.352.762**		**3.454.795.608**		**109.526.560**		**317.228.982**						**426.755.542**	**0**	**12,35**		**426.755.542**	**0**	**2,04**	Kelurahan Kutisari	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.293.030.822		652.412.220		669.600.000		109.526.560		162.880.375						272.406.935	0	40,68		272.406.935	0	4,33		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kutisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6.293.030.822		652.412.220		669.600.000		109.526.560		162.880.375						272.406.935	0	40,68		272.406.935	0	4,33		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			14.639.903.091		2.378.940.542		2.785.195.608		-		154.348.607						154.348.607	0	5,54		154.348.607	0	1,05		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		8		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			14.639.903.091		2.378.940.542		2.785.195.608		-		154.348.607						154.348.607	0	5,54		154.348.607	0	1,05		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		8		1		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**19.983.142.258**		**3.029.221.063**		**3.801.730.087**		**112.562.988**		**377.814.454**						**490.377.442**	**0**	**12,9**		**490.377.442**	**0**	**2,45**	Kelurahan Panjang Jiwo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.346.840.635		911.245.927		1.129.366.673		112.562.988		167.073.628						279.636.616	0	24,76		279.636.616	0	3,35		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			8.346.840.635		911.245.927		1.129.366.673		112.562.988		167.073.628						279.636.616	0	24,76		279.636.616	0	3,35		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			11.636.301.623		2.117.975.136		2.672.363.414		-		210.740.826						210.740.826	0	7,89		210.740.826	0	1,81		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		8		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			11.636.301.623		2.117.975.136		2.672.363.414		-		210.740.826						210.740.826	0	7,89		210.740.826	0	1,81		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		8		1		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.520.200.221**		**2.030.141.006**		**3.281.062.709**		**89.911.804**		**626.890.518**						**716.802.322**	**50**	**21,85**		**716.802.322**	**50**	**4,94**	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.959.521.829		665.606.692		731.117.400		89.911.804		136.155.625						226.067.429	0	30,92		226.067.429	0	3,79		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5.959.521.829		665.606.692		731.117.400		89.911.804		136.155.625						226.067.429	0	30,92		226.067.429	0	3,79		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		100				100			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.560.678.392		1.364.534.314		2.549.945.309		-		490.734.893						490.734.893	100	19,24		490.734.893	100	5,73		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		10		1		0		1						1		100		1		100			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.560.678.392		1.364.534.314		2.549.945.309		-		490.734.893						490.734.893	100	19,24		490.734.893	100	5,73		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		10		1		0		1						1		100		1		100			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**106.904.477.981**		**18.496.092.923**		**20.691.369.470**		**4.720.192.377**		**5.859.901.280**						**10.580.093.657**	**33,04**	**51,13**		**10.580.093.657**	**34,91**	**9,9**	Kec. Wiyung	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	98,53		99,01		98,46		99,07		98,88						98,88		100,43		98,88		100,36			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.932.000		-		1.325.000						1.325.000	12,5	33,7		1.325.000	12,5	10,19		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.932.000		-		1.325.000						1.325.000	12,5	33,7		1.325.000	12,5	10,19		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			83.393.619.852		14.564.365.198		16.599.690.772		4.036.668.467		4.856.568.410						8.893.236.877	107,14	53,57		8.893.236.877	107,14	10,66		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42		46		42		45		45						45		107,14		45		107,14			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			83.393.619.852		14.564.365.198		16.599.690.772		4.036.668.467		4.856.568.410						8.893.236.877	107,14	53,57		8.893.236.877	107,14	10,66		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42		46		42		45		45						45		107,14		45		107,14			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			23.077.125.629		3.838.810.305		3.989.940.819		683.523.910		986.014.970						1.669.538.880	12,5	41,84		1.669.538.880	20	7,23		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		8		8		0		1						1		12,5		1		20			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			23.077.125.629		3.838.810.305		3.989.940.819		683.523.910		986.014.970						1.669.538.880	12,5	41,84		1.669.538.880	20	7,23		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		8		8		0		1						1		12,5		1		20			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			420.732.500		92.917.420		97.805.879		-		15.992.900						15.992.900	0	16,35		15.992.900	0	3,8		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		4		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			420.732.500		92.917.420		97.805.879		-		15.992.900						15.992.900	0	16,35		15.992.900	0	3,8		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		4		5		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**719.532.000**		**47.060.000**		**148.677.493**		**3.418.200**		**35.680.500**						**39.098.700**	**50**	**26,3**		**39.098.700**	**50**	**5,43**	Kec. Wiyung	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			719.532.000		47.060.000		148.677.493		3.418.200		35.680.500						39.098.700	50	26,3		39.098.700	50	5,43		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			719.532.000		47.060.000		148.677.493		3.418.200		35.680.500						39.098.700	50	26,3		39.098.700	50	5,43		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**6.455.105.600**		**866.811.600**		**1.312.760.200**						**2.179.571.800**	**48,14**	**33,77**		**2.179.571.800**	**48,14**	**1816,31**	Kec. Wiyung	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		6.455.105.600		866.811.600		1.312.760.200						2.179.571.800	48,14	33,77		2.179.571.800	48,14	1816,31		
			Meningkatnya kualitas SDM pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	170		0		170		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.190.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	170		0		170		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	12920		0		12920		12.440		12.440						12.440		96,28		12.440		96,28			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		5.265.105.600		866.811.600		1.312.760.200						2.179.571.800	96,28	41,4		2.179.571.800	96,28	3632,62		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	12920		0		12920		12.440		12.440						12.440		96,28		12.440		96,28			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**715.746.000**		-		**147.156.000**		-		**24.523.000**						**24.523.000**	**50**	**16,66**		**24.523.000**	**50**	**3,43**	Kec. Wiyung	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		0		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			715.746.000		-		147.156.000		-		24.523.000						24.523.000	50	16,66		24.523.000	50	3,43		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			715.746.000		-		147.156.000		-		24.523.000						24.523.000	50	16,66		24.523.000	50	3,43		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**18.577.573.621**		**2.810.944.588**		**3.557.154.689**		**170.690.003**		**617.607.141**						**788.297.144**	**0**	**22,16**		**788.297.144**	**0**	**4,24**	Kelurahan Babatan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.692.092.938		1.017.146.627		1.866.719.881		170.690.003		253.898.540						424.588.543	0	22,75		424.588.543	0	4,38		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Babatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		2		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.692.092.938		1.017.146.627		1.866.719.881		170.690.003		253.898.540						424.588.543	0	22,75		424.588.543	0	4,38		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		2		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.885.480.683		1.793.797.961		1.690.434.808		-		363.708.601						363.708.601	0	21,52		363.708.601	0	4,09		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	11		5		6		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.885.480.683		1.793.797.961		1.690.434.808		-		363.708.601						363.708.601	0	21,52		363.708.601	0	4,09		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	11		5		6		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**15.316.660.397**		**1.888.022.523**		**2.913.946.561**		**107.481.183**		**536.504.539**						**643.985.722**	**0**	**22,1**		**643.985.722**	**0**	**4,2**	Kelurahan Balas Klumprik	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.487.606.968		640.559.715		688.948.095		107.481.183		158.120.491						265.601.674	0	38,55		265.601.674	0	4,84		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Balas Klumprik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5.487.606.968		640.559.715		688.948.095		107.481.183		158.120.491						265.601.674	0	38,55		265.601.674	0	4,84		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.829.053.429		1.247.462.808		2.224.998.466		-		378.384.048						378.384.048	0	17,01		378.384.048	0	3,85		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		8		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			9.829.053.429		1.247.462.808		2.224.998.466		-		378.384.048						378.384.048	0	17,01		378.384.048	0	3,85		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		8		8		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**20.212.141.536**		**2.586.084.301**		**3.845.296.481**		**70.296.444**		**322.922.074**						**393.218.518**	**25**	**10,23**		**393.218.518**	**25**	**1,95**	Kelurahan Jajar Tunggal	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		50				50			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.110.856.137		424.681.174		1.162.571.198		70.296.444		105.288.653						175.585.097	50	15,1		175.585.097	50	2,87		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6.110.856.137		424.681.174		1.162.571.198		70.296.444		105.288.653						175.585.097	50	15,1		175.585.097	50	2,87		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			14.101.285.399		2.161.403.127		2.682.725.283		-		217.633.421						217.633.421	0	8,11		217.633.421	0	1,54		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		6		6		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			14.101.285.399		2.161.403.127		2.682.725.283		-		217.633.421						217.633.421	0	8,11		217.633.421	0	1,54		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		6		6		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**21.904.288.493**		**3.335.028.187**		**4.091.838.705**		**389.660.189**		**1.366.454.585**						**1.756.114.774**	**22,22**	**42,92**		**1.756.114.774**	**22,22**	**8,02**	Kelurahan Wiyung	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.482.350.640		629.883.757		802.680.000		105.121.020		156.705.875						261.826.895	0	32,62		261.826.895	0	4,78		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Wiyung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5.482.350.640		629.883.757		802.680.000		105.121.020		156.705.875						261.826.895	0	32,62		261.826.895	0	4,78		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		44,44				44,44			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			16.421.937.853		2.705.144.430		3.289.158.705		284.539.169		1.209.748.710						1.494.287.879	44,44	45,43		1.494.287.879	44,44	9,1		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9		9		9		0		4						4		44,44		4		44,44			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			16.421.937.853		2.705.144.430		3.289.158.705		284.539.169		1.209.748.710						1.494.287.879	44,44	45,43		1.494.287.879	44,44	9,1		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9		9		9		0		4						4		44,44		4		44,44			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**127.791.785.279**		**23.206.374.180**		**24.931.802.318**		**5.959.651.762**		**7.530.885.195**						**13.490.536.957**	**29,42**	**54,11**		**13.490.536.957**	**29,42**	**10,56**	Kec. Wonocolo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	96,6		96,77		96,4		97,7		97,4						97,4		101,04		97,4		100,83			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.932.000		-		-						-	12,5	0		-	12,5	0		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.666.455		-		3.932.000		-		-						-	12,5	0		-	12,5	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			101.282.163.579		18.590.078.241		20.122.223.806		5.139.889.065		6.311.848.294						11.451.737.359	105,17	56,91		11.451.737.359	105,17	11,31		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58		60		58		61		61						61		105,17		61		105,17			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			101.282.163.579		18.590.078.241		20.122.223.806		5.139.889.065		6.311.848.294						11.451.737.359	105,17	56,91		11.451.737.359	105,17	11,31		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58		60		58		61		61						61		105,17		61		105,17			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			25.812.101.528		4.532.014.149		4.688.362.480		819.762.697		1.200.636.901						2.020.399.598	0	43,09		2.020.399.598	0	7,83		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11		11		11		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.812.101.528		4.532.014.149		4.688.362.480		819.762.697		1.200.636.901						2.020.399.598	0	43,09		2.020.399.598	0	7,83		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11		11		11		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			683.853.717		84.281.790		117.284.032		-		18.400.000						18.400.000	0	15,69		18.400.000	0	2,69		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		7		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			683.853.717		84.281.790		117.284.032		-		18.400.000						18.400.000	0	15,69		18.400.000	0	2,69		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		7		2		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**933.732.000**		**79.617.000**		**192.471.712**		**4.552.200**		**46.310.400**						**50.862.600**	**50**	**26,43**		**50.862.600**	**50**	**5,45**	Kec. Wonocolo	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat		Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			933.732.000		79.617.000		192.471.712		4.552.200		46.310.400						50.862.600	50	26,43		50.862.600	50	5,45		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			933.732.000		79.617.000		192.471.712		4.552.200		46.310.400						50.862.600	50	26,43		50.862.600	50	5,45		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**9.353.010.400**		**1.277.500.000**		**1.919.460.400**						**3.196.960.400**	**50**	**34,18**		**3.196.960.400**	**50**	**2664,13**	Kec. Wonocolo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		9.353.010.400		1.277.500.000		1.919.460.400						3.196.960.400	50	34,18		3.196.960.400	50	2664,13		
			Meningkatnya kualitas SDM pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	220		0		220		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		1.540.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	220		0		220		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	18720		0		18720		18.720		18.720						18.720		100		18.720		100			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		7.813.010.400		1.277.500.000		1.919.460.400						3.196.960.400	100	40,92		3.196.960.400	100	5328,27		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	18720		0		18720		18.720		18.720						18.720		100		18.720		100			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**707.244.000**		-		**147.156.000**		-		**24.523.200**						**24.523.200**	**50**	**16,66**		**24.523.200**	**50**	**3,47**	Kec. Wonocolo	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			707.244.000		-		147.156.000		-		24.523.200						24.523.200	50	16,66		24.523.200	50	3,47		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			707.244.000		-		147.156.000		-		24.523.200						24.523.200	50	16,66		24.523.200	50	3,47		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**25.205.364.598**		**4.481.609.662**		**4.784.051.560**		**157.182.952**		**565.841.527**						**723.024.479**	**0**	**15,11**		**723.024.479**	**0**	**2,87**	Kelurahan Bendul Merisi	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.796.030.742		927.328.353		1.506.000.000		157.182.952		231.606.282						388.789.234	0	25,82		388.789.234	0	4,99		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		2		0		0						0		0		0		0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.796.030.742		927.328.353		1.506.000.000		157.182.952		231.606.282						388.789.234	0	25,82		388.789.234	0	4,99		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			17.409.333.856		3.554.281.309		3.278.051.560		-		334.235.245						334.235.245	0	10,2		334.235.245	0	1,92		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			17.409.333.856		3.554.281.309		3.278.051.560		-		334.235.245						334.235.245	0	10,2		334.235.245	0	1,92		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**16.130.740.514**		**2.329.444.620**		**3.413.702.748**		**154.947.389**		**889.208.573**						**1.044.155.962**	**0**	**30,59**		**1.044.155.962**	**0**	**6,47**	Kelurahan Jemur Wonosari	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.084.269.870		915.611.159		1.239.060.090		154.947.389		231.854.833						386.802.222	0	31,22		386.802.222	0	3,84		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.084.269.870		915.611.159		1.239.060.090		154.947.389		231.854.833						386.802.222	0	31,22		386.802.222	0	3,84		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		3		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.046.470.644		1.413.833.461		2.174.642.658		-		657.353.740						657.353.740	0	30,23		657.353.740	0	10,87		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10		3		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			6.046.470.644		1.413.833.461		2.174.642.658		-		657.353.740						657.353.740	0	30,23		657.353.740	0	10,87		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10		3		2		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**13.009.279.408**		**1.615.008.221**		**2.346.219.122**		**95.777.100**		**508.338.071**						**604.115.171**	**6,25**	**25,75**		**604.115.171**	**6,25**	**4,64**	Kelurahan Margorejo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.455.375.656		748.756.000		1.289.606.367		95.777.100		143.282.100						239.059.200	0	18,54		239.059.200	0	3,21		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Margorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7.455.375.656		748.756.000		1.289.606.367		95.777.100		143.282.100						239.059.200	0	18,54		239.059.200	0	3,21		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		12,5				12,5			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.553.903.752		866.252.221		1.056.612.755		-		365.055.971						365.055.971	12,5	34,55		365.055.971	12,5	6,57		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		8		8		0		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5.553.903.752		866.252.221		1.056.612.755		-		365.055.971						365.055.971	12,5	34,55		365.055.971	12,5	6,57		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		8		8		0		1						1		12,5		1		12,5			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**14.626.676.213**		**2.237.055.357**		**2.911.434.685**		**96.512.817**		**612.281.307**						**708.794.124**	**0**	**24,35**		**708.794.124**	**0**	**4,85**	Kelurahan Sidosermo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			4.812.694.388		571.527.650		580.786.868		96.512.817		144.127.741						240.640.558	0	41,43		240.640.558	0	5		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sidosermo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			4.812.694.388		571.527.650		580.786.868		96.512.817		144.127.741						240.640.558	0	41,43		240.640.558	0	5		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.813.981.825		1.665.527.707		2.330.647.817		-		468.153.566						468.153.566	0	20,09		468.153.566	0	4,77		

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		8		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			9.813.981.825		1.665.527.707		2.330.647.817		-		468.153.566						468.153.566	0	20,09		468.153.566	0	4,77		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		8		8		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima baoi Masvarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**22.960.516.196**		**3.353.646.743**		**3.887.207.902**		**102.410.342**		**836.182.128**						**938.592.470**	**0**	**24,15**		**938.592.470**	**8,33**	**4,09**	Kelurahan Siwalankerto	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.191.150.041		706.218.291		642.720.000		102.410.342		151.159.623						253.569.965	0	39,45		253.569.965	0	4,88		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5.191.150.041		706.218.291		642.720.000		102.410.342		151.159.623						253.569.965	0	39,45		253.569.965	0	4,88		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				16,67			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			17.769.366.155		2.647.428.452		3.244.487.902		-		685.022.505						685.022.505	0	21,11		685.022.505	16,67	3,86		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		7		0		0		1						1		0		1		16,67			
		7.01.03.2.02.000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			17.769.366.155		2.647.428.452		3.244.487.902		-		685.022.505						685.022.505	0	21,11		685.022.505	16,67	3,86		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		7		0		0		1						1		0		1		16,67			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**150.702.909.768**		**26.075.991.382**		**29.413.340.902**		**6.361.946.002**		**8.166.154.344**						**14.528.100.346**	**27,32**	**49,39**		**14.528.100.346**	**27,32**	**9,64**	Kec. Wonokromo	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada Kecamatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	98,12		99,58		98,08		99,46		99,64						99,64		101,59		99,64		101,55			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		-						-	12,5	0		-	12,5	0		
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daera	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.000.000		-		3.944.000		-		-						-	12,5	0		-	12,5	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			116.654.799.815		20.137.004.184		23.019.207.959		5.339.939.275		6.623.099.144						11.963.038.419	96,77	51,97		11.963.038.419	96,77	10,26		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62		64		62		60		60						60		96,77		60		96,77			
		7.01.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			116.654.799.815		20.137.004.184		23.019.207.959		5.339.939.275		6.623.099.144						11.963.038.419	96,77	51,97		11.963.038.419	96,77	10,26		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62		64		62		60		60						60		96,77		60		96,77			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			33.366.617.203		5.871.910.358		6.241.529.743		1.022.006.727		1.532.979.600						2.554.986.327	0	40,94		2.554.986.327	0	7,66		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		7		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			33.366.617.203		5.871.910.358		6.241.529.743		1.022.006.727		1.532.979.600						2.554.986.327	0	40,94		2.554.986.327	0	7,66		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8		7		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			668.492.750		67.076.840		148.659.200		-		10.075.600						10.075.600	0	6,78		10.075.600	0	1,51		
			Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			668.492.750		67.076.840		148.659.200		-		10.075.600						10.075.600	0	6,78		10.075.600	0	1,51		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima baoi Masvarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**1.126.152.000**		**171.455.200**		**265.649.131**		-		**61.173.900**						**61.173.900**	**50**	**23,03**		**61.173.900**	**50**	**5,43**	Kec. Wonokromo	
			Terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan yang sesuai ketentuan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			1.126.152.000		171.455.200		265.649.131		-		61.173.900						61.173.900	50	23,03		61.173.900	50	5,43		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.126.152.000		171.455.200		265.649.131		-		61.173.900						61.173.900	50	23,03		61.173.900	50	5,43		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**120.000.000**		-		**16.157.751.200**		**2.309.897.800**		**3.425.860.800**						**5.735.758.600**	**50,54**	**35,5**		**5.735.758.600**	**50,54**	**4779,8**	Kec. Wonokromo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi	Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi (%)	100		50		50		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			120.000.000		-		16.157.751.200		2.309.897.800		3.425.860.800						5.735.758.600	50,54	35,5		5.735.758.600	50,54	4779,8		
			Meningkatnya kualitas SDM pemuda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	290		0		290		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber			60.000.000		-		2.030.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	290		0		290		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	35220		0		35220		35.598		35.598						35.598		101,07		35.598		101,07			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			60.000.000		-		14.127.751.200		2.309.897.800		3.425.860.800						5.735.758.600	101,07	40,6		5.735.758.600	101,07	9559,6		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	35220		0		35220		35.598		35.598						35.598		101,07		35.598		101,07			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**1.374.665.022**		-		**211.542.000**		-		**29.077.200**						**29.077.200**	**50**	**13,75**		**29.077.200**	**50**	**2,12**	Kec. Wonokromo	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP (%)	100		100		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			1.374.665.022		-		211.542.000		-		29.077.200						29.077.200	50	13,75		29.077.200	50	2,12		
			Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-			1.374.665.022		-		211.542.000		-		29.077.200						29.077.200	50	13,75		29.077.200	50	2,12		
			Terlaksanaya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**21.046.789.240**		**3.211.004.217**		**4.026.915.210**		**201.765.703**		**301.778.895**						**503.544.598**	**0**	**12,5**		**503.544.598**	**0**	**2,39**	Kelurahan Darmo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12.440.542.732		1.205.766.080		1.518.820.090		201.765.703		301.778.895						503.544.598	0	33,15		503.544.598	0	4,05		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Darmo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		3		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12.440.542.732		1.205.766.080		1.518.820.090		201.765.703		301.778.895						503.544.598	0	33,15		503.544.598	0	4,05		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		3		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.606.246.508		2.005.238.137		2.508.095.120		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		9		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.606.246.508		2.005.238.137		2.508.095.120		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		9		1		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**20.247.492.712**		**2.771.318.461**		**3.852.021.931**		**271.527.396**		**587.800.308**						**859.327.704**	**0**	**22,31**		**859.327.704**	**0**	**4,24**	Kelurahan Jagir	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.309.171.715		1.311.892.789		1.401.089.640		176.355.996		262.464.308						438.820.304	0	31,32		438.820.304	0	4,71		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Jagir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.309.171.715		1.311.892.789		1.401.089.640		176.355.996		262.464.308						438.820.304	0	31,32		438.820.304	0	4,71		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.938.320.997		1.459.425.672		2.450.932.291		95.171.400		325.336.000						420.507.400	0	17,16		420.507.400	0	3,84		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		6		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.938.320.997		1.459.425.672		2.450.932.291		95.171.400		325.336.000						420.507.400	0	17,16		420.507.400	0	3,84		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		6		0		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**19.657.761.641**		**2.863.071.704**		**3.739.827.446**		**96.265.299**		**384.846.931**						**481.112.230**	**0**	**12,86**		**481.112.230**	**0**	**2,45**	Kelurahan Ngagel	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5.005.076.011		574.225.672		611.960.000		96.265.299		144.026.678						240.291.977	0	39,27		240.291.977	0	4,8		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Ngagel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5.005.076.011		574.225.672		611.960.000		96.265.299		144.026.678						240.291.977	0	39,27		240.291.977	0	4,8		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			14.652.685.630		2.288.846.032		3.127.867.446		-		240.820.253						240.820.253	0	7,7		240.820.253	0	1,64		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		6		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			14.652.685.630		2.288.846.032		3.127.867.446		-		240.820.253						240.820.253	0	7,7		240.820.253	0	1,64		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	6		6		1		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**33.683.260.156**		**4.401.445.954**		**6.147.398.303**		**288.759.801**		**643.765.659**						**932.525.460**	**0**	**15,17**		**932.525.460**	**0**	**2,77**	Kelurahan Ngagel Rejo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan inovasi																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			14.909.260.450		1.719.906.097		1.867.364.018		288.759.801		430.168.359						718.928.160	0	38,5		718.928.160	0	4,82		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		2		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			14.909.260.450		1.719.906.097		1.867.364.018		288.759.801		430.168.359						718.928.160	0	38,5		718.928.160	0	4,82		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		2		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			18.773.999.706		2.681.539.857		4.280.034.285		-		213.597.300						213.597.300	0	4,99		213.597.300	0	1,14		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		6		0		0		0						0		0		0		0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			18.773.999.706		2.681.539.857		4.280.034.285		-		213.597.300						213.597.300	0	4,99		213.597.300	0	1,14		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		6		0		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**25.938.987.014**		**4.578.169.218**		**4.934.810.856**		**385.313.891**		**927.296.357**						**1.312.610.248**	**0**	**26,6**		**1.312.610.248**	**0**	**5,06**	Kelurahan Sawunggaling	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10.898.630.272		1.495.477.141		1.336.247.602		213.253.730		316.821.444						530.075.174	0	39,67		530.075.174	0	4,86		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sawunggaling	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			10.898.630.272		1.495.477.141		1.336.247.602		213.253.730		316.821.444						530.075.174	0	39,67		530.075.174	0	4,86		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			15.040.356.742		3.082.692.077		3.598.563.254		172.060.161		610.474.913						782.535.074	0	21,75		782.535.074	0	5,2		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			15.040.356.742		3.082.692.077		3.598.563.254		172.060.161		610.474.913						782.535.074	0	21,75		782.535.074	0	5,2		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**29.142.626.779**		**4.774.314.624**		**5.544.293.265**		**218.185.349**		**719.209.779**						**937.395.128**	**0**	**16,91**		**937.395.128**	**0**	**3,22**	Kelurahan Wonokromo	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan dalam peningkatan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.829.024.950		1.302.071.111		1.482.328.036		218.185.349		325.689.508						543.874.857	0	36,69		543.874.857	0	3,93		
			Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Wonokromo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			13.829.024.950		1.302.071.111		1.482.328.036		218.185.349		325.689.508						543.874.857	0	36,69		543.874.857	0	3,93		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		5		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pembangunan sarana dan																		0				0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			15.313.601.829		3.472.243.513		4.061.965.229		-		393.520.271						393.520.271	0	9,69		393.520.271	0	2,57		
			Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		8		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			15.313.601.829		3.472.243.513		4.061.965.229		-		393.520.271						393.520.271	0	9,69		393.520.271	0	2,57		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8		8		8		0		0						0		0		0		0			
		8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**476.877.496.218**		**29.095.074.524**		**88.689.642.685**		**6.041.919.932**		**31.568.058.979**						**37.609.978.911**	**56,25**	**42,41**		**37.609.978.911**	**56,18**	**7,89**		
		8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**72.605.271.082**		**12.249.315.631**		**14.460.100.721**		**2.913.934.232**		**3.933.562.189**						**6.847.496.421**	**40,63**	**47,35**		**6.847.496.421**	**40,63**	**9,43**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan pada bidang kesatuan bangsa dan politik	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	97,96		99,48		97,92		100		99,94						99,94		102,06		99,94		102,02			
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			68.339.879		-		7.077.120		-		6.580.000						6.580.000	12,5	92,98		6.580.000	12,5	9,63		
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			68.339.879		-		7.077.120		-		6.580.000						6.580.000	12,5	92,98		6.580.000	12,5	9,63		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		9		8		2		1						1		12,5		1		12,5			
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			57.093.242.445		9.433.970.925		11.269.656.347		2.606.424.136		3.259.567.401						5.865.991.537	100	52,05		5.865.991.537	100	10,27		
			Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28		28		28		28		28						28		100		28		100			
		8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			57.093.242.445		9.433.970.925		11.269.656.347		2.606.424.136		3.259.567.401						5.865.991.537	100	52,05		5.865.991.537	100	10,27		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28		28		28		28		28						28		100		28		100			
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			685.704.521		86.125.800		165.452.356		-		9.400.000						9.400.000	0	5,68		9.400.000	0	1,37		
			Meningkatnya Ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			685.704.521		86.125.800		165.452.356		-		9.400.000						9.400.000	0	5,68		9.400.000	0	1,37		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		5		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.757.984.237		2.729.218.906		3.017.914.898		307.510.096		658.014.788						965.524.884	50	31,99		965.524.884	50	6,54		
			Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		4		4		1		1						2		50		2		50			
		8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			14.757.984.237		2.729.218.906		3.017.914.898		307.510.096		658.014.788						965.524.884	50	31,99		965.524.884	50	6,54		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		4		4		1		1						2		50		2		50			
	Meningkatnya Keharmonisan dan Kerukunan Umat Beragama	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**23.145.379.011**		**4.287.891.978**		**4.850.868.290**		**39.452.000**		**573.206.700**						**612.658.700**	**62,5**	**12,63**		**612.658.700**	**62,5**	**2,65**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan (%)	94,1		94,9		93,22		95		95						95		101,91		95		100,96			
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			23.145.379.011		4.287.891.978		4.850.868.290		39.452.000		573.206.700						612.658.700	62,5	12,63		612.658.700	62,5	2,65		
			meningkatnya jumlah lembaga yang difasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	320		294		320		40		160						200		62,5		200		62,5			
		8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran			23.145.379.011		4.287.891.978		4.850.868.290		39.452.000		573.206.700						612.658.700	62,5	12,63		612.658.700	62,5	2,65		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	320		294		320		40		160						200		62,5		200		62,5			
	Meningkatnya Keharmonisan dan Kerukunan Umat Beragama	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**312.916.042.759**		**-**		**28.979.238.900**		**-**		**13.932.000**						**13.932.000**	**40,68**	**0,05**		**13.932.000**	**40**	**0**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya peran serta lembaga pendidikan dan lembaga politik dalam peningkatan etika dan budaya politik	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (%)	100		77,31		23		0		9,38						9,38		40,78		9,38		9,38			
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan			312.916.042.759		-		28.979.238.900		-		13.932.000						13.932.000	40,68	0,05		13.932.000	40	0		
			Meningkatnya lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	120		60		118		0		48						48		40,68		48		40			
		8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi			312.916.042.759		-		28.979.238.900		-		13.932.000						13.932.000	40,68	0,05		13.932.000	40	0		
			Terlaksanaya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	120		60		118		0		48						48		40,68		48		40			
	Meningkatnya Keharmonisan dan Kerukunan Umat Beragama	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**426.045.902**		**-**		**387.373.500**		**7.804.000**		**22.542.000**						**30.346.000**	**100**	**7,83**		**30.346.000**	**100**	**7,12**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas (Nilai)	69		68		68,2		0		80						80		117,3		80		115,94			
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi			426.045.902		-		387.373.500		7.804.000		22.542.000						30.346.000	100	7,83		30.346.000	100	7,12		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	30		30		30		0		30						30		100		30		100			
		8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa			426.045.902		-		387.373.500		7.804.000		22.542.000						30.346.000	100	7,83		30.346.000	100	7,12		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	30		30		30		0		30						30		100		30		100			
	Meningkatnya Keharmonisan dan Kerukunan Umat Beragama	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**3.751.294.606**		**693.121.840**		**1.218.155.854**		**220.000.000**		**241.816.000**						**461.816.000**	**53,62**	**37,91**		**461.816.000**	**53,62**	**12,31**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Persentase pencegahan P4GN di kawasan rawan narkoba (%)	92,5		90		90,50		25		50						75		82,87		75		81,08			
				Persentase potensi konflik umat beragama yang terfasilitasi (%)	92,5		90		90,50		100		100						100		110,5		100		108,11			
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			3.751.294.606		693.121.840		1.218.155.854		220.000.000		241.816.000						461.816.000	53,62	37,91		461.816.000	53,62	12,31		
			Meningkatnya lembaga yang berkontribusi dalam mendukung Kerukunan Beragama dan P4GN	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	690		691		690		60		310						370		53,62		370		53,62			
		8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan			3.751.294.606		693.121.840		1.218.155.854		220.000.000		241.816.000						461.816.000	53,62	37,91		461.816.000	53,62	12,31		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	690		691		690		60		310						370		53,62		370		53,62			
	Meningkatnya Keharmonisan dan Kerukunan Umat Beragama	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**64.033.462.858**		**11.864.745.075**		**38.793.905.420**		**2.860.729.700**		**26.783.000.090**						**29.643.729.790**	**71,59**	**76,41**		**29.643.729.790**	**71,59**	**46,29**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya penanganan konflik Ipoleksosbud	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti (%)	98,4		97,9		98,00		83,33		100						100		102,04		100		101,63			
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			64.033.462.858		11.864.745.075		38.793.905.420		2.860.729.700		26.783.000.090						29.643.729.790	71,59	76,41		29.643.729.790	71,59	46,29		
			Meningkatnya pelaksanaan pemantauan orang asing dan potensi konflik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	15		17		15		15		15						15		100		15		100			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	44		44		44		6		13						19		43,18		19		43,18			

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/8 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja			60.449.236.311		11.269.555.700		36.093.057.200		2.688.041.200		26.545.080.050						29.233.121.250	100	80,99		29.233.121.250	100	48,36		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	15		17		15		15		15						15		100		15		100			
		8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang			3.584.226.547		595.189.375		2.700.848.220		172.688.500		237.920.040						410.608.540	43,18	15,2		410.608.540	43,18	11,46		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	44		44		44		6		13						19		43,18		19		43,18			
				JUMLAH		62.906.145.609.715		9.368.029.699.124		12.839.824.904.968		1.432.248.606.513		2.634.421.844.422						4.066.670.450.935				4.066.670.450.935				
				Rata-rata capaian kinerja (%)																	115,98	31,67			59,56	6,46		SUB KEGIATAN
				Predikat kinerja																	Sangat tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
				Rata-rata capaian kinerja (%)																	74,98				72,18			PROGRAM
				Predikat kinerja																	Sedang				Sedang			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	1. Ketersediaan sumber daya yang memadai. 2. Pelaksanaan tata kelola dan sistem kerja yang efektif. 3. Komitmen terhadap monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 4. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan. 5. Komunikasi dan koordinasi yang efektif.
Faktor penghambat pencapaian kinerja	1. Pelaksanaan program masih berada pada tahapan awal. 2. Adanya penyesuaian mekanisme pelaksanaan pembangunan fisik Dana Kelurahan. 3. Pelaksanaan kegiatan masih dalam proses pengadaan dan penyelesaian administrasi 4. Karakteristik indikator yang memerlukan koordinasi lintas pihak dan partisipasi masyarakat.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	1. Melakukan pemantauan atas perkembangan tahap persiapan, memastikan seluruh persyaratan pelaksanaan di TW III dan IV telah dipenuhi serta melakukan monitoring secara rutin untuk memastikan target dapat tercapai tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan. 2. Intensif melakukan koordinasi dengan pemangku kegiatan/sub kegiatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penyerapan anggaran, seperti Pemerintah Pusat / Kementerian terkait dan Badan Pendapatan Daerah untuk memastikan rencana penyerapan anggaran tidak terkendala dan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan. 3. Terkait pelaksanaan pembangunan fisik Dana Kelurahan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas), Perangkat Daerah bersama kecamatan dan kelurahan agar: mempercepat pembentukan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas Pokmas sehingga pelaksanaan pembangunan fisik tidak mengalami keterlambatan, dan memastikan seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi sebelum pelaksanaan kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	1. Secara aktif melakukan evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan untuk memastikan laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun di Triwulan IV dapat memberikan informasi dan rekomendasi yang berkualitas untuk pelaksanaan di tahun berikutnya. 2. Perangkat Daerah agar memastikan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, serta proyeksi target kinerja merupakan data yang mutakhir, akurat, dan sesuai dengan kondisi eksisting sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran.

WALI KOTA SURABAYA

ERI CAHYADI

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR : 34 TAHUN 2026
TANGGAL : 22 JULI 2026

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Dinas Pendidikan					2.245.925.651.556	2.193.939.380.187	2.190.203.123.353	55.722.528.203		2.317.188.336.352	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.245.925.651.556	2.245.925.651.556	2.190.203.123.353	55.722.528.203		2.317.188.336.352	
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					2.245.925.651.556	2.193.939.380.187	2.190.203.123.353	55.722.528.203		2.317.188.336.352	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.063.368.345.821	1.064.234.591.568	1.066.799.204.923	-3.430.859.102		1.087.293.391.303	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,22 %	95,11%	95,11%	1.063.368.345.821	1.064.234.591.568	1.066.799.204.923	-3.430.859.102	95,14 %	1.087.293.391.303	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					999.379.940	1.340.876.614	1.752.388.614	-753.008.674		1.002.106.136	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					999.379.940	1.340.876.614	1.752.388.614	-753.008.674		1.002.106.136	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	999.379.940	1.340.876.614	1.752.388.614	-753.008.674	8 Dokumen	1.002.106.136	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					999.379.940	1.340.876.614	1.752.388.614	-753.008.674		1.002.106.136	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	999.379.940	1.340.876.614	1.752.388.614	-753.008.674	8 Dokumen	1.002.106.136	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.050.446.784.381	1.053.451.176.640	1.055.404.263.541	-4.957.479.160		1.074.923.075.432	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					1.050.446.784.381	1.053.451.176.640	1.055.404.263.541	-4.957.479.160		1.074.923.075.432	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8172 Orang/bulan	8172 Orang/bulan	8168 Orang/bulan	1.050.446.784.381	1.053.451.176.640	1.055.404.263.541	-4.957.479.160	8172 Orang/bulan	1.074.923.075.432	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.050.446.784.381	1.053.451.176.640	1.055.404.263.541	-4.957.479.160		1.074.923.075.432	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8172 Orang/bulan	8172 Orang/bulan	8168 Orang/bulan	1.050.446.784.381	1.053.451.176.640	1.055.404.263.541	-4.957.479.160	8172 Orang/bulan	1.074.923.075.432	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.193.566.640	522.919.536	560.552.071	633.014.569		951.972.341	
	Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.193.566.640	522.919.536	560.552.071	633.014.569		951.972.341	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	1.193.566.640	522.919.536	560.552.071	633.014.569	12 Paket	951.972.341	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.193.566.640	522.919.536	560.552.071	633.014.569		951.972.341	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	1.193.566.640	522.919.536	560.552.071	633.014.569	12 Paket	951.972.341	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.183.457.941	1.739.850.458	1.920.177.083	1.263.280.858		2.738.248.083	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					3.183.457.941	1.739.850.458	1.920.177.083	1.263.280.858		2.738.248.083	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	705 Unit	504 Unit	504 Unit	3.183.457.941	1.739.850.458	1.920.177.083	1.263.280.858	537 Unit	2.738.248.083	
1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3.183.457.941	1.739.850.458	1.920.177.083	1.263.280.858		2.738.248.083	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	705 Unit	504 Unit	504 Unit	3.183.457.941	1.739.850.458	1.920.177.083	1.263.280.858	537 Unit	2.738.248.083	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.545.156.919	7.179.768.320	7.161.823.614	383.333.305		7.677.989.311	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					7.545.156.919	7.179.768.320	7.161.823.614	383.333.305		7.677.989.311	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	7.545.156.919	7.179.768.320	7.161.823.614	383.333.305	4 Laporan	7.677.989.311	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.545.156.919	7.179.768.320	7.161.823.614	383.333.305	1 Laporan	7.677.989.311	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2.154.875.881	1.959.995.234	2.054.921.468	99.954.413		2.222.231.510	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.154.875.881	1.959.995.234	2.054.921.468	99.954.413	4 Laporan	2.222.231.510	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					5.390.281.038	5.219.773.086	5.106.902.146	283.378.892		5.455.757.801	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.390.281.038	5.219.773.086	5.106.902.146	283.378.892	1 Laporan	5.455.757.801	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644		1.189.972.036.969	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00%	100,00%	100,00%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	100,00%	1.189.972.036.969	
		Angka Kelulusan SMP/MTS	100%	100%	100%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	100%	1.189.972.036.969	
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	100%	100%	100%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	100%	1.189.972.036.969	
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun	100%	91,88%	91,88%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	94,43%	1.189.972.036.969	
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	100%	99,93%	99,93%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	100%	1.189.972.036.969	
		Iklim Inklusivitas SD	76,07 Nilai	66,07 Nilai	66,07 Nilai	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	68,57 Nilai	1.189.972.036.969	
		Iklim Inklusivitas SMP	77,81 Nilai	68,21 Nilai	68,21 Nilai	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	70,61 Nilai	1.189.972.036.969	
		Iklim Keamanan SD	82,4 Nilai	78,8 Nilai	78,8 Nilai	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	79,7 Nilai	1.189.972.036.969	
		Iklim Keamanan SMP	83,58 Nilai	77,58 Nilai	77,58 Nilai	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	79,08 Nilai	1.189.972.036.969	
		Persentase anak usia 4-6 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	15,45 %	14,87%	14,87%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	15,02 %	1.189.972.036.969	
		Persentase anak usia 7-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	63,27 %	63,27%	63,27%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	63,27 %	1.189.972.036.969	
		Persentase daya tampung satuan pendidikan SD/MI terhadap jumlah penduduk usia sekolah (7-12)	84,63 %	84,55%	84,55%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	84,57 %	1.189.972.036.969	
		Persentase daya tampung satuan pendidikan SMP/MTs terhadap jumlah penduduk usia sekolah (13-15)	80,38 %	80,21%	80,21%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	80,25 %	1.189.972.036.969	
		Persentase lembaga PAUD berkualitas	90,01%	89,93%	89,93%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	89,95%	1.189.972.036.969	
		Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang sesuai standar nasional pendidikan	100%	100%	100%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	100%	1.189.972.036.969	
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan peningkatan karir, kompetensi dan kualifikasi	90%	83,50%	83,50%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	84,5 %	1.189.972.036.969	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standart nasional sarana dan prasarana pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	100%	1.189.972.036.969	
		Persentase SD terakreditasi minimal B	93%	92,37%	92,37%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	92,53%	1.189.972.036.969	
		Persentase siswa SD SMP yang berprestasi TK provinsi	0,69%	0,60%	0,60%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	0,62%	1.189.972.036.969	
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	96,52%	96,22%	96,22%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	96,32%	1.189.972.036.969	
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	80,69%	79,04%	79,04%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	79,46%	1.189.972.036.969	
		Skor Kemampuan Literasi SD	84.37 Nilai	74.37 Nilai	82.03 Nilai	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	76.87 Nilai	1.189.972.036.969	
		Skor Kemampuan Literasi SMP	90.61 Nilai	86.21 Nilai	94.61 Nilai	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	87.31 Nilai	1.189.972.036.969	
		Skor Kemampuan Numerasi SD	75.39 Nilai	63.79 Nilai	72.69 Nilai	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	66.69 Nilai	1.189.972.036.969	
		Skor Kemampuan Numerasi SMP	80.68 Nilai	74.68 Nilai	90.13 Nilai	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	76.18 Nilai	1.189.972.036.969	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	1.142.640.207.151	1.089.791.928.776	1.075.551.620.507	67.088.586.644	100%	1.189.972.036.969	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392		1.854.659.563.288	
	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan gratis bagi anak usia sekolah jenjang SD					1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392		1.854.659.563.288	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	1 Dokumen	1.854.659.563.288	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang	3135 Orang	3135 Orang	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	3135 Orang	1.854.659.563.288	
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	3 Paket	1.854.659.563.288	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	32513 Peserta Didik	32513 Peserta Didik	30034 Peserta Didik	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	32513 Peserta Didik	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	17 Unit	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	163 Unit	155 Unit	155 Unit	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	157 Unit	1.854.659.563.288	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	652 Satuan Pendidikan	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	652 Satuan Pendidikan	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	592 Satuan Pendidikan	592 Satuan Pendidikan	691 Satuan Pendidikan	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	592 Satuan Pendidikan	1.854.659.563.288	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	51050 Peserta Didik	51050 Peserta Didik	51050 Peserta Didik	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	51050 Peserta Didik	1.854.659.563.288	
	Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah Dasar					1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392		1.854.659.563.288	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	1 Dokumen	1.854.659.563.288	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang	3135 Orang	3135 Orang	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	3135 Orang	1.854.659.563.288	
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	3 Paket	1.854.659.563.288	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	32513 Peserta Didik	32513 Peserta Didik	30034 Peserta Didik	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	32513 Peserta Didik	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	17 Unit	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	163 Unit	155 Unit	155 Unit	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	157 Unit	1.854.659.563.288	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	652 Satuan Pendidikan	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	652 Satuan Pendidikan	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	592 Satuan Pendidikan	592 Satuan Pendidikan	691 Satuan Pendidikan	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	592 Satuan Pendidikan	1.854.659.563.288	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	51050 Peserta Didik	51050 Peserta Didik	51050 Peserta Didik	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	51050 Peserta Didik	1.854.659.563.288	
	Meningkatnya prestasi siswa jenjang SD di tingkat Kota					1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392		1.854.659.563.288	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	1 Dokumen	1.854.659.563.288	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang	3135 Orang	3135 Orang	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	3135 Orang	1.854.659.563.288	
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	3 Paket	1.854.659.563.288	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	32513 Peserta Didik	32513 Peserta Didik	30034 Peserta Didik	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	32513 Peserta Didik	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	17 Unit	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	163 Unit	155 Unit	155 Unit	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	157 Unit	1.854.659.563.288	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	652 Satuan Pendidikan	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	652 Satuan Pendidikan	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	592 Satuan Pendidikan	592 Satuan Pendidikan	691 Satuan Pendidikan	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	592 Satuan Pendidikan	1.854.659.563.288	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	51050 Peserta Didik	51050 Peserta Didik	51050 Peserta Didik	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	51050 Peserta Didik	1.854.659.563.288	
	Meningkatnya penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik jenjang SD					1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392		1.854.659.563.288	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	1 Dokumen	1.854.659.563.288	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang	3135 Orang	3135 Orang	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	3135 Orang	1.854.659.563.288	
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	3 Paket	1.854.659.563.288	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	32513 Peserta Didik	32513 Peserta Didik	30034 Peserta Didik	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	32513 Peserta Didik	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	17 Unit	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	163 Unit	155 Unit	155 Unit	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	157 Unit	1.854.659.563.288	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	652 Satuan Pendidikan	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	652 Satuan Pendidikan	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	592 Satuan Pendidikan	592 Satuan Pendidikan	691 Satuan Pendidikan	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	592 Satuan Pendidikan	1.854.659.563.288	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	51050 Peserta Didik	51050 Peserta Didik	51050 Peserta Didik	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	51050 Peserta Didik	1.854.659.563.288	
	Terlaksananya Peningkatan Karir, Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD					1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392		1.854.659.563.288	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	1 Dokumen	1.854.659.563.288	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang	3135 Orang	3135 Orang	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	3135 Orang	1.854.659.563.288	
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	3 Paket	1.854.659.563.288	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	32513 Peserta Didik	32513 Peserta Didik	30034 Peserta Didik	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	32513 Peserta Didik	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	17 Unit	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	163 Unit	155 Unit	155 Unit	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	157 Unit	1.854.659.563.288	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	652 Satuan Pendidikan	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	652 Satuan Pendidikan	1.854.659.563.288	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	592 Satuan Pendidikan	592 Satuan Pendidikan	691 Satuan Pendidikan	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	592 Satuan Pendidikan	1.854.659.563.288	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	51050 Peserta Didik	51050 Peserta Didik	51050 Peserta Didik	1.821.906.454.708	1.812.919.741.976	1.776.160.622.316	45.745.832.392	51050 Peserta Didik	1.854.659.563.288	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					24.984.911.889	37.568.548.244	27.910.948.997	-2.926.037.108		28.936.842.987	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit	24.984.911.889	37.568.548.244	27.910.948.997	-2.926.037.108	17 Unit	28.936.842.987	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					5.036.432.000	6.617.719.194	6.617.719.194	-1.581.287.194		5.563.095.704	
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	3 Paket	5.036.432.000	6.617.719.194	6.617.719.194	-1.581.287.194	3 Paket	5.563.095.704	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					2.059.717.701	1.105.309.800	1.105.309.800	954.407.901		2.072.270.145	
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	51050 Peserta Didik	51050 Peserta Didik	51050 Peserta Didik	2.059.717.701	1.105.309.800	1.105.309.800	954.407.901	51050 Peserta Didik	2.072.270.145	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					951.463.760	446.565.662	446.565.662	504.898.098		954.985.097	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3135 Orang	3135 Orang	3135 Orang	951.463.760	446.565.662	446.565.662	504.898.098	3135 Orang	954.985.097	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					214.665.808	158.840.000	158.840.000	55.825.808		215.179.216	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	214.665.808	158.840.000	158.840.000	55.825.808	652 Satuan Pendidikan	215.179.216	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					205.606.560.000	199.947.300.000	200.150.693.217	5.455.866.783		211.217.068.200	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	592 Satuan Pendidikan	592 Satuan Pendidikan	691 Satuan Pendidikan	205.606.560.000	199.947.300.000	200.150.693.217	5.455.866.783	592 Satuan Pendidikan	211.217.068.200	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					1.632.369.760	63.254.216	63.254.216	1.569.115.544		1.633.011.520	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.632.369.760	63.254.216	63.254.216	1.569.115.544	1 Dokumen	1.633.011.520	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					14.518.401.253	13.931.240.896	16.921.098.811	-2.402.697.558		14.979.468.788	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	163 Unit	155 Unit	155 Unit	14.518.401.253	13.931.240.896	16.921.098.811	-2.402.697.558	157 Unit	14.979.468.788	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik					415.218.560	300.080.000	342.909.000	72.309.560		419.069.120	
	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	415.218.560	300.080.000	342.909.000	72.309.560	652 Satuan Pendidikan	419.069.120	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					200.056.872.946	193.091.077.482	190.322.816.682	9.734.056.264		197.673.900.045	
	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	32513 Peserta Didik	32513 Peserta Didik	30034 Peserta Didik	200.056.872.946	193.091.077.482	190.322.816.682	9.734.056.264	32513 Peserta Didik	197.673.900.045	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668		2.023.248.352.748	
	Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama					1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668		2.023.248.352.748	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang	1013 Orang	1013 Orang	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	1013 Orang	2.023.248.352.748	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	2 Paket	2 Paket	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	3 Paket	2.023.248.352.748	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	450 Orang	450 Orang	450 Orang	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	450 Orang	2.023.248.352.748	
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16362 Peserta Didik	16362 Peserta Didik	16362 Peserta Didik	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	16362 Peserta Didik	2.023.248.352.748	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	34.707 Satuan Pendidikan	34579 Satuan Pendidikan	34579 Satuan Pendidikan	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	34.611 Satuan Pendidikan	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	4 Unit	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit	18 Unit	18 Unit	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	18 Unit	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	330 Satuan Pendidikan	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan	272 Satuan Pendidikan	271 Satuan Pendidikan	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	272 Satuan Pendidikan	2.023.248.352.748	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2220 Peserta Didik	2220 Peserta Didik	3250 Peserta Didik	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	2220 Peserta Didik	2.023.248.352.748	
	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan gratis bagi anak usia jenjang SMP					1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668		2.023.248.352.748	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang	1013 Orang	1013 Orang	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	1013 Orang	2.023.248.352.748	
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	2 Paket	2 Paket	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	3 Paket	2.023.248.352.748	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	450 Orang	450 Orang	450 Orang	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	450 Orang	2.023.248.352.748	
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16362 Peserta Didik	16362 Peserta Didik	16362 Peserta Didik	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	16362 Peserta Didik	2.023.248.352.748	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	34.707 Satuan Pendidikan	34579 Satuan Pendidikan	34579 Satuan Pendidikan	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	34.611 Satuan Pendidikan	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	4 Unit	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit	18 Unit	18 Unit	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	18 Unit	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	330 Satuan Pendidikan	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan	272 Satuan Pendidikan	271 Satuan Pendidikan	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	272 Satuan Pendidikan	2.023.248.352.748	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2220 Peserta Didik	2220 Peserta Didik	3250 Peserta Didik	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	2220 Peserta Didik	2.023.248.352.748	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik jenjang SMP					1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668		2.023.248.352.748	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang	1013 Orang	1013 Orang	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	1013 Orang	2.023.248.352.748	
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	2 Paket	2 Paket	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	3 Paket	2.023.248.352.748	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	450 Orang	450 Orang	450 Orang	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	450 Orang	2.023.248.352.748	
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16362 Peserta Didik	16362 Peserta Didik	16362 Peserta Didik	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	16362 Peserta Didik	2.023.248.352.748	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	34.707 Satuan Pendidikan	34579 Satuan Pendidikan	34579 Satuan Pendidikan	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	34.611 Satuan Pendidikan	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	4 Unit	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit	18 Unit	18 Unit	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	18 Unit	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	330 Satuan Pendidikan	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan	272 Satuan Pendidikan	271 Satuan Pendidikan	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	272 Satuan Pendidikan	2.023.248.352.748	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2220 Peserta Didik	2220 Peserta Didik	3250 Peserta Didik	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	2220 Peserta Didik	2.023.248.352.748	
	Meningkatnya prestasi siswa jenjang SMP di tingkat Kota					1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668		2.023.248.352.748	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang	1013 Orang	1013 Orang	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	1013 Orang	2.023.248.352.748	
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	2 Paket	2 Paket	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	3 Paket	2.023.248.352.748	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	450 Orang	450 Orang	450 Orang	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	450 Orang	2.023.248.352.748	
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16362 Peserta Didik	16362 Peserta Didik	16362 Peserta Didik	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	16362 Peserta Didik	2.023.248.352.748	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	34.707 Satuan Pendidikan	34579 Satuan Pendidikan	34579 Satuan Pendidikan	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	34.611 Satuan Pendidikan	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	4 Unit	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit	18 Unit	18 Unit	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	18 Unit	2.023.248.352.748	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	330 Satuan Pendidikan	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan	272 Satuan Pendidikan	271 Satuan Pendidikan	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	272 Satuan Pendidikan	2.023.248.352.748	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2220 Peserta Didik	2220 Peserta Didik	3250 Peserta Didik	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	2220 Peserta Didik	2.023.248.352.748	
	Terlaksananya Peningkatan Karir, Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP					1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668		2.023.248.352.748	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang	1013 Orang	1013 Orang	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	1013 Orang	2.023.248.352.748	
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	2 Paket	2 Paket	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	3 Paket	2.023.248.352.748	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	450 Orang	450 Orang	450 Orang	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	450 Orang	2.023.248.352.748	
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16362 Peserta Didik	16362 Peserta Didik	16362 Peserta Didik	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	16362 Peserta Didik	2.023.248.352.748	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	34.707 Satuan Pendidikan	34579 Satuan Pendidikan	34579 Satuan Pendidikan	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	34.611 Satuan Pendidikan	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	4 Unit	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit	18 Unit	18 Unit	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	18 Unit	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	330 Satuan Pendidikan	2.023.248.352.748	
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan	272 Satuan Pendidikan	271 Satuan Pendidikan	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	272 Satuan Pendidikan	2.023.248.352.748	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2220 Peserta Didik	2220 Peserta Didik	3250 Peserta Didik	1.861.170.157.928	1.531.762.639.696	1.538.113.455.260	323.056.702.668	2220 Peserta Didik	2.023.248.352.748	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					195.279.597.624	71.693.979.346	72.161.979.346	123.117.618.278		223.463.591.319	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	195.279.597.624	71.693.979.346	72.161.979.346	123.117.618.278	4 Unit	223.463.591.319	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					10.282.595.374	10.182.318.574	12.921.010.374	-2.638.415.000		10.475.613.327	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit	18 Unit	18 Unit	10.282.595.374	10.182.318.574	12.921.010.374	-2.638.415.000	18 Unit	10.475.613.327	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					1.475.015.107	46.284.171.103	46.284.171.103	-44.809.155.996		10.639.022.757	
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	2 Paket	2 Paket	1.475.015.107	46.284.171.103	46.284.171.103	-44.809.155.996	3 Paket	10.639.022.757	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					129.104.909.553	129.183.654.553	127.551.509.353	1.553.400.200		131.380.126.554	
	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16362 Peserta Didik	16362 Peserta Didik	16362 Peserta Didik	129.104.909.553	129.183.654.553	127.551.509.353	1.553.400.200	16362 Peserta Didik	131.380.126.554	Dinas Pendidikan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					1.779.572.660	1.544.195.468	1.544.195.468	235.377.192		1.782.139.700	
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2220 Peserta Didik	2220 Peserta Didik	3250 Peserta Didik	1.779.572.660	1.544.195.468	1.544.195.468	235.377.192	2220 Peserta Didik	1.782.139.700	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					691.772.772	404.711.000	404.711.000	287.061.772		694.767.744	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1013 Orang	1013 Orang	1013 Orang	691.772.772	404.711.000	404.711.000	287.061.772	1013 Orang	694.767.744	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					151.400.000	191.400.000	191.400.000	-40.000.000		222.151.603	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	151.400.000	191.400.000	191.400.000	-40.000.000	330 Satuan Pendidikan	222.151.603	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					126.132.830.000	123.118.850.000	123.132.007.291	3.000.822.709		126.612.829.999	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	272 Satuan Pendidikan	272 Satuan Pendidikan	271 Satuan Pendidikan	126.132.830.000	123.118.850.000	123.132.007.291	3.000.822.709	272 Satuan Pendidikan	126.612.829.999	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					357.050.000	310.287.000	310.287.000	46.763.000		503.760.000	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	34.707 Satuan Pendidikan	34579 Satuan Pendidikan	34579 Satuan Pendidikan	357.050.000	310.287.000	310.287.000	46.763.000	34.611 Satuan Pendidikan	503.760.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					37.796.392	27.092.880	27.092.880	10.703.512		38.085.184	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	450 Orang	450 Orang	450 Orang	37.796.392	27.092.880	27.092.880	10.703.512	450 Orang	38.085.184	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661		369.007.899.231	
	Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah PAUD					380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661		369.007.899.231	
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan	2355 Satuan Pendidikan	2355 Satuan Pendidikan	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	2355 Satuan Pendidikan	369.007.899.231	
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2479 Satuan Pendidikan	2479 Satuan Pendidikan	2479 Satuan Pendidikan	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	2479 Satuan Pendidikan	369.007.899.231	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2600 Orang	2600 Orang	2600 Orang	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	2600 Orang	369.007.899.231	
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	3 Paket	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	3 Paket	369.007.899.231	
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	229 Peserta Didik	219 Peserta Didik	219 Peserta Didik	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	219 Peserta Didik	369.007.899.231	
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	84669 Satuan Pendidikan	84669 Satuan Pendidikan	84669 Satuan Pendidikan	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	84669 Satuan Pendidikan	369.007.899.231	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	3 Unit	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	3 Unit	369.007.899.231	
	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia jenjang PAUD					380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661		369.007.899.231	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan	2355 Satuan Pendidikan	2355 Satuan Pendidikan	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	2355 Satuan Pendidikan	369.007.899.231	
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2479 Satuan Pendidikan	2479 Satuan Pendidikan	2479 Satuan Pendidikan	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	2479 Satuan Pendidikan	369.007.899.231	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2600 Orang	2600 Orang	2600 Orang	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	2600 Orang	369.007.899.231	
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	3 Paket	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	3 Paket	369.007.899.231	
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	229 Peserta Didik	219 Peserta Didik	219 Peserta Didik	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	219 Peserta Didik	369.007.899.231	
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	84669 Satuan Pendidikan	84669 Satuan Pendidikan	84669 Satuan Pendidikan	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	84669 Satuan Pendidikan	369.007.899.231	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	3 Unit	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	3 Unit	369.007.899.231	
	Terlaksananya Peningkatan Karir, Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD					380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661		369.007.899.231	
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan	2355 Satuan Pendidikan	2355 Satuan Pendidikan	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	2355 Satuan Pendidikan	369.007.899.231	
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2479 Satuan Pendidikan	2479 Satuan Pendidikan	2479 Satuan Pendidikan	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	2479 Satuan Pendidikan	369.007.899.231	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2600 Orang	2600 Orang	2600 Orang	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	2600 Orang	369.007.899.231	
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	3 Paket	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	3 Paket	369.007.899.231	
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	229 Peserta Didik	219 Peserta Didik	219 Peserta Didik	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	219 Peserta Didik	369.007.899.231	
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	84669 Satuan Pendidikan	84669 Satuan Pendidikan	84669 Satuan Pendidikan	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	84669 Satuan Pendidikan	369.007.899.231	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	3 Unit	380.149.368.300	420.842.932.647	412.512.935.961	-32.363.567.661	3 Unit	369.007.899.231	
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD					83.366.173	131.544.517	498.982.429	-415.616.256		83.604.050	
	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	3 Paket	83.366.173	131.544.517	498.982.429	-415.616.256	3 Paket	83.604.050	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD					4.648.989.152	8.505.901.536	7.872.652.136	-3.223.662.984		4.563.139.727	
	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	229 Peserta Didik	219 Peserta Didik	219 Peserta Didik	4.648.989.152	8.505.901.536	7.872.652.136	-3.223.662.984	219 Peserta Didik	4.563.139.727	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					2.908.475.874	4.991.750.000	3.771.750.000	-863.274.126		2.910.615.842	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2600 Orang	2600 Orang	2600 Orang	2.908.475.874	4.991.750.000	3.771.750.000	-863.274.126	2600 Orang	2.910.615.842	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					449.794.230	989.086.560	1.622.586.560	-1.172.792.330		450.969.198	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2355 Satuan Pendidikan	2355 Satuan Pendidikan	2355 Satuan Pendidikan	449.794.230	989.086.560	1.622.586.560	-1.172.792.330	2355 Satuan Pendidikan	450.969.198	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD					58.642.480.000	55.186.980.000	55.188.625.926	3.453.854.074		58.642.480.000	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2479 Satuan Pendidikan	2479 Satuan Pendidikan	2479 Satuan Pendidikan	58.642.480.000	55.186.980.000	55.188.625.926	3.453.854.074	2479 Satuan Pendidikan	58.642.480.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					739.990.986	2.482.124.131	2.482.124.131	-1.742.133.145		748.245.036	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	3 Unit	739.990.986	2.482.124.131	2.482.124.131	-1.742.133.145	3 Unit	748.245.036	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD					59.243.359.685	67.993.590.805	66.067.590.805	-6.824.231.120		55.513.879.224	
	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	84669 Satuan Pendidikan	84669 Satuan Pendidikan	84669 Satuan Pendidikan	59.243.359.685	67.993.590.805	66.067.590.805	-6.824.231.120	84669 Satuan Pendidikan	55.513.879.224	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702		292.477.274.649	
	Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah Nonformal					285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702		292.477.274.649	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	150 Orang	150 Orang	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	150 Orang	292.477.274.649	
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	2 Paket	292.477.274.649	
		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	90 Peserta Didik	90 Peserta Didik	90 Peserta Didik	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	90 Peserta Didik	292.477.274.649	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	40 Peserta Didik	292.477.274.649	
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	40 Satuan Pendidikan	292.477.274.649	
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	32 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	30 Satuan Pendidikan	292.477.274.649	
	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan bagi anak rentan putus sekolah dan putus sekolah					285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702		292.477.274.649	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	150 Orang	150 Orang	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	150 Orang	292.477.274.649	
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	2 Paket	292.477.274.649	
		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	90 Peserta Didik	90 Peserta Didik	90 Peserta Didik	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	90 Peserta Didik	292.477.274.649	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	40 Peserta Didik	292.477.274.649	
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	40 Satuan Pendidikan	292.477.274.649	
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	32 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	30 Satuan Pendidikan	292.477.274.649	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Peningkatan Karir, Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Nonformal/Kesetaraan					285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702		292.477.274.649	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	150 Orang	150 Orang	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	150 Orang	292.477.274.649	
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	2 Paket	292.477.274.649	
		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	90 Peserta Didik	90 Peserta Didik	90 Peserta Didik	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	90 Peserta Didik	292.477.274.649	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	40 Peserta Didik	292.477.274.649	
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	40 Satuan Pendidikan	292.477.274.649	
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	32 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	285.463.793.676	340.021.067.427	328.436.367.378	-42.972.573.702	30 Satuan Pendidikan	292.477.274.649	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan					7.686.120.327	6.823.033.081	5.452.938.953	2.233.181.374		7.693.773.080	
	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	90 Peserta Didik	90 Peserta Didik	90 Peserta Didik	7.686.120.327	6.823.033.081	5.452.938.953	2.233.181.374	90 Peserta Didik	7.693.773.080	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					64.475.000	90.293.500	90.293.500	-25.818.500		64.620.273	
	Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	150 Orang	150 Orang	64.475.000	90.293.500	90.293.500	-25.818.500	150 Orang	64.620.273	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan					72.702.440	671.048.800	641.948.400	-569.245.960		72.862.880	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	72.702.440	671.048.800	641.948.400	-569.245.960	40 Satuan Pendidikan	72.862.880	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					5.272.910.000	5.024.890.000	5.024.890.000	248.020.000		5.272.910.000	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	32 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	5.272.910.000	5.024.890.000	5.024.890.000	248.020.000	30 Satuan Pendidikan	5.272.910.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					752.478.025	770.478.025	282.388.033	470.089.992		761.105.502	
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	752.478.025	770.478.025	282.388.033	470.089.992	2 Paket	761.105.502	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					81.305.912.100	99.960.612.403	97.986.330.240	-16.680.418.140		83.627.153.148	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	40 Peserta Didik	81.305.912.100	99.960.612.403	97.986.330.240	-16.680.418.140	40 Peserta Didik	83.627.153.148	Dinas Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					39.917.098.584	39.912.859.843	47.852.297.923	-7.935.199.339		39.922.908.080	
		Iklim Kebhinekaan SD	81.77 Nilai	77.77 Nilai	77.77 Nilai	39.917.098.584	39.912.859.843	47.852.297.923	-7.935.199.339	78.77 Nilai	39.922.908.080	
		Iklim Kebinekaan SMP	79.71 Nilai	75.71 Nilai	75.71 Nilai	39.917.098.584	39.912.859.843	47.852.297.923	-7.935.199.339	76.71 Nilai	39.922.908.080	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	60%	35%	35%	39.917.098.584	39.912.859.843	47.852.297.923	-7.935.199.339	40%	39.922.908.080	
		Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	100%	100%	100%	39.917.098.584	39.912.859.843	47.852.297.923	-7.935.199.339	100%	39.922.908.080	
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	89,82%	87,82%	87,82%	39.917.098.584	39.912.859.843	47.852.297.923	-7.935.199.339	88,32%	39.922.908.080	
		Prosentase jumlah guru yang mendapat jumlah jam mengajar di sekolah	100%	100%	100%	39.917.098.584	39.912.859.843	47.852.297.923	-7.935.199.339	100%	39.922.908.080	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					39.917.098.584	39.912.859.843	47.852.297.923	-7.935.199.339		39.922.908.080	
	Tersedianya minimal Pendidik SD dan SMP					39.917.098.584	39.912.859.843	47.852.297.923	-7.935.199.339		39.922.908.080	
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	39.917.098.584	39.912.859.843	47.852.297.923	-7.935.199.339	2 Dokumen	39.922.908.080	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	39.917.098.584	39.912.859.843	47.852.297.923	-7.935.199.339	1 Laporan	39.922.908.080	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					563.098.584	540.979.843	6.284.417.923	-5.721.319.339		568.908.080	
	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	563.098.584	540.979.843	6.284.417.923	-5.721.319.339	2 Dokumen	568.908.080	Dinas Pendidikan
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					39.354.000.000	39.371.880.000	41.567.880.000	-2.213.880.000		39.354.000.000	
	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	39.354.000.000	39.371.880.000	41.567.880.000	-2.213.880.000	1 Laporan	39.354.000.000	Dinas Pendidikan
	Dinas Kesehatan					1.761.024.179.998	1.163.136.807.193	1.036.890.675.652	724.133.504.346		1.379.562.333.311	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.761.024.179.998	1.761.024.179.998	1.036.890.675.652	724.133.504.346		1.379.562.333.311	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.761.024.179.998	1.163.136.807.193	1.036.890.675.652	724.133.504.346		1.379.562.333.311	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					563.256.836.888	568.116.307.529	488.706.899.099	74.549.937.789		700.667.348.238	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	563.256.836.888	568.116.307.529	488.706.899.099	74.549.937.789	89,97 %	700.667.348.238	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					47.651.520	81.767.520	81.767.520	-34.116.000		50.251.520	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah					47.651.520	81.767.520	81.767.520	-34.116.000		50.251.520	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	47.651.520	81.767.520	81.767.520	-34.116.000	8 Dokumen	50.251.520	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					47.651.520	81.767.520	81.767.520	-34.116.000		50.251.520	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	47.651.520	81.767.520	81.767.520	-34.116.000	8 Dokumen	50.251.520	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					542.011.331.076	443.017.017.596	384.757.688.176	157.253.642.900		546.351.538.905	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					542.011.331.076	443.017.017.596	384.757.688.176	157.253.642.900		546.351.538.905	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2191 Orang/bulan	2191 Orang/bulan	2451 Orang/bulan	542.011.331.076	443.017.017.596	384.757.688.176	157.253.642.900	2191 Orang/bulan	546.351.538.905	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					542.011.331.076	443.017.017.596	384.757.688.176	157.253.642.900		546.351.538.905	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2191 Orang/bulan	2191 Orang/bulan	2451 Orang/bulan	542.011.331.076	443.017.017.596	384.757.688.176	157.253.642.900	2191 Orang/bulan	546.351.538.905	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.899.152.532	702.862.612	702.862.612	10.196.289.920		1.478.619.280	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					10.899.152.532	702.862.612	702.862.612	10.196.289.920		1.478.619.280	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	77 Unit	77 Unit	10.899.152.532	702.862.612	702.862.612	10.196.289.920	9 Unit	1.478.619.280	
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.899.152.532	702.862.612	702.862.612	10.196.289.920		1.478.619.280	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	77 Unit	77 Unit	10.899.152.532	702.862.612	702.862.612	10.196.289.920	9 Unit	1.478.619.280	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.298.701.760	124.314.659.801	103.164.580.791	-92.865.879.031		152.786.938.533	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					10.298.701.760	124.314.659.801	103.164.580.791	-92.865.879.031		152.786.938.533	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.298.701.760	124.314.659.801	103.164.580.791	-92.865.879.031	12 Laporan	152.786.938.533	
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10.298.701.760	124.314.659.801	103.164.580.791	-92.865.879.031		152.786.938.533	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.298.701.760	124.314.659.801	103.164.580.791	-92.865.879.031	12 Laporan	152.786.938.533	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.049.374.332.323	591.750.335.661	544.971.347.550	504.402.984.773		675.247.665.207	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.049.374.332.323	591.750.335.661	544.971.347.550	504.402.984.773	91%	675.247.665.207	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.049.374.332.323	591.750.335.661	544.971.347.550	504.402.984.773	4 per 1.000 kelahiran hidup	675.247.665.207	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.049.374.332.323	591.750.335.661	544.971.347.550	504.402.984.773	80%	675.247.665.207	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.049.374.332.323	591.750.335.661	544.971.347.550	504.402.984.773	98,70 %	675.247.665.207	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.049.374.332.323	591.750.335.661	544.971.347.550	504.402.984.773	82%	675.247.665.207	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.049.374.332.323	591.750.335.661	544.971.347.550	504.402.984.773	40%	675.247.665.207	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.049.374.332.323	591.750.335.661	544.971.347.550	504.402.984.773	100%	675.247.665.207	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.049.374.332.323	591.750.335.661	544.971.347.550	504.402.984.773	95,45%	675.247.665.207	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.049.374.332.323	591.750.335.661	544.971.347.550	504.402.984.773	90,75 %	675.247.665.207	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.049.374.332.323	591.750.335.661	544.971.347.550	504.402.984.773	0,58 %	675.247.665.207	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.049.374.332.323	591.750.335.661	544.971.347.550	504.402.984.773	12%	675.247.665.207	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.049.374.332.323	591.750.335.661	544.971.347.550	504.402.984.773	21,6 %	675.247.665.207	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.049.374.332.323	591.750.335.661	544.971.347.550	504.402.984.773	1,92 %	675.247.665.207	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.049.374.332.323	591.750.335.661	544.971.347.550	504.402.984.773	80%	675.247.665.207	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.049.374.332.323	591.750.335.661	544.971.347.550	504.402.984.773	69%	675.247.665.207	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.049.374.332.323	591.750.335.661	544.971.347.550	504.402.984.773	100%	675.247.665.207	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					960.753.276.386	88.594.811.852	65.975.011.876	894.778.264.510		237.015.387.734	
	Meningkatnya kualitas obat dan perbekalan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan					960.753.276.386	88.594.811.852	65.975.011.876	894.778.264.510		237.015.387.734	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit	876 Unit	876 Unit	960.753.276.386	88.594.811.852	65.975.011.876	894.778.264.510	33 Unit	237.015.387.734	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	70 Unit	6 Unit	49 Unit	960.753.276.386	88.594.811.852	65.975.011.876	894.778.264.510	80 Unit	237.015.387.734	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	3 Unit	1 Unit	960.753.276.386	88.594.811.852	65.975.011.876	894.778.264.510	4 Unit	237.015.387.734	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	960.753.276.386	88.594.811.852	65.975.011.876	894.778.264.510	5 Paket	237.015.387.734	
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	1 Unit	1 Unit	960.753.276.386	88.594.811.852	65.975.011.876	894.778.264.510	0 Unit	237.015.387.734	
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	960.753.276.386	88.594.811.852	65.975.011.876	894.778.264.510	2 Unit	237.015.387.734	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	13 Unit	10 Unit	10 Unit	960.753.276.386	88.594.811.852	65.975.011.876	894.778.264.510	13 Unit	237.015.387.734	
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah					960.753.276.386	88.594.811.852	65.975.011.876	894.778.264.510		237.015.387.734	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit	876 Unit	876 Unit	960.753.276.386	88.594.811.852	65.975.011.876	894.778.264.510	33 Unit	237.015.387.734	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	70 Unit	6 Unit	49 Unit	960.753.276.386	88.594.811.852	65.975.011.876	894.778.264.510	80 Unit	237.015.387.734	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	3 Unit	1 Unit	960.753.276.386	88.594.811.852	65.975.011.876	894.778.264.510	4 Unit	237.015.387.734	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	960.753.276.386	88.594.811.852	65.975.011.876	894.778.264.510	5 Paket	237.015.387.734	
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	1 Unit	1 Unit	960.753.276.386	88.594.811.852	65.975.011.876	894.778.264.510	0 Unit	237.015.387.734	
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	960.753.276.386	88.594.811.852	65.975.011.876	894.778.264.510	2 Unit	237.015.387.734	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	13 Unit	10 Unit	10 Unit	960.753.276.386	88.594.811.852	65.975.011.876	894.778.264.510	13 Unit	237.015.387.734	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas					17.017.082.724	9.499.999.955	8.856.186.503	8.160.896.221		0	
	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	1 Unit	1 Unit	17.017.082.724	9.499.999.955	8.856.186.503	8.160.896.221	0 Unit	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya					43.870.000	69.870.000	69.870.000	-26.000.000		46.600.000	
	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	3 Unit	1 Unit	43.870.000	69.870.000	69.870.000	-26.000.000	4 Unit	46.600.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					5.864.215.425	5.864.215.425	6.398.535.350	-534.319.925		8.083.105.118	
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	13 Unit	10 Unit	10 Unit	5.864.215.425	5.864.215.425	6.398.535.350	-534.319.925	13 Unit	8.083.105.118	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					339.802.789	339.802.789	339.802.789	0		2.411.188.628	
	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	339.802.789	339.802.789	339.802.789	0	2 Unit	2.411.188.628	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					70.337.306.739	3.965.890.612	3.965.890.612	66.371.416.127		72.697.672.628	
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	70 Unit	6 Unit	49 Unit	70.337.306.739	3.965.890.612	3.965.890.612	66.371.416.127	80 Unit	72.697.672.628	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					4.486.517.381	1.639.959.864	1.639.959.864	2.846.557.517		4.491.227.381	
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	33 Unit	876 Unit	876 Unit	4.486.517.381	1.639.959.864	1.639.959.864	2.846.557.517	33 Unit	4.491.227.381	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					29.667.846.998	22.917.667.281	11.717.260.820	17.950.586.178		30.777.900.112	
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	29.667.846.998	22.917.667.281	11.717.260.820	17.950.586.178	5 Paket	30.777.900.112	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535		1.668.893.934.690	
	Meningkatnya penanganan KLB dan cakupan imunisasi					1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535		1.668.893.934.690	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	173022 Orang	181238 Orang	130418 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	179184 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33919 Orang	35139 Orang	33153 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	34819 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35248 Orang	36468 Orang	34049 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36148 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35434 Orang	36664 Orang	34239 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36334 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	320 Orang	320 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	205 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1013 Orang	1068 Orang	1068 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1411 Orang	1.668.893.934.690	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48792 Orang	49728 Orang	49728 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	49494 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	41047 Orang	66739 Orang	61624 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	57162 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang	10 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	10 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5974 Orang	5823 Orang	5552 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	5863 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	111.502 Orang	111482 Orang	113587 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	111.487 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246.204 Orang	246184 Orang	248261 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	246.189 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	779117 Orang	472640 Orang	413791 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	549281 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.926.466 Orang	1926446 Orang	1928295 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1.926.451 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	2 Paket	1.668.893.934.690	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia					1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535		1.668.893.934.690	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	173022 Orang	181238 Orang	130418 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	179184 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33919 Orang	35139 Orang	33153 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	34819 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35248 Orang	36468 Orang	34049 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36148 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35434 Orang	36664 Orang	34239 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36334 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	320 Orang	320 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	205 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1013 Orang	1068 Orang	1068 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1411 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48792 Orang	49728 Orang	49728 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	49494 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	41047 Orang	66739 Orang	61624 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	57162 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang	10 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	10 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5974 Orang	5823 Orang	5552 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	5863 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	111.502 Orang	111482 Orang	113587 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	111.487 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246.204 Orang	246184 Orang	248261 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	246.189 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	779117 Orang	472640 Orang	413791 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	549281 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.926.466 Orang	1926446 Orang	1928295 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1.926.451 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	2 Paket	1.668.893.934.690	
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan					1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535		1.668.893.934.690	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	173022 Orang	181238 Orang	130418 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	179184 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33919 Orang	35139 Orang	33153 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	34819 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35248 Orang	36468 Orang	34049 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36148 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35434 Orang	36664 Orang	34239 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36334 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	320 Orang	320 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	205 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1013 Orang	1068 Orang	1068 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1411 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48792 Orang	49728 Orang	49728 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	49494 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	41047 Orang	66739 Orang	61624 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	57162 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang	10 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	10 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5974 Orang	5823 Orang	5552 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	5863 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	111.502 Orang	111482 Orang	113587 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	111.487 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246.204 Orang	246184 Orang	248261 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	246.189 Orang	1.668.893.934.690	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	779117 Orang	472640 Orang	413791 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	549281 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.926.466 Orang	1926446 Orang	1928295 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1.926.451 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	2 Paket	1.668.893.934.690	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan					1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535		1.668.893.934.690	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	173022 Orang	181238 Orang	130418 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	179184 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33919 Orang	35139 Orang	33153 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	34819 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35248 Orang	36468 Orang	34049 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36148 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35434 Orang	36664 Orang	34239 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36334 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	320 Orang	320 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	205 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1013 Orang	1068 Orang	1068 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1411 Orang	1.668.893.934.690	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48792 Orang	49728 Orang	49728 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	49494 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	41047 Orang	66739 Orang	61624 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	57162 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang	10 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	10 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5974 Orang	5823 Orang	5552 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	5863 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	111.502 Orang	111482 Orang	113587 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	111.487 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246.204 Orang	246184 Orang	248261 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	246.189 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	779117 Orang	472640 Orang	413791 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	549281 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.926.466 Orang	1926446 Orang	1928295 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1.926.451 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	2 Paket	1.668.893.934.690	
	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat					1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535		1.668.893.934.690	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	173022 Orang	181238 Orang	130418 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	179184 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33919 Orang	35139 Orang	33153 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	34819 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35248 Orang	36468 Orang	34049 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36148 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35434 Orang	36664 Orang	34239 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36334 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	320 Orang	320 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	205 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1013 Orang	1068 Orang	1068 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1411 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48792 Orang	49728 Orang	49728 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	49494 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	41047 Orang	66739 Orang	61624 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	57162 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang	10 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	10 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5974 Orang	5823 Orang	5552 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	5863 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	111.502 Orang	111482 Orang	113587 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	111.487 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246.204 Orang	246184 Orang	248261 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	246.189 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	779117 Orang	472640 Orang	413791 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	549281 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.926.466 Orang	1926446 Orang	1928295 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1.926.451 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	2 Paket	1.668.893.934.690	
	Meningkatnya Pemantauan Pembinaan Terpadu (Bindu)					1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535		1.668.893.934.690	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	173022 Orang	181238 Orang	130418 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	179184 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33919 Orang	35139 Orang	33153 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	34819 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35248 Orang	36468 Orang	34049 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36148 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35434 Orang	36664 Orang	34239 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36334 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	320 Orang	320 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	205 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1013 Orang	1068 Orang	1068 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1411 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48792 Orang	49728 Orang	49728 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	49494 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	41047 Orang	66739 Orang	61624 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	57162 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang	10 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	10 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5974 Orang	5823 Orang	5552 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	5863 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	111.502 Orang	111482 Orang	113587 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	111.487 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246.204 Orang	246184 Orang	248261 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	246.189 Orang	1.668.893.934.690	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	779117 Orang	472640 Orang	413791 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	549281 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.926.466 Orang	1926446 Orang	1928295 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1.926.451 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	2 Paket	1.668.893.934.690	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular, tidak menular dan usia produktif					1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535		1.668.893.934.690	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	173022 Orang	181238 Orang	130418 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	179184 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33919 Orang	35139 Orang	33153 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	34819 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35248 Orang	36468 Orang	34049 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36148 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35434 Orang	36664 Orang	34239 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36334 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	320 Orang	320 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	205 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1013 Orang	1068 Orang	1068 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1411 Orang	1.668.893.934.690	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48792 Orang	49728 Orang	49728 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	49494 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	41047 Orang	66739 Orang	61624 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	57162 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang	10 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	10 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5974 Orang	5823 Orang	5552 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	5863 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	111.502 Orang	111482 Orang	113587 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	111.487 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246.204 Orang	246184 Orang	248261 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	246.189 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	779117 Orang	472640 Orang	413791 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	549281 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.926.466 Orang	1926446 Orang	1928295 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1.926.451 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	2 Paket	1.668.893.934.690	
	Meningkatnya cakupan penjangkauan orang dengan masalah kesehatan					1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535		1.668.893.934.690	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	173022 Orang	181238 Orang	130418 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	179184 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33919 Orang	35139 Orang	33153 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	34819 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35248 Orang	36468 Orang	34049 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36148 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35434 Orang	36664 Orang	34239 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36334 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	320 Orang	320 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	205 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1013 Orang	1068 Orang	1068 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1411 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48792 Orang	49728 Orang	49728 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	49494 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	41047 Orang	66739 Orang	61624 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	57162 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang	10 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	10 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5974 Orang	5823 Orang	5552 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	5863 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	111.502 Orang	111482 Orang	113587 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	111.487 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246.204 Orang	246184 Orang	248261 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	246.189 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	779117 Orang	472640 Orang	413791 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	549281 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.926.466 Orang	1926446 Orang	1928295 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1.926.451 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	2 Paket	1.668.893.934.690	
	Meningkatnya Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dalam pemberian pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional					1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535		1.668.893.934.690	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	173022 Orang	181238 Orang	130418 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	179184 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33919 Orang	35139 Orang	33153 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	34819 Orang	1.668.893.934.690	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Laporan	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	12 Dokumen	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35248 Orang	36468 Orang	34049 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36148 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35434 Orang	36664 Orang	34239 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	36334 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	320 Orang	320 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	205 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1013 Orang	1068 Orang	1068 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1411 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48792 Orang	49728 Orang	49728 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	49494 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	41047 Orang	66739 Orang	61624 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	57162 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang	10 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	10 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5974 Orang	5823 Orang	5552 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	5863 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	111.502 Orang	111482 Orang	113587 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	111.487 Orang	1.668.893.934.690	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246.204 Orang	246184 Orang	248261 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	246.189 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	779117 Orang	472640 Orang	413791 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	549281 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.926.466 Orang	1926446 Orang	1928295 Orang	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	1.926.451 Orang	1.668.893.934.690	
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1.705.753.849.371	1.641.357.857.205	1.535.036.392.836	170.717.456.535	2 Paket	1.668.893.934.690	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					552.384.691	1.114.841.200	480.845.200	71.539.491		591.051.620	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35434 Orang	36664 Orang	34239 Orang	552.384.691	1.114.841.200	480.845.200	71.539.491	36334 Orang	591.051.620	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					117.700.000	117.700.000	117.700.000	0		125.939.000	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35248 Orang	36468 Orang	34049 Orang	117.700.000	117.700.000	117.700.000	0	36148 Orang	125.939.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					1.856.198.207	6.671.701.147	6.604.023.827	-4.747.825.620		1.986.131.922	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33919 Orang	35139 Orang	33153 Orang	1.856.198.207	6.671.701.147	6.604.023.827	-4.747.825.620	34819 Orang	1.986.131.922	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					2.543.918.484	2.458.468.489	2.458.468.489	85.449.995		2.900.380.818	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	173022 Orang	181238 Orang	130418 Orang	2.543.918.484	2.458.468.489	2.458.468.489	85.449.995	179184 Orang	2.900.380.818	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					1.404.050.897	1.476.753.124	1.476.753.124	-72.702.227		1.502.334.460	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.926.466 Orang	1926446 Orang	1928295 Orang	1.404.050.897	1.476.753.124	1.476.753.124	-72.702.227	1.926.451 Orang	1.502.334.460	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					119.941.066	37.200.000	37.200.000	82.741.066		128.337.110	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	779117 Orang	472640 Orang	413791 Orang	119.941.066	37.200.000	37.200.000	82.741.066	549281 Orang	128.337.110	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					142.310.000	168.119.600	168.119.600	-25.809.600		152.271.700	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246.204 Orang	246184 Orang	248261 Orang	142.310.000	168.119.600	168.119.600	-25.809.600	246.189 Orang	152.271.700	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					58.850.000	84.810.400	84.810.400	-25.960.400		62.969.500	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	111.502 Orang	111482 Orang	113587 Orang	58.850.000	84.810.400	84.810.400	-25.960.400	111.487 Orang	62.969.500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					524.300.000	540.194.135	540.194.135	-15.894.135		561.001.000	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5974 Orang	5823 Orang	5552 Orang	524.300.000	540.194.135	540.194.135	-15.894.135	5863 Orang	561.001.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					522.331.200	12.113.517.600	12.855.120.600	-12.332.789.400		558.894.384	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	41047 Orang	66739 Orang	61624 Orang	522.331.200	12.113.517.600	12.855.120.600	-12.332.789.400	57162 Orang	558.894.384	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					486.938.273	738.647.800	1.562.267.300	-1.075.329.027		521.023.952	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48792 Orang	49728 Orang	49728 Orang	486.938.273	738.647.800	1.562.267.300	-1.075.329.027	49494 Orang	521.023.952	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana					710.178.985	688.837.520	688.837.520	21.341.465		759.891.514	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	710.178.985	688.837.520	688.837.520	21.341.465	12 Dokumen	759.891.514	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					44.907.900	44.885.000	44.885.000	22.900		48.051.453	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	44.907.900	44.885.000	44.885.000	22.900	12 Laporan	48.051.453	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					804.583.652	1.653.918.680	1.832.936.380	-1.028.352.728		834.153.790	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	804.583.652	1.653.918.680	1.832.936.380	-1.028.352.728	12 Dokumen	834.153.790	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					328.234.923	256.354.000	283.339.320	44.895.603		351.211.367	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	328.234.923	256.354.000	283.339.320	44.895.603	12 Dokumen	351.211.367	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					269.233.126	286.843.936	283.622.260	-14.389.134		288.079.445	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	269.233.126	286.843.936	283.622.260	-14.389.134	12 Dokumen	288.079.445	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					151.376.110	228.789.000	228.789.000	-77.412.890		161.972.438	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	151.376.110	228.789.000	228.789.000	-77.412.890	12 Dokumen	161.972.438	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					665.956.118	1.636.419.824	934.812.824	-268.856.706		712.573.046	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	665.956.118	1.636.419.824	934.812.824	-268.856.706	12 Laporan	712.573.046	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					554.411.653.367	492.543.053.179	456.697.149.532	97.714.503.835		540.981.270.601	
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	554.411.653.367	492.543.053.179	456.697.149.532	97.714.503.835	12 Dokumen	540.981.270.601	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional					849.292.387	21.445.107.900	21.445.107.900	-20.595.815.513		908.742.854	
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	849.292.387	21.445.107.900	21.445.107.900	-20.595.815.513	2 Paket	908.742.854	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					1.045.698.588	1.045.518.001	1.045.518.001	180.587		1.118.897.489	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1013 Orang	1068 Orang	1068 Orang	1.045.698.588	1.045.518.001	1.045.518.001	180.587	1411 Orang	1.118.897.489	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					900.811.066	898.867.200	898.867.200	1.943.866		963.867.841	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	205 Orang	320 Orang	320 Orang	900.811.066	898.867.200	898.867.200	1.943.866	205 Orang	963.867.841	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					32.679.411	32.700.000	32.700.000	-20.589		34.966.970	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang	10 Orang	32.679.411	32.700.000	32.700.000	-20.589	10 Orang	34.966.970	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					41.088.006	836.038.000	876.730.000	-835.641.994		43.963.956	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	41.088.006	836.038.000	876.730.000	-835.641.994	12 Dokumen	43.963.956	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					413.077.673	333.644.000	305.044.000	108.033.673		441.993.110	
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya					413.077.673	333.644.000	305.044.000	108.033.673		441.993.110	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	413.077.673	333.644.000	305.044.000	108.033.673	12 Dokumen	441.993.110	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit	63 Unit	63 Unit	413.077.673	333.644.000	305.044.000	108.033.673	63 Unit	441.993.110	
	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar					413.077.673	333.644.000	305.044.000	108.033.673		441.993.110	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	413.077.673	333.644.000	305.044.000	108.033.673	12 Dokumen	441.993.110	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit	63 Unit	63 Unit	413.077.673	333.644.000	305.044.000	108.033.673	63 Unit	441.993.110	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					308.110.673	217.044.000	188.444.000	119.666.673		329.678.420	
	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	63 Unit	63 Unit	63 Unit	308.110.673	217.044.000	188.444.000	119.666.673	63 Unit	329.678.420	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan					104.967.000	116.600.000	116.600.000	-11.633.000		112.314.690	
	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	104.967.000	116.600.000	116.600.000	-11.633.000	12 Dokumen	112.314.690	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					147.182.868.152	2.348.007.500	2.290.272.500	144.892.595.652		2.352.467.247	
		Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	147.182.868.152	2.348.007.500	2.290.272.500	144.892.595.652	100%	2.352.467.247	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					145.325.517.212	387.269.500	329.534.500	144.995.982.712		365.101.741	
	Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan yang sesuai kebutuhan					145.325.517.212	387.269.500	329.534.500	144.995.982.712		365.101.741	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	126 Orang	126 Orang	126 Orang	145.325.517.212	387.269.500	329.534.500	144.995.982.712	126 Orang	365.101.741	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					145.325.517.212	387.269.500	329.534.500	144.995.982.712		365.101.741	
	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	126 Orang	126 Orang	126 Orang	145.325.517.212	387.269.500	329.534.500	144.995.982.712	126 Orang	365.101.741	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.857.350.940	1.960.738.000	1.960.738.000	-103.387.060		1.987.365.506	
	Meningkatnya pembinaan SDM Kesehatan					1.857.350.940	1.960.738.000	1.960.738.000	-103.387.060		1.987.365.506	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	319 Orang	299 Orang	299 Orang	1.857.350.940	1.960.738.000	1.960.738.000	-103.387.060	304 Orang	1.987.365.506	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.857.350.940	1.960.738.000	1.960.738.000	-103.387.060		1.987.365.506	
	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	319 Orang	299 Orang	299 Orang	1.857.350.940	1.960.738.000	1.960.738.000	-103.387.060	304 Orang	1.987.365.506	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					509.901.176	218.827.763	218.827.763	291.073.413		545.594.258	
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	100%	100%	100%	509.901.176	218.827.763	218.827.763	291.073.413	100%	545.594.258	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					509.901.176	218.827.763	218.827.763	291.073.413		545.594.258	
	Meningkatnya kualitas pemeriksaan sampel makanan minuman industri rumah tangga dan siap saji					509.901.176	218.827.763	218.827.763	291.073.413		545.594.258	
		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit	180 Unit	180 Unit	509.901.176	218.827.763	218.827.763	291.073.413	150 Unit	545.594.258	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					509.901.176	218.827.763	218.827.763	291.073.413		545.594.258	
	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150 Unit	180 Unit	180 Unit	509.901.176	218.827.763	218.827.763	291.073.413	150 Unit	545.594.258	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					700.241.459	703.328.740	703.328.740	-3.087.281		749.258.361	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	700.241.459	703.328.740	703.328.740	-3.087.281	68%	749.258.361	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					700.241.459	703.328.740	703.328.740	-3.087.281		749.258.361	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat					700.241.459	703.328.740	703.328.740	-3.087.281		749.258.361	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	700.241.459	703.328.740	703.328.740	-3.087.281	12 Dokumen	749.258.361	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					700.241.459	703.328.740	703.328.740	-3.087.281		749.258.361	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	700.241.459	703.328.740	703.328.740	-3.087.281	12 Dokumen	749.258.361	Dinas Kesehatan
	IFK					123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466		132.235.950	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466		132.235.950	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466		132.235.950	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466		132.235.950	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466	91%	132.235.950	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466	4 per 1.000 kelahiran hidup	132.235.950	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466	80%	132.235.950	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466	98,70 %	132.235.950	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466	82%	132.235.950	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466	40%	132.235.950	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466	100%	132.235.950	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466	95,45%	132.235.950	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466	90,75 %	132.235.950	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466	0,58 %	132.235.950	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466	12%	132.235.950	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466	21,6 %	132.235.950	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466	1,92 %	132.235.950	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466	80%	132.235.950	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466	69%	132.235.950	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466	100%	132.235.950	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					370.755.000	370.755.000	350.824.602	19.930.398		396.707.850	
	Terpenuhinya operasional fasilitas kesehatan lainnya pada IFK					370.755.000	370.755.000	350.824.602	19.930.398		396.707.850	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	370.755.000	370.755.000	350.824.602	19.930.398	12 Dokumen	396.707.850	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466		132.235.950	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	123.585.000	123.585.000	116.941.534	6.643.466	12 Dokumen	132.235.950	IFK
	Labkesda					2.170.019.310	2.670.019.310	5.669.212.482	-3.499.193.172		2.215.702.428	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.170.019.310	2.170.019.310	5.669.212.482	-3.499.193.172		2.215.702.428	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.170.019.310	2.670.019.310	5.669.212.482	-3.499.193.172		2.215.702.428	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.038.075.310	2.538.075.310	5.537.268.482	-3.499.193.172		2.080.729.177	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.038.075.310	2.538.075.310	5.537.268.482	-3.499.193.172	89,97 %	2.080.729.177	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.038.075.310	2.538.075.310	5.537.268.482	-3.499.193.172		2.080.729.177	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di Laboraturium Kesehatan Masyarakat (Labkesda)					2.038.075.310	2.538.075.310	5.537.268.482	-3.499.193.172		2.080.729.177	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.038.075.310	2.538.075.310	5.537.268.482	-3.499.193.172	1 Unit Kerja	2.080.729.177	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.038.075.310	2.538.075.310	5.537.268.482	-3.499.193.172		2.080.729.177	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.038.075.310	2.538.075.310	5.537.268.482	-3.499.193.172	1 Unit Kerja	2.080.729.177	Labkesda
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					131.944.000	131.944.000	131.944.000	0		134.973.251	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	131.944.000	131.944.000	131.944.000	0	91%	134.973.251	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	131.944.000	131.944.000	131.944.000	0	4 per 1.000 kelahiran hidup	134.973.251	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	131.944.000	131.944.000	131.944.000	0	80%	134.973.251	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	131.944.000	131.944.000	131.944.000	0	98,70 %	134.973.251	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	131.944.000	131.944.000	131.944.000	0	82%	134.973.251	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	131.944.000	131.944.000	131.944.000	0	40%	134.973.251	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	131.944.000	131.944.000	131.944.000	0	100%	134.973.251	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	131.944.000	131.944.000	131.944.000	0	95,45%	134.973.251	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	131.944.000	131.944.000	131.944.000	0	90,75 %	134.973.251	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	131.944.000	131.944.000	131.944.000	0	0,58 %	134.973.251	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	131.944.000	131.944.000	131.944.000	0	12%	134.973.251	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	131.944.000	131.944.000	131.944.000	0	21,6 %	134.973.251	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	131.944.000	131.944.000	131.944.000	0	1,92 %	134.973.251	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	131.944.000	131.944.000	131.944.000	0	80%	134.973.251	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	131.944.000	131.944.000	131.944.000	0	69%	134.973.251	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	131.944.000	131.944.000	131.944.000	0	100%	134.973.251	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					395.832.000	395.832.000	395.832.000	0		404.919.753	
	Terpenuhinya operasional fasilitas kesehatan lainnya pada Labkesda					395.832.000	395.832.000	395.832.000	0		404.919.753	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	395.832.000	395.832.000	395.832.000	0	12 Dokumen	404.919.753	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					131.944.000	131.944.000	131.944.000	0		134.973.251	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	131.944.000	131.944.000	131.944.000	0	12 Dokumen	134.973.251	Labkesda
	Puskesmas Asemrowo					4.064.662.635	4.062.755.645	4.708.612.417	-643.949.782		4.142.945.105	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.064.662.635	4.064.662.635	4.708.612.417	-643.949.782		4.142.945.105	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.064.662.635	4.062.755.645	4.708.612.417	-643.949.782		4.142.945.105	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.751.992.053	2.751.992.053	3.330.152.825	-578.160.772		2.759.760.927	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.751.992.053	2.751.992.053	3.330.152.825	-578.160.772	89,97 %	2.759.760.927	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.751.992.053	2.751.992.053	3.330.152.825	-578.160.772		2.759.760.927	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Asemrowo					2.751.992.053	2.751.992.053	3.330.152.825	-578.160.772		2.759.760.927	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.751.992.053	2.751.992.053	3.330.152.825	-578.160.772	1 Unit Kerja	2.759.760.927	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.751.992.053	2.751.992.053	3.330.152.825	-578.160.772		2.759.760.927	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.751.992.053	2.751.992.053	3.330.152.825	-578.160.772	1 Unit Kerja	2.759.760.927	Puskesmas Asemrowo
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.309.418.567	1.309.938.592	1.363.404.992	-53.986.425		1.379.691.514	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.309.418.567	1.309.938.592	1.363.404.992	-53.986.425	91%	1.379.691.514	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.309.418.567	1.309.938.592	1.363.404.992	-53.986.425	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.379.691.514	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.309.418.567	1.309.938.592	1.363.404.992	-53.986.425	80%	1.379.691.514	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.309.418.567	1.309.938.592	1.363.404.992	-53.986.425	98,70 %	1.379.691.514	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.309.418.567	1.309.938.592	1.363.404.992	-53.986.425	82%	1.379.691.514	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.309.418.567	1.309.938.592	1.363.404.992	-53.986.425	40%	1.379.691.514	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.309.418.567	1.309.938.592	1.363.404.992	-53.986.425	100%	1.379.691.514	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.309.418.567	1.309.938.592	1.363.404.992	-53.986.425	95,45%	1.379.691.514	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.309.418.567	1.309.938.592	1.363.404.992	-53.986.425	90,75 %	1.379.691.514	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.309.418.567	1.309.938.592	1.363.404.992	-53.986.425	0,58 %	1.379.691.514	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.309.418.567	1.309.938.592	1.363.404.992	-53.986.425	12%	1.379.691.514	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.309.418.567	1.309.938.592	1.363.404.992	-53.986.425	21,6 %	1.379.691.514	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.309.418.567	1.309.938.592	1.363.404.992	-53.986.425	1,92 %	1.379.691.514	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.309.418.567	1.309.938.592	1.363.404.992	-53.986.425	80%	1.379.691.514	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.309.418.567	1.309.938.592	1.363.404.992	-53.986.425	69%	1.379.691.514	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.309.418.567	1.309.938.592	1.363.404.992	-53.986.425	100%	1.379.691.514	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275		4.139.074.542	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Asemrowo					3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275		4.139.074.542	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7030 Orang	7745 Orang	6840 Orang	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	7575 Orang	4.139.074.542	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	12 Laporan	4.139.074.542	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	12 Dokumen	4.139.074.542	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	12 Dokumen	4.139.074.542	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	12 Dokumen	4.139.074.542	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	12 Dokumen	4.139.074.542	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	12 Dokumen	4.139.074.542	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	12 Dokumen	4.139.074.542	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	12 Dokumen	4.139.074.542	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	599 Orang	623 Orang	600 Orang	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	617 Orang	4.139.074.542	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	646 Orang	1046 Orang	990 Orang	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	897 Orang	4.139.074.542	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang	92 Orang	90 Orang	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	93 Orang	4.139.074.542	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Asemrowo					3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275		4.139.074.542	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7030 Orang	7745 Orang	6840 Orang	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	7575 Orang	4.139.074.542	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	12 Laporan	4.139.074.542	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	12 Dokumen	4.139.074.542	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	12 Dokumen	4.139.074.542	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	12 Dokumen	4.139.074.542	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	12 Dokumen	4.139.074.542	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	12 Dokumen	4.139.074.542	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	12 Dokumen	4.139.074.542	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	12 Dokumen	4.139.074.542	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	599 Orang	623 Orang	600 Orang	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	617 Orang	4.139.074.542	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	646 Orang	1046 Orang	990 Orang	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	897 Orang	4.139.074.542	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang	92 Orang	90 Orang	3.928.255.701	3.929.815.776	4.090.214.976	-161.959.275	93 Orang	4.139.074.542	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	599 Orang	623 Orang	600 Orang	69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727	617 Orang	74.468.926	Puskesmas Asemrowo
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.283.712	7.560.000	660.000	623.712		1.373.559	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7030 Orang	7745 Orang	6840 Orang	1.283.712	7.560.000	660.000	623.712	7575 Orang	1.373.559	Puskesmas Asemrowo
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					5.367.600	1.980.000	1.980.000	3.387.600		5.743.332	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang	92 Orang	90 Orang	5.367.600	1.980.000	1.980.000	3.387.600	93 Orang	5.743.332	Puskesmas Asemrowo
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					21.263.040	17.172.000	16.420.000	4.843.040		22.751.453	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	646 Orang	1046 Orang	990 Orang	21.263.040	17.172.000	16.420.000	4.843.040	897 Orang	22.751.453	Puskesmas Asemrowo
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					322.913.944	234.564.000	289.057.400	33.856.544		345.517.920	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	322.913.944	234.564.000	289.057.400	33.856.544	12 Dokumen	345.517.920	Puskesmas Asemrowo
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					3.433.416	1.560.000	2.640.000	793.416		3.673.068	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.433.416	1.560.000	2.640.000	793.416	12 Dokumen	3.673.068	Puskesmas Asemrowo
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					8.545.846	7.722.000	8.682.000	-136.154		9.142.346	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.545.846	7.722.000	8.682.000	-136.154	12 Dokumen	9.142.346	Puskesmas Asemrowo
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					121.887.231	52.008.000	9.360.000	112.527.231		130.419.337	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	121.887.231	52.008.000	9.360.000	112.527.231	12 Laporan	130.419.337	Puskesmas Asemrowo
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					743.877.051	915.119.092	962.352.092	-218.475.041		774.733.071	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	743.877.051	915.119.092	962.352.092	-218.475.041	12 Dokumen	774.733.071	Puskesmas Asemrowo
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.288.214	550.000	550.000	738.214		1.361.384	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.288.214	550.000	550.000	738.214	12 Dokumen	1.361.384	Puskesmas Asemrowo
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					8.165.986	687.500	687.500	7.478.486		8.858.462	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.165.986	687.500	687.500	7.478.486	12 Dokumen	8.858.462	Puskesmas Asemrowo
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					1.540.800	1.320.000	1.320.000	220.800		1.648.656	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.540.800	1.320.000	1.320.000	220.800	12 Dokumen	1.648.656	Puskesmas Asemrowo
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.252.015	825.000	15.054.600	-11.802.585		3.492.664	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.252.015	825.000	15.054.600	-11.802.585	68%	3.492.664	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.252.015	825.000	15.054.600	-11.802.585		3.492.664	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Asemrowo					3.252.015	825.000	15.054.600	-11.802.585		3.492.664	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.252.015	825.000	15.054.600	-11.802.585	12 Dokumen	3.492.664	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.252.015	825.000	15.054.600	-11.802.585		3.492.664	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.252.015	825.000	15.054.600	-11.802.585	12 Dokumen	3.492.664	Puskesmas Asemrowo
	Puskesmas Balasklumprik					1.788.413.971	1.625.509.758	1.890.435.828	-102.021.857		1.833.718.916	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.788.413.971	1.788.413.971	1.890.435.828	-102.021.857		1.833.718.916	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.788.413.971	1.625.509.758	1.890.435.828	-102.021.857		1.833.718.916	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.018.414.524	1.018.414.524	1.259.705.194	-241.290.670		1.021.289.509	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	1.018.414.524	1.018.414.524	1.259.705.194	-241.290.670	89,97 %	1.021.289.509	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1.018.414.524	1.018.414.524	1.259.705.194	-241.290.670		1.021.289.509	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Balasklumprik					1.018.414.524	1.018.414.524	1.259.705.194	-241.290.670		1.021.289.509	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.018.414.524	1.018.414.524	1.259.705.194	-241.290.670	1 Unit Kerja	1.021.289.509	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.018.414.524	1.018.414.524	1.259.705.194	-241.290.670		1.021.289.509	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.018.414.524	1.018.414.524	1.259.705.194	-241.290.670	1 Unit Kerja	1.021.289.509	Puskesmas Balasklumprik
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					764.961.592	606.270.234	622.790.834	142.170.758		807.018.751	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	764.961.592	606.270.234	622.790.834	142.170.758	91%	807.018.751	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	764.961.592	606.270.234	622.790.834	142.170.758	4 per 1.000 kelahiran hidup	807.018.751	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	764.961.592	606.270.234	622.790.834	142.170.758	80%	807.018.751	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	764.961.592	606.270.234	622.790.834	142.170.758	98,70 %	807.018.751	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	764.961.592	606.270.234	622.790.834	142.170.758	82%	807.018.751	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	764.961.592	606.270.234	622.790.834	142.170.758	40%	807.018.751	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	764.961.592	606.270.234	622.790.834	142.170.758	100%	807.018.751	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	764.961.592	606.270.234	622.790.834	142.170.758	95,45%	807.018.751	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	764.961.592	606.270.234	622.790.834	142.170.758	90,75 %	807.018.751	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	764.961.592	606.270.234	622.790.834	142.170.758	0,58 %	807.018.751	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	764.961.592	606.270.234	622.790.834	142.170.758	12%	807.018.751	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	764.961.592	606.270.234	622.790.834	142.170.758	21,6 %	807.018.751	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	764.961.592	606.270.234	622.790.834	142.170.758	1,92 %	807.018.751	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	764.961.592	606.270.234	622.790.834	142.170.758	80%	807.018.751	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	764.961.592	606.270.234	622.790.834	142.170.758	69%	807.018.751	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	764.961.592	606.270.234	622.790.834	142.170.758	100%	807.018.751	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274		2.421.056.253	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Balasklumprik					2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274		2.421.056.253	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2042 Orang	2249 Orang	2069 Orang	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	2200 Orang	2.421.056.253	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	12 Laporan	2.421.056.253	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	12 Dokumen	2.421.056.253	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	12 Dokumen	2.421.056.253	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	12 Dokumen	2.421.056.253	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	12 Dokumen	2.421.056.253	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	12 Dokumen	2.421.056.253	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	12 Dokumen	2.421.056.253	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	12 Dokumen	2.421.056.253	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	182 Orang	186 Orang	166 Orang	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	185 Orang	2.421.056.253	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	193 Orang	312 Orang	315 Orang	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	268 Orang	2.421.056.253	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	30 Orang	50 Orang	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	31 Orang	2.421.056.253	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Balasklumprik					2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274		2.421.056.253	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2042 Orang	2249 Orang	2069 Orang	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	2200 Orang	2.421.056.253	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	12 Laporan	2.421.056.253	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	12 Dokumen	2.421.056.253	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	12 Dokumen	2.421.056.253	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	12 Dokumen	2.421.056.253	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	12 Dokumen	2.421.056.253	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	12 Dokumen	2.421.056.253	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	12 Dokumen	2.421.056.253	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	12 Dokumen	2.421.056.253	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	182 Orang	186 Orang	166 Orang	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	185 Orang	2.421.056.253	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	193 Orang	312 Orang	315 Orang	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	268 Orang	2.421.056.253	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	30 Orang	50 Orang	2.294.884.776	1.818.810.702	1.868.372.502	426.512.274	31 Orang	2.421.056.253	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170		26.477.840	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	182 Orang	186 Orang	166 Orang	24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170	185 Orang	26.477.840	Puskesmas Balasklumprik
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.123.248	13.125.000	690.000	433.248		1.201.864	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2042 Orang	2249 Orang	2069 Orang	1.123.248	13.125.000	690.000	433.248	2200 Orang	1.201.864	Puskesmas Balasklumprik
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					2.108.700	360.000	360.000	1.748.700		2.256.309	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	30 Orang	50 Orang	2.108.700	360.000	360.000	1.748.700	31 Orang	2.256.309	Puskesmas Balasklumprik
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.053.040	18.072.000	14.760.000	3.293.040		19.316.753	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	193 Orang	312 Orang	315 Orang	18.053.040	18.072.000	14.760.000	3.293.040	268 Orang	19.316.753	Puskesmas Balasklumprik
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					246.671.327	106.956.600	163.634.200	83.037.127		263.938.319	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	246.671.327	106.956.600	163.634.200	83.037.127	12 Dokumen	263.938.319	Puskesmas Balasklumprik
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	690.000	2.550.000	-2.250.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	690.000	2.550.000	-2.250.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Balasklumprik
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					3.115.940	2.614.000	2.794.000	321.940		3.333.433	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.115.940	2.614.000	2.794.000	321.940	12 Dokumen	3.333.433	Puskesmas Balasklumprik
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					61.259.640	26.793.000	5.640.000	55.619.640		65.547.815	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	61.259.640	26.793.000	5.640.000	55.619.640	12 Laporan	65.547.815	Puskesmas Balasklumprik
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					400.972.138	412.640.134	407.343.134	-6.370.996		417.604.463	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	400.972.138	412.640.134	407.343.134	-6.370.996	12 Dokumen	417.604.463	Puskesmas Balasklumprik
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.092.536	550.000	550.000	542.536		1.154.592	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.092.536	550.000	550.000	542.536	12 Dokumen	1.154.592	Puskesmas Balasklumprik
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					3.888.565	687.500	687.500	3.201.065		4.218.315	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.888.565	687.500	687.500	3.201.065	12 Dokumen	4.218.315	Puskesmas Balasklumprik
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					1.540.800	550.000	550.000	990.800		1.648.656	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.540.800	550.000	550.000	990.800	12 Dokumen	1.648.656	Puskesmas Balasklumprik
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					5.037.855	825.000	7.939.800	-2.901.945		5.410.656	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	5.037.855	825.000	7.939.800	-2.901.945	68%	5.410.656	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5.037.855	825.000	7.939.800	-2.901.945		5.410.656	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Balasklumprik					5.037.855	825.000	7.939.800	-2.901.945		5.410.656	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.037.855	825.000	7.939.800	-2.901.945	12 Dokumen	5.410.656	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					5.037.855	825.000	7.939.800	-2.901.945		5.410.656	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.037.855	825.000	7.939.800	-2.901.945	12 Dokumen	5.410.656	Puskesmas Balasklumprik
	Puskesmas Balongsari					3.646.259.966	4.131.392.093	4.939.429.735	-1.293.169.769		3.709.342.259	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.646.259.966	3.646.259.966	4.939.429.735	-1.293.169.769		3.709.342.259	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.646.259.966	4.131.392.093	4.939.429.735	-1.293.169.769		3.709.342.259	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.614.323.809	2.614.323.809	3.410.210.451	-795.886.642		2.621.704.045	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.614.323.809	2.614.323.809	3.410.210.451	-795.886.642	89,97 %	2.621.704.045	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.614.323.809	2.614.323.809	3.410.210.451	-795.886.642		2.621.704.045	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Balongsari					2.614.323.809	2.614.323.809	3.410.210.451	-795.886.642		2.621.704.045	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.614.323.809	2.614.323.809	3.410.210.451	-795.886.642	1 Unit Kerja	2.621.704.045	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.614.323.809	2.614.323.809	3.410.210.451	-795.886.642		2.621.704.045	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.614.323.809	2.614.323.809	3.410.210.451	-795.886.642	1 Unit Kerja	2.621.704.045	Puskesmas Balongsari
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.027.663.662	1.516.243.284	1.511.841.484	-484.177.822		1.083.049.555	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.027.663.662	1.516.243.284	1.511.841.484	-484.177.822	91%	1.083.049.555	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.027.663.662	1.516.243.284	1.511.841.484	-484.177.822	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.083.049.555	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.027.663.662	1.516.243.284	1.511.841.484	-484.177.822	80%	1.083.049.555	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.027.663.662	1.516.243.284	1.511.841.484	-484.177.822	98,70 %	1.083.049.555	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.027.663.662	1.516.243.284	1.511.841.484	-484.177.822	82%	1.083.049.555	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.027.663.662	1.516.243.284	1.511.841.484	-484.177.822	40%	1.083.049.555	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.027.663.662	1.516.243.284	1.511.841.484	-484.177.822	100%	1.083.049.555	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.027.663.662	1.516.243.284	1.511.841.484	-484.177.822	95,45%	1.083.049.555	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.027.663.662	1.516.243.284	1.511.841.484	-484.177.822	90,75 %	1.083.049.555	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.027.663.662	1.516.243.284	1.511.841.484	-484.177.822	0,58 %	1.083.049.555	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.027.663.662	1.516.243.284	1.511.841.484	-484.177.822	12%	1.083.049.555	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.027.663.662	1.516.243.284	1.511.841.484	-484.177.822	21,6 %	1.083.049.555	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.027.663.662	1.516.243.284	1.511.841.484	-484.177.822	1,92 %	1.083.049.555	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.027.663.662	1.516.243.284	1.511.841.484	-484.177.822	80%	1.083.049.555	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.027.663.662	1.516.243.284	1.511.841.484	-484.177.822	69%	1.083.049.555	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.027.663.662	1.516.243.284	1.511.841.484	-484.177.822	100%	1.083.049.555	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466		3.249.148.665	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Balongsari					3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466		3.249.148.665	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4774 Orang	5259 Orang	3510 Orang	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	5144 Orang	3.249.148.665	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	12 Laporan	3.249.148.665	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	12 Dokumen	3.249.148.665	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	12 Dokumen	3.249.148.665	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	12 Dokumen	3.249.148.665	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	12 Dokumen	3.249.148.665	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	12 Dokumen	3.249.148.665	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	12 Dokumen	3.249.148.665	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	12 Dokumen	3.249.148.665	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	439 Orang	455 Orang	391 Orang	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	451 Orang	3.249.148.665	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang	780 Orang	566 Orang	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	669 Orang	3.249.148.665	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	59 Orang	55 Orang	66 Orang	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	56 Orang	3.249.148.665	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Balongsari					3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466		3.249.148.665	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4774 Orang	5259 Orang	3510 Orang	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	5144 Orang	3.249.148.665	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	12 Laporan	3.249.148.665	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	12 Dokumen	3.249.148.665	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	12 Dokumen	3.249.148.665	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	12 Dokumen	3.249.148.665	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	12 Dokumen	3.249.148.665	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	12 Dokumen	3.249.148.665	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	12 Dokumen	3.249.148.665	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	12 Dokumen	3.249.148.665	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	439 Orang	455 Orang	391 Orang	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	451 Orang	3.249.148.665	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang	780 Orang	566 Orang	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	669 Orang	3.249.148.665	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	59 Orang	55 Orang	66 Orang	3.082.990.986	4.548.729.852	4.535.524.452	-1.452.533.466	56 Orang	3.249.148.665	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	439 Orang	455 Orang	391 Orang	69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727	451 Orang	74.468.926	Puskesmas Balongsari

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.347.898	6.345.000	4.860.000	-3.512.102		1.442.237	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4774 Orang	5259 Orang	3510 Orang	1.347.898	6.345.000	4.860.000	-3.512.102	5144 Orang	1.442.237	Puskesmas Balongsari
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.834.000	3.600.000	3.600.000	234.000		4.102.380	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	59 Orang	55 Orang	66 Orang	3.834.000	3.600.000	3.600.000	234.000	56 Orang	4.102.380	Puskesmas Balongsari
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					19.722.240	18.072.000	14.160.000	5.562.240		21.102.797	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang	780 Orang	566 Orang	19.722.240	18.072.000	14.160.000	5.562.240	669 Orang	21.102.797	Puskesmas Balongsari
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					190.918.648	235.890.000	288.230.200	-97.311.552		204.282.953	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	190.918.648	235.890.000	288.230.200	-97.311.552	12 Dokumen	204.282.953	Puskesmas Balongsari
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					3.080.448	1.200.000	2.670.000	410.448		3.295.463	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.080.448	1.200.000	2.670.000	410.448	12 Dokumen	3.295.463	Puskesmas Balongsari
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					8.513.767	7.752.000	8.742.000	-228.233		9.108.028	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.513.767	7.752.000	8.742.000	-228.233	12 Dokumen	9.108.028	Puskesmas Balongsari
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					137.487.831	76.044.000	29.340.000	108.147.831		147.111.979	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	137.487.831	76.044.000	29.340.000	108.147.831	12 Laporan	147.111.979	Puskesmas Balongsari
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					575.143.980	1.094.481.784	1.087.380.784	-512.236.804		599.000.952	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	575.143.980	1.094.481.784	1.087.380.784	-512.236.804	12 Dokumen	599.000.952	Puskesmas Balongsari
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.127.998	825.000	825.000	1.302.998		2.248.869	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.127.998	825.000	825.000	1.302.998	12 Dokumen	2.248.869	Puskesmas Balongsari
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					10.499.125	687.500	687.500	9.811.625		11.389.451	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.499.125	687.500	687.500	9.811.625	12 Dokumen	11.389.451	Puskesmas Balongsari
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					5.136.000	1.650.000	1.650.000	3.486.000		5.495.520	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.136.000	1.650.000	1.650.000	3.486.000	12 Dokumen	5.495.520	Puskesmas Balongsari
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					4.272.495	825.000	17.377.800	-13.105.305		4.588.659	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	4.272.495	825.000	17.377.800	-13.105.305	68%	4.588.659	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.272.495	825.000	17.377.800	-13.105.305		4.588.659	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Balongsari					4.272.495	825.000	17.377.800	-13.105.305		4.588.659	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.272.495	825.000	17.377.800	-13.105.305	12 Dokumen	4.588.659	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4.272.495	825.000	17.377.800	-13.105.305		4.588.659	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.272.495	825.000	17.377.800	-13.105.305	12 Dokumen	4.588.659	Puskesmas Balongsari
	Puskesmas Bangkingan					1.843.426.924	1.931.067.575	2.166.320.451	-322.893.527		1.890.439.024	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.843.426.924	1.843.426.924	2.166.320.451	-322.893.527		1.890.439.024	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.843.426.924	1.931.067.575	2.166.320.451	-322.893.527		1.890.439.024	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.050.866.179	1.050.866.179	1.296.543.655	-245.677.476		1.053.832.774	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	1.050.866.179	1.050.866.179	1.296.543.655	-245.677.476	89,97 %	1.053.832.774	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1.050.866.179	1.050.866.179	1.296.543.655	-245.677.476		1.053.832.774	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Bangkingan					1.050.866.179	1.050.866.179	1.296.543.655	-245.677.476		1.053.832.774	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.050.866.179	1.050.866.179	1.296.543.655	-245.677.476	1 Unit Kerja	1.053.832.774	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.050.866.179	1.050.866.179	1.296.543.655	-245.677.476		1.053.832.774	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.050.866.179	1.050.866.179	1.296.543.655	-245.677.476	1 Unit Kerja	1.053.832.774	Puskesmas Bangkingan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					788.415.810	879.376.396	858.279.596	-69.863.786		832.154.590	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	788.415.810	879.376.396	858.279.596	-69.863.786	91%	832.154.590	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	788.415.810	879.376.396	858.279.596	-69.863.786	4 per 1.000 kelahiran hidup	832.154.590	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	788.415.810	879.376.396	858.279.596	-69.863.786	80%	832.154.590	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	788.415.810	879.376.396	858.279.596	-69.863.786	98,70 %	832.154.590	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	788.415.810	879.376.396	858.279.596	-69.863.786	82%	832.154.590	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	788.415.810	879.376.396	858.279.596	-69.863.786	40%	832.154.590	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	788.415.810	879.376.396	858.279.596	-69.863.786	100%	832.154.590	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	788.415.810	879.376.396	858.279.596	-69.863.786	95,45%	832.154.590	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	788.415.810	879.376.396	858.279.596	-69.863.786	90,75 %	832.154.590	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	788.415.810	879.376.396	858.279.596	-69.863.786	0,58 %	832.154.590	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	788.415.810	879.376.396	858.279.596	-69.863.786	12%	832.154.590	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	788.415.810	879.376.396	858.279.596	-69.863.786	21,6 %	832.154.590	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	788.415.810	879.376.396	858.279.596	-69.863.786	1,92 %	832.154.590	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	788.415.810	879.376.396	858.279.596	-69.863.786	80%	832.154.590	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	788.415.810	879.376.396	858.279.596	-69.863.786	69%	832.154.590	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	788.415.810	879.376.396	858.279.596	-69.863.786	100%	832.154.590	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358		2.496.463.770	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Bangkingan					2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358		2.496.463.770	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1982 Orang	2183 Orang	1983 Orang	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	2135 Orang	2.496.463.770	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	12 Laporan	2.496.463.770	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	12 Dokumen	2.496.463.770	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	12 Dokumen	2.496.463.770	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	12 Dokumen	2.496.463.770	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	12 Dokumen	2.496.463.770	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	12 Dokumen	2.496.463.770	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	12 Dokumen	2.496.463.770	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	12 Dokumen	2.496.463.770	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	179 Orang	183 Orang	171 Orang	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	182 Orang	2.496.463.770	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	323 Orang	319 Orang	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	277 Orang	2.496.463.770	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	30 Orang	34 Orang	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	31 Orang	2.496.463.770	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Bangkingan					2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358		2.496.463.770	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1982 Orang	2183 Orang	1983 Orang	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	2135 Orang	2.496.463.770	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	12 Laporan	2.496.463.770	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	12 Dokumen	2.496.463.770	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	12 Dokumen	2.496.463.770	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	12 Dokumen	2.496.463.770	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	12 Dokumen	2.496.463.770	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	12 Dokumen	2.496.463.770	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	12 Dokumen	2.496.463.770	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	12 Dokumen	2.496.463.770	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	179 Orang	183 Orang	171 Orang	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	182 Orang	2.496.463.770	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	323 Orang	319 Orang	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	277 Orang	2.496.463.770	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	30 Orang	34 Orang	2.365.247.430	2.638.129.188	2.574.838.788	-209.591.358	31 Orang	2.496.463.770	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339		52.955.681	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	179 Orang	183 Orang	171 Orang	49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339	182 Orang	52.955.681	Puskesmas Bangkingan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.412.083	7.860.000	3.540.000	-2.127.917		1.510.915	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1982 Orang	2183 Orang	1983 Orang	1.412.083	7.860.000	3.540.000	-2.127.917	2135 Orang	1.510.915	Puskesmas Bangkingan
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					1.917.000	1.800.000	1.800.000	117.000		2.051.190	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	30 Orang	34 Orang	1.917.000	1.800.000	1.800.000	117.000	31 Orang	2.051.190	Puskesmas Bangkingan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.695.040	18.072.000	14.160.000	4.535.040		20.003.693	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	323 Orang	319 Orang	18.695.040	18.072.000	14.160.000	4.535.040	277 Orang	20.003.693	Puskesmas Bangkingan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					202.929.338	85.524.600	147.859.800	55.069.538		217.134.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	202.929.338	85.524.600	147.859.800	55.069.538	12 Dokumen	217.134.392	Puskesmas Bangkingan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	540.000	2.520.000	-2.220.512		320.392	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	540.000	2.520.000	-2.220.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Bangkingan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					5.911.090	10.516.000	5.588.000	323.090		6.323.685	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.911.090	10.516.000	5.588.000	323.090	12 Dokumen	6.323.685	Puskesmas Bangkingan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					98.270.940	70.716.000	8.730.000	89.540.940		105.149.906	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	98.270.940	70.716.000	8.730.000	89.540.940	12 Laporan	105.149.906	Puskesmas Bangkingan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					398.536.074	636.096.296	625.830.296	-227.294.222		415.067.351	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	398.536.074	636.096.296	625.830.296	-227.294.222	12 Dokumen	415.067.351	Puskesmas Bangkingan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.190.375	550.000	550.000	640.375		1.257.988	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.190.375	550.000	550.000	640.375	12 Dokumen	1.257.988	Puskesmas Bangkingan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					8.554.843	687.500	687.500	7.867.343		9.280.293	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.554.843	687.500	687.500	7.867.343	12 Dokumen	9.280.293	Puskesmas Bangkingan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					1.027.200	550.000	550.000	477.200		1.099.104	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.027.200	550.000	550.000	477.200	12 Dokumen	1.099.104	Puskesmas Bangkingan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					4.144.935	825.000	11.497.200	-7.352.265		4.451.660	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	4.144.935	825.000	11.497.200	-7.352.265	68%	4.451.660	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.144.935	825.000	11.497.200	-7.352.265		4.451.660	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Bangkingan					4.144.935	825.000	11.497.200	-7.352.265		4.451.660	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.144.935	825.000	11.497.200	-7.352.265	12 Dokumen	4.451.660	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4.144.935	825.000	11.497.200	-7.352.265		4.451.660	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.144.935	825.000	11.497.200	-7.352.265	12 Dokumen	4.451.660	Puskesmas Bangkingan
	Puskesmas Banyuurip					4.873.273.103	4.960.753.345	6.293.845.656	-1.420.572.553		4.947.081.697	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.873.273.103	4.873.273.103	6.293.845.656	-1.420.572.553		4.947.081.697	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.873.273.103	4.960.753.345	6.293.845.656	-1.420.572.553		4.947.081.697	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.733.144.161	3.733.144.161	5.131.273.272	-1.398.129.111		3.743.682.827	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.733.144.161	3.733.144.161	5.131.273.272	-1.398.129.111	89,97 %	3.743.682.827	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.733.144.161	3.733.144.161	5.131.273.272	-1.398.129.111		3.743.682.827	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Banyuurip					3.733.144.161	3.733.144.161	5.131.273.272	-1.398.129.111		3.743.682.827	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.733.144.161	3.733.144.161	5.131.273.272	-1.398.129.111	1 Unit Kerja	3.743.682.827	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.733.144.161	3.733.144.161	5.131.273.272	-1.398.129.111		3.743.682.827	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.733.144.161	3.733.144.161	5.131.273.272	-1.398.129.111	1 Unit Kerja	3.743.682.827	Puskesmas Banyuurip
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.137.056.872	1.226.784.184	1.149.260.184	-12.203.312		1.200.099.467	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.137.056.872	1.226.784.184	1.149.260.184	-12.203.312	91%	1.200.099.467	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.137.056.872	1.226.784.184	1.149.260.184	-12.203.312	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.200.099.467	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.137.056.872	1.226.784.184	1.149.260.184	-12.203.312	80%	1.200.099.467	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.137.056.872	1.226.784.184	1.149.260.184	-12.203.312	98,70 %	1.200.099.467	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.137.056.872	1.226.784.184	1.149.260.184	-12.203.312	82%	1.200.099.467	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.137.056.872	1.226.784.184	1.149.260.184	-12.203.312	40%	1.200.099.467	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.137.056.872	1.226.784.184	1.149.260.184	-12.203.312	100%	1.200.099.467	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.137.056.872	1.226.784.184	1.149.260.184	-12.203.312	95,45%	1.200.099.467	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.137.056.872	1.226.784.184	1.149.260.184	-12.203.312	90,75 %	1.200.099.467	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.137.056.872	1.226.784.184	1.149.260.184	-12.203.312	0,58 %	1.200.099.467	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.137.056.872	1.226.784.184	1.149.260.184	-12.203.312	12%	1.200.099.467	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.137.056.872	1.226.784.184	1.149.260.184	-12.203.312	21,6 %	1.200.099.467	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.137.056.872	1.226.784.184	1.149.260.184	-12.203.312	1,92 %	1.200.099.467	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.137.056.872	1.226.784.184	1.149.260.184	-12.203.312	80%	1.200.099.467	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.137.056.872	1.226.784.184	1.149.260.184	-12.203.312	69%	1.200.099.467	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.137.056.872	1.226.784.184	1.149.260.184	-12.203.312	100%	1.200.099.467	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936		3.600.298.401	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Banyuurip					3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936		3.600.298.401	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8608 Orang	9484 Orang	7758 Orang	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	9276 Orang	3.600.298.401	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	12 Laporan	3.600.298.401	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	12 Dokumen	3.600.298.401	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	12 Dokumen	3.600.298.401	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	12 Dokumen	3.600.298.401	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	12 Dokumen	3.600.298.401	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	12 Dokumen	3.600.298.401	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	12 Dokumen	3.600.298.401	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	12 Dokumen	3.600.298.401	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	755 Orang	783 Orang	750 Orang	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	776 Orang	3.600.298.401	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	880 Orang	1425 Orang	1271 Orang	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	1222 Orang	3.600.298.401	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	120 Orang	114 Orang	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	122 Orang	3.600.298.401	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Banyuurip					3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936		3.600.298.401	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8608 Orang	9484 Orang	7758 Orang	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	9276 Orang	3.600.298.401	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	12 Laporan	3.600.298.401	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	12 Dokumen	3.600.298.401	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	12 Dokumen	3.600.298.401	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	12 Dokumen	3.600.298.401	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	12 Dokumen	3.600.298.401	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	12 Dokumen	3.600.298.401	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	12 Dokumen	3.600.298.401	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	12 Dokumen	3.600.298.401	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	755 Orang	783 Orang	750 Orang	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	776 Orang	3.600.298.401	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	880 Orang	1425 Orang	1271 Orang	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	1222 Orang	3.600.298.401	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	120 Orang	114 Orang	3.411.170.616	3.680.352.552	3.447.780.552	-36.609.936	122 Orang	3.600.298.401	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339		52.955.681	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	755 Orang	783 Orang	750 Orang	49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339	776 Orang	52.955.681	Puskesmas Banyuurip
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.219.526	38.503.500	1.260.000	-40.474		1.304.881	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8608 Orang	9484 Orang	7758 Orang	1.219.526	38.503.500	1.260.000	-40.474	9276 Orang	1.304.881	Puskesmas Banyuurip
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.450.600	2.250.000	2.250.000	1.200.600		3.692.142	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	120 Orang	114 Orang	3.450.600	2.250.000	2.250.000	1.200.600	122 Orang	3.692.142	Puskesmas Banyuurip
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					17.507.340	16.272.000	16.720.000	787.340		18.732.854	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	880 Orang	1425 Orang	1271 Orang	17.507.340	16.272.000	16.720.000	787.340	1222 Orang	18.732.854	Puskesmas Banyuurip
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					370.102.899	148.975.800	183.362.800	186.740.099		396.010.102	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	370.102.899	148.975.800	183.362.800	186.740.099	12 Dokumen	396.010.102	Puskesmas Banyuurip
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	990.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	990.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Banyuurip
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					6.039.406	5.108.000	5.948.000	91.406		6.460.957	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.039.406	5.108.000	5.948.000	91.406	12 Dokumen	6.460.957	Puskesmas Banyuurip
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					93.980.775	100.941.000	16.470.000	77.510.775		100.559.429	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	93.980.775	100.941.000	16.470.000	77.510.775	12 Laporan	100.559.429	Puskesmas Banyuurip
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					576.466.093	863.842.384	870.647.884	-294.181.791		600.377.906	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	576.466.093	863.842.384	870.647.884	-294.181.791	12 Dokumen	600.377.906	Puskesmas Banyuurip
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.323.676	1.650.000	1.650.000	673.676		2.455.661	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.323.676	1.650.000	1.650.000	673.676	12 Dokumen	2.455.661	Puskesmas Banyuurip
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					7.777.130	687.500	687.500	7.089.630		8.436.630	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.777.130	687.500	687.500	7.089.630	12 Dokumen	8.436.630	Puskesmas Banyuurip
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					8.217.600	1.100.000	1.100.000	7.117.600		8.792.832	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.217.600	1.100.000	1.100.000	7.117.600	12 Dokumen	8.792.832	Puskesmas Banyuurip
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.072.070	825.000	13.312.200	-10.240.130		3.299.403	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.072.070	825.000	13.312.200	-10.240.130	68%	3.299.403	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.072.070	825.000	13.312.200	-10.240.130		3.299.403	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Banyuurip					3.072.070	825.000	13.312.200	-10.240.130		3.299.403	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.072.070	825.000	13.312.200	-10.240.130	12 Dokumen	3.299.403	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.072.070	825.000	13.312.200	-10.240.130		3.299.403	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.072.070	825.000	13.312.200	-10.240.130	12 Dokumen	3.299.403	Puskesmas Banyuurip
	Puskesmas Benowo					4.820.159.713	5.806.725.408	6.339.614.159	-1.519.454.446		4.905.333.933	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.820.159.713	4.820.159.713	6.339.614.159	-1.519.454.446		4.905.333.933	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.820.159.713	5.806.725.408	6.339.614.159	-1.519.454.446		4.905.333.933	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.427.312.736	3.427.312.736	3.874.477.087	-447.164.351		3.436.988.040	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.427.312.736	3.427.312.736	3.874.477.087	-447.164.351	89,97 %	3.436.988.040	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.427.312.736	3.427.312.736	3.874.477.087	-447.164.351		3.436.988.040	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Benowo					3.427.312.736	3.427.312.736	3.874.477.087	-447.164.351		3.436.988.040	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.427.312.736	3.427.312.736	3.874.477.087	-447.164.351	1 Unit Kerja	3.436.988.040	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.427.312.736	3.427.312.736	3.874.477.087	-447.164.351		3.436.988.040	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.427.312.736	3.427.312.736	3.874.477.087	-447.164.351	1 Unit Kerja	3.436.988.040	Puskesmas Benowo
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.388.446.922	2.378.587.672	2.442.423.172	-1.053.976.250		1.463.620.234	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.388.446.922	2.378.587.672	2.442.423.172	-1.053.976.250	91%	1.463.620.234	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.388.446.922	2.378.587.672	2.442.423.172	-1.053.976.250	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.463.620.234	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.388.446.922	2.378.587.672	2.442.423.172	-1.053.976.250	80%	1.463.620.234	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.388.446.922	2.378.587.672	2.442.423.172	-1.053.976.250	98,70 %	1.463.620.234	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.388.446.922	2.378.587.672	2.442.423.172	-1.053.976.250	82%	1.463.620.234	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.388.446.922	2.378.587.672	2.442.423.172	-1.053.976.250	40%	1.463.620.234	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.388.446.922	2.378.587.672	2.442.423.172	-1.053.976.250	100%	1.463.620.234	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.388.446.922	2.378.587.672	2.442.423.172	-1.053.976.250	95,45%	1.463.620.234	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.388.446.922	2.378.587.672	2.442.423.172	-1.053.976.250	90,75 %	1.463.620.234	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.388.446.922	2.378.587.672	2.442.423.172	-1.053.976.250	0,58 %	1.463.620.234	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.388.446.922	2.378.587.672	2.442.423.172	-1.053.976.250	12%	1.463.620.234	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.388.446.922	2.378.587.672	2.442.423.172	-1.053.976.250	21,6 %	1.463.620.234	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.388.446.922	2.378.587.672	2.442.423.172	-1.053.976.250	1,92 %	1.463.620.234	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.388.446.922	2.378.587.672	2.442.423.172	-1.053.976.250	80%	1.463.620.234	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.388.446.922	2.378.587.672	2.442.423.172	-1.053.976.250	69%	1.463.620.234	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.388.446.922	2.378.587.672	2.442.423.172	-1.053.976.250	100%	1.463.620.234	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750		4.390.860.702	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Benowo					4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750		4.390.860.702	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8495 Orang	9359 Orang	8578 Orang	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	9154 Orang	4.390.860.702	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	12 Laporan	4.390.860.702	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	12 Dokumen	4.390.860.702	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	12 Dokumen	4.390.860.702	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	12 Dokumen	4.390.860.702	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	12 Dokumen	4.390.860.702	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	12 Dokumen	4.390.860.702	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	12 Dokumen	4.390.860.702	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	12 Dokumen	4.390.860.702	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	671 Orang	695 Orang	657 Orang	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	689 Orang	4.390.860.702	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	802 Orang	1300 Orang	1312 Orang	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	1115 Orang	4.390.860.702	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	120 Orang	120 Orang	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	122 Orang	4.390.860.702	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Benowo					4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750		4.390.860.702	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8495 Orang	9359 Orang	8578 Orang	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	9154 Orang	4.390.860.702	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	12 Laporan	4.390.860.702	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	12 Dokumen	4.390.860.702	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	12 Dokumen	4.390.860.702	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	12 Dokumen	4.390.860.702	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	12 Dokumen	4.390.860.702	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	12 Dokumen	4.390.860.702	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	12 Dokumen	4.390.860.702	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	12 Dokumen	4.390.860.702	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	671 Orang	695 Orang	657 Orang	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	689 Orang	4.390.860.702	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	802 Orang	1300 Orang	1312 Orang	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	1115 Orang	4.390.860.702	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	120 Orang	120 Orang	4.165.340.766	7.135.763.016	7.327.269.516	-3.161.928.750	122 Orang	4.390.860.702	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					80.717.551	75.504.000	75.504.000	5.213.551		86.052.981	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	671 Orang	695 Orang	657 Orang	80.717.551	75.504.000	75.504.000	5.213.551	689 Orang	86.052.981	Puskesmas Benowo
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					3.851.136	48.438.000	11.280.000	-7.428.864		4.120.677	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8495 Orang	9359 Orang	8578 Orang	3.851.136	48.438.000	11.280.000	-7.428.864	9154 Orang	4.120.677	Puskesmas Benowo
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					2.683.800	1.800.000	1.800.000	883.800		2.871.666	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	120 Orang	120 Orang	2.683.800	1.800.000	1.800.000	883.800	122 Orang	2.871.666	Puskesmas Benowo
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					17.667.840	17.232.000	13.560.000	4.107.840		18.904.589	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	802 Orang	1300 Orang	1312 Orang	17.667.840	17.232.000	13.560.000	4.107.840	1115 Orang	18.904.589	Puskesmas Benowo
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					342.321.134	583.947.600	615.143.100	-272.821.966		366.283.613	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	342.321.134	583.947.600	615.143.100	-272.821.966	12 Dokumen	366.283.613	Puskesmas Benowo
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					4.428.144	2.130.000	2.700.000	1.728.144		4.737.228	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.428.144	2.130.000	2.700.000	1.728.144	12 Dokumen	4.737.228	Puskesmas Benowo
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12.207.129	11.656.000	11.356.000	851.129		13.059.186	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.207.129	11.656.000	11.356.000	851.129	12 Dokumen	13.059.186	Puskesmas Benowo
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					128.210.931	131.016.000	40.050.000	88.160.931		137.185.696	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	128.210.931	131.016.000	40.050.000	88.160.931	12 Laporan	137.185.696	Puskesmas Benowo
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					767.557.061	1.501.226.572	1.665.392.572	-897.835.511		799.395.328	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	767.557.061	1.501.226.572	1.665.392.572	-897.835.511	12 Dokumen	799.395.328	Puskesmas Benowo
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.975.936	2.750.000	2.750.000	225.936		3.144.969	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.975.936	2.750.000	2.750.000	225.936	12 Dokumen	3.144.969	Puskesmas Benowo
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					15.554.260	687.500	687.500	14.866.760		16.873.261	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15.554.260	687.500	687.500	14.866.760	12 Dokumen	16.873.261	Puskesmas Benowo
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					10.272.000	2.200.000	2.200.000	8.072.000		10.991.040	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.272.000	2.200.000	2.200.000	8.072.000	12 Dokumen	10.991.040	Puskesmas Benowo
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					4.400.055	825.000	22.713.900	-18.313.845		4.725.659	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	4.400.055	825.000	22.713.900	-18.313.845	68%	4.725.659	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.400.055	825.000	22.713.900	-18.313.845		4.725.659	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Benowo					4.400.055	825.000	22.713.900	-18.313.845		4.725.659	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.400.055	825.000	22.713.900	-18.313.845	12 Dokumen	4.725.659	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4.400.055	825.000	22.713.900	-18.313.845		4.725.659	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.400.055	825.000	22.713.900	-18.313.845	12 Dokumen	4.725.659	Puskesmas Benowo
	Puskesmas Bulak Banteng					3.637.157.388	3.744.512.724	4.868.089.256	-1.230.931.868		3.708.162.902	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.637.157.388	3.637.157.388	4.868.089.256	-1.230.931.868		3.708.162.902	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.637.157.388	3.744.512.724	4.868.089.256	-1.230.931.868		3.708.162.902	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.419.384.132	2.419.384.132	3.471.876.464	-1.052.492.332		2.426.214.053	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.419.384.132	2.419.384.132	3.471.876.464	-1.052.492.332	89,97 %	2.426.214.053	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.419.384.132	2.419.384.132	3.471.876.464	-1.052.492.332		2.426.214.053	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Bulak Banteng					2.419.384.132	2.419.384.132	3.471.876.464	-1.052.492.332		2.426.214.053	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.419.384.132	2.419.384.132	3.471.876.464	-1.052.492.332	1 Unit Kerja	2.426.214.053	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.419.384.132	2.419.384.132	3.471.876.464	-1.052.492.332		2.426.214.053	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.419.384.132	2.419.384.132	3.471.876.464	-1.052.492.332	1 Unit Kerja	2.426.214.053	Puskesmas Bulak Banteng
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.214.266.121	1.324.303.592	1.384.603.392	-170.337.271		1.278.182.186	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.214.266.121	1.324.303.592	1.384.603.392	-170.337.271	91%	1.278.182.186	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.214.266.121	1.324.303.592	1.384.603.392	-170.337.271	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.278.182.186	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.214.266.121	1.324.303.592	1.384.603.392	-170.337.271	80%	1.278.182.186	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.214.266.121	1.324.303.592	1.384.603.392	-170.337.271	98,70 %	1.278.182.186	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.214.266.121	1.324.303.592	1.384.603.392	-170.337.271	82%	1.278.182.186	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.214.266.121	1.324.303.592	1.384.603.392	-170.337.271	40%	1.278.182.186	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.214.266.121	1.324.303.592	1.384.603.392	-170.337.271	100%	1.278.182.186	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.214.266.121	1.324.303.592	1.384.603.392	-170.337.271	95,45%	1.278.182.186	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.214.266.121	1.324.303.592	1.384.603.392	-170.337.271	90,75 %	1.278.182.186	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.214.266.121	1.324.303.592	1.384.603.392	-170.337.271	0,58 %	1.278.182.186	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.214.266.121	1.324.303.592	1.384.603.392	-170.337.271	12%	1.278.182.186	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.214.266.121	1.324.303.592	1.384.603.392	-170.337.271	21,6 %	1.278.182.186	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.214.266.121	1.324.303.592	1.384.603.392	-170.337.271	1,92 %	1.278.182.186	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.214.266.121	1.324.303.592	1.384.603.392	-170.337.271	80%	1.278.182.186	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.214.266.121	1.324.303.592	1.384.603.392	-170.337.271	69%	1.278.182.186	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.214.266.121	1.324.303.592	1.384.603.392	-170.337.271	100%	1.278.182.186	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813		3.834.546.558	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Bulak Banteng					3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813		3.834.546.558	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5336 Orang	5879 Orang	5366 Orang	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	5750 Orang	3.834.546.558	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	12 Laporan	3.834.546.558	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	12 Dokumen	3.834.546.558	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	12 Dokumen	3.834.546.558	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	12 Dokumen	3.834.546.558	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	12 Dokumen	3.834.546.558	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	12 Dokumen	3.834.546.558	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	12 Dokumen	3.834.546.558	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	12 Dokumen	3.834.546.558	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	547 Orang	567 Orang	564 Orang	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	562 Orang	3.834.546.558	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	485 Orang	785 Orang	772 Orang	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	673 Orang	3.834.546.558	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	75 Orang	71 Orang	70 Orang	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	72 Orang	3.834.546.558	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Bulak Banteng					3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813		3.834.546.558	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5336 Orang	5879 Orang	5366 Orang	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	5750 Orang	3.834.546.558	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	12 Laporan	3.834.546.558	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	12 Dokumen	3.834.546.558	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	12 Dokumen	3.834.546.558	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	12 Dokumen	3.834.546.558	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	12 Dokumen	3.834.546.558	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	12 Dokumen	3.834.546.558	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	12 Dokumen	3.834.546.558	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	12 Dokumen	3.834.546.558	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	547 Orang	567 Orang	564 Orang	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	562 Orang	3.834.546.558	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	485 Orang	785 Orang	772 Orang	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	673 Orang	3.834.546.558	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	75 Orang	71 Orang	70 Orang	3.642.798.363	3.972.910.776	4.153.810.176	-511.011.813	72 Orang	3.834.546.558	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					24.836.170	14.520.000	14.520.000	10.316.170		26.477.840	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	547 Orang	567 Orang	564 Orang	24.836.170	14.520.000	14.520.000	10.316.170	562 Orang	26.477.840	Puskesmas Bulak Banteng
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.444.176	12.810.000	1.500.000	-55.824		1.545.254	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5336 Orang	5879 Orang	5366 Orang	1.444.176	12.810.000	1.500.000	-55.824	5750 Orang	1.545.254	Puskesmas Bulak Banteng
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.834.000	2.700.000	2.700.000	1.134.000		4.102.380	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	75 Orang	71 Orang	70 Orang	3.834.000	2.700.000	2.700.000	1.134.000	72 Orang	4.102.380	Puskesmas Bulak Banteng
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.695.040	18.072.000	13.860.000	4.835.040		20.003.693	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	485 Orang	785 Orang	772 Orang	18.695.040	18.072.000	13.860.000	4.835.040	673 Orang	20.003.693	Puskesmas Bulak Banteng
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					292.303.853	265.162.800	316.414.600	-24.110.747		312.765.123	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	292.303.853	265.162.800	316.414.600	-24.110.747	12 Dokumen	312.765.123	Puskesmas Bulak Banteng
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2.117.808	930.000	2.550.000	-432.192		2.265.631	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.117.808	930.000	2.550.000	-432.192	12 Dokumen	2.265.631	Puskesmas Bulak Banteng
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					3.629.204	3.574.000	3.514.000	115.204		3.882.523	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.629.204	3.574.000	3.514.000	115.204	12 Dokumen	3.882.523	Puskesmas Bulak Banteng
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					123.941.631	70.377.000	33.180.000	90.761.631		132.617.545	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	123.941.631	70.377.000	33.180.000	90.761.631	12 Laporan	132.617.545	Puskesmas Bulak Banteng
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					737.378.510	934.370.292	994.577.292	-257.198.782		767.964.970	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	737.378.510	934.370.292	994.577.292	-257.198.782	12 Dokumen	767.964.970	Puskesmas Bulak Banteng
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					913.164	550.000	550.000	363.164		965.032	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	913.164	550.000	550.000	363.164	12 Dokumen	965.032	Puskesmas Bulak Banteng
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					3.888.565	687.500	687.500	3.201.065		4.218.315	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.888.565	687.500	687.500	3.201.065	12 Dokumen	4.218.315	Puskesmas Bulak Banteng
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					1.284.000	550.000	550.000	734.000		1.373.880	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.284.000	550.000	550.000	734.000	12 Dokumen	1.373.880	Puskesmas Bulak Banteng
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.507.135	825.000	11.609.400	-8.102.265		3.766.663	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.507.135	825.000	11.609.400	-8.102.265	68%	3.766.663	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.507.135	825.000	11.609.400	-8.102.265		3.766.663	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Bulak Banteng					3.507.135	825.000	11.609.400	-8.102.265		3.766.663	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.507.135	825.000	11.609.400	-8.102.265	12 Dokumen	3.766.663	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.507.135	825.000	11.609.400	-8.102.265		3.766.663	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.507.135	825.000	11.609.400	-8.102.265	12 Dokumen	3.766.663	Puskesmas Bulak Banteng
	Puskesmas Dr. Soetomo					3.693.804.159	4.284.134.124	4.712.615.226	-1.018.811.067		3.762.588.451	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.693.804.159	3.693.804.159	4.712.615.226	-1.018.811.067		3.762.588.451	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.693.804.159	4.284.134.124	4.712.615.226	-1.018.811.067		3.762.588.451	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.594.486.536	2.594.486.536	3.054.556.838	-460.070.302		2.601.810.771	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.594.486.536	2.594.486.536	3.054.556.838	-460.070.302	89,97 %	2.601.810.771	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.594.486.536	2.594.486.536	3.054.556.838	-460.070.302		2.601.810.771	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Dr. Soetomo					2.594.486.536	2.594.486.536	3.054.556.838	-460.070.302		2.601.810.771	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.594.486.536	2.594.486.536	3.054.556.838	-460.070.302	1 Unit Kerja	2.601.810.771	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.594.486.536	2.594.486.536	3.054.556.838	-460.070.302		2.601.810.771	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.594.486.536	2.594.486.536	3.054.556.838	-460.070.302	1 Unit Kerja	2.601.810.771	Puskesmas Dr. Soetomo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.094.969.953	1.688.822.588	1.642.132.588	-547.162.635		1.156.108.282	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.094.969.953	1.688.822.588	1.642.132.588	-547.162.635	91%	1.156.108.282	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.094.969.953	1.688.822.588	1.642.132.588	-547.162.635	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.156.108.282	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.094.969.953	1.688.822.588	1.642.132.588	-547.162.635	80%	1.156.108.282	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.094.969.953	1.688.822.588	1.642.132.588	-547.162.635	98,70 %	1.156.108.282	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.094.969.953	1.688.822.588	1.642.132.588	-547.162.635	82%	1.156.108.282	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.094.969.953	1.688.822.588	1.642.132.588	-547.162.635	40%	1.156.108.282	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.094.969.953	1.688.822.588	1.642.132.588	-547.162.635	100%	1.156.108.282	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.094.969.953	1.688.822.588	1.642.132.588	-547.162.635	95,45%	1.156.108.282	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.094.969.953	1.688.822.588	1.642.132.588	-547.162.635	90,75 %	1.156.108.282	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.094.969.953	1.688.822.588	1.642.132.588	-547.162.635	0,58 %	1.156.108.282	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.094.969.953	1.688.822.588	1.642.132.588	-547.162.635	12%	1.156.108.282	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.094.969.953	1.688.822.588	1.642.132.588	-547.162.635	21,6 %	1.156.108.282	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.094.969.953	1.688.822.588	1.642.132.588	-547.162.635	1,92 %	1.156.108.282	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.094.969.953	1.688.822.588	1.642.132.588	-547.162.635	80%	1.156.108.282	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.094.969.953	1.688.822.588	1.642.132.588	-547.162.635	69%	1.156.108.282	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.094.969.953	1.688.822.588	1.642.132.588	-547.162.635	100%	1.156.108.282	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905		3.468.324.846	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Dr. Soetomo					3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905		3.468.324.846	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7361 Orang	8111 Orang	6840 Orang	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	7933 Orang	3.468.324.846	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	12 Laporan	3.468.324.846	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	12 Dokumen	3.468.324.846	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	12 Dokumen	3.468.324.846	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	12 Dokumen	3.468.324.846	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	12 Dokumen	3.468.324.846	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	12 Dokumen	3.468.324.846	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	12 Dokumen	3.468.324.846	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	12 Dokumen	3.468.324.846	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	616 Orang	640 Orang	641 Orang	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	634 Orang	3.468.324.846	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	791 Orang	1283 Orang	1154 Orang	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	1100 Orang	3.468.324.846	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	118 Orang	110 Orang	103 Orang	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	112 Orang	3.468.324.846	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Dr. Soetomo					3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905		3.468.324.846	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7361 Orang	8111 Orang	6840 Orang	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	7933 Orang	3.468.324.846	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	12 Laporan	3.468.324.846	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	12 Dokumen	3.468.324.846	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	12 Dokumen	3.468.324.846	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	12 Dokumen	3.468.324.846	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	12 Dokumen	3.468.324.846	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	12 Dokumen	3.468.324.846	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	12 Dokumen	3.468.324.846	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	12 Dokumen	3.468.324.846	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	616 Orang	640 Orang	641 Orang	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	634 Orang	3.468.324.846	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	791 Orang	1283 Orang	1154 Orang	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	1100 Orang	3.468.324.846	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	118 Orang	110 Orang	103 Orang	3.284.909.859	5.066.467.764	4.926.397.764	-1.641.487.905	112 Orang	3.468.324.846	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727		74.468.926	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	616 Orang	640 Orang	641 Orang	69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727	634 Orang	74.468.926	Puskesmas Dr. Soetomo
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					5.776.704	16.200.000	2.280.000	3.496.704		6.181.016	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7361 Orang	8111 Orang	6840 Orang	5.776.704	16.200.000	2.280.000	3.496.704	7933 Orang	6.181.016	Puskesmas Dr. Soetomo
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					4.792.500	2.700.000	2.700.000	2.092.500		5.127.975	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	118 Orang	110 Orang	103 Orang	4.792.500	2.700.000	2.700.000	2.092.500	112 Orang	5.127.975	Puskesmas Dr. Soetomo
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					25.115.040	18.192.000	13.860.000	11.255.040		26.873.093	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	791 Orang	1283 Orang	1154 Orang	25.115.040	18.192.000	13.860.000	11.255.040	1100 Orang	26.873.093	Puskesmas Dr. Soetomo
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					251.515.439	148.174.200	196.014.200	55.501.239		269.121.520	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	251.515.439	148.174.200	196.014.200	55.501.239	12 Dokumen	269.121.520	Puskesmas Dr. Soetomo
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	2.100.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	2.100.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Dr. Soetomo
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					9.283.663	7.782.000	8.772.000	511.663		9.931.662	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.283.663	7.782.000	8.772.000	511.663	12 Dokumen	9.931.662	Puskesmas Dr. Soetomo
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					159.848.370	82.224.000	20.130.000	139.718.370		171.037.756	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	159.848.370	82.224.000	20.130.000	139.718.370	12 Laporan	171.037.756	Puskesmas Dr. Soetomo
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					539.079.640	1.338.041.888	1.322.267.888	-783.188.248		561.440.664	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	539.079.640	1.338.041.888	1.322.267.888	-783.188.248	12 Dokumen	561.440.664	Puskesmas Dr. Soetomo
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5.136.548	1.375.000	1.375.000	3.761.548		5.428.303	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.136.548	1.375.000	1.375.000	3.761.548	12 Dokumen	5.428.303	Puskesmas Dr. Soetomo
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					13.998.834	687.500	687.500	13.311.334		15.185.935	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	13.998.834	687.500	687.500	13.311.334	12 Dokumen	15.185.935	Puskesmas Dr. Soetomo
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					10.272.000	1.650.000	1.650.000	8.622.000		10.991.040	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.272.000	1.650.000	1.650.000	8.622.000	12 Dokumen	10.991.040	Puskesmas Dr. Soetomo
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					4.347.670	825.000	15.925.800	-11.578.130		4.669.398	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	4.347.670	825.000	15.925.800	-11.578.130	68%	4.669.398	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.347.670	825.000	15.925.800	-11.578.130		4.669.398	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Dr. Soetomo					4.347.670	825.000	15.925.800	-11.578.130		4.669.398	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.347.670	825.000	15.925.800	-11.578.130	12 Dokumen	4.669.398	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4.347.670	825.000	15.925.800	-11.578.130		4.669.398	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.347.670	825.000	15.925.800	-11.578.130	12 Dokumen	4.669.398	Puskesmas Dr. Soetomo
	Puskesmas Dukuh Kupang					4.685.411.584	5.341.501.141	6.232.850.263	-1.547.438.679		4.755.898.370	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.685.411.584	4.685.411.584	6.232.850.263	-1.547.438.679		4.755.898.370	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.685.411.584	5.341.501.141	6.232.850.263	-1.547.438.679		4.755.898.370	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.619.069.865	3.619.069.865	4.541.378.887	-922.309.022		3.629.286.499	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.619.069.865	3.619.069.865	4.541.378.887	-922.309.022	89,97 %	3.629.286.499	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.619.069.865	3.619.069.865	4.541.378.887	-922.309.022		3.629.286.499	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Dukuh Kupang					3.619.069.865	3.619.069.865	4.541.378.887	-922.309.022		3.629.286.499	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.619.069.865	3.619.069.865	4.541.378.887	-922.309.022	1 Unit Kerja	3.629.286.499	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.619.069.865	3.619.069.865	4.541.378.887	-922.309.022		3.629.286.499	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.619.069.865	3.619.069.865	4.541.378.887	-922.309.022	1 Unit Kerja	3.629.286.499	Puskesmas Dukuh Kupang
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.061.941.664	1.721.606.276	1.674.093.576	-612.151.912		1.121.886.212	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.061.941.664	1.721.606.276	1.674.093.576	-612.151.912	91%	1.121.886.212	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.061.941.664	1.721.606.276	1.674.093.576	-612.151.912	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.121.886.212	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.061.941.664	1.721.606.276	1.674.093.576	-612.151.912	80%	1.121.886.212	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.061.941.664	1.721.606.276	1.674.093.576	-612.151.912	98,70 %	1.121.886.212	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.061.941.664	1.721.606.276	1.674.093.576	-612.151.912	82%	1.121.886.212	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.061.941.664	1.721.606.276	1.674.093.576	-612.151.912	40%	1.121.886.212	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.061.941.664	1.721.606.276	1.674.093.576	-612.151.912	100%	1.121.886.212	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.061.941.664	1.721.606.276	1.674.093.576	-612.151.912	95,45%	1.121.886.212	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.061.941.664	1.721.606.276	1.674.093.576	-612.151.912	90,75 %	1.121.886.212	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.061.941.664	1.721.606.276	1.674.093.576	-612.151.912	0,58 %	1.121.886.212	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.061.941.664	1.721.606.276	1.674.093.576	-612.151.912	12%	1.121.886.212	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.061.941.664	1.721.606.276	1.674.093.576	-612.151.912	21,6 %	1.121.886.212	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.061.941.664	1.721.606.276	1.674.093.576	-612.151.912	1,92 %	1.121.886.212	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.061.941.664	1.721.606.276	1.674.093.576	-612.151.912	80%	1.121.886.212	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.061.941.664	1.721.606.276	1.674.093.576	-612.151.912	69%	1.121.886.212	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.061.941.664	1.721.606.276	1.674.093.576	-612.151.912	100%	1.121.886.212	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736		3.365.658.636	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Dukuh Kupang					3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736		3.365.658.636	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7863 Orang	8664 Orang	4157 Orang	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	8474 Orang	3.365.658.636	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	12 Laporan	3.365.658.636	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	12 Dokumen	3.365.658.636	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	12 Dokumen	3.365.658.636	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	12 Dokumen	3.365.658.636	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	12 Dokumen	3.365.658.636	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	12 Dokumen	3.365.658.636	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	12 Dokumen	3.365.658.636	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	12 Dokumen	3.365.658.636	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	835 Orang	867 Orang	675 Orang	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	859 Orang	3.365.658.636	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	827 Orang	1341 Orang	1215 Orang	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	1150 Orang	3.365.658.636	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	123 Orang	115 Orang	110 Orang	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	117 Orang	3.365.658.636	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Dukuh Kupang					3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736		3.365.658.636	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7863 Orang	8664 Orang	4157 Orang	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	8474 Orang	3.365.658.636	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	12 Laporan	3.365.658.636	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	12 Dokumen	3.365.658.636	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	12 Dokumen	3.365.658.636	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	12 Dokumen	3.365.658.636	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	12 Dokumen	3.365.658.636	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	12 Dokumen	3.365.658.636	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	12 Dokumen	3.365.658.636	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	12 Dokumen	3.365.658.636	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	835 Orang	867 Orang	675 Orang	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	859 Orang	3.365.658.636	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	827 Orang	1341 Orang	1215 Orang	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	1150 Orang	3.365.658.636	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	123 Orang	115 Orang	110 Orang	3.185.824.992	5.164.818.828	5.022.280.728	-1.836.455.736	117 Orang	3.365.658.636	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					80.717.551	92.928.000	92.928.000	-12.210.449		86.052.981	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	835 Orang	867 Orang	675 Orang	80.717.551	92.928.000	92.928.000	-12.210.449	859 Orang	86.052.981	Puskesmas Dukuh Kupang
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					2.759.981	39.645.000	13.380.000	-10.620.019		2.953.152	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7863 Orang	8664 Orang	4157 Orang	2.759.981	39.645.000	13.380.000	-10.620.019	8474 Orang	2.953.152	Puskesmas Dukuh Kupang
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					2.300.400	2.160.000	2.160.000	140.400		2.461.428	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	123 Orang	115 Orang	110 Orang	2.300.400	2.160.000	2.160.000	140.400	117 Orang	2.461.428	Puskesmas Dukuh Kupang
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.951.840	17.712.000	14.520.000	4.431.840		20.278.469	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	827 Orang	1341 Orang	1215 Orang	18.951.840	17.712.000	14.520.000	4.431.840	1150 Orang	20.278.469	Puskesmas Dukuh Kupang
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					305.043.864	256.763.400	300.620.200	4.423.664		326.396.934	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	305.043.864	256.763.400	300.620.200	4.423.664	12 Dokumen	326.396.934	Puskesmas Dukuh Kupang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					3.818.472	1.800.000	2.700.000	1.118.472		4.085.001	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.818.472	1.800.000	2.700.000	1.118.472	12 Dokumen	4.085.001	Puskesmas Dukuh Kupang
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12.592.077	11.656.000	11.476.000	1.116.077		13.471.004	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.592.077	11.656.000	11.476.000	1.116.077	12 Dokumen	13.471.004	Puskesmas Dukuh Kupang
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					118.570.980	61.392.000	6.030.000	112.540.980		126.870.949	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	118.570.980	61.392.000	6.030.000	112.540.980	12 Laporan	126.870.949	Puskesmas Dukuh Kupang
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					498.400.191	1.233.562.376	1.226.291.876	-727.891.685		519.073.831	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	498.400.191	1.233.562.376	1.226.291.876	-727.891.685	12 Dokumen	519.073.831	Puskesmas Dukuh Kupang
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					3.261.300	1.100.000	1.100.000	2.161.300		3.446.542	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.261.300	1.100.000	1.100.000	2.161.300	12 Dokumen	3.446.542	Puskesmas Dukuh Kupang
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					12.443.408	687.500	687.500	11.755.908		13.498.609	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.443.408	687.500	687.500	11.755.908	12 Dokumen	13.498.609	Puskesmas Dukuh Kupang
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					3.081.600	2.200.000	2.200.000	881.600		3.297.312	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.081.600	2.200.000	2.200.000	881.600	12 Dokumen	3.297.312	Puskesmas Dukuh Kupang
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					4.400.055	825.000	17.377.800	-12.977.745		4.725.659	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	4.400.055	825.000	17.377.800	-12.977.745	68%	4.725.659	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.400.055	825.000	17.377.800	-12.977.745		4.725.659	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Dukuh Kupang					4.400.055	825.000	17.377.800	-12.977.745		4.725.659	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.400.055	825.000	17.377.800	-12.977.745	12 Dokumen	4.725.659	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4.400.055	825.000	17.377.800	-12.977.745		4.725.659	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.400.055	825.000	17.377.800	-12.977.745	12 Dokumen	4.725.659	Puskesmas Dukuh Kupang
	Puskesmas Dupak					3.046.591.260	2.841.464.157	3.404.321.057	-357.729.797		3.104.998.152	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.046.591.260	3.046.591.260	3.404.321.057	-357.729.797		3.104.998.152	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.046.591.260	2.841.464.157	3.404.321.057	-357.729.797		3.104.998.152	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.072.994.165	2.072.994.165	2.627.469.365	-554.475.200		2.078.846.228	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.072.994.165	2.072.994.165	2.627.469.365	-554.475.200	89,97 %	2.078.846.228	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.072.994.165	2.072.994.165	2.627.469.365	-554.475.200		2.078.846.228	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Dupak					2.072.994.165	2.072.994.165	2.627.469.365	-554.475.200		2.078.846.228	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.072.994.165	2.072.994.165	2.627.469.365	-554.475.200	1 Unit Kerja	2.078.846.228	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.072.994.165	2.072.994.165	2.627.469.365	-554.475.200		2.078.846.228	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.072.994.165	2.072.994.165	2.627.469.365	-554.475.200	1 Unit Kerja	2.078.846.228	Puskesmas Dupak
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					970.525.025	767.644.992	770.980.992	199.544.033		1.022.852.521	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	970.525.025	767.644.992	770.980.992	199.544.033	91%	1.022.852.521	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	970.525.025	767.644.992	770.980.992	199.544.033	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.022.852.521	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	970.525.025	767.644.992	770.980.992	199.544.033	80%	1.022.852.521	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	970.525.025	767.644.992	770.980.992	199.544.033	98,70 %	1.022.852.521	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	970.525.025	767.644.992	770.980.992	199.544.033	82%	1.022.852.521	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	970.525.025	767.644.992	770.980.992	199.544.033	40%	1.022.852.521	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	970.525.025	767.644.992	770.980.992	199.544.033	100%	1.022.852.521	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	970.525.025	767.644.992	770.980.992	199.544.033	95,45%	1.022.852.521	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	970.525.025	767.644.992	770.980.992	199.544.033	90,75 %	1.022.852.521	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	970.525.025	767.644.992	770.980.992	199.544.033	0,58 %	1.022.852.521	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	970.525.025	767.644.992	770.980.992	199.544.033	12%	1.022.852.521	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	970.525.025	767.644.992	770.980.992	199.544.033	21,6 %	1.022.852.521	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	970.525.025	767.644.992	770.980.992	199.544.033	1,92 %	1.022.852.521	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	970.525.025	767.644.992	770.980.992	199.544.033	80%	1.022.852.521	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	970.525.025	767.644.992	770.980.992	199.544.033	69%	1.022.852.521	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	970.525.025	767.644.992	770.980.992	199.544.033	100%	1.022.852.521	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099		3.068.557.563	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Dupak					2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099		3.068.557.563	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3788 Orang	4173 Orang	2925 Orang	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	4082 Orang	3.068.557.563	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	12 Laporan	3.068.557.563	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	12 Dokumen	3.068.557.563	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	12 Dokumen	3.068.557.563	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	12 Dokumen	3.068.557.563	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	12 Dokumen	3.068.557.563	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	12 Dokumen	3.068.557.563	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	12 Dokumen	3.068.557.563	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	12 Dokumen	3.068.557.563	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang	304 Orang	312 Orang	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	301 Orang	3.068.557.563	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	316 Orang	511 Orang	458 Orang	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	438 Orang	3.068.557.563	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	44 Orang	41 Orang	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	45 Orang	3.068.557.563	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Dupak					2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099		3.068.557.563	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3788 Orang	4173 Orang	2925 Orang	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	4082 Orang	3.068.557.563	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	12 Laporan	3.068.557.563	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	12 Dokumen	3.068.557.563	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	12 Dokumen	3.068.557.563	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	12 Dokumen	3.068.557.563	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	12 Dokumen	3.068.557.563	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	12 Dokumen	3.068.557.563	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	12 Dokumen	3.068.557.563	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	12 Dokumen	3.068.557.563	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang	304 Orang	312 Orang	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	301 Orang	3.068.557.563	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	316 Orang	511 Orang	458 Orang	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	438 Orang	3.068.557.563	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	44 Orang	41 Orang	2.911.575.075	2.302.934.976	2.312.942.976	598.632.099	45 Orang	3.068.557.563	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170		26.477.840	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang	304 Orang	312 Orang	24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170	301 Orang	26.477.840	Puskesmas Dupak
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.283.712	12.154.500	1.260.000	23.712		1.373.559	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3788 Orang	4173 Orang	2925 Orang	1.283.712	12.154.500	1.260.000	23.712	4082 Orang	1.373.559	Puskesmas Dupak
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					2.492.100	1.080.000	1.080.000	1.412.100		2.666.547	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	44 Orang	41 Orang	2.492.100	1.080.000	1.080.000	1.412.100	45 Orang	2.666.547	Puskesmas Dupak
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.374.040	16.512.000	13.740.000	4.634.040		19.660.223	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	316 Orang	511 Orang	458 Orang	18.374.040	16.512.000	13.740.000	4.634.040	438 Orang	19.660.223	Puskesmas Dupak
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					308.792.193	204.817.800	250.486.300	58.305.893		330.407.647	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	308.792.193	204.817.800	250.486.300	58.305.893	12 Dokumen	330.407.647	Puskesmas Dupak
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1.572.312	810.000	2.670.000	-1.097.688		1.682.059	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.572.312	810.000	2.670.000	-1.097.688	12 Dokumen	1.682.059	Puskesmas Dupak
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					2.891.387	2.614.000	2.614.000	277.387		3.093.206	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.891.387	2.614.000	2.614.000	277.387	12 Dokumen	3.093.206	Puskesmas Dupak
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					58.627.440	32.601.000	5.190.000	53.437.440		62.731.361	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	58.627.440	32.601.000	5.190.000	53.437.440	12 Laporan	62.731.361	Puskesmas Dupak
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					545.174.482	471.926.192	468.811.192	76.363.290		567.788.320	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	545.174.482	471.926.192	468.811.192	76.363.290	12 Dokumen	567.788.320	Puskesmas Dupak
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.565.424	660.000	660.000	905.424		1.654.340	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.565.424	660.000	660.000	905.424	12 Dokumen	1.654.340	Puskesmas Dupak
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					3.888.565	687.500	687.500	3.201.065		4.218.315	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.888.565	687.500	687.500	3.201.065	12 Dokumen	4.218.315	Puskesmas Dupak
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					1.027.200	550.000	550.000	477.200		1.099.104	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.027.200	550.000	550.000	477.200	12 Dokumen	1.099.104	Puskesmas Dupak
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.072.070	825.000	5.870.700	-2.798.630		3.299.403	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.072.070	825.000	5.870.700	-2.798.630	68%	3.299.403	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.072.070	825.000	5.870.700	-2.798.630		3.299.403	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Dupak					3.072.070	825.000	5.870.700	-2.798.630		3.299.403	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.072.070	825.000	5.870.700	-2.798.630	12 Dokumen	3.299.403	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.072.070	825.000	5.870.700	-2.798.630		3.299.403	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.072.070	825.000	5.870.700	-2.798.630	12 Dokumen	3.299.403	Puskesmas Dupak
	Puskesmas Gading					5.650.573.529	8.604.099.661	9.804.521.274	-4.153.947.745		5.743.850.657	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.650.573.529	5.650.573.529	9.804.521.274	-4.153.947.745		5.743.850.657	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					5.650.573.529	8.604.099.661	9.804.521.274	-4.153.947.745		5.743.850.657	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.128.609.353	4.128.609.353	5.109.756.366	-981.147.013		4.140.264.417	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	4.128.609.353	4.128.609.353	5.109.756.366	-981.147.013	89,97 %	4.140.264.417	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					4.128.609.353	4.128.609.353	5.109.756.366	-981.147.013		4.140.264.417	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Gading					4.128.609.353	4.128.609.353	5.109.756.366	-981.147.013		4.140.264.417	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.128.609.353	4.128.609.353	5.109.756.366	-981.147.013	1 Unit Kerja	4.140.264.417	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					4.128.609.353	4.128.609.353	5.109.756.366	-981.147.013		4.140.264.417	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.128.609.353	4.128.609.353	5.109.756.366	-981.147.013	1 Unit Kerja	4.140.264.417	Puskesmas Gading
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.516.851.146	4.474.665.308	4.681.017.108	-3.164.165.962		1.598.094.846	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.516.851.146	4.474.665.308	4.681.017.108	-3.164.165.962	91%	1.598.094.846	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.516.851.146	4.474.665.308	4.681.017.108	-3.164.165.962	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.598.094.846	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.516.851.146	4.474.665.308	4.681.017.108	-3.164.165.962	80%	1.598.094.846	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.516.851.146	4.474.665.308	4.681.017.108	-3.164.165.962	98,70 %	1.598.094.846	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.516.851.146	4.474.665.308	4.681.017.108	-3.164.165.962	82%	1.598.094.846	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.516.851.146	4.474.665.308	4.681.017.108	-3.164.165.962	40%	1.598.094.846	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.516.851.146	4.474.665.308	4.681.017.108	-3.164.165.962	100%	1.598.094.846	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.516.851.146	4.474.665.308	4.681.017.108	-3.164.165.962	95,45%	1.598.094.846	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.516.851.146	4.474.665.308	4.681.017.108	-3.164.165.962	90,75 %	1.598.094.846	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.516.851.146	4.474.665.308	4.681.017.108	-3.164.165.962	0,58 %	1.598.094.846	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.516.851.146	4.474.665.308	4.681.017.108	-3.164.165.962	12%	1.598.094.846	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.516.851.146	4.474.665.308	4.681.017.108	-3.164.165.962	21,6 %	1.598.094.846	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.516.851.146	4.474.665.308	4.681.017.108	-3.164.165.962	1,92 %	1.598.094.846	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.516.851.146	4.474.665.308	4.681.017.108	-3.164.165.962	80%	1.598.094.846	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.516.851.146	4.474.665.308	4.681.017.108	-3.164.165.962	69%	1.598.094.846	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.516.851.146	4.474.665.308	4.681.017.108	-3.164.165.962	100%	1.598.094.846	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886		4.794.284.538	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Gading					4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886		4.794.284.538	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12613 Orang	13898 Orang	12120 Orang	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	13593 Orang	4.794.284.538	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	12 Laporan	4.794.284.538	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	12 Dokumen	4.794.284.538	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	12 Dokumen	4.794.284.538	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	12 Dokumen	4.794.284.538	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	12 Dokumen	4.794.284.538	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	12 Dokumen	4.794.284.538	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	12 Dokumen	4.794.284.538	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	12 Dokumen	4.794.284.538	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1043 Orang	1083 Orang	1026 Orang	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	1073 Orang	4.794.284.538	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1276 Orang	2071 Orang	1911 Orang	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	1775 Orang	4.794.284.538	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	132 Orang	179 Orang	173 Orang	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	181 Orang	4.794.284.538	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Gading					4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886		4.794.284.538	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12613 Orang	13898 Orang	12120 Orang	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	13593 Orang	4.794.284.538	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	12 Laporan	4.794.284.538	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	12 Dokumen	4.794.284.538	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	12 Dokumen	4.794.284.538	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	12 Dokumen	4.794.284.538	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	12 Dokumen	4.794.284.538	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	12 Dokumen	4.794.284.538	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	12 Dokumen	4.794.284.538	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	12 Dokumen	4.794.284.538	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1043 Orang	1083 Orang	1026 Orang	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	1073 Orang	4.794.284.538	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1276 Orang	2071 Orang	1911 Orang	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	1775 Orang	4.794.284.538	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	132 Orang	179 Orang	173 Orang	4.550.553.438	13.423.995.924	14.043.051.324	-9.492.497.886	181 Orang	4.794.284.538	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1043 Orang	1083 Orang	1026 Orang	69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727	1073 Orang	74.468.926	Puskesmas Gading
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.219.526	6.015.000	3.030.000	-1.810.474		1.304.881	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12613 Orang	13898 Orang	12120 Orang	1.219.526	6.015.000	3.030.000	-1.810.474	13593 Orang	1.304.881	Puskesmas Gading
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.738.150	1.800.000	1.800.000	1.938.150		3.999.821	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	132 Orang	179 Orang	173 Orang	3.738.150	1.800.000	1.800.000	1.938.150	181 Orang	3.999.821	Puskesmas Gading
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					23.189.040	19.272.000	16.870.000	6.319.040		24.812.273	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1276 Orang	2071 Orang	1911 Orang	23.189.040	19.272.000	16.870.000	6.319.040	1775 Orang	24.812.273	Puskesmas Gading
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					411.783.070	955.394.400	1.183.065.200	-771.282.130		440.607.885	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	411.783.070	955.394.400	1.183.065.200	-771.282.130	12 Dokumen	440.607.885	Puskesmas Gading
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2.214.072	960.000	2.700.000	-485.928		2.368.614	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.214.072	960.000	2.700.000	-485.928	12 Dokumen	2.368.614	Puskesmas Gading
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					9.444.058	8.412.000	7.872.000	1.572.058		10.103.253	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.444.058	8.412.000	7.872.000	1.572.058	12 Dokumen	10.103.253	Puskesmas Gading
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					111.203.388	29.706.000	3.210.000	107.993.388		118.987.625	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	111.203.388	29.706.000	3.210.000	107.993.388	12 Laporan	118.987.625	Puskesmas Gading
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					867.595.035	3.379.697.408	3.389.061.408	-2.521.466.373		903.582.877	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	867.595.035	3.379.697.408	3.389.061.408	-2.521.466.373	12 Dokumen	903.582.877	Puskesmas Gading
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					4.198.924	1.375.000	1.375.000	2.823.924		4.437.423	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.198.924	1.375.000	1.375.000	2.823.924	12 Dokumen	4.437.423	Puskesmas Gading
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					9.332.556	687.500	687.500	8.645.056		10.123.956	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.332.556	687.500	687.500	8.645.056	12 Dokumen	10.123.956	Puskesmas Gading
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					3.081.600	1.650.000	1.650.000	1.431.600		3.297.312	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.081.600	1.650.000	1.650.000	1.431.600	12 Dokumen	3.297.312	Puskesmas Gading
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					5.113.030	825.000	13.747.800	-8.634.770		5.491.394	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	5.113.030	825.000	13.747.800	-8.634.770	68%	5.491.394	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5.113.030	825.000	13.747.800	-8.634.770		5.491.394	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Gading					5.113.030	825.000	13.747.800	-8.634.770		5.491.394	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.113.030	825.000	13.747.800	-8.634.770	12 Dokumen	5.491.394	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					5.113.030	825.000	13.747.800	-8.634.770		5.491.394	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.113.030	825.000	13.747.800	-8.634.770	12 Dokumen	5.491.394	Puskesmas Gading
	Puskesmas Gayungan					3.758.140.919	4.049.602.187	4.242.977.173	-484.836.254		3.821.996.661	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.758.140.919	3.758.140.919	4.242.977.173	-484.836.254		3.821.996.661	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.758.140.919	4.049.602.187	4.242.977.173	-484.836.254		3.821.996.661	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.743.139.491	2.743.139.491	3.024.265.877	-281.126.386		2.750.883.374	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.743.139.491	2.743.139.491	3.024.265.877	-281.126.386	89,97 %	2.750.883.374	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.743.139.491	2.743.139.491	3.024.265.877	-281.126.386		2.750.883.374	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Gayungan					2.743.139.491	2.743.139.491	3.024.265.877	-281.126.386		2.750.883.374	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.743.139.491	2.743.139.491	3.024.265.877	-281.126.386	1 Unit Kerja	2.750.883.374	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.743.139.491	2.743.139.491	3.024.265.877	-281.126.386		2.750.883.374	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.743.139.491	2.743.139.491	3.024.265.877	-281.126.386	1 Unit Kerja	2.750.883.374	Puskesmas Gayungan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.012.120.698	1.305.637.696	1.200.144.396	-188.023.698		1.068.019.383	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.012.120.698	1.305.637.696	1.200.144.396	-188.023.698	91%	1.068.019.383	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.012.120.698	1.305.637.696	1.200.144.396	-188.023.698	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.068.019.383	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.012.120.698	1.305.637.696	1.200.144.396	-188.023.698	80%	1.068.019.383	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.012.120.698	1.305.637.696	1.200.144.396	-188.023.698	98,70 %	1.068.019.383	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.012.120.698	1.305.637.696	1.200.144.396	-188.023.698	82%	1.068.019.383	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.012.120.698	1.305.637.696	1.200.144.396	-188.023.698	40%	1.068.019.383	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.012.120.698	1.305.637.696	1.200.144.396	-188.023.698	100%	1.068.019.383	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.012.120.698	1.305.637.696	1.200.144.396	-188.023.698	95,45%	1.068.019.383	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.012.120.698	1.305.637.696	1.200.144.396	-188.023.698	90,75 %	1.068.019.383	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.012.120.698	1.305.637.696	1.200.144.396	-188.023.698	0,58 %	1.068.019.383	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.012.120.698	1.305.637.696	1.200.144.396	-188.023.698	12%	1.068.019.383	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.012.120.698	1.305.637.696	1.200.144.396	-188.023.698	21,6 %	1.068.019.383	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.012.120.698	1.305.637.696	1.200.144.396	-188.023.698	1,92 %	1.068.019.383	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.012.120.698	1.305.637.696	1.200.144.396	-188.023.698	80%	1.068.019.383	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.012.120.698	1.305.637.696	1.200.144.396	-188.023.698	69%	1.068.019.383	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.012.120.698	1.305.637.696	1.200.144.396	-188.023.698	100%	1.068.019.383	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094		3.204.058.149	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Gayungan					3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094		3.204.058.149	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5779 Orang	6367 Orang	5478 Orang	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	6227 Orang	3.204.058.149	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	12 Laporan	3.204.058.149	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	12 Dokumen	3.204.058.149	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	12 Dokumen	3.204.058.149	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	12 Dokumen	3.204.058.149	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	12 Dokumen	3.204.058.149	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	12 Dokumen	3.204.058.149	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	12 Dokumen	3.204.058.149	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	12 Dokumen	3.204.058.149	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	545 Orang	565 Orang	508 Orang	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	560 Orang	3.204.058.149	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	604 Orang	978 Orang	897 Orang	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	839 Orang	3.204.058.149	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	89 Orang	85 Orang	80 Orang	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	86 Orang	3.204.058.149	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Gayungan					3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094		3.204.058.149	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5779 Orang	6367 Orang	5478 Orang	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	6227 Orang	3.204.058.149	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	12 Laporan	3.204.058.149	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	12 Dokumen	3.204.058.149	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	12 Dokumen	3.204.058.149	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	12 Dokumen	3.204.058.149	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	12 Dokumen	3.204.058.149	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	12 Dokumen	3.204.058.149	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	12 Dokumen	3.204.058.149	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	12 Dokumen	3.204.058.149	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	545 Orang	565 Orang	508 Orang	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	560 Orang	3.204.058.149	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	604 Orang	978 Orang	897 Orang	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	839 Orang	3.204.058.149	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	89 Orang	85 Orang	80 Orang	3.036.362.094	3.916.913.088	3.600.433.188	-564.071.094	86 Orang	3.204.058.149	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					80.717.551	46.464.000	46.464.000	34.253.551		86.052.981	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	545 Orang	565 Orang	508 Orang	80.717.551	46.464.000	46.464.000	34.253.551	560 Orang	86.052.981	Puskesmas Gayungan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					3.337.651	54.315.000	8.580.000	-5.242.349		3.571.253	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5779 Orang	6367 Orang	5478 Orang	3.337.651	54.315.000	8.580.000	-5.242.349	6227 Orang	3.571.253	Puskesmas Gayungan
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					2.587.950	4.860.000	4.860.000	-2.272.050		2.769.107	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	89 Orang	85 Orang	80 Orang	2.587.950	4.860.000	4.860.000	-2.272.050	86 Orang	2.769.107	Puskesmas Gayungan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.951.840	17.712.000	13.920.000	5.031.840		20.278.469	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	604 Orang	978 Orang	897 Orang	18.951.840	17.712.000	13.920.000	5.031.840	839 Orang	20.278.469	Puskesmas Gayungan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					231.678.418	362.018.400	413.498.100	-181.819.682		247.895.907	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	231.678.418	362.018.400	413.498.100	-181.819.682	12 Dokumen	247.895.907	Puskesmas Gayungan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.620.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.620.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Gayungan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					11.116.443	30.648.000	11.476.000	-359.557		11.892.371	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11.116.443	30.648.000	11.476.000	-359.557	12 Dokumen	11.892.371	Puskesmas Gayungan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					129.013.431	84.372.000	15.450.000	113.563.431		138.044.371	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	129.013.431	84.372.000	15.450.000	113.563.431	12 Laporan	138.044.371	Puskesmas Gayungan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					516.338.996	699.255.796	678.823.796	-162.484.800		537.756.738	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	516.338.996	699.255.796	678.823.796	-162.484.800	12 Dokumen	537.756.738	Puskesmas Gayungan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5.136.548	1.925.000	1.925.000	3.211.548		5.428.303	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.136.548	1.925.000	1.925.000	3.211.548	12 Dokumen	5.428.303	Puskesmas Gayungan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					10.887.982	687.500	687.500	10.200.482		11.811.283	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.887.982	687.500	687.500	10.200.482	12 Dokumen	11.811.283	Puskesmas Gayungan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					2.054.400	1.760.000	1.760.000	294.400		2.198.208	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.054.400	1.760.000	1.760.000	294.400	12 Dokumen	2.198.208	Puskesmas Gayungan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.880.730	825.000	18.566.900	-15.686.170		3.093.904	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	2.880.730	825.000	18.566.900	-15.686.170	68%	3.093.904	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.880.730	825.000	18.566.900	-15.686.170		3.093.904	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Gayungan					2.880.730	825.000	18.566.900	-15.686.170		3.093.904	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.880.730	825.000	18.566.900	-15.686.170	12 Dokumen	3.093.904	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					2.880.730	825.000	18.566.900	-15.686.170		3.093.904	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.880.730	825.000	18.566.900	-15.686.170	12 Dokumen	3.093.904	Puskesmas Gayungan
	Puskesmas Gundih					2.989.076.586	3.376.810.802	3.702.878.240	-713.801.654		3.051.222.875	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.989.076.586	2.989.076.586	3.702.878.240	-713.801.654		3.051.222.875	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.989.076.586	3.376.810.802	3.702.878.240	-713.801.654		3.051.222.875	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.960.676.882	1.960.676.882	2.310.997.120	-350.320.238		1.966.211.872	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	1.960.676.882	1.960.676.882	2.310.997.120	-350.320.238	89,97 %	1.966.211.872	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1.960.676.882	1.960.676.882	2.310.997.120	-350.320.238		1.966.211.872	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Gundih					1.960.676.882	1.960.676.882	2.310.997.120	-350.320.238		1.966.211.872	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.960.676.882	1.960.676.882	2.310.997.120	-350.320.238	1 Unit Kerja	1.966.211.872	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.960.676.882	1.960.676.882	2.310.997.120	-350.320.238		1.966.211.872	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.960.676.882	1.960.676.882	2.310.997.120	-350.320.238	1 Unit Kerja	1.966.211.872	Puskesmas Gundih
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.024.765.009	1.415.308.920	1.378.205.920	-353.440.911		1.081.107.341	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.024.765.009	1.415.308.920	1.378.205.920	-353.440.911	91%	1.081.107.341	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.024.765.009	1.415.308.920	1.378.205.920	-353.440.911	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.081.107.341	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.024.765.009	1.415.308.920	1.378.205.920	-353.440.911	80%	1.081.107.341	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.024.765.009	1.415.308.920	1.378.205.920	-353.440.911	98,70 %	1.081.107.341	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.024.765.009	1.415.308.920	1.378.205.920	-353.440.911	82%	1.081.107.341	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.024.765.009	1.415.308.920	1.378.205.920	-353.440.911	40%	1.081.107.341	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.024.765.009	1.415.308.920	1.378.205.920	-353.440.911	100%	1.081.107.341	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.024.765.009	1.415.308.920	1.378.205.920	-353.440.911	95,45%	1.081.107.341	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.024.765.009	1.415.308.920	1.378.205.920	-353.440.911	90,75 %	1.081.107.341	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.024.765.009	1.415.308.920	1.378.205.920	-353.440.911	0,58 %	1.081.107.341	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.024.765.009	1.415.308.920	1.378.205.920	-353.440.911	12%	1.081.107.341	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.024.765.009	1.415.308.920	1.378.205.920	-353.440.911	21,6 %	1.081.107.341	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.024.765.009	1.415.308.920	1.378.205.920	-353.440.911	1,92 %	1.081.107.341	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.024.765.009	1.415.308.920	1.378.205.920	-353.440.911	80%	1.081.107.341	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.024.765.009	1.415.308.920	1.378.205.920	-353.440.911	69%	1.081.107.341	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.024.765.009	1.415.308.920	1.378.205.920	-353.440.911	100%	1.081.107.341	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733		3.243.322.023	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Gundih					3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733		3.243.322.023	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5482 Orang	6039 Orang	2671 Orang	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	5907 Orang	3.243.322.023	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	12 Laporan	3.243.322.023	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	12 Dokumen	3.243.322.023	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	12 Dokumen	3.243.322.023	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	12 Dokumen	3.243.322.023	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	12 Dokumen	3.243.322.023	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	12 Dokumen	3.243.322.023	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	12 Dokumen	3.243.322.023	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	12 Dokumen	3.243.322.023	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	485 Orang	502 Orang	479 Orang	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	497 Orang	3.243.322.023	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	568 Orang	920 Orang	816 Orang	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	789 Orang	3.243.322.023	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang	78 Orang	73 Orang	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	79 Orang	3.243.322.023	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Gundih					3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733		3.243.322.023	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5482 Orang	6039 Orang	2671 Orang	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	5907 Orang	3.243.322.023	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	12 Laporan	3.243.322.023	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	12 Dokumen	3.243.322.023	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	12 Dokumen	3.243.322.023	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	12 Dokumen	3.243.322.023	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	12 Dokumen	3.243.322.023	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	12 Dokumen	3.243.322.023	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	12 Dokumen	3.243.322.023	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	12 Dokumen	3.243.322.023	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	485 Orang	502 Orang	479 Orang	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	497 Orang	3.243.322.023	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	568 Orang	920 Orang	816 Orang	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	789 Orang	3.243.322.023	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang	78 Orang	73 Orang	3.074.295.027	4.245.926.760	4.134.617.760	-1.060.322.733	79 Orang	3.243.322.023	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.672.339	46.464.000	52.272.000	-2.599.661		52.955.681	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	485 Orang	502 Orang	479 Orang	49.672.339	46.464.000	52.272.000	-2.599.661	497 Orang	52.955.681	Puskesmas Gundih
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					2.053.939	15.660.000	9.690.000	-7.636.061		2.197.694	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5482 Orang	6039 Orang	2671 Orang	2.053.939	15.660.000	9.690.000	-7.636.061	5907 Orang	2.197.694	Puskesmas Gundih
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.834.000	3.600.000	3.600.000	234.000		4.102.380	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang	78 Orang	73 Orang	3.834.000	3.600.000	3.600.000	234.000	79 Orang	4.102.380	Puskesmas Gundih
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					17.796.240	16.452.000	13.740.000	4.056.240		19.041.977	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	568 Orang	920 Orang	816 Orang	17.796.240	16.452.000	13.740.000	4.056.240	789 Orang	19.041.977	Puskesmas Gundih
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					265.670.418	272.092.800	324.450.800	-58.780.382		284.267.347	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	265.670.418	272.092.800	324.450.800	-58.780.382	12 Dokumen	284.267.347	Puskesmas Gundih
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.170.000	2.520.000	-2.220.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.170.000	2.520.000	-2.220.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Gundih
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					5.782.774	25.780.000	5.198.000	584.774		6.186.412	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.782.774	25.780.000	5.198.000	584.774	12 Dokumen	6.186.412	Puskesmas Gundih
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					134.630.931	79.026.000	22.290.000	112.340.931		144.055.096	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	134.630.931	79.026.000	22.290.000	112.340.931	12 Laporan	144.055.096	Puskesmas Gundih
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					535.460.562	952.726.620	942.107.620	-406.647.058		557.671.466	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	535.460.562	952.726.620	942.107.620	-406.647.058	12 Dokumen	557.671.466	Puskesmas Gundih
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.288.214	550.000	550.000	738.214		1.361.384	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.288.214	550.000	550.000	738.214	12 Dokumen	1.361.384	Puskesmas Gundih
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					6.221.704	687.500	687.500	5.534.204		6.749.304	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.221.704	687.500	687.500	5.534.204	12 Dokumen	6.749.304	Puskesmas Gundih
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					2.054.400	1.100.000	1.100.000	954.400		2.198.208	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.054.400	1.100.000	1.100.000	954.400	12 Dokumen	2.198.208	Puskesmas Gundih
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.634.695	825.000	13.675.200	-10.040.505		3.903.662	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.634.695	825.000	13.675.200	-10.040.505	68%	3.903.662	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.634.695	825.000	13.675.200	-10.040.505		3.903.662	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Gundih					3.634.695	825.000	13.675.200	-10.040.505		3.903.662	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.634.695	825.000	13.675.200	-10.040.505	12 Dokumen	3.903.662	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.634.695	825.000	13.675.200	-10.040.505		3.903.662	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.634.695	825.000	13.675.200	-10.040.505	12 Dokumen	3.903.662	Puskesmas Gundih
	Puskesmas Gunung Anyar					3.838.384.910	3.921.662.328	5.031.849.022	-1.193.464.112		3.908.439.321	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.838.384.910	3.838.384.910	5.031.849.022	-1.193.464.112		3.908.439.321	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.838.384.910	3.921.662.328	5.031.849.022	-1.193.464.112		3.908.439.321	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.718.665.232	2.718.665.232	3.867.446.126	-1.148.780.894		2.726.340.024	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.718.665.232	2.718.665.232	3.867.446.126	-1.148.780.894	89,97 %	2.726.340.024	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.718.665.232	2.718.665.232	3.867.446.126	-1.148.780.894		2.726.340.024	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Gunung Anyar					2.718.665.232	2.718.665.232	3.867.446.126	-1.148.780.894		2.726.340.024	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.718.665.232	2.718.665.232	3.867.446.126	-1.148.780.894	1 Unit Kerja	2.726.340.024	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.718.665.232	2.718.665.232	3.867.446.126	-1.148.780.894		2.726.340.024	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.718.665.232	2.718.665.232	3.867.446.126	-1.148.780.894	1 Unit Kerja	2.726.340.024	Puskesmas Gunung Anyar
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.116.212.543	1.202.172.096	1.147.133.996	-30.921.453		1.178.332.634	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.116.212.543	1.202.172.096	1.147.133.996	-30.921.453	91%	1.178.332.634	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.116.212.543	1.202.172.096	1.147.133.996	-30.921.453	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.178.332.634	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.116.212.543	1.202.172.096	1.147.133.996	-30.921.453	80%	1.178.332.634	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.116.212.543	1.202.172.096	1.147.133.996	-30.921.453	98,70 %	1.178.332.634	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.116.212.543	1.202.172.096	1.147.133.996	-30.921.453	82%	1.178.332.634	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.116.212.543	1.202.172.096	1.147.133.996	-30.921.453	40%	1.178.332.634	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.116.212.543	1.202.172.096	1.147.133.996	-30.921.453	100%	1.178.332.634	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.116.212.543	1.202.172.096	1.147.133.996	-30.921.453	95,45%	1.178.332.634	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.116.212.543	1.202.172.096	1.147.133.996	-30.921.453	90,75 %	1.178.332.634	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.116.212.543	1.202.172.096	1.147.133.996	-30.921.453	0,58 %	1.178.332.634	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.116.212.543	1.202.172.096	1.147.133.996	-30.921.453	12%	1.178.332.634	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.116.212.543	1.202.172.096	1.147.133.996	-30.921.453	21,6 %	1.178.332.634	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.116.212.543	1.202.172.096	1.147.133.996	-30.921.453	1,92 %	1.178.332.634	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.116.212.543	1.202.172.096	1.147.133.996	-30.921.453	80%	1.178.332.634	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.116.212.543	1.202.172.096	1.147.133.996	-30.921.453	69%	1.178.332.634	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.116.212.543	1.202.172.096	1.147.133.996	-30.921.453	100%	1.178.332.634	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359		3.534.997.902	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Gunung Anyar					3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359		3.534.997.902	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8195 Orang	9029 Orang	8028 Orang	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	8831 Orang	3.534.997.902	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	12 Laporan	3.534.997.902	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	12 Dokumen	3.534.997.902	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	12 Dokumen	3.534.997.902	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	12 Dokumen	3.534.997.902	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	12 Dokumen	3.534.997.902	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	12 Dokumen	3.534.997.902	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	12 Dokumen	3.534.997.902	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	12 Dokumen	3.534.997.902	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	785 Orang	816 Orang	687 Orang	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	808 Orang	3.534.997.902	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	818 Orang	1326 Orang	1272 Orang	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	1137 Orang	3.534.997.902	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	127 Orang	119 Orang	116 Orang	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	121 Orang	3.534.997.902	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Gunung Anyar					3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359		3.534.997.902	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8195 Orang	9029 Orang	8028 Orang	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	8831 Orang	3.534.997.902	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	12 Laporan	3.534.997.902	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	12 Dokumen	3.534.997.902	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	12 Dokumen	3.534.997.902	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	12 Dokumen	3.534.997.902	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	12 Dokumen	3.534.997.902	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	12 Dokumen	3.534.997.902	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	12 Dokumen	3.534.997.902	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	12 Dokumen	3.534.997.902	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	785 Orang	816 Orang	687 Orang	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	808 Orang	3.534.997.902	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	818 Orang	1326 Orang	1272 Orang	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	1137 Orang	3.534.997.902	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	127 Orang	119 Orang	116 Orang	3.348.637.629	3.606.516.288	3.441.401.988	-92.764.359	121 Orang	3.534.997.902	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					80.717.551	92.928.000	92.928.000	-12.210.449		86.052.981	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	785 Orang	816 Orang	687 Orang	80.717.551	92.928.000	92.928.000	-12.210.449	808 Orang	86.052.981	Puskesmas Gunung Anyar
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.925.568	24.375.000	3.180.000	-1.254.432		2.060.339	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8195 Orang	9029 Orang	8028 Orang	1.925.568	24.375.000	3.180.000	-1.254.432	8831 Orang	2.060.339	Puskesmas Gunung Anyar
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					5.942.700	2.700.000	2.700.000	3.242.700		6.358.689	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	127 Orang	119 Orang	116 Orang	5.942.700	2.700.000	2.700.000	3.242.700	121 Orang	6.358.689	Puskesmas Gunung Anyar
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					19.337.040	18.072.000	14.640.000	4.697.040		20.690.633	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	818 Orang	1326 Orang	1272 Orang	19.337.040	18.072.000	14.640.000	4.697.040	1137 Orang	20.690.633	Puskesmas Gunung Anyar
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					298.829.986	404.257.200	456.579.100	-157.749.114		319.748.085	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	298.829.986	404.257.200	456.579.100	-157.749.114	12 Dokumen	319.748.085	Puskesmas Gunung Anyar
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.140.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.140.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Gunung Anyar
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					11.084.364	10.276.000	10.126.000	958.364		11.858.052	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11.084.364	10.276.000	10.126.000	958.364	12 Dokumen	11.858.052	Puskesmas Gunung Anyar
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					121.373.631	74.028.000	7.110.000	114.263.631		129.869.785	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	121.373.631	74.028.000	7.110.000	114.263.631	12 Laporan	129.869.785	Puskesmas Gunung Anyar
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					554.923.883	567.383.396	550.158.396	4.765.487		577.942.126	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	554.923.883	567.383.396	550.158.396	4.765.487	12 Dokumen	577.942.126	Puskesmas Gunung Anyar
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					4.198.924	4.125.000	4.125.000	73.924		4.437.423	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.198.924	4.125.000	4.125.000	73.924	12 Dokumen	4.437.423	Puskesmas Gunung Anyar
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					12.443.408	687.500	687.500	11.755.908		13.498.609	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.443.408	687.500	687.500	11.755.908	12 Dokumen	13.498.609	Puskesmas Gunung Anyar
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					5.136.000	2.200.000	2.200.000	2.936.000		5.495.520	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.136.000	2.200.000	2.200.000	2.936.000	12 Dokumen	5.495.520	Puskesmas Gunung Anyar
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.507.135	825.000	17.268.900	-13.761.765		3.766.663	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.507.135	825.000	17.268.900	-13.761.765	68%	3.766.663	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.507.135	825.000	17.268.900	-13.761.765		3.766.663	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Gunung Anyar					3.507.135	825.000	17.268.900	-13.761.765		3.766.663	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.507.135	825.000	17.268.900	-13.761.765	12 Dokumen	3.766.663	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.507.135	825.000	17.268.900	-13.761.765		3.766.663	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.507.135	825.000	17.268.900	-13.761.765	12 Dokumen	3.766.663	Puskesmas Gunung Anyar
	Puskesmas Jagir					5.403.439.402	5.719.147.293	6.379.009.758	-975.570.356		5.485.105.864	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.403.439.402	5.403.439.402	6.379.009.758	-975.570.356		5.485.105.864	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					5.403.439.402	5.719.147.293	6.379.009.758	-975.570.356		5.485.105.864	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.087.616.375	4.087.616.375	4.776.708.640	-689.092.265		4.099.155.716	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	4.087.616.375	4.087.616.375	4.776.708.640	-689.092.265	89,97 %	4.099.155.716	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					4.087.616.375	4.087.616.375	4.776.708.640	-689.092.265		4.099.155.716	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Jagir					4.087.616.375	4.087.616.375	4.776.708.640	-689.092.265		4.099.155.716	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.087.616.375	4.087.616.375	4.776.708.640	-689.092.265	1 Unit Kerja	4.099.155.716	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					4.087.616.375	4.087.616.375	4.776.708.640	-689.092.265		4.099.155.716	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.087.616.375	4.087.616.375	4.776.708.640	-689.092.265	1 Unit Kerja	4.099.155.716	Puskesmas Jagir
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.312.240.717	1.630.705.918	1.587.573.218	-275.332.501		1.382.102.747	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.312.240.717	1.630.705.918	1.587.573.218	-275.332.501	91%	1.382.102.747	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.312.240.717	1.630.705.918	1.587.573.218	-275.332.501	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.382.102.747	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.312.240.717	1.630.705.918	1.587.573.218	-275.332.501	80%	1.382.102.747	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.312.240.717	1.630.705.918	1.587.573.218	-275.332.501	98,70 %	1.382.102.747	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.312.240.717	1.630.705.918	1.587.573.218	-275.332.501	82%	1.382.102.747	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.312.240.717	1.630.705.918	1.587.573.218	-275.332.501	40%	1.382.102.747	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.312.240.717	1.630.705.918	1.587.573.218	-275.332.501	100%	1.382.102.747	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.312.240.717	1.630.705.918	1.587.573.218	-275.332.501	95,45%	1.382.102.747	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.312.240.717	1.630.705.918	1.587.573.218	-275.332.501	90,75 %	1.382.102.747	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.312.240.717	1.630.705.918	1.587.573.218	-275.332.501	0,58 %	1.382.102.747	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.312.240.717	1.630.705.918	1.587.573.218	-275.332.501	12%	1.382.102.747	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.312.240.717	1.630.705.918	1.587.573.218	-275.332.501	21,6 %	1.382.102.747	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.312.240.717	1.630.705.918	1.587.573.218	-275.332.501	1,92 %	1.382.102.747	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.312.240.717	1.630.705.918	1.587.573.218	-275.332.501	80%	1.382.102.747	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.312.240.717	1.630.705.918	1.587.573.218	-275.332.501	69%	1.382.102.747	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.312.240.717	1.630.705.918	1.587.573.218	-275.332.501	100%	1.382.102.747	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503		4.146.308.241	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Jagir					3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503		4.146.308.241	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7761 Orang	8551 Orang	6901 Orang	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	8363 Orang	4.146.308.241	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	12 Laporan	4.146.308.241	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	12 Dokumen	4.146.308.241	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	12 Dokumen	4.146.308.241	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	12 Dokumen	4.146.308.241	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	12 Dokumen	4.146.308.241	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	12 Dokumen	4.146.308.241	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	12 Dokumen	4.146.308.241	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	12 Dokumen	4.146.308.241	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	661 Orang	685 Orang	643 Orang	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	679 Orang	4.146.308.241	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	865 Orang	1403 Orang	1235 Orang	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	1203 Orang	4.146.308.241	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	125 Orang	117 Orang	110 Orang	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	119 Orang	4.146.308.241	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Jagir					3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503		4.146.308.241	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7761 Orang	8551 Orang	6901 Orang	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	8363 Orang	4.146.308.241	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	12 Laporan	4.146.308.241	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	12 Dokumen	4.146.308.241	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	12 Dokumen	4.146.308.241	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	12 Dokumen	4.146.308.241	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	12 Dokumen	4.146.308.241	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	12 Dokumen	4.146.308.241	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	12 Dokumen	4.146.308.241	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	12 Dokumen	4.146.308.241	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	661 Orang	685 Orang	643 Orang	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	679 Orang	4.146.308.241	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	865 Orang	1403 Orang	1235 Orang	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	1203 Orang	4.146.308.241	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	125 Orang	117 Orang	110 Orang	3.936.722.151	4.892.117.754	4.762.719.654	-825.997.503	119 Orang	4.146.308.241	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					60.538.163	169.884.000	104.544.000	-44.005.837		64.539.736	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	661 Orang	685 Orang	643 Orang	60.538.163	169.884.000	104.544.000	-44.005.837	679 Orang	64.539.736	Puskesmas Jagir
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					2.439.053	5.682.000	3.960.000	-1.520.947		2.609.762	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7761 Orang	8551 Orang	6901 Orang	2.439.053	5.682.000	3.960.000	-1.520.947	8363 Orang	2.609.762	Puskesmas Jagir
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					5.367.600	900.000	1.800.000	3.567.600		5.743.332	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	125 Orang	117 Orang	110 Orang	5.367.600	900.000	1.800.000	3.567.600	119 Orang	5.743.332	Puskesmas Jagir
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					19.979.040	17.472.000	17.620.000	2.359.040		21.377.573	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	865 Orang	1403 Orang	1235 Orang	19.979.040	17.472.000	17.620.000	2.359.040	1203 Orang	21.377.573	Puskesmas Jagir
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					322.794.922	380.566.800	435.831.100	-113.036.178		345.390.566	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	322.794.922	380.566.800	435.831.100	-113.036.178	12 Dokumen	345.390.566	Puskesmas Jagir
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					4.813.200	2.370.000	2.700.000	2.113.200		5.149.161	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.813.200	2.370.000	2.700.000	2.113.200	12 Dokumen	5.149.161	Puskesmas Jagir
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					8.706.241	7.722.000	9.402.000	-695.759		9.313.936	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.706.241	7.722.000	9.402.000	-695.759	12 Dokumen	9.313.936	Puskesmas Jagir
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					105.217.380	26.268.000	5.190.000	100.027.380		112.582.597	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	105.217.380	26.268.000	5.190.000	100.027.380	12 Laporan	112.582.597	Puskesmas Jagir
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					766.945.342	1.017.228.618	1.003.913.618	-236.968.276		798.758.235	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	766.945.342	1.017.228.618	1.003.913.618	-236.968.276	12 Dokumen	798.758.235	Puskesmas Jagir
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.886.251	1.375.000	1.375.000	1.511.251		3.050.190	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.886.251	1.375.000	1.375.000	1.511.251	12 Dokumen	3.050.190	Puskesmas Jagir
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					10.499.125	687.500	687.500	9.811.625		11.389.451	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.499.125	687.500	687.500	9.811.625	12 Dokumen	11.389.451	Puskesmas Jagir
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					2.054.400	550.000	550.000	1.504.400		2.198.208	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.054.400	550.000	550.000	1.504.400	12 Dokumen	2.198.208	Puskesmas Jagir
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.582.310	825.000	14.727.900	-11.145.590		3.847.401	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.582.310	825.000	14.727.900	-11.145.590	68%	3.847.401	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.582.310	825.000	14.727.900	-11.145.590		3.847.401	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Jagir					3.582.310	825.000	14.727.900	-11.145.590		3.847.401	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.582.310	825.000	14.727.900	-11.145.590	12 Dokumen	3.847.401	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.582.310	825.000	14.727.900	-11.145.590		3.847.401	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.582.310	825.000	14.727.900	-11.145.590	12 Dokumen	3.847.401	Puskesmas Jagir
	Puskesmas Jemursari					2.330.356.054	2.288.692.463	2.618.866.604	-288.510.550		2.381.503.028	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.330.356.054	2.330.356.054	2.618.866.604	-288.510.550		2.381.503.028	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.330.356.054	2.288.692.463	2.618.866.604	-288.510.550		2.381.503.028	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.473.950.676	1.473.950.676	1.757.571.817	-283.621.141		1.478.111.639	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	1.473.950.676	1.473.950.676	1.757.571.817	-283.621.141	89,97 %	1.478.111.639	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1.473.950.676	1.473.950.676	1.757.571.817	-283.621.141		1.478.111.639	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Jemursari					1.473.950.676	1.473.950.676	1.757.571.817	-283.621.141		1.478.111.639	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.473.950.676	1.473.950.676	1.757.571.817	-283.621.141	1 Unit Kerja	1.478.111.639	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.473.950.676	1.473.950.676	1.757.571.817	-283.621.141		1.478.111.639	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.473.950.676	1.473.950.676	1.757.571.817	-283.621.141	1 Unit Kerja	1.478.111.639	Puskesmas Jemursari
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					852.770.683	813.916.787	852.048.187	722.496		899.487.727	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	852.770.683	813.916.787	852.048.187	722.496	91%	899.487.727	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	852.770.683	813.916.787	852.048.187	722.496	4 per 1.000 kelahiran hidup	899.487.727	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	852.770.683	813.916.787	852.048.187	722.496	80%	899.487.727	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	852.770.683	813.916.787	852.048.187	722.496	98,70 %	899.487.727	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	852.770.683	813.916.787	852.048.187	722.496	82%	899.487.727	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	852.770.683	813.916.787	852.048.187	722.496	40%	899.487.727	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	852.770.683	813.916.787	852.048.187	722.496	100%	899.487.727	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	852.770.683	813.916.787	852.048.187	722.496	95,45%	899.487.727	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	852.770.683	813.916.787	852.048.187	722.496	90,75 %	899.487.727	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	852.770.683	813.916.787	852.048.187	722.496	0,58 %	899.487.727	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	852.770.683	813.916.787	852.048.187	722.496	12%	899.487.727	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	852.770.683	813.916.787	852.048.187	722.496	21,6 %	899.487.727	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	852.770.683	813.916.787	852.048.187	722.496	1,92 %	899.487.727	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	852.770.683	813.916.787	852.048.187	722.496	80%	899.487.727	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	852.770.683	813.916.787	852.048.187	722.496	69%	899.487.727	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	852.770.683	813.916.787	852.048.187	722.496	100%	899.487.727	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488		2.698.463.181	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Jemursari					2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488		2.698.463.181	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2835 Orang	3122 Orang	2482 Orang	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	3054 Orang	2.698.463.181	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	12 Laporan	2.698.463.181	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	12 Dokumen	2.698.463.181	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	12 Dokumen	2.698.463.181	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	12 Dokumen	2.698.463.181	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	12 Dokumen	2.698.463.181	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	12 Dokumen	2.698.463.181	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	12 Dokumen	2.698.463.181	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	12 Dokumen	2.698.463.181	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	226 Orang	234 Orang	350 Orang	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	232 Orang	2.698.463.181	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	289 Orang	467 Orang	428 Orang	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	401 Orang	2.698.463.181	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang	41 Orang	32 Orang	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	42 Orang	2.698.463.181	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Jemursari					2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488		2.698.463.181	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2835 Orang	3122 Orang	2482 Orang	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	3054 Orang	2.698.463.181	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	12 Laporan	2.698.463.181	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	12 Dokumen	2.698.463.181	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	12 Dokumen	2.698.463.181	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	12 Dokumen	2.698.463.181	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	12 Dokumen	2.698.463.181	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	12 Dokumen	2.698.463.181	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	12 Dokumen	2.698.463.181	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	12 Dokumen	2.698.463.181	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	226 Orang	234 Orang	350 Orang	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	232 Orang	2.698.463.181	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	289 Orang	467 Orang	428 Orang	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	401 Orang	2.698.463.181	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang	41 Orang	32 Orang	2.558.312.049	2.441.750.361	2.556.144.561	2.167.488	42 Orang	2.698.463.181	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170		26.477.840	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	226 Orang	234 Orang	350 Orang	24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170	232 Orang	26.477.840	Puskesmas Jemursari
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					962.784	3.018.000	1.200.000	-237.216		1.030.169	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2835 Orang	3122 Orang	2482 Orang	962.784	3.018.000	1.200.000	-237.216	3054 Orang	1.030.169	Puskesmas Jemursari
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					2.492.100	1.440.000	1.440.000	1.052.100		2.666.547	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang	41 Orang	32 Orang	2.492.100	1.440.000	1.440.000	1.052.100	42 Orang	2.666.547	Puskesmas Jemursari
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.951.840	17.892.000	14.640.000	4.311.840		20.278.469	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	289 Orang	467 Orang	428 Orang	18.951.840	17.892.000	14.640.000	4.311.840	401 Orang	20.278.469	Puskesmas Jemursari
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					262.091.374	186.390.000	241.209.400	20.881.974		280.437.770	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	262.091.374	186.390.000	241.209.400	20.881.974	12 Dokumen	280.437.770	Puskesmas Jemursari
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1.315.608	630.000	2.700.000	-1.384.392		1.407.437	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.315.608	630.000	2.700.000	-1.384.392	12 Dokumen	1.407.437	Puskesmas Jemursari
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					3.372.572	2.734.000	2.764.000	608.572		3.607.978	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.372.572	2.734.000	2.764.000	608.572	12 Dokumen	3.607.978	Puskesmas Jemursari
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					77.771.880	34.071.000	13.350.000	64.421.880		83.215.912	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	77.771.880	34.071.000	13.350.000	64.421.880	12 Laporan	83.215.912	Puskesmas Jemursari
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					452.001.255	542.557.287	549.560.287	-97.559.032		470.750.267	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	452.001.255	542.557.287	549.560.287	-97.559.032	12 Dokumen	470.750.267	Puskesmas Jemursari
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.144.305	715.000	715.000	1.429.305		2.266.101	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.144.305	715.000	715.000	1.429.305	12 Dokumen	2.266.101	Puskesmas Jemursari
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					2.721.995	687.500	687.500	2.034.495		2.952.821	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.721.995	687.500	687.500	2.034.495	12 Dokumen	2.952.821	Puskesmas Jemursari
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					4.108.800	550.000	550.000	3.558.800		4.396.416	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.108.800	550.000	550.000	3.558.800	12 Dokumen	4.396.416	Puskesmas Jemursari
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.634.695	825.000	9.246.600	-5.611.905		3.903.662	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.634.695	825.000	9.246.600	-5.611.905	68%	3.903.662	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.634.695	825.000	9.246.600	-5.611.905		3.903.662	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Jemursari					3.634.695	825.000	9.246.600	-5.611.905		3.903.662	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.634.695	825.000	9.246.600	-5.611.905	12 Dokumen	3.903.662	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.634.695	825.000	9.246.600	-5.611.905		3.903.662	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.634.695	825.000	9.246.600	-5.611.905	12 Dokumen	3.903.662	Puskesmas Jemursari
	Puskesmas Jeruk					2.457.573.553	2.715.968.591	3.293.261.452	-835.687.899		2.514.927.331	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.457.573.553	2.457.573.553	3.293.261.452	-835.687.899		2.514.927.331	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.457.573.553	2.715.968.591	3.293.261.452	-835.687.899		2.514.927.331	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.446.369.379	1.446.369.379	1.999.078.840	-552.709.461		1.450.452.480	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	1.446.369.379	1.446.369.379	1.999.078.840	-552.709.461	89,97 %	1.450.452.480	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1.446.369.379	1.446.369.379	1.999.078.840	-552.709.461		1.450.452.480	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Jeruk					1.446.369.379	1.446.369.379	1.999.078.840	-552.709.461		1.450.452.480	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.446.369.379	1.446.369.379	1.999.078.840	-552.709.461	1 Unit Kerja	1.450.452.480	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.446.369.379	1.446.369.379	1.999.078.840	-552.709.461		1.450.452.480	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.446.369.379	1.446.369.379	1.999.078.840	-552.709.461	1 Unit Kerja	1.450.452.480	Puskesmas Jeruk
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.008.195.884	1.268.774.212	1.283.048.412	-274.852.528		1.061.243.948	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.008.195.884	1.268.774.212	1.283.048.412	-274.852.528	91%	1.061.243.948	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.008.195.884	1.268.774.212	1.283.048.412	-274.852.528	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.061.243.948	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.008.195.884	1.268.774.212	1.283.048.412	-274.852.528	80%	1.061.243.948	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.008.195.884	1.268.774.212	1.283.048.412	-274.852.528	98,70 %	1.061.243.948	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.008.195.884	1.268.774.212	1.283.048.412	-274.852.528	82%	1.061.243.948	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.008.195.884	1.268.774.212	1.283.048.412	-274.852.528	40%	1.061.243.948	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.008.195.884	1.268.774.212	1.283.048.412	-274.852.528	100%	1.061.243.948	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.008.195.884	1.268.774.212	1.283.048.412	-274.852.528	95,45%	1.061.243.948	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.008.195.884	1.268.774.212	1.283.048.412	-274.852.528	90,75 %	1.061.243.948	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.008.195.884	1.268.774.212	1.283.048.412	-274.852.528	0,58 %	1.061.243.948	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.008.195.884	1.268.774.212	1.283.048.412	-274.852.528	12%	1.061.243.948	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.008.195.884	1.268.774.212	1.283.048.412	-274.852.528	21,6 %	1.061.243.948	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.008.195.884	1.268.774.212	1.283.048.412	-274.852.528	1,92 %	1.061.243.948	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.008.195.884	1.268.774.212	1.283.048.412	-274.852.528	80%	1.061.243.948	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.008.195.884	1.268.774.212	1.283.048.412	-274.852.528	69%	1.061.243.948	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.008.195.884	1.268.774.212	1.283.048.412	-274.852.528	100%	1.061.243.948	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584		3.183.731.844	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Jeruk					3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584		3.183.731.844	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2525 Orang	2781 Orang	2441 Orang	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	2720 Orang	3.183.731.844	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	12 Laporan	3.183.731.844	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	12 Dokumen	3.183.731.844	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	12 Dokumen	3.183.731.844	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	12 Dokumen	3.183.731.844	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	12 Dokumen	3.183.731.844	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	12 Dokumen	3.183.731.844	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	12 Dokumen	3.183.731.844	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	12 Dokumen	3.183.731.844	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	241 Orang	249 Orang	216 Orang	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	247 Orang	3.183.731.844	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	243 Orang	391 Orang	374 Orang	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	336 Orang	3.183.731.844	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	39 Orang	35 Orang	34 Orang	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	36 Orang	3.183.731.844	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Jeruk					3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584		3.183.731.844	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2525 Orang	2781 Orang	2441 Orang	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	2720 Orang	3.183.731.844	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	12 Laporan	3.183.731.844	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	12 Dokumen	3.183.731.844	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	12 Dokumen	3.183.731.844	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	12 Dokumen	3.183.731.844	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	12 Dokumen	3.183.731.844	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	12 Dokumen	3.183.731.844	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	12 Dokumen	3.183.731.844	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	12 Dokumen	3.183.731.844	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	241 Orang	249 Orang	216 Orang	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	247 Orang	3.183.731.844	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	243 Orang	391 Orang	374 Orang	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	336 Orang	3.183.731.844	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	39 Orang	35 Orang	34 Orang	3.024.587.652	3.806.322.636	3.849.145.236	-824.557.584	36 Orang	3.183.731.844	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339		52.955.681	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	241 Orang	249 Orang	216 Orang	49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339	247 Orang	52.955.681	Puskesmas Jeruk
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.251.619	6.345.000	3.240.000	-1.988.381		1.339.220	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2525 Orang	2781 Orang	2441 Orang	1.251.619	6.345.000	3.240.000	-1.988.381	2720 Orang	1.339.220	Puskesmas Jeruk
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					2.300.400	900.000	900.000	1.400.400		2.461.428	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	39 Orang	35 Orang	34 Orang	2.300.400	900.000	900.000	1.400.400	36 Orang	2.461.428	Puskesmas Jeruk
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					21.263.040	17.232.000	14.100.000	7.163.040		22.751.453	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	243 Orang	391 Orang	374 Orang	21.263.040	17.232.000	14.100.000	7.163.040	336 Orang	22.751.453	Puskesmas Jeruk
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					175.939.667	149.751.600	209.130.800	-33.191.133		188.255.443	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	175.939.667	149.751.600	209.130.800	-33.191.133	12 Dokumen	188.255.443	Puskesmas Jeruk
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	450.000	2.610.000	-2.310.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	450.000	2.610.000	-2.310.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Jeruk
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					6.424.354	5.198.000	5.108.000	1.316.354		6.872.774	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.424.354	5.198.000	5.108.000	1.316.354	12 Dokumen	6.872.774	Puskesmas Jeruk
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					129.077.631	42.456.000	7.620.000	121.457.631		138.113.065	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	129.077.631	42.456.000	7.620.000	121.457.631	12 Laporan	138.113.065	Puskesmas Jeruk
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					610.250.789	997.640.112	991.538.112	-381.287.323		635.563.992	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	610.250.789	997.640.112	991.538.112	-381.287.323	12 Dokumen	635.563.992	Puskesmas Jeruk
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.386.053	550.000	550.000	836.053		1.464.780	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.386.053	550.000	550.000	836.053	12 Dokumen	1.464.780	Puskesmas Jeruk
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					6.221.704	687.500	687.500	5.534.204		6.749.304	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.221.704	687.500	687.500	5.534.204	12 Dokumen	6.749.304	Puskesmas Jeruk
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					4.108.800	1.100.000	1.100.000	3.008.800		4.396.416	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.108.800	1.100.000	1.100.000	3.008.800	12 Dokumen	4.396.416	Puskesmas Jeruk
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.008.290	825.000	11.134.200	-8.125.910		3.230.903	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.008.290	825.000	11.134.200	-8.125.910	68%	3.230.903	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.008.290	825.000	11.134.200	-8.125.910		3.230.903	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Jeruk					3.008.290	825.000	11.134.200	-8.125.910		3.230.903	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.008.290	825.000	11.134.200	-8.125.910	12 Dokumen	3.230.903	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.008.290	825.000	11.134.200	-8.125.910		3.230.903	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.008.290	825.000	11.134.200	-8.125.910	12 Dokumen	3.230.903	Puskesmas Jeruk
	Puskesmas Kalijudan					3.056.674.622	3.349.451.695	3.736.147.661	-679.473.039		3.111.079.796	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.056.674.622	3.056.674.622	3.736.147.661	-679.473.039		3.111.079.796	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.056.674.622	3.349.451.695	3.736.147.661	-679.473.039		3.111.079.796	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.208.207.303	2.208.207.303	2.559.459.069	-351.251.766		2.214.441.072	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.208.207.303	2.208.207.303	2.559.459.069	-351.251.766	89,97 %	2.214.441.072	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.208.207.303	2.208.207.303	2.559.459.069	-351.251.766		2.214.441.072	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kalijudan					2.208.207.303	2.208.207.303	2.559.459.069	-351.251.766		2.214.441.072	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.208.207.303	2.208.207.303	2.559.459.069	-351.251.766	1 Unit Kerja	2.214.441.072	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.208.207.303	2.208.207.303	2.559.459.069	-351.251.766		2.214.441.072	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.208.207.303	2.208.207.303	2.559.459.069	-351.251.766	1 Unit Kerja	2.214.441.072	Puskesmas Kalijudan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					845.012.569	1.140.419.392	1.160.399.792	-315.387.223		892.928.322	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	845.012.569	1.140.419.392	1.160.399.792	-315.387.223	91%	892.928.322	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	845.012.569	1.140.419.392	1.160.399.792	-315.387.223	4 per 1.000 kelahiran hidup	892.928.322	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	845.012.569	1.140.419.392	1.160.399.792	-315.387.223	80%	892.928.322	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	845.012.569	1.140.419.392	1.160.399.792	-315.387.223	98,70 %	892.928.322	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	845.012.569	1.140.419.392	1.160.399.792	-315.387.223	82%	892.928.322	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	845.012.569	1.140.419.392	1.160.399.792	-315.387.223	40%	892.928.322	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	845.012.569	1.140.419.392	1.160.399.792	-315.387.223	100%	892.928.322	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	845.012.569	1.140.419.392	1.160.399.792	-315.387.223	95,45%	892.928.322	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	845.012.569	1.140.419.392	1.160.399.792	-315.387.223	90,75 %	892.928.322	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	845.012.569	1.140.419.392	1.160.399.792	-315.387.223	0,58 %	892.928.322	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	845.012.569	1.140.419.392	1.160.399.792	-315.387.223	12%	892.928.322	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	845.012.569	1.140.419.392	1.160.399.792	-315.387.223	21,6 %	892.928.322	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	845.012.569	1.140.419.392	1.160.399.792	-315.387.223	1,92 %	892.928.322	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	845.012.569	1.140.419.392	1.160.399.792	-315.387.223	80%	892.928.322	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	845.012.569	1.140.419.392	1.160.399.792	-315.387.223	69%	892.928.322	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	845.012.569	1.140.419.392	1.160.399.792	-315.387.223	100%	892.928.322	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669		2.678.784.966	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Kalijudan					2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669		2.678.784.966	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5625 Orang	6197 Orang	5400 Orang	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	6061 Orang	2.678.784.966	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	12 Laporan	2.678.784.966	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	12 Dokumen	2.678.784.966	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	12 Dokumen	2.678.784.966	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	12 Dokumen	2.678.784.966	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	12 Dokumen	2.678.784.966	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	12 Dokumen	2.678.784.966	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	12 Dokumen	2.678.784.966	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	12 Dokumen	2.678.784.966	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	666 Orang	690 Orang	373 Orang	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	684 Orang	2.678.784.966	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	624 Orang	1011 Orang	950 Orang	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	867 Orang	2.678.784.966	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang	88 Orang	71 Orang	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	89 Orang	2.678.784.966	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Kalijudan					2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669		2.678.784.966	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5625 Orang	6197 Orang	5400 Orang	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	6061 Orang	2.678.784.966	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	12 Laporan	2.678.784.966	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	12 Dokumen	2.678.784.966	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	12 Dokumen	2.678.784.966	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	12 Dokumen	2.678.784.966	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	12 Dokumen	2.678.784.966	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	12 Dokumen	2.678.784.966	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	12 Dokumen	2.678.784.966	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	12 Dokumen	2.678.784.966	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	666 Orang	690 Orang	373 Orang	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	684 Orang	2.678.784.966	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	624 Orang	1011 Orang	950 Orang	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	867 Orang	2.678.784.966	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang	88 Orang	71 Orang	2.535.037.707	3.421.258.176	3.481.199.376	-946.161.669	89 Orang	2.678.784.966	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	56.628.000	56.628.000	13.223.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	666 Orang	690 Orang	373 Orang	69.851.727	56.628.000	56.628.000	13.223.727	684 Orang	74.468.926	Puskesmas Kalijudan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.540.454	8.880.000	4.860.000	-3.319.546		1.648.271	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5625 Orang	6197 Orang	5400 Orang	1.540.454	8.880.000	4.860.000	-3.319.546	6061 Orang	1.648.271	Puskesmas Kalijudan
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					2.300.400	270.000	270.000	2.030.400		2.461.428	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang	88 Orang	71 Orang	2.300.400	270.000	270.000	2.030.400	89 Orang	2.461.428	Puskesmas Kalijudan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.951.840	16.632.000	13.860.000	5.091.840		20.278.469	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	624 Orang	1011 Orang	950 Orang	18.951.840	16.632.000	13.860.000	5.091.840	867 Orang	20.278.469	Puskesmas Kalijudan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					236.082.498	488.167.800	543.951.200	-307.868.702		252.608.273	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	236.082.498	488.167.800	543.951.200	-307.868.702	12 Dokumen	252.608.273	Puskesmas Kalijudan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2.823.744	1.350.000	2.700.000	123.744		3.020.841	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.823.744	1.350.000	2.700.000	123.744	12 Dokumen	3.020.841	Puskesmas Kalijudan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					9.283.663	7.602.000	7.542.000	1.741.663		9.931.662	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.283.663	7.602.000	7.542.000	1.741.663	12 Dokumen	9.931.662	Puskesmas Kalijudan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					103.914.120	47.058.000	22.770.000	81.144.120		111.188.108	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	103.914.120	47.058.000	22.770.000	81.144.120	12 Laporan	111.188.108	Puskesmas Kalijudan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					387.463.261	510.669.092	504.656.092	-117.192.831		403.535.237	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	387.463.261	510.669.092	504.656.092	-117.192.831	12 Dokumen	403.535.237	Puskesmas Kalijudan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.323.676	825.000	825.000	1.498.676		2.455.661	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.323.676	825.000	825.000	1.498.676	12 Dokumen	2.455.661	Puskesmas Kalijudan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					8.165.986	687.500	687.500	7.478.486		8.858.462	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.165.986	687.500	687.500	7.478.486	12 Dokumen	8.858.462	Puskesmas Kalijudan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					2.311.200	1.650.000	1.650.000	661.200		2.472.984	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.311.200	1.650.000	1.650.000	661.200	12 Dokumen	2.472.984	Puskesmas Kalijudan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.454.750	825.000	16.288.800	-12.834.050		3.710.402	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.454.750	825.000	16.288.800	-12.834.050	68%	3.710.402	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.454.750	825.000	16.288.800	-12.834.050		3.710.402	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Kalijudan					3.454.750	825.000	16.288.800	-12.834.050		3.710.402	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.454.750	825.000	16.288.800	-12.834.050	12 Dokumen	3.710.402	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.454.750	825.000	16.288.800	-12.834.050		3.710.402	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.454.750	825.000	16.288.800	-12.834.050	12 Dokumen	3.710.402	Puskesmas Kalijudan
	Puskesmas Kalirungkut					3.904.375.088	3.974.743.229	5.566.032.106	-1.661.657.018		3.980.935.029	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.904.375.088	3.904.375.088	5.566.032.106	-1.661.657.018		3.980.935.029	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.904.375.088	3.974.743.229	5.566.032.106	-1.661.657.018		3.980.935.029	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.591.505.809	2.591.505.809	4.066.242.986	-1.474.737.177		2.598.821.630	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.591.505.809	2.591.505.809	4.066.242.986	-1.474.737.177	89,97 %	2.598.821.630	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.591.505.809	2.591.505.809	4.066.242.986	-1.474.737.177		2.598.821.630	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kalirungkut					2.591.505.809	2.591.505.809	4.066.242.986	-1.474.737.177		2.598.821.630	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.591.505.809	2.591.505.809	4.066.242.986	-1.474.737.177	1 Unit Kerja	2.598.821.630	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.591.505.809	2.591.505.809	4.066.242.986	-1.474.737.177		2.598.821.630	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.591.505.809	2.591.505.809	4.066.242.986	-1.474.737.177	1 Unit Kerja	2.598.821.630	Puskesmas Kalirungkut
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.306.799.549	1.382.412.420	1.485.968.720	-179.169.171		1.375.594.509	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.306.799.549	1.382.412.420	1.485.968.720	-179.169.171	91%	1.375.594.509	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.306.799.549	1.382.412.420	1.485.968.720	-179.169.171	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.375.594.509	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.306.799.549	1.382.412.420	1.485.968.720	-179.169.171	80%	1.375.594.509	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.306.799.549	1.382.412.420	1.485.968.720	-179.169.171	98,70 %	1.375.594.509	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.306.799.549	1.382.412.420	1.485.968.720	-179.169.171	82%	1.375.594.509	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.306.799.549	1.382.412.420	1.485.968.720	-179.169.171	40%	1.375.594.509	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.306.799.549	1.382.412.420	1.485.968.720	-179.169.171	100%	1.375.594.509	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.306.799.549	1.382.412.420	1.485.968.720	-179.169.171	95,45%	1.375.594.509	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.306.799.549	1.382.412.420	1.485.968.720	-179.169.171	90,75 %	1.375.594.509	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.306.799.549	1.382.412.420	1.485.968.720	-179.169.171	0,58 %	1.375.594.509	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.306.799.549	1.382.412.420	1.485.968.720	-179.169.171	12%	1.375.594.509	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.306.799.549	1.382.412.420	1.485.968.720	-179.169.171	21,6 %	1.375.594.509	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.306.799.549	1.382.412.420	1.485.968.720	-179.169.171	1,92 %	1.375.594.509	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.306.799.549	1.382.412.420	1.485.968.720	-179.169.171	80%	1.375.594.509	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.306.799.549	1.382.412.420	1.485.968.720	-179.169.171	69%	1.375.594.509	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.306.799.549	1.382.412.420	1.485.968.720	-179.169.171	100%	1.375.594.509	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513		4.126.783.527	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Kalirungkut					3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513		4.126.783.527	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6782 Orang	7472 Orang	6546 Orang	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	7308 Orang	4.126.783.527	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	12 Laporan	4.126.783.527	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	12 Dokumen	4.126.783.527	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	12 Dokumen	4.126.783.527	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	12 Dokumen	4.126.783.527	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	12 Dokumen	4.126.783.527	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	12 Dokumen	4.126.783.527	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	12 Dokumen	4.126.783.527	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	12 Dokumen	4.126.783.527	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	687 Orang	713 Orang	561 Orang	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	706 Orang	4.126.783.527	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	726 Orang	1176 Orang	1073 Orang	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	1008 Orang	4.126.783.527	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	109 Orang	101 Orang	96 Orang	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	103 Orang	4.126.783.527	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Kalirungkut					3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513		4.126.783.527	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6782 Orang	7472 Orang	6546 Orang	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	7308 Orang	4.126.783.527	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	12 Laporan	4.126.783.527	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	12 Dokumen	4.126.783.527	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	12 Dokumen	4.126.783.527	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	12 Dokumen	4.126.783.527	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	12 Dokumen	4.126.783.527	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	12 Dokumen	4.126.783.527	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	12 Dokumen	4.126.783.527	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	12 Dokumen	4.126.783.527	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	687 Orang	713 Orang	561 Orang	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	706 Orang	4.126.783.527	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	726 Orang	1176 Orang	1073 Orang	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	1008 Orang	4.126.783.527	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	109 Orang	101 Orang	96 Orang	3.920.398.647	4.147.237.260	4.457.906.160	-537.507.513	103 Orang	4.126.783.527	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	52.272.000	52.272.000	17.579.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	687 Orang	713 Orang	561 Orang	69.851.727	52.272.000	52.272.000	17.579.727	706 Orang	74.468.926	Puskesmas Kalirungkut
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.733.011	9.823.500	1.140.000	593.011		1.854.305	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6782 Orang	7472 Orang	6546 Orang	1.733.011	9.823.500	1.140.000	593.011	7308 Orang	1.854.305	Puskesmas Kalirungkut
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.642.300	1.710.000	1.350.000	2.292.300		3.897.261	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	109 Orang	101 Orang	96 Orang	3.642.300	1.710.000	1.350.000	2.292.300	103 Orang	3.897.261	Puskesmas Kalirungkut
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					25.115.040	17.172.000	16.120.000	8.995.040		26.873.093	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	726 Orang	1176 Orang	1073 Orang	25.115.040	17.172.000	16.120.000	8.995.040	1008 Orang	26.873.093	Puskesmas Kalirungkut
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					294.892.198	478.966.800	521.105.600	-226.213.402		315.534.652	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	294.892.198	478.966.800	521.105.600	-226.213.402	12 Dokumen	315.534.652	Puskesmas Kalirungkut
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.950.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.950.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Kalirungkut
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					513.264	7.512.000	8.442.000	-7.928.736		549.090	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	513.264	7.512.000	8.442.000	-7.928.736	12 Dokumen	549.090	Puskesmas Kalirungkut
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					97.051.140	46.604.400	2.490.000	94.561.140		103.844.720	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	97.051.140	46.604.400	2.490.000	94.561.140	12 Laporan	103.844.720	Puskesmas Kalirungkut
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					787.134.824	762.139.220	876.086.620	-88.951.796		819.785.176	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	787.134.824	762.139.220	876.086.620	-88.951.796	12 Dokumen	819.785.176	Puskesmas Kalirungkut
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					6.074.171	1.925.000	1.925.000	4.149.171		6.419.184	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.074.171	1.925.000	1.925.000	4.149.171	12 Dokumen	6.419.184	Puskesmas Kalirungkut
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					8.165.986	687.500	687.500	7.478.486		8.858.462	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.165.986	687.500	687.500	7.478.486	12 Dokumen	8.858.462	Puskesmas Kalirungkut
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					12.326.400	1.650.000	1.650.000	10.676.400		13.189.248	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.326.400	1.650.000	1.650.000	10.676.400	12 Dokumen	13.189.248	Puskesmas Kalirungkut
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					6.069.730	825.000	13.820.400	-7.750.670		6.518.890	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	6.069.730	825.000	13.820.400	-7.750.670	68%	6.518.890	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					6.069.730	825.000	13.820.400	-7.750.670		6.518.890	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Kalirungkut					6.069.730	825.000	13.820.400	-7.750.670		6.518.890	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.069.730	825.000	13.820.400	-7.750.670	12 Dokumen	6.518.890	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					6.069.730	825.000	13.820.400	-7.750.670		6.518.890	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.069.730	825.000	13.820.400	-7.750.670	12 Dokumen	6.518.890	Puskesmas Kalirungkut
	Puskesmas Kebonsari					4.519.657.805	4.915.662.614	5.649.608.349	-1.129.950.544		4.595.060.812	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.519.657.805	4.519.657.805	5.649.608.349	-1.129.950.544		4.595.060.812	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.519.657.805	4.915.662.614	5.649.608.349	-1.129.950.544		4.595.060.812	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.313.536.022	3.313.536.022	4.167.715.957	-854.179.935		3.322.890.134	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.313.536.022	3.313.536.022	4.167.715.957	-854.179.935	89,97 %	3.322.890.134	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.313.536.022	3.313.536.022	4.167.715.957	-854.179.935		3.322.890.134	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kebonsari					3.313.536.022	3.313.536.022	4.167.715.957	-854.179.935		3.322.890.134	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.313.536.022	3.313.536.022	4.167.715.957	-854.179.935	1 Unit Kerja	3.322.890.134	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.313.536.022	3.313.536.022	4.167.715.957	-854.179.935		3.322.890.134	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.313.536.022	3.313.536.022	4.167.715.957	-854.179.935	1 Unit Kerja	3.322.890.134	Puskesmas Kebonsari
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.201.976.848	1.601.301.592	1.464.260.492	-262.283.644		1.267.719.018	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.201.976.848	1.601.301.592	1.464.260.492	-262.283.644	91%	1.267.719.018	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.201.976.848	1.601.301.592	1.464.260.492	-262.283.644	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.267.719.018	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.201.976.848	1.601.301.592	1.464.260.492	-262.283.644	80%	1.267.719.018	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.201.976.848	1.601.301.592	1.464.260.492	-262.283.644	98,70 %	1.267.719.018	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.201.976.848	1.601.301.592	1.464.260.492	-262.283.644	82%	1.267.719.018	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.201.976.848	1.601.301.592	1.464.260.492	-262.283.644	40%	1.267.719.018	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.201.976.848	1.601.301.592	1.464.260.492	-262.283.644	100%	1.267.719.018	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.201.976.848	1.601.301.592	1.464.260.492	-262.283.644	95,45%	1.267.719.018	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.201.976.848	1.601.301.592	1.464.260.492	-262.283.644	90,75 %	1.267.719.018	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.201.976.848	1.601.301.592	1.464.260.492	-262.283.644	0,58 %	1.267.719.018	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.201.976.848	1.601.301.592	1.464.260.492	-262.283.644	12%	1.267.719.018	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.201.976.848	1.601.301.592	1.464.260.492	-262.283.644	21,6 %	1.267.719.018	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.201.976.848	1.601.301.592	1.464.260.492	-262.283.644	1,92 %	1.267.719.018	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.201.976.848	1.601.301.592	1.464.260.492	-262.283.644	80%	1.267.719.018	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.201.976.848	1.601.301.592	1.464.260.492	-262.283.644	69%	1.267.719.018	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.201.976.848	1.601.301.592	1.464.260.492	-262.283.644	100%	1.267.719.018	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932		3.803.157.054	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Kebonsari					3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932		3.803.157.054	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7399 Orang	8153 Orang	7116 Orang	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	7974 Orang	3.803.157.054	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	12 Laporan	3.803.157.054	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	12 Dokumen	3.803.157.054	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	12 Dokumen	3.803.157.054	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	12 Dokumen	3.803.157.054	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	12 Dokumen	3.803.157.054	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	12 Dokumen	3.803.157.054	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	12 Dokumen	3.803.157.054	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	12 Dokumen	3.803.157.054	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	692 Orang	719 Orang	675 Orang	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	712 Orang	3.803.157.054	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	725 Orang	1174 Orang	1106 Orang	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	1007 Orang	3.803.157.054	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	112 Orang	104 Orang	100 Orang	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	106 Orang	3.803.157.054	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Kebonsari					3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932		3.803.157.054	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7399 Orang	8153 Orang	7116 Orang	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	7974 Orang	3.803.157.054	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	12 Laporan	3.803.157.054	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	12 Dokumen	3.803.157.054	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	12 Dokumen	3.803.157.054	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	12 Dokumen	3.803.157.054	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	12 Dokumen	3.803.157.054	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	12 Dokumen	3.803.157.054	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	12 Dokumen	3.803.157.054	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	12 Dokumen	3.803.157.054	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	692 Orang	719 Orang	675 Orang	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	712 Orang	3.803.157.054	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	725 Orang	1174 Orang	1106 Orang	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	1007 Orang	3.803.157.054	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	112 Orang	104 Orang	100 Orang	3.605.930.544	4.803.904.776	4.392.781.476	-786.850.932	106 Orang	3.803.157.054	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					80.717.551	75.504.000	75.504.000	5.213.551		86.052.981	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	692 Orang	719 Orang	675 Orang	80.717.551	75.504.000	75.504.000	5.213.551	712 Orang	86.052.981	Puskesmas Kebonsari
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					2.792.074	14.433.600	1.170.000	1.622.074		2.987.491	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7399 Orang	8153 Orang	7116 Orang	2.792.074	14.433.600	1.170.000	1.622.074	7974 Orang	2.987.491	Puskesmas Kebonsari
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					2.875.500	1.800.000	1.800.000	1.075.500		3.076.785	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	112 Orang	104 Orang	100 Orang	2.875.500	1.800.000	1.800.000	1.075.500	106 Orang	3.076.785	Puskesmas Kebonsari
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.374.040	18.072.000	16.120.000	2.254.040		19.660.223	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	725 Orang	1174 Orang	1106 Orang	18.374.040	18.072.000	16.120.000	2.254.040	1007 Orang	19.660.223	Puskesmas Kebonsari
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					309.456.761	464.680.200	484.641.100	-175.184.339		331.118.734	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	309.456.761	464.680.200	484.641.100	-175.184.339	12 Dokumen	331.118.734	Puskesmas Kebonsari
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.260.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.260.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Kebonsari
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					11.180.601	10.276.000	11.146.000	34.601		11.961.007	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11.180.601	10.276.000	11.146.000	34.601	12 Dokumen	11.961.007	Puskesmas Kebonsari
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					123.428.031	115.658.400	6.930.000	116.498.031		132.067.993	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	123.428.031	115.658.400	6.930.000	116.498.031	12 Laporan	132.067.993	Puskesmas Kebonsari
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					637.929.016	897.337.092	861.969.092	-224.040.076		664.390.312	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	637.929.016	897.337.092	861.969.092	-224.040.076	12 Dokumen	664.390.312	Puskesmas Kebonsari
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					3.522.204	1.100.000	1.100.000	2.422.204		3.722.265	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.522.204	1.100.000	1.100.000	2.422.204	12 Dokumen	3.722.265	Puskesmas Kebonsari
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					10.887.982	687.500	687.500	10.200.482		11.811.283	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.887.982	687.500	687.500	10.200.482	12 Dokumen	11.811.283	Puskesmas Kebonsari
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					513.600	492.800	492.800	20.800		549.552	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	513.600	492.800	492.800	20.800	12 Dokumen	549.552	Puskesmas Kebonsari

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					4.144.935	825.000	17.631.900	-13.486.965		4.451.660	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	4.144.935	825.000	17.631.900	-13.486.965	68%	4.451.660	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.144.935	825.000	17.631.900	-13.486.965		4.451.660	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Kebonsari					4.144.935	825.000	17.631.900	-13.486.965		4.451.660	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.144.935	825.000	17.631.900	-13.486.965	12 Dokumen	4.451.660	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4.144.935	825.000	17.631.900	-13.486.965		4.451.660	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.144.935	825.000	17.631.900	-13.486.965	12 Dokumen	4.451.660	Puskesmas Kebonsari
	Puskesmas Kedungdoro					3.689.991.307	3.687.519.728	4.013.441.143	-323.449.836		3.754.725.522	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.689.991.307	3.689.991.307	4.013.441.143	-323.449.836		3.754.725.522	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.689.991.307	3.687.519.728	4.013.441.143	-323.449.836		3.754.725.522	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.629.973.832	2.629.973.832	2.943.122.247	-313.148.415		2.637.398.248	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.629.973.832	2.629.973.832	2.943.122.247	-313.148.415	89,97 %	2.637.398.248	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.629.973.832	2.629.973.832	2.943.122.247	-313.148.415		2.637.398.248	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kedungdoro					2.629.973.832	2.629.973.832	2.943.122.247	-313.148.415		2.637.398.248	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.629.973.832	2.629.973.832	2.943.122.247	-313.148.415	1 Unit Kerja	2.637.398.248	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.629.973.832	2.629.973.832	2.943.122.247	-313.148.415		2.637.398.248	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.629.973.832	2.629.973.832	2.943.122.247	-313.148.415	1 Unit Kerja	2.637.398.248	Puskesmas Kedungdoro
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.056.382.780	1.056.720.896	1.057.914.196	-1.531.416		1.113.423.612	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.056.382.780	1.056.720.896	1.057.914.196	-1.531.416	91%	1.113.423.612	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.056.382.780	1.056.720.896	1.057.914.196	-1.531.416	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.113.423.612	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.056.382.780	1.056.720.896	1.057.914.196	-1.531.416	80%	1.113.423.612	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.056.382.780	1.056.720.896	1.057.914.196	-1.531.416	98,70 %	1.113.423.612	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.056.382.780	1.056.720.896	1.057.914.196	-1.531.416	82%	1.113.423.612	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.056.382.780	1.056.720.896	1.057.914.196	-1.531.416	40%	1.113.423.612	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.056.382.780	1.056.720.896	1.057.914.196	-1.531.416	100%	1.113.423.612	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.056.382.780	1.056.720.896	1.057.914.196	-1.531.416	95,45%	1.113.423.612	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.056.382.780	1.056.720.896	1.057.914.196	-1.531.416	90,75 %	1.113.423.612	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.056.382.780	1.056.720.896	1.057.914.196	-1.531.416	0,58 %	1.113.423.612	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.056.382.780	1.056.720.896	1.057.914.196	-1.531.416	12%	1.113.423.612	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.056.382.780	1.056.720.896	1.057.914.196	-1.531.416	21,6 %	1.113.423.612	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.056.382.780	1.056.720.896	1.057.914.196	-1.531.416	1,92 %	1.113.423.612	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.056.382.780	1.056.720.896	1.057.914.196	-1.531.416	80%	1.113.423.612	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.056.382.780	1.056.720.896	1.057.914.196	-1.531.416	69%	1.113.423.612	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.056.382.780	1.056.720.896	1.057.914.196	-1.531.416	100%	1.113.423.612	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248		3.340.270.836	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Kedungdoro					3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248		3.340.270.836	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5581 Orang	6149 Orang	5167 Orang	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	6014 Orang	3.340.270.836	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	12 Laporan	3.340.270.836	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	12 Dokumen	3.340.270.836	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	12 Dokumen	3.340.270.836	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	12 Dokumen	3.340.270.836	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	12 Dokumen	3.340.270.836	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	12 Dokumen	3.340.270.836	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	12 Dokumen	3.340.270.836	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	12 Dokumen	3.340.270.836	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	470 Orang	486 Orang	510 Orang	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	482 Orang	3.340.270.836	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	577 Orang	934 Orang	844 Orang	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	801 Orang	3.340.270.836	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	81 Orang	75 Orang	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	82 Orang	3.340.270.836	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Kedungdoro					3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248		3.340.270.836	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5581 Orang	6149 Orang	5167 Orang	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	6014 Orang	3.340.270.836	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	12 Laporan	3.340.270.836	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	12 Dokumen	3.340.270.836	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	12 Dokumen	3.340.270.836	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	12 Dokumen	3.340.270.836	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	12 Dokumen	3.340.270.836	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	12 Dokumen	3.340.270.836	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	12 Dokumen	3.340.270.836	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	12 Dokumen	3.340.270.836	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	470 Orang	486 Orang	510 Orang	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	482 Orang	3.340.270.836	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	577 Orang	934 Orang	844 Orang	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	801 Orang	3.340.270.836	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	81 Orang	75 Orang	3.169.148.340	3.170.162.688	3.173.742.588	-4.594.248	82 Orang	3.340.270.836	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339		52.955.681	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	470 Orang	486 Orang	510 Orang	49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339	482 Orang	52.955.681	Puskesmas Kedungdoro
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					706.042	4.047.000	4.020.000	-3.313.958		755.457	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5581 Orang	6149 Orang	5167 Orang	706.042	4.047.000	4.020.000	-3.313.958	6014 Orang	755.457	Puskesmas Kedungdoro
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.258.900	3.060.000	3.060.000	198.900		3.487.023	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	81 Orang	75 Orang	3.258.900	3.060.000	3.060.000	198.900	82 Orang	3.487.023	Puskesmas Kedungdoro
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.374.040	17.172.000	16.420.000	1.954.040		19.660.223	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	577 Orang	934 Orang	844 Orang	18.374.040	17.172.000	16.420.000	1.954.040	801 Orang	19.660.223	Puskesmas Kedungdoro
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					278.957.814	281.892.000	333.963.300	-55.005.486		298.484.861	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	278.957.814	281.892.000	333.963.300	-55.005.486	12 Dokumen	298.484.861	Puskesmas Kedungdoro
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.020.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.020.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Kedungdoro
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					5.943.169	5.468.000	5.168.000	775.169		6.358.003	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.943.169	5.468.000	5.168.000	775.169	12 Dokumen	6.358.003	Puskesmas Kedungdoro
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					97.795.860	57.096.000	11.790.000	86.005.860		104.641.570	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	97.795.860	57.096.000	11.790.000	86.005.860	12 Laporan	104.641.570	Puskesmas Kedungdoro
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					588.435.693	637.669.396	631.496.396	-43.060.703		612.844.005	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	588.435.693	637.669.396	631.496.396	-43.060.703	12 Dokumen	612.844.005	Puskesmas Kedungdoro
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.581.731	1.045.000	1.045.000	536.731		1.671.573	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.581.731	1.045.000	1.045.000	536.731	12 Dokumen	1.671.573	Puskesmas Kedungdoro
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					6.221.704	687.500	687.500	5.534.204		6.749.304	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.221.704	687.500	687.500	5.534.204	12 Dokumen	6.749.304	Puskesmas Kedungdoro
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					5.136.000	1.100.000	1.100.000	4.036.000		5.495.520	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.136.000	1.100.000	1.100.000	4.036.000	12 Dokumen	5.495.520	Puskesmas Kedungdoro
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.634.695	825.000	12.404.700	-8.770.005		3.903.662	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.634.695	825.000	12.404.700	-8.770.005	68%	3.903.662	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.634.695	825.000	12.404.700	-8.770.005		3.903.662	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Kedungdoro					3.634.695	825.000	12.404.700	-8.770.005		3.903.662	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.634.695	825.000	12.404.700	-8.770.005	12 Dokumen	3.903.662	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.634.695	825.000	12.404.700	-8.770.005		3.903.662	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.634.695	825.000	12.404.700	-8.770.005	12 Dokumen	3.903.662	Puskesmas Kedungdoro
	Puskesmas Kedurus					4.908.483.238	5.582.199.236	6.704.094.934	-1.795.611.696		4.986.388.313	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.908.483.238	4.908.483.238	6.704.094.934	-1.795.611.696		4.986.388.313	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.908.483.238	5.582.199.236	6.704.094.934	-1.795.611.696		4.986.388.313	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.701.761.048	3.701.761.048	4.651.092.246	-949.331.198		3.712.211.119	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.701.761.048	3.701.761.048	4.651.092.246	-949.331.198	89,97 %	3.712.211.119	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.701.761.048	3.701.761.048	4.651.092.246	-949.331.198		3.712.211.119	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kedurus					3.701.761.048	3.701.761.048	4.651.092.246	-949.331.198		3.712.211.119	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.701.761.048	3.701.761.048	4.651.092.246	-949.331.198	1 Unit Kerja	3.712.211.119	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.701.761.048	3.701.761.048	4.651.092.246	-949.331.198		3.712.211.119	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.701.761.048	3.701.761.048	4.651.092.246	-949.331.198	1 Unit Kerja	3.712.211.119	Puskesmas Kedurus
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.203.713.900	1.879.613.188	2.035.189.288	-831.475.388		1.270.946.291	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.203.713.900	1.879.613.188	2.035.189.288	-831.475.388	91%	1.270.946.291	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.203.713.900	1.879.613.188	2.035.189.288	-831.475.388	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.270.946.291	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.203.713.900	1.879.613.188	2.035.189.288	-831.475.388	80%	1.270.946.291	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.203.713.900	1.879.613.188	2.035.189.288	-831.475.388	98,70 %	1.270.946.291	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.203.713.900	1.879.613.188	2.035.189.288	-831.475.388	82%	1.270.946.291	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.203.713.900	1.879.613.188	2.035.189.288	-831.475.388	40%	1.270.946.291	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.203.713.900	1.879.613.188	2.035.189.288	-831.475.388	100%	1.270.946.291	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.203.713.900	1.879.613.188	2.035.189.288	-831.475.388	95,45%	1.270.946.291	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.203.713.900	1.879.613.188	2.035.189.288	-831.475.388	90,75 %	1.270.946.291	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.203.713.900	1.879.613.188	2.035.189.288	-831.475.388	0,58 %	1.270.946.291	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.203.713.900	1.879.613.188	2.035.189.288	-831.475.388	12%	1.270.946.291	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.203.713.900	1.879.613.188	2.035.189.288	-831.475.388	21,6 %	1.270.946.291	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.203.713.900	1.879.613.188	2.035.189.288	-831.475.388	1,92 %	1.270.946.291	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.203.713.900	1.879.613.188	2.035.189.288	-831.475.388	80%	1.270.946.291	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.203.713.900	1.879.613.188	2.035.189.288	-831.475.388	69%	1.270.946.291	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.203.713.900	1.879.613.188	2.035.189.288	-831.475.388	100%	1.270.946.291	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164		3.812.838.873	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Kedurus					3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164		3.812.838.873	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9851 Orang	10854 Orang	18000 Orang	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	10616 Orang	3.812.838.873	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	12 Laporan	3.812.838.873	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	12 Dokumen	3.812.838.873	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	12 Dokumen	3.812.838.873	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	12 Dokumen	3.812.838.873	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	12 Dokumen	3.812.838.873	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	12 Dokumen	3.812.838.873	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	12 Dokumen	3.812.838.873	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	12 Dokumen	3.812.838.873	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	898 Orang	934 Orang	965 Orang	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	925 Orang	3.812.838.873	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1030 Orang	1669 Orang	1693 Orang	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	1431 Orang	3.812.838.873	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	167 Orang	159 Orang	153 Orang	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	161 Orang	3.812.838.873	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Kedurus					3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164		3.812.838.873	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9851 Orang	10854 Orang	18000 Orang	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	10616 Orang	3.812.838.873	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	12 Laporan	3.812.838.873	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	12 Dokumen	3.812.838.873	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	12 Dokumen	3.812.838.873	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	12 Dokumen	3.812.838.873	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	12 Dokumen	3.812.838.873	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	12 Dokumen	3.812.838.873	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	12 Dokumen	3.812.838.873	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	12 Dokumen	3.812.838.873	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	898 Orang	934 Orang	965 Orang	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	925 Orang	3.812.838.873	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1030 Orang	1669 Orang	1693 Orang	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	1431 Orang	3.812.838.873	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	167 Orang	159 Orang	153 Orang	3.611.141.700	5.638.839.564	6.105.567.864	-2.494.426.164	161 Orang	3.812.838.873	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					80.717.551	75.504.000	75.504.000	5.213.551		86.052.981	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	898 Orang	934 Orang	965 Orang	80.717.551	75.504.000	75.504.000	5.213.551	925 Orang	86.052.981	Puskesmas Kedurus
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.733.011	4.650.000	4.620.000	-2.886.989		1.854.305	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9851 Orang	10854 Orang	18000 Orang	1.733.011	4.650.000	4.620.000	-2.886.989	10616 Orang	1.854.305	Puskesmas Kedurus
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					7.092.900	540.000	540.000	6.552.900		7.589.403	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	167 Orang	159 Orang	153 Orang	7.092.900	540.000	540.000	6.552.900	161 Orang	7.589.403	Puskesmas Kedurus
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.181.440	16.572.000	16.120.000	2.061.440		19.454.141	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1030 Orang	1669 Orang	1693 Orang	18.181.440	16.572.000	16.120.000	2.061.440	1431 Orang	19.454.141	Puskesmas Kedurus
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					357.663.279	711.892.500	935.791.600	-578.128.321		382.699.709	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	357.663.279	711.892.500	935.791.600	-578.128.321	12 Dokumen	382.699.709	Puskesmas Kedurus
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.110.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.110.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Kedurus
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12.527.919	10.456.000	10.456.000	2.071.919		13.402.368	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.527.919	10.456.000	10.456.000	2.071.919	12 Dokumen	13.402.368	Puskesmas Kedurus
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					117.906.831	65.304.000	10.380.000	107.526.831		126.160.309	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	117.906.831	65.304.000	10.380.000	107.526.831	12 Laporan	126.160.309	Puskesmas Kedurus
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					590.859.573	991.093.188	976.586.188	-385.726.615		615.368.428	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	590.859.573	991.093.188	976.586.188	-385.726.615	12 Dokumen	615.368.428	Puskesmas Kedurus
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					3.261.300	1.100.000	1.100.000	2.161.300		3.446.542	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.261.300	1.100.000	1.100.000	2.161.300	12 Dokumen	3.446.542	Puskesmas Kedurus
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					12.443.408	687.500	687.500	11.755.908		13.498.609	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.443.408	687.500	687.500	11.755.908	12 Dokumen	13.498.609	Puskesmas Kedurus
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					1.027.200	704.000	704.000	323.200		1.099.104	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.027.200	704.000	704.000	323.200	12 Dokumen	1.099.104	Puskesmas Kedurus
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.008.290	825.000	17.813.400	-14.805.110		3.230.903	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.008.290	825.000	17.813.400	-14.805.110	68%	3.230.903	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.008.290	825.000	17.813.400	-14.805.110		3.230.903	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Kedurus					3.008.290	825.000	17.813.400	-14.805.110		3.230.903	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.008.290	825.000	17.813.400	-14.805.110	12 Dokumen	3.230.903	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.008.290	825.000	17.813.400	-14.805.110		3.230.903	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.008.290	825.000	17.813.400	-14.805.110	12 Dokumen	3.230.903	Puskesmas Kedurus
	Puskesmas Kenjeran					3.522.811.626	3.659.109.473	4.389.811.108	-866.999.482		3.586.648.811	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.522.811.626	3.522.811.626	4.389.811.108	-866.999.482		3.586.648.811	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.522.811.626	3.659.109.473	4.389.811.108	-866.999.482		3.586.648.811	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.460.237.993	2.460.237.993	3.057.214.428	-596.976.435		2.467.183.245	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.460.237.993	2.460.237.993	3.057.214.428	-596.976.435	89,97 %	2.467.183.245	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.460.237.993	2.460.237.993	3.057.214.428	-596.976.435		2.467.183.245	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Kenjeran					2.460.237.993	2.460.237.993	3.057.214.428	-596.976.435		2.467.183.245	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.460.237.993	2.460.237.993	3.057.214.428	-596.976.435	1 Unit Kerja	2.467.183.245	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.460.237.993	2.460.237.993	3.057.214.428	-596.976.435		2.467.183.245	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.460.237.993	2.460.237.993	3.057.214.428	-596.976.435	1 Unit Kerja	2.467.183.245	Puskesmas Kenjeran
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.059.066.498	1.198.046.480	1.315.690.780	-256.624.282		1.115.698.903	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.059.066.498	1.198.046.480	1.315.690.780	-256.624.282	91%	1.115.698.903	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.059.066.498	1.198.046.480	1.315.690.780	-256.624.282	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.115.698.903	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.059.066.498	1.198.046.480	1.315.690.780	-256.624.282	80%	1.115.698.903	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.059.066.498	1.198.046.480	1.315.690.780	-256.624.282	98,70 %	1.115.698.903	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.059.066.498	1.198.046.480	1.315.690.780	-256.624.282	82%	1.115.698.903	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.059.066.498	1.198.046.480	1.315.690.780	-256.624.282	40%	1.115.698.903	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.059.066.498	1.198.046.480	1.315.690.780	-256.624.282	100%	1.115.698.903	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.059.066.498	1.198.046.480	1.315.690.780	-256.624.282	95,45%	1.115.698.903	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.059.066.498	1.198.046.480	1.315.690.780	-256.624.282	90,75 %	1.115.698.903	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.059.066.498	1.198.046.480	1.315.690.780	-256.624.282	0,58 %	1.115.698.903	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.059.066.498	1.198.046.480	1.315.690.780	-256.624.282	12%	1.115.698.903	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.059.066.498	1.198.046.480	1.315.690.780	-256.624.282	21,6 %	1.115.698.903	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.059.066.498	1.198.046.480	1.315.690.780	-256.624.282	1,92 %	1.115.698.903	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.059.066.498	1.198.046.480	1.315.690.780	-256.624.282	80%	1.115.698.903	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.059.066.498	1.198.046.480	1.315.690.780	-256.624.282	69%	1.115.698.903	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.059.066.498	1.198.046.480	1.315.690.780	-256.624.282	100%	1.115.698.903	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846		3.347.096.709	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Kenjeran					3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846		3.347.096.709	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6603 Orang	7276 Orang	6501 Orang	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	7116 Orang	3.347.096.709	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	12 Laporan	3.347.096.709	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	12 Dokumen	3.347.096.709	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	12 Dokumen	3.347.096.709	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	12 Dokumen	3.347.096.709	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	12 Dokumen	3.347.096.709	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	12 Dokumen	3.347.096.709	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	12 Dokumen	3.347.096.709	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	12 Dokumen	3.347.096.709	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	558 Orang	578 Orang	457 Orang	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	573 Orang	3.347.096.709	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	624 Orang	1011 Orang	972 Orang	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	867 Orang	3.347.096.709	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	95 Orang	91 Orang	88 Orang	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	92 Orang	3.347.096.709	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Kenjeran					3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846		3.347.096.709	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6603 Orang	7276 Orang	6501 Orang	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	7116 Orang	3.347.096.709	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	12 Laporan	3.347.096.709	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	12 Dokumen	3.347.096.709	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	12 Dokumen	3.347.096.709	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	12 Dokumen	3.347.096.709	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	12 Dokumen	3.347.096.709	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	12 Dokumen	3.347.096.709	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	12 Dokumen	3.347.096.709	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	12 Dokumen	3.347.096.709	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	558 Orang	578 Orang	457 Orang	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	573 Orang	3.347.096.709	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	624 Orang	1011 Orang	972 Orang	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	867 Orang	3.347.096.709	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	95 Orang	91 Orang	88 Orang	3.177.199.494	3.594.139.440	3.947.072.340	-769.872.846	92 Orang	3.347.096.709	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					80.717.551	75.504.000	75.504.000	5.213.551		86.052.981	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	558 Orang	578 Orang	457 Orang	80.717.551	75.504.000	75.504.000	5.213.551	573 Orang	86.052.981	Puskesmas Kenjeran
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.733.011	18.264.000	1.920.000	-186.989		1.854.305	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6603 Orang	7276 Orang	6501 Orang	1.733.011	18.264.000	1.920.000	-186.989	7116 Orang	1.854.305	Puskesmas Kenjeran
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					2.875.500	1.350.000	1.350.000	1.525.500		3.076.785	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	95 Orang	91 Orang	88 Orang	2.875.500	1.350.000	1.350.000	1.525.500	92 Orang	3.076.785	Puskesmas Kenjeran
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					17.796.240	16.992.000	14.040.000	3.756.240		19.041.977	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	624 Orang	1011 Orang	972 Orang	17.796.240	16.992.000	14.040.000	3.756.240	867 Orang	19.041.977	Puskesmas Kenjeran
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					212.111.433	245.026.800	289.823.100	-77.711.667		226.959.233	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	212.111.433	245.026.800	289.823.100	-77.711.667	12 Dokumen	226.959.233	Puskesmas Kenjeran
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.560.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.560.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Kenjeran
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					10.795.653	10.246.000	11.116.000	-320.347		11.549.189	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.795.653	10.246.000	11.116.000	-320.347	12 Dokumen	11.549.189	Puskesmas Kenjeran
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					110.274.414	37.608.000	5.760.000	104.514.414		117.993.623	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	110.274.414	37.608.000	5.760.000	104.514.414	12 Laporan	117.993.623	Puskesmas Kenjeran
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					608.609.342	789.818.180	911.800.180	-303.190.838		633.854.458	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	608.609.342	789.818.180	911.800.180	-303.190.838	12 Dokumen	633.854.458	Puskesmas Kenjeran
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					896.858	550.000	550.000	346.858		947.799	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	896.858	550.000	550.000	346.858	12 Dokumen	947.799	Puskesmas Kenjeran
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					12.443.408	687.500	687.500	11.755.908		13.498.609	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.443.408	687.500	687.500	11.755.908	12 Dokumen	13.498.609	Puskesmas Kenjeran
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					513.600	440.000	440.000	73.600		549.552	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	513.600	440.000	440.000	73.600	12 Dokumen	549.552	Puskesmas Kenjeran
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.507.135	825.000	16.905.900	-13.398.765		3.766.663	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.507.135	825.000	16.905.900	-13.398.765	68%	3.766.663	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.507.135	825.000	16.905.900	-13.398.765		3.766.663	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Kenjeran					3.507.135	825.000	16.905.900	-13.398.765		3.766.663	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.507.135	825.000	16.905.900	-13.398.765	12 Dokumen	3.766.663	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.507.135	825.000	16.905.900	-13.398.765		3.766.663	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.507.135	825.000	16.905.900	-13.398.765	12 Dokumen	3.766.663	Puskesmas Kenjeran
	Puskesmas Keputih					3.298.511.936	2.857.988.170	3.654.470.910	-355.958.974		3.364.626.356	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.298.511.936	3.298.511.936	3.654.470.910	-355.958.974		3.364.626.356	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.298.511.936	2.857.988.170	3.654.470.910	-355.958.974		3.364.626.356	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.193.493.449	2.193.493.449	2.989.616.989	-796.123.540		2.199.685.681	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.193.493.449	2.193.493.449	2.989.616.989	-796.123.540	89,97 %	2.199.685.681	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.193.493.449	2.193.493.449	2.989.616.989	-796.123.540		2.199.685.681	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Keputih					2.193.493.449	2.193.493.449	2.989.616.989	-796.123.540		2.199.685.681	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.193.493.449	2.193.493.449	2.989.616.989	-796.123.540	1 Unit Kerja	2.199.685.681	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.193.493.449	2.193.493.449	2.989.616.989	-796.123.540		2.199.685.681	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.193.493.449	2.193.493.449	2.989.616.989	-796.123.540	1 Unit Kerja	2.199.685.681	Puskesmas Keputih
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.102.085.372	663.669.721	654.185.021	447.900.351		1.161.790.510	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.102.085.372	663.669.721	654.185.021	447.900.351	91%	1.161.790.510	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.102.085.372	663.669.721	654.185.021	447.900.351	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.161.790.510	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.102.085.372	663.669.721	654.185.021	447.900.351	80%	1.161.790.510	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.102.085.372	663.669.721	654.185.021	447.900.351	98,70 %	1.161.790.510	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.102.085.372	663.669.721	654.185.021	447.900.351	82%	1.161.790.510	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.102.085.372	663.669.721	654.185.021	447.900.351	40%	1.161.790.510	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.102.085.372	663.669.721	654.185.021	447.900.351	100%	1.161.790.510	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.102.085.372	663.669.721	654.185.021	447.900.351	95,45%	1.161.790.510	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.102.085.372	663.669.721	654.185.021	447.900.351	90,75 %	1.161.790.510	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.102.085.372	663.669.721	654.185.021	447.900.351	0,58 %	1.161.790.510	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.102.085.372	663.669.721	654.185.021	447.900.351	12%	1.161.790.510	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.102.085.372	663.669.721	654.185.021	447.900.351	21,6 %	1.161.790.510	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.102.085.372	663.669.721	654.185.021	447.900.351	1,92 %	1.161.790.510	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.102.085.372	663.669.721	654.185.021	447.900.351	80%	1.161.790.510	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.102.085.372	663.669.721	654.185.021	447.900.351	69%	1.161.790.510	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.102.085.372	663.669.721	654.185.021	447.900.351	100%	1.161.790.510	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053		3.485.371.530	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Keputih					3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053		3.485.371.530	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8453 Orang	9312 Orang	5332 Orang	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	9108 Orang	3.485.371.530	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	12 Laporan	3.485.371.530	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	12 Dokumen	3.485.371.530	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	12 Dokumen	3.485.371.530	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	12 Dokumen	3.485.371.530	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	12 Dokumen	3.485.371.530	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	12 Dokumen	3.485.371.530	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	12 Dokumen	3.485.371.530	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	12 Dokumen	3.485.371.530	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	492 Orang	511 Orang	518 Orang	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	506 Orang	3.485.371.530	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	510 Orang	827 Orang	834 Orang	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	709 Orang	3.485.371.530	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	81 Orang	77 Orang	76 Orang	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	78 Orang	3.485.371.530	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Keputih					3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053		3.485.371.530	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8453 Orang	9312 Orang	5332 Orang	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	9108 Orang	3.485.371.530	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	12 Laporan	3.485.371.530	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	12 Dokumen	3.485.371.530	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	12 Dokumen	3.485.371.530	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	12 Dokumen	3.485.371.530	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	12 Dokumen	3.485.371.530	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	12 Dokumen	3.485.371.530	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	12 Dokumen	3.485.371.530	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	12 Dokumen	3.485.371.530	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	492 Orang	511 Orang	518 Orang	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	506 Orang	3.485.371.530	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	510 Orang	827 Orang	834 Orang	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	709 Orang	3.485.371.530	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	81 Orang	77 Orang	76 Orang	3.306.256.116	1.991.009.163	1.962.555.063	1.343.701.053	78 Orang	3.485.371.530	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339		52.955.681	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	492 Orang	511 Orang	518 Orang	49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339	506 Orang	52.955.681	Puskesmas Keputih
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					770.227	25.035.000	2.280.000	-1.509.773		824.135	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8453 Orang	9312 Orang	5332 Orang	770.227	25.035.000	2.280.000	-1.509.773	9108 Orang	824.135	Puskesmas Keputih
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					4.409.100	3.600.000	3.600.000	809.100		4.717.737	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	81 Orang	77 Orang	76 Orang	4.409.100	3.600.000	3.600.000	809.100	78 Orang	4.717.737	Puskesmas Keputih
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					17.411.040	16.272.000	13.860.000	3.551.040		18.629.813	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	510 Orang	827 Orang	834 Orang	17.411.040	16.272.000	13.860.000	3.551.040	709 Orang	18.629.813	Puskesmas Keputih
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					307.426.282	189.916.800	244.706.100	62.720.182		328.946.121	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	307.426.282	189.916.800	244.706.100	62.720.182	12 Dokumen	328.946.121	Puskesmas Keputih
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.260.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.260.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Keputih
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					5.333.668	5.078.000	5.078.000	255.668		5.705.958	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.333.668	5.078.000	5.078.000	255.668	12 Dokumen	5.705.958	Puskesmas Keputih
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					98.068.710	42.573.000	8.490.000	89.578.710		104.933.520	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	98.068.710	42.573.000	8.490.000	89.578.710	12 Laporan	104.933.520	Puskesmas Keputih
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					607.643.209	330.858.421	324.394.421	283.248.788		632.848.249	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	607.643.209	330.858.421	324.394.421	283.248.788	12 Dokumen	632.848.249	Puskesmas Keputih
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.483.892	825.000	825.000	658.892		1.568.177	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.483.892	825.000	825.000	658.892	12 Dokumen	1.568.177	Puskesmas Keputih
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					6.999.417	687.500	687.500	6.311.917		7.592.967	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.999.417	687.500	687.500	6.311.917	12 Dokumen	7.592.967	Puskesmas Keputih
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					2.568.000	1.100.000	1.100.000	1.468.000		2.747.760	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.568.000	1.100.000	1.100.000	1.468.000	12 Dokumen	2.747.760	Puskesmas Keputih
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.933.115	825.000	10.668.900	-7.735.785		3.150.165	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	2.933.115	825.000	10.668.900	-7.735.785	68%	3.150.165	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.933.115	825.000	10.668.900	-7.735.785		3.150.165	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Keputih					2.933.115	825.000	10.668.900	-7.735.785		3.150.165	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.933.115	825.000	10.668.900	-7.735.785	12 Dokumen	3.150.165	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					2.933.115	825.000	10.668.900	-7.735.785		3.150.165	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.933.115	825.000	10.668.900	-7.735.785	12 Dokumen	3.150.165	Puskesmas Keputih
	Puskesmas Ketabang					2.499.903.076	2.328.778.920	2.810.610.713	-310.707.637		2.549.580.015	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.499.903.076	2.499.903.076	2.810.610.713	-310.707.637		2.549.580.015	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.499.903.076	2.328.778.920	2.810.610.713	-310.707.637		2.549.580.015	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.684.867.232	1.684.867.232	2.118.604.225	-433.736.993		1.689.623.612	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	1.684.867.232	1.684.867.232	2.118.604.225	-433.736.993	89,97 %	1.689.623.612	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1.684.867.232	1.684.867.232	2.118.604.225	-433.736.993		1.689.623.612	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Ketabang					1.684.867.232	1.684.867.232	2.118.604.225	-433.736.993		1.689.623.612	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.684.867.232	1.684.867.232	2.118.604.225	-433.736.993	1 Unit Kerja	1.689.623.612	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.684.867.232	1.684.867.232	2.118.604.225	-433.736.993		1.689.623.612	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.684.867.232	1.684.867.232	2.118.604.225	-433.736.993	1 Unit Kerja	1.689.623.612	Puskesmas Ketabang
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					811.836.214	643.086.688	684.393.388	127.442.826		856.520.000	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	811.836.214	643.086.688	684.393.388	127.442.826	91%	856.520.000	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	811.836.214	643.086.688	684.393.388	127.442.826	4 per 1.000 kelahiran hidup	856.520.000	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	811.836.214	643.086.688	684.393.388	127.442.826	80%	856.520.000	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	811.836.214	643.086.688	684.393.388	127.442.826	98,70 %	856.520.000	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	811.836.214	643.086.688	684.393.388	127.442.826	82%	856.520.000	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	811.836.214	643.086.688	684.393.388	127.442.826	40%	856.520.000	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	811.836.214	643.086.688	684.393.388	127.442.826	100%	856.520.000	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	811.836.214	643.086.688	684.393.388	127.442.826	95,45%	856.520.000	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	811.836.214	643.086.688	684.393.388	127.442.826	90,75 %	856.520.000	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	811.836.214	643.086.688	684.393.388	127.442.826	0,58 %	856.520.000	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	811.836.214	643.086.688	684.393.388	127.442.826	12%	856.520.000	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	811.836.214	643.086.688	684.393.388	127.442.826	21,6 %	856.520.000	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	811.836.214	643.086.688	684.393.388	127.442.826	1,92 %	856.520.000	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	811.836.214	643.086.688	684.393.388	127.442.826	80%	856.520.000	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	811.836.214	643.086.688	684.393.388	127.442.826	69%	856.520.000	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	811.836.214	643.086.688	684.393.388	127.442.826	100%	856.520.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478		2.569.560.000	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Ketabang					2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478		2.569.560.000	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2538 Orang	2795 Orang	2280 Orang	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	2734 Orang	2.569.560.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	12 Laporan	2.569.560.000	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	12 Dokumen	2.569.560.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	12 Dokumen	2.569.560.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	12 Dokumen	2.569.560.000	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	12 Dokumen	2.569.560.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	12 Dokumen	2.569.560.000	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	12 Dokumen	2.569.560.000	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	12 Dokumen	2.569.560.000	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	247 Orang	235 Orang	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	245 Orang	2.569.560.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	267 Orang	431 Orang	394 Orang	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	370 Orang	2.569.560.000	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	42 Orang	38 Orang	45 Orang	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	39 Orang	2.569.560.000	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Ketabang					2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478		2.569.560.000	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2538 Orang	2795 Orang	2280 Orang	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	2734 Orang	2.569.560.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	12 Laporan	2.569.560.000	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	12 Dokumen	2.569.560.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	12 Dokumen	2.569.560.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	12 Dokumen	2.569.560.000	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	12 Dokumen	2.569.560.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	12 Dokumen	2.569.560.000	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	12 Dokumen	2.569.560.000	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	12 Dokumen	2.569.560.000	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	247 Orang	235 Orang	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	245 Orang	2.569.560.000	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	267 Orang	431 Orang	394 Orang	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	370 Orang	2.569.560.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	42 Orang	38 Orang	45 Orang	2.435.508.642	1.929.260.064	2.053.180.164	382.328.478	39 Orang	2.569.560.000	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.672.339	40.656.000	40.656.000	9.016.339		52.955.681	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	247 Orang	235 Orang	49.672.339	40.656.000	40.656.000	9.016.339	245 Orang	52.955.681	Puskesmas Ketabang
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					2.695.795	3.075.000	2.880.000	-184.205		2.884.474	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2538 Orang	2795 Orang	2280 Orang	2.695.795	3.075.000	2.880.000	-184.205	2734 Orang	2.884.474	Puskesmas Ketabang
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					1.917.000	450.000	450.000	1.467.000		2.051.190	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	42 Orang	38 Orang	45 Orang	1.917.000	450.000	450.000	1.467.000	39 Orang	2.051.190	Puskesmas Ketabang
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.759.240	17.532.000	13.860.000	4.899.240		20.072.387	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	267 Orang	431 Orang	394 Orang	18.759.240	17.532.000	13.860.000	4.899.240	370 Orang	20.072.387	Puskesmas Ketabang
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					227.482.010	90.694.200	147.424.900	80.057.110		243.405.750	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	227.482.010	90.694.200	147.424.900	80.057.110	12 Dokumen	243.405.750	Puskesmas Ketabang
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.020.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.020.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Ketabang
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					5.333.668	6.458.000	5.378.000	-44.332		5.705.958	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.333.668	6.458.000	5.378.000	-44.332	12 Dokumen	5.705.958	Puskesmas Ketabang
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					75.576.240	12.030.000	2.310.000	73.266.240		80.866.577	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	75.576.240	12.030.000	2.310.000	73.266.240	12 Laporan	80.866.577	Puskesmas Ketabang
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					420.270.104	467.843.988	465.406.988	-45.136.884		437.702.908	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	420.270.104	467.843.988	465.406.988	-45.136.884	12 Dokumen	437.702.908	Puskesmas Ketabang
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					3.359.139	1.650.000	1.650.000	1.709.139		3.549.938	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.359.139	1.650.000	1.650.000	1.709.139	12 Dokumen	3.549.938	Puskesmas Ketabang
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					5.443.991	687.500	687.500	4.756.491		5.905.641	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.443.991	687.500	687.500	4.756.491	12 Dokumen	5.905.641	Puskesmas Ketabang
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					1.027.200	990.000	990.000	37.200		1.099.104	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.027.200	990.000	990.000	37.200	12 Dokumen	1.099.104	Puskesmas Ketabang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.199.630	825.000	7.613.100	-4.413.470		3.436.403	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.199.630	825.000	7.613.100	-4.413.470	68%	3.436.403	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.199.630	825.000	7.613.100	-4.413.470		3.436.403	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Ketabang					3.199.630	825.000	7.613.100	-4.413.470		3.436.403	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.199.630	825.000	7.613.100	-4.413.470	12 Dokumen	3.436.403	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.199.630	825.000	7.613.100	-4.413.470		3.436.403	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.199.630	825.000	7.613.100	-4.413.470	12 Dokumen	3.436.403	Puskesmas Ketabang
	Puskesmas Klampis Ngasem					2.494.905.918	2.402.645.730	3.015.289.549	-520.383.631		2.542.426.611	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.494.905.918	2.494.905.918	3.015.289.549	-520.383.631		2.542.426.611	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.494.905.918	2.402.645.730	3.015.289.549	-520.383.631		2.542.426.611	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.736.448.738	1.736.448.738	2.335.199.157	-598.750.419		1.741.350.733	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	1.736.448.738	1.736.448.738	2.335.199.157	-598.750.419	89,97 %	1.741.350.733	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1.736.448.738	1.736.448.738	2.335.199.157	-598.750.419		1.741.350.733	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Klampis Ngasem					1.736.448.738	1.736.448.738	2.335.199.157	-598.750.419		1.741.350.733	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.736.448.738	1.736.448.738	2.335.199.157	-598.750.419	1 Unit Kerja	1.741.350.733	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.736.448.738	1.736.448.738	2.335.199.157	-598.750.419		1.741.350.733	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.736.448.738	1.736.448.738	2.335.199.157	-598.750.419	1 Unit Kerja	1.741.350.733	Puskesmas Klampis Ngasem
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					755.205.165	665.371.992	666.052.192	89.152.973		797.583.214	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	755.205.165	665.371.992	666.052.192	89.152.973	91%	797.583.214	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	755.205.165	665.371.992	666.052.192	89.152.973	4 per 1.000 kelahiran hidup	797.583.214	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	755.205.165	665.371.992	666.052.192	89.152.973	80%	797.583.214	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	755.205.165	665.371.992	666.052.192	89.152.973	98,70 %	797.583.214	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	755.205.165	665.371.992	666.052.192	89.152.973	82%	797.583.214	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	755.205.165	665.371.992	666.052.192	89.152.973	40%	797.583.214	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	755.205.165	665.371.992	666.052.192	89.152.973	100%	797.583.214	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	755.205.165	665.371.992	666.052.192	89.152.973	95,45%	797.583.214	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	755.205.165	665.371.992	666.052.192	89.152.973	90,75 %	797.583.214	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	755.205.165	665.371.992	666.052.192	89.152.973	0,58 %	797.583.214	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	755.205.165	665.371.992	666.052.192	89.152.973	12%	797.583.214	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	755.205.165	665.371.992	666.052.192	89.152.973	21,6 %	797.583.214	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	755.205.165	665.371.992	666.052.192	89.152.973	1,92 %	797.583.214	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	755.205.165	665.371.992	666.052.192	89.152.973	80%	797.583.214	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	755.205.165	665.371.992	666.052.192	89.152.973	69%	797.583.214	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	755.205.165	665.371.992	666.052.192	89.152.973	100%	797.583.214	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919		2.392.749.642	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Klampis Ngasem					2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919		2.392.749.642	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3236 Orang	3564 Orang	3247 Orang	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	3486 Orang	2.392.749.642	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	12 Laporan	2.392.749.642	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	12 Dokumen	2.392.749.642	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	12 Dokumen	2.392.749.642	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	12 Dokumen	2.392.749.642	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	12 Dokumen	2.392.749.642	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	12 Dokumen	2.392.749.642	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	12 Dokumen	2.392.749.642	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	12 Dokumen	2.392.749.642	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	328 Orang	340 Orang	325 Orang	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	337 Orang	2.392.749.642	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	338 Orang	547 Orang	510 Orang	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	469 Orang	2.392.749.642	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	52 Orang	48 Orang	46 Orang	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	49 Orang	2.392.749.642	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Klampis Ngasem					2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919		2.392.749.642	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3236 Orang	3564 Orang	3247 Orang	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	3486 Orang	2.392.749.642	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	12 Laporan	2.392.749.642	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	12 Dokumen	2.392.749.642	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	12 Dokumen	2.392.749.642	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	12 Dokumen	2.392.749.642	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	12 Dokumen	2.392.749.642	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	12 Dokumen	2.392.749.642	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	12 Dokumen	2.392.749.642	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	12 Dokumen	2.392.749.642	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	328 Orang	340 Orang	325 Orang	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	337 Orang	2.392.749.642	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	338 Orang	547 Orang	510 Orang	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	469 Orang	2.392.749.642	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	52 Orang	48 Orang	46 Orang	2.265.615.495	1.996.115.976	1.998.156.576	267.458.919	49 Orang	2.392.749.642	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.672.339	46.464.000	63.888.000	-14.215.661		52.955.681	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	328 Orang	340 Orang	325 Orang	49.672.339	46.464.000	63.888.000	-14.215.661	337 Orang	52.955.681	Puskesmas Klampis Ngasem
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.026.970	17.535.000	3.120.000	-2.093.030		1.098.847	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3236 Orang	3564 Orang	3247 Orang	1.026.970	17.535.000	3.120.000	-2.093.030	3486 Orang	1.098.847	Puskesmas Klampis Ngasem
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					2.492.100	7.380.000	4.320.000	-1.827.900		2.666.547	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	52 Orang	48 Orang	46 Orang	2.492.100	7.380.000	4.320.000	-1.827.900	49 Orang	2.666.547	Puskesmas Klampis Ngasem
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					19.722.240	18.072.000	13.860.000	5.862.240		21.102.797	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	338 Orang	547 Orang	510 Orang	19.722.240	18.072.000	13.860.000	5.862.240	469 Orang	21.102.797	Puskesmas Klampis Ngasem
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					201.235.597	107.373.600	165.916.800	35.318.797		215.322.088	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	201.235.597	107.373.600	165.916.800	35.318.797	12 Dokumen	215.322.088	Puskesmas Klampis Ngasem
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	900.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	900.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Klampis Ngasem
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					6.360.196	6.248.000	5.468.000	892.196		6.804.138	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.360.196	6.248.000	5.468.000	892.196	12 Dokumen	6.804.138	Puskesmas Klampis Ngasem
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					98.797.380	66.318.000	26.850.000	71.947.380		105.713.197	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	98.797.380	66.318.000	26.850.000	71.947.380	12 Laporan	105.713.197	Puskesmas Klampis Ngasem
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					361.713.370	392.193.892	377.041.892	-15.328.522		376.717.241	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	361.713.370	392.193.892	377.041.892	-15.328.522	12 Dokumen	376.717.241	Puskesmas Klampis Ngasem
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5.095.781	1.650.000	1.650.000	3.445.781		5.385.222	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.095.781	1.650.000	1.650.000	3.445.781	12 Dokumen	5.385.222	Puskesmas Klampis Ngasem
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					6.221.704	687.500	687.500	5.534.204		6.749.304	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.221.704	687.500	687.500	5.534.204	12 Dokumen	6.749.304	Puskesmas Klampis Ngasem
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					2.568.000	550.000	550.000	2.018.000		2.747.760	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.568.000	550.000	550.000	2.018.000	12 Dokumen	2.747.760	Puskesmas Klampis Ngasem
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.252.015	825.000	14.038.200	-10.786.185		3.492.664	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.252.015	825.000	14.038.200	-10.786.185	68%	3.492.664	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.252.015	825.000	14.038.200	-10.786.185		3.492.664	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Klampis Ngasem					3.252.015	825.000	14.038.200	-10.786.185		3.492.664	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.252.015	825.000	14.038.200	-10.786.185	12 Dokumen	3.492.664	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.252.015	825.000	14.038.200	-10.786.185		3.492.664	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.252.015	825.000	14.038.200	-10.786.185	12 Dokumen	3.492.664	Puskesmas Klampis Ngasem
	Puskesmas Krembangan Selatan					4.000.786.723	4.520.910.335	5.307.269.767	-1.306.483.044		4.063.360.137	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.000.786.723	4.000.786.723	5.307.269.767	-1.306.483.044		4.063.360.137	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.000.786.723	4.520.910.335	5.307.269.767	-1.306.483.044		4.063.360.137	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.029.658.879	3.029.658.879	3.840.935.511	-811.276.632		3.038.211.606	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.029.658.879	3.029.658.879	3.840.935.511	-811.276.632	89,97 %	3.038.211.606	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.029.658.879	3.029.658.879	3.840.935.511	-811.276.632		3.038.211.606	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Krembangan Selatan					3.029.658.879	3.029.658.879	3.840.935.511	-811.276.632		3.038.211.606	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.029.658.879	3.029.658.879	3.840.935.511	-811.276.632	1 Unit Kerja	3.038.211.606	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.029.658.879	3.029.658.879	3.840.935.511	-811.276.632		3.038.211.606	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.029.658.879	3.029.658.879	3.840.935.511	-811.276.632	1 Unit Kerja	3.038.211.606	Puskesmas Krembangan Selatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					967.673.094	1.490.426.456	1.451.315.956	-483.642.862		1.021.438.129	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	967.673.094	1.490.426.456	1.451.315.956	-483.642.862	91%	1.021.438.129	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	967.673.094	1.490.426.456	1.451.315.956	-483.642.862	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.021.438.129	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	967.673.094	1.490.426.456	1.451.315.956	-483.642.862	80%	1.021.438.129	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	967.673.094	1.490.426.456	1.451.315.956	-483.642.862	98,70 %	1.021.438.129	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	967.673.094	1.490.426.456	1.451.315.956	-483.642.862	82%	1.021.438.129	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	967.673.094	1.490.426.456	1.451.315.956	-483.642.862	40%	1.021.438.129	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	967.673.094	1.490.426.456	1.451.315.956	-483.642.862	100%	1.021.438.129	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	967.673.094	1.490.426.456	1.451.315.956	-483.642.862	95,45%	1.021.438.129	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	967.673.094	1.490.426.456	1.451.315.956	-483.642.862	90,75 %	1.021.438.129	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	967.673.094	1.490.426.456	1.451.315.956	-483.642.862	0,58 %	1.021.438.129	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	967.673.094	1.490.426.456	1.451.315.956	-483.642.862	12%	1.021.438.129	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	967.673.094	1.490.426.456	1.451.315.956	-483.642.862	21,6 %	1.021.438.129	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	967.673.094	1.490.426.456	1.451.315.956	-483.642.862	1,92 %	1.021.438.129	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	967.673.094	1.490.426.456	1.451.315.956	-483.642.862	80%	1.021.438.129	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	967.673.094	1.490.426.456	1.451.315.956	-483.642.862	69%	1.021.438.129	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	967.673.094	1.490.426.456	1.451.315.956	-483.642.862	100%	1.021.438.129	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586		3.064.314.387	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Krembangan Selatan					2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586		3.064.314.387	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6151 Orang	6777 Orang	5522 Orang	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	6628 Orang	3.064.314.387	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	12 Laporan	3.064.314.387	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	12 Dokumen	3.064.314.387	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	12 Dokumen	3.064.314.387	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	12 Dokumen	3.064.314.387	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	12 Dokumen	3.064.314.387	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	12 Dokumen	3.064.314.387	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	12 Dokumen	3.064.314.387	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	12 Dokumen	3.064.314.387	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	488 Orang	506 Orang	427 Orang	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	501 Orang	3.064.314.387	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	640 Orang	1037 Orang	923 Orang	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	889 Orang	3.064.314.387	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang	88 Orang	83 Orang	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	89 Orang	3.064.314.387	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Krembangan Selatan					2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586		3.064.314.387	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6151 Orang	6777 Orang	5522 Orang	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	6628 Orang	3.064.314.387	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	12 Laporan	3.064.314.387	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	12 Dokumen	3.064.314.387	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	12 Dokumen	3.064.314.387	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	12 Dokumen	3.064.314.387	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	12 Dokumen	3.064.314.387	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	12 Dokumen	3.064.314.387	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	12 Dokumen	3.064.314.387	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	12 Dokumen	3.064.314.387	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	488 Orang	506 Orang	427 Orang	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	501 Orang	3.064.314.387	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	640 Orang	1037 Orang	923 Orang	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	889 Orang	3.064.314.387	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang	88 Orang	83 Orang	2.903.019.282	4.471.279.368	4.353.947.868	-1.450.928.586	89 Orang	3.064.314.387	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	488 Orang	506 Orang	427 Orang	69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727	501 Orang	74.468.926	Puskesmas Krembangan Selatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					2.631.610	29.736.000	7.560.000	-4.928.390		2.815.796	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6151 Orang	6777 Orang	5522 Orang	2.631.610	29.736.000	7.560.000	-4.928.390	6628 Orang	2.815.796	Puskesmas Krembangan Selatan
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					5.367.600	5.040.000	5.040.000	327.600		5.743.332	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang	88 Orang	83 Orang	5.367.600	5.040.000	5.040.000	327.600	89 Orang	5.743.332	Puskesmas Krembangan Selatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.566.640	16.812.000	14.640.000	3.926.640		19.866.305	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	640 Orang	1037 Orang	923 Orang	18.566.640	16.812.000	14.640.000	3.926.640	889 Orang	19.866.305	Puskesmas Krembangan Selatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					268.882.775	326.746.800	371.841.700	-102.958.925		287.704.569	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	268.882.775	326.746.800	371.841.700	-102.958.925	12 Dokumen	287.704.569	Puskesmas Krembangan Selatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.530.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.530.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Krembangan Selatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					8.577.925	7.512.000	7.902.000	675.925		9.176.664	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.577.925	7.512.000	7.902.000	675.925	12 Dokumen	9.176.664	Puskesmas Krembangan Selatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					97.270.704	57.386.400	11.700.000	85.570.704		104.079.653	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	97.270.704	57.386.400	11.700.000	85.570.704	12 Laporan	104.079.653	Puskesmas Krembangan Selatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					483.696.924	972.804.756	957.073.756	-473.376.832		503.760.672	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	483.696.924	972.804.756	957.073.756	-473.376.832	12 Dokumen	503.760.672	Puskesmas Krembangan Selatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.793.715	825.000	825.000	968.715		1.895.598	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.793.715	825.000	825.000	968.715	12 Dokumen	1.895.598	Puskesmas Krembangan Selatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					8.165.986	687.500	687.500	7.478.486		8.858.462	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.165.986	687.500	687.500	7.478.486	12 Dokumen	8.858.462	Puskesmas Krembangan Selatan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					2.568.000	1.650.000	1.650.000	918.000		2.747.760	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.568.000	1.650.000	1.650.000	918.000	12 Dokumen	2.747.760	Puskesmas Krembangan Selatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.454.750	825.000	15.018.300	-11.563.550		3.710.402	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.454.750	825.000	15.018.300	-11.563.550	68%	3.710.402	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.454.750	825.000	15.018.300	-11.563.550		3.710.402	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Krembangan Selatan					3.454.750	825.000	15.018.300	-11.563.550		3.710.402	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.454.750	825.000	15.018.300	-11.563.550	12 Dokumen	3.710.402	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.454.750	825.000	15.018.300	-11.563.550		3.710.402	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.454.750	825.000	15.018.300	-11.563.550	12 Dokumen	3.710.402	Puskesmas Krembangan Selatan
	Puskesmas Lidah Kulon					2.894.732.240	2.928.323.798	3.214.156.649	-319.424.409		2.952.108.178	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.894.732.240	2.894.732.240	3.214.156.649	-319.424.409		2.952.108.178	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.894.732.240	2.928.323.798	3.214.156.649	-319.424.409		2.952.108.178	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.952.465.814	1.952.465.814	2.253.569.265	-301.103.451		1.957.977.625	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	1.952.465.814	1.952.465.814	2.253.569.265	-301.103.451	89,97 %	1.957.977.625	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1.952.465.814	1.952.465.814	2.253.569.265	-301.103.451		1.957.977.625	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Lidah Kulon					1.952.465.814	1.952.465.814	2.253.569.265	-301.103.451		1.957.977.625	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.952.465.814	1.952.465.814	2.253.569.265	-301.103.451	1 Unit Kerja	1.957.977.625	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.952.465.814	1.952.465.814	2.253.569.265	-301.103.451		1.957.977.625	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.952.465.814	1.952.465.814	2.253.569.265	-301.103.451	1 Unit Kerja	1.957.977.625	Puskesmas Lidah Kulon

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					938.695.511	975.032.984	949.997.684	-11.302.173		990.295.391	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	938.695.511	975.032.984	949.997.684	-11.302.173	91%	990.295.391	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	938.695.511	975.032.984	949.997.684	-11.302.173	4 per 1.000 kelahiran hidup	990.295.391	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	938.695.511	975.032.984	949.997.684	-11.302.173	80%	990.295.391	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	938.695.511	975.032.984	949.997.684	-11.302.173	98,70 %	990.295.391	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	938.695.511	975.032.984	949.997.684	-11.302.173	82%	990.295.391	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	938.695.511	975.032.984	949.997.684	-11.302.173	40%	990.295.391	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	938.695.511	975.032.984	949.997.684	-11.302.173	100%	990.295.391	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	938.695.511	975.032.984	949.997.684	-11.302.173	95,45%	990.295.391	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	938.695.511	975.032.984	949.997.684	-11.302.173	90,75 %	990.295.391	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	938.695.511	975.032.984	949.997.684	-11.302.173	0,58 %	990.295.391	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	938.695.511	975.032.984	949.997.684	-11.302.173	12%	990.295.391	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	938.695.511	975.032.984	949.997.684	-11.302.173	21,6 %	990.295.391	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	938.695.511	975.032.984	949.997.684	-11.302.173	1,92 %	990.295.391	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	938.695.511	975.032.984	949.997.684	-11.302.173	80%	990.295.391	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	938.695.511	975.032.984	949.997.684	-11.302.173	69%	990.295.391	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	938.695.511	975.032.984	949.997.684	-11.302.173	100%	990.295.391	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519		2.970.886.173	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Lidah Kulon					2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519		2.970.886.173	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4187 Orang	4612 Orang	4030 Orang	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	4511 Orang	2.970.886.173	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	12 Laporan	2.970.886.173	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	12 Dokumen	2.970.886.173	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	12 Dokumen	2.970.886.173	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	12 Dokumen	2.970.886.173	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	12 Dokumen	2.970.886.173	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	12 Dokumen	2.970.886.173	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	12 Dokumen	2.970.886.173	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	12 Dokumen	2.970.886.173	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	325 Orang	337 Orang	322 Orang	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	334 Orang	2.970.886.173	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	405 Orang	654 Orang	632 Orang	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	561 Orang	2.970.886.173	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	63 Orang	59 Orang	57 Orang	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	60 Orang	2.970.886.173	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Lidah Kulon					2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519		2.970.886.173	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4187 Orang	4612 Orang	4030 Orang	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	4511 Orang	2.970.886.173	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	12 Laporan	2.970.886.173	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	12 Dokumen	2.970.886.173	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	12 Dokumen	2.970.886.173	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	12 Dokumen	2.970.886.173	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	12 Dokumen	2.970.886.173	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	12 Dokumen	2.970.886.173	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	12 Dokumen	2.970.886.173	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	12 Dokumen	2.970.886.173	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	325 Orang	337 Orang	322 Orang	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	334 Orang	2.970.886.173	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	405 Orang	654 Orang	632 Orang	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	561 Orang	2.970.886.173	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	63 Orang	59 Orang	57 Orang	2.816.086.533	2.925.098.952	2.849.993.052	-33.906.519	60 Orang	2.970.886.173	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339		52.955.681	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	325 Orang	337 Orang	322 Orang	49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339	334 Orang	52.955.681	Puskesmas Lidah Kulon
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					3.530.208	15.900.000	2.880.000	650.208		3.777.287	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4187 Orang	4612 Orang	4030 Orang	3.530.208	15.900.000	2.880.000	650.208	4511 Orang	3.777.287	Puskesmas Lidah Kulon
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					2.875.500	2.700.000	2.700.000	175.500		3.076.785	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	63 Orang	59 Orang	57 Orang	2.875.500	2.700.000	2.700.000	175.500	60 Orang	3.076.785	Puskesmas Lidah Kulon
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					17.732.040	16.632.000	13.860.000	3.872.040		18.973.283	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	405 Orang	654 Orang	632 Orang	17.732.040	16.632.000	13.860.000	3.872.040	561 Orang	18.973.283	Puskesmas Lidah Kulon
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					254.419.809	123.543.600	183.726.300	70.693.509		272.229.195	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	254.419.809	123.543.600	183.726.300	70.693.509	12 Dokumen	272.229.195	Puskesmas Lidah Kulon
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	990.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	990.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Lidah Kulon
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					6.296.038	5.138.000	5.318.000	978.038		6.735.502	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.296.038	5.138.000	5.318.000	978.038	12 Dokumen	6.735.502	Puskesmas Lidah Kulon
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					99.615.930	65.412.000	4.500.000	95.115.930		106.589.045	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	99.615.930	65.412.000	4.500.000	95.115.930	12 Laporan	106.589.045	Puskesmas Lidah Kulon
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					489.434.642	695.365.884	684.961.884	-195.527.242		509.736.391	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	489.434.642	695.365.884	684.961.884	-195.527.242	12 Dokumen	509.736.391	Puskesmas Lidah Kulon
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.698.726	1.100.000	1.100.000	1.598.726		2.852.013	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.698.726	1.100.000	1.100.000	1.598.726	12 Dokumen	2.852.013	Puskesmas Lidah Kulon
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					5.443.991	687.500	687.500	4.756.491		5.905.641	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.443.991	687.500	687.500	4.756.491	12 Dokumen	5.905.641	Puskesmas Lidah Kulon
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					6.676.800	1.100.000	1.100.000	5.576.800		7.144.176	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.676.800	1.100.000	1.100.000	5.576.800	12 Dokumen	7.144.176	Puskesmas Lidah Kulon
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.570.915	825.000	10.589.700	-7.018.785		3.835.162	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.570.915	825.000	10.589.700	-7.018.785	68%	3.835.162	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.570.915	825.000	10.589.700	-7.018.785		3.835.162	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Lidah Kulon					3.570.915	825.000	10.589.700	-7.018.785		3.835.162	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.570.915	825.000	10.589.700	-7.018.785	12 Dokumen	3.835.162	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.570.915	825.000	10.589.700	-7.018.785		3.835.162	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.570.915	825.000	10.589.700	-7.018.785	12 Dokumen	3.835.162	Puskesmas Lidah Kulon
	Puskesmas Lontar					3.469.583.923	3.919.849.226	4.284.827.571	-815.243.648		3.538.070.010	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.469.583.923	3.469.583.923	4.284.827.571	-815.243.648		3.538.070.010	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.469.583.923	3.919.849.226	4.284.827.571	-815.243.648		3.538.070.010	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.335.618.950	2.335.618.950	2.764.464.995	-428.846.045		2.342.212.402	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.335.618.950	2.335.618.950	2.764.464.995	-428.846.045	89,97 %	2.342.212.402	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.335.618.950	2.335.618.950	2.764.464.995	-428.846.045		2.342.212.402	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Lontar					2.335.618.950	2.335.618.950	2.764.464.995	-428.846.045		2.342.212.402	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.335.618.950	2.335.618.950	2.764.464.995	-428.846.045	1 Unit Kerja	2.342.212.402	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.335.618.950	2.335.618.950	2.764.464.995	-428.846.045		2.342.212.402	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.335.618.950	2.335.618.950	2.764.464.995	-428.846.045	1 Unit Kerja	2.342.212.402	Puskesmas Lontar
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.131.127.528	1.583.405.276	1.509.954.376	-378.826.848		1.192.810.192	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.131.127.528	1.583.405.276	1.509.954.376	-378.826.848	91%	1.192.810.192	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.131.127.528	1.583.405.276	1.509.954.376	-378.826.848	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.192.810.192	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.131.127.528	1.583.405.276	1.509.954.376	-378.826.848	80%	1.192.810.192	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.131.127.528	1.583.405.276	1.509.954.376	-378.826.848	98,70 %	1.192.810.192	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.131.127.528	1.583.405.276	1.509.954.376	-378.826.848	82%	1.192.810.192	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.131.127.528	1.583.405.276	1.509.954.376	-378.826.848	40%	1.192.810.192	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.131.127.528	1.583.405.276	1.509.954.376	-378.826.848	100%	1.192.810.192	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.131.127.528	1.583.405.276	1.509.954.376	-378.826.848	95,45%	1.192.810.192	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.131.127.528	1.583.405.276	1.509.954.376	-378.826.848	90,75 %	1.192.810.192	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.131.127.528	1.583.405.276	1.509.954.376	-378.826.848	0,58 %	1.192.810.192	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.131.127.528	1.583.405.276	1.509.954.376	-378.826.848	12%	1.192.810.192	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.131.127.528	1.583.405.276	1.509.954.376	-378.826.848	21,6 %	1.192.810.192	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.131.127.528	1.583.405.276	1.509.954.376	-378.826.848	1,92 %	1.192.810.192	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.131.127.528	1.583.405.276	1.509.954.376	-378.826.848	80%	1.192.810.192	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.131.127.528	1.583.405.276	1.509.954.376	-378.826.848	69%	1.192.810.192	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.131.127.528	1.583.405.276	1.509.954.376	-378.826.848	100%	1.192.810.192	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544		3.578.430.576	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Lontar					3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544		3.578.430.576	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7045 Orang	7761 Orang	6898 Orang	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	7591 Orang	3.578.430.576	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	12 Laporan	3.578.430.576	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	12 Dokumen	3.578.430.576	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	12 Dokumen	3.578.430.576	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	12 Dokumen	3.578.430.576	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	12 Dokumen	3.578.430.576	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	12 Dokumen	3.578.430.576	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	12 Dokumen	3.578.430.576	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	12 Dokumen	3.578.430.576	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	568 Orang	588 Orang	542 Orang	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	583 Orang	3.578.430.576	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	699 Orang	1134 Orang	1091 Orang	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	972 Orang	3.578.430.576	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	109 Orang	101 Orang	99 Orang	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	103 Orang	3.578.430.576	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Lontar					3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544		3.578.430.576	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7045 Orang	7761 Orang	6898 Orang	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	7591 Orang	3.578.430.576	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	12 Laporan	3.578.430.576	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	12 Dokumen	3.578.430.576	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	12 Dokumen	3.578.430.576	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	12 Dokumen	3.578.430.576	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	12 Dokumen	3.578.430.576	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	12 Dokumen	3.578.430.576	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	12 Dokumen	3.578.430.576	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	12 Dokumen	3.578.430.576	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	568 Orang	588 Orang	542 Orang	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	583 Orang	3.578.430.576	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	699 Orang	1134 Orang	1091 Orang	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	972 Orang	3.578.430.576	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	109 Orang	101 Orang	99 Orang	3.393.382.584	4.750.215.828	4.529.863.128	-1.136.480.544	103 Orang	3.578.430.576	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.672.339	63.888.000	63.888.000	-14.215.661		52.955.681	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	568 Orang	588 Orang	542 Orang	49.672.339	63.888.000	63.888.000	-14.215.661	583 Orang	52.955.681	Puskesmas Lontar
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					2.888.352	37.324.500	540.000	2.348.352		3.090.508	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7045 Orang	7761 Orang	6898 Orang	2.888.352	37.324.500	540.000	2.348.352	7591 Orang	3.090.508	Puskesmas Lontar
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.137.850	450.000	450.000	2.687.850		3.357.500	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	109 Orang	101 Orang	99 Orang	3.137.850	450.000	450.000	2.687.850	103 Orang	3.357.500	Puskesmas Lontar
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					17.411.040	16.272.000	13.560.000	3.851.040		18.629.813	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	699 Orang	1134 Orang	1091 Orang	17.411.040	16.272.000	13.560.000	3.851.040	972 Orang	18.629.813	Puskesmas Lontar
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					313.356.462	266.887.200	324.348.800	-10.992.338		335.291.415	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	313.356.462	266.887.200	324.348.800	-10.992.338	12 Dokumen	335.291.415	Puskesmas Lontar
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					3.593.856	1.560.000	2.700.000	893.856		3.844.707	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.593.856	1.560.000	2.700.000	893.856	12 Dokumen	3.844.707	Puskesmas Lontar
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					7.643.356	5.588.000	5.528.000	2.115.356		8.176.863	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.643.356	5.588.000	5.528.000	2.115.356	12 Dokumen	8.176.863	Puskesmas Lontar
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					116.173.431	83.364.000	3.180.000	112.993.431		124.305.571	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	116.173.431	83.364.000	3.180.000	112.993.431	12 Laporan	124.305.571	Puskesmas Lontar
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					608.260.297	1.104.744.076	1.092.432.076	-484.171.779		633.490.935	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	608.260.297	1.104.744.076	1.092.432.076	-484.171.779	12 Dokumen	633.490.935	Puskesmas Lontar
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.519.354	1.650.000	1.650.000	869.354		2.662.454	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.519.354	1.650.000	1.650.000	869.354	12 Dokumen	2.662.454	Puskesmas Lontar
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					5.443.991	687.500	687.500	4.756.491		5.905.641	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.443.991	687.500	687.500	4.756.491	12 Dokumen	5.905.641	Puskesmas Lontar
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					1.027.200	990.000	990.000	37.200		1.099.104	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.027.200	990.000	990.000	37.200	12 Dokumen	1.099.104	Puskesmas Lontar
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.837.445	825.000	10.408.200	-7.570.755		3.047.416	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	2.837.445	825.000	10.408.200	-7.570.755	68%	3.047.416	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.837.445	825.000	10.408.200	-7.570.755		3.047.416	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Lontar					2.837.445	825.000	10.408.200	-7.570.755		3.047.416	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.837.445	825.000	10.408.200	-7.570.755	12 Dokumen	3.047.416	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					2.837.445	825.000	10.408.200	-7.570.755		3.047.416	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.837.445	825.000	10.408.200	-7.570.755	12 Dokumen	3.047.416	Puskesmas Lontar
	Puskesmas Made					2.275.826.375	1.930.415.278	2.313.800.724	-37.974.349		2.325.131.366	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.275.826.375	2.275.826.375	2.313.800.724	-37.974.349		2.325.131.366	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.275.826.375	1.930.415.278	2.313.800.724	-37.974.349		2.325.131.366	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.449.797.418	1.449.797.418	1.826.574.064	-376.776.646		1.453.890.196	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	1.449.797.418	1.449.797.418	1.826.574.064	-376.776.646	89,97 %	1.453.890.196	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1.449.797.418	1.449.797.418	1.826.574.064	-376.776.646		1.453.890.196	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Made					1.449.797.418	1.449.797.418	1.826.574.064	-376.776.646		1.453.890.196	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.449.797.418	1.449.797.418	1.826.574.064	-376.776.646	1 Unit Kerja	1.453.890.196	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.449.797.418	1.449.797.418	1.826.574.064	-376.776.646		1.453.890.196	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.449.797.418	1.449.797.418	1.826.574.064	-376.776.646	1 Unit Kerja	1.453.890.196	Puskesmas Made
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					821.808.847	479.792.860	476.092.460	345.716.387		866.708.772	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	821.808.847	479.792.860	476.092.460	345.716.387	91%	866.708.772	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	821.808.847	479.792.860	476.092.460	345.716.387	4 per 1.000 kelahiran hidup	866.708.772	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	821.808.847	479.792.860	476.092.460	345.716.387	80%	866.708.772	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	821.808.847	479.792.860	476.092.460	345.716.387	98,70 %	866.708.772	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	821.808.847	479.792.860	476.092.460	345.716.387	82%	866.708.772	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	821.808.847	479.792.860	476.092.460	345.716.387	40%	866.708.772	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	821.808.847	479.792.860	476.092.460	345.716.387	100%	866.708.772	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	821.808.847	479.792.860	476.092.460	345.716.387	95,45%	866.708.772	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	821.808.847	479.792.860	476.092.460	345.716.387	90,75 %	866.708.772	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	821.808.847	479.792.860	476.092.460	345.716.387	0,58 %	866.708.772	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	821.808.847	479.792.860	476.092.460	345.716.387	12%	866.708.772	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	821.808.847	479.792.860	476.092.460	345.716.387	21,6 %	866.708.772	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	821.808.847	479.792.860	476.092.460	345.716.387	1,92 %	866.708.772	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	821.808.847	479.792.860	476.092.460	345.716.387	80%	866.708.772	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	821.808.847	479.792.860	476.092.460	345.716.387	69%	866.708.772	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	821.808.847	479.792.860	476.092.460	345.716.387	100%	866.708.772	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161		2.600.126.316	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Made					2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161		2.600.126.316	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2011 Orang	2214 Orang	1972 Orang	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	2166 Orang	2.600.126.316	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	12 Laporan	2.600.126.316	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	12 Dokumen	2.600.126.316	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	12 Dokumen	2.600.126.316	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	12 Dokumen	2.600.126.316	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	12 Dokumen	2.600.126.316	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	12 Dokumen	2.600.126.316	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	12 Dokumen	2.600.126.316	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	12 Dokumen	2.600.126.316	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	213 Orang	221 Orang	300 Orang	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	219 Orang	2.600.126.316	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	204 Orang	329 Orang	319 Orang	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	282 Orang	2.600.126.316	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	30 Orang	39 Orang	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	31 Orang	2.600.126.316	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Made					2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161		2.600.126.316	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2011 Orang	2214 Orang	1972 Orang	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	2166 Orang	2.600.126.316	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	12 Laporan	2.600.126.316	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	12 Dokumen	2.600.126.316	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	12 Dokumen	2.600.126.316	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	12 Dokumen	2.600.126.316	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	12 Dokumen	2.600.126.316	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	12 Dokumen	2.600.126.316	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	12 Dokumen	2.600.126.316	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	12 Dokumen	2.600.126.316	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	213 Orang	221 Orang	300 Orang	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	219 Orang	2.600.126.316	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	204 Orang	329 Orang	319 Orang	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	282 Orang	2.600.126.316	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	30 Orang	39 Orang	2.465.426.541	1.439.378.580	1.428.277.380	1.037.149.161	31 Orang	2.600.126.316	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339		52.955.681	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	213 Orang	221 Orang	300 Orang	49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339	219 Orang	52.955.681	Puskesmas Made
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.347.898	1.932.000	1.440.000	-92.102		1.442.237	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2011 Orang	2214 Orang	1972 Orang	1.347.898	1.932.000	1.440.000	-92.102	2166 Orang	1.442.237	Puskesmas Made
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					1.917.000	450.000	900.000	1.017.000		2.051.190	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	30 Orang	39 Orang	1.917.000	450.000	900.000	1.017.000	31 Orang	2.051.190	Puskesmas Made
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					25.115.040	18.432.000	13.740.000	11.375.040		26.873.093	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	204 Orang	329 Orang	319 Orang	25.115.040	18.432.000	13.740.000	11.375.040	282 Orang	26.873.093	Puskesmas Made
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					197.361.616	97.408.200	158.934.800	38.426.816		211.176.929	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	197.361.616	97.408.200	158.934.800	38.426.816	12 Dokumen	211.176.929	Puskesmas Made
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	540.000	2.610.000	-2.310.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	540.000	2.610.000	-2.310.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Made
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					5.911.090	5.288.000	5.408.000	503.090		6.323.685	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.911.090	5.288.000	5.408.000	503.090	12 Dokumen	6.323.685	Puskesmas Made
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					90.557.310	59.874.000	9.960.000	80.597.310		96.896.322	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	90.557.310	59.874.000	9.960.000	80.597.310	12 Laporan	96.896.322	Puskesmas Made
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					437.995.251	246.957.160	234.188.160	203.807.091		456.163.294	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	437.995.251	246.957.160	234.188.160	203.807.091	12 Dokumen	456.163.294	Puskesmas Made
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.565.424	660.000	660.000	905.424		1.654.340	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.565.424	660.000	660.000	905.424	12 Dokumen	1.654.340	Puskesmas Made
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					5.443.991	687.500	687.500	4.756.491		5.905.641	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.443.991	687.500	687.500	4.756.491	12 Dokumen	5.905.641	Puskesmas Made
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					4.622.400	1.100.000	1.100.000	3.522.400		4.945.968	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.622.400	1.100.000	1.100.000	3.522.400	12 Dokumen	4.945.968	Puskesmas Made
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					4.220.110	825.000	11.134.200	-6.914.090		4.532.398	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	4.220.110	825.000	11.134.200	-6.914.090	68%	4.532.398	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.220.110	825.000	11.134.200	-6.914.090		4.532.398	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Made					4.220.110	825.000	11.134.200	-6.914.090		4.532.398	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.220.110	825.000	11.134.200	-6.914.090	12 Dokumen	4.532.398	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4.220.110	825.000	11.134.200	-6.914.090		4.532.398	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.220.110	825.000	11.134.200	-6.914.090	12 Dokumen	4.532.398	Puskesmas Made
	Puskesmas Manukan Kulon					5.238.107.747	5.400.976.535	6.388.659.114	-1.150.551.367		5.311.247.051	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.238.107.747	5.238.107.747	6.388.659.114	-1.150.551.367		5.311.247.051	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					5.238.107.747	5.400.976.535	6.388.659.114	-1.150.551.367		5.311.247.051	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.137.238.747	4.137.238.747	5.046.942.426	-909.703.679		4.148.918.172	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	4.137.238.747	4.137.238.747	5.046.942.426	-909.703.679	89,97 %	4.148.918.172	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					4.137.238.747	4.137.238.747	5.046.942.426	-909.703.679		4.148.918.172	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Manukan Kulon					4.137.238.747	4.137.238.747	5.046.942.426	-909.703.679		4.148.918.172	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.137.238.747	4.137.238.747	5.046.942.426	-909.703.679	1 Unit Kerja	4.148.918.172	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					4.137.238.747	4.137.238.747	5.046.942.426	-909.703.679		4.148.918.172	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.137.238.747	4.137.238.747	5.046.942.426	-909.703.679	1 Unit Kerja	4.148.918.172	Puskesmas Manukan Kulon
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.097.988.270	1.262.912.788	1.326.879.888	-228.891.618		1.159.234.975	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.097.988.270	1.262.912.788	1.326.879.888	-228.891.618	91%	1.159.234.975	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.097.988.270	1.262.912.788	1.326.879.888	-228.891.618	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.159.234.975	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.097.988.270	1.262.912.788	1.326.879.888	-228.891.618	80%	1.159.234.975	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.097.988.270	1.262.912.788	1.326.879.888	-228.891.618	98,70 %	1.159.234.975	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.097.988.270	1.262.912.788	1.326.879.888	-228.891.618	82%	1.159.234.975	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.097.988.270	1.262.912.788	1.326.879.888	-228.891.618	40%	1.159.234.975	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.097.988.270	1.262.912.788	1.326.879.888	-228.891.618	100%	1.159.234.975	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.097.988.270	1.262.912.788	1.326.879.888	-228.891.618	95,45%	1.159.234.975	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.097.988.270	1.262.912.788	1.326.879.888	-228.891.618	90,75 %	1.159.234.975	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.097.988.270	1.262.912.788	1.326.879.888	-228.891.618	0,58 %	1.159.234.975	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.097.988.270	1.262.912.788	1.326.879.888	-228.891.618	12%	1.159.234.975	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.097.988.270	1.262.912.788	1.326.879.888	-228.891.618	21,6 %	1.159.234.975	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.097.988.270	1.262.912.788	1.326.879.888	-228.891.618	1,92 %	1.159.234.975	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.097.988.270	1.262.912.788	1.326.879.888	-228.891.618	80%	1.159.234.975	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.097.988.270	1.262.912.788	1.326.879.888	-228.891.618	69%	1.159.234.975	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.097.988.270	1.262.912.788	1.326.879.888	-228.891.618	100%	1.159.234.975	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854		3.477.704.925	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Manukan Kulon					3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854		3.477.704.925	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8130 Orang	8958 Orang	7380 Orang	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	8761 Orang	3.477.704.925	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	12 Laporan	3.477.704.925	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	12 Dokumen	3.477.704.925	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	12 Dokumen	3.477.704.925	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	12 Dokumen	3.477.704.925	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	12 Dokumen	3.477.704.925	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	12 Dokumen	3.477.704.925	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	12 Dokumen	3.477.704.925	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	12 Dokumen	3.477.704.925	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	688 Orang	715 Orang	735 Orang	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	708 Orang	3.477.704.925	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	791 Orang	1282 Orang	1159 Orang	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	1099 Orang	3.477.704.925	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	118 Orang	110 Orang	104 Orang	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	112 Orang	3.477.704.925	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Manukan Kulon					3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854		3.477.704.925	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8130 Orang	8958 Orang	7380 Orang	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	8761 Orang	3.477.704.925	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	12 Laporan	3.477.704.925	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	12 Dokumen	3.477.704.925	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	12 Dokumen	3.477.704.925	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	12 Dokumen	3.477.704.925	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	12 Dokumen	3.477.704.925	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	12 Dokumen	3.477.704.925	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	12 Dokumen	3.477.704.925	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	12 Dokumen	3.477.704.925	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	688 Orang	715 Orang	735 Orang	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	708 Orang	3.477.704.925	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	791 Orang	1282 Orang	1159 Orang	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	1099 Orang	3.477.704.925	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	118 Orang	110 Orang	104 Orang	3.293.964.810	3.788.738.364	3.980.639.664	-686.674.854	112 Orang	3.477.704.925	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	60.984.000	65.340.000	4.511.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	688 Orang	715 Orang	735 Orang	69.851.727	60.984.000	65.340.000	4.511.727	708 Orang	74.468.926	Puskesmas Manukan Kulon
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.797.197	6.045.000	780.000	1.017.197		1.922.983	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8130 Orang	8958 Orang	7380 Orang	1.797.197	6.045.000	780.000	1.017.197	8761 Orang	1.922.983	Puskesmas Manukan Kulon
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.067.200	1.350.000	1.350.000	1.717.200		3.281.904	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	118 Orang	110 Orang	104 Orang	3.067.200	1.350.000	1.350.000	1.717.200	112 Orang	3.281.904	Puskesmas Manukan Kulon
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					17.732.040	22.272.000	15.820.000	1.912.040		18.973.283	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	791 Orang	1282 Orang	1159 Orang	17.732.040	22.272.000	15.820.000	1.912.040	1099 Orang	18.973.283	Puskesmas Manukan Kulon
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					300.174.155	240.354.600	294.088.200	6.085.955		321.186.345	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	300.174.155	240.354.600	294.088.200	6.085.955	12 Dokumen	321.186.345	Puskesmas Manukan Kulon
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.320.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.320.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Manukan Kulon
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					8.289.214	7.632.000	8.292.000	-2.786		8.867.801	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.289.214	7.632.000	8.292.000	-2.786	12 Dokumen	8.867.801	Puskesmas Manukan Kulon
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					138.212.863	101.430.000	8.250.000	129.962.863		147.887.763	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	138.212.863	101.430.000	8.250.000	129.962.863	12 Laporan	147.887.763	Puskesmas Manukan Kulon
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					542.353.391	818.637.688	927.372.188	-385.018.797		564.850.210	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	542.353.391	818.637.688	927.372.188	-385.018.797	12 Dokumen	564.850.210	Puskesmas Manukan Kulon
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					3.261.300	1.100.000	1.100.000	2.161.300		3.446.542	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.261.300	1.100.000	1.100.000	2.161.300	12 Dokumen	3.446.542	Puskesmas Manukan Kulon
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					11.665.695	687.500	687.500	10.978.195		12.654.946	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11.665.695	687.500	687.500	10.978.195	12 Dokumen	12.654.946	Puskesmas Manukan Kulon
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					1.284.000	1.100.000	1.100.000	184.000		1.373.880	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.284.000	1.100.000	1.100.000	184.000	12 Dokumen	1.373.880	Puskesmas Manukan Kulon
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.880.730	825.000	14.836.800	-11.956.070		3.093.904	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	2.880.730	825.000	14.836.800	-11.956.070	68%	3.093.904	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.880.730	825.000	14.836.800	-11.956.070		3.093.904	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Manukan Kulon					2.880.730	825.000	14.836.800	-11.956.070		3.093.904	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.880.730	825.000	14.836.800	-11.956.070	12 Dokumen	3.093.904	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					2.880.730	825.000	14.836.800	-11.956.070		3.093.904	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.880.730	825.000	14.836.800	-11.956.070	12 Dokumen	3.093.904	Puskesmas Manukan Kulon
	Puskesmas Medokan Ayu					5.095.550.851	5.009.470.970	6.276.475.276	-1.180.924.425		5.170.680.525	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.095.550.851	5.095.550.851	6.276.475.276	-1.180.924.425		5.170.680.525	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					5.095.550.851	5.009.470.970	6.276.475.276	-1.180.924.425		5.170.680.525	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.949.414.874	3.949.414.874	5.299.108.180	-1.349.693.306		3.960.564.072	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.949.414.874	3.949.414.874	5.299.108.180	-1.349.693.306	89,97 %	3.960.564.072	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.949.414.874	3.949.414.874	5.299.108.180	-1.349.693.306		3.960.564.072	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Medokan Ayu					3.949.414.874	3.949.414.874	5.299.108.180	-1.349.693.306		3.960.564.072	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.949.414.874	3.949.414.874	5.299.108.180	-1.349.693.306	1 Unit Kerja	3.960.564.072	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.949.414.874	3.949.414.874	5.299.108.180	-1.349.693.306		3.960.564.072	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.949.414.874	3.949.414.874	5.299.108.180	-1.349.693.306	1 Unit Kerja	3.960.564.072	Puskesmas Medokan Ayu
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.142.883.962	1.059.231.096	962.167.296	180.716.666		1.206.623.789	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.142.883.962	1.059.231.096	962.167.296	180.716.666	91%	1.206.623.789	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.142.883.962	1.059.231.096	962.167.296	180.716.666	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.206.623.789	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.142.883.962	1.059.231.096	962.167.296	180.716.666	80%	1.206.623.789	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.142.883.962	1.059.231.096	962.167.296	180.716.666	98,70 %	1.206.623.789	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.142.883.962	1.059.231.096	962.167.296	180.716.666	82%	1.206.623.789	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.142.883.962	1.059.231.096	962.167.296	180.716.666	40%	1.206.623.789	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.142.883.962	1.059.231.096	962.167.296	180.716.666	100%	1.206.623.789	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.142.883.962	1.059.231.096	962.167.296	180.716.666	95,45%	1.206.623.789	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.142.883.962	1.059.231.096	962.167.296	180.716.666	90,75 %	1.206.623.789	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.142.883.962	1.059.231.096	962.167.296	180.716.666	0,58 %	1.206.623.789	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.142.883.962	1.059.231.096	962.167.296	180.716.666	12%	1.206.623.789	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.142.883.962	1.059.231.096	962.167.296	180.716.666	21,6 %	1.206.623.789	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.142.883.962	1.059.231.096	962.167.296	180.716.666	1,92 %	1.206.623.789	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.142.883.962	1.059.231.096	962.167.296	180.716.666	80%	1.206.623.789	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.142.883.962	1.059.231.096	962.167.296	180.716.666	69%	1.206.623.789	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.142.883.962	1.059.231.096	962.167.296	180.716.666	100%	1.206.623.789	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998		3.619.871.367	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Medokan Ayu					3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998		3.619.871.367	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9180 Orang	10115 Orang	9318 Orang	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	9893 Orang	3.619.871.367	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	12 Laporan	3.619.871.367	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	12 Dokumen	3.619.871.367	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	12 Dokumen	3.619.871.367	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	12 Dokumen	3.619.871.367	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	12 Dokumen	3.619.871.367	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	12 Dokumen	3.619.871.367	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	12 Dokumen	3.619.871.367	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	12 Dokumen	3.619.871.367	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	729 Orang	757 Orang	610 Orang	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	750 Orang	3.619.871.367	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	899 Orang	1458 Orang	1453 Orang	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	1250 Orang	3.619.871.367	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	142 Orang	134 Orang	103 Orang	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	136 Orang	3.619.871.367	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Medokan Ayu					3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998		3.619.871.367	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9180 Orang	10115 Orang	9318 Orang	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	9893 Orang	3.619.871.367	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	12 Laporan	3.619.871.367	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	12 Dokumen	3.619.871.367	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	12 Dokumen	3.619.871.367	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	12 Dokumen	3.619.871.367	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	12 Dokumen	3.619.871.367	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	12 Dokumen	3.619.871.367	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	12 Dokumen	3.619.871.367	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	12 Dokumen	3.619.871.367	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	729 Orang	757 Orang	610 Orang	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	750 Orang	3.619.871.367	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	899 Orang	1458 Orang	1453 Orang	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	1250 Orang	3.619.871.367	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	142 Orang	134 Orang	103 Orang	3.428.651.886	3.177.693.288	2.886.501.888	542.149.998	136 Orang	3.619.871.367	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	729 Orang	757 Orang	610 Orang	69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727	750 Orang	74.468.926	Puskesmas Medokan Ayu
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.283.712	9.312.000	6.840.000	-5.556.288		1.373.559	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9180 Orang	10115 Orang	9318 Orang	1.283.712	9.312.000	6.840.000	-5.556.288	9893 Orang	1.373.559	Puskesmas Medokan Ayu
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					7.476.300	900.000	900.000	6.576.300		7.999.641	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	142 Orang	134 Orang	103 Orang	7.476.300	900.000	900.000	6.576.300	136 Orang	7.999.641	Puskesmas Medokan Ayu
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					23.176.200	20.052.000	16.120.000	7.056.200		24.798.534	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	899 Orang	1458 Orang	1453 Orang	23.176.200	20.052.000	16.120.000	7.056.200	1250 Orang	24.798.534	Puskesmas Medokan Ayu
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					323.813.963	214.899.000	264.688.200	59.125.763		346.480.940	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	323.813.963	214.899.000	264.688.200	59.125.763	12 Dokumen	346.480.940	Puskesmas Medokan Ayu
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.860.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.860.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Medokan Ayu
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					11.400.877	7.542.000	8.442.000	2.958.877		12.196.658	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.877	7.542.000	8.442.000	2.958.877	12 Dokumen	12.196.658	Puskesmas Medokan Ayu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					120.673.530	130.266.000	12.270.000	108.403.530		129.120.677	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	120.673.530	130.266.000	12.270.000	108.403.530	12 Laporan	129.120.677	Puskesmas Medokan Ayu
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					565.334.365	600.991.596	576.798.596	-11.464.231		588.784.435	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	565.334.365	600.991.596	576.798.596	-11.464.231	12 Dokumen	588.784.435	Puskesmas Medokan Ayu
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.772.105	1.375.000	1.375.000	1.397.105		2.929.561	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.772.105	1.375.000	1.375.000	1.397.105	12 Dokumen	2.929.561	Puskesmas Medokan Ayu
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					11.665.695	687.500	687.500	10.978.195		12.654.946	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11.665.695	687.500	687.500	10.978.195	12 Dokumen	12.654.946	Puskesmas Medokan Ayu
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					5.136.000	1.650.000	1.650.000	3.486.000		5.495.520	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.136.000	1.650.000	1.650.000	3.486.000	12 Dokumen	5.495.520	Puskesmas Medokan Ayu
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.252.015	825.000	15.199.800	-11.947.785		3.492.664	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.252.015	825.000	15.199.800	-11.947.785	68%	3.492.664	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.252.015	825.000	15.199.800	-11.947.785		3.492.664	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Medokan Ayu					3.252.015	825.000	15.199.800	-11.947.785		3.492.664	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.252.015	825.000	15.199.800	-11.947.785	12 Dokumen	3.492.664	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.252.015	825.000	15.199.800	-11.947.785		3.492.664	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.252.015	825.000	15.199.800	-11.947.785	12 Dokumen	3.492.664	Puskesmas Medokan Ayu
	Puskesmas Menur					3.606.781.451	3.458.082.133	4.110.015.074	-503.233.623		3.671.586.697	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.606.781.451	3.606.781.451	4.110.015.074	-503.233.623		3.671.586.697	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.606.781.451	3.458.082.133	4.110.015.074	-503.233.623		3.671.586.697	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.541.747.789	2.541.747.789	3.147.058.844	-605.311.055		2.548.923.143	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.541.747.789	2.541.747.789	3.147.058.844	-605.311.055	89,97 %	2.548.923.143	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.541.747.789	2.541.747.789	3.147.058.844	-605.311.055		2.548.923.143	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Menur					2.541.747.789	2.541.747.789	3.147.058.844	-605.311.055		2.548.923.143	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.541.747.789	2.541.747.789	3.147.058.844	-605.311.055	1 Unit Kerja	2.548.923.143	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.541.747.789	2.541.747.789	3.147.058.844	-605.311.055		2.548.923.143	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.541.747.789	2.541.747.789	3.147.058.844	-605.311.055	1 Unit Kerja	2.548.923.143	Puskesmas Menur
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.060.622.212	915.509.344	946.667.430	113.954.782		1.117.925.657	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.060.622.212	915.509.344	946.667.430	113.954.782	91%	1.117.925.657	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.060.622.212	915.509.344	946.667.430	113.954.782	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.117.925.657	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.060.622.212	915.509.344	946.667.430	113.954.782	80%	1.117.925.657	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.060.622.212	915.509.344	946.667.430	113.954.782	98,70 %	1.117.925.657	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.060.622.212	915.509.344	946.667.430	113.954.782	82%	1.117.925.657	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.060.622.212	915.509.344	946.667.430	113.954.782	40%	1.117.925.657	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.060.622.212	915.509.344	946.667.430	113.954.782	100%	1.117.925.657	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.060.622.212	915.509.344	946.667.430	113.954.782	95,45%	1.117.925.657	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.060.622.212	915.509.344	946.667.430	113.954.782	90,75 %	1.117.925.657	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.060.622.212	915.509.344	946.667.430	113.954.782	0,58 %	1.117.925.657	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.060.622.212	915.509.344	946.667.430	113.954.782	12%	1.117.925.657	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.060.622.212	915.509.344	946.667.430	113.954.782	21,6 %	1.117.925.657	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.060.622.212	915.509.344	946.667.430	113.954.782	1,92 %	1.117.925.657	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.060.622.212	915.509.344	946.667.430	113.954.782	80%	1.117.925.657	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.060.622.212	915.509.344	946.667.430	113.954.782	69%	1.117.925.657	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.060.622.212	915.509.344	946.667.430	113.954.782	100%	1.117.925.657	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346		3.353.776.971	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Menur					3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346		3.353.776.971	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6567 Orang	7236 Orang	6235 Orang	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	7077 Orang	3.353.776.971	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	12 Laporan	3.353.776.971	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	12 Dokumen	3.353.776.971	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	12 Dokumen	3.353.776.971	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	12 Dokumen	3.353.776.971	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	12 Dokumen	3.353.776.971	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	12 Dokumen	3.353.776.971	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	12 Dokumen	3.353.776.971	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	12 Dokumen	3.353.776.971	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	375 Orang	387 Orang	371 Orang	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	384 Orang	3.353.776.971	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	688 Orang	1114 Orang	1026 Orang	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	955 Orang	3.353.776.971	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	96 Orang	93 Orang	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	97 Orang	3.353.776.971	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Menur					3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346		3.353.776.971	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6567 Orang	7236 Orang	6235 Orang	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	7077 Orang	3.353.776.971	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	12 Laporan	3.353.776.971	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	12 Dokumen	3.353.776.971	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	12 Dokumen	3.353.776.971	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	12 Dokumen	3.353.776.971	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	12 Dokumen	3.353.776.971	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	12 Dokumen	3.353.776.971	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	12 Dokumen	3.353.776.971	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	12 Dokumen	3.353.776.971	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	375 Orang	387 Orang	371 Orang	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	384 Orang	3.353.776.971	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	688 Orang	1114 Orang	1026 Orang	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	955 Orang	3.353.776.971	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	96 Orang	93 Orang	3.181.866.636	2.746.528.032	2.840.002.290	341.864.346	97 Orang	3.353.776.971	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	52.272.000	52.272.000	17.579.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	375 Orang	387 Orang	371 Orang	69.851.727	52.272.000	52.272.000	17.579.727	384 Orang	74.468.926	Puskesmas Menur
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					3.851.136	19.935.000	9.360.000	-5.508.864		4.120.677	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6567 Orang	7236 Orang	6235 Orang	3.851.136	19.935.000	9.360.000	-5.508.864	7077 Orang	4.120.677	Puskesmas Menur
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					4.217.400	3.960.000	3.960.000	257.400		4.512.618	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	96 Orang	93 Orang	4.217.400	3.960.000	3.960.000	257.400	97 Orang	4.512.618	Puskesmas Menur
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					19.016.040	22.272.000	14.160.000	4.856.040		20.347.163	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	688 Orang	1114 Orang	1026 Orang	19.016.040	22.272.000	14.160.000	4.856.040	955 Orang	20.347.163	Puskesmas Menur
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					203.032.059	226.474.200	285.512.200	-82.480.141		217.244.303	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	203.032.059	226.474.200	285.512.200	-82.480.141	12 Dokumen	217.244.303	Puskesmas Menur
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2.952.096	1.500.000	2.700.000	252.096		3.158.152	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.952.096	1.500.000	2.700.000	252.096	12 Dokumen	3.158.152	Puskesmas Menur
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					10.246.033	7.782.000	8.502.000	1.744.033		10.961.206	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.246.033	7.782.000	8.502.000	1.744.033	12 Dokumen	10.961.206	Puskesmas Menur
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					140.187.120	54.420.000	19.080.000	121.107.120		150.000.218	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	140.187.120	54.420.000	19.080.000	121.107.120	12 Laporan	150.000.218	Puskesmas Menur
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					588.094.036	523.291.644	547.518.730	40.575.306		612.488.177	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	588.094.036	523.291.644	547.518.730	40.575.306	12 Dokumen	612.488.177	Puskesmas Menur
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					4.940.870	1.265.000	1.265.000	3.675.870		5.221.511	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.940.870	1.265.000	1.265.000	3.675.870	12 Dokumen	5.221.511	Puskesmas Menur
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					11.665.695	687.500	687.500	10.978.195		12.654.946	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11.665.695	687.500	687.500	10.978.195	12 Dokumen	12.654.946	Puskesmas Menur
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					2.568.000	1.650.000	1.650.000	918.000		2.747.760	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.568.000	1.650.000	1.650.000	918.000	12 Dokumen	2.747.760	Puskesmas Menur
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					4.411.450	825.000	16.288.800	-11.877.350		4.737.897	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	4.411.450	825.000	16.288.800	-11.877.350	68%	4.737.897	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.411.450	825.000	16.288.800	-11.877.350		4.737.897	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Menur					4.411.450	825.000	16.288.800	-11.877.350		4.737.897	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.411.450	825.000	16.288.800	-11.877.350	12 Dokumen	4.737.897	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4.411.450	825.000	16.288.800	-11.877.350		4.737.897	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.411.450	825.000	16.288.800	-11.877.350	12 Dokumen	4.737.897	Puskesmas Menur
	Puskesmas Mojo					5.108.379.171	5.482.876.929	6.084.829.753	-976.450.582		5.191.117.739	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.108.379.171	5.108.379.171	6.084.829.753	-976.450.582		5.191.117.739	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					5.108.379.171	5.482.876.929	6.084.829.753	-976.450.582		5.191.117.739	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.804.516.553	3.804.516.553	4.415.746.777	-611.230.224		3.815.256.704	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.804.516.553	3.804.516.553	4.415.746.777	-611.230.224	89,97 %	3.815.256.704	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.804.516.553	3.804.516.553	4.415.746.777	-611.230.224		3.815.256.704	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Mojo					3.804.516.553	3.804.516.553	4.415.746.777	-611.230.224		3.815.256.704	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.804.516.553	3.804.516.553	4.415.746.777	-611.230.224	1 Unit Kerja	3.815.256.704	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.804.516.553	3.804.516.553	4.415.746.777	-611.230.224		3.815.256.704	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.804.516.553	3.804.516.553	4.415.746.777	-611.230.224	1 Unit Kerja	3.815.256.704	Puskesmas Mojo
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.299.514.948	1.677.535.376	1.646.986.176	-347.471.228		1.371.191.637	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.299.514.948	1.677.535.376	1.646.986.176	-347.471.228	91%	1.371.191.637	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.299.514.948	1.677.535.376	1.646.986.176	-347.471.228	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.371.191.637	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.299.514.948	1.677.535.376	1.646.986.176	-347.471.228	80%	1.371.191.637	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.299.514.948	1.677.535.376	1.646.986.176	-347.471.228	98,70 %	1.371.191.637	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.299.514.948	1.677.535.376	1.646.986.176	-347.471.228	82%	1.371.191.637	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.299.514.948	1.677.535.376	1.646.986.176	-347.471.228	40%	1.371.191.637	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.299.514.948	1.677.535.376	1.646.986.176	-347.471.228	100%	1.371.191.637	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.299.514.948	1.677.535.376	1.646.986.176	-347.471.228	95,45%	1.371.191.637	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.299.514.948	1.677.535.376	1.646.986.176	-347.471.228	90,75 %	1.371.191.637	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.299.514.948	1.677.535.376	1.646.986.176	-347.471.228	0,58 %	1.371.191.637	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.299.514.948	1.677.535.376	1.646.986.176	-347.471.228	12%	1.371.191.637	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.299.514.948	1.677.535.376	1.646.986.176	-347.471.228	21,6 %	1.371.191.637	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.299.514.948	1.677.535.376	1.646.986.176	-347.471.228	1,92 %	1.371.191.637	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.299.514.948	1.677.535.376	1.646.986.176	-347.471.228	80%	1.371.191.637	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.299.514.948	1.677.535.376	1.646.986.176	-347.471.228	69%	1.371.191.637	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.299.514.948	1.677.535.376	1.646.986.176	-347.471.228	100%	1.371.191.637	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684		4.113.574.911	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Mojo					3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684		4.113.574.911	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10217 Orang	11258 Orang	4935 Orang	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	11011 Orang	4.113.574.911	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	12 Laporan	4.113.574.911	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	12 Dokumen	4.113.574.911	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	12 Dokumen	4.113.574.911	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	12 Dokumen	4.113.574.911	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	12 Dokumen	4.113.574.911	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	12 Dokumen	4.113.574.911	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	12 Dokumen	4.113.574.911	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	12 Dokumen	4.113.574.911	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	940 Orang	976 Orang	1018 Orang	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	967 Orang	4.113.574.911	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1121 Orang	1818 Orang	1619 Orang	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	1559 Orang	4.113.574.911	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	157 Orang	154 Orang	145 Orang	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	156 Orang	4.113.574.911	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Mojo					3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684		4.113.574.911	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10217 Orang	11258 Orang	4935 Orang	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	11011 Orang	4.113.574.911	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	12 Laporan	4.113.574.911	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	12 Dokumen	4.113.574.911	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	12 Dokumen	4.113.574.911	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	12 Dokumen	4.113.574.911	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	12 Dokumen	4.113.574.911	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	12 Dokumen	4.113.574.911	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	12 Dokumen	4.113.574.911	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	12 Dokumen	4.113.574.911	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	940 Orang	976 Orang	1018 Orang	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	967 Orang	4.113.574.911	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1121 Orang	1818 Orang	1619 Orang	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	1559 Orang	4.113.574.911	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	157 Orang	154 Orang	145 Orang	3.898.544.844	5.032.606.128	4.940.958.528	-1.042.413.684	156 Orang	4.113.574.911	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	56.628.000	56.628.000	13.223.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	940 Orang	976 Orang	1018 Orang	69.851.727	56.628.000	56.628.000	13.223.727	967 Orang	74.468.926	Puskesmas Mojo
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					4.653.456	34.470.000	9.360.000	-4.706.544		4.979.151	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10217 Orang	11258 Orang	4935 Orang	4.653.456	34.470.000	9.360.000	-4.706.544	11011 Orang	4.979.151	Puskesmas Mojo
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					7.092.900	6.660.000	6.660.000	432.900		7.589.403	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	157 Orang	154 Orang	145 Orang	7.092.900	6.660.000	6.660.000	432.900	156 Orang	7.589.403	Puskesmas Mojo
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					22.033.440	20.592.000	17.620.000	4.413.440		23.575.781	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1121 Orang	1818 Orang	1619 Orang	22.033.440	20.592.000	17.620.000	4.413.440	1559 Orang	23.575.781	Puskesmas Mojo
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					349.489.681	328.577.400	382.839.200	-33.349.519		373.953.959	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	349.489.681	328.577.400	382.839.200	-33.349.519	12 Dokumen	373.953.959	Puskesmas Mojo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.950.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.950.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Mojo
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					9.027.031	8.562.000	8.622.000	405.031		9.657.117	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.027.031	8.562.000	8.622.000	405.031	12 Dokumen	9.657.117	Puskesmas Mojo
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					136.268.031	95.262.000	52.440.000	83.828.031		145.806.793	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	136.268.031	95.262.000	52.440.000	83.828.031	12 Laporan	145.806.793	Puskesmas Mojo
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					671.441.606	1.121.121.476	1.106.404.476	-434.962.870		699.293.004	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	671.441.606	1.121.121.476	1.106.404.476	-434.962.870	12 Dokumen	699.293.004	Puskesmas Mojo
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					4.198.924	1.375.000	1.375.000	2.823.924		4.437.423	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.198.924	1.375.000	1.375.000	2.823.924	12 Dokumen	4.437.423	Puskesmas Mojo
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					12.832.264	687.500	687.500	12.144.764		13.920.440	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.832.264	687.500	687.500	12.144.764	12 Dokumen	13.920.440	Puskesmas Mojo
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					12.326.400	1.650.000	1.650.000	10.676.400		13.189.248	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.326.400	1.650.000	1.650.000	10.676.400	12 Dokumen	13.189.248	Puskesmas Mojo
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					4.347.670	825.000	22.096.800	-17.749.130		4.669.398	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	4.347.670	825.000	22.096.800	-17.749.130	68%	4.669.398	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.347.670	825.000	22.096.800	-17.749.130		4.669.398	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Mojo					4.347.670	825.000	22.096.800	-17.749.130		4.669.398	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.347.670	825.000	22.096.800	-17.749.130	12 Dokumen	4.669.398	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4.347.670	825.000	22.096.800	-17.749.130		4.669.398	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.347.670	825.000	22.096.800	-17.749.130	12 Dokumen	4.669.398	Puskesmas Mojo
	Puskesmas Morokrembangan					3.871.470.422	4.208.708.770	4.742.367.812	-870.897.390		3.949.291.160	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.871.470.422	3.871.470.422	4.742.367.812	-870.897.390		3.949.291.160	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.871.470.422	4.208.708.770	4.742.367.812	-870.897.390		3.949.291.160	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.536.655.578	2.536.655.578	2.864.651.820	-327.996.242		2.543.816.557	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.536.655.578	2.536.655.578	2.864.651.820	-327.996.242	89,97 %	2.543.816.557	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.536.655.578	2.536.655.578	2.864.651.820	-327.996.242		2.543.816.557	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Morokrembangan					2.536.655.578	2.536.655.578	2.864.651.820	-327.996.242		2.543.816.557	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.536.655.578	2.536.655.578	2.864.651.820	-327.996.242	1 Unit Kerja	2.543.816.557	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.536.655.578	2.536.655.578	2.864.651.820	-327.996.242		2.543.816.557	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.536.655.578	2.536.655.578	2.864.651.820	-327.996.242	1 Unit Kerja	2.543.816.557	Puskesmas Morokrembangan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.331.360.094	1.671.228.192	1.868.469.392	-537.109.298		1.401.764.201	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.331.360.094	1.671.228.192	1.868.469.392	-537.109.298	91%	1.401.764.201	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.331.360.094	1.671.228.192	1.868.469.392	-537.109.298	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.401.764.201	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.331.360.094	1.671.228.192	1.868.469.392	-537.109.298	80%	1.401.764.201	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.331.360.094	1.671.228.192	1.868.469.392	-537.109.298	98,70 %	1.401.764.201	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.331.360.094	1.671.228.192	1.868.469.392	-537.109.298	82%	1.401.764.201	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.331.360.094	1.671.228.192	1.868.469.392	-537.109.298	40%	1.401.764.201	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.331.360.094	1.671.228.192	1.868.469.392	-537.109.298	100%	1.401.764.201	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.331.360.094	1.671.228.192	1.868.469.392	-537.109.298	95,45%	1.401.764.201	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.331.360.094	1.671.228.192	1.868.469.392	-537.109.298	90,75 %	1.401.764.201	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.331.360.094	1.671.228.192	1.868.469.392	-537.109.298	0,58 %	1.401.764.201	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.331.360.094	1.671.228.192	1.868.469.392	-537.109.298	12%	1.401.764.201	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.331.360.094	1.671.228.192	1.868.469.392	-537.109.298	21,6 %	1.401.764.201	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.331.360.094	1.671.228.192	1.868.469.392	-537.109.298	1,92 %	1.401.764.201	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.331.360.094	1.671.228.192	1.868.469.392	-537.109.298	80%	1.401.764.201	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.331.360.094	1.671.228.192	1.868.469.392	-537.109.298	69%	1.401.764.201	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.331.360.094	1.671.228.192	1.868.469.392	-537.109.298	100%	1.401.764.201	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894		4.205.292.603	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Morokrembangan					3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894		4.205.292.603	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6497 Orang	7158 Orang	6374 Orang	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	7001 Orang	4.205.292.603	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	12 Laporan	4.205.292.603	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	12 Dokumen	4.205.292.603	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	12 Dokumen	4.205.292.603	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	12 Dokumen	4.205.292.603	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	12 Dokumen	4.205.292.603	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	12 Dokumen	4.205.292.603	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	12 Dokumen	4.205.292.603	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	12 Dokumen	4.205.292.603	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	668 Orang	692 Orang	745 Orang	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	686 Orang	4.205.292.603	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	635 Orang	1028 Orang	962 Orang	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	881 Orang	4.205.292.603	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	95 Orang	91 Orang	87 Orang	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	92 Orang	4.205.292.603	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Morokrembangan					3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894		4.205.292.603	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6497 Orang	7158 Orang	6374 Orang	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	7001 Orang	4.205.292.603	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	12 Laporan	4.205.292.603	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	12 Dokumen	4.205.292.603	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	12 Dokumen	4.205.292.603	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	12 Dokumen	4.205.292.603	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	12 Dokumen	4.205.292.603	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	12 Dokumen	4.205.292.603	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	12 Dokumen	4.205.292.603	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	12 Dokumen	4.205.292.603	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	668 Orang	692 Orang	745 Orang	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	686 Orang	4.205.292.603	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	635 Orang	1028 Orang	962 Orang	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	881 Orang	4.205.292.603	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	95 Orang	91 Orang	87 Orang	3.994.080.282	5.013.684.576	5.605.408.176	-1.611.327.894	92 Orang	4.205.292.603	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170		26.477.840	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	668 Orang	692 Orang	745 Orang	24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170	686 Orang	26.477.840	Puskesmas Morokrembangan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.091.155	8.643.000	3.180.000	-2.088.845		1.167.525	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6497 Orang	7158 Orang	6374 Orang	1.091.155	8.643.000	3.180.000	-2.088.845	7001 Orang	1.167.525	Puskesmas Morokrembangan
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					4.792.500	4.500.000	2.250.000	2.542.500		5.127.975	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	95 Orang	91 Orang	87 Orang	4.792.500	4.500.000	2.250.000	2.542.500	92 Orang	5.127.975	Puskesmas Morokrembangan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					21.263.040	19.272.000	16.120.000	5.143.040		22.751.453	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	635 Orang	1028 Orang	962 Orang	21.263.040	19.272.000	16.120.000	5.143.040	881 Orang	22.751.453	Puskesmas Morokrembangan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					403.321.826	447.481.200	492.652.400	-89.330.574		431.554.354	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	403.321.826	447.481.200	492.652.400	-89.330.574	12 Dokumen	431.554.354	Puskesmas Morokrembangan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2.470.776	1.050.000	2.700.000	-229.224		2.643.236	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.470.776	1.050.000	2.700.000	-229.224	12 Dokumen	2.643.236	Puskesmas Morokrembangan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					3.597.125	2.584.000	2.614.000	983.125		3.848.205	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.597.125	2.584.000	2.614.000	983.125	12 Dokumen	3.848.205	Puskesmas Morokrembangan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					61.664.100	27.828.000	11.820.000	49.844.100		65.980.587	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	61.664.100	27.828.000	11.820.000	49.844.100	12 Laporan	65.980.587	Puskesmas Morokrembangan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					796.413.515	1.134.850.492	1.312.113.492	-515.699.977		829.448.748	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	796.413.515	1.134.850.492	1.312.113.492	-515.699.977	12 Dokumen	829.448.748	Puskesmas Morokrembangan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.483.892	550.000	550.000	933.892		1.568.177	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.483.892	550.000	550.000	933.892	12 Dokumen	1.568.177	Puskesmas Morokrembangan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					2.721.995	687.500	687.500	2.034.495		2.952.821	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.721.995	687.500	687.500	2.034.495	12 Dokumen	2.952.821	Puskesmas Morokrembangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					7.704.000	550.000	550.000	7.154.000		8.243.280	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.704.000	550.000	550.000	7.154.000	12 Dokumen	8.243.280	Puskesmas Morokrembangan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.454.750	825.000	9.246.600	-5.791.850		3.710.402	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.454.750	825.000	9.246.600	-5.791.850	68%	3.710.402	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.454.750	825.000	9.246.600	-5.791.850		3.710.402	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Morokrembangan					3.454.750	825.000	9.246.600	-5.791.850		3.710.402	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.454.750	825.000	9.246.600	-5.791.850	12 Dokumen	3.710.402	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.454.750	825.000	9.246.600	-5.791.850		3.710.402	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.454.750	825.000	9.246.600	-5.791.850	12 Dokumen	3.710.402	Puskesmas Morokrembangan
	Puskesmas Mulyorejo					4.233.107.652	4.133.986.043	4.685.510.182	-452.402.530		4.299.228.617	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.233.107.652	4.233.107.652	4.685.510.182	-452.402.530		4.299.228.617	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.233.107.652	4.133.986.043	4.685.510.182	-452.402.530		4.299.228.617	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.216.429.047	3.216.429.047	3.802.244.786	-585.815.739		3.225.509.026	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.216.429.047	3.216.429.047	3.802.244.786	-585.815.739	89,97 %	3.225.509.026	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.216.429.047	3.216.429.047	3.802.244.786	-585.815.739		3.225.509.026	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Mulyorejo					3.216.429.047	3.216.429.047	3.802.244.786	-585.815.739		3.225.509.026	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.216.429.047	3.216.429.047	3.802.244.786	-585.815.739	1 Unit Kerja	3.225.509.026	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.216.429.047	3.216.429.047	3.802.244.786	-585.815.739		3.225.509.026	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.216.429.047	3.216.429.047	3.802.244.786	-585.815.739	1 Unit Kerja	3.225.509.026	Puskesmas Mulyorejo
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.013.426.590	916.731.996	868.065.596	145.360.994		1.070.226.927	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.013.426.590	916.731.996	868.065.596	145.360.994	91%	1.070.226.927	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.013.426.590	916.731.996	868.065.596	145.360.994	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.070.226.927	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.013.426.590	916.731.996	868.065.596	145.360.994	80%	1.070.226.927	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.013.426.590	916.731.996	868.065.596	145.360.994	98,70 %	1.070.226.927	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.013.426.590	916.731.996	868.065.596	145.360.994	82%	1.070.226.927	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.013.426.590	916.731.996	868.065.596	145.360.994	40%	1.070.226.927	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.013.426.590	916.731.996	868.065.596	145.360.994	100%	1.070.226.927	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.013.426.590	916.731.996	868.065.596	145.360.994	95,45%	1.070.226.927	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.013.426.590	916.731.996	868.065.596	145.360.994	90,75 %	1.070.226.927	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.013.426.590	916.731.996	868.065.596	145.360.994	0,58 %	1.070.226.927	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.013.426.590	916.731.996	868.065.596	145.360.994	12%	1.070.226.927	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.013.426.590	916.731.996	868.065.596	145.360.994	21,6 %	1.070.226.927	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.013.426.590	916.731.996	868.065.596	145.360.994	1,92 %	1.070.226.927	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.013.426.590	916.731.996	868.065.596	145.360.994	80%	1.070.226.927	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.013.426.590	916.731.996	868.065.596	145.360.994	69%	1.070.226.927	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.013.426.590	916.731.996	868.065.596	145.360.994	100%	1.070.226.927	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982		3.210.680.781	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo					3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982		3.210.680.781	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5525 Orang	6086 Orang	5154 Orang	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	5953 Orang	3.210.680.781	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	12 Laporan	3.210.680.781	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	12 Dokumen	3.210.680.781	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	12 Dokumen	3.210.680.781	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	12 Dokumen	3.210.680.781	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	12 Dokumen	3.210.680.781	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	12 Dokumen	3.210.680.781	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	12 Dokumen	3.210.680.781	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	12 Dokumen	3.210.680.781	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	520 Orang	480 Orang	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	515 Orang	3.210.680.781	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	574 Orang	929 Orang	858 Orang	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	797 Orang	3.210.680.781	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	81 Orang	77 Orang	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	82 Orang	3.210.680.781	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo					3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982		3.210.680.781	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5525 Orang	6086 Orang	5154 Orang	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	5953 Orang	3.210.680.781	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	12 Laporan	3.210.680.781	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	12 Dokumen	3.210.680.781	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	12 Dokumen	3.210.680.781	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	12 Dokumen	3.210.680.781	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	12 Dokumen	3.210.680.781	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	12 Dokumen	3.210.680.781	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	12 Dokumen	3.210.680.781	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	12 Dokumen	3.210.680.781	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	520 Orang	480 Orang	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	515 Orang	3.210.680.781	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	574 Orang	929 Orang	858 Orang	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	797 Orang	3.210.680.781	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	81 Orang	77 Orang	3.040.279.770	2.750.195.988	2.604.196.788	436.082.982	82 Orang	3.210.680.781	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	520 Orang	480 Orang	69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727	515 Orang	74.468.926	Puskesmas Mulyorejo
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					2.695.795	11.232.000	6.660.000	-3.964.205		2.884.474	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5525 Orang	6086 Orang	5154 Orang	2.695.795	11.232.000	6.660.000	-3.964.205	5953 Orang	2.884.474	Puskesmas Mulyorejo
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.067.200	2.880.000	2.880.000	187.200		3.281.904	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	81 Orang	77 Orang	3.067.200	2.880.000	2.880.000	187.200	82 Orang	3.281.904	Puskesmas Mulyorejo
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					22.033.440	19.152.000	13.860.000	8.173.440		23.575.781	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	574 Orang	929 Orang	858 Orang	22.033.440	19.152.000	13.860.000	8.173.440	797 Orang	23.575.781	Puskesmas Mulyorejo
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					282.741.562	210.096.600	258.097.200	24.644.362		302.533.471	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	282.741.562	210.096.600	258.097.200	24.644.362	12 Dokumen	302.533.471	Puskesmas Mulyorejo
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.590.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.590.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Mulyorejo
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					8.321.293	2.764.000	8.292.000	29.293		8.902.119	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.321.293	2.764.000	8.292.000	29.293	12 Dokumen	8.902.119	Puskesmas Mulyorejo
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					120.571.131	89.502.000	12.180.000	108.391.131		129.011.110	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	120.571.131	89.502.000	12.180.000	108.391.131	12 Laporan	129.011.110	Puskesmas Mulyorejo
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					488.064.106	505.831.896	489.712.896	-1.648.790		508.309.005	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	488.064.106	505.831.896	489.712.896	-1.648.790	12 Dokumen	508.309.005	Puskesmas Mulyorejo
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					5.046.862	1.650.000	1.650.000	3.396.862		5.333.523	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.046.862	1.650.000	1.650.000	3.396.862	12 Dokumen	5.333.523	Puskesmas Mulyorejo
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					8.165.986	687.500	687.500	7.478.486		8.858.462	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.165.986	687.500	687.500	7.478.486	12 Dokumen	8.858.462	Puskesmas Mulyorejo
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					2.568.000	1.650.000	1.650.000	918.000		2.747.760	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.568.000	1.650.000	1.650.000	918.000	12 Dokumen	2.747.760	Puskesmas Mulyorejo
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.252.015	825.000	15.199.800	-11.947.785		3.492.664	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.252.015	825.000	15.199.800	-11.947.785	68%	3.492.664	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.252.015	825.000	15.199.800	-11.947.785		3.492.664	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Mulyorejo					3.252.015	825.000	15.199.800	-11.947.785		3.492.664	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.252.015	825.000	15.199.800	-11.947.785	12 Dokumen	3.492.664	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.252.015	825.000	15.199.800	-11.947.785		3.492.664	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.252.015	825.000	15.199.800	-11.947.785	12 Dokumen	3.492.664	Puskesmas Mulyorejo
	Puskesmas Ngagel Rejo					3.952.159.458	4.548.427.239	5.084.128.876	-1.131.969.418		4.030.599.575	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.952.159.458	3.952.159.458	5.084.128.876	-1.131.969.418		4.030.599.575	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.952.159.458	4.548.427.239	5.084.128.876	-1.131.969.418		4.030.599.575	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.597.666.959	2.597.666.959	3.107.366.196	-509.699.237		2.605.000.172	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.597.666.959	2.597.666.959	3.107.366.196	-509.699.237	89,97 %	2.605.000.172	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.597.666.959	2.597.666.959	3.107.366.196	-509.699.237		2.605.000.172	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Ngagel Rejo					2.597.666.959	2.597.666.959	3.107.366.196	-509.699.237		2.605.000.172	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.597.666.959	2.597.666.959	3.107.366.196	-509.699.237	1 Unit Kerja	2.605.000.172	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.597.666.959	2.597.666.959	3.107.366.196	-509.699.237		2.605.000.172	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.597.666.959	2.597.666.959	3.107.366.196	-509.699.237	1 Unit Kerja	2.605.000.172	Puskesmas Ngagel Rejo
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.350.985.364	1.949.935.280	1.959.457.480	-608.472.116		1.421.832.740	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.350.985.364	1.949.935.280	1.959.457.480	-608.472.116	91%	1.421.832.740	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.350.985.364	1.949.935.280	1.959.457.480	-608.472.116	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.421.832.740	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.350.985.364	1.949.935.280	1.959.457.480	-608.472.116	80%	1.421.832.740	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.350.985.364	1.949.935.280	1.959.457.480	-608.472.116	98,70 %	1.421.832.740	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.350.985.364	1.949.935.280	1.959.457.480	-608.472.116	82%	1.421.832.740	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.350.985.364	1.949.935.280	1.959.457.480	-608.472.116	40%	1.421.832.740	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.350.985.364	1.949.935.280	1.959.457.480	-608.472.116	100%	1.421.832.740	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.350.985.364	1.949.935.280	1.959.457.480	-608.472.116	95,45%	1.421.832.740	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.350.985.364	1.949.935.280	1.959.457.480	-608.472.116	90,75 %	1.421.832.740	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.350.985.364	1.949.935.280	1.959.457.480	-608.472.116	0,58 %	1.421.832.740	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.350.985.364	1.949.935.280	1.959.457.480	-608.472.116	12%	1.421.832.740	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.350.985.364	1.949.935.280	1.959.457.480	-608.472.116	21,6 %	1.421.832.740	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.350.985.364	1.949.935.280	1.959.457.480	-608.472.116	1,92 %	1.421.832.740	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.350.985.364	1.949.935.280	1.959.457.480	-608.472.116	80%	1.421.832.740	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.350.985.364	1.949.935.280	1.959.457.480	-608.472.116	69%	1.421.832.740	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.350.985.364	1.949.935.280	1.959.457.480	-608.472.116	100%	1.421.832.740	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348		4.265.498.220	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Ngagel Rejo					4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348		4.265.498.220	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7139 Orang	7867 Orang	6264 Orang	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	7694 Orang	4.265.498.220	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	12 Laporan	4.265.498.220	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	12 Dokumen	4.265.498.220	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	12 Dokumen	4.265.498.220	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	12 Dokumen	4.265.498.220	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	12 Dokumen	4.265.498.220	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	12 Dokumen	4.265.498.220	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	12 Dokumen	4.265.498.220	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	12 Dokumen	4.265.498.220	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	686 Orang	712 Orang	776 Orang	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	705 Orang	4.265.498.220	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	773 Orang	1253 Orang	1098 Orang	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	1074 Orang	4.265.498.220	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	114 Orang	106 Orang	98 Orang	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	108 Orang	4.265.498.220	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Ngagel Rejo					4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348		4.265.498.220	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7139 Orang	7867 Orang	6264 Orang	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	7694 Orang	4.265.498.220	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	12 Laporan	4.265.498.220	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	12 Dokumen	4.265.498.220	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	12 Dokumen	4.265.498.220	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	12 Dokumen	4.265.498.220	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	12 Dokumen	4.265.498.220	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	12 Dokumen	4.265.498.220	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	12 Dokumen	4.265.498.220	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	12 Dokumen	4.265.498.220	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	686 Orang	712 Orang	776 Orang	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	705 Orang	4.265.498.220	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	773 Orang	1253 Orang	1098 Orang	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	1074 Orang	4.265.498.220	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	114 Orang	106 Orang	98 Orang	4.052.956.092	5.849.805.840	5.878.372.440	-1.825.416.348	108 Orang	4.265.498.220	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339		52.955.681	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	686 Orang	712 Orang	776 Orang	49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339	705 Orang	52.955.681	Puskesmas Ngagel Rejo
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					2.182.310	7.848.000	5.340.000	-3.157.690		2.335.050	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7139 Orang	7867 Orang	6264 Orang	2.182.310	7.848.000	5.340.000	-3.157.690	7694 Orang	2.335.050	Puskesmas Ngagel Rejo
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					4.217.400	3.960.000	3.960.000	257.400		4.512.618	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	114 Orang	106 Orang	98 Orang	4.217.400	3.960.000	3.960.000	257.400	108 Orang	4.512.618	Puskesmas Ngagel Rejo
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					22.547.040	18.432.000	14.160.000	8.387.040		24.125.333	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	773 Orang	1253 Orang	1098 Orang	22.547.040	18.432.000	14.160.000	8.387.040	1074 Orang	24.125.333	Puskesmas Ngagel Rejo
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					325.829.841	517.671.600	577.918.800	-252.088.959		348.637.930	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	325.829.841	517.671.600	577.918.800	-252.088.959	12 Dokumen	348.637.930	Puskesmas Ngagel Rejo
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.350.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.350.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Ngagel Rejo
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					7.033.855	6.578.000	5.648.000	1.385.855		7.524.819	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.033.855	6.578.000	5.648.000	1.385.855	12 Dokumen	7.524.819	Puskesmas Ngagel Rejo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					94.566.600	86.064.000	42.660.000	51.906.600		101.186.262	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	94.566.600	86.064.000	42.660.000	51.906.600	12 Laporan	101.186.262	Puskesmas Ngagel Rejo
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					827.434.861	1.258.405.180	1.257.444.180	-430.009.319		861.756.859	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	827.434.861	1.258.405.180	1.257.444.180	-430.009.319	12 Dokumen	861.756.859	Puskesmas Ngagel Rejo
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					3.261.300	1.375.000	1.375.000	1.886.300		3.446.542	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.261.300	1.375.000	1.375.000	1.886.300	12 Dokumen	3.446.542	Puskesmas Ngagel Rejo
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					7.777.130	687.500	687.500	7.089.630		8.436.630	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.777.130	687.500	687.500	7.089.630	12 Dokumen	8.436.630	Puskesmas Ngagel Rejo
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					6.163.200	1.100.000	1.100.000	5.063.200		6.594.624	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.163.200	1.100.000	1.100.000	5.063.200	12 Dokumen	6.594.624	Puskesmas Ngagel Rejo
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.507.135	825.000	17.305.200	-13.798.065		3.766.663	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.507.135	825.000	17.305.200	-13.798.065	68%	3.766.663	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.507.135	825.000	17.305.200	-13.798.065		3.766.663	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Ngagel Rejo					3.507.135	825.000	17.305.200	-13.798.065		3.766.663	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.507.135	825.000	17.305.200	-13.798.065	12 Dokumen	3.766.663	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.507.135	825.000	17.305.200	-13.798.065		3.766.663	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.507.135	825.000	17.305.200	-13.798.065	12 Dokumen	3.766.663	Puskesmas Ngagel Rejo
	Puskesmas Pacar Keling					4.321.960.686	4.587.824.447	5.225.656.139	-903.695.453		4.398.441.702	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.321.960.686	4.321.960.686	5.225.656.139	-903.695.453		4.398.441.702	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.321.960.686	4.587.824.447	5.225.656.139	-903.695.453		4.398.441.702	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.043.890.319	3.043.890.319	3.647.636.811	-603.746.492		3.052.483.222	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.043.890.319	3.043.890.319	3.647.636.811	-603.746.492	89,97 %	3.052.483.222	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.043.890.319	3.043.890.319	3.647.636.811	-603.746.492		3.052.483.222	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Pacar Keling					3.043.890.319	3.043.890.319	3.647.636.811	-603.746.492		3.052.483.222	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.043.890.319	3.043.890.319	3.647.636.811	-603.746.492	1 Unit Kerja	3.052.483.222	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.043.890.319	3.043.890.319	3.647.636.811	-603.746.492		3.052.483.222	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.043.890.319	3.043.890.319	3.647.636.811	-603.746.492	1 Unit Kerja	3.052.483.222	Puskesmas Pacar Keling
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.274.945.912	1.543.109.128	1.562.408.128	-287.462.216		1.342.602.816	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.274.945.912	1.543.109.128	1.562.408.128	-287.462.216	91%	1.342.602.816	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.274.945.912	1.543.109.128	1.562.408.128	-287.462.216	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.342.602.816	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.274.945.912	1.543.109.128	1.562.408.128	-287.462.216	80%	1.342.602.816	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.274.945.912	1.543.109.128	1.562.408.128	-287.462.216	98,70 %	1.342.602.816	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.274.945.912	1.543.109.128	1.562.408.128	-287.462.216	82%	1.342.602.816	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.274.945.912	1.543.109.128	1.562.408.128	-287.462.216	40%	1.342.602.816	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.274.945.912	1.543.109.128	1.562.408.128	-287.462.216	100%	1.342.602.816	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.274.945.912	1.543.109.128	1.562.408.128	-287.462.216	95,45%	1.342.602.816	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.274.945.912	1.543.109.128	1.562.408.128	-287.462.216	90,75 %	1.342.602.816	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.274.945.912	1.543.109.128	1.562.408.128	-287.462.216	0,58 %	1.342.602.816	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.274.945.912	1.543.109.128	1.562.408.128	-287.462.216	12%	1.342.602.816	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.274.945.912	1.543.109.128	1.562.408.128	-287.462.216	21,6 %	1.342.602.816	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.274.945.912	1.543.109.128	1.562.408.128	-287.462.216	1,92 %	1.342.602.816	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.274.945.912	1.543.109.128	1.562.408.128	-287.462.216	80%	1.342.602.816	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.274.945.912	1.543.109.128	1.562.408.128	-287.462.216	69%	1.342.602.816	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.274.945.912	1.543.109.128	1.562.408.128	-287.462.216	100%	1.342.602.816	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648		4.027.808.448	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Pacar Keling					3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648		4.027.808.448	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8343 Orang	9192 Orang	7768 Orang	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	8990 Orang	4.027.808.448	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	12 Laporan	4.027.808.448	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	12 Dokumen	4.027.808.448	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	12 Dokumen	4.027.808.448	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	12 Dokumen	4.027.808.448	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	12 Dokumen	4.027.808.448	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	12 Dokumen	4.027.808.448	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	12 Dokumen	4.027.808.448	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	12 Dokumen	4.027.808.448	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	612 Orang	636 Orang	800 Orang	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	630 Orang	4.027.808.448	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	863 Orang	1398 Orang	1270 Orang	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	1199 Orang	4.027.808.448	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	120 Orang	104 Orang	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	122 Orang	4.027.808.448	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Pacar Keling					3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648		4.027.808.448	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8343 Orang	9192 Orang	7768 Orang	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	8990 Orang	4.027.808.448	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	12 Laporan	4.027.808.448	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	12 Dokumen	4.027.808.448	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	12 Dokumen	4.027.808.448	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	12 Dokumen	4.027.808.448	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	12 Dokumen	4.027.808.448	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	12 Dokumen	4.027.808.448	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	12 Dokumen	4.027.808.448	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	12 Dokumen	4.027.808.448	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	612 Orang	636 Orang	800 Orang	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	630 Orang	4.027.808.448	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	863 Orang	1398 Orang	1270 Orang	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	1199 Orang	4.027.808.448	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	120 Orang	104 Orang	3.824.837.736	4.629.327.384	4.687.224.384	-862.386.648	122 Orang	4.027.808.448	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339		52.955.681	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	612 Orang	636 Orang	800 Orang	49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339	630 Orang	52.955.681	Puskesmas Pacar Keling
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					4.332.528	5.250.000	2.550.000	1.782.528		4.635.762	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8343 Orang	9192 Orang	7768 Orang	4.332.528	5.250.000	2.550.000	1.782.528	8990 Orang	4.635.762	Puskesmas Pacar Keling
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					4.792.500	1.800.000	1.800.000	2.992.500		5.127.975	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	120 Orang	104 Orang	4.792.500	1.800.000	1.800.000	2.992.500	122 Orang	5.127.975	Puskesmas Pacar Keling
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					24.473.040	23.472.000	16.720.000	7.753.040		26.186.153	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	863 Orang	1398 Orang	1270 Orang	24.473.040	23.472.000	16.720.000	7.753.040	1199 Orang	26.186.153	Puskesmas Pacar Keling
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					289.087.699	278.365.800	326.380.800	-37.293.101		309.323.838	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	289.087.699	278.365.800	326.380.800	-37.293.101	12 Dokumen	309.323.838	Puskesmas Pacar Keling
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					3.112.536	1.410.000	2.700.000	412.536		3.329.791	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.112.536	1.410.000	2.700.000	412.536	12 Dokumen	3.329.791	Puskesmas Pacar Keling
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					9.054.832	8.468.000	6.518.000	2.536.832		9.686.860	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.054.832	8.468.000	6.518.000	2.536.832	12 Dokumen	9.686.860	Puskesmas Pacar Keling
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					123.726.240	44.136.000	28.260.000	95.466.240		132.387.077	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	123.726.240	44.136.000	28.260.000	95.466.240	12 Laporan	132.387.077	Puskesmas Pacar Keling
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					752.688.313	1.131.130.828	1.128.402.828	-375.714.515		783.909.824	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	752.688.313	1.131.130.828	1.128.402.828	-375.714.515	12 Dokumen	783.909.824	Puskesmas Pacar Keling
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					3.147.155	825.000	825.000	2.322.155		3.325.913	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.147.155	825.000	825.000	2.322.155	12 Dokumen	3.325.913	Puskesmas Pacar Keling
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					7.777.130	687.500	687.500	7.089.630		8.436.630	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.777.130	687.500	687.500	7.089.630	12 Dokumen	8.436.630	Puskesmas Pacar Keling
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					3.081.600	1.100.000	1.100.000	1.981.600		3.297.312	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.081.600	1.100.000	1.100.000	1.981.600	12 Dokumen	3.297.312	Puskesmas Pacar Keling

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.124.455	825.000	15.611.200	-12.486.745		3.355.664	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.124.455	825.000	15.611.200	-12.486.745	68%	3.355.664	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.124.455	825.000	15.611.200	-12.486.745		3.355.664	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Pacar Keling					3.124.455	825.000	15.611.200	-12.486.745		3.355.664	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.124.455	825.000	15.611.200	-12.486.745	12 Dokumen	3.355.664	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.124.455	825.000	15.611.200	-12.486.745		3.355.664	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.124.455	825.000	15.611.200	-12.486.745	12 Dokumen	3.355.664	Puskesmas Pacar Keling
	Puskesmas Pakis					3.152.303.354	2.935.565.180	3.439.719.919	-287.416.565		3.209.106.685	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.152.303.354	3.152.303.354	3.439.719.919	-287.416.565		3.209.106.685	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.152.303.354	2.935.565.180	3.439.719.919	-287.416.565		3.209.106.685	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.258.408.288	2.258.408.288	2.770.061.027	-511.652.739		2.264.783.775	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.258.408.288	2.258.408.288	2.770.061.027	-511.652.739	89,97 %	2.264.783.775	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.258.408.288	2.258.408.288	2.770.061.027	-511.652.739		2.264.783.775	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Pakis					2.258.408.288	2.258.408.288	2.770.061.027	-511.652.739		2.264.783.775	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.258.408.288	2.258.408.288	2.770.061.027	-511.652.739	1 Unit Kerja	2.264.783.775	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.258.408.288	2.258.408.288	2.770.061.027	-511.652.739		2.264.783.775	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.258.408.288	2.258.408.288	2.770.061.027	-511.652.739	1 Unit Kerja	2.264.783.775	Puskesmas Pakis
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					890.898.171	676.331.892	661.682.792	229.215.379		941.104.245	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	890.898.171	676.331.892	661.682.792	229.215.379	91%	941.104.245	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	890.898.171	676.331.892	661.682.792	229.215.379	4 per 1.000 kelahiran hidup	941.104.245	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	890.898.171	676.331.892	661.682.792	229.215.379	80%	941.104.245	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	890.898.171	676.331.892	661.682.792	229.215.379	98,70 %	941.104.245	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	890.898.171	676.331.892	661.682.792	229.215.379	82%	941.104.245	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	890.898.171	676.331.892	661.682.792	229.215.379	40%	941.104.245	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	890.898.171	676.331.892	661.682.792	229.215.379	100%	941.104.245	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	890.898.171	676.331.892	661.682.792	229.215.379	95,45%	941.104.245	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	890.898.171	676.331.892	661.682.792	229.215.379	90,75 %	941.104.245	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	890.898.171	676.331.892	661.682.792	229.215.379	0,58 %	941.104.245	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	890.898.171	676.331.892	661.682.792	229.215.379	12%	941.104.245	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	890.898.171	676.331.892	661.682.792	229.215.379	21,6 %	941.104.245	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	890.898.171	676.331.892	661.682.792	229.215.379	1,92 %	941.104.245	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	890.898.171	676.331.892	661.682.792	229.215.379	80%	941.104.245	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	890.898.171	676.331.892	661.682.792	229.215.379	69%	941.104.245	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	890.898.171	676.331.892	661.682.792	229.215.379	100%	941.104.245	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137		2.823.312.735	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Pakis					2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137		2.823.312.735	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4798 Orang	5285 Orang	4268 Orang	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	5169 Orang	2.823.312.735	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	12 Laporan	2.823.312.735	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	12 Dokumen	2.823.312.735	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	12 Dokumen	2.823.312.735	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	12 Dokumen	2.823.312.735	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	12 Dokumen	2.823.312.735	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	12 Dokumen	2.823.312.735	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	12 Dokumen	2.823.312.735	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	12 Dokumen	2.823.312.735	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang	450 Orang	430 Orang	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	446 Orang	2.823.312.735	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	505 Orang	817 Orang	724 Orang	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	701 Orang	2.823.312.735	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang	69 Orang	65 Orang	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	70 Orang	2.823.312.735	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Pakis					2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137		2.823.312.735	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4798 Orang	5285 Orang	4268 Orang	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	5169 Orang	2.823.312.735	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	12 Laporan	2.823.312.735	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	12 Dokumen	2.823.312.735	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	12 Dokumen	2.823.312.735	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	12 Dokumen	2.823.312.735	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	12 Dokumen	2.823.312.735	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	12 Dokumen	2.823.312.735	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	12 Dokumen	2.823.312.735	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	12 Dokumen	2.823.312.735	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang	450 Orang	430 Orang	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	446 Orang	2.823.312.735	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	505 Orang	817 Orang	724 Orang	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	701 Orang	2.823.312.735	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang	69 Orang	65 Orang	2.672.694.513	2.028.995.676	1.985.048.376	687.646.137	70 Orang	2.823.312.735	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170		26.477.840	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang	450 Orang	430 Orang	24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170	446 Orang	26.477.840	Puskesmas Pakis
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.347.898	1.566.000	1.320.000	27.898		1.442.237	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4798 Orang	5285 Orang	4268 Orang	1.347.898	1.566.000	1.320.000	27.898	5169 Orang	1.442.237	Puskesmas Pakis
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.258.900	2.700.000	900.000	2.358.900		3.487.023	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang	69 Orang	65 Orang	3.258.900	2.700.000	900.000	2.358.900	70 Orang	3.487.023	Puskesmas Pakis
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.374.040	16.572.000	13.860.000	4.514.040		19.660.223	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	505 Orang	817 Orang	724 Orang	18.374.040	16.572.000	13.860.000	4.514.040	701 Orang	19.660.223	Puskesmas Pakis
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					283.772.122	221.082.000	269.061.900	14.710.222		303.636.171	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	283.772.122	221.082.000	269.061.900	14.710.222	12 Dokumen	303.636.171	Puskesmas Pakis
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.230.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.230.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Pakis
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					3.051.782	2.854.000	3.634.000	-582.218		3.264.797	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.051.782	2.854.000	3.634.000	-582.218	12 Dokumen	3.264.797	Puskesmas Pakis
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					123.684.831	59.607.000	5.820.000	117.864.831		132.342.769	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	123.684.831	59.607.000	5.820.000	117.864.831	12 Laporan	132.342.769	Puskesmas Pakis
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					424.022.660	345.151.392	338.817.392	85.205.268		441.611.120	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	424.022.660	345.151.392	338.817.392	85.205.268	12 Dokumen	441.611.120	Puskesmas Pakis
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.793.715	1.100.000	1.100.000	693.715		1.895.598	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.793.715	1.100.000	1.100.000	693.715	12 Dokumen	1.895.598	Puskesmas Pakis
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					3.888.565	687.500	687.500	3.201.065		4.218.315	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.888.565	687.500	687.500	3.201.065	12 Dokumen	4.218.315	Puskesmas Pakis
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					2.568.000	550.000	550.000	2.018.000		2.747.760	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.568.000	550.000	550.000	2.018.000	12 Dokumen	2.747.760	Puskesmas Pakis
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.996.895	825.000	7.976.100	-4.979.205		3.218.665	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	2.996.895	825.000	7.976.100	-4.979.205	68%	3.218.665	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.996.895	825.000	7.976.100	-4.979.205		3.218.665	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Pakis					2.996.895	825.000	7.976.100	-4.979.205		3.218.665	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.996.895	825.000	7.976.100	-4.979.205	12 Dokumen	3.218.665	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					2.996.895	825.000	7.976.100	-4.979.205		3.218.665	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.996.895	825.000	7.976.100	-4.979.205	12 Dokumen	3.218.665	Puskesmas Pakis
	Puskesmas Pegirian					3.830.629.787	4.192.442.228	4.286.003.287	-455.373.500		3.897.607.074	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.830.629.787	3.830.629.787	4.286.003.287	-455.373.500		3.897.607.074	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.830.629.787	4.192.442.228	4.286.003.287	-455.373.500		3.897.607.074	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.704.897.160	2.704.897.160	2.761.295.019	-56.397.859		2.712.533.084	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.704.897.160	2.704.897.160	2.761.295.019	-56.397.859	89,97 %	2.712.533.084	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.704.897.160	2.704.897.160	2.761.295.019	-56.397.859		2.712.533.084	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Pegirian					2.704.897.160	2.704.897.160	2.761.295.019	-56.397.859		2.712.533.084	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.704.897.160	2.704.897.160	2.761.295.019	-56.397.859	1 Unit Kerja	2.712.533.084	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.704.897.160	2.704.897.160	2.761.295.019	-56.397.859		2.712.533.084	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.704.897.160	2.704.897.160	2.761.295.019	-56.397.859	1 Unit Kerja	2.712.533.084	Puskesmas Pegirian
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.122.225.492	1.486.720.068	1.516.187.668	-393.962.176		1.181.307.327	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.122.225.492	1.486.720.068	1.516.187.668	-393.962.176	91%	1.181.307.327	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.122.225.492	1.486.720.068	1.516.187.668	-393.962.176	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.181.307.327	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.122.225.492	1.486.720.068	1.516.187.668	-393.962.176	80%	1.181.307.327	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.122.225.492	1.486.720.068	1.516.187.668	-393.962.176	98,70 %	1.181.307.327	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.122.225.492	1.486.720.068	1.516.187.668	-393.962.176	82%	1.181.307.327	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.122.225.492	1.486.720.068	1.516.187.668	-393.962.176	40%	1.181.307.327	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.122.225.492	1.486.720.068	1.516.187.668	-393.962.176	100%	1.181.307.327	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.122.225.492	1.486.720.068	1.516.187.668	-393.962.176	95,45%	1.181.307.327	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.122.225.492	1.486.720.068	1.516.187.668	-393.962.176	90,75 %	1.181.307.327	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.122.225.492	1.486.720.068	1.516.187.668	-393.962.176	0,58 %	1.181.307.327	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.122.225.492	1.486.720.068	1.516.187.668	-393.962.176	12%	1.181.307.327	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.122.225.492	1.486.720.068	1.516.187.668	-393.962.176	21,6 %	1.181.307.327	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.122.225.492	1.486.720.068	1.516.187.668	-393.962.176	1,92 %	1.181.307.327	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.122.225.492	1.486.720.068	1.516.187.668	-393.962.176	80%	1.181.307.327	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.122.225.492	1.486.720.068	1.516.187.668	-393.962.176	69%	1.181.307.327	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.122.225.492	1.486.720.068	1.516.187.668	-393.962.176	100%	1.181.307.327	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528		3.543.921.981	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Pegirian					3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528		3.543.921.981	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4557 Orang	5020 Orang	4332 Orang	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	4910 Orang	3.543.921.981	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	12 Laporan	3.543.921.981	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	12 Dokumen	3.543.921.981	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	12 Dokumen	3.543.921.981	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	12 Dokumen	3.543.921.981	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	12 Dokumen	3.543.921.981	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	12 Dokumen	3.543.921.981	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	12 Dokumen	3.543.921.981	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	12 Dokumen	3.543.921.981	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	339 Orang	351 Orang	353 Orang	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	348 Orang	3.543.921.981	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	429 Orang	695 Orang	639 Orang	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	596 Orang	3.543.921.981	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang	61 Orang	57 Orang	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	62 Orang	3.543.921.981	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Pegirian					3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528		3.543.921.981	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4557 Orang	5020 Orang	4332 Orang	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	4910 Orang	3.543.921.981	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	12 Laporan	3.543.921.981	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	12 Dokumen	3.543.921.981	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	12 Dokumen	3.543.921.981	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	12 Dokumen	3.543.921.981	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	12 Dokumen	3.543.921.981	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	12 Dokumen	3.543.921.981	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	12 Dokumen	3.543.921.981	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	12 Dokumen	3.543.921.981	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	339 Orang	351 Orang	353 Orang	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	348 Orang	3.543.921.981	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	429 Orang	695 Orang	639 Orang	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	596 Orang	3.543.921.981	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang	61 Orang	57 Orang	3.366.676.476	4.460.160.204	4.548.563.004	-1.181.886.528	62 Orang	3.543.921.981	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170		26.477.840	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	339 Orang	351 Orang	353 Orang	24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170	348 Orang	26.477.840	Puskesmas Pegirian
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.925.568	5.256.000	2.820.000	-894.432		2.060.339	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4557 Orang	5020 Orang	4332 Orang	1.925.568	5.256.000	2.820.000	-894.432	4910 Orang	2.060.339	Puskesmas Pegirian
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.834.000	3.600.000	1.800.000	2.034.000		4.102.380	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang	61 Orang	57 Orang	3.834.000	3.600.000	1.800.000	2.034.000	62 Orang	4.102.380	Puskesmas Pegirian
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.117.240	16.992.000	16.120.000	1.997.240		19.385.447	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	429 Orang	695 Orang	639 Orang	18.117.240	16.992.000	16.120.000	1.997.240	596 Orang	19.385.447	Puskesmas Pegirian
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					326.868.697	189.964.800	246.670.400	80.198.297		349.749.506	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	326.868.697	189.964.800	246.670.400	80.198.297	12 Dokumen	349.749.506	Puskesmas Pegirian
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	630.000	2.460.000	-2.160.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	630.000	2.460.000	-2.160.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Pegirian
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					3.693.362	2.884.000	2.704.000	989.362		3.951.159	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.693.362	2.884.000	2.704.000	989.362	12 Dokumen	3.951.159	Puskesmas Pegirian
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					50.472.435	29.796.000	8.100.000	42.372.435		54.005.505	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	50.472.435	29.796.000	8.100.000	42.372.435	12 Laporan	54.005.505	Puskesmas Pegirian
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					681.061.136	1.212.577.768	1.210.493.768	-529.432.632		709.311.552	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	681.061.136	1.212.577.768	1.210.493.768	-529.432.632	12 Dokumen	709.311.552	Puskesmas Pegirian
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.190.375	550.000	550.000	640.375		1.257.988	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.190.375	550.000	550.000	640.375	12 Dokumen	1.257.988	Puskesmas Pegirian
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					4.277.421	687.500	687.500	3.589.921		4.640.147	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.277.421	687.500	687.500	3.589.921	12 Dokumen	4.640.147	Puskesmas Pegirian
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					5.649.600	550.000	550.000	5.099.600		6.045.072	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.649.600	550.000	550.000	5.099.600	12 Dokumen	6.045.072	Puskesmas Pegirian
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.507.135	825.000	8.520.600	-5.013.465		3.766.663	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.507.135	825.000	8.520.600	-5.013.465	68%	3.766.663	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.507.135	825.000	8.520.600	-5.013.465		3.766.663	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Pegirian					3.507.135	825.000	8.520.600	-5.013.465		3.766.663	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.507.135	825.000	8.520.600	-5.013.465	12 Dokumen	3.766.663	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.507.135	825.000	8.520.600	-5.013.465		3.766.663	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.507.135	825.000	8.520.600	-5.013.465	12 Dokumen	3.766.663	Puskesmas Pegirian
	Puskesmas Peneleh					3.372.122.085	3.815.686.046	4.221.186.296	-849.064.211		3.433.430.670	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.372.122.085	3.372.122.085	4.221.186.296	-849.064.211		3.433.430.670	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.372.122.085	3.815.686.046	4.221.186.296	-849.064.211		3.433.430.670	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.367.518.166	2.367.518.166	2.791.269.316	-423.751.150		2.374.201.670	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.367.518.166	2.367.518.166	2.791.269.316	-423.751.150	89,97 %	2.374.201.670	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.367.518.166	2.367.518.166	2.791.269.316	-423.751.150		2.374.201.670	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Peneleh					2.367.518.166	2.367.518.166	2.791.269.316	-423.751.150		2.374.201.670	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.367.518.166	2.367.518.166	2.791.269.316	-423.751.150	1 Unit Kerja	2.374.201.670	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.367.518.166	2.367.518.166	2.791.269.316	-423.751.150		2.374.201.670	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.367.518.166	2.367.518.166	2.791.269.316	-423.751.150	1 Unit Kerja	2.374.201.670	Puskesmas Peneleh
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.001.021.609	1.447.342.880	1.411.813.180	-410.791.571		1.055.381.599	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.001.021.609	1.447.342.880	1.411.813.180	-410.791.571	91%	1.055.381.599	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.001.021.609	1.447.342.880	1.411.813.180	-410.791.571	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.055.381.599	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.001.021.609	1.447.342.880	1.411.813.180	-410.791.571	80%	1.055.381.599	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.001.021.609	1.447.342.880	1.411.813.180	-410.791.571	98,70 %	1.055.381.599	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.001.021.609	1.447.342.880	1.411.813.180	-410.791.571	82%	1.055.381.599	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.001.021.609	1.447.342.880	1.411.813.180	-410.791.571	40%	1.055.381.599	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.001.021.609	1.447.342.880	1.411.813.180	-410.791.571	100%	1.055.381.599	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.001.021.609	1.447.342.880	1.411.813.180	-410.791.571	95,45%	1.055.381.599	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.001.021.609	1.447.342.880	1.411.813.180	-410.791.571	90,75 %	1.055.381.599	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.001.021.609	1.447.342.880	1.411.813.180	-410.791.571	0,58 %	1.055.381.599	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.001.021.609	1.447.342.880	1.411.813.180	-410.791.571	12%	1.055.381.599	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.001.021.609	1.447.342.880	1.411.813.180	-410.791.571	21,6 %	1.055.381.599	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.001.021.609	1.447.342.880	1.411.813.180	-410.791.571	1,92 %	1.055.381.599	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.001.021.609	1.447.342.880	1.411.813.180	-410.791.571	80%	1.055.381.599	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.001.021.609	1.447.342.880	1.411.813.180	-410.791.571	69%	1.055.381.599	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.001.021.609	1.447.342.880	1.411.813.180	-410.791.571	100%	1.055.381.599	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713		3.166.144.797	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Peneleh					3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713		3.166.144.797	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4969 Orang	5474 Orang	8000 Orang	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	5354 Orang	3.166.144.797	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	12 Laporan	3.166.144.797	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	12 Dokumen	3.166.144.797	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	12 Dokumen	3.166.144.797	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	12 Dokumen	3.166.144.797	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	12 Dokumen	3.166.144.797	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	12 Dokumen	3.166.144.797	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	12 Dokumen	3.166.144.797	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	12 Dokumen	3.166.144.797	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	495 Orang	514 Orang	484 Orang	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	509 Orang	3.166.144.797	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	544 Orang	880 Orang	801 Orang	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	755 Orang	3.166.144.797	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang	76 Orang	72 Orang	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	77 Orang	3.166.144.797	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Peneleh					3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713		3.166.144.797	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4969 Orang	5474 Orang	8000 Orang	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	5354 Orang	3.166.144.797	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	12 Laporan	3.166.144.797	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	12 Dokumen	3.166.144.797	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	12 Dokumen	3.166.144.797	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	12 Dokumen	3.166.144.797	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	12 Dokumen	3.166.144.797	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	12 Dokumen	3.166.144.797	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	12 Dokumen	3.166.144.797	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	12 Dokumen	3.166.144.797	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	495 Orang	514 Orang	484 Orang	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	509 Orang	3.166.144.797	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	544 Orang	880 Orang	801 Orang	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	755 Orang	3.166.144.797	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang	76 Orang	72 Orang	3.003.064.827	4.342.028.640	4.235.439.540	-1.232.374.713	77 Orang	3.166.144.797	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	495 Orang	514 Orang	484 Orang	69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727	509 Orang	74.468.926	Puskesmas Peneleh
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					2.952.538	13.867.500	7.260.000	-4.307.462		3.159.186	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4969 Orang	5474 Orang	8000 Orang	2.952.538	13.867.500	7.260.000	-4.307.462	5354 Orang	3.159.186	Puskesmas Peneleh
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					4.600.800	4.320.000	4.320.000	280.800		4.922.856	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang	76 Orang	72 Orang	4.600.800	4.320.000	4.320.000	280.800	77 Orang	4.922.856	Puskesmas Peneleh
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.053.040	16.572.000	13.740.000	4.313.040		19.316.753	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	544 Orang	880 Orang	801 Orang	18.053.040	16.572.000	13.740.000	4.313.040	755 Orang	19.316.753	Puskesmas Peneleh
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					231.299.658	229.523.400	273.715.200	-42.415.542		247.490.634	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	231.299.658	229.523.400	273.715.200	-42.415.542	12 Dokumen	247.490.634	Puskesmas Peneleh
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.410.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.410.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Peneleh
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					8.321.293	7.872.000	7.872.000	449.293		8.902.119	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.321.293	7.872.000	7.872.000	449.293	12 Dokumen	8.902.119	Puskesmas Peneleh
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					107.669.820	91.854.000	31.650.000	76.019.820		115.206.707	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	107.669.820	91.854.000	31.650.000	76.019.820	12 Laporan	115.206.707	Puskesmas Peneleh
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					544.841.384	1.009.450.480	998.082.480	-453.241.096		567.441.405	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	544.841.384	1.009.450.480	998.082.480	-453.241.096	12 Dokumen	567.441.405	Puskesmas Peneleh
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.772.105	1.100.000	1.100.000	1.672.105		2.929.561	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.772.105	1.100.000	1.100.000	1.672.105	12 Dokumen	2.929.561	Puskesmas Peneleh
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					9.332.556	687.500	687.500	8.645.056		10.123.956	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.332.556	687.500	687.500	8.645.056	12 Dokumen	10.123.956	Puskesmas Peneleh
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					1.027.200	990.000	990.000	37.200		1.099.104	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.027.200	990.000	990.000	37.200	12 Dokumen	1.099.104	Puskesmas Peneleh
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.582.310	825.000	18.103.800	-14.521.490		3.847.401	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.582.310	825.000	18.103.800	-14.521.490	68%	3.847.401	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.582.310	825.000	18.103.800	-14.521.490		3.847.401	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Peneleh					3.582.310	825.000	18.103.800	-14.521.490		3.847.401	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.582.310	825.000	18.103.800	-14.521.490	12 Dokumen	3.847.401	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.582.310	825.000	18.103.800	-14.521.490		3.847.401	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.582.310	825.000	18.103.800	-14.521.490	12 Dokumen	3.847.401	Puskesmas Peneleh
	Puskesmas Perak Timur					5.460.060.268	6.125.118.751	7.220.053.057	-1.759.992.789		5.551.092.482	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.460.060.268	5.460.060.268	7.220.053.057	-1.759.992.789		5.551.092.482	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					5.460.060.268	6.125.118.751	7.220.053.057	-1.759.992.789		5.551.092.482	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.944.081.819	3.944.081.819	4.794.747.125	-850.665.306		3.955.215.962	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.944.081.819	3.944.081.819	4.794.747.125	-850.665.306	89,97 %	3.955.215.962	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.944.081.819	3.944.081.819	4.794.747.125	-850.665.306		3.955.215.962	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Perak Timur					3.944.081.819	3.944.081.819	4.794.747.125	-850.665.306		3.955.215.962	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.944.081.819	3.944.081.819	4.794.747.125	-850.665.306	1 Unit Kerja	3.955.215.962	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.944.081.819	3.944.081.819	4.794.747.125	-850.665.306		3.955.215.962	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.944.081.819	3.944.081.819	4.794.747.125	-850.665.306	1 Unit Kerja	3.955.215.962	Puskesmas Perak Timur
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.511.375.659	2.180.211.932	2.406.403.532	-895.027.873		1.590.933.124	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.511.375.659	2.180.211.932	2.406.403.532	-895.027.873	91%	1.590.933.124	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.511.375.659	2.180.211.932	2.406.403.532	-895.027.873	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.590.933.124	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.511.375.659	2.180.211.932	2.406.403.532	-895.027.873	80%	1.590.933.124	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.511.375.659	2.180.211.932	2.406.403.532	-895.027.873	98,70 %	1.590.933.124	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.511.375.659	2.180.211.932	2.406.403.532	-895.027.873	82%	1.590.933.124	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.511.375.659	2.180.211.932	2.406.403.532	-895.027.873	40%	1.590.933.124	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.511.375.659	2.180.211.932	2.406.403.532	-895.027.873	100%	1.590.933.124	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.511.375.659	2.180.211.932	2.406.403.532	-895.027.873	95,45%	1.590.933.124	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.511.375.659	2.180.211.932	2.406.403.532	-895.027.873	90,75 %	1.590.933.124	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.511.375.659	2.180.211.932	2.406.403.532	-895.027.873	0,58 %	1.590.933.124	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.511.375.659	2.180.211.932	2.406.403.532	-895.027.873	12%	1.590.933.124	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.511.375.659	2.180.211.932	2.406.403.532	-895.027.873	21,6 %	1.590.933.124	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.511.375.659	2.180.211.932	2.406.403.532	-895.027.873	1,92 %	1.590.933.124	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.511.375.659	2.180.211.932	2.406.403.532	-895.027.873	80%	1.590.933.124	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.511.375.659	2.180.211.932	2.406.403.532	-895.027.873	69%	1.590.933.124	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.511.375.659	2.180.211.932	2.406.403.532	-895.027.873	100%	1.590.933.124	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619		4.772.799.372	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Perak Timur					4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619		4.772.799.372	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10206 Orang	11245 Orang	9317 Orang	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	10998 Orang	4.772.799.372	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	12 Laporan	4.772.799.372	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	12 Dokumen	4.772.799.372	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	12 Dokumen	4.772.799.372	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	12 Dokumen	4.772.799.372	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	12 Dokumen	4.772.799.372	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	12 Dokumen	4.772.799.372	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	12 Dokumen	4.772.799.372	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	12 Dokumen	4.772.799.372	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	875 Orang	908 Orang	904 Orang	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	899 Orang	4.772.799.372	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1043 Orang	1692 Orang	1510 Orang	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	1451 Orang	4.772.799.372	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	142 Orang	144 Orang	134 Orang	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	146 Orang	4.772.799.372	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Perak Timur					4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619		4.772.799.372	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10206 Orang	11245 Orang	9317 Orang	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	10998 Orang	4.772.799.372	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	12 Laporan	4.772.799.372	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	12 Dokumen	4.772.799.372	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	12 Dokumen	4.772.799.372	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	12 Dokumen	4.772.799.372	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	12 Dokumen	4.772.799.372	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	12 Dokumen	4.772.799.372	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	12 Dokumen	4.772.799.372	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	12 Dokumen	4.772.799.372	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	875 Orang	908 Orang	904 Orang	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	899 Orang	4.772.799.372	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1043 Orang	1692 Orang	1510 Orang	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	1451 Orang	4.772.799.372	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	142 Orang	144 Orang	134 Orang	4.534.126.977	6.540.635.796	7.219.210.596	-2.685.083.619	146 Orang	4.772.799.372	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					80.717.551	75.504.000	75.504.000	5.213.551		86.052.981	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	875 Orang	908 Orang	904 Orang	80.717.551	75.504.000	75.504.000	5.213.551	899 Orang	86.052.981	Puskesmas Perak Timur
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.925.568	7.185.000	5.700.000	-3.774.432		2.060.339	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10206 Orang	11245 Orang	9317 Orang	1.925.568	7.185.000	5.700.000	-3.774.432	10998 Orang	2.060.339	Puskesmas Perak Timur
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					6.326.100	5.400.000	5.400.000	926.100		6.768.927	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	142 Orang	144 Orang	134 Orang	6.326.100	5.400.000	5.400.000	926.100	146 Orang	6.768.927	Puskesmas Perak Timur
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					19.722.240	16.572.000	16.720.000	3.002.240		21.102.797	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1043 Orang	1692 Orang	1510 Orang	19.722.240	16.572.000	16.720.000	3.002.240	1451 Orang	21.102.797	Puskesmas Perak Timur
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					342.962.497	504.186.000	549.601.600	-206.639.103		366.969.872	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	342.962.497	504.186.000	549.601.600	-206.639.103	12 Dokumen	366.969.872	Puskesmas Perak Timur
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					3.465.504	1.410.000	2.700.000	765.504		3.707.396	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.465.504	1.410.000	2.700.000	765.504	12 Dokumen	3.707.396	Puskesmas Perak Timur
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					11.180.601	10.186.000	10.156.000	1.024.601		11.961.007	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11.180.601	10.186.000	10.156.000	1.024.601	12 Dokumen	11.961.007	Puskesmas Perak Timur
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					105.780.735	48.012.000	15.060.000	90.720.735		113.185.386	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	105.780.735	48.012.000	15.060.000	90.720.735	12 Laporan	113.185.386	Puskesmas Perak Timur
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					914.255.779	1.508.044.432	1.721.849.432	-807.593.653		952.179.109	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	914.255.779	1.508.044.432	1.721.849.432	-807.593.653	12 Dokumen	952.179.109	Puskesmas Perak Timur
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.323.676	825.000	825.000	1.498.676		2.455.661	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.323.676	825.000	825.000	1.498.676	12 Dokumen	2.455.661	Puskesmas Perak Timur
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					12.443.408	687.500	687.500	11.755.908		13.498.609	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.443.408	687.500	687.500	11.755.908	12 Dokumen	13.498.609	Puskesmas Perak Timur
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					10.272.000	2.200.000	2.200.000	8.072.000		10.991.040	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.272.000	2.200.000	2.200.000	8.072.000	12 Dokumen	10.991.040	Puskesmas Perak Timur
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					4.602.790	825.000	18.902.400	-14.299.610		4.943.396	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	4.602.790	825.000	18.902.400	-14.299.610	68%	4.943.396	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.602.790	825.000	18.902.400	-14.299.610		4.943.396	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Perak Timur					4.602.790	825.000	18.902.400	-14.299.610		4.943.396	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.602.790	825.000	18.902.400	-14.299.610	12 Dokumen	4.943.396	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4.602.790	825.000	18.902.400	-14.299.610		4.943.396	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.602.790	825.000	18.902.400	-14.299.610	12 Dokumen	4.943.396	Puskesmas Perak Timur
	Puskesmas Pucang Sewu					4.193.082.808	4.267.633.544	4.479.116.421	-286.033.613		4.255.870.419	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.193.082.808	4.193.082.808	4.479.116.421	-286.033.613		4.255.870.419	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.193.082.808	4.267.633.544	4.479.116.421	-286.033.613		4.255.870.419	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.245.182.160	3.245.182.160	3.534.470.237	-289.288.077		3.254.343.310	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.245.182.160	3.245.182.160	3.534.470.237	-289.288.077	89,97 %	3.254.343.310	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.245.182.160	3.245.182.160	3.534.470.237	-289.288.077		3.254.343.310	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Pucang Sewu					3.245.182.160	3.245.182.160	3.534.470.237	-289.288.077		3.254.343.310	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.245.182.160	3.245.182.160	3.534.470.237	-289.288.077	1 Unit Kerja	3.254.343.310	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.245.182.160	3.245.182.160	3.534.470.237	-289.288.077		3.254.343.310	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.245.182.160	3.245.182.160	3.534.470.237	-289.288.077	1 Unit Kerja	3.254.343.310	Puskesmas Pucang Sewu
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					944.445.898	1.021.626.384	929.627.884	14.818.014		997.816.707	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	944.445.898	1.021.626.384	929.627.884	14.818.014	91%	997.816.707	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	944.445.898	1.021.626.384	929.627.884	14.818.014	4 per 1.000 kelahiran hidup	997.816.707	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	944.445.898	1.021.626.384	929.627.884	14.818.014	80%	997.816.707	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	944.445.898	1.021.626.384	929.627.884	14.818.014	98,70 %	997.816.707	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	944.445.898	1.021.626.384	929.627.884	14.818.014	82%	997.816.707	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	944.445.898	1.021.626.384	929.627.884	14.818.014	40%	997.816.707	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	944.445.898	1.021.626.384	929.627.884	14.818.014	100%	997.816.707	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	944.445.898	1.021.626.384	929.627.884	14.818.014	95,45%	997.816.707	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	944.445.898	1.021.626.384	929.627.884	14.818.014	90,75 %	997.816.707	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	944.445.898	1.021.626.384	929.627.884	14.818.014	0,58 %	997.816.707	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	944.445.898	1.021.626.384	929.627.884	14.818.014	12%	997.816.707	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	944.445.898	1.021.626.384	929.627.884	14.818.014	21,6 %	997.816.707	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	944.445.898	1.021.626.384	929.627.884	14.818.014	1,92 %	997.816.707	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	944.445.898	1.021.626.384	929.627.884	14.818.014	80%	997.816.707	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	944.445.898	1.021.626.384	929.627.884	14.818.014	69%	997.816.707	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	944.445.898	1.021.626.384	929.627.884	14.818.014	100%	997.816.707	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042		2.993.450.121	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Pucang Sewu					2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042		2.993.450.121	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6830 Orang	7525 Orang	6092 Orang	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	7360 Orang	2.993.450.121	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	12 Laporan	2.993.450.121	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	12 Dokumen	2.993.450.121	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	12 Dokumen	2.993.450.121	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	12 Dokumen	2.993.450.121	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	12 Dokumen	2.993.450.121	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	12 Dokumen	2.993.450.121	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	12 Dokumen	2.993.450.121	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	12 Dokumen	2.993.450.121	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	521 Orang	541 Orang	496 Orang	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	536 Orang	2.993.450.121	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	759 Orang	1229 Orang	1098 Orang	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	1054 Orang	2.993.450.121	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	112 Orang	104 Orang	99 Orang	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	106 Orang	2.993.450.121	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Pucang Sewu					2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042		2.993.450.121	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6830 Orang	7525 Orang	6092 Orang	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	7360 Orang	2.993.450.121	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	12 Laporan	2.993.450.121	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	12 Dokumen	2.993.450.121	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	12 Dokumen	2.993.450.121	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	12 Dokumen	2.993.450.121	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	12 Dokumen	2.993.450.121	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	12 Dokumen	2.993.450.121	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	12 Dokumen	2.993.450.121	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	12 Dokumen	2.993.450.121	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	521 Orang	541 Orang	496 Orang	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	536 Orang	2.993.450.121	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	759 Orang	1229 Orang	1098 Orang	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	1054 Orang	2.993.450.121	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	112 Orang	104 Orang	99 Orang	2.833.337.694	3.064.879.152	2.788.883.652	44.454.042	106 Orang	2.993.450.121	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	56.628.000	56.628.000	13.223.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	521 Orang	541 Orang	496 Orang	69.851.727	56.628.000	56.628.000	13.223.727	536 Orang	74.468.926	Puskesmas Pucang Sewu
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.797.197	27.456.000	6.960.000	-5.162.803		1.922.983	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6830 Orang	7525 Orang	6092 Orang	1.797.197	27.456.000	6.960.000	-5.162.803	7360 Orang	1.922.983	Puskesmas Pucang Sewu
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					5.942.700	5.400.000	5.400.000	542.700		6.358.689	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	112 Orang	104 Orang	99 Orang	5.942.700	5.400.000	5.400.000	542.700	106 Orang	6.358.689	Puskesmas Pucang Sewu
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					17.796.240	16.632.000	16.420.000	1.376.240		19.041.977	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	759 Orang	1229 Orang	1098 Orang	17.796.240	16.632.000	16.420.000	1.376.240	1054 Orang	19.041.977	Puskesmas Pucang Sewu
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					263.043.034	167.188.800	220.558.700	42.484.334		281.456.046	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	263.043.034	167.188.800	220.558.700	42.484.334	12 Dokumen	281.456.046	Puskesmas Pucang Sewu
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	2.280.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	2.280.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Pucang Sewu
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					8.770.399	7.602.000	7.602.000	1.168.399		9.382.572	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.770.399	7.602.000	7.602.000	1.168.399	12 Dokumen	9.382.572	Puskesmas Pucang Sewu
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					122.144.031	112.754.400	9.870.000	112.274.031		130.694.113	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	122.144.031	112.754.400	9.870.000	112.274.031	12 Laporan	130.694.113	Puskesmas Pucang Sewu
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					439.793.973	622.357.684	600.161.684	-160.367.711		458.036.627	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	439.793.973	622.357.684	600.161.684	-160.367.711	12 Dokumen	458.036.627	Puskesmas Pucang Sewu
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					4.647.353	1.650.000	1.650.000	2.997.353		4.911.322	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.647.353	1.650.000	1.650.000	2.997.353	12 Dokumen	4.911.322	Puskesmas Pucang Sewu
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					9.332.556	687.500	687.500	8.645.056		10.123.956	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.332.556	687.500	687.500	8.645.056	12 Dokumen	10.123.956	Puskesmas Pucang Sewu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					1.027.200	990.000	990.000	37.200		1.099.104	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.027.200	990.000	990.000	37.200	12 Dokumen	1.099.104	Puskesmas Pucang Sewu
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.454.750	825.000	15.018.300	-11.563.550		3.710.402	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.454.750	825.000	15.018.300	-11.563.550	68%	3.710.402	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.454.750	825.000	15.018.300	-11.563.550		3.710.402	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Pucang Sewu					3.454.750	825.000	15.018.300	-11.563.550		3.710.402	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.454.750	825.000	15.018.300	-11.563.550	12 Dokumen	3.710.402	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.454.750	825.000	15.018.300	-11.563.550		3.710.402	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.454.750	825.000	15.018.300	-11.563.550	12 Dokumen	3.710.402	Puskesmas Pucang Sewu
	Puskesmas Putat Jaya					3.905.381.565	3.778.813.533	4.363.054.277	-457.672.712		3.984.077.041	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.905.381.565	3.905.381.565	4.363.054.277	-457.672.712		3.984.077.041	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.905.381.565	3.778.813.533	4.363.054.277	-457.672.712		3.984.077.041	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.535.887.745	2.535.887.745	3.073.025.289	-537.137.544		2.543.046.556	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.535.887.745	2.535.887.745	3.073.025.289	-537.137.544	89,97 %	2.543.046.556	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.535.887.745	2.535.887.745	3.073.025.289	-537.137.544		2.543.046.556	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Putat Jaya					2.535.887.745	2.535.887.745	3.073.025.289	-537.137.544		2.543.046.556	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.535.887.745	2.535.887.745	3.073.025.289	-537.137.544	1 Unit Kerja	2.543.046.556	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.535.887.745	2.535.887.745	3.073.025.289	-537.137.544		2.543.046.556	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.535.887.745	2.535.887.745	3.073.025.289	-537.137.544	1 Unit Kerja	2.543.046.556	Puskesmas Putat Jaya
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.365.911.510	1.242.100.788	1.281.508.388	84.403.122		1.437.183.084	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.365.911.510	1.242.100.788	1.281.508.388	84.403.122	91%	1.437.183.084	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.365.911.510	1.242.100.788	1.281.508.388	84.403.122	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.437.183.084	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.365.911.510	1.242.100.788	1.281.508.388	84.403.122	80%	1.437.183.084	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.365.911.510	1.242.100.788	1.281.508.388	84.403.122	98,70 %	1.437.183.084	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.365.911.510	1.242.100.788	1.281.508.388	84.403.122	82%	1.437.183.084	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.365.911.510	1.242.100.788	1.281.508.388	84.403.122	40%	1.437.183.084	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.365.911.510	1.242.100.788	1.281.508.388	84.403.122	100%	1.437.183.084	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.365.911.510	1.242.100.788	1.281.508.388	84.403.122	95,45%	1.437.183.084	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.365.911.510	1.242.100.788	1.281.508.388	84.403.122	90,75 %	1.437.183.084	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.365.911.510	1.242.100.788	1.281.508.388	84.403.122	0,58 %	1.437.183.084	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.365.911.510	1.242.100.788	1.281.508.388	84.403.122	12%	1.437.183.084	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.365.911.510	1.242.100.788	1.281.508.388	84.403.122	21,6 %	1.437.183.084	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.365.911.510	1.242.100.788	1.281.508.388	84.403.122	1,92 %	1.437.183.084	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.365.911.510	1.242.100.788	1.281.508.388	84.403.122	80%	1.437.183.084	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.365.911.510	1.242.100.788	1.281.508.388	84.403.122	69%	1.437.183.084	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.365.911.510	1.242.100.788	1.281.508.388	84.403.122	100%	1.437.183.084	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366		4.311.549.252	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Putat Jaya					4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366		4.311.549.252	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6618 Orang	7291 Orang	6249 Orang	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	7131 Orang	4.311.549.252	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	12 Laporan	4.311.549.252	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	12 Dokumen	4.311.549.252	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	12 Dokumen	4.311.549.252	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	12 Dokumen	4.311.549.252	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	12 Dokumen	4.311.549.252	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	12 Dokumen	4.311.549.252	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	12 Dokumen	4.311.549.252	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	12 Dokumen	4.311.549.252	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	637 Orang	661 Orang	657 Orang	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	655 Orang	4.311.549.252	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	643 Orang	1042 Orang	963 Orang	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	893 Orang	4.311.549.252	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	95 Orang	91 Orang	87 Orang	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	92 Orang	4.311.549.252	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Putat Jaya					4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366		4.311.549.252	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6618 Orang	7291 Orang	6249 Orang	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	7131 Orang	4.311.549.252	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	12 Laporan	4.311.549.252	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	12 Dokumen	4.311.549.252	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	12 Dokumen	4.311.549.252	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	12 Dokumen	4.311.549.252	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	12 Dokumen	4.311.549.252	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	12 Dokumen	4.311.549.252	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	12 Dokumen	4.311.549.252	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	12 Dokumen	4.311.549.252	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	637 Orang	661 Orang	657 Orang	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	655 Orang	4.311.549.252	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	643 Orang	1042 Orang	963 Orang	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	893 Orang	4.311.549.252	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	95 Orang	91 Orang	87 Orang	4.097.734.530	3.726.302.364	3.844.525.164	253.209.366	92 Orang	4.311.549.252	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170		26.477.840	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	637 Orang	661 Orang	657 Orang	24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170	655 Orang	26.477.840	Puskesmas Putat Jaya
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.283.712	2.778.000	2.520.000	-1.236.288		1.373.559	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6618 Orang	7291 Orang	6249 Orang	1.283.712	2.778.000	2.520.000	-1.236.288	7131 Orang	1.373.559	Puskesmas Putat Jaya
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					5.175.900	2.520.000	2.520.000	2.655.900		5.538.213	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	95 Orang	91 Orang	87 Orang	5.175.900	2.520.000	2.520.000	2.655.900	92 Orang	5.538.213	Puskesmas Putat Jaya
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.181.440	16.872.000	16.870.000	1.311.440		19.454.141	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	643 Orang	1042 Orang	963 Orang	18.181.440	16.872.000	16.870.000	1.311.440	893 Orang	19.454.141	Puskesmas Putat Jaya
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					346.742.767	345.286.800	394.397.400	-47.654.633		371.014.761	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	346.742.767	345.286.800	394.397.400	-47.654.633	12 Dokumen	371.014.761	Puskesmas Putat Jaya
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.230.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.230.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Putat Jaya
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					3.244.256	2.794.000	2.674.000	570.256		3.470.705	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.244.256	2.794.000	2.674.000	570.256	12 Dokumen	3.470.705	Puskesmas Putat Jaya
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					106.616.940	19.998.000	7.110.000	99.506.940		114.080.126	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	106.616.940	19.998.000	7.110.000	99.506.940	12 Laporan	114.080.126	Puskesmas Putat Jaya
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					851.280.557	825.052.488	827.147.488	24.133.069		886.591.674	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	851.280.557	825.052.488	827.147.488	24.133.069	12 Dokumen	886.591.674	Puskesmas Putat Jaya
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.793.715	1.100.000	1.100.000	693.715		1.895.598	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.793.715	1.100.000	1.100.000	693.715	12 Dokumen	1.895.598	Puskesmas Putat Jaya
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					3.888.565	687.500	687.500	3.201.065		4.218.315	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.888.565	687.500	687.500	3.201.065	12 Dokumen	4.218.315	Puskesmas Putat Jaya
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					2.568.000	550.000	550.000	2.018.000		2.747.760	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.568.000	550.000	550.000	2.018.000	12 Dokumen	2.747.760	Puskesmas Putat Jaya
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.582.310	825.000	8.520.600	-4.938.290		3.847.401	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.582.310	825.000	8.520.600	-4.938.290	68%	3.847.401	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.582.310	825.000	8.520.600	-4.938.290		3.847.401	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Putat Jaya					3.582.310	825.000	8.520.600	-4.938.290		3.847.401	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.582.310	825.000	8.520.600	-4.938.290	12 Dokumen	3.847.401	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.582.310	825.000	8.520.600	-4.938.290		3.847.401	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.582.310	825.000	8.520.600	-4.938.290	12 Dokumen	3.847.401	Puskesmas Putat Jaya
	Puskesmas Rangkah					4.787.463.707	5.934.923.822	6.478.432.678	-1.690.968.971		4.863.442.878	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.787.463.707	4.787.463.707	6.478.432.678	-1.690.968.971		4.863.442.878	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.787.463.707	5.934.923.822	6.478.432.678	-1.690.968.971		4.863.442.878	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.561.700.562	3.561.700.562	4.049.206.018	-487.505.456		3.571.755.242	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.561.700.562	3.561.700.562	4.049.206.018	-487.505.456	89,97 %	3.571.755.242	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.561.700.562	3.561.700.562	4.049.206.018	-487.505.456		3.571.755.242	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Rangkah					3.561.700.562	3.561.700.562	4.049.206.018	-487.505.456		3.571.755.242	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.561.700.562	3.561.700.562	4.049.206.018	-487.505.456	1 Unit Kerja	3.571.755.242	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.561.700.562	3.561.700.562	4.049.206.018	-487.505.456		3.571.755.242	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.561.700.562	3.561.700.562	4.049.206.018	-487.505.456	1 Unit Kerja	3.571.755.242	Puskesmas Rangkah
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.222.180.835	2.372.398.260	2.410.759.860	-1.188.579.025		1.287.840.235	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.222.180.835	2.372.398.260	2.410.759.860	-1.188.579.025	91%	1.287.840.235	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.222.180.835	2.372.398.260	2.410.759.860	-1.188.579.025	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.287.840.235	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.222.180.835	2.372.398.260	2.410.759.860	-1.188.579.025	80%	1.287.840.235	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.222.180.835	2.372.398.260	2.410.759.860	-1.188.579.025	98,70 %	1.287.840.235	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.222.180.835	2.372.398.260	2.410.759.860	-1.188.579.025	82%	1.287.840.235	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.222.180.835	2.372.398.260	2.410.759.860	-1.188.579.025	40%	1.287.840.235	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.222.180.835	2.372.398.260	2.410.759.860	-1.188.579.025	100%	1.287.840.235	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.222.180.835	2.372.398.260	2.410.759.860	-1.188.579.025	95,45%	1.287.840.235	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.222.180.835	2.372.398.260	2.410.759.860	-1.188.579.025	90,75 %	1.287.840.235	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.222.180.835	2.372.398.260	2.410.759.860	-1.188.579.025	0,58 %	1.287.840.235	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.222.180.835	2.372.398.260	2.410.759.860	-1.188.579.025	12%	1.287.840.235	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.222.180.835	2.372.398.260	2.410.759.860	-1.188.579.025	21,6 %	1.287.840.235	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.222.180.835	2.372.398.260	2.410.759.860	-1.188.579.025	1,92 %	1.287.840.235	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.222.180.835	2.372.398.260	2.410.759.860	-1.188.579.025	80%	1.287.840.235	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.222.180.835	2.372.398.260	2.410.759.860	-1.188.579.025	69%	1.287.840.235	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.222.180.835	2.372.398.260	2.410.759.860	-1.188.579.025	100%	1.287.840.235	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075		3.863.520.705	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Rangkah					3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075		3.863.520.705	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9361 Orang	10314 Orang	8555 Orang	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	10088 Orang	3.863.520.705	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	12 Laporan	3.863.520.705	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	12 Dokumen	3.863.520.705	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	12 Dokumen	3.863.520.705	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	12 Dokumen	3.863.520.705	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	12 Dokumen	3.863.520.705	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	12 Dokumen	3.863.520.705	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	12 Dokumen	3.863.520.705	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	12 Dokumen	3.863.520.705	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	436 Orang	452 Orang	402 Orang	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	448 Orang	3.863.520.705	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	982 Orang	1592 Orang	1465 Orang	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	1365 Orang	3.863.520.705	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	146 Orang	138 Orang	132 Orang	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	140 Orang	3.863.520.705	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Rangkah					3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075		3.863.520.705	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9361 Orang	10314 Orang	8555 Orang	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	10088 Orang	3.863.520.705	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	12 Laporan	3.863.520.705	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	12 Dokumen	3.863.520.705	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	12 Dokumen	3.863.520.705	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	12 Dokumen	3.863.520.705	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	12 Dokumen	3.863.520.705	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	12 Dokumen	3.863.520.705	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	12 Dokumen	3.863.520.705	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	12 Dokumen	3.863.520.705	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	436 Orang	452 Orang	402 Orang	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	448 Orang	3.863.520.705	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	982 Orang	1592 Orang	1465 Orang	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	1365 Orang	3.863.520.705	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	146 Orang	138 Orang	132 Orang	3.666.542.505	7.117.194.780	7.232.279.580	-3.565.737.075	140 Orang	3.863.520.705	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	436 Orang	452 Orang	402 Orang	69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727	448 Orang	74.468.926	Puskesmas Rangkah
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					3.466.022	6.405.000	5.160.000	-1.693.978		3.708.609	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9361 Orang	10314 Orang	8555 Orang	3.466.022	6.405.000	5.160.000	-1.693.978	10088 Orang	3.708.609	Puskesmas Rangkah
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					7.859.700	1.800.000	1.800.000	6.059.700		8.409.879	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	146 Orang	138 Orang	132 Orang	7.859.700	1.800.000	1.800.000	6.059.700	140 Orang	8.409.879	Puskesmas Rangkah
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					19.337.040	17.142.000	16.720.000	2.617.040		20.690.633	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	982 Orang	1592 Orang	1465 Orang	19.337.040	17.142.000	16.720.000	2.617.040	1365 Orang	20.690.633	Puskesmas Rangkah
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					284.621.661	459.477.600	498.721.200	-214.099.539		304.545.177	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	284.621.661	459.477.600	498.721.200	-214.099.539	12 Dokumen	304.545.177	Puskesmas Rangkah
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.470.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.470.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Rangkah
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					8.321.293	7.782.000	7.752.000	569.293		8.902.119	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.321.293	7.782.000	7.752.000	569.293	12 Dokumen	8.902.119	Puskesmas Rangkah
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					117.299.820	42.864.000	28.860.000	88.439.820		125.510.807	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	117.299.820	42.864.000	28.860.000	88.439.820	12 Laporan	125.510.807	Puskesmas Rangkah
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					692.540.767	1.762.324.160	1.775.913.160	-1.083.372.393		721.267.358	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	692.540.767	1.762.324.160	1.775.913.160	-1.083.372.393	12 Dokumen	721.267.358	Puskesmas Rangkah
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					3.065.622	1.100.000	1.100.000	1.965.622		3.239.749	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.065.622	1.100.000	1.100.000	1.965.622	12 Dokumen	3.239.749	Puskesmas Rangkah
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					11.665.695	687.500	687.500	10.978.195		12.654.946	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11.665.695	687.500	687.500	10.978.195	12 Dokumen	12.654.946	Puskesmas Rangkah
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					3.852.000	1.650.000	1.650.000	2.202.000		4.121.640	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.852.000	1.650.000	1.650.000	2.202.000	12 Dokumen	4.121.640	Puskesmas Rangkah
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.582.310	825.000	18.466.800	-14.884.490		3.847.401	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.582.310	825.000	18.466.800	-14.884.490	68%	3.847.401	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.582.310	825.000	18.466.800	-14.884.490		3.847.401	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Rangkah					3.582.310	825.000	18.466.800	-14.884.490		3.847.401	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.582.310	825.000	18.466.800	-14.884.490	12 Dokumen	3.847.401	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.582.310	825.000	18.466.800	-14.884.490		3.847.401	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.582.310	825.000	18.466.800	-14.884.490	12 Dokumen	3.847.401	Puskesmas Rangkah
	Puskesmas Sawahan					4.002.487.574	4.309.338.006	4.962.881.454	-960.393.880		4.066.000.859	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.002.487.574	4.002.487.574	4.962.881.454	-960.393.880		4.066.000.859	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.002.487.574	4.309.338.006	4.962.881.454	-960.393.880		4.066.000.859	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.044.546.170	3.044.546.170	3.638.116.318	-593.570.148		3.053.140.924	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.044.546.170	3.044.546.170	3.638.116.318	-593.570.148	89,97 %	3.053.140.924	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.044.546.170	3.044.546.170	3.638.116.318	-593.570.148		3.053.140.924	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sawahan					3.044.546.170	3.044.546.170	3.638.116.318	-593.570.148		3.053.140.924	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.044.546.170	3.044.546.170	3.638.116.318	-593.570.148	1 Unit Kerja	3.053.140.924	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.044.546.170	3.044.546.170	3.638.116.318	-593.570.148		3.053.140.924	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.044.546.170	3.044.546.170	3.638.116.318	-593.570.148	1 Unit Kerja	3.053.140.924	Puskesmas Sawahan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					954.359.094	1.263.966.836	1.313.812.436	-359.453.342		1.009.012.534	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	954.359.094	1.263.966.836	1.313.812.436	-359.453.342	91%	1.009.012.534	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	954.359.094	1.263.966.836	1.313.812.436	-359.453.342	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.009.012.534	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	954.359.094	1.263.966.836	1.313.812.436	-359.453.342	80%	1.009.012.534	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	954.359.094	1.263.966.836	1.313.812.436	-359.453.342	98,70 %	1.009.012.534	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	954.359.094	1.263.966.836	1.313.812.436	-359.453.342	82%	1.009.012.534	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	954.359.094	1.263.966.836	1.313.812.436	-359.453.342	40%	1.009.012.534	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	954.359.094	1.263.966.836	1.313.812.436	-359.453.342	100%	1.009.012.534	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	954.359.094	1.263.966.836	1.313.812.436	-359.453.342	95,45%	1.009.012.534	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	954.359.094	1.263.966.836	1.313.812.436	-359.453.342	90,75 %	1.009.012.534	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	954.359.094	1.263.966.836	1.313.812.436	-359.453.342	0,58 %	1.009.012.534	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	954.359.094	1.263.966.836	1.313.812.436	-359.453.342	12%	1.009.012.534	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	954.359.094	1.263.966.836	1.313.812.436	-359.453.342	21,6 %	1.009.012.534	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	954.359.094	1.263.966.836	1.313.812.436	-359.453.342	1,92 %	1.009.012.534	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	954.359.094	1.263.966.836	1.313.812.436	-359.453.342	80%	1.009.012.534	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	954.359.094	1.263.966.836	1.313.812.436	-359.453.342	69%	1.009.012.534	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	954.359.094	1.263.966.836	1.313.812.436	-359.453.342	100%	1.009.012.534	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026		3.027.037.602	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Sawahan					2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026		3.027.037.602	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6949 Orang	7656 Orang	6242 Orang	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	7488 Orang	3.027.037.602	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	12 Laporan	3.027.037.602	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	12 Dokumen	3.027.037.602	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	12 Dokumen	3.027.037.602	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	12 Dokumen	3.027.037.602	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	12 Dokumen	3.027.037.602	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	12 Dokumen	3.027.037.602	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	12 Dokumen	3.027.037.602	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	12 Dokumen	3.027.037.602	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	573 Orang	593 Orang	514 Orang	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	588 Orang	3.027.037.602	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	767 Orang	1242 Orang	1100 Orang	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	1065 Orang	3.027.037.602	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	112 Orang	104 Orang	98 Orang	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	106 Orang	3.027.037.602	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Sawahan					2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026		3.027.037.602	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6949 Orang	7656 Orang	6242 Orang	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	7488 Orang	3.027.037.602	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	12 Laporan	3.027.037.602	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	12 Dokumen	3.027.037.602	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	12 Dokumen	3.027.037.602	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	12 Dokumen	3.027.037.602	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	12 Dokumen	3.027.037.602	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	12 Dokumen	3.027.037.602	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	12 Dokumen	3.027.037.602	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	12 Dokumen	3.027.037.602	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	573 Orang	593 Orang	514 Orang	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	588 Orang	3.027.037.602	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	767 Orang	1242 Orang	1100 Orang	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	1065 Orang	3.027.037.602	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	112 Orang	104 Orang	98 Orang	2.863.077.282	3.791.900.508	3.941.437.308	-1.078.360.026	106 Orang	3.027.037.602	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339		52.955.681	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	573 Orang	593 Orang	514 Orang	49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339	588 Orang	52.955.681	Puskesmas Sawahan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					2.310.682	8.700.000	1.680.000	630.682		2.472.406	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6949 Orang	7656 Orang	6242 Orang	2.310.682	8.700.000	1.680.000	630.682	7488 Orang	2.472.406	Puskesmas Sawahan
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					6.709.500	6.300.000	6.300.000	409.500		7.179.165	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	112 Orang	104 Orang	98 Orang	6.709.500	6.300.000	6.300.000	409.500	106 Orang	7.179.165	Puskesmas Sawahan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.951.840	16.632.000	14.040.000	4.911.840		20.278.469	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	767 Orang	1242 Orang	1100 Orang	18.951.840	16.632.000	14.040.000	4.911.840	1065 Orang	20.278.469	Puskesmas Sawahan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					347.578.831	240.643.200	296.416.300	51.162.531		371.909.349	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	347.578.831	240.643.200	296.416.300	51.162.531	12 Dokumen	371.909.349	Puskesmas Sawahan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.110.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.110.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Sawahan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					7.130.092	5.348.000	5.348.000	1.782.092		7.627.773	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.130.092	5.348.000	5.348.000	1.782.092	12 Dokumen	7.627.773	Puskesmas Sawahan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					87.883.380	39.396.000	6.960.000	80.923.380		94.035.217	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	87.883.380	39.396.000	6.960.000	80.923.380	12 Laporan	94.035.217	Puskesmas Sawahan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					421.757.312	896.596.136	931.126.636	-509.369.324		439.251.806	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	421.757.312	896.596.136	931.126.636	-509.369.324	12 Dokumen	439.251.806	Puskesmas Sawahan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					3.261.300	1.100.000	1.100.000	2.161.300		3.446.542	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.261.300	1.100.000	1.100.000	2.161.300	12 Dokumen	3.446.542	Puskesmas Sawahan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					7.777.130	687.500	687.500	7.089.630		8.436.630	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.777.130	687.500	687.500	7.089.630	12 Dokumen	8.436.630	Puskesmas Sawahan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					1.027.200	990.000	990.000	37.200		1.099.104	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.027.200	990.000	990.000	37.200	12 Dokumen	1.099.104	Puskesmas Sawahan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.582.310	825.000	10.952.700	-7.370.390		3.847.401	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.582.310	825.000	10.952.700	-7.370.390	68%	3.847.401	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.582.310	825.000	10.952.700	-7.370.390		3.847.401	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Sawahan					3.582.310	825.000	10.952.700	-7.370.390		3.847.401	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.582.310	825.000	10.952.700	-7.370.390	12 Dokumen	3.847.401	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.582.310	825.000	10.952.700	-7.370.390		3.847.401	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.582.310	825.000	10.952.700	-7.370.390	12 Dokumen	3.847.401	Puskesmas Sawahan
	Puskesmas Sawahpulo					2.899.236.499	2.901.389.839	3.391.906.813	-492.670.314		2.959.545.639	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.899.236.499	2.899.236.499	3.391.906.813	-492.670.314		2.959.545.639	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.899.236.499	2.901.389.839	3.391.906.813	-492.670.314		2.959.545.639	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.888.996.459	1.888.996.459	2.335.268.933	-446.272.474		1.894.329.096	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	1.888.996.459	1.888.996.459	2.335.268.933	-446.272.474	89,97 %	1.894.329.096	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1.888.996.459	1.888.996.459	2.335.268.933	-446.272.474		1.894.329.096	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sawahpulo					1.888.996.459	1.888.996.459	2.335.268.933	-446.272.474		1.894.329.096	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.888.996.459	1.888.996.459	2.335.268.933	-446.272.474	1 Unit Kerja	1.894.329.096	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.888.996.459	1.888.996.459	2.335.268.933	-446.272.474		1.894.329.096	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.888.996.459	1.888.996.459	2.335.268.933	-446.272.474	1 Unit Kerja	1.894.329.096	Puskesmas Sawahpulo
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.006.605.345	1.011.568.380	1.039.042.280	-32.436.935		1.061.312.881	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.006.605.345	1.011.568.380	1.039.042.280	-32.436.935	91%	1.061.312.881	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.006.605.345	1.011.568.380	1.039.042.280	-32.436.935	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.061.312.881	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.006.605.345	1.011.568.380	1.039.042.280	-32.436.935	80%	1.061.312.881	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.006.605.345	1.011.568.380	1.039.042.280	-32.436.935	98,70 %	1.061.312.881	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.006.605.345	1.011.568.380	1.039.042.280	-32.436.935	82%	1.061.312.881	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.006.605.345	1.011.568.380	1.039.042.280	-32.436.935	40%	1.061.312.881	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.006.605.345	1.011.568.380	1.039.042.280	-32.436.935	100%	1.061.312.881	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.006.605.345	1.011.568.380	1.039.042.280	-32.436.935	95,45%	1.061.312.881	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.006.605.345	1.011.568.380	1.039.042.280	-32.436.935	90,75 %	1.061.312.881	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.006.605.345	1.011.568.380	1.039.042.280	-32.436.935	0,58 %	1.061.312.881	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.006.605.345	1.011.568.380	1.039.042.280	-32.436.935	12%	1.061.312.881	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.006.605.345	1.011.568.380	1.039.042.280	-32.436.935	21,6 %	1.061.312.881	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.006.605.345	1.011.568.380	1.039.042.280	-32.436.935	1,92 %	1.061.312.881	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.006.605.345	1.011.568.380	1.039.042.280	-32.436.935	80%	1.061.312.881	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.006.605.345	1.011.568.380	1.039.042.280	-32.436.935	69%	1.061.312.881	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.006.605.345	1.011.568.380	1.039.042.280	-32.436.935	100%	1.061.312.881	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805		3.183.938.643	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Sawahpulo					3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805		3.183.938.643	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5139 Orang	5660 Orang	4834 Orang	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	5536 Orang	3.183.938.643	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	12 Laporan	3.183.938.643	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	12 Dokumen	3.183.938.643	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	12 Dokumen	3.183.938.643	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	12 Dokumen	3.183.938.643	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	12 Dokumen	3.183.938.643	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	12 Dokumen	3.183.938.643	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	12 Dokumen	3.183.938.643	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	12 Dokumen	3.183.938.643	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	372 Orang	384 Orang	393 Orang	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	381 Orang	3.183.938.643	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	463 Orang	750 Orang	678 Orang	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	643 Orang	3.183.938.643	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	68 Orang	64 Orang	61 Orang	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	65 Orang	3.183.938.643	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Sawahpulo					3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805		3.183.938.643	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5139 Orang	5660 Orang	4834 Orang	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	5536 Orang	3.183.938.643	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	12 Laporan	3.183.938.643	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	12 Dokumen	3.183.938.643	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	12 Dokumen	3.183.938.643	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	12 Dokumen	3.183.938.643	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	12 Dokumen	3.183.938.643	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	12 Dokumen	3.183.938.643	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	12 Dokumen	3.183.938.643	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	12 Dokumen	3.183.938.643	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	372 Orang	384 Orang	393 Orang	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	381 Orang	3.183.938.643	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	463 Orang	750 Orang	678 Orang	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	643 Orang	3.183.938.643	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	68 Orang	64 Orang	61 Orang	3.019.816.035	3.034.705.140	3.117.126.840	-97.310.805	65 Orang	3.183.938.643	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					24.836.170	26.136.000	26.136.000	-1.299.830		26.477.840	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	372 Orang	384 Orang	393 Orang	24.836.170	26.136.000	26.136.000	-1.299.830	381 Orang	26.477.840	Puskesmas Sawahpulo
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					5.006.477	12.577.500	7.920.000	-2.913.523		5.356.880	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5139 Orang	5660 Orang	4834 Orang	5.006.477	12.577.500	7.920.000	-2.913.523	5536 Orang	5.356.880	Puskesmas Sawahpulo
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.642.300	1.800.000	1.800.000	1.842.300		3.897.261	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	68 Orang	64 Orang	61 Orang	3.642.300	1.800.000	1.800.000	1.842.300	65 Orang	3.897.261	Puskesmas Sawahpulo
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.566.640	16.452.000	16.120.000	2.446.640		19.866.305	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	463 Orang	750 Orang	678 Orang	18.566.640	16.452.000	16.120.000	2.446.640	643 Orang	19.866.305	Puskesmas Sawahpulo
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					236.655.903	180.722.400	235.486.400	1.169.503		253.221.816	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	236.655.903	180.722.400	235.486.400	1.169.503	12 Dokumen	253.221.816	Puskesmas Sawahpulo
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2.695.392	990.000	2.700.000	-4.608		2.883.530	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.695.392	990.000	2.700.000	-4.608	12 Dokumen	2.883.530	Puskesmas Sawahpulo
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					3.115.940	2.794.000	2.794.000	321.940		3.333.433	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.115.940	2.794.000	2.794.000	321.940	12 Dokumen	3.333.433	Puskesmas Sawahpulo
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					150.873.531	100.386.000	61.560.000	89.313.531		161.434.678	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	150.873.531	100.386.000	61.560.000	89.313.531	12 Laporan	161.434.678	Puskesmas Sawahpulo
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					549.962.590	667.922.980	682.738.380	-132.775.790		572.775.038	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	549.962.590	667.922.980	682.738.380	-132.775.790	12 Dokumen	572.775.038	Puskesmas Sawahpulo
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.225.837	550.000	550.000	1.675.837		2.352.265	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.225.837	550.000	550.000	1.675.837	12 Dokumen	2.352.265	Puskesmas Sawahpulo
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					3.888.565	687.500	687.500	3.201.065		4.218.315	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.888.565	687.500	687.500	3.201.065	12 Dokumen	4.218.315	Puskesmas Sawahpulo
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					5.136.000	550.000	550.000	4.586.000		5.495.520	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.136.000	550.000	550.000	4.586.000	12 Dokumen	5.495.520	Puskesmas Sawahpulo
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.634.695	825.000	17.595.600	-13.960.905		3.903.662	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.634.695	825.000	17.595.600	-13.960.905	68%	3.903.662	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.634.695	825.000	17.595.600	-13.960.905		3.903.662	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Sawahpulo					3.634.695	825.000	17.595.600	-13.960.905		3.903.662	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.634.695	825.000	17.595.600	-13.960.905	12 Dokumen	3.903.662	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.634.695	825.000	17.595.600	-13.960.905		3.903.662	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.634.695	825.000	17.595.600	-13.960.905	12 Dokumen	3.903.662	Puskesmas Sawahpulo
	Puskesmas Sememi					5.205.963.577	8.204.098.170	10.018.600.271	-4.812.636.694		5.292.739.201	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.205.963.577	5.205.963.577	10.018.600.271	-4.812.636.694		5.292.739.201	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					5.205.963.577	8.204.098.170	10.018.600.271	-4.812.636.694		5.292.739.201	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.807.599.102	3.807.599.102	5.570.747.203	-1.763.148.101		3.818.347.955	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.807.599.102	3.807.599.102	5.570.747.203	-1.763.148.101	89,97 %	3.818.347.955	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.807.599.102	3.807.599.102	5.570.747.203	-1.763.148.101		3.818.347.955	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sememi					3.807.599.102	3.807.599.102	5.570.747.203	-1.763.148.101		3.818.347.955	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.807.599.102	3.807.599.102	5.570.747.203	-1.763.148.101	1 Unit Kerja	3.818.347.955	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.807.599.102	3.807.599.102	5.570.747.203	-1.763.148.101		3.818.347.955	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.807.599.102	3.807.599.102	5.570.747.203	-1.763.148.101	1 Unit Kerja	3.818.347.955	Puskesmas Sememi
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.395.303.800	4.395.674.068	4.426.426.168	-3.031.122.368		1.471.104.081	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.395.303.800	4.395.674.068	4.426.426.168	-3.031.122.368	91%	1.471.104.081	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.395.303.800	4.395.674.068	4.426.426.168	-3.031.122.368	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.471.104.081	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.395.303.800	4.395.674.068	4.426.426.168	-3.031.122.368	80%	1.471.104.081	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.395.303.800	4.395.674.068	4.426.426.168	-3.031.122.368	98,70 %	1.471.104.081	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.395.303.800	4.395.674.068	4.426.426.168	-3.031.122.368	82%	1.471.104.081	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.395.303.800	4.395.674.068	4.426.426.168	-3.031.122.368	40%	1.471.104.081	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.395.303.800	4.395.674.068	4.426.426.168	-3.031.122.368	100%	1.471.104.081	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.395.303.800	4.395.674.068	4.426.426.168	-3.031.122.368	95,45%	1.471.104.081	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.395.303.800	4.395.674.068	4.426.426.168	-3.031.122.368	90,75 %	1.471.104.081	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.395.303.800	4.395.674.068	4.426.426.168	-3.031.122.368	0,58 %	1.471.104.081	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.395.303.800	4.395.674.068	4.426.426.168	-3.031.122.368	12%	1.471.104.081	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.395.303.800	4.395.674.068	4.426.426.168	-3.031.122.368	21,6 %	1.471.104.081	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.395.303.800	4.395.674.068	4.426.426.168	-3.031.122.368	1,92 %	1.471.104.081	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.395.303.800	4.395.674.068	4.426.426.168	-3.031.122.368	80%	1.471.104.081	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.395.303.800	4.395.674.068	4.426.426.168	-3.031.122.368	69%	1.471.104.081	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.395.303.800	4.395.674.068	4.426.426.168	-3.031.122.368	100%	1.471.104.081	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104		4.413.312.243	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Sememi					4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104		4.413.312.243	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10042 Orang	11065 Orang	10137 Orang	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	10822 Orang	4.413.312.243	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	12 Laporan	4.413.312.243	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	12 Dokumen	4.413.312.243	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	12 Dokumen	4.413.312.243	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	12 Dokumen	4.413.312.243	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	12 Dokumen	4.413.312.243	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	12 Dokumen	4.413.312.243	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	12 Dokumen	4.413.312.243	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	12 Dokumen	4.413.312.243	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1091 Orang	1135 Orang	575 Orang	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	1124 Orang	4.413.312.243	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	941 Orang	1525 Orang	1522 Orang	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	1307 Orang	4.413.312.243	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	149 Orang	141 Orang	139 Orang	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	143 Orang	4.413.312.243	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Sememi					4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104		4.413.312.243	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10042 Orang	11065 Orang	10137 Orang	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	10822 Orang	4.413.312.243	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	12 Laporan	4.413.312.243	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	12 Dokumen	4.413.312.243	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	12 Dokumen	4.413.312.243	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	12 Dokumen	4.413.312.243	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	12 Dokumen	4.413.312.243	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	12 Dokumen	4.413.312.243	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	12 Dokumen	4.413.312.243	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	12 Dokumen	4.413.312.243	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1091 Orang	1135 Orang	575 Orang	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	1124 Orang	4.413.312.243	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	941 Orang	1525 Orang	1522 Orang	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	1307 Orang	4.413.312.243	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	149 Orang	141 Orang	139 Orang	4.185.911.400	13.187.022.204	13.279.278.504	-9.093.367.104	143 Orang	4.413.312.243	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					80.717.551	75.504.000	75.504.000	5.213.551		86.052.981	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1091 Orang	1135 Orang	575 Orang	80.717.551	75.504.000	75.504.000	5.213.551	1124 Orang	86.052.981	Puskesmas Sememi
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					4.653.456	14.745.000	2.550.000	2.103.456		4.979.151	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10042 Orang	11065 Orang	10137 Orang	4.653.456	14.745.000	2.550.000	2.103.456	10822 Orang	4.979.151	Puskesmas Sememi
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					7.476.300	1.800.000	1.800.000	5.676.300		7.999.641	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	149 Orang	141 Orang	139 Orang	7.476.300	1.800.000	1.800.000	5.676.300	143 Orang	7.999.641	Puskesmas Sememi
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					17.411.040	16.272.000	16.120.000	1.291.040		18.629.813	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	941 Orang	1525 Orang	1522 Orang	17.411.040	16.272.000	16.120.000	1.291.040	1307 Orang	18.629.813	Puskesmas Sememi
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					369.692.247	704.929.800	758.583.100	-388.890.853		395.570.704	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	369.692.247	704.929.800	758.583.100	-388.890.853	12 Dokumen	395.570.704	Puskesmas Sememi
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.950.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.950.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Sememi
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12.592.077	10.576.000	11.236.000	1.356.077		13.471.004	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.592.077	10.576.000	11.236.000	1.356.077	12 Dokumen	13.471.004	Puskesmas Sememi
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					127.601.031	41.365.200	27.600.000	100.001.031		136.533.103	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	127.601.031	41.365.200	27.600.000	100.001.031	12 Laporan	136.533.103	Puskesmas Sememi
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					760.483.201	3.526.029.568	3.527.830.568	-2.767.347.367		792.028.044	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	760.483.201	3.526.029.568	3.527.830.568	-2.767.347.367	12 Dokumen	792.028.044	Puskesmas Sememi
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.948.627	715.000	715.000	1.233.627		2.059.309	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.948.627	715.000	715.000	1.233.627	12 Dokumen	2.059.309	Puskesmas Sememi
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					10.887.982	687.500	687.500	10.200.482		11.811.283	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.887.982	687.500	687.500	10.200.482	12 Dokumen	11.811.283	Puskesmas Sememi
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					1.540.800	1.100.000	1.100.000	440.800		1.648.656	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.540.800	1.100.000	1.100.000	440.800	12 Dokumen	1.648.656	Puskesmas Sememi

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.060.675	825.000	21.426.900	-18.366.225		3.287.165	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.060.675	825.000	21.426.900	-18.366.225	68%	3.287.165	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.060.675	825.000	21.426.900	-18.366.225		3.287.165	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Sememi					3.060.675	825.000	21.426.900	-18.366.225		3.287.165	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.060.675	825.000	21.426.900	-18.366.225	12 Dokumen	3.287.165	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.060.675	825.000	21.426.900	-18.366.225		3.287.165	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.060.675	825.000	21.426.900	-18.366.225	12 Dokumen	3.287.165	Puskesmas Sememi
	Puskesmas Sidosermo					3.212.937.318	3.204.104.100	4.002.612.337	-789.675.019		3.284.464.907	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.212.937.318	3.212.937.318	4.002.612.337	-789.675.019		3.284.464.907	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.212.937.318	3.204.104.100	4.002.612.337	-789.675.019		3.284.464.907	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.967.429.424	1.967.429.424	2.738.041.661	-770.612.237		1.972.983.477	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	1.967.429.424	1.967.429.424	2.738.041.661	-770.612.237	89,97 %	1.972.983.477	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1.967.429.424	1.967.429.424	2.738.041.661	-770.612.237		1.972.983.477	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sidosermo					1.967.429.424	1.967.429.424	2.738.041.661	-770.612.237		1.972.983.477	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.967.429.424	1.967.429.424	2.738.041.661	-770.612.237	1 Unit Kerja	1.972.983.477	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.967.429.424	1.967.429.424	2.738.041.661	-770.612.237		1.972.983.477	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.967.429.424	1.967.429.424	2.738.041.661	-770.612.237	1 Unit Kerja	1.972.983.477	Puskesmas Sidosermo
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.242.627.164	1.235.849.676	1.251.730.376	-9.103.212		1.308.387.526	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.242.627.164	1.235.849.676	1.251.730.376	-9.103.212	91%	1.308.387.526	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.242.627.164	1.235.849.676	1.251.730.376	-9.103.212	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.308.387.526	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.242.627.164	1.235.849.676	1.251.730.376	-9.103.212	80%	1.308.387.526	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.242.627.164	1.235.849.676	1.251.730.376	-9.103.212	98,70 %	1.308.387.526	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.242.627.164	1.235.849.676	1.251.730.376	-9.103.212	82%	1.308.387.526	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.242.627.164	1.235.849.676	1.251.730.376	-9.103.212	40%	1.308.387.526	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.242.627.164	1.235.849.676	1.251.730.376	-9.103.212	100%	1.308.387.526	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.242.627.164	1.235.849.676	1.251.730.376	-9.103.212	95,45%	1.308.387.526	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.242.627.164	1.235.849.676	1.251.730.376	-9.103.212	90,75 %	1.308.387.526	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.242.627.164	1.235.849.676	1.251.730.376	-9.103.212	0,58 %	1.308.387.526	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.242.627.164	1.235.849.676	1.251.730.376	-9.103.212	12%	1.308.387.526	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.242.627.164	1.235.849.676	1.251.730.376	-9.103.212	21,6 %	1.308.387.526	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.242.627.164	1.235.849.676	1.251.730.376	-9.103.212	1,92 %	1.308.387.526	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.242.627.164	1.235.849.676	1.251.730.376	-9.103.212	80%	1.308.387.526	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.242.627.164	1.235.849.676	1.251.730.376	-9.103.212	69%	1.308.387.526	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.242.627.164	1.235.849.676	1.251.730.376	-9.103.212	100%	1.308.387.526	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636		3.925.162.578	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Sidosermo					3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636		3.925.162.578	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5561 Orang	6125 Orang	5278 Orang	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	5991 Orang	3.925.162.578	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	12 Laporan	3.925.162.578	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	12 Dokumen	3.925.162.578	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	12 Dokumen	3.925.162.578	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	12 Dokumen	3.925.162.578	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	12 Dokumen	3.925.162.578	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	12 Dokumen	3.925.162.578	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	12 Dokumen	3.925.162.578	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	12 Dokumen	3.925.162.578	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	501 Orang	521 Orang	513 Orang	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	516 Orang	3.925.162.578	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	572 Orang	926 Orang	853 Orang	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	794 Orang	3.925.162.578	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	81 Orang	77 Orang	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	82 Orang	3.925.162.578	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Sidosermo					3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636		3.925.162.578	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5561 Orang	6125 Orang	5278 Orang	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	5991 Orang	3.925.162.578	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	12 Laporan	3.925.162.578	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	12 Dokumen	3.925.162.578	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	12 Dokumen	3.925.162.578	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	12 Dokumen	3.925.162.578	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	12 Dokumen	3.925.162.578	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	12 Dokumen	3.925.162.578	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	12 Dokumen	3.925.162.578	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	12 Dokumen	3.925.162.578	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	501 Orang	521 Orang	513 Orang	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	516 Orang	3.925.162.578	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	572 Orang	926 Orang	853 Orang	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	794 Orang	3.925.162.578	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	81 Orang	77 Orang	3.727.881.492	3.707.549.028	3.755.191.128	-27.309.636	82 Orang	3.925.162.578	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	52.272.000	52.272.000	17.579.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	501 Orang	521 Orang	513 Orang	69.851.727	52.272.000	52.272.000	17.579.727	516 Orang	74.468.926	Puskesmas Sidosermo
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					2.182.310	7.242.000	2.160.000	22.310		2.335.050	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5561 Orang	6125 Orang	5278 Orang	2.182.310	7.242.000	2.160.000	22.310	5991 Orang	2.335.050	Puskesmas Sidosermo
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					1.821.150	900.000	270.000	1.551.150		1.948.631	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	81 Orang	77 Orang	1.821.150	900.000	270.000	1.551.150	82 Orang	1.948.631	Puskesmas Sidosermo
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.053.040	16.872.000	13.560.000	4.493.040		19.316.753	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	572 Orang	926 Orang	853 Orang	18.053.040	16.872.000	13.560.000	4.493.040	794 Orang	19.316.753	Puskesmas Sidosermo
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					282.055.011	279.174.000	333.632.700	-51.577.689		301.798.862	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	282.055.011	279.174.000	333.632.700	-51.577.689	12 Dokumen	301.798.862	Puskesmas Sidosermo
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.470.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.470.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Sidosermo
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					9.604.453	2.674.000	2.614.000	6.990.453		10.274.843	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.604.453	2.674.000	2.614.000	6.990.453	12 Dokumen	10.274.843	Puskesmas Sidosermo
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					102.870.870	28.506.000	5.250.000	97.620.870		110.071.831	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	102.870.870	28.506.000	5.250.000	97.620.870	12 Laporan	110.071.831	Puskesmas Sidosermo
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					740.264.445	844.622.176	837.154.176	-96.889.731		770.970.614	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	740.264.445	844.622.176	837.154.176	-96.889.731	12 Dokumen	770.970.614	Puskesmas Sidosermo
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.022.006	880.000	880.000	1.142.006		2.136.856	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.022.006	880.000	880.000	1.142.006	12 Dokumen	2.136.856	Puskesmas Sidosermo
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					12.832.264	687.500	687.500	12.144.764		13.920.440	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.832.264	687.500	687.500	12.144.764	12 Dokumen	13.920.440	Puskesmas Sidosermo
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					770.400	550.000	550.000	220.400		824.328	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	770.400	550.000	550.000	220.400	12 Dokumen	824.328	Puskesmas Sidosermo
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.880.730	825.000	12.840.300	-9.959.570		3.093.904	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	2.880.730	825.000	12.840.300	-9.959.570	68%	3.093.904	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.880.730	825.000	12.840.300	-9.959.570		3.093.904	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Sidosermo					2.880.730	825.000	12.840.300	-9.959.570		3.093.904	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.880.730	825.000	12.840.300	-9.959.570	12 Dokumen	3.093.904	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					2.880.730	825.000	12.840.300	-9.959.570		3.093.904	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.880.730	825.000	12.840.300	-9.959.570	12 Dokumen	3.093.904	Puskesmas Sidosermo
	Puskesmas Sidotopo					4.358.301.076	4.379.823.279	5.083.816.353	-725.515.277		4.445.845.222	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.358.301.076	4.358.301.076	5.083.816.353	-725.515.277		4.445.845.222	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.358.301.076	4.379.823.279	5.083.816.353	-725.515.277		4.445.845.222	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.762.859.091	2.762.859.091	3.445.458.765	-682.599.674		2.770.658.642	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.762.859.091	2.762.859.091	3.445.458.765	-682.599.674	89,97 %	2.770.658.642	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.762.859.091	2.762.859.091	3.445.458.765	-682.599.674		2.770.658.642	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sidotopo					2.762.859.091	2.762.859.091	3.445.458.765	-682.599.674		2.770.658.642	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.762.859.091	2.762.859.091	3.445.458.765	-682.599.674	1 Unit Kerja	2.770.658.642	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.762.859.091	2.762.859.091	3.445.458.765	-682.599.674		2.770.658.642	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.762.859.091	2.762.859.091	3.445.458.765	-682.599.674	1 Unit Kerja	2.770.658.642	Puskesmas Sidotopo
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.591.998.630	1.616.139.188	1.627.762.388	-35.763.758		1.671.488.417	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.591.998.630	1.616.139.188	1.627.762.388	-35.763.758	91%	1.671.488.417	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.591.998.630	1.616.139.188	1.627.762.388	-35.763.758	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.671.488.417	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.591.998.630	1.616.139.188	1.627.762.388	-35.763.758	80%	1.671.488.417	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.591.998.630	1.616.139.188	1.627.762.388	-35.763.758	98,70 %	1.671.488.417	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.591.998.630	1.616.139.188	1.627.762.388	-35.763.758	82%	1.671.488.417	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.591.998.630	1.616.139.188	1.627.762.388	-35.763.758	40%	1.671.488.417	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.591.998.630	1.616.139.188	1.627.762.388	-35.763.758	100%	1.671.488.417	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.591.998.630	1.616.139.188	1.627.762.388	-35.763.758	95,45%	1.671.488.417	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.591.998.630	1.616.139.188	1.627.762.388	-35.763.758	90,75 %	1.671.488.417	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.591.998.630	1.616.139.188	1.627.762.388	-35.763.758	0,58 %	1.671.488.417	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.591.998.630	1.616.139.188	1.627.762.388	-35.763.758	12%	1.671.488.417	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.591.998.630	1.616.139.188	1.627.762.388	-35.763.758	21,6 %	1.671.488.417	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.591.998.630	1.616.139.188	1.627.762.388	-35.763.758	1,92 %	1.671.488.417	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.591.998.630	1.616.139.188	1.627.762.388	-35.763.758	80%	1.671.488.417	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.591.998.630	1.616.139.188	1.627.762.388	-35.763.758	69%	1.671.488.417	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.591.998.630	1.616.139.188	1.627.762.388	-35.763.758	100%	1.671.488.417	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274		5.014.465.251	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Sidotopo					4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274		5.014.465.251	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7358 Orang	8108 Orang	6865 Orang	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	7930 Orang	5.014.465.251	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	12 Laporan	5.014.465.251	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	12 Dokumen	5.014.465.251	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	12 Dokumen	5.014.465.251	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	12 Dokumen	5.014.465.251	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	12 Dokumen	5.014.465.251	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	12 Dokumen	5.014.465.251	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	12 Dokumen	5.014.465.251	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	12 Dokumen	5.014.465.251	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	640 Orang	664 Orang	354 Orang	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	658 Orang	5.014.465.251	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	692 Orang	1122 Orang	1012 Orang	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	962 Orang	5.014.465.251	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	99 Orang	95 Orang	91 Orang	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	96 Orang	5.014.465.251	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Sidotopo					4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274		5.014.465.251	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7358 Orang	8108 Orang	6865 Orang	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	7930 Orang	5.014.465.251	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	12 Laporan	5.014.465.251	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	12 Dokumen	5.014.465.251	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	12 Dokumen	5.014.465.251	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	12 Dokumen	5.014.465.251	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	12 Dokumen	5.014.465.251	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	12 Dokumen	5.014.465.251	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	12 Dokumen	5.014.465.251	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	12 Dokumen	5.014.465.251	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	640 Orang	664 Orang	354 Orang	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	658 Orang	5.014.465.251	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	692 Orang	1122 Orang	1012 Orang	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	962 Orang	5.014.465.251	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	99 Orang	95 Orang	91 Orang	4.775.995.890	4.848.417.564	4.883.287.164	-107.291.274	96 Orang	5.014.465.251	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.672.339	23.232.000	23.232.000	26.440.339		52.955.681	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	640 Orang	664 Orang	354 Orang	49.672.339	23.232.000	23.232.000	26.440.339	658 Orang	52.955.681	Puskesmas Sidotopo
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.668.826	6.048.000	420.000	1.248.826		1.785.627	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7358 Orang	8108 Orang	6865 Orang	1.668.826	6.048.000	420.000	1.248.826	7930 Orang	1.785.627	Puskesmas Sidotopo
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					5.367.600	900.000	900.000	4.467.600		5.743.332	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	99 Orang	95 Orang	91 Orang	5.367.600	900.000	900.000	4.467.600	96 Orang	5.743.332	Puskesmas Sidotopo
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					13.696.000	16.812.000	16.720.000	-3.024.000		14.654.720	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	692 Orang	1122 Orang	1012 Orang	13.696.000	16.812.000	16.720.000	-3.024.000	962 Orang	14.654.720	Puskesmas Sidotopo
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					295.455.371	266.775.600	318.603.800	-23.148.429		316.137.247	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	295.455.371	266.775.600	318.603.800	-23.148.429	12 Dokumen	316.137.247	Puskesmas Sidotopo
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2.406.600	960.000	2.670.000	-263.400		2.574.581	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.406.600	960.000	2.670.000	-263.400	12 Dokumen	2.574.581	Puskesmas Sidotopo
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					6.039.406	5.708.000	5.528.000	511.406		6.460.957	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.039.406	5.708.000	5.528.000	511.406	12 Dokumen	6.460.957	Puskesmas Sidotopo
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					90.197.790	31.452.000	2.490.000	87.707.790		96.511.635	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	90.197.790	31.452.000	2.490.000	87.707.790	12 Laporan	96.511.635	Puskesmas Sidotopo
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					1.116.831.482	1.261.914.088	1.254.861.088	-138.029.606		1.163.157.652	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.116.831.482	1.261.914.088	1.254.861.088	-138.029.606	12 Dokumen	1.163.157.652	Puskesmas Sidotopo
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.345.286	1.100.000	1.100.000	245.286		1.421.699	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.345.286	1.100.000	1.100.000	245.286	12 Dokumen	1.421.699	Puskesmas Sidotopo
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					7.777.130	687.500	687.500	7.089.630		8.436.630	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.777.130	687.500	687.500	7.089.630	12 Dokumen	8.436.630	Puskesmas Sidotopo
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					1.540.800	550.000	550.000	990.800		1.648.656	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.540.800	550.000	550.000	990.800	12 Dokumen	1.648.656	Puskesmas Sidotopo
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.443.355	825.000	10.595.200	-7.151.845		3.698.163	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.443.355	825.000	10.595.200	-7.151.845	68%	3.698.163	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.443.355	825.000	10.595.200	-7.151.845		3.698.163	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Sidotopo					3.443.355	825.000	10.595.200	-7.151.845		3.698.163	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.443.355	825.000	10.595.200	-7.151.845	12 Dokumen	3.698.163	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.443.355	825.000	10.595.200	-7.151.845		3.698.163	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.443.355	825.000	10.595.200	-7.151.845	12 Dokumen	3.698.163	Puskesmas Sidotopo
	Puskesmas Sidotopo Wetan					7.250.947.592	8.508.483.197	10.475.626.021	-3.224.678.429		7.343.912.963	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.250.947.592	7.250.947.592	10.475.626.021	-3.224.678.429		7.343.912.963	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					7.250.947.592	8.508.483.197	10.475.626.021	-3.224.678.429		7.343.912.963	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.792.156.661	5.792.156.661	7.512.074.885	-1.719.918.224		5.808.507.919	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	5.792.156.661	5.792.156.661	7.512.074.885	-1.719.918.224	89,97 %	5.808.507.919	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					5.792.156.661	5.792.156.661	7.512.074.885	-1.719.918.224		5.808.507.919	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Sidotopo Wetan					5.792.156.661	5.792.156.661	7.512.074.885	-1.719.918.224		5.808.507.919	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	5.792.156.661	5.792.156.661	7.512.074.885	-1.719.918.224	1 Unit Kerja	5.808.507.919	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					5.792.156.661	5.792.156.661	7.512.074.885	-1.719.918.224		5.808.507.919	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	5.792.156.661	5.792.156.661	7.512.074.885	-1.719.918.224	1 Unit Kerja	5.808.507.919	Puskesmas Sidotopo Wetan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.455.714.311	2.715.501.536	2.956.119.536	-1.500.405.225		1.532.100.755	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.455.714.311	2.715.501.536	2.956.119.536	-1.500.405.225	91%	1.532.100.755	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.455.714.311	2.715.501.536	2.956.119.536	-1.500.405.225	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.532.100.755	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.455.714.311	2.715.501.536	2.956.119.536	-1.500.405.225	80%	1.532.100.755	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.455.714.311	2.715.501.536	2.956.119.536	-1.500.405.225	98,70 %	1.532.100.755	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.455.714.311	2.715.501.536	2.956.119.536	-1.500.405.225	82%	1.532.100.755	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.455.714.311	2.715.501.536	2.956.119.536	-1.500.405.225	40%	1.532.100.755	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.455.714.311	2.715.501.536	2.956.119.536	-1.500.405.225	100%	1.532.100.755	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.455.714.311	2.715.501.536	2.956.119.536	-1.500.405.225	95,45%	1.532.100.755	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.455.714.311	2.715.501.536	2.956.119.536	-1.500.405.225	90,75 %	1.532.100.755	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.455.714.311	2.715.501.536	2.956.119.536	-1.500.405.225	0,58 %	1.532.100.755	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.455.714.311	2.715.501.536	2.956.119.536	-1.500.405.225	12%	1.532.100.755	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.455.714.311	2.715.501.536	2.956.119.536	-1.500.405.225	21,6 %	1.532.100.755	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.455.714.311	2.715.501.536	2.956.119.536	-1.500.405.225	1,92 %	1.532.100.755	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.455.714.311	2.715.501.536	2.956.119.536	-1.500.405.225	80%	1.532.100.755	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.455.714.311	2.715.501.536	2.956.119.536	-1.500.405.225	69%	1.532.100.755	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.455.714.311	2.715.501.536	2.956.119.536	-1.500.405.225	100%	1.532.100.755	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675		4.596.302.265	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Sidotopo Wetan					4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675		4.596.302.265	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9059 Orang	9981 Orang	8583 Orang	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	9762 Orang	4.596.302.265	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	12 Laporan	4.596.302.265	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	12 Dokumen	4.596.302.265	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	12 Dokumen	4.596.302.265	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	12 Dokumen	4.596.302.265	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	12 Dokumen	4.596.302.265	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	12 Dokumen	4.596.302.265	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	12 Dokumen	4.596.302.265	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	12 Dokumen	4.596.302.265	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	854 Orang	886 Orang	917 Orang	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	878 Orang	4.596.302.265	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	848 Orang	1374 Orang	1283 Orang	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	1178 Orang	4.596.302.265	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	120 Orang	116 Orang	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	122 Orang	4.596.302.265	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Sidotopo Wetan					4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675		4.596.302.265	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9059 Orang	9981 Orang	8583 Orang	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	9762 Orang	4.596.302.265	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	12 Laporan	4.596.302.265	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	12 Dokumen	4.596.302.265	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	12 Dokumen	4.596.302.265	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	12 Dokumen	4.596.302.265	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	12 Dokumen	4.596.302.265	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	12 Dokumen	4.596.302.265	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	12 Dokumen	4.596.302.265	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	12 Dokumen	4.596.302.265	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	854 Orang	886 Orang	917 Orang	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	878 Orang	4.596.302.265	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	848 Orang	1374 Orang	1283 Orang	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	1178 Orang	4.596.302.265	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	120 Orang	116 Orang	4.367.142.933	8.146.504.608	8.868.358.608	-4.501.215.675	122 Orang	4.596.302.265	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170		26.477.840	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	854 Orang	886 Orang	917 Orang	24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170	878 Orang	26.477.840	Puskesmas Sidotopo Wetan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					2.021.846	13.698.000	1.320.000	701.846		2.163.355	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9059 Orang	9981 Orang	8583 Orang	2.021.846	13.698.000	1.320.000	701.846	9762 Orang	2.163.355	Puskesmas Sidotopo Wetan
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					7.092.900	1.800.000	1.800.000	5.292.900		7.589.403	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	120 Orang	116 Orang	7.092.900	1.800.000	1.800.000	5.292.900	122 Orang	7.589.403	Puskesmas Sidotopo Wetan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.951.840	16.632.000	16.120.000	2.831.840		20.278.469	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	848 Orang	1374 Orang	1283 Orang	18.951.840	16.632.000	16.120.000	2.831.840	1178 Orang	20.278.469	Puskesmas Sidotopo Wetan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					445.219.359	636.986.400	690.916.400	-245.697.041		476.384.714	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	445.219.359	636.986.400	690.916.400	-245.697.041	12 Dokumen	476.384.714	Puskesmas Sidotopo Wetan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.350.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.350.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Sidotopo Wetan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					4.142.468	2.854.000	3.094.000	1.048.468		4.431.612	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.142.468	2.854.000	3.094.000	1.048.468	12 Dokumen	4.431.612	Puskesmas Sidotopo Wetan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					55.441.515	12.939.000	7.110.000	48.331.515		59.322.421	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	55.441.515	12.939.000	7.110.000	48.331.515	12 Laporan	59.322.421	Puskesmas Sidotopo Wetan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					892.350.131	2.004.017.636	2.207.834.636	-1.315.484.505		929.364.814	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	892.350.131	2.004.017.636	2.207.834.636	-1.315.484.505	12 Dokumen	929.364.814	Puskesmas Sidotopo Wetan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.345.286	825.000	825.000	520.286		1.421.699	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.345.286	825.000	825.000	520.286	12 Dokumen	1.421.699	Puskesmas Sidotopo Wetan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					3.499.708	687.500	687.500	2.812.208		3.796.484	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.499.708	687.500	687.500	2.812.208	12 Dokumen	3.796.484	Puskesmas Sidotopo Wetan
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					513.600	480.000	480.000	33.600		549.552	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	513.600	480.000	480.000	33.600	12 Dokumen	549.552	Puskesmas Sidotopo Wetan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.076.620	825.000	7.431.600	-4.354.980		3.304.289	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.076.620	825.000	7.431.600	-4.354.980	68%	3.304.289	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.076.620	825.000	7.431.600	-4.354.980		3.304.289	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Sidotopo Wetan					3.076.620	825.000	7.431.600	-4.354.980		3.304.289	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.076.620	825.000	7.431.600	-4.354.980	12 Dokumen	3.304.289	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.076.620	825.000	7.431.600	-4.354.980		3.304.289	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.076.620	825.000	7.431.600	-4.354.980	12 Dokumen	3.304.289	Puskesmas Sidotopo Wetan
	Puskesmas Simolawang					3.624.932.998	4.729.225.500	5.306.014.841	-1.681.081.843		3.690.884.651	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.624.932.998	3.624.932.998	5.306.014.841	-1.681.081.843		3.690.884.651	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.624.932.998	4.729.225.500	5.306.014.841	-1.681.081.843		3.690.884.651	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.521.214.244	2.521.214.244	3.127.731.185	-606.516.941		2.528.331.632	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.521.214.244	2.521.214.244	3.127.731.185	-606.516.941	89,97 %	2.528.331.632	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.521.214.244	2.521.214.244	3.127.731.185	-606.516.941		2.528.331.632	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Simolawang					2.521.214.244	2.521.214.244	3.127.731.185	-606.516.941		2.528.331.632	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.521.214.244	2.521.214.244	3.127.731.185	-606.516.941	1 Unit Kerja	2.528.331.632	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.521.214.244	2.521.214.244	3.127.731.185	-606.516.941		2.528.331.632	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.521.214.244	2.521.214.244	3.127.731.185	-606.516.941	1 Unit Kerja	2.528.331.632	Puskesmas Simolawang
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.099.701.379	2.207.186.256	2.166.731.456	-1.067.030.077		1.158.238.359	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.099.701.379	2.207.186.256	2.166.731.456	-1.067.030.077	91%	1.158.238.359	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.099.701.379	2.207.186.256	2.166.731.456	-1.067.030.077	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.158.238.359	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.099.701.379	2.207.186.256	2.166.731.456	-1.067.030.077	80%	1.158.238.359	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.099.701.379	2.207.186.256	2.166.731.456	-1.067.030.077	98,70 %	1.158.238.359	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.099.701.379	2.207.186.256	2.166.731.456	-1.067.030.077	82%	1.158.238.359	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.099.701.379	2.207.186.256	2.166.731.456	-1.067.030.077	40%	1.158.238.359	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.099.701.379	2.207.186.256	2.166.731.456	-1.067.030.077	100%	1.158.238.359	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.099.701.379	2.207.186.256	2.166.731.456	-1.067.030.077	95,45%	1.158.238.359	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.099.701.379	2.207.186.256	2.166.731.456	-1.067.030.077	90,75 %	1.158.238.359	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.099.701.379	2.207.186.256	2.166.731.456	-1.067.030.077	0,58 %	1.158.238.359	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.099.701.379	2.207.186.256	2.166.731.456	-1.067.030.077	12%	1.158.238.359	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.099.701.379	2.207.186.256	2.166.731.456	-1.067.030.077	21,6 %	1.158.238.359	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.099.701.379	2.207.186.256	2.166.731.456	-1.067.030.077	1,92 %	1.158.238.359	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.099.701.379	2.207.186.256	2.166.731.456	-1.067.030.077	80%	1.158.238.359	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.099.701.379	2.207.186.256	2.166.731.456	-1.067.030.077	69%	1.158.238.359	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.099.701.379	2.207.186.256	2.166.731.456	-1.067.030.077	100%	1.158.238.359	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231		3.474.715.077	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Simolawang					3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231		3.474.715.077	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5280 Orang	5816 Orang	5175 Orang	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	5689 Orang	3.474.715.077	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	12 Laporan	3.474.715.077	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	12 Dokumen	3.474.715.077	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	12 Dokumen	3.474.715.077	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	12 Dokumen	3.474.715.077	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	12 Dokumen	3.474.715.077	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	12 Dokumen	3.474.715.077	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	12 Dokumen	3.474.715.077	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	12 Dokumen	3.474.715.077	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	491 Orang	509 Orang	447 Orang	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	504 Orang	3.474.715.077	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	531 Orang	859 Orang	766 Orang	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	737 Orang	3.474.715.077	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	76 Orang	72 Orang	68 Orang	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	73 Orang	3.474.715.077	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Simolawang					3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231		3.474.715.077	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5280 Orang	5816 Orang	5175 Orang	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	5689 Orang	3.474.715.077	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	12 Laporan	3.474.715.077	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	12 Dokumen	3.474.715.077	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	12 Dokumen	3.474.715.077	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	12 Dokumen	3.474.715.077	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	12 Dokumen	3.474.715.077	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	12 Dokumen	3.474.715.077	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	12 Dokumen	3.474.715.077	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	12 Dokumen	3.474.715.077	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	491 Orang	509 Orang	447 Orang	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	504 Orang	3.474.715.077	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	531 Orang	859 Orang	766 Orang	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	737 Orang	3.474.715.077	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	76 Orang	72 Orang	68 Orang	3.299.104.137	6.621.558.768	6.500.194.368	-3.201.090.231	73 Orang	3.474.715.077	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339		52.955.681	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	491 Orang	509 Orang	447 Orang	49.672.339	46.464.000	46.464.000	3.208.339	504 Orang	52.955.681	Puskesmas Simolawang
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					4.236.250	10.383.000	5.760.000	-1.523.750		4.532.745	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5280 Orang	5816 Orang	5175 Orang	4.236.250	10.383.000	5.760.000	-1.523.750	5689 Orang	4.532.745	Puskesmas Simolawang
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.258.900	1.800.000	1.800.000	1.458.900		3.487.023	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	76 Orang	72 Orang	68 Orang	3.258.900	1.800.000	1.800.000	1.458.900	73 Orang	3.487.023	Puskesmas Simolawang
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					19.979.040	17.472.000	13.860.000	6.119.040		21.377.573	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	531 Orang	859 Orang	766 Orang	19.979.040	17.472.000	13.860.000	6.119.040	737 Orang	21.377.573	Puskesmas Simolawang
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					216.433.549	210.216.600	262.998.800	-46.565.251		231.583.898	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	216.433.549	210.216.600	262.998.800	-46.565.251	12 Dokumen	231.583.898	Puskesmas Simolawang
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.980.000	2.670.000	-2.370.512		320.392	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.980.000	2.670.000	-2.370.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Simolawang
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					7.194.250	6.728.000	6.668.000	526.250		7.696.409	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.194.250	6.728.000	6.668.000	526.250	12 Dokumen	7.696.409	Puskesmas Simolawang
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					139.510.131	92.670.000	18.780.000	120.730.131		149.275.840	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	139.510.131	92.670.000	18.780.000	120.730.131	12 Laporan	149.275.840	Puskesmas Simolawang
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					643.200.752	1.816.585.156	1.804.843.156	-1.161.642.404		669.880.720	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	643.200.752	1.816.585.156	1.804.843.156	-1.161.642.404	12 Dokumen	669.880.720	Puskesmas Simolawang
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.225.837	1.100.000	1.100.000	1.125.837		2.352.265	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.225.837	1.100.000	1.100.000	1.125.837	12 Dokumen	2.352.265	Puskesmas Simolawang
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					8.554.843	687.500	687.500	7.867.343		9.280.293	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.554.843	687.500	687.500	7.867.343	12 Dokumen	9.280.293	Puskesmas Simolawang
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					5.136.000	1.100.000	1.100.000	4.036.000		5.495.520	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.136.000	1.100.000	1.100.000	4.036.000	12 Dokumen	5.495.520	Puskesmas Simolawang
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					4.017.375	825.000	11.552.200	-7.534.825		4.314.660	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	4.017.375	825.000	11.552.200	-7.534.825	68%	4.314.660	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.017.375	825.000	11.552.200	-7.534.825		4.314.660	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Simolawang					4.017.375	825.000	11.552.200	-7.534.825		4.314.660	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.017.375	825.000	11.552.200	-7.534.825	12 Dokumen	4.314.660	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4.017.375	825.000	11.552.200	-7.534.825		4.314.660	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.017.375	825.000	11.552.200	-7.534.825	12 Dokumen	4.314.660	Puskesmas Simolawang
	Puskesmas Simomulyo					6.101.811.551	5.763.474.548	7.409.944.122	-1.308.132.571		6.193.159.665	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.101.811.551	6.101.811.551	7.409.944.122	-1.308.132.571		6.193.159.665	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					6.101.811.551	5.763.474.548	7.409.944.122	-1.308.132.571		6.193.159.665	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.668.015.156	4.668.015.156	6.347.428.930	-1.679.413.774		4.681.192.962	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	4.668.015.156	4.668.015.156	6.347.428.930	-1.679.413.774	89,97 %	4.681.192.962	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					4.668.015.156	4.668.015.156	6.347.428.930	-1.679.413.774		4.681.192.962	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Simomulyo					4.668.015.156	4.668.015.156	6.347.428.930	-1.679.413.774		4.681.192.962	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.668.015.156	4.668.015.156	6.347.428.930	-1.679.413.774	1 Unit Kerja	4.681.192.962	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					4.668.015.156	4.668.015.156	6.347.428.930	-1.679.413.774		4.681.192.962	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.668.015.156	4.668.015.156	6.347.428.930	-1.679.413.774	1 Unit Kerja	4.681.192.962	Puskesmas Simomulyo
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.430.289.260	1.094.634.392	1.047.698.192	382.591.068		1.508.200.040	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.430.289.260	1.094.634.392	1.047.698.192	382.591.068	91%	1.508.200.040	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.430.289.260	1.094.634.392	1.047.698.192	382.591.068	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.508.200.040	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.430.289.260	1.094.634.392	1.047.698.192	382.591.068	80%	1.508.200.040	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.430.289.260	1.094.634.392	1.047.698.192	382.591.068	98,70 %	1.508.200.040	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.430.289.260	1.094.634.392	1.047.698.192	382.591.068	82%	1.508.200.040	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.430.289.260	1.094.634.392	1.047.698.192	382.591.068	40%	1.508.200.040	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.430.289.260	1.094.634.392	1.047.698.192	382.591.068	100%	1.508.200.040	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.430.289.260	1.094.634.392	1.047.698.192	382.591.068	95,45%	1.508.200.040	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.430.289.260	1.094.634.392	1.047.698.192	382.591.068	90,75 %	1.508.200.040	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.430.289.260	1.094.634.392	1.047.698.192	382.591.068	0,58 %	1.508.200.040	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.430.289.260	1.094.634.392	1.047.698.192	382.591.068	12%	1.508.200.040	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.430.289.260	1.094.634.392	1.047.698.192	382.591.068	21,6 %	1.508.200.040	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.430.289.260	1.094.634.392	1.047.698.192	382.591.068	1,92 %	1.508.200.040	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.430.289.260	1.094.634.392	1.047.698.192	382.591.068	80%	1.508.200.040	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.430.289.260	1.094.634.392	1.047.698.192	382.591.068	69%	1.508.200.040	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.430.289.260	1.094.634.392	1.047.698.192	382.591.068	100%	1.508.200.040	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204		4.524.600.120	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Simomulyo					4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204		4.524.600.120	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10722 Orang	11814 Orang	9845 Orang	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	11555 Orang	4.524.600.120	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	12 Laporan	4.524.600.120	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	12 Dokumen	4.524.600.120	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	12 Dokumen	4.524.600.120	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	12 Dokumen	4.524.600.120	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	12 Dokumen	4.524.600.120	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	12 Dokumen	4.524.600.120	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	12 Dokumen	4.524.600.120	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	12 Dokumen	4.524.600.120	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	945 Orang	981 Orang	1024 Orang	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	972 Orang	4.524.600.120	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1062 Orang	1722 Orang	1573 Orang	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	1476 Orang	4.524.600.120	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	103 Orang	149 Orang	140 Orang	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	151 Orang	4.524.600.120	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Simomulyo					4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204		4.524.600.120	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10722 Orang	11814 Orang	9845 Orang	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	11555 Orang	4.524.600.120	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	12 Laporan	4.524.600.120	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	12 Dokumen	4.524.600.120	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	12 Dokumen	4.524.600.120	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	12 Dokumen	4.524.600.120	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	12 Dokumen	4.524.600.120	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	12 Dokumen	4.524.600.120	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	12 Dokumen	4.524.600.120	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	12 Dokumen	4.524.600.120	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	945 Orang	981 Orang	1024 Orang	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	972 Orang	4.524.600.120	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1062 Orang	1722 Orang	1573 Orang	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	1476 Orang	4.524.600.120	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	103 Orang	149 Orang	140 Orang	4.290.867.780	3.283.903.176	3.143.094.576	1.147.773.204	151 Orang	4.524.600.120	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	945 Orang	981 Orang	1024 Orang	69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727	972 Orang	74.468.926	Puskesmas Simomulyo
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					320.928	26.436.000	2.760.000	-2.439.072		343.390	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10722 Orang	11814 Orang	9845 Orang	320.928	26.436.000	2.760.000	-2.439.072	11555 Orang	343.390	Puskesmas Simomulyo
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.450.600	900.000	2.700.000	750.600		3.692.142	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	103 Orang	149 Orang	140 Orang	3.450.600	900.000	2.700.000	750.600	151 Orang	3.692.142	Puskesmas Simomulyo
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					9.865.400	16.722.000	17.620.000	-7.754.600		10.555.978	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1062 Orang	1722 Orang	1573 Orang	9.865.400	16.722.000	17.620.000	-7.754.600	1476 Orang	10.555.978	Puskesmas Simomulyo
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					424.325.755	352.807.200	390.453.000	33.872.755		454.028.558	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	424.325.755	352.807.200	390.453.000	33.872.755	12 Dokumen	454.028.558	Puskesmas Simomulyo
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.470.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.470.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Simomulyo
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					8.385.451	7.752.000	7.782.000	603.451		8.970.755	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.385.451	7.752.000	7.782.000	603.451	12 Dokumen	8.970.755	Puskesmas Simomulyo
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					119.640.231	90.542.400	6.810.000	112.830.231		128.015.047	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	119.640.231	90.542.400	6.810.000	112.830.231	12 Laporan	128.015.047	Puskesmas Simomulyo
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					774.326.415	525.311.292	544.179.692	230.146.723		806.445.475	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	774.326.415	525.311.292	544.179.692	230.146.723	12 Dokumen	806.445.475	Puskesmas Simomulyo
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					3.139.001	660.000	660.000	2.479.001		3.317.297	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.139.001	660.000	660.000	2.479.001	12 Dokumen	3.317.297	Puskesmas Simomulyo
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					12.832.264	687.500	687.500	12.144.764		13.920.440	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.832.264	687.500	687.500	12.144.764	12 Dokumen	13.920.440	Puskesmas Simomulyo
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					3.852.000	1.650.000	1.650.000	2.202.000		4.121.640	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.852.000	1.650.000	1.650.000	2.202.000	12 Dokumen	4.121.640	Puskesmas Simomulyo
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.507.135	825.000	14.817.000	-11.309.865		3.766.663	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.507.135	825.000	14.817.000	-11.309.865	68%	3.766.663	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.507.135	825.000	14.817.000	-11.309.865		3.766.663	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Simomulyo					3.507.135	825.000	14.817.000	-11.309.865		3.766.663	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.507.135	825.000	14.817.000	-11.309.865	12 Dokumen	3.766.663	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.507.135	825.000	14.817.000	-11.309.865		3.766.663	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.507.135	825.000	14.817.000	-11.309.865	12 Dokumen	3.766.663	Puskesmas Simomulyo
	Puskesmas Siwalankerto					2.677.328.806	2.560.914.872	3.117.269.208	-439.940.402		2.734.582.641	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.677.328.806	2.677.328.806	3.117.269.208	-439.940.402		2.734.582.641	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.677.328.806	2.560.914.872	3.117.269.208	-439.940.402		2.734.582.641	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.686.136.580	1.686.136.580	2.237.576.816	-551.440.236		1.690.896.543	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	1.686.136.580	1.686.136.580	2.237.576.816	-551.440.236	89,97 %	1.690.896.543	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1.686.136.580	1.686.136.580	2.237.576.816	-551.440.236		1.690.896.543	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Siwalankerto					1.686.136.580	1.686.136.580	2.237.576.816	-551.440.236		1.690.896.543	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.686.136.580	1.686.136.580	2.237.576.816	-551.440.236	1 Unit Kerja	1.690.896.543	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.686.136.580	1.686.136.580	2.237.576.816	-551.440.236		1.690.896.543	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.686.136.580	1.686.136.580	2.237.576.816	-551.440.236	1 Unit Kerja	1.690.896.543	Puskesmas Siwalankerto
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					987.685.091	873.953.292	871.716.292	115.968.799		1.039.919.435	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	987.685.091	873.953.292	871.716.292	115.968.799	91%	1.039.919.435	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	987.685.091	873.953.292	871.716.292	115.968.799	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.039.919.435	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	987.685.091	873.953.292	871.716.292	115.968.799	80%	1.039.919.435	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	987.685.091	873.953.292	871.716.292	115.968.799	98,70 %	1.039.919.435	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	987.685.091	873.953.292	871.716.292	115.968.799	82%	1.039.919.435	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	987.685.091	873.953.292	871.716.292	115.968.799	40%	1.039.919.435	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	987.685.091	873.953.292	871.716.292	115.968.799	100%	1.039.919.435	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	987.685.091	873.953.292	871.716.292	115.968.799	95,45%	1.039.919.435	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	987.685.091	873.953.292	871.716.292	115.968.799	90,75 %	1.039.919.435	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	987.685.091	873.953.292	871.716.292	115.968.799	0,58 %	1.039.919.435	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	987.685.091	873.953.292	871.716.292	115.968.799	12%	1.039.919.435	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	987.685.091	873.953.292	871.716.292	115.968.799	21,6 %	1.039.919.435	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	987.685.091	873.953.292	871.716.292	115.968.799	1,92 %	1.039.919.435	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	987.685.091	873.953.292	871.716.292	115.968.799	80%	1.039.919.435	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	987.685.091	873.953.292	871.716.292	115.968.799	69%	1.039.919.435	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	987.685.091	873.953.292	871.716.292	115.968.799	100%	1.039.919.435	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397		3.119.758.305	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Siwalankerto					2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397		3.119.758.305	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2258 Orang	2487 Orang	2191 Orang	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	2433 Orang	3.119.758.305	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	12 Laporan	3.119.758.305	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	12 Dokumen	3.119.758.305	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	12 Dokumen	3.119.758.305	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	12 Dokumen	3.119.758.305	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	12 Dokumen	3.119.758.305	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	12 Dokumen	3.119.758.305	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	12 Dokumen	3.119.758.305	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	12 Dokumen	3.119.758.305	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	199 Orang	207 Orang	219 Orang	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	205 Orang	3.119.758.305	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	243 Orang	391 Orang	354 Orang	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	336 Orang	3.119.758.305	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	38 Orang	34 Orang	32 Orang	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	35 Orang	3.119.758.305	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Siwalankerto					2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397		3.119.758.305	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2258 Orang	2487 Orang	2191 Orang	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	2433 Orang	3.119.758.305	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	12 Laporan	3.119.758.305	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	12 Dokumen	3.119.758.305	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	12 Dokumen	3.119.758.305	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	12 Dokumen	3.119.758.305	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	12 Dokumen	3.119.758.305	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	12 Dokumen	3.119.758.305	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	12 Dokumen	3.119.758.305	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	12 Dokumen	3.119.758.305	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	199 Orang	207 Orang	219 Orang	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	205 Orang	3.119.758.305	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	243 Orang	391 Orang	354 Orang	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	336 Orang	3.119.758.305	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	38 Orang	34 Orang	32 Orang	2.963.055.273	2.621.859.876	2.615.148.876	347.906.397	35 Orang	3.119.758.305	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					24.836.170	31.944.000	31.944.000	-7.107.830		26.477.840	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	199 Orang	207 Orang	219 Orang	24.836.170	31.944.000	31.944.000	-7.107.830	205 Orang	26.477.840	Puskesmas Siwalankerto
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					2.021.846	17.595.000	1.320.000	701.846		2.163.355	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2258 Orang	2487 Orang	2191 Orang	2.021.846	17.595.000	1.320.000	701.846	2433 Orang	2.163.355	Puskesmas Siwalankerto
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					2.108.700	2.880.000	1.440.000	668.700		2.256.309	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	38 Orang	34 Orang	32 Orang	2.108.700	2.880.000	1.440.000	668.700	35 Orang	2.256.309	Puskesmas Siwalankerto
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					21.263.040	17.622.000	14.460.000	6.803.040		22.751.453	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	243 Orang	391 Orang	354 Orang	21.263.040	17.622.000	14.460.000	6.803.040	336 Orang	22.751.453	Puskesmas Siwalankerto
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					206.549.943	187.592.400	244.386.900	-37.836.957		221.008.439	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	206.549.943	187.592.400	244.386.900	-37.836.957	12 Dokumen	221.008.439	Puskesmas Siwalankerto
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	720.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	720.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Siwalankerto
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					3.180.098	2.674.000	2.764.000	416.098		3.402.069	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.180.098	2.674.000	2.764.000	416.098	12 Dokumen	3.402.069	Puskesmas Siwalankerto
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					124.840.431	41.878.500	6.120.000	118.720.431		133.579.261	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	124.840.431	41.878.500	6.120.000	118.720.431	12 Laporan	133.579.261	Puskesmas Siwalankerto
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					590.218.087	568.929.892	564.463.892	25.754.195		614.700.333	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	590.218.087	568.929.892	564.463.892	25.754.195	12 Dokumen	614.700.333	Puskesmas Siwalankerto
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.315.523	880.000	880.000	1.435.523		2.447.045	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.315.523	880.000	880.000	1.435.523	12 Dokumen	2.447.045	Puskesmas Siwalankerto
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					3.888.565	687.500	687.500	3.201.065		4.218.315	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.888.565	687.500	687.500	3.201.065	12 Dokumen	4.218.315	Puskesmas Siwalankerto
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					6.163.200	550.000	550.000	5.613.200		6.594.624	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.163.200	550.000	550.000	5.613.200	12 Dokumen	6.594.624	Puskesmas Siwalankerto
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.507.135	825.000	7.976.100	-4.468.965		3.766.663	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.507.135	825.000	7.976.100	-4.468.965	68%	3.766.663	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.507.135	825.000	7.976.100	-4.468.965		3.766.663	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Siwalankerto					3.507.135	825.000	7.976.100	-4.468.965		3.766.663	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.507.135	825.000	7.976.100	-4.468.965	12 Dokumen	3.766.663	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.507.135	825.000	7.976.100	-4.468.965		3.766.663	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.507.135	825.000	7.976.100	-4.468.965	12 Dokumen	3.766.663	Puskesmas Siwalankerto
	Puskesmas Tambakrejo					4.397.982.660	4.412.996.867	4.702.646.358	-304.663.698		4.470.389.953	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.397.982.660	4.397.982.660	4.702.646.358	-304.663.698		4.470.389.953	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.397.982.660	4.412.996.867	4.702.646.358	-304.663.698		4.470.389.953	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.223.572.779	3.223.572.779	3.534.901.570	-311.328.791		3.232.672.925	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.223.572.779	3.223.572.779	3.534.901.570	-311.328.791	89,97 %	3.232.672.925	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.223.572.779	3.223.572.779	3.534.901.570	-311.328.791		3.232.672.925	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tambakrejo					3.223.572.779	3.223.572.779	3.534.901.570	-311.328.791		3.232.672.925	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.223.572.779	3.223.572.779	3.534.901.570	-311.328.791	1 Unit Kerja	3.232.672.925	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.223.572.779	3.223.572.779	3.534.901.570	-311.328.791		3.232.672.925	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.223.572.779	3.223.572.779	3.534.901.570	-311.328.791	1 Unit Kerja	3.232.672.925	Puskesmas Tambakrejo
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.170.137.386	1.188.599.088	1.152.000.488	18.136.898		1.233.128.369	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.170.137.386	1.188.599.088	1.152.000.488	18.136.898	91%	1.233.128.369	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.170.137.386	1.188.599.088	1.152.000.488	18.136.898	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.233.128.369	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.170.137.386	1.188.599.088	1.152.000.488	18.136.898	80%	1.233.128.369	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.170.137.386	1.188.599.088	1.152.000.488	18.136.898	98,70 %	1.233.128.369	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.170.137.386	1.188.599.088	1.152.000.488	18.136.898	82%	1.233.128.369	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.170.137.386	1.188.599.088	1.152.000.488	18.136.898	40%	1.233.128.369	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.170.137.386	1.188.599.088	1.152.000.488	18.136.898	100%	1.233.128.369	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.170.137.386	1.188.599.088	1.152.000.488	18.136.898	95,45%	1.233.128.369	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.170.137.386	1.188.599.088	1.152.000.488	18.136.898	90,75 %	1.233.128.369	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.170.137.386	1.188.599.088	1.152.000.488	18.136.898	0,58 %	1.233.128.369	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.170.137.386	1.188.599.088	1.152.000.488	18.136.898	12%	1.233.128.369	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.170.137.386	1.188.599.088	1.152.000.488	18.136.898	21,6 %	1.233.128.369	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.170.137.386	1.188.599.088	1.152.000.488	18.136.898	1,92 %	1.233.128.369	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.170.137.386	1.188.599.088	1.152.000.488	18.136.898	80%	1.233.128.369	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.170.137.386	1.188.599.088	1.152.000.488	18.136.898	69%	1.233.128.369	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.170.137.386	1.188.599.088	1.152.000.488	18.136.898	100%	1.233.128.369	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694		3.699.385.107	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Tambakrejo					3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694		3.699.385.107	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7480 Orang	8242 Orang	6483 Orang	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	8061 Orang	3.699.385.107	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	12 Laporan	3.699.385.107	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	12 Dokumen	3.699.385.107	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	12 Dokumen	3.699.385.107	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	12 Dokumen	3.699.385.107	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	12 Dokumen	3.699.385.107	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	12 Dokumen	3.699.385.107	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	12 Dokumen	3.699.385.107	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	12 Dokumen	3.699.385.107	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	478 Orang	494 Orang	332 Orang	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	490 Orang	3.699.385.107	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	780 Orang	1266 Orang	1115 Orang	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	1085 Orang	3.699.385.107	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	115 Orang	107 Orang	99 Orang	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	109 Orang	3.699.385.107	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Tambakrejo					3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694		3.699.385.107	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7480 Orang	8242 Orang	6483 Orang	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	8061 Orang	3.699.385.107	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	12 Laporan	3.699.385.107	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	12 Dokumen	3.699.385.107	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	12 Dokumen	3.699.385.107	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	12 Dokumen	3.699.385.107	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	12 Dokumen	3.699.385.107	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	12 Dokumen	3.699.385.107	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	12 Dokumen	3.699.385.107	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	12 Dokumen	3.699.385.107	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	478 Orang	494 Orang	332 Orang	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	490 Orang	3.699.385.107	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	780 Orang	1266 Orang	1115 Orang	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	1085 Orang	3.699.385.107	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	115 Orang	107 Orang	99 Orang	3.510.412.158	3.565.797.264	3.456.001.464	54.410.694	109 Orang	3.699.385.107	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	478 Orang	494 Orang	332 Orang	69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727	490 Orang	74.468.926	Puskesmas Tambakrejo
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.604.640	21.876.000	1.980.000	-375.360		1.716.949	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7480 Orang	8242 Orang	6483 Orang	1.604.640	21.876.000	1.980.000	-375.360	8061 Orang	1.716.949	Puskesmas Tambakrejo
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					6.134.400	2.880.000	1.800.000	4.334.400		6.563.808	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	115 Orang	107 Orang	99 Orang	6.134.400	2.880.000	1.800.000	4.334.400	109 Orang	6.563.808	Puskesmas Tambakrejo
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					22.803.840	17.772.000	16.420.000	6.383.840		24.400.109	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	780 Orang	1266 Orang	1115 Orang	22.803.840	17.772.000	16.420.000	6.383.840	1085 Orang	24.400.109	Puskesmas Tambakrejo
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					289.935.501	348.059.400	385.073.700	-95.138.199		310.230.986	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	289.935.501	348.059.400	385.073.700	-95.138.199	12 Dokumen	310.230.986	Puskesmas Tambakrejo
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	870.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	870.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Tambakrejo
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					8.257.135	7.482.000	7.482.000	775.135		8.833.483	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.257.135	7.482.000	7.482.000	775.135	12 Dokumen	8.833.483	Puskesmas Tambakrejo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					99.630.375	52.770.900	15.960.000	83.670.375		106.604.501	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	99.630.375	52.770.900	15.960.000	83.670.375	12 Laporan	106.604.501	Puskesmas Tambakrejo
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					657.591.726	664.030.288	647.726.288	9.865.438		684.868.630	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	657.591.726	664.030.288	647.726.288	9.865.438	12 Dokumen	684.868.630	Puskesmas Tambakrejo
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.127.998	825.000	825.000	1.302.998		2.248.869	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.127.998	825.000	825.000	1.302.998	12 Dokumen	2.248.869	Puskesmas Tambakrejo
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					9.332.556	687.500	687.500	8.645.056		10.123.956	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.332.556	687.500	687.500	8.645.056	12 Dokumen	10.123.956	Puskesmas Tambakrejo
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					2.568.000	1.650.000	1.650.000	918.000		2.747.760	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.568.000	1.650.000	1.650.000	918.000	12 Dokumen	2.747.760	Puskesmas Tambakrejo
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					4.272.495	825.000	15.744.300	-11.471.805		4.588.659	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	4.272.495	825.000	15.744.300	-11.471.805	68%	4.588.659	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.272.495	825.000	15.744.300	-11.471.805		4.588.659	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Tambakrejo					4.272.495	825.000	15.744.300	-11.471.805		4.588.659	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.272.495	825.000	15.744.300	-11.471.805	12 Dokumen	4.588.659	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4.272.495	825.000	15.744.300	-11.471.805		4.588.659	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.272.495	825.000	15.744.300	-11.471.805	12 Dokumen	4.588.659	Puskesmas Tambakrejo
	Puskesmas Tambakwedi					2.393.442.436	2.607.173.468	3.058.398.604	-664.956.168		2.449.758.442	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.393.442.436	2.393.442.436	3.058.398.604	-664.956.168		2.449.758.442	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.393.442.436	2.607.173.468	3.058.398.604	-664.956.168		2.449.758.442	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.407.788.276	1.407.788.276	1.829.799.412	-422.011.136		1.411.762.462	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	1.407.788.276	1.407.788.276	1.829.799.412	-422.011.136	89,97 %	1.411.762.462	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1.407.788.276	1.407.788.276	1.829.799.412	-422.011.136		1.411.762.462	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tambakwedi					1.407.788.276	1.407.788.276	1.829.799.412	-422.011.136		1.411.762.462	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.407.788.276	1.407.788.276	1.829.799.412	-422.011.136	1 Unit Kerja	1.411.762.462	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.407.788.276	1.407.788.276	1.829.799.412	-422.011.136		1.411.762.462	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.407.788.276	1.407.788.276	1.829.799.412	-422.011.136	1 Unit Kerja	1.411.762.462	Puskesmas Tambakwedi
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					982.147.025	1.198.560.192	1.220.078.592	-237.931.567		1.034.229.317	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	982.147.025	1.198.560.192	1.220.078.592	-237.931.567	91%	1.034.229.317	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	982.147.025	1.198.560.192	1.220.078.592	-237.931.567	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.034.229.317	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	982.147.025	1.198.560.192	1.220.078.592	-237.931.567	80%	1.034.229.317	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	982.147.025	1.198.560.192	1.220.078.592	-237.931.567	98,70 %	1.034.229.317	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	982.147.025	1.198.560.192	1.220.078.592	-237.931.567	82%	1.034.229.317	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	982.147.025	1.198.560.192	1.220.078.592	-237.931.567	40%	1.034.229.317	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	982.147.025	1.198.560.192	1.220.078.592	-237.931.567	100%	1.034.229.317	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	982.147.025	1.198.560.192	1.220.078.592	-237.931.567	95,45%	1.034.229.317	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	982.147.025	1.198.560.192	1.220.078.592	-237.931.567	90,75 %	1.034.229.317	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	982.147.025	1.198.560.192	1.220.078.592	-237.931.567	0,58 %	1.034.229.317	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	982.147.025	1.198.560.192	1.220.078.592	-237.931.567	12%	1.034.229.317	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	982.147.025	1.198.560.192	1.220.078.592	-237.931.567	21,6 %	1.034.229.317	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	982.147.025	1.198.560.192	1.220.078.592	-237.931.567	1,92 %	1.034.229.317	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	982.147.025	1.198.560.192	1.220.078.592	-237.931.567	80%	1.034.229.317	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	982.147.025	1.198.560.192	1.220.078.592	-237.931.567	69%	1.034.229.317	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	982.147.025	1.198.560.192	1.220.078.592	-237.931.567	100%	1.034.229.317	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701		3.102.687.951	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Tambakwedi					2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701		3.102.687.951	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2961 Orang	3260 Orang	1927 Orang	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	3189 Orang	3.102.687.951	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	12 Laporan	3.102.687.951	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	12 Dokumen	3.102.687.951	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	12 Dokumen	3.102.687.951	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	12 Dokumen	3.102.687.951	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	12 Dokumen	3.102.687.951	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	12 Dokumen	3.102.687.951	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	12 Dokumen	3.102.687.951	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	12 Dokumen	3.102.687.951	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	244 Orang	252 Orang	246 Orang	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	250 Orang	3.102.687.951	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250 Orang	403 Orang	431 Orang	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	346 Orang	3.102.687.951	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	43 Orang	39 Orang	40 Orang	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	40 Orang	3.102.687.951	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Tambakwedi					2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701		3.102.687.951	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2961 Orang	3260 Orang	1927 Orang	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	3189 Orang	3.102.687.951	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	12 Laporan	3.102.687.951	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	12 Dokumen	3.102.687.951	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	12 Dokumen	3.102.687.951	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	12 Dokumen	3.102.687.951	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	12 Dokumen	3.102.687.951	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	12 Dokumen	3.102.687.951	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	12 Dokumen	3.102.687.951	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	12 Dokumen	3.102.687.951	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	244 Orang	252 Orang	246 Orang	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	250 Orang	3.102.687.951	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250 Orang	403 Orang	431 Orang	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	346 Orang	3.102.687.951	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	43 Orang	39 Orang	40 Orang	2.946.441.075	3.595.680.576	3.660.235.776	-713.794.701	40 Orang	3.102.687.951	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170		26.477.840	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	244 Orang	252 Orang	246 Orang	24.836.170	23.232.000	23.232.000	1.604.170	250 Orang	26.477.840	Puskesmas Tambakwedi
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.412.083	1.629.000	570.000	842.083		1.510.915	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2961 Orang	3260 Orang	1927 Orang	1.412.083	1.629.000	570.000	842.083	3189 Orang	1.510.915	Puskesmas Tambakwedi
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					2.108.700	2.700.000	2.700.000	-591.300		2.256.309	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	43 Orang	39 Orang	40 Orang	2.108.700	2.700.000	2.700.000	-591.300	40 Orang	2.256.309	Puskesmas Tambakwedi
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					15.151.200	17.352.000	14.280.000	871.200		16.211.784	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250 Orang	403 Orang	431 Orang	15.151.200	17.352.000	14.280.000	871.200	346 Orang	16.211.784	Puskesmas Tambakwedi
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					270.626.445	270.509.400	326.063.400	-55.436.955		289.570.296	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	270.626.445	270.509.400	326.063.400	-55.436.955	12 Dokumen	289.570.296	Puskesmas Tambakwedi
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.080.000	2.520.000	-2.220.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.080.000	2.520.000	-2.220.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Tambakwedi
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					4.270.784	3.094.000	3.094.000	1.176.784		4.568.885	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.270.784	3.094.000	3.094.000	1.176.784	12 Dokumen	4.568.885	Puskesmas Tambakwedi
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					74.972.760	51.762.000	9.420.000	65.552.760		80.220.853	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	74.972.760	51.762.000	9.420.000	65.552.760	12 Laporan	80.220.853	Puskesmas Tambakwedi
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					582.025.713	824.974.292	835.971.692	-253.945.979		606.168.139	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	582.025.713	824.974.292	835.971.692	-253.945.979	12 Dokumen	606.168.139	Puskesmas Tambakwedi
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.278.430	990.000	990.000	288.430		1.351.044	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.278.430	990.000	990.000	288.430	12 Dokumen	1.351.044	Puskesmas Tambakwedi
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					3.110.852	687.500	687.500	2.423.352		3.374.652	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.110.852	687.500	687.500	2.423.352	12 Dokumen	3.374.652	Puskesmas Tambakwedi
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					2.054.400	550.000	550.000	1.504.400		2.198.208	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.054.400	550.000	550.000	1.504.400	12 Dokumen	2.198.208	Puskesmas Tambakwedi

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.507.135	825.000	8.520.600	-5.013.465		3.766.663	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.507.135	825.000	8.520.600	-5.013.465	68%	3.766.663	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.507.135	825.000	8.520.600	-5.013.465		3.766.663	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Tambakwedi					3.507.135	825.000	8.520.600	-5.013.465		3.766.663	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.507.135	825.000	8.520.600	-5.013.465	12 Dokumen	3.766.663	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.507.135	825.000	8.520.600	-5.013.465		3.766.663	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.507.135	825.000	8.520.600	-5.013.465	12 Dokumen	3.766.663	Puskesmas Tambakwedi
	Puskesmas Tanah Kali Kedinding					6.103.325.089	5.825.710.867	7.157.596.546	-1.054.271.457		6.189.697.135	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.103.325.089	6.103.325.089	7.157.596.546	-1.054.271.457		6.189.697.135	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					6.103.325.089	5.825.710.867	7.157.596.546	-1.054.271.457		6.189.697.135	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.701.005.879	4.701.005.879	5.932.365.558	-1.231.359.679		4.714.276.819	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	4.701.005.879	4.701.005.879	5.932.365.558	-1.231.359.679	89,97 %	4.714.276.819	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					4.701.005.879	4.701.005.879	5.932.365.558	-1.231.359.679		4.714.276.819	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tanah Kali Kedinding					4.701.005.879	4.701.005.879	5.932.365.558	-1.231.359.679		4.714.276.819	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.701.005.879	4.701.005.879	5.932.365.558	-1.231.359.679	1 Unit Kerja	4.714.276.819	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					4.701.005.879	4.701.005.879	5.932.365.558	-1.231.359.679		4.714.276.819	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.701.005.879	4.701.005.879	5.932.365.558	-1.231.359.679	1 Unit Kerja	4.714.276.819	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.398.992.020	1.123.879.988	1.215.984.388	183.007.632		1.471.846.914	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.398.992.020	1.123.879.988	1.215.984.388	183.007.632	91%	1.471.846.914	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.398.992.020	1.123.879.988	1.215.984.388	183.007.632	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.471.846.914	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.398.992.020	1.123.879.988	1.215.984.388	183.007.632	80%	1.471.846.914	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.398.992.020	1.123.879.988	1.215.984.388	183.007.632	98,70 %	1.471.846.914	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.398.992.020	1.123.879.988	1.215.984.388	183.007.632	82%	1.471.846.914	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.398.992.020	1.123.879.988	1.215.984.388	183.007.632	40%	1.471.846.914	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.398.992.020	1.123.879.988	1.215.984.388	183.007.632	100%	1.471.846.914	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.398.992.020	1.123.879.988	1.215.984.388	183.007.632	95,45%	1.471.846.914	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.398.992.020	1.123.879.988	1.215.984.388	183.007.632	90,75 %	1.471.846.914	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.398.992.020	1.123.879.988	1.215.984.388	183.007.632	0,58 %	1.471.846.914	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.398.992.020	1.123.879.988	1.215.984.388	183.007.632	12%	1.471.846.914	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.398.992.020	1.123.879.988	1.215.984.388	183.007.632	21,6 %	1.471.846.914	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.398.992.020	1.123.879.988	1.215.984.388	183.007.632	1,92 %	1.471.846.914	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.398.992.020	1.123.879.988	1.215.984.388	183.007.632	80%	1.471.846.914	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.398.992.020	1.123.879.988	1.215.984.388	183.007.632	69%	1.471.846.914	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.398.992.020	1.123.879.988	1.215.984.388	183.007.632	100%	1.471.846.914	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896		4.415.540.742	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Tanah Kali Kedinding					4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896		4.415.540.742	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8792 Orang	9687 Orang	8876 Orang	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	9474 Orang	4.415.540.742	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	12 Laporan	4.415.540.742	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	12 Dokumen	4.415.540.742	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	12 Dokumen	4.415.540.742	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	12 Dokumen	4.415.540.742	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	12 Dokumen	4.415.540.742	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	12 Dokumen	4.415.540.742	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	12 Dokumen	4.415.540.742	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	12 Dokumen	4.415.540.742	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	766 Orang	794 Orang	756 Orang	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	787 Orang	4.415.540.742	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	811 Orang	1316 Orang	1273 Orang	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	1128 Orang	4.415.540.742	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	101 Orang	118 Orang	116 Orang	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	120 Orang	4.415.540.742	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Tanah Kali Kedinding					4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896		4.415.540.742	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8792 Orang	9687 Orang	8876 Orang	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	9474 Orang	4.415.540.742	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	12 Laporan	4.415.540.742	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	12 Dokumen	4.415.540.742	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	12 Dokumen	4.415.540.742	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	12 Dokumen	4.415.540.742	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	12 Dokumen	4.415.540.742	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	12 Dokumen	4.415.540.742	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	12 Dokumen	4.415.540.742	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	12 Dokumen	4.415.540.742	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	766 Orang	794 Orang	756 Orang	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	787 Orang	4.415.540.742	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	811 Orang	1316 Orang	1273 Orang	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	1128 Orang	4.415.540.742	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	101 Orang	118 Orang	116 Orang	4.196.976.060	3.371.639.964	3.647.953.164	549.022.896	120 Orang	4.415.540.742	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					27.940.691	23.232.000	31.944.000	-4.003.309		29.787.570	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	766 Orang	794 Orang	756 Orang	27.940.691	23.232.000	31.944.000	-4.003.309	787 Orang	29.787.570	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.925.568	30.960.000	2.580.000	-654.432		2.060.339	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8792 Orang	9687 Orang	8876 Orang	1.925.568	30.960.000	2.580.000	-654.432	9474 Orang	2.060.339	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					4.217.400	1.800.000	2.700.000	1.517.400		4.512.618	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	101 Orang	118 Orang	116 Orang	4.217.400	1.800.000	2.700.000	1.517.400	120 Orang	4.512.618	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.695.040	17.172.000	16.870.000	1.825.040		20.003.693	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	811 Orang	1316 Orang	1273 Orang	18.695.040	17.172.000	16.870.000	1.825.040	1128 Orang	20.003.693	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					336.142.924	179.496.000	338.154.400	-2.011.476		359.672.928	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	336.142.924	179.496.000	338.154.400	-2.011.476	12 Dokumen	359.672.928	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.470.000	2.610.000	-2.310.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.470.000	2.610.000	-2.310.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					3.083.861	2.974.000	3.094.000	-10.139		3.299.115	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.083.861	2.974.000	3.094.000	-10.139	12 Dokumen	3.299.115	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					120.901.440	60.030.000	10.530.000	110.371.440		129.364.541	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	120.901.440	60.030.000	10.530.000	110.371.440	12 Laporan	129.364.541	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					877.138.195	805.068.488	805.824.488	71.313.707		913.521.887	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	877.138.195	805.068.488	805.824.488	71.313.707	12 Dokumen	913.521.887	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.116.995	440.000	440.000	676.995		1.180.441	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.116.995	440.000	440.000	676.995	12 Dokumen	1.180.441	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					4.448.818	687.500	687.500	3.761.318		4.826.078	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.448.818	687.500	687.500	3.761.318	12 Dokumen	4.826.078	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					3.081.600	550.000	550.000	2.531.600		3.297.312	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.081.600	550.000	550.000	2.531.600	12 Dokumen	3.297.312	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.327.190	825.000	9.246.600	-5.919.410		3.573.402	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.327.190	825.000	9.246.600	-5.919.410	68%	3.573.402	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.327.190	825.000	9.246.600	-5.919.410		3.573.402	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Tanah Kali Kedinding					3.327.190	825.000	9.246.600	-5.919.410		3.573.402	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.327.190	825.000	9.246.600	-5.919.410	12 Dokumen	3.573.402	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.327.190	825.000	9.246.600	-5.919.410		3.573.402	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.327.190	825.000	9.246.600	-5.919.410	12 Dokumen	3.573.402	Puskesmas Tanah Kali Kedinding
	Puskesmas Tanjungsari					2.900.347.267	3.003.506.389	3.685.118.862	-784.771.595		2.953.444.806	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.900.347.267	2.900.347.267	3.685.118.862	-784.771.595		2.953.444.806	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.900.347.267	3.003.506.389	3.685.118.862	-784.771.595		2.953.444.806	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.038.706.205	2.038.706.205	2.797.784.178	-759.077.973		2.044.461.473	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.038.706.205	2.038.706.205	2.797.784.178	-759.077.973	89,97 %	2.044.461.473	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.038.706.205	2.038.706.205	2.797.784.178	-759.077.973		2.044.461.473	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tanjungsari					2.038.706.205	2.038.706.205	2.797.784.178	-759.077.973		2.044.461.473	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.038.706.205	2.038.706.205	2.797.784.178	-759.077.973	1 Unit Kerja	2.044.461.473	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.038.706.205	2.038.706.205	2.797.784.178	-759.077.973		2.044.461.473	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.038.706.205	2.038.706.205	2.797.784.178	-759.077.973	1 Unit Kerja	2.044.461.473	Puskesmas Tanjungsari
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					858.154.422	963.975.184	872.497.884	-14.343.462		905.238.682	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	858.154.422	963.975.184	872.497.884	-14.343.462	91%	905.238.682	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	858.154.422	963.975.184	872.497.884	-14.343.462	4 per 1.000 kelahiran hidup	905.238.682	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	858.154.422	963.975.184	872.497.884	-14.343.462	80%	905.238.682	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	858.154.422	963.975.184	872.497.884	-14.343.462	98,70 %	905.238.682	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	858.154.422	963.975.184	872.497.884	-14.343.462	82%	905.238.682	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	858.154.422	963.975.184	872.497.884	-14.343.462	40%	905.238.682	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	858.154.422	963.975.184	872.497.884	-14.343.462	100%	905.238.682	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	858.154.422	963.975.184	872.497.884	-14.343.462	95,45%	905.238.682	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	858.154.422	963.975.184	872.497.884	-14.343.462	90,75 %	905.238.682	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	858.154.422	963.975.184	872.497.884	-14.343.462	0,58 %	905.238.682	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	858.154.422	963.975.184	872.497.884	-14.343.462	12%	905.238.682	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	858.154.422	963.975.184	872.497.884	-14.343.462	21,6 %	905.238.682	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	858.154.422	963.975.184	872.497.884	-14.343.462	1,92 %	905.238.682	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	858.154.422	963.975.184	872.497.884	-14.343.462	80%	905.238.682	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	858.154.422	963.975.184	872.497.884	-14.343.462	69%	905.238.682	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	858.154.422	963.975.184	872.497.884	-14.343.462	100%	905.238.682	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386		2.715.716.046	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Tanjungsari					2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386		2.715.716.046	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3313 Orang	3648 Orang	3090 Orang	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	3568 Orang	2.715.716.046	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	12 Laporan	2.715.716.046	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	12 Dokumen	2.715.716.046	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	12 Dokumen	2.715.716.046	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	12 Dokumen	2.715.716.046	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	12 Dokumen	2.715.716.046	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	12 Dokumen	2.715.716.046	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	12 Dokumen	2.715.716.046	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	12 Dokumen	2.715.716.046	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	291 Orang	299 Orang	276 Orang	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	297 Orang	2.715.716.046	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	376 Orang	609 Orang	556 Orang	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	522 Orang	2.715.716.046	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 Orang	52 Orang	50 Orang	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	53 Orang	2.715.716.046	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Tanjungsari					2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386		2.715.716.046	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3313 Orang	3648 Orang	3090 Orang	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	3568 Orang	2.715.716.046	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	12 Laporan	2.715.716.046	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	12 Dokumen	2.715.716.046	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	12 Dokumen	2.715.716.046	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	12 Dokumen	2.715.716.046	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	12 Dokumen	2.715.716.046	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	12 Dokumen	2.715.716.046	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	12 Dokumen	2.715.716.046	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	12 Dokumen	2.715.716.046	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	291 Orang	299 Orang	276 Orang	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	297 Orang	2.715.716.046	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	376 Orang	609 Orang	556 Orang	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	522 Orang	2.715.716.046	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 Orang	52 Orang	50 Orang	2.574.463.266	2.891.925.552	2.617.493.652	-43.030.386	53 Orang	2.715.716.046	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	291 Orang	299 Orang	276 Orang	69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727	297 Orang	74.468.926	Puskesmas Tanjungsari
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					1.155.341	9.787.500	3.060.000	-1.904.659		1.236.203	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3313 Orang	3648 Orang	3090 Orang	1.155.341	9.787.500	3.060.000	-1.904.659	3568 Orang	1.236.203	Puskesmas Tanjungsari
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					1.533.600	1.440.000	1.440.000	93.600		1.640.952	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 Orang	52 Orang	50 Orang	1.533.600	1.440.000	1.440.000	93.600	53 Orang	1.640.952	Puskesmas Tanjungsari
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					17.732.040	16.572.000	13.860.000	3.872.040		18.973.283	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	376 Orang	609 Orang	556 Orang	17.732.040	16.572.000	13.860.000	3.872.040	522 Orang	18.973.283	Puskesmas Tanjungsari
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					160.538.318	122.337.000	175.668.200	-15.129.882		171.776.000	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	160.538.318	122.337.000	175.668.200	-15.129.882	12 Dokumen	171.776.000	Puskesmas Tanjungsari
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2.181.984	1.020.000	2.700.000	-518.016		2.334.286	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.181.984	1.020.000	2.700.000	-518.016	12 Dokumen	2.334.286	Puskesmas Tanjungsari
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					9.476.137	9.162.000	8.742.000	734.137		10.137.571	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.476.137	9.162.000	8.742.000	734.137	12 Dokumen	10.137.571	Puskesmas Tanjungsari
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					132.769.131	128.238.000	9.960.000	122.809.131		142.062.970	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	132.769.131	128.238.000	9.960.000	122.809.131	12 Laporan	142.062.970	Puskesmas Tanjungsari
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					448.614.264	603.132.184	584.781.184	-136.166.920		467.222.784	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	448.614.264	603.132.184	584.781.184	-136.166.920	12 Dokumen	467.222.784	Puskesmas Tanjungsari
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					4.198.924	1.375.000	1.375.000	2.823.924		4.437.423	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.198.924	1.375.000	1.375.000	2.823.924	12 Dokumen	4.437.423	Puskesmas Tanjungsari
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					9.332.556	687.500	687.500	8.645.056		10.123.956	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.332.556	687.500	687.500	8.645.056	12 Dokumen	10.123.956	Puskesmas Tanjungsari
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					770.400	528.000	528.000	242.400		824.328	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	770.400	528.000	528.000	242.400	12 Dokumen	824.328	Puskesmas Tanjungsari
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.486.640	825.000	14.836.800	-11.350.160		3.744.651	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.486.640	825.000	14.836.800	-11.350.160	68%	3.744.651	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.486.640	825.000	14.836.800	-11.350.160		3.744.651	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Tanjungsari					3.486.640	825.000	14.836.800	-11.350.160		3.744.651	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.486.640	825.000	14.836.800	-11.350.160	12 Dokumen	3.744.651	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.486.640	825.000	14.836.800	-11.350.160		3.744.651	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.486.640	825.000	14.836.800	-11.350.160	12 Dokumen	3.744.651	Puskesmas Tanjungsari
	Puskesmas Tembok Dukuh					4.581.382.955	4.621.026.000	4.948.836.451	-367.453.496		4.662.628.184	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.581.382.955	4.581.382.955	4.948.836.451	-367.453.496		4.662.628.184	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.581.382.955	4.621.026.000	4.948.836.451	-367.453.496		4.662.628.184	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.200.383.115	3.200.383.115	3.557.374.766	-356.991.651		3.209.417.796	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.200.383.115	3.200.383.115	3.557.374.766	-356.991.651	89,97 %	3.209.417.796	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.200.383.115	3.200.383.115	3.557.374.766	-356.991.651		3.209.417.796	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tembok Dukuh					3.200.383.115	3.200.383.115	3.557.374.766	-356.991.651		3.209.417.796	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.200.383.115	3.200.383.115	3.557.374.766	-356.991.651	1 Unit Kerja	3.209.417.796	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.200.383.115	3.200.383.115	3.557.374.766	-356.991.651		3.209.417.796	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.200.383.115	3.200.383.115	3.557.374.766	-356.991.651	1 Unit Kerja	3.209.417.796	Puskesmas Tembok Dukuh

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.377.991.550	1.419.817.885	1.377.895.385	96.165		1.449.979.485	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.377.991.550	1.419.817.885	1.377.895.385	96.165	91%	1.449.979.485	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.377.991.550	1.419.817.885	1.377.895.385	96.165	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.449.979.485	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.377.991.550	1.419.817.885	1.377.895.385	96.165	80%	1.449.979.485	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.377.991.550	1.419.817.885	1.377.895.385	96.165	98,70 %	1.449.979.485	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.377.991.550	1.419.817.885	1.377.895.385	96.165	82%	1.449.979.485	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.377.991.550	1.419.817.885	1.377.895.385	96.165	40%	1.449.979.485	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.377.991.550	1.419.817.885	1.377.895.385	96.165	100%	1.449.979.485	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.377.991.550	1.419.817.885	1.377.895.385	96.165	95,45%	1.449.979.485	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.377.991.550	1.419.817.885	1.377.895.385	96.165	90,75 %	1.449.979.485	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.377.991.550	1.419.817.885	1.377.895.385	96.165	0,58 %	1.449.979.485	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.377.991.550	1.419.817.885	1.377.895.385	96.165	12%	1.449.979.485	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.377.991.550	1.419.817.885	1.377.895.385	96.165	21,6 %	1.449.979.485	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.377.991.550	1.419.817.885	1.377.895.385	96.165	1,92 %	1.449.979.485	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.377.991.550	1.419.817.885	1.377.895.385	96.165	80%	1.449.979.485	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.377.991.550	1.419.817.885	1.377.895.385	96.165	69%	1.449.979.485	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.377.991.550	1.419.817.885	1.377.895.385	96.165	100%	1.449.979.485	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495		4.349.938.455	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Tembok Dukuh					4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495		4.349.938.455	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7704 Orang	8488 Orang	7033 Orang	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	8302 Orang	4.349.938.455	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	12 Laporan	4.349.938.455	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	12 Dokumen	4.349.938.455	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	12 Dokumen	4.349.938.455	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	12 Dokumen	4.349.938.455	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	12 Dokumen	4.349.938.455	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	12 Dokumen	4.349.938.455	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	12 Dokumen	4.349.938.455	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	12 Dokumen	4.349.938.455	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	584 Orang	606 Orang	542 Orang	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	600 Orang	4.349.938.455	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	799 Orang	1296 Orang	1160 Orang	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	1111 Orang	4.349.938.455	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	118 Orang	110 Orang	104 Orang	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	112 Orang	4.349.938.455	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Tembok Dukuh					4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495		4.349.938.455	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7704 Orang	8488 Orang	7033 Orang	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	8302 Orang	4.349.938.455	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	12 Laporan	4.349.938.455	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	12 Dokumen	4.349.938.455	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	12 Dokumen	4.349.938.455	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	12 Dokumen	4.349.938.455	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	12 Dokumen	4.349.938.455	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	12 Dokumen	4.349.938.455	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	12 Dokumen	4.349.938.455	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	12 Dokumen	4.349.938.455	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	584 Orang	606 Orang	542 Orang	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	600 Orang	4.349.938.455	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	799 Orang	1296 Orang	1160 Orang	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	1111 Orang	4.349.938.455	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	118 Orang	110 Orang	104 Orang	4.133.974.650	4.259.453.655	4.133.686.155	288.495	112 Orang	4.349.938.455	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727		74.468.926	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	584 Orang	606 Orang	542 Orang	69.851.727	69.696.000	69.696.000	155.727	600 Orang	74.468.926	Puskesmas Tembok Dukuh
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					2.214.403	7.785.000	5.040.000	-2.825.597		2.369.389	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7704 Orang	8488 Orang	7033 Orang	2.214.403	7.785.000	5.040.000	-2.825.597	8302 Orang	2.369.389	Puskesmas Tembok Dukuh
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					6.326.100	2.250.000	4.500.000	1.826.100		6.768.927	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	118 Orang	110 Orang	104 Orang	6.326.100	2.250.000	4.500.000	1.826.100	112 Orang	6.768.927	Puskesmas Tembok Dukuh
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					19.465.440	17.472.000	15.960.000	3.505.440		20.828.021	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	799 Orang	1296 Orang	1160 Orang	19.465.440	17.472.000	15.960.000	3.505.440	1111 Orang	20.828.021	Puskesmas Tembok Dukuh
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					268.523.008	402.394.200	453.995.700	-185.472.692		287.319.618	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	268.523.008	402.394.200	453.995.700	-185.472.692	12 Dokumen	287.319.618	Puskesmas Tembok Dukuh
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					4.331.880	1.500.000	2.700.000	1.631.880		4.634.245	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.331.880	1.500.000	2.700.000	1.631.880	12 Dokumen	4.634.245	Puskesmas Tembok Dukuh
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1.090.686	1.620.000	1.290.000	-199.314		1.166.816	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.090.686	1.620.000	1.290.000	-199.314	12 Dokumen	1.166.816	Puskesmas Tembok Dukuh
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					127.697.331	86.514.000	8.700.000	118.997.331		136.636.144	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	127.697.331	86.514.000	8.700.000	118.997.331	12 Laporan	136.636.144	Puskesmas Tembok Dukuh
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					852.828.174	828.249.185	813.676.185	39.151.989		888.203.487	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	852.828.174	828.249.185	813.676.185	39.151.989	12 Dokumen	888.203.487	Puskesmas Tembok Dukuh
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.323.676	1.100.000	1.100.000	1.223.676		2.455.661	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.323.676	1.100.000	1.100.000	1.223.676	12 Dokumen	2.455.661	Puskesmas Tembok Dukuh
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					10.499.125	687.500	687.500	9.811.625		11.389.451	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.499.125	687.500	687.500	9.811.625	12 Dokumen	11.389.451	Puskesmas Tembok Dukuh
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					12.840.000	550.000	550.000	12.290.000		13.738.800	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.840.000	550.000	550.000	12.290.000	12 Dokumen	13.738.800	Puskesmas Tembok Dukuh
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.008.290	825.000	13.566.300	-10.558.010		3.230.903	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.008.290	825.000	13.566.300	-10.558.010	68%	3.230.903	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.008.290	825.000	13.566.300	-10.558.010		3.230.903	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Tembok Dukuh					3.008.290	825.000	13.566.300	-10.558.010		3.230.903	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.008.290	825.000	13.566.300	-10.558.010	12 Dokumen	3.230.903	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.008.290	825.000	13.566.300	-10.558.010		3.230.903	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.008.290	825.000	13.566.300	-10.558.010	12 Dokumen	3.230.903	Puskesmas Tembok Dukuh
	Puskesmas Tenggilis					4.130.951.672	4.354.538.567	4.973.594.920	-842.643.248		4.207.157.160	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.130.951.672	4.130.951.672	4.973.594.920	-842.643.248		4.207.157.160	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.130.951.672	4.354.538.567	4.973.594.920	-842.643.248		4.207.157.160	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.855.352.787	2.855.352.787	3.468.532.540	-613.179.753		2.863.413.448	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.855.352.787	2.855.352.787	3.468.532.540	-613.179.753	89,97 %	2.863.413.448	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.855.352.787	2.855.352.787	3.468.532.540	-613.179.753		2.863.413.448	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Tenggilis					2.855.352.787	2.855.352.787	3.468.532.540	-613.179.753		2.863.413.448	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.855.352.787	2.855.352.787	3.468.532.540	-613.179.753	1 Unit Kerja	2.863.413.448	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.855.352.787	2.855.352.787	3.468.532.540	-613.179.753		2.863.413.448	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.855.352.787	2.855.352.787	3.468.532.540	-613.179.753	1 Unit Kerja	2.863.413.448	Puskesmas Tenggilis
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.271.326.390	1.498.360.780	1.486.522.980	-215.196.590		1.339.155.053	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.271.326.390	1.498.360.780	1.486.522.980	-215.196.590	91%	1.339.155.053	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.271.326.390	1.498.360.780	1.486.522.980	-215.196.590	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.339.155.053	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.271.326.390	1.498.360.780	1.486.522.980	-215.196.590	80%	1.339.155.053	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.271.326.390	1.498.360.780	1.486.522.980	-215.196.590	98,70 %	1.339.155.053	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.271.326.390	1.498.360.780	1.486.522.980	-215.196.590	82%	1.339.155.053	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.271.326.390	1.498.360.780	1.486.522.980	-215.196.590	40%	1.339.155.053	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.271.326.390	1.498.360.780	1.486.522.980	-215.196.590	100%	1.339.155.053	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.271.326.390	1.498.360.780	1.486.522.980	-215.196.590	95,45%	1.339.155.053	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.271.326.390	1.498.360.780	1.486.522.980	-215.196.590	90,75 %	1.339.155.053	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.271.326.390	1.498.360.780	1.486.522.980	-215.196.590	0,58 %	1.339.155.053	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.271.326.390	1.498.360.780	1.486.522.980	-215.196.590	12%	1.339.155.053	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.271.326.390	1.498.360.780	1.486.522.980	-215.196.590	21,6 %	1.339.155.053	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.271.326.390	1.498.360.780	1.486.522.980	-215.196.590	1,92 %	1.339.155.053	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.271.326.390	1.498.360.780	1.486.522.980	-215.196.590	80%	1.339.155.053	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.271.326.390	1.498.360.780	1.486.522.980	-215.196.590	69%	1.339.155.053	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.271.326.390	1.498.360.780	1.486.522.980	-215.196.590	100%	1.339.155.053	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770		4.017.465.159	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Tenggilis					3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770		4.017.465.159	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7708 Orang	8492 Orang	7388 Orang	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	8306 Orang	4.017.465.159	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	12 Laporan	4.017.465.159	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	12 Dokumen	4.017.465.159	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	12 Dokumen	4.017.465.159	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	12 Dokumen	4.017.465.159	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	12 Dokumen	4.017.465.159	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	12 Dokumen	4.017.465.159	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	12 Dokumen	4.017.465.159	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	12 Dokumen	4.017.465.159	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	594 Orang	617 Orang	593 Orang	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	611 Orang	4.017.465.159	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	807 Orang	1307 Orang	1205 Orang	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	1121 Orang	4.017.465.159	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	107 Orang	114 Orang	109 Orang	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	116 Orang	4.017.465.159	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Tenggilis					3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770		4.017.465.159	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7708 Orang	8492 Orang	7388 Orang	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	8306 Orang	4.017.465.159	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	12 Laporan	4.017.465.159	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	12 Dokumen	4.017.465.159	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	12 Dokumen	4.017.465.159	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	12 Dokumen	4.017.465.159	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	12 Dokumen	4.017.465.159	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	12 Dokumen	4.017.465.159	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	12 Dokumen	4.017.465.159	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	12 Dokumen	4.017.465.159	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	594 Orang	617 Orang	593 Orang	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	611 Orang	4.017.465.159	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	807 Orang	1307 Orang	1205 Orang	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	1121 Orang	4.017.465.159	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	107 Orang	114 Orang	109 Orang	3.813.979.170	4.495.082.340	4.459.568.940	-645.589.770	116 Orang	4.017.465.159	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					80.717.551	75.504.000	75.504.000	5.213.551		86.052.981	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	594 Orang	617 Orang	593 Orang	80.717.551	75.504.000	75.504.000	5.213.551	611 Orang	86.052.981	Puskesmas Tenggilis
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					3.466.022	13.281.000	5.700.000	-2.233.978		3.708.609	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7708 Orang	8492 Orang	7388 Orang	3.466.022	13.281.000	5.700.000	-2.233.978	8306 Orang	3.708.609	Puskesmas Tenggilis
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					6.326.100	1.800.000	1.800.000	4.526.100		6.768.927	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	107 Orang	114 Orang	109 Orang	6.326.100	1.800.000	1.800.000	4.526.100	116 Orang	6.768.927	Puskesmas Tenggilis
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.566.640	16.632.000	15.720.000	2.846.640		19.866.305	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	807 Orang	1307 Orang	1205 Orang	18.566.640	16.632.000	15.720.000	2.846.640	1121 Orang	19.866.305	Puskesmas Tenggilis
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					254.434.392	343.853.400	396.966.600	-142.532.208		272.244.799	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	254.434.392	343.853.400	396.966.600	-142.532.208	12 Dokumen	272.244.799	Puskesmas Tenggilis
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.590.000	5.400.000	-5.100.512		320.392	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.590.000	5.400.000	-5.100.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Tenggilis
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					14.067.711	12.676.000	12.076.000	1.991.711		15.049.637	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	14.067.711	12.676.000	12.076.000	1.991.711	12 Dokumen	15.049.637	Puskesmas Tenggilis
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					135.597.462	46.806.000	10.620.000	124.977.462		145.089.284	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	135.597.462	46.806.000	10.620.000	124.977.462	12 Laporan	145.089.284	Puskesmas Tenggilis
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					737.070.640	983.451.880	959.969.880	-222.899.240		767.644.331	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	737.070.640	983.451.880	959.969.880	-222.899.240	12 Dokumen	767.644.331	Puskesmas Tenggilis
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					4.198.924	1.375.000	1.375.000	2.823.924		4.437.423	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.198.924	1.375.000	1.375.000	2.823.924	12 Dokumen	4.437.423	Puskesmas Tenggilis
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					15.554.260	687.500	687.500	14.866.760		16.873.261	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15.554.260	687.500	687.500	14.866.760	12 Dokumen	16.873.261	Puskesmas Tenggilis
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					1.027.200	704.000	704.000	323.200		1.099.104	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.027.200	704.000	704.000	323.200	12 Dokumen	1.099.104	Puskesmas Tenggilis
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					4.272.495	825.000	18.539.400	-14.266.905		4.588.659	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	4.272.495	825.000	18.539.400	-14.266.905	68%	4.588.659	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.272.495	825.000	18.539.400	-14.266.905		4.588.659	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Tenggilis					4.272.495	825.000	18.539.400	-14.266.905		4.588.659	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.272.495	825.000	18.539.400	-14.266.905	12 Dokumen	4.588.659	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4.272.495	825.000	18.539.400	-14.266.905		4.588.659	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.272.495	825.000	18.539.400	-14.266.905	12 Dokumen	4.588.659	Puskesmas Tenggilis
	Puskesmas Wiyung					4.718.426.263	4.958.376.078	6.002.222.416	-1.283.796.153		4.791.937.725	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.718.426.263	4.718.426.263	6.002.222.416	-1.283.796.153		4.791.937.725	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.718.426.263	4.958.376.078	6.002.222.416	-1.283.796.153		4.791.937.725	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.528.517.190	3.528.517.190	4.579.237.728	-1.050.720.538		3.538.478.194	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	3.528.517.190	3.528.517.190	4.579.237.728	-1.050.720.538	89,97 %	3.538.478.194	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.528.517.190	3.528.517.190	4.579.237.728	-1.050.720.538		3.538.478.194	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Wiyung					3.528.517.190	3.528.517.190	4.579.237.728	-1.050.720.538		3.538.478.194	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.528.517.190	3.528.517.190	4.579.237.728	-1.050.720.538	1 Unit Kerja	3.538.478.194	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					3.528.517.190	3.528.517.190	4.579.237.728	-1.050.720.538		3.538.478.194	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.528.517.190	3.528.517.190	4.579.237.728	-1.050.720.538	1 Unit Kerja	3.538.478.194	Puskesmas Wiyung
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.186.900.783	1.429.033.888	1.408.147.888	-221.247.105		1.250.228.628	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.186.900.783	1.429.033.888	1.408.147.888	-221.247.105	91%	1.250.228.628	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.186.900.783	1.429.033.888	1.408.147.888	-221.247.105	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.250.228.628	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.186.900.783	1.429.033.888	1.408.147.888	-221.247.105	80%	1.250.228.628	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.186.900.783	1.429.033.888	1.408.147.888	-221.247.105	98,70 %	1.250.228.628	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.186.900.783	1.429.033.888	1.408.147.888	-221.247.105	82%	1.250.228.628	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.186.900.783	1.429.033.888	1.408.147.888	-221.247.105	40%	1.250.228.628	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.186.900.783	1.429.033.888	1.408.147.888	-221.247.105	100%	1.250.228.628	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.186.900.783	1.429.033.888	1.408.147.888	-221.247.105	95,45%	1.250.228.628	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.186.900.783	1.429.033.888	1.408.147.888	-221.247.105	90,75 %	1.250.228.628	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.186.900.783	1.429.033.888	1.408.147.888	-221.247.105	0,58 %	1.250.228.628	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.186.900.783	1.429.033.888	1.408.147.888	-221.247.105	12%	1.250.228.628	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.186.900.783	1.429.033.888	1.408.147.888	-221.247.105	21,6 %	1.250.228.628	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.186.900.783	1.429.033.888	1.408.147.888	-221.247.105	1,92 %	1.250.228.628	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.186.900.783	1.429.033.888	1.408.147.888	-221.247.105	80%	1.250.228.628	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.186.900.783	1.429.033.888	1.408.147.888	-221.247.105	69%	1.250.228.628	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.186.900.783	1.429.033.888	1.408.147.888	-221.247.105	100%	1.250.228.628	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315		3.750.685.884	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Wiyung					3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315		3.750.685.884	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7603 Orang	8377 Orang	7302 Orang	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	8193 Orang	3.750.685.884	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	12 Laporan	3.750.685.884	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	12 Dokumen	3.750.685.884	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	12 Dokumen	3.750.685.884	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	12 Dokumen	3.750.685.884	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	12 Dokumen	3.750.685.884	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	12 Dokumen	3.750.685.884	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	12 Dokumen	3.750.685.884	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	12 Dokumen	3.750.685.884	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	687 Orang	713 Orang	702 Orang	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	706 Orang	3.750.685.884	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	813 Orang	1318 Orang	1248 Orang	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	1130 Orang	3.750.685.884	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	124 Orang	116 Orang	113 Orang	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	118 Orang	3.750.685.884	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Wiyung					3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315		3.750.685.884	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7603 Orang	8377 Orang	7302 Orang	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	8193 Orang	3.750.685.884	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	12 Laporan	3.750.685.884	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	12 Dokumen	3.750.685.884	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	12 Dokumen	3.750.685.884	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	12 Dokumen	3.750.685.884	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	12 Dokumen	3.750.685.884	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	12 Dokumen	3.750.685.884	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	12 Dokumen	3.750.685.884	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	12 Dokumen	3.750.685.884	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	687 Orang	713 Orang	702 Orang	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	706 Orang	3.750.685.884	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	813 Orang	1318 Orang	1248 Orang	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	1130 Orang	3.750.685.884	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	124 Orang	116 Orang	113 Orang	3.560.702.349	4.287.101.664	4.224.443.664	-663.741.315	118 Orang	3.750.685.884	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					69.851.727	56.628.000	69.696.000	155.727		74.468.926	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	687 Orang	713 Orang	702 Orang	69.851.727	56.628.000	69.696.000	155.727	706 Orang	74.468.926	Puskesmas Wiyung
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					3.851.136	14.448.000	1.320.000	2.531.136		4.120.677	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7603 Orang	8377 Orang	7302 Orang	3.851.136	14.448.000	1.320.000	2.531.136	8193 Orang	4.120.677	Puskesmas Wiyung
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.258.900	540.000	540.000	2.718.900		3.487.023	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	124 Orang	116 Orang	113 Orang	3.258.900	540.000	540.000	2.718.900	118 Orang	3.487.023	Puskesmas Wiyung
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					17.507.340	16.632.000	13.740.000	3.767.340		18.732.854	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	813 Orang	1318 Orang	1248 Orang	17.507.340	16.632.000	13.740.000	3.767.340	1130 Orang	18.732.854	Puskesmas Wiyung
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					250.293.984	514.825.200	570.429.200	-320.135.216		267.814.563	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	250.293.984	514.825.200	570.429.200	-320.135.216	12 Dokumen	267.814.563	Puskesmas Wiyung
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	1.440.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	1.440.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Wiyung
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					8.481.688	7.902.000	7.842.000	639.688		9.073.709	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.481.688	7.902.000	7.842.000	639.688	12 Dokumen	9.073.709	Puskesmas Wiyung
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					128.756.631	80.328.000	11.340.000	117.416.631		137.769.595	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	128.756.631	80.328.000	11.340.000	117.416.631	12 Laporan	137.769.595	Puskesmas Wiyung
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					688.042.518	732.853.188	727.103.188	-39.060.670		716.582.522	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	688.042.518	732.853.188	727.103.188	-39.060.670	12 Dokumen	716.582.522	Puskesmas Wiyung
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.323.676	1.100.000	1.100.000	1.223.676		2.455.661	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.323.676	1.100.000	1.100.000	1.223.676	12 Dokumen	2.455.661	Puskesmas Wiyung
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					11.665.695	687.500	687.500	10.978.195		12.654.946	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11.665.695	687.500	687.500	10.978.195	12 Dokumen	12.654.946	Puskesmas Wiyung
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					2.568.000	1.650.000	1.650.000	918.000		2.747.760	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.568.000	1.650.000	1.650.000	918.000	12 Dokumen	2.747.760	Puskesmas Wiyung
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.008.290	825.000	14.836.800	-11.828.510		3.230.903	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.008.290	825.000	14.836.800	-11.828.510	68%	3.230.903	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.008.290	825.000	14.836.800	-11.828.510		3.230.903	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Wiyung					3.008.290	825.000	14.836.800	-11.828.510		3.230.903	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.008.290	825.000	14.836.800	-11.828.510	12 Dokumen	3.230.903	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.008.290	825.000	14.836.800	-11.828.510		3.230.903	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.008.290	825.000	14.836.800	-11.828.510	12 Dokumen	3.230.903	Puskesmas Wiyung
	Puskesmas Wonokromo					3.077.528.437	3.187.720.923	3.754.940.605	-677.412.168		3.128.770.529	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.077.528.437	3.077.528.437	3.754.940.605	-677.412.168		3.128.770.529	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.077.528.437	3.187.720.923	3.754.940.605	-677.412.168		3.128.770.529	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.310.349.435	2.310.349.435	2.796.176.517	-485.827.082		2.316.871.551	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	2.310.349.435	2.310.349.435	2.796.176.517	-485.827.082	89,97 %	2.316.871.551	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.310.349.435	2.310.349.435	2.796.176.517	-485.827.082		2.316.871.551	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Wonokromo					2.310.349.435	2.310.349.435	2.796.176.517	-485.827.082		2.316.871.551	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.310.349.435	2.310.349.435	2.796.176.517	-485.827.082	1 Unit Kerja	2.316.871.551	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.310.349.435	2.310.349.435	2.796.176.517	-485.827.082		2.316.871.551	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.310.349.435	2.310.349.435	2.796.176.517	-485.827.082	1 Unit Kerja	2.316.871.551	Puskesmas Wonokromo
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					763.544.307	876.546.488	949.154.488	-185.610.181		807.995.316	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	763.544.307	876.546.488	949.154.488	-185.610.181	91%	807.995.316	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	763.544.307	876.546.488	949.154.488	-185.610.181	4 per 1.000 kelahiran hidup	807.995.316	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	763.544.307	876.546.488	949.154.488	-185.610.181	80%	807.995.316	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	763.544.307	876.546.488	949.154.488	-185.610.181	98,70 %	807.995.316	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	763.544.307	876.546.488	949.154.488	-185.610.181	82%	807.995.316	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	763.544.307	876.546.488	949.154.488	-185.610.181	40%	807.995.316	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	763.544.307	876.546.488	949.154.488	-185.610.181	100%	807.995.316	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	763.544.307	876.546.488	949.154.488	-185.610.181	95,45%	807.995.316	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	763.544.307	876.546.488	949.154.488	-185.610.181	90,75 %	807.995.316	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	763.544.307	876.546.488	949.154.488	-185.610.181	0,58 %	807.995.316	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	763.544.307	876.546.488	949.154.488	-185.610.181	12%	807.995.316	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	763.544.307	876.546.488	949.154.488	-185.610.181	21,6 %	807.995.316	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	763.544.307	876.546.488	949.154.488	-185.610.181	1,92 %	807.995.316	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	763.544.307	876.546.488	949.154.488	-185.610.181	80%	807.995.316	
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	763.544.307	876.546.488	949.154.488	-185.610.181	69%	807.995.316	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	763.544.307	876.546.488	949.154.488	-185.610.181	100%	807.995.316	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543		2.423.985.948	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Wonokromo					2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543		2.423.985.948	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5354 Orang	5898 Orang	4936 Orang	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	5769 Orang	2.423.985.948	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	12 Laporan	2.423.985.948	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	12 Dokumen	2.423.985.948	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	12 Dokumen	2.423.985.948	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	12 Dokumen	2.423.985.948	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	12 Dokumen	2.423.985.948	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	12 Dokumen	2.423.985.948	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	12 Dokumen	2.423.985.948	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	12 Dokumen	2.423.985.948	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	497 Orang	517 Orang	529 Orang	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	512 Orang	2.423.985.948	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	564 Orang	914 Orang	808 Orang	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	784 Orang	2.423.985.948	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang	76 Orang	73 Orang	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	77 Orang	2.423.985.948	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Wonokromo					2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543		2.423.985.948	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5354 Orang	5898 Orang	4936 Orang	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	5769 Orang	2.423.985.948	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	12 Laporan	2.423.985.948	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	12 Dokumen	2.423.985.948	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	12 Dokumen	2.423.985.948	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	12 Dokumen	2.423.985.948	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	12 Dokumen	2.423.985.948	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	12 Dokumen	2.423.985.948	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	12 Dokumen	2.423.985.948	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	12 Dokumen	2.423.985.948	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	497 Orang	517 Orang	529 Orang	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	512 Orang	2.423.985.948	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	564 Orang	914 Orang	808 Orang	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	784 Orang	2.423.985.948	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang	76 Orang	73 Orang	2.290.632.921	2.629.639.464	2.847.463.464	-556.830.543	77 Orang	2.423.985.948	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					24.836.170	31.944.000	31.944.000	-7.107.830		26.477.840	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	497 Orang	517 Orang	529 Orang	24.836.170	31.944.000	31.944.000	-7.107.830	512 Orang	26.477.840	Puskesmas Wonokromo
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					2.824.166	13.890.000	10.500.000	-7.675.834		3.021.830	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5354 Orang	5898 Orang	4936 Orang	2.824.166	13.890.000	10.500.000	-7.675.834	5769 Orang	3.021.830	Puskesmas Wonokromo
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					4.409.100	2.700.000	3.600.000	809.100		4.717.737	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang	76 Orang	73 Orang	4.409.100	2.700.000	3.600.000	809.100	77 Orang	4.717.737	Puskesmas Wonokromo
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					20.300.040	18.072.000	14.160.000	6.140.040		21.721.043	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	564 Orang	914 Orang	808 Orang	20.300.040	18.072.000	14.160.000	6.140.040	784 Orang	21.721.043	Puskesmas Wonokromo
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					290.445.405	180.080.400	226.819.400	63.626.005		310.776.584	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	290.445.405	180.080.400	226.819.400	63.626.005	12 Dokumen	310.776.584	Puskesmas Wonokromo
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					299.488	750.000	2.700.000	-2.400.512		320.392	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.488	750.000	2.700.000	-2.400.512	12 Dokumen	320.392	Puskesmas Wonokromo
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					3.436.730	3.214.000	3.004.000	432.730		3.676.614	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.436.730	3.214.000	3.004.000	432.730	12 Dokumen	3.676.614	Puskesmas Wonokromo
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					91.350.180	58.212.000	15.270.000	76.080.180		97.744.693	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	91.350.180	58.212.000	15.270.000	76.080.180	12 Laporan	97.744.693	Puskesmas Wonokromo
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					312.379.757	565.621.588	639.094.588	-326.714.831		325.337.269	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	312.379.757	565.621.588	639.094.588	-326.714.831	12 Dokumen	325.337.269	Puskesmas Wonokromo
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.323.676	825.000	825.000	1.498.676		2.455.661	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.323.676	825.000	825.000	1.498.676	12 Dokumen	2.455.661	Puskesmas Wonokromo
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					2.721.995	687.500	687.500	2.034.495		2.952.821	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.721.995	687.500	687.500	2.034.495	12 Dokumen	2.952.821	Puskesmas Wonokromo
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					8.217.600	550.000	550.000	7.667.600		8.792.832	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.217.600	550.000	550.000	7.667.600	12 Dokumen	8.792.832	Puskesmas Wonokromo
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.634.695	825.000	9.609.600	-5.974.905		3.903.662	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	3.634.695	825.000	9.609.600	-5.974.905	68%	3.903.662	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.634.695	825.000	9.609.600	-5.974.905		3.903.662	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Wonokromo					3.634.695	825.000	9.609.600	-5.974.905		3.903.662	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.634.695	825.000	9.609.600	-5.974.905	12 Dokumen	3.903.662	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3.634.695	825.000	9.609.600	-5.974.905		3.903.662	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.634.695	825.000	9.609.600	-5.974.905	12 Dokumen	3.903.662	Puskesmas Wonokromo
	Puskesmas Wonokusumo					5.594.413.765	7.645.843.931	8.949.645.256	-3.355.231.491		5.687.247.895	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.594.413.765	5.594.413.765	8.949.645.256	-3.355.231.491		5.687.247.895	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					5.594.413.765	7.645.843.931	8.949.645.256	-3.355.231.491		5.687.247.895	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.041.097.536	4.041.097.536	5.355.818.861	-1.314.721.325		4.052.722.907	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	89,96%	89,96%	4.041.097.536	4.041.097.536	5.355.818.861	-1.314.721.325	89,97 %	4.052.722.907	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					4.041.097.536	4.041.097.536	5.355.818.861	-1.314.721.325		4.052.722.907	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan BLUD di FKTP milik Pemerintah Daerah pada Puskesmas Wonokusumo					4.041.097.536	4.041.097.536	5.355.818.861	-1.314.721.325		4.052.722.907	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.041.097.536	4.041.097.536	5.355.818.861	-1.314.721.325	1 Unit Kerja	4.052.722.907	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					4.041.097.536	4.041.097.536	5.355.818.861	-1.314.721.325		4.052.722.907	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.041.097.536	4.041.097.536	5.355.818.861	-1.314.721.325	1 Unit Kerja	4.052.722.907	Puskesmas Wonokusumo
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.548.286.964	3.603.921.395	3.585.487.295	-2.037.200.331		1.629.129.848	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	91,50 %	90,90%	90,90%	1.548.286.964	3.603.921.395	3.585.487.295	-2.037.200.331	91%	1.629.129.848	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,97 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	4.01 per 1.000 kelahiran hidup	1.548.286.964	3.603.921.395	3.585.487.295	-2.037.200.331	4 per 1.000 kelahiran hidup	1.629.129.848	
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80%	80%	80%	1.548.286.964	3.603.921.395	3.585.487.295	-2.037.200.331	80%	1.629.129.848	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98,70 %	98,70%	99,30%	1.548.286.964	3.603.921.395	3.585.487.295	-2.037.200.331	98,70 %	1.629.129.848	
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90%	79%	79%	1.548.286.964	3.603.921.395	3.585.487.295	-2.037.200.331	82%	1.629.129.848	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	46%	38%	38%	1.548.286.964	3.603.921.395	3.585.487.295	-2.037.200.331	40%	1.629.129.848	
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100%	100%	1.548.286.964	3.603.921.395	3.585.487.295	-2.037.200.331	100%	1.629.129.848	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	98,41%	95,45%	95,45%	1.548.286.964	3.603.921.395	3.585.487.295	-2.037.200.331	95,45%	1.629.129.848	
		Presentase lanjut usia yang mandiri	92%	90,50%	90,50%	1.548.286.964	3.603.921.395	3.585.487.295	-2.037.200.331	90,75 %	1.629.129.848	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0,55 %	0,59%	0,59%	1.548.286.964	3.603.921.395	3.585.487.295	-2.037.200.331	0,58 %	1.629.129.848	
		Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4 %	12,20%	12,20%	1.548.286.964	3.603.921.395	3.585.487.295	-2.037.200.331	12%	1.629.129.848	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 Tahun	21,3 %	21,70%	21,70%	1.548.286.964	3.603.921.395	3.585.487.295	-2.037.200.331	21,6 %	1.629.129.848	
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	1,62 %	2,02%	2,02%	1.548.286.964	3.603.921.395	3.585.487.295	-2.037.200.331	1,92 %	1.629.129.848	
		Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	83%	79%	79%	1.548.286.964	3.603.921.395	3.585.487.295	-2.037.200.331	80%	1.629.129.848	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	76%	68%	68%	1.548.286.964	3.603.921.395	3.585.487.295	-2.037.200.331	69%	1.629.129.848	
		Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	100%	100%	100%	1.548.286.964	3.603.921.395	3.585.487.295	-2.037.200.331	100%	1.629.129.848	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993		4.887.389.544	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil termasuk Ibu Hamil KEK di wilayah kerja Puskesmas Wonokusumo					4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993		4.887.389.544	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10409 Orang	11616 Orang	9926 Orang	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	11478 Orang	4.887.389.544	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	12 Laporan	4.887.389.544	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	12 Dokumen	4.887.389.544	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	12 Dokumen	4.887.389.544	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	12 Dokumen	4.887.389.544	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	12 Dokumen	4.887.389.544	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	12 Dokumen	4.887.389.544	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	12 Dokumen	4.887.389.544	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	12 Dokumen	4.887.389.544	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	965 Orang	913 Orang	1000 Orang	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	910 Orang	4.887.389.544	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	825 Orang	1576 Orang	1396 Orang	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	1286 Orang	4.887.389.544	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	105 Orang	150 Orang	125 Orang	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	100 Orang	4.887.389.544	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita termasuk Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Wonokusumo					4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993		4.887.389.544	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10409 Orang	11616 Orang	9926 Orang	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	11478 Orang	4.887.389.544	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	12 Laporan	4.887.389.544	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	12 Dokumen	4.887.389.544	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	12 Dokumen	4.887.389.544	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	12 Dokumen	4.887.389.544	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	12 Dokumen	4.887.389.544	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	12 Dokumen	4.887.389.544	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	12 Dokumen	4.887.389.544	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	12 Dokumen	4.887.389.544	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	965 Orang	913 Orang	1000 Orang	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	910 Orang	4.887.389.544	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	825 Orang	1576 Orang	1396 Orang	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	1286 Orang	4.887.389.544	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	105 Orang	150 Orang	125 Orang	4.644.860.892	10.811.764.185	10.756.461.885	-6.111.600.993	100 Orang	4.887.389.544	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					24.865.463	31.944.000	31.944.000	-7.078.537		26.465.287	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	965 Orang	913 Orang	1000 Orang	24.865.463	31.944.000	31.944.000	-7.078.537	910 Orang	26.465.287	Puskesmas Wonokusumo
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					3.277.249	31.200.000	10.920.000	-7.642.751		3.518.847	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10409 Orang	11616 Orang	9926 Orang	3.277.249	31.200.000	10.920.000	-7.642.751	11478 Orang	3.518.847	Puskesmas Wonokusumo
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					5.751.000	2.700.000	2.700.000	3.051.000		6.139.168	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	105 Orang	150 Orang	125 Orang	5.751.000	2.700.000	2.700.000	3.051.000	100 Orang	6.139.168	Puskesmas Wonokusumo
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					19.008.480	17.712.000	16.870.000	2.138.480		20.339.842	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	825 Orang	1576 Orang	1396 Orang	19.008.480	17.712.000	16.870.000	2.138.480	1286 Orang	20.339.842	Puskesmas Wonokusumo
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					378.912.026	782.898.000	832.007.900	-453.095.874		405.578.552	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	378.912.026	782.898.000	832.007.900	-453.095.874	12 Dokumen	405.578.552	Puskesmas Wonokusumo
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2.774.168	1.170.000	2.700.000	74.168		2.978.717	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.774.168	1.170.000	2.700.000	74.168	12 Dokumen	2.978.717	Puskesmas Wonokusumo
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					3.199.262	2.944.000	3.514.000	-314.738		3.439.159	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.199.262	2.944.000	3.514.000	-314.738	12 Dokumen	3.439.159	Puskesmas Wonokusumo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					124.843.144	61.950.000	10.380.000	114.463.144		133.594.422	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	124.843.144	61.950.000	10.380.000	114.463.144	12 Laporan	133.594.422	Puskesmas Wonokusumo
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					971.630.719	2.668.515.895	2.671.563.895	-1.699.933.176		1.012.052.840	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	971.630.719	2.668.515.895	2.671.563.895	-1.699.933.176	12 Dokumen	1.012.052.840	Puskesmas Wonokusumo
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2.425.422	1.650.000	1.650.000	775.422		2.570.557	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.425.422	1.650.000	1.650.000	775.422	12 Dokumen	2.570.557	Puskesmas Wonokusumo
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					3.905.631	687.500	687.500	3.218.131		4.232.049	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.905.631	687.500	687.500	3.218.131	12 Dokumen	4.232.049	Puskesmas Wonokusumo
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan					7.694.400	550.000	550.000	7.144.400		8.220.408	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.694.400	550.000	550.000	7.144.400	12 Dokumen	8.220.408	Puskesmas Wonokusumo
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					5.029.265	825.000	8.339.100	-3.309.835		5.395.140	
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	80%	65%	65%	5.029.265	825.000	8.339.100	-3.309.835	68%	5.395.140	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5.029.265	825.000	8.339.100	-3.309.835		5.395.140	
	Meningkatnya upaya kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat pada Puskesmas Wonokusumo					5.029.265	825.000	8.339.100	-3.309.835		5.395.140	
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.029.265	825.000	8.339.100	-3.309.835	12 Dokumen	5.395.140	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					5.029.265	825.000	8.339.100	-3.309.835		5.395.140	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.029.265	825.000	8.339.100	-3.309.835	12 Dokumen	5.395.140	Puskesmas Wonokusumo
	RSUD Bhakti Dharma Husada					303.615.599.349	300.161.033.969	349.742.490.050	-46.126.890.701		309.695.371.612	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					303.615.599.349	303.615.599.349	349.742.490.050	-46.126.890.701		309.695.371.612	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					303.615.599.349	300.161.033.969	349.742.490.050	-46.126.890.701		309.695.371.612	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					266.832.691.429	254.448.377.574	304.029.833.655	-37.197.142.226		270.679.557.414	
		Persentase capaian SPM RSUD Bhakti Dharma Husada	96,02 %	95,98%	95,98%	266.832.691.429	254.448.377.574	304.029.833.655	-37.197.142.226	95,99 %	270.679.557.414	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Bhakti Dharma Husada	92,81 %	92,41%	99%	266.832.691.429	254.448.377.574	304.029.833.655	-37.197.142.226	92,51 %	270.679.557.414	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					89.228.180.229	76.843.866.374	69.208.848.822	20.019.331.407		89.948.267.014	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					89.228.180.229	76.843.866.374	69.208.848.822	20.019.331.407		89.948.267.014	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	550 Orang/bulan	510 Orang/bulan	510 Orang/bulan	89.228.180.229	76.843.866.374	69.208.848.822	20.019.331.407	520 Orang/bulan	89.948.267.014	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					89.228.180.229	76.843.866.374	69.208.848.822	20.019.331.407		89.948.267.014	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	550 Orang/bulan	510 Orang/bulan	510 Orang/bulan	89.228.180.229	76.843.866.374	69.208.848.822	20.019.331.407	520 Orang/bulan	89.948.267.014	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					177.604.511.200	177.604.511.200	234.820.984.833	-57.216.473.633		180.731.290.400	
	Meningkatnya pelayanan dan penunjang BLUD RSUD Bhakti Dharma Husada					177.604.511.200	177.604.511.200	234.820.984.833	-57.216.473.633		180.731.290.400	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	177.604.511.200	177.604.511.200	234.820.984.833	-57.216.473.633	1 Unit Kerja	180.731.290.400	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					177.604.511.200	177.604.511.200	234.820.984.833	-57.216.473.633		180.731.290.400	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	177.604.511.200	177.604.511.200	234.820.984.833	-57.216.473.633	1 Unit Kerja	180.731.290.400	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					36.782.907.920	45.712.656.395	45.712.656.395	-8.929.748.475		39.015.814.198	
		Persentase ketersediaan SDM pada RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan standar	92%	89,50%	89,47 %	36.782.907.920	45.712.656.395	45.712.656.395	-8.929.748.475	90,5 %	39.015.814.198	
		Persentase sarana prasarana Rumah Sakit sesuai standar dalam kondisi baik	100%	100%	100%	36.782.907.920	45.712.656.395	45.712.656.395	-8.929.748.475	100%	39.015.814.198	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					73.565.815.840	91.425.312.790	91.425.312.790	-17.859.496.950		78.031.628.396	
	Terpenuhinya sarana prasarana pada RSUD Bhakti Dharma Husada					73.565.815.840	91.425.312.790	91.425.312.790	-17.859.496.950		78.031.628.396	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 Unit	103 Unit	119 Unit	73.565.815.840	91.425.312.790	91.425.312.790	-17.859.496.950	16 Unit	78.031.628.396	
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	73.565.815.840	91.425.312.790	91.425.312.790	-17.859.496.950	1 Unit	78.031.628.396	
	Terpenuhinya SDM pada RSUD Bhakti Dharma Husada					73.565.815.840	91.425.312.790	91.425.312.790	-17.859.496.950		78.031.628.396	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 Unit	103 Unit	119 Unit	73.565.815.840	91.425.312.790	91.425.312.790	-17.859.496.950	16 Unit	78.031.628.396	
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	73.565.815.840	91.425.312.790	91.425.312.790	-17.859.496.950	1 Unit	78.031.628.396	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					3.114.100.000	32.787.040.175	32.787.040.175	-29.672.940.175		3.587.019.731	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 Unit	103 Unit	119 Unit	3.114.100.000	32.787.040.175	32.787.040.175	-29.672.940.175	16 Unit	3.587.019.731	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit					33.668.807.920	12.925.616.220	12.925.616.220	20.743.191.700		35.428.794.467	
	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	33.668.807.920	12.925.616.220	12.925.616.220	20.743.191.700	1 Unit	35.428.794.467	RSUD Bhakti Dharma Husada
	RSUD dr. Mohamad Soewandhie					421.743.778.195	422.334.928.317	457.196.404.563	-35.452.626.368		429.942.193.628	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					421.743.778.195	421.743.778.195	457.196.404.563	-35.452.626.368		429.942.193.628	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					421.743.778.195	422.334.928.317	457.196.404.563	-35.452.626.368		429.942.193.628	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					417.288.021.975	418.177.587.321	453.039.063.567	-35.751.041.592		424.258.723.356	
		Persentase Capaian SPM RSUD dr. Mohamad Soewandhie	89,89 %	88,89%	88,89%	417.288.021.975	418.177.587.321	453.039.063.567	-35.751.041.592	88,89 %	424.258.723.356	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Dokter Mohamad Soewandhie	91,8 %	91,40%	93,63 %	417.288.021.975	418.177.587.321	453.039.063.567	-35.751.041.592	91,5 %	424.258.723.356	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					138.782.429.415	117.599.623.845	112.370.967.544	26.411.461.871		139.906.811.129	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					138.782.429.415	117.599.623.845	112.370.967.544	26.411.461.871		139.906.811.129	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	799 Orang/bulan	799 Orang/bulan	799 Orang/bulan	138.782.429.415	117.599.623.845	112.370.967.544	26.411.461.871	799 Orang/bulan	139.906.811.129	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					138.782.429.415	117.599.623.845	112.370.967.544	26.411.461.871		139.906.811.129	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	799 Orang/bulan	799 Orang/bulan	799 Orang/bulan	138.782.429.415	117.599.623.845	112.370.967.544	26.411.461.871	799 Orang/bulan	139.906.811.129	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					278.505.592.560	300.577.963.476	340.668.096.023	-62.162.503.463		284.351.912.227	
	Meningkatnya pelayanan dan penunjang BLUD RSUD dr. Mohamad Soewandhie					278.505.592.560	300.577.963.476	340.668.096.023	-62.162.503.463		284.351.912.227	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	278.505.592.560	300.577.963.476	340.668.096.023	-62.162.503.463	1 Unit Kerja	284.351.912.227	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					278.505.592.560	300.577.963.476	340.668.096.023	-62.162.503.463		284.351.912.227	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	278.505.592.560	300.577.963.476	340.668.096.023	-62.162.503.463	1 Unit Kerja	284.351.912.227	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					4.455.756.220	4.157.340.996	4.157.340.996	298.415.224		5.683.470.272	
		Persentase ketersediaan SDM pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan standar	93,50%	89,50%	94,73 %	4.455.756.220	4.157.340.996	4.157.340.996	298.415.224	91%	5.683.470.272	
		Persentase Sarana Prasarana rumah sakit sesuai standar dalam kondisi baik	100%	100%	100%	4.455.756.220	4.157.340.996	4.157.340.996	298.415.224	100%	5.683.470.272	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					4.455.756.220	4.157.340.996	4.157.340.996	298.415.224		5.683.470.272	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terpenuhinya sarana prasarana dan SDM pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie					4.455.756.220	4.157.340.996	4.157.340.996	298.415.224		5.683.470.272	
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.455.756.220	4.157.340.996	4.157.340.996	298.415.224	1 Unit	5.683.470.272	
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit					4.455.756.220	4.157.340.996	4.157.340.996	298.415.224		5.683.470.272	
	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.455.756.220	4.157.340.996	4.157.340.996	298.415.224	1 Unit	5.683.470.272	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
	RSUD Eka Candrarini					214.879.566.280	214.819.929.179	224.299.712.602	-9.420.146.322		218.894.770.028	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					214.879.566.280	214.879.566.280	224.299.712.602	-9.420.146.322		218.894.770.028	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					214.879.566.280	214.819.929.179	224.299.712.602	-9.420.146.322		218.894.770.028	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					147.041.812.432	149.148.374.448	159.477.821.875	-12.436.009.443		151.208.450.474	
		Persentase Capaian SPM RSUD Eka Candrarini	96,96 %	95,95%	95,95%	147.041.812.432	149.148.374.448	159.477.821.875	-12.436.009.443	95,95 %	151.208.450.474	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan RSUD Eka Candrarini	85,50 %	85,10%	85,10%	147.041.812.432	149.148.374.448	159.477.821.875	-12.436.009.443	85,20 %	151.208.450.474	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					75.827.183.985	93.190.305.793	88.193.872.516	-12.366.688.531		76.366.078.175	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					75.827.183.985	93.190.305.793	88.193.872.516	-12.366.688.531		76.366.078.175	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	475 Orang/bulan	475 Orang/bulan	479 Orang/bulan	75.827.183.985	93.190.305.793	88.193.872.516	-12.366.688.531	475 Orang/bulan	76.366.078.175	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					75.827.183.985	93.190.305.793	88.193.872.516	-12.366.688.531		76.366.078.175	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	475 Orang/bulan	475 Orang/bulan	479 Orang/bulan	75.827.183.985	93.190.305.793	88.193.872.516	-12.366.688.531	475 Orang/bulan	76.366.078.175	RSUD Eka Candrarini
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.339.628.447	20.083.068.655	19.785.758.044	15.553.870.403		35.379.872.299	
	Meningkatnya Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran					35.339.628.447	20.083.068.655	19.785.758.044	15.553.870.403		35.379.872.299	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	35.339.628.447	20.083.068.655	19.785.758.044	15.553.870.403	12 Laporan	35.379.872.299	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					35.339.628.447	20.083.068.655	19.785.758.044	15.553.870.403		35.379.872.299	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	35.339.628.447	20.083.068.655	19.785.758.044	15.553.870.403	12 Laporan	35.379.872.299	RSUD Eka Candrarini
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					35.875.000.000	35.875.000.000	51.498.191.315	-15.623.191.315		39.462.500.000	
	Meningkatnya pelayanan dan penunjang BLUD RSUD Eka Candrarini					35.875.000.000	35.875.000.000	51.498.191.315	-15.623.191.315		39.462.500.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	35.875.000.000	35.875.000.000	51.498.191.315	-15.623.191.315	1 Unit Kerja	39.462.500.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					35.875.000.000	35.875.000.000	51.498.191.315	-15.623.191.315		39.462.500.000	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	35.875.000.000	35.875.000.000	51.498.191.315	-15.623.191.315	1 Unit Kerja	39.462.500.000	RSUD Eka Candrarini
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					67.837.753.848	65.671.554.731	64.821.890.727	3.015.863.121		67.686.319.554	
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100%	100%	100%	67.837.753.848	65.671.554.731	64.821.890.727	3.015.863.121	100%	67.686.319.554	
		Persentase ketersediaan SDM pada RSUD Eka Candrarini sesuai dengan standar	89%	82%	82%	67.837.753.848	65.671.554.731	64.821.890.727	3.015.863.121	85%	67.686.319.554	
		Persentase Sarana Prasarana rumah sakit sesuai standar dalam kondisi baik	100%	100%	100%	67.837.753.848	65.671.554.731	64.821.890.727	3.015.863.121	100%	67.686.319.554	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					135.675.507.696	131.343.109.462	129.643.781.454	6.031.726.242		135.372.639.108	
	Terpenuhinya sarana prasarana pada RSUD Eka Candrarini					135.675.507.696	131.343.109.462	129.643.781.454	6.031.726.242		135.372.639.108	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	588 Unit	788 Unit	135.675.507.696	131.343.109.462	129.643.781.454	6.031.726.242	15 Unit	135.372.639.108	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	135.675.507.696	131.343.109.462	129.643.781.454	6.031.726.242	5 Paket	135.372.639.108	
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	135.675.507.696	131.343.109.462	129.643.781.454	6.031.726.242	1 Unit	135.372.639.108	
	Terpenuhinya SDM pada RSUD Eka Candrarini					135.675.507.696	131.343.109.462	129.643.781.454	6.031.726.242		135.372.639.108	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	588 Unit	788 Unit	135.675.507.696	131.343.109.462	129.643.781.454	6.031.726.242	15 Unit	135.372.639.108	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	135.675.507.696	131.343.109.462	129.643.781.454	6.031.726.242	5 Paket	135.372.639.108	
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	135.675.507.696	131.343.109.462	129.643.781.454	6.031.726.242	1 Unit	135.372.639.108	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					55.253.465.247	38.661.561.256	46.772.930.703	8.480.534.544		49.802.030.952	
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	588 Unit	788 Unit	55.253.465.247	38.661.561.256	46.772.930.703	8.480.534.544	15 Unit	49.802.030.952	RSUD Eka Candrarini
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit					624.000.000	2.510.135.705	2.510.135.705	-1.886.135.705		624.000.000	
	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	624.000.000	2.510.135.705	2.510.135.705	-1.886.135.705	1 Unit	624.000.000	RSUD Eka Candrarini
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					11.960.288.601	24.499.857.770	15.538.824.319	-3.578.535.718		17.260.288.602	
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	11.960.288.601	24.499.857.770	15.538.824.319	-3.578.535.718	5 Paket	17.260.288.602	RSUD Eka Candrarini
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan					404.225.111.251	432.059.797.968	533.266.715.370	-129.041.604.119		434.779.402.323	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					343.723.711.251	343.723.711.251	464.523.053.367	-120.799.342.116		351.502.712.244	
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					213.039.442.999	218.796.058.041	310.912.385.043	-97.872.942.044		215.421.954.796	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					205.294.061.909	211.548.022.455	303.574.444.745	-98.280.382.836		208.934.790.734	
		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	94,37 %	91,39%	91,39%	205.294.061.909	211.548.022.455	303.574.444.745	-98.280.382.836	92,88 %	208.934.790.734	
		Persentase bangunan yang ber IMB/PBG	2,18 %	2,01%	2,17 %	205.294.061.909	211.548.022.455	303.574.444.745	-98.280.382.836	2,05 %	208.934.790.734	
		Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	205.294.061.909	211.548.022.455	303.574.444.745	-98.280.382.836	100%	208.934.790.734	
		Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	80%	75%	100%	205.294.061.909	211.548.022.455	303.574.444.745	-98.280.382.836	80%	208.934.790.734	
		Persentase penyelesaian perizinan bangunan	83%	83%	83%	205.294.061.909	211.548.022.455	303.574.444.745	-98.280.382.836	83%	208.934.790.734	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672		417.869.581.468	
	Meningkatnya pelayanan tata bangunan gedung					410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672		417.869.581.468	
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	148 Bangunan Gedung	100 Bangunan Gedung	100 Bangunan Gedung	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	142 Bangunan Gedung	417.869.581.468	
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	165 Bangunan Gedung	161 Bangunan Gedung	161 Bangunan Gedung	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	162 Bangunan Gedung	417.869.581.468	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	2 Dokumen	417.869.581.468	
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	63 Bangunan Gedung	50 Dokumen	50 Dokumen	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	59 Bangunan Gedung	417.869.581.468	
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	1 Dokumen	417.869.581.468	
		Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	2124 Orang	2124 Orang	2124 Orang	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	2124 Orang	417.869.581.468	
	Terlaksananya pemeliharaan dan pembangunan gedung daerah					410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672		417.869.581.468	
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	148 Bangunan Gedung	100 Bangunan Gedung	100 Bangunan Gedung	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	142 Bangunan Gedung	417.869.581.468	
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	165 Bangunan Gedung	161 Bangunan Gedung	161 Bangunan Gedung	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	162 Bangunan Gedung	417.869.581.468	
		Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	2 Dokumen	417.869.581.468	
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	63 Bangunan Gedung	50 Dokumen	50 Dokumen	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	59 Bangunan Gedung	417.869.581.468	
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	1 Dokumen	417.869.581.468	
		Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	2124 Orang	2124 Orang	2124 Orang	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	2124 Orang	417.869.581.468	
	Meningkatnya pengawasan bangunan berizin					410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672		417.869.581.468	
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	148 Bangunan Gedung	100 Bangunan Gedung	100 Bangunan Gedung	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	142 Bangunan Gedung	417.869.581.468	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	165 Bangunan Gedung	161 Bangunan Gedung	161 Bangunan Gedung	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	162 Bangunan Gedung	417.869.581.468	
		Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	2 Dokumen	417.869.581.468	
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	63 Bangunan Gedung	50 Dokumen	50 Dokumen	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	59 Bangunan Gedung	417.869.581.468	
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	1 Dokumen	417.869.581.468	
		Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	2124 Orang	2124 Orang	2124 Orang	410.588.123.818	423.096.044.910	607.148.889.490	-196.560.765.672	2124 Orang	417.869.581.468	
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					159.464.981.166	165.413.518.696	252.355.841.820	-92.890.860.654		163.951.725.848	
	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	148 Bangunan Gedung	100 Bangunan Gedung	100 Bangunan Gedung	159.464.981.166	165.413.518.696	252.355.841.820	-92.890.860.654	142 Bangunan Gedung	163.951.725.848	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					36.002.986.755	36.002.986.755	39.858.085.921	-3.855.099.166		35.010.754.595	
	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	165 Bangunan Gedung	161 Bangunan Gedung	161 Bangunan Gedung	36.002.986.755	36.002.986.755	39.858.085.921	-3.855.099.166	162 Bangunan Gedung	35.010.754.595	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung					422.600.000	568.186.163	576.186.163	-153.586.163		422.600.000	
	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	422.600.000	568.186.163	576.186.163	-153.586.163	2 Dokumen	422.600.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					5.573.496.922	5.546.484.100	6.546.484.100	-972.987.178		5.712.834.345	
	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	63 Bangunan Gedung	50 Dokumen	50 Dokumen	5.573.496.922	5.546.484.100	6.546.484.100	-972.987.178	59 Bangunan Gedung	5.712.834.345	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung					1.533.499.273	1.801.866.304	1.974.866.304	-441.367.031		1.537.626.601	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	2124 Orang	2124 Orang	2124 Orang	1.533.499.273	1.801.866.304	1.974.866.304	-441.367.031	2124 Orang	1.537.626.601	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					2.296.497.793	2.214.980.437	2.262.980.437	33.517.356		2.299.249.345	
	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.296.497.793	2.214.980.437	2.262.980.437	33.517.356	1 Dokumen	2.299.249.345	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					547.012.061	498.198.443	512.103.155	34.908.906		557.345.661	
		Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkompeten	100%	100%	100%	547.012.061	498.198.443	512.103.155	34.908.906	100%	557.345.661	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					547.012.061	498.198.443	512.103.155	34.908.906		557.345.661	
	Meningkatnya pembinaan kepada pelaku jasa konstruksi					547.012.061	498.198.443	512.103.155	34.908.906		557.345.661	
		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	547.012.061	498.198.443	512.103.155	34.908.906	20 Lembaga	557.345.661	
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi					547.012.061	498.198.443	512.103.155	34.908.906		557.345.661	
	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	547.012.061	498.198.443	512.103.155	34.908.906	20 Lembaga	557.345.661	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					7.198.369.029	6.749.837.143	6.825.837.143	372.531.886		5.929.818.401	
		Persentase kepatuhan terhadap implementasi perencanaan dan pelaksaaan pemanfaatan tata ruang	96%	96%	96%	7.198.369.029	6.749.837.143	6.825.837.143	372.531.886	96%	5.929.818.401	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					1.990.733.011	1.570.610.479	1.574.610.479	416.122.532		3.522.367.167	
	Meningkatnya perencanaan tata ruang					1.990.733.011	1.570.610.479	1.574.610.479	416.122.532		3.522.367.167	
		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.990.733.011	1.570.610.479	1.574.610.479	416.122.532	2 Dokumen	3.522.367.167	
		Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.990.733.011	1.570.610.479	1.574.610.479	416.122.532	0 Dokumen	3.522.367.167	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang					1.240.733.011	803.810.479	807.810.479	432.922.532		3.522.367.167	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.240.733.011	803.810.479	807.810.479	432.922.532	2 Dokumen	3.522.367.167	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota					750.000.000	766.800.000	766.800.000	-16.800.000		0	
	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000	766.800.000	766.800.000	-16.800.000	0 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					3.000.000.000	3.017.960.080	3.017.960.080	-17.960.080		0	
	Meningkatnya sinkronisasi penyelenggaraan tata ruang					3.000.000.000	3.017.960.080	3.017.960.080	-17.960.080		0	
		Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000.000	3.017.960.080	3.017.960.080	-17.960.080	0 Dokumen	0	
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota					3.000.000.000	3.017.960.080	3.017.960.080	-17.960.080		0	
	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000.000	3.017.960.080	3.017.960.080	-17.960.080	0 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					2.207.636.018	2.161.266.584	2.233.266.584	-25.630.566		2.407.451.234	
	Meningkatnya pelayanan tata ruang					2.207.636.018	2.161.266.584	2.233.266.584	-25.630.566		2.407.451.234	
		Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.207.636.018	2.161.266.584	2.233.266.584	-25.630.566	2 Dokumen	2.407.451.234	
		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	2.207.636.018	2.161.266.584	2.233.266.584	-25.630.566	1 Sistem Informasi	2.407.451.234	
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang					918.022.901	1.010.378.004	1.054.378.004	-136.355.103		1.114.398.677	
	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	918.022.901	1.010.378.004	1.054.378.004	-136.355.103	2 Dokumen	1.114.398.677	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang					1.289.613.117	1.150.888.580	1.178.888.580	110.724.537		1.293.052.557	
	Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1.289.613.117	1.150.888.580	1.178.888.580	110.724.537	1 Sistem Informasi	1.293.052.557	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					130.684.268.252	152.734.608.259	153.610.668.324	-22.926.400.072		136.080.757.448	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.765.080.625	39.150.708.901	40.581.601.220	-1.816.520.595		42.046.419.115	
		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	98%	96%	96%	38.765.080.625	39.150.708.901	40.581.601.220	-1.816.520.595	96,50%	42.046.419.115	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					41.600.000	26.483.840	26.483.840	15.116.160		39.000.000	
	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah					41.600.000	26.483.840	26.483.840	15.116.160		39.000.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	41.600.000	26.483.840	26.483.840	15.116.160	8 Dokumen	39.000.000	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					41.600.000	26.483.840	26.483.840	15.116.160		39.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	41.600.000	26.483.840	26.483.840	15.116.160	8 Dokumen	39.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					31.588.187.307	31.592.516.012	32.992.115.529	-1.403.928.222		31.830.924.353	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					31.588.187.307	31.592.516.012	32.992.115.529	-1.403.928.222		31.830.924.353	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	31.588.187.307	31.592.516.012	32.992.115.529	-1.403.928.222	110 Orang/bulan	31.830.924.353	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					31.588.187.307	31.592.516.012	32.992.115.529	-1.403.928.222		31.830.924.353	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	31.588.187.307	31.592.516.012	32.992.115.529	-1.403.928.222	110 Orang/bulan	31.830.924.353	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					5.212.316.222	5.711.577.018	5.742.869.820	-530.553.598		7.651.293.519	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					5.212.316.222	5.711.577.018	5.742.869.820	-530.553.598		7.651.293.519	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	8 Paket	8 Paket	5.212.316.222	5.711.577.018	5.742.869.820	-530.553.598	13 Paket	7.651.293.519	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.212.316.222	5.711.577.018	5.742.869.820	-530.553.598		7.651.293.519	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	8 Paket	8 Paket	5.212.316.222	5.711.577.018	5.742.869.820	-530.553.598	13 Paket	7.651.293.519	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.922.977.096	1.820.132.031	1.820.132.031	102.845.065		2.525.201.243	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					1.922.977.096	1.820.132.031	1.820.132.031	102.845.065		2.525.201.243	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	73 Unit	73 Unit	1.922.977.096	1.820.132.031	1.820.132.031	102.845.065	73 Unit	2.525.201.243	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1.922.977.096	1.820.132.031	1.820.132.031	102.845.065		2.525.201.243	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	73 Unit	73 Unit	1.922.977.096	1.820.132.031	1.820.132.031	102.845.065	73 Unit	2.525.201.243	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					90.512.878.425	112.150.202.195	111.549.647.740	-21.036.769.315		92.620.256.148	
		Persentase penyediaan rumah layak huni	100%	100%	100%	90.512.878.425	112.150.202.195	111.549.647.740	-21.036.769.315	100%	92.620.256.148	
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	90.512.878.425	112.150.202.195	111.549.647.740	-21.036.769.315	100%	92.620.256.148	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					90.512.878.425	112.150.202.195	111.549.647.740	-21.036.769.315		92.620.256.148	
	Meningkatnya pembangunan dan /atau rehabilitasi permukiman					90.512.878.425	112.150.202.195	111.549.647.740	-21.036.769.315		92.620.256.148	
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	12 Unit	10 Unit	10 Unit	90.512.878.425	112.150.202.195	111.549.647.740	-21.036.769.315	11 Unit	92.620.256.148	
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2000 Unit Rumah	2240 Unit Rumah	2240 Unit Rumah	90.512.878.425	112.150.202.195	111.549.647.740	-21.036.769.315	1190 Unit Rumah	92.620.256.148	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					74.987.889.345	96.567.831.914	95.693.403.106	-20.705.513.761		76.035.926.419	
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2000 Unit Rumah	2240 Unit Rumah	2240 Unit Rumah	74.987.889.345	96.567.831.914	95.693.403.106	-20.705.513.761	1190 Unit Rumah	76.035.926.419	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru					15.524.989.080	15.582.370.281	15.856.244.634	-331.255.554		16.584.329.729	
	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	12 Unit	10 Unit	10 Unit	15.524.989.080	15.582.370.281	15.856.244.634	-331.255.554	11 Unit	16.584.329.729	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.406.309.202	1.433.697.163	1.479.419.364	-73.110.162		1.414.082.185	
		Persentase PSU yang diserahkan	100%	71,51%	71,51%	1.406.309.202	1.433.697.163	1.479.419.364	-73.110.162	78,21 %	1.414.082.185	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					1.406.309.202	1.433.697.163	1.479.419.364	-73.110.162		1.414.082.185	
	Meningkatnya Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dari pengembang secara administrasi dan fisik					1.406.309.202	1.433.697.163	1.479.419.364	-73.110.162		1.414.082.185	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	6 Laporan	6 Laporan	12 Laporan	1.406.309.202	1.433.697.163	1.479.419.364	-73.110.162	6 Laporan	1.414.082.185	
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	13 Lokasi	12 Lokasi	15 Lokasi	1.406.309.202	1.433.697.163	1.479.419.364	-73.110.162	12 Lokasi	1.414.082.185	
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					270.537.877	288.367.235	242.257.200	28.280.677		270.561.397	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	6 Laporan	6 Laporan	12 Laporan	270.537.877	288.367.235	242.257.200	28.280.677	6 Laporan	270.561.397	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan					1.135.771.325	1.145.329.928	1.237.162.164	-101.390.839		1.143.520.788	
	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	13 Lokasi	12 Lokasi	15 Lokasi	1.135.771.325	1.145.329.928	1.237.162.164	-101.390.839	12 Lokasi	1.143.520.788	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					60.501.400.000	60.501.400.000	68.743.662.003	-8.242.262.003		83.276.690.079	
2,1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					60.501.400.000	60.529.131.668	68.743.662.003	-8.242.262.003		83.276.690.079	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					60.251.069.854	60.261.069.854	68.651.170.259	-8.400.100.405		83.026.308.592	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Presentase Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	60.251.069.854	60.261.069.854	68.651.170.259	-8.400.100.405	100%	83.026.308.592	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					60.251.069.854	60.261.069.854	68.651.170.259	-8.400.100.405		83.026.308.592	
	Tersedianya luas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum					60.251.069.854	60.261.069.854	68.651.170.259	-8.400.100.405		83.026.308.592	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60.251.069.854	60.261.069.854	68.651.170.259	-8.400.100.405	1 Dokumen	83.026.308.592	
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					60.251.069.854	60.261.069.854	68.651.170.259	-8.400.100.405		83.026.308.592	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60.251.069.854	60.261.069.854	68.651.170.259	-8.400.100.405	1 Dokumen	83.026.308.592	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					250.330.146	268.061.814	92.491.744	157.838.402		250.381.487	
		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penataan Aset dan Akses Reforma	100%	100%	100%	250.330.146	268.061.814	92.491.744	157.838.402	100%	250.381.487	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					250.330.146	268.061.814	92.491.744	157.838.402		250.381.487	
	Terlaksananya redistribusi tanah untuk kepentingan umum					250.330.146	268.061.814	92.491.744	157.838.402		250.381.487	
		Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	250.330.146	268.061.814	92.491.744	157.838.402	1 Berita Acara	250.381.487	
2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria					250.330.146	268.061.814	92.491.744	157.838.402		250.381.487	
	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	250.330.146	268.061.814	92.491.744	157.838.402	1 Berita Acara	250.381.487	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	UPTD Rumah Susun					25.011.454.338	20.151.491.595	19.041.660.247	5.969.794.091		24.354.324.662	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					25.011.454.338	25.011.454.338	19.041.660.247	5.969.794.091		24.354.324.662	
1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					25.011.454.338	20.151.491.595	19.041.660.247	5.969.794.091		24.354.324.662	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					25.011.454.338	20.151.491.595	19.041.660.247	5.969.794.091		24.354.324.662	
		Persentase rumah susun yang dimanfaatkan tepat sasaran	100%	100%	100%	25.011.454.338	20.151.491.595	19.041.660.247	5.969.794.091	100%	24.354.324.662	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	25.011.454.338	20.151.491.595	19.041.660.247	5.969.794.091	100%	24.354.324.662	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					25.011.454.338	20.151.491.595	19.041.660.247	5.969.794.091		24.354.324.662	
	Meningkatnya pengelolaan rumah susun sederhana sewa					25.011.454.338	20.151.491.595	19.041.660.247	5.969.794.091		24.354.324.662	
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	109 Dokumen	109 Dokumen	109 Dokumen	25.011.454.338	20.151.491.595	19.041.660.247	5.969.794.091	109 Dokumen	24.354.324.662	
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					25.011.454.338	20.151.491.595	19.041.660.247	5.969.794.091		24.354.324.662	
	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	109 Dokumen	109 Dokumen	109 Dokumen	25.011.454.338	20.151.491.595	19.041.660.247	5.969.794.091	109 Dokumen	24.354.324.662	UPTD Rumah Susun
	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga					3.836.826.272.037	2.355.293.357.927	2.487.819.878.426	1.349.006.393.611		2.665.778.770.691	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.836.826.272.037	3.836.826.272.037	2.487.819.878.426	1.349.006.393.611		2.665.778.770.691	
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					3.836.826.272.037	2.355.293.357.927	2.487.819.878.426	1.349.006.393.611		2.665.778.770.691	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					157.414.994.724	151.398.757.741	161.593.560.260	-4.178.565.536		163.764.493.547	
		Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	98%	95,50%	95,50%	157.414.994.724	151.398.757.741	161.593.560.260	-4.178.565.536	96%	163.764.493.547	
		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	94,16 %	93,36%	93,36%	157.414.994.724	151.398.757.741	161.593.560.260	-4.178.565.536	93,56 %	163.764.493.547	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					157.227.811	175.201.200	175.201.200	-17.973.389		157.242.259	
	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah					157.227.811	175.201.200	175.201.200	-17.973.389		157.242.259	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	157.227.811	175.201.200	175.201.200	-17.973.389	8 Dokumen	157.242.259	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					157.227.811	175.201.200	175.201.200	-17.973.389		157.242.259	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	157.227.811	175.201.200	175.201.200	-17.973.389	8 Dokumen	157.242.259	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					53.556.837.866	53.556.837.866	53.942.499.097	-385.661.231		53.973.988.554	
	Terlaksananya pelayanan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu					53.556.837.866	53.556.837.866	53.942.499.097	-385.661.231		53.973.988.554	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan	205 Orang/bulan	202 Orang/bulan	53.556.837.866	53.556.837.866	53.942.499.097	-385.661.231	197 Orang/bulan	53.973.988.554	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					53.556.837.866	53.556.837.866	53.942.499.097	-385.661.231		53.973.988.554	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan	205 Orang/bulan	202 Orang/bulan	53.556.837.866	53.556.837.866	53.942.499.097	-385.661.231	197 Orang/bulan	53.973.988.554	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					6.460.315.643	5.915.692.587	5.925.239.515	535.076.128		6.197.074.433	
	Terlaksananya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					6.460.315.643	5.915.692.587	5.925.239.515	535.076.128		6.197.074.433	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	6.460.315.643	5.915.692.587	5.925.239.515	535.076.128	3 Paket	6.197.074.433	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6.460.315.643	5.915.692.587	5.925.239.515	535.076.128		6.197.074.433	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	6.460.315.643	5.915.692.587	5.925.239.515	535.076.128	3 Paket	6.197.074.433	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					194.481.226.808	183.502.052.176	203.101.240.896	-8.620.014.088		206.872.376.602	
	Meningkatnya pengelolaan alat berat dan alat angkut					194.481.226.808	183.502.052.176	203.101.240.896	-8.620.014.088		206.872.376.602	
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	73 Unit	73 Unit	73 Unit	194.481.226.808	183.502.052.176	203.101.240.896	-8.620.014.088	73 Unit	206.872.376.602	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	6 Unit	6 Unit	194.481.226.808	183.502.052.176	203.101.240.896	-8.620.014.088	3 Unit	206.872.376.602	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	227 Unit	227 Unit	227 Unit	194.481.226.808	183.502.052.176	203.101.240.896	-8.620.014.088	227 Unit	206.872.376.602	
	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran					194.481.226.808	183.502.052.176	203.101.240.896	-8.620.014.088		206.872.376.602	
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	73 Unit	73 Unit	73 Unit	194.481.226.808	183.502.052.176	203.101.240.896	-8.620.014.088	73 Unit	206.872.376.602	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	6 Unit	6 Unit	194.481.226.808	183.502.052.176	203.101.240.896	-8.620.014.088	3 Unit	206.872.376.602	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	227 Unit	227 Unit	227 Unit	194.481.226.808	183.502.052.176	203.101.240.896	-8.620.014.088	227 Unit	206.872.376.602	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					17.964.796.553	15.568.814.905	21.168.635.394	-3.203.838.841		18.653.904.075	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	227 Unit	227 Unit	227 Unit	17.964.796.553	15.568.814.905	21.168.635.394	-3.203.838.841	227 Unit	18.653.904.075	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					20.978.932.469	16.973.872.255	17.673.646.126	3.305.286.343		22.993.637.217	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	73 Unit	73 Unit	73 Unit	20.978.932.469	16.973.872.255	17.673.646.126	3.305.286.343	73 Unit	22.993.637.217	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					58.296.884.382	59.208.338.928	62.708.338.928	-4.411.454.546		61.788.647.009	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	6 Unit	6 Unit	58.296.884.382	59.208.338.928	62.708.338.928	-4.411.454.546	3 Unit	61.788.647.009	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					74.025.203.557	70.405.488.414	100.630.915.288	-26.605.711.731		74.653.382.280	
		Persentase rumah pompa yang beroperasi dan berfungsi baik	100%	100%	100%	74.025.203.557	70.405.488.414	100.630.915.288	-26.605.711.731	100%	74.653.382.280	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					74.025.203.557	70.405.488.414	100.630.915.288	-26.605.711.731		74.653.382.280	
	Meningkatnya operasional dan fungsi rumah pompa					74.025.203.557	70.405.488.414	100.630.915.288	-26.605.711.731		74.653.382.280	
		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	323 Unit	319 Unit	319 Unit	74.025.203.557	70.405.488.414	100.630.915.288	-26.605.711.731	321 Unit	74.653.382.280	
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir					74.025.203.557	70.405.488.414	100.630.915.288	-26.605.711.731		74.653.382.280	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	323 Unit	319 Unit	319 Unit	74.025.203.557	70.405.488.414	100.630.915.288	-26.605.711.731	321 Unit	74.653.382.280	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					913.791.855	499.748.050	499.748.050	414.043.805		914.479.743	
		Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan yang layak dan aman	6,27 %	3%	3%	913.791.855	499.748.050	499.748.050	414.043.805	3%	914.479.743	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					913.791.855	499.748.050	499.748.050	414.043.805		914.479.743	
	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terpadu					913.791.855	499.748.050	499.748.050	414.043.805		914.479.743	
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	913.791.855	499.748.050	499.748.050	414.043.805	2 Dokumen	914.479.743	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					913.791.855	499.748.050	499.748.050	414.043.805		914.479.743	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	913.791.855	499.748.050	499.748.050	414.043.805	2 Dokumen	914.479.743	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					12.660.181.721	11.596.139.221	11.934.704.346	725.477.375		13.993.931.796	
		Persentase limbah domestik yang dilakukan pengolahan pada unit olah	27,5 %	17,50%	17,50%	12.660.181.721	11.596.139.221	11.934.704.346	725.477.375	20%	13.993.931.796	
		Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	3,55 %	1%	2,4 %	12.660.181.721	11.596.139.221	11.934.704.346	725.477.375	1%	13.993.931.796	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					25.320.363.442	23.192.278.442	23.869.408.692	1.450.954.750		27.987.863.592	
	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Terpadu					25.320.363.442	23.192.278.442	23.869.408.692	1.450.954.750		27.987.863.592	
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.320.363.442	23.192.278.442	23.869.408.692	1.450.954.750	1 Dokumen	27.987.863.592	
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5.900 Unit	5900 Unit	13920 Unit	25.320.363.442	23.192.278.442	23.869.408.692	1.450.954.750	5.900 Unit	27.987.863.592	
	Terwujudnya pengolahan limbah domestik yang terpusat					25.320.363.442	23.192.278.442	23.869.408.692	1.450.954.750		27.987.863.592	
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.320.363.442	23.192.278.442	23.869.408.692	1.450.954.750	1 Dokumen	27.987.863.592	
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5.900 Unit	5900 Unit	13920 Unit	25.320.363.442	23.192.278.442	23.869.408.692	1.450.954.750	5.900 Unit	27.987.863.592	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					10.974.412.724	10.904.074.421	11.670.896.619	-696.483.895		12.280.505.457	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5.900 Unit	5900 Unit	13920 Unit	10.974.412.724	10.904.074.421	11.670.896.619	-696.483.895	5.900 Unit	12.280.505.457	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					1.685.768.997	692.064.800	263.807.727	1.421.961.270		1.713.426.339	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.685.768.997	692.064.800	263.807.727	1.421.961.270	1 Dokumen	1.713.426.339	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.308.422.447.898	1.091.706.880.340	1.086.320.137.221	1.222.102.310.677		1.671.882.315.438	
		Persentase kolam tampung/long storage yang kapasitasnya sesuai rekomendasi teknis	100%	100%	100%	2.308.422.447.898	1.091.706.880.340	1.086.320.137.221	1.222.102.310.677	100%	1.671.882.315.438	
		Persentase sarana dan prasarana drainase baik primer maupun sekunder yang berfungsi dengan baik dan siap operasional	88,75 %	87,50%	87,50%	2.308.422.447.898	1.091.706.880.340	1.086.320.137.221	1.222.102.310.677	88%	1.671.882.315.438	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354		3.343.764.630.876	
	Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan dan perkotaan					4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354		3.343.764.630.876	
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	240 Dokumen	240 Dokumen	240 Dokumen	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	240 Dokumen	3.343.764.630.876	
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	25 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	50 Dokumen	3.343.764.630.876	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	30 Sistem Drainase Perkotaan	30 Sistem Drainase Perkotaan	30 Sistem Drainase Perkotaan	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	30 Sistem Drainase Perkotaan	3.343.764.630.876	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	10 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	22 Sistem Drainase Perkotaan	3.343.764.630.876	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	6 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	12 Sistem Drainase Perkotaan	3.343.764.630.876	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	6 Sistem Drainase Perkotaan	7 Sistem Drainase Perkotaan	7 Sistem Drainase Perkotaan	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	12 Sistem Drainase Perkotaan	3.343.764.630.876	
		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2500 M	5655 M	5655 M	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	7500 M	3.343.764.630.876	
	Tersedianya perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan sistem drainase					4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354		3.343.764.630.876	
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	240 Dokumen	240 Dokumen	240 Dokumen	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	240 Dokumen	3.343.764.630.876	
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	25 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	50 Dokumen	3.343.764.630.876	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	30 Sistem Drainase Perkotaan	30 Sistem Drainase Perkotaan	30 Sistem Drainase Perkotaan	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	30 Sistem Drainase Perkotaan	3.343.764.630.876	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	10 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	22 Sistem Drainase Perkotaan	3.343.764.630.876	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	6 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	12 Sistem Drainase Perkotaan	3.343.764.630.876	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	6 Sistem Drainase Perkotaan	7 Sistem Drainase Perkotaan	7 Sistem Drainase Perkotaan	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	12 Sistem Drainase Perkotaan	3.343.764.630.876	
		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2500 M	5655 M	5655 M	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	7500 M	3.343.764.630.876	
	Meningkatnya fungsi optimal saluran sistem drainase					4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354		3.343.764.630.876	
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	240 Dokumen	240 Dokumen	240 Dokumen	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	240 Dokumen	3.343.764.630.876	
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	25 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	50 Dokumen	3.343.764.630.876	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	30 Sistem Drainase Perkotaan	30 Sistem Drainase Perkotaan	30 Sistem Drainase Perkotaan	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	30 Sistem Drainase Perkotaan	3.343.764.630.876	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	10 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	22 Sistem Drainase Perkotaan	3.343.764.630.876	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	6 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	12 Sistem Drainase Perkotaan	3.343.764.630.876	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	6 Sistem Drainase Perkotaan	7 Sistem Drainase Perkotaan	7 Sistem Drainase Perkotaan	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	12 Sistem Drainase Perkotaan	3.343.764.630.876	
		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2500 M	5655 M	5655 M	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	7500 M	3.343.764.630.876	
	Meningkatnya pengawasan pembangunan sistem drainase di Kawasan Permukiman					4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354		3.343.764.630.876	
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	240 Dokumen	240 Dokumen	240 Dokumen	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	240 Dokumen	3.343.764.630.876	
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	25 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	50 Dokumen	3.343.764.630.876	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	30 Sistem Drainase Perkotaan	30 Sistem Drainase Perkotaan	30 Sistem Drainase Perkotaan	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	30 Sistem Drainase Perkotaan	3.343.764.630.876	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	10 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	22 Sistem Drainase Perkotaan	3.343.764.630.876	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	6 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	12 Sistem Drainase Perkotaan	3.343.764.630.876	
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	6 Sistem Drainase Perkotaan	7 Sistem Drainase Perkotaan	7 Sistem Drainase Perkotaan	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	12 Sistem Drainase Perkotaan	3.343.764.630.876	
		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2500 M	5655 M	5655 M	4.616.844.895.796	2.183.413.760.680	2.172.640.274.442	2.444.204.621.354	7500 M	3.343.764.630.876	
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan					348.298.355.325	70.280.355.325	74.282.965.037	274.015.390.288		258.840.934.064	
	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2500 M	5655 M	5655 M	348.298.355.325	70.280.355.325	74.282.965.037	274.015.390.288	7500 M	258.840.934.064	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan					1.419.907.337	1.246.951.142	1.254.668.912	165.238.425		1.421.283.113	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	240 Dokumen	240 Dokumen	240 Dokumen	1.419.907.337	1.246.951.142	1.254.668.912	165.238.425	240 Dokumen	1.421.283.113	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan					17.457.281.720	22.935.448.925	22.951.478.583	-5.494.196.863		17.457.969.608	
	Terbinanya secara Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	6 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	17.457.281.720	22.935.448.925	22.951.478.583	-5.494.196.863	12 Sistem Drainase Perkotaan	17.457.969.608	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan					278.919.769.014	133.420.294.849	120.751.431.429	158.168.337.585		106.405.427.551	
	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	6 Sistem Drainase Perkotaan	7 Sistem Drainase Perkotaan	7 Sistem Drainase Perkotaan	278.919.769.014	133.420.294.849	120.751.431.429	158.168.337.585	12 Sistem Drainase Perkotaan	106.405.427.551	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					1.559.306.476.542	770.997.630.256	771.031.027.004	788.275.449.538		1.167.751.498.846	
	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	10 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan	1.559.306.476.542	770.997.630.256	771.031.027.004	788.275.449.538	22 Sistem Drainase Perkotaan	1.167.751.498.846	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan					2.156.168.557	13.311.094.892	13.303.473.522	-11.147.304.965		2.156.919.165	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	25 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	2.156.168.557	13.311.094.892	13.303.473.522	-11.147.304.965	50 Dokumen	2.156.919.165	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan					100.864.489.403	79.515.104.951	82.745.092.734	18.119.396.669		117.848.283.091	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	30 Sistem Drainase Perkotaan	30 Sistem Drainase Perkotaan	30 Sistem Drainase Perkotaan	100.864.489.403	79.515.104.951	82.745.092.734	18.119.396.669	30 Sistem Drainase Perkotaan	117.848.283.091	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					1.283.389.652.282	1.029.686.344.161	1.126.840.813.261	156.548.839.021		740.570.167.887	
		Persentase panjang jalan kota yang diperbaiki	21,20 %	21%	21%	1.283.389.652.282	1.029.686.344.161	1.126.840.813.261	156.548.839.021	21,05 %	740.570.167.887	
		Persentase rekomendasi Penyelenggaraan Jalan yang telah dilakukan pengawasan / pengendalian	9%	9%	9%	1.283.389.652.282	1.029.686.344.161	1.126.840.813.261	156.548.839.021	9%	740.570.167.887	
		Tingkat kemantapan jalan	99,28 %	99,24%	99,24%	1.283.389.652.282	1.029.686.344.161	1.126.840.813.261	156.548.839.021	99,25 %	740.570.167.887	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042		1.481.140.335.774	
	Meningkatnya Pembangunan jalan, jembatan, dan kelengkapannya					2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042		1.481.140.335.774	
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	21 Dokumen	70 Dokumen	75 Dokumen	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	70 Dokumen	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	3,5 KM	11.7 KM	11.7 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	11,7 KM	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	10 KM	10 KM	60 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	10 KM	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	3,5 KM	11.7 KM	11.7 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	11,7 KM	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0,2 KM	0.8 KM	1,7 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	0,3 KM	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 KM	40 KM	160 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	40 KM	1.481.140.335.774	
	Meningkatnya pemeliharaan rutin jalan, jembatan, dan kelengkapannya					2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042		1.481.140.335.774	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	21 Dokumen	70 Dokumen	75 Dokumen	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	70 Dokumen	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	3,5 KM	11.7 KM	11.7 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	11,7 KM	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	10 KM	10 KM	60 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	10 KM	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	3,5 KM	11.7 KM	11.7 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	11,7 KM	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0,2 KM	0.8 KM	1,7 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	0,3 KM	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 KM	40 KM	160 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	40 KM	1.481.140.335.774	
	Meningkatnya pengawasan teknis Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042		1.481.140.335.774	
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	21 Dokumen	70 Dokumen	75 Dokumen	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	70 Dokumen	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	3,5 KM	11.7 KM	11.7 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	11,7 KM	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	10 KM	10 KM	60 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	10 KM	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	3,5 KM	11.7 KM	11.7 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	11,7 KM	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0,2 KM	0.8 KM	1,7 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	0,3 KM	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 KM	40 KM	160 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	40 KM	1.481.140.335.774	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan					2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042		1.481.140.335.774	
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	21 Dokumen	70 Dokumen	75 Dokumen	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	70 Dokumen	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	3,5 KM	11.7 KM	11.7 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	11,7 KM	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	10 KM	10 KM	60 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	10 KM	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	3,5 KM	11.7 KM	11.7 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	11,7 KM	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0,2 KM	0.8 KM	1,7 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	0,3 KM	1.481.140.335.774	
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 KM	40 KM	160 KM	2.566.779.304.564	2.059.372.688.322	2.253.681.626.522	313.097.678.042	40 KM	1.481.140.335.774	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					8.449.820.348	8.449.820.348	9.749.139.714	-1.299.319.366		8.450.508.236	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	21 Dokumen	70 Dokumen	75 Dokumen	8.449.820.348	8.449.820.348	9.749.139.714	-1.299.319.366	70 Dokumen	8.450.508.236	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan					93.008.871.024	101.108.871.024	119.012.888.837	-26.004.017.813		95.445.971.956	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 KM	40 KM	160 KM	93.008.871.024	101.108.871.024	119.012.888.837	-26.004.017.813	40 KM	95.445.971.956	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa					854.240.012	973.240.012	983.555.848	-129.315.836		855.615.788	
	Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	10 KM	10 KM	60 KM	854.240.012	973.240.012	983.555.848	-129.315.836	10 KM	855.615.788	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan					774.901.656.866	452.260.588.293	408.398.621.992	366.503.034.874		543.568.679.057	
	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	3,5 KM	11.7 KM	11.7 KM	774.901.656.866	452.260.588.293	408.398.621.992	366.503.034.874	11,7 KM	543.568.679.057	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa					8.788.783.060	11.788.783.060	10.518.001.033	-1.729.217.973		8.794.974.052	
	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	3,5 KM	11.7 KM	11.7 KM	8.788.783.060	11.788.783.060	10.518.001.033	-1.729.217.973	11,7 KM	8.794.974.052	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar					397.386.280.972	455.105.041.424	578.178.605.837	-180.792.324.865		83.454.418.798	
	Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0,2 KM	0.8 KM	1,7 KM	397.386.280.972	455.105.041.424	578.178.605.837	-180.792.324.865	0,3 KM	83.454.418.798	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					42.725.999.759	44.580.149.742	47.094.839.240	-4.368.839.481		43.580.141.506	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					42.725.999.759	42.725.999.759	47.094.839.240	-4.368.839.481		43.580.141.506	
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					42.725.999.759	44.580.149.742	47.094.839.240	-4.368.839.481		43.580.141.506	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.472.374.773	16.223.447.545	17.149.057.108	-676.682.335		16.906.235.780	
		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	96,40 %	96,20%	96,20%	16.472.374.773	16.223.447.545	17.149.057.108	-676.682.335	96,25 %	16.906.235.780	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					157.190.757	156.355.200	156.355.200	835.557		157.204.241	
	Tersusunnya dokumen perencanaan, pendanaan, dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah					157.190.757	156.355.200	156.355.200	835.557		157.204.241	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	157.190.757	156.355.200	156.355.200	835.557	8 Dokumen	157.204.241	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					157.190.757	156.355.200	156.355.200	835.557		157.204.241	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	157.190.757	156.355.200	156.355.200	835.557	8 Dokumen	157.204.241	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.129.700.336	12.129.700.336	12.613.185.524	-483.485.188		12.222.684.598	
	Terpenuhinya pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara tepat waktu					12.129.700.336	12.129.700.336	12.613.185.524	-483.485.188		12.222.684.598	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	12.129.700.336	12.129.700.336	12.613.185.524	-483.485.188	37 Orang/bulan	12.222.684.598	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.129.700.336	12.129.700.336	12.613.185.524	-483.485.188		12.222.684.598	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	12.129.700.336	12.129.700.336	12.613.185.524	-483.485.188	37 Orang/bulan	12.222.684.598	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.351.338.328	2.335.992.308	2.868.671.890	-517.333.562		2.579.579.617	
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan perkantoran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kondisi baik					2.351.338.328	2.335.992.308	2.868.671.890	-517.333.562		2.579.579.617	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	8 Paket	8 Paket	2.351.338.328	2.335.992.308	2.868.671.890	-517.333.562	14 Paket	2.579.579.617	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.351.338.328	2.335.992.308	2.868.671.890	-517.333.562		2.579.579.617	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	8 Paket	8 Paket	2.351.338.328	2.335.992.308	2.868.671.890	-517.333.562	14 Paket	2.579.579.617	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.834.145.352	1.601.399.701	1.510.844.494	323.300.858		1.946.767.324	
	Tersedianya jasa penunjang umum yang mendukung operasional kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah					1.834.145.352	1.601.399.701	1.510.844.494	323.300.858		1.946.767.324	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.834.145.352	1.601.399.701	1.510.844.494	323.300.858	12 Laporan	1.946.767.324	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.834.145.352	1.601.399.701	1.510.844.494	323.300.858		1.946.767.324	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.834.145.352	1.601.399.701	1.510.844.494	323.300.858	12 Laporan	1.946.767.324	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					26.253.624.986	28.356.702.197	29.945.782.132	-3.692.157.146		26.673.905.726	
		Persentase aparatur yang meningkat kompetensinya dalam mitigasi dan penanganan bencana	100%	100%	100%	26.253.624.986	28.356.702.197	29.945.782.132	-3.692.157.146	100%	26.673.905.726	
		Persentase kawasan siap siaga bencana	100%	100%	100%	26.253.624.986	28.356.702.197	29.945.782.132	-3.692.157.146	100%	26.673.905.726	
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%	100%	100%	26.253.624.986	28.356.702.197	29.945.782.132	-3.692.157.146	100%	26.673.905.726	
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana dengan waktu respon ≤ 7 menit	100%	100%	100%	26.253.624.986	28.356.702.197	29.945.782.132	-3.692.157.146	100%	26.673.905.726	
		Persentase peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya mitigasi bencana	100%	100%	100%	26.253.624.986	28.356.702.197	29.945.782.132	-3.692.157.146	100%	26.673.905.726	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293		2.096.598.272	
	Meningkatnya penyebaran informasi rawan bencana					2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293		2.096.598.272	
		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293	1 Dokumen	2.096.598.272	
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293	0 Dokumen	2.096.598.272	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	31 Kawasan	31 Kawasan	31 Kawasan	2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293	30 Kawasan	2.096.598.272	
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	1662 Unit	3517 Unit	2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293	5 Unit	2.096.598.272	
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1850 Orang	1750 Kawasan	1750 Kawasan	2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293	1775 Orang	2.096.598.272	
	Terlaksananya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293		2.096.598.272	
		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293	1 Dokumen	2.096.598.272	
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293	0 Dokumen	2.096.598.272	
		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	31 Kawasan	31 Kawasan	31 Kawasan	2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293	30 Kawasan	2.096.598.272	
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	1662 Unit	3517 Unit	2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293	5 Unit	2.096.598.272	
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1850 Orang	1750 Kawasan	1750 Kawasan	2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293	1775 Orang	2.096.598.272	
	Meningkatnya tata kelola mitigasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293		2.096.598.272	
		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293	1 Dokumen	2.096.598.272	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293	0 Dokumen	2.096.598.272	
		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	31 Kawasan	31 Kawasan	31 Kawasan	2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293	30 Kawasan	2.096.598.272	
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	1662 Unit	3517 Unit	2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293	5 Unit	2.096.598.272	
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1850 Orang	1750 Kawasan	1750 Kawasan	2.086.355.633	2.245.768.442	3.299.895.926	-1.213.540.293	1775 Orang	2.096.598.272	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					625.366.482	849.825.822	1.903.953.306	-1.278.586.824		625.419.800	
	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	1662 Unit	3517 Unit	625.366.482	849.825.822	1.903.953.306	-1.278.586.824	5 Unit	625.419.800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana					249.054.640	235.519.072	235.519.072	13.535.568		343.617.280	
	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	31 Kawasan	31 Kawasan	31 Kawasan	249.054.640	235.519.072	235.519.072	13.535.568	30 Kawasan	343.617.280	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota					125.991.071	143.587.500	143.587.500	-17.596.429		207.746.312	
	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	125.991.071	143.587.500	143.587.500	-17.596.429	1 Dokumen	207.746.312	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					170.300.000	170.300.000	170.300.000	0		0	
	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	170.300.000	170.300.000	170.300.000	0	0 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota					915.643.440	846.536.048	846.536.048	69.107.392		919.814.880	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1850 Orang	1750 Kawasan	1750 Kawasan	915.643.440	846.536.048	846.536.048	69.107.392	1775 Orang	919.814.880	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					46.305.799.064	50.087.707.868	51.076.120.012	-4.770.320.948		47.109.365.954	
	Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana					46.305.799.064	50.087.707.868	51.076.120.012	-4.770.320.948		47.109.365.954	
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	46.305.799.064	50.087.707.868	51.076.120.012	-4.770.320.948	1000 Orang	47.109.365.954	
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	17500 Orang	17500 Orang	20000 Orang	46.305.799.064	50.087.707.868	51.076.120.012	-4.770.320.948	17500 Orang	47.109.365.954	
	Meningkatnya pemenuhan bantuan logistik bagi korban bencana					46.305.799.064	50.087.707.868	51.076.120.012	-4.770.320.948		47.109.365.954	
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	46.305.799.064	50.087.707.868	51.076.120.012	-4.770.320.948	1000 Orang	47.109.365.954	
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	17500 Orang	17500 Orang	20000 Orang	46.305.799.064	50.087.707.868	51.076.120.012	-4.770.320.948	17500 Orang	47.109.365.954	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					20.630.065.132	22.412.803.514	22.967.018.706	-2.336.953.574		21.026.000.941	
	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	17500 Orang	17500 Orang	20000 Orang	20.630.065.132	22.412.803.514	22.967.018.706	-2.336.953.574	17500 Orang	21.026.000.941	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					2.522.834.400	2.631.050.420	2.571.041.300	-48.206.900		2.528.682.036	
	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	2.522.834.400	2.631.050.420	2.571.041.300	-48.206.900	1000 Orang	2.528.682.036	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					2.028.739.642	2.134.159.642	2.215.652.400	-186.912.758		2.045.248.954	
	Optimalnya pembinaan dan pengawasan petugas dalam penanggulangan bencana					2.028.739.642	2.134.159.642	2.215.652.400	-186.912.758		2.045.248.954	
		Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	90 Orang	90 Orang	90 Orang	2.028.739.642	2.134.159.642	2.215.652.400	-186.912.758	90 Orang	2.045.248.954	
		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.028.739.642	2.134.159.642	2.215.652.400	-186.912.758	12 Laporan	2.045.248.954	
		Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	349 Orang	349 Orang	349 Orang	2.028.739.642	2.134.159.642	2.215.652.400	-186.912.758	349 Orang	2.045.248.954	
	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					2.028.739.642	2.134.159.642	2.215.652.400	-186.912.758		2.045.248.954	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	90 Orang	90 Orang	90 Orang	2.028.739.642	2.134.159.642	2.215.652.400	-186.912.758	90 Orang	2.045.248.954	
		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.028.739.642	2.134.159.642	2.215.652.400	-186.912.758	12 Laporan	2.045.248.954	
		Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	349 Orang	349 Orang	349 Orang	2.028.739.642	2.134.159.642	2.215.652.400	-186.912.758	349 Orang	2.045.248.954	
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					684.369.821	698.119.821	738.866.200	-54.496.379		692.624.477	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	684.369.821	698.119.821	738.866.200	-54.496.379	12 Laporan	692.624.477	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					180.000.000	267.692.000	267.692.000	-87.692.000		179.691.955	
	Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	349 Orang	349 Orang	349 Orang	180.000.000	267.692.000	267.692.000	-87.692.000	349 Orang	179.691.955	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota					150.000.000	101.268.000	101.268.000	48.732.000		150.308.045	
	Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	90 Orang	90 Orang	90 Orang	150.000.000	101.268.000	101.268.000	48.732.000	90 Orang	150.308.045	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					150.711.973.593	151.933.501.314	143.398.402.187	7.313.571.406		152.897.477.314	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					150.711.973.593	150.711.973.593	143.398.402.187	7.313.571.406		152.897.477.314	
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					150.711.973.593	151.933.501.314	143.398.402.187	7.313.571.406		152.897.477.314	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					98.487.970.034	99.347.432.077	85.619.251.195	12.868.718.839		99.313.963.425	
		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	97,90 %	97,70%	97,70%	98.487.970.034	99.347.432.077	85.619.251.195	12.868.718.839	97,75 %	99.313.963.425	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					52.000.000	52.358.400	15.958.400	36.041.600		52.000.000	
	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					52.000.000	52.358.400	15.958.400	36.041.600		52.000.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	52.000.000	52.358.400	15.958.400	36.041.600	8 Dokumen	52.000.000	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					52.000.000	52.358.400	15.958.400	36.041.600		52.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	52.000.000	52.358.400	15.958.400	36.041.600	8 Dokumen	52.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					94.497.875.256	94.497.875.256	81.582.920.603	12.914.954.653		95.278.026.518	
	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN					94.497.875.256	94.497.875.256	81.582.920.603	12.914.954.653		95.278.026.518	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	726 Orang/bulan	726 Orang/bulan	715 Orang/bulan	94.497.875.256	94.497.875.256	81.582.920.603	12.914.954.653	726 Orang/bulan	95.278.026.518	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					94.497.875.256	94.497.875.256	81.582.920.603	12.914.954.653		95.278.026.518	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	726 Orang/bulan	726 Orang/bulan	715 Orang/bulan	94.497.875.256	94.497.875.256	81.582.920.603	12.914.954.653	726 Orang/bulan	95.278.026.518	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					859.864.848	1.798.036.313	1.805.287.388	-945.422.540		860.353.280	
	Tersedianya laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					859.864.848	1.798.036.313	1.805.287.388	-945.422.540		860.353.280	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3 Paket	859.864.848	1.798.036.313	1.805.287.388	-945.422.540	2 Paket	860.353.280	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					859.864.848	1.798.036.313	1.805.287.388	-945.422.540		860.353.280	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3 Paket	859.864.848	1.798.036.313	1.805.287.388	-945.422.540	2 Paket	860.353.280	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.078.229.930	2.999.162.108	2.215.084.804	863.145.126		3.123.583.627	
	Tersedianya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor					3.078.229.930	2.999.162.108	2.215.084.804	863.145.126		3.123.583.627	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.078.229.930	2.999.162.108	2.215.084.804	863.145.126	12 Laporan	3.123.583.627	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.078.229.930	2.999.162.108	2.215.084.804	863.145.126		3.123.583.627	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.078.229.930	2.999.162.108	2.215.084.804	863.145.126	12 Laporan	3.123.583.627	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					52.224.003.559	52.586.069.237	57.779.150.992	-5.555.147.433		53.583.513.889	
		Persentase gedung dengan hasil laik fungsi	34%	30%	51%	52.224.003.559	52.586.069.237	57.779.150.992	-5.555.147.433	31%	53.583.513.889	
		Persentase kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kejadian kebakaran	78%	70%	70%	52.224.003.559	52.586.069.237	57.779.150.992	-5.555.147.433	72%	53.583.513.889	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap kurang dari 15 menit	100%	100%	100%	52.224.003.559	52.586.069.237	57.779.150.992	-5.555.147.433	100%	53.583.513.889	
		Persentase petugas pemadam kebakaran yang kompetensinya meningkat	88,50%	86,50%	86,50%	52.224.003.559	52.586.069.237	57.779.150.992	-5.555.147.433	87%	53.583.513.889	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					101.866.307.336	101.768.856.628	112.128.828.402	-10.262.521.066		104.577.991.868	
	Meningkatnya pelatihan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan					101.866.307.336	101.768.856.628	112.128.828.402	-10.262.521.066		104.577.991.868	
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 Orang	16 Orang	16 Orang	101.866.307.336	101.768.856.628	112.128.828.402	-10.262.521.066	14 Orang	104.577.991.868	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	101.866.307.336	101.768.856.628	112.128.828.402	-10.262.521.066	2 Dokumen	104.577.991.868	
		Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	101.866.307.336	101.768.856.628	112.128.828.402	-10.262.521.066	1 Dokumen	104.577.991.868	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	101.866.307.336	101.768.856.628	112.128.828.402	-10.262.521.066	2 Laporan	104.577.991.868	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	905 Unit	2891 Unit	2891 Unit	101.866.307.336	101.768.856.628	112.128.828.402	-10.262.521.066	845 Unit	104.577.991.868	
	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan					101.866.307.336	101.768.856.628	112.128.828.402	-10.262.521.066		104.577.991.868	
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 Orang	16 Orang	16 Orang	101.866.307.336	101.768.856.628	112.128.828.402	-10.262.521.066	14 Orang	104.577.991.868	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	101.866.307.336	101.768.856.628	112.128.828.402	-10.262.521.066	2 Dokumen	104.577.991.868	
		Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	101.866.307.336	101.768.856.628	112.128.828.402	-10.262.521.066	1 Dokumen	104.577.991.868	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	101.866.307.336	101.768.856.628	112.128.828.402	-10.262.521.066	2 Laporan	104.577.991.868	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	905 Unit	2891 Unit	2891 Unit	101.866.307.336	101.768.856.628	112.128.828.402	-10.262.521.066	845 Unit	104.577.991.868	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					3.584.669.031	4.738.535.172	3.452.656.600	132.012.431		3.614.625.215	
	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.584.669.031	4.738.535.172	3.452.656.600	132.012.431	2 Laporan	3.614.625.215	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					8.662.796.997	8.698.299.792	9.064.103.287	-401.306.290		8.687.665.784	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8.662.796.997	8.698.299.792	9.064.103.287	-401.306.290	2 Dokumen	8.687.665.784	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran					952.094.571	942.073.094	928.977.226	23.117.345		955.762.635	
	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 Orang	16 Orang	16 Orang	952.094.571	942.073.094	928.977.226	23.117.345	14 Orang	955.762.635	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)					104.000.000	213.000.000	213.000.000	-109.000.000		104.000.000	
	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	104.000.000	213.000.000	213.000.000	-109.000.000	1 Dokumen	104.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					37.629.593.069	36.292.520.256	42.405.677.088	-4.776.084.019		38.926.942.300	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	905 Unit	2891 Unit	2891 Unit	37.629.593.069	36.292.520.256	42.405.677.088	-4.776.084.019	845 Unit	38.926.942.300	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					708.976.091	835.171.706	835.171.706	-126.195.615		711.039.755	
	Terlaksananya pendataan sistem proteksi kebakaran bangunan					708.976.091	835.171.706	835.171.706	-126.195.615		711.039.755	
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	530 Dokumen	510 Dokumen	510 Dokumen	708.976.091	835.171.706	835.171.706	-126.195.615	515 Dokumen	711.039.755	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					708.976.091	835.171.706	835.171.706	-126.195.615		711.039.755	
	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	530 Dokumen	510 Dokumen	510 Dokumen	708.976.091	835.171.706	835.171.706	-126.195.615	515 Dokumen	711.039.755	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					581.873.800	866.469.217	879.565.085	-297.691.285		583.478.200	
	Terlaksananya simulasi pencegahan kebakaran dan penyelamatan					581.873.800	866.469.217	879.565.085	-297.691.285		583.478.200	
		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1250 Orang	1050 Orang	1900 Orang	581.873.800	866.469.217	879.565.085	-297.691.285	1100 Orang	583.478.200	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					581.873.800	866.469.217	879.565.085	-297.691.285		583.478.200	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1250 Orang	1050 Orang	1900 Orang	581.873.800	866.469.217	879.565.085	-297.691.285	1100 Orang	583.478.200	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Satuan Polisi Pamong Praja					181.485.605.913	153.733.582.774	131.850.250.622	49.635.355.291		184.508.991.555	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					181.485.605.913	181.485.605.913	131.850.250.622	49.635.355.291		184.508.991.555	
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					181.485.605.913	153.733.582.774	131.850.250.622	49.635.355.291		184.508.991.555	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					132.820.542.706	102.750.749.476	84.352.422.402	48.468.120.304		135.199.822.933	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,80 %	98%	98%	132.820.542.706	102.750.749.476	84.352.422.402	48.468.120.304	98,29 %	135.199.822.933	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					39.976.976	40.216.000	40.216.000	-239.024		40.041.152	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					39.976.976	40.216.000	40.216.000	-239.024		40.041.152	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	39.976.976	40.216.000	40.216.000	-239.024	8 Dokumen	40.041.152	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					39.976.976	40.216.000	40.216.000	-239.024		40.041.152	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	39.976.976	40.216.000	40.216.000	-239.024	8 Dokumen	40.041.152	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					97.414.740.056	97.414.740.056	79.182.402.382	18.232.337.674		98.234.545.641	
	Meningkatnya ketepatan waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah					97.414.740.056	97.414.740.056	79.182.402.382	18.232.337.674		98.234.545.641	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	838 Orang/bulan	838 Orang/bulan	837 Orang/bulan	97.414.740.056	97.414.740.056	79.182.402.382	18.232.337.674	838 Orang/bulan	98.234.545.641	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					97.414.740.056	97.414.740.056	79.182.402.382	18.232.337.674		98.234.545.641	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	838 Orang/bulan	838 Orang/bulan	837 Orang/bulan	97.414.740.056	97.414.740.056	79.182.402.382	18.232.337.674	838 Orang/bulan	98.234.545.641	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					32.728.273.255	2.946.727.018	3.102.526.223	29.625.747.032		34.235.127.102	
	meningkatnya pelayanan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor					32.728.273.255	2.946.727.018	3.102.526.223	29.625.747.032		34.235.127.102	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	17 Paket	32.728.273.255	2.946.727.018	3.102.526.223	29.625.747.032	17 Paket	34.235.127.102	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					32.728.273.255	2.946.727.018	3.102.526.223	29.625.747.032		34.235.127.102	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	17 Paket	32.728.273.255	2.946.727.018	3.102.526.223	29.625.747.032	17 Paket	34.235.127.102	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.637.552.419	2.349.066.402	2.027.277.797	610.274.622		2.690.109.038	
	Meningkatnya ketersediaan barang jasa dan pelayanan umum perkantoran					2.637.552.419	2.349.066.402	2.027.277.797	610.274.622		2.690.109.038	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.637.552.419	2.349.066.402	2.027.277.797	610.274.622	12 Laporan	2.690.109.038	
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.637.552.419	2.349.066.402	2.027.277.797	610.274.622		2.690.109.038	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.637.552.419	2.349.066.402	2.027.277.797	610.274.622	12 Laporan	2.690.109.038	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					48.665.063.207	50.982.833.298	47.497.828.220	1.167.234.987		49.309.168.622	
		Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100%	100%	100%	48.665.063.207	50.982.833.298	47.497.828.220	1.167.234.987	100%	49.309.168.622	
		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100%	100%	100%	48.665.063.207	50.982.833.298	47.497.828.220	1.167.234.987	100%	49.309.168.622	
		Persentase PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	100%	100%	48.665.063.207	50.982.833.298	47.497.828.220	1.167.234.987	100%	49.309.168.622	
		Persentase Satlinmas yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	100%	48.665.063.207	50.982.833.298	47.497.828.220	1.167.234.987	100%	49.309.168.622	
		Persentase SDM Satpol PP yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	100%	48.665.063.207	50.982.833.298	47.497.828.220	1.167.234.987	100%	49.309.168.622	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	48.665.063.207	50.982.833.298	47.497.828.220	1.167.234.987	100%	49.309.168.622	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004		170.696.766.848	
	Terlaksananya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum					169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004		170.696.766.848	
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	820 Orang	820 Orang	820 Orang	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	820 Orang	170.696.766.848	
		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 Dokumen	170.696.766.848	
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 Dokumen	170.696.766.848	
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 Laporan	170.696.766.848	
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 laporan	170.696.766.848	
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 Laporan	170.696.766.848	
	Meningkatnya pembinaan SDM Satlinmas					169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004		170.696.766.848	
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	820 Orang	820 Orang	820 Orang	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	820 Orang	170.696.766.848	
		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 Dokumen	170.696.766.848	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 Dokumen	170.696.766.848	
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 Laporan	170.696.766.848	
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 laporan	170.696.766.848	
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 Laporan	170.696.766.848	
	Meningkatnya pembinaan SDM Satuan Polisi Pamong Praja					169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004		170.696.766.848	
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	820 Orang	820 Orang	820 Orang	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	820 Orang	170.696.766.848	
		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 Dokumen	170.696.766.848	
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 Dokumen	170.696.766.848	
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 Laporan	170.696.766.848	
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 laporan	170.696.766.848	
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 Laporan	170.696.766.848	
	Meningkatnya Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan					169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004		170.696.766.848	
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	820 Orang	820 Orang	820 Orang	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	820 Orang	170.696.766.848	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 Dokumen	170.696.766.848	
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 Dokumen	170.696.766.848	
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 Laporan	170.696.766.848	
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 laporan	170.696.766.848	
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	169.321.788.536	177.760.690.644	164.181.649.532	5.140.139.004	12 Laporan	170.696.766.848	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					366.784.959	468.299.428	468.299.428	-101.514.469		468.595.132	
	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	366.784.959	468.299.428	468.299.428	-101.514.469	12 Dokumen	468.595.132	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					147.558.556	147.489.600	147.489.600	68.956		147.674.073	
	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	147.558.556	147.489.600	147.489.600	68.956	12 Dokumen	147.674.073	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					37.159.231.696	37.781.442.741	34.372.603.463	2.786.628.233		37.221.010.520	
	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	37.159.231.696	37.781.442.741	34.372.603.463	2.786.628.233	12 laporan	37.221.010.520	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					3.311.871.000	4.576.120.000	4.576.120.000	-1.264.249.000		3.490.721.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.311.871.000	4.576.120.000	4.576.120.000	-1.264.249.000	12 Laporan	3.490.721.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah					270.631.147	351.937.822	366.016.822	-95.385.675		271.246.194	
	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270.631.147	351.937.822	366.016.822	-95.385.675	12 Laporan	271.246.194	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja					1.074.369.776	1.114.883.070	1.114.883.070	-40.513.294		1.074.944.793	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	820 Orang	820 Orang	820 Orang	1.074.369.776	1.114.883.070	1.114.883.070	-40.513.294	820 Orang	1.074.944.793	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					6.197.662.121	6.405.760.137	6.315.515.337	-117.853.216		6.497.894.606	
	Terlaksananya penegakan Perda dan Perkada					6.197.662.121	6.405.760.137	6.315.515.337	-117.853.216		6.497.894.606	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.197.662.121	6.405.760.137	6.315.515.337	-117.853.216	12 Laporan	6.497.894.606	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	6.197.662.121	6.405.760.137	6.315.515.337	-117.853.216	4 Laporan	6.497.894.606	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.197.662.121	6.405.760.137	6.315.515.337	-117.853.216	12 Laporan	6.497.894.606	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					1.042.294.361	621.986.714	621.986.714	420.307.647		1.148.778.974	
	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.042.294.361	621.986.714	621.986.714	420.307.647	4 Laporan	1.148.778.974	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					4.076.127.580	3.956.723.671	3.866.478.871	209.648.709		4.269.664.863	
	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.076.127.580	3.956.723.671	3.866.478.871	209.648.709	12 Laporan	4.269.664.863	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					1.079.240.180	1.827.049.752	1.827.049.752	-747.809.572		1.079.450.769	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.079.240.180	1.827.049.752	1.827.049.752	-747.809.572	12 Laporan	1.079.450.769	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					136.953.952	136.900.500	136.900.500	53.452		137.082.304	
	Meningkatnya pembinaan SDM penegak peraturan					136.953.952	136.900.500	136.900.500	53.452		137.082.304	
		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	136.953.952	136.900.500	136.900.500	53.452	4 Laporan	137.082.304	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					136.953.952	136.900.500	136.900.500	53.452		137.082.304	
	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	136.953.952	136.900.500	136.900.500	53.452	4 Laporan	137.082.304	Satuan Polisi Pamong Praja
	Dinas Sosial					67.957.304.748	69.862.936.029	67.025.348.742	931.956.006		70.402.185.641	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					67.957.304.748	67.957.304.748	67.025.348.742	931.956.006		70.402.185.641	
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					67.957.304.748	69.862.936.029	67.025.348.742	931.956.006		70.402.185.641	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.815.015.974	20.610.472.357	21.019.783.163	-204.767.189		21.025.210.348	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,41 %	94,81%	94,81%	20.815.015.974	20.610.472.357	21.019.783.163	-204.767.189	95,21 %	21.025.210.348	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.544.742	7.336.000	7.336.000	208.742		7.698.764	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial					7.544.742	7.336.000	7.336.000	208.742		7.698.764	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	7.544.742	7.336.000	7.336.000	208.742	8 Dokumen	7.698.764	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.544.742	7.336.000	7.336.000	208.742		7.698.764	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	7.544.742	7.336.000	7.336.000	208.742	8 Dokumen	7.698.764	Dinas Sosial
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.384.860.653	18.384.860.653	18.762.411.526	-377.550.873		18.524.687.683	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN					18.384.860.653	18.384.860.653	18.762.411.526	-377.550.873		18.524.687.683	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	18.384.860.653	18.384.860.653	18.762.411.526	-377.550.873	53 Orang/bulan	18.524.687.683	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					18.384.860.653	18.384.860.653	18.762.411.526	-377.550.873		18.524.687.683	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	18.384.860.653	18.384.860.653	18.762.411.526	-377.550.873	53 Orang/bulan	18.524.687.683	Dinas Sosial
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.003.237.180	462.559.807	397.195.779	606.041.401		1.004.783.056	
	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Administrasi Umum Dinas Sosial					1.003.237.180	462.559.807	397.195.779	606.041.401		1.004.783.056	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7 Paket	7 Paket	1.003.237.180	462.559.807	397.195.779	606.041.401	12 Paket	1.004.783.056	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.003.237.180	462.559.807	397.195.779	606.041.401		1.004.783.056	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7 Paket	7 Paket	1.003.237.180	462.559.807	397.195.779	606.041.401	12 Paket	1.004.783.056	Dinas Sosial
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.419.373.399	1.755.715.897	1.852.839.858	-433.466.459		1.488.040.845	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Kantor Dinas Sosial					1.419.373.399	1.755.715.897	1.852.839.858	-433.466.459		1.488.040.845	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.419.373.399	1.755.715.897	1.852.839.858	-433.466.459	12 Laporan	1.488.040.845	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.419.373.399	1.755.715.897	1.852.839.858	-433.466.459		1.488.040.845	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.419.373.399	1.755.715.897	1.852.839.858	-433.466.459	12 Laporan	1.488.040.845	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					6.951.239.189	7.027.028.491	6.683.440.181	267.799.008		6.955.834.438	
		Persentase Lembaga Kepahlawanan yang aktif	100%	100%	100%	6.951.239.189	7.027.028.491	6.683.440.181	267.799.008	100%	6.955.834.438	
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	6.951.239.189	7.027.028.491	6.683.440.181	267.799.008	100%	6.955.834.438	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					6.951.239.189	7.027.028.491	6.683.440.181	267.799.008		6.955.834.438	
	Meningkatnya pengembangan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial					6.951.239.189	7.027.028.491	6.683.440.181	267.799.008		6.955.834.438	
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	463 Lembaga	459 Lembaga	459 Lembaga	6.951.239.189	7.027.028.491	6.683.440.181	267.799.008	460 Lembaga	6.955.834.438	
		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	486 Orang	486 Orang	486 Orang	6.951.239.189	7.027.028.491	6.683.440.181	267.799.008	486 Orang	6.955.834.438	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					766.480.902	766.480.902	908.797.613	-142.316.711		768.874.509	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	463 Lembaga	459 Lembaga	459 Lembaga	766.480.902	766.480.902	908.797.613	-142.316.711	460 Lembaga	768.874.509	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota					6.184.758.287	6.260.547.589	5.774.642.568	410.115.719		6.186.959.929	
	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	486 Orang	486 Orang	486 Orang	6.184.758.287	6.260.547.589	5.774.642.568	410.115.719	486 Orang	6.186.959.929	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					7.353.767.812	12.612.268.939	11.719.255.947	-4.365.488.135		7.948.466.721	
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	7.353.767.812	12.612.268.939	11.719.255.947	-4.365.488.135	100%	7.948.466.721	
		Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	7.353.767.812	12.612.268.939	11.719.255.947	-4.365.488.135	100%	7.948.466.721	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	7.353.767.812	12.612.268.939	11.719.255.947	-4.365.488.135	100%	7.948.466.721	
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	100%	7.353.767.812	12.612.268.939	11.719.255.947	-4.365.488.135	100%	7.948.466.721	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	7.353.767.812	12.612.268.939	11.719.255.947	-4.365.488.135	100%	7.948.466.721	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					160.926.254	160.595.400	160.595.400	330.854		160.926.254	
	Meningkatnya reunifikasi keluarga bagi PPKS					160.926.254	160.595.400	160.595.400	330.854		160.926.254	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang	795 Orang	970 Orang	160.926.254	160.595.400	160.595.400	330.854	795 Orang	160.926.254	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					160.926.254	160.595.400	160.595.400	330.854		160.926.254	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	795 Orang	795 Orang	970 Orang	160.926.254	160.595.400	160.595.400	330.854	795 Orang	160.926.254	Dinas Sosial
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					7.192.841.558	12.451.673.539	11.558.660.547	-4.365.818.989		7.787.540.467	
	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS melalui layanan kedaruratan, alat bantu, dan asistensi rehabilitasi sosial					7.192.841.558	12.451.673.539	11.558.660.547	-4.365.818.989		7.787.540.467	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	439 Orang	300 Orang	391 Orang	7.192.841.558	12.451.673.539	11.558.660.547	-4.365.818.989	332 Orang	7.787.540.467	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang	4716 Orang	6528 Orang	7.192.841.558	12.451.673.539	11.558.660.547	-4.365.818.989	4716 Orang	7.787.540.467	
		Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	1335 Orang	1335 Orang	6116 Orang	7.192.841.558	12.451.673.539	11.558.660.547	-4.365.818.989	1335 Orang	7.787.540.467	
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan					3.783.948.183	3.783.710.858	3.772.152.476	11.795.707		4.168.737.318	
	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4716 Orang	4716 Orang	6528 Orang	3.783.948.183	3.783.710.858	3.772.152.476	11.795.707	4716 Orang	4.168.737.318	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu					873.411.105	1.298.509.301	1.298.509.301	-425.098.196		964.654.053	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	439 Orang	300 Orang	391 Orang	873.411.105	1.298.509.301	1.298.509.301	-425.098.196	332 Orang	964.654.053	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)					2.535.482.270	7.369.453.380	6.487.998.770	-3.952.516.500		2.654.149.096	
	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	1335 Orang	1335 Orang	6116 Orang	2.535.482.270	7.369.453.380	6.487.998.770	-3.952.516.500	1335 Orang	2.654.149.096	Dinas Sosial

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					30.280.662.491	27.551.972.305	25.504.395.227	4.776.267.264		31.861.781.887	
		Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%	100%	100%	30.280.662.491	27.551.972.305	25.504.395.227	4.776.267.264	100%	31.861.781.887	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					30.280.662.491	27.551.972.305	25.504.395.227	4.776.267.264		31.861.781.887	
	Tersedianya data Keluarga Miskin yang mutakhir dan akurat					30.280.662.491	27.551.972.305	25.504.395.227	4.776.267.264		31.861.781.887	
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	65578 Orang	65578 Orang	65578 Orang	30.280.662.491	27.551.972.305	25.504.395.227	4.776.267.264	65578 Orang	31.861.781.887	
		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	680 Orang	340 Orang	62 Orang	30.280.662.491	27.551.972.305	25.504.395.227	4.776.267.264	680 Orang	31.861.781.887	
		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24152 Orang	24152 Orang	24152 Orang	30.280.662.491	27.551.972.305	25.504.395.227	4.776.267.264	24152 Orang	31.861.781.887	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					5.573.755.281	5.568.758.561	5.664.482.197	-90.726.916		5.596.835.130	
	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	65578 Orang	65578 Orang	65578 Orang	5.573.755.281	5.568.758.561	5.664.482.197	-90.726.916	65578 Orang	5.596.835.130	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					3.792.301.016	1.907.864.958	249.593.838	3.542.707.178		3.814.830.427	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	680 Orang	340 Orang	62 Orang	3.792.301.016	1.907.864.958	249.593.838	3.542.707.178	680 Orang	3.814.830.427	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					20.914.606.194	20.075.348.786	19.590.319.192	1.324.287.002		22.450.116.330	
	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24152 Orang	24152 Orang	24152 Orang	20.914.606.194	20.075.348.786	19.590.319.192	1.324.287.002	24152 Orang	22.450.116.330	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					55.105.320	60.640.700	80.979.904	-25.874.584		55.105.320	
		Persentase Korban Bencana Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	100%	100%	55.105.320	60.640.700	80.979.904	-25.874.584	100%	55.105.320	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					55.105.320	60.640.700	80.979.904	-25.874.584		55.105.320	
	Meningkatnya peran serta pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial dalam penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana					55.105.320	60.640.700	80.979.904	-25.874.584		55.105.320	
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	59 Orang	59 Orang	59 Orang	55.105.320	60.640.700	80.979.904	-25.874.584	59 Orang	55.105.320	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					55.105.320	60.640.700	80.979.904	-25.874.584		55.105.320	
	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	59 Orang	59 Orang	59 Orang	55.105.320	60.640.700	80.979.904	-25.874.584	59 Orang	55.105.320	Dinas Sosial
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					2.501.513.962	2.000.553.237	2.017.494.320	484.019.642		2.555.786.927	
		Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	2.501.513.962	2.000.553.237	2.017.494.320	484.019.642	100%	2.555.786.927	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					2.501.513.962	2.000.553.237	2.017.494.320	484.019.642		2.555.786.927	
	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional di Kota Surabaya					2.501.513.962	2.000.553.237	2.017.494.320	484.019.642		2.555.786.927	
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam	7 Makam	7 Makam	2.501.513.962	2.000.553.237	2.017.494.320	484.019.642	7 Makam	2.555.786.927	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					2.501.513.962	2.000.553.237	2.017.494.320	484.019.642		2.555.786.927	
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam	7 Makam	7 Makam	2.501.513.962	2.000.553.237	2.017.494.320	484.019.642	7 Makam	2.555.786.927	Dinas Sosial
	UPTD Griya Wreda dan Liponsos Kusta Babat Jerawat					8.927.403.825	8.945.403.825	8.711.746.169	215.657.656		9.104.270.037	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					8.927.403.825	8.927.403.825	8.711.746.169	215.657.656		9.104.270.037	
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					8.927.403.825	8.945.403.825	8.711.746.169	215.657.656		9.104.270.037	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					8.927.403.825	8.945.403.825	8.711.746.169	215.657.656		9.104.270.037	
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	8.927.403.825	8.945.403.825	8.711.746.169	215.657.656	100%	9.104.270.037	
		Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	8.927.403.825	8.945.403.825	8.711.746.169	215.657.656	100%	9.104.270.037	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	8.927.403.825	8.945.403.825	8.711.746.169	215.657.656	100%	9.104.270.037	
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	100%	8.927.403.825	8.945.403.825	8.711.746.169	215.657.656	100%	9.104.270.037	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	8.927.403.825	8.945.403.825	8.711.746.169	215.657.656	100%	9.104.270.037	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					8.927.403.825	8.945.403.825	8.711.746.169	215.657.656		9.104.270.037	
	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar di UPTD Griya Wreda dan Liponsos Kusta Babat Jerawat					8.927.403.825	8.945.403.825	8.711.746.169	215.657.656		9.104.270.037	
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	255 Orang	255 Orang	255 Orang	8.927.403.825	8.945.403.825	8.711.746.169	215.657.656	255 Orang	9.104.270.037	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					8.927.403.825	8.945.403.825	8.711.746.169	215.657.656		9.104.270.037	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	255 Orang	255 Orang	255 Orang	8.927.403.825	8.945.403.825	8.711.746.169	215.657.656	255 Orang	9.104.270.037	UPTD Griya Wreda dan Liponsos Kusta Babat Jerawat
	UPTD Kampung Anak Negeri					13.614.768.893	18.653.095.853	12.280.326.904	1.334.441.989		13.893.620.674	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.614.768.893	13.614.768.893	12.280.326.904	1.334.441.989		13.893.620.674	
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					13.614.768.893	18.653.095.853	12.280.326.904	1.334.441.989		13.893.620.674	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					13.614.768.893	18.653.095.853	12.280.326.904	1.334.441.989		13.893.620.674	
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	13.614.768.893	18.653.095.853	12.280.326.904	1.334.441.989	100%	13.893.620.674	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	13.614.768.893	18.653.095.853	12.280.326.904	1.334.441.989	100%	13.893.620.674	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	13.614.768.893	18.653.095.853	12.280.326.904	1.334.441.989	100%	13.893.620.674	
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	100%	13.614.768.893	18.653.095.853	12.280.326.904	1.334.441.989	100%	13.893.620.674	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	13.614.768.893	18.653.095.853	12.280.326.904	1.334.441.989	100%	13.893.620.674	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					13.614.768.893	18.653.095.853	12.280.326.904	1.334.441.989		13.893.620.674	
	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar di UPTD Kampung Anak Negeri					13.614.768.893	18.653.095.853	12.280.326.904	1.334.441.989		13.893.620.674	
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	376 Orang	476 Orang	316 Orang	13.614.768.893	18.653.095.853	12.280.326.904	1.334.441.989	376 Orang	13.893.620.674	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					13.614.768.893	18.653.095.853	12.280.326.904	1.334.441.989		13.893.620.674	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	376 Orang	476 Orang	316 Orang	13.614.768.893	18.653.095.853	12.280.326.904	1.334.441.989	376 Orang	13.893.620.674	UPTD Kampung Anak Negeri
	UPTD Liponsos Keputih					15.352.629.423	15.370.629.423	15.066.590.604	286.038.819		15.712.583.524	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					15.352.629.423	15.352.629.423	15.066.590.604	286.038.819		15.712.583.524	
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					15.352.629.423	15.370.629.423	15.066.590.604	286.038.819		15.712.583.524	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					15.352.629.423	15.370.629.423	15.066.590.604	286.038.819		15.712.583.524	
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	15.352.629.423	15.370.629.423	15.066.590.604	286.038.819	100%	15.712.583.524	
		Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	15.352.629.423	15.370.629.423	15.066.590.604	286.038.819	100%	15.712.583.524	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	15.352.629.423	15.370.629.423	15.066.590.604	286.038.819	100%	15.712.583.524	
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100%	100%	100%	15.352.629.423	15.370.629.423	15.066.590.604	286.038.819	100%	15.712.583.524	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	15.352.629.423	15.370.629.423	15.066.590.604	286.038.819	100%	15.712.583.524	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					15.352.629.423	15.370.629.423	15.066.590.604	286.038.819		15.712.583.524	
	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS yang memperoleh pelayanan kebutuhan dasar di UPTD Liponsos Keputih					15.352.629.423	15.370.629.423	15.066.590.604	286.038.819		15.712.583.524	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1595 Orang	1595 Orang	1870 Orang	15.352.629.423	15.370.629.423	15.066.590.604	286.038.819	1595 Orang	15.712.583.524	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					15.352.629.423	15.370.629.423	15.066.590.604	286.038.819		15.712.583.524	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1595 Orang	1595 Orang	1870 Orang	15.352.629.423	15.370.629.423	15.066.590.604	286.038.819	1595 Orang	15.712.583.524	UPTD Liponsos Keputih
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja					34.640.415.260	35.105.425.323	39.064.653.166	-4.424.237.906		35.626.170.957	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					33.578.609.537	33.578.609.537	37.899.087.942	-4.320.478.405		34.552.874.076	
2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					33.578.609.537	33.958.001.963	37.899.087.942	-4.320.478.405		34.552.874.076	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.530.719.617	17.427.356.693	18.920.518.724	-1.389.799.107		17.594.022.959	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95%	93,50%	93,50%	17.530.719.617	17.427.356.693	18.920.518.724	-1.389.799.107	94%	17.594.022.959	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					96.200.000	97.344.000	97.332.000	-1.132.000		18.200.000	
	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah					96.200.000	97.344.000	97.332.000	-1.132.000		18.200.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	96.200.000	97.344.000	97.332.000	-1.132.000	8 Dokumen	18.200.000	
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					96.200.000	97.344.000	97.332.000	-1.132.000		18.200.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	96.200.000	97.344.000	97.332.000	-1.132.000	8 Dokumen	18.200.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.749.741.311	15.749.741.311	17.181.048.490	-1.431.307.179		15.871.202.159	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					15.749.741.311	15.749.741.311	17.181.048.490	-1.431.307.179		15.871.202.159	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	49 Orang/bulan	15.749.741.311	15.749.741.311	17.181.048.490	-1.431.307.179	50 Orang/bulan	15.871.202.159	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					15.749.741.311	15.749.741.311	17.181.048.490	-1.431.307.179		15.871.202.159	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	49 Orang/bulan	15.749.741.311	15.749.741.311	17.181.048.490	-1.431.307.179	50 Orang/bulan	15.871.202.159	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.684.778.306	1.580.271.382	1.642.138.234	42.640.072		1.704.620.800	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					1.684.778.306	1.580.271.382	1.642.138.234	42.640.072		1.704.620.800	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.684.778.306	1.580.271.382	1.642.138.234	42.640.072	12 Laporan	1.704.620.800	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.684.778.306	1.580.271.382	1.642.138.234	42.640.072	12 Laporan	1.704.620.800	
2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					140.638.097	54.554.400	54.523.035	86.115.062		140.638.097	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	140.638.097	54.554.400	54.523.035	86.115.062	12 Laporan	140.638.097	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.544.140.209	1.525.716.982	1.587.615.199	-43.474.990		1.563.982.703	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.544.140.209	1.525.716.982	1.587.615.199	-43.474.990	12 Laporan	1.563.982.703	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					7.752.970.415	7.363.957.605	9.385.609.384	-1.632.638.969		8.060.433.639	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase peserta pelatihan dan sertifikasi yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja	43,5 %	41,50%	41,50%	7.752.970.415	7.363.957.605	9.385.609.384	-1.632.638.969	42%	8.060.433.639	
		Tingkat produktivitas tenaga kerja	36,29 %	32,96%	32,96%	7.752.970.415	7.363.957.605	9.385.609.384	-1.632.638.969	33,76 %	8.060.433.639	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					5.594.045.960	4.954.083.966	7.163.428.888	-1.569.382.928		5.850.894.424	
	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan					5.594.045.960	4.954.083.966	7.163.428.888	-1.569.382.928		5.850.894.424	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	784 Orang	720 Orang	720 Orang	5.594.045.960	4.954.083.966	7.163.428.888	-1.569.382.928	736 Orang	5.850.894.424	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					5.594.045.960	4.954.083.966	7.163.428.888	-1.569.382.928		5.850.894.424	
	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	784 Orang	720 Orang	720 Orang	5.594.045.960	4.954.083.966	7.163.428.888	-1.569.382.928	736 Orang	5.850.894.424	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.158.924.455	2.409.873.639	2.222.180.496	-63.256.041		2.209.539.215	
	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui sertifikasi					2.158.924.455	2.409.873.639	2.222.180.496	-63.256.041		2.209.539.215	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.158.924.455	2.409.873.639	2.222.180.496	-63.256.041	4 Dokumen	2.209.539.215	
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja					2.158.924.455	2.409.873.639	2.222.180.496	-63.256.041		2.209.539.215	
	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.158.924.455	2.409.873.639	2.222.180.496	-63.256.041	4 Dokumen	2.209.539.215	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.771.061.773	2.243.253.339	2.288.892.774	-517.831.001		1.856.681.956	
		Persentase pencari kerja terserap ke sektor formal	46,40 %	40,00%	40,00%	1.771.061.773	2.243.253.339	2.288.892.774	-517.831.001	41,60 %	1.856.681.956	
		Persentase tenaga kerja terserap ke sektor informal	11,60 %	10,00%	10,00%	1.771.061.773	2.243.253.339	2.288.892.774	-517.831.001	10,40 %	1.856.681.956	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					2.350.239.718	3.306.755.898	3.400.814.376	-1.050.574.658		2.519.766.676	
	Meningkatnya pelayanan antar kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan					2.350.239.718	3.306.755.898	3.400.814.376	-1.050.574.658		2.519.766.676	
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2000 Orang	1200 Orang	1200 Orang	2.350.239.718	3.306.755.898	3.400.814.376	-1.050.574.658	1400 Orang	2.519.766.676	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	300 Orang	250 Orang	250 Orang	2.350.239.718	3.306.755.898	3.400.814.376	-1.050.574.658	260 Orang	2.519.766.676	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2200 Orang	2075 Orang	2075 Orang	2.350.239.718	3.306.755.898	3.400.814.376	-1.050.574.658	2100 Orang	2.519.766.676	
	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan melalui padat karya					2.350.239.718	3.306.755.898	3.400.814.376	-1.050.574.658		2.519.766.676	
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2000 Orang	1200 Orang	1200 Orang	2.350.239.718	3.306.755.898	3.400.814.376	-1.050.574.658	1400 Orang	2.519.766.676	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	300 Orang	250 Orang	250 Orang	2.350.239.718	3.306.755.898	3.400.814.376	-1.050.574.658	260 Orang	2.519.766.676	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2200 Orang	2075 Orang	2075 Orang	2.350.239.718	3.306.755.898	3.400.814.376	-1.050.574.658	2100 Orang	2.519.766.676	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja					53.834.400	60.860.000	61.960.000	-8.125.600		97.536.280	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2200 Orang	2075 Orang	2075 Orang	53.834.400	60.860.000	61.960.000	-8.125.600	2100 Orang	97.536.280	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja					497.959.283	528.046.963	560.148.372	-62.189.089		513.559.283	
	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2000 Orang	1200 Orang	1200 Orang	497.959.283	528.046.963	560.148.372	-62.189.089	1400 Orang	513.559.283	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja					623.326.176	1.064.470.986	1.078.298.816	-454.972.640		648.787.775	
	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	300 Orang	250 Orang	250 Orang	623.326.176	1.064.470.986	1.078.298.816	-454.972.640	260 Orang	648.787.775	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					226.104.800	185.504.800	185.938.710	40.166.090		226.104.800	
	Meningkatnya akses pekerjaan melalui Bursa Kerja					226.104.800	185.504.800	185.938.710	40.166.090		226.104.800	
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang	250 Orang	250 Orang	226.104.800	185.504.800	185.938.710	40.166.090	260 Orang	226.104.800	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja					226.104.800	185.504.800	185.938.710	40.166.090		226.104.800	
	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang	250 Orang	250 Orang	226.104.800	185.504.800	185.938.710	40.166.090	260 Orang	226.104.800	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					369.837.114	404.370.590	402.546.876	-32.709.762		370.693.818	
	Meningkatnya kompetensi CPMI/PMI					369.837.114	404.370.590	402.546.876	-32.709.762		370.693.818	
		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	400 Orang	300 Orang	300 Orang	369.837.114	404.370.590	402.546.876	-32.709.762	320 Orang	370.693.818	
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)					369.837.114	404.370.590	402.546.876	-32.709.762		370.693.818	
	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	400 Orang	300 Orang	300 Orang	369.837.114	404.370.590	402.546.876	-32.709.762	320 Orang	370.693.818	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					6.523.857.732	6.923.434.326	7.304.067.060	-780.209.328		7.041.735.522	
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	68,58 %	60,78%	60,78%	6.523.857.732	6.923.434.326	7.304.067.060	-780.209.328	62,78 %	7.041.735.522	
		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	21,08 %	16,06%	16,06%	6.523.857.732	6.923.434.326	7.304.067.060	-780.209.328	17,32 %	7.041.735.522	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					743.415.616	790.182.310	1.068.615.344	-325.199.728		744.189.406	
	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial					743.415.616	790.182.310	1.068.615.344	-325.199.728		744.189.406	
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	743.415.616	790.182.310	1.068.615.344	-325.199.728	12 Laporan	744.189.406	
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	230 Perusahaan	230 Perusahaan	230 Perusahaan	743.415.616	790.182.310	1.068.615.344	-325.199.728	230 Perusahaan	744.189.406	
	Meningkatnya perusahaan yang menyampaikan data ketenagakerjaan					743.415.616	790.182.310	1.068.615.344	-325.199.728		744.189.406	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	743.415.616	790.182.310	1.068.615.344	-325.199.728	12 Laporan	744.189.406	
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	230 Perusahaan	230 Perusahaan	230 Perusahaan	743.415.616	790.182.310	1.068.615.344	-325.199.728	230 Perusahaan	744.189.406	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan					33.600.000	50.780.000	50.766.400	-17.166.400		33.600.000	
	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	230 Perusahaan	230 Perusahaan	230 Perusahaan	33.600.000	50.780.000	50.766.400	-17.166.400	230 Perusahaan	33.600.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan					709.815.616	739.402.310	1.017.848.944	-308.033.328		710.589.406	
	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	709.815.616	739.402.310	1.017.848.944	-308.033.328	12 Laporan	710.589.406	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					5.780.442.116	6.133.252.016	6.235.451.716	-455.009.600		6.297.546.116	
	Menurunnya permasalahan ketenagakerjaan					5.780.442.116	6.133.252.016	6.235.451.716	-455.009.600		6.297.546.116	
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	110 Perkara	110 Perkara	110 Perkara	5.780.442.116	6.133.252.016	6.235.451.716	-455.009.600	110 Perkara	6.297.546.116	
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100 Perkara	60 Perkara	60 Perkara	5.780.442.116	6.133.252.016	6.235.451.716	-455.009.600	70 Perkara	6.297.546.116	
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	37554 Orang	25650 Orang	25650 Orang	5.780.442.116	6.133.252.016	6.235.451.716	-455.009.600	28215 Orang	6.297.546.116	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					282.707.189	284.583.389	384.621.908	-101.914.719		282.707.189	
	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100 Perkara	60 Perkara	60 Perkara	282.707.189	284.583.389	384.621.908	-101.914.719	70 Perkara	282.707.189	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					326.694.927	346.248.627	348.409.808	-21.714.881		326.694.927	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	110 Perkara	110 Perkara	110 Perkara	326.694.927	346.248.627	348.409.808	-21.714.881	110 Perkara	326.694.927	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					5.171.040.000	5.502.420.000	5.502.420.000	-331.380.000		5.688.144.000	
	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	37554 Orang	25650 Orang	25650 Orang	5.171.040.000	5.502.420.000	5.502.420.000	-331.380.000	28215 Orang	5.688.144.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					1.061.805.723	1.061.805.723	1.165.565.224	-103.759.501		1.073.296.881	
3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.061.805.723	1.147.423.360	1.165.565.224	-103.759.501		1.073.296.881	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					555.711.687	623.543.960	633.262.408	-77.550.721		555.711.687	
		Persentase pelaku usaha industri kecil menengah yang memiliki kemampuan ekspor	32%	24%	24%	555.711.687	623.543.960	633.262.408	-77.550.721	26%	555.711.687	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					555.711.687	623.543.960	633.262.408	-77.550.721		555.711.687	
	Meningkatnya pendampingan peningkatan kualitas produk dan akses kemitraan pelaku usaha industri kecil menengah					555.711.687	623.543.960	633.262.408	-77.550.721		555.711.687	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	555.711.687	623.543.960	633.262.408	-77.550.721	1 Dokumen	555.711.687	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	555.711.687	623.543.960	633.262.408	-77.550.721	12 Dokumen	555.711.687	
		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	555.711.687	623.543.960	633.262.408	-77.550.721	1 Dokumen	555.711.687	
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					198.309.480	216.309.480	221.418.704	-23.109.224		152.109.480	
	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	198.309.480	216.309.480	221.418.704	-23.109.224	1 Dokumen	152.109.480	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					113.092.727	112.925.000	112.925.000	167.727		113.092.727	
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	113.092.727	112.925.000	112.925.000	167.727	1 Dokumen	113.092.727	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					244.309.480	294.309.480	298.918.704	-54.609.224		290.509.480	
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	244.309.480	294.309.480	298.918.704	-54.609.224	12 Dokumen	290.509.480	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					263.094.036	280.879.400	289.302.816	-26.208.780		263.094.035	
		Persentase Industri Kecil Menengah yang patuh	33%	25%	25%	263.094.036	280.879.400	289.302.816	-26.208.780	27%	263.094.035	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					263.094.036	280.879.400	289.302.816	-26.208.780		263.094.035	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya pengawasan terhadap pelaku usaha industri kecil menengah					263.094.036	280.879.400	289.302.816	-26.208.780		263.094.035	
		-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	263.094.036	280.879.400	289.302.816	-26.208.780	1 Dokumen	263.094.035	
		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	263.094.036	280.879.400	289.302.816	-26.208.780	12 Dokumen	263.094.035	
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota					137.539.700	137.539.700	141.751.408	-4.211.708		137.539.700	
	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	137.539.700	137.539.700	141.751.408	-4.211.708	1 Dokumen	137.539.700	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)					125.554.336	143.339.700	147.551.408	-21.997.072		125.554.335	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	125.554.336	143.339.700	147.551.408	-21.997.072	12 Dokumen	125.554.335	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					243.000.000	243.000.000	243.000.000	0		254.491.159	
		Persentase kepatuhan penyampaian data industri kecil menengah	100%	81%	81%	243.000.000	243.000.000	243.000.000	0	86%	254.491.159	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					243.000.000	243.000.000	243.000.000	0		254.491.159	
	Meningkatnya pelaporan operasional pelaku usaha industri kecil menengah					243.000.000	243.000.000	243.000.000	0		254.491.159	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	243.000.000	243.000.000	243.000.000	0	12 Dokumen	254.491.159	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					243.000.000	243.000.000	243.000.000	0		254.491.159	
	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	243.000.000	243.000.000	243.000.000	0	12 Dokumen	254.491.159	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					56.434.003.043	57.067.909.591	58.614.986.024	-2.180.982.981		57.910.420.726	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					56.434.003.043	56.434.003.043	58.614.986.024	-2.180.982.981		57.910.420.726	
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					28.238.833.230	28.014.720.866	29.662.648.567	-1.423.815.337		28.958.032.028	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.109.844.976	16.930.194.708	18.594.834.627	-1.484.989.651		17.363.669.594	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,30%	98,26%	98,26%	17.109.844.976	16.930.194.708	18.594.834.627	-1.484.989.651	98,27%	17.363.669.594	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					11.080.000	14.192.576	14.192.576	-3.112.576		11.137.805	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					11.080.000	14.192.576	14.192.576	-3.112.576		11.137.805	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	11.080.000	14.192.576	14.192.576	-3.112.576	8 Dokumen	11.137.805	
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					11.080.000	14.192.576	14.192.576	-3.112.576		11.137.805	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	11.080.000	14.192.576	14.192.576	-3.112.576	8 Dokumen	11.137.805	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.482.012.020	14.482.012.020	16.181.950.089	-1.699.938.069		14.591.879.927	
	Meningkatnya ketepatan waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah					14.482.012.020	14.482.012.020	16.181.950.089	-1.699.938.069		14.591.879.927	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	39 Orang/bulan	14.482.012.020	14.482.012.020	16.181.950.089	-1.699.938.069	35 Orang/bulan	14.591.879.927	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14.482.012.020	14.482.012.020	16.181.950.089	-1.699.938.069		14.591.879.927	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	39 Orang/bulan	14.482.012.020	14.482.012.020	16.181.950.089	-1.699.938.069	35 Orang/bulan	14.591.879.927	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.136.935.191	482.487.546	384.959.781	1.751.975.410		2.280.398.494	
	Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.136.935.191	482.487.546	384.959.781	1.751.975.410		2.280.398.494	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.136.935.191	482.487.546	384.959.781	1.751.975.410	12 Paket	2.280.398.494	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.136.935.191	482.487.546	384.959.781	1.751.975.410		2.280.398.494	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.136.935.191	482.487.546	384.959.781	1.751.975.410	12 Paket	2.280.398.494	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					479.817.765	1.951.502.566	2.013.732.181	-1.533.914.416		480.253.368	
	Meningkatnya ketersediaan barang jasa dan pelayanan umum perkantoran					479.817.765	1.951.502.566	2.013.732.181	-1.533.914.416		480.253.368	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	479.817.765	1.951.502.566	2.013.732.181	-1.533.914.416	12 Laporan	480.253.368	
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					479.817.765	1.951.502.566	2.013.732.181	-1.533.914.416		480.253.368	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	479.817.765	1.951.502.566	2.013.732.181	-1.533.914.416	12 Laporan	480.253.368	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					3.101.740.427	2.926.717.726	2.921.919.067	179.821.360		3.260.523.296	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	100%	100%	100%	3.101.740.427	2.926.717.726	2.921.919.067	179.821.360	100%	3.260.523.296	
		Persentase organisasi perempuan yang berperan aktif dalam pemberdayaan gender	100%	100%	100%	3.101.740.427	2.926.717.726	2.921.919.067	179.821.360	100%	3.260.523.296	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					700.506.414	742.273.211	751.732.759	-51.226.345		709.094.117	
	Terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah					700.506.414	742.273.211	751.732.759	-51.226.345		709.094.117	
		jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	220 Orang	58 Lembaga	59 Lembaga	700.506.414	742.273.211	751.732.759	-51.226.345	220 Orang	709.094.117	
2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota					700.506.414	742.273.211	751.732.759	-51.226.345		709.094.117	
	terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	220 Orang	58 Lembaga	59 Lembaga	700.506.414	742.273.211	751.732.759	-51.226.345	220 Orang	709.094.117	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					548.692.273	418.736.023	428.319.816	120.372.457		550.617.553	
	Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dalam mendorong partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi					548.692.273	418.736.023	428.319.816	120.372.457		550.617.553	
		jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	610 Orang	610 Orang	610 Orang	548.692.273	418.736.023	428.319.816	120.372.457	610 Orang	550.617.553	
2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					548.692.273	418.736.023	428.319.816	120.372.457		550.617.553	
	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	610 Orang	610 Orang	610 Orang	548.692.273	418.736.023	428.319.816	120.372.457	610 Orang	550.617.553	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					1.852.541.740	1.765.708.492	1.741.866.492	110.675.248		2.000.811.626	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan					1.852.541.740	1.765.708.492	1.741.866.492	110.675.248		2.000.811.626	
		jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	1.852.541.740	1.765.708.492	1.741.866.492	110.675.248	12 Laporan	2.000.811.626	
2.08.02.2.03.0009	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota					1.852.541.740	1.765.708.492	1.741.866.492	110.675.248		2.000.811.626	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	1.852.541.740	1.765.708.492	1.741.866.492	110.675.248	12 Laporan	2.000.811.626	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					1.676.930.662	1.800.360.855	1.737.698.196	-60.767.534		1.685.075.516	
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan dalam waktu ≤ 12 jam	100%	100%	100%	1.676.930.662	1.800.360.855	1.737.698.196	-60.767.534	100%	1.685.075.516	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					36.212.400	37.004.400	37.004.400	-792.000		36.399.690	
	Terlaksananya Advokasi dan pencegahan KtP dan TPPO					36.212.400	37.004.400	37.004.400	-792.000		36.399.690	
		Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1 Kegiatan	184 Lembaga	184 Lembaga	36.212.400	37.004.400	37.004.400	-792.000	1 Kegiatan	36.399.690	
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota					36.212.400	37.004.400	37.004.400	-792.000		36.399.690	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1 Kegiatan	184 Lembaga	184 Lembaga	36.212.400	37.004.400	37.004.400	-792.000	1 Kegiatan	36.399.690	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					1.274.737.650	1.378.108.828	1.371.025.388	-96.287.738		1.281.609.356	
	Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan					1.274.737.650	1.378.108.828	1.371.025.388	-96.287.738		1.281.609.356	
		Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	Orang	24 orang	24 orang	1.274.737.650	1.378.108.828	1.371.025.388	-96.287.738	Orang	1.281.609.356	
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatan/Kota	Lembaga	24 orang	24 orang	1.274.737.650	1.378.108.828	1.371.025.388	-96.287.738	Lembaga	1.281.609.356	
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	20 orang	120 orang	1.274.737.650	1.378.108.828	1.371.025.388	-96.287.738	20 Orang	1.281.609.356	
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang	36 Orang	1.274.737.650	1.378.108.828	1.371.025.388	-96.287.738	6 Orang	1.281.609.356	
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	20 orang	120 orang	1.274.737.650	1.378.108.828	1.371.025.388	-96.287.738	20 Orang	1.281.609.356	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
2.08.03.2.02.0003	Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS, Jamkesda, dan Sumber Pendanaan Lainnya Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					0	0	5.040.000	-5.040.000		0	
	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	Orang	24 orang	24 orang	0	0	5.040.000	-5.040.000	Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.02.0004	Layanan Gelar Kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					0	0	70.386.000	-70.386.000		0	
	Tersedianya layanan gelar kasus bagi perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota	Lembaga	24 orang	24 orang	0	0	70.386.000	-70.386.000	Lembaga	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					375.312.775	377.375.941	368.803.596	6.509.179		377.730.174	
	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang	36 Orang	375.312.775	377.375.941	368.803.596	6.509.179	6 Orang	377.730.174	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					807.314.675	906.968.295	903.983.200	-96.668.525		811.525.266	
	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	20 orang	120 orang	807.314.675	906.968.295	903.983.200	-96.668.525	20 Orang	811.525.266	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					92.110.200	93.764.592	22.812.592	69.297.608		92.353.916	
	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	20 orang	120 orang	92.110.200	93.764.592	22.812.592	69.297.608	20 Orang	92.353.916	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					365.980.612	385.247.627	329.668.408	36.312.204		367.066.470	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan					365.980.612	385.247.627	329.668.408	36.312.204		367.066.470	
		Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	365.980.612	385.247.627	329.668.408	36.312.204	184 Lembaga	367.066.470	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	50 Orang	50 orang	208 orang	365.980.612	385.247.627	329.668.408	36.312.204	50 Orang	367.066.470	
2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					331.596.046	350.943.627	295.364.408	36.231.638		332.681.904	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	184 Lembaga	184 Lembaga	184 Lembaga	331.596.046	350.943.627	295.364.408	36.231.638	184 Lembaga	332.681.904	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					34.384.566	34.304.000	34.304.000	80.566		34.384.566	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	50 Orang	50 orang	208 orang	34.384.566	34.304.000	34.304.000	80.566	50 Orang	34.384.566	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					1.154.750.739	1.307.225.377	1.338.629.365	-183.878.626		1.277.616.404	
		Persentase keluarga yang memiliki akses dan mendapat layanan konseling/konsultasi Puspaga	100%	100%	100%	1.154.750.739	1.307.225.377	1.338.629.365	-183.878.626	100%	1.277.616.404	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.154.750.739	1.307.225.377	1.338.629.365	-183.878.626		1.277.616.404	
	Tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak					1.154.750.739	1.307.225.377	1.338.629.365	-183.878.626		1.277.616.404	
		Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang	150 Orang	1.154.750.739	1.307.225.377	1.338.629.365	-183.878.626	120 Orang	1.277.616.404	
2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota					1.154.750.739	1.307.225.377	1.338.629.365	-183.878.626		1.277.616.404	
	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang	150 Orang	1.154.750.739	1.307.225.377	1.338.629.365	-183.878.626	120 Orang	1.277.616.404	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					248.611.597	229.286.451	238.756.799	9.854.798		249.826.597	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan data terpilah gender dan anak dalam perencanaan program atau kegiatan	100%	100%	100%	248.611.597	229.286.451	238.756.799	9.854.798	100%	249.826.597	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					248.611.597	229.286.451	238.756.799	9.854.798		249.826.597	
	Tersedianya Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data					248.611.597	229.286.451	238.756.799	9.854.798		249.826.597	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248.611.597	229.286.451	238.756.799	9.854.798	1 Dokumen	249.826.597	
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota					248.611.597	229.286.451	238.756.799	9.854.798		249.826.597	
	Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	248.611.597	229.286.451	238.756.799	9.854.798	1 Dokumen	249.826.597	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					2.207.812.590	1.614.717.959	1.562.957.878	644.854.712		2.365.403.513	
		Persentase Kelurahan Layak Anak	100%	100%	100%	2.207.812.590	1.614.717.959	1.562.957.878	644.854.712	100%	2.365.403.513	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					2.207.812.590	1.614.717.959	1.562.957.878	644.854.712		2.365.403.513	
	Terlaksananya Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha					2.207.812.590	1.614.717.959	1.562.957.878	644.854.712		2.365.403.513	
		Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	153 Lembaga	153 Lembaga	153 Lembaga	2.207.812.590	1.614.717.959	1.562.957.878	644.854.712	153 Lembaga	2.365.403.513	
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					2.207.812.590	1.614.717.959	1.562.957.878	644.854.712		2.365.403.513	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	153 Lembaga	153 Lembaga	153 Lembaga	2.207.812.590	1.614.717.959	1.562.957.878	644.854.712	153 Lembaga	2.365.403.513	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					2.739.142.239	3.206.217.790	3.267.852.635	-528.710.396		2.755.917.108	
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan sesuai standar pelayanan dalam waktu ≤ 12 jam	100%	100%	100%	2.739.142.239	3.206.217.790	3.267.852.635	-528.710.396	100%	2.755.917.108	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					65.287.600	64.995.600	64.995.600	292.000		65.752.358	
	Meningkatnya peran lembaga dalam advokasi pencegahan KtA					65.287.600	64.995.600	64.995.600	292.000		65.752.358	
		Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	65.287.600	64.995.600	64.995.600	292.000	2 Kegiatan	65.752.358	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota					65.287.600	64.995.600	64.995.600	292.000		65.752.358	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	65.287.600	64.995.600	64.995.600	292.000	2 Kegiatan	65.752.358	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.639.219.205	3.106.166.190	3.167.801.035	-528.581.830		2.655.529.316	
	Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus					2.639.219.205	3.106.166.190	3.167.801.035	-528.581.830		2.655.529.316	
		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	24 orang	24 orang	2.639.219.205	3.106.166.190	3.167.801.035	-528.581.830	Orang	2.655.529.316	
		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	264 Orang	2.639.219.205	3.106.166.190	3.167.801.035	-528.581.830	150 Orang	2.655.529.316	
		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	33 Orang	33 Orang	50 Orang	2.639.219.205	3.106.166.190	3.167.801.035	-528.581.830	33 Orang	2.655.529.316	
		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	12 orang	12 orang	2.639.219.205	3.106.166.190	3.167.801.035	-528.581.830	2 Kegiatan	2.655.529.316	
		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	264 Orang	2.639.219.205	3.106.166.190	3.167.801.035	-528.581.830	150 Orang	2.655.529.316	
		Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Orang	24 orang	48 orang	2.639.219.205	3.106.166.190	3.167.801.035	-528.581.830	200 Orang	2.655.529.316	
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					1.082.204.679	1.198.665.460	1.198.665.459	-116.460.780		1.084.316.864	
	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	264 Orang	1.082.204.679	1.198.665.460	1.198.665.459	-116.460.780	150 Orang	1.084.316.864	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.02.0011	Layanan Gelar Kasus Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					0	0	71.184.600	-71.184.600		0	
	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	24 orang	24 orang	0	0	71.184.600	-71.184.600	Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					1.337.599.226	1.613.995.322	1.724.541.844	-386.942.618		1.350.594.216	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	33 Orang	33 Orang	50 Orang	1.337.599.226	1.613.995.322	1.724.541.844	-386.942.618	33 Orang	1.350.594.216	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					219.415.300	293.505.408	151.833.900	67.581.400		220.618.236	
	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	264 Orang	219.415.300	293.505.408	151.833.900	67.581.400	150 Orang	220.618.236	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.02.0014	Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS, Jamkesda, dan Sumber Pendanaan Lainnya Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					0	0	13.440.000	-13.440.000		0	
	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Orang	24 orang	48 orang	0	0	13.440.000	-13.440.000	200 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.02.0015	Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					0	0	8.135.232	-8.135.232		0	
	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi anak korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	12 orang	12 orang	0	0	8.135.232	-8.135.232	2 Kegiatan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					34.635.434	35.056.000	35.056.000	-420.566		34.635.434	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus					34.635.434	35.056.000	35.056.000	-420.566		34.635.434	
		jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	50 Orang	50 Orang	208 Orang	34.635.434	35.056.000	35.056.000	-420.566	50 Orang	34.635.434	
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai					34.635.434	35.056.000	35.056.000	-420.566		34.635.434	
	terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	50 Orang	50 Orang	208 Orang	34.635.434	35.056.000	35.056.000	-420.566	50 Orang	34.635.434	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					28.195.169.813	29.053.188.725	28.952.337.457	-757.167.644		28.952.388.698	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					549.139.500	711.671.472	657.671.472	-108.531.972		549.882.008	
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	5,80 kelahiran hidup per 1000 perempuan	5.80 kelahiran hidup per 1000 perempuan	10,3 kelahiran hidup per 1000 perempuan	549.139.500	711.671.472	657.671.472	-108.531.972	5,80 kelahiran hidup per 1000 perempuan	549.882.008	
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,68 %	1,68%	1,68%	549.139.500	711.671.472	657.671.472	-108.531.972	1,68 %	549.882.008	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					234.964.500	310.849.072	256.849.072	-21.884.572		235.675.807	
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi					234.964.500	310.849.072	256.849.072	-21.884.572		235.675.807	
		Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	2 Laporan / Dokumen	57 Satuan Pendidikan	57 Satuan Pendidikan	234.964.500	310.849.072	256.849.072	-21.884.572	2 Laporan / Dokumen	235.675.807	
		Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	234.964.500	310.849.072	256.849.072	-21.884.572	1 Dokumen	235.675.807	
2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota					110.000.000	104.499.072	65.499.072	44.500.928		110.394.130	
	Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	104.499.072	65.499.072	44.500.928	1 Dokumen	110.394.130	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal					124.964.500	206.350.000	191.350.000	-66.385.500		125.281.677	
	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	2 Laporan / Dokumen	57 Satuan Pendidikan	57 Satuan Pendidikan	124.964.500	206.350.000	191.350.000	-66.385.500	2 Laporan / Dokumen	125.281.677	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					314.175.000	400.822.400	400.822.400	-86.647.400		314.206.201	
	Terlaksananya koordinasi pemetaan data perkiraan dalam rangka pengendalian penduduk					314.175.000	400.822.400	400.822.400	-86.647.400		314.206.201	
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	314.175.000	400.822.400	400.822.400	-86.647.400	1 Dokumen	314.206.201	
		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	314.175.000	400.822.400	400.822.400	-86.647.400	1 Laporan	314.206.201	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					212.700.000	299.400.000	91.800.000	120.900.000		212.700.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	212.700.000	299.400.000	91.800.000	120.900.000	1 Laporan	212.700.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					101.475.000	101.422.400	309.022.400	-207.547.400		101.506.201	
	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	101.475.000	101.422.400	309.022.400	-207.547.400	1 Dokumen	101.506.201	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					7.788.204.731	5.110.142.502	4.973.665.704	2.814.539.027		8.085.165.263	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,50 %	14,50%	13%	7.788.204.731	5.110.142.502	4.973.665.704	2.814.539.027	14,00 %	8.085.165.263	
		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	18%	20,00%	20,00%	7.788.204.731	5.110.142.502	4.973.665.704	2.814.539.027	19,5 %	8.085.165.263	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					565.000.000	575.264.100	605.264.100	-40.264.100		565.000.000	
	Terlaksananya kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					565.000.000	575.264.100	605.264.100	-40.264.100		565.000.000	
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	565.000.000	575.264.100	605.264.100	-40.264.100	1 Dokumen	565.000.000	
		Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		1 laporan	1 laporan	565.000.000	575.264.100	605.264.100	-40.264.100		565.000.000	
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	565.000.000	575.264.100	605.264.100	-40.264.100	1 Laporan	565.000.000	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana					0	0	30.000.000	-30.000.000		0	
	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		1 laporan	1 laporan	0	0	30.000.000	-30.000.000		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					465.000.000	474.990.500	474.990.500	-9.990.500		465.000.000	
	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	465.000.000	474.990.500	474.990.500	-9.990.500	1 Laporan	465.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					100.000.000	100.273.600	100.273.600	-273.600		100.000.000	
	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.273.600	100.273.600	-273.600	1 Dokumen	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					813.184.841	664.428.534	585.217.722	227.967.119		854.747.984	
	Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					813.184.841	664.428.534	585.217.722	227.967.119		854.747.984	
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2214 Orang	2214 Orang	2214 Orang	813.184.841	664.428.534	585.217.722	227.967.119	2214 Orang	854.747.984	
		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	813.184.841	664.428.534	585.217.722	227.967.119	1 Laporan	854.747.984	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					428.400.000	114.750.000	51.634.440	376.765.560		428.400.000	
	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2214 Orang	2214 Orang	2214 Orang	428.400.000	114.750.000	51.634.440	376.765.560	2214 Orang	428.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					384.784.841	549.678.534	533.583.282	-148.798.441		426.347.984	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	384.784.841	549.678.534	533.583.282	-148.798.441	1 Laporan	426.347.984	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					5.726.724.834	3.295.394.868	3.208.128.882	2.518.595.952		5.976.923.967	
	Terkendalinya pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi					5.726.724.834	3.295.394.868	3.208.128.882	2.518.595.952		5.976.923.967	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.726.724.834	3.295.394.868	3.208.128.882	2.518.595.952	1 Laporan	5.976.923.967	
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.726.724.834	3.295.394.868	3.208.128.882	2.518.595.952	1 Laporan	5.976.923.967	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	1950 Orang	2911 Orang	5.726.724.834	3.295.394.868	3.208.128.882	2.518.595.952	1950 Orang	5.976.923.967	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					543.519.834	420.680.868	333.414.882	210.104.952		793.718.967	
	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	543.519.834	420.680.868	333.414.882	210.104.952	1 Laporan	793.718.967	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					5.169.705.000	2.861.214.000	2.861.214.000	2.308.491.000		5.169.705.000	
	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang	1950 Orang	2911 Orang	5.169.705.000	2.861.214.000	2.861.214.000	2.308.491.000	1950 Orang	5.169.705.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					13.500.000	13.500.000	13.500.000	0		13.500.000	
	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0	1 Laporan	13.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					683.295.056	575.055.000	575.055.000	108.240.056		688.493.312	
	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					683.295.056	575.055.000	575.055.000	108.240.056		688.493.312	
		Jumlah DASHAT di Kampung KB	0 Unit	3 Unit	3 Unit	683.295.056	575.055.000	575.055.000	108.240.056	0 Unit	688.493.312	
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Kampung	153 Kampung	153 Kampung	683.295.056	575.055.000	575.055.000	108.240.056	0 Kampung	688.493.312	
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas					318.495.056	324.455.000	324.455.000	-5.959.944		323.693.312	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	0 Unit	3 Unit	3 Unit	318.495.056	324.455.000	324.455.000	-5.959.944	0 Unit	323.693.312	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					364.800.000	250.600.000	250.600.000	114.200.000		364.800.000	
	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Kampung	153 Kampung	153 Kampung	364.800.000	250.600.000	250.600.000	114.200.000	0 Kampung	364.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					19.857.825.582	23.231.374.751	23.321.000.281	-3.463.174.699		20.317.341.427	
		Indeks Lansia Berdaya	67,8 %	59,80%	71,3 %	19.857.825.582	23.231.374.751	23.321.000.281	-3.463.174.699	61,8 %	20.317.341.427	
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	91,7 %	88,60%	88,60%	19.857.825.582	23.231.374.751	23.321.000.281	-3.463.174.699	89,5 %	20.317.341.427	
		Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	22,80 tahun	22.45 tahun	22,1 tahun	19.857.825.582	23.231.374.751	23.321.000.281	-3.463.174.699	22,50 tahun	20.317.341.427	
		Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	100%	100%	100%	19.857.825.582	23.231.374.751	23.321.000.281	-3.463.174.699	100%	20.317.341.427	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					5.909.625.582	8.618.974.751	8.708.600.281	-2.798.974.699		6.369.141.427	
	Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan kesejahteraan keluarga					5.909.625.582	8.618.974.751	8.708.600.281	-2.798.974.699		6.369.141.427	
		Jumlah kelompok kegiatan/poktan atau setara poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapatkan biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan)	1490000 Orang	155 kelompok	155 kelompok	5.909.625.582	8.618.974.751	8.708.600.281	-2.798.974.699	1490000 Orang	6.369.141.427	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	153 Kelompok	153 Kelompok	153 Kelompok	5.909.625.582	8.618.974.751	8.708.600.281	-2.798.974.699	153 Kelompok	6.369.141.427	
		Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	5.909.625.582	8.618.974.751	8.708.600.281	-2.798.974.699	1 Laporan / Dokumen	6.369.141.427	
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.909.625.582	8.618.974.751	8.708.600.281	-2.798.974.699	1 Laporan	6.369.141.427	
		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	6 Unit	6 Unit	5.909.625.582	8.618.974.751	8.708.600.281	-2.798.974.699	6 Unit	6.369.141.427	
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)					156.164.000	154.674.016	130.200.000	25.964.000		204.524.000	
	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	156.164.000	154.674.016	130.200.000	25.964.000	1 Laporan / Dokumen	204.524.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					1.550.379.007	3.070.728.738	3.084.633.432	-1.534.254.425		1.647.281.204	
	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.550.379.007	3.070.728.738	3.084.633.432	-1.534.254.425	1 Laporan	1.647.281.204	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					120.000.000	138.000.000	138.000.000	-18.000.000		120.000.000	
	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	6 Unit	6 Unit	120.000.000	138.000.000	138.000.000	-18.000.000	6 Unit	120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					0	0	63.115.560	-63.115.560		0	
	Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kelompok kegiatan/poktan atau setara poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapatkan biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan)	1490000 Orang	155 kelompok	155 kelompok	0	0	63.115.560	-63.115.560	1490000 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)					4.083.082.575	5.255.571.997	5.292.651.289	-1.209.568.714		4.397.336.223	
	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	153 Kelompok	153 Kelompok	153 Kelompok	4.083.082.575	5.255.571.997	5.292.651.289	-1.209.568.714	153 Kelompok	4.397.336.223	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					13.948.200.000	14.612.400.000	14.612.400.000	-664.200.000		13.948.200.000	
	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					13.948.200.000	14.612.400.000	14.612.400.000	-664.200.000		13.948.200.000	
		Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	13.948.200.000	14.612.400.000	14.612.400.000	-664.200.000	1 laporan	13.948.200.000	
		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	6642 Keluarga	1 laporan	1 laporan	13.948.200.000	14.612.400.000	14.612.400.000	-664.200.000	6642 Keluarga	13.948.200.000	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					6.642.000.000	3.321.000.000	3.321.000.000	3.321.000.000		6.642.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	6.642.000.000	3.321.000.000	3.321.000.000	3.321.000.000	1 laporan	6.642.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					7.306.200.000	11.291.400.000	11.291.400.000	-3.985.200.000		7.306.200.000	
	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	6642 Keluarga	1 laporan	1 laporan	7.306.200.000	11.291.400.000	11.291.400.000	-3.985.200.000	6642 Keluarga	7.306.200.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					44.899.380.854	46.880.703.735	45.662.552.740	-763.171.886		45.502.842.113	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					26.574.284.299	26.574.284.299	24.893.263.388	1.681.020.911		26.776.256.892	
2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					26.574.284.299	26.350.289.679	24.893.263.388	1.681.020.911		26.776.256.892	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.871.566.551	24.928.531.632	23.421.179.428	1.450.387.123		25.059.738.516	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,80 %	94,60%	94,60%	24.871.566.551	24.928.531.632	23.421.179.428	1.450.387.123	94,65 %	25.059.738.516	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					62.400.000	70.170.000	43.140.600	19.259.400		62.400.000	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					62.400.000	70.170.000	43.140.600	19.259.400		62.400.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	62.400.000	70.170.000	43.140.600	19.259.400	8 Dokumen	62.400.000	
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					62.400.000	70.170.000	43.140.600	19.259.400		62.400.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	62.400.000	70.170.000	43.140.600	19.259.400	8 Dokumen	62.400.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					21.440.327.898	21.440.327.898	19.807.546.492	1.632.781.406		21.606.473.401	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					21.440.327.898	21.440.327.898	19.807.546.492	1.632.781.406		21.606.473.401	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	79 Orang/bulan	59 Orang/bulan	21.440.327.898	21.440.327.898	19.807.546.492	1.632.781.406	79 Orang/bulan	21.606.473.401	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					21.440.327.898	21.440.327.898	19.807.546.492	1.632.781.406		21.606.473.401	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	79 Orang/bulan	59 Orang/bulan	21.440.327.898	21.440.327.898	19.807.546.492	1.632.781.406	79 Orang/bulan	21.606.473.401	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.368.838.653	3.418.033.734	3.570.492.336	-201.653.683		3.390.865.115	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa serta terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran					3.368.838.653	3.418.033.734	3.570.492.336	-201.653.683		3.390.865.115	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.368.838.653	3.418.033.734	3.570.492.336	-201.653.683	12 Laporan	3.390.865.115	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.368.838.653	3.418.033.734	3.570.492.336	-201.653.683	12 Laporan	3.390.865.115	
2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					601.314.621	794.725.504	821.754.904	-220.440.283		601.779.561	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	601.314.621	794.725.504	821.754.904	-220.440.283	12 Laporan	601.779.561	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.767.524.032	2.623.308.230	2.748.737.432	18.786.600		2.789.085.554	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.767.524.032	2.623.308.230	2.748.737.432	18.786.600	12 Laporan	2.789.085.554	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					678.042.470	452.094.926	461.364.328	216.678.142		687.401.109	
		Skor Pola Pangan Harapan	95,5 Nilai	95.35 Nilai	96.31 Nilai	678.042.470	452.094.926	461.364.328	216.678.142	95,35 Nilai	687.401.109	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					678.042.470	452.094.926	461.364.328	216.678.142		687.401.109	
	Meningkatnya Cakupan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					678.042.470	452.094.926	461.364.328	216.678.142		687.401.109	
		Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	678.042.470	452.094.926	461.364.328	216.678.142	2 Dokumen	687.401.109	
2.09.03.2.04.0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					678.042.470	452.094.926	461.364.328	216.678.142		687.401.109	
	Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	678.042.470	452.094.926	461.364.328	216.678.142	2 Dokumen	687.401.109	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					479.938.455	541.174.222	564.689.008	-84.750.553		480.511.695	
		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	0%	0%	0%	479.938.455	541.174.222	564.689.008	-84.750.553	0%	480.511.695	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota					479.938.455	541.174.222	564.689.008	-84.750.553		480.511.695	
	Meningkatnya efektivitas upaya penanganan dan pencegahan kerawanan pangan					479.938.455	541.174.222	564.689.008	-84.750.553		480.511.695	
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	479.938.455	541.174.222	564.689.008	-84.750.553	15 Laporan	480.511.695	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota					479.938.455	541.174.222	564.689.008	-84.750.553		480.511.695	
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	479.938.455	541.174.222	564.689.008	-84.750.553	15 Laporan	480.511.695	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					544.736.823	428.488.899	446.030.624	98.706.199		548.605.572	
		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	97,99 %	97,91%	99,36 %	544.736.823	428.488.899	446.030.624	98.706.199	97,93 %	548.605.572	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					544.736.823	428.488.899	446.030.624	98.706.199		548.605.572	
	Meningkatnya upaya pengawasan keamanan pangan segar					544.736.823	428.488.899	446.030.624	98.706.199		548.605.572	
		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	544.736.823	428.488.899	446.030.624	98.706.199	36 Dokumen	548.605.572	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					544.736.823	428.488.899	446.030.624	98.706.199		548.605.572	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	544.736.823	428.488.899	446.030.624	98.706.199	36 Dokumen	548.605.572	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					18.325.096.555	18.325.096.555	20.769.289.352	-2.444.192.797		18.726.585.221	
3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					4.248.315.975	5.002.377.928	5.058.313.296	-809.997.321		4.106.586.953	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.199.045.486	1.182.880.075	1.157.898.767	41.146.719		1.021.045.206	
		Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	45%	45%	45%	1.199.045.486	1.182.880.075	1.157.898.767	41.146.719	45%	1.021.045.206	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.199.045.486	1.182.880.075	1.157.898.767	41.146.719		1.021.045.206	
	Meningkatnya upaya pemberdayaan nelayan kecil					1.199.045.486	1.182.880.075	1.157.898.767	41.146.719		1.021.045.206	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	65 Unit	65 Unit	65 Unit	1.199.045.486	1.182.880.075	1.157.898.767	41.146.719	65 Unit	1.021.045.206	
3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil					1.199.045.486	1.182.880.075	1.157.898.767	41.146.719		1.021.045.206	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	65 Unit	65 Unit	65 Unit	1.199.045.486	1.182.880.075	1.157.898.767	41.146.719	65 Unit	1.021.045.206	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.079.166.516	1.329.379.329	1.364.249.879	-285.083.363		1.083.498.700	
		Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	50 orang	40 orang	40 orang	1.079.166.516	1.329.379.329	1.364.249.879	-285.083.363	40 orang	1.083.498.700	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					289.530.000	492.831.087	492.208.099	-202.678.099		289.992.446	
	Meningkatnya upaya pemberdayaan pembudidaya perikanan					289.530.000	492.831.087	492.208.099	-202.678.099		289.992.446	
		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	40 Kelompok	38 Kelompok	38 Kelompok	289.530.000	492.831.087	492.208.099	-202.678.099	38 Kelompok	289.992.446	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					289.530.000	492.831.087	492.208.099	-202.678.099		289.992.446	
	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	40 Kelompok	38 Kelompok	38 Kelompok	289.530.000	492.831.087	492.208.099	-202.678.099	38 Kelompok	289.992.446	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					789.636.516	836.548.242	872.041.780	-82.405.264		793.506.254	
	Meningkatnya upaya pendampingan pembudidaya perikanan					789.636.516	836.548.242	872.041.780	-82.405.264		793.506.254	
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63 Unit	63 Unit	63 Unit	789.636.516	836.548.242	872.041.780	-82.405.264	63 Unit	793.506.254	
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					789.636.516	836.548.242	872.041.780	-82.405.264		793.506.254	
	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63 Unit	63 Unit	63 Unit	789.636.516	836.548.242	872.041.780	-82.405.264	63 Unit	793.506.254	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					365.975.844	365.620.600	366.875.800	-899.956		366.893.897	
		Persentase Kepatuhan Nelayan Perikanan Tangkap	95%	95%	95%	365.975.844	365.620.600	366.875.800	-899.956	95%	366.893.897	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					365.975.844	365.620.600	366.875.800	-899.956		366.893.897	
	Meningkatnya upaya pengawasan sumber daya perikanan					365.975.844	365.620.600	366.875.800	-899.956		366.893.897	
		Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	105 Pelaku Usaha	105 Pelaku Usaha	105 Pelaku Usaha	365.975.844	365.620.600	366.875.800	-899.956	105 Pelaku Usaha	366.893.897	
		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1768 Pelaku Usaha	1768 Pelaku Usaha	1768 Pelaku Usaha	365.975.844	365.620.600	366.875.800	-899.956	1768 Pelaku Usaha	366.893.897	
3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota					131.561.840	131.272.600	132.343.450	-781.610		131.722.280	
	Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1768 Pelaku Usaha	1768 Pelaku Usaha	1768 Pelaku Usaha	131.561.840	131.272.600	132.343.450	-781.610	1768 Pelaku Usaha	131.722.280	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam					234.414.004	234.348.000	234.532.350	-118.346		235.171.617	
	Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	105 Pelaku Usaha	105 Pelaku Usaha	105 Pelaku Usaha	234.414.004	234.348.000	234.532.350	-118.346	105 Pelaku Usaha	235.171.617	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.604.128.129	2.124.497.924	2.169.288.850	-565.160.721		1.635.149.150	
		Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang aktif	75%	75%	75%	1.604.128.129	2.124.497.924	2.169.288.850	-565.160.721	75%	1.635.149.150	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					1.604.128.129	2.124.497.924	2.169.288.850	-565.160.721		1.635.149.150	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan sentra pemasaran hasil perikanan					1.604.128.129	2.124.497.924	2.169.288.850	-565.160.721		1.635.149.150	
		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	180 Pelaku Usaha	180 Pelaku Usaha	180 Pelaku Usaha	1.604.128.129	2.124.497.924	2.169.288.850	-565.160.721	180 Pelaku Usaha	1.635.149.150	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.604.128.129	2.124.497.924	2.169.288.850	-565.160.721		1.635.149.150	
	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	180 Pelaku Usaha	180 Pelaku Usaha	180 Pelaku Usaha	1.604.128.129	2.124.497.924	2.169.288.850	-565.160.721	180 Pelaku Usaha	1.635.149.150	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					14.076.780.580	15.528.036.128	15.710.976.056	-1.634.195.476		14.619.998.268	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					4.045.469.252	4.703.237.357	4.898.445.087	-852.975.835		4.404.926.602	
		Persentase sarana prasarana peternakan yang terstandarisasi	100%	100%	100%	4.045.469.252	4.703.237.357	4.898.445.087	-852.975.835	100%	4.404.926.602	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Produksi Hortikultura Pertanian Perkotaan	8,74 Ton	8.33 Ton	12 Ton	4.045.469.252	4.703.237.357	4.898.445.087	-852.975.835	8,43 Ton	4.404.926.602	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					2.487.440.120	2.622.831.461	2.687.587.057	-200.146.937		2.803.281.736	
	Meningkatnya upaya pendampingan dan pembinaan budidaya pertanian perkotaan					2.487.440.120	2.622.831.461	2.687.587.057	-200.146.937		2.803.281.736	
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.487.440.120	2.622.831.461	2.687.587.057	-200.146.937	4 Laporan	2.803.281.736	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					2.487.440.120	2.622.831.461	2.687.587.057	-200.146.937		2.803.281.736	
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.487.440.120	2.622.831.461	2.687.587.057	-200.146.937	4 Laporan	2.803.281.736	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.558.029.132	2.080.405.896	2.210.858.030	-652.828.898		1.601.644.866	
	Meningkatnya upaya pendampingan dan pembinaan budidaya peternakan					1.558.029.132	2.080.405.896	2.210.858.030	-652.828.898		1.601.644.866	
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.558.029.132	2.080.405.896	2.210.858.030	-652.828.898	12 Laporan	1.601.644.866	
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil					1.558.029.132	2.080.405.896	2.210.858.030	-652.828.898		1.601.644.866	
	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.558.029.132	2.080.405.896	2.210.858.030	-652.828.898	12 Laporan	1.601.644.866	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					6.048.070.495	6.370.957.372	6.293.023.368	-244.952.873		6.189.513.017	
		Produksi pertanian pada lahan aset	16 Ton	14 Ton	14 Ton	6.048.070.495	6.370.957.372	6.293.023.368	-244.952.873	15 Ton	6.189.513.017	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian					6.048.070.495	6.370.957.372	6.293.023.368	-244.952.873		6.189.513.017	
	Meningkatnya usaha pengembangan prasarana pertanian					6.048.070.495	6.370.957.372	6.293.023.368	-244.952.873		6.189.513.017	
		Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	35,975 Ha	35.975 Ha	35.975 Ha	6.048.070.495	6.370.957.372	6.293.023.368	-244.952.873	35,975 Ha	6.189.513.017	
3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian					6.048.070.495	6.370.957.372	6.293.023.368	-244.952.873		6.189.513.017	
	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	35,975 Ha	35.975 Ha	35.975 Ha	6.048.070.495	6.370.957.372	6.293.023.368	-244.952.873	35,975 Ha	6.189.513.017	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.924.783.405	2.286.213.565	2.250.514.365	-325.730.960		1.958.436.009	
		Pembudidaya ternak yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	12 Unit Usaha	8 Unit Usaha	8 Unit Usaha	1.924.783.405	2.286.213.565	2.250.514.365	-325.730.960	9 Unit Usaha	1.958.436.009	
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100%	100%	100%	1.924.783.405	2.286.213.565	2.250.514.365	-325.730.960	100%	1.958.436.009	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota					616.596.035	640.390.633	646.871.033	-30.274.998		619.207.147	
	Meningkatnya upaya pengendalian kesehatan hewan					616.596.035	640.390.633	646.871.033	-30.274.998		619.207.147	
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	616.596.035	640.390.633	646.871.033	-30.274.998	12 Laporan	619.207.147	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					616.596.035	640.390.633	646.871.033	-30.274.998		619.207.147	
	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	616.596.035	640.390.633	646.871.033	-30.274.998	12 Laporan	619.207.147	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					936.293.390	1.545.976.612	1.503.797.012	-567.503.622		944.093.209	
	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner					936.293.390	1.545.976.612	1.503.797.012	-567.503.622		944.093.209	
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	936.293.390	1.545.976.612	1.503.797.012	-567.503.622	12 Laporan	944.093.209	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner					936.293.390	1.545.976.612	1.503.797.012	-567.503.622		944.093.209	
	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	936.293.390	1.545.976.612	1.503.797.012	-567.503.622	12 Laporan	944.093.209	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					371.893.980	99.846.320	99.846.320	272.047.660		395.135.653	
	Meningkatnya upaya pengawasan unit usaha produk hewan					371.893.980	99.846.320	99.846.320	272.047.660		395.135.653	
		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	65 Unit Usaha	45 Unit Usaha	45 Unit Usaha	371.893.980	99.846.320	99.846.320	272.047.660	50 Unit Usaha	395.135.653	
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan					371.893.980	99.846.320	99.846.320	272.047.660		395.135.653	
	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	65 Unit Usaha	45 Unit Usaha	45 Unit Usaha	371.893.980	99.846.320	99.846.320	272.047.660	50 Unit Usaha	395.135.653	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					2.058.457.428	2.167.627.834	2.268.993.236	-210.535.808		2.067.122.640	
		Persentase penyuluh yang memenuhi standar kompetensi	100%	100%	100%	2.058.457.428	2.167.627.834	2.268.993.236	-210.535.808	100%	2.067.122.640	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					2.058.457.428	2.167.627.834	2.268.993.236	-210.535.808		2.067.122.640	
	Meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian					2.058.457.428	2.167.627.834	2.268.993.236	-210.535.808		2.067.122.640	
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.058.457.428	2.167.627.834	2.268.993.236	-210.535.808	1 Unit	2.067.122.640	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	106 Dokumen	96 Unit	96 Unit	2.058.457.428	2.167.627.834	2.268.993.236	-210.535.808	3 Dokumen	2.067.122.640	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					1.038.020.837	1.148.664.939	1.213.152.240	-175.131.403		1.045.675.227	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.038.020.837	1.148.664.939	1.213.152.240	-175.131.403	1 Unit	1.045.675.227	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					1.020.436.591	1.018.962.895	1.055.840.996	-35.404.405		1.021.447.413	
	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	106 Dokumen	96 Unit	96 Unit	1.020.436.591	1.018.962.895	1.055.840.996	-35.404.405	3 Dokumen	1.021.447.413	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Dinas Lingkungan Hidup					563.563.725.514	575.929.237.150	790.133.236.116	-226.569.510.602		547.077.580.443	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					563.563.725.514	563.563.725.514	790.133.236.116	-226.569.510.602		547.077.580.443	
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					563.563.725.514	575.929.237.150	790.133.236.116	-226.569.510.602		547.077.580.443	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					63.294.497.645	62.906.959.066	62.381.833.238	912.664.407		63.408.680.666	
		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89%	87%	87%	63.294.497.645	62.906.959.066	62.381.833.238	912.664.407	88%	63.408.680.666	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					41.600.000	42.480.000	42.480.000	-880.000		41.600.000	
	Meningkatnya efektifitas penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Lingkungan Hidup					41.600.000	42.480.000	42.480.000	-880.000		41.600.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	41.600.000	42.480.000	42.480.000	-880.000	8 Dokumen	41.600.000	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					41.600.000	42.480.000	42.480.000	-880.000		41.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	41.600.000	42.480.000	42.480.000	-880.000	8 Dokumen	41.600.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					49.158.822.238	49.158.822.238	48.553.176.974	605.645.264		49.540.532.375	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					49.158.822.238	49.158.822.238	48.553.176.974	605.645.264		49.540.532.375	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	181 Orang/bulan	181 Orang/bulan	173 Orang/bulan	49.158.822.238	49.158.822.238	48.553.176.974	605.645.264	181 Orang/bulan	49.540.532.375	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					49.158.822.238	49.158.822.238	48.553.176.974	605.645.264		49.540.532.375	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	181 Orang/bulan	181 Orang/bulan	173 Orang/bulan	49.158.822.238	49.158.822.238	48.553.176.974	605.645.264	181 Orang/bulan	49.540.532.375	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					13.551.028.594	13.172.420.377	13.224.822.871	326.205.723		13.267.457.406	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					13.551.028.594	13.172.420.377	13.224.822.871	326.205.723		13.267.457.406	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.551.028.594	13.172.420.377	13.224.822.871	326.205.723	12 Laporan	13.267.457.406	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					13.551.028.594	13.172.420.377	13.224.822.871	326.205.723		13.267.457.406	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.551.028.594	13.172.420.377	13.224.822.871	326.205.723	12 Laporan	13.267.457.406	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					543.046.813	533.236.451	561.353.393	-18.306.580		559.090.885	
	Meningkatnya pengelolaan sarana perkantoran					543.046.813	533.236.451	561.353.393	-18.306.580		559.090.885	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	50 Unit	543.046.813	533.236.451	561.353.393	-18.306.580	50 Unit	559.090.885	
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					543.046.813	533.236.451	561.353.393	-18.306.580		559.090.885	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	50 Unit	543.046.813	533.236.451	561.353.393	-18.306.580	50 Unit	559.090.885	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					6.378.018.295	6.694.626.617	6.672.258.192	-294.239.897		6.451.920.641	
		Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	40,65%	40,61%	40,61%	6.378.018.295	6.694.626.617	6.672.258.192	-294.239.897	40,62%	6.451.920.641	
		Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	92%	88%	88%	6.378.018.295	6.694.626.617	6.672.258.192	-294.239.897	89%	6.451.920.641	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					6.378.018.295	6.694.626.617	6.672.258.192	-294.239.897		6.451.920.641	
	Meningkatnya pencegahan pencemaran air dan udara					6.378.018.295	6.694.626.617	6.672.258.192	-294.239.897		6.451.920.641	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	6.378.018.295	6.694.626.617	6.672.258.192	-294.239.897	3 Lokasi	6.451.920.641	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.378.018.295	6.694.626.617	6.672.258.192	-294.239.897	1 Dokumen	6.451.920.641	
		Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	6.378.018.295	6.694.626.617	6.672.258.192	-294.239.897	3 Dokumen	6.451.920.641	
		Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.378.018.295	6.694.626.617	6.672.258.192	-294.239.897	1 Paket	6.451.920.641	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					1.553.703.405	1.535.323.727	1.480.990.388	72.713.017		1.625.413.405	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.553.703.405	1.535.323.727	1.480.990.388	72.713.017	1 Dokumen	1.625.413.405	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					3.793.231.063	4.130.180.663	4.152.927.632	-359.696.569		3.808.423.409	
	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3.793.231.063	4.130.180.663	4.152.927.632	-359.696.569	3 Lokasi	3.808.423.409	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah					517.720.627	517.156.627	526.374.572	-8.653.945		504.720.627	
	Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	517.720.627	517.156.627	526.374.572	-8.653.945	3 Dokumen	504.720.627	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan					513.363.200	511.965.600	511.965.600	1.397.600		513.363.200	
	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	513.363.200	511.965.600	511.965.600	1.397.600	1 Paket	513.363.200	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					99.027.168.524	94.639.191.986	112.146.561.691	-13.119.393.167		101.506.587.042	
		Persentase RTH publik perkotaan lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	20,32 %	20,32%	20,32%	99.027.168.524	94.639.191.986	112.146.561.691	-13.119.393.167	20,32 %	101.506.587.042	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					99.027.168.524	94.639.191.986	112.146.561.691	-13.119.393.167		101.506.587.042	
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati					99.027.168.524	94.639.191.986	112.146.561.691	-13.119.393.167		101.506.587.042	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit	125 Unit	125 Unit	99.027.168.524	94.639.191.986	112.146.561.691	-13.119.393.167	125 Unit	101.506.587.042	
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275,98 Ha	275.9 Ha	275.9 Ha	99.027.168.524	94.639.191.986	112.146.561.691	-13.119.393.167	275,92 Ha	101.506.587.042	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					89.652.292.858	86.222.522.468	103.517.508.666	-13.865.215.808		91.899.122.991	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275,98 Ha	275.9 Ha	275.9 Ha	89.652.292.858	86.222.522.468	103.517.508.666	-13.865.215.808	275,92 Ha	91.899.122.991	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati					9.374.875.666	8.416.669.518	8.629.053.025	745.822.641		9.607.464.051	
	Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	125 Unit	125 Unit	125 Unit	9.374.875.666	8.416.669.518	8.629.053.025	745.822.641	125 Unit	9.607.464.051	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					2.247.245.927	2.249.019.787	15.520.321.045	-13.273.075.118		2.392.974.186	
		Persentase ketepatan waktu rincian teknis/standard teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang telah dinilai	90%	80%	80%	2.247.245.927	2.249.019.787	15.520.321.045	-13.273.075.118	90%	2.392.974.186	
		Volume penanganan limbah B3 pada Rumah Tangga	9993 kg/tahun	6826 kg/tahun	6826 kg/tahun	2.247.245.927	2.249.019.787	15.520.321.045	-13.273.075.118	7508 kg/tahun	2.392.974.186	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3					227.912.926	228.252.940	235.920.416	-8.007.490		250.012.926	
	Meningkatnya rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3					227.912.926	228.252.940	235.920.416	-8.007.490		250.012.926	
		Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	370 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	227.912.926	228.252.940	235.920.416	-8.007.490	355 Dokumen	250.012.926	
2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)					227.912.926	228.252.940	235.920.416	-8.007.490		250.012.926	
	Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	370 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	227.912.926	228.252.940	235.920.416	-8.007.490	355 Dokumen	250.012.926	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					2.019.333.001	2.020.766.847	15.284.400.629	-13.265.067.628		2.142.961.260	
	Meningkatnya kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan					2.019.333.001	2.020.766.847	15.284.400.629	-13.265.067.628		2.142.961.260	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.019.333.001	2.020.766.847	15.284.400.629	-13.265.067.628	1 Dokumen	2.142.961.260	
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan					2.019.333.001	2.020.766.847	15.284.400.629	-13.265.067.628		2.142.961.260	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.019.333.001	2.020.766.847	15.284.400.629	-13.265.067.628	1 Dokumen	2.142.961.260	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					1.690.555.960	1.797.304.283	1.732.028.252	-41.472.292		1.866.285.857	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/ Kota	60%	60%	62%	1.690.555.960	1.797.304.283	1.732.028.252	-41.472.292	60%	1.866.285.857	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.690.555.960	1.797.304.283	1.732.028.252	-41.472.292		1.866.285.857	
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan					1.690.555.960	1.797.304.283	1.732.028.252	-41.472.292		1.866.285.857	
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	615 Badan Usaha	475 Badan Usaha	475 Badan Usaha	1.690.555.960	1.797.304.283	1.732.028.252	-41.472.292	510 Badan Usaha	1.866.285.857	
		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	450 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	1.690.555.960	1.797.304.283	1.732.028.252	-41.472.292	375 Dokumen	1.866.285.857	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH					885.542.284	993.216.080	1.042.340.688	-156.798.404		972.717.030	
	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	450 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	885.542.284	993.216.080	1.042.340.688	-156.798.404	375 Dokumen	972.717.030	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					805.013.676	804.088.203	689.687.564	115.326.112		893.568.827	
	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	615 Badan Usaha	475 Badan Usaha	475 Badan Usaha	805.013.676	804.088.203	689.687.564	115.326.112	510 Badan Usaha	893.568.827	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					5.317.103.714	3.792.255.926	7.313.932.693	-1.996.828.979		5.404.571.214	
		Persentase Kampung Zero Waste	100%	52,90%	52,90%	5.317.103.714	3.792.255.926	7.313.932.693	-1.996.828.979	68,33 %	5.404.571.214	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase Kapasitas Pemahaman Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	100%	48,00%	48,00%	5.317.103.714	3.792.255.926	7.313.932.693	-1.996.828.979	61,00 %	5.404.571.214	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5.317.103.714	3.792.255.926	7.313.932.693	-1.996.828.979		5.404.571.214	
	Terwujudnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan					5.317.103.714	3.792.255.926	7.313.932.693	-1.996.828.979		5.404.571.214	
		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1945 Orang	1725 Orang	1725 Orang	5.317.103.714	3.792.255.926	7.313.932.693	-1.996.828.979	1780 Orang	5.404.571.214	
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.317.103.714	3.792.255.926	7.313.932.693	-1.996.828.979	12 Dokumen	5.404.571.214	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					4.605.640.884	1.792.648.794	5.416.596.176	-810.955.292		4.687.607.296	
	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.605.640.884	1.792.648.794	5.416.596.176	-810.955.292	12 Dokumen	4.687.607.296	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup					711.462.830	1.999.607.132	1.897.336.517	-1.185.873.687		716.963.918	
	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1945 Orang	1725 Orang	1725 Orang	711.462.830	1.999.607.132	1.897.336.517	-1.185.873.687	1780 Orang	716.963.918	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					546.114.728	440.568.893	388.985.033	157.129.695		606.208.078	
		Persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	100%	100%	100%	546.114.728	440.568.893	388.985.033	157.129.695	100%	606.208.078	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					546.114.728	440.568.893	388.985.033	157.129.695		606.208.078	
	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					546.114.728	440.568.893	388.985.033	157.129.695		606.208.078	
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	46 Pengaduan	47 Pengaduan	47 Pengaduan	546.114.728	440.568.893	388.985.033	157.129.695	47 Pengaduan	606.208.078	
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota					546.114.728	440.568.893	388.985.033	157.129.695		606.208.078	
	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	46 Pengaduan	47 Pengaduan	47 Pengaduan	546.114.728	440.568.893	388.985.033	157.129.695	47 Pengaduan	606.208.078	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					385.063.020.721	403.409.310.592	583.977.315.972	-198.914.295.251		365.440.352.759	
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	100%	100%	100%	385.063.020.721	403.409.310.592	583.977.315.972	-198.914.295.251	100%	365.440.352.759	
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	95%	95%	99,64 %	385.063.020.721	403.409.310.592	583.977.315.972	-198.914.295.251	95%	365.440.352.759	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah					770.126.041.442	806.818.621.184	1.167.954.631.944	-397.828.590.502		730.880.705.518	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya Pemanfaatan Sampah, Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan, dan Penanganan Sampah					770.126.041.442	806.818.621.184	1.167.954.631.944	-397.828.590.502		730.880.705.518	
		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	580480 Ton	568047 Ton	592760 Ton	770.126.041.442	806.818.621.184	1.167.954.631.944	-397.828.590.502	571328 Ton	730.880.705.518	
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	15000 Ton	14600 Ton	36500 Ton	770.126.041.442	806.818.621.184	1.167.954.631.944	-397.828.590.502	14700 Ton	730.880.705.518	
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	580480 Ton	568047 Ton	568047 Ton	770.126.041.442	806.818.621.184	1.167.954.631.944	-397.828.590.502	571328 Ton	730.880.705.518	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	235 Unit	231 Unit	231 Unit	770.126.041.442	806.818.621.184	1.167.954.631.944	-397.828.590.502	232 Unit	730.880.705.518	
		Persentase luas layanan pengumpulan sampah	85 Persentase	85 Persentase	85,611 Persentase	770.126.041.442	806.818.621.184	1.167.954.631.944	-397.828.590.502	85 Persentase	730.880.705.518	
	Meningkatnya pengumpulan dan pengangkutan sampah					770.126.041.442	806.818.621.184	1.167.954.631.944	-397.828.590.502		730.880.705.518	
		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	580480 Ton	568047 Ton	592760 Ton	770.126.041.442	806.818.621.184	1.167.954.631.944	-397.828.590.502	571328 Ton	730.880.705.518	
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	15000 Ton	14600 Ton	36500 Ton	770.126.041.442	806.818.621.184	1.167.954.631.944	-397.828.590.502	14700 Ton	730.880.705.518	
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	580480 Ton	568047 Ton	568047 Ton	770.126.041.442	806.818.621.184	1.167.954.631.944	-397.828.590.502	571328 Ton	730.880.705.518	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	235 Unit	231 Unit	231 Unit	770.126.041.442	806.818.621.184	1.167.954.631.944	-397.828.590.502	232 Unit	730.880.705.518	
		Persentase luas layanan pengumpulan sampah	85 Persentase	85 Persentase	85,611 Persentase	770.126.041.442	806.818.621.184	1.167.954.631.944	-397.828.590.502	85 Persentase	730.880.705.518	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					45.450.424.703	49.908.942.210	69.242.532.497	-23.792.107.794		21.511.101.661	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	235 Unit	231 Unit	231 Unit	45.450.424.703	49.908.942.210	69.242.532.497	-23.792.107.794	232 Unit	21.511.101.661	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan					190.207.474.778	91.822.646.581	97.276.250.485	92.931.224.293		194.251.953.268	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	580480 Ton	568047 Ton	568047 Ton	190.207.474.778	91.822.646.581	97.276.250.485	92.931.224.293	571328 Ton	194.251.953.268	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah					787.136.000	103.527.267.190	139.524.356.919	-138.737.220.919		787.136.000	
	Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	85 Persentase	85 Persentase	85,611 Persentase	787.136.000	103.527.267.190	139.524.356.919	-138.737.220.919	85 Persentase	787.136.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan					95.485.824	19.523.704.211	126.314.317.821	-126.218.831.997		96.183.136	
	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	15000 Ton	14600 Ton	36500 Ton	95.485.824	19.523.704.211	126.314.317.821	-126.218.831.997	14700 Ton	96.183.136	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional					148.522.499.416	138.626.750.400	151.619.858.250	-3.097.358.834		148.793.978.694	
	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	580480 Ton	568047 Ton	592760 Ton	148.522.499.416	138.626.750.400	151.619.858.250	-3.097.358.834	571328 Ton	148.793.978.694	Dinas Lingkungan Hidup
	UPTD Pemakaman					21.317.858.191	21.291.058.191	21.470.453.493	-152.595.302		21.754.218.578	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					21.317.858.191	21.317.858.191	21.470.453.493	-152.595.302		21.754.218.578	
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					21.317.858.191	21.291.058.191	21.470.453.493	-152.595.302		21.754.218.578	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					21.317.858.191	21.291.058.191	21.470.453.493	-152.595.302		21.754.218.578	
		Persentase RTH publik perkotaan lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	20,32 %	20,32%	20,32%	21.317.858.191	21.291.058.191	21.470.453.493	-152.595.302	20,32 %	21.754.218.578	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					21.317.858.191	21.291.058.191	21.470.453.493	-152.595.302		21.754.218.578	
	Terlaksananya pengelolaan makam sesuai kewenangan					21.317.858.191	21.291.058.191	21.470.453.493	-152.595.302		21.754.218.578	
		Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Unit	14 Unit	14 Unit	21.317.858.191	21.291.058.191	21.470.453.493	-152.595.302	14 Unit	21.754.218.578	
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya					21.317.858.191	21.291.058.191	21.470.453.493	-152.595.302		21.754.218.578	
	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Unit	14 Unit	14 Unit	21.317.858.191	21.291.058.191	21.470.453.493	-152.595.302	14 Unit	21.754.218.578	UPTD Pemakaman
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					59.680.665.670	60.774.591.121	62.664.007.885	-2.983.342.215		60.465.447.702	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					59.680.665.670	59.680.665.670	62.664.007.885	-2.983.342.215		60.465.447.702	
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					59.680.665.670	60.774.591.121	62.664.007.885	-2.983.342.215		60.465.447.702	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					50.660.344.742	50.858.400.696	52.505.905.908	-1.845.561.166		51.049.488.517	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%	93,25%	93,25%	50.660.344.742	50.858.400.696	52.505.905.908	-1.845.561.166	93,4 %	51.049.488.517	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.600.000	15.600.000	15.600.000	0		15.600.000	
	Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.600.000	15.600.000	15.600.000	0		15.600.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	15.600.000	15.600.000	15.600.000	0	8 Dokumen	15.600.000	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					15.600.000	15.600.000	15.600.000	0		15.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	15.600.000	15.600.000	15.600.000	0	8 Dokumen	15.600.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.299.132.422	41.299.132.422	43.054.272.847	-1.755.140.425		41.624.375.210	
	Meningkatnya ketepatan waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah					41.299.132.422	41.299.132.422	43.054.272.847	-1.755.140.425		41.624.375.210	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/bulan	161 Orang/bulan	167 Orang/bulan	41.299.132.422	41.299.132.422	43.054.272.847	-1.755.140.425	151 Orang/bulan	41.624.375.210	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					41.299.132.422	41.299.132.422	43.054.272.847	-1.755.140.425		41.624.375.210	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/bulan	161 Orang/bulan	167 Orang/bulan	41.299.132.422	41.299.132.422	43.054.272.847	-1.755.140.425	151 Orang/bulan	41.624.375.210	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					6.332.477.477	6.649.965.493	6.634.683.135	-302.205.658		6.369.220.681	
	Meningkatnya ketepatan waktu ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor					6.332.477.477	6.649.965.493	6.634.683.135	-302.205.658		6.369.220.681	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	6.332.477.477	6.649.965.493	6.634.683.135	-302.205.658	3 Paket	6.369.220.681	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6.332.477.477	6.649.965.493	6.634.683.135	-302.205.658		6.369.220.681	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	6.332.477.477	6.649.965.493	6.634.683.135	-302.205.658	3 Paket	6.369.220.681	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.013.134.843	2.893.702.781	2.801.349.926	211.784.917		3.040.292.626	
	Meningkatnya ketersediaan barang jasa dan pelayanan umum perkantoran					3.013.134.843	2.893.702.781	2.801.349.926	211.784.917		3.040.292.626	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.013.134.843	2.893.702.781	2.801.349.926	211.784.917	12 Laporan	3.040.292.626	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.013.134.843	2.893.702.781	2.801.349.926	211.784.917		3.040.292.626	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.013.134.843	2.893.702.781	2.801.349.926	211.784.917	12 Laporan	3.040.292.626	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					4.213.248.156	4.660.886.104	4.683.818.993	-470.570.837		4.361.020.787	
		Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang selesai tepat waktu	95%	95%	100%	4.213.248.156	4.660.886.104	4.683.818.993	-470.570.837	95%	4.361.020.787	
		Persentase pelayanan proaktif perekaman KTP dan aktivasi IKD yang selesai tepat waktu	95%	95%	95%	4.213.248.156	4.660.886.104	4.683.818.993	-470.570.837	95%	4.361.020.787	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk					3.712.693.022	4.113.685.822	4.122.333.962	-409.640.940		3.837.396.128	
	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk					3.712.693.022	4.113.685.822	4.122.333.962	-409.640.940		3.837.396.128	
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	404543 Dokumen	404543 Dokumen	404543 Dokumen	3.712.693.022	4.113.685.822	4.122.333.962	-409.640.940	404543 Dokumen	3.837.396.128	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	85969 Dokumen	85969 Dokumen	85969 Dokumen	3.712.693.022	4.113.685.822	4.122.333.962	-409.640.940	85969 Dokumen	3.837.396.128	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk					2.234.818.976	2.648.950.908	2.638.056.110	-403.237.134		2.299.205.970	
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	404543 Dokumen	404543 Dokumen	404543 Dokumen	2.234.818.976	2.648.950.908	2.638.056.110	-403.237.134	404543 Dokumen	2.299.205.970	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan					1.477.874.046	1.464.734.914	1.484.277.852	-6.403.806		1.538.190.158	
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	85969 Dokumen	85969 Dokumen	85969 Dokumen	1.477.874.046	1.464.734.914	1.484.277.852	-6.403.806	85969 Dokumen	1.538.190.158	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					500.555.134	547.200.282	561.485.031	-60.929.897		523.624.659	
	Terselenggaranya pendaftaran penduduk					500.555.134	547.200.282	561.485.031	-60.929.897		523.624.659	
		Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	500.555.134	547.200.282	561.485.031	-60.929.897	10 Dokumen	523.624.659	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	500.555.134	547.200.282	561.485.031	-60.929.897	1 Laporan	523.624.659	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	500.555.134	547.200.282	561.485.031	-60.929.897	40 Laporan	523.624.659	
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk					178.992.205	188.426.802	188.353.200	-9.360.995		215.281.413	
	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	178.992.205	188.426.802	188.353.200	-9.360.995	40 Laporan	215.281.413	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk					60.078.250	82.624.422	81.715.600	-21.637.350		65.721.898	
	Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	60.078.250	82.624.422	81.715.600	-21.637.350	1 Laporan	65.721.898	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk					261.484.679	276.149.058	291.416.231	-29.931.552		242.621.348	
	Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	261.484.679	276.149.058	291.416.231	-29.931.552	10 Dokumen	242.621.348	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					2.626.754.512	2.869.521.940	3.062.894.160	-436.139.648		3.016.979.521	
		Persentase dokumen pencatatan sipil yang selesai tepat waktu	95%	95%	100%	2.626.754.512	2.869.521.940	3.062.894.160	-436.139.648	95%	3.016.979.521	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil					2.070.388.923	2.257.389.491	2.418.890.032	-348.501.109		2.307.833.371	
	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil					2.070.388.923	2.257.389.491	2.418.890.032	-348.501.109		2.307.833.371	
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	69302 Dokumen	70748 Dokumen	70748 Dokumen	2.070.388.923	2.257.389.491	2.418.890.032	-348.501.109	70401 Dokumen	2.307.833.371	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					2.070.388.923	2.257.389.491	2.418.890.032	-348.501.109		2.307.833.371	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	69302 Dokumen	70748 Dokumen	70748 Dokumen	2.070.388.923	2.257.389.491	2.418.890.032	-348.501.109	70401 Dokumen	2.307.833.371	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					556.365.589	612.132.449	644.004.128	-87.638.539		709.146.150	
	Terselenggaranya pencatatan sipil					556.365.589	612.132.449	644.004.128	-87.638.539		709.146.150	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	3050 Laporan	3050 Laporan	3050 Laporan	556.365.589	612.132.449	644.004.128	-87.638.539	3050 Laporan	709.146.150	
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil					556.365.589	612.132.449	644.004.128	-87.638.539		709.146.150	
	Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	3050 Laporan	3050 Laporan	3050 Laporan	556.365.589	612.132.449	644.004.128	-87.638.539	3050 Laporan	709.146.150	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					2.061.838.260	2.267.302.381	2.293.288.824	-231.450.564		1.919.461.853	
		Rata-rata waktu tanggap gangguan layanan administrasi kependudukan	24 jam	24 jam	24 jam	2.061.838.260	2.267.302.381	2.293.288.824	-231.450.564	24 jam	1.919.461.853	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					2.061.838.260	2.267.302.381	2.293.288.824	-231.450.564		1.919.461.853	
	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					2.061.838.260	2.267.302.381	2.293.288.824	-231.450.564		1.919.461.853	
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.061.838.260	2.267.302.381	2.293.288.824	-231.450.564	12 Dokumen	1.919.461.853	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.061.838.260	2.267.302.381	2.293.288.824	-231.450.564	12 Laporan	1.919.461.853	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					1.430.401.526	1.521.801.277	1.555.211.674	-124.810.148		1.280.060.681	
	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.430.401.526	1.521.801.277	1.555.211.674	-124.810.148	12 Laporan	1.280.060.681	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan					631.436.734	745.501.104	738.077.150	-106.640.416		639.401.172	
	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	631.436.734	745.501.104	738.077.150	-106.640.416	12 Dokumen	639.401.172	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					118.480.000	118.480.000	118.100.000	380.000		118.497.024	
		Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%	100%	100%	118.480.000	118.480.000	118.100.000	380.000	100%	118.497.024	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan					118.480.000	118.480.000	118.100.000	380.000		118.497.024	
	Tersusunnya informasi profil kependudukan					118.480.000	118.480.000	118.100.000	380.000		118.497.024	
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	118.480.000	118.480.000	118.100.000	380.000	2 Dokumen	118.497.024	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain					118.480.000	118.480.000	118.100.000	380.000		118.497.024	
	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	118.480.000	118.480.000	118.100.000	380.000	2 Dokumen	118.497.024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Dinas Perhubungan					556.380.981.456	453.664.138.961	465.578.376.740	90.802.604.716		440.300.240.156	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					556.380.981.456	556.380.981.456	465.578.376.740	90.802.604.716		440.300.240.156	
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					556.380.981.456	453.664.138.961	465.578.376.740	90.802.604.716		440.300.240.156	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					70.583.963.519	70.410.693.256	68.553.028.428	2.030.935.091		71.076.838.011	
		Persentase kepatuhan pelayanan transportasi umum	70%	62%	62%	70.583.963.519	70.410.693.256	68.553.028.428	2.030.935.091	64%	71.076.838.011	
		Persentase kepatuhan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir	85%	80%	80%	70.583.963.519	70.410.693.256	68.553.028.428	2.030.935.091	83%	71.076.838.011	
		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%	92%	92%	70.583.963.519	70.410.693.256	68.553.028.428	2.030.935.091	92%	71.076.838.011	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					52.743.582	52.743.610	52.743.610	-28		52.842.243	
	Terpenuhinya ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya					52.743.582	52.743.610	52.743.610	-28		52.842.243	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	52.743.582	52.743.610	52.743.610	-28	8 Dokumen	52.842.243	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					52.743.582	52.743.610	52.743.610	-28		52.842.243	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	52.743.582	52.743.610	52.743.610	-28	8 Dokumen	52.842.243	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					58.398.664.297	58.398.664.297	55.228.356.560	3.170.307.737		58.857.784.989	
	Terpenuhinya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perhubungan Kota Surabaya					58.398.664.297	58.398.664.297	55.228.356.560	3.170.307.737		58.857.784.989	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	245 Orang/bulan	240 Orang/bulan	223 Orang/bulan	58.398.664.297	58.398.664.297	55.228.356.560	3.170.307.737	240 Orang/bulan	58.857.784.989	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					58.398.664.297	58.398.664.297	55.228.356.560	3.170.307.737		58.857.784.989	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	245 Orang/bulan	240 Orang/bulan	223 Orang/bulan	58.398.664.297	58.398.664.297	55.228.356.560	3.170.307.737	240 Orang/bulan	58.857.784.989	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.273.000.000	3.916.281.400	4.725.629.450	-452.629.450		4.273.000.000	
	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya					4.273.000.000	3.916.281.400	4.725.629.450	-452.629.450		4.273.000.000	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	3 Paket	3 Paket	4.273.000.000	3.916.281.400	4.725.629.450	-452.629.450	13 Paket	4.273.000.000	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.273.000.000	3.916.281.400	4.725.629.450	-452.629.450		4.273.000.000	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	3 Paket	3 Paket	4.273.000.000	3.916.281.400	4.725.629.450	-452.629.450	13 Paket	4.273.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.859.555.640	8.043.003.949	8.546.298.808	-686.743.168		7.893.210.779	
	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya					7.859.555.640	8.043.003.949	8.546.298.808	-686.743.168		7.893.210.779	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.859.555.640	8.043.003.949	8.546.298.808	-686.743.168	3 Laporan	7.893.210.779	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					7.859.555.640	8.043.003.949	8.546.298.808	-686.743.168		7.893.210.779	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.859.555.640	8.043.003.949	8.546.298.808	-686.743.168	3 Laporan	7.893.210.779	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					479.933.745.640	377.827.661.666	390.476.426.165	89.457.319.475		363.328.679.442	
		Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	45 km/jam	45 km/jam	45 km/jam	479.933.745.640	377.827.661.666	390.476.426.165	89.457.319.475	45 km/jam	363.328.679.442	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase angkutan umum (trunk dan feeder) dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan dan tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	100%	100%	100%	479.933.745.640	377.827.661.666	390.476.426.165	89.457.319.475	100%	363.328.679.442	
		Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio ≤ 0,90	90%	90%	90%	479.933.745.640	377.827.661.666	390.476.426.165	89.457.319.475	90%	363.328.679.442	
		Persentase jalan kota yang terpenuhi prasarana jalannya	98%	92%	92%	479.933.745.640	377.827.661.666	390.476.426.165	89.457.319.475	94%	363.328.679.442	
		Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	96%	94%	94%	479.933.745.640	377.827.661.666	390.476.426.165	89.457.319.475	94%	363.328.679.442	
		Persentase Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan pada ruas jalan yang rawan pelanggaran	100%	100%	100%	479.933.745.640	377.827.661.666	390.476.426.165	89.457.319.475	100%	363.328.679.442	
		Persentase peningkatan pengelolaan titik parkir	16%	12%	12%	479.933.745.640	377.827.661.666	390.476.426.165	89.457.319.475	13%	363.328.679.442	
		Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	21:21 Rasio	21:21 Rasio	21:21 Rasio	479.933.745.640	377.827.661.666	390.476.426.165	89.457.319.475	21:21 Rasio	363.328.679.442	
		Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya	55%	53%	53%	479.933.745.640	377.827.661.666	390.476.426.165	89.457.319.475	54%	363.328.679.442	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					852.085.053.370	653.436.630.028	659.075.404.288	193.009.649.082		617.655.420.314	
	Terselenggaranya perlengkapan jalan di Kota Surabaya					852.085.053.370	653.436.630.028	659.075.404.288	193.009.649.082		617.655.420.314	
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	2500 Unit	2500 Unit	852.085.053.370	653.436.630.028	659.075.404.288	193.009.649.082	2500 Unit	617.655.420.314	
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit	9000 Unit	9000 Unit	852.085.053.370	653.436.630.028	659.075.404.288	193.009.649.082	9000 Unit	617.655.420.314	
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1000 Unit	10000 Unit	10000 Unit	852.085.053.370	653.436.630.028	659.075.404.288	193.009.649.082	10000 Unit	617.655.420.314	
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	142344 Unit	120344 Unit	123366 Unit	852.085.053.370	653.436.630.028	659.075.404.288	193.009.649.082	130344 Unit	617.655.420.314	
	Terselenggaranya prasarana jalan di Kota Surabaya					852.085.053.370	653.436.630.028	659.075.404.288	193.009.649.082		617.655.420.314	
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	2500 Unit	2500 Unit	852.085.053.370	653.436.630.028	659.075.404.288	193.009.649.082	2500 Unit	617.655.420.314	
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit	9000 Unit	9000 Unit	852.085.053.370	653.436.630.028	659.075.404.288	193.009.649.082	9000 Unit	617.655.420.314	
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1000 Unit	10000 Unit	10000 Unit	852.085.053.370	653.436.630.028	659.075.404.288	193.009.649.082	10000 Unit	617.655.420.314	
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	142344 Unit	120344 Unit	123366 Unit	852.085.053.370	653.436.630.028	659.075.404.288	193.009.649.082	130344 Unit	617.655.420.314	
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					261.532.752.577	150.524.116.876	150.524.116.876	111.008.635.701		128.848.829.032	
	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1000 Unit	10000 Unit	10000 Unit	261.532.752.577	150.524.116.876	150.524.116.876	111.008.635.701	10000 Unit	128.848.829.032	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					10.188.526.589	10.207.025.123	10.207.025.123	-18.498.534		10.470.678.202	
	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit	2500 Unit	2500 Unit	10.188.526.589	10.207.025.123	10.207.025.123	-18.498.534	2500 Unit	10.470.678.202	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					132.692.358.960	144.270.999.405	145.242.275.139	-12.549.916.179		147.720.448.502	
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	142344 Unit	120344 Unit	123366 Unit	132.692.358.960	144.270.999.405	145.242.275.139	-12.549.916.179	130344 Unit	147.720.448.502	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					21.628.888.559	21.716.173.610	23.564.285.006	-1.935.396.447		21.787.754.421	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	9000 Unit	9000 Unit	9000 Unit	21.628.888.559	21.716.173.610	23.564.285.006	-1.935.396.447	9000 Unit	21.787.754.421	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					14.743.389.528	13.823.089.766	16.188.186.834	-1.444.797.306		14.895.598.505	
	Pengelolaan terminal angkutan umum tipe C di Kota Surabaya					14.743.389.528	13.823.089.766	16.188.186.834	-1.444.797.306		14.895.598.505	
		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14.743.389.528	13.823.089.766	16.188.186.834	-1.444.797.306	14 Unit	14.895.598.505	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)					14.743.389.528	13.823.089.766	16.188.186.834	-1.444.797.306		14.895.598.505	
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14.743.389.528	13.823.089.766	16.188.186.834	-1.444.797.306	14 Unit	14.895.598.505	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					6.632.245.522	6.487.742.499	8.955.268.935	-2.323.023.413		6.702.834.983	
	Terpenuhinya kendaraan bermotor yang lulus uji KIR					6.632.245.522	6.487.742.499	8.955.268.935	-2.323.023.413		6.702.834.983	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit	33 Unit	33 Unit	6.632.245.522	6.487.742.499	8.955.268.935	-2.323.023.413	33 Unit	6.702.834.983	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					6.632.245.522	6.487.742.499	8.955.268.935	-2.323.023.413		6.702.834.983	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	33 Unit	33 Unit	33 Unit	6.632.245.522	6.487.742.499	8.955.268.935	-2.323.023.413	33 Unit	6.702.834.983	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					58.203.078.834	54.846.648.066	64.220.748.880	-6.017.670.046		58.970.488.002	
	Terlaksananya implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kota Surabaya					58.203.078.834	54.846.648.066	64.220.748.880	-6.017.670.046		58.970.488.002	
		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	58.203.078.834	54.846.648.066	64.220.748.880	-6.017.670.046	4 Laporan	58.970.488.002	
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	58.203.078.834	54.846.648.066	64.220.748.880	-6.017.670.046	12 Laporan	58.970.488.002	
	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian jenis sarana angkutan jalan di Kota Surabaya					58.203.078.834	54.846.648.066	64.220.748.880	-6.017.670.046		58.970.488.002	
		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	58.203.078.834	54.846.648.066	64.220.748.880	-6.017.670.046	4 Laporan	58.970.488.002	
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	58.203.078.834	54.846.648.066	64.220.748.880	-6.017.670.046	12 Laporan	58.970.488.002	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					27.552.660.893	26.027.186.489	30.512.803.604	-2.960.142.711		27.933.499.277	
	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	27.552.660.893	26.027.186.489	30.512.803.604	-2.960.142.711	12 Laporan	27.933.499.277	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					1.548.878.524	1.396.137.544	1.597.570.836	-48.692.312		1.551.744.724	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.548.878.524	1.396.137.544	1.597.570.836	-48.692.312	4 Laporan	1.551.744.724	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.707.253.267	1.701.022.343	1.836.777.174	-129.523.907		1.709.798.983	
	Optimalisasi operasional layanan angkutan umum di Kota Surabaya melalui peningkatan kapasitas awak angkutan					1.707.253.267	1.701.022.343	1.836.777.174	-129.523.907		1.709.798.983	
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.707.253.267	1.701.022.343	1.836.777.174	-129.523.907	2 Laporan	1.709.798.983	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					1.707.253.267	1.701.022.343	1.836.777.174	-129.523.907		1.709.798.983	
	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.707.253.267	1.701.022.343	1.836.777.174	-129.523.907	2 Laporan	1.709.798.983	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.706.791.221	1.674.168.011	1.848.116.638	-141.325.417		1.707.492.813	
	Tercapainya penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan					1.706.791.221	1.674.168.011	1.848.116.638	-141.325.417		1.707.492.813	
		Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.706.791.221	1.674.168.011	1.848.116.638	-141.325.417	8 Dokumen	1.707.492.813	
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.706.791.221	1.674.168.011	1.848.116.638	-141.325.417		1.707.492.813	
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.706.791.221	1.674.168.011	1.848.116.638	-141.325.417	8 Dokumen	1.707.492.813	Dinas Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					1.111.640.348	1.107.640.348	1.086.840.348	24.800.000		1.113.058.748	
		Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat pemahaman Keselamatan Transportasi Perairan	100%	100%	100%	1.111.640.348	1.107.640.348	1.086.840.348	24.800.000	100%	1.113.058.748	
2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota					1.111.640.348	1.107.640.348	1.086.840.348	24.800.000		1.113.058.748	
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Keselamatan Perairan di Wilayah Kota Surabaya					1.111.640.348	1.107.640.348	1.086.840.348	24.800.000		1.113.058.748	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.111.640.348	1.107.640.348	1.086.840.348	24.800.000	2 Laporan	1.113.058.748	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
2.15.03.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota					1.111.640.348	1.107.640.348	1.086.840.348	24.800.000		1.113.058.748	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.111.640.348	1.107.640.348	1.086.840.348	24.800.000	2 Laporan	1.113.058.748	Dinas Perhubungan
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					4.751.631.949	4.318.143.691	5.462.081.799	-710.449.850		4.781.663.955	
		Persentase Petugas Jaga Lintasan Kereta Api yang melaksanakan Upaya Peningkatan Keselamatan pada Perlintasan Sebidang	100%	100%	100%	4.751.631.949	4.318.143.691	5.462.081.799	-710.449.850	100%	4.781.663.955	
2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian					4.751.631.949	4.318.143.691	5.462.081.799	-710.449.850		4.781.663.955	
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Perkeretaapian di Kota Surabaya					4.751.631.949	4.318.143.691	5.462.081.799	-710.449.850		4.781.663.955	
		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.751.631.949	4.318.143.691	5.462.081.799	-710.449.850	2 Dokumen	4.781.663.955	
2.15.05.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					4.751.631.949	4.318.143.691	5.462.081.799	-710.449.850		4.781.663.955	
	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.751.631.949	4.318.143.691	5.462.081.799	-710.449.850	2 Dokumen	4.781.663.955	Dinas Perhubungan
	UPTD Parkir Tepi Jalan Umum					33.310.102.895	33.232.269.382	44.126.909.562	-10.816.806.667		33.643.540.260	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					33.310.102.895	33.310.102.895	44.126.909.562	-10.816.806.667		33.643.540.260	
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					33.310.102.895	33.232.269.382	44.126.909.562	-10.816.806.667		33.643.540.260	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.957.666.807	17.383.882.684	17.453.314.258	-1.495.647.451		15.963.378.316	
		Persentase kepatuhan pelayanan transportasi umum	70%	62%	62%	15.957.666.807	17.383.882.684	17.453.314.258	-1.495.647.451	64%	15.963.378.316	
		Persentase kepatuhan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir	85%	80%	80%	15.957.666.807	17.383.882.684	17.453.314.258	-1.495.647.451	83%	15.963.378.316	
		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%	92%	92%	15.957.666.807	17.383.882.684	17.453.314.258	-1.495.647.451	92%	15.963.378.316	
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					31.915.333.614	34.767.765.368	34.906.628.516	-2.991.294.902		31.926.756.632	
	Optimalisasi penyusunan laporan kegiatan BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum					31.915.333.614	34.767.765.368	34.906.628.516	-2.991.294.902		31.926.756.632	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	31.915.333.614	34.767.765.368	34.906.628.516	-2.991.294.902	1 Unit Kerja	31.926.756.632	
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					15.957.666.807	17.383.882.684	17.453.314.258	-1.495.647.451		15.963.378.316	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	15.957.666.807	17.383.882.684	17.453.314.258	-1.495.647.451	1 Unit Kerja	15.963.378.316	UPTD Parkir Tepi Jalan Umum
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					17.352.436.088	15.848.386.698	26.673.595.304	-9.321.159.216		17.680.161.944	
		Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	45 km/jam	45 km/jam	45 km/jam	17.352.436.088	15.848.386.698	26.673.595.304	-9.321.159.216	45 km/jam	17.680.161.944	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase angkutan umum (trunk dan feeder) dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan dan tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	100%	100%	100%	17.352.436.088	15.848.386.698	26.673.595.304	-9.321.159.216	100%	17.680.161.944	
		Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio ≤ 0,90	90%	90%	90%	17.352.436.088	15.848.386.698	26.673.595.304	-9.321.159.216	90%	17.680.161.944	
		Persentase jalan kota yang terpenuhi prasarana jalannya	98%	92%	92%	17.352.436.088	15.848.386.698	26.673.595.304	-9.321.159.216	94%	17.680.161.944	
		Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	96%	94%	94%	17.352.436.088	15.848.386.698	26.673.595.304	-9.321.159.216	94%	17.680.161.944	
		Persentase Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan pada ruas jalan yang rawan pelanggaran	100%	100%	100%	17.352.436.088	15.848.386.698	26.673.595.304	-9.321.159.216	100%	17.680.161.944	
		Persentase peningkatan pengelolaan titik parkir	16%	12%	12%	17.352.436.088	15.848.386.698	26.673.595.304	-9.321.159.216	13%	17.680.161.944	
		Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	21:21 Rasio	21:21 Rasio	21:21 Rasio	17.352.436.088	15.848.386.698	26.673.595.304	-9.321.159.216	21:21 Rasio	17.680.161.944	
		Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya	55%	53%	53%	17.352.436.088	15.848.386.698	26.673.595.304	-9.321.159.216	54%	17.680.161.944	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					17.352.436.088	15.848.386.698	26.673.595.304	-9.321.159.216		17.680.161.944	
	Tersusunnya dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik					17.352.436.088	15.848.386.698	26.673.595.304	-9.321.159.216		17.680.161.944	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	17.352.436.088	15.848.386.698	26.673.595.304	-9.321.159.216	12 Laporan	17.680.161.944	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					17.352.436.088	15.848.386.698	26.673.595.304	-9.321.159.216		17.680.161.944	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	17.352.436.088	15.848.386.698	26.673.595.304	-9.321.159.216	12 Laporan	17.680.161.944	UPTD Parkir Tepi Jalan Umum
	UPTD Pengelolaan Transportasi Umum					211.271.790.318	220.975.584.895	238.023.800.513	-26.752.010.195		223.327.571.023	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					211.271.790.318	211.271.790.318	238.023.800.513	-26.752.010.195		223.327.571.023	
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					211.271.790.318	220.975.584.895	238.023.800.513	-26.752.010.195		223.327.571.023	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.815.688.935	13.815.936.872	13.815.936.872	-247.937		13.815.688.935	
		Persentase kepatuhan pelayanan transportasi umum	70%	62%	62%	13.815.688.935	13.815.936.872	13.815.936.872	-247.937	64%	13.815.688.935	
		Persentase kepatuhan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir	85%	80%	80%	13.815.688.935	13.815.936.872	13.815.936.872	-247.937	83%	13.815.688.935	
		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%	92%	92%	13.815.688.935	13.815.936.872	13.815.936.872	-247.937	92%	13.815.688.935	
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					27.631.377.870	27.631.873.744	27.631.873.744	-495.874		27.631.377.870	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Optimalisasi penyusunan laporan kegiatan BLUD Pengelolaan Transportasi Umum					27.631.377.870	27.631.873.744	27.631.873.744	-495.874		27.631.377.870	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	27.631.377.870	27.631.873.744	27.631.873.744	-495.874	1 Unit Kerja	27.631.377.870	
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					13.815.688.935	13.815.936.872	13.815.936.872	-247.937		13.815.688.935	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	13.815.688.935	13.815.936.872	13.815.936.872	-247.937	1 Unit Kerja	13.815.688.935	UPTD Pengelolaan Transportasi Umum
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					197.456.101.383	207.159.648.023	224.207.863.641	-26.751.762.258		209.511.882.088	
		Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	45 km/jam	45 km/jam	45 km/jam	197.456.101.383	207.159.648.023	224.207.863.641	-26.751.762.258	45 km/jam	209.511.882.088	
		Persentase angkutan umum (trunk dan feeder) dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan dan tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	100%	100%	100%	197.456.101.383	207.159.648.023	224.207.863.641	-26.751.762.258	100%	209.511.882.088	
		Persentase Jalan Kewenangan Kota Dengan V/C Ratio ≤ 0,90	90%	90%	90%	197.456.101.383	207.159.648.023	224.207.863.641	-26.751.762.258	90%	209.511.882.088	
		Persentase jalan kota yang terpenuhi prasarana jalannya	98%	92%	92%	197.456.101.383	207.159.648.023	224.207.863.641	-26.751.762.258	94%	209.511.882.088	
		Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	96%	94%	94%	197.456.101.383	207.159.648.023	224.207.863.641	-26.751.762.258	94%	209.511.882.088	
		Persentase Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan pada ruas jalan yang rawan pelanggaran	100%	100%	100%	197.456.101.383	207.159.648.023	224.207.863.641	-26.751.762.258	100%	209.511.882.088	
		Persentase peningkatan pengelolaan titik parkir	16%	12%	12%	197.456.101.383	207.159.648.023	224.207.863.641	-26.751.762.258	13%	209.511.882.088	
		Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	21:21 Rasio	21:21 Rasio	21:21 Rasio	197.456.101.383	207.159.648.023	224.207.863.641	-26.751.762.258	21:21 Rasio	209.511.882.088	
		Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Surabaya	55%	53%	53%	197.456.101.383	207.159.648.023	224.207.863.641	-26.751.762.258	54%	209.511.882.088	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					197.456.101.383	207.159.648.023	224.207.863.641	-26.751.762.258		209.511.882.088	
	Optimalisasi operasional layanan angkutan umum di Kota Surabaya melalui cakupan layanan angkutan umum					197.456.101.383	207.159.648.023	224.207.863.641	-26.751.762.258		209.511.882.088	
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	251 Unit	199 Unit	199 Unit	197.456.101.383	207.159.648.023	224.207.863.641	-26.751.762.258	210 Unit	209.511.882.088	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					197.456.101.383	207.159.648.023	224.207.863.641	-26.751.762.258		209.511.882.088	
	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	251 Unit	199 Unit	199 Unit	197.456.101.383	207.159.648.023	224.207.863.641	-26.751.762.258	210 Unit	209.511.882.088	UPTD Pengelolaan Transportasi Umum
	Dinas Komunikasi dan Informatika					119.252.578.649	128.598.181.119	127.852.595.716	-8.600.017.067		121.928.452.721	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					119.252.578.649	119.252.578.649	127.852.595.716	-8.600.017.067		121.928.452.721	
2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					112.521.366.111	120.155.493.917	115.280.062.960	-2.758.696.849		114.621.101.352	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.671.529.579	19.831.494.425	20.300.588.166	-629.058.587		20.412.527.623	
		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	93,36 %	93,36%	93,36%	19.671.529.579	19.831.494.425	20.300.588.166	-629.058.587	93,36 %	20.412.527.623	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					67.284.880	25.791.200	25.791.200	41.493.680		67.605.760	
	Meningkatnya efektifitas penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika					67.284.880	25.791.200	25.791.200	41.493.680		67.605.760	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	67.284.880	25.791.200	25.791.200	41.493.680	8 Dokumen	67.605.760	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					67.284.880	25.791.200	25.791.200	41.493.680		67.605.760	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	67.284.880	25.791.200	25.791.200	41.493.680	8 Dokumen	67.605.760	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.889.693.426	17.889.693.426	17.717.117.606	172.575.820		18.026.563.985	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					17.889.693.426	17.889.693.426	17.717.117.606	172.575.820		18.026.563.985	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	57 Orang/bulan	17.889.693.426	17.889.693.426	17.717.117.606	172.575.820	55 Orang/bulan	18.026.563.985	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					17.889.693.426	17.889.693.426	17.717.117.606	172.575.820		18.026.563.985	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	57 Orang/bulan	17.889.693.426	17.889.693.426	17.717.117.606	172.575.820	55 Orang/bulan	18.026.563.985	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.353.757.169	1.576.894.969	2.115.096.027	-761.338.858		1.530.130.862	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					1.353.757.169	1.576.894.969	2.115.096.027	-761.338.858		1.530.130.862	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7 Paket	7 Paket	1.353.757.169	1.576.894.969	2.115.096.027	-761.338.858	4 Paket	1.530.130.862	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.353.757.169	1.576.894.969	2.115.096.027	-761.338.858		1.530.130.862	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7 Paket	7 Paket	1.353.757.169	1.576.894.969	2.115.096.027	-761.338.858	4 Paket	1.530.130.862	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					360.794.104	339.114.830	442.583.333	-81.789.229		788.227.016	
	Meingkatnya pengelolaan sarana perkantoran					360.794.104	339.114.830	442.583.333	-81.789.229		788.227.016	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	90 Unit	360.794.104	339.114.830	442.583.333	-81.789.229	90 Unit	788.227.016	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					360.794.104	339.114.830	442.583.333	-81.789.229		788.227.016	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit	90 Unit	360.794.104	339.114.830	442.583.333	-81.789.229	90 Unit	788.227.016	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					15.034.760.641	20.838.729.652	22.162.510.583	-7.127.749.942		15.788.248.192	
		Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan dan permohonan informasi publik	92,5 %	90,50%	90,50%	15.034.760.641	20.838.729.652	22.162.510.583	-7.127.749.942	91%	15.788.248.192	
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	75%	71%	71%	15.034.760.641	20.838.729.652	22.162.510.583	-7.127.749.942	72%	15.788.248.192	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					15.034.760.641	20.838.729.652	22.162.510.583	-7.127.749.942		15.788.248.192	
	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik					15.034.760.641	20.838.729.652	22.162.510.583	-7.127.749.942		15.788.248.192	
		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	68 Komunitas	68 Komunitas	68 Komunitas	15.034.760.641	20.838.729.652	22.162.510.583	-7.127.749.942	68 Komunitas	15.788.248.192	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.034.760.641	20.838.729.652	22.162.510.583	-7.127.749.942	1 Laporan	15.788.248.192	
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	22 Laporan	17 Media	18 Media	15.034.760.641	20.838.729.652	22.162.510.583	-7.127.749.942	12 Laporan	15.788.248.192	
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100%	30 Permohonan	30 Permohonan	15.034.760.641	20.838.729.652	22.162.510.583	-7.127.749.942	100%	15.788.248.192	
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	15.034.760.641	20.838.729.652	22.162.510.583	-7.127.749.942	12 Rekomendasi	15.788.248.192	
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat					1.347.352.567	1.470.308.176	1.507.425.966	-160.073.399		1.831.459.784	
	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	68 Komunitas	68 Komunitas	68 Komunitas	1.347.352.567	1.470.308.176	1.507.425.966	-160.073.399	68 Komunitas	1.831.459.784	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik					49.400.000	49.592.192	49.592.192	-192.192		49.400.000	
	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	49.400.000	49.592.192	49.592.192	-192.192	1 Laporan	49.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik					1.731.567.828	1.731.567.803	1.740.562.327	-8.994.499		1.802.782.057	
	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100%	30 Permohonan	30 Permohonan	1.731.567.828	1.731.567.803	1.740.562.327	-8.994.499	100%	1.802.782.057	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik					382.800.000	362.640.000	362.640.000	20.160.000		382.800.000	
	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	382.800.000	362.640.000	362.640.000	20.160.000	12 Rekomendasi	382.800.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik					11.523.640.246	17.224.621.481	18.502.290.098	-6.978.649.852		11.721.806.351	
	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	22 Laporan	17 Media	18 Media	11.523.640.246	17.224.621.481	18.502.290.098	-6.978.649.852	12 Laporan	11.721.806.351	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					77.815.075.891	79.485.269.840	72.816.964.211	4.998.111.680		78.420.325.537	
		Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	3 Level	1 Level	1 Level	77.815.075.891	79.485.269.840	72.816.964.211	4.998.111.680	1 Level	78.420.325.537	
		Rata-rata nilai tingkat kematangan aspek teknologi digital	2,25 Nilai	1.75 Nilai	1.75 Nilai	77.815.075.891	79.485.269.840	72.816.964.211	4.998.111.680	1,75 Nilai	78.420.325.537	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360		156.840.651.074	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya pengelolaan pusat data dan jaringan intra					155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360		156.840.651.074	
		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	10 Aplikasi	10 Aplikasi	10 Aplikasi	155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360	10 Aplikasi	156.840.651.074	
		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360	12 Dokumen	156.840.651.074	
		Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Aplikasi	12 Laporan	12 Laporan	155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360	1 Aplikasi	156.840.651.074	
		Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360	12 Laporan	156.840.651.074	
		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360	6 Dokumen	156.840.651.074	
		Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360	7 Layanan	156.840.651.074	
		Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	62 Titik	58 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360	62 Titik	156.840.651.074	
		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	62 Titik	58 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360	62 Titik	156.840.651.074	
	Meningkatnya tata kelola teknologi digital					155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360		156.840.651.074	
		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	10 Aplikasi	10 Aplikasi	10 Aplikasi	155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360	10 Aplikasi	156.840.651.074	
		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360	12 Dokumen	156.840.651.074	
		Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Aplikasi	12 Laporan	12 Laporan	155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360	1 Aplikasi	156.840.651.074	
		Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360	12 Laporan	156.840.651.074	
		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360	6 Dokumen	156.840.651.074	
		Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360	7 Layanan	156.840.651.074	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	62 Titik	58 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360	62 Titik	156.840.651.074	
		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	62 Titik	58 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	155.630.151.782	158.970.539.680	145.633.928.422	9.996.223.360	62 Titik	156.840.651.074	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					40.701.655.069	32.953.965.620	27.291.209.570	13.410.445.499		45.159.437.215	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	62 Titik	58 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	40.701.655.069	32.953.965.620	27.291.209.570	13.410.445.499	62 Titik	45.159.437.215	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi					1.185.755.430	1.220.855.429	734.807.999	450.947.431		1.209.890.732	
	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	1.185.755.430	1.220.855.429	734.807.999	450.947.431	7 Layanan	1.209.890.732	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah					3.332.325.019	5.350.856.311	4.959.522.125	-1.627.197.106		4.259.598.671	
	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Aplikasi	12 Laporan	12 Laporan	3.332.325.019	5.350.856.311	4.959.522.125	-1.627.197.106	1 Aplikasi	4.259.598.671	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan					196.706.267	214.706.267	219.643.064	-22.936.797		221.406.267	
	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	10 Aplikasi	10 Aplikasi	10 Aplikasi	196.706.267	214.706.267	219.643.064	-22.936.797	10 Aplikasi	221.406.267	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE					2.470.682.137	2.543.484.883	2.512.739.966	-42.057.829		2.898.115.049	
	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.470.682.137	2.543.484.883	2.512.739.966	-42.057.829	12 Laporan	2.898.115.049	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet					29.570.186.996	36.794.236.357	36.749.022.783	-7.178.835.787		24.162.840.132	
	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	62 Titik	58 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	29.570.186.996	36.794.236.357	36.749.022.783	-7.178.835.787	62 Titik	24.162.840.132	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah					194.391.637	194.391.637	200.718.704	-6.327.067		270.264.135	
	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	194.391.637	194.391.637	200.718.704	-6.327.067	12 Dokumen	270.264.135	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas					163.373.336	212.773.336	149.300.000	14.073.336		238.773.336	
	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	163.373.336	212.773.336	149.300.000	14.073.336	6 Dokumen	238.773.336	Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
2,2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					714.555.948	538.932.899	547.959.608	166.596.340		778.547.251	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					714.555.948	538.932.899	547.959.608	166.596.340		778.547.251	
		Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	100%	100%	714.555.948	538.932.899	547.959.608	166.596.340	100%	778.547.251	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					714.555.948	538.932.899	547.959.608	166.596.340		778.547.251	
	Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral					714.555.948	538.932.899	547.959.608	166.596.340		778.547.251	
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	93%	81%	81%	714.555.948	538.932.899	547.959.608	166.596.340	84%	778.547.251	
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	90%	76%	76%	714.555.948	538.932.899	547.959.608	166.596.340	90%	778.547.251	
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	74%	62%	62%	714.555.948	538.932.899	547.959.608	166.596.340	65%	778.547.251	
2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional					434.513.548	377.063.699	386.090.408	48.423.140		498.504.851	
	Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	90%	76%	76%	434.513.548	377.063.699	386.090.408	48.423.140	90%	498.504.851	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia					202.042.400	77.072.000	77.072.000	124.970.400		202.042.400	
	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	74%	62%	62%	202.042.400	77.072.000	77.072.000	124.970.400	65%	202.042.400	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral					78.000.000	84.797.200	84.797.200	-6.797.200		78.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	93%	81%	81%	78.000.000	84.797.200	84.797.200	-6.797.200	84%	78.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					6.016.656.590	7.903.754.303	12.024.573.148	-6.007.916.558		6.528.804.118	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					6.016.656.590	7.903.754.303	12.024.573.148	-6.007.916.558		6.528.804.118	
		Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	100%	100%	100%	6.016.656.590	7.903.754.303	12.024.573.148	-6.007.916.558	100%	6.528.804.118	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					6.016.656.590	7.903.754.303	12.024.573.148	-6.007.916.558		6.528.804.118	
	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi					6.016.656.590	7.903.754.303	12.024.573.148	-6.007.916.558		6.528.804.118	
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.016.656.590	7.903.754.303	12.024.573.148	-6.007.916.558	1 Dokumen	6.528.804.118	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	12 Laporan	58 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	6.016.656.590	7.903.754.303	12.024.573.148	-6.007.916.558	12 Laporan	6.528.804.118	
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					5.603.012.561	7.297.811.684	11.066.038.810	-5.463.026.249		6.115.160.089	
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	12 Laporan	58 Perangkat Daerah	62 Perangkat Daerah	5.603.012.561	7.297.811.684	11.066.038.810	-5.463.026.249	12 Laporan	6.115.160.089	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					413.644.029	605.942.619	958.534.338	-544.890.309		413.644.029	
	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	413.644.029	605.942.619	958.534.338	-544.890.309	1 Dokumen	413.644.029	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan					52.339.737.404	53.085.671.898	54.188.039.430	-1.848.302.026		52.954.280.759	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					37.987.666.556	37.987.666.556	39.407.654.411	-1.419.987.855		38.081.746.217	
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					37.987.666.556	38.378.189.048	39.407.654.411	-1.419.987.855		38.081.746.217	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.621.631.598	31.771.915.054	33.053.435.287	-1.431.803.689		31.789.639.574	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,63 %	94,23%	94,23%	31.621.631.598	31.771.915.054	33.053.435.287	-1.431.803.689	94,33 %	31.789.639.574	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					35.100.000	34.767.680	34.767.680	332.320		128.700.000	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah					35.100.000	34.767.680	34.767.680	332.320		128.700.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	35.100.000	34.767.680	34.767.680	332.320	8 Dokumen	128.700.000	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					35.100.000	34.767.680	34.767.680	332.320		128.700.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	35.100.000	34.767.680	34.767.680	332.320	8 Dokumen	128.700.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					28.924.458.562	28.924.458.562	30.159.051.846	-1.234.593.284		29.147.252.280	
	Meningkatnya ketepatan pelayanan gaji dan tunjangan ASN					28.924.458.562	28.924.458.562	30.159.051.846	-1.234.593.284		29.147.252.280	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	95 Orang/bulan	91 Orang/bulan	28.924.458.562	28.924.458.562	30.159.051.846	-1.234.593.284	94 Orang/bulan	29.147.252.280	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					28.924.458.562	28.924.458.562	30.159.051.846	-1.234.593.284		29.147.252.280	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	95 Orang/bulan	91 Orang/bulan	28.924.458.562	28.924.458.562	30.159.051.846	-1.234.593.284	94 Orang/bulan	29.147.252.280	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.662.073.036	2.812.688.812	2.859.615.761	-197.542.725		2.513.687.294	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					2.662.073.036	2.812.688.812	2.859.615.761	-197.542.725		2.513.687.294	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.662.073.036	2.812.688.812	2.859.615.761	-197.542.725	12 Laporan	2.513.687.294	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.662.073.036	2.812.688.812	2.859.615.761	-197.542.725	12 Laporan	2.513.687.294	
	Meningkatnya efektivitas pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					2.662.073.036	2.812.688.812	2.859.615.761	-197.542.725		2.513.687.294	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.662.073.036	2.812.688.812	2.859.615.761	-197.542.725	12 Laporan	2.513.687.294	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.662.073.036	2.812.688.812	2.859.615.761	-197.542.725	12 Laporan	2.513.687.294	
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					291.483.400	283.625.196	229.922.050	61.561.350		291.483.400	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	291.483.400	283.625.196	229.922.050	61.561.350	12 Laporan	291.483.400	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.370.589.636	2.529.063.616	2.629.693.711	-259.104.075		2.222.203.894	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.370.589.636	2.529.063.616	2.629.693.711	-259.104.075	12 Laporan	2.222.203.894	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					940.254.625	880.946.310	919.323.772	20.930.853		940.254.625	
		Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya	90%	86%	86%	940.254.625	880.946.310	919.323.772	20.930.853	87%	940.254.625	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					940.254.625	880.946.310	919.323.772	20.930.853		940.254.625	
	Meningkatnya koperasi yang patuh tata kelola					940.254.625	880.946.310	919.323.772	20.930.853		940.254.625	
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	421 Unit Usaha	421 Unit Usaha	421 Unit Usaha	940.254.625	880.946.310	919.323.772	20.930.853	421 Unit Usaha	940.254.625	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					940.254.625	880.946.310	919.323.772	20.930.853		940.254.625	
	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	421 Unit Usaha	421 Unit Usaha	421 Unit Usaha	940.254.625	880.946.310	919.323.772	20.930.853	421 Unit Usaha	940.254.625	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					414.296.000	432.295.200	432.295.200	-17.999.200		414.296.000	
		Persentase koperasi yang memiliki kinerja baik	81%	78%	78%	414.296.000	432.295.200	432.295.200	-17.999.200	79%	414.296.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					414.296.000	432.295.200	432.295.200	-17.999.200		414.296.000	
	Meningkatnya SDM perkoperasian yang menerapkan pengetahuan perkoperasian					414.296.000	432.295.200	432.295.200	-17.999.200		414.296.000	
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	128 Orang	153 Orang	153 Orang	414.296.000	432.295.200	432.295.200	-17.999.200	127 Orang	414.296.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					414.296.000	432.295.200	432.295.200	-17.999.200		414.296.000	
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	128 Orang	153 Orang	153 Orang	414.296.000	432.295.200	432.295.200	-17.999.200	127 Orang	414.296.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					693.043.959	1.009.945.832	1.027.881.144	-334.837.185		661.080.640	
		Persentase koperasi yang dapat mengembangkan usahanya	10%	10%	10%	693.043.959	1.009.945.832	1.027.881.144	-334.837.185	10%	661.080.640	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					693.043.959	1.009.945.832	1.027.881.144	-334.837.185		661.080.640	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berkoperasi					693.043.959	1.009.945.832	1.027.881.144	-334.837.185		661.080.640	
		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	85 Unit Usaha	153 Unit Usaha	153 Unit Usaha	693.043.959	1.009.945.832	1.027.881.144	-334.837.185	85 Unit Usaha	661.080.640	
		Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 Kelompok Masyarakat	20 Kelompok Masyarakat	20 Kelompok Masyarakat	693.043.959	1.009.945.832	1.027.881.144	-334.837.185	20 Kelompok Masyarakat	661.080.640	
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi					142.497.713	363.933.809	372.844.028	-230.346.315		143.446.020	
	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 Kelompok Masyarakat	20 Kelompok Masyarakat	20 Kelompok Masyarakat	142.497.713	363.933.809	372.844.028	-230.346.315	20 Kelompok Masyarakat	143.446.020	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota					550.546.246	646.012.023	655.037.116	-104.490.870		517.634.620	
	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	85 Unit Usaha	153 Unit Usaha	153 Unit Usaha	550.546.246	646.012.023	655.037.116	-104.490.870	85 Unit Usaha	517.634.620	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					2.860.188.568	2.772.284.788	2.674.754.744	185.433.824		2.814.761.811	
		Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki akses sumber daya produktif	27%	25%	25%	2.860.188.568	2.772.284.788	2.674.754.744	185.433.824	25%	2.814.761.811	
		Persentase sentra usaha yang meningkat okupansinya	39%	39%	39%	2.860.188.568	2.772.284.788	2.674.754.744	185.433.824	39%	2.814.761.811	
		Pertumbuhan Wirausaha	1,2 %	1%	1%	2.860.188.568	2.772.284.788	2.674.754.744	185.433.824	1%	2.814.761.811	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					5.720.377.136	5.544.569.576	5.349.509.488	370.867.648		5.629.523.622	
	Meningkatnya pendampingan dan kemitraan usaha mikro					5.720.377.136	5.544.569.576	5.349.509.488	370.867.648		5.629.523.622	
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200 Unit Usaha	160 Orang	160 Orang	5.720.377.136	5.544.569.576	5.349.509.488	370.867.648	200 Unit Usaha	5.629.523.622	
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Orang	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	5.720.377.136	5.544.569.576	5.349.509.488	370.867.648	200 Orang	5.629.523.622	
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	550 Orang	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	5.720.377.136	5.544.569.576	5.349.509.488	370.867.648	423 Orang	5.629.523.622	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya giat di sentra usaha					5.720.377.136	5.544.569.576	5.349.509.488	370.867.648		5.629.523.622	
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200 Unit Usaha	160 Orang	160 Orang	5.720.377.136	5.544.569.576	5.349.509.488	370.867.648	200 Unit Usaha	5.629.523.622	
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Orang	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	5.720.377.136	5.544.569.576	5.349.509.488	370.867.648	200 Orang	5.629.523.622	
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	550 Orang	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	5.720.377.136	5.544.569.576	5.349.509.488	370.867.648	423 Orang	5.629.523.622	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro					349.438.119	362.643.113	311.277.816	38.160.303		292.029.631	
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Orang	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	349.438.119	362.643.113	311.277.816	38.160.303	200 Orang	292.029.631	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					2.290.965.569	2.171.865.675	2.234.300.928	56.664.641		2.302.626.420	
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	550 Orang	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	2.290.965.569	2.171.865.675	2.234.300.928	56.664.641	423 Orang	2.302.626.420	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan					219.784.880	237.776.000	129.176.000	90.608.880		220.105.760	
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200 Unit Usaha	160 Orang	160 Orang	219.784.880	237.776.000	129.176.000	90.608.880	200 Unit Usaha	220.105.760	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.458.251.806	1.510.801.864	1.299.964.264	158.287.542		1.461.713.567	
		Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat skala kinerja usahanya	11,83 %	6,64%	6,64%	1.458.251.806	1.510.801.864	1.299.964.264	158.287.542	7,93 %	1.461.713.567	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					1.458.251.806	1.510.801.864	1.299.964.264	158.287.542		1.461.713.567	
	Meningkatnya usaha mikro yang yang bertransformasi dari informal ke formal					1.458.251.806	1.510.801.864	1.299.964.264	158.287.542		1.461.713.567	
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Orang	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	1.458.251.806	1.510.801.864	1.299.964.264	158.287.542	500 Orang	1.461.713.567	
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro					1.458.251.806	1.510.801.864	1.299.964.264	158.287.542		1.461.713.567	
	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Orang	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	1.458.251.806	1.510.801.864	1.299.964.264	158.287.542	500 Orang	1.461.713.567	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					14.352.070.848	14.352.070.848	14.780.385.019	-428.314.171		14.872.534.542	
3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					14.352.070.848	14.707.482.850	14.780.385.019	-428.314.171		14.872.534.542	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					1.035.734.435	1.054.964.789	1.085.377.818	-49.643.383		1.039.861.763	
		Persentase kepatuhan pelaku usaha	92,5 %	90%	90%	1.035.734.435	1.054.964.789	1.085.377.818	-49.643.383	91%	1.039.861.763	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan					286.278.746	287.509.100	296.216.528	-9.937.782		286.966.634	
	Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pembinaan / pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan					286.278.746	287.509.100	296.216.528	-9.937.782		286.966.634	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen	450 Dokumen	450 Dokumen	286.278.746	287.509.100	296.216.528	-9.937.782	450 Dokumen	286.966.634	
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					286.278.746	287.509.100	296.216.528	-9.937.782		286.966.634	
	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen	450 Dokumen	450 Dokumen	286.278.746	287.509.100	296.216.528	-9.937.782	450 Dokumen	286.966.634	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang					275.597.983	275.597.983	284.280.223	-8.682.240		276.973.759	
	Terlaksananya pengawasan gudang					275.597.983	275.597.983	284.280.223	-8.682.240		276.973.759	
		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	160 Dokumen	160 Dokumen	160 Dokumen	275.597.983	275.597.983	284.280.223	-8.682.240	160 Dokumen	276.973.759	
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang					275.597.983	275.597.983	284.280.223	-8.682.240		276.973.759	
	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	160 Dokumen	160 Dokumen	160 Dokumen	275.597.983	275.597.983	284.280.223	-8.682.240	160 Dokumen	276.973.759	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri					118.019.235	118.019.235	122.360.356	-4.341.121		118.707.123	
	Meningkatnya tindak lanjut atas pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri					118.019.235	118.019.235	122.360.356	-4.341.121		118.707.123	
		Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	118.019.235	118.019.235	122.360.356	-4.341.121	24 Dokumen	118.707.123	
3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri					118.019.235	118.019.235	122.360.356	-4.341.121		118.707.123	
	Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	118.019.235	118.019.235	122.360.356	-4.341.121	24 Dokumen	118.707.123	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri					60.800.000	60.800.000	60.800.000	0		60.800.000	
	Meningkatnya tindak lanjut atas pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Luar Negeri					60.800.000	60.800.000	60.800.000	0		60.800.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	60.800.000	60.800.000	60.800.000	0	24 Dokumen	60.800.000	
3.30.02.2.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri					60.800.000	60.800.000	60.800.000	0		60.800.000	
	Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	60.800.000	60.800.000	60.800.000	0	24 Dokumen	60.800.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat					292.438.471	292.438.471	301.120.711	-8.682.240		293.814.247	
	Meningkatnya verifikasi persetujuan teknis penjual langsung minuman beralkohol Golongan B dan C					292.438.471	292.438.471	301.120.711	-8.682.240		293.814.247	
		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	292.438.471	292.438.471	301.120.711	-8.682.240	50 Dokumen	293.814.247	
3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C					292.438.471	292.438.471	301.120.711	-8.682.240		293.814.247	
	Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	292.438.471	292.438.471	301.120.711	-8.682.240	50 Dokumen	293.814.247	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)					2.600.000	20.600.000	20.600.000	-18.000.000		2.600.000	
	Meningkatnya koordinasi terkait penerbitan Surat Keterangan Asal dengan Instansi yang ditetapkan sebagai penerbit Surat Keterangan Asal					2.600.000	20.600.000	20.600.000	-18.000.000		2.600.000	
		Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.600.000	20.600.000	20.600.000	-18.000.000	2 Dokumen	2.600.000	
3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA					2.600.000	20.600.000	20.600.000	-18.000.000		2.600.000	
	Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.600.000	20.600.000	20.600.000	-18.000.000	2 Dokumen	2.600.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					5.136.309.471	5.312.131.137	5.496.190.953	-359.881.482		5.296.275.163	
		Persentase peningkatan omset pelaku usaha perdagangan	2%	2%	2%	5.136.309.471	5.312.131.137	5.496.190.953	-359.881.482	2%	5.296.275.163	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					5.136.309.471	5.312.131.137	5.496.190.953	-359.881.482		5.296.275.163	
	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan yang terstandarisasi					5.136.309.471	5.312.131.137	5.496.190.953	-359.881.482		5.296.275.163	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen	611 Dokumen	611 Dokumen	5.136.309.471	5.312.131.137	5.496.190.953	-359.881.482	611 Dokumen	5.296.275.163	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					5.136.309.471	5.312.131.137	5.496.190.953	-359.881.482		5.296.275.163	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen	611 Dokumen	611 Dokumen	5.136.309.471	5.312.131.137	5.496.190.953	-359.881.482	611 Dokumen	5.296.275.163	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					613.798.635	706.944.391	760.962.323	-147.163.688		775.648.999	
		Persentase ketersediaan komoditas bapokting	100%	100%	100%	613.798.635	706.944.391	760.962.323	-147.163.688	100%	775.648.999	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					613.798.635	706.944.391	760.962.323	-147.163.688		775.648.999	
	Terlaksananya Operasi Pasar dan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					613.798.635	706.944.391	760.962.323	-147.163.688		775.648.999	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	613.798.635	706.944.391	760.962.323	-147.163.688	12 Laporan	775.648.999	
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	613.798.635	706.944.391	760.962.323	-147.163.688	12 Laporan	775.648.999	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					350.404.587	441.888.053	455.369.105	-104.964.518		469.508.747	
	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	350.404.587	441.888.053	455.369.105	-104.964.518	12 Laporan	469.508.747	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					263.394.048	265.056.338	305.593.218	-42.199.170		306.140.252	
	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	263.394.048	265.056.338	305.593.218	-42.199.170	12 Laporan	306.140.252	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					2.760.772.399	2.531.173.378	2.365.542.330	395.230.069		2.912.016.307	
		Persentase Usaha Mikro yang memiliki kemampuan ekspor	2,39%	2,01%	2,01%	2.760.772.399	2.531.173.378	2.365.542.330	395.230.069	2,11%	2.912.016.307	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					2.760.772.399	2.531.173.378	2.365.542.330	395.230.069		2.912.016.307	
	Meningkatnya transaksi/pemesanan Usaha Mikro skala nasional					2.760.772.399	2.531.173.378	2.365.542.330	395.230.069		2.912.016.307	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	2.760.772.399	2.531.173.378	2.365.542.330	395.230.069	50 Pelaku Usaha	2.912.016.307	
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional					2.760.772.399	2.531.173.378	2.365.542.330	395.230.069		2.912.016.307	
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	2.760.772.399	2.531.173.378	2.365.542.330	395.230.069	50 Pelaku Usaha	2.912.016.307	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					4.805.455.908	5.102.269.155	5.072.311.595	-266.855.687		4.848.732.310	
		Persentase Usaha Mikro yang meningkat cakupan pemasarannya	7%	7%	7%	4.805.455.908	5.102.269.155	5.072.311.595	-266.855.687	7%	4.848.732.310	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					4.805.455.908	5.102.269.155	5.072.311.595	-266.855.687		4.848.732.310	
	Meningkatnya transaksi/pemesanan Usaha Mikro skala lokal					4.805.455.908	5.102.269.155	5.072.311.595	-266.855.687		4.848.732.310	
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5220 UMKM	5220 UMKM	5220 UMKM	4.805.455.908	5.102.269.155	5.072.311.595	-266.855.687	5220 UMKM	4.848.732.310	
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					4.805.455.908	5.102.269.155	5.072.311.595	-266.855.687		4.848.732.310	
	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5220 UMKM	5220 UMKM	5220 UMKM	4.805.455.908	5.102.269.155	5.072.311.595	-266.855.687	5220 UMKM	4.848.732.310	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	UPTD Metrologi Legal					628.493.396	763.662.918	790.211.959	-161.718.563		632.449.515	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					628.493.396	628.493.396	790.211.959	-161.718.563		632.449.515	
3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					628.493.396	763.662.918	790.211.959	-161.718.563		632.449.515	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					628.493.396	763.662.918	790.211.959	-161.718.563		632.449.515	
		Persentase Alat UTTP yang Memenuhi syarat teknis kemetrologian	92,84 %	92,44%	92,44%	628.493.396	763.662.918	790.211.959	-161.718.563	92,54 %	632.449.515	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					628.493.396	763.662.918	790.211.959	-161.718.563		632.449.515	
	Meningkatnya Pengawasan dan Pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)					628.493.396	763.662.918	790.211.959	-161.718.563		632.449.515	
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	26310 Unit	24290 Unit	24290 Unit	628.493.396	763.662.918	790.211.959	-161.718.563	24780 Unit	632.449.515	
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1222 Orang	1222 Orang	1222 Orang	628.493.396	763.662.918	790.211.959	-161.718.563	1222 Orang	632.449.515	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					529.117.898	655.488.360	678.346.839	-149.228.941		532.486.002	
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	26310 Unit	24290 Unit	24290 Unit	529.117.898	655.488.360	678.346.839	-149.228.941	24780 Unit	532.486.002	UPTD Metrologi Legal
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal					99.375.498	108.174.558	111.865.120	-12.489.622		99.963.513	
	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1222 Orang	1222 Orang	1222 Orang	99.375.498	108.174.558	111.865.120	-12.489.622	1222 Orang	99.963.513	UPTD Metrologi Legal
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					22.085.934.979	22.868.669.998	23.995.277.700	-1.909.342.721		22.365.219.767	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					22.085.934.979	22.085.934.979	23.995.277.700	-1.909.342.721		22.365.219.767	
2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					22.085.934.979	22.868.669.998	23.995.277.700	-1.909.342.721		22.365.219.767	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.260.680.665	16.581.421.086	17.566.518.902	-1.305.838.237		16.402.770.928	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95,12 %	94,92%	94,92%	16.260.680.665	16.581.421.086	17.566.518.902	-1.305.838.237	94,97 %	16.402.770.928	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.540.240	15.891.668	13.000.000	2.540.240		15.587.280	
	Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					15.540.240	15.891.668	13.000.000	2.540.240		15.587.280	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	15.540.240	15.891.668	13.000.000	2.540.240	8 Dokumen	15.587.280	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					15.540.240	15.891.668	13.000.000	2.540.240		15.587.280	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	15.540.240	15.891.668	13.000.000	2.540.240	8 Dokumen	15.587.280	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.879.530.557	12.879.530.557	13.819.824.433	-940.293.876		12.977.955.049	
	Meningkatnya ketepatan pelayanan gaji dan tunjangan ASN					12.879.530.557	12.879.530.557	13.819.824.433	-940.293.876		12.977.955.049	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	12.879.530.557	12.879.530.557	13.819.824.433	-940.293.876	41 Orang/bulan	12.977.955.049	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.879.530.557	12.879.530.557	13.819.824.433	-940.293.876		12.977.955.049	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	12.879.530.557	12.879.530.557	13.819.824.433	-940.293.876	41 Orang/bulan	12.977.955.049	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.365.609.868	3.685.998.861	3.733.694.469	-368.084.601		3.409.228.599	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					3.365.609.868	3.685.998.861	3.733.694.469	-368.084.601		3.409.228.599	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.365.609.868	3.685.998.861	3.733.694.469	-368.084.601	12 Laporan	3.409.228.599	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.365.609.868	3.685.998.861	3.733.694.469	-368.084.601	12 Laporan	3.409.228.599	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					3.365.609.868	3.685.998.861	3.733.694.469	-368.084.601		3.409.228.599	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.365.609.868	3.685.998.861	3.733.694.469	-368.084.601	12 Laporan	3.409.228.599	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.365.609.868	3.685.998.861	3.733.694.469	-368.084.601	12 Laporan	3.409.228.599	
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					126.716.600	126.649.400	126.647.411	69.189		132.646.600	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	126.716.600	126.649.400	126.647.411	69.189	12 Laporan	132.646.600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.238.893.268	3.559.349.461	3.607.047.058	-368.153.790		3.276.581.999	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.238.893.268	3.559.349.461	3.607.047.058	-368.153.790	12 Laporan	3.276.581.999	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					538.024.412	547.993.122	548.382.608	-10.358.196		541.833.353	
		Realisasi Total terhadap Target Investasi	100%	100%	100%	538.024.412	547.993.122	548.382.608	-10.358.196	100%	541.833.353	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					538.024.412	547.993.122	548.382.608	-10.358.196		541.833.353	
	Meningkatnya kesesuaian usaha dengan peta potensi dan peluang usaha					538.024.412	547.993.122	548.382.608	-10.358.196		541.833.353	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	538.024.412	547.993.122	548.382.608	-10.358.196	4 Dokumen	541.833.353	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					538.024.412	547.993.122	548.382.608	-10.358.196		541.833.353	
	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	538.024.412	547.993.122	548.382.608	-10.358.196	4 Dokumen	541.833.353	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					695.251.821	694.396.215	703.790.112	-8.538.291		730.783.100	
		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	7%	5%	5%	695.251.821	694.396.215	703.790.112	-8.538.291	5,5 %	730.783.100	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					695.251.821	694.396.215	703.790.112	-8.538.291		730.783.100	
	Intensifikasi Kegiatan Promosi Investasi Daerah					695.251.821	694.396.215	703.790.112	-8.538.291		730.783.100	
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	695.251.821	694.396.215	703.790.112	-8.538.291	3 Dokumen	730.783.100	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					695.251.821	694.396.215	703.790.112	-8.538.291		730.783.100	
	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	695.251.821	694.396.215	703.790.112	-8.538.291	3 Dokumen	730.783.100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					3.709.883.855	4.138.788.532	4.237.584.814	-527.700.959		3.802.510.160	
		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	100%	100%	3.709.883.855	4.138.788.532	4.237.584.814	-527.700.959	100%	3.802.510.160	
		Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha sesuai ketentuan	100%	100%	100%	3.709.883.855	4.138.788.532	4.237.584.814	-527.700.959	100%	3.802.510.160	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					3.709.883.855	4.138.788.532	4.237.584.814	-527.700.959		3.802.510.160	
	Meningkatnya pelayanan penerbitan perizinan berusaha					3.709.883.855	4.138.788.532	4.237.584.814	-527.700.959		3.802.510.160	
		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	13000 Kegiatan Usaha	12000 Kegiatan Usaha	12000 Kegiatan Usaha	3.709.883.855	4.138.788.532	4.237.584.814	-527.700.959	12500 Kegiatan Usaha	3.802.510.160	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15000 Pelaku Usaha	14000 Pelaku Usaha	14000 Pelaku Usaha	3.709.883.855	4.138.788.532	4.237.584.814	-527.700.959	14500 Pelaku Usaha	3.802.510.160	
	Meningkatnya pelayanan penerbitan perizinan non berusaha dan non perizinan					3.709.883.855	4.138.788.532	4.237.584.814	-527.700.959		3.802.510.160	
		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	13000 Kegiatan Usaha	12000 Kegiatan Usaha	12000 Kegiatan Usaha	3.709.883.855	4.138.788.532	4.237.584.814	-527.700.959	12500 Kegiatan Usaha	3.802.510.160	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15000 Pelaku Usaha	14000 Pelaku Usaha	14000 Pelaku Usaha	3.709.883.855	4.138.788.532	4.237.584.814	-527.700.959	14500 Pelaku Usaha	3.802.510.160	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					2.961.689.678	3.105.008.960	3.188.869.686	-227.180.008		2.980.652.098	
	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15000 Pelaku Usaha	14000 Pelaku Usaha	14000 Pelaku Usaha	2.961.689.678	3.105.008.960	3.188.869.686	-227.180.008	14500 Pelaku Usaha	2.980.652.098	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko					748.194.177	1.033.779.572	1.048.715.128	-300.520.951		821.858.062	
	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	13000 Kegiatan Usaha	12000 Kegiatan Usaha	12000 Kegiatan Usaha	748.194.177	1.033.779.572	1.048.715.128	-300.520.951	12500 Kegiatan Usaha	821.858.062	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					753.954.871	790.797.708	819.082.560	-65.127.689		756.582.871	
		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100%	100%	100%	753.954.871	790.797.708	819.082.560	-65.127.689	100%	756.582.871	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					753.954.871	790.797.708	819.082.560	-65.127.689		756.582.871	
	Meningkatnya kualitas pendampingan terhadap penyampaian LKPM dan penyelesaian permasalahan pelaku usaha					753.954.871	790.797.708	819.082.560	-65.127.689		756.582.871	
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	3100 Kegiatan Usaha	3060 Kegiatan Usaha	3060 Kegiatan Usaha	753.954.871	790.797.708	819.082.560	-65.127.689	3070 Kegiatan Usaha	756.582.871	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	315 Pelaku Usaha	295 Pelaku Usaha	295 Pelaku Usaha	753.954.871	790.797.708	819.082.560	-65.127.689	300 Pelaku Usaha	756.582.871	
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha.	5 Kegiatan Usaha.	753.954.871	790.797.708	819.082.560	-65.127.689	5 Kegiatan Usaha	756.582.871	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					138.727.284	161.471.925	170.865.822	-32.138.538		138.727.284	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha.	5 Kegiatan Usaha.	138.727.284	161.471.925	170.865.822	-32.138.538	5 Kegiatan Usaha	138.727.284	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					129.431.728	127.443.810	127.443.810	1.987.918		129.459.728	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	315 Pelaku Usaha	295 Pelaku Usaha	295 Pelaku Usaha	129.431.728	127.443.810	127.443.810	1.987.918	300 Pelaku Usaha	129.459.728	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal					485.795.859	501.881.973	520.772.928	-34.977.069		488.395.859	
	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	3100 Kegiatan Usaha	3060 Kegiatan Usaha	3060 Kegiatan Usaha	485.795.859	501.881.973	520.772.928	-34.977.069	3070 Kegiatan Usaha	488.395.859	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					128.139.355	115.273.335	119.918.704	8.220.651		130.739.355	
		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	100%	100%	128.139.355	115.273.335	119.918.704	8.220.651	100%	130.739.355	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					128.139.355	115.273.335	119.918.704	8.220.651		130.739.355	
	Terlaksananya pemutakhiran data investasi secara berkala					128.139.355	115.273.335	119.918.704	8.220.651		130.739.355	
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	128.139.355	115.273.335	119.918.704	8.220.651	4 Dokumen	130.739.355	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					128.139.355	115.273.335	119.918.704	8.220.651		130.739.355	
	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	128.139.355	115.273.335	119.918.704	8.220.651	4 Dokumen	130.739.355	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata					124.029.697.313	292.610.520.902	179.455.491.079	-55.425.793.766		230.345.747.874	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					119.143.605.608	119.143.605.608	168.727.872.486	-49.584.266.878		225.335.098.919	
2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					85.131.079.226	244.012.723.085	128.554.258.711	-43.423.179.485		191.100.987.184	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					50.621.419.981	194.694.438.813	80.261.072.625	-29.639.652.644		65.155.726.362	
		Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	15%	7%	7%	50.621.419.981	194.694.438.813	80.261.072.625	-29.639.652.644	9%	65.155.726.362	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	17%	9%	9%	50.621.419.981	194.694.438.813	80.261.072.625	-29.639.652.644	11%	65.155.726.362	
		Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	36%	28%	28%	50.621.419.981	194.694.438.813	80.261.072.625	-29.639.652.644	30%	65.155.726.362	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					50.621.419.981	194.694.438.813	80.261.072.625	-29.639.652.644		65.155.726.362	
	Meningkatnya kualitas pembinaan kepemudaan					50.621.419.981	194.694.438.813	80.261.072.625	-29.639.652.644		65.155.726.362	
		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	825 Orang	10 Kegiatan	10 Kegiatan	50.621.419.981	194.694.438.813	80.261.072.625	-29.639.652.644	825 Orang	65.155.726.362	
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	859 Orang	859 Orang	859 Orang	50.621.419.981	194.694.438.813	80.261.072.625	-29.639.652.644	859 Orang	65.155.726.362	
		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	700 Orang	700 Orang	700 Orang	50.621.419.981	194.694.438.813	80.261.072.625	-29.639.652.644	700 Orang	65.155.726.362	
		Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	5500 Orang	23820 Orang	23820 Orang	50.621.419.981	194.694.438.813	80.261.072.625	-29.639.652.644	5500 Orang	65.155.726.362	
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota					707.566.917	745.264.267	754.129.574	-46.562.657		753.979.009	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	700 Orang	700 Orang	700 Orang	707.566.917	745.264.267	754.129.574	-46.562.657	700 Orang	753.979.009	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda					47.687.061.179	191.228.403.476	76.786.235.232	-29.099.174.053		61.653.226.145	
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	5500 Orang	23820 Orang	23820 Orang	47.687.061.179	191.228.403.476	76.786.235.232	-29.099.174.053	5500 Orang	61.653.226.145	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota					405.964.488	496.569.201	514.786.652	-108.822.164		503.796.785	
	Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	825 Orang	10 Kegiatan	10 Kegiatan	405.964.488	496.569.201	514.786.652	-108.822.164	825 Orang	503.796.785	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota					1.820.827.397	2.224.201.869	2.205.921.167	-385.093.770		2.244.724.423	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	859 Orang	859 Orang	859 Orang	1.820.827.397	2.224.201.869	2.205.921.167	-385.093.770	859 Orang	2.244.724.423	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					34.509.659.245	49.318.284.272	48.293.186.086	-13.783.526.841		125.945.260.822	
		Persentase Atlet Berprestasi	77,8 %	73,16%	73,16%	34.509.659.245	49.318.284.272	48.293.186.086	-13.783.526.841	74,32 %	125.945.260.822	
		Persentase prasarana olahraga yang termanfaatkan	100%	75%	75%	34.509.659.245	49.318.284.272	48.293.186.086	-13.783.526.841	80%	125.945.260.822	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					4.576.503.663	6.018.990.627	6.018.990.627	-1.442.486.964		42.979.912.856	
	Meningkatnya sebaran prasarana olahraga					4.576.503.663	6.018.990.627	6.018.990.627	-1.442.486.964		42.979.912.856	
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	18 Unit	10 Unit	10 Unit	4.576.503.663	6.018.990.627	6.018.990.627	-1.442.486.964	12 Unit	42.979.912.856	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota					4.576.503.663	6.018.990.627	6.018.990.627	-1.442.486.964		42.979.912.856	
	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	18 Unit	10 Unit	10 Unit	4.576.503.663	6.018.990.627	6.018.990.627	-1.442.486.964	12 Unit	42.979.912.856	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					12.857.933.944	15.490.815.146	15.532.529.285	-2.674.595.341		67.439.843.813	
	Meningkatnya cabang olahraga prestasi yang dibina					12.857.933.944	15.490.815.146	15.532.529.285	-2.674.595.341		67.439.843.813	
		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	2414 Orang	2214 Orang	2214 Orang	12.857.933.944	15.490.815.146	15.532.529.285	-2.674.595.341	2314 Orang	67.439.843.813	
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota					12.857.933.944	15.490.815.146	15.532.529.285	-2.674.595.341		67.439.843.813	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	2414 Orang	2214 Orang	2214 Orang	12.857.933.944	15.490.815.146	15.532.529.285	-2.674.595.341	2314 Orang	67.439.843.813	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					17.075.221.638	27.808.478.499	26.741.666.174	-9.666.444.536		15.525.504.153	
	Meningkatnya kegiatan pemasyarakatan olahraga rekreasi					17.075.221.638	27.808.478.499	26.741.666.174	-9.666.444.536		15.525.504.153	
		Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	17 Lembaga	4 Laporan	4 Laporan	17.075.221.638	27.808.478.499	26.741.666.174	-9.666.444.536	12 Lembaga	15.525.504.153	
		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	447 Unit	404 Unit	404 Unit	17.075.221.638	27.808.478.499	26.741.666.174	-9.666.444.536	404 Unit	15.525.504.153	
2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan					2.011.812.900	5.242.781.698	4.395.243.156	-2.383.430.256		2.102.567.612	
	Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	17 Lembaga	4 Laporan	4 Laporan	2.011.812.900	5.242.781.698	4.395.243.156	-2.383.430.256	12 Lembaga	2.102.567.612	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan					15.063.408.738	22.565.696.801	22.346.423.018	-7.283.014.280		13.422.936.541	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	447 Unit	404 Unit	404 Unit	15.063.408.738	22.565.696.801	22.346.423.018	-7.283.014.280	404 Unit	13.422.936.541	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					34.012.526.382	38.815.462.041	40.173.613.775	-6.161.087.393		34.234.111.735	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.514.398.550	25.795.263.664	27.130.346.691	-1.615.948.141		25.717.415.082	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,75 %	94,35%	94,35%	25.514.398.550	25.795.263.664	27.130.346.691	-1.615.948.141	94,45 %	25.717.415.082	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					27.289.608	25.897.500	25.897.500	1.392.108		27.374.320	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					27.289.608	25.897.500	25.897.500	1.392.108		27.374.320	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	27.289.608	25.897.500	25.897.500	1.392.108	8 Dokumen	27.374.320	
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					27.289.608	25.897.500	25.897.500	1.392.108		27.374.320	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	27.289.608	25.897.500	25.897.500	1.392.108	8 Dokumen	27.374.320	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					23.767.451.541	24.022.788.949	25.297.690.741	-1.530.239.200		23.950.833.483	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					23.767.451.541	24.022.788.949	25.297.690.741	-1.530.239.200		23.950.833.483	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/bulan	82 Orang/bulan	82 Orang/bulan	23.767.451.541	24.022.788.949	25.297.690.741	-1.530.239.200	82 Orang/bulan	23.950.833.483	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					23.767.451.541	24.022.788.949	25.297.690.741	-1.530.239.200		23.950.833.483	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/bulan	82 Orang/bulan	82 Orang/bulan	23.767.451.541	24.022.788.949	25.297.690.741	-1.530.239.200	82 Orang/bulan	23.950.833.483	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.719.657.401	1.746.577.215	1.806.758.450	-87.101.049		1.739.207.279	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa serta terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran					1.719.657.401	1.746.577.215	1.806.758.450	-87.101.049		1.739.207.279	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.719.657.401	1.746.577.215	1.806.758.450	-87.101.049	12 Laporan	1.739.207.279	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.719.657.401	1.746.577.215	1.806.758.450	-87.101.049	12 Laporan	1.739.207.279	
2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					349.182.203	369.657.403	369.657.403	-20.475.200		342.889.198	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	349.182.203	369.657.403	369.657.403	-20.475.200	12 Laporan	342.889.198	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.370.475.198	1.376.919.812	1.437.101.047	-66.625.849		1.396.318.081	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.370.475.198	1.376.919.812	1.437.101.047	-66.625.849	12 Laporan	1.396.318.081	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					4.706.718.449	8.649.510.319	8.649.510.319	-3.942.791.870		4.703.162.167	
		Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	100%	100%	100%	4.706.718.449	8.649.510.319	8.649.510.319	-3.942.791.870	100%	4.703.162.167	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					4.706.718.449	8.649.510.319	8.649.510.319	-3.942.791.870		4.703.162.167	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya upaya pelestarian budaya daerah					4.706.718.449	8.649.510.319	8.649.510.319	-3.942.791.870		4.703.162.167	
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	2 Objek	2 Objek	4.706.718.449	8.649.510.319	8.649.510.319	-3.942.791.870	3 Objek	4.703.162.167	
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang	20 Orang	20 Orang	4.706.718.449	8.649.510.319	8.649.510.319	-3.942.791.870	40 Orang	4.703.162.167	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					4.525.594.069	8.450.932.119	8.450.932.119	-3.925.338.050		4.521.622.247	
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	2 Objek	2 Objek	4.525.594.069	8.450.932.119	8.450.932.119	-3.925.338.050	3 Objek	4.521.622.247	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					181.124.380	198.578.200	198.578.200	-17.453.820		181.539.920	
	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang	20 Orang	20 Orang	181.124.380	198.578.200	198.578.200	-17.453.820	40 Orang	181.539.920	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					1.560.364.791	1.579.652.671	1.588.919.648	-28.554.857		1.560.364.791	
		Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	100%	100%	100%	1.560.364.791	1.579.652.671	1.588.919.648	-28.554.857	100%	1.560.364.791	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.560.364.791	1.579.652.671	1.588.919.648	-28.554.857		1.560.364.791	
	Meningkatnya kualitas pembinaan kesenian daerah					1.560.364.791	1.579.652.671	1.588.919.648	-28.554.857		1.560.364.791	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1113 Orang	973 Orang	973 Orang	1.560.364.791	1.579.652.671	1.588.919.648	-28.554.857	1008 Orang	1.560.364.791	
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional					1.560.364.791	1.579.652.671	1.588.919.648	-28.554.857		1.560.364.791	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1113 Orang	973 Orang	973 Orang	1.560.364.791	1.579.652.671	1.588.919.648	-28.554.857	1008 Orang	1.560.364.791	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					1.052.312.689	1.362.314.968	1.362.314.968	-310.002.279		1.073.672.024	
		Persentase masyarakat yang memahami nilai sejarah lokal	82%	79%	79%	1.052.312.689	1.362.314.968	1.362.314.968	-310.002.279	80%	1.073.672.024	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.052.312.689	1.362.314.968	1.362.314.968	-310.002.279		1.073.672.024	
	Meningkatnya kualitas pembinaan sejarah lokal					1.052.312.689	1.362.314.968	1.362.314.968	-310.002.279		1.073.672.024	
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.052.312.689	1.362.314.968	1.362.314.968	-310.002.279	4 Dokumen	1.073.672.024	
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah					1.052.312.689	1.362.314.968	1.362.314.968	-310.002.279		1.073.672.024	
	Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.052.312.689	1.362.314.968	1.362.314.968	-310.002.279	4 Dokumen	1.073.672.024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					1.178.731.903	1.428.720.419	1.442.522.149	-263.790.246		1.179.497.671	
		Persentase Cagar Budaya yang termanfaatkan	91,61 %	89,16%	89,16%	1.178.731.903	1.428.720.419	1.442.522.149	-263.790.246	89,51 %	1.179.497.671	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					1.178.731.903	1.428.720.419	1.442.522.149	-263.790.246		1.179.497.671	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian cagar budaya					1.178.731.903	1.428.720.419	1.442.522.149	-263.790.246		1.179.497.671	
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	4 Objek	4 Objek	4 Objek	1.178.731.903	1.428.720.419	1.442.522.149	-263.790.246	4 Objek	1.179.497.671	
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	285 Objek	285 Objek	285 Objek	1.178.731.903	1.428.720.419	1.442.522.149	-263.790.246	285 Objek	1.179.497.671	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya					940.800.975	1.173.080.419	1.186.882.149	-246.081.174		941.374.215	
	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	285 Objek	285 Objek	285 Objek	940.800.975	1.173.080.419	1.186.882.149	-246.081.174	285 Objek	941.374.215	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya					237.930.928	255.640.000	255.640.000	-17.709.072		238.123.456	
	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	4 Objek	4 Objek	4 Objek	237.930.928	255.640.000	255.640.000	-17.709.072	4 Objek	238.123.456	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					4.886.091.705	4.886.091.705	10.727.618.593	-5.841.526.888		5.010.648.955	
3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					4.886.091.705	9.782.335.776	10.727.618.593	-5.841.526.888		5.010.648.955	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.431.845.216	1.706.488.366	2.565.509.275	-1.133.664.059		1.433.954.672	
		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke destinasi Pariwisata Kota Surabaya	7%	3%	3%	1.431.845.216	1.706.488.366	2.565.509.275	-1.133.664.059	4%	1.433.954.672	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					254.357.072	267.106.302	276.338.523	-21.981.451		255.893.288	
	Meningkatnya kualitas SDM stakeholder bidang pariwisata					254.357.072	267.106.302	276.338.523	-21.981.451		255.893.288	
		Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	80 Orang	60 Orang	60 Orang	254.357.072	267.106.302	276.338.523	-21.981.451	60 Orang	255.893.288	
3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					254.357.072	267.106.302	276.338.523	-21.981.451		255.893.288	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	80 Orang	60 Orang	60 Orang	254.357.072	267.106.302	276.338.523	-21.981.451	60 Orang	255.893.288	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					1.177.488.144	1.439.382.064	2.289.170.752	-1.111.682.608		1.178.061.384	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi pariwisata daerah					1.177.488.144	1.439.382.064	2.289.170.752	-1.111.682.608		1.178.061.384	
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	1.177.488.144	1.439.382.064	2.289.170.752	-1.111.682.608	2 Lokasi	1.178.061.384	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.177.488.144	1.439.382.064	2.289.170.752	-1.111.682.608	2 Dokumen	1.178.061.384	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.177.488.144	1.439.382.064	2.289.170.752	-1.111.682.608	12 Laporan	1.178.061.384	
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					148.000.000	148.000.000	148.000.000	0		148.000.000	
	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	148.000.000	148.000.000	148.000.000	0	2 Dokumen	148.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					907.662.304	1.168.397.064	2.018.185.752	-1.110.523.448		908.235.544	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	907.662.304	1.168.397.064	2.018.185.752	-1.110.523.448	2 Lokasi	908.235.544	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					121.825.840	122.985.000	122.985.000	-1.159.160		121.825.840	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	121.825.840	122.985.000	122.985.000	-1.159.160	12 Laporan	121.825.840	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					2.026.912.106	6.453.766.225	6.486.002.862	-4.459.090.756		2.134.859.844	
		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	7%	3%	3%	2.026.912.106	6.453.766.225	6.486.002.862	-4.459.090.756	4%	2.134.859.844	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					2.026.912.106	6.453.766.225	6.486.002.862	-4.459.090.756		2.134.859.844	
	Meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata daerah					2.026.912.106	6.453.766.225	6.486.002.862	-4.459.090.756		2.134.859.844	
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	340 Kegiatan	300 Kegiatan	300 Kegiatan	2.026.912.106	6.453.766.225	6.486.002.862	-4.459.090.756	320 Kegiatan	2.134.859.844	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					2.026.912.106	6.453.766.225	6.486.002.862	-4.459.090.756		2.134.859.844	
	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	340 Kegiatan	300 Kegiatan	300 Kegiatan	2.026.912.106	6.453.766.225	6.486.002.862	-4.459.090.756	320 Kegiatan	2.134.859.844	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					76.638.608	116.283.200	116.283.200	-39.644.592		76.670.696	
		Persentase produk kreatif yang mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	76.638.608	116.283.200	116.283.200	-39.644.592	100%	76.670.696	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					76.638.608	116.283.200	116.283.200	-39.644.592		76.670.696	
	Meningkatnya intensitas kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif					76.638.608	116.283.200	116.283.200	-39.644.592		76.670.696	
		Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	7 Produk	4 Produk	4 Produk	76.638.608	116.283.200	116.283.200	-39.644.592	5 Produk	76.670.696	
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual					76.638.608	116.283.200	116.283.200	-39.644.592		76.670.696	
	Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	7 Produk	4 Produk	4 Produk	76.638.608	116.283.200	116.283.200	-39.644.592	5 Produk	76.670.696	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.350.695.775	1.505.797.985	1.559.823.256	-209.127.481		1.365.163.743	
		Persentase pertumbuhan produk ekonomi kreatif	12,50 %	25,00%	25,00%	1.350.695.775	1.505.797.985	1.559.823.256	-209.127.481	20,00 %	1.365.163.743	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					1.350.695.775	1.505.797.985	1.559.823.256	-209.127.481		1.365.163.743	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif					1.350.695.775	1.505.797.985	1.559.823.256	-209.127.481		1.365.163.743	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	250 Orang	220 Orang	220 Orang	1.350.695.775	1.505.797.985	1.559.823.256	-209.127.481	220 Orang	1.365.163.743	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					1.350.695.775	1.505.797.985	1.559.823.256	-209.127.481		1.365.163.743	
	Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	250 Orang	220 Orang	220 Orang	1.350.695.775	1.505.797.985	1.559.823.256	-209.127.481	220 Orang	1.365.163.743	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
	UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya					9.656.184.773	10.176.605.934	10.256.349.627	-600.164.854		9.803.430.272	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					9.656.184.773	9.656.184.773	10.256.349.627	-600.164.854		9.803.430.272	
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					9.656.184.773	10.176.605.934	10.256.349.627	-600.164.854		9.803.430.272	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					9.656.184.773	10.176.605.934	10.256.349.627	-600.164.854		9.803.430.272	
		Persentase peningkatan kunjungan ke museum	8%	4%	4%	9.656.184.773	10.176.605.934	10.256.349.627	-600.164.854	5%	9.803.430.272	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					9.656.184.773	10.176.605.934	10.256.349.627	-600.164.854		9.803.430.272	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan museum					9.656.184.773	10.176.605.934	10.256.349.627	-600.164.854		9.803.430.272	
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1101 Unit	1101 Unit	1101 Unit	9.656.184.773	10.176.605.934	10.256.349.627	-600.164.854	1101 Unit	9.803.430.272	
		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	6 Unit	6 Unit	6 Unit	9.656.184.773	10.176.605.934	10.256.349.627	-600.164.854	6 Unit	9.803.430.272	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9.656.184.773	10.176.605.934	10.256.349.627	-600.164.854	9 Unit	9.803.430.272	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	9.656.184.773	10.176.605.934	10.256.349.627	-600.164.854	2 Unit	9.803.430.272	
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu					450.849.059	516.575.933	528.335.556	-77.486.497		456.066.127	
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1101 Unit	1101 Unit	1101 Unit	450.849.059	516.575.933	528.335.556	-77.486.497	1101 Unit	456.066.127	UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya
2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum					813.648.000	677.172.588	669.749.100	143.898.900		814.424.530	
	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	6 Unit	6 Unit	6 Unit	813.648.000	677.172.588	669.749.100	143.898.900	6 Unit	814.424.530	UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum					235.502.940	102.190.589	101.915.344	133.587.596		239.524.593	
	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	235.502.940	102.190.589	101.915.344	133.587.596	2 Unit	239.524.593	UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya
2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum					8.156.184.774	8.880.666.824	8.956.349.627	-800.164.853		8.293.415.022	
	Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	9 Unit	9 Unit	9 Unit	8.156.184.774	8.880.666.824	8.956.349.627	-800.164.853	9 Unit	8.293.415.022	UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya
	UPTD Objek Wisata					5.668.761.348	6.657.822.651	6.894.539.485	-1.225.778.137		5.751.774.468	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					5.668.761.348	5.668.761.348	6.894.539.485	-1.225.778.137		5.751.774.468	
3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					5.668.761.348	6.657.822.651	6.894.539.485	-1.225.778.137		5.751.774.468	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					5.668.761.348	6.657.822.651	6.894.539.485	-1.225.778.137		5.751.774.468	
		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke destinasi Pariwisata Kota Surabaya	7%	3%	3%	5.668.761.348	6.657.822.651	6.894.539.485	-1.225.778.137	4%	5.751.774.468	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					5.668.761.348	6.657.822.651	6.894.539.485	-1.225.778.137		5.751.774.468	
	Meningkatnya kunjungan ke THP Kenjeran dan Wisata Air Kalimas					5.668.761.348	6.657.822.651	6.894.539.485	-1.225.778.137		5.751.774.468	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.668.761.348	6.657.822.651	6.894.539.485	-1.225.778.137	2 Unit	5.751.774.468	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					5.668.761.348	6.657.822.651	6.894.539.485	-1.225.778.137		5.751.774.468	
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.668.761.348	6.657.822.651	6.894.539.485	-1.225.778.137	2 Unit	5.751.774.468	UPTD Objek Wisata
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					42.406.722.623	44.872.922.143	47.758.237.083	-5.351.514.460		43.139.107.981	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					42.406.722.623	42.406.722.623	47.758.237.083	-5.351.514.460		43.139.107.981	
2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					39.322.421.436	41.449.938.788	44.347.168.388	-5.024.746.952		39.997.935.063	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.258.456.090	23.672.631.624	25.755.289.408	-3.496.833.318		22.473.450.204	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,09	98,09	98,09	22.258.456.090	23.672.631.624	25.755.289.408	-3.496.833.318	98,09	22.473.450.204	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					33.675.416	33.260.000	33.260.000	415.416		33.900.032	
	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					33.675.416	33.260.000	33.260.000	415.416		33.900.032	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	33.675.416	33.260.000	33.260.000	415.416	8 Dokumen	33.900.032	
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					33.675.416	33.260.000	33.260.000	415.416		33.900.032	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	33.675.416	33.260.000	33.260.000	415.416	8 Dokumen	33.900.032	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19.076.625.645	19.877.771.415	21.882.675.688	-2.806.050.043		19.225.758.579	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan					19.076.625.645	19.877.771.415	21.882.675.688	-2.806.050.043		19.225.758.579	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	66 Orang/bulan	19.076.625.645	19.877.771.415	21.882.675.688	-2.806.050.043	65 Orang/bulan	19.225.758.579	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					19.076.625.645	19.877.771.415	21.882.675.688	-2.806.050.043		19.225.758.579	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	66 Orang/bulan	19.076.625.645	19.877.771.415	21.882.675.688	-2.806.050.043	65 Orang/bulan	19.225.758.579	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					343.563.705	340.569.067	308.601.067	34.962.638		359.035.967	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					343.563.705	340.569.067	308.601.067	34.962.638		359.035.967	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	4 Paket	343.563.705	340.569.067	308.601.067	34.962.638	10 Paket	359.035.967	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					343.563.705	340.569.067	308.601.067	34.962.638		359.035.967	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	4 Paket	343.563.705	340.569.067	308.601.067	34.962.638	10 Paket	359.035.967	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.804.591.324	3.421.031.142	3.530.752.653	-726.161.329		2.854.755.626	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					2.804.591.324	3.421.031.142	3.530.752.653	-726.161.329		2.854.755.626	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.804.591.324	3.421.031.142	3.530.752.653	-726.161.329	12 Laporan	2.854.755.626	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.804.591.324	3.421.031.142	3.530.752.653	-726.161.329		2.854.755.626	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.804.591.324	3.421.031.142	3.530.752.653	-726.161.329	12 Laporan	2.854.755.626	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					17.016.699.882	17.724.237.164	18.538.808.980	-1.522.109.098		17.476.739.016	
		Persentase anggota perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan	5,9 %	5,50%	5,50%	17.016.699.882	17.724.237.164	18.538.808.980	-1.522.109.098	5,6 %	17.476.739.016	
		Persentase masyarakat yang dihasilkan menjadi pegiat literasi	100,00 %	42,85%	42,85%	17.016.699.882	17.724.237.164	18.538.808.980	-1.522.109.098	57,14 %	17.476.739.016	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	100,00 %	65,70%	65,70%	17.016.699.882	17.724.237.164	18.538.808.980	-1.522.109.098	73,70 %	17.476.739.016	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					16.478.023.580	16.510.796.947	17.093.412.026	-615.388.446		16.910.035.997	
	Meningkatnya kualitas perpustakaan dan layanan baca					16.478.023.580	16.510.796.947	17.093.412.026	-615.388.446		16.910.035.997	
		Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	21305 Eksemplar	17305 Eksemplar	84000 Eksemplar	16.478.023.580	16.510.796.947	17.093.412.026	-615.388.446	18305 Eksemplar	16.910.035.997	
		Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			50 Eksemplar	16.478.023.580	16.510.796.947	17.093.412.026	-615.388.446		16.910.035.997	
		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	240 Perpustakaan	240 Perpustakaan	240 Perpustakaan	16.478.023.580	16.510.796.947	17.093.412.026	-615.388.446	240 Perpustakaan	16.910.035.997	
		Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	307 Perpustakaan	100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	16.478.023.580	16.510.796.947	17.093.412.026	-615.388.446	150 Perpustakaan	16.910.035.997	
		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			150 Perpustakaan	16.478.023.580	16.510.796.947	17.093.412.026	-615.388.446		16.910.035.997	
		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	500 Orang	16.478.023.580	16.510.796.947	17.093.412.026	-615.388.446	500 Orang	16.910.035.997	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan					55.675.000	95.692.200	51.015.000	4.660.000		66.800.000	
	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	240 Perpustakaan	240 Perpustakaan	240 Perpustakaan	55.675.000	95.692.200	51.015.000	4.660.000	240 Perpustakaan	66.800.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	62.092.200	-62.092.200		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			150 Perpustakaan	0	0	62.092.200	-62.092.200		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota					15.266.746.345	15.235.297.947	16.001.075.675	-734.329.330		15.585.072.335	
	Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	307 Perpustakaan	100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	15.266.746.345	15.235.297.947	16.001.075.675	-734.329.330	150 Perpustakaan	15.585.072.335	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat					914.381.756	863.500.557	703.778.591	210.603.165		1.001.540.519	
	Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	21305 Eksemplar	17305 Eksemplar	84000 Eksemplar	914.381.756	863.500.557	703.778.591	210.603.165	18305 Eksemplar	1.001.540.519	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					241.220.479	316.306.243	248.361.760	-7.141.281		256.623.143	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	500 Orang	241.220.479	316.306.243	248.361.760	-7.141.281	500 Orang	256.623.143	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota					0	0	27.088.800	-27.088.800		0	
		Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			50 Eksemplar	0	0	27.088.800	-27.088.800		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					538.676.302	1.213.440.217	1.445.396.954	-906.720.652		566.703.019	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berliterasi					538.676.302	1.213.440.217	1.445.396.954	-906.720.652		566.703.019	
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	280 Lokus	260 Lokus	260 Lokus	538.676.302	1.213.440.217	1.445.396.954	-906.720.652	265 Lokus	566.703.019	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			6 Orang	538.676.302	1.213.440.217	1.445.396.954	-906.720.652		566.703.019	
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca					0	0	92.492.000	-92.492.000		0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			6 Orang	0	0	92.492.000	-92.492.000		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat					538.676.302	1.213.440.217	1.352.904.954	-814.228.652		566.703.019	
	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	280 Lokus	260 Lokus	260 Lokus	538.676.302	1.213.440.217	1.352.904.954	-814.228.652	265 Lokus	566.703.019	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					47.265.464	53.070.000	53.070.000	-5.804.536		47.745.843	
		Persentase naskah kuno yang dilestarikan	100%	50%	50%	47.265.464	53.070.000	53.070.000	-5.804.536	62,50 %	47.745.843	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota					47.265.464	53.070.000	53.070.000	-5.804.536		47.745.843	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya pelestarian naskah kuno					47.265.464	53.070.000	53.070.000	-5.804.536		47.745.843	
		Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	10 Orang	6 Orang	6 Orang	47.265.464	53.070.000	53.070.000	-5.804.536	7 Orang	47.745.843	
		Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	47.265.464	53.070.000	53.070.000	-5.804.536	2 Eksemplar	47.745.843	
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno					17.488.488	23.440.000	4.052.000	13.436.488		17.904.691	
	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	10 Orang	6 Orang	6 Orang	17.488.488	23.440.000	4.052.000	13.436.488	7 Orang	17.904.691	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan					29.776.976	29.630.000	49.018.000	-19.241.024		29.841.152	
	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	29.776.976	29.630.000	49.018.000	-19.241.024	2 Eksemplar	29.841.152	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					3.084.301.187	3.422.983.355	3.411.068.695	-326.767.508		3.141.172.918	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					3.084.301.187	3.422.983.355	3.411.068.695	-326.767.508		3.141.172.918	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	34,89%	30,78%	30,78%	3.084.301.187	3.422.983.355	3.411.068.695	-326.767.508	31,60%	3.141.172.918	
		Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	100%	36,48%	36,48%	3.084.301.187	3.422.983.355	3.411.068.695	-326.767.508	52,36%	3.141.172.918	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	28,55%	15,25%	15,25%	3.084.301.187	3.422.983.355	3.411.068.695	-326.767.508	18,58%	3.141.172.918	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota					2.309.293.288	2.361.907.942	2.368.639.232	-59.345.944		2.333.520.586	
	Meningkatnya kualitas pengawasan kearsipan					2.309.293.288	2.361.907.942	2.368.639.232	-59.345.944		2.333.520.586	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	68 Laporan	68 Laporan	68 Laporan	2.309.293.288	2.361.907.942	2.368.639.232	-59.345.944	68 Laporan	2.333.520.586	
		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1666 Berkas	1666 Berkas	1666 Berkas	2.309.293.288	2.361.907.942	2.368.639.232	-59.345.944	1666 Berkas	2.333.520.586	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dinamis					2.309.293.288	2.361.907.942	2.368.639.232	-59.345.944		2.333.520.586	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	68 Laporan	68 Laporan	68 Laporan	2.309.293.288	2.361.907.942	2.368.639.232	-59.345.944	68 Laporan	2.333.520.586	
		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1666 Berkas	1666 Berkas	1666 Berkas	2.309.293.288	2.361.907.942	2.368.639.232	-59.345.944	1666 Berkas	2.333.520.586	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis					922.891.308	940.418.632	940.418.632	-17.527.324		929.618.200	
	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1666 Berkas	1666 Berkas	1666 Berkas	922.891.308	940.418.632	940.418.632	-17.527.324	1666 Berkas	929.618.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					231.755.336	240.535.339	243.900.984	-12.145.648		237.142.093	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	68 Laporan	68 Laporan	68 Laporan	231.755.336	240.535.339	243.900.984	-12.145.648	68 Laporan	237.142.093	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota					1.434.899.767	1.664.261.811	1.701.111.912	-266.212.145		1.447.646.980	
	Meningkatnya pengelolaan arsip statis					1.434.899.767	1.664.261.811	1.701.111.912	-266.212.145		1.447.646.980	
		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	600 Arsip	396 Arsip	521 Arsip	1.434.899.767	1.664.261.811	1.701.111.912	-266.212.145	444 Arsip	1.447.646.980	
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					1.434.899.767	1.664.261.811	1.701.111.912	-266.212.145		1.447.646.980	
	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	600 Arsip	396 Arsip	521 Arsip	1.434.899.767	1.664.261.811	1.701.111.912	-266.212.145	444 Arsip	1.447.646.980	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota					494.754.776	577.767.573	525.637.167	-30.882.391		526.765.645	
	Pelaksanaan dokumentasi arsip dalam SIKN melalui JIKN					494.754.776	577.767.573	525.637.167	-30.882.391		526.765.645	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	630 Laporan	230 Laporan	230 Laporan	494.754.776	577.767.573	525.637.167	-30.882.391	330 Laporan	526.765.645	
		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1200 Pengguna	1200 Pengguna	5000 Pengguna	494.754.776	577.767.573	525.637.167	-30.882.391	1200 Pengguna	526.765.645	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN					318.428.319	401.476.583	349.346.177	-30.917.858		338.118.365	
	Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1200 Pengguna	1200 Pengguna	5000 Pengguna	318.428.319	401.476.583	349.346.177	-30.917.858	1200 Pengguna	338.118.365	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					176.326.457	176.290.990	176.290.990	35.467		188.647.280	
	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	630 Laporan	230 Laporan	230 Laporan	176.326.457	176.290.990	176.290.990	35.467	330 Laporan	188.647.280	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Sekretariat Daerah					623.404.640.964	349.423.269.705	354.803.320.001	268.601.320.963		654.039.400.063	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					623.404.640.964	623.404.640.964	354.803.320.001	268.601.320.963		654.039.400.063	
4,01	SEKRETARIAT DAERAH					623.404.640.964	349.423.269.705	354.803.320.001	268.601.320.963		654.039.400.063	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					226.848.301.782	217.256.250.182	222.777.425.481	4.070.876.301		246.026.328.444	
		Persentase kematangan perangkat daerah pada level 5	100%	85%	85%	226.848.301.782	217.256.250.182	222.777.425.481	4.070.876.301	100%	246.026.328.444	
		Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	226.848.301.782	217.256.250.182	222.777.425.481	4.070.876.301	100%	246.026.328.444	
		Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	226.848.301.782	217.256.250.182	222.777.425.481	4.070.876.301	100%	246.026.328.444	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A	100%	100%	100%	226.848.301.782	217.256.250.182	222.777.425.481	4.070.876.301	100%	246.026.328.444	
		Persentase rekomendasi Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	226.848.301.782	217.256.250.182	222.777.425.481	4.070.876.301	100%	246.026.328.444	
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	226.848.301.782	217.256.250.182	222.777.425.481	4.070.876.301	100%	246.026.328.444	
		Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%	100%	100%	226.848.301.782	217.256.250.182	222.777.425.481	4.070.876.301	100%	246.026.328.444	
		Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	226.848.301.782	217.256.250.182	222.777.425.481	4.070.876.301	100%	246.026.328.444	
		Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang/Jasa Penunjang Tepat Waktu	100%	100%	100%	226.848.301.782	217.256.250.182	222.777.425.481	4.070.876.301	100%	246.026.328.444	
		Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori sangat baik	98%	97,20%	97,20%	226.848.301.782	217.256.250.182	222.777.425.481	4.070.876.301	97,40%	246.026.328.444	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99%	95%	95%	226.848.301.782	217.256.250.182	222.777.425.481	4.070.876.301	96%	246.026.328.444	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					156.000.000	17.467.712	17.510.976	138.489.024		156.000.000	
	Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					156.000.000	17.467.712	17.510.976	138.489.024		156.000.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	156.000.000	17.467.712	17.510.976	138.489.024	8 Dokumen	156.000.000	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					156.000.000	17.467.712	17.510.976	138.489.024		156.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	156.000.000	17.467.712	17.510.976	138.489.024	8 Dokumen	156.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					79.011.533.942	79.005.500.342	84.384.523.178	-5.372.989.236		79.611.548.135	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					79.011.533.942	79.005.500.342	84.384.523.178	-5.372.989.236		79.611.548.135	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang/bulan	157 Orang/bulan	232 Orang/bulan	79.011.533.942	79.005.500.342	84.384.523.178	-5.372.989.236	157 Orang/bulan	79.611.548.135	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					79.011.533.942	79.005.500.342	84.384.523.178	-5.372.989.236		79.611.548.135	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang/bulan	157 Orang/bulan	232 Orang/bulan	79.011.533.942	79.005.500.342	84.384.523.178	-5.372.989.236	157 Orang/bulan	79.611.548.135	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	9.354.870.673	9.354.870.673	-9.354.870.673		9.777.854.087	
	Terlaksananya pengadaan barang/jasa penunjang					0	9.354.870.673	9.354.870.673	-9.354.870.673		9.777.854.087	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	532 Unit	532 Unit	532 Unit	0	9.354.870.673	9.354.870.673	-9.354.870.673	532 Unit	9.777.854.087	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0	9.354.870.673	9.354.870.673	-9.354.870.673		9.777.854.087	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	532 Unit	532 Unit	532 Unit	0	9.354.870.673	9.354.870.673	-9.354.870.673	532 Unit	9.777.854.087	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					113.827.610.745	102.614.726.899	102.723.874.504	11.103.736.241		120.999.667.493	
	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					113.827.610.745	102.614.726.899	102.723.874.504	11.103.736.241		120.999.667.493	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	113.827.610.745	102.614.726.899	102.723.874.504	11.103.736.241	12 Laporan	120.999.667.493	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	113.827.610.745	102.614.726.899	102.723.874.504	11.103.736.241	12 Laporan	120.999.667.493	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	113.827.610.745	102.614.726.899	102.723.874.504	11.103.736.241	12 Laporan	120.999.667.493	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.156.796.000	2.156.796.716	2.156.180.180	615.820		2.269.796.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.156.796.000	2.156.796.716	2.156.180.180	615.820	12 Laporan	2.269.796.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3.300.451.505	64.844.519.926	64.954.569.097	-61.654.117.592		3.470.691.505	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.300.451.505	64.844.519.926	64.954.569.097	-61.654.117.592	12 Laporan	3.470.691.505	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					108.370.363.240	35.613.410.257	35.613.125.227	72.757.238.013		115.259.179.988	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	108.370.363.240	35.613.410.257	35.613.125.227	72.757.238.013	12 Laporan	115.259.179.988	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					12.222.470.887	13.421.578.471	13.421.578.471	-1.199.107.584		12.931.470.887	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan serta biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					12.222.470.887	13.421.578.471	13.421.578.471	-1.199.107.584		12.931.470.887	
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	12.222.470.887	13.421.578.471	13.421.578.471	-1.199.107.584	2 Orang/Bulan	12.931.470.887	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	12.222.470.887	13.421.578.471	13.421.578.471	-1.199.107.584	2 Orang/Bulan	12.931.470.887	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					186.001.452	1.385.109.036	1.385.109.036	-1.199.107.584		195.001.452	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	186.001.452	1.385.109.036	1.385.109.036	-1.199.107.584	2 Orang/Bulan	195.001.452	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					12.036.469.435	12.036.469.435	12.036.469.435	0		12.736.469.435	
	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	12.036.469.435	12.036.469.435	12.036.469.435	0	2 Orang/Bulan	12.736.469.435	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi					4.159.978.386	4.454.070.588	4.491.853.246	-331.874.860		4.640.912.494	
	Meningkatnya kualitas penataan organisasi Kota Surabaya					4.159.978.386	4.454.070.588	4.491.853.246	-331.874.860		4.640.912.494	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.159.978.386	4.454.070.588	4.491.853.246	-331.874.860	1 Dokumen	4.640.912.494	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.159.978.386	4.454.070.588	4.491.853.246	-331.874.860	1 Dokumen	4.640.912.494	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.159.978.386	4.454.070.588	4.491.853.246	-331.874.860	2 Dokumen	4.640.912.494	
	Terselenggaranya pendampingan penerapan akuntabilitas dan pelaporan kinerja perangkat daerah					4.159.978.386	4.454.070.588	4.491.853.246	-331.874.860		4.640.912.494	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.159.978.386	4.454.070.588	4.491.853.246	-331.874.860	1 Dokumen	4.640.912.494	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.159.978.386	4.454.070.588	4.491.853.246	-331.874.860	1 Dokumen	4.640.912.494	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.159.978.386	4.454.070.588	4.491.853.246	-331.874.860	2 Dokumen	4.640.912.494	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					719.152.265	823.567.350	828.758.687	-109.606.422		838.697.738	
	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	719.152.265	823.567.350	828.758.687	-109.606.422	1 Dokumen	838.697.738	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					739.188.301	704.219.317	708.465.120	30.723.181		860.109.882	
	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	739.188.301	704.219.317	708.465.120	30.723.181	2 Dokumen	860.109.882	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					621.648.627	699.248.627	708.702.816	-87.054.189		621.648.627	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	621.648.627	699.248.627	708.702.816	-87.054.189	1 Dokumen	621.648.627	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					19.550.697.015	10.615.070.791	10.629.141.056	8.921.555.959		20.229.331.595	
	Meningkatnya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					19.550.697.015	10.615.070.791	10.629.141.056	8.921.555.959		20.229.331.595	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19.550.697.015	10.615.070.791	10.629.141.056	8.921.555.959	12 Laporan	20.229.331.595	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19.550.697.015	10.615.070.791	10.629.141.056	8.921.555.959	12 Laporan	20.229.331.595	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan					19.046.451.000	10.110.824.776	10.125.228.288	8.921.222.712		19.517.893.325	
	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19.046.451.000	10.110.824.776	10.125.228.288	8.921.222.712	12 Laporan	19.517.893.325	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					504.246.015	504.246.015	503.912.768	333.247		711.438.270	
	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	504.246.015	504.246.015	503.912.768	333.247	12 Laporan	711.438.270	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					376.262.847.072	111.691.511.581	111.567.072.619	264.695.774.453		387.427.411.357	
		Indeks Kualitas Kebijakan	88 nilai	86 nilai	86 nilai	376.262.847.072	111.691.511.581	111.567.072.619	264.695.774.453	87 nilai	387.427.411.357	
		Indeks Reformasi Hukum	98 nilai	97.2 nilai	97.2 nilai	376.262.847.072	111.691.511.581	111.567.072.619	264.695.774.453	97.4 nilai	387.427.411.357	
		Kinerja SPM	97.83 nilai	97.43 nilai	97.43 nilai	376.262.847.072	111.691.511.581	111.567.072.619	264.695.774.453	97.53 nilai	387.427.411.357	
		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	3.6 nilai	3.2 nilai	3.2 nilai	376.262.847.072	111.691.511.581	111.567.072.619	264.695.774.453	3.3 nilai	387.427.411.357	
		Persentase intervensi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan secara tepat sasaran	100%	100%	100%	376.262.847.072	111.691.511.581	111.567.072.619	264.695.774.453	100%	387.427.411.357	
		Persentase jenis data yang telah disajikan pada aplikasi Basis Data Kewilayahan	100%	100%	100%	376.262.847.072	111.691.511.581	111.567.072.619	264.695.774.453	100%	387.427.411.357	
		Persentase Keberhasilan Pemberian Bantuan Hukum kepada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	376.262.847.072	111.691.511.581	111.567.072.619	264.695.774.453	100%	387.427.411.357	
		Persentase Pelaksanaan Kerja Sama yang Optimal	100%	100%	100%	376.262.847.072	111.691.511.581	111.567.072.619	264.695.774.453	100%	387.427.411.357	
		Presentase pelaksanaan Kegiatan Pendataan Pilar Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	100%	376.262.847.072	111.691.511.581	111.567.072.619	264.695.774.453	100%	387.427.411.357	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan					7.854.076.881	15.243.582.059	15.303.986.814	-7.449.909.933		7.898.670.676	
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Tata Pemerintahan					7.854.076.881	15.243.582.059	15.303.986.814	-7.449.909.933		7.898.670.676	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.854.076.881	15.243.582.059	15.303.986.814	-7.449.909.933	2 Dokumen	7.898.670.676	
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.854.076.881	15.243.582.059	15.303.986.814	-7.449.909.933	1 Dokumen	7.898.670.676	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.854.076.881	15.243.582.059	15.303.986.814	-7.449.909.933	1 Dokumen	7.898.670.676	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan					2.309.888.092	8.051.538.369	8.065.614.340	-5.755.726.248		2.316.161.516	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.309.888.092	8.051.538.369	8.065.614.340	-5.755.726.248	1 Dokumen	2.316.161.516	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					3.706.026.883	5.697.239.478	5.711.144.254	-2.005.117.371		3.711.811.098	
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.706.026.883	5.697.239.478	5.711.144.254	-2.005.117.371	1 Dokumen	3.711.811.098	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					1.838.161.906	1.494.804.212	1.527.228.220	310.933.686		1.870.698.062	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.838.161.906	1.494.804.212	1.527.228.220	310.933.686	2 Dokumen	1.870.698.062	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					360.927.986.442	90.148.024.624	89.930.141.774	270.997.844.668		371.999.554.859	
	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					360.927.986.442	90.148.024.624	89.930.141.774	270.997.844.668		371.999.554.859	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	360.927.986.442	90.148.024.624	89.930.141.774	270.997.844.668	1 Dokumen	371.999.554.859	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	608340 Keluarga	12 Keluarga	12 Keluarga	360.927.986.442	90.148.024.624	89.930.141.774	270.997.844.668	598460 Keluarga	371.999.554.859	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	21000 Keluarga	21000 Keluarga	21000 Keluarga	360.927.986.442	90.148.024.624	89.930.141.774	270.997.844.668	21000 Keluarga	371.999.554.859	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					37.102.467.402	39.073.303.569	39.046.211.488	-1.943.744.086		39.429.087.532	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37.102.467.402	39.073.303.569	39.046.211.488	-1.943.744.086	1 Dokumen	39.429.087.532	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					262.794.423.415	1.273.396.367	1.073.414.544	261.721.008.871		271.536.369.549	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	608340 Keluarga	12 Keluarga	12 Keluarga	262.794.423.415	1.273.396.367	1.073.414.544	261.721.008.871	598460 Keluarga	271.536.369.549	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					61.031.095.625	49.801.324.688	49.810.515.742	11.220.579.883		61.034.097.778	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	21000 Keluarga	21000 Keluarga	21000 Keluarga	61.031.095.625	49.801.324.688	49.810.515.742	11.220.579.883	21000 Keluarga	61.034.097.778	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					12.109.999.904	9.835.507.974	9.902.922.794	2.207.077.110		12.143.553.962	
	Meningkatnya efektifitas penyusunan produk hukum daerah oleh Pemerintah Daerah					12.109.999.904	9.835.507.974	9.902.922.794	2.207.077.110		12.143.553.962	
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	12.109.999.904	9.835.507.974	9.902.922.794	2.207.077.110	20 Kasus	12.143.553.962	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	12.109.999.904	9.835.507.974	9.902.922.794	2.207.077.110	60 Dokumen	12.143.553.962	
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	12.109.999.904	9.835.507.974	9.902.922.794	2.207.077.110	60 Dokumen	12.143.553.962	
	Meningkatnya efektifitas penanganan permasalahan hukum oleh Pemerintah Daerah					12.109.999.904	9.835.507.974	9.902.922.794	2.207.077.110		12.143.553.962	
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	12.109.999.904	9.835.507.974	9.902.922.794	2.207.077.110	20 Kasus	12.143.553.962	
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	12.109.999.904	9.835.507.974	9.902.922.794	2.207.077.110	60 Dokumen	12.143.553.962	
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	12.109.999.904	9.835.507.974	9.902.922.794	2.207.077.110	60 Dokumen	12.143.553.962	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					3.180.695.893	2.174.662.583	2.196.469.747	984.226.146		3.190.238.844	
	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	3.180.695.893	2.174.662.583	2.196.469.747	984.226.146	60 Dokumen	3.190.238.844	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum					1.559.935.540	1.575.073.797	1.585.158.091	-25.222.551		1.564.435.836	
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	1.559.935.540	1.575.073.797	1.585.158.091	-25.222.551	20 Kasus	1.564.435.836	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					1.314.368.519	1.168.017.607	1.169.833.559	144.534.960		1.317.102.301	
	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	1.314.368.519	1.168.017.607	1.169.833.559	144.534.960	60 Dokumen	1.317.102.301	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah					1.425.783.797	1.382.150.911	1.381.482.634	44.301.163		1.457.408.841	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan dan Evaluasi Kerja Sama Daerah					1.425.783.797	1.382.150.911	1.381.482.634	44.301.163		1.457.408.841	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.425.783.797	1.382.150.911	1.381.482.634	44.301.163	1 Dokumen	1.457.408.841	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.425.783.797	1.382.150.911	1.381.482.634	44.301.163	1 Dokumen	1.457.408.841	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.425.783.797	1.382.150.911	1.381.482.634	44.301.163	1 Laporan	1.457.408.841	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					567.819.381	569.285.612	568.816.050	-996.669		597.094.480	
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	567.819.381	569.285.612	568.816.050	-996.669	1 Dokumen	597.094.480	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri					451.958.426	385.125.267	385.067.488	66.890.938		452.062.211	
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	451.958.426	385.125.267	385.067.488	66.890.938	1 Dokumen	452.062.211	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					406.005.990	427.740.032	427.599.096	-21.593.106		408.252.150	
	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	406.005.990	427.740.032	427.599.096	-21.593.106	1 Laporan	408.252.150	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					20.293.492.110	20.475.507.942	20.458.821.901	-165.329.791		20.585.660.262	
		Indeks Akses Keuangan Daerah	6,87 Indeks	6.85 Indeks	6.81 Indeks	20.293.492.110	20.475.507.942	20.458.821.901	-165.329.791	6,86 Indeks	20.585.660.262	
		Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	19,29 Nilai	17.14 Nilai	17.14 Nilai	20.293.492.110	20.475.507.942	20.458.821.901	-165.329.791	17,68 Nilai	20.585.660.262	
		Pemanfaatan Sistem Pengadaan	30 Nilai	28.75 Nilai	28.75 Nilai	20.293.492.110	20.475.507.942	20.458.821.901	-165.329.791	29,06 Nilai	20.585.660.262	
		Persentase capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	76%	76%	76%	20.293.492.110	20.475.507.942	20.458.821.901	-165.329.791	76%	20.585.660.262	
		Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	85,5 %	85,50%	85,50%	20.293.492.110	20.475.507.942	20.458.821.901	-165.329.791	85,5 %	20.585.660.262	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase penyediaan data harga bahan pokok penting yang akurat dan dapat diakses untuk mendukung pengambilan keputusan	100%	100%	100%	20.293.492.110	20.475.507.942	20.458.821.901	-165.329.791	100%	20.585.660.262	
		Persentase Terlaksananya Siklus Koordinasi Bidang Perekonomian dan Evaluasi BUMD	100%	100%	100%	20.293.492.110	20.475.507.942	20.458.821.901	-165.329.791	100%	20.585.660.262	
		Tingkat Kematangan UKPBJ	40 Nilai	40 Nilai	40 Nilai	20.293.492.110	20.475.507.942	20.458.821.901	-165.329.791	40 Nilai	20.585.660.262	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					9.609.679.938	9.639.337.388	9.718.001.964	-108.322.026		10.082.607.410	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Perekonomian sesuai dengan Rekomendasi yang Ditetapkan					9.609.679.938	9.639.337.388	9.718.001.964	-108.322.026		10.082.607.410	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9.609.679.938	9.639.337.388	9.718.001.964	-108.322.026	2 Dokumen	10.082.607.410	
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	9.609.679.938	9.639.337.388	9.718.001.964	-108.322.026	4 Dokumen	10.082.607.410	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.609.679.938	9.639.337.388	9.718.001.964	-108.322.026	12 Laporan	10.082.607.410	
	Meningkatnya kebijakan di bidang perekonomian sesuai dengan rekomendasi TPID yang ditetapkan					9.609.679.938	9.639.337.388	9.718.001.964	-108.322.026		10.082.607.410	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9.609.679.938	9.639.337.388	9.718.001.964	-108.322.026	2 Dokumen	10.082.607.410	
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	9.609.679.938	9.639.337.388	9.718.001.964	-108.322.026	4 Dokumen	10.082.607.410	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.609.679.938	9.639.337.388	9.718.001.964	-108.322.026	12 Laporan	10.082.607.410	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					1.235.740.016	1.251.740.000	1.375.722.500	-139.982.484		1.442.640.022	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.235.740.016	1.251.740.000	1.375.722.500	-139.982.484	2 Dokumen	1.442.640.022	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					2.861.500.007	2.860.918.694	2.783.354.407	78.145.600		2.888.863.883	
	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.861.500.007	2.860.918.694	2.783.354.407	78.145.600	12 Laporan	2.888.863.883	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					707.599.946	707.010.000	699.924.075	7.675.871		709.799.800	
	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	707.599.946	707.010.000	699.924.075	7.675.871	4 Dokumen	709.799.800	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					9.040.619.700	9.123.043.499	9.112.450.113	-71.830.413		9.083.336.660	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					9.040.619.700	9.123.043.499	9.112.450.113	-71.830.413		9.083.336.660	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	9.040.619.700	9.123.043.499	9.112.450.113	-71.830.413	16 Laporan	9.083.336.660	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.040.619.700	9.123.043.499	9.112.450.113	-71.830.413	12 Laporan	9.083.336.660	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					2.492.948.551	2.627.765.029	2.581.213.102	-88.264.551		2.508.937.792	
	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.492.948.551	2.627.765.029	2.581.213.102	-88.264.551	12 Laporan	2.508.937.792	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					6.547.671.149	6.495.278.470	6.531.237.011	16.434.138		6.574.398.868	
	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	6.547.671.149	6.495.278.470	6.531.237.011	16.434.138	16 Laporan	6.574.398.868	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					6.396.032.441	6.480.952.869	6.453.727.926	-57.695.485		6.401.219.897	
	Meningkatnya Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Menunjang Proses Pengadaan Barang dan Jasa					6.396.032.441	6.480.952.869	6.453.727.926	-57.695.485		6.401.219.897	
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.396.032.441	6.480.952.869	6.453.727.926	-57.695.485	1 Dokumen	6.401.219.897	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	6.396.032.441	6.480.952.869	6.453.727.926	-57.695.485	20 Dokumen	6.401.219.897	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	300 Orang	300 Orang	6.396.032.441	6.480.952.869	6.453.727.926	-57.695.485	300 Orang	6.401.219.897	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					4.550.219.501	5.205.179.310	5.168.690.518	-618.471.017		4.555.406.957	
	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	4.550.219.501	5.205.179.310	5.168.690.518	-618.471.017	20 Dokumen	4.555.406.957	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					1.539.212.940	969.173.559	978.437.408	560.775.532		1.539.212.940	
	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.539.212.940	969.173.559	978.437.408	560.775.532	1 Dokumen	1.539.212.940	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					306.600.000	306.600.000	306.600.000	0		306.600.000	
	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	300 Orang	300 Orang	306.600.000	306.600.000	306.600.000	0	300 Orang	306.600.000	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					52.000.000	51.842.880	33.642.880	18.357.120		59.800.000	
	Meningkatnya Efektifitas Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					52.000.000	51.842.880	33.642.880	18.357.120		59.800.000	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000	51.842.880	33.642.880	18.357.120	1 Dokumen	59.800.000	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					52.000.000	51.842.880	33.642.880	18.357.120		59.800.000	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000	51.842.880	33.642.880	18.357.120	1 Dokumen	59.800.000	Sekretariat Daerah
	Sekretariat DPRD					198.767.523.207	233.538.959.143	234.370.834.450	-35.603.311.243		203.481.279.167	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					198.767.523.207	198.767.523.207	234.370.834.450	-35.603.311.243		203.481.279.167	
4,02	SEKRETARIAT DPRD					198.767.523.207	233.538.959.143	234.370.834.450	-35.603.311.243		203.481.279.167	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					136.826.327.295	150.873.414.537	151.705.289.844	-14.878.962.549		141.438.136.851	
		Persentase pelaksanaan layanan pendukung DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%	136.826.327.295	150.873.414.537	151.705.289.844	-14.878.962.549	100%	141.438.136.851	
		Persentase perjalanan dinas DPRD yang difasilitasi	100,00 %	100,00%	100,00%	136.826.327.295	150.873.414.537	151.705.289.844	-14.878.962.549	100,00 %	141.438.136.851	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	93%	93%	136.826.327.295	150.873.414.537	151.705.289.844	-14.878.962.549	93%	141.438.136.851	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.923.200	15.923.200	15.923.200	0		15.923.200	
	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah					15.923.200	15.923.200	15.923.200	0		15.923.200	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	15.923.200	15.923.200	15.923.200	0	8 Dokumen	15.923.200	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					15.923.200	15.923.200	15.923.200	0		15.923.200	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	15.923.200	15.923.200	15.923.200	0	8 Dokumen	15.923.200	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.819.563.581	14.819.563.581	15.070.430.535	-250.866.954		14.934.620.550	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					14.819.563.581	14.819.563.581	15.070.430.535	-250.866.954		14.934.620.550	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	14.819.563.581	14.819.563.581	15.070.430.535	-250.866.954	50 Orang/bulan	14.934.620.550	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14.819.563.581	14.819.563.581	15.070.430.535	-250.866.954		14.934.620.550	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	14.819.563.581	14.819.563.581	15.070.430.535	-250.866.954	50 Orang/bulan	14.934.620.550	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					29.527.735.220	31.326.742.283	31.907.750.636	-2.380.015.416		29.865.210.269	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					29.527.735.220	31.326.742.283	31.907.750.636	-2.380.015.416		29.865.210.269	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	11 Paket	29.527.735.220	31.326.742.283	31.907.750.636	-2.380.015.416	11 Paket	29.865.210.269	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					29.527.735.220	31.326.742.283	31.907.750.636	-2.380.015.416		29.865.210.269	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	11 Paket	29.527.735.220	31.326.742.283	31.907.750.636	-2.380.015.416	11 Paket	29.865.210.269	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.992.684.629	10.193.165.148	10.193.165.148	-5.200.480.519		4.997.419.789	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					4.992.684.629	10.193.165.148	10.193.165.148	-5.200.480.519		4.997.419.789	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	105 Unit	50 Unit	50 Unit	4.992.684.629	10.193.165.148	10.193.165.148	-5.200.480.519	105 Unit	4.997.419.789	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4.992.684.629	10.193.165.148	10.193.165.148	-5.200.480.519		4.997.419.789	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	105 Unit	50 Unit	50 Unit	4.992.684.629	10.193.165.148	10.193.165.148	-5.200.480.519	105 Unit	4.997.419.789	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					32.390.554.899	39.205.297.465	39.205.297.465	-6.814.742.566		36.526.877.457	
	Terlaksananya protokol dan komunikasi DPRD					32.390.554.899	39.205.297.465	39.205.297.465	-6.814.742.566		36.526.877.457	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96 Laporan	96 Laporan	144 Laporan	32.390.554.899	39.205.297.465	39.205.297.465	-6.814.742.566	96 Laporan	36.526.877.457	
4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan					32.390.554.899	39.205.297.465	39.205.297.465	-6.814.742.566		36.526.877.457	
	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96 Laporan	96 Laporan	144 Laporan	32.390.554.899	39.205.297.465	39.205.297.465	-6.814.742.566	96 Laporan	36.526.877.457	Sekretariat DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					54.522.056.860	54.522.056.860	54.522.056.860	0		54.522.056.860	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan anggota DPRD					54.522.056.860	54.522.056.860	54.522.056.860	0		54.522.056.860	
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	54.522.056.860	54.522.056.860	54.522.056.860	0	50 Orang/Bulan	54.522.056.860	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD					54.522.056.860	54.522.056.860	54.522.056.860	0		54.522.056.860	
	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	54.522.056.860	54.522.056.860	54.522.056.860	0	50 Orang/Bulan	54.522.056.860	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD					557.808.906	790.666.000	790.666.000	-232.857.094		576.028.726	
	Meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian laporan perjalanan dinas					557.808.906	790.666.000	790.666.000	-232.857.094		576.028.726	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	557.808.906	790.666.000	790.666.000	-232.857.094	8 Laporan	576.028.726	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					557.808.906	790.666.000	790.666.000	-232.857.094		576.028.726	
	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	557.808.906	790.666.000	790.666.000	-232.857.094	8 Laporan	576.028.726	Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					61.941.195.912	82.665.544.606	82.665.544.606	-20.724.348.694		62.043.142.316	
		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%	61.941.195.912	82.665.544.606	82.665.544.606	-20.724.348.694	100%	62.043.142.316	
		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	53,6 %	52,50%	52,50%	61.941.195.912	82.665.544.606	82.665.544.606	-20.724.348.694	52,5 %	62.043.142.316	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					909.425.790	1.712.412.034	1.712.412.034	-802.986.244		915.566.817	
	Terlaksananya Pembahasan dan Pengesahan Raperda dan/atau Rancangan Peraturan DPRD					909.425.790	1.712.412.034	1.712.412.034	-802.986.244		915.566.817	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	909.425.790	1.712.412.034	1.712.412.034	-802.986.244	6 Dokumen	915.566.817	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					909.425.790	1.712.412.034	1.712.412.034	-802.986.244		915.566.817	
	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	909.425.790	1.712.412.034	1.712.412.034	-802.986.244	6 Dokumen	915.566.817	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD					27.315.121.571	27.754.139.085	27.754.139.085	-439.017.514		27.407.833.062	
	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD					27.315.121.571	27.754.139.085	27.754.139.085	-439.017.514		27.407.833.062	
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen	27.315.121.571	27.754.139.085	27.754.139.085	-439.017.514	2 Dokumen	27.407.833.062	
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	27.315.121.571	27.754.139.085	27.754.139.085	-439.017.514	4 Dokumen	27.407.833.062	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD					546.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	-579.000.000		580.161.049	
	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen	546.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	-579.000.000	2 Dokumen	580.161.049	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD					26.769.121.571	26.629.139.085	26.629.139.085	139.982.486		26.827.672.013	
	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	26.769.121.571	26.629.139.085	26.629.139.085	139.982.486	4 Dokumen	26.827.672.013	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					30.361.679.497	48.243.344.696	48.243.344.696	-17.881.665.199		30.362.438.841	
	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					30.361.679.497	48.243.344.696	48.243.344.696	-17.881.665.199		30.362.438.841	
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	30.361.679.497	48.243.344.696	48.243.344.696	-17.881.665.199	150 Dokumen	30.362.438.841	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses					30.361.679.497	48.243.344.696	48.243.344.696	-17.881.665.199		30.362.438.841	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	30.361.679.497	48.243.344.696	48.243.344.696	-17.881.665.199	150 Dokumen	30.362.438.841	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD					3.354.969.054	4.955.648.791	4.955.648.791	-1.600.679.737		3.357.303.596	
	Terfasilitasinya Rapat terkait Tugas dan Fungsi DPRD					3.354.969.054	4.955.648.791	4.955.648.791	-1.600.679.737		3.357.303.596	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	3.354.969.054	4.955.648.791	4.955.648.791	-1.600.679.737	36 Dokumen	3.357.303.596	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					3.354.969.054	4.955.648.791	4.955.648.791	-1.600.679.737		3.357.303.596	
	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	3.354.969.054	4.955.648.791	4.955.648.791	-1.600.679.737	36 Dokumen	3.357.303.596	Sekretariat DPRD
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					39.877.510.565	39.453.325.259	39.596.406.780	281.103.785		40.204.287.837	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					39.877.510.565	39.877.510.565	39.596.406.780	281.103.785		40.204.287.837	
5,01	PERENCANAAN					39.877.510.565	39.453.325.259	39.596.406.780	281.103.785		40.204.287.837	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32.584.857.365	31.891.722.527	31.956.160.499	628.696.866		32.875.873.234	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,07 %	95,69%	95,69%	32.584.857.365	31.891.722.527	31.956.160.499	628.696.866	95,76 %	32.875.873.234	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					180.500.000	179.800.000	179.800.000	700.000		180.500.000	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					180.500.000	179.800.000	179.800.000	700.000		180.500.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	180.500.000	179.800.000	179.800.000	700.000	8 Dokumen	180.500.000	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					180.500.000	179.800.000	179.800.000	700.000		180.500.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	180.500.000	179.800.000	179.800.000	700.000	8 Dokumen	180.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					28.184.849.481	27.512.654.691	27.522.862.124	661.987.357		28.397.642.822	
	Meningkatnya ketepatan waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah					28.184.849.481	27.512.654.691	27.522.862.124	661.987.357		28.397.642.822	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	78 Orang/bulan	28.184.849.481	27.512.654.691	27.522.862.124	661.987.357	65 Orang/bulan	28.397.642.822	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					28.184.849.481	27.512.654.691	27.522.862.124	661.987.357		28.397.642.822	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	78 Orang/bulan	28.184.849.481	27.512.654.691	27.522.862.124	661.987.357	65 Orang/bulan	28.397.642.822	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.219.507.884	4.199.267.836	4.253.498.375	-33.990.491		4.297.730.412	
	Meningkatnya ketersediaan barang jasa dan pelayanan umum perkantoran					4.219.507.884	4.199.267.836	4.253.498.375	-33.990.491		4.297.730.412	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.219.507.884	4.199.267.836	4.253.498.375	-33.990.491	12 Laporan	4.297.730.412	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.219.507.884	4.199.267.836	4.253.498.375	-33.990.491	12 Laporan	4.297.730.412	
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					819.444.919	469.230.178	469.230.178	350.214.741		812.129.573	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	819.444.919	469.230.178	469.230.178	350.214.741	12 Laporan	812.129.573	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.400.062.965	3.730.037.658	3.784.268.197	-384.205.232		3.485.600.839	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.400.062.965	3.730.037.658	3.784.268.197	-384.205.232	12 Laporan	3.485.600.839	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.070.576.470	2.202.709.704	2.221.156.288	-150.579.818		2.070.576.470	
		Persentase hasil analisa data dan evaluasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan	100%	100%	100%	2.070.576.470	2.202.709.704	2.221.156.288	-150.579.818	100%	2.070.576.470	
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	100%	100%	2.070.576.470	2.202.709.704	2.221.156.288	-150.579.818	100%	2.070.576.470	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					1.000.777.115	1.066.850.452	1.076.134.944	-75.357.829		1.000.777.115	
	Terjaganya ketepatan penyusunan perencanaan pendanaan pembangunan daerah					1.000.777.115	1.066.850.452	1.076.134.944	-75.357.829		1.000.777.115	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.777.115	1.066.850.452	1.076.134.944	-75.357.829	2 Dokumen	1.000.777.115	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					1.000.777.115	1.066.850.452	1.076.134.944	-75.357.829		1.000.777.115	
	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.777.115	1.066.850.452	1.076.134.944	-75.357.829	2 Dokumen	1.000.777.115	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					1.069.799.355	1.135.859.252	1.145.021.344	-75.221.989		1.069.799.355	
	Terjaganya ketepatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah					1.069.799.355	1.135.859.252	1.145.021.344	-75.221.989		1.069.799.355	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1.069.799.355	1.135.859.252	1.145.021.344	-75.221.989	5 Laporan	1.069.799.355	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					1.069.799.355	1.135.859.252	1.145.021.344	-75.221.989		1.069.799.355	
	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1.069.799.355	1.135.859.252	1.145.021.344	-75.221.989	5 Laporan	1.069.799.355	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					5.222.076.730	5.358.893.028	5.419.089.993	-197.013.263		5.257.838.133	
		Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	98,83 %	98,63%	98,63%	5.222.076.730	5.358.893.028	5.419.089.993	-197.013.263	98,68 %	5.257.838.133	
		Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	98,83 %	98,63%	98,63%	5.222.076.730	5.358.893.028	5.419.089.993	-197.013.263	98,68 %	5.257.838.133	
		Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76% pada Bidang Perekonomian dan SDA	98,83 %	98,63%	98,63%	5.222.076.730	5.358.893.028	5.419.089.993	-197.013.263	98,68 %	5.257.838.133	
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	5.222.076.730	5.358.893.028	5.419.089.993	-197.013.263	100%	5.257.838.133	
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	5.222.076.730	5.358.893.028	5.419.089.993	-197.013.263	100%	5.257.838.133	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	100%	5.222.076.730	5.358.893.028	5.419.089.993	-197.013.263	100%	5.257.838.133	
		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	99%	90%	90%	5.222.076.730	5.358.893.028	5.419.089.993	-197.013.263	95%	5.257.838.133	
		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	99%	90%	90%	5.222.076.730	5.358.893.028	5.419.089.993	-197.013.263	95%	5.257.838.133	
		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada Bidang Perekonomian dan SDA	99%	90%	90%	5.222.076.730	5.358.893.028	5.419.089.993	-197.013.263	95%	5.257.838.133	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					1.964.318.286	2.004.718.286	2.033.630.928	-69.312.642		1.964.318.286	
	Terjaganya ketepatan perencanaan Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					1.964.318.286	2.004.718.286	2.033.630.928	-69.312.642		1.964.318.286	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.964.318.286	2.004.718.286	2.033.630.928	-69.312.642	2 Laporan	1.964.318.286	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.964.318.286	2.004.718.286	2.033.630.928	-69.312.642	2 Laporan	1.964.318.286	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					749.728.821	748.928.821	767.374.816	-17.645.995		749.728.821	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	749.728.821	748.928.821	767.374.816	-17.645.995	2 Laporan	749.728.821	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					1.214.589.465	1.255.789.465	1.266.256.112	-51.666.647		1.214.589.465	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.214.589.465	1.255.789.465	1.266.256.112	-51.666.647	2 Laporan	1.214.589.465	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					1.511.554.979	1.553.554.979	1.574.124.137	-62.569.158		1.525.193.214	
	Terjaganya ketepatan perencanaan Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					1.511.554.979	1.553.554.979	1.574.124.137	-62.569.158		1.525.193.214	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.511.554.979	1.553.554.979	1.574.124.137	-62.569.158	2 Laporan	1.525.193.214	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.511.554.979	1.553.554.979	1.574.124.137	-62.569.158	2 Laporan	1.525.193.214	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					785.808.308	761.734.971	768.399.424	17.408.884		786.446.543	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	785.808.308	761.734.971	768.399.424	17.408.884	2 Laporan	786.446.543	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					725.746.671	791.820.008	805.724.713	-79.978.042		738.746.671	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	725.746.671	791.820.008	805.724.713	-79.978.042	2 Laporan	738.746.671	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					1.746.203.465	1.800.619.763	1.811.334.928	-65.131.463		1.768.326.633	
	Terjaganya ketepatan perencanaan Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					1.746.203.465	1.800.619.763	1.811.334.928	-65.131.463		1.768.326.633	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.746.203.465	1.800.619.763	1.811.334.928	-65.131.463	2 Laporan	1.768.326.633	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.746.203.465	1.800.619.763	1.811.334.928	-65.131.463	2 Laporan	1.768.326.633	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					870.928.273	859.271.234	863.565.120	7.363.153		872.251.441	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	870.928.273	859.271.234	863.565.120	7.363.153	2 Laporan	872.251.441	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					875.275.192	941.348.529	947.769.808	-72.494.616		896.075.192	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	875.275.192	941.348.529	947.769.808	-72.494.616	2 Laporan	896.075.192	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Badan Pendapatan Daerah					72.113.015.749	82.064.758.941	84.092.382.317	-11.979.366.568		73.123.525.910	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					72.113.015.749	72.113.015.749	84.092.382.317	-11.979.366.568		73.123.525.910	
5,02	KEUANGAN					72.113.015.749	82.064.758.941	84.092.382.317	-11.979.366.568		73.123.525.910	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					54.001.835.907	54.788.151.132	56.254.808.454	-2.252.972.547		54.516.179.382	
		Persentase PD yang capaian retribusinya meningkat	85,71 %	71,43%	71,43%	54.001.835.907	54.788.151.132	56.254.808.454	-2.252.972.547	78,57 %	54.516.179.382	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,22 %	96%	96%	54.001.835.907	54.788.151.132	56.254.808.454	-2.252.972.547	96,01 %	54.516.179.382	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					180.500.000	222.532.000	222.532.000	-42.032.000		180.500.000	
	Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah					180.500.000	222.532.000	222.532.000	-42.032.000		180.500.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	180.500.000	222.532.000	222.532.000	-42.032.000	8 Dokumen	180.500.000	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					180.500.000	222.532.000	222.532.000	-42.032.000		180.500.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	180.500.000	222.532.000	222.532.000	-42.032.000	8 Dokumen	180.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					45.488.214.040	45.699.965.058	47.017.298.075	-1.529.084.035		45.833.104.179	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					45.488.214.040	45.699.965.058	47.017.298.075	-1.529.084.035		45.833.104.179	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang/bulan	128 Orang/bulan	127 Orang/bulan	45.488.214.040	45.699.965.058	47.017.298.075	-1.529.084.035	128 Orang/bulan	45.833.104.179	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					45.488.214.040	45.699.965.058	47.017.298.075	-1.529.084.035		45.833.104.179	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang/bulan	128 Orang/bulan	127 Orang/bulan	45.488.214.040	45.699.965.058	47.017.298.075	-1.529.084.035	128 Orang/bulan	45.833.104.179	Badan Pendapatan Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					239.139.573	257.992.210	258.402.720	-19.263.147		239.724.885	
	Terlaksananya implementasi rekomendasi strategis kebijakan retribusi daerah					239.139.573	257.992.210	258.402.720	-19.263.147		239.724.885	
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	239.139.573	257.992.210	258.402.720	-19.263.147	2 Dokumen	239.724.885	
5.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah					239.139.573	257.992.210	258.402.720	-19.263.147		239.724.885	
	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	239.139.573	257.992.210	258.402.720	-19.263.147	2 Dokumen	239.724.885	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.093.982.294	8.607.661.864	8.756.575.659	-662.593.365		8.262.850.318	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran serta meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					8.093.982.294	8.607.661.864	8.756.575.659	-662.593.365		8.262.850.318	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.093.982.294	8.607.661.864	8.756.575.659	-662.593.365	12 Laporan	8.262.850.318	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.093.982.294	8.607.661.864	8.756.575.659	-662.593.365	12 Laporan	8.262.850.318	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.384.501.662	2.711.655.582	2.711.660.386	-327.158.724		2.368.644.785	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.384.501.662	2.711.655.582	2.711.660.386	-327.158.724	12 Laporan	2.368.644.785	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					5.709.480.632	5.896.006.282	6.044.915.273	-335.434.641		5.894.205.533	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.709.480.632	5.896.006.282	6.044.915.273	-335.434.641	12 Laporan	5.894.205.533	Badan Pendapatan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					384.452.902	428.687.600	423.209.548	-38.756.646		385.038.325	
		Persentase kesesuaian penyaluran dana transfer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	100%	100%	384.452.902	428.687.600	423.209.548	-38.756.646	100%	385.038.325	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					384.452.902	428.687.600	423.209.548	-38.756.646		385.038.325	
	Terjaganya kesesuaian pelaporan penyaluran pendapatan transfer					384.452.902	428.687.600	423.209.548	-38.756.646		385.038.325	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	384.452.902	428.687.600	423.209.548	-38.756.646	4 Dokumen	385.038.325	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					384.452.902	428.687.600	423.209.548	-38.756.646		385.038.325	
	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	384.452.902	428.687.600	423.209.548	-38.756.646	4 Dokumen	385.038.325	Badan Pendapatan Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					17.726.726.940	26.847.920.209	27.414.364.315	-9.687.637.375		18.222.308.203	
		Persentase Capaian Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame, PPJ, Air Tanah	98,81 %	98,77%	98,77%	17.726.726.940	26.847.920.209	27.414.364.315	-9.687.637.375	98,78 %	18.222.308.203	
		Persentase Capaian PBB, BPHTB	88,53 %	88,49%	88,49%	17.726.726.940	26.847.920.209	27.414.364.315	-9.687.637.375	88,5 %	18.222.308.203	
		Persentase capaian retribusi daerah	84,60 %	84,56%	84,56%	17.726.726.940	26.847.920.209	27.414.364.315	-9.687.637.375	84,57 %	18.222.308.203	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125		54.666.924.609	
	Terlaksananya Pembayaran Piutang PBB dan BPHTB					53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125		54.666.924.609	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	12 Dokumen	54.666.924.609	
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	12 Dokumen	54.666.924.609	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	4 Laporan	54.666.924.609	
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	12 Laporan	54.666.924.609	
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	21221 Obyek Pajak	20615 Obyek Pajak	20615 Obyek Pajak	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	20703 Obyek Pajak	54.666.924.609	
	Terlaksananya Kepatuhan Wajib Pajak					53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125		54.666.924.609	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	12 Dokumen	54.666.924.609	
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	12 Dokumen	54.666.924.609	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	4 Laporan	54.666.924.609	
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	12 Laporan	54.666.924.609	
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	21221 Obyek Pajak	20615 Obyek Pajak	20615 Obyek Pajak	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	20703 Obyek Pajak	54.666.924.609	
	Terlaksananya sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir					53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125		54.666.924.609	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	12 Dokumen	54.666.924.609	
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	12 Dokumen	54.666.924.609	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	4 Laporan	54.666.924.609	
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	12 Laporan	54.666.924.609	
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	21221 Obyek Pajak	20615 Obyek Pajak	20615 Obyek Pajak	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	20703 Obyek Pajak	54.666.924.609	
	Terlaksananya Kegiatan Monev Pendapatan Bukan Pajak					53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125		54.666.924.609	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	12 Dokumen	54.666.924.609	
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	12 Dokumen	54.666.924.609	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	4 Laporan	54.666.924.609	
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	12 Laporan	54.666.924.609	
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	21221 Obyek Pajak	20615 Obyek Pajak	20615 Obyek Pajak	53.180.180.820	80.543.760.627	82.243.092.945	-29.062.912.125	20703 Obyek Pajak	54.666.924.609	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					6.526.269.361	11.061.189.450	11.271.603.055	-4.745.333.694		6.533.152.676	
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.526.269.361	11.061.189.450	11.271.603.055	-4.745.333.694	12 Laporan	6.533.152.676	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					4.709.533.010	5.487.272.248	5.685.374.593	-975.841.583		4.734.501.503	
	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	21221 Obyek Pajak	20615 Obyek Pajak	20615 Obyek Pajak	4.709.533.010	5.487.272.248	5.685.374.593	-975.841.583	20703 Obyek Pajak	4.734.501.503	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah					3.221.236.257	3.552.594.739	3.674.801.171	-453.564.914		3.294.690.291	
	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.221.236.257	3.552.594.739	3.674.801.171	-453.564.914	12 Dokumen	3.294.690.291	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					2.966.941.117	3.066.069.291	3.115.284.540	-148.343.423		3.357.202.863	
	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.966.941.117	3.066.069.291	3.115.284.540	-148.343.423	12 Dokumen	3.357.202.863	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					302.747.195	3.680.794.481	3.667.300.956	-3.364.553.761		302.760.870	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	302.747.195	3.680.794.481	3.667.300.956	-3.364.553.761	4 Laporan	302.760.870	Badan Pendapatan Daerah
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					168.401.580.790	282.201.833.977	189.176.961.696	-20.775.380.906		290.577.864.671	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					168.401.580.790	168.401.580.790	189.176.961.696	-20.775.380.906		290.577.864.671	
5,02	KEUANGAN					168.401.580.790	282.201.833.977	189.176.961.696	-20.775.380.906		290.577.864.671	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					41.440.802.654	55.793.168.120	40.497.410.587	943.392.067		41.473.892.913	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,23 %	94,63%	94,63%	41.440.802.654	55.793.168.120	40.497.410.587	943.392.067	95,03 %	41.473.892.913	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.128.000	15.131.200	6.500.000	8.628.000		15.128.000	
	Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					15.128.000	15.131.200	6.500.000	8.628.000		15.128.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	15.128.000	15.131.200	6.500.000	8.628.000	8 Dokumen	15.128.000	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					15.128.000	15.131.200	6.500.000	8.628.000		15.128.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	15.128.000	15.131.200	6.500.000	8.628.000	8 Dokumen	15.128.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					38.137.453.330	52.025.953.333	36.727.085.529	1.410.367.801		38.423.880.055	
	Meningkatnya ketepatan pelayanan gaji dan tunjangan ASN					38.137.453.330	52.025.953.333	36.727.085.529	1.410.367.801		38.423.880.055	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan	87 Orang/bulan	93 Orang/bulan	38.137.453.330	52.025.953.333	36.727.085.529	1.410.367.801	87 Orang/bulan	38.423.880.055	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					38.137.453.330	52.025.953.333	36.727.085.529	1.410.367.801		38.423.880.055	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan	87 Orang/bulan	93 Orang/bulan	38.137.453.330	52.025.953.333	36.727.085.529	1.410.367.801	87 Orang/bulan	38.423.880.055	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.288.221.324	3.752.083.587	3.763.825.058	-475.603.734		3.034.884.858	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					3.288.221.324	3.752.083.587	3.763.825.058	-475.603.734		3.034.884.858	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.288.221.324	3.752.083.587	3.763.825.058	-475.603.734	12 Laporan	3.034.884.858	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.288.221.324	3.752.083.587	3.763.825.058	-475.603.734	12 Laporan	3.034.884.858	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					3.288.221.324	3.752.083.587	3.763.825.058	-475.603.734		3.034.884.858	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.288.221.324	3.752.083.587	3.763.825.058	-475.603.734	12 Laporan	3.034.884.858	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.288.221.324	3.752.083.587	3.763.825.058	-475.603.734	12 Laporan	3.034.884.858	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					496.755.194	496.712.900	554.434.834	-57.679.640		496.705.494	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	496.755.194	496.712.900	554.434.834	-57.679.640	12 Laporan	496.705.494	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.791.466.130	3.255.370.687	3.209.390.224	-417.924.094		2.538.179.364	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.791.466.130	3.255.370.687	3.209.390.224	-417.924.094	12 Laporan	2.538.179.364	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					100.343.282.400	194.530.103.801	116.233.096.230	-15.889.813.830		216.629.640.640	
		Persentase Kesesuaian Alokasi Mandatory Spending	100%	100%	100%	100.343.282.400	194.530.103.801	116.233.096.230	-15.889.813.830	100%	216.629.640.640	
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100.343.282.400	194.530.103.801	116.233.096.230	-15.889.813.830	100%	216.629.640.640	
		Persentase Penurunan SILPA	4,00 %	6,68%	6,68%	100.343.282.400	194.530.103.801	116.233.096.230	-15.889.813.830	4,08 %	216.629.640.640	
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	70%	70%	70%	100.343.282.400	194.530.103.801	116.233.096.230	-15.889.813.830	70%	216.629.640.640	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					3.483.618.438	3.847.573.382	3.823.715.446	-340.097.008		3.545.818.158	
	Terjaminnya kualitas penyusunan penganggaran					3.483.618.438	3.847.573.382	3.823.715.446	-340.097.008		3.545.818.158	
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.483.618.438	3.847.573.382	3.823.715.446	-340.097.008	2 Dokumen	3.545.818.158	
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.483.618.438	3.847.573.382	3.823.715.446	-340.097.008	2 Dokumen	3.545.818.158	
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.483.618.438	3.847.573.382	3.823.715.446	-340.097.008	2 Dokumen	3.545.818.158	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.483.618.438	3.847.573.382	3.823.715.446	-340.097.008	2 Dokumen	3.545.818.158	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					1.134.049.400	1.160.078.560	1.160.078.560	-26.029.160		1.134.049.400	
	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.134.049.400	1.160.078.560	1.160.078.560	-26.029.160	2 Dokumen	1.134.049.400	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					283.261.535	351.251.300	351.251.300	-67.989.765		283.261.535	
	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	283.261.535	351.251.300	351.251.300	-67.989.765	2 Dokumen	283.261.535	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					682.313.851	852.019.107	830.518.850	-148.204.999		682.887.091	
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	682.313.851	852.019.107	830.518.850	-148.204.999	2 Dokumen	682.887.091	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					1.383.993.652	1.484.224.415	1.481.866.736	-97.873.084		1.445.620.132	
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.383.993.652	1.484.224.415	1.481.866.736	-97.873.084	2 Dokumen	1.445.620.132	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					48.041.917.394	127.162.668.112	81.791.760.194	-33.749.842.800		172.072.335.144	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas Daerah					48.041.917.394	127.162.668.112	81.791.760.194	-33.749.842.800		172.072.335.144	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen	244 Dokumen	244 Dokumen	48.041.917.394	127.162.668.112	81.791.760.194	-33.749.842.800	244 Dokumen	172.072.335.144	
		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	48.041.917.394	127.162.668.112	81.791.760.194	-33.749.842.800	1 Dokumen	172.072.335.144	
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	104440 Dokumen	100440 Dokumen	100440 Dokumen	48.041.917.394	127.162.668.112	81.791.760.194	-33.749.842.800	101440 Dokumen	172.072.335.144	
	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang ditindaklanjuti					48.041.917.394	127.162.668.112	81.791.760.194	-33.749.842.800		172.072.335.144	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen	244 Dokumen	244 Dokumen	48.041.917.394	127.162.668.112	81.791.760.194	-33.749.842.800	244 Dokumen	172.072.335.144	
		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	48.041.917.394	127.162.668.112	81.791.760.194	-33.749.842.800	1 Dokumen	172.072.335.144	
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	104440 Dokumen	100440 Dokumen	100440 Dokumen	48.041.917.394	127.162.668.112	81.791.760.194	-33.749.842.800	101440 Dokumen	172.072.335.144	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					644.984.121	658.499.087	680.893.124	-35.909.003		641.056.486	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen	244 Dokumen	244 Dokumen	644.984.121	658.499.087	680.893.124	-35.909.003	244 Dokumen	641.056.486	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah					46.445.117.720	125.506.599.742	80.087.972.321	-33.642.854.601		170.483.178.492	
	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	46.445.117.720	125.506.599.742	80.087.972.321	-33.642.854.601	1 Dokumen	170.483.178.492	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					951.815.553	997.569.283	1.022.894.749	-71.079.196		948.100.166	
	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	104440 Dokumen	100440 Dokumen	100440 Dokumen	951.815.553	997.569.283	1.022.894.749	-71.079.196	101440 Dokumen	948.100.166	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					1.317.746.568	1.364.862.307	1.384.165.060	-66.418.492		1.511.487.338	
	Terjaminnya kualitas pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD					1.317.746.568	1.364.862.307	1.384.165.060	-66.418.492		1.511.487.338	
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	1.317.746.568	1.364.862.307	1.384.165.060	-66.418.492	24 Dokumen	1.511.487.338	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					1.317.746.568	1.364.862.307	1.384.165.060	-66.418.492		1.511.487.338	
	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	1.317.746.568	1.364.862.307	1.384.165.060	-66.418.492	24 Dokumen	1.511.487.338	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					47.500.000.000	62.155.000.000	29.233.455.530	18.266.544.470		39.500.000.000	
	Terjaminnya ketepatan penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana sesuai ketentuan yang berlaku					47.500.000.000	62.155.000.000	29.233.455.530	18.266.544.470		39.500.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	47.500.000.000	62.155.000.000	29.233.455.530	18.266.544.470	1 Laporan	39.500.000.000	
	Terjaminnya ketepatan realisasi dana darurat dan mendesak sesuai ketentuan yang berlaku					47.500.000.000	62.155.000.000	29.233.455.530	18.266.544.470		39.500.000.000	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	47.500.000.000	62.155.000.000	29.233.455.530	18.266.544.470	1 Laporan	39.500.000.000	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					47.000.000.000	62.155.000.000	29.233.455.530	17.766.544.470		39.000.000.000	
	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	47.000.000.000	62.155.000.000	29.233.455.530	17.766.544.470	1 Laporan	39.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					26.617.495.736	31.878.562.056	32.446.454.879	-5.828.959.143		32.474.331.118	
		Persentase Aset Produktif	6,80%	6%	6%	26.617.495.736	31.878.562.056	32.446.454.879	-5.828.959.143	6,20%	32.474.331.118	
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	2,94%	2,56%	2,56%	26.617.495.736	31.878.562.056	32.446.454.879	-5.828.959.143	2,65%	32.474.331.118	
		Persentase register tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	17,87 %	16,01%	16,01%	26.617.495.736	31.878.562.056	32.446.454.879	-5.828.959.143	16,53 %	32.474.331.118	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah					53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286		64.948.662.236	
	Meningkatnya Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan					53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286		64.948.662.236	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen	7679 Dokumen	7679 Dokumen	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	7679 Dokumen	64.948.662.236	
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	4 Laporan	64.948.662.236	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	30 Laporan	64.948.662.236	
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	20 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	18 Laporan	64.948.662.236	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	61 Orang	61 Orang	62 Orang	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	61 Orang	64.948.662.236	
	Meningkatnya Pemanfaatan Barang Milik Daerah					53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286		64.948.662.236	
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen	7679 Dokumen	7679 Dokumen	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	7679 Dokumen	64.948.662.236	
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	4 Laporan	64.948.662.236	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	30 Laporan	64.948.662.236	
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	20 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	18 Laporan	64.948.662.236	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	61 Orang	61 Orang	62 Orang	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	61 Orang	64.948.662.236	
	Terlaksananya Pendataan, Pelaporan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah					53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286		64.948.662.236	
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen	7679 Dokumen	7679 Dokumen	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	7679 Dokumen	64.948.662.236	
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	4 Laporan	64.948.662.236	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	30 Laporan	64.948.662.236	
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	20 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	18 Laporan	64.948.662.236	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	61 Orang	61 Orang	62 Orang	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	61 Orang	64.948.662.236	
	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah					53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286		64.948.662.236	
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen	7679 Dokumen	7679 Dokumen	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	7679 Dokumen	64.948.662.236	
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	4 Laporan	64.948.662.236	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	30 Laporan	64.948.662.236	
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	20 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	18 Laporan	64.948.662.236	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	61 Orang	61 Orang	62 Orang	53.234.991.472	63.757.124.112	64.892.909.758	-11.657.918.286	61 Orang	64.948.662.236	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah					5.888.063.083	5.966.062.813	6.053.760.126	-165.697.043		6.296.415.879	
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.888.063.083	5.966.062.813	6.053.760.126	-165.697.043	4 Laporan	6.296.415.879	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah					713.280.280	751.850.175	751.850.175	-38.569.895		713.280.280	
	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	20 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	713.280.280	751.850.175	751.850.175	-38.569.895	18 Laporan	713.280.280	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.634.006.520	2.243.390.520	2.211.147.557	-577.141.037		1.637.393.352	
	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	1.634.006.520	2.243.390.520	2.211.147.557	-577.141.037	30 Laporan	1.637.393.352	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					16.909.847.352	17.585.039.726	18.110.958.288	-1.201.110.936		18.505.309.074	
	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen	7679 Dokumen	7679 Dokumen	16.909.847.352	17.585.039.726	18.110.958.288	-1.201.110.936	7679 Dokumen	18.505.309.074	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					1.472.298.501	5.332.218.822	5.318.738.733	-3.846.440.232		5.321.932.533	
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	61 Orang	61 Orang	62 Orang	1.472.298.501	5.332.218.822	5.318.738.733	-3.846.440.232	61 Orang	5.321.932.533	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					30.006.931.053	31.277.365.588	32.828.768.998	-2.821.837.945		30.491.209.686	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					30.006.931.053	30.006.931.053	32.828.768.998	-2.821.837.945		30.491.209.686	
5,03	KEPEGAWAIAN					25.465.663.302	25.940.166.023	27.549.969.433	-2.084.306.131		25.929.706.005	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.037.191.137	20.514.429.252	22.068.790.533	-2.031.599.396		20.166.170.297	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,18%	94,18%	94,18%	20.037.191.137	20.514.429.252	22.068.790.533	-2.031.599.396	94,18%	20.166.170.297	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					87.659.614	136.025.000	86.000.000	1.659.614		87.782.656	
	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah					87.659.614	136.025.000	86.000.000	1.659.614		87.782.656	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	87.659.614	136.025.000	86.000.000	1.659.614	8 Dokumen	87.782.656	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					87.659.614	136.025.000	86.000.000	1.659.614		87.782.656	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	87.659.614	136.025.000	86.000.000	1.659.614	8 Dokumen	87.782.656	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.677.442.199	18.677.442.199	20.239.265.473	-1.561.823.274		18.819.071.250	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					18.677.442.199	18.677.442.199	20.239.265.473	-1.561.823.274		18.819.071.250	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	18.677.442.199	18.677.442.199	20.239.265.473	-1.561.823.274	43 Orang/bulan	18.819.071.250	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					18.677.442.199	18.677.442.199	20.239.265.473	-1.561.823.274		18.819.071.250	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	18.677.442.199	18.677.442.199	20.239.265.473	-1.561.823.274	43 Orang/bulan	18.819.071.250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					706.393.192	358.685.978	377.972.014	328.421.178		688.644.106	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					706.393.192	358.685.978	377.972.014	328.421.178		688.644.106	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5 Paket	5 Paket	706.393.192	358.685.978	377.972.014	328.421.178	15 Paket	688.644.106	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					706.393.192	358.685.978	377.972.014	328.421.178		688.644.106	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	5 Paket	5 Paket	706.393.192	358.685.978	377.972.014	328.421.178	15 Paket	688.644.106	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					565.696.132	1.342.276.075	1.365.553.046	-799.856.914		570.672.285	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					565.696.132	1.342.276.075	1.365.553.046	-799.856.914		570.672.285	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	565.696.132	1.342.276.075	1.365.553.046	-799.856.914	4 Laporan	570.672.285	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					565.696.132	1.342.276.075	1.365.553.046	-799.856.914		570.672.285	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	565.696.132	1.342.276.075	1.365.553.046	-799.856.914	4 Laporan	570.672.285	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					5.428.472.165	5.425.736.771	5.481.178.900	-52.706.735		5.763.535.708	
		Persentase ASN yang berkinerja minimal baik	97%	96%	96%	5.428.472.165	5.425.736.771	5.481.178.900	-52.706.735	96%	5.763.535.708	
		Persentase ASN yang disiplin	97%	97%	97%	5.428.472.165	5.425.736.771	5.481.178.900	-52.706.735	97%	5.763.535.708	
		Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	5.428.472.165	5.425.736.771	5.481.178.900	-52.706.735	100%	5.763.535.708	
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	5.428.472.165	5.425.736.771	5.481.178.900	-52.706.735	100%	5.763.535.708	
		Persentase PNS yang telah mengikuti asesmen	32%	28%	28%	5.428.472.165	5.425.736.771	5.481.178.900	-52.706.735	29%	5.763.535.708	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					1.304.321.999	1.290.821.999	1.308.251.839	-3.929.840		1.298.296.427	
	Meningkatnya pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					1.304.321.999	1.290.821.999	1.308.251.839	-3.929.840		1.298.296.427	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.304.321.999	1.290.821.999	1.308.251.839	-3.929.840	1 Dokumen	1.298.296.427	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.304.321.999	1.290.821.999	1.308.251.839	-3.929.840	1 Dokumen	1.298.296.427	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.304.321.999	1.290.821.999	1.308.251.839	-3.929.840	1 Dokumen	1.298.296.427	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					264.836.150	255.836.150	232.400.000	32.436.150		260.336.150	
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	264.836.150	255.836.150	232.400.000	32.436.150	1 Dokumen	260.336.150	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					806.785.849	806.785.849	847.651.839	-40.865.990		800.660.277	
	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	806.785.849	806.785.849	847.651.839	-40.865.990	1 Dokumen	800.660.277	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian					232.700.000	228.200.000	228.200.000	4.500.000		237.300.000	
	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	232.700.000	228.200.000	228.200.000	4.500.000	1 Dokumen	237.300.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN					1.393.779.388	1.404.538.668	1.420.622.187	-26.842.799		1.560.635.676	
	Meningkatnya pelayanan mutasi dan promosi ASN					1.393.779.388	1.404.538.668	1.420.622.187	-26.842.799		1.560.635.676	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.393.779.388	1.404.538.668	1.420.622.187	-26.842.799	1 Dokumen	1.560.635.676	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.393.779.388	1.404.538.668	1.420.622.187	-26.842.799	1 Dokumen	1.560.635.676	
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	430 Dokumen	1132 Dokumen	1820 Dokumen	1.393.779.388	1.404.538.668	1.420.622.187	-26.842.799	910 Dokumen	1.560.635.676	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN					488.662.700	484.162.700	484.074.687	4.588.013		525.062.700	
	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	488.662.700	484.162.700	484.074.687	4.588.013	1 Dokumen	525.062.700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					364.016.688	359.075.968	320.247.500	43.769.188		429.472.976	
	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	430 Dokumen	1132 Dokumen	1820 Dokumen	364.016.688	359.075.968	320.247.500	43.769.188	910 Dokumen	429.472.976	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN					541.100.000	561.300.000	616.300.000	-75.200.000		606.100.000	
	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	541.100.000	561.300.000	616.300.000	-75.200.000	1 Dokumen	606.100.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					2.730.370.778	2.730.376.104	2.752.304.874	-21.934.096		2.904.603.605	
	Meningkatnya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					2.730.370.778	2.730.376.104	2.752.304.874	-21.934.096		2.904.603.605	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.730.370.778	2.730.376.104	2.752.304.874	-21.934.096	1 Laporan	2.904.603.605	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6257 Dokumen	7169 Dokumen	7169 Dokumen	2.730.370.778	2.730.376.104	2.752.304.874	-21.934.096	6903 Dokumen	2.904.603.605	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2.730.370.778	2.730.376.104	2.752.304.874	-21.934.096	5 Laporan	2.904.603.605	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					710.406.765	710.411.438	732.340.208	-21.933.443		786.344.718	
	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6257 Dokumen	7169 Dokumen	7169 Dokumen	710.406.765	710.411.438	732.340.208	-21.933.443	6903 Dokumen	786.344.718	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1.232.500.000	1.232.500.000	1.232.500.000	0		1.232.500.000	
	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.232.500.000	1.232.500.000	1.232.500.000	0	1 Laporan	1.232.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					787.464.013	787.464.666	787.464.666	-653		885.758.887	
	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	787.464.013	787.464.666	787.464.666	-653	5 Laporan	885.758.887	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					4.541.267.751	5.337.199.565	5.278.799.565	-737.531.814		4.561.503.681	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					4.541.267.751	5.337.199.565	5.278.799.565	-737.531.814		4.561.503.681	
		Persentase ASN yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	97%	97%	97%	4.541.267.751	5.337.199.565	5.278.799.565	-737.531.814	97%	4.561.503.681	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis					1.916.468.574	1.950.996.980	1.950.996.980	-34.528.406		1.921.384.953	
	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Teknis					1.916.468.574	1.950.996.980	1.950.996.980	-34.528.406		1.921.384.953	
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2482 Orang	2282 Orang	2282 Orang	1.916.468.574	1.950.996.980	1.950.996.980	-34.528.406	2332 Orang	1.921.384.953	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					1.916.468.574	1.950.996.980	1.950.996.980	-34.528.406		1.921.384.953	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2482 Orang	2282 Orang	2282 Orang	1.916.468.574	1.950.996.980	1.950.996.980	-34.528.406	2332 Orang	1.921.384.953	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					2.624.799.177	3.386.202.585	3.327.802.585	-703.003.408		2.640.118.728	
	Meningkatnya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					2.624.799.177	3.386.202.585	3.327.802.585	-703.003.408		2.640.118.728	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.624.799.177	3.386.202.585	3.327.802.585	-703.003.408	4 Laporan	2.640.118.728	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					2.624.799.177	3.386.202.585	3.327.802.585	-703.003.408		2.640.118.728	
	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.624.799.177	3.386.202.585	3.327.802.585	-703.003.408	4 Laporan	2.640.118.728	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Badan Riset dan Inovasi Daerah					23.756.218.770	38.717.715.001	15.984.118.788	7.772.099.982		22.900.495.835	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					23.756.218.770	23.756.218.770	15.984.118.788	7.772.099.982		22.900.495.835	
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					23.756.218.770	38.717.715.001	15.984.118.788	7.772.099.982		22.900.495.835	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.301.489.970	34.260.064.371	11.526.468.158	7.775.021.812		18.392.987.036	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,07 %	95,69%	95,69%	19.301.489.970	34.260.064.371	11.526.468.158	7.775.021.812	95,76 %	18.392.987.036	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					180.500.000	87.000.000	87.000.000	93.500.000		180.500.000	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					180.500.000	87.000.000	87.000.000	93.500.000		180.500.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	180.500.000	87.000.000	87.000.000	93.500.000	8 Dokumen	180.500.000	
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					180.500.000	87.000.000	87.000.000	93.500.000		180.500.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	180.500.000	87.000.000	87.000.000	93.500.000	8 Dokumen	180.500.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.242.544.225	32.406.872.421	9.716.314.538	6.526.229.687		16.311.402.681	
	Meningkatnya ketepatan waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN Perangkat Daerah					16.242.544.225	32.406.872.421	9.716.314.538	6.526.229.687		16.311.402.681	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	52 Orang/bulan	18 Orang/bulan	16.242.544.225	32.406.872.421	9.716.314.538	6.526.229.687	58 Orang/bulan	16.311.402.681	
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					16.242.544.225	32.406.872.421	9.716.314.538	6.526.229.687		16.311.402.681	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	52 Orang/bulan	18 Orang/bulan	16.242.544.225	32.406.872.421	9.716.314.538	6.526.229.687	58 Orang/bulan	16.311.402.681	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.878.445.745	1.766.191.950	1.723.153.620	1.155.292.125		1.901.084.355	
	Meningkatnya ketersediaan barang jasa dan pelayanan umum perkantoran					2.878.445.745	1.766.191.950	1.723.153.620	1.155.292.125		1.901.084.355	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.878.445.745	1.766.191.950	1.723.153.620	1.155.292.125	12 Laporan	1.901.084.355	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.878.445.745	1.766.191.950	1.723.153.620	1.155.292.125	12 Laporan	1.901.084.355	
5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.389.763.131	774.670.996	774.670.996	615.092.135		337.967.607	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.389.763.131	774.670.996	774.670.996	615.092.135	12 Laporan	337.967.607	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.488.682.614	991.520.954	948.482.624	540.199.990		1.563.116.748	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.488.682.614	991.520.954	948.482.624	540.199.990	12 Laporan	1.563.116.748	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					4.454.728.800	4.457.650.630	4.457.650.630	-2.921.830		4.507.508.799	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100%	100%	100%	4.454.728.800	4.457.650.630	4.457.650.630	-2.921.830	100%	4.507.508.799	
		Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan/atau Badan Usaha di Daerah	100%	100%	100%	4.454.728.800	4.457.650.630	4.457.650.630	-2.921.830	100%	4.507.508.799	
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					3.360.100.000	3.578.500.000	3.578.500.000	-218.400.000		3.010.400.000	
	Terlaksananya pemantauan penyelenggaraan riset					3.360.100.000	3.578.500.000	3.578.500.000	-218.400.000		3.010.400.000	
		Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.360.100.000	3.578.500.000	3.578.500.000	-218.400.000	2 Dokumen	3.010.400.000	
		Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pelatihan	1 Pelatihan	1 Pelatihan	3.360.100.000	3.578.500.000	3.578.500.000	-218.400.000	1 Pelatihan	3.010.400.000	
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	16 Laporan	22 Laporan	16 Laporan	3.360.100.000	3.578.500.000	3.578.500.000	-218.400.000	23 Laporan	3.010.400.000	
		Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.360.100.000	3.578.500.000	3.578.500.000	-218.400.000	2 Laporan	3.010.400.000	
		Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	4 Naskah	1 Naskah	4 Naskah	3.360.100.000	3.578.500.000	3.578.500.000	-218.400.000	2 Naskah	3.010.400.000	
		Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.360.100.000	3.578.500.000	3.578.500.000	-218.400.000	2 Laporan	3.010.400.000	
	Terlaksananya penyusunan riset berbasis bukti					3.360.100.000	3.578.500.000	3.578.500.000	-218.400.000		3.010.400.000	
		Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.360.100.000	3.578.500.000	3.578.500.000	-218.400.000	2 Dokumen	3.010.400.000	
		Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pelatihan	1 Pelatihan	1 Pelatihan	3.360.100.000	3.578.500.000	3.578.500.000	-218.400.000	1 Pelatihan	3.010.400.000	
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	16 Laporan	22 Laporan	16 Laporan	3.360.100.000	3.578.500.000	3.578.500.000	-218.400.000	23 Laporan	3.010.400.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.360.100.000	3.578.500.000	3.578.500.000	-218.400.000	2 Laporan	3.010.400.000	
		Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	4 Naskah	1 Naskah	4 Naskah	3.360.100.000	3.578.500.000	3.578.500.000	-218.400.000	2 Naskah	3.010.400.000	
		Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.360.100.000	3.578.500.000	3.578.500.000	-218.400.000	2 Laporan	3.010.400.000	
5.05.03.2.01.0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					65.000.000	161.600.000	161.600.000	-96.600.000		65.000.000	
	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	65.000.000	161.600.000	161.600.000	-96.600.000	2 Laporan	65.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset					180.500.000	178.100.000	178.100.000	2.400.000		180.500.000	
	Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	4 Naskah	1 Naskah	4 Naskah	180.500.000	178.100.000	178.100.000	2.400.000	2 Naskah	180.500.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					2.650.700.000	2.714.100.000	2.714.100.000	-63.400.000		2.250.300.000	
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	16 Laporan	22 Laporan	16 Laporan	2.650.700.000	2.714.100.000	2.714.100.000	-63.400.000	23 Laporan	2.250.300.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					198.900.000	232.500.000	232.500.000	-33.600.000		249.600.000	
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	198.900.000	232.500.000	232.500.000	-33.600.000	2 Laporan	249.600.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.01.0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					176.600.000	172.200.000	172.200.000	4.400.000		176.600.000	
	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pelatihan	1 Pelatihan	1 Pelatihan	176.600.000	172.200.000	172.200.000	4.400.000	1 Pelatihan	176.600.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah					88.400.000	120.000.000	120.000.000	-31.600.000		88.400.000	
	Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	88.400.000	120.000.000	120.000.000	-31.600.000	2 Dokumen	88.400.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi					1.094.628.800	879.150.630	879.150.630	215.478.170		1.497.108.799	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan inovasi					1.094.628.800	879.150.630	879.150.630	215.478.170		1.497.108.799	
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.094.628.800	879.150.630	879.150.630	215.478.170	1 Laporan	1.497.108.799	
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.094.628.800	879.150.630	879.150.630	215.478.170	1 Laporan	1.497.108.799	
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.094.628.800	879.150.630	879.150.630	215.478.170	1 Laporan	1.497.108.799	
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.094.628.800	879.150.630	879.150.630	215.478.170	1 Laporan	1.497.108.799	
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.094.628.800	879.150.630	879.150.630	215.478.170	1 Laporan	1.497.108.799	
		Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.094.628.800	879.150.630	879.150.630	215.478.170	1 Laporan	1.497.108.799	
		Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	1.094.628.800	879.150.630	879.150.630	215.478.170	2 Sistem Informasi	1.497.108.799	
	Terlaksananya difusi inovasi					1.094.628.800	879.150.630	879.150.630	215.478.170		1.497.108.799	
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.094.628.800	879.150.630	879.150.630	215.478.170	1 Laporan	1.497.108.799	
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.094.628.800	879.150.630	879.150.630	215.478.170	1 Laporan	1.497.108.799	
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.094.628.800	879.150.630	879.150.630	215.478.170	1 Laporan	1.497.108.799	
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.094.628.800	879.150.630	879.150.630	215.478.170	1 Laporan	1.497.108.799	
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.094.628.800	879.150.630	879.150.630	215.478.170	1 Laporan	1.497.108.799	
		Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.094.628.800	879.150.630	879.150.630	215.478.170	1 Laporan	1.497.108.799	
		Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	1.094.628.800	879.150.630	879.150.630	215.478.170	2 Sistem Informasi	1.497.108.799	
5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi					259.648.800	240.790.630	240.790.630	18.858.170		261.728.799	
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	259.648.800	240.790.630	240.790.630	18.858.170	1 Laporan	261.728.799	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual					67.200.000	41.200.000	41.200.000	26.000.000		71.100.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	67.200.000	41.200.000	41.200.000	26.000.000	1 Laporan	71.100.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.02.0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi					213.600.000	151.600.000	151.600.000	62.000.000		224.000.000	
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	213.600.000	151.600.000	151.600.000	62.000.000	1 Laporan	224.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.02.0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.					76.320.000	48.860.000	48.860.000	27.460.000		210.220.000	
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	76.320.000	48.860.000	48.860.000	27.460.000	1 Laporan	210.220.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi					282.560.000	207.400.000	207.400.000	75.160.000		361.860.000	
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	282.560.000	207.400.000	207.400.000	75.160.000	1 Laporan	361.860.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.02.0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah					123.800.000	99.800.000	99.800.000	24.000.000		223.900.000	
	Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	123.800.000	99.800.000	99.800.000	24.000.000	2 Sistem Informasi	223.900.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03.2.02.0016	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi					71.500.000	89.500.000	89.500.000	-18.000.000		144.300.000	
	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	71.500.000	89.500.000	89.500.000	-18.000.000	1 Laporan	144.300.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	UPTD Kebun Raya Mangrove					6.297.551.158	7.294.446.817	7.314.069.983	-1.016.518.825		6.477.170.005	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					6.297.551.158	6.297.551.158	7.314.069.983	-1.016.518.825		6.477.170.005	
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					6.297.551.158	7.294.446.817	7.314.069.983	-1.016.518.825		6.477.170.005	
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					6.297.551.158	7.294.446.817	7.314.069.983	-1.016.518.825		6.477.170.005	
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100%	100%	100%	6.297.551.158	7.294.446.817	7.314.069.983	-1.016.518.825	100%	6.477.170.005	
		Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan/atau Badan Usaha di Daerah	100%	100%	100%	6.297.551.158	7.294.446.817	7.314.069.983	-1.016.518.825	100%	6.477.170.005	
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi					6.297.551.158	7.294.446.817	7.314.069.983	-1.016.518.825		6.477.170.005	
	Terlaksananya edukasi dan diseminasi terkait Mangrove					6.297.551.158	7.294.446.817	7.314.069.983	-1.016.518.825		6.477.170.005	
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.297.551.158	7.294.446.817	7.314.069.983	-1.016.518.825	1 Laporan	6.477.170.005	
5.05.03.2.02.0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah					6.297.551.158	7.294.446.817	7.314.069.983	-1.016.518.825		6.477.170.005	
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.297.551.158	7.294.446.817	7.314.069.983	-1.016.518.825	1 Laporan	6.477.170.005	UPTD Kebun Raya Mangrove
	Inspektorat					31.791.011.099	32.366.084.948	34.410.430.347	-2.619.419.248		32.139.828.991	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					31.791.011.099	31.791.011.099	34.410.430.347	-2.619.419.248		32.139.828.991	

Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
6,01	INSPEKTORAT DAERAH					31.791.011.099	32.366.084.948	34.410.430.347	-2.619.419.248		32.139.828.991	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.496.103.557	28.427.319.948	30.803.250.347	-3.307.146.790		27.699.245.234	
		Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	96,00%	95,30%	95,30%	27.496.103.557	28.427.319.948	30.803.250.347	-3.307.146.790	95,45%	27.699.245.234	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.390.790	13.000.000	13.000.000	390.790		13.416.460	
	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah tepat waktu					13.390.790	13.000.000	13.000.000	390.790		13.416.460	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	13.390.790	13.000.000	13.000.000	390.790	8 Dokumen	13.416.460	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					13.390.790	13.000.000	13.000.000	390.790		13.416.460	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	13.390.790	13.000.000	13.000.000	390.790	8 Dokumen	13.416.460	Inspektorat
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					25.524.131.961	25.842.100.760	28.491.416.482	-2.967.284.521		25.716.277.875	
	Terlaksananya penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu					25.524.131.961	25.842.100.760	28.491.416.482	-2.967.284.521		25.716.277.875	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	25.524.131.961	25.842.100.760	28.491.416.482	-2.967.284.521	53 Orang/bulan	25.716.277.875	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					25.524.131.961	25.842.100.760	28.491.416.482	-2.967.284.521		25.716.277.875	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	25.524.131.961	25.842.100.760	28.491.416.482	-2.967.284.521	53 Orang/bulan	25.716.277.875	Inspektorat
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					592.090.363	462.028.100	298.763.750	293.326.613		592.217.653	
	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					592.090.363	462.028.100	298.763.750	293.326.613		592.217.653	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	592.090.363	462.028.100	298.763.750	293.326.613	2 Paket	592.217.653	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					592.090.363	462.028.100	298.763.750	293.326.613		592.217.653	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	592.090.363	462.028.100	298.763.750	293.326.613	2 Paket	592.217.653	Inspektorat
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.366.490.443	2.110.191.088	2.000.070.115	-633.579.672		1.377.333.246	
	Terlaksananya penyediaan barang dan jasa perkantoran					1.366.490.443	2.110.191.088	2.000.070.115	-633.579.672		1.377.333.246	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.366.490.443	2.110.191.088	2.000.070.115	-633.579.672	12 Laporan	1.377.333.246	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.366.490.443	2.110.191.088	2.000.070.115	-633.579.672		1.377.333.246	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.366.490.443	2.110.191.088	2.000.070.115	-633.579.672	12 Laporan	1.377.333.246	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.193.537.456	2.078.915.000	1.828.760.000	364.777.456		2.428.230.512	
		Persentase Pemenuhan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	100%	100%	100%	2.193.537.456	2.078.915.000	1.828.760.000	364.777.456	100%	2.428.230.512	
		Persentase pengawasan keuangan dan kinerja yang telah selesai	100%	100%	100%	2.193.537.456	2.078.915.000	1.828.760.000	364.777.456	100%	2.428.230.512	
		Persentase penyelesaian kerugian negara/daerah dan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaporkan	100%	100%	100%	2.193.537.456	2.078.915.000	1.828.760.000	364.777.456	100%	2.428.230.512	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008		3.188.308.416	
	Terlaksananya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI					2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008		3.188.308.416	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008	20 Dokumen	3.188.308.416	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	66 Laporan	66 Laporan	66 Laporan	2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008	66 Laporan	3.188.308.416	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008	2 Laporan	3.188.308.416	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008	7 Laporan	3.188.308.416	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008	10 Laporan	3.188.308.416	
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan oleh APIP					2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008		3.188.308.416	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008	20 Dokumen	3.188.308.416	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	66 Laporan	66 Laporan	66 Laporan	2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008	66 Laporan	3.188.308.416	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008	2 Laporan	3.188.308.416	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008	7 Laporan	3.188.308.416	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008	10 Laporan	3.188.308.416	
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja oleh APIP					2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008		3.188.308.416	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008	20 Dokumen	3.188.308.416	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	66 Laporan	66 Laporan	66 Laporan	2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008	66 Laporan	3.188.308.416	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008	2 Laporan	3.188.308.416	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008	7 Laporan	3.188.308.416	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	2.719.179.008	2.588.970.000	2.192.720.000	526.459.008	10 Laporan	3.188.308.416	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					107.181.600	148.600.000	122.600.000	-15.418.400		107.181.600	
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	107.181.600	148.600.000	122.600.000	-15.418.400	2 Laporan	107.181.600	Inspektorat
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					298.670.000	273.000.000	260.610.000	38.060.000		557.724.000	
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	66 Laporan	66 Laporan	66 Laporan	298.670.000	273.000.000	260.610.000	38.060.000	66 Laporan	557.724.000	Inspektorat
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja					306.771.976	274.025.000	222.800.000	83.971.976		282.090.152	
	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	306.771.976	274.025.000	222.800.000	83.971.976	10 Laporan	282.090.152	Inspektorat
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan					373.868.952	339.360.000	234.750.000	139.118.952		373.997.304	
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	373.868.952	339.360.000	234.750.000	139.118.952	7 Laporan	373.997.304	Inspektorat

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					273.096.976	259.500.000	255.600.000	17.496.976		273.161.152	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	273.096.976	259.500.000	255.600.000	17.496.976	20 Dokumen	273.161.152	Inspektorat
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					833.947.952	784.430.000	732.400.000	101.547.952		834.076.304	
	Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu					833.947.952	784.430.000	732.400.000	101.547.952		834.076.304	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	833.947.952	784.430.000	732.400.000	101.547.952	20 Laporan	834.076.304	
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	833.947.952	784.430.000	732.400.000	101.547.952	5 Laporan	834.076.304	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah					321.046.976	296.100.000	275.300.000	45.746.976		321.111.152	
	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	321.046.976	296.100.000	275.300.000	45.746.976	5 Laporan	321.111.152	Inspektorat
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					512.900.976	488.330.000	457.100.000	55.800.976		512.965.152	
	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	512.900.976	488.330.000	457.100.000	55.800.976	20 Laporan	512.965.152	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					2.101.370.086	1.859.850.000	1.778.420.000	322.950.086		2.012.353.245	
		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan Pemerintah Daerah yang telah sesuai dengan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang disusun	100%	100%	100%	2.101.370.086	1.859.850.000	1.778.420.000	322.950.086	100%	2.012.353.245	
		Persentase Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang terpenuhi dengan nilai > 90	100%	100%	100%	2.101.370.086	1.859.850.000	1.778.420.000	322.950.086	100%	2.012.353.245	
		Persentase pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah yang telah diselesaikan	100%	100%	100%	2.101.370.086	1.859.850.000	1.778.420.000	322.950.086	100%	2.012.353.245	
		Persentase Perangkat Daerah dan Unit Layanan Publik yang Meningkat Menjadi Zona Integritas WBBM	100%	100%	100%	2.101.370.086	1.859.850.000	1.778.420.000	322.950.086	100%	2.012.353.245	
		Persentase Perangkat Daerah dan Unit Layanan Publik yang Meningkat Menjadi Zona Integritas WBK	100%	100%	100%	2.101.370.086	1.859.850.000	1.778.420.000	322.950.086	100%	2.012.353.245	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					560.200.000	527.200.000	493.400.000	66.800.000		560.200.000	
	Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan terkait urusan pemerintah daerah					560.200.000	527.200.000	493.400.000	66.800.000		560.200.000	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	560.200.000	527.200.000	493.400.000	66.800.000	3 Rekomendasi	560.200.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	560.200.000	527.200.000	493.400.000	66.800.000	4 Rekomendasi	560.200.000	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					306.550.000	290.900.000	266.200.000	40.350.000		306.550.000	
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	306.550.000	290.900.000	266.200.000	40.350.000	4 Rekomendasi	306.550.000	Inspektorat
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					253.650.000	236.300.000	227.200.000	26.450.000		253.650.000	
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	253.650.000	236.300.000	227.200.000	26.450.000	3 Rekomendasi	253.650.000	Inspektorat
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi					3.082.340.172	2.665.300.000	2.570.040.000	512.300.172		2.904.306.490	
	Terlaksananya pendampingan dan asistensi di bidang reformasi birokasi, pemberantasan korupsi dan penegakan integritas					3.082.340.172	2.665.300.000	2.570.040.000	512.300.172		2.904.306.490	
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	3.082.340.172	2.665.300.000	2.570.040.000	512.300.172	25 Kegiatan	2.904.306.490	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	3.082.340.172	2.665.300.000	2.570.040.000	512.300.172	12 perangkat daerah	2.904.306.490	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	3.082.340.172	2.665.300.000	2.570.040.000	512.300.172	10 perangkat daerah	2.904.306.490	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	61 perangkat daerah	61 perangkat daerah	61 perangkat daerah	3.082.340.172	2.665.300.000	2.570.040.000	512.300.172	61 perangkat daerah	2.904.306.490	
	Terlaksananya penyelenggaraan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah					3.082.340.172	2.665.300.000	2.570.040.000	512.300.172		2.904.306.490	
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	3.082.340.172	2.665.300.000	2.570.040.000	512.300.172	25 Kegiatan	2.904.306.490	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	3.082.340.172	2.665.300.000	2.570.040.000	512.300.172	12 perangkat daerah	2.904.306.490	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	3.082.340.172	2.665.300.000	2.570.040.000	512.300.172	10 perangkat daerah	2.904.306.490	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	61 perangkat daerah	61 perangkat daerah	61 perangkat daerah	3.082.340.172	2.665.300.000	2.570.040.000	512.300.172	61 perangkat daerah	2.904.306.490	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					334.325.000	318.025.000	270.535.000	63.790.000		334.325.000	
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	61 perangkat daerah	61 perangkat daerah	61 perangkat daerah	334.325.000	318.025.000	270.535.000	63.790.000	61 perangkat daerah	334.325.000	Inspektorat
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					260.310.000	244.300.000	430.085.000	-169.775.000		260.310.000	
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	260.310.000	244.300.000	430.085.000	-169.775.000	10 perangkat daerah	260.310.000	Inspektorat
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					581.111.086	471.625.000	285.700.000	295.411.086		492.094.245	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	581.111.086	471.625.000	285.700.000	295.411.086	25 Kegiatan	492.094.245	Inspektorat
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					365.424.000	298.700.000	298.700.000	66.724.000		365.424.000	
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	365.424.000	298.700.000	298.700.000	66.724.000	12 perangkat daerah	365.424.000	Inspektorat
	Kec. Asemrowo					18.880.257.073	23.819.528.259	24.690.130.305	-5.809.873.232		19.106.420.290	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					18.880.257.073	18.880.257.073	24.690.130.305	-5.809.873.232		19.106.420.290	
7,01	KECAMATAN					18.880.257.073	23.819.528.259	24.690.130.305	-5.809.873.232		19.106.420.290	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.677.361.073	18.593.060.459	19.452.339.305	-774.978.232		18.887.337.085	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,10 %	97,08%	97,52%	18.677.361.073	18.593.060.459	19.452.339.305	-774.978.232	97,08 %	18.887.337.085	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	1.371.040	1.228.960		2.665.001	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	1.371.040	1.228.960		2.665.001	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	1.371.040	1.228.960	8 Dokumen	2.665.001	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	1.371.040	1.228.960		2.665.001	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	1.371.040	1.228.960	8 Dokumen	2.665.001	Kec. Asemrowo
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.643.123.459	15.643.123.459	15.810.527.914	-167.404.455		15.763.095.322	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					15.643.123.459	15.643.123.459	15.810.527.914	-167.404.455		15.763.095.322	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	50 Orang/bulan	42 Orang/bulan	15.643.123.459	15.643.123.459	15.810.527.914	-167.404.455	50 Orang/bulan	15.763.095.322	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					15.643.123.459	15.643.123.459	15.810.527.914	-167.404.455		15.763.095.322	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	50 Orang/bulan	42 Orang/bulan	15.643.123.459	15.643.123.459	15.810.527.914	-167.404.455	50 Orang/bulan	15.763.095.322	Kec. Asemrowo
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.923.872.614	2.855.870.600	3.586.862.441	-662.989.827		3.042.259.609	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					2.923.872.614	2.855.870.600	3.586.862.441	-662.989.827		3.042.259.609	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	2 Paket	2 Paket	2.923.872.614	2.855.870.600	3.586.862.441	-662.989.827	18 Paket	3.042.259.609	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.923.872.614	2.855.870.600	3.586.862.441	-662.989.827		3.042.259.609	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	2 Paket	2 Paket	2.923.872.614	2.855.870.600	3.586.862.441	-662.989.827	18 Paket	3.042.259.609	Kec. Asemrowo
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.765.000	90.134.400	53.577.910	54.187.090		79.317.153	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					107.765.000	90.134.400	53.577.910	54.187.090		79.317.153	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	107.765.000	90.134.400	53.577.910	54.187.090	5 Unit	79.317.153	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					107.765.000	90.134.400	53.577.910	54.187.090		79.317.153	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	107.765.000	90.134.400	53.577.910	54.187.090	5 Unit	79.317.153	Kec. Asemrowo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					74.124.000	73.542.600	73.542.600	581.400		74.124.000	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	74.124.000	73.542.600	73.542.600	581.400	100%	74.124.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					74.124.000	73.542.600	73.542.600	581.400		74.124.000	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					74.124.000	73.542.600	73.542.600	581.400		74.124.000	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.124.000	73.542.600	73.542.600	581.400	12 Laporan	74.124.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					74.124.000	73.542.600	73.542.600	581.400		74.124.000	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.124.000	73.542.600	73.542.600	581.400	12 Laporan	74.124.000	Kec. Asemrowo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	4.996.696.000	4.996.696.000	-4.996.696.000		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	0	4.996.696.000	4.996.696.000	-4.996.696.000	75%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	4.996.696.000	4.996.696.000	-4.996.696.000	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	4.996.696.000	4.996.696.000	-4.996.696.000		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	4.996.696.000	4.996.696.000	-4.996.696.000		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10580 Keluarga	10580 Keluarga	10320 Keluarga	0	4.996.696.000	4.996.696.000	-4.996.696.000	10580 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	85 Keluarga	85 Keluarga	85 Keluarga	0	4.996.696.000	4.996.696.000	-4.996.696.000	85 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	4.996.696.000	4.996.696.000	-4.996.696.000		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10580 Keluarga	10580 Keluarga	10320 Keluarga	0	4.996.696.000	4.996.696.000	-4.996.696.000	10580 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	85 Keluarga	85 Keluarga	85 Keluarga	0	4.996.696.000	4.996.696.000	-4.996.696.000	85 Keluarga	24.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	4.401.696.000	4.401.696.000	-4.401.696.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10580 Keluarga	10580 Keluarga	10320 Keluarga	0	4.401.696.000	4.401.696.000	-4.401.696.000	10580 Keluarga	12.000.000	Kec. Asemrowo
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	595.000.000	595.000.000	-595.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	85 Keluarga	85 Keluarga	85 Keluarga	0	595.000.000	595.000.000	-595.000.000	85 Keluarga	12.000.000	Kec. Asemrowo
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					128.772.000	156.229.200	167.552.400	-38.780.400		120.959.205	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	128.772.000	156.229.200	167.552.400	-38.780.400	100%	120.959.205	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					128.772.000	156.229.200	167.552.400	-38.780.400		120.959.205	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					128.772.000	156.229.200	167.552.400	-38.780.400		120.959.205	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	128.772.000	156.229.200	167.552.400	-38.780.400	6 Laporan	120.959.205	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					128.772.000	156.229.200	167.552.400	-38.780.400		120.959.205	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	128.772.000	156.229.200	167.552.400	-38.780.400	6 Laporan	120.959.205	Kec. Asemrowo
	Kelurahan Asemrowo					4.480.691.132	4.480.691.132	4.480.691.132	0		4.619.228.403	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.480.691.132	4.480.691.132	4.480.691.132	0		4.619.228.403	
7.01	KECAMATAN					4.480.691.132	4.480.691.132	4.480.691.132	0		4.619.228.403	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.480.691.132	4.480.691.132	4.480.691.132	0		4.619.228.403	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	4.480.691.132	4.480.691.132	4.480.691.132	0	75%	4.619.228.403	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.480.691.132	4.480.691.132	4.480.691.132	0	40%	4.619.228.403	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.961.382.264	8.961.382.264	8.961.382.264	0		9.238.456.806	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Asemrowo					8.961.382.264	8.961.382.264	8.961.382.264	0		9.238.456.806	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.961.382.264	8.961.382.264	8.961.382.264	0	3 Pokmas / Ormas	9.238.456.806	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2 Unit	6 Unit	8.961.382.264	8.961.382.264	8.961.382.264	0	3 Unit	9.238.456.806	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Asemrowo					8.961.382.264	8.961.382.264	8.961.382.264	0		9.238.456.806	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.961.382.264	8.961.382.264	8.961.382.264	0	3 Pokmas / Ormas	9.238.456.806	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2 Unit	6 Unit	8.961.382.264	8.961.382.264	8.961.382.264	0	3 Unit	9.238.456.806	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.568.292.092	3.299.891.132	3.299.891.132	-731.599.040		2.683.019.390	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2 Unit	6 Unit	2.568.292.092	3.299.891.132	3.299.891.132	-731.599.040	3 Unit	2.683.019.390	Kelurahan Asemrowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.912.399.040	1.180.800.000	1.180.800.000	731.599.040		1.936.209.013	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.912.399.040	1.180.800.000	1.180.800.000	731.599.040	3 Pokmas / Ormas	1.936.209.013	Kelurahan Asemrowo
	Kelurahan Genting Kalianak					2.315.365.792	2.315.365.792	2.315.365.792	0		2.373.249.933	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.315.365.792	2.315.365.792	2.315.365.792	0		2.373.249.933	
7,01	KECAMATAN					2.315.365.792	2.315.365.792	2.315.365.792	0		2.373.249.933	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.315.365.792	2.315.365.792	2.315.365.792	0		2.373.249.933	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	2.315.365.792	2.315.365.792	2.315.365.792	0	75%	2.373.249.933	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.315.365.792	2.315.365.792	2.315.365.792	0	40%	2.373.249.933	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.630.731.584	4.630.731.584	4.630.731.584	0		4.746.499.866	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Genting Kalianak					4.630.731.584	4.630.731.584	4.630.731.584	0		4.746.499.866	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	4.630.731.584	4.630.731.584	4.630.731.584	0	3 Pokmas / Ormas	4.746.499.866	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2 Unit	4 Unit	4.630.731.584	4.630.731.584	4.630.731.584	0	3 Unit	4.746.499.866	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Genting Kalianak					4.630.731.584	4.630.731.584	4.630.731.584	0		4.746.499.866	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	4.630.731.584	4.630.731.584	4.630.731.584	0	3 Pokmas / Ormas	4.746.499.866	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2 Unit	4 Unit	4.630.731.584	4.630.731.584	4.630.731.584	0	3 Unit	4.746.499.866	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.675.856.375	1.595.935.656	1.595.935.656	79.920.719		1.717.752.782	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2 Unit	4 Unit	1.675.856.375	1.595.935.656	1.595.935.656	79.920.719	3 Unit	1.717.752.782	Kelurahan Genting Kalianak

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					639.509.417	719.430.136	719.430.136	-79.920.719		655.497.151	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	639.509.417	719.430.136	719.430.136	-79.920.719	3 Pokmas / Ormas	655.497.151	Kelurahan Genting Kalianak
	Kelurahan Tambak Sarioso					2.415.004.302	2.415.004.302	2.415.004.302	0		2.475.379.406	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.415.004.302	2.415.004.302	2.415.004.302	0		2.475.379.406	
7,01	KECAMATAN					2.415.004.302	2.415.004.302	2.415.004.302	0		2.475.379.406	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.415.004.302	2.415.004.302	2.415.004.302	0		2.475.379.406	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	2.415.004.302	2.415.004.302	2.415.004.302	0	75%	2.475.379.406	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.415.004.302	2.415.004.302	2.415.004.302	0	40%	2.475.379.406	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.830.008.604	4.830.008.604	4.830.008.604	0		4.950.758.812	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tambak Sarioso					4.830.008.604	4.830.008.604	4.830.008.604	0		4.950.758.812	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	4.830.008.604	4.830.008.604	4.830.008.604	0	3 Pokmas / Ormas	4.950.758.812	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2 Unit	2 Unit	4.830.008.604	4.830.008.604	4.830.008.604	0	3 Unit	4.950.758.812	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tambak Sarioso					4.830.008.604	4.830.008.604	4.830.008.604	0		4.950.758.812	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	4.830.008.604	4.830.008.604	4.830.008.604	0	3 Pokmas / Ormas	4.950.758.812	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2 Unit	2 Unit	4.830.008.604	4.830.008.604	4.830.008.604	0	3 Unit	4.950.758.812	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.717.872.486	1.797.108.362	1.797.108.362	-79.235.876		1.760.819.296	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2 Unit	2 Unit	1.717.872.486	1.797.108.362	1.797.108.362	-79.235.876	3 Unit	1.760.819.296	Kelurahan Tambak Sarioso
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					697.131.816	617.895.940	617.895.940	79.235.876		714.560.110	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	697.131.816	617.895.940	617.895.940	79.235.876	3 Pokmas / Ormas	714.560.110	Kelurahan Tambak Sarioso
	Kec. Benowo					22.194.409.849	29.137.967.541	30.625.082.318	-8.430.672.469		22.563.023.105	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					22.194.409.849	22.194.409.849	30.625.082.318	-8.430.672.469		22.563.023.105	
7,01	KECAMATAN					22.194.409.849	29.137.967.541	30.625.082.318	-8.430.672.469		22.563.023.105	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.903.533.599	21.694.696.448	23.181.811.225	-1.278.277.626		22.248.146.855	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,22 %	94,18%	95,70%	21.903.533.599	21.694.696.448	23.181.811.225	-1.278.277.626	94,18 %	22.248.146.855	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Benowo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.396.162.478	18.396.162.478	19.658.012.727	-1.261.850.249		18.537.339.853	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					18.396.162.478	18.396.162.478	19.658.012.727	-1.261.850.249		18.537.339.853	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	51 Orang/bulan	18.396.162.478	18.396.162.478	19.658.012.727	-1.261.850.249	55 Orang/bulan	18.537.339.853	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					18.396.162.478	18.396.162.478	19.658.012.727	-1.261.850.249		18.537.339.853	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	51 Orang/bulan	18.396.162.478	18.396.162.478	19.658.012.727	-1.261.850.249	55 Orang/bulan	18.537.339.853	Kec. Benowo
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.412.123.621	3.180.164.370	3.405.428.898	6.694.723		3.613.787.390	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					3.412.123.621	3.180.164.370	3.405.428.898	6.694.723		3.613.787.390	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	3.412.123.621	3.180.164.370	3.405.428.898	6.694.723	9 Paket	3.613.787.390	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3.412.123.621	3.180.164.370	3.405.428.898	6.694.723		3.613.787.390	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	3.412.123.621	3.180.164.370	3.405.428.898	6.694.723	9 Paket	3.613.787.390	Kec. Benowo
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					92.647.500	114.425.600	114.425.600	-21.778.100		94.419.612	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					92.647.500	114.425.600	114.425.600	-21.778.100		94.419.612	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	92.647.500	114.425.600	114.425.600	-21.778.100	5 Unit	94.419.612	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					92.647.500	114.425.600	114.425.600	-21.778.100		94.419.612	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	92.647.500	114.425.600	114.425.600	-21.778.100	5 Unit	94.419.612	Kec. Benowo
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					116.251.200	121.022.293	121.022.293	-4.771.093		116.251.200	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	116.251.200	121.022.293	121.022.293	-4.771.093	100%	116.251.200	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					116.251.200	121.022.293	121.022.293	-4.771.093		116.251.200	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					116.251.200	121.022.293	121.022.293	-4.771.093		116.251.200	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	116.251.200	121.022.293	121.022.293	-4.771.093	12 Laporan	116.251.200	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					116.251.200	121.022.293	121.022.293	-4.771.093		116.251.200	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	116.251.200	121.022.293	121.022.293	-4.771.093	12 Laporan	116.251.200	Kec. Benowo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	7.175.092.800	7.175.092.800	-7.175.092.800		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	0	7.175.092.800	7.175.092.800	-7.175.092.800	75%	24.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	7.175.092.800	7.175.092.800	-7.175.092.800	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	7.175.092.800	7.175.092.800	-7.175.092.800		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	7.175.092.800	7.175.092.800	-7.175.092.800		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	15000 Keluarga	15000 Keluarga	14998 Keluarga	0	7.175.092.800	7.175.092.800	-7.175.092.800	15000 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	135 Keluarga	135 Keluarga	135 Keluarga	0	7.175.092.800	7.175.092.800	-7.175.092.800	135 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	7.175.092.800	7.175.092.800	-7.175.092.800		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	15000 Keluarga	15000 Keluarga	14998 Keluarga	0	7.175.092.800	7.175.092.800	-7.175.092.800	15000 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	135 Keluarga	135 Keluarga	135 Keluarga	0	7.175.092.800	7.175.092.800	-7.175.092.800	135 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	6.230.092.800	6.230.092.800	-6.230.092.800		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	15000 Keluarga	15000 Keluarga	14998 Keluarga	0	6.230.092.800	6.230.092.800	-6.230.092.800	15000 Keluarga	12.000.000	Kec. Benowo
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	945.000.000	945.000.000	-945.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	135 Keluarga	135 Keluarga	135 Keluarga	0	945.000.000	945.000.000	-945.000.000	135 Keluarga	12.000.000	Kec. Benowo
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					174.625.050	147.156.000	147.156.000	27.469.050		174.625.050	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	174.625.050	147.156.000	147.156.000	27.469.050	100%	174.625.050	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					174.625.050	147.156.000	147.156.000	27.469.050		174.625.050	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					174.625.050	147.156.000	147.156.000	27.469.050		174.625.050	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	174.625.050	147.156.000	147.156.000	27.469.050	12 Laporan	174.625.050	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					174.625.050	147.156.000	147.156.000	27.469.050		174.625.050	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	174.625.050	147.156.000	147.156.000	27.469.050	12 Laporan	174.625.050	Kec. Benowo
	Kelurahan Kandangan					3.673.352.218	3.673.352.218	3.673.352.218	0		3.741.186.018	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.673.352.218	3.673.352.218	3.673.352.218	0		3.741.186.018	
7,01	KECAMATAN					3.673.352.218	3.673.352.218	3.673.352.218	0		3.741.186.018	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.673.352.218	3.673.352.218	3.673.352.218	0		3.741.186.018	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.673.352.218	3.673.352.218	3.673.352.218	0	75%	3.741.186.018	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.673.352.218	3.673.352.218	3.673.352.218	0	40%	3.741.186.018	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.346.704.436	7.346.704.436	7.346.704.436	0		7.482.372.036	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kandangan					7.346.704.436	7.346.704.436	7.346.704.436	0		7.482.372.036	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.346.704.436	7.346.704.436	7.346.704.436	0	1 Pokmas / Ormas	7.482.372.036	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	10 Unit	7.346.704.436	7.346.704.436	7.346.704.436	0	5 Unit	7.482.372.036	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kandangan					7.346.704.436	7.346.704.436	7.346.704.436	0		7.482.372.036	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.346.704.436	7.346.704.436	7.346.704.436	0	1 Pokmas / Ormas	7.482.372.036	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	10 Unit	7.346.704.436	7.346.704.436	7.346.704.436	0	5 Unit	7.482.372.036	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.134.451.989	2.134.451.989	2.134.451.989	0		2.187.813.286	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	10 Unit	2.134.451.989	2.134.451.989	2.134.451.989	0	5 Unit	2.187.813.286	Kelurahan Kandangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.538.900.229	1.538.900.229	1.538.900.229	0		1.553.372.732	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.538.900.229	1.538.900.229	1.538.900.229	0	1 Pokmas / Ormas	1.553.372.732	Kelurahan Kandangan
	Kelurahan Romokalisari					3.048.607.855	3.048.607.855	3.048.607.855	0		3.124.823.047	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.048.607.855	3.048.607.855	3.048.607.855	0		3.124.823.047	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7,01	KECAMATAN					3.048.607.855	3.048.607.855	3.048.607.855	0		3.124.823.047	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.048.607.855	3.048.607.855	3.048.607.855	0		3.124.823.047	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.048.607.855	3.048.607.855	3.048.607.855	0	75%	3.124.823.047	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.048.607.855	3.048.607.855	3.048.607.855	0	40%	3.124.823.047	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.097.215.710	6.097.215.710	6.097.215.710	0		6.249.646.094	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Romokalisari					6.097.215.710	6.097.215.710	6.097.215.710	0		6.249.646.094	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	6.097.215.710	6.097.215.710	6.097.215.710	0	1 Pokmas / Ormas	6.249.646.094	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	6.097.215.710	6.097.215.710	6.097.215.710	0	4 Unit	6.249.646.094	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Romokalisari					6.097.215.710	6.097.215.710	6.097.215.710	0		6.249.646.094	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	6.097.215.710	6.097.215.710	6.097.215.710	0	1 Pokmas / Ormas	6.249.646.094	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	6.097.215.710	6.097.215.710	6.097.215.710	0	4 Unit	6.249.646.094	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.600.675.799	2.600.675.799	2.600.675.799	0		2.665.692.690	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	2.600.675.799	2.600.675.799	2.600.675.799	0	4 Unit	2.665.692.690	Kelurahan Romokalisari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					447.932.056	447.932.056	447.932.056	0		459.130.357	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	447.932.056	447.932.056	447.932.056	0	1 Pokmas / Ormas	459.130.357	Kelurahan Romokalisari
	Kelurahan Sememi					5.197.579.824	5.197.579.824	5.197.579.824	0		5.336.812.137	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					5.197.579.824	5.197.579.824	5.197.579.824	0		5.336.812.137	
7,01	KECAMATAN					5.197.579.824	5.197.579.824	5.197.579.824	0		5.336.812.137	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.197.579.824	5.197.579.824	5.197.579.824	0		5.336.812.137	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	5.197.579.824	5.197.579.824	5.197.579.824	0	75%	5.336.812.137	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	5.197.579.824	5.197.579.824	5.197.579.824	0	40%	5.336.812.137	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					10.395.159.648	10.395.159.648	10.395.159.648	0		10.673.624.274	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sememi					10.395.159.648	10.395.159.648	10.395.159.648	0		10.673.624.274	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	10.395.159.648	10.395.159.648	10.395.159.648	0	1 Pokmas / Ormas	10.673.624.274	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	10.395.159.648	10.395.159.648	10.395.159.648	0	5 Unit	10.673.624.274	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sememi					10.395.159.648	10.395.159.648	10.395.159.648	0		10.673.624.274	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	10.395.159.648	10.395.159.648	10.395.159.648	0	1 Pokmas / Ormas	10.673.624.274	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	10.395.159.648	10.395.159.648	10.395.159.648	0	5 Unit	10.673.624.274	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.968.851.365	3.221.849.597	3.221.849.597	-252.998.232		3.052.365.470	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	2.968.851.365	3.221.849.597	3.221.849.597	-252.998.232	5 Unit	3.052.365.470	Kelurahan Sememi
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.228.728.459	1.975.730.227	1.975.730.227	252.998.232		2.284.446.667	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.228.728.459	1.975.730.227	1.975.730.227	252.998.232	1 Pokmas / Ormas	2.284.446.667	Kelurahan Sememi
	Kelurahan Tambak Oso Wilangun					2.600.247.927	2.600.247.927	2.600.247.927	0		2.665.254.122	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.600.247.927	2.600.247.927	2.600.247.927	0		2.665.254.122	
7,01	KECAMATAN					2.600.247.927	2.600.247.927	2.600.247.927	0		2.665.254.122	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.600.247.927	2.600.247.927	2.600.247.927	0		2.665.254.122	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	2.600.247.927	2.600.247.927	2.600.247.927	0	75%	2.665.254.122	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.600.247.927	2.600.247.927	2.600.247.927	0	40%	2.665.254.122	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.200.495.854	5.200.495.854	5.200.495.854	0		5.330.508.244	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tambak Oso Wilangun					5.200.495.854	5.200.495.854	5.200.495.854	0		5.330.508.244	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	5.200.495.854	5.200.495.854	5.200.495.854	0	1 Pokmas / Ormas	5.330.508.244	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5.200.495.854	5.200.495.854	5.200.495.854	0	4 Unit	5.330.508.244	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tambak Oso Wilangun					5.200.495.854	5.200.495.854	5.200.495.854	0		5.330.508.244	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	5.200.495.854	5.200.495.854	5.200.495.854	0	1 Pokmas / Ormas	5.330.508.244	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5.200.495.854	5.200.495.854	5.200.495.854	0	4 Unit	5.330.508.244	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.996.790.064	1.996.790.064	1.996.790.064	0		2.046.709.813	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.996.790.064	1.996.790.064	1.996.790.064	0	4 Unit	2.046.709.813	Kelurahan Tambak Oso Wilangun
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					603.457.863	603.457.863	603.457.863	0		618.544.309	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	603.457.863	603.457.863	603.457.863	0	1 Pokmas / Ormas	618.544.309	Kelurahan Tambak Oso Wilangun
	Kec. Bubutan					23.869.447.186	33.607.535.788	35.380.822.678	-11.511.375.492		24.170.190.560	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					23.869.447.186	23.869.447.186	35.380.822.678	-11.511.375.492		24.170.190.560	
7,01	KECAMATAN					23.869.447.186	33.607.535.788	35.380.822.678	-11.511.375.492		24.170.190.560	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.500.410.785	23.474.574.476	25.247.861.366	-1.747.450.581		23.777.037.421	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,30%	96,14%	98,68%	23.500.410.785	23.474.574.476	25.247.861.366	-1.747.450.581	96,18%	23.777.037.421	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.665.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.665.000	Kec. Bubutan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.672.370.679	18.672.370.679	20.172.798.743	-1.500.428.064		18.814.574.610	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					18.672.370.679	18.672.370.679	20.172.798.743	-1.500.428.064		18.814.574.610	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	18.672.370.679	18.672.370.679	20.172.798.743	-1.500.428.064	47 Orang/bulan	18.814.574.610	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					18.672.370.679	18.672.370.679	20.172.798.743	-1.500.428.064		18.814.574.610	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	18.672.370.679	18.672.370.679	20.172.798.743	-1.500.428.064	47 Orang/bulan	18.814.574.610	Kec. Bubutan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.744.665.106	4.682.146.181	4.955.005.007	-210.339.901		4.879.022.811	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					4.744.665.106	4.682.146.181	4.955.005.007	-210.339.901		4.879.022.811	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	4.744.665.106	4.682.146.181	4.955.005.007	-210.339.901	10 Paket	4.879.022.811	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.744.665.106	4.682.146.181	4.955.005.007	-210.339.901		4.879.022.811	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	4.744.665.106	4.682.146.181	4.955.005.007	-210.339.901	10 Paket	4.879.022.811	Kec. Bubutan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					80.775.000	116.113.616	116.113.616	-35.338.616		80.775.000	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					80.775.000	116.113.616	116.113.616	-35.338.616		80.775.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	80.775.000	116.113.616	116.113.616	-35.338.616	1 Unit	80.775.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					80.775.000	116.113.616	116.113.616	-35.338.616		80.775.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	80.775.000	116.113.616	116.113.616	-35.338.616	1 Unit	80.775.000	Kec. Bubutan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					208.071.401	201.090.112	201.090.112	6.981.289		208.188.139	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	208.071.401	201.090.112	201.090.112	6.981.289	100%	208.188.139	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					208.071.401	201.090.112	201.090.112	6.981.289		208.188.139	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					208.071.401	201.090.112	201.090.112	6.981.289		208.188.139	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	208.071.401	201.090.112	201.090.112	6.981.289	12 Laporan	208.188.139	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					208.071.401	201.090.112	201.090.112	6.981.289		208.188.139	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	208.071.401	201.090.112	201.090.112	6.981.289	12 Laporan	208.188.139	Kec. Bubutan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	9.784.715.200	9.751.115.200	-9.751.115.200		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	62,74%	62,58%	62,58%	0	9.784.715.200	9.751.115.200	-9.751.115.200	62,62%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	9.784.715.200	9.751.115.200	-9.751.115.200	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	9.784.715.200	9.751.115.200	-9.751.115.200		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	9.784.715.200	9.751.115.200	-9.751.115.200		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20680 Keluarga	20680 Keluarga	20064 Keluarga	0	9.784.715.200	9.751.115.200	-9.751.115.200	20680 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	220 Keluarga	220 Keluarga	220 Keluarga	0	9.784.715.200	9.751.115.200	-9.751.115.200	220 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	9.784.715.200	9.751.115.200	-9.751.115.200		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20680 Keluarga	20680 Keluarga	20064 Keluarga	0	9.784.715.200	9.751.115.200	-9.751.115.200	20680 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	220 Keluarga	220 Keluarga	220 Keluarga	0	9.784.715.200	9.751.115.200	-9.751.115.200	220 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	8.244.715.200	8.211.115.200	-8.211.115.200		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20680 Keluarga	20680 Keluarga	20064 Keluarga	0	8.244.715.200	8.211.115.200	-8.211.115.200	20680 Keluarga	12.000.000	Kec. Bubutan
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.540.000.000	1.540.000.000	-1.540.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	220 Keluarga	220 Keluarga	220 Keluarga	0	1.540.000.000	1.540.000.000	-1.540.000.000	220 Keluarga	12.000.000	Kec. Bubutan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					160.965.000	147.156.000	180.756.000	-19.791.000		160.965.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	160.965.000	147.156.000	180.756.000	-19.791.000	100%	160.965.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					160.965.000	147.156.000	180.756.000	-19.791.000		160.965.000	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					160.965.000	147.156.000	180.756.000	-19.791.000		160.965.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	160.965.000	147.156.000	180.756.000	-19.791.000	12 Laporan	160.965.000	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					160.965.000	147.156.000	180.756.000	-19.791.000		160.965.000	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	160.965.000	147.156.000	180.756.000	-19.791.000	12 Laporan	160.965.000	Kec. Bubutan
	Kelurahan Alun-Alun Contong					2.816.362.407	2.816.362.407	2.816.362.407	0		2.862.771.463	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.816.362.407	2.816.362.407	2.816.362.407	0		2.862.771.463	
7,01	KECAMATAN					2.816.362.407	2.816.362.407	2.816.362.407	0		2.862.771.463	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.816.362.407	2.816.362.407	2.816.362.407	0		2.862.771.463	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	62,74%	62,58%	62,58%	2.816.362.407	2.816.362.407	2.816.362.407	0	62,62%	2.862.771.463	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.816.362.407	2.816.362.407	2.816.362.407	0	40%	2.862.771.463	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.632.724.814	5.632.724.814	5.632.724.814	0		5.725.542.926	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Alun-Alun Contong					5.632.724.814	5.632.724.814	5.632.724.814	0		5.725.542.926	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	5.632.724.814	5.632.724.814	5.632.724.814	0	2 Pokmas / Ormas	5.725.542.926	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	5.632.724.814	5.632.724.814	5.632.724.814	0	3 Unit	5.725.542.926	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Alun-Alun Contong					5.632.724.814	5.632.724.814	5.632.724.814	0		5.725.542.926	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	5.632.724.814	5.632.724.814	5.632.724.814	0	2 Pokmas / Ormas	5.725.542.926	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	5.632.724.814	5.632.724.814	5.632.724.814	0	3 Unit	5.725.542.926	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					886.603.923	1.619.657.346	1.619.657.346	-733.053.423		908.769.020	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	886.603.923	1.619.657.346	1.619.657.346	-733.053.423	3 Unit	908.769.020	Kelurahan Alun-Alun Contong

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.929.758.484	1.196.705.061	1.196.705.061	733.053.423		1.954.002.443	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.929.758.484	1.196.705.061	1.196.705.061	733.053.423	2 Pokmas / Ormas	1.954.002.443	Kelurahan Alun-Alun Contong
	Kelurahan Bubutan					4.167.602.593	4.167.602.593	4.167.602.593	0		4.456.292.651	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.167.602.593	4.167.602.593	4.167.602.593	0		4.456.292.651	
7,01	KECAMATAN					4.167.602.593	4.167.602.593	4.167.602.593	0		4.456.292.651	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.167.602.593	4.167.602.593	4.167.602.593	0		4.456.292.651	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	62,74%	62,58%	62,58%	4.167.602.593	4.167.602.593	4.167.602.593	0	62,62%	4.456.292.651	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.167.602.593	4.167.602.593	4.167.602.593	0	40%	4.456.292.651	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.335.205.186	8.335.205.186	8.335.205.186	0		8.912.585.302	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Bubutan					8.335.205.186	8.335.205.186	8.335.205.186	0		8.912.585.302	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	8.335.205.186	8.335.205.186	8.335.205.186	0	2 Pokmas / Ormas	8.912.585.302	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	8.335.205.186	8.335.205.186	8.335.205.186	0	4 Unit	8.912.585.302	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bubutan					8.335.205.186	8.335.205.186	8.335.205.186	0		8.912.585.302	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	8.335.205.186	8.335.205.186	8.335.205.186	0	2 Pokmas / Ormas	8.912.585.302	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	8.335.205.186	8.335.205.186	8.335.205.186	0	4 Unit	8.912.585.302	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.174.983.141	2.872.201.122	2.872.201.122	-697.217.981		2.413.857.716	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	2.174.983.141	2.872.201.122	2.872.201.122	-697.217.981	4 Unit	2.413.857.716	Kelurahan Bubutan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.992.619.452	1.295.401.471	1.295.401.471	697.217.981		2.042.434.935	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.992.619.452	1.295.401.471	1.295.401.471	697.217.981	2 Pokmas / Ormas	2.042.434.935	Kelurahan Bubutan
	Kelurahan Gundih					5.361.673.867	5.361.673.867	5.361.673.867	0		5.495.715.706	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					5.361.673.867	5.361.673.867	5.361.673.867	0		5.495.715.706	
7,01	KECAMATAN					5.361.673.867	5.361.673.867	5.361.673.867	0		5.495.715.706	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.361.673.867	5.361.673.867	5.361.673.867	0		5.495.715.706	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	62,74%	62,58%	62,58%	5.361.673.867	5.361.673.867	5.361.673.867	0	62,62%	5.495.715.706	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	5.361.673.867	5.361.673.867	5.361.673.867	0	40%	5.495.715.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					10.723.347.734	10.723.347.734	10.723.347.734	0		10.991.431.412	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Gundih					10.723.347.734	10.723.347.734	10.723.347.734	0		10.991.431.412	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	10.723.347.734	10.723.347.734	10.723.347.734	0	2 Pokmas / Ormas	10.991.431.412	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	10.723.347.734	10.723.347.734	10.723.347.734	0	5 Unit	10.991.431.412	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Gundih					10.723.347.734	10.723.347.734	10.723.347.734	0		10.991.431.412	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	10.723.347.734	10.723.347.734	10.723.347.734	0	2 Pokmas / Ormas	10.991.431.412	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	10.723.347.734	10.723.347.734	10.723.347.734	0	5 Unit	10.991.431.412	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.364.073.867	3.997.215.822	3.997.215.822	-633.141.955		3.448.175.709	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	3.364.073.867	3.997.215.822	3.997.215.822	-633.141.955	5 Unit	3.448.175.709	Kelurahan Gundih
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.997.600.000	1.364.458.045	1.364.458.045	633.141.955		2.047.539.997	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.997.600.000	1.364.458.045	1.364.458.045	633.141.955	2 Pokmas / Ormas	2.047.539.997	Kelurahan Gundih
	Kelurahan Jepara					4.188.793.309	4.188.793.309	4.188.793.309	0		4.293.513.136	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.188.793.309	4.188.793.309	4.188.793.309	0		4.293.513.136	
7,01	KECAMATAN					4.188.793.309	4.188.793.309	4.188.793.309	0		4.293.513.136	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.188.793.309	4.188.793.309	4.188.793.309	0		4.293.513.136	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	62,74%	62,58%	62,58%	4.188.793.309	4.188.793.309	4.188.793.309	0	62,62%	4.293.513.136	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.188.793.309	4.188.793.309	4.188.793.309	0	40%	4.293.513.136	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.377.586.618	8.377.586.618	8.377.586.618	0		8.587.026.272	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Jepara					8.377.586.618	8.377.586.618	8.377.586.618	0		8.587.026.272	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	8.377.586.618	8.377.586.618	8.377.586.618	0	2 Pokmas / Ormas	8.587.026.272	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	8.377.586.618	8.377.586.618	8.377.586.618	0	5 Unit	8.587.026.272	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Jepara					8.377.586.618	8.377.586.618	8.377.586.618	0		8.587.026.272	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	8.377.586.618	8.377.586.618	8.377.586.618	0	2 Pokmas / Ormas	8.587.026.272	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	8.377.586.618	8.377.586.618	8.377.586.618	0	5 Unit	8.587.026.272	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.041.393.309	2.778.134.629	2.778.134.629	-736.741.320		2.092.428.139	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	2.041.393.309	2.778.134.629	2.778.134.629	-736.741.320	5 Unit	2.092.428.139	Kelurahan Jepara
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.147.400.000	1.410.658.680	1.410.658.680	736.741.320		2.201.084.997	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.147.400.000	1.410.658.680	1.410.658.680	736.741.320	2 Pokmas / Ormas	2.201.084.997	Kelurahan Jepara
	Kelurahan Tembok Dukuh					5.250.558.898	5.250.558.898	5.250.558.898	0		5.381.822.863	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					5.250.558.898	5.250.558.898	5.250.558.898	0		5.381.822.863	
7,01	KECAMATAN					5.250.558.898	5.250.558.898	5.250.558.898	0		5.381.822.863	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.250.558.898	5.250.558.898	5.250.558.898	0		5.381.822.863	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	62,74%	62,58%	62,58%	5.250.558.898	5.250.558.898	5.250.558.898	0	62,62%	5.381.822.863	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	5.250.558.898	5.250.558.898	5.250.558.898	0	40%	5.381.822.863	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					10.501.117.796	10.501.117.796	10.501.117.796	0		10.763.645.726	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tembok Dukuh					10.501.117.796	10.501.117.796	10.501.117.796	0		10.763.645.726	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	10.501.117.796	10.501.117.796	10.501.117.796	0	2 Pokmas / Ormas	10.763.645.726	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	10.501.117.796	10.501.117.796	10.501.117.796	0	5 Unit	10.763.645.726	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tembok Dukuh					10.501.117.796	10.501.117.796	10.501.117.796	0		10.763.645.726	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	10.501.117.796	10.501.117.796	10.501.117.796	0	2 Pokmas / Ormas	10.763.645.726	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	10.501.117.796	10.501.117.796	10.501.117.796	0	5 Unit	10.763.645.726	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.661.505.855	2.870.268.995	2.870.268.995	-1.208.763.140		1.703.043.499	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1.661.505.855	2.870.268.995	2.870.268.995	-1.208.763.140	5 Unit	1.703.043.499	Kelurahan Tembok Dukuh
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3.589.053.043	2.380.289.903	2.380.289.903	1.208.763.140		3.678.779.364	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3.589.053.043	2.380.289.903	2.380.289.903	1.208.763.140	2 Pokmas / Ormas	3.678.779.364	Kelurahan Tembok Dukuh
	Kec. Bulak					22.666.757.607	26.028.442.761	27.274.762.373	-4.608.004.766		22.953.917.584	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					22.666.757.607	22.666.757.607	27.274.762.373	-4.608.004.766		22.953.917.584	
7.01	KECAMATAN					22.666.757.607	26.028.442.761	27.274.762.373	-4.608.004.766		22.953.917.584	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.464.870.807	22.245.598.868	23.491.918.480	-1.027.047.673		22.647.815.593	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99,41%	99,37%	99,37%	22.464.870.807	22.245.598.868	23.491.918.480	-1.027.047.673	99,38%	22.647.815.593	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	2.671.680	2.671.680	-71.680		2.600.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	2.671.680	2.671.680	-71.680		2.600.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	2.671.680	2.671.680	-71.680	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	2.671.680	2.671.680	-71.680		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	2.671.680	2.671.680	-71.680	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Bulak
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.673.280.959	17.673.280.959	18.829.565.860	-1.156.284.901		17.809.054.006	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					17.673.280.959	17.673.280.959	18.829.565.860	-1.156.284.901		17.809.054.006	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	48 Orang/bulan	17.673.280.959	17.673.280.959	18.829.565.860	-1.156.284.901	50 Orang/bulan	17.809.054.006	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					17.673.280.959	17.673.280.959	18.829.565.860	-1.156.284.901		17.809.054.006	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	48 Orang/bulan	17.673.280.959	17.673.280.959	18.829.565.860	-1.156.284.901	50 Orang/bulan	17.809.054.006	Kec. Bulak
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.703.227.348	4.512.692.389	4.602.727.100	100.500.248		4.713.129.803	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					4.703.227.348	4.512.692.389	4.602.727.100	100.500.248		4.713.129.803	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	2 Paket	2 Paket	4.703.227.348	4.512.692.389	4.602.727.100	100.500.248	11 Paket	4.713.129.803	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.703.227.348	4.512.692.389	4.602.727.100	100.500.248		4.713.129.803	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	2 Paket	2 Paket	4.703.227.348	4.512.692.389	4.602.727.100	100.500.248	11 Paket	4.713.129.803	Kec. Bulak
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85.762.500	56.953.840	56.953.840	28.808.660		123.031.784	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					85.762.500	56.953.840	56.953.840	28.808.660		123.031.784	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	1 Unit	85.762.500	56.953.840	56.953.840	28.808.660	2 Unit	123.031.784	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					85.762.500	56.953.840	56.953.840	28.808.660		123.031.784	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	1 Unit	85.762.500	56.953.840	56.953.840	28.808.660	2 Unit	123.031.784	Kec. Bulak
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					94.576.800	95.162.293	95.162.293	-585.493		94.576.800	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	94.576.800	95.162.293	95.162.293	-585.493	100%	94.576.800	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					94.576.800	95.162.293	95.162.293	-585.493		94.576.800	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					94.576.800	95.162.293	95.162.293	-585.493		94.576.800	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	94.576.800	95.162.293	95.162.293	-585.493	12 Laporan	94.576.800	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					94.576.800	95.162.293	95.162.293	-585.493		94.576.800	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	94.576.800	95.162.293	95.162.293	-585.493	12 Laporan	94.576.800	Kec. Bulak
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	3.596.102.400	3.596.102.400	-3.596.102.400		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	91%	88,50%	88,50%	0	3.596.102.400	3.596.102.400	-3.596.102.400	89,50%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	3.596.102.400	3.596.102.400	-3.596.102.400	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	3.596.102.400	3.596.102.400	-3.596.102.400		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	3.596.102.400	3.596.102.400	-3.596.102.400		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	6840 Keluarga	6840 Keluarga	6801 Keluarga	0	3.596.102.400	3.596.102.400	-3.596.102.400	6840 Keluarga	24.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	105 Keluarga	105 Keluarga	105 Keluarga	0	3.596.102.400	3.596.102.400	-3.596.102.400	105 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	3.596.102.400	3.596.102.400	-3.596.102.400		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	6840 Keluarga	6840 Keluarga	6801 Keluarga	0	3.596.102.400	3.596.102.400	-3.596.102.400	6840 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	105 Keluarga	105 Keluarga	105 Keluarga	0	3.596.102.400	3.596.102.400	-3.596.102.400	105 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	2.861.102.400	2.861.102.400	-2.861.102.400		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	6840 Keluarga	6840 Keluarga	6801 Keluarga	0	2.861.102.400	2.861.102.400	-2.861.102.400	6840 Keluarga	12.000.000	Kec. Bulak
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	735.000.000	735.000.000	-735.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	105 Keluarga	105 Keluarga	105 Keluarga	0	735.000.000	735.000.000	-735.000.000	105 Keluarga	12.000.000	Kec. Bulak
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					107.310.000	91.579.200	91.579.200	15.730.800		187.525.191	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	107.310.000	91.579.200	91.579.200	15.730.800	100%	187.525.191	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					107.310.000	91.579.200	91.579.200	15.730.800		187.525.191	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					107.310.000	91.579.200	91.579.200	15.730.800		187.525.191	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	107.310.000	91.579.200	91.579.200	15.730.800	12 Laporan	187.525.191	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					107.310.000	91.579.200	91.579.200	15.730.800		187.525.191	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	107.310.000	91.579.200	91.579.200	15.730.800	12 Laporan	187.525.191	Kec. Bulak
	Kelurahan Bulak					3.308.847.974	3.308.847.974	3.308.847.974	0		3.367.569.168	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.308.847.974	3.308.847.974	3.308.847.974	0		3.367.569.168	
7,01	KECAMATAN					3.308.847.974	3.308.847.974	3.308.847.974	0		3.367.569.168	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.308.847.974	3.308.847.974	3.308.847.974	0		3.367.569.168	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	91%	88,50%	88,50%	3.308.847.974	3.308.847.974	3.308.847.974	0	89,50%	3.367.569.168	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.308.847.974	3.308.847.974	3.308.847.974	0	40%	3.367.569.168	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.617.695.948	6.617.695.948	6.617.695.948	0		6.735.138.336	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Bulak					6.617.695.948	6.617.695.948	6.617.695.948	0		6.735.138.336	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.617.695.948	6.617.695.948	6.617.695.948	0	2 Pokmas / Ormas	6.735.138.336	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6.617.695.948	6.617.695.948	6.617.695.948	0	2 Unit	6.735.138.336	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bulak					6.617.695.948	6.617.695.948	6.617.695.948	0		6.735.138.336	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.617.695.948	6.617.695.948	6.617.695.948	0	2 Pokmas / Ormas	6.735.138.336	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6.617.695.948	6.617.695.948	6.617.695.948	0	2 Unit	6.735.138.336	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.527.609.144	1.612.388.581	1.615.023.902	-87.414.758		1.565.799.370	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.527.609.144	1.612.388.581	1.615.023.902	-87.414.758	2 Unit	1.565.799.370	Kelurahan Bulak
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.781.238.830	1.696.459.393	1.693.824.072	87.414.758		1.801.769.798	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.781.238.830	1.696.459.393	1.693.824.072	87.414.758	2 Pokmas / Ormas	1.801.769.798	Kelurahan Bulak
	Kelurahan Kedung Cowek					2.276.517.897	2.276.517.897	2.276.517.897	0		2.435.430.841	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.276.517.897	2.276.517.897	2.276.517.897	0		2.435.430.841	
7,01	KECAMATAN					2.276.517.897	2.276.517.897	2.276.517.897	0		2.435.430.841	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.276.517.897	2.276.517.897	2.276.517.897	0		2.435.430.841	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	91%	88,50%	88,50%	2.276.517.897	2.276.517.897	2.276.517.897	0	89,50%	2.435.430.841	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.276.517.897	2.276.517.897	2.276.517.897	0	40%	2.435.430.841	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.553.035.794	4.553.035.794	4.553.035.794	0		4.870.861.682	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kedung Cowek					4.553.035.794	4.553.035.794	4.553.035.794	0		4.870.861.682	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	4.553.035.794	4.553.035.794	4.553.035.794	0	3 Pokmas / Ormas	4.870.861.682	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	5 Unit	5 Unit	4.553.035.794	4.553.035.794	4.553.035.794	0	6 Unit	4.870.861.682	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kedung Cowek					4.553.035.794	4.553.035.794	4.553.035.794	0		4.870.861.682	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	4.553.035.794	4.553.035.794	4.553.035.794	0	3 Pokmas / Ormas	4.870.861.682	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	5 Unit	5 Unit	4.553.035.794	4.553.035.794	4.553.035.794	0	6 Unit	4.870.861.682	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.755.142.230	1.961.630.179	1.961.630.179	-206.487.949		1.901.020.783	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	5 Unit	5 Unit	1.755.142.230	1.961.630.179	1.961.630.179	-206.487.949	6 Unit	1.901.020.783	Kelurahan Kedung Cowek
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					521.375.667	314.887.718	314.887.718	206.487.949		534.410.058	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	521.375.667	314.887.718	314.887.718	206.487.949	3 Pokmas / Ormas	534.410.058	Kelurahan Kedung Cowek
	Kelurahan Kenjeran					2.231.461.714	2.231.461.714	2.231.461.714	0		2.287.248.254	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.231.461.714	2.231.461.714	2.231.461.714	0		2.287.248.254	
7,01	KECAMATAN					2.231.461.714	2.231.461.714	2.231.461.714	0		2.287.248.254	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.231.461.714	2.231.461.714	2.231.461.714	0		2.287.248.254	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	91%	88,50%	88,50%	2.231.461.714	2.231.461.714	2.231.461.714	0	89,50%	2.287.248.254	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.231.461.714	2.231.461.714	2.231.461.714	0	40%	2.287.248.254	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.462.923.428	4.462.923.428	4.462.923.428	0		4.574.496.508	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kenjeran					4.462.923.428	4.462.923.428	4.462.923.428	0		4.574.496.508	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	4.462.923.428	4.462.923.428	4.462.923.428	0	3 Pokmas / Ormas	4.574.496.508	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	4.462.923.428	4.462.923.428	4.462.923.428	0	3 Unit	4.574.496.508	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kenjeran					4.462.923.428	4.462.923.428	4.462.923.428	0		4.574.496.508	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	4.462.923.428	4.462.923.428	4.462.923.428	0	3 Pokmas / Ormas	4.574.496.508	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	4.462.923.428	4.462.923.428	4.462.923.428	0	3 Unit	4.574.496.508	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.522.341.531	1.675.369.660	1.675.369.660	-153.028.129		1.560.400.067	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.522.341.531	1.675.369.660	1.675.369.660	-153.028.129	3 Unit	1.560.400.067	Kelurahan Kenjeran
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					709.120.183	556.092.054	556.092.054	153.028.129		726.848.187	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	709.120.183	556.092.054	556.092.054	153.028.129	3 Pokmas / Ormas	726.848.187	Kelurahan Kenjeran
	Kelurahan Sukolilo Baru					2.802.925.346	2.802.925.346	2.802.925.346	0		2.872.998.476	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.802.925.346	2.802.925.346	2.802.925.346	0		2.872.998.476	
7,01	KECAMATAN					2.802.925.346	2.802.925.346	2.802.925.346	0		2.872.998.476	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.802.925.346	2.802.925.346	2.802.925.346	0		2.872.998.476	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	91%	88,50%	88,50%	2.802.925.346	2.802.925.346	2.802.925.346	0	89,50%	2.872.998.476	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.802.925.346	2.802.925.346	2.802.925.346	0	40%	2.872.998.476	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.605.850.692	5.605.850.692	5.605.850.692	0		5.745.996.952	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sukolilo Baru					5.605.850.692	5.605.850.692	5.605.850.692	0		5.745.996.952	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.605.850.692	5.605.850.692	5.605.850.692	0	2 Pokmas / Ormas	5.745.996.952	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	5.605.850.692	5.605.850.692	5.605.850.692	0	3 Unit	5.745.996.952	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sukolilo Baru					5.605.850.692	5.605.850.692	5.605.850.692	0		5.745.996.952	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.605.850.692	5.605.850.692	5.605.850.692	0	2 Pokmas / Ormas	5.745.996.952	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	5.605.850.692	5.605.850.692	5.605.850.692	0	3 Unit	5.745.996.952	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.365.649.985	1.651.237.885	1.651.237.885	-285.587.900		1.399.791.233	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.365.649.985	1.651.237.885	1.651.237.885	-285.587.900	3 Unit	1.399.791.233	Kelurahan Sukolilo Baru
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.437.275.361	1.151.687.461	1.151.687.461	285.587.900		1.473.207.243	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.437.275.361	1.151.687.461	1.151.687.461	285.587.900	2 Pokmas / Ormas	1.473.207.243	Kelurahan Sukolilo Baru
	Kec. Dukuh Pakis					21.673.497.427	28.109.662.184	29.631.360.690	-7.957.863.263		21.939.284.249	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					21.673.497.427	21.673.497.427	29.631.360.690	-7.957.863.263		21.939.284.249	
7,01	KECAMATAN					21.673.497.427	28.109.662.184	29.631.360.690	-7.957.863.263		21.939.284.249	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.391.328.883	21.386.445.984	22.922.487.390	-1.531.158.507		21.615.542.291	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,89%	98,29%	98,29%	21.391.328.883	21.386.445.984	22.922.487.390	-1.531.158.507	98,35%	21.615.542.291	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	2.632.000	-32.000		2.600.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	2.632.000	-32.000		2.600.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	2.632.000	-32.000	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	2.632.000	-32.000		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	2.632.000	-32.000	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Dukuh Pakis
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.430.536.975	17.446.100.585	18.756.756.481	-1.326.219.506		17.564.209.764	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					17.430.536.975	17.446.100.585	18.756.756.481	-1.326.219.506		17.564.209.764	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	46 Orang/bulan	17.430.536.975	17.446.100.585	18.756.756.481	-1.326.219.506	50 Orang/bulan	17.564.209.764	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					17.430.536.975	17.446.100.585	18.756.756.481	-1.326.219.506		17.564.209.764	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	46 Orang/bulan	17.430.536.975	17.446.100.585	18.756.756.481	-1.326.219.506	50 Orang/bulan	17.564.209.764	Kec. Dukuh Pakis
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.824.656.908	3.819.159.385	4.038.255.202	-213.598.294		3.944.314.405	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					3.824.656.908	3.819.159.385	4.038.255.202	-213.598.294		3.944.314.405	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	3.824.656.908	3.819.159.385	4.038.255.202	-213.598.294	2 Paket	3.944.314.405	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3.824.656.908	3.819.159.385	4.038.255.202	-213.598.294		3.944.314.405	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	3.824.656.908	3.819.159.385	4.038.255.202	-213.598.294	2 Paket	3.944.314.405	Kec. Dukuh Pakis
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					133.535.000	117.254.014	124.843.707	8.691.293		104.418.122	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					133.535.000	117.254.014	124.843.707	8.691.293		104.418.122	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	133.535.000	117.254.014	124.843.707	8.691.293	4 Unit	104.418.122	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					133.535.000	117.254.014	124.843.707	8.691.293		104.418.122	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	133.535.000	117.254.014	124.843.707	8.691.293	4 Unit	104.418.122	Kec. Dukuh Pakis
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					140.519.344	130.383.000	130.383.000	10.136.344		140.602.728	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	140.519.344	130.383.000	130.383.000	10.136.344	100%	140.602.728	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					140.519.344	130.383.000	130.383.000	10.136.344		140.602.728	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					140.519.344	130.383.000	130.383.000	10.136.344		140.602.728	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	140.519.344	130.383.000	130.383.000	10.136.344	12 Laporan	140.602.728	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					140.519.344	130.383.000	130.383.000	10.136.344		140.602.728	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	140.519.344	130.383.000	130.383.000	10.136.344	12 Laporan	140.602.728	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	6.460.148.000	6.426.288.800	-6.426.288.800		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	79,89%	68,32%	68,32%	0	6.460.148.000	6.426.288.800	-6.426.288.800	70,66%	24.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	6.460.148.000	6.426.288.800	-6.426.288.800	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	6.460.148.000	6.426.288.800	-6.426.288.800		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	6.460.148.000	6.426.288.800	-6.426.288.800		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12600 Keluarga	12600 Keluarga	12540 Keluarga	0	6.460.148.000	6.426.288.800	-6.426.288.800	12600 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	155 Keluarga	155 Keluarga	155 Keluarga	0	6.460.148.000	6.426.288.800	-6.426.288.800	155 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	6.460.148.000	6.426.288.800	-6.426.288.800		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12600 Keluarga	12600 Keluarga	12540 Keluarga	0	6.460.148.000	6.426.288.800	-6.426.288.800	12600 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	155 Keluarga	155 Keluarga	155 Keluarga	0	6.460.148.000	6.426.288.800	-6.426.288.800	155 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	5.375.148.000	5.341.288.800	-5.341.288.800		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12600 Keluarga	12600 Keluarga	12540 Keluarga	0	5.375.148.000	5.341.288.800	-5.341.288.800	12600 Keluarga	12.000.000	Kec. Dukuh Pakis
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.085.000.000	1.085.000.000	-1.085.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	155 Keluarga	155 Keluarga	155 Keluarga	0	1.085.000.000	1.085.000.000	-1.085.000.000	155 Keluarga	12.000.000	Kec. Dukuh Pakis
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					141.649.200	132.685.200	152.201.500	-10.552.300		159.139.230	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	141.649.200	132.685.200	152.201.500	-10.552.300	100%	159.139.230	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					141.649.200	132.685.200	152.201.500	-10.552.300		159.139.230	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					141.649.200	132.685.200	152.201.500	-10.552.300		159.139.230	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	141.649.200	132.685.200	152.201.500	-10.552.300	6 Laporan	159.139.230	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					141.649.200	132.685.200	152.201.500	-10.552.300		159.139.230	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	141.649.200	132.685.200	152.201.500	-10.552.300	6 Laporan	159.139.230	Kec. Dukuh Pakis
	Kelurahan Dukuh Kupang					3.723.979.724	3.723.979.724	3.723.979.724	0		3.874.679.211	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.723.979.724	3.723.979.724	3.723.979.724	0		3.874.679.211	
7,01	KECAMATAN					3.723.979.724	3.723.979.724	3.723.979.724	0		3.874.679.211	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.723.979.724	3.723.979.724	3.723.979.724	0		3.874.679.211	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	79,89%	68,32%	68,32%	3.723.979.724	3.723.979.724	3.723.979.724	0	70,66%	3.874.679.211	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.723.979.724	3.723.979.724	3.723.979.724	0	40%	3.874.679.211	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.447.959.448	7.447.959.448	7.447.959.448	0		7.749.358.422	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Dukuh Kupang					7.447.959.448	7.447.959.448	7.447.959.448	0		7.749.358.422	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.447.959.448	7.447.959.448	7.447.959.448	0	3 Pokmas / Ormas	7.749.358.422	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	7.447.959.448	7.447.959.448	7.447.959.448	0	3 Unit	7.749.358.422	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Dukuh Kupang					7.447.959.448	7.447.959.448	7.447.959.448	0		7.749.358.422	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.447.959.448	7.447.959.448	7.447.959.448	0	3 Pokmas / Ormas	7.749.358.422	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	7.447.959.448	7.447.959.448	7.447.959.448	0	3 Unit	7.749.358.422	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.394.892.531	2.665.699.025	2.665.699.025	-1.270.806.494		1.511.364.842	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.394.892.531	2.665.699.025	2.665.699.025	-1.270.806.494	3 Unit	1.511.364.842	Kelurahan Dukuh Kupang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.329.087.193	1.058.280.699	1.058.280.699	1.270.806.494		2.363.314.369	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.329.087.193	1.058.280.699	1.058.280.699	1.270.806.494	3 Pokmas / Ormas	2.363.314.369	Kelurahan Dukuh Kupang
	Kelurahan Dukuh Pakis					4.338.038.888	4.338.038.888	4.338.038.888	0		4.446.489.854	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.338.038.888	4.338.038.888	4.338.038.888	0		4.446.489.854	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7,01	KECAMATAN					4.338.038.888	4.338.038.888	4.338.038.888	0		4.446.489.854	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.338.038.888	4.338.038.888	4.338.038.888	0		4.446.489.854	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	79,89%	68,32%	68,32%	4.338.038.888	4.338.038.888	4.338.038.888	0	70,66%	4.446.489.854	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.338.038.888	4.338.038.888	4.338.038.888	0	40%	4.446.489.854	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.676.077.776	8.676.077.776	8.676.077.776	0		8.892.979.708	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Dukuh Pakis					8.676.077.776	8.676.077.776	8.676.077.776	0		8.892.979.708	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	8.676.077.776	8.676.077.776	8.676.077.776	0	3 Pokmas / Ormas	8.892.979.708	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	8.676.077.776	8.676.077.776	8.676.077.776	0	3 Unit	8.892.979.708	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Dukuh Pakis					8.676.077.776	8.676.077.776	8.676.077.776	0		8.892.979.708	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	8.676.077.776	8.676.077.776	8.676.077.776	0	3 Pokmas / Ormas	8.892.979.708	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	8.676.077.776	8.676.077.776	8.676.077.776	0	3 Unit	8.892.979.708	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.371.438.888	3.625.309.812	3.625.309.812	-253.870.924		3.455.724.855	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3.371.438.888	3.625.309.812	3.625.309.812	-253.870.924	3 Unit	3.455.724.855	Kelurahan Dukuh Pakis
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					966.600.000	712.729.076	712.729.076	253.870.924		990.764.999	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	966.600.000	712.729.076	712.729.076	253.870.924	3 Pokmas / Ormas	990.764.999	Kelurahan Dukuh Pakis
	Kelurahan Gunungsari					2.918.070.933	2.918.070.933	2.918.070.933	0		2.991.022.702	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.918.070.933	2.918.070.933	2.918.070.933	0		2.991.022.702	
7.01	KECAMATAN					2.918.070.933	2.918.070.933	2.918.070.933	0		2.991.022.702	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.918.070.933	2.918.070.933	2.918.070.933	0		2.991.022.702	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	79,89%	68,32%	68,32%	2.918.070.933	2.918.070.933	2.918.070.933	0	70,66%	2.991.022.702	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.918.070.933	2.918.070.933	2.918.070.933	0	40%	2.991.022.702	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.836.141.866	5.836.141.866	5.836.141.866	0		5.982.045.404	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Gunungsari					5.836.141.866	5.836.141.866	5.836.141.866	0		5.982.045.404	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	5.836.141.866	5.836.141.866	5.836.141.866	0	2 Pokmas / Ormas	5.982.045.404	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	5.836.141.866	5.836.141.866	5.836.141.866	0	3 Unit	5.982.045.404	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Gunungsari					5.836.141.866	5.836.141.866	5.836.141.866	0		5.982.045.404	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	5.836.141.866	5.836.141.866	5.836.141.866	0	2 Pokmas / Ormas	5.982.045.404	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	5.836.141.866	5.836.141.866	5.836.141.866	0	3 Unit	5.982.045.404	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.156.780.683	1.326.938.699	1.326.938.699	-170.158.016		1.185.700.198	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.156.780.683	1.326.938.699	1.326.938.699	-170.158.016	3 Unit	1.185.700.198	Kelurahan Gunungsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.761.290.250	1.591.132.234	1.591.132.234	170.158.016		1.805.322.504	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.761.290.250	1.591.132.234	1.591.132.234	170.158.016	2 Pokmas / Ormas	1.805.322.504	Kelurahan Gunungsari
	Kelurahan Pradah Kalikendal					3.465.867.745	3.465.867.745	3.465.867.745	0		3.552.514.433	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.465.867.745	3.465.867.745	3.465.867.745	0		3.552.514.433	
7,01	KECAMATAN					3.465.867.745	3.465.867.745	3.465.867.745	0		3.552.514.433	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.465.867.745	3.465.867.745	3.465.867.745	0		3.552.514.433	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	79,89%	68,32%	68,32%	3.465.867.745	3.465.867.745	3.465.867.745	0	70,66%	3.552.514.433	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.465.867.745	3.465.867.745	3.465.867.745	0	40%	3.552.514.433	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.931.735.490	6.931.735.490	6.931.735.490	0		7.105.028.866	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Pradah Kalikendal					6.931.735.490	6.931.735.490	6.931.735.490	0		7.105.028.866	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	6.931.735.490	6.931.735.490	6.931.735.490	0	2 Pokmas / Ormas	7.105.028.866	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	6.931.735.490	6.931.735.490	6.931.735.490	0	3 Unit	7.105.028.866	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pradah Kalikendal					6.931.735.490	6.931.735.490	6.931.735.490	0		7.105.028.866	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	6.931.735.490	6.931.735.490	6.931.735.490	0	2 Pokmas / Ormas	7.105.028.866	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	6.931.735.490	6.931.735.490	6.931.735.490	0	3 Unit	7.105.028.866	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.020.943.766	2.199.255.082	2.199.255.082	-178.311.316		2.071.467.357	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	2.020.943.766	2.199.255.082	2.199.255.082	-178.311.316	3 Unit	2.071.467.357	Kelurahan Pradah Kalikendal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.444.923.979	1.266.612.663	1.266.612.663	178.311.316		1.481.047.076	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.444.923.979	1.266.612.663	1.266.612.663	178.311.316	2 Pokmas / Ormas	1.481.047.076	Kelurahan Pradah Kalikendal
	Kec. Gayungan					22.926.005.576	27.571.577.032	29.872.120.965	-6.946.115.389		23.196.869.482	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					22.926.005.576	22.926.005.576	29.872.120.965	-6.946.115.389		23.196.869.482	
7,01	KECAMATAN					22.926.005.576	27.571.577.032	29.872.120.965	-6.946.115.389		23.196.869.482	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.649.386.376	22.671.234.308	24.962.002.241	-2.312.615.865		22.896.250.282	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,53 %	96,50%	97,07%	22.649.386.376	22.671.234.308	24.962.002.241	-2.312.615.865	96,51 %	22.896.250.282	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	2.632.000	-32.000		2.600.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	2.632.000	-32.000		2.600.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	2.632.000	-32.000	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	2.632.000	-32.000		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	2.632.000	-32.000	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Gayungan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.891.139.482	18.891.139.482	21.056.621.918	-2.165.482.436		19.036.869.215	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					18.891.139.482	18.891.139.482	21.056.621.918	-2.165.482.436		19.036.869.215	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	73 Orang/bulan	55 Orang/bulan	18.891.139.482	18.891.139.482	21.056.621.918	-2.165.482.436	87 Orang/bulan	19.036.869.215	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					18.891.139.482	18.891.139.482	21.056.621.918	-2.165.482.436		19.036.869.215	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	73 Orang/bulan	55 Orang/bulan	18.891.139.482	18.891.139.482	21.056.621.918	-2.165.482.436	87 Orang/bulan	19.036.869.215	Kec. Gayungan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.660.374.894	3.662.435.131	3.787.720.628	-127.345.734		3.761.509.067	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					3.660.374.894	3.662.435.131	3.787.720.628	-127.345.734		3.761.509.067	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	3.660.374.894	3.662.435.131	3.787.720.628	-127.345.734	10 Paket	3.761.509.067	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3.660.374.894	3.662.435.131	3.787.720.628	-127.345.734		3.761.509.067	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	3.660.374.894	3.662.435.131	3.787.720.628	-127.345.734	10 Paket	3.761.509.067	Kec. Gayungan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.272.000	113.727.695	115.027.695	-19.755.695		95.272.000	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					95.272.000	113.727.695	115.027.695	-19.755.695		95.272.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	95.272.000	113.727.695	115.027.695	-19.755.695	5 Unit	95.272.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					95.272.000	113.727.695	115.027.695	-19.755.695		95.272.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	95.272.000	113.727.695	115.027.695	-19.755.695	5 Unit	95.272.000	Kec. Gayungan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					130.677.600	136.078.724	136.078.724	-5.401.124		130.677.600	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	130.677.600	136.078.724	136.078.724	-5.401.124	100%	130.677.600	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					130.677.600	136.078.724	136.078.724	-5.401.124		130.677.600	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					130.677.600	136.078.724	136.078.724	-5.401.124		130.677.600	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	130.677.600	136.078.724	136.078.724	-5.401.124	12 Laporan	130.677.600	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					130.677.600	136.078.724	136.078.724	-5.401.124		130.677.600	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	130.677.600	136.078.724	136.078.724	-5.401.124	12 Laporan	130.677.600	Kec. Gayungan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	4.596.751.200	4.596.751.200	-4.596.751.200		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	0	4.596.751.200	4.596.751.200	-4.596.751.200	75%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	4.596.751.200	4.596.751.200	-4.596.751.200	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	4.596.751.200	4.596.751.200	-4.596.751.200		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	4.596.751.200	4.596.751.200	-4.596.751.200		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	8520 Keluarga	8520 Keluarga	8380 Keluarga	0	4.596.751.200	4.596.751.200	-4.596.751.200	8520 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	150 Keluarga	150 Keluarga	150 Keluarga	0	4.596.751.200	4.596.751.200	-4.596.751.200	150 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	4.596.751.200	4.596.751.200	-4.596.751.200		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	8520 Keluarga	8520 Keluarga	8380 Keluarga	0	4.596.751.200	4.596.751.200	-4.596.751.200	8520 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	150 Keluarga	150 Keluarga	150 Keluarga	0	4.596.751.200	4.596.751.200	-4.596.751.200	150 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	3.546.751.200	3.546.751.200	-3.546.751.200		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	8520 Keluarga	8520 Keluarga	8380 Keluarga	0	3.546.751.200	3.546.751.200	-3.546.751.200	8520 Keluarga	12.000.000	Kec. Gayungan
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.050.000.000	1.050.000.000	-1.050.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	150 Keluarga	150 Keluarga	150 Keluarga	0	1.050.000.000	1.050.000.000	-1.050.000.000	150 Keluarga	12.000.000	Kec. Gayungan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					145.941.600	167.512.800	177.288.800	-31.347.200		145.941.600	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	145.941.600	167.512.800	177.288.800	-31.347.200	100%	145.941.600	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					145.941.600	167.512.800	177.288.800	-31.347.200		145.941.600	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					145.941.600	167.512.800	177.288.800	-31.347.200		145.941.600	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	145.941.600	167.512.800	177.288.800	-31.347.200	12 Laporan	145.941.600	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					145.941.600	167.512.800	177.288.800	-31.347.200		145.941.600	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	145.941.600	167.512.800	177.288.800	-31.347.200	12 Laporan	145.941.600	Kec. Gayungan
	Kelurahan Dukuh Menanggal					3.955.927.966	2.653.618.076	2.653.618.076	1.302.309.890		4.030.826.159	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.955.927.966	3.955.927.966	2.653.618.076	1.302.309.890		4.030.826.159	
7,01	KECAMATAN					3.955.927.966	2.653.618.076	2.653.618.076	1.302.309.890		4.030.826.159	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.955.927.966	2.653.618.076	2.653.618.076	1.302.309.890		4.030.826.159	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.955.927.966	2.653.618.076	2.653.618.076	1.302.309.890	75%	4.030.826.159	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.955.927.966	2.653.618.076	2.653.618.076	1.302.309.890	40%	4.030.826.159	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.911.855.932	5.307.236.152	5.307.236.152	2.604.619.780		8.061.652.318	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Dukuh Menanggal					7.911.855.932	5.307.236.152	5.307.236.152	2.604.619.780		8.061.652.318	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.911.855.932	5.307.236.152	5.307.236.152	2.604.619.780	2 Pokmas / Ormas	8.061.652.318	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	7.911.855.932	5.307.236.152	5.307.236.152	2.604.619.780	9 Unit	8.061.652.318	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Dukuh Menanggal					7.911.855.932	5.307.236.152	5.307.236.152	2.604.619.780		8.061.652.318	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.911.855.932	5.307.236.152	5.307.236.152	2.604.619.780	2 Pokmas / Ormas	8.061.652.318	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	7.911.855.932	5.307.236.152	5.307.236.152	2.604.619.780	9 Unit	8.061.652.318	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.668.570.417	1.976.158.923	1.976.158.923	692.411.494		2.735.284.673	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	2.668.570.417	1.976.158.923	1.976.158.923	692.411.494	9 Unit	2.735.284.673	Kelurahan Dukuh Menanggal

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.287.357.549	677.459.153	677.459.153	609.898.396		1.295.541.486	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.287.357.549	677.459.153	677.459.153	609.898.396	2 Pokmas / Ormas	1.295.541.486	Kelurahan Dukuh Menanggal
	Kelurahan Gayungan					4.182.662.046	4.182.662.046	4.182.662.046	0		4.297.728.591	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.182.662.046	4.182.662.046	4.182.662.046	0		4.297.728.591	
7,01	KECAMATAN					4.182.662.046	4.182.662.046	4.182.662.046	0		4.297.728.591	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.182.662.046	4.182.662.046	4.182.662.046	0		4.297.728.591	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	4.182.662.046	4.182.662.046	4.182.662.046	0	75%	4.297.728.591	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.182.662.046	4.182.662.046	4.182.662.046	0	40%	4.297.728.591	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.365.324.092	8.365.324.092	8.365.324.092	0		8.595.457.182	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Gayungan					8.365.324.092	8.365.324.092	8.365.324.092	0		8.595.457.182	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.365.324.092	8.365.324.092	8.365.324.092	0	2 Pokmas / Ormas	8.595.457.182	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	8.365.324.092	8.365.324.092	8.365.324.092	0	7 Unit	8.595.457.182	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Gayungan					8.365.324.092	8.365.324.092	8.365.324.092	0		8.595.457.182	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.365.324.092	8.365.324.092	8.365.324.092	0	2 Pokmas / Ormas	8.595.457.182	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	8.365.324.092	8.365.324.092	8.365.324.092	0	7 Unit	8.595.457.182	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.137.866.558	3.061.802.443	3.061.802.443	-923.935.885		2.201.813.219	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	2.137.866.558	3.061.802.443	3.061.802.443	-923.935.885	7 Unit	2.201.813.219	Kelurahan Gayungan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.044.795.488	1.120.859.603	1.120.859.603	923.935.885		2.095.915.372	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2.044.795.488	1.120.859.603	1.120.859.603	923.935.885	2 Pokmas / Ormas	2.095.915.372	Kelurahan Gayungan
	Kelurahan Ketintang					2.788.070.147	4.843.708.109	4.843.708.109	-2.055.637.962		2.857.771.896	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.788.070.147	2.788.070.147	4.843.708.109	-2.055.637.962		2.857.771.896	
7,01	KECAMATAN					2.788.070.147	4.843.708.109	4.843.708.109	-2.055.637.962		2.857.771.896	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.788.070.147	4.843.708.109	4.843.708.109	-2.055.637.962		2.857.771.896	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	2.788.070.147	4.843.708.109	4.843.708.109	-2.055.637.962	75%	2.857.771.896	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.788.070.147	4.843.708.109	4.843.708.109	-2.055.637.962	40%	2.857.771.896	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.576.140.294	9.687.416.218	9.687.416.218	-4.111.275.924		5.715.543.792	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Ketintang					5.576.140.294	9.687.416.218	9.687.416.218	-4.111.275.924		5.715.543.792	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.576.140.294	9.687.416.218	9.687.416.218	-4.111.275.924	2 Pokmas / Ormas	5.715.543.792	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	5.576.140.294	9.687.416.218	9.687.416.218	-4.111.275.924	8 Unit	5.715.543.792	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Ketintang					5.576.140.294	9.687.416.218	9.687.416.218	-4.111.275.924		5.715.543.792	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.576.140.294	9.687.416.218	9.687.416.218	-4.111.275.924	2 Pokmas / Ormas	5.715.543.792	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	5.576.140.294	9.687.416.218	9.687.416.218	-4.111.275.924	8 Unit	5.715.543.792	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.627.210.102	3.752.257.569	3.752.257.569	-2.125.047.467		1.667.890.352	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.627.210.102	3.752.257.569	3.752.257.569	-2.125.047.467	8 Unit	1.667.890.352	Kelurahan Ketintang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.160.860.045	1.091.450.540	1.091.450.540	69.409.505		1.189.881.544	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.160.860.045	1.091.450.540	1.091.450.540	69.409.505	2 Pokmas / Ormas	1.189.881.544	Kelurahan Ketintang
	Kelurahan Menanggal					3.078.555.666	2.325.227.594	2.325.227.594	753.328.072		3.155.519.553	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.078.555.666	3.078.555.666	2.325.227.594	753.328.072		3.155.519.553	
7,01	KECAMATAN					3.078.555.666	2.325.227.594	2.325.227.594	753.328.072		3.155.519.553	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.078.555.666	2.325.227.594	2.325.227.594	753.328.072		3.155.519.553	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.078.555.666	2.325.227.594	2.325.227.594	753.328.072	75%	3.155.519.553	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.078.555.666	2.325.227.594	2.325.227.594	753.328.072	40%	3.155.519.553	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.157.111.332	4.650.455.188	4.650.455.188	1.506.656.144		6.311.039.106	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Menanggal					6.157.111.332	4.650.455.188	4.650.455.188	1.506.656.144		6.311.039.106	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.157.111.332	4.650.455.188	4.650.455.188	1.506.656.144	2 Pokmas / Ormas	6.311.039.106	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6.157.111.332	4.650.455.188	4.650.455.188	1.506.656.144	6 Unit	6.311.039.106	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Menanggal					6.157.111.332	4.650.455.188	4.650.455.188	1.506.656.144		6.311.039.106	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.157.111.332	4.650.455.188	4.650.455.188	1.506.656.144	2 Pokmas / Ormas	6.311.039.106	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6.157.111.332	4.650.455.188	4.650.455.188	1.506.656.144	6 Unit	6.311.039.106	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.485.895.632	1.485.895.632	1.485.895.632	0		1.523.043.021	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.485.895.632	1.485.895.632	1.485.895.632	0	6 Unit	1.523.043.021	Kelurahan Menanggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.592.660.034	839.331.962	839.331.962	753.328.072		1.632.476.532	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.592.660.034	839.331.962	839.331.962	753.328.072	2 Pokmas / Ormas	1.632.476.532	Kelurahan Menanggal
	Kec. Genteng					25.021.847.342	31.691.731.446	34.454.129.288	-9.432.281.946		25.329.576.236	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					25.021.847.342	25.021.847.342	34.454.129.288	-9.432.281.946		25.329.576.236	
7,01	KECAMATAN					25.021.847.342	31.691.731.446	34.454.129.288	-9.432.281.946		25.329.576.236	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.574.215.182	24.674.975.334	27.480.621.315	-2.906.406.133		24.854.093.516	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,78%	97,70%	98,80%	24.574.215.182	24.674.975.334	27.480.621.315	-2.906.406.133	97,72%	24.854.093.516	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.665.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.665.000	Kec. Genteng
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19.750.082.181	19.750.082.181	22.308.353.249	-2.558.271.068		19.901.416.923	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					19.750.082.181	19.750.082.181	22.308.353.249	-2.558.271.068		19.901.416.923	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	54 Orang/bulan	19.750.082.181	19.750.082.181	22.308.353.249	-2.558.271.068	60 Orang/bulan	19.901.416.923	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					19.750.082.181	19.750.082.181	22.308.353.249	-2.558.271.068		19.901.416.923	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	54 Orang/bulan	19.750.082.181	19.750.082.181	22.308.353.249	-2.558.271.068	60 Orang/bulan	19.901.416.923	Kec. Genteng
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.724.408.001	4.814.943.131	5.068.648.754	-344.240.753		4.822.208.870	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					4.724.408.001	4.814.943.131	5.068.648.754	-344.240.753		4.822.208.870	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	2 Paket	2 Paket	4.724.408.001	4.814.943.131	5.068.648.754	-344.240.753	11 Paket	4.822.208.870	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.724.408.001	4.814.943.131	5.068.648.754	-344.240.753		4.822.208.870	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	2 Paket	2 Paket	4.724.408.001	4.814.943.131	5.068.648.754	-344.240.753	11 Paket	4.822.208.870	Kec. Genteng
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					97.125.000	106.006.022	99.675.312	-2.550.312		127.802.723	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					97.125.000	106.006.022	99.675.312	-2.550.312		127.802.723	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	97.125.000	106.006.022	99.675.312	-2.550.312	5 Unit	127.802.723	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					97.125.000	106.006.022	99.675.312	-2.550.312		127.802.723	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	97.125.000	106.006.022	99.675.312	-2.550.312	5 Unit	127.802.723	Kec. Genteng
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					318.860.160	262.966.912	259.367.517	59.492.643		322.710.720	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	318.860.160	262.966.912	259.367.517	59.492.643	100%	322.710.720	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					318.860.160	262.966.912	259.367.517	59.492.643		322.710.720	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					318.860.160	262.966.912	259.367.517	59.492.643		322.710.720	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	318.860.160	262.966.912	259.367.517	59.492.643	12 Laporan	322.710.720	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					318.860.160	262.966.912	259.367.517	59.492.643		322.710.720	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	318.860.160	262.966.912	259.367.517	59.492.643	12 Laporan	322.710.720	Kec. Genteng
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	6.621.344.000	6.562.090.400	-6.562.090.400		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	0	6.621.344.000	6.562.090.400	-6.562.090.400	75%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	6.621.344.000	6.562.090.400	-6.562.090.400	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	6.621.344.000	6.562.090.400	-6.562.090.400		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	6.621.344.000	6.562.090.400	-6.562.090.400		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10740 Keluarga	10740 Keluarga	10740 Keluarga	0	6.621.344.000	6.562.090.400	-6.562.090.400	10740 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	305 Keluarga	305 Keluarga	305 Keluarga	0	6.621.344.000	6.562.090.400	-6.562.090.400	305 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	6.621.344.000	6.562.090.400	-6.562.090.400		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10740 Keluarga	10740 Keluarga	10740 Keluarga	0	6.621.344.000	6.562.090.400	-6.562.090.400	10740 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	305 Keluarga	305 Keluarga	305 Keluarga	0	6.621.344.000	6.562.090.400	-6.562.090.400	305 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	4.486.344.000	4.427.090.400	-4.427.090.400		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10740 Keluarga	10740 Keluarga	10740 Keluarga	0	4.486.344.000	4.427.090.400	-4.427.090.400	10740 Keluarga	12.000.000	Kec. Genteng
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	2.135.000.000	2.135.000.000	-2.135.000.000		12.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	305 Keluarga	305 Keluarga	305 Keluarga	0	2.135.000.000	2.135.000.000	-2.135.000.000	305 Keluarga	12.000.000	Kec. Genteng
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					128.772.000	132.445.200	152.050.056	-23.278.056		128.772.000	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	128.772.000	132.445.200	152.050.056	-23.278.056	100%	128.772.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					128.772.000	132.445.200	152.050.056	-23.278.056		128.772.000	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					128.772.000	132.445.200	152.050.056	-23.278.056		128.772.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	128.772.000	132.445.200	152.050.056	-23.278.056	12 Laporan	128.772.000	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					128.772.000	132.445.200	152.050.056	-23.278.056		128.772.000	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	128.772.000	132.445.200	152.050.056	-23.278.056	12 Laporan	128.772.000	Kec. Genteng
	Kelurahan Embong Kaliasin					3.587.949.265	3.587.949.265	3.587.949.265	0		3.653.647.991	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.587.949.265	3.587.949.265	3.587.949.265	0		3.653.647.991	
7.01	KECAMATAN					3.587.949.265	3.587.949.265	3.587.949.265	0		3.653.647.991	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.587.949.265	3.587.949.265	3.587.949.265	0		3.653.647.991	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.587.949.265	3.587.949.265	3.587.949.265	0	75%	3.653.647.991	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.587.949.265	3.587.949.265	3.587.949.265	0	40%	3.653.647.991	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.175.898.530	7.175.898.530	7.175.898.530	0		7.307.295.982	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Embong Kaliasin					7.175.898.530	7.175.898.530	7.175.898.530	0		7.307.295.982	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.175.898.530	7.175.898.530	7.175.898.530	0	2 Pokmas / Ormas	7.307.295.982	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	7.175.898.530	7.175.898.530	7.175.898.530	0	5 Unit	7.307.295.982	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Embong Kaliasin					7.175.898.530	7.175.898.530	7.175.898.530	0		7.307.295.982	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.175.898.530	7.175.898.530	7.175.898.530	0	2 Pokmas / Ormas	7.307.295.982	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	7.175.898.530	7.175.898.530	7.175.898.530	0	5 Unit	7.307.295.982	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.780.988.714	2.410.612.292	2.348.061.875	-567.073.161		1.825.513.429	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1.780.988.714	2.410.612.292	2.348.061.875	-567.073.161	5 Unit	1.825.513.429	Kelurahan Embong Kaliasin
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.806.960.551	1.177.336.973	1.239.887.390	567.073.161		1.828.134.562	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.806.960.551	1.177.336.973	1.239.887.390	567.073.161	2 Pokmas / Ormas	1.828.134.562	Kelurahan Embong Kaliasin
	Kelurahan Genteng					2.628.654.400	2.628.654.400	2.628.654.400	0		2.694.370.757	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.628.654.400	2.628.654.400	2.628.654.400	0		2.694.370.757	
7,01	KECAMATAN					2.628.654.400	2.628.654.400	2.628.654.400	0		2.694.370.757	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.628.654.400	2.628.654.400	2.628.654.400	0		2.694.370.757	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	2.628.654.400	2.628.654.400	2.628.654.400	0	75%	2.694.370.757	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.628.654.400	2.628.654.400	2.628.654.400	0	40%	2.694.370.757	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.257.308.800	5.257.308.800	5.257.308.800	0		5.388.741.514	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Genteng					5.257.308.800	5.257.308.800	5.257.308.800	0		5.388.741.514	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.257.308.800	5.257.308.800	5.257.308.800	0	2 Pokmas / Ormas	5.388.741.514	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5.257.308.800	5.257.308.800	5.257.308.800	0	4 Unit	5.388.741.514	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Genteng					5.257.308.800	5.257.308.800	5.257.308.800	0		5.388.741.514	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.257.308.800	5.257.308.800	5.257.308.800	0	2 Pokmas / Ormas	5.388.741.514	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5.257.308.800	5.257.308.800	5.257.308.800	0	4 Unit	5.388.741.514	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.231.396.576	1.444.130.895	1.444.130.895	-212.734.319		1.262.181.489	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.231.396.576	1.444.130.895	1.444.130.895	-212.734.319	4 Unit	1.262.181.489	Kelurahan Genteng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.397.257.824	1.184.523.505	1.184.523.505	212.734.319		1.432.189.268	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.397.257.824	1.184.523.505	1.184.523.505	212.734.319	2 Pokmas / Ormas	1.432.189.268	Kelurahan Genteng
	Kelurahan Kapasari					3.347.545.715	3.347.545.715	3.347.545.715	0		3.431.234.352	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.347.545.715	3.347.545.715	3.347.545.715	0		3.431.234.352	
7,01	KECAMATAN					3.347.545.715	3.347.545.715	3.347.545.715	0		3.431.234.352	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.347.545.715	3.347.545.715	3.347.545.715	0		3.431.234.352	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.347.545.715	3.347.545.715	3.347.545.715	0	75%	3.431.234.352	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.347.545.715	3.347.545.715	3.347.545.715	0	40%	3.431.234.352	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.695.091.430	6.695.091.430	6.695.091.430	0		6.862.468.704	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kapasari					6.695.091.430	6.695.091.430	6.695.091.430	0		6.862.468.704	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.695.091.430	6.695.091.430	6.695.091.430	0	2 Pokmas / Ormas	6.862.468.704	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	6.695.091.430	6.695.091.430	6.695.091.430	0	4 Unit	6.862.468.704	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kapasari					6.695.091.430	6.695.091.430	6.695.091.430	0		6.862.468.704	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.695.091.430	6.695.091.430	6.695.091.430	0	2 Pokmas / Ormas	6.862.468.704	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	6.695.091.430	6.695.091.430	6.695.091.430	0	4 Unit	6.862.468.704	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.413.039.463	1.904.243.703	1.904.243.703	-491.204.240		1.448.365.447	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.413.039.463	1.904.243.703	1.904.243.703	-491.204.240	4 Unit	1.448.365.447	Kelurahan Kapasari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.934.506.252	1.443.302.012	1.443.302.012	491.204.240		1.982.868.905	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.934.506.252	1.443.302.012	1.443.302.012	491.204.240	2 Pokmas / Ormas	1.982.868.905	Kelurahan Kapasari
	Kelurahan Ketabang					2.754.922.629	2.754.922.629	2.754.922.629	0		2.823.795.690	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.754.922.629	2.754.922.629	2.754.922.629	0		2.823.795.690	
7,01	KECAMATAN					2.754.922.629	2.754.922.629	2.754.922.629	0		2.823.795.690	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.754.922.629	2.754.922.629	2.754.922.629	0		2.823.795.690	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	2.754.922.629	2.754.922.629	2.754.922.629	0	75%	2.823.795.690	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.754.922.629	2.754.922.629	2.754.922.629	0	40%	2.823.795.690	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.509.845.258	5.509.845.258	5.509.845.258	0		5.647.591.380	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Ketabang					5.509.845.258	5.509.845.258	5.509.845.258	0		5.647.591.380	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.509.845.258	5.509.845.258	5.509.845.258	0	2 Pokmas / Ormas	5.647.591.380	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5.509.845.258	5.509.845.258	5.509.845.258	0	5 Unit	5.647.591.380	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Ketabang					5.509.845.258	5.509.845.258	5.509.845.258	0		5.647.591.380	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.509.845.258	5.509.845.258	5.509.845.258	0	2 Pokmas / Ormas	5.647.591.380	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5.509.845.258	5.509.845.258	5.509.845.258	0	5 Unit	5.647.591.380	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.147.642.354	1.652.121.200	1.781.276.508	-633.634.154		1.176.333.411	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1.147.642.354	1.652.121.200	1.781.276.508	-633.634.154	5 Unit	1.176.333.411	Kelurahan Ketabang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.607.280.275	1.102.801.429	973.646.121	633.634.154		1.647.462.279	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.607.280.275	1.102.801.429	973.646.121	633.634.154	2 Pokmas / Ormas	1.647.462.279	Kelurahan Ketabang
	Kelurahan Peneleh					3.425.647.693	3.425.647.693	3.425.647.693	0		3.535.288.880	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.425.647.693	3.425.647.693	3.425.647.693	0		3.535.288.880	
7,01	KECAMATAN					3.425.647.693	3.425.647.693	3.425.647.693	0		3.535.288.880	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.425.647.693	3.425.647.693	3.425.647.693	0		3.535.288.880	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.425.647.693	3.425.647.693	3.425.647.693	0	75%	3.535.288.880	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.425.647.693	3.425.647.693	3.425.647.693	0	40%	3.535.288.880	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.851.295.386	6.851.295.386	6.851.295.386	0		7.070.577.760	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Peneleh					6.851.295.386	6.851.295.386	6.851.295.386	0		7.070.577.760	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.851.295.386	6.851.295.386	6.851.295.386	0	2 Pokmas / Ormas	7.070.577.760	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	6.851.295.386	6.851.295.386	6.851.295.386	0	4 Unit	7.070.577.760	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Peneleh					6.851.295.386	6.851.295.386	6.851.295.386	0		7.070.577.760	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.851.295.386	6.851.295.386	6.851.295.386	0	2 Pokmas / Ormas	7.070.577.760	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	6.851.295.386	6.851.295.386	6.851.295.386	0	4 Unit	7.070.577.760	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.175.081.165	2.002.999.813	2.002.999.813	-827.918.648		1.228.458.192	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.175.081.165	2.002.999.813	2.002.999.813	-827.918.648	4 Unit	1.228.458.192	Kelurahan Peneleh
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.250.566.528	1.422.647.880	1.422.647.880	827.918.648		2.306.830.688	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2.250.566.528	1.422.647.880	1.422.647.880	827.918.648	2 Pokmas / Ormas	2.306.830.688	Kelurahan Peneleh
	Kec. Gubeng					28.185.135.246	40.290.150.710	41.444.559.469	-13.259.424.223		28.536.449.769	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					28.185.135.246	28.185.135.246	41.444.559.469	-13.259.424.223		28.536.449.769	
7,01	KECAMATAN					28.185.135.246	40.290.150.710	41.444.559.469	-13.259.424.223		28.536.449.769	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.765.984.846	27.679.582.025	28.833.990.784	-1.068.005.938		28.084.506.969	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,82 %	96,61%	97,33%	27.765.984.846	27.679.582.025	28.833.990.784	-1.068.005.938	96,67 %	28.084.506.969	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.665.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.665.000	Kec. Gubeng

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					21.802.841.459	21.802.841.459	22.612.114.731	-809.273.272		21.969.848.605	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					21.802.841.459	21.802.841.459	22.612.114.731	-809.273.272		21.969.848.605	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	56 Orang/bulan	54 Orang/bulan	21.802.841.459	21.802.841.459	22.612.114.731	-809.273.272	53 Orang/bulan	21.969.848.605	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					21.802.841.459	21.802.841.459	22.612.114.731	-809.273.272		21.969.848.605	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	56 Orang/bulan	54 Orang/bulan	21.802.841.459	21.802.841.459	22.612.114.731	-809.273.272	53 Orang/bulan	21.969.848.605	Kec. Gubeng
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					5.818.918.387	5.766.480.022	6.111.615.509	-292.697.122		5.955.406.864	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					5.818.918.387	5.766.480.022	6.111.615.509	-292.697.122		5.955.406.864	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	5.818.918.387	5.766.480.022	6.111.615.509	-292.697.122	6 Paket	5.955.406.864	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.818.918.387	5.766.480.022	6.111.615.509	-292.697.122		5.955.406.864	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	5.818.918.387	5.766.480.022	6.111.615.509	-292.697.122	6 Paket	5.955.406.864	Kec. Gubeng
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					141.625.000	106.316.544	106.316.544	35.308.456		156.586.500	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					141.625.000	106.316.544	106.316.544	35.308.456		156.586.500	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	141.625.000	106.316.544	106.316.544	35.308.456	5 Unit	156.586.500	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					141.625.000	106.316.544	106.316.544	35.308.456		156.586.500	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	141.625.000	106.316.544	106.316.544	35.308.456	5 Unit	156.586.500	Kec. Gubeng
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					230.284.800	236.964.331	236.964.331	-6.679.531		234.784.800	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	230.284.800	236.964.331	236.964.331	-6.679.531	100%	234.784.800	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					230.284.800	236.964.331	236.964.331	-6.679.531		234.784.800	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					230.284.800	236.964.331	236.964.331	-6.679.531		234.784.800	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	230.284.800	236.964.331	236.964.331	-6.679.531	12 Laporan	234.784.800	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					230.284.800	236.964.331	236.964.331	-6.679.531		234.784.800	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	230.284.800	236.964.331	236.964.331	-6.679.531	12 Laporan	234.784.800	Kec. Gubeng
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	12.223.239.200	12.223.239.200	-12.223.239.200		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	0	12.223.239.200	12.223.239.200	-12.223.239.200	100%	24.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	12.223.239.200	12.223.239.200	-12.223.239.200	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	12.223.239.200	12.223.239.200	-12.223.239.200		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	12.223.239.200	12.223.239.200	-12.223.239.200		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25000 Keluarga	25000 Keluarga	24580 Keluarga	0	12.223.239.200	12.223.239.200	-12.223.239.200	25000 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	260 Keluarga	260 Keluarga	260 Keluarga	0	12.223.239.200	12.223.239.200	-12.223.239.200	260 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	12.223.239.200	12.223.239.200	-12.223.239.200		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25000 Keluarga	25000 Keluarga	24580 Keluarga	0	12.223.239.200	12.223.239.200	-12.223.239.200	25000 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	260 Keluarga	260 Keluarga	260 Keluarga	0	12.223.239.200	12.223.239.200	-12.223.239.200	260 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	10.403.239.200	10.403.239.200	-10.403.239.200		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25000 Keluarga	25000 Keluarga	24580 Keluarga	0	10.403.239.200	10.403.239.200	-10.403.239.200	25000 Keluarga	12.000.000	Kec. Gubeng
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.820.000.000	1.820.000.000	-1.820.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	260 Keluarga	260 Keluarga	260 Keluarga	0	1.820.000.000	1.820.000.000	-1.820.000.000	260 Keluarga	12.000.000	Kec. Gubeng
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					188.865.600	150.365.154	150.365.154	38.500.446		193.158.000	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	188.865.600	150.365.154	150.365.154	38.500.446	100%	193.158.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					188.865.600	150.365.154	150.365.154	38.500.446		193.158.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					188.865.600	150.365.154	150.365.154	38.500.446		193.158.000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	188.865.600	150.365.154	150.365.154	38.500.446	12 Laporan	193.158.000	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					188.865.600	150.365.154	150.365.154	38.500.446		193.158.000	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	188.865.600	150.365.154	150.365.154	38.500.446	12 Laporan	193.158.000	Kec. Gubeng
	Kelurahan Airlangga					3.787.247.745	3.787.247.745	3.787.247.745	0		3.857.928.932	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.787.247.745	3.787.247.745	3.787.247.745	0		3.857.928.932	
7,01	KECAMATAN					3.787.247.745	3.787.247.745	3.787.247.745	0		3.857.928.932	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.787.247.745	3.787.247.745	3.787.247.745	0		3.857.928.932	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.787.247.745	3.787.247.745	3.787.247.745	0	100%	3.857.928.932	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.787.247.745	3.787.247.745	3.787.247.745	0	40%	3.857.928.932	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.574.495.490	7.574.495.490	7.574.495.490	0		7.715.857.864	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Airlangga					7.574.495.490	7.574.495.490	7.574.495.490	0		7.715.857.864	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.574.495.490	7.574.495.490	7.574.495.490	0	2 Pokmas / Ormas	7.715.857.864	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	6 Unit	7.574.495.490	7.574.495.490	7.574.495.490	0	1 Unit	7.715.857.864	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Airlangga					7.574.495.490	7.574.495.490	7.574.495.490	0		7.715.857.864	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.574.495.490	7.574.495.490	7.574.495.490	0	2 Pokmas / Ormas	7.715.857.864	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	6 Unit	7.574.495.490	7.574.495.490	7.574.495.490	0	1 Unit	7.715.857.864	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.120.447.745	2.700.219.173	2.700.219.173	-579.771.428		2.173.458.935	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	6 Unit	2.120.447.745	2.700.219.173	2.700.219.173	-579.771.428	1 Unit	2.173.458.935	Kelurahan Airlangga
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.666.800.000	1.087.028.572	1.087.028.572	579.771.428		1.684.469.997	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.666.800.000	1.087.028.572	1.087.028.572	579.771.428	2 Pokmas / Ormas	1.684.469.997	Kelurahan Airlangga
	Kelurahan Baratajaya					3.435.321.710	3.435.321.710	3.435.321.710	0		3.628.694.748	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.435.321.710	3.435.321.710	3.435.321.710	0		3.628.694.748	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7,01	KECAMATAN					3.435.321.710	3.435.321.710	3.435.321.710	0		3.628.694.748	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.435.321.710	3.435.321.710	3.435.321.710	0		3.628.694.748	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.435.321.710	3.435.321.710	3.435.321.710	0	100%	3.628.694.748	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.435.321.710	3.435.321.710	3.435.321.710	0	40%	3.628.694.748	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.870.643.420	6.870.643.420	6.870.643.420	0		7.257.389.496	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Baratajaya					6.870.643.420	6.870.643.420	6.870.643.420	0		7.257.389.496	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	6.870.643.420	6.870.643.420	6.870.643.420	0	2 Pokmas / Ormas	7.257.389.496	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6.870.643.420	6.870.643.420	6.870.643.420	0	1 Unit	7.257.389.496	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Baratajaya					6.870.643.420	6.870.643.420	6.870.643.420	0		7.257.389.496	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	6.870.643.420	6.870.643.420	6.870.643.420	0	2 Pokmas / Ormas	7.257.389.496	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6.870.643.420	6.870.643.420	6.870.643.420	0	1 Unit	7.257.389.496	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.464.160.718	1.979.544.749	1.979.544.749	-515.384.031		1.608.254.734	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.464.160.718	1.979.544.749	1.979.544.749	-515.384.031	1 Unit	1.608.254.734	Kelurahan Baratajaya
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.971.160.992	1.455.776.961	1.455.776.961	515.384.031		2.020.440.014	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.971.160.992	1.455.776.961	1.455.776.961	515.384.031	2 Pokmas / Ormas	2.020.440.014	Kelurahan Baratajaya
	Kelurahan Gubeng					2.786.878.548	2.786.878.548	2.786.878.548	0		2.856.550.507	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.786.878.548	2.786.878.548	2.786.878.548	0		2.856.550.507	
7.01	KECAMATAN					2.786.878.548	2.786.878.548	2.786.878.548	0		2.856.550.507	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.786.878.548	2.786.878.548	2.786.878.548	0		2.856.550.507	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	2.786.878.548	2.786.878.548	2.786.878.548	0	100%	2.856.550.507	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.786.878.548	2.786.878.548	2.786.878.548	0	40%	2.856.550.507	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.573.757.096	5.573.757.096	5.573.757.096	0		5.713.101.014	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Gubeng					5.573.757.096	5.573.757.096	5.573.757.096	0		5.713.101.014	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	5.573.757.096	5.573.757.096	5.573.757.096	0	3 Pokmas / Ormas	5.713.101.014	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.573.757.096	5.573.757.096	5.573.757.096	0	1 Unit	5.713.101.014	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Gubeng					5.573.757.096	5.573.757.096	5.573.757.096	0		5.713.101.014	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	5.573.757.096	5.573.757.096	5.573.757.096	0	3 Pokmas / Ormas	5.713.101.014	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.573.757.096	5.573.757.096	5.573.757.096	0	1 Unit	5.713.101.014	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.760.398.548	2.013.909.719	2.013.909.719	-253.511.171		1.804.408.509	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.760.398.548	2.013.909.719	2.013.909.719	-253.511.171	1 Unit	1.804.408.509	Kelurahan Gubeng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.026.480.000	772.968.829	772.968.829	253.511.171		1.052.141.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.026.480.000	772.968.829	772.968.829	253.511.171	3 Pokmas / Ormas	1.052.141.998	Kelurahan Gubeng
	Kelurahan Kertajaya					4.080.231.358	4.080.231.358	4.080.231.358	0		4.182.237.136	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.080.231.358	4.080.231.358	4.080.231.358	0		4.182.237.136	
7,01	KECAMATAN					4.080.231.358	4.080.231.358	4.080.231.358	0		4.182.237.136	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.080.231.358	4.080.231.358	4.080.231.358	0		4.182.237.136	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	4.080.231.358	4.080.231.358	4.080.231.358	0	100%	4.182.237.136	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.080.231.358	4.080.231.358	4.080.231.358	0	40%	4.182.237.136	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.160.462.716	8.160.462.716	8.160.462.716	0		8.364.474.272	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kertajaya					8.160.462.716	8.160.462.716	8.160.462.716	0		8.364.474.272	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	8.160.462.716	8.160.462.716	8.160.462.716	0	3 Pokmas / Ormas	8.364.474.272	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	8.160.462.716	8.160.462.716	8.160.462.716	0	1 Unit	8.364.474.272	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kertajaya					8.160.462.716	8.160.462.716	8.160.462.716	0		8.364.474.272	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	8.160.462.716	8.160.462.716	8.160.462.716	0	3 Pokmas / Ormas	8.364.474.272	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	8.160.462.716	8.160.462.716	8.160.462.716	0	1 Unit	8.364.474.272	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.132.271.358	2.881.828.134	2.881.828.134	-749.556.776		2.185.578.139	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.132.271.358	2.881.828.134	2.881.828.134	-749.556.776	1 Unit	2.185.578.139	Kelurahan Kertajaya
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.947.960.000	1.198.403.224	1.198.403.224	749.556.776		1.996.658.997	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.947.960.000	1.198.403.224	1.198.403.224	749.556.776	3 Pokmas / Ormas	1.996.658.997	Kelurahan Kertajaya
	Kelurahan Mojo					4.930.555.626	4.930.555.626	4.930.555.626	0		5.053.819.509	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.930.555.626	4.930.555.626	4.930.555.626	0		5.053.819.509	
7,01	KECAMATAN					4.930.555.626	4.930.555.626	4.930.555.626	0		5.053.819.509	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.930.555.626	4.930.555.626	4.930.555.626	0		5.053.819.509	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	4.930.555.626	4.930.555.626	4.930.555.626	0	100%	5.053.819.509	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.930.555.626	4.930.555.626	4.930.555.626	0	40%	5.053.819.509	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.861.111.252	9.861.111.252	9.861.111.252	0		10.107.639.018	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Mojo					9.861.111.252	9.861.111.252	9.861.111.252	0		10.107.639.018	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	9.861.111.252	9.861.111.252	9.861.111.252	0	3 Pokmas / Ormas	10.107.639.018	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	13 Unit	9.861.111.252	9.861.111.252	9.861.111.252	0	1 Unit	10.107.639.018	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Mojo					9.861.111.252	9.861.111.252	9.861.111.252	0		10.107.639.018	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	9.861.111.252	9.861.111.252	9.861.111.252	0	3 Pokmas / Ormas	10.107.639.018	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	13 Unit	9.861.111.252	9.861.111.252	9.861.111.252	0	1 Unit	10.107.639.018	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.232.355.626	2.701.569.648	2.701.569.648	-469.214.022		2.288.164.513	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	13 Unit	2.232.355.626	2.701.569.648	2.701.569.648	-469.214.022	1 Unit	2.288.164.513	Kelurahan Mojo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.698.200.000	2.228.985.978	2.228.985.978	469.214.022		2.765.654.996	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2.698.200.000	2.228.985.978	2.228.985.978	469.214.022	3 Pokmas / Ormas	2.765.654.996	Kelurahan Mojo
	Kelurahan Pucang Sewu					2.926.946.844	2.926.946.844	2.926.946.844	0		3.000.120.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.926.946.844	2.926.946.844	2.926.946.844	0		3.000.120.510	
7,01	KECAMATAN					2.926.946.844	2.926.946.844	2.926.946.844	0		3.000.120.510	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.926.946.844	2.926.946.844	2.926.946.844	0		3.000.120.510	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	2.926.946.844	2.926.946.844	2.926.946.844	0	100%	3.000.120.510	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.926.946.844	2.926.946.844	2.926.946.844	0	40%	3.000.120.510	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.853.893.688	5.853.893.688	5.853.893.688	0		6.000.241.020	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Pucang Sewu					5.853.893.688	5.853.893.688	5.853.893.688	0		6.000.241.020	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	5.853.893.688	5.853.893.688	5.853.893.688	0	7 Pokmas / Ormas	6.000.241.020	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	5.853.893.688	5.853.893.688	5.853.893.688	0	3 Unit	6.000.241.020	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pucang Sewu					5.853.893.688	5.853.893.688	5.853.893.688	0		6.000.241.020	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	5.853.893.688	5.853.893.688	5.853.893.688	0	7 Pokmas / Ormas	6.000.241.020	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	5.853.893.688	5.853.893.688	5.853.893.688	0	3 Unit	6.000.241.020	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.691.145.961	2.137.416.522	2.137.416.522	-446.270.561		1.733.424.607	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.691.145.961	2.137.416.522	2.137.416.522	-446.270.561	3 Unit	1.733.424.607	Kelurahan Pucang Sewu
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.235.800.883	789.530.322	789.530.322	446.270.561		1.266.695.903	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.235.800.883	789.530.322	789.530.322	446.270.561	7 Pokmas / Ormas	1.266.695.903	Kelurahan Pucang Sewu
	Kec. Gunung Anyar					21.463.770.967	28.357.189.539	30.829.257.025	-9.365.486.058		22.159.014.812	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7	UNSUR KEWILAYAHAN					21.463.770.967	21.463.770.967	30.829.257.025	-9.365.486.058		22.159.014.812	
7,01	KECAMATAN					21.463.770.967	28.357.189.539	30.829.257.025	-9.365.486.058		22.159.014.812	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.151.521.038	21.245.498.333	23.717.565.825	-2.566.044.787		21.822.764.883	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	100%	21.151.521.038	21.245.498.333	23.717.565.825	-2.566.044.787	100%	21.822.764.883	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.665.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.665.000	Kec. Gunung Anyar
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.090.934.172	16.090.934.172	18.655.684.863	-2.564.750.691		16.214.109.903	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					16.090.934.172	16.090.934.172	18.655.684.863	-2.564.750.691		16.214.109.903	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	40 Orang/bulan	45 Orang/bulan	16.090.934.172	16.090.934.172	18.655.684.863	-2.564.750.691	42 Orang/bulan	16.214.109.903	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					16.090.934.172	16.090.934.172	18.655.684.863	-2.564.750.691		16.214.109.903	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	40 Orang/bulan	45 Orang/bulan	16.090.934.172	16.090.934.172	18.655.684.863	-2.564.750.691	42 Orang/bulan	16.214.109.903	Kec. Gunung Anyar
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.956.538.367	5.043.079.169	4.950.395.970	6.142.397		5.504.541.481	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					4.956.538.367	5.043.079.169	4.950.395.970	6.142.397		5.504.541.481	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	2 Paket	2 Paket	4.956.538.367	5.043.079.169	4.950.395.970	6.142.397	100 Paket	5.504.541.481	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.956.538.367	5.043.079.169	4.950.395.970	6.142.397		5.504.541.481	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	2 Paket	2 Paket	4.956.538.367	5.043.079.169	4.950.395.970	6.142.397	100 Paket	5.504.541.481	Kec. Gunung Anyar
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.448.499	107.540.992	107.540.992	-6.092.493		101.448.499	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					101.448.499	107.540.992	107.540.992	-6.092.493		101.448.499	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1 Unit	1 Unit	101.448.499	107.540.992	107.540.992	-6.092.493	10 Unit	101.448.499	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					101.448.499	107.540.992	107.540.992	-6.092.493		101.448.499	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1 Unit	1 Unit	101.448.499	107.540.992	107.540.992	-6.092.493	10 Unit	101.448.499	Kec. Gunung Anyar
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					118.965.606	125.272.806	125.272.800	-6.307.194		118.965.606	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	99,40%	99,30%	100%	118.965.606	125.272.806	125.272.800	-6.307.194	99,32%	118.965.606	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					118.965.606	125.272.806	125.272.800	-6.307.194		118.965.606	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					118.965.606	125.272.806	125.272.800	-6.307.194		118.965.606	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	118.965.606	125.272.806	125.272.800	-6.307.194	12 Laporan	118.965.606	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					118.965.606	125.272.806	125.272.800	-6.307.194		118.965.606	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	118.965.606	125.272.806	125.272.800	-6.307.194	12 Laporan	118.965.606	Kec. Gunung Anyar
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	6.804.923.200	6.804.923.200	-6.804.923.200		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	50%	50%	0	6.804.923.200	6.804.923.200	-6.804.923.200	50%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	6.804.923.200	6.804.923.200	-6.804.923.200	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	6.804.923.200	6.804.923.200	-6.804.923.200		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	6.804.923.200	6.804.923.200	-6.804.923.200		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	13940 Keluarga	13940 Keluarga	14099 Keluarga	0	6.804.923.200	6.804.923.200	-6.804.923.200	13940 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	145 Keluarga	145 Keluarga	145 Keluarga	0	6.804.923.200	6.804.923.200	-6.804.923.200	145 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	6.804.923.200	6.804.923.200	-6.804.923.200		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	13940 Keluarga	13940 Keluarga	14099 Keluarga	0	6.804.923.200	6.804.923.200	-6.804.923.200	13940 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	145 Keluarga	145 Keluarga	145 Keluarga	0	6.804.923.200	6.804.923.200	-6.804.923.200	145 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	5.789.923.200	5.789.923.200	-5.789.923.200		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	13940 Keluarga	13940 Keluarga	14099 Keluarga	0	5.789.923.200	5.789.923.200	-5.789.923.200	13940 Keluarga	12.000.000	Kec. Gunung Anyar

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.015.000.000	1.015.000.000	-1.015.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	145 Keluarga	145 Keluarga	145 Keluarga	0	1.015.000.000	1.015.000.000	-1.015.000.000	145 Keluarga	12.000.000	Kec. Gunung Anyar
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					193.284.323	181.495.200	181.495.200	11.789.123		193.284.323	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	193.284.323	181.495.200	181.495.200	11.789.123	100%	193.284.323	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					193.284.323	181.495.200	181.495.200	11.789.123		193.284.323	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					193.284.323	181.495.200	181.495.200	11.789.123		193.284.323	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	193.284.323	181.495.200	181.495.200	11.789.123	12 Laporan	193.284.323	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					193.284.323	181.495.200	181.495.200	11.789.123		193.284.323	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	193.284.323	181.495.200	181.495.200	11.789.123	12 Laporan	193.284.323	Kec. Gunung Anyar
	Kelurahan Gunung Anyar					2.972.374.456	2.972.374.456	2.972.374.456	0		3.022.683.813	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.972.374.456	2.972.374.456	2.972.374.456	0		3.022.683.813	
7,01	KECAMATAN					2.972.374.456	2.972.374.456	2.972.374.456	0		3.022.683.813	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.972.374.456	2.972.374.456	2.972.374.456	0		3.022.683.813	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	50%	50%	2.972.374.456	2.972.374.456	2.972.374.456	0	50%	3.022.683.813	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.972.374.456	2.972.374.456	2.972.374.456	0	40%	3.022.683.813	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.944.748.912	5.944.748.912	5.944.748.912	0		6.045.367.626	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Gunung Anyar					5.944.748.912	5.944.748.912	5.944.748.912	0		6.045.367.626	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	5.944.748.912	5.944.748.912	5.944.748.912	0	3 Pokmas / Ormas	6.045.367.626	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	5.944.748.912	5.944.748.912	5.944.748.912	0	12 Unit	6.045.367.626	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Anyar					5.944.748.912	5.944.748.912	5.944.748.912	0		6.045.367.626	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	5.944.748.912	5.944.748.912	5.944.748.912	0	3 Pokmas / Ormas	6.045.367.626	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	5.944.748.912	5.944.748.912	5.944.748.912	0	12 Unit	6.045.367.626	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.532.374.456	1.532.374.456	1.532.374.456	0		1.570.683.815	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.532.374.456	1.532.374.456	1.532.374.456	0	12 Unit	1.570.683.815	Kelurahan Gunung Anyar
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.440.000.000	1.440.000.000	1.440.000.000	0		1.451.999.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.440.000.000	1.440.000.000	1.440.000.000	0	3 Pokmas / Ormas	1.451.999.998	Kelurahan Gunung Anyar
	Kelurahan Gunung Anyar Tambak					2.914.461.534	2.914.461.534	2.914.461.534	0		2.987.323.068	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.914.461.534	2.914.461.534	2.914.461.534	0		2.987.323.068	
7,01	KECAMATAN					2.914.461.534	2.914.461.534	2.914.461.534	0		2.987.323.068	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.914.461.534	2.914.461.534	2.914.461.534	0		2.987.323.068	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	50%	50%	2.914.461.534	2.914.461.534	2.914.461.534	0	50%	2.987.323.068	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.914.461.534	2.914.461.534	2.914.461.534	0	40%	2.987.323.068	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.828.923.068	5.828.923.068	5.828.923.068	0		5.974.646.136	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Gunung Anyar Tambak					5.828.923.068	5.828.923.068	5.828.923.068	0		5.974.646.136	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.828.923.068	5.828.923.068	5.828.923.068	0	2 Pokmas / Ormas	5.974.646.136	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	3 Unit	5.828.923.068	5.828.923.068	5.828.923.068	0	2 Unit	5.974.646.136	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Anyar Tambak					5.828.923.068	5.828.923.068	5.828.923.068	0		5.974.646.136	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.828.923.068	5.828.923.068	5.828.923.068	0	2 Pokmas / Ormas	5.974.646.136	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	3 Unit	5.828.923.068	5.828.923.068	5.828.923.068	0	2 Unit	5.974.646.136	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.598.221.167	1.987.405.462	1.987.405.462	-389.184.295		1.638.176.694	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	3 Unit	1.598.221.167	1.987.405.462	1.987.405.462	-389.184.295	2 Unit	1.638.176.694	Kelurahan Gunung Anyar Tambak
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.316.240.367	927.056.072	927.056.072	389.184.295		1.349.146.374	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.316.240.367	927.056.072	927.056.072	389.184.295	2 Pokmas / Ormas	1.349.146.374	Kelurahan Gunung Anyar Tambak
	Kelurahan Rungkut Menanggal					2.711.538.669	2.711.538.669	2.711.538.669	0		2.789.607.705	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.711.538.669	2.711.538.669	2.711.538.669	0		2.789.607.705	
7,01	KECAMATAN					2.711.538.669	2.711.538.669	2.711.538.669	0		2.789.607.705	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.711.538.669	2.711.538.669	2.711.538.669	0		2.789.607.705	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	50%	50%	2.711.538.669	2.711.538.669	2.711.538.669	0	50%	2.789.607.705	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.711.538.669	2.711.538.669	2.711.538.669	0	40%	2.789.607.705	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.423.077.338	5.423.077.338	5.423.077.338	0		5.579.215.410	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Rungkut Menanggal					5.423.077.338	5.423.077.338	5.423.077.338	0		5.579.215.410	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.423.077.338	5.423.077.338	5.423.077.338	0	4 Pokmas / Ormas	5.579.215.410	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.423.077.338	5.423.077.338	5.423.077.338	0	1 Unit	5.579.215.410	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Rungkut Menanggal					5.423.077.338	5.423.077.338	5.423.077.338	0		5.579.215.410	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.423.077.338	5.423.077.338	5.423.077.338	0	4 Pokmas / Ormas	5.579.215.410	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.423.077.338	5.423.077.338	5.423.077.338	0	1 Unit	5.579.215.410	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.915.938.669	1.915.938.669	1.915.938.669	0		1.974.117.706	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.915.938.669	1.915.938.669	1.915.938.669	0	1 Unit	1.974.117.706	Kelurahan Rungkut Menanggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					795.600.000	795.600.000	795.600.000	0		815.489.999	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	795.600.000	795.600.000	795.600.000	0	4 Pokmas / Ormas	815.489.999	Kelurahan Rungkut Menanggal
	Kelurahan Rungkut Tengah					2.718.475.660	2.718.475.660	2.718.475.660	0		2.786.437.547	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.718.475.660	2.718.475.660	2.718.475.660	0		2.786.437.547	
7.01	KECAMATAN					2.718.475.660	2.718.475.660	2.718.475.660	0		2.786.437.547	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.718.475.660	2.718.475.660	2.718.475.660	0		2.786.437.547	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	50%	50%	50%	2.718.475.660	2.718.475.660	2.718.475.660	0	50%	2.786.437.547	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.718.475.660	2.718.475.660	2.718.475.660	0	40%	2.786.437.547	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.436.951.320	5.436.951.320	5.436.951.320	0		5.572.875.094	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Rungkut Tengah					5.436.951.320	5.436.951.320	5.436.951.320	0		5.572.875.094	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	5.436.951.320	5.436.951.320	5.436.951.320	0	1 Pokmas / Ormas	5.572.875.094	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5.436.951.320	5.436.951.320	5.436.951.320	0	4 Unit	5.572.875.094	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Rungkut Tengah					5.436.951.320	5.436.951.320	5.436.951.320	0		5.572.875.094	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	5.436.951.320	5.436.951.320	5.436.951.320	0	1 Pokmas / Ormas	5.572.875.094	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	5.436.951.320	5.436.951.320	5.436.951.320	0	4 Unit	5.572.875.094	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.544.275.660	1.544.275.660	1.630.921.688	-86.646.028		1.582.882.549	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.544.275.660	1.544.275.660	1.630.921.688	-86.646.028	4 Unit	1.582.882.549	Kelurahan Rungkut Tengah
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.174.200.000	1.174.200.000	1.087.553.972	86.646.028		1.203.554.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.174.200.000	1.174.200.000	1.087.553.972	86.646.028	1 Pokmas / Ormas	1.203.554.998	Kelurahan Rungkut Tengah
	Kec. Jambangan					22.734.506.681	30.155.807.007	31.834.264.104	-9.099.757.423		22.999.362.221	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					22.734.506.681	22.734.506.681	31.834.264.104	-9.099.757.423		22.999.362.221	
7.01	KECAMATAN					22.734.506.681	30.155.807.007	31.834.264.104	-9.099.757.423		22.999.362.221	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.397.266.773	22.208.872.714	23.882.612.016	-1.485.345.243		22.665.112.571	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,59%	98,59%	98,59%	22.397.266.773	22.208.872.714	23.882.612.016	-1.485.345.243	98,59%	22.665.112.571	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Jambangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19.018.592.312	19.046.281.829	20.573.778.206	-1.555.185.894		19.164.922.524	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					19.018.592.312	19.046.281.829	20.573.778.206	-1.555.185.894		19.164.922.524	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	19.018.592.312	19.046.281.829	20.573.778.206	-1.555.185.894	55 Orang/bulan	19.164.922.524	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					19.018.592.312	19.046.281.829	20.573.778.206	-1.555.185.894		19.164.922.524	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	19.018.592.312	19.046.281.829	20.573.778.206	-1.555.185.894	55 Orang/bulan	19.164.922.524	Kec. Jambangan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.247.010.961	3.096.755.614	3.250.221.965	-3.211.004		3.368.526.547	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					3.247.010.961	3.096.755.614	3.250.221.965	-3.211.004		3.368.526.547	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	3.247.010.961	3.096.755.614	3.250.221.965	-3.211.004	10 Paket	3.368.526.547	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3.247.010.961	3.096.755.614	3.250.221.965	-3.211.004		3.368.526.547	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	3.247.010.961	3.096.755.614	3.250.221.965	-3.211.004	10 Paket	3.368.526.547	Kec. Jambangan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					129.063.500	61.891.271	54.667.845	74.395.655		129.063.500	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					129.063.500	61.891.271	54.667.845	74.395.655		129.063.500	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1 Unit	1 Unit	129.063.500	61.891.271	54.667.845	74.395.655	10 Unit	129.063.500	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					129.063.500	61.891.271	54.667.845	74.395.655		129.063.500	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1 Unit	1 Unit	129.063.500	61.891.271	54.667.845	74.395.655	10 Unit	129.063.500	Kec. Jambangan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					143.904.818	115.247.893	115.247.893	28.656.925		116.914.560	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	143.904.818	115.247.893	115.247.893	28.656.925	100%	116.914.560	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					143.904.818	115.247.893	115.247.893	28.656.925		116.914.560	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					143.904.818	115.247.893	115.247.893	28.656.925		116.914.560	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	143.904.818	115.247.893	115.247.893	28.656.925	12 Laporan	116.914.560	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					143.904.818	115.247.893	115.247.893	28.656.925		116.914.560	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	143.904.818	115.247.893	115.247.893	28.656.925	12 Laporan	116.914.560	Kec. Jambangan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	7.647.980.800	7.647.980.800	-7.647.980.800		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	75%	25%	25%	0	7.647.980.800	7.647.980.800	-7.647.980.800	50%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	7.647.980.800	7.647.980.800	-7.647.980.800	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	7.647.980.800	7.647.980.800	-7.647.980.800		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	7.647.980.800	7.647.980.800	-7.647.980.800		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	16000 Keluarga	16000 Keluarga	13327 Keluarga	0	7.647.980.800	7.647.980.800	-7.647.980.800	16000 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	130 Keluarga	130 Keluarga	130 Keluarga	0	7.647.980.800	7.647.980.800	-7.647.980.800	130 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	7.647.980.800	7.647.980.800	-7.647.980.800		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	16000 Keluarga	16000 Keluarga	13327 Keluarga	0	7.647.980.800	7.647.980.800	-7.647.980.800	16000 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	130 Keluarga	130 Keluarga	130 Keluarga	0	7.647.980.800	7.647.980.800	-7.647.980.800	130 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	6.737.980.800	6.737.980.800	-6.737.980.800		12.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	16000 Keluarga	16000 Keluarga	13327 Keluarga	0	6.737.980.800	6.737.980.800	-6.737.980.800	16000 Keluarga	12.000.000	Kec. Jambangan
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	910.000.000	910.000.000	-910.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	130 Keluarga	130 Keluarga	130 Keluarga	0	910.000.000	910.000.000	-910.000.000	130 Keluarga	12.000.000	Kec. Jambangan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					193.335.090	183.705.600	188.423.395	4.911.695		193.335.090	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	193.335.090	183.705.600	188.423.395	4.911.695	100%	193.335.090	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					193.335.090	183.705.600	188.423.395	4.911.695		193.335.090	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					193.335.090	183.705.600	188.423.395	4.911.695		193.335.090	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	193.335.090	183.705.600	188.423.395	4.911.695	12 Laporan	193.335.090	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					193.335.090	183.705.600	188.423.395	4.911.695		193.335.090	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	193.335.090	183.705.600	188.423.395	4.911.695	12 Laporan	193.335.090	Kec. Jambangan
	Kelurahan Jambangan					4.214.567.215	4.214.567.215	4.214.567.215	0		4.295.931.389	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.214.567.215	4.214.567.215	4.214.567.215	0		4.295.931.389	
7.01	KECAMATAN					4.214.567.215	4.214.567.215	4.214.567.215	0		4.295.931.389	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.214.567.215	4.214.567.215	4.214.567.215	0		4.295.931.389	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	75%	25%	25%	4.214.567.215	4.214.567.215	4.214.567.215	0	50%	4.295.931.389	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.214.567.215	4.214.567.215	4.214.567.215	0	40%	4.295.931.389	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.429.134.430	8.429.134.430	8.429.134.430	0		8.591.862.778	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Jambangan					8.429.134.430	8.429.134.430	8.429.134.430	0		8.591.862.778	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.429.134.430	8.429.134.430	8.429.134.430	0	7 Pokmas / Ormas	8.591.862.778	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	8.429.134.430	8.429.134.430	8.429.134.430	0	7 Unit	8.591.862.778	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Jambangan					8.429.134.430	8.429.134.430	8.429.134.430	0		8.591.862.778	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.429.134.430	8.429.134.430	8.429.134.430	0	7 Pokmas / Ormas	8.591.862.778	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	8.429.134.430	8.429.134.430	8.429.134.430	0	7 Unit	8.591.862.778	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.437.567.215	3.437.567.215	3.437.567.215	0		3.523.506.390	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	3.437.567.215	3.437.567.215	3.437.567.215	0	7 Unit	3.523.506.390	Kelurahan Jambangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					777.000.000	777.000.000	777.000.000	0		772.424.999	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	777.000.000	777.000.000	777.000.000	0	7 Pokmas / Ormas	772.424.999	Kelurahan Jambangan
	Kelurahan Karah					3.474.144.505	3.474.144.505	3.474.144.505	0		3.626.096.112	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.474.144.505	3.474.144.505	3.474.144.505	0		3.626.096.112	
7,01	KECAMATAN					3.474.144.505	3.474.144.505	3.474.144.505	0		3.626.096.112	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.474.144.505	3.474.144.505	3.474.144.505	0		3.626.096.112	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	75%	25%	25%	3.474.144.505	3.474.144.505	3.474.144.505	0	50%	3.626.096.112	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.474.144.505	3.474.144.505	3.474.144.505	0	40%	3.626.096.112	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.948.289.010	6.948.289.010	6.948.289.010	0		7.252.192.224	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Karah					6.948.289.010	6.948.289.010	6.948.289.010	0		7.252.192.224	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.948.289.010	6.948.289.010	6.948.289.010	0	12 Pokmas / Ormas	7.252.192.224	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	10 Unit	6.948.289.010	6.948.289.010	6.948.289.010	0	12 Unit	7.252.192.224	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Karah					6.948.289.010	6.948.289.010	6.948.289.010	0		7.252.192.224	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.948.289.010	6.948.289.010	6.948.289.010	0	12 Pokmas / Ormas	7.252.192.224	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	10 Unit	6.948.289.010	6.948.289.010	6.948.289.010	0	12 Unit	7.252.192.224	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.744.251.720	2.487.699.705	2.487.699.705	-743.447.985		1.852.956.010	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	10 Unit	1.744.251.720	2.487.699.705	2.487.699.705	-743.447.985	12 Unit	1.852.956.010	Kelurahan Karah
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.729.892.785	986.444.800	986.444.800	743.447.985		1.773.140.102	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.729.892.785	986.444.800	986.444.800	743.447.985	12 Pokmas / Ormas	1.773.140.102	Kelurahan Karah
	Kelurahan Kebonsari					2.776.810.796	2.776.810.796	2.776.810.796	0		2.846.231.062	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.776.810.796	2.776.810.796	2.776.810.796	0		2.846.231.062	
7,01	KECAMATAN					2.776.810.796	2.776.810.796	2.776.810.796	0		2.846.231.062	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.776.810.796	2.776.810.796	2.776.810.796	0		2.846.231.062	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	75%	25%	25%	2.776.810.796	2.776.810.796	2.776.810.796	0	50%	2.846.231.062	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.776.810.796	2.776.810.796	2.776.810.796	0	40%	2.846.231.062	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.553.621.592	5.553.621.592	5.553.621.592	0		5.692.462.124	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kebonsari					5.553.621.592	5.553.621.592	5.553.621.592	0		5.692.462.124	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	5.553.621.592	5.553.621.592	5.553.621.592	0	3 Pokmas / Ormas	5.692.462.124	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	5.553.621.592	5.553.621.592	5.553.621.592	0	3 Unit	5.692.462.124	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kebonsari					5.553.621.592	5.553.621.592	5.553.621.592	0		5.692.462.124	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	5.553.621.592	5.553.621.592	5.553.621.592	0	3 Pokmas / Ormas	5.692.462.124	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	5.553.621.592	5.553.621.592	5.553.621.592	0	3 Unit	5.692.462.124	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.109.010.796	2.315.198.796	2.315.198.796	-206.188.000		2.161.736.063	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	2.109.010.796	2.315.198.796	2.315.198.796	-206.188.000	3 Unit	2.161.736.063	Kelurahan Kebonsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					667.800.000	461.612.000	461.612.000	206.188.000		684.494.999	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	667.800.000	461.612.000	461.612.000	206.188.000	3 Pokmas / Ormas	684.494.999	Kelurahan Kebonsari
	Kelurahan Pagesangan					2.680.171.324	2.680.171.324	2.680.171.324	0		2.747.175.603	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.680.171.324	2.680.171.324	2.680.171.324	0		2.747.175.603	
7,01	KECAMATAN					2.680.171.324	2.680.171.324	2.680.171.324	0		2.747.175.603	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.680.171.324	2.680.171.324	2.680.171.324	0		2.747.175.603	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	75%	25%	25%	2.680.171.324	2.680.171.324	2.680.171.324	0	50%	2.747.175.603	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.680.171.324	2.680.171.324	2.680.171.324	0	40%	2.747.175.603	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.360.342.648	5.360.342.648	5.360.342.648	0		5.494.351.206	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Pagesangan					5.360.342.648	5.360.342.648	5.360.342.648	0		5.494.351.206	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.360.342.648	5.360.342.648	5.360.342.648	0	4 Pokmas / Ormas	5.494.351.206	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	7 Unit	5.360.342.648	5.360.342.648	5.360.342.648	0	4 Unit	5.494.351.206	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pagesangan					5.360.342.648	5.360.342.648	5.360.342.648	0		5.494.351.206	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.360.342.648	5.360.342.648	5.360.342.648	0	4 Pokmas / Ormas	5.494.351.206	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	7 Unit	5.360.342.648	5.360.342.648	5.360.342.648	0	4 Unit	5.494.351.206	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.518.365.254	1.672.410.782	1.672.410.782	-154.045.528		1.556.324.383	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	7 Unit	1.518.365.254	1.672.410.782	1.672.410.782	-154.045.528	4 Unit	1.556.324.383	Kelurahan Pagesangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.161.806.070	1.007.760.542	1.007.760.542	154.045.528		1.190.851.220	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.161.806.070	1.007.760.542	1.007.760.542	154.045.528	4 Pokmas / Ormas	1.190.851.220	Kelurahan Pagesangan
	Kec. Karangpilang					22.499.715.404	28.594.331.923	29.696.387.577	-7.196.672.173		22.777.551.091	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					22.499.715.404	22.499.715.404	29.696.387.577	-7.196.672.173		22.777.551.091	
7.01	KECAMATAN					22.499.715.404	28.594.331.923	29.696.387.577	-7.196.672.173		22.777.551.091	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.091.258.004	21.964.210.923	23.135.269.873	-1.044.011.869		22.345.093.691	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,90 %	96,81%	96,81%	22.091.258.004	21.964.210.923	23.135.269.873	-1.044.011.869	96,83 %	22.345.093.691	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	1.332.000	1.268.000		2.600.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	1.332.000	1.268.000		2.600.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	1.332.000	1.268.000	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	1.332.000	1.268.000		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	1.332.000	1.268.000	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Karangpilang
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.976.161.913	17.976.161.913	18.888.206.331	-912.044.418		18.114.367.543	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					17.976.161.913	17.976.161.913	18.888.206.331	-912.044.418		18.114.367.543	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	52 Orang/bulan	17.976.161.913	17.976.161.913	18.888.206.331	-912.044.418	50 Orang/bulan	18.114.367.543	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					17.976.161.913	17.976.161.913	18.888.206.331	-912.044.418		18.114.367.543	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	52 Orang/bulan	17.976.161.913	17.976.161.913	18.888.206.331	-912.044.418	50 Orang/bulan	18.114.367.543	Kec. Karangpilang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.004.183.841	3.889.990.610	4.115.353.004	-111.169.163		4.119.813.898	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					4.004.183.841	3.889.990.610	4.115.353.004	-111.169.163		4.119.813.898	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	2 Paket	2 Paket	4.004.183.841	3.889.990.610	4.115.353.004	-111.169.163	19 Paket	4.119.813.898	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.004.183.841	3.889.990.610	4.115.353.004	-111.169.163		4.119.813.898	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	2 Paket	2 Paket	4.004.183.841	3.889.990.610	4.115.353.004	-111.169.163	19 Paket	4.119.813.898	Kec. Karangpilang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					108.312.250	94.126.400	130.378.538	-22.066.288		108.312.250	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					108.312.250	94.126.400	130.378.538	-22.066.288		108.312.250	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	1 Unit	1 Unit	108.312.250	94.126.400	130.378.538	-22.066.288	29 Unit	108.312.250	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					108.312.250	94.126.400	130.378.538	-22.066.288		108.312.250	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	1 Unit	1 Unit	108.312.250	94.126.400	130.378.538	-22.066.288	29 Unit	108.312.250	Kec. Karangpilang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					132.677.600	124.345.800	124.345.800	8.331.800		132.677.600	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	132.677.600	124.345.800	124.345.800	8.331.800	100%	132.677.600	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					132.677.600	124.345.800	124.345.800	8.331.800		132.677.600	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					132.677.600	124.345.800	124.345.800	8.331.800		132.677.600	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	132.677.600	124.345.800	124.345.800	8.331.800	12 Laporan	132.677.600	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					132.677.600	124.345.800	124.345.800	8.331.800		132.677.600	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	132.677.600	124.345.800	124.345.800	8.331.800	12 Laporan	132.677.600	Kec. Karangpilang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	6.347.824.000	6.254.711.200	-6.254.711.200		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	0	6.347.824.000	6.254.711.200	-6.254.711.200	100%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	6.347.824.000	6.254.711.200	-6.254.711.200	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	6.347.824.000	6.254.711.200	-6.254.711.200		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	6.347.824.000	6.254.711.200	-6.254.711.200		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	18360 Keluarga	18360 Keluarga	12880 Keluarga	0	6.347.824.000	6.254.711.200	-6.254.711.200	18360 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	145 Keluarga	145 Keluarga	145 Keluarga	0	6.347.824.000	6.254.711.200	-6.254.711.200	145 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	6.347.824.000	6.254.711.200	-6.254.711.200		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	18360 Keluarga	18360 Keluarga	12880 Keluarga	0	6.347.824.000	6.254.711.200	-6.254.711.200	18360 Keluarga	24.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	145 Keluarga	145 Keluarga	145 Keluarga	0	6.347.824.000	6.254.711.200	-6.254.711.200	145 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	5.332.824.000	5.239.711.200	-5.239.711.200		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	18360 Keluarga	18360 Keluarga	12880 Keluarga	0	5.332.824.000	5.239.711.200	-5.239.711.200	18360 Keluarga	12.000.000	Kec. Karangpilang
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.015.000.000	1.015.000.000	-1.015.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	145 Keluarga	145 Keluarga	145 Keluarga	0	1.015.000.000	1.015.000.000	-1.015.000.000	145 Keluarga	12.000.000	Kec. Karangpilang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					275.779.800	157.951.200	182.060.704	93.719.096		275.779.800	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	275.779.800	157.951.200	182.060.704	93.719.096	100%	275.779.800	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					275.779.800	157.951.200	182.060.704	93.719.096		275.779.800	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					275.779.800	157.951.200	182.060.704	93.719.096		275.779.800	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	275.779.800	157.951.200	182.060.704	93.719.096	12 Laporan	275.779.800	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					275.779.800	157.951.200	182.060.704	93.719.096		275.779.800	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	275.779.800	157.951.200	182.060.704	93.719.096	12 Laporan	275.779.800	Kec. Karangpilang
	Kelurahan Karang Pilang					2.222.667.620	2.222.667.620	2.222.667.620	0		2.355.882.307	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.222.667.620	2.222.667.620	2.222.667.620	0		2.355.882.307	
7,01	KECAMATAN					2.222.667.620	2.222.667.620	2.222.667.620	0		2.355.882.307	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.222.667.620	2.222.667.620	2.222.667.620	0		2.355.882.307	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	2.222.667.620	2.222.667.620	2.222.667.620	0	100%	2.355.882.307	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.222.667.620	2.222.667.620	2.222.667.620	0	40%	2.355.882.307	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.445.335.240	4.445.335.240	4.445.335.240	0		4.711.764.614	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Karang Pilang					4.445.335.240	4.445.335.240	4.445.335.240	0		4.711.764.614	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	4.445.335.240	4.445.335.240	4.445.335.240	0	2 Pokmas / Ormas	4.711.764.614	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	15 Unit	4.445.335.240	4.445.335.240	4.445.335.240	0	4 Unit	4.711.764.614	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Karang Pilang					4.445.335.240	4.445.335.240	4.445.335.240	0		4.711.764.614	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	4.445.335.240	4.445.335.240	4.445.335.240	0	2 Pokmas / Ormas	4.711.764.614	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	15 Unit	4.445.335.240	4.445.335.240	4.445.335.240	0	4 Unit	4.711.764.614	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.586.667.620	1.781.799.460	1.781.799.460	-195.131.840		1.727.982.308	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	15 Unit	1.586.667.620	1.781.799.460	1.781.799.460	-195.131.840	4 Unit	1.727.982.308	Kelurahan Karang Pilang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					636.000.000	440.868.160	440.868.160	195.131.840		627.899.999	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	636.000.000	440.868.160	440.868.160	195.131.840	2 Pokmas / Ormas	627.899.999	Kelurahan Karang Pilang
	Kelurahan Kebraon					3.851.456.011	3.851.456.012	3.851.456.012	-1		3.947.742.406	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.851.456.011	3.851.456.011	3.851.456.012	-1		3.947.742.406	
7.01	KECAMATAN					3.851.456.011	3.851.456.012	3.851.456.012	-1		3.947.742.406	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.851.456.011	3.851.456.012	3.851.456.012	-1		3.947.742.406	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.851.456.011	3.851.456.012	3.851.456.012	-1	100%	3.947.742.406	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.851.456.011	3.851.456.012	3.851.456.012	-1	40%	3.947.742.406	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.702.912.022	7.702.912.024	7.702.912.024	-2		7.895.484.812	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kebraon					7.702.912.022	7.702.912.024	7.702.912.024	-2		7.895.484.812	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.702.912.022	7.702.912.024	7.702.912.024	-2	2 Pokmas / Ormas	7.895.484.812	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	7.702.912.022	7.702.912.024	7.702.912.024	-2	13 Unit	7.895.484.812	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kebraon					7.702.912.022	7.702.912.024	7.702.912.024	-2		7.895.484.812	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.702.912.022	7.702.912.024	7.702.912.024	-2	2 Pokmas / Ormas	7.895.484.812	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	7.702.912.022	7.702.912.024	7.702.912.024	-2	13 Unit	7.895.484.812	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					708.628.384	1.454.642.878	1.454.642.878	-746.014.494		726.344.093	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	708.628.384	1.454.642.878	1.454.642.878	-746.014.494	13 Unit	726.344.093	Kelurahan Kebraon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3.142.827.627	2.396.813.134	2.396.813.134	746.014.493		3.221.398.313	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	3.142.827.627	2.396.813.134	2.396.813.134	746.014.493	2 Pokmas / Ormas	3.221.398.313	Kelurahan Kebraon
	Kelurahan Kedurus					3.524.067.318	3.524.067.317	3.524.067.317	1		3.612.168.996	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.524.067.318	3.524.067.317	3.524.067.317	1		3.612.168.996	
7,01	KECAMATAN					3.524.067.318	3.524.067.317	3.524.067.317	1		3.612.168.996	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.524.067.318	3.524.067.317	3.524.067.317	1		3.612.168.996	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.524.067.318	3.524.067.317	3.524.067.317	1	100%	3.612.168.996	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.524.067.318	3.524.067.317	3.524.067.317	1	40%	3.612.168.996	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.048.134.636	7.048.134.634	7.048.134.634	2		7.224.337.992	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kedurus					7.048.134.636	7.048.134.634	7.048.134.634	2		7.224.337.992	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.048.134.636	7.048.134.634	7.048.134.634	2	2 Pokmas / Ormas	7.224.337.992	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	10 Unit	7.048.134.636	7.048.134.634	7.048.134.634	2	9 Unit	7.224.337.992	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kedurus					7.048.134.636	7.048.134.634	7.048.134.634	2		7.224.337.992	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.048.134.636	7.048.134.634	7.048.134.634	2	2 Pokmas / Ormas	7.224.337.992	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	10 Unit	7.048.134.636	7.048.134.634	7.048.134.634	2	9 Unit	7.224.337.992	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.766.900.910	2.213.433.101	2.213.433.101	-446.532.191		1.811.073.430	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	10 Unit	1.766.900.910	2.213.433.101	2.213.433.101	-446.532.191	9 Unit	1.811.073.430	Kelurahan Kedurus
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.757.166.408	1.310.634.216	1.310.634.216	446.532.192		1.801.095.566	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.757.166.408	1.310.634.216	1.310.634.216	446.532.192	2 Pokmas / Ormas	1.801.095.566	Kelurahan Kedurus
	Kelurahan Waru Gunung					3.739.820.276	3.739.820.276	3.739.820.276	0		3.833.315.777	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.739.820.276	3.739.820.276	3.739.820.276	0		3.833.315.777	
7,01	KECAMATAN					3.739.820.276	3.739.820.276	3.739.820.276	0		3.833.315.777	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.739.820.276	3.739.820.276	3.739.820.276	0		3.833.315.777	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.739.820.276	3.739.820.276	3.739.820.276	0	100%	3.833.315.777	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.739.820.276	3.739.820.276	3.739.820.276	0	40%	3.833.315.777	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.479.640.552	7.479.640.552	7.479.640.552	0		7.666.631.554	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Waru Gunung					7.479.640.552	7.479.640.552	7.479.640.552	0		7.666.631.554	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.479.640.552	7.479.640.552	7.479.640.552	0	2 Pokmas / Ormas	7.666.631.554	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	11 Unit	7.479.640.552	7.479.640.552	7.479.640.552	0	3 Unit	7.666.631.554	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Waru Gunung					7.479.640.552	7.479.640.552	7.479.640.552	0		7.666.631.554	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.479.640.552	7.479.640.552	7.479.640.552	0	2 Pokmas / Ormas	7.666.631.554	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	11 Unit	7.479.640.552	7.479.640.552	7.479.640.552	0	3 Unit	7.666.631.554	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.289.220.276	3.289.220.276	3.289.220.276	0		3.371.450.778	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	11 Unit	3.289.220.276	3.289.220.276	3.289.220.276	0	3 Unit	3.371.450.778	Kelurahan Waru Gunung
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					450.600.000	450.600.000	450.600.000	0		461.864.999	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	450.600.000	450.600.000	450.600.000	0	2 Pokmas / Ormas	461.864.999	Kelurahan Waru Gunung
	Kec. Kenjeran					21.680.075.867	34.493.435.987	37.092.307.189	-15.412.231.322		22.341.597.651	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					21.680.075.867	21.680.075.867	37.092.307.189	-15.412.231.322		22.341.597.651	
7,01	KECAMATAN					21.680.075.867	34.493.435.987	37.092.307.189	-15.412.231.322		22.341.597.651	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.464.029.463	21.406.870.494	24.005.741.696	-2.541.712.233		22.101.406.291	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,40%	97,32%	99,02%	21.464.029.463	21.406.870.494	24.005.741.696	-2.541.712.233	97,34%	22.101.406.291	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					22.927.520	3.944.000	3.944.000	18.983.520		23.059.232	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					22.927.520	3.944.000	3.944.000	18.983.520		23.059.232	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	22.927.520	3.944.000	3.944.000	18.983.520	8 Dokumen	23.059.232	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					22.927.520	3.944.000	3.944.000	18.983.520		23.059.232	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	22.927.520	3.944.000	3.944.000	18.983.520	8 Dokumen	23.059.232	Kec. Kenjeran
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.694.658.086	16.928.253.924	19.369.287.754	-2.674.629.668		16.821.983.007	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					16.694.658.086	16.928.253.924	19.369.287.754	-2.674.629.668		16.821.983.007	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	16.694.658.086	16.928.253.924	19.369.287.754	-2.674.629.668	47 Orang/bulan	16.821.983.007	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					16.694.658.086	16.928.253.924	19.369.287.754	-2.674.629.668		16.821.983.007	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	16.694.658.086	16.928.253.924	19.369.287.754	-2.674.629.668	47 Orang/bulan	16.821.983.007	Kec. Kenjeran
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.629.323.857	4.393.386.170	4.551.223.542	78.100.315		5.139.244.052	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					4.629.323.857	4.393.386.170	4.551.223.542	78.100.315		5.139.244.052	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	4.629.323.857	4.393.386.170	4.551.223.542	78.100.315	12 Paket	5.139.244.052	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.629.323.857	4.393.386.170	4.551.223.542	78.100.315		5.139.244.052	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	4.629.323.857	4.393.386.170	4.551.223.542	78.100.315	12 Paket	5.139.244.052	Kec. Kenjeran

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					117.120.000	81.286.400	81.286.400	35.833.600		117.120.000	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					117.120.000	81.286.400	81.286.400	35.833.600		117.120.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	117.120.000	81.286.400	81.286.400	35.833.600	5 Unit	117.120.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					117.120.000	81.286.400	81.286.400	35.833.600		117.120.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	117.120.000	81.286.400	81.286.400	35.833.600	5 Unit	117.120.000	Kec. Kenjeran
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					37.437.600	180.199.093	180.199.093	-142.761.493		37.437.600	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	37.437.600	180.199.093	180.199.093	-142.761.493	100%	37.437.600	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					37.437.600	180.199.093	180.199.093	-142.761.493		37.437.600	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					37.437.600	180.199.093	180.199.093	-142.761.493		37.437.600	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	37.437.600	180.199.093	180.199.093	-142.761.493	12 Laporan	37.437.600	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					37.437.600	180.199.093	180.199.093	-142.761.493		37.437.600	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	37.437.600	180.199.093	180.199.093	-142.761.493	12 Laporan	37.437.600	Kec. Kenjeran
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	12.791.339.200	12.791.339.200	-12.791.339.200		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	0	12.791.339.200	12.791.339.200	-12.791.339.200	100%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	12.791.339.200	12.791.339.200	-12.791.339.200	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	12.791.339.200	12.791.339.200	-12.791.339.200		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	12.791.339.200	12.791.339.200	-12.791.339.200		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30060 Keluarga	30060 Keluarga	27080 Keluarga	0	12.791.339.200	12.791.339.200	-12.791.339.200	30060 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	190 Keluarga	190 Keluarga	190 Keluarga	0	12.791.339.200	12.791.339.200	-12.791.339.200	190 Keluarga	24.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	12.791.339.200	12.791.339.200	-12.791.339.200		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30060 Keluarga	30060 Keluarga	27080 Keluarga	0	12.791.339.200	12.791.339.200	-12.791.339.200	30060 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	190 Keluarga	190 Keluarga	190 Keluarga	0	12.791.339.200	12.791.339.200	-12.791.339.200	190 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	11.461.339.200	11.461.339.200	-11.461.339.200		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30060 Keluarga	30060 Keluarga	27080 Keluarga	0	11.461.339.200	11.461.339.200	-11.461.339.200	30060 Keluarga	12.000.000	Kec. Kenjeran
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.330.000.000	1.330.000.000	-1.330.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	190 Keluarga	190 Keluarga	190 Keluarga	0	1.330.000.000	1.330.000.000	-1.330.000.000	190 Keluarga	12.000.000	Kec. Kenjeran
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					178.608.804	115.027.200	115.027.200	63.581.604		178.753.760	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	178.608.804	115.027.200	115.027.200	63.581.604	100%	178.753.760	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					178.608.804	115.027.200	115.027.200	63.581.604		178.753.760	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					178.608.804	115.027.200	115.027.200	63.581.604		178.753.760	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	178.608.804	115.027.200	115.027.200	63.581.604	12 Laporan	178.753.760	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					178.608.804	115.027.200	115.027.200	63.581.604		178.753.760	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	178.608.804	115.027.200	115.027.200	63.581.604	12 Laporan	178.753.760	Kec. Kenjeran
	Kelurahan Bulak Banteng					3.619.019.503	3.619.019.503	3.619.019.503	0		3.614.468.743	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.619.019.503	3.619.019.503	3.619.019.503	0		3.614.468.743	
7,01	KECAMATAN					3.619.019.503	3.619.019.503	3.619.019.503	0		3.614.468.743	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.619.019.503	3.619.019.503	3.619.019.503	0		3.614.468.743	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.619.019.503	3.619.019.503	3.619.019.503	0	100%	3.614.468.743	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.619.019.503	3.619.019.503	3.619.019.503	0	40%	3.614.468.743	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.238.039.006	7.238.039.006	7.238.039.006	0		7.228.937.486	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Bulak Banteng					7.238.039.006	7.238.039.006	7.238.039.006	0		7.228.937.486	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	7.238.039.006	7.238.039.006	7.238.039.006	0	3 Pokmas / Ormas	7.228.937.486	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	7.238.039.006	7.238.039.006	7.238.039.006	0	8 Unit	7.228.937.486	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bulak Banteng					7.238.039.006	7.238.039.006	7.238.039.006	0		7.228.937.486	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	7.238.039.006	7.238.039.006	7.238.039.006	0	3 Pokmas / Ormas	7.228.937.486	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	7.238.039.006	7.238.039.006	7.238.039.006	0	8 Unit	7.228.937.486	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.561.819.503	2.537.704.303	2.537.704.303	24.115.200		2.607.668.743	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	2.561.819.503	2.537.704.303	2.537.704.303	24.115.200	8 Unit	2.607.668.743	Kelurahan Bulak Banteng
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.057.200.000	1.081.315.200	1.081.315.200	-24.115.200		1.006.800.000	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.057.200.000	1.081.315.200	1.081.315.200	-24.115.200	3 Pokmas / Ormas	1.006.800.000	Kelurahan Bulak Banteng
	Kelurahan Sidotopo Wetan					6.222.165.572	6.222.165.572	6.222.165.572	0		6.253.303.998	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					6.222.165.572	6.222.165.572	6.222.165.572	0		6.253.303.998	
7,01	KECAMATAN					6.222.165.572	6.222.165.572	6.222.165.572	0		6.253.303.998	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6.222.165.572	6.222.165.572	6.222.165.572	0		6.253.303.998	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	6.222.165.572	6.222.165.572	6.222.165.572	0	100%	6.253.303.998	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	6.222.165.572	6.222.165.572	6.222.165.572	0	40%	6.253.303.998	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					12.444.331.144	12.444.331.144	12.444.331.144	0		12.506.607.996	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sidotopo Wetan					12.444.331.144	12.444.331.144	12.444.331.144	0		12.506.607.996	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	12.444.331.144	12.444.331.144	12.444.331.144	0	3 Pokmas / Ormas	12.506.607.996	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	12.444.331.144	12.444.331.144	12.444.331.144	0	14 Unit	12.506.607.996	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sidotopo Wetan					12.444.331.144	12.444.331.144	12.444.331.144	0		12.506.607.996	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	12.444.331.144	12.444.331.144	12.444.331.144	0	3 Pokmas / Ormas	12.506.607.996	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	12.444.331.144	12.444.331.144	12.444.331.144	0	14 Unit	12.506.607.996	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					4.148.565.572	4.148.565.572	4.148.565.572	0		4.174.903.998	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	4.148.565.572	4.148.565.572	4.148.565.572	0	14 Unit	4.174.903.998	Kelurahan Sidotopo Wetan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.073.600.000	2.073.600.000	2.073.600.000	0		2.078.400.000	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2.073.600.000	2.073.600.000	2.073.600.000	0	3 Pokmas / Ormas	2.078.400.000	Kelurahan Sidotopo Wetan
	Kelurahan Tambak Wedi					3.358.619.503	3.358.619.503	3.358.619.503	0		3.385.568.743	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.358.619.503	3.358.619.503	3.358.619.503	0		3.385.568.743	
7,01	KECAMATAN					3.358.619.503	3.358.619.503	3.358.619.503	0		3.385.568.743	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.358.619.503	3.358.619.503	3.358.619.503	0		3.385.568.743	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.358.619.503	3.358.619.503	3.358.619.503	0	100%	3.385.568.743	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.358.619.503	3.358.619.503	3.358.619.503	0	40%	3.385.568.743	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.717.239.006	6.717.239.006	6.717.239.006	0		6.771.137.486	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tambak Wedi					6.717.239.006	6.717.239.006	6.717.239.006	0		6.771.137.486	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	6.717.239.006	6.717.239.006	6.717.239.006	0	3 Pokmas / Ormas	6.771.137.486	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	6.717.239.006	6.717.239.006	6.717.239.006	0	4 Unit	6.771.137.486	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tambak Wedi					6.717.239.006	6.717.239.006	6.717.239.006	0		6.771.137.486	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	6.717.239.006	6.717.239.006	6.717.239.006	0	3 Pokmas / Ormas	6.771.137.486	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	6.717.239.006	6.717.239.006	6.717.239.006	0	4 Unit	6.771.137.486	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.571.419.503	2.571.419.503	2.571.419.503	0		2.615.168.743	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	2.571.419.503	2.571.419.503	2.571.419.503	0	4 Unit	2.615.168.743	Kelurahan Tambak Wedi
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					787.200.000	787.200.000	787.200.000	0		770.400.000	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	787.200.000	787.200.000	787.200.000	0	3 Pokmas / Ormas	770.400.000	Kelurahan Tambak Wedi
	Kelurahan Tanah Kali Kedinding					6.180.165.570	6.180.165.570	6.180.165.570	0		6.211.303.998	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					6.180.165.570	6.180.165.570	6.180.165.570	0		6.211.303.998	
7,01	KECAMATAN					6.180.165.570	6.180.165.570	6.180.165.570	0		6.211.303.998	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6.180.165.570	6.180.165.570	6.180.165.570	0		6.211.303.998	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	6.180.165.570	6.180.165.570	6.180.165.570	0	100%	6.211.303.998	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	6.180.165.570	6.180.165.570	6.180.165.570	0	40%	6.211.303.998	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					12.360.331.140	12.360.331.140	12.360.331.140	0		12.422.607.996	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tanah Kali Kedinding					12.360.331.140	12.360.331.140	12.360.331.140	0		12.422.607.996	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	12.360.331.140	12.360.331.140	12.360.331.140	0	3 Pokmas / Ormas	12.422.607.996	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12.360.331.140	12.360.331.140	12.360.331.140	0	12 Unit	12.422.607.996	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tanah Kali Kedinding					12.360.331.140	12.360.331.140	12.360.331.140	0		12.422.607.996	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	12.360.331.140	12.360.331.140	12.360.331.140	0	3 Pokmas / Ormas	12.422.607.996	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12.360.331.140	12.360.331.140	12.360.331.140	0	12 Unit	12.422.607.996	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					4.155.765.570	3.728.556.637	3.728.556.637	427.208.933		4.186.903.998	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	4.155.765.570	3.728.556.637	3.728.556.637	427.208.933	12 Unit	4.186.903.998	Kelurahan Tanah Kali Kedinding
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.024.400.000	2.451.608.933	2.451.608.933	-427.208.933		2.024.400.000	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2.024.400.000	2.451.608.933	2.451.608.933	-427.208.933	3 Pokmas / Ormas	2.024.400.000	Kelurahan Tanah Kali Kedinding
	Kec. Krembangan					23.456.199.434	35.081.131.690	37.621.087.510	-14.164.888.076		23.767.989.863	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					23.456.199.434	23.456.199.434	37.621.087.510	-14.164.888.076		23.767.989.863	
7.01	KECAMATAN					23.456.199.434	35.081.131.690	37.621.087.510	-14.164.888.076		23.767.989.863	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.091.726.244	22.765.521.119	25.230.096.798	-2.138.370.554		23.386.693.463	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,44%	97,44%	97,44%	23.091.726.244	22.765.521.119	25.230.096.798	-2.138.370.554	97,44%	23.386.693.463	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.600.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.600.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Krembangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.334.008.295	17.334.008.295	19.755.681.920	-2.421.673.625		17.465.817.912	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					17.334.008.295	17.334.008.295	19.755.681.920	-2.421.673.625		17.465.817.912	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	45 Orang/bulan	17.334.008.295	17.334.008.295	19.755.681.920	-2.421.673.625	58 Orang/bulan	17.465.817.912	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					17.334.008.295	17.334.008.295	19.755.681.920	-2.421.673.625		17.465.817.912	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	45 Orang/bulan	17.334.008.295	17.334.008.295	19.755.681.920	-2.421.673.625	58 Orang/bulan	17.465.817.912	Kec. Krembangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					5.649.987.949	5.370.017.124	5.333.197.857	316.790.092		5.813.145.551	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					5.649.987.949	5.370.017.124	5.333.197.857	316.790.092		5.813.145.551	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	2 Paket	2 Paket	5.649.987.949	5.370.017.124	5.333.197.857	316.790.092	13 Paket	5.813.145.551	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.649.987.949	5.370.017.124	5.333.197.857	316.790.092		5.813.145.551	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	2 Paket	2 Paket	5.649.987.949	5.370.017.124	5.333.197.857	316.790.092	13 Paket	5.813.145.551	Kec. Krembangan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					105.130.000	57.563.700	137.285.021	-32.155.021		105.130.000	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					105.130.000	57.563.700	137.285.021	-32.155.021		105.130.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1 Unit	1 Unit	105.130.000	57.563.700	137.285.021	-32.155.021	6 Unit	105.130.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					105.130.000	57.563.700	137.285.021	-32.155.021		105.130.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1 Unit	1 Unit	105.130.000	57.563.700	137.285.021	-32.155.021	6 Unit	105.130.000	Kec. Krembangan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					203.643.190	202.191.712	202.191.712	1.451.478		196.466.400	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	203.643.190	202.191.712	202.191.712	1.451.478	100%	196.466.400	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					203.643.190	202.191.712	202.191.712	1.451.478		196.466.400	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					203.643.190	202.191.712	202.191.712	1.451.478		196.466.400	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	203.643.190	202.191.712	202.191.712	1.451.478	12 Laporan	196.466.400	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					203.643.190	202.191.712	202.191.712	1.451.478		196.466.400	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	203.643.190	202.191.712	202.191.712	1.451.478	12 Laporan	196.466.400	Kec. Krembangan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	11.977.098.400	11.977.098.400	-11.977.098.400		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	70%	70%	70%	0	11.977.098.400	11.977.098.400	-11.977.098.400	70%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	11.977.098.400	11.977.098.400	-11.977.098.400	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	11.977.098.400	11.977.098.400	-11.977.098.400		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	11.977.098.400	11.977.098.400	-11.977.098.400		24.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25320 Keluarga	25320 Keluarga	25320 Keluarga	0	11.977.098.400	11.977.098.400	-11.977.098.400	25320 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	220 Keluarga	220 Keluarga	220 Keluarga	0	11.977.098.400	11.977.098.400	-11.977.098.400	220 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	11.977.098.400	11.977.098.400	-11.977.098.400		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25320 Keluarga	25320 Keluarga	25320 Keluarga	0	11.977.098.400	11.977.098.400	-11.977.098.400	25320 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	220 Keluarga	220 Keluarga	220 Keluarga	0	11.977.098.400	11.977.098.400	-11.977.098.400	220 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	10.437.098.400	10.437.098.400	-10.437.098.400		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25320 Keluarga	25320 Keluarga	25320 Keluarga	0	10.437.098.400	10.437.098.400	-10.437.098.400	25320 Keluarga	12.000.000	Kec. Krembangan
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.540.000.000	1.540.000.000	-1.540.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	220 Keluarga	220 Keluarga	220 Keluarga	0	1.540.000.000	1.540.000.000	-1.540.000.000	220 Keluarga	12.000.000	Kec. Krembangan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					160.830.000	136.320.459	211.700.600	-50.870.600		160.830.000	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	160.830.000	136.320.459	211.700.600	-50.870.600	100%	160.830.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					160.830.000	136.320.459	211.700.600	-50.870.600		160.830.000	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					160.830.000	136.320.459	211.700.600	-50.870.600		160.830.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	160.830.000	136.320.459	211.700.600	-50.870.600	12 Laporan	160.830.000	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					160.830.000	136.320.459	211.700.600	-50.870.600		160.830.000	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	160.830.000	136.320.459	211.700.600	-50.870.600	12 Laporan	160.830.000	Kec. Krembangan
	Kelurahan Dupak					3.753.677.864	3.753.677.864	3.753.677.864	0		3.823.519.805	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.753.677.864	3.753.677.864	3.753.677.864	0		3.823.519.805	
7,01	KECAMATAN					3.753.677.864	3.753.677.864	3.753.677.864	0		3.823.519.805	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.753.677.864	3.753.677.864	3.753.677.864	0		3.823.519.805	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	70%	70%	70%	3.753.677.864	3.753.677.864	3.753.677.864	0	70%	3.823.519.805	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.753.677.864	3.753.677.864	3.753.677.864	0	40%	3.823.519.805	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.507.355.728	7.507.355.728	7.507.355.728	0		7.647.039.610	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Dupak					7.507.355.728	7.507.355.728	7.507.355.728	0		7.647.039.610	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.507.355.728	7.507.355.728	7.507.355.728	0	4 Pokmas / Ormas	7.647.039.610	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	7.507.355.728	7.507.355.728	7.507.355.728	0	4 Unit	7.647.039.610	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Dupak					7.507.355.728	7.507.355.728	7.507.355.728	0		7.647.039.610	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.507.355.728	7.507.355.728	7.507.355.728	0	4 Pokmas / Ormas	7.647.039.610	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	7.507.355.728	7.507.355.728	7.507.355.728	0	4 Unit	7.647.039.610	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.109.520.617	1.822.199.230	1.849.061.230	-739.540.613		1.137.258.631	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.109.520.617	1.822.199.230	1.849.061.230	-739.540.613	4 Unit	1.137.258.631	Kelurahan Dupak
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.644.157.247	1.931.478.634	1.904.616.634	739.540.613		2.686.261.174	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2.644.157.247	1.931.478.634	1.904.616.634	739.540.613	4 Pokmas / Ormas	2.686.261.174	Kelurahan Dupak
	Kelurahan Kemayoran					5.432.125.666	5.432.125.666	5.432.125.666	0		5.567.928.800	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					5.432.125.666	5.432.125.666	5.432.125.666	0		5.567.928.800	
7,01	KECAMATAN					5.432.125.666	5.432.125.666	5.432.125.666	0		5.567.928.800	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.432.125.666	5.432.125.666	5.432.125.666	0		5.567.928.800	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	70%	70%	70%	5.432.125.666	5.432.125.666	5.432.125.666	0	70%	5.567.928.800	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	5.432.125.666	5.432.125.666	5.432.125.666	0	40%	5.567.928.800	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					10.864.251.332	10.864.251.332	10.864.251.332	0		11.135.857.600	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kemayoran					10.864.251.332	10.864.251.332	10.864.251.332	0		11.135.857.600	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	10.864.251.332	10.864.251.332	10.864.251.332	0	3 Pokmas / Ormas	11.135.857.600	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	10.864.251.332	10.864.251.332	10.864.251.332	0	6 Unit	11.135.857.600	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kemayoran					10.864.251.332	10.864.251.332	10.864.251.332	0		11.135.857.600	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	10.864.251.332	10.864.251.332	10.864.251.332	0	3 Pokmas / Ormas	11.135.857.600	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	10.864.251.332	10.864.251.332	10.864.251.332	0	6 Unit	11.135.857.600	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.637.585.529	4.278.714.091	3.532.309.892	105.275.637		3.728.525.162	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	3.637.585.529	4.278.714.091	3.532.309.892	105.275.637	6 Unit	3.728.525.162	Kelurahan Kemayoran
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.794.540.137	1.153.411.575	1.899.815.774	-105.275.637		1.839.403.638	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.794.540.137	1.153.411.575	1.899.815.774	-105.275.637	3 Pokmas / Ormas	1.839.403.638	Kelurahan Kemayoran
	Kelurahan Krembangan Selatan					4.188.736.928	4.188.736.928	4.188.736.928	0		4.410.495.345	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.188.736.928	4.188.736.928	4.188.736.928	0		4.410.495.345	
7.01	KECAMATAN					4.188.736.928	4.188.736.928	4.188.736.928	0		4.410.495.345	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.188.736.928	4.188.736.928	4.188.736.928	0		4.410.495.345	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	70%	70%	70%	4.188.736.928	4.188.736.928	4.188.736.928	0	70%	4.410.495.345	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.188.736.928	4.188.736.928	4.188.736.928	0	40%	4.410.495.345	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.377.473.856	8.377.473.856	8.377.473.856	0		8.820.990.690	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Krembangan Selatan					8.377.473.856	8.377.473.856	8.377.473.856	0		8.820.990.690	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.377.473.856	8.377.473.856	8.377.473.856	0	7 Pokmas / Ormas	8.820.990.690	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	8.377.473.856	8.377.473.856	8.377.473.856	0	4 Unit	8.820.990.690	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Krembangan Selatan					8.377.473.856	8.377.473.856	8.377.473.856	0		8.820.990.690	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.377.473.856	8.377.473.856	8.377.473.856	0	7 Pokmas / Ormas	8.820.990.690	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	8.377.473.856	8.377.473.856	8.377.473.856	0	4 Unit	8.820.990.690	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					477.894.543	1.680.944.441	1.906.353.165	-1.428.458.622		606.881.906	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	477.894.543	1.680.944.441	1.906.353.165	-1.428.458.622	4 Unit	606.881.906	Kelurahan Krembangan Selatan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3.710.842.385	2.507.792.487	2.282.383.763	1.428.458.622		3.803.613.439	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	3.710.842.385	2.507.792.487	2.282.383.763	1.428.458.622	7 Pokmas / Ormas	3.803.613.439	Kelurahan Krembangan Selatan
	Kelurahan Morokrembangan					4.832.287.092	4.832.287.092	4.832.287.092	0		4.953.094.262	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.832.287.092	4.832.287.092	4.832.287.092	0		4.953.094.262	
7,01	KECAMATAN					4.832.287.092	4.832.287.092	4.832.287.092	0		4.953.094.262	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.832.287.092	4.832.287.092	4.832.287.092	0		4.953.094.262	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	70%	70%	70%	4.832.287.092	4.832.287.092	4.832.287.092	0	70%	4.953.094.262	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.832.287.092	4.832.287.092	4.832.287.092	0	40%	4.953.094.262	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.664.574.184	9.664.574.184	9.664.574.184	0		9.906.188.524	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Morokrembangan					9.664.574.184	9.664.574.184	9.664.574.184	0		9.906.188.524	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	9.664.574.184	9.664.574.184	9.664.574.184	0	5 Pokmas / Ormas	9.906.188.524	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	9.664.574.184	9.664.574.184	9.664.574.184	0	5 Unit	9.906.188.524	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Morokrembangan					9.664.574.184	9.664.574.184	9.664.574.184	0		9.906.188.524	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	9.664.574.184	9.664.574.184	9.664.574.184	0	5 Pokmas / Ormas	9.906.188.524	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	9.664.574.184	9.664.574.184	9.664.574.184	0	5 Unit	9.906.188.524	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.264.002.650	1.264.002.650	1.264.002.650	0		1.295.602.714	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1.264.002.650	1.264.002.650	1.264.002.650	0	5 Unit	1.295.602.714	Kelurahan Morokrembangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3.568.284.442	3.568.284.442	3.568.284.442	0		3.657.491.548	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3.568.284.442	3.568.284.442	3.568.284.442	0	5 Pokmas / Ormas	3.657.491.548	Kelurahan Morokrembangan
	Kelurahan Perak Barat					4.329.251.385	4.329.251.385	4.329.251.385	0		4.437.482.663	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.329.251.385	4.329.251.385	4.329.251.385	0		4.437.482.663	
7,01	KECAMATAN					4.329.251.385	4.329.251.385	4.329.251.385	0		4.437.482.663	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.329.251.385	4.329.251.385	4.329.251.385	0		4.437.482.663	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	70%	70%	70%	4.329.251.385	4.329.251.385	4.329.251.385	0	70%	4.437.482.663	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.329.251.385	4.329.251.385	4.329.251.385	0	40%	4.437.482.663	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.658.502.770	8.658.502.770	8.658.502.770	0		8.874.965.326	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Perak Barat					8.658.502.770	8.658.502.770	8.658.502.770	0		8.874.965.326	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.658.502.770	8.658.502.770	8.658.502.770	0	5 Pokmas / Ormas	8.874.965.326	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	8.658.502.770	8.658.502.770	8.658.502.770	0	3 Unit	8.874.965.326	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Perak Barat					8.658.502.770	8.658.502.770	8.658.502.770	0		8.874.965.326	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.658.502.770	8.658.502.770	8.658.502.770	0	5 Pokmas / Ormas	8.874.965.326	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	8.658.502.770	8.658.502.770	8.658.502.770	0	3 Unit	8.874.965.326	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.459.703.316	3.038.526.860	3.038.526.860	-578.823.544		2.521.195.895	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	2.459.703.316	3.038.526.860	3.038.526.860	-578.823.544	3 Unit	2.521.195.895	Kelurahan Perak Barat
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.869.548.069	1.290.724.525	1.290.724.525	578.823.544		1.916.286.768	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.869.548.069	1.290.724.525	1.290.724.525	578.823.544	5 Pokmas / Ormas	1.916.286.768	Kelurahan Perak Barat
	Kec. Lakarsantri					28.465.161.268	33.924.907.554	36.315.904.123	-7.850.742.855		28.795.270.676	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					28.465.161.268	28.465.161.268	36.315.904.123	-7.850.742.855		28.795.270.676	
7,01	KECAMATAN					28.465.161.268	33.924.907.554	36.315.904.123	-7.850.742.855		28.795.270.676	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.245.625.112	27.664.044.823	30.039.753.392	-1.794.128.280		28.567.386.822	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,30%	97,26%	97,85%	28.245.625.112	27.664.044.823	30.039.753.392	-1.794.128.280	97,27%	28.567.386.822	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.665.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.665.000	Kec. Lakarsantri
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					23.419.912.966	23.419.912.966	25.461.017.489	-2.041.104.523		23.599.891.141	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					23.419.912.966	23.419.912.966	25.461.017.489	-2.041.104.523		23.599.891.141	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	65 Orang/bulan	23.419.912.966	23.419.912.966	25.461.017.489	-2.041.104.523	70 Orang/bulan	23.599.891.141	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					23.419.912.966	23.419.912.966	25.461.017.489	-2.041.104.523		23.599.891.141	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	65 Orang/bulan	23.419.912.966	23.419.912.966	25.461.017.489	-2.041.104.523	70 Orang/bulan	23.599.891.141	Kec. Lakarsantri
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.704.100.332	4.104.205.873	4.438.809.919	265.290.413		4.845.818.867	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					4.704.100.332	4.104.205.873	4.438.809.919	265.290.413		4.845.818.867	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	4.704.100.332	4.104.205.873	4.438.809.919	265.290.413	8 Paket	4.845.818.867	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.704.100.332	4.104.205.873	4.438.809.919	265.290.413		4.845.818.867	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	4.704.100.332	4.104.205.873	4.438.809.919	265.290.413	8 Paket	4.845.818.867	Kec. Lakarsantri

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.011.814	135.981.984	135.981.984	-16.970.170		119.011.814	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					119.011.814	135.981.984	135.981.984	-16.970.170		119.011.814	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	119.011.814	135.981.984	135.981.984	-16.970.170	3 Unit	119.011.814	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					119.011.814	135.981.984	135.981.984	-16.970.170		119.011.814	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	119.011.814	135.981.984	135.981.984	-16.970.170	3 Unit	119.011.814	Kec. Lakarsantri
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					38.042.322	151.953.931	151.953.931	-113.911.609		17.852.674	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	38.042.322	151.953.931	151.953.931	-113.911.609	100%	17.852.674	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					38.042.322	151.953.931	151.953.931	-113.911.609		17.852.674	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					38.042.322	151.953.931	151.953.931	-113.911.609		17.852.674	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	38.042.322	151.953.931	151.953.931	-113.911.609	12 Laporan	17.852.674	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					38.042.322	151.953.931	151.953.931	-113.911.609		17.852.674	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	38.042.322	151.953.931	151.953.931	-113.911.609	12 Laporan	17.852.674	Kec. Lakarsantri
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	5.911.076.800	5.911.076.800	-5.911.076.800		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	0	5.911.076.800	5.911.076.800	-5.911.076.800	75%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	5.911.076.800	5.911.076.800	-5.911.076.800	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	5.911.076.800	5.911.076.800	-5.911.076.800		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	5.911.076.800	5.911.076.800	-5.911.076.800		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	11400 Keluarga	11400 Keluarga	11253 Keluarga	0	5.911.076.800	5.911.076.800	-5.911.076.800	11400 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	160 Keluarga	160 Keluarga	160 Keluarga	0	5.911.076.800	5.911.076.800	-5.911.076.800	160 Keluarga	24.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	5.911.076.800	5.911.076.800	-5.911.076.800		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	11400 Keluarga	11400 Keluarga	11253 Keluarga	0	5.911.076.800	5.911.076.800	-5.911.076.800	11400 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	160 Keluarga	160 Keluarga	160 Keluarga	0	5.911.076.800	5.911.076.800	-5.911.076.800	160 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	4.791.076.800	4.791.076.800	-4.791.076.800		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	11400 Keluarga	11400 Keluarga	11253 Keluarga	0	4.791.076.800	4.791.076.800	-4.791.076.800	11400 Keluarga	12.000.000	Kec. Lakarsantri
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.120.000.000	1.120.000.000	-1.120.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	160 Keluarga	160 Keluarga	160 Keluarga	0	1.120.000.000	1.120.000.000	-1.120.000.000	160 Keluarga	12.000.000	Kec. Lakarsantri
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					181.493.834	197.832.000	213.120.000	-31.626.166		186.031.180	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	181.493.834	197.832.000	213.120.000	-31.626.166	100%	186.031.180	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					181.493.834	197.832.000	213.120.000	-31.626.166		186.031.180	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					181.493.834	197.832.000	213.120.000	-31.626.166		186.031.180	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	181.493.834	197.832.000	213.120.000	-31.626.166	12 Laporan	186.031.180	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					181.493.834	197.832.000	213.120.000	-31.626.166		186.031.180	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	181.493.834	197.832.000	213.120.000	-31.626.166	12 Laporan	186.031.180	Kec. Lakarsantri
	Kelurahan Bangkingan					2.657.553.951	2.657.553.951	2.657.553.951	0		2.699.992.796	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.657.553.951	2.657.553.951	2.657.553.951	0		2.699.992.796	
7,01	KECAMATAN					2.657.553.951	2.657.553.951	2.657.553.951	0		2.699.992.796	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.657.553.951	2.657.553.951	2.657.553.951	0		2.699.992.796	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	2.657.553.951	2.657.553.951	2.657.553.951	0	75%	2.699.992.796	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.657.553.951	2.657.553.951	2.657.553.951	0	40%	2.699.992.796	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.315.107.902	5.315.107.902	5.315.107.902	0		5.399.985.592	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Bangkingan					5.315.107.902	5.315.107.902	5.315.107.902	0		5.399.985.592	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	5.315.107.902	5.315.107.902	5.315.107.902	0	2 Pokmas / Ormas	5.399.985.592	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	5.315.107.902	5.315.107.902	5.315.107.902	0	7 Unit	5.399.985.592	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bangkingan					5.315.107.902	5.315.107.902	5.315.107.902	0		5.399.985.592	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	5.315.107.902	5.315.107.902	5.315.107.902	0	2 Pokmas / Ormas	5.399.985.592	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	5.315.107.902	5.315.107.902	5.315.107.902	0	7 Unit	5.399.985.592	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.929.753.951	2.109.927.329	2.109.927.329	-180.173.378		1.977.997.797	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1.929.753.951	2.109.927.329	2.109.927.329	-180.173.378	7 Unit	1.977.997.797	Kelurahan Bangkingan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					727.800.000	547.626.622	547.626.622	180.173.378		721.994.999	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	727.800.000	547.626.622	547.626.622	180.173.378	2 Pokmas / Ormas	721.994.999	Kelurahan Bangkingan
	Kelurahan Jeruk					2.387.289.848	2.387.289.848	2.387.289.848	0		2.446.972.091	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.387.289.848	2.387.289.848	2.387.289.848	0		2.446.972.091	
7,01	KECAMATAN					2.387.289.848	2.387.289.848	2.387.289.848	0		2.446.972.091	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.387.289.848	2.387.289.848	2.387.289.848	0		2.446.972.091	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	2.387.289.848	2.387.289.848	2.387.289.848	0	75%	2.446.972.091	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.387.289.848	2.387.289.848	2.387.289.848	0	40%	2.446.972.091	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.774.579.696	4.774.579.696	4.774.579.696	0		4.893.944.182	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Jeruk					4.774.579.696	4.774.579.696	4.774.579.696	0		4.893.944.182	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	4.774.579.696	4.774.579.696	4.774.579.696	0	2 Pokmas / Ormas	4.893.944.182	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	9 Unit	9 Unit	4.774.579.696	4.774.579.696	4.774.579.696	0	6 Unit	4.893.944.182	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Jeruk					4.774.579.696	4.774.579.696	4.774.579.696	0		4.893.944.182	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	4.774.579.696	4.774.579.696	4.774.579.696	0	2 Pokmas / Ormas	4.893.944.182	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	9 Unit	9 Unit	4.774.579.696	4.774.579.696	4.774.579.696	0	6 Unit	4.893.944.182	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.547.363.329	1.748.259.256	1.768.145.937	-220.782.608		1.586.047.410	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	9 Unit	9 Unit	1.547.363.329	1.748.259.256	1.768.145.937	-220.782.608	6 Unit	1.586.047.410	Kelurahan Jeruk
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					839.926.519	639.030.592	619.143.911	220.782.608		860.924.681	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	839.926.519	639.030.592	619.143.911	220.782.608	2 Pokmas / Ormas	860.924.681	Kelurahan Jeruk
	Kelurahan Lakarsantri					3.689.241.224	3.689.241.224	3.689.241.224	0		3.781.472.249	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.689.241.224	3.689.241.224	3.689.241.224	0		3.781.472.249	
7,01	KECAMATAN					3.689.241.224	3.689.241.224	3.689.241.224	0		3.781.472.249	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.689.241.224	3.689.241.224	3.689.241.224	0		3.781.472.249	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.689.241.224	3.689.241.224	3.689.241.224	0	75%	3.781.472.249	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.689.241.224	3.689.241.224	3.689.241.224	0	40%	3.781.472.249	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.378.482.448	7.378.482.448	7.378.482.448	0		7.562.944.498	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Lakarsantri					7.378.482.448	7.378.482.448	7.378.482.448	0		7.562.944.498	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.378.482.448	7.378.482.448	7.378.482.448	0	1 Pokmas / Ormas	7.562.944.498	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	7.378.482.448	7.378.482.448	7.378.482.448	0	12 Unit	7.562.944.498	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Lakarsantri					7.378.482.448	7.378.482.448	7.378.482.448	0		7.562.944.498	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.378.482.448	7.378.482.448	7.378.482.448	0	1 Pokmas / Ormas	7.562.944.498	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	7.378.482.448	7.378.482.448	7.378.482.448	0	12 Unit	7.562.944.498	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.245.241.224	3.149.555.514	3.149.555.514	95.685.710		3.326.372.250	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	3.245.241.224	3.149.555.514	3.149.555.514	95.685.710	12 Unit	3.326.372.250	Kelurahan Lakarsantri
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					444.000.000	539.685.710	539.685.710	-95.685.710		455.099.999	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	444.000.000	539.685.710	539.685.710	-95.685.710	1 Pokmas / Ormas	455.099.999	Kelurahan Lakarsantri
	Kelurahan Lidah Kulon					3.456.044.117	3.456.044.117	3.456.044.117	0		3.542.445.215	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.456.044.117	3.456.044.117	3.456.044.117	0		3.542.445.215	
7,01	KECAMATAN					3.456.044.117	3.456.044.117	3.456.044.117	0		3.542.445.215	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.456.044.117	3.456.044.117	3.456.044.117	0		3.542.445.215	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.456.044.117	3.456.044.117	3.456.044.117	0	75%	3.542.445.215	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.456.044.117	3.456.044.117	3.456.044.117	0	40%	3.542.445.215	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.912.088.234	6.912.088.234	6.912.088.234	0		7.084.890.430	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Lidah Kulon					6.912.088.234	6.912.088.234	6.912.088.234	0		7.084.890.430	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.912.088.234	6.912.088.234	6.912.088.234	0	2 Pokmas / Ormas	7.084.890.430	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6.912.088.234	6.912.088.234	6.912.088.234	0	6 Unit	7.084.890.430	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Lidah Kulon					6.912.088.234	6.912.088.234	6.912.088.234	0		7.084.890.430	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.912.088.234	6.912.088.234	6.912.088.234	0	2 Pokmas / Ormas	7.084.890.430	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6.912.088.234	6.912.088.234	6.912.088.234	0	6 Unit	7.084.890.430	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.062.244.117	2.532.828.437	2.532.828.437	-470.584.320		2.113.800.217	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	2.062.244.117	2.532.828.437	2.532.828.437	-470.584.320	6 Unit	2.113.800.217	Kelurahan Lidah Kulon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.393.800.000	923.215.680	923.215.680	470.584.320		1.428.644.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.393.800.000	923.215.680	923.215.680	470.584.320	2 Pokmas / Ormas	1.428.644.998	Kelurahan Lidah Kulon
	Kelurahan Lidah Wetan					2.890.772.877	2.890.772.877	2.890.772.877	0		2.963.042.195	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.890.772.877	2.890.772.877	2.890.772.877	0		2.963.042.195	
7.01	KECAMATAN					2.890.772.877	2.890.772.877	2.890.772.877	0		2.963.042.195	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.890.772.877	2.890.772.877	2.890.772.877	0		2.963.042.195	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	2.890.772.877	2.890.772.877	2.890.772.877	0	75%	2.963.042.195	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.890.772.877	2.890.772.877	2.890.772.877	0	40%	2.963.042.195	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.781.545.754	5.781.545.754	5.781.545.754	0		5.926.084.390	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Lidah Wetan					5.781.545.754	5.781.545.754	5.781.545.754	0		5.926.084.390	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.781.545.754	5.781.545.754	5.781.545.754	0	2 Pokmas / Ormas	5.926.084.390	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	5.781.545.754	5.781.545.754	5.781.545.754	0	14 Unit	5.926.084.390	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Lidah Wetan					5.781.545.754	5.781.545.754	5.781.545.754	0		5.926.084.390	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.781.545.754	5.781.545.754	5.781.545.754	0	2 Pokmas / Ormas	5.926.084.390	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	5.781.545.754	5.781.545.754	5.781.545.754	0	14 Unit	5.926.084.390	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.108.972.877	2.121.172.418	2.121.172.418	-12.199.541		2.161.697.196	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	2.108.972.877	2.121.172.418	2.121.172.418	-12.199.541	14 Unit	2.161.697.196	Kelurahan Lidah Wetan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					781.800.000	769.600.459	769.600.459	12.199.541		801.344.999	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	781.800.000	769.600.459	769.600.459	12.199.541	2 Pokmas / Ormas	801.344.999	Kelurahan Lidah Wetan
	Kelurahan Sumurwelut					2.934.721.643	2.934.721.643	2.934.721.643	0		3.017.984.466	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.934.721.643	2.934.721.643	2.934.721.643	0		3.017.984.466	
7,01	KECAMATAN					2.934.721.643	2.934.721.643	2.934.721.643	0		3.017.984.466	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.934.721.643	2.934.721.643	2.934.721.643	0		3.017.984.466	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	2.934.721.643	2.934.721.643	2.934.721.643	0	75%	3.017.984.466	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.934.721.643	2.934.721.643	2.934.721.643	0	40%	3.017.984.466	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.869.443.286	5.869.443.286	5.869.443.286	0		6.035.968.932	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sumurwelut					5.869.443.286	5.869.443.286	5.869.443.286	0		6.035.968.932	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.869.443.286	5.869.443.286	5.869.443.286	0	2 Pokmas / Ormas	6.035.968.932	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	25 Unit	10 Unit	5.869.443.286	5.869.443.286	5.869.443.286	0	20 Unit	6.035.968.932	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sumurwelut					5.869.443.286	5.869.443.286	5.869.443.286	0		6.035.968.932	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.869.443.286	5.869.443.286	5.869.443.286	0	2 Pokmas / Ormas	6.035.968.932	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	25 Unit	10 Unit	5.869.443.286	5.869.443.286	5.869.443.286	0	20 Unit	6.035.968.932	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.518.921.643	2.668.921.643	2.668.921.643	-150.000.000		2.591.789.467	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	25 Unit	10 Unit	2.518.921.643	2.668.921.643	2.668.921.643	-150.000.000	20 Unit	2.591.789.467	Kelurahan Sumurwelut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					415.800.000	265.800.000	265.800.000	150.000.000		426.194.999	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	415.800.000	265.800.000	265.800.000	150.000.000	2 Pokmas / Ormas	426.194.999	Kelurahan Sumurwelut
	Kec. Mulyorejo					29.068.617.411	36.526.736.064	38.589.152.713	-9.520.535.302		29.420.318.822	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					29.068.617.411	29.068.617.411	38.589.152.713	-9.520.535.302		29.420.318.822	
7,01	KECAMATAN					29.068.617.411	36.526.736.064	38.589.152.713	-9.520.535.302		29.420.318.822	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					28.806.443.436	28.637.142.133	30.699.558.782	-1.893.115.346		29.134.144.847	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,45 %	97,03%	97,31%	28.806.443.436	28.637.142.133	30.699.558.782	-1.893.115.346	97,17 %	29.134.144.847	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.711.807	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.711.807	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.711.807	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.711.807	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.711.807	Kec. Mulyorejo
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					23.043.997.279	23.043.997.279	24.873.374.307	-1.829.377.028		23.220.823.768	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					23.043.997.279	23.043.997.279	24.873.374.307	-1.829.377.028		23.220.823.768	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	63 Orang/bulan	23.043.997.279	23.043.997.279	24.873.374.307	-1.829.377.028	66 Orang/bulan	23.220.823.768	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					23.043.997.279	23.043.997.279	24.873.374.307	-1.829.377.028		23.220.823.768	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	63 Orang/bulan	23.043.997.279	23.043.997.279	24.873.374.307	-1.829.377.028	66 Orang/bulan	23.220.823.768	Kec. Mulyorejo
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					5.617.720.135	5.416.642.113	5.649.681.734	-31.961.599		5.768.483.250	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					5.617.720.135	5.416.642.113	5.649.681.734	-31.961.599		5.768.483.250	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	2 Paket	2 Paket	5.617.720.135	5.416.642.113	5.649.681.734	-31.961.599	22 Paket	5.768.483.250	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.617.720.135	5.416.642.113	5.649.681.734	-31.961.599		5.768.483.250	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	2 Paket	2 Paket	5.617.720.135	5.416.642.113	5.649.681.734	-31.961.599	22 Paket	5.768.483.250	Kec. Mulyorejo
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					142.126.022	172.558.741	172.558.741	-30.432.719		142.126.022	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					142.126.022	172.558.741	172.558.741	-30.432.719		142.126.022	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	142.126.022	172.558.741	172.558.741	-30.432.719	3 Unit	142.126.022	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					142.126.022	172.558.741	172.558.741	-30.432.719		142.126.022	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	142.126.022	172.558.741	172.558.741	-30.432.719	3 Unit	142.126.022	Kec. Mulyorejo
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					45.430.816	232.111.531	232.111.531	-186.680.715		45.430.816	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	45.430.816	232.111.531	232.111.531	-186.680.715	100%	45.430.816	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					45.430.816	232.111.531	232.111.531	-186.680.715		45.430.816	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					45.430.816	232.111.531	232.111.531	-186.680.715		45.430.816	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	45.430.816	232.111.531	232.111.531	-186.680.715	12 Laporan	45.430.816	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					45.430.816	232.111.531	232.111.531	-186.680.715		45.430.816	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	45.430.816	232.111.531	232.111.531	-186.680.715	12 Laporan	45.430.816	Kec. Mulyorejo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	7.450.232.800	7.450.232.800	-7.450.232.800		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	87,50%	87,50%	87,50%	0	7.450.232.800	7.450.232.800	-7.450.232.800	87,50%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	7.450.232.800	7.450.232.800	-7.450.232.800	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	7.450.232.800	7.450.232.800	-7.450.232.800		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	7.450.232.800	7.450.232.800	-7.450.232.800		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	15580 Keluarga	15580 Keluarga	13460 Keluarga	0	7.450.232.800	7.450.232.800	-7.450.232.800	15580 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	265 Keluarga	265 Keluarga	265 Keluarga	0	7.450.232.800	7.450.232.800	-7.450.232.800	265 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	7.450.232.800	7.450.232.800	-7.450.232.800		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	15580 Keluarga	15580 Keluarga	13460 Keluarga	0	7.450.232.800	7.450.232.800	-7.450.232.800	15580 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	265 Keluarga	265 Keluarga	265 Keluarga	0	7.450.232.800	7.450.232.800	-7.450.232.800	265 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	5.595.232.800	5.595.232.800	-5.595.232.800		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	15580 Keluarga	15580 Keluarga	13460 Keluarga	0	5.595.232.800	5.595.232.800	-5.595.232.800	15580 Keluarga	12.000.000	Kec. Mulyorejo
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.855.000.000	1.855.000.000	-1.855.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	265 Keluarga	265 Keluarga	265 Keluarga	0	1.855.000.000	1.855.000.000	-1.855.000.000	265 Keluarga	12.000.000	Kec. Mulyorejo
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					216.743.159	207.249.600	207.249.600	9.493.559		216.743.159	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	216.743.159	207.249.600	207.249.600	9.493.559	100%	216.743.159	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					216.743.159	207.249.600	207.249.600	9.493.559		216.743.159	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					216.743.159	207.249.600	207.249.600	9.493.559		216.743.159	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	216.743.159	207.249.600	207.249.600	9.493.559	12 Laporan	216.743.159	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					216.743.159	207.249.600	207.249.600	9.493.559		216.743.159	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	216.743.159	207.249.600	207.249.600	9.493.559	12 Laporan	216.743.159	Kec. Mulyorejo
	Kelurahan Dukuh Sutorejo					3.532.880.101	3.532.880.101	3.532.880.101	0		3.597.202.098	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.532.880.101	3.532.880.101	3.532.880.101	0		3.597.202.098	
7,01	KECAMATAN					3.532.880.101	3.532.880.101	3.532.880.101	0		3.597.202.098	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.532.880.101	3.532.880.101	3.532.880.101	0		3.597.202.098	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	87,50%	87,50%	87,50%	3.532.880.101	3.532.880.101	3.532.880.101	0	87,50%	3.597.202.098	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.532.880.101	3.532.880.101	3.532.880.101	0	40%	3.597.202.098	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.065.760.202	7.065.760.202	7.065.760.202	0		7.194.404.196	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Dukuh Sutorejo					7.065.760.202	7.065.760.202	7.065.760.202	0		7.194.404.196	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.065.760.202	7.065.760.202	7.065.760.202	0	2 Pokmas / Ormas	7.194.404.196	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.065.760.202	7.065.760.202	7.065.760.202	0	1 Unit	7.194.404.196	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Dukuh Sutorejo					7.065.760.202	7.065.760.202	7.065.760.202	0		7.194.404.196	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.065.760.202	7.065.760.202	7.065.760.202	0	2 Pokmas / Ormas	7.194.404.196	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.065.760.202	7.065.760.202	7.065.760.202	0	1 Unit	7.194.404.196	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.229.080.101	2.307.892.497	2.307.892.497	-78.812.396		2.284.807.100	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.229.080.101	2.307.892.497	2.307.892.497	-78.812.396	1 Unit	2.284.807.100	Kelurahan Dukuh Sutorejo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.303.800.000	1.224.987.604	1.224.987.604	78.812.396		1.312.394.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.303.800.000	1.224.987.604	1.224.987.604	78.812.396	2 Pokmas / Ormas	1.312.394.998	Kelurahan Dukuh Sutorejo
	Kelurahan Kalijudan					4.596.244.371	4.596.244.371	4.596.244.371	0		4.711.150.473	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.596.244.371	4.596.244.371	4.596.244.371	0		4.711.150.473	
7,01	KECAMATAN					4.596.244.371	4.596.244.371	4.596.244.371	0		4.711.150.473	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.596.244.371	4.596.244.371	4.596.244.371	0		4.711.150.473	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	87,50%	87,50%	87,50%	4.596.244.371	4.596.244.371	4.596.244.371	0	87,50%	4.711.150.473	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.596.244.371	4.596.244.371	4.596.244.371	0	40%	4.711.150.473	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.192.488.742	9.192.488.742	9.192.488.742	0		9.422.300.946	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kalijudan					9.192.488.742	9.192.488.742	9.192.488.742	0		9.422.300.946	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	9.192.488.742	9.192.488.742	9.192.488.742	0	2 Pokmas / Ormas	9.422.300.946	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	9.192.488.742	9.192.488.742	9.192.488.742	0	1 Unit	9.422.300.946	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kalijudan					9.192.488.742	9.192.488.742	9.192.488.742	0		9.422.300.946	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	9.192.488.742	9.192.488.742	9.192.488.742	0	2 Pokmas / Ormas	9.422.300.946	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	9.192.488.742	9.192.488.742	9.192.488.742	0	1 Unit	9.422.300.946	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.620.569.183	3.644.825.760	3.644.825.760	-24.256.577		3.711.083.407	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.620.569.183	3.644.825.760	3.644.825.760	-24.256.577	1 Unit	3.711.083.407	Kelurahan Kalijudan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					975.675.188	951.418.611	951.418.611	24.256.577		1.000.067.066	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	975.675.188	951.418.611	951.418.611	24.256.577	2 Pokmas / Ormas	1.000.067.066	Kelurahan Kalijudan
	Kelurahan Kalisari					4.245.051.095	4.245.051.095	4.245.051.095	0		4.362.734.509	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.245.051.095	4.245.051.095	4.245.051.095	0		4.362.734.509	
7,01	KECAMATAN					4.245.051.095	4.245.051.095	4.245.051.095	0		4.362.734.509	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.245.051.095	4.245.051.095	4.245.051.095	0		4.362.734.509	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	87,50%	87,50%	87,50%	4.245.051.095	4.245.051.095	4.245.051.095	0	87,50%	4.362.734.509	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.245.051.095	4.245.051.095	4.245.051.095	0	40%	4.362.734.509	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.490.102.190	8.490.102.190	8.490.102.190	0		8.725.469.018	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kalisari					8.490.102.190	8.490.102.190	8.490.102.190	0		8.725.469.018	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.490.102.190	8.490.102.190	8.490.102.190	0	2 Pokmas / Ormas	8.725.469.018	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	8.490.102.190	8.490.102.190	8.490.102.190	0	1 Unit	8.725.469.018	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kalisari					8.490.102.190	8.490.102.190	8.490.102.190	0		8.725.469.018	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.490.102.190	8.490.102.190	8.490.102.190	0	2 Pokmas / Ormas	8.725.469.018	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	8.490.102.190	8.490.102.190	8.490.102.190	0	1 Unit	8.725.469.018	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.816.025.815	2.816.025.815	2.816.025.815	0		2.897.983.599	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.816.025.815	2.816.025.815	2.816.025.815	0	1 Unit	2.897.983.599	Kelurahan Kalisari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.429.025.280	1.429.025.280	1.429.025.280	0		1.464.750.910	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.429.025.280	1.429.025.280	1.429.025.280	0	2 Pokmas / Ormas	1.464.750.910	Kelurahan Kalisari
	Kelurahan Kejawan Putih Tambak					2.642.680.267	2.642.680.267	2.642.680.267	0		2.708.747.270	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.642.680.267	2.642.680.267	2.642.680.267	0		2.708.747.270	
7,01	KECAMATAN					2.642.680.267	2.642.680.267	2.642.680.267	0		2.708.747.270	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.642.680.267	2.642.680.267	2.642.680.267	0		2.708.747.270	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	87,50%	87,50%	87,50%	2.642.680.267	2.642.680.267	2.642.680.267	0	87,50%	2.708.747.270	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.642.680.267	2.642.680.267	2.642.680.267	0	40%	2.708.747.270	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.285.360.534	5.285.360.534	5.285.360.534	0		5.417.494.540	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kejawan Putih Tambak					5.285.360.534	5.285.360.534	5.285.360.534	0		5.417.494.540	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.285.360.534	5.285.360.534	5.285.360.534	0	2 Pokmas / Ormas	5.417.494.540	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.285.360.534	5.285.360.534	5.285.360.534	0	1 Unit	5.417.494.540	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kejawan Putih Tambak					5.285.360.534	5.285.360.534	5.285.360.534	0		5.417.494.540	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.285.360.534	5.285.360.534	5.285.360.534	0	2 Pokmas / Ormas	5.417.494.540	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.285.360.534	5.285.360.534	5.285.360.534	0	1 Unit	5.417.494.540	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.013.081.302	2.013.710.174	2.027.380.934	-14.299.632		2.063.408.332	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.013.081.302	2.013.710.174	2.027.380.934	-14.299.632	1 Unit	2.063.408.332	Kelurahan Kejawan Putih Tambak
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					629.598.965	628.970.093	615.299.333	14.299.632		645.338.938	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	629.598.965	628.970.093	615.299.333	14.299.632	2 Pokmas / Ormas	645.338.938	Kelurahan Kejawan Putih Tambak
	Kelurahan Manyar Sambangan					3.535.059.044	3.535.059.044	3.535.059.044	0		3.623.435.515	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.535.059.044	3.535.059.044	3.535.059.044	0		3.623.435.515	
7,01	KECAMATAN					3.535.059.044	3.535.059.044	3.535.059.044	0		3.623.435.515	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.535.059.044	3.535.059.044	3.535.059.044	0		3.623.435.515	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	87,50%	87,50%	87,50%	3.535.059.044	3.535.059.044	3.535.059.044	0	87,50%	3.623.435.515	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.535.059.044	3.535.059.044	3.535.059.044	0	40%	3.623.435.515	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.070.118.088	7.070.118.088	7.070.118.088	0		7.246.871.030	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Manyar Sambangan					7.070.118.088	7.070.118.088	7.070.118.088	0		7.246.871.030	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.070.118.088	7.070.118.088	7.070.118.088	0	2 Pokmas / Ormas	7.246.871.030	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.070.118.088	7.070.118.088	7.070.118.088	0	1 Unit	7.246.871.030	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Manyar Sambangan					7.070.118.088	7.070.118.088	7.070.118.088	0		7.246.871.030	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.070.118.088	7.070.118.088	7.070.118.088	0	2 Pokmas / Ormas	7.246.871.030	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.070.118.088	7.070.118.088	7.070.118.088	0	1 Unit	7.246.871.030	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.158.659.044	2.342.252.134	2.342.252.134	-183.593.090		2.212.625.517	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.158.659.044	2.342.252.134	2.342.252.134	-183.593.090	1 Unit	2.212.625.517	Kelurahan Manyar Sambangan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.376.400.000	1.192.806.910	1.192.806.910	183.593.090		1.410.809.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.376.400.000	1.192.806.910	1.192.806.910	183.593.090	2 Pokmas / Ormas	1.410.809.998	Kelurahan Manyar Sambangan
	Kelurahan Mulyorejo					3.593.749.009	3.593.749.009	3.593.749.009	0		3.683.592.729	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.593.749.009	3.593.749.009	3.593.749.009	0		3.683.592.729	
7.01	KECAMATAN					3.593.749.009	3.593.749.009	3.593.749.009	0		3.683.592.729	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.593.749.009	3.593.749.009	3.593.749.009	0		3.683.592.729	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	87,50%	87,50%	87,50%	3.593.749.009	3.593.749.009	3.593.749.009	0	87,50%	3.683.592.729	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.593.749.009	3.593.749.009	3.593.749.009	0	40%	3.683.592.729	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.187.498.018	7.187.498.018	7.187.498.018	0		7.367.185.458	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Mulyorejo					7.187.498.018	7.187.498.018	7.187.498.018	0		7.367.185.458	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.187.498.018	7.187.498.018	7.187.498.018	0	2 Pokmas / Ormas	7.367.185.458	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.187.498.018	7.187.498.018	7.187.498.018	0	1 Unit	7.367.185.458	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Mulyorejo					7.187.498.018	7.187.498.018	7.187.498.018	0		7.367.185.458	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.187.498.018	7.187.498.018	7.187.498.018	0	2 Pokmas / Ormas	7.367.185.458	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.187.498.018	7.187.498.018	7.187.498.018	0	1 Unit	7.367.185.458	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.533.118.636	2.238.279.982	2.238.279.982	-705.161.346		1.571.446.600	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.533.118.636	2.238.279.982	2.238.279.982	-705.161.346	1 Unit	1.571.446.600	Kelurahan Mulyorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.060.630.373	1.355.469.027	1.355.469.027	705.161.346		2.112.146.129	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2.060.630.373	1.355.469.027	1.355.469.027	705.161.346	2 Pokmas / Ormas	2.112.146.129	Kelurahan Mulyorejo
	Kec. Pabean Cantian					23.290.853.616	30.099.798.733	32.186.149.963	-8.895.296.347		23.595.918.022	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					23.290.853.616	23.290.853.616	32.186.149.963	-8.895.296.347		23.595.918.022	
7.01	KECAMATAN					23.290.853.616	30.099.798.733	32.186.149.963	-8.895.296.347		23.595.918.022	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.923.569.638	22.385.467.640	24.470.518.870	-1.546.949.232		23.204.584.593	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,7 %	98,20%	98,22%	22.923.569.638	22.385.467.640	24.470.518.870	-1.546.949.232	98,4 %	23.204.584.593	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.400.000	3.932.000	2.632.000	1.768.000		4.400.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					4.400.000	3.932.000	2.632.000	1.768.000		4.400.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	4.400.000	3.932.000	2.632.000	1.768.000	8 Dokumen	4.400.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.400.000	3.932.000	2.632.000	1.768.000		4.400.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	4.400.000	3.932.000	2.632.000	1.768.000	8 Dokumen	4.400.000	Kec. Pabean Cantian
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.474.675.538	17.474.675.538	19.241.218.492	-1.766.542.954		17.608.622.788	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					17.474.675.538	17.474.675.538	19.241.218.492	-1.766.542.954		17.608.622.788	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	56 Orang/bulan	47 Orang/bulan	17.474.675.538	17.474.675.538	19.241.218.492	-1.766.542.954	57 Orang/bulan	17.608.622.788	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					17.474.675.538	17.474.675.538	19.241.218.492	-1.766.542.954		17.608.622.788	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	56 Orang/bulan	47 Orang/bulan	17.474.675.538	17.474.675.538	19.241.218.492	-1.766.542.954	57 Orang/bulan	17.608.622.788	Kec. Pabean Cantian
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					5.305.935.939	4.794.508.102	5.114.316.378	191.619.561		5.446.075.736	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					5.305.935.939	4.794.508.102	5.114.316.378	191.619.561		5.446.075.736	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	5.305.935.939	4.794.508.102	5.114.316.378	191.619.561	6 Paket	5.446.075.736	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.305.935.939	4.794.508.102	5.114.316.378	191.619.561		5.446.075.736	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	5.305.935.939	4.794.508.102	5.114.316.378	191.619.561	6 Paket	5.446.075.736	Kec. Pabean Cantian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					138.558.161	112.352.000	112.352.000	26.206.161		145.486.069	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					138.558.161	112.352.000	112.352.000	26.206.161		145.486.069	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	138.558.161	112.352.000	112.352.000	26.206.161	4 Unit	145.486.069	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					138.558.161	112.352.000	112.352.000	26.206.161		145.486.069	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	138.558.161	112.352.000	112.352.000	26.206.161	4 Unit	145.486.069	Kec. Pabean Cantian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					220.943.392	220.331.893	220.331.893	611.499		220.992.843	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	220.943.392	220.331.893	220.331.893	611.499	100%	220.992.843	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					220.943.392	220.331.893	220.331.893	611.499		220.992.843	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					220.943.392	220.331.893	220.331.893	611.499		220.992.843	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	220.943.392	220.331.893	220.331.893	611.499	12 Laporan	220.992.843	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					220.943.392	220.331.893	220.331.893	611.499		220.992.843	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	220.943.392	220.331.893	220.331.893	611.499	12 Laporan	220.992.843	Kec. Pabean Cantian
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	7.387.556.800	7.387.556.800	-7.387.556.800		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	0	7.387.556.800	7.387.556.800	-7.387.556.800	100%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	7.387.556.800	7.387.556.800	-7.387.556.800	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	7.387.556.800	7.387.556.800	-7.387.556.800		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	7.387.556.800	7.387.556.800	-7.387.556.800		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	13460 Keluarga	13460 Keluarga	13460 Keluarga	0	7.387.556.800	7.387.556.800	-7.387.556.800	13460 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	250 Keluarga	250 Keluarga	250 Keluarga	0	7.387.556.800	7.387.556.800	-7.387.556.800	250 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	7.387.556.800	7.387.556.800	-7.387.556.800		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	13460 Keluarga	13460 Keluarga	13460 Keluarga	0	7.387.556.800	7.387.556.800	-7.387.556.800	13460 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	250 Keluarga	250 Keluarga	250 Keluarga	0	7.387.556.800	7.387.556.800	-7.387.556.800	250 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	5.637.556.800	5.637.556.800	-5.637.556.800		12.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	13460 Keluarga	13460 Keluarga	13460 Keluarga	0	5.637.556.800	5.637.556.800	-5.637.556.800	13460 Keluarga	12.000.000	Kec. Pabean Cantian
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.750.000.000	1.750.000.000	-1.750.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	250 Keluarga	250 Keluarga	250 Keluarga	0	1.750.000.000	1.750.000.000	-1.750.000.000	250 Keluarga	12.000.000	Kec. Pabean Cantian
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					146.340.586	106.442.400	107.742.400	38.598.186		146.340.586	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	146.340.586	106.442.400	107.742.400	38.598.186	100%	146.340.586	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					146.340.586	106.442.400	107.742.400	38.598.186		146.340.586	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					146.340.586	106.442.400	107.742.400	38.598.186		146.340.586	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	146.340.586	106.442.400	107.742.400	38.598.186	12 Laporan	146.340.586	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					146.340.586	106.442.400	107.742.400	38.598.186		146.340.586	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	146.340.586	106.442.400	107.742.400	38.598.186	12 Laporan	146.340.586	Kec. Pabean Cantian
	Kelurahan Bongkaran					2.692.139.038	2.901.139.037	2.901.139.037	-208.999.999		2.735.442.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.692.139.038	2.901.139.037	2.901.139.037	-208.999.999		2.735.442.510	
7.01	KECAMATAN					2.692.139.038	2.901.139.037	2.901.139.037	-208.999.999		2.735.442.510	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.692.139.038	2.901.139.037	2.901.139.037	-208.999.999		2.735.442.510	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	2.692.139.038	2.901.139.037	2.901.139.037	-208.999.999	100%	2.735.442.510	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.692.139.038	2.901.139.037	2.901.139.037	-208.999.999	40%	2.735.442.510	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.384.278.076	5.802.278.074	5.802.278.074	-417.999.998		5.470.885.020	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Bongkaran					5.384.278.076	5.802.278.074	5.802.278.074	-417.999.998		5.470.885.020	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.384.278.076	5.802.278.074	5.802.278.074	-417.999.998	2 Pokmas / Ormas	5.470.885.020	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.384.278.076	5.802.278.074	5.802.278.074	-417.999.998	2 Unit	5.470.885.020	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bongkaran					5.384.278.076	5.802.278.074	5.802.278.074	-417.999.998		5.470.885.020	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.384.278.076	5.802.278.074	5.802.278.074	-417.999.998	2 Pokmas / Ormas	5.470.885.020	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.384.278.076	5.802.278.074	5.802.278.074	-417.999.998	2 Unit	5.470.885.020	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					762.581.708	1.786.718.947	1.786.718.947	-1.024.137.239		781.646.250	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	762.581.708	1.786.718.947	1.786.718.947	-1.024.137.239	2 Unit	781.646.250	Kelurahan Bongkaran
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.929.557.330	1.114.420.090	1.114.420.090	815.137.240		1.953.796.260	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.929.557.330	1.114.420.090	1.114.420.090	815.137.240	2 Pokmas / Ormas	1.953.796.260	Kelurahan Bongkaran
	Kelurahan Krembangan Utara					4.459.187.565	4.250.187.566	4.250.187.566	208.999.999		4.570.667.248	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.459.187.565	4.459.187.565	4.250.187.566	208.999.999		4.570.667.248	
7,01	KECAMATAN					4.459.187.565	4.250.187.566	4.250.187.566	208.999.999		4.570.667.248	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.459.187.565	4.250.187.566	4.250.187.566	208.999.999		4.570.667.248	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	4.459.187.565	4.250.187.566	4.250.187.566	208.999.999	100%	4.570.667.248	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.459.187.565	4.250.187.566	4.250.187.566	208.999.999	40%	4.570.667.248	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.918.375.130	8.500.375.132	8.500.375.132	417.999.998		9.141.334.496	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Krembangan Utara					8.918.375.130	8.500.375.132	8.500.375.132	417.999.998		9.141.334.496	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	8.918.375.130	8.500.375.132	8.500.375.132	417.999.998	2 Pokmas / Ormas	9.141.334.496	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	8.918.375.130	8.500.375.132	8.500.375.132	417.999.998	2 Unit	9.141.334.496	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Krembangan Utara					8.918.375.130	8.500.375.132	8.500.375.132	417.999.998		9.141.334.496	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	8.918.375.130	8.500.375.132	8.500.375.132	417.999.998	2 Pokmas / Ormas	9.141.334.496	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	8.918.375.130	8.500.375.132	8.500.375.132	417.999.998	2 Unit	9.141.334.496	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.474.627.016	2.560.259.005	2.560.259.005	-85.631.989		2.536.492.688	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2.474.627.016	2.560.259.005	2.560.259.005	-85.631.989	2 Unit	2.536.492.688	Kelurahan Krembangan Utara
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.984.560.549	1.689.928.561	1.689.928.561	294.631.988		2.034.174.560	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.984.560.549	1.689.928.561	1.689.928.561	294.631.988	2 Pokmas / Ormas	2.034.174.560	Kelurahan Krembangan Utara
	Kelurahan Nyamplungan					3.249.368.637	3.249.368.637	3.249.368.637	0		3.330.602.848	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.249.368.637	3.249.368.637	3.249.368.637	0		3.330.602.848	
7,01	KECAMATAN					3.249.368.637	3.249.368.637	3.249.368.637	0		3.330.602.848	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.249.368.637	3.249.368.637	3.249.368.637	0		3.330.602.848	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.249.368.637	3.249.368.637	3.249.368.637	0	100%	3.330.602.848	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.249.368.637	3.249.368.637	3.249.368.637	0	40%	3.330.602.848	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.498.737.274	6.498.737.274	6.498.737.274	0		6.661.205.696	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Nyamplungan					6.498.737.274	6.498.737.274	6.498.737.274	0		6.661.205.696	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.498.737.274	6.498.737.274	6.498.737.274	0	2 Pokmas / Ormas	6.661.205.696	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6.498.737.274	6.498.737.274	6.498.737.274	0	2 Unit	6.661.205.696	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Nyamplungan					6.498.737.274	6.498.737.274	6.498.737.274	0		6.661.205.696	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.498.737.274	6.498.737.274	6.498.737.274	0	2 Pokmas / Ormas	6.661.205.696	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6.498.737.274	6.498.737.274	6.498.737.274	0	2 Unit	6.661.205.696	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.521.608.086	2.027.984.529	2.027.984.529	-506.376.443		1.559.648.286	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.521.608.086	2.027.984.529	2.027.984.529	-506.376.443	2 Unit	1.559.648.286	Kelurahan Nyamplungan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.727.760.551	1.221.384.108	1.221.384.108	506.376.443		1.770.954.562	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.727.760.551	1.221.384.108	1.221.384.108	506.376.443	2 Pokmas / Ormas	1.770.954.562	Kelurahan Nyamplungan
	Kelurahan Tanjung Perak					5.476.150.479	5.476.150.479	5.476.150.479	0		5.681.561.433	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					5.476.150.479	5.476.150.479	5.476.150.479	0		5.681.561.433	
7,01	KECAMATAN					5.476.150.479	5.476.150.479	5.476.150.479	0		5.681.561.433	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.476.150.479	5.476.150.479	5.476.150.479	0		5.681.561.433	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	5.476.150.479	5.476.150.479	5.476.150.479	0	100%	5.681.561.433	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	5.476.150.479	5.476.150.479	5.476.150.479	0	40%	5.681.561.433	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					10.952.300.958	10.952.300.958	10.952.300.958	0		11.363.122.866	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tanjung Perak					10.952.300.958	10.952.300.958	10.952.300.958	0		11.363.122.866	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	10.952.300.958	10.952.300.958	10.952.300.958	0	2 Pokmas / Ormas	11.363.122.866	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	10.952.300.958	10.952.300.958	10.952.300.958	0	2 Unit	11.363.122.866	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tanjung Perak					10.952.300.958	10.952.300.958	10.952.300.958	0		11.363.122.866	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	10.952.300.958	10.952.300.958	10.952.300.958	0	2 Pokmas / Ormas	11.363.122.866	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	10.952.300.958	10.952.300.958	10.952.300.958	0	2 Unit	11.363.122.866	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.493.889.245	2.641.768.675	2.641.768.675	-1.147.879.430		1.599.743.674	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.493.889.245	2.641.768.675	2.641.768.675	-1.147.879.430	2 Unit	1.599.743.674	Kelurahan Tanjung Perak
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3.982.261.234	2.834.381.804	2.834.381.804	1.147.879.430		4.081.817.759	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3.982.261.234	2.834.381.804	2.834.381.804	1.147.879.430	2 Pokmas / Ormas	4.081.817.759	Kelurahan Tanjung Perak
	Kec. Pakal					22.080.637.595	29.195.794.183	29.762.196.055	-7.681.558.460		22.368.115.100	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					22.080.637.595	22.080.637.595	29.762.196.055	-7.681.558.460		22.368.115.100	
7.01	KECAMATAN					22.080.637.595	29.195.794.183	29.762.196.055	-7.681.558.460		22.368.115.100	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.797.223.095	21.529.545.490	22.078.909.012	-281.685.917		22.060.700.600	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,49 %	97,45%	97,45%	21.797.223.095	21.529.545.490	22.078.909.012	-281.685.917	97,46 %	22.060.700.600	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Pakal
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.741.522.181	16.741.522.181	17.103.795.668	-362.273.487		16.869.348.876	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					16.741.522.181	16.741.522.181	17.103.795.668	-362.273.487		16.869.348.876	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	43 Orang/bulan	16.741.522.181	16.741.522.181	17.103.795.668	-362.273.487	60 Orang/bulan	16.869.348.876	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					16.741.522.181	16.741.522.181	17.103.795.668	-362.273.487		16.869.348.876	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	43 Orang/bulan	16.741.522.181	16.741.522.181	17.103.795.668	-362.273.487	60 Orang/bulan	16.869.348.876	Kec. Pakal
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.917.803.364	4.652.575.309	4.820.482.894	97.320.470		5.053.454.174	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					4.917.803.364	4.652.575.309	4.820.482.894	97.320.470		5.053.454.174	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	4.917.803.364	4.652.575.309	4.820.482.894	97.320.470	10 Paket	5.053.454.174	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.917.803.364	4.652.575.309	4.820.482.894	97.320.470		5.053.454.174	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	4.917.803.364	4.652.575.309	4.820.482.894	97.320.470	10 Paket	5.053.454.174	Kec. Pakal
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					135.297.550	131.504.000	150.686.450	-15.388.900		135.297.550	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					135.297.550	131.504.000	150.686.450	-15.388.900		135.297.550	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	1 Unit	1 Unit	135.297.550	131.504.000	150.686.450	-15.388.900	19 Unit	135.297.550	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					135.297.550	131.504.000	150.686.450	-15.388.900		135.297.550	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	1 Unit	1 Unit	135.297.550	131.504.000	150.686.450	-15.388.900	19 Unit	135.297.550	Kec. Pakal
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					145.137.600	149.908.693	149.908.693	-4.771.093		145.137.600	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	145.137.600	149.908.693	149.908.693	-4.771.093	100%	145.137.600	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					145.137.600	149.908.693	149.908.693	-4.771.093		145.137.600	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					145.137.600	149.908.693	149.908.693	-4.771.093		145.137.600	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	145.137.600	149.908.693	149.908.693	-4.771.093	12 Laporan	145.137.600	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					145.137.600	149.908.693	149.908.693	-4.771.093		145.137.600	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	145.137.600	149.908.693	149.908.693	-4.771.093	12 Laporan	145.137.600	Kec. Pakal
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	7.377.768.800	7.377.768.800	-7.377.768.800		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	92%	88%	88%	0	7.377.768.800	7.377.768.800	-7.377.768.800	89%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	7.377.768.800	7.377.768.800	-7.377.768.800	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	7.377.768.800	7.377.768.800	-7.377.768.800		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	7.377.768.800	7.377.768.800	-7.377.768.800		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	14940 Keluarga	14940 Keluarga	14600 Keluarga	0	7.377.768.800	7.377.768.800	-7.377.768.800	14940 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	0	7.377.768.800	7.377.768.800	-7.377.768.800	170 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	7.377.768.800	7.377.768.800	-7.377.768.800		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	14940 Keluarga	14940 Keluarga	14600 Keluarga	0	7.377.768.800	7.377.768.800	-7.377.768.800	14940 Keluarga	24.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	0	7.377.768.800	7.377.768.800	-7.377.768.800	170 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	6.187.768.800	6.187.768.800	-6.187.768.800		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	14940 Keluarga	14940 Keluarga	14600 Keluarga	0	6.187.768.800	6.187.768.800	-6.187.768.800	14940 Keluarga	12.000.000	Kec. Pakal
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.190.000.000	1.190.000.000	-1.190.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	0	1.190.000.000	1.190.000.000	-1.190.000.000	170 Keluarga	12.000.000	Kec. Pakal
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					138.276.900	138.571.200	155.609.550	-17.332.650		138.276.900	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	138.276.900	138.571.200	155.609.550	-17.332.650	100%	138.276.900	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					138.276.900	138.571.200	155.609.550	-17.332.650		138.276.900	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					138.276.900	138.571.200	155.609.550	-17.332.650		138.276.900	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	138.276.900	138.571.200	155.609.550	-17.332.650	12 Laporan	138.276.900	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					138.276.900	138.571.200	155.609.550	-17.332.650		138.276.900	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	138.276.900	138.571.200	155.609.550	-17.332.650	12 Laporan	138.276.900	Kec. Pakal
	Kelurahan Babat Jerawat					4.555.598.987	4.555.598.987	4.555.598.987	0		4.645.488.955	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.555.598.987	4.555.598.987	4.555.598.987	0		4.645.488.955	
7,01	KECAMATAN					4.555.598.987	4.555.598.987	4.555.598.987	0		4.645.488.955	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.555.598.987	4.555.598.987	4.555.598.987	0		4.645.488.955	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	92%	88%	88%	4.555.598.987	4.555.598.987	4.555.598.987	0	89%	4.645.488.955	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.555.598.987	4.555.598.987	4.555.598.987	0	40%	4.645.488.955	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.111.197.974	9.111.197.974	9.111.197.974	0		9.290.977.910	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Babat Jerawat					9.111.197.974	9.111.197.974	9.111.197.974	0		9.290.977.910	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	9.111.197.974	9.111.197.974	9.111.197.974	0	5 Pokmas / Ormas	9.290.977.910	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	6 Unit	6 Unit	9.111.197.974	9.111.197.974	9.111.197.974	0	33 Unit	9.290.977.910	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Babat Jerawat					9.111.197.974	9.111.197.974	9.111.197.974	0		9.290.977.910	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	9.111.197.974	9.111.197.974	9.111.197.974	0	5 Pokmas / Ormas	9.290.977.910	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	6 Unit	6 Unit	9.111.197.974	9.111.197.974	9.111.197.974	0	33 Unit	9.290.977.910	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.306.798.987	3.032.450.125	3.032.450.125	-725.651.138		2.364.468.958	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	6 Unit	6 Unit	2.306.798.987	3.032.450.125	3.032.450.125	-725.651.138	33 Unit	2.364.468.958	Kelurahan Babat Jerawat
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.248.800.000	1.523.148.862	1.523.148.862	725.651.138		2.281.019.997	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2.248.800.000	1.523.148.862	1.523.148.862	725.651.138	5 Pokmas / Ormas	2.281.019.997	Kelurahan Babat Jerawat
	Kelurahan Benowo					3.910.726.421	3.910.726.421	3.910.726.421	0		4.008.494.576	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.910.726.421	3.910.726.421	3.910.726.421	0		4.008.494.576	
7.01	KECAMATAN					3.910.726.421	3.910.726.421	3.910.726.421	0		4.008.494.576	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.910.726.421	3.910.726.421	3.910.726.421	0		4.008.494.576	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	92%	88%	88%	3.910.726.421	3.910.726.421	3.910.726.421	0	89%	4.008.494.576	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.910.726.421	3.910.726.421	3.910.726.421	0	40%	4.008.494.576	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.821.452.842	7.821.452.842	7.821.452.842	0		8.016.989.152	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Benowo					7.821.452.842	7.821.452.842	7.821.452.842	0		8.016.989.152	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.821.452.842	7.821.452.842	7.821.452.842	0	4 Pokmas / Ormas	8.016.989.152	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	11 Unit	11 Unit	7.821.452.842	7.821.452.842	7.821.452.842	0	20 Unit	8.016.989.152	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Benowo					7.821.452.842	7.821.452.842	7.821.452.842	0		8.016.989.152	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.821.452.842	7.821.452.842	7.821.452.842	0	4 Pokmas / Ormas	8.016.989.152	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	11 Unit	11 Unit	7.821.452.842	7.821.452.842	7.821.452.842	0	20 Unit	8.016.989.152	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.008.326.421	3.008.326.421	3.008.326.421	0		3.083.534.577	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	11 Unit	11 Unit	3.008.326.421	3.008.326.421	3.008.326.421	0	20 Unit	3.083.534.577	Kelurahan Benowo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					902.400.000	902.400.000	902.400.000	0		924.959.999	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	902.400.000	902.400.000	902.400.000	0	4 Pokmas / Ormas	924.959.999	Kelurahan Benowo
	Kelurahan Pakal					3.706.421.791	3.706.421.791	3.706.421.791	0		3.799.082.330	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.706.421.791	3.706.421.791	3.706.421.791	0		3.799.082.330	
7,01	KECAMATAN					3.706.421.791	3.706.421.791	3.706.421.791	0		3.799.082.330	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.706.421.791	3.706.421.791	3.706.421.791	0		3.799.082.330	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	92%	88%	88%	3.706.421.791	3.706.421.791	3.706.421.791	0	89%	3.799.082.330	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.706.421.791	3.706.421.791	3.706.421.791	0	40%	3.799.082.330	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.412.843.582	7.412.843.582	7.412.843.582	0		7.598.164.660	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Pakal					7.412.843.582	7.412.843.582	7.412.843.582	0		7.598.164.660	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.412.843.582	7.412.843.582	7.412.843.582	0	2 Pokmas / Ormas	7.598.164.660	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	11 Unit	7.412.843.582	7.412.843.582	7.412.843.582	0	6 Unit	7.598.164.660	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pakal					7.412.843.582	7.412.843.582	7.412.843.582	0		7.598.164.660	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.412.843.582	7.412.843.582	7.412.843.582	0	2 Pokmas / Ormas	7.598.164.660	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	11 Unit	7.412.843.582	7.412.843.582	7.412.843.582	0	6 Unit	7.598.164.660	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.960.021.791	2.970.141.925	2.970.141.925	-10.120.134		3.034.022.331	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	11 Unit	2.960.021.791	2.970.141.925	2.970.141.925	-10.120.134	6 Unit	3.034.022.331	Kelurahan Pakal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					746.400.000	736.279.866	736.279.866	10.120.134		765.059.999	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	746.400.000	736.279.866	736.279.866	10.120.134	2 Pokmas / Ormas	765.059.999	Kelurahan Pakal
	Kelurahan Sumberejo					4.503.288.070	4.503.288.070	4.503.288.070	0		4.702.786.265	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.503.288.070	4.503.288.070	4.503.288.070	0		4.702.786.265	
7,01	KECAMATAN					4.503.288.070	4.503.288.070	4.503.288.070	0		4.702.786.265	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.503.288.070	4.503.288.070	4.503.288.070	0		4.702.786.265	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	92%	88%	88%	4.503.288.070	4.503.288.070	4.503.288.070	0	89%	4.702.786.265	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.503.288.070	4.503.288.070	4.503.288.070	0	40%	4.702.786.265	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.006.576.140	9.006.576.140	9.006.576.140	0		9.405.572.530	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sumberejo					9.006.576.140	9.006.576.140	9.006.576.140	0		9.405.572.530	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	9.006.576.140	9.006.576.140	9.006.576.140	0	6 Pokmas / Ormas	9.405.572.530	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	9.006.576.140	9.006.576.140	9.006.576.140	0	3 Unit	9.405.572.530	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sumberejo					9.006.576.140	9.006.576.140	9.006.576.140	0		9.405.572.530	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	9.006.576.140	9.006.576.140	9.006.576.140	0	6 Pokmas / Ormas	9.405.572.530	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	9.006.576.140	9.006.576.140	9.006.576.140	0	3 Unit	9.405.572.530	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.570.888.070	3.574.323.790	3.574.323.790	-3.435.720		3.747.076.266	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3.570.888.070	3.574.323.790	3.574.323.790	-3.435.720	3 Unit	3.747.076.266	Kelurahan Sumberejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					932.400.000	928.964.280	928.964.280	3.435.720		955.709.999	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	932.400.000	928.964.280	928.964.280	3.435.720	6 Pokmas / Ormas	955.709.999	Kelurahan Sumberejo
	Kec. Rungkut					29.745.279.283	41.128.638.885	43.433.947.825	-13.688.668.542		30.123.087.774	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					29.745.279.283	29.745.279.283	43.433.947.825	-13.688.668.542		30.123.087.774	
7,01	KECAMATAN					29.745.279.283	41.128.638.885	43.433.947.825	-13.688.668.542		30.123.087.774	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.183.070.123	28.508.840.554	30.814.149.494	-1.631.079.371		29.536.174.773	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	100%	29.183.070.123	28.508.840.554	30.814.149.494	-1.631.079.371	100%	29.536.174.773	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Rungkut
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					22.506.872.594	22.506.872.594	24.393.160.100	-1.886.287.506		22.679.408.987	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan AS					22.506.872.594	22.506.872.594	24.393.160.100	-1.886.287.506		22.679.408.987	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	76 Orang/bulan	56 Orang/bulan	22.506.872.594	22.506.872.594	24.393.160.100	-1.886.287.506	76 Orang/bulan	22.679.408.987	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					22.506.872.594	22.506.872.594	24.393.160.100	-1.886.287.506		22.679.408.987	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	76 Orang/bulan	56 Orang/bulan	22.506.872.594	22.506.872.594	24.393.160.100	-1.886.287.506	76 Orang/bulan	22.679.408.987	Kec. Rungkut
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					6.572.955.929	5.882.231.960	6.301.253.394	271.702.535		6.753.524.186	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					6.572.955.929	5.882.231.960	6.301.253.394	271.702.535		6.753.524.186	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	6.572.955.929	5.882.231.960	6.301.253.394	271.702.535	12 Paket	6.753.524.186	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6.572.955.929	5.882.231.960	6.301.253.394	271.702.535		6.753.524.186	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	6.572.955.929	5.882.231.960	6.301.253.394	271.702.535	12 Paket	6.753.524.186	Kec. Rungkut

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.641.600	115.792.000	115.792.000	-15.150.400		100.641.600	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100.641.600	115.792.000	115.792.000	-15.150.400		100.641.600	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100.641.600	115.792.000	115.792.000	-15.150.400	5 Unit	100.641.600	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.641.600	115.792.000	115.792.000	-15.150.400		100.641.600	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100.641.600	115.792.000	115.792.000	-15.150.400	5 Unit	100.641.600	Kec. Rungkut
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					408.379.360	322.464.331	322.464.331	85.915.029		409.083.201	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	408.379.360	322.464.331	322.464.331	85.915.029	100%	409.083.201	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					408.379.360	322.464.331	322.464.331	85.915.029		409.083.201	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					408.379.360	322.464.331	322.464.331	85.915.029		409.083.201	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	408.379.360	322.464.331	322.464.331	85.915.029	12 Laporan	409.083.201	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					408.379.360	322.464.331	322.464.331	85.915.029		409.083.201	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	408.379.360	322.464.331	322.464.331	85.915.029	12 Laporan	409.083.201	Kec. Rungkut
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	12.095.970.400	12.095.970.400	-12.095.970.400		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	0	12.095.970.400	12.095.970.400	-12.095.970.400	100%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	12.095.970.400	12.095.970.400	-12.095.970.400	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	12.095.970.400	12.095.970.400	-12.095.970.400		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	12.095.970.400	12.095.970.400	-12.095.970.400		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	21960 Keluarga	21960 Keluarga	21960 Keluarga	0	12.095.970.400	12.095.970.400	-12.095.970.400	21960 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	370 Keluarga	370 Keluarga	370 Keluarga	0	12.095.970.400	12.095.970.400	-12.095.970.400	370 Keluarga	24.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	12.095.970.400	12.095.970.400	-12.095.970.400		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	21960 Keluarga	21960 Keluarga	21960 Keluarga	0	12.095.970.400	12.095.970.400	-12.095.970.400	21960 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	370 Keluarga	370 Keluarga	370 Keluarga	0	12.095.970.400	12.095.970.400	-12.095.970.400	370 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	9.505.970.400	9.505.970.400	-9.505.970.400		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	21960 Keluarga	21960 Keluarga	21960 Keluarga	0	9.505.970.400	9.505.970.400	-9.505.970.400	21960 Keluarga	12.000.000	Kec. Rungkut
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	2.590.000.000	2.590.000.000	-2.590.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	370 Keluarga	370 Keluarga	370 Keluarga	0	2.590.000.000	2.590.000.000	-2.590.000.000	370 Keluarga	12.000.000	Kec. Rungkut
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					153.829.800	201.363.600	201.363.600	-47.533.800		153.829.800	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	153.829.800	201.363.600	201.363.600	-47.533.800	100%	153.829.800	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					153.829.800	201.363.600	201.363.600	-47.533.800		153.829.800	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					153.829.800	201.363.600	201.363.600	-47.533.800		153.829.800	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	153.829.800	201.363.600	201.363.600	-47.533.800	12 Laporan	153.829.800	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					153.829.800	201.363.600	201.363.600	-47.533.800		153.829.800	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	153.829.800	201.363.600	201.363.600	-47.533.800	12 Laporan	153.829.800	Kec. Rungkut
	Kelurahan Kalirungkut					4.068.468.404	4.068.468.404	4.068.468.404	0		4.146.180.108	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.068.468.404	4.068.468.404	4.068.468.404	0		4.146.180.108	
7,01	KECAMATAN					4.068.468.404	4.068.468.404	4.068.468.404	0		4.146.180.108	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.068.468.404	4.068.468.404	4.068.468.404	0		4.146.180.108	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	4.068.468.404	4.068.468.404	4.068.468.404	0	100%	4.146.180.108	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.068.468.404	4.068.468.404	4.068.468.404	0	40%	4.146.180.108	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.136.936.808	8.136.936.808	8.136.936.808	0		8.292.360.216	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kalirungkut					8.136.936.808	8.136.936.808	8.136.936.808	0		8.292.360.216	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.136.936.808	8.136.936.808	8.136.936.808	0	2 Pokmas / Ormas	8.292.360.216	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	8.136.936.808	8.136.936.808	8.136.936.808	0	5 Unit	8.292.360.216	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kalirungkut					8.136.936.808	8.136.936.808	8.136.936.808	0		8.292.360.216	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.136.936.808	8.136.936.808	8.136.936.808	0	2 Pokmas / Ormas	8.292.360.216	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	8.136.936.808	8.136.936.808	8.136.936.808	0	5 Unit	8.292.360.216	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.947.468.404	2.713.068.404	2.713.068.404	-765.600.000		1.996.155.111	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1.947.468.404	2.713.068.404	2.713.068.404	-765.600.000	5 Unit	1.996.155.111	Kelurahan Kalirungkut
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.121.000.000	1.355.400.000	1.355.400.000	765.600.000		2.150.024.997	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2.121.000.000	1.355.400.000	1.355.400.000	765.600.000	2 Pokmas / Ormas	2.150.024.997	Kelurahan Kalirungkut
	Kelurahan Kedung Baruk					3.365.570.565	3.365.570.565	3.365.570.565	0		3.449.709.824	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.365.570.565	3.365.570.565	3.365.570.565	0		3.449.709.824	
7,01	KECAMATAN					3.365.570.565	3.365.570.565	3.365.570.565	0		3.449.709.824	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.365.570.565	3.365.570.565	3.365.570.565	0		3.449.709.824	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.365.570.565	3.365.570.565	3.365.570.565	0	100%	3.449.709.824	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.365.570.565	3.365.570.565	3.365.570.565	0	40%	3.449.709.824	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.731.141.130	6.731.141.130	6.731.141.130	0		6.899.419.648	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kedung Baruk					6.731.141.130	6.731.141.130	6.731.141.130	0		6.899.419.648	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.731.141.130	6.731.141.130	6.731.141.130	0	2 Pokmas / Ormas	6.899.419.648	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	6.731.141.130	6.731.141.130	6.731.141.130	0	10 Unit	6.899.419.648	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kedung Baruk					6.731.141.130	6.731.141.130	6.731.141.130	0		6.899.419.648	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.731.141.130	6.731.141.130	6.731.141.130	0	2 Pokmas / Ormas	6.899.419.648	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	6.731.141.130	6.731.141.130	6.731.141.130	0	10 Unit	6.899.419.648	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.111.570.565	2.577.170.565	2.577.170.565	-465.600.000		2.164.359.826	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	2.111.570.565	2.577.170.565	2.577.170.565	-465.600.000	10 Unit	2.164.359.826	Kelurahan Kedung Baruk
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.254.000.000	788.400.000	788.400.000	465.600.000		1.285.349.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.254.000.000	788.400.000	788.400.000	465.600.000	2 Pokmas / Ormas	1.285.349.998	Kelurahan Kedung Baruk
	Kelurahan Medokan Ayu					4.447.111.545	4.447.111.545	4.447.111.545	0		4.558.289.327	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.447.111.545	4.447.111.545	4.447.111.545	0		4.558.289.327	
7,01	KECAMATAN					4.447.111.545	4.447.111.545	4.447.111.545	0		4.558.289.327	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.447.111.545	4.447.111.545	4.447.111.545	0		4.558.289.327	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	4.447.111.545	4.447.111.545	4.447.111.545	0	100%	4.558.289.327	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.447.111.545	4.447.111.545	4.447.111.545	0	40%	4.558.289.327	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.894.223.090	8.894.223.090	8.894.223.090	0		9.116.578.654	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Medokan Ayu					8.894.223.090	8.894.223.090	8.894.223.090	0		9.116.578.654	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.894.223.090	8.894.223.090	8.894.223.090	0	2 Pokmas / Ormas	9.116.578.654	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	8.894.223.090	8.894.223.090	8.894.223.090	0	4 Unit	9.116.578.654	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Medokan Ayu					8.894.223.090	8.894.223.090	8.894.223.090	0		9.116.578.654	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.894.223.090	8.894.223.090	8.894.223.090	0	2 Pokmas / Ormas	9.116.578.654	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	8.894.223.090	8.894.223.090	8.894.223.090	0	4 Unit	9.116.578.654	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.902.511.545	2.852.911.545	2.852.911.545	-950.400.000		1.950.074.331	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.902.511.545	2.852.911.545	2.852.911.545	-950.400.000	4 Unit	1.950.074.331	Kelurahan Medokan Ayu
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.544.600.000	1.594.200.000	1.594.200.000	950.400.000		2.608.214.996	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2.544.600.000	1.594.200.000	1.594.200.000	950.400.000	2 Pokmas / Ormas	2.608.214.996	Kelurahan Medokan Ayu
	Kelurahan Penjaringansari					3.170.898.178	3.170.898.178	3.170.898.178	0		3.250.170.628	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.170.898.178	3.170.898.178	3.170.898.178	0		3.250.170.628	
7,01	KECAMATAN					3.170.898.178	3.170.898.178	3.170.898.178	0		3.250.170.628	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.170.898.178	3.170.898.178	3.170.898.178	0		3.250.170.628	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.170.898.178	3.170.898.178	3.170.898.178	0	100%	3.250.170.628	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.170.898.178	3.170.898.178	3.170.898.178	0	40%	3.250.170.628	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.341.796.356	6.341.796.356	6.341.796.356	0		6.500.341.256	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Penjaringansari					6.341.796.356	6.341.796.356	6.341.796.356	0		6.500.341.256	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.341.796.356	6.341.796.356	6.341.796.356	0	2 Pokmas / Ormas	6.500.341.256	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	6.341.796.356	6.341.796.356	6.341.796.356	0	4 Unit	6.500.341.256	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Penjaringansari					6.341.796.356	6.341.796.356	6.341.796.356	0		6.500.341.256	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.341.796.356	6.341.796.356	6.341.796.356	0	2 Pokmas / Ormas	6.500.341.256	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	6.341.796.356	6.341.796.356	6.341.796.356	0	4 Unit	6.500.341.256	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.389.659.156	1.753.562.580	1.753.562.580	-363.903.424		1.424.400.633	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.389.659.156	1.753.562.580	1.753.562.580	-363.903.424	4 Unit	1.424.400.633	Kelurahan Penjaringansari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.781.239.022	1.417.335.598	1.417.335.598	363.903.424		1.825.769.995	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.781.239.022	1.417.335.598	1.417.335.598	363.903.424	2 Pokmas / Ormas	1.825.769.995	Kelurahan Penjaringansari
	Kelurahan Rungkut Kidul					3.084.926.237	3.084.926.237	3.084.926.237	0		3.162.049.389	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.084.926.237	3.084.926.237	3.084.926.237	0		3.162.049.389	
7.01	KECAMATAN					3.084.926.237	3.084.926.237	3.084.926.237	0		3.162.049.389	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.084.926.237	3.084.926.237	3.084.926.237	0		3.162.049.389	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.084.926.237	3.084.926.237	3.084.926.237	0	100%	3.162.049.389	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.084.926.237	3.084.926.237	3.084.926.237	0	40%	3.162.049.389	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.169.852.474	6.169.852.474	6.169.852.474	0		6.324.098.778	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Rungkut Kidul					6.169.852.474	6.169.852.474	6.169.852.474	0		6.324.098.778	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	6.169.852.474	6.169.852.474	6.169.852.474	0	3 Pokmas / Ormas	6.324.098.778	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	6.169.852.474	6.169.852.474	6.169.852.474	0	12 Unit	6.324.098.778	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Rungkut Kidul					6.169.852.474	6.169.852.474	6.169.852.474	0		6.324.098.778	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	6.169.852.474	6.169.852.474	6.169.852.474	0	3 Pokmas / Ormas	6.324.098.778	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	6.169.852.474	6.169.852.474	6.169.852.474	0	12 Unit	6.324.098.778	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.507.588.637	2.081.389.264	1.981.274.146	-473.685.509		1.545.278.351	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.507.588.637	2.081.389.264	1.981.274.146	-473.685.509	12 Unit	1.545.278.351	Kelurahan Rungkut Kidul
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.577.337.600	1.003.536.973	1.103.652.091	473.685.509		1.616.771.038	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.577.337.600	1.003.536.973	1.103.652.091	473.685.509	3 Pokmas / Ormas	1.616.771.038	Kelurahan Rungkut Kidul
	Kelurahan Wonorejo					2.518.617.754	2.518.617.754	2.518.617.754	0		2.595.479.020	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.518.617.754	2.518.617.754	6.436.127.169	-3.917.509.415		2.595.479.020	
7.01	KECAMATAN					2.518.617.754	2.518.617.754	6.436.127.169	-3.917.509.415		2.595.479.020	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.518.617.754	2.518.617.754	6.436.127.169	-3.917.509.415		2.595.479.020	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	2.518.617.754	2.518.617.754	6.436.127.169	-3.917.509.415	100%	2.595.479.020	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.518.617.754	2.518.617.754	6.436.127.169	-3.917.509.415	40%	2.595.479.020	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.037.235.508	5.037.235.508	5.037.235.508	0		5.190.958.040	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Wonorejo					5.037.235.508	5.037.235.508	5.037.235.508	0		5.190.958.040	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	5.037.235.508	5.037.235.508	5.037.235.508	0	1 Pokmas / Ormas	5.190.958.040	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.037.235.508	5.037.235.508	5.037.235.508	0	2 Pokmas / Ormas	5.190.958.040	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	5.037.235.508	5.037.235.508	5.037.235.508	0	10 Unit	5.190.958.040	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	5.037.235.508	5.037.235.508	5.037.235.508	0	14 Unit	5.190.958.040	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Wonorejo					5.037.235.508	5.037.235.508	5.037.235.508	0		5.190.958.040	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	5.037.235.508	5.037.235.508	5.037.235.508	0	1 Pokmas / Ormas	5.190.958.040	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.037.235.508	5.037.235.508	5.037.235.508	0	2 Pokmas / Ormas	5.190.958.040	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	5.037.235.508	5.037.235.508	5.037.235.508	0	10 Unit	5.190.958.040	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	5.037.235.508	5.037.235.508	5.037.235.508	0	14 Unit	5.190.958.040	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.145.817.754	1.635.017.754	1.635.017.754	-489.200.000		1.188.359.022	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.145.817.754	1.635.017.754	1.635.017.754	-489.200.000	10 Unit	1.188.359.022	Kelurahan Wonorejo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.828.422.443	2.099.254.080	2.254.262.144	-425.839.701		1.874.133.001	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.828.422.443	2.099.254.080	2.254.262.144	-425.839.701	14 Unit	1.874.133.001	Kelurahan Wonorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.089.086.972	1.818.255.335	1.663.247.271	425.839.701		2.141.314.143	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.089.086.972	1.818.255.335	1.663.247.271	425.839.701	1 Pokmas / Ormas	2.141.314.143	Kelurahan Wonorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.372.800.000	883.600.000	883.600.000	489.200.000		1.407.119.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.372.800.000	883.600.000	883.600.000	489.200.000	2 Pokmas / Ormas	1.407.119.998	Kelurahan Wonorejo
	Kec. Sambikerep					21.148.384.904	27.537.046.416	29.497.145.012	-8.348.760.108		21.420.126.392	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					21.148.384.904	21.148.384.904	29.497.145.012	-8.348.760.108		21.420.126.392	
7,01	KECAMATAN					21.148.384.904	27.537.046.416	29.497.145.012	-8.348.760.108		21.420.126.392	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.734.310.082	20.356.007.323	22.316.105.919	-1.581.795.837		20.981.390.961	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,48 %	97,46%	97,46%	20.734.310.082	20.356.007.323	22.316.105.919	-1.581.795.837	97,46 %	20.981.390.961	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.800.000	3.944.000	3.944.000	3.856.000		7.800.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					7.800.000	3.944.000	3.944.000	3.856.000		7.800.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	7.800.000	3.944.000	3.944.000	3.856.000	8 Dokumen	7.800.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.800.000	3.944.000	3.944.000	3.856.000		7.800.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	7.800.000	3.944.000	3.944.000	3.856.000	8 Dokumen	7.800.000	Kec. Sambikerep
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.212.969.169	16.212.969.169	17.889.773.779	-1.676.804.610		16.336.794.876	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					16.212.969.169	16.212.969.169	17.889.773.779	-1.676.804.610		16.336.794.876	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	44 Orang/bulan	16.212.969.169	16.212.969.169	17.889.773.779	-1.676.804.610	40 Orang/bulan	16.336.794.876	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					16.212.969.169	16.212.969.169	17.889.773.779	-1.676.804.610		16.336.794.876	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	44 Orang/bulan	16.212.969.169	16.212.969.169	17.889.773.779	-1.676.804.610	40 Orang/bulan	16.336.794.876	Kec. Sambikerep
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.387.317.713	4.007.590.154	4.290.884.140	96.433.573		4.510.572.885	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					4.387.317.713	4.007.590.154	4.290.884.140	96.433.573		4.510.572.885	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	4.387.317.713	4.007.590.154	4.290.884.140	96.433.573	8 Paket	4.510.572.885	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.387.317.713	4.007.590.154	4.290.884.140	96.433.573		4.510.572.885	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	4.387.317.713	4.007.590.154	4.290.884.140	96.433.573	8 Paket	4.510.572.885	Kec. Sambikerep
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					126.223.200	131.504.000	131.504.000	-5.280.800		126.223.200	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					126.223.200	131.504.000	131.504.000	-5.280.800		126.223.200	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	126.223.200	131.504.000	131.504.000	-5.280.800	4 Unit	126.223.200	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					126.223.200	131.504.000	131.504.000	-5.280.800		126.223.200	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	126.223.200	131.504.000	131.504.000	-5.280.800	4 Unit	126.223.200	Kec. Sambikerep

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					249.439.980	167.303.893	167.303.893	82.136.087		250.100.589	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	249.439.980	167.303.893	167.303.893	82.136.087	100%	250.100.589	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					249.439.980	167.303.893	167.303.893	82.136.087		250.100.589	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					249.439.980	167.303.893	167.303.893	82.136.087		250.100.589	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	249.439.980	167.303.893	167.303.893	82.136.087	12 Laporan	250.100.589	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					249.439.980	167.303.893	167.303.893	82.136.087		250.100.589	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	249.439.980	167.303.893	167.303.893	82.136.087	12 Laporan	250.100.589	Kec. Sambikerep
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	6.823.655.200	6.823.655.200	-6.823.655.200		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	0	6.823.655.200	6.823.655.200	-6.823.655.200	75%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	6.823.655.200	6.823.655.200	-6.823.655.200	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	6.823.655.200	6.823.655.200	-6.823.655.200		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	6.823.655.200	6.823.655.200	-6.823.655.200		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12840 Keluarga	12840 Keluarga	12840 Keluarga	0	6.823.655.200	6.823.655.200	-6.823.655.200	12840 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	190 Keluarga	190 Keluarga	190 Keluarga	0	6.823.655.200	6.823.655.200	-6.823.655.200	190 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	6.823.655.200	6.823.655.200	-6.823.655.200		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12840 Keluarga	12840 Keluarga	12840 Keluarga	0	6.823.655.200	6.823.655.200	-6.823.655.200	12840 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	190 Keluarga	190 Keluarga	190 Keluarga	0	6.823.655.200	6.823.655.200	-6.823.655.200	190 Keluarga	24.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	5.493.655.200	5.493.655.200	-5.493.655.200		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12840 Keluarga	12840 Keluarga	12840 Keluarga	0	5.493.655.200	5.493.655.200	-5.493.655.200	12840 Keluarga	12.000.000	Kec. Sambikerep
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.330.000.000	1.330.000.000	-1.330.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	190 Keluarga	190 Keluarga	190 Keluarga	0	1.330.000.000	1.330.000.000	-1.330.000.000	190 Keluarga	12.000.000	Kec. Sambikerep
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					164.634.842	190.080.000	190.080.000	-25.445.158		164.634.842	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	164.634.842	190.080.000	190.080.000	-25.445.158	100%	164.634.842	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					164.634.842	190.080.000	190.080.000	-25.445.158		164.634.842	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					164.634.842	190.080.000	190.080.000	-25.445.158		164.634.842	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	164.634.842	190.080.000	190.080.000	-25.445.158	12 Laporan	164.634.842	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					164.634.842	190.080.000	190.080.000	-25.445.158		164.634.842	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	164.634.842	190.080.000	190.080.000	-25.445.158	12 Laporan	164.634.842	Kec. Sambikerep
	Kelurahan Beringin					3.383.880.303	2.683.880.303	2.683.880.303	700.000.000		3.444.477.305	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.383.880.303	3.383.880.303	2.683.880.303	700.000.000		3.444.477.305	
7.01	KECAMATAN					3.383.880.303	2.683.880.303	2.683.880.303	700.000.000		3.444.477.305	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.383.880.303	2.683.880.303	2.683.880.303	700.000.000		3.444.477.305	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.383.880.303	2.683.880.303	2.683.880.303	700.000.000	75%	3.444.477.305	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.383.880.303	2.683.880.303	2.683.880.303	700.000.000	40%	3.444.477.305	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.767.760.606	5.367.760.606	5.367.760.606	1.400.000.000		6.888.954.610	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Beringin					6.767.760.606	5.367.760.606	5.367.760.606	1.400.000.000		6.888.954.610	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	6.767.760.606	5.367.760.606	5.367.760.606	1.400.000.000	3 Pokmas / Ormas	6.888.954.610	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	6.767.760.606	5.367.760.606	5.367.760.606	1.400.000.000	12 Unit	6.888.954.610	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Beringin					6.767.760.606	5.367.760.606	5.367.760.606	1.400.000.000		6.888.954.610	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	6.767.760.606	5.367.760.606	5.367.760.606	1.400.000.000	3 Pokmas / Ormas	6.888.954.610	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	6.767.760.606	5.367.760.606	5.367.760.606	1.400.000.000	12 Unit	6.888.954.610	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.921.719.823	2.177.591.823	2.177.591.823	744.128.000		2.994.762.814	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	2.921.719.823	2.177.591.823	2.177.591.823	744.128.000	12 Unit	2.994.762.814	Kelurahan Beringin
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					462.160.480	506.288.480	506.288.480	-44.128.000		449.714.491	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	462.160.480	506.288.480	506.288.480	-44.128.000	3 Pokmas / Ormas	449.714.491	Kelurahan Beringin
	Kelurahan Lontar					5.143.940.303	5.143.940.303	5.143.940.303	0		5.293.753.418	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					5.143.940.303	5.143.940.303	5.143.940.303	0		5.293.753.418	
7,01	KECAMATAN					5.143.940.303	5.143.940.303	5.143.940.303	0		5.293.753.418	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.143.940.303	5.143.940.303	5.143.940.303	0		5.293.753.418	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	5.143.940.303	5.143.940.303	5.143.940.303	0	75%	5.293.753.418	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	5.143.940.303	5.143.940.303	5.143.940.303	0	40%	5.293.753.418	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					10.287.880.606	10.287.880.606	10.287.880.606	0		10.587.506.836	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Lontar					10.287.880.606	10.287.880.606	10.287.880.606	0		10.587.506.836	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	10.287.880.606	10.287.880.606	10.287.880.606	0	3 Pokmas / Ormas	10.587.506.836	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	10.287.880.606	10.287.880.606	10.287.880.606	0	9 Unit	10.587.506.836	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Lontar					10.287.880.606	10.287.880.606	10.287.880.606	0		10.587.506.836	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	10.287.880.606	10.287.880.606	10.287.880.606	0	3 Pokmas / Ormas	10.587.506.836	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	10.287.880.606	10.287.880.606	10.287.880.606	0	9 Unit	10.587.506.836	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.768.020.120	3.672.140.301	3.608.653.303	-840.633.183		2.858.435.234	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	2.768.020.120	3.672.140.301	3.608.653.303	-840.633.183	9 Unit	2.858.435.234	Kelurahan Lontar

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.375.920.183	1.471.800.002	1.535.287.000	840.633.183		2.435.318.184	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2.375.920.183	1.471.800.002	1.535.287.000	840.633.183	3 Pokmas / Ormas	2.435.318.184	Kelurahan Lontar
	Kelurahan Made					3.135.409.343	3.135.409.343	3.135.409.343	0		3.213.794.572	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.135.409.343	3.135.409.343	3.135.409.343	0		3.213.794.572	
7,01	KECAMATAN					3.135.409.343	3.135.409.343	3.135.409.343	0		3.213.794.572	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.135.409.343	3.135.409.343	3.135.409.343	0		3.213.794.572	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.135.409.343	3.135.409.343	3.135.409.343	0	75%	3.213.794.572	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.135.409.343	3.135.409.343	3.135.409.343	0	40%	3.213.794.572	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.270.818.686	6.270.818.686	6.270.818.686	0		6.427.589.144	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Made					6.270.818.686	6.270.818.686	6.270.818.686	0		6.427.589.144	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	6.270.818.686	6.270.818.686	6.270.818.686	0	3 Pokmas / Ormas	6.427.589.144	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	6.270.818.686	6.270.818.686	6.270.818.686	0	10 Unit	6.427.589.144	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Made					6.270.818.686	6.270.818.686	6.270.818.686	0		6.427.589.144	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	6.270.818.686	6.270.818.686	6.270.818.686	0	3 Pokmas / Ormas	6.427.589.144	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	6.270.818.686	6.270.818.686	6.270.818.686	0	10 Unit	6.427.589.144	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.279.577.343	2.538.397.587	2.524.646.472	-245.069.129		2.336.566.773	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	2.279.577.343	2.538.397.587	2.524.646.472	-245.069.129	10 Unit	2.336.566.773	Kelurahan Made
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					855.832.000	597.011.756	610.762.871	245.069.129		877.227.799	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	855.832.000	597.011.756	610.762.871	245.069.129	3 Pokmas / Ormas	877.227.799	Kelurahan Made
	Kelurahan Sambikerep					3.325.410.706	4.025.410.706	4.025.410.706	-700.000.000		3.408.545.969	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.325.410.706	4.025.410.706	4.025.410.706	-700.000.000		3.408.545.969	
7,01	KECAMATAN					3.325.410.706	4.025.410.706	4.025.410.706	-700.000.000		3.408.545.969	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.325.410.706	4.025.410.706	4.025.410.706	-700.000.000		3.408.545.969	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.325.410.706	4.025.410.706	4.025.410.706	-700.000.000	75%	3.408.545.969	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.325.410.706	4.025.410.706	4.025.410.706	-700.000.000	40%	3.408.545.969	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.650.821.412	8.050.821.412	8.050.821.412	-1.400.000.000		6.817.091.938	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sambikerep					6.650.821.412	8.050.821.412	8.050.821.412	-1.400.000.000		6.817.091.938	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	6.650.821.412	8.050.821.412	8.050.821.412	-1.400.000.000	3 Pokmas / Ormas	6.817.091.938	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	6.650.821.412	8.050.821.412	8.050.821.412	-1.400.000.000	7 Unit	6.817.091.938	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sambikerep					6.650.821.412	8.050.821.412	8.050.821.412	-1.400.000.000		6.817.091.938	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	6.650.821.412	8.050.821.412	8.050.821.412	-1.400.000.000	3 Pokmas / Ormas	6.817.091.938	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	6.650.821.412	8.050.821.412	8.050.821.412	-1.400.000.000	7 Unit	6.817.091.938	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.392.210.706	2.803.810.706	2.734.147.506	-1.341.936.800		1.427.015.972	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1.392.210.706	2.803.810.706	2.734.147.506	-1.341.936.800	7 Unit	1.427.015.972	Kelurahan Sambikerep
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.933.200.000	1.221.600.000	1.291.263.200	641.936.800		1.981.529.997	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.933.200.000	1.221.600.000	1.291.263.200	641.936.800	3 Pokmas / Ormas	1.981.529.997	Kelurahan Sambikerep
	Kec. Sawahan					29.871.936.075	50.853.022.699	53.674.731.434	-23.802.795.359		30.254.884.127	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					29.871.936.075	29.871.936.075	53.674.731.434	-23.802.795.359		30.254.884.127	
7,01	KECAMATAN					29.871.936.075	50.853.022.699	53.674.731.434	-23.802.795.359		30.254.884.127	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.421.009.377	28.223.549.899	31.045.258.634	-1.624.249.257		29.779.924.462	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,22 %	96,20%	96,73%	29.421.009.377	28.223.549.899	31.045.258.634	-1.624.249.257	96,20 %	29.779.924.462	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.600.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.600.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Sawahan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					22.613.251.291	22.678.720.293	25.262.200.250	-2.648.948.959		22.786.120.140	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					22.613.251.291	22.678.720.293	25.262.200.250	-2.648.948.959		22.786.120.140	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	61 Orang/bulan	22.613.251.291	22.678.720.293	25.262.200.250	-2.648.948.959	62 Orang/bulan	22.786.120.140	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					22.613.251.291	22.678.720.293	25.262.200.250	-2.648.948.959		22.786.120.140	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	61 Orang/bulan	22.613.251.291	22.678.720.293	25.262.200.250	-2.648.948.959	62 Orang/bulan	22.786.120.140	Kec. Sawahan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					6.709.411.886	5.449.429.241	5.687.658.019	1.021.753.867		6.895.458.122	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					6.709.411.886	5.449.429.241	5.687.658.019	1.021.753.867		6.895.458.122	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	2 Paket	2 Paket	6.709.411.886	5.449.429.241	5.687.658.019	1.021.753.867	19 Paket	6.895.458.122	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6.709.411.886	5.449.429.241	5.687.658.019	1.021.753.867		6.895.458.122	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	2 Paket	2 Paket	6.709.411.886	5.449.429.241	5.687.658.019	1.021.753.867	19 Paket	6.895.458.122	Kec. Sawahan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.746.200	91.468.365	91.468.365	4.277.835		95.746.200	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					95.746.200	91.468.365	91.468.365	4.277.835		95.746.200	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	95.746.200	91.468.365	91.468.365	4.277.835	3 Unit	95.746.200	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					95.746.200	91.468.365	91.468.365	4.277.835		95.746.200	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	95.746.200	91.468.365	91.468.365	4.277.835	3 Unit	95.746.200	Kec. Sawahan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					320.006.794	313.956.000	313.956.000	6.050.794		320.039.761	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	320.006.794	313.956.000	313.956.000	6.050.794	100%	320.039.761	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					320.006.794	313.956.000	313.956.000	6.050.794		320.039.761	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					320.006.794	313.956.000	313.956.000	6.050.794		320.039.761	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	320.006.794	313.956.000	313.956.000	6.050.794	12 Laporan	320.039.761	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					320.006.794	313.956.000	313.956.000	6.050.794		320.039.761	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	320.006.794	313.956.000	313.956.000	6.050.794	12 Laporan	320.039.761	Kec. Sawahan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	22.056.758.400	22.056.758.400	-22.056.758.400		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	0	22.056.758.400	22.056.758.400	-22.056.758.400	50%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	22.056.758.400	22.056.758.400	-22.056.758.400	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	22.056.758.400	22.056.758.400	-22.056.758.400		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	22.056.758.400	22.056.758.400	-22.056.758.400		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	49880 Keluarga	49880 Keluarga	46160 Keluarga	0	22.056.758.400	22.056.758.400	-22.056.758.400	49880 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	360 Keluarga	360 Keluarga	360 Keluarga	0	22.056.758.400	22.056.758.400	-22.056.758.400	360 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	22.056.758.400	22.056.758.400	-22.056.758.400		24.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	49880 Keluarga	49880 Keluarga	46160 Keluarga	0	22.056.758.400	22.056.758.400	-22.056.758.400	49880 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	360 Keluarga	360 Keluarga	360 Keluarga	0	22.056.758.400	22.056.758.400	-22.056.758.400	360 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	19.536.758.400	19.536.758.400	-19.536.758.400		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	49880 Keluarga	49880 Keluarga	46160 Keluarga	0	19.536.758.400	19.536.758.400	-19.536.758.400	49880 Keluarga	12.000.000	Kec. Sawahan
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	2.520.000.000	2.520.000.000	-2.520.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	360 Keluarga	360 Keluarga	360 Keluarga	0	2.520.000.000	2.520.000.000	-2.520.000.000	360 Keluarga	12.000.000	Kec. Sawahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					130.919.904	258.758.400	258.758.400	-127.838.496		130.919.904	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	130.919.904	258.758.400	258.758.400	-127.838.496	100%	130.919.904	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					130.919.904	258.758.400	258.758.400	-127.838.496		130.919.904	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					130.919.904	258.758.400	258.758.400	-127.838.496		130.919.904	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	130.919.904	258.758.400	258.758.400	-127.838.496	12 Laporan	130.919.904	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					130.919.904	258.758.400	258.758.400	-127.838.496		130.919.904	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	130.919.904	258.758.400	258.758.400	-127.838.496	12 Laporan	130.919.904	Kec. Sawahan
	Kelurahan Banyu Urip					4.821.324.526	4.821.324.526	4.821.324.526	0		4.917.857.632	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.821.324.526	4.821.324.526	4.821.324.526	0		4.917.857.632	
7,01	KECAMATAN					4.821.324.526	4.821.324.526	4.821.324.526	0		4.917.857.632	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.821.324.526	4.821.324.526	4.821.324.526	0		4.917.857.632	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	4.821.324.526	4.821.324.526	4.821.324.526	0	50%	4.917.857.632	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.821.324.526	4.821.324.526	4.821.324.526	0	40%	4.917.857.632	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.642.649.052	9.642.649.052	9.642.649.052	0		9.835.715.264	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Banyu Urip					9.642.649.052	9.642.649.052	9.642.649.052	0		9.835.715.264	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	9.642.649.052	9.642.649.052	9.642.649.052	0	2 Pokmas / Ormas	9.835.715.264	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	18 Unit	14 Unit	9.642.649.052	9.642.649.052	9.642.649.052	0	18 Unit	9.835.715.264	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Banyu Urip					9.642.649.052	9.642.649.052	9.642.649.052	0		9.835.715.264	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	9.642.649.052	9.642.649.052	9.642.649.052	0	2 Pokmas / Ormas	9.835.715.264	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	18 Unit	14 Unit	9.642.649.052	9.642.649.052	9.642.649.052	0	18 Unit	9.835.715.264	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.483.416.763	3.434.724.526	3.434.724.526	-951.307.763		2.545.502.178	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	18 Unit	14 Unit	2.483.416.763	3.434.724.526	3.434.724.526	-951.307.763	18 Unit	2.545.502.178	Kelurahan Banyu Urip
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.337.907.763	1.386.600.000	1.386.600.000	951.307.763		2.372.355.454	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.337.907.763	1.386.600.000	1.386.600.000	951.307.763	2 Pokmas / Ormas	2.372.355.454	Kelurahan Banyu Urip
	Kelurahan Kupang Krajan					4.865.609.307	4.865.609.307	4.865.609.307	0		4.987.249.533	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.865.609.307	4.865.609.307	4.865.609.307	0		4.987.249.533	
7,01	KECAMATAN					4.865.609.307	4.865.609.307	4.865.609.307	0		4.987.249.533	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.865.609.307	4.865.609.307	4.865.609.307	0		4.987.249.533	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	4.865.609.307	4.865.609.307	4.865.609.307	0	50%	4.987.249.533	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.865.609.307	4.865.609.307	4.865.609.307	0	40%	4.987.249.533	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.731.218.614	9.731.218.614	9.731.218.614	0		9.974.499.066	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kupang Krajan					9.731.218.614	9.731.218.614	9.731.218.614	0		9.974.499.066	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	9.731.218.614	9.731.218.614	9.731.218.614	0	2 Pokmas / Ormas	9.974.499.066	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	9.731.218.614	9.731.218.614	9.731.218.614	0	14 Unit	9.974.499.066	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kupang Krajan					9.731.218.614	9.731.218.614	9.731.218.614	0		9.974.499.066	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	9.731.218.614	9.731.218.614	9.731.218.614	0	2 Pokmas / Ormas	9.974.499.066	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	9.731.218.614	9.731.218.614	9.731.218.614	0	14 Unit	9.974.499.066	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.377.009.307	3.903.809.307	3.903.809.307	-526.800.000		3.461.434.535	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	3.377.009.307	3.903.809.307	3.903.809.307	-526.800.000	14 Unit	3.461.434.535	Kelurahan Kupang Krajan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.488.600.000	961.800.000	961.800.000	526.800.000		1.525.814.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.488.600.000	961.800.000	961.800.000	526.800.000	2 Pokmas / Ormas	1.525.814.998	Kelurahan Kupang Krajan
	Kelurahan Pakis					5.257.382.632	5.257.382.632	5.257.382.632	0		5.573.298.693	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					5.257.382.632	5.257.382.632	5.257.382.632	0		5.573.298.693	
7,01	KECAMATAN					5.257.382.632	5.257.382.632	5.257.382.632	0		5.573.298.693	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.257.382.632	5.257.382.632	5.257.382.632	0		5.573.298.693	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	5.257.382.632	5.257.382.632	5.257.382.632	0	50%	5.573.298.693	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	5.257.382.632	5.257.382.632	5.257.382.632	0	40%	5.573.298.693	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					10.514.765.264	10.514.765.264	10.514.765.264	0		11.146.597.386	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Pakis					10.514.765.264	10.514.765.264	10.514.765.264	0		11.146.597.386	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	10.514.765.264	10.514.765.264	10.514.765.264	0	2 Pokmas / Ormas	11.146.597.386	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10.514.765.264	10.514.765.264	10.514.765.264	0	10 Unit	11.146.597.386	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pakis					10.514.765.264	10.514.765.264	10.514.765.264	0		11.146.597.386	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	10.514.765.264	10.514.765.264	10.514.765.264	0	2 Pokmas / Ormas	11.146.597.386	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10.514.765.264	10.514.765.264	10.514.765.264	0	10 Unit	11.146.597.386	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.075.782.632	3.482.271.511	3.482.271.511	-406.488.879		3.337.158.696	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	3.075.782.632	3.482.271.511	3.482.271.511	-406.488.879	10 Unit	3.337.158.696	Kelurahan Pakis
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.181.600.000	1.775.111.121	1.775.111.121	406.488.879		2.236.139.997	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.181.600.000	1.775.111.121	1.775.111.121	406.488.879	2 Pokmas / Ormas	2.236.139.997	Kelurahan Pakis
	Kelurahan Petemon					4.945.805.072	4.945.805.072	4.945.805.072	0		5.069.450.192	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.945.805.072	4.945.805.072	4.945.805.072	0		5.069.450.192	
7,01	KECAMATAN					4.945.805.072	4.945.805.072	4.945.805.072	0		5.069.450.192	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.945.805.072	4.945.805.072	4.945.805.072	0		5.069.450.192	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	4.945.805.072	4.945.805.072	4.945.805.072	0	50%	5.069.450.192	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.945.805.072	4.945.805.072	4.945.805.072	0	40%	5.069.450.192	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.891.610.144	9.891.610.144	9.891.610.144	0		10.138.900.384	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Petemon					9.891.610.144	9.891.610.144	9.891.610.144	0		10.138.900.384	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	9.891.610.144	9.891.610.144	9.891.610.144	0	2 Pokmas / Ormas	10.138.900.384	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9.891.610.144	9.891.610.144	9.891.610.144	0	9 Unit	10.138.900.384	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Petemon					9.891.610.144	9.891.610.144	9.891.610.144	0		10.138.900.384	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	9.891.610.144	9.891.610.144	9.891.610.144	0	2 Pokmas / Ormas	10.138.900.384	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9.891.610.144	9.891.610.144	9.891.610.144	0	9 Unit	10.138.900.384	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.002.205.072	2.668.256.945	2.668.256.945	-666.051.873		2.052.260.196	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	2.002.205.072	2.668.256.945	2.668.256.945	-666.051.873	9 Unit	2.052.260.196	Kelurahan Petemon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.943.600.000	2.277.548.127	2.277.548.127	666.051.873		3.017.189.996	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.943.600.000	2.277.548.127	2.277.548.127	666.051.873	2 Pokmas / Ormas	3.017.189.996	Kelurahan Petemon
	Kelurahan Putat Jaya					5.654.411.088	5.654.411.088	5.654.411.088	0		5.795.771.357	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					5.654.411.088	5.654.411.088	5.654.411.088	0		5.795.771.357	
7.01	KECAMATAN					5.654.411.088	5.654.411.088	5.654.411.088	0		5.795.771.357	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.654.411.088	5.654.411.088	5.654.411.088	0		5.795.771.357	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	5.654.411.088	5.654.411.088	5.654.411.088	0	50%	5.795.771.357	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	5.654.411.088	5.654.411.088	5.654.411.088	0	40%	5.795.771.357	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					11.308.822.176	11.308.822.176	11.308.822.176	0		11.591.542.714	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Putat Jaya					11.308.822.176	11.308.822.176	11.308.822.176	0		11.591.542.714	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	11.308.822.176	11.308.822.176	11.308.822.176	0	2 Pokmas / Ormas	11.591.542.714	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	11.308.822.176	11.308.822.176	11.308.822.176	0	10 Unit	11.591.542.714	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Putat Jaya					11.308.822.176	11.308.822.176	11.308.822.176	0		11.591.542.714	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	11.308.822.176	11.308.822.176	11.308.822.176	0	2 Pokmas / Ormas	11.591.542.714	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	11.308.822.176	11.308.822.176	11.308.822.176	0	10 Unit	11.591.542.714	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.867.411.088	3.606.273.432	3.606.273.432	-738.862.344		2.939.096.361	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	2.867.411.088	3.606.273.432	3.606.273.432	-738.862.344	10 Unit	2.939.096.361	Kelurahan Putat Jaya
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.787.000.000	2.048.137.656	2.048.137.656	738.862.344		2.856.674.996	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.787.000.000	2.048.137.656	2.048.137.656	738.862.344	2 Pokmas / Ormas	2.856.674.996	Kelurahan Putat Jaya
	Kelurahan Sawahan					4.865.211.331	4.865.211.331	4.865.211.331	0		4.986.841.607	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.865.211.331	4.865.211.331	4.865.211.331	0		4.986.841.607	
7,01	KECAMATAN					4.865.211.331	4.865.211.331	4.865.211.331	0		4.986.841.607	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.865.211.331	4.865.211.331	4.865.211.331	0		4.986.841.607	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	4.865.211.331	4.865.211.331	4.865.211.331	0	50%	4.986.841.607	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.865.211.331	4.865.211.331	4.865.211.331	0	40%	4.986.841.607	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.730.422.662	9.730.422.662	9.730.422.662	0		9.973.683.214	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sawahan					9.730.422.662	9.730.422.662	9.730.422.662	0		9.973.683.214	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	9.730.422.662	9.730.422.662	9.730.422.662	0	2 Pokmas / Ormas	9.973.683.214	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	9.730.422.662	9.730.422.662	9.730.422.662	0	7 Unit	9.973.683.214	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sawahan					9.730.422.662	9.730.422.662	9.730.422.662	0		9.973.683.214	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	9.730.422.662	9.730.422.662	9.730.422.662	0	2 Pokmas / Ormas	9.973.683.214	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	9.730.422.662	9.730.422.662	9.730.422.662	0	7 Unit	9.973.683.214	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.164.251.240	3.844.308.451	3.844.308.451	-680.057.211		3.243.357.516	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	3.164.251.240	3.844.308.451	3.844.308.451	-680.057.211	7 Unit	3.243.357.516	Kelurahan Sawahan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.700.960.091	1.020.902.880	1.020.902.880	680.057.211		1.743.484.091	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.700.960.091	1.020.902.880	1.020.902.880	680.057.211	2 Pokmas / Ormas	1.743.484.091	Kelurahan Sawahan
	Kec. Semampir					26.285.668.561	41.574.677.466	44.061.773.264	-17.776.104.703		26.627.883.544	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					26.285.668.561	26.285.668.561	44.061.773.264	-17.776.104.703		26.627.883.544	
7,01	KECAMATAN					26.285.668.561	41.574.677.466	44.061.773.264	-17.776.104.703		26.627.883.544	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.992.707.734	24.932.649.353	27.393.026.370	-1.400.318.636		26.310.834.953	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,66%	95,92%	97,25%	25.992.707.734	24.932.649.353	27.393.026.370	-1.400.318.636	96,17%	26.310.834.953	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Semampir
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19.553.888.044	19.553.888.044	21.810.196.073	-2.256.308.029		19.703.486.424	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					19.553.888.044	19.553.888.044	21.810.196.073	-2.256.308.029		19.703.486.424	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	52 Orang/bulan	19.553.888.044	19.553.888.044	21.810.196.073	-2.256.308.029	55 Orang/bulan	19.703.486.424	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					19.553.888.044	19.553.888.044	21.810.196.073	-2.256.308.029		19.703.486.424	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	52 Orang/bulan	19.553.888.044	19.553.888.044	21.810.196.073	-2.256.308.029	55 Orang/bulan	19.703.486.424	Kec. Semampir
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					6.277.403.938	5.226.669.109	5.408.427.428	868.976.510		6.445.932.777	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					6.277.403.938	5.226.669.109	5.408.427.428	868.976.510		6.445.932.777	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	6.277.403.938	5.226.669.109	5.408.427.428	868.976.510	10 Paket	6.445.932.777	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6.277.403.938	5.226.669.109	5.408.427.428	868.976.510		6.445.932.777	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	6.277.403.938	5.226.669.109	5.408.427.428	868.976.510	10 Paket	6.445.932.777	Kec. Semampir
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					158.815.752	148.148.200	170.458.869	-11.643.117		158.815.752	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					158.815.752	148.148.200	170.458.869	-11.643.117		158.815.752	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	158.815.752	148.148.200	170.458.869	-11.643.117	3 Unit	158.815.752	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					158.815.752	148.148.200	170.458.869	-11.643.117		158.815.752	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	158.815.752	148.148.200	170.458.869	-11.643.117	3 Unit	158.815.752	Kec. Semampir
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					50.765.715	315.066.112	315.066.112	-264.300.397		50.853.479	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	50.765.715	315.066.112	315.066.112	-264.300.397	100%	50.853.479	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					50.765.715	315.066.112	315.066.112	-264.300.397		50.853.479	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamata					50.765.715	315.066.112	315.066.112	-264.300.397		50.853.479	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.765.715	315.066.112	315.066.112	-264.300.397	12 Laporan	50.853.479	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					50.765.715	315.066.112	315.066.112	-264.300.397		50.853.479	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.765.715	315.066.112	315.066.112	-264.300.397	12 Laporan	50.853.479	Kec. Semampir

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	16.162.976.000	16.162.976.000	-16.162.976.000		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	0	16.162.976.000	16.162.976.000	-16.162.976.000	100%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	16.162.976.000	16.162.976.000	-16.162.976.000	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	16.162.976.000	16.162.976.000	-16.162.976.000		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	16.162.976.000	16.162.976.000	-16.162.976.000		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	33300 Keluarga	33300 Keluarga	33300 Keluarga	0	16.162.976.000	16.162.976.000	-16.162.976.000	33300 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	350 Keluarga	350 Keluarga	350 Keluarga	0	16.162.976.000	16.162.976.000	-16.162.976.000	350 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	16.162.976.000	16.162.976.000	-16.162.976.000		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	33300 Keluarga	33300 Keluarga	33300 Keluarga	0	16.162.976.000	16.162.976.000	-16.162.976.000	33300 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	350 Keluarga	350 Keluarga	350 Keluarga	0	16.162.976.000	16.162.976.000	-16.162.976.000	350 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	13.712.976.000	13.712.976.000	-13.712.976.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	33300 Keluarga	33300 Keluarga	33300 Keluarga	0	13.712.976.000	13.712.976.000	-13.712.976.000	33300 Keluarga	12.000.000	Kec. Semampir
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	2.450.000.000	2.450.000.000	-2.450.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	350 Keluarga	350 Keluarga	350 Keluarga	0	2.450.000.000	2.450.000.000	-2.450.000.000	350 Keluarga	12.000.000	Kec. Semampir
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					242.195.112	163.986.001	190.704.782	51.490.330		242.195.112	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	242.195.112	163.986.001	190.704.782	51.490.330	100%	242.195.112	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					242.195.112	163.986.001	190.704.782	51.490.330		242.195.112	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					242.195.112	163.986.001	190.704.782	51.490.330		242.195.112	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	242.195.112	163.986.001	190.704.782	51.490.330	12 Laporan	242.195.112	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					242.195.112	163.986.001	190.704.782	51.490.330		242.195.112	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	242.195.112	163.986.001	190.704.782	51.490.330	12 Laporan	242.195.112	Kec. Semampir
	Kelurahan Ampel					3.613.460.913	3.613.460.913	3.613.460.913	0		3.692.679.514	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.613.460.913	3.613.460.913	3.613.460.913	0		3.692.679.514	
7,01	KECAMATAN					3.613.460.913	3.613.460.913	3.613.460.913	0		3.692.679.514	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.613.460.913	3.613.460.913	3.613.460.913	0		3.692.679.514	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.613.460.913	3.613.460.913	3.613.460.913	0	100%	3.692.679.514	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.613.460.913	3.613.460.913	3.613.460.913	0	40%	3.692.679.514	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.226.921.826	7.226.921.826	7.226.921.826	0		7.385.359.028	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Ampel					7.226.921.826	7.226.921.826	7.226.921.826	0		7.385.359.028	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.226.921.826	7.226.921.826	7.226.921.826	0	1 Pokmas / Ormas	7.385.359.028	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.226.921.826	7.226.921.826	7.226.921.826	0	1 Unit	7.385.359.028	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Ampel					7.226.921.826	7.226.921.826	7.226.921.826	0		7.385.359.028	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.226.921.826	7.226.921.826	7.226.921.826	0	1 Pokmas / Ormas	7.385.359.028	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.226.921.826	7.226.921.826	7.226.921.826	0	1 Unit	7.385.359.028	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.288.071.498	1.898.290.852	1.898.290.852	-610.219.354		1.333.155.367	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.288.071.498	1.898.290.852	1.898.290.852	-610.219.354	1 Unit	1.333.155.367	Kelurahan Ampel

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.325.389.415	1.715.170.061	1.715.170.061	610.219.354		2.359.524.147	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.325.389.415	1.715.170.061	1.715.170.061	610.219.354	1 Pokmas / Ormas	2.359.524.147	Kelurahan Ampel
	Kelurahan Pegirian					5.228.658.107	5.228.658.107	5.228.658.107	0		5.359.374.552	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					5.228.658.107	5.228.658.107	5.228.658.107	0		5.359.374.552	
7,01	KECAMATAN					5.228.658.107	5.228.658.107	5.228.658.107	0		5.359.374.552	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.228.658.107	5.228.658.107	5.228.658.107	0		5.359.374.552	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	5.228.658.107	5.228.658.107	5.228.658.107	0	100%	5.359.374.552	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	5.228.658.107	5.228.658.107	5.228.658.107	0	40%	5.359.374.552	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					10.457.316.214	10.457.316.214	10.457.316.214	0		10.718.749.104	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Pegirian					10.457.316.214	10.457.316.214	10.457.316.214	0		10.718.749.104	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	10.457.316.214	10.457.316.214	10.457.316.214	0	1 Pokmas / Ormas	10.718.749.104	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.457.316.214	10.457.316.214	10.457.316.214	0	1 Unit	10.718.749.104	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pegirian					10.457.316.214	10.457.316.214	10.457.316.214	0		10.718.749.104	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	10.457.316.214	10.457.316.214	10.457.316.214	0	1 Pokmas / Ormas	10.718.749.104	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.457.316.214	10.457.316.214	10.457.316.214	0	1 Unit	10.718.749.104	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.630.172.781	3.569.265.053	3.569.265.053	-939.092.272		2.695.927.097	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.630.172.781	3.569.265.053	3.569.265.053	-939.092.272	1 Unit	2.695.927.097	Kelurahan Pegirian
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.598.485.326	1.659.393.054	1.659.393.054	939.092.272		2.663.447.455	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.598.485.326	1.659.393.054	1.659.393.054	939.092.272	1 Pokmas / Ormas	2.663.447.455	Kelurahan Pegirian
	Kelurahan Sidotopo					4.693.225.187	4.693.225.187	4.693.225.187	0		4.810.555.810	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.693.225.187	4.693.225.187	4.693.225.187	0		4.810.555.810	
7,01	KECAMATAN					4.693.225.187	4.693.225.187	4.693.225.187	0		4.810.555.810	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.693.225.187	4.693.225.187	4.693.225.187	0		4.810.555.810	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	4.693.225.187	4.693.225.187	4.693.225.187	0	100%	4.810.555.810	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.693.225.187	4.693.225.187	4.693.225.187	0	40%	4.810.555.810	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.386.450.374	9.386.450.374	9.386.450.374	0		9.621.111.620	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sidotopo					9.386.450.374	9.386.450.374	9.386.450.374	0		9.621.111.620	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	9.386.450.374	9.386.450.374	9.386.450.374	0	1 Pokmas / Ormas	9.621.111.620	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	9.386.450.374	9.386.450.374	9.386.450.374	0	1 Unit	9.621.111.620	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sidotopo					9.386.450.374	9.386.450.374	9.386.450.374	0		9.621.111.620	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	9.386.450.374	9.386.450.374	9.386.450.374	0	1 Pokmas / Ormas	9.621.111.620	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	9.386.450.374	9.386.450.374	9.386.450.374	0	1 Unit	9.621.111.620	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.209.683.736	3.291.087.187	3.290.517.177	-1.080.833.441		2.264.925.826	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.209.683.736	3.291.087.187	3.290.517.177	-1.080.833.441	1 Unit	2.264.925.826	Kelurahan Sidotopo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.483.541.451	1.402.138.000	1.402.708.010	1.080.833.441		2.545.629.984	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.483.541.451	1.402.138.000	1.402.708.010	1.080.833.441	1 Pokmas / Ormas	2.545.629.984	Kelurahan Sidotopo
	Kelurahan Ujung					4.809.727.876	4.809.727.876	4.809.727.876	0		4.929.971.066	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.809.727.876	4.809.727.876	4.809.727.876	0		4.929.971.066	
7,01	KECAMATAN					4.809.727.876	4.809.727.876	4.809.727.876	0		4.929.971.066	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.809.727.876	4.809.727.876	4.809.727.876	0		4.929.971.066	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	4.809.727.876	4.809.727.876	4.809.727.876	0	100%	4.929.971.066	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.809.727.876	4.809.727.876	4.809.727.876	0	40%	4.929.971.066	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.619.455.752	9.619.455.752	9.619.455.752	0		9.859.942.132	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Ujung					9.619.455.752	9.619.455.752	9.619.455.752	0		9.859.942.132	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	9.619.455.752	9.619.455.752	9.619.455.752	0	1 Pokmas / Ormas	9.859.942.132	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	9.619.455.752	9.619.455.752	9.619.455.752	0	1 Unit	9.859.942.132	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Ujung					9.619.455.752	9.619.455.752	9.619.455.752	0		9.859.942.132	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	9.619.455.752	9.619.455.752	9.619.455.752	0	1 Pokmas / Ormas	9.859.942.132	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	9.619.455.752	9.619.455.752	9.619.455.752	0	1 Unit	9.859.942.132	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.111.316.194	3.106.763.858	3.102.665.927	-991.349.733		2.164.099.096	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.111.316.194	3.106.763.858	3.102.665.927	-991.349.733	1 Unit	2.164.099.096	Kelurahan Ujung
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.698.411.682	1.702.964.018	1.707.061.949	991.349.733		2.765.871.970	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.698.411.682	1.702.964.018	1.707.061.949	991.349.733	1 Pokmas / Ormas	2.765.871.970	Kelurahan Ujung
	Kelurahan Wonokusumo					6.106.656.686	6.106.656.686	6.106.656.686	0		6.259.323.094	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					6.106.656.686	6.106.656.686	6.106.656.686	0		6.259.323.094	
7,01	KECAMATAN					6.106.656.686	6.106.656.686	6.106.656.686	0		6.259.323.094	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6.106.656.686	6.106.656.686	6.106.656.686	0		6.259.323.094	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	6.106.656.686	6.106.656.686	6.106.656.686	0	100%	6.259.323.094	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	6.106.656.686	6.106.656.686	6.106.656.686	0	40%	6.259.323.094	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					12.213.313.372	12.213.313.372	12.213.313.372	0		12.518.646.188	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Wonokusumo					12.213.313.372	12.213.313.372	12.213.313.372	0		12.518.646.188	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	12.213.313.372	12.213.313.372	12.213.313.372	0	1 Pokmas / Ormas	12.518.646.188	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	8 Unit	12.213.313.372	12.213.313.372	12.213.313.372	0	1 Unit	12.518.646.188	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Wonokusumo					12.213.313.372	12.213.313.372	12.213.313.372	0		12.518.646.188	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	12.213.313.372	12.213.313.372	12.213.313.372	0	1 Pokmas / Ormas	12.518.646.188	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	8 Unit	12.213.313.372	12.213.313.372	12.213.313.372	0	1 Unit	12.518.646.188	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.372.256.686	3.746.573.186	3.746.573.186	-1.374.316.500		2.431.563.100	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	8 Unit	2.372.256.686	3.746.573.186	3.746.573.186	-1.374.316.500	1 Unit	2.431.563.100	Kelurahan Wonokusumo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3.734.400.000	2.360.083.500	2.360.083.500	1.374.316.500		3.827.759.994	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3.734.400.000	2.360.083.500	2.360.083.500	1.374.316.500	1 Pokmas / Ormas	3.827.759.994	Kelurahan Wonokusumo
	Kec. Simokerto					24.120.106.959	31.978.461.209	34.713.842.529	-10.593.735.570		24.411.257.891	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					24.120.106.959	24.120.106.959	34.713.842.529	-10.593.735.570		24.411.257.891	
7.01	KECAMATAN					24.120.106.959	31.978.461.209	34.713.842.529	-10.593.735.570		24.411.257.891	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.740.747.094	23.274.855.359	25.992.555.799	-2.251.808.705		24.007.865.059	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,36 %	97,32%	97,32%	23.740.747.094	23.274.855.359	25.992.555.799	-2.251.808.705	97,33 %	24.007.865.059	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Simokerto
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19.521.955.820	19.521.955.820	22.063.421.146	-2.541.465.326		19.671.537.985	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					19.521.955.820	19.521.955.820	22.063.421.146	-2.541.465.326		19.671.537.985	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	55 Orang/bulan	19.521.955.820	19.521.955.820	22.063.421.146	-2.541.465.326	68 Orang/bulan	19.671.537.985	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					19.521.955.820	19.521.955.820	22.063.421.146	-2.541.465.326		19.671.537.985	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	55 Orang/bulan	19.521.955.820	19.521.955.820	22.063.421.146	-2.541.465.326	68 Orang/bulan	19.671.537.985	Kec. Simokerto
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.105.474.743	3.665.873.779	3.842.108.893	263.365.850		4.223.010.543	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					4.105.474.743	3.665.873.779	3.842.108.893	263.365.850		4.223.010.543	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	2 Paket	4.105.474.743	3.665.873.779	3.842.108.893	263.365.850	5 Paket	4.223.010.543	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.105.474.743	3.665.873.779	3.842.108.893	263.365.850		4.223.010.543	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	2 Paket	4.105.474.743	3.665.873.779	3.842.108.893	263.365.850	5 Paket	4.223.010.543	Kec. Simokerto
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.716.531	83.081.760	83.081.760	27.634.771		110.716.531	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					110.716.531	83.081.760	83.081.760	27.634.771		110.716.531	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	110.716.531	83.081.760	83.081.760	27.634.771	4 Unit	110.716.531	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					110.716.531	83.081.760	83.081.760	27.634.771		110.716.531	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	110.716.531	83.081.760	83.081.760	27.634.771	4 Unit	110.716.531	Kec. Simokerto
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					210.516.395	205.286.400	205.286.400	5.229.995		210.549.362	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	210.516.395	205.286.400	205.286.400	5.229.995	100%	210.549.362	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					210.516.395	205.286.400	205.286.400	5.229.995		210.549.362	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamata					210.516.395	205.286.400	205.286.400	5.229.995		210.549.362	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	210.516.395	205.286.400	205.286.400	5.229.995	12 Laporan	210.549.362	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					210.516.395	205.286.400	205.286.400	5.229.995		210.549.362	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	210.516.395	205.286.400	205.286.400	5.229.995	12 Laporan	210.549.362	Kec. Simokerto
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	8.367.192.000	8.367.192.000	-8.367.192.000		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	0	8.367.192.000	8.367.192.000	-8.367.192.000	75%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	8.367.192.000	8.367.192.000	-8.367.192.000	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	8.367.192.000	8.367.192.000	-8.367.192.000		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	8.367.192.000	8.367.192.000	-8.367.192.000		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	16100 Keluarga	16100 Keluarga	16100 Keluarga	0	8.367.192.000	8.367.192.000	-8.367.192.000	16100 Keluarga	24.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	240 Keluarga	240 Keluarga	240 Keluarga	0	8.367.192.000	8.367.192.000	-8.367.192.000	240 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	8.367.192.000	8.367.192.000	-8.367.192.000		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	16100 Keluarga	16100 Keluarga	16100 Keluarga	0	8.367.192.000	8.367.192.000	-8.367.192.000	16100 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	240 Keluarga	240 Keluarga	240 Keluarga	0	8.367.192.000	8.367.192.000	-8.367.192.000	240 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	6.687.192.000	6.687.192.000	-6.687.192.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	16100 Keluarga	16100 Keluarga	16100 Keluarga	0	6.687.192.000	6.687.192.000	-6.687.192.000	16100 Keluarga	12.000.000	Kec. Simokerto
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.680.000.000	1.680.000.000	-1.680.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	240 Keluarga	240 Keluarga	240 Keluarga	0	1.680.000.000	1.680.000.000	-1.680.000.000	240 Keluarga	12.000.000	Kec. Simokerto
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					168.843.470	131.127.450	148.808.330	20.035.140		168.843.470	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	168.843.470	131.127.450	148.808.330	20.035.140	100%	168.843.470	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					168.843.470	131.127.450	148.808.330	20.035.140		168.843.470	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					168.843.470	131.127.450	148.808.330	20.035.140		168.843.470	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	168.843.470	131.127.450	148.808.330	20.035.140	12 Laporan	168.843.470	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					168.843.470	131.127.450	148.808.330	20.035.140		168.843.470	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	168.843.470	131.127.450	148.808.330	20.035.140	12 Laporan	168.843.470	Kec. Simokerto
	Kelurahan Kapasan					3.798.293.187	3.798.293.187	3.798.293.187	0		3.869.250.511	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.798.293.187	3.798.293.187	3.798.293.187	0		3.869.250.511	
7,01	KECAMATAN					3.798.293.187	3.798.293.187	3.798.293.187	0		3.869.250.511	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.798.293.187	3.798.293.187	3.798.293.187	0		3.869.250.511	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.798.293.187	3.798.293.187	3.798.293.187	0	75%	3.869.250.511	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.798.293.187	3.798.293.187	3.798.293.187	0	40%	3.869.250.511	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.596.586.374	7.596.586.374	7.596.586.374	0		7.738.501.022	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kapasan					7.596.586.374	7.596.586.374	7.596.586.374	0		7.738.501.022	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.596.586.374	7.596.586.374	7.596.586.374	0	2 Pokmas / Ormas	7.738.501.022	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	7.596.586.374	7.596.586.374	7.596.586.374	0	4 Unit	7.738.501.022	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kapasan					7.596.586.374	7.596.586.374	7.596.586.374	0		7.738.501.022	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.596.586.374	7.596.586.374	7.596.586.374	0	2 Pokmas / Ormas	7.738.501.022	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	7.596.586.374	7.596.586.374	7.596.586.374	0	4 Unit	7.738.501.022	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.225.872.774	2.217.981.977	2.680.094.122	-454.221.348		2.281.519.590	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	2.225.872.774	2.217.981.977	2.680.094.122	-454.221.348	4 Unit	2.281.519.590	Kelurahan Kapasan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.572.420.413	1.580.311.210	1.118.199.065	454.221.348		1.587.730.921	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.572.420.413	1.580.311.210	1.118.199.065	454.221.348	2 Pokmas / Ormas	1.587.730.921	Kelurahan Kapasan
	Kelurahan Sidodadi					3.669.428.217	3.669.428.217	3.669.428.217	0		3.761.163.917	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.669.428.217	3.669.428.217	3.669.428.217	0		3.761.163.917	
7,01	KECAMATAN					3.669.428.217	3.669.428.217	3.669.428.217	0		3.761.163.917	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.669.428.217	3.669.428.217	3.669.428.217	0		3.761.163.917	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.669.428.217	3.669.428.217	3.669.428.217	0	75%	3.761.163.917	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.669.428.217	3.669.428.217	3.669.428.217	0	40%	3.761.163.917	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.338.856.434	7.338.856.434	7.338.856.434	0		7.522.327.834	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sidodadi					7.338.856.434	7.338.856.434	7.338.856.434	0		7.522.327.834	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.338.856.434	7.338.856.434	7.338.856.434	0	2 Pokmas / Ormas	7.522.327.834	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	7.338.856.434	7.338.856.434	7.338.856.434	0	3 Unit	7.522.327.834	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sidodadi					7.338.856.434	7.338.856.434	7.338.856.434	0		7.522.327.834	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.338.856.434	7.338.856.434	7.338.856.434	0	2 Pokmas / Ormas	7.522.327.834	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	7.338.856.434	7.338.856.434	7.338.856.434	0	3 Unit	7.522.327.834	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.137.031.712	2.137.031.712	2.137.031.712	0		2.190.457.502	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	2.137.031.712	2.137.031.712	2.137.031.712	0	3 Unit	2.190.457.502	Kelurahan Sidodadi
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.532.396.505	1.532.396.505	1.532.396.505	0		1.570.706.415	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.532.396.505	1.532.396.505	1.532.396.505	0	2 Pokmas / Ormas	1.570.706.415	Kelurahan Sidodadi
	Kelurahan Simokerto					3.516.511.536	3.516.511.536	3.516.511.536	0		3.604.424.319	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.516.511.536	3.516.511.536	3.516.511.536	0		3.604.424.319	
7,01	KECAMATAN					3.516.511.536	3.516.511.536	3.516.511.536	0		3.604.424.319	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.516.511.536	3.516.511.536	3.516.511.536	0		3.604.424.319	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.516.511.536	3.516.511.536	3.516.511.536	0	75%	3.604.424.319	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.516.511.536	3.516.511.536	3.516.511.536	0	40%	3.604.424.319	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.033.023.072	7.033.023.072	7.033.023.072	0		7.208.848.638	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Simokerto					7.033.023.072	7.033.023.072	7.033.023.072	0		7.208.848.638	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.033.023.072	7.033.023.072	7.033.023.072	0	1 Pokmas / Ormas	7.208.848.638	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	7.033.023.072	7.033.023.072	7.033.023.072	0	3 Unit	7.208.848.638	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Simokerto					7.033.023.072	7.033.023.072	7.033.023.072	0		7.208.848.638	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.033.023.072	7.033.023.072	7.033.023.072	0	1 Pokmas / Ormas	7.208.848.638	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	7.033.023.072	7.033.023.072	7.033.023.072	0	3 Unit	7.208.848.638	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.492.151.445	1.659.777.684	1.677.803.604	-185.652.159		1.529.455.229	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.492.151.445	1.659.777.684	1.677.803.604	-185.652.159	3 Unit	1.529.455.229	Kelurahan Simokerto
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.024.360.091	1.856.733.852	1.838.707.932	185.652.159		2.074.969.090	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.024.360.091	1.856.733.852	1.838.707.932	185.652.159	1 Pokmas / Ormas	2.074.969.090	Kelurahan Simokerto
	Kelurahan Simolawang					4.094.024.993	4.094.024.993	4.094.024.993	0		4.196.375.612	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.094.024.993	4.094.024.993	4.094.024.993	0		4.196.375.612	
7,01	KECAMATAN					4.094.024.993	4.094.024.993	4.094.024.993	0		4.196.375.612	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.094.024.993	4.094.024.993	4.094.024.993	0		4.196.375.612	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	4.094.024.993	4.094.024.993	4.094.024.993	0	75%	4.196.375.612	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.094.024.993	4.094.024.993	4.094.024.993	0	40%	4.196.375.612	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.188.049.986	8.188.049.986	8.188.049.986	0		8.392.751.224	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Simolawang					8.188.049.986	8.188.049.986	8.188.049.986	0		8.392.751.224	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	8.188.049.986	8.188.049.986	8.188.049.986	0	2 Pokmas / Ormas	8.392.751.224	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	8.188.049.986	8.188.049.986	8.188.049.986	0	3 Unit	8.392.751.224	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Simolawang					8.188.049.986	8.188.049.986	8.188.049.986	0		8.392.751.224	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	8.188.049.986	8.188.049.986	8.188.049.986	0	2 Pokmas / Ormas	8.392.751.224	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	8.188.049.986	8.188.049.986	8.188.049.986	0	3 Unit	8.392.751.224	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.093.454.608	2.903.605.160	2.708.292.362	-614.837.754		2.145.790.970	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	2.093.454.608	2.903.605.160	2.708.292.362	-614.837.754	3 Unit	2.145.790.970	Kelurahan Simolawang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.000.570.385	1.190.419.833	1.385.732.631	614.837.754		2.050.584.642	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.000.570.385	1.190.419.833	1.385.732.631	614.837.754	2 Pokmas / Ormas	2.050.584.642	Kelurahan Simolawang
	Kelurahan Tambakrejo					3.999.983.077	3.999.983.077	3.999.983.077	0		4.204.581.048	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.999.983.077	3.999.983.077	3.999.983.077	0		4.204.581.048	
7,01	KECAMATAN					3.999.983.077	3.999.983.077	3.999.983.077	0		4.204.581.048	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.999.983.077	3.999.983.077	3.999.983.077	0		4.204.581.048	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.999.983.077	3.999.983.077	3.999.983.077	0	75%	4.204.581.048	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.999.983.077	3.999.983.077	3.999.983.077	0	40%	4.204.581.048	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.999.966.154	7.999.966.154	7.999.966.154	0		8.409.162.096	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tambakrejo					7.999.966.154	7.999.966.154	7.999.966.154	0		8.409.162.096	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.999.966.154	7.999.966.154	7.999.966.154	0	2 Pokmas / Ormas	8.409.162.096	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	7.999.966.154	7.999.966.154	7.999.966.154	0	2 Unit	8.409.162.096	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tambakrejo					7.999.966.154	7.999.966.154	7.999.966.154	0		8.409.162.096	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.999.966.154	7.999.966.154	7.999.966.154	0	2 Pokmas / Ormas	8.409.162.096	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	7.999.966.154	7.999.966.154	7.999.966.154	0	2 Unit	8.409.162.096	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.931.703.033	1.931.703.033	1.931.703.033	0		2.084.594.006	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.931.703.033	1.931.703.033	1.931.703.033	0	2 Unit	2.084.594.006	Kelurahan Tambakrejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.068.280.044	2.068.280.044	2.068.280.044	0		2.119.987.042	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2.068.280.044	2.068.280.044	2.068.280.044	0	2 Pokmas / Ormas	2.119.987.042	Kelurahan Tambakrejo
	Kec. Sukolilo					32.556.503.729	42.048.618.082	43.339.057.471	-10.782.553.742		32.958.437.834	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					32.556.503.729	32.556.503.729	43.339.057.471	-10.782.553.742		32.958.437.834	
7,01	KECAMATAN					32.556.503.729	42.048.618.082	43.339.057.471	-10.782.553.742		32.958.437.834	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32.234.179.386	31.746.392.333	33.036.831.722	-802.652.336		32.604.055.379	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,26 %	97,26%	97,26%	32.234.179.386	31.746.392.333	33.036.831.722	-802.652.336	97,26 %	32.604.055.379	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.665.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.665.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.665.000	Kec. Sukolilo
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					25.150.256.246	25.150.256.246	26.419.026.031	-1.268.769.785		25.343.034.128	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					25.150.256.246	25.150.256.246	26.419.026.031	-1.268.769.785		25.343.034.128	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	89 Orang/bulan	63 Orang/bulan	25.150.256.246	25.150.256.246	26.419.026.031	-1.268.769.785	89 Orang/bulan	25.343.034.128	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					25.150.256.246	25.150.256.246	26.419.026.031	-1.268.769.785		25.343.034.128	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	89 Orang/bulan	63 Orang/bulan	25.150.256.246	25.150.256.246	26.419.026.031	-1.268.769.785	89 Orang/bulan	25.343.034.128	Kec. Sukolilo
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					6.906.589.257	6.435.471.124	6.457.140.728	449.448.529		7.079.254.020	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					6.906.589.257	6.435.471.124	6.457.140.728	449.448.529		7.079.254.020	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2 Paket	2 Paket	6.906.589.257	6.435.471.124	6.457.140.728	449.448.529	15 Paket	7.079.254.020	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6.906.589.257	6.435.471.124	6.457.140.728	449.448.529		7.079.254.020	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2 Paket	2 Paket	6.906.589.257	6.435.471.124	6.457.140.728	449.448.529	15 Paket	7.079.254.020	Kec. Sukolilo
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					174.733.883	156.720.963	156.720.963	18.012.920		179.102.231	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					174.733.883	156.720.963	156.720.963	18.012.920		179.102.231	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	1 Unit	1 Unit	174.733.883	156.720.963	156.720.963	18.012.920	34 Unit	179.102.231	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					174.733.883	156.720.963	156.720.963	18.012.920		179.102.231	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	1 Unit	1 Unit	174.733.883	156.720.963	156.720.963	18.012.920	34 Unit	179.102.231	Kec. Sukolilo
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					55.853.972	292.847.349	292.847.349	-236.993.377		57.250.323	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	55.853.972	292.847.349	292.847.349	-236.993.377	100%	57.250.323	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					55.853.972	292.847.349	292.847.349	-236.993.377		57.250.323	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					55.853.972	292.847.349	292.847.349	-236.993.377		57.250.323	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.853.972	292.847.349	292.847.349	-236.993.377	12 Laporan	57.250.323	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					55.853.972	292.847.349	292.847.349	-236.993.377		57.250.323	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.853.972	292.847.349	292.847.349	-236.993.377	12 Laporan	57.250.323	Kec. Sukolilo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	9.827.883.200	9.827.883.200	-9.827.883.200		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	0	9.827.883.200	9.827.883.200	-9.827.883.200	100%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	9.827.883.200	9.827.883.200	-9.827.883.200	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	9.827.883.200	9.827.883.200	-9.827.883.200		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	9.827.883.200	9.827.883.200	-9.827.883.200		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	18280 Keluarga	18280 Keluarga	17680 Keluarga	0	9.827.883.200	9.827.883.200	-9.827.883.200	18280 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	335 Keluarga	335 Keluarga	335 Keluarga	0	9.827.883.200	9.827.883.200	-9.827.883.200	335 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	9.827.883.200	9.827.883.200	-9.827.883.200		24.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	18280 Keluarga	18280 Keluarga	17680 Keluarga	0	9.827.883.200	9.827.883.200	-9.827.883.200	18280 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	335 Keluarga	335 Keluarga	335 Keluarga	0	9.827.883.200	9.827.883.200	-9.827.883.200	335 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	7.482.883.200	7.482.883.200	-7.482.883.200		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	18280 Keluarga	18280 Keluarga	17680 Keluarga	0	7.482.883.200	7.482.883.200	-7.482.883.200	18280 Keluarga	12.000.000	Kec. Sukolilo
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	2.345.000.000	2.345.000.000	-2.345.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	335 Keluarga	335 Keluarga	335 Keluarga	0	2.345.000.000	2.345.000.000	-2.345.000.000	335 Keluarga	12.000.000	Kec. Sukolilo
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					266.470.371	181.495.200	181.495.200	84.975.171		273.132.132	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	266.470.371	181.495.200	181.495.200	84.975.171	100%	273.132.132	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					266.470.371	181.495.200	181.495.200	84.975.171		273.132.132	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					266.470.371	181.495.200	181.495.200	84.975.171		273.132.132	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	266.470.371	181.495.200	181.495.200	84.975.171	12 Laporan	273.132.132	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					266.470.371	181.495.200	181.495.200	84.975.171		273.132.132	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	266.470.371	181.495.200	181.495.200	84.975.171	12 Laporan	273.132.132	Kec. Sukolilo
	Kelurahan Gebang Putih					2.704.026.181	2.704.026.181	2.704.026.181	0		2.747.626.831	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.704.026.181	2.704.026.181	2.704.026.181	0		2.747.626.831	
7,01	KECAMATAN					2.704.026.181	2.704.026.181	2.704.026.181	0		2.747.626.831	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.704.026.181	2.704.026.181	2.704.026.181	0		2.747.626.831	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	2.704.026.181	2.704.026.181	2.704.026.181	0	100%	2.747.626.831	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.704.026.181	2.704.026.181	2.704.026.181	0	40%	2.747.626.831	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.408.052.362	5.408.052.362	5.408.052.362	0		5.495.253.662	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Gebang Putih					5.408.052.362	5.408.052.362	5.408.052.362	0		5.495.253.662	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.408.052.362	5.408.052.362	5.408.052.362	0	2 Pokmas / Ormas	5.495.253.662	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.408.052.362	5.408.052.362	5.408.052.362	0	2 Unit	5.495.253.662	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Gebang Putih					5.408.052.362	5.408.052.362	5.408.052.362	0		5.495.253.662	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.408.052.362	5.408.052.362	5.408.052.362	0	2 Pokmas / Ormas	5.495.253.662	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.408.052.362	5.408.052.362	5.408.052.362	0	2 Unit	5.495.253.662	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.624.563.901	1.624.563.901	1.624.563.901	0		1.665.177.996	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.624.563.901	1.624.563.901	1.624.563.901	0	2 Unit	1.665.177.996	Kelurahan Gebang Putih
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.079.462.280	1.079.462.280	1.079.462.280	0		1.082.448.835	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.079.462.280	1.079.462.280	1.079.462.280	0	2 Pokmas / Ormas	1.082.448.835	Kelurahan Gebang Putih
	Kelurahan Keputih					3.908.659.698	3.908.659.698	3.908.659.698	0		4.020.903.773	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.908.659.698	3.908.659.698	3.908.659.698	0		4.020.903.773	
7,01	KECAMATAN					3.908.659.698	3.908.659.698	3.908.659.698	0		4.020.903.773	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.908.659.698	3.908.659.698	3.908.659.698	0		4.020.903.773	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.908.659.698	3.908.659.698	3.908.659.698	0	100%	4.020.903.773	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.908.659.698	3.908.659.698	3.908.659.698	0	40%	4.020.903.773	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.817.319.396	7.817.319.396	7.817.319.396	0		8.041.807.546	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Keputih					7.817.319.396	7.817.319.396	7.817.319.396	0		8.041.807.546	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.817.319.396	7.817.319.396	7.817.319.396	0	2 Pokmas / Ormas	8.041.807.546	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	7.817.319.396	7.817.319.396	7.817.319.396	0	2 Unit	8.041.807.546	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Keputih					7.817.319.396	7.817.319.396	7.817.319.396	0		8.041.807.546	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.817.319.396	7.817.319.396	7.817.319.396	0	2 Pokmas / Ormas	8.041.807.546	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	7.817.319.396	7.817.319.396	7.817.319.396	0	2 Unit	8.041.807.546	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.564.920.818	2.564.920.818	2.564.920.818	0		2.643.571.423	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2.564.920.818	2.564.920.818	2.564.920.818	0	2 Unit	2.643.571.423	Kelurahan Keputih
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.343.738.880	1.343.738.880	1.343.738.880	0		1.377.332.350	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.343.738.880	1.343.738.880	1.343.738.880	0	2 Pokmas / Ormas	1.377.332.350	Kelurahan Keputih
	Kelurahan Klampis Ngasem					3.827.465.432	3.827.465.432	3.827.465.432	0		3.923.152.062	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.827.465.432	3.827.465.432	3.827.465.432	0		3.923.152.062	
7,01	KECAMATAN					3.827.465.432	3.827.465.432	3.827.465.432	0		3.923.152.062	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.827.465.432	3.827.465.432	3.827.465.432	0		3.923.152.062	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.827.465.432	3.827.465.432	3.827.465.432	0	100%	3.923.152.062	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.827.465.432	3.827.465.432	3.827.465.432	0	40%	3.923.152.062	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.654.930.864	7.654.930.864	7.654.930.864	0		7.846.304.124	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Klampis Ngasem					7.654.930.864	7.654.930.864	7.654.930.864	0		7.846.304.124	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.654.930.864	7.654.930.864	7.654.930.864	0	2 Pokmas / Ormas	7.846.304.124	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	7.654.930.864	7.654.930.864	7.654.930.864	0	2 Unit	7.846.304.124	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Klampis Ngasem					7.654.930.864	7.654.930.864	7.654.930.864	0		7.846.304.124	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.654.930.864	7.654.930.864	7.654.930.864	0	2 Pokmas / Ormas	7.846.304.124	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	7.654.930.864	7.654.930.864	7.654.930.864	0	2 Unit	7.846.304.124	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.623.265.432	2.623.265.432	2.623.265.432	0		2.688.847.064	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2.623.265.432	2.623.265.432	2.623.265.432	0	2 Unit	2.688.847.064	Kelurahan Klampis Ngasem
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.204.200.000	1.204.200.000	1.204.200.000	0		1.234.304.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.204.200.000	1.204.200.000	1.204.200.000	0	2 Pokmas / Ormas	1.234.304.998	Kelurahan Klampis Ngasem
	Kelurahan Medokan Semampir					4.034.864.454	4.034.864.454	4.034.864.454	0		4.135.736.059	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.034.864.454	4.034.864.454	4.034.864.454	0		4.135.736.059	
7,01	KECAMATAN					4.034.864.454	4.034.864.454	4.034.864.454	0		4.135.736.059	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.034.864.454	4.034.864.454	4.034.864.454	0		4.135.736.059	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	4.034.864.454	4.034.864.454	4.034.864.454	0	100%	4.135.736.059	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.034.864.454	4.034.864.454	4.034.864.454	0	40%	4.135.736.059	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.069.728.908	8.069.728.908	8.069.728.908	0		8.271.472.118	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Medokan Semampir					8.069.728.908	8.069.728.908	8.069.728.908	0		8.271.472.118	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.069.728.908	8.069.728.908	8.069.728.908	0	2 Pokmas / Ormas	8.271.472.118	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	8.069.728.908	8.069.728.908	8.069.728.908	0	2 Unit	8.271.472.118	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Medokan Semampir					8.069.728.908	8.069.728.908	8.069.728.908	0		8.271.472.118	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.069.728.908	8.069.728.908	8.069.728.908	0	2 Pokmas / Ormas	8.271.472.118	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	8.069.728.908	8.069.728.908	8.069.728.908	0	2 Unit	8.271.472.118	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.575.064.454	2.887.065.152	2.887.065.152	-312.000.698		2.639.441.061	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2.575.064.454	2.887.065.152	2.887.065.152	-312.000.698	2 Unit	2.639.441.061	Kelurahan Medokan Semampir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.459.800.000	1.147.799.302	1.147.799.302	312.000.698		1.496.294.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.459.800.000	1.147.799.302	1.147.799.302	312.000.698	2 Pokmas / Ormas	1.496.294.998	Kelurahan Medokan Semampir
	Kelurahan Menur Pumpungan					3.532.807.135	3.532.807.135	3.532.807.135	0		3.621.127.308	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.532.807.135	3.532.807.135	3.532.807.135	0		3.621.127.308	
7.01	KECAMATAN					3.532.807.135	3.532.807.135	3.532.807.135	0		3.621.127.308	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.532.807.135	3.532.807.135	3.532.807.135	0		3.621.127.308	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.532.807.135	3.532.807.135	3.532.807.135	0	100%	3.621.127.308	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.532.807.135	3.532.807.135	3.532.807.135	0	40%	3.621.127.308	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.065.614.270	7.065.614.270	7.065.614.270	0		7.242.254.616	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Menur Pumpungan					7.065.614.270	7.065.614.270	7.065.614.270	0		7.242.254.616	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.065.614.270	7.065.614.270	7.065.614.270	0	2 Pokmas / Ormas	7.242.254.616	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	7.065.614.270	7.065.614.270	7.065.614.270	0	2 Unit	7.242.254.616	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Menur Pumpungan					7.065.614.270	7.065.614.270	7.065.614.270	0		7.242.254.616	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.065.614.270	7.065.614.270	7.065.614.270	0	2 Pokmas / Ormas	7.242.254.616	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	7.065.614.270	7.065.614.270	7.065.614.270	0	2 Unit	7.242.254.616	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.149.207.135	2.149.207.135	2.149.207.135	0		2.202.937.310	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2.149.207.135	2.149.207.135	2.149.207.135	0	2 Unit	2.202.937.310	Kelurahan Menur Pumpungan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.383.600.000	1.383.600.000	1.383.600.000	0		1.418.189.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.383.600.000	1.383.600.000	1.383.600.000	0	2 Pokmas / Ormas	1.418.189.998	Kelurahan Menur Pumpungan
	Kelurahan Nginden Jangkungan					2.812.847.741	2.812.847.741	2.812.847.741	0		2.883.168.930	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.812.847.741	2.812.847.741	2.812.847.741	0		2.883.168.930	
7,01	KECAMATAN					2.812.847.741	2.812.847.741	2.812.847.741	0		2.883.168.930	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.812.847.741	2.812.847.741	2.812.847.741	0		2.883.168.930	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	2.812.847.741	2.812.847.741	2.812.847.741	0	100%	2.883.168.930	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.812.847.741	2.812.847.741	2.812.847.741	0	40%	2.883.168.930	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.625.695.482	5.625.695.482	5.625.695.482	0		5.766.337.860	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Nginden Jangkungan					5.625.695.482	5.625.695.482	5.625.695.482	0		5.766.337.860	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.625.695.482	5.625.695.482	5.625.695.482	0	2 Pokmas / Ormas	5.766.337.860	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.625.695.482	5.625.695.482	5.625.695.482	0	2 Unit	5.766.337.860	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Nginden Jangkungan					5.625.695.482	5.625.695.482	5.625.695.482	0		5.766.337.860	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.625.695.482	5.625.695.482	5.625.695.482	0	2 Pokmas / Ormas	5.766.337.860	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.625.695.482	5.625.695.482	5.625.695.482	0	2 Unit	5.766.337.860	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					846.986.965	1.380.830.219	1.380.830.219	-533.843.254		868.161.638	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	846.986.965	1.380.830.219	1.380.830.219	-533.843.254	2 Unit	868.161.638	Kelurahan Nginden Jangkungan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.965.860.776	1.432.017.522	1.432.017.522	533.843.254		2.015.007.292	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.965.860.776	1.432.017.522	1.432.017.522	533.843.254	2 Pokmas / Ormas	2.015.007.292	Kelurahan Nginden Jangkungan
	Kelurahan Semolowaru					3.053.655.183	3.053.655.183	3.053.655.183	0		3.129.996.558	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.053.655.183	3.053.655.183	3.053.655.183	0		3.129.996.558	
7,01	KECAMATAN					3.053.655.183	3.053.655.183	3.053.655.183	0		3.129.996.558	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.053.655.183	3.053.655.183	3.053.655.183	0		3.129.996.558	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.053.655.183	3.053.655.183	3.053.655.183	0	100%	3.129.996.558	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.053.655.183	3.053.655.183	3.053.655.183	0	40%	3.129.996.558	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.107.310.366	6.107.310.366	6.107.310.366	0		6.259.993.116	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Semolowaru					6.107.310.366	6.107.310.366	6.107.310.366	0		6.259.993.116	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.107.310.366	6.107.310.366	6.107.310.366	0	2 Pokmas / Ormas	6.259.993.116	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6.107.310.366	6.107.310.366	6.107.310.366	0	2 Unit	6.259.993.116	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Semolowaru					6.107.310.366	6.107.310.366	6.107.310.366	0		6.259.993.116	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.107.310.366	6.107.310.366	6.107.310.366	0	2 Pokmas / Ormas	6.259.993.116	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6.107.310.366	6.107.310.366	6.107.310.366	0	2 Unit	6.259.993.116	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.319.710.018	1.913.090.876	1.913.090.876	-593.380.858		1.352.702.766	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.319.710.018	1.913.090.876	1.913.090.876	-593.380.858	2 Unit	1.352.702.766	Kelurahan Semolowaru
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.733.945.165	1.140.564.307	1.140.564.307	593.380.858		1.777.293.792	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.733.945.165	1.140.564.307	1.140.564.307	593.380.858	2 Pokmas / Ormas	1.777.293.792	Kelurahan Semolowaru
	Kec. Sukomanunggal					27.224.740.347	37.266.750.268	38.498.353.736	-11.273.613.389		27.572.043.275	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					27.224.740.347	27.224.740.347	38.498.353.736	-11.273.613.389		27.572.043.275	
7,01	KECAMATAN					27.224.740.347	37.266.750.268	38.498.353.736	-11.273.613.389		27.572.043.275	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.934.743.403	26.555.867.668	27.787.471.136	-852.727.733		27.251.823.267	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,29 %	97,29%	97,39%	26.934.743.403	26.555.867.668	27.787.471.136	-852.727.733	97,29 %	27.251.823.267	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.665.000	
	Terlaksananya proses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.665.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000	8 Dokumen	2.665.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.665.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000	8 Dokumen	2.665.000	Kec. Sukomanunggal
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.561.038.913	20.561.038.913	21.618.217.629	-1.057.178.716		20.717.749.274	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					20.561.038.913	20.561.038.913	21.618.217.629	-1.057.178.716		20.717.749.274	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	51 Orang/bulan	20.561.038.913	20.561.038.913	21.618.217.629	-1.057.178.716	55 Orang/bulan	20.717.749.274	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					20.561.038.913	20.561.038.913	21.618.217.629	-1.057.178.716		20.717.749.274	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	51 Orang/bulan	20.561.038.913	20.561.038.913	21.618.217.629	-1.057.178.716	55 Orang/bulan	20.717.749.274	Kec. Sukomanunggal
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					6.213.895.476	5.847.723.774	6.022.148.526	191.746.950		6.370.269.753	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					6.213.895.476	5.847.723.774	6.022.148.526	191.746.950		6.370.269.753	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	2 Paket	6.213.895.476	5.847.723.774	6.022.148.526	191.746.950	5 Paket	6.370.269.753	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6.213.895.476	5.847.723.774	6.022.148.526	191.746.950		6.370.269.753	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	2 Paket	6.213.895.476	5.847.723.774	6.022.148.526	191.746.950	5 Paket	6.370.269.753	Kec. Sukomanunggal

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					157.209.014	143.172.981	143.172.981	14.036.033		161.139.240	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					157.209.014	143.172.981	143.172.981	14.036.033		161.139.240	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1 Unit	1 Unit	157.209.014	143.172.981	143.172.981	14.036.033	6 Unit	161.139.240	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					157.209.014	143.172.981	143.172.981	14.036.033		161.139.240	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1 Unit	1 Unit	157.209.014	143.172.981	143.172.981	14.036.033	6 Unit	161.139.240	Kec. Sukomanunggal
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					50.252.119	157.593.600	157.593.600	-107.341.481		50.481.561	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	50.252.119	157.593.600	157.593.600	-107.341.481	100%	50.481.561	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					50.252.119	157.593.600	157.593.600	-107.341.481		50.481.561	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					50.252.119	157.593.600	157.593.600	-107.341.481		50.481.561	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.252.119	157.593.600	157.593.600	-107.341.481	12 Laporan	50.481.561	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					50.252.119	157.593.600	157.593.600	-107.341.481		50.481.561	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.252.119	157.593.600	157.593.600	-107.341.481	12 Laporan	50.481.561	Kec. Sukomanunggal
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	10.368.124.800	10.368.124.800	-10.368.124.800		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	60%	60%	60%	0	10.368.124.800	10.368.124.800	-10.368.124.800	60%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	10.368.124.800	10.368.124.800	-10.368.124.800	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	10.368.124.800	10.368.124.800	-10.368.124.800		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	10.368.124.800	10.368.124.800	-10.368.124.800		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	21540 Keluarga	21540 Keluarga	21540 Keluarga	0	10.368.124.800	10.368.124.800	-10.368.124.800	21540 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	180 Keluarga	180 Keluarga	180 Keluarga	0	10.368.124.800	10.368.124.800	-10.368.124.800	180 Keluarga	24.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	10.368.124.800	10.368.124.800	-10.368.124.800		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	21540 Keluarga	21540 Keluarga	21540 Keluarga	0	10.368.124.800	10.368.124.800	-10.368.124.800	21540 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	180 Keluarga	180 Keluarga	180 Keluarga	0	10.368.124.800	10.368.124.800	-10.368.124.800	180 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	9.108.124.800	9.108.124.800	-9.108.124.800		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	21540 Keluarga	21540 Keluarga	21540 Keluarga	0	9.108.124.800	9.108.124.800	-9.108.124.800	21540 Keluarga	12.000.000	Kec. Sukomanunggal
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.260.000.000	1.260.000.000	-1.260.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	180 Keluarga	180 Keluarga	180 Keluarga	0	1.260.000.000	1.260.000.000	-1.260.000.000	180 Keluarga	12.000.000	Kec. Sukomanunggal
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					239.744.825	185.164.200	185.164.200	54.580.625		245.738.447	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	239.744.825	185.164.200	185.164.200	54.580.625	100%	245.738.447	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					239.744.825	185.164.200	185.164.200	54.580.625		245.738.447	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					239.744.825	185.164.200	185.164.200	54.580.625		245.738.447	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	239.744.825	185.164.200	185.164.200	54.580.625	12 Laporan	245.738.447	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					239.744.825	185.164.200	185.164.200	54.580.625		245.738.447	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	239.744.825	185.164.200	185.164.200	54.580.625	12 Laporan	245.738.447	Kec. Sukomanunggal
	Kelurahan Putat Gede					3.227.532.037	3.227.532.037	3.227.532.037	0		3.284.220.333	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.227.532.037	3.227.532.037	3.227.532.037	0		3.284.220.333	
7,01	KECAMATAN					3.227.532.037	3.227.532.037	3.227.532.037	0		3.284.220.333	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.227.532.037	3.227.532.037	3.227.532.037	0		3.284.220.333	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	60%	60%	60%	3.227.532.037	3.227.532.037	3.227.532.037	0	60%	3.284.220.333	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.227.532.037	3.227.532.037	3.227.532.037	0	40%	3.284.220.333	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.455.064.074	6.455.064.074	6.455.064.074	0		6.568.440.666	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Putat Gede					6.455.064.074	6.455.064.074	6.455.064.074	0		6.568.440.666	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.455.064.074	6.455.064.074	6.455.064.074	0	2 Pokmas / Ormas	6.568.440.666	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	6.455.064.074	6.455.064.074	6.455.064.074	0	4 Unit	6.568.440.666	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Putat Gede					6.455.064.074	6.455.064.074	6.455.064.074	0		6.568.440.666	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.455.064.074	6.455.064.074	6.455.064.074	0	2 Pokmas / Ormas	6.568.440.666	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	6.455.064.074	6.455.064.074	6.455.064.074	0	4 Unit	6.568.440.666	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.031.587.213	2.370.049.285	2.370.049.285	-338.462.072		2.082.376.890	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	2.031.587.213	2.370.049.285	2.370.049.285	-338.462.072	4 Unit	2.082.376.890	Kelurahan Putat Gede
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.195.944.824	857.482.752	857.482.752	338.462.072		1.201.843.443	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.195.944.824	857.482.752	857.482.752	338.462.072	2 Pokmas / Ormas	1.201.843.443	Kelurahan Putat Gede
	Kelurahan Simomulyo					4.126.488.716	4.126.488.716	4.126.488.716	0		4.229.650.927	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.126.488.716	4.126.488.716	4.126.488.716	0		4.229.650.927	
7,01	KECAMATAN					4.126.488.716	4.126.488.716	4.126.488.716	0		4.229.650.927	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.126.488.716	4.126.488.716	4.126.488.716	0		4.229.650.927	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	60%	60%	60%	4.126.488.716	4.126.488.716	4.126.488.716	0	60%	4.229.650.927	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.126.488.716	4.126.488.716	4.126.488.716	0	40%	4.229.650.927	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.252.977.432	8.252.977.432	8.252.977.432	0		8.459.301.854	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Simomulyo					8.252.977.432	8.252.977.432	8.252.977.432	0		8.459.301.854	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.252.977.432	8.252.977.432	8.252.977.432	0	2 Pokmas / Ormas	8.459.301.854	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	6 Unit	8.252.977.432	8.252.977.432	8.252.977.432	0	7 Unit	8.459.301.854	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Simomulyo					8.252.977.432	8.252.977.432	8.252.977.432	0		8.459.301.854	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.252.977.432	8.252.977.432	8.252.977.432	0	2 Pokmas / Ormas	8.459.301.854	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	6 Unit	8.252.977.432	8.252.977.432	8.252.977.432	0	7 Unit	8.459.301.854	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.751.292.219	2.852.941.767	2.852.941.767	-101.649.548		2.820.074.520	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	6 Unit	2.751.292.219	2.852.941.767	2.852.941.767	-101.649.548	7 Unit	2.820.074.520	Kelurahan Simomulyo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.375.196.497	1.273.546.949	1.273.546.949	101.649.548		1.409.576.407	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.375.196.497	1.273.546.949	1.273.546.949	101.649.548	2 Pokmas / Ormas	1.409.576.407	Kelurahan Simomulyo
	Kelurahan Simomulyo Baru					4.157.824.102	4.157.824.102	4.157.824.102	0		4.261.769.699	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.157.824.102	4.157.824.102	4.157.824.102	0		4.261.769.699	
7,01	KECAMATAN					4.157.824.102	4.157.824.102	4.157.824.102	0		4.261.769.699	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.157.824.102	4.157.824.102	4.157.824.102	0		4.261.769.699	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	60%	60%	60%	4.157.824.102	4.157.824.102	4.157.824.102	0	60%	4.261.769.699	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.157.824.102	4.157.824.102	4.157.824.102	0	40%	4.261.769.699	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.315.648.204	8.315.648.204	8.315.648.204	0		8.523.539.398	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Simomulyo Baru					8.315.648.204	8.315.648.204	8.315.648.204	0		8.523.539.398	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.315.648.204	8.315.648.204	8.315.648.204	0	2 Pokmas / Ormas	8.523.539.398	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	8.315.648.204	8.315.648.204	8.315.648.204	0	5 Unit	8.523.539.398	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Simomulyo Baru					8.315.648.204	8.315.648.204	8.315.648.204	0		8.523.539.398	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.315.648.204	8.315.648.204	8.315.648.204	0	2 Pokmas / Ormas	8.523.539.398	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	8.315.648.204	8.315.648.204	8.315.648.204	0	5 Unit	8.523.539.398	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.900.624.102	1.900.624.102	1.900.624.102	0		1.948.139.702	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1.900.624.102	1.900.624.102	1.900.624.102	0	5 Unit	1.948.139.702	Kelurahan Simomulyo Baru
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.257.200.000	2.257.200.000	2.257.200.000	0		2.313.629.997	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2.257.200.000	2.257.200.000	2.257.200.000	0	2 Pokmas / Ormas	2.313.629.997	Kelurahan Simomulyo Baru
	Kelurahan Sonokwijenan					3.206.625.761	3.206.625.761	3.206.625.761	0		3.286.791.400	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.206.625.761	3.206.625.761	3.206.625.761	0		3.286.791.400	
7,01	KECAMATAN					3.206.625.761	3.206.625.761	3.206.625.761	0		3.286.791.400	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.206.625.761	3.206.625.761	3.206.625.761	0		3.286.791.400	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	60%	60%	60%	3.206.625.761	3.206.625.761	3.206.625.761	0	60%	3.286.791.400	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.206.625.761	3.206.625.761	3.206.625.761	0	40%	3.286.791.400	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.413.251.522	6.413.251.522	6.413.251.522	0		6.573.582.800	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sonokwijenan					6.413.251.522	6.413.251.522	6.413.251.522	0		6.573.582.800	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.413.251.522	6.413.251.522	6.413.251.522	0	2 Pokmas / Ormas	6.573.582.800	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6.413.251.522	6.413.251.522	6.413.251.522	0	6 Unit	6.573.582.800	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sonokwijenan					6.413.251.522	6.413.251.522	6.413.251.522	0		6.573.582.800	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.413.251.522	6.413.251.522	6.413.251.522	0	2 Pokmas / Ormas	6.573.582.800	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6.413.251.522	6.413.251.522	6.413.251.522	0	6 Unit	6.573.582.800	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.072.051.336	2.072.051.336	2.072.051.336	0		2.123.852.616	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	2.072.051.336	2.072.051.336	2.072.051.336	0	6 Unit	2.123.852.616	Kelurahan Sonokwijenan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.134.574.425	1.134.574.425	1.134.574.425	0		1.162.938.784	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.134.574.425	1.134.574.425	1.134.574.425	0	2 Pokmas / Ormas	1.162.938.784	Kelurahan Sonokwijenan
	Kelurahan Sukomanunggal					2.737.015.685	2.737.015.685	2.737.015.685	0		2.805.441.073	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.737.015.685	2.737.015.685	2.737.015.685	0		2.805.441.073	
7.01	KECAMATAN					2.737.015.685	2.737.015.685	2.737.015.685	0		2.805.441.073	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.737.015.685	2.737.015.685	2.737.015.685	0		2.805.441.073	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	60%	60%	60%	2.737.015.685	2.737.015.685	2.737.015.685	0	60%	2.805.441.073	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.737.015.685	2.737.015.685	2.737.015.685	0	40%	2.805.441.073	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.474.031.370	5.474.031.370	5.474.031.370	0		5.610.882.146	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sukomanunggal					5.474.031.370	5.474.031.370	5.474.031.370	0		5.610.882.146	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.474.031.370	5.474.031.370	5.474.031.370	0	2 Pokmas / Ormas	5.610.882.146	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5.474.031.370	5.474.031.370	5.474.031.370	0	5 Unit	5.610.882.146	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sukomanunggal					5.474.031.370	5.474.031.370	5.474.031.370	0		5.610.882.146	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.474.031.370	5.474.031.370	5.474.031.370	0	2 Pokmas / Ormas	5.610.882.146	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5.474.031.370	5.474.031.370	5.474.031.370	0	5 Unit	5.610.882.146	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.630.127.226	1.236.310.555	1.528.495.564	101.631.662		1.670.880.404	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1.630.127.226	1.236.310.555	1.528.495.564	101.631.662	5 Unit	1.670.880.404	Kelurahan Sukomanunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.106.888.459	1.500.705.130	1.208.520.121	-101.631.662		1.134.560.669	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.106.888.459	1.500.705.130	1.208.520.121	-101.631.662	2 Pokmas / Ormas	1.134.560.669	Kelurahan Sukomanunggal
	Kelurahan Tanjungsari					3.329.000.439	3.329.000.439	3.329.000.439	0		3.425.295.995	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.329.000.439	3.329.000.439	3.329.000.439	0		3.425.295.995	
7,01	KECAMATAN					3.329.000.439	3.329.000.439	3.329.000.439	0		3.425.295.995	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.329.000.439	3.329.000.439	3.329.000.439	0		3.425.295.995	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	60%	60%	60%	3.329.000.439	3.329.000.439	3.329.000.439	0	60%	3.425.295.995	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.329.000.439	3.329.000.439	3.329.000.439	0	40%	3.425.295.995	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.658.000.878	6.658.000.878	6.658.000.878	0		6.850.591.990	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tanjungsari					6.658.000.878	6.658.000.878	6.658.000.878	0		6.850.591.990	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.658.000.878	6.658.000.878	6.658.000.878	0	2 Pokmas / Ormas	6.850.591.990	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	6.658.000.878	6.658.000.878	6.658.000.878	0	4 Unit	6.850.591.990	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tanjungsari					6.658.000.878	6.658.000.878	6.658.000.878	0		6.850.591.990	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.658.000.878	6.658.000.878	6.658.000.878	0	2 Pokmas / Ormas	6.850.591.990	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	6.658.000.878	6.658.000.878	6.658.000.878	0	4 Unit	6.850.591.990	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.255.116.119	2.442.735.081	2.442.735.081	-187.618.962		2.324.564.569	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	2.255.116.119	2.442.735.081	2.442.735.081	-187.618.962	4 Unit	2.324.564.569	Kelurahan Tanjungsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.073.884.320	886.265.358	886.265.358	187.618.962		1.100.731.426	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.073.884.320	886.265.358	886.265.358	187.618.962	2 Pokmas / Ormas	1.100.731.426	Kelurahan Tanjungsari
	Kec. Tambaksari					36.780.697.984	56.530.822.923	59.463.931.936	-22.683.233.952		37.244.500.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					36.780.697.984	36.780.697.984	59.463.931.936	-22.683.233.952		37.244.500.000	
7,01	KECAMATAN					36.780.697.984	56.530.822.923	59.463.931.936	-22.683.233.952		37.244.500.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					36.166.289.934	35.283.228.555	38.216.337.568	-2.050.047.634		36.606.091.950	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,96%	97,92%	97,92%	36.166.289.934	35.283.228.555	38.216.337.568	-2.050.047.634	97,93%	36.606.091.950	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Tambaksari
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					27.481.022.797	27.481.022.797	30.016.142.530	-2.535.119.733		27.691.426.774	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					27.481.022.797	27.481.022.797	30.016.142.530	-2.535.119.733		27.691.426.774	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	82 Orang/bulan	72 Orang/bulan	27.481.022.797	27.481.022.797	30.016.142.530	-2.535.119.733	84 Orang/bulan	27.691.426.774	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					27.481.022.797	27.481.022.797	30.016.142.530	-2.535.119.733		27.691.426.774	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	82 Orang/bulan	72 Orang/bulan	27.481.022.797	27.481.022.797	30.016.142.530	-2.535.119.733	84 Orang/bulan	27.691.426.774	Kec. Tambaksari
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					8.572.660.137	7.657.069.758	8.035.079.038	537.581.099		8.802.058.176	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					8.572.660.137	7.657.069.758	8.035.079.038	537.581.099		8.802.058.176	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	8.572.660.137	7.657.069.758	8.035.079.038	537.581.099	12 Paket	8.802.058.176	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					8.572.660.137	7.657.069.758	8.035.079.038	537.581.099		8.802.058.176	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	8.572.660.137	7.657.069.758	8.035.079.038	537.581.099	12 Paket	8.802.058.176	Kec. Tambaksari
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.007.000	141.192.000	161.172.000	-51.165.000		110.007.000	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					110.007.000	141.192.000	161.172.000	-51.165.000		110.007.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1 Unit	1 Unit	110.007.000	141.192.000	161.172.000	-51.165.000	7 Unit	110.007.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					110.007.000	141.192.000	161.172.000	-51.165.000		110.007.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1 Unit	1 Unit	110.007.000	141.192.000	161.172.000	-51.165.000	7 Unit	110.007.000	Kec. Tambaksari
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					367.996.000	356.023.968	356.023.968	11.972.032		367.996.000	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	367.996.000	356.023.968	356.023.968	11.972.032	100%	367.996.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					367.996.000	356.023.968	356.023.968	11.972.032		367.996.000	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					367.996.000	356.023.968	356.023.968	11.972.032		367.996.000	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	367.996.000	356.023.968	356.023.968	11.972.032	12 Laporan	367.996.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					367.996.000	356.023.968	356.023.968	11.972.032		367.996.000	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	367.996.000	356.023.968	356.023.968	11.972.032	12 Laporan	367.996.000	Kec. Tambaksari

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	20.649.981.600	20.633.052.000	-20.633.052.000		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	0	20.649.981.600	20.633.052.000	-20.633.052.000	100%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	20.649.981.600	20.633.052.000	-20.633.052.000	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	20.649.981.600	20.633.052.000	-20.633.052.000		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	20.649.981.600	20.633.052.000	-20.633.052.000		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	46480 Keluarga	46480 Keluarga	46480 Keluarga	0	20.649.981.600	20.633.052.000	-20.633.052.000	46480 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	390 Keluarga	390 Keluarga	390 Keluarga	0	20.649.981.600	20.633.052.000	-20.633.052.000	390 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	20.649.981.600	20.633.052.000	-20.633.052.000		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	46480 Keluarga	46480 Keluarga	46480 Keluarga	0	20.649.981.600	20.633.052.000	-20.633.052.000	46480 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	390 Keluarga	390 Keluarga	390 Keluarga	0	20.649.981.600	20.633.052.000	-20.633.052.000	390 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	17.919.981.600	17.903.052.000	-17.903.052.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	46480 Keluarga	46480 Keluarga	46480 Keluarga	0	17.919.981.600	17.903.052.000	-17.903.052.000	46480 Keluarga	12.000.000	Kec. Tambaksari
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	2.730.000.000	2.730.000.000	-2.730.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	390 Keluarga	390 Keluarga	390 Keluarga	0	2.730.000.000	2.730.000.000	-2.730.000.000	390 Keluarga	12.000.000	Kec. Tambaksari
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					246.412.050	241.588.800	258.518.400	-12.106.350		246.412.050	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	246.412.050	241.588.800	258.518.400	-12.106.350	100%	246.412.050	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					246.412.050	241.588.800	258.518.400	-12.106.350		246.412.050	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					246.412.050	241.588.800	258.518.400	-12.106.350		246.412.050	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	246.412.050	241.588.800	258.518.400	-12.106.350	12 Laporan	246.412.050	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					246.412.050	241.588.800	258.518.400	-12.106.350		246.412.050	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	246.412.050	241.588.800	258.518.400	-12.106.350	12 Laporan	246.412.050	Kec. Tambaksari
	Kelurahan Dukuh Setro					3.705.092.387	3.705.092.387	3.705.092.387	0		3.773.719.691	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.705.092.387	3.705.092.387	3.705.092.387	0		3.773.719.691	
7,01	KECAMATAN					3.705.092.387	3.705.092.387	3.705.092.387	0		3.773.719.691	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.705.092.387	3.705.092.387	3.705.092.387	0		3.773.719.691	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.705.092.387	3.705.092.387	3.705.092.387	0	100%	3.773.719.691	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.705.092.387	3.705.092.387	3.705.092.387	0	40%	3.773.719.691	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.410.184.774	7.410.184.774	7.410.184.774	0		7.547.439.382	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Dukuh Setro					7.410.184.774	7.410.184.774	7.410.184.774	0		7.547.439.382	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.410.184.774	7.410.184.774	7.410.184.774	0	2 Pokmas / Ormas	7.547.439.382	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7.410.184.774	7.410.184.774	7.410.184.774	0	7 Unit	7.547.439.382	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Dukuh Setro					7.410.184.774	7.410.184.774	7.410.184.774	0		7.547.439.382	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.410.184.774	7.410.184.774	7.410.184.774	0	2 Pokmas / Ormas	7.547.439.382	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7.410.184.774	7.410.184.774	7.410.184.774	0	7 Unit	7.547.439.382	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.184.812.387	2.718.116.388	2.718.116.388	-533.304.001		2.239.432.693	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	2.184.812.387	2.718.116.388	2.718.116.388	-533.304.001	7 Unit	2.239.432.693	Kelurahan Dukuh Setro

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.520.280.000	986.975.999	986.975.999	533.304.001		1.534.286.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.520.280.000	986.975.999	986.975.999	533.304.001	2 Pokmas / Ormas	1.534.286.998	Kelurahan Dukuh Setro
	Kelurahan Gading					3.979.816.116	3.979.816.116	3.979.816.116	0		4.079.311.513	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.979.816.116	3.979.816.116	3.979.816.116	0		4.079.311.513	
7,01	KECAMATAN					3.979.816.116	3.979.816.116	3.979.816.116	0		4.079.311.513	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.979.816.116	3.979.816.116	3.979.816.116	0		4.079.311.513	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.979.816.116	3.979.816.116	3.979.816.116	0	100%	4.079.311.513	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.979.816.116	3.979.816.116	3.979.816.116	0	40%	4.079.311.513	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.959.632.232	7.959.632.232	7.959.632.232	0		8.158.623.026	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Gading					7.959.632.232	7.959.632.232	7.959.632.232	0		8.158.623.026	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.959.632.232	7.959.632.232	7.959.632.232	0	2 Pokmas / Ormas	8.158.623.026	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	10 Unit	10 Unit	7.959.632.232	7.959.632.232	7.959.632.232	0	9 Unit	8.158.623.026	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Gading					7.959.632.232	7.959.632.232	7.959.632.232	0		8.158.623.026	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.959.632.232	7.959.632.232	7.959.632.232	0	2 Pokmas / Ormas	8.158.623.026	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	10 Unit	10 Unit	7.959.632.232	7.959.632.232	7.959.632.232	0	9 Unit	8.158.623.026	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.833.616.116	2.456.760.676	2.618.416.116	-784.800.000		1.879.456.516	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	10 Unit	10 Unit	1.833.616.116	2.456.760.676	2.618.416.116	-784.800.000	9 Unit	1.879.456.516	Kelurahan Gading
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.146.200.000	1.523.055.440	1.361.400.000	784.800.000		2.199.854.997	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2.146.200.000	1.523.055.440	1.361.400.000	784.800.000	2 Pokmas / Ormas	2.199.854.997	Kelurahan Gading
	Kelurahan Kapasmadya Baru					5.035.629.642	5.035.629.642	5.035.629.642	0		5.161.520.376	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					5.035.629.642	5.035.629.642	5.035.629.642	0		5.161.520.376	
7,01	KECAMATAN					5.035.629.642	5.035.629.642	5.035.629.642	0		5.161.520.376	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.035.629.642	5.035.629.642	5.035.629.642	0		5.161.520.376	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	5.035.629.642	5.035.629.642	5.035.629.642	0	100%	5.161.520.376	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	5.035.629.642	5.035.629.642	5.035.629.642	0	40%	5.161.520.376	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					10.071.259.284	10.071.259.284	10.071.259.284	0		10.323.040.752	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kapasmadya Baru					10.071.259.284	10.071.259.284	10.071.259.284	0		10.323.040.752	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	10.071.259.284	10.071.259.284	10.071.259.284	0	2 Pokmas / Ormas	10.323.040.752	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	10.071.259.284	10.071.259.284	10.071.259.284	0	8 Unit	10.323.040.752	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kapasmadya Baru					10.071.259.284	10.071.259.284	10.071.259.284	0		10.323.040.752	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	10.071.259.284	10.071.259.284	10.071.259.284	0	2 Pokmas / Ormas	10.323.040.752	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	10.071.259.284	10.071.259.284	10.071.259.284	0	8 Unit	10.323.040.752	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.971.648.842	3.507.691.984	3.507.691.984	-536.043.142		3.045.940.059	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	2.971.648.842	3.507.691.984	3.507.691.984	-536.043.142	8 Unit	3.045.940.059	Kelurahan Kapasmadya Baru
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.063.980.800	1.527.937.658	1.527.937.658	536.043.142		2.115.580.317	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2.063.980.800	1.527.937.658	1.527.937.658	536.043.142	2 Pokmas / Ormas	2.115.580.317	Kelurahan Kapasmadya Baru
	Kelurahan Pacarkeling					4.238.705.044	4.238.705.044	4.238.705.044	0		4.344.672.664	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.238.705.044	4.238.705.044	4.238.705.044	0		4.344.672.664	
7,01	KECAMATAN					4.238.705.044	4.238.705.044	4.238.705.044	0		4.344.672.664	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.238.705.044	4.238.705.044	4.238.705.044	0		4.344.672.664	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	4.238.705.044	4.238.705.044	4.238.705.044	0	100%	4.344.672.664	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.238.705.044	4.238.705.044	4.238.705.044	0	40%	4.344.672.664	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.477.410.088	8.477.410.088	8.477.410.088	0		8.689.345.328	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Pacarkeling					8.477.410.088	8.477.410.088	8.477.410.088	0		8.689.345.328	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	8.477.410.088	8.477.410.088	8.477.410.088	0	1 Pokmas / Ormas	8.689.345.328	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	12 Unit	12 Unit	8.477.410.088	8.477.410.088	8.477.410.088	0	8 Unit	8.689.345.328	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pacarkeling					8.477.410.088	8.477.410.088	8.477.410.088	0		8.689.345.328	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	8.477.410.088	8.477.410.088	8.477.410.088	0	1 Pokmas / Ormas	8.689.345.328	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	12 Unit	12 Unit	8.477.410.088	8.477.410.088	8.477.410.088	0	8 Unit	8.689.345.328	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.276.742.964	2.870.283.475	2.870.283.475	-593.540.511		2.333.661.535	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	12 Unit	12 Unit	2.276.742.964	2.870.283.475	2.870.283.475	-593.540.511	8 Unit	2.333.661.535	Kelurahan Pacarkeling
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.961.962.080	1.368.421.569	1.368.421.569	593.540.511		2.011.011.129	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.961.962.080	1.368.421.569	1.368.421.569	593.540.511	1 Pokmas / Ormas	2.011.011.129	Kelurahan Pacarkeling
	Kelurahan Pacarkembang					5.264.156.140	5.264.156.140	5.264.156.140	0		5.395.760.035	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					5.264.156.140	5.264.156.140	5.264.156.140	0		5.395.760.035	
7,01	KECAMATAN					5.264.156.140	5.264.156.140	5.264.156.140	0		5.395.760.035	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.264.156.140	5.264.156.140	5.264.156.140	0		5.395.760.035	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	5.264.156.140	5.264.156.140	5.264.156.140	0	100%	5.395.760.035	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	5.264.156.140	5.264.156.140	5.264.156.140	0	40%	5.395.760.035	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					10.528.312.280	10.528.312.280	10.528.312.280	0		10.791.520.070	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Pacarkembang					10.528.312.280	10.528.312.280	10.528.312.280	0		10.791.520.070	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	10.528.312.280	10.528.312.280	10.528.312.280	0	2 Pokmas / Ormas	10.791.520.070	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	11 Unit	11 Unit	10.528.312.280	10.528.312.280	10.528.312.280	0	11 Unit	10.791.520.070	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pacarkembang					10.528.312.280	10.528.312.280	10.528.312.280	0		10.791.520.070	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	10.528.312.280	10.528.312.280	10.528.312.280	0	2 Pokmas / Ormas	10.791.520.070	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	11 Unit	11 Unit	10.528.312.280	10.528.312.280	10.528.312.280	0	11 Unit	10.791.520.070	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.449.775.635	3.684.676.140	3.684.676.140	-1.234.900.505		2.511.020.022	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	11 Unit	11 Unit	2.449.775.635	3.684.676.140	3.684.676.140	-1.234.900.505	11 Unit	2.511.020.022	Kelurahan Pacarkembang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.814.380.505	1.579.480.000	1.579.480.000	1.234.900.505		2.884.740.013	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2.814.380.505	1.579.480.000	1.579.480.000	1.234.900.505	2 Pokmas / Ormas	2.884.740.013	Kelurahan Pacarkembang
	Kelurahan Ploso					4.448.287.965	4.448.287.965	4.448.287.965	0		4.559.495.158	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.448.287.965	4.448.287.965	4.448.287.965	0		4.559.495.158	
7.01	KECAMATAN					4.448.287.965	4.448.287.965	4.448.287.965	0		4.559.495.158	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.448.287.965	4.448.287.965	4.448.287.965	0		4.559.495.158	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	4.448.287.965	4.448.287.965	4.448.287.965	0	100%	4.559.495.158	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.448.287.965	4.448.287.965	4.448.287.965	0	40%	4.559.495.158	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.896.575.930	8.896.575.930	8.896.575.930	0		9.118.990.316	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Ploso					8.896.575.930	8.896.575.930	8.896.575.930	0		9.118.990.316	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	8.896.575.930	8.896.575.930	8.896.575.930	0	3 Pokmas / Ormas	9.118.990.316	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	11 Unit	11 Unit	8.896.575.930	8.896.575.930	8.896.575.930	0	9 Unit	9.118.990.316	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Ploso					8.896.575.930	8.896.575.930	8.896.575.930	0		9.118.990.316	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	8.896.575.930	8.896.575.930	8.896.575.930	0	3 Pokmas / Ormas	9.118.990.316	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	11 Unit	11 Unit	8.896.575.930	8.896.575.930	8.896.575.930	0	9 Unit	9.118.990.316	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.229.687.965	3.059.022.557	3.059.022.557	-829.334.592		2.285.430.161	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	11 Unit	11 Unit	2.229.687.965	3.059.022.557	3.059.022.557	-829.334.592	9 Unit	2.285.430.161	Kelurahan Ploso
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.218.600.000	1.389.265.408	1.389.265.408	829.334.592		2.274.064.997	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2.218.600.000	1.389.265.408	1.389.265.408	829.334.592	3 Pokmas / Ormas	2.274.064.997	Kelurahan Ploso
	Kelurahan Rangkah					3.726.228.729	3.726.228.729	3.726.228.729	0		3.932.438.121	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.726.228.729	3.726.228.729	3.726.228.729	0		3.932.438.121	
7,01	KECAMATAN					3.726.228.729	3.726.228.729	3.726.228.729	0		3.932.438.121	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.726.228.729	3.726.228.729	3.726.228.729	0		3.932.438.121	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.726.228.729	3.726.228.729	3.726.228.729	0	100%	3.932.438.121	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.726.228.729	3.726.228.729	3.726.228.729	0	40%	3.932.438.121	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.452.457.458	7.452.457.458	7.452.457.458	0		7.864.876.242	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Rangkah					7.452.457.458	7.452.457.458	7.452.457.458	0		7.864.876.242	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.452.457.458	7.452.457.458	7.452.457.458	0	2 Pokmas / Ormas	7.864.876.242	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	9 Unit	9 Unit	7.452.457.458	7.452.457.458	7.452.457.458	0	9 Unit	7.864.876.242	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Rangkah					7.452.457.458	7.452.457.458	7.452.457.458	0		7.864.876.242	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.452.457.458	7.452.457.458	7.452.457.458	0	2 Pokmas / Ormas	7.864.876.242	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	9 Unit	9 Unit	7.452.457.458	7.452.457.458	7.452.457.458	0	9 Unit	7.864.876.242	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.488.428.729	2.895.712.282	2.895.712.282	-407.283.553		2.663.693.123	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	9 Unit	9 Unit	2.488.428.729	2.895.712.282	2.895.712.282	-407.283.553	9 Unit	2.663.693.123	Kelurahan Rangkah
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.237.800.000	830.516.447	830.516.447	407.283.553		1.268.744.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.237.800.000	830.516.447	830.516.447	407.283.553	2 Pokmas / Ormas	1.268.744.998	Kelurahan Rangkah
	Kelurahan Tambaksari					4.770.177.837	4.770.177.837	4.770.177.837	0		4.889.432.275	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.770.177.837	4.770.177.837	4.770.177.837	0		4.889.432.275	
7,01	KECAMATAN					4.770.177.837	4.770.177.837	4.770.177.837	0		4.889.432.275	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.770.177.837	4.770.177.837	4.770.177.837	0		4.889.432.275	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	4.770.177.837	4.770.177.837	4.770.177.837	0	100%	4.889.432.275	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.770.177.837	4.770.177.837	4.770.177.837	0	40%	4.889.432.275	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.540.355.674	9.540.355.674	9.540.355.674	0		9.778.864.550	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tambaksari					9.540.355.674	9.540.355.674	9.540.355.674	0		9.778.864.550	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	9.540.355.674	9.540.355.674	9.540.355.674	0	2 Pokmas / Ormas	9.778.864.550	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9.540.355.674	9.540.355.674	9.540.355.674	0	9 Unit	9.778.864.550	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tambaksari					9.540.355.674	9.540.355.674	9.540.355.674	0		9.778.864.550	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	9.540.355.674	9.540.355.674	9.540.355.674	0	2 Pokmas / Ormas	9.778.864.550	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9.540.355.674	9.540.355.674	9.540.355.674	0	9 Unit	9.778.864.550	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.999.577.837	3.530.649.837	3.462.369.437	-462.791.600		3.074.567.278	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	2.999.577.837	3.530.649.837	3.462.369.437	-462.791.600	9 Unit	3.074.567.278	Kelurahan Tambaksari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.770.600.000	1.239.528.000	1.307.808.400	462.791.600		1.814.864.997	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.770.600.000	1.239.528.000	1.307.808.400	462.791.600	2 Pokmas / Ormas	1.814.864.997	Kelurahan Tambaksari
	Kec. Tandes					30.042.342.207	40.355.351.186	43.731.825.803	-13.689.483.596		30.399.982.493	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					30.042.342.207	30.042.342.207	43.731.825.803	-13.689.483.596		30.399.982.493	
7,01	KECAMATAN					30.042.342.207	40.355.351.186	43.731.825.803	-13.689.483.596		30.399.982.493	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.525.373.000	29.084.620.986	32.430.885.953	-2.905.512.953		29.858.801.301	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,60 %	97,20%	97,20%	29.525.373.000	29.084.620.986	32.430.885.953	-2.905.512.953	97,32 %	29.858.801.301	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Tandes
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					23.804.526.774	23.804.526.774	26.861.193.120	-3.056.666.346		23.987.273.900	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					23.804.526.774	23.804.526.774	26.861.193.120	-3.056.666.346		23.987.273.900	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	69 Orang/bulan	23.804.526.774	23.804.526.774	26.861.193.120	-3.056.666.346	73 Orang/bulan	23.987.273.900	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					23.804.526.774	23.804.526.774	26.861.193.120	-3.056.666.346		23.987.273.900	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	69 Orang/bulan	23.804.526.774	23.804.526.774	26.861.193.120	-3.056.666.346	73 Orang/bulan	23.987.273.900	Kec. Tandes
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					5.595.113.626	5.166.713.662	5.439.037.723	156.075.903		5.745.794.801	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					5.595.113.626	5.166.713.662	5.439.037.723	156.075.903		5.745.794.801	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	5.595.113.626	5.166.713.662	5.439.037.723	156.075.903	10 Paket	5.745.794.801	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.595.113.626	5.166.713.662	5.439.037.723	156.075.903		5.745.794.801	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	5.595.113.626	5.166.713.662	5.439.037.723	156.075.903	10 Paket	5.745.794.801	Kec. Tandes
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					123.132.600	109.436.550	126.711.110	-3.578.510		123.132.600	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					123.132.600	109.436.550	126.711.110	-3.578.510		123.132.600	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1 Unit	1 Unit	123.132.600	109.436.550	126.711.110	-3.578.510	6 Unit	123.132.600	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					123.132.600	109.436.550	126.711.110	-3.578.510		123.132.600	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1 Unit	1 Unit	123.132.600	109.436.550	126.711.110	-3.578.510	6 Unit	123.132.600	Kec. Tandes
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					250.362.807	223.050.800	223.436.600	26.926.207		250.574.792	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	250.362.807	223.050.800	223.436.600	26.926.207	100%	250.574.792	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					250.362.807	223.050.800	223.436.600	26.926.207		250.574.792	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					250.362.807	223.050.800	223.436.600	26.926.207		250.574.792	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	250.362.807	223.050.800	223.436.600	26.926.207	12 Laporan	250.574.792	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					250.362.807	223.050.800	223.436.600	26.926.207		250.574.792	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	250.362.807	223.050.800	223.436.600	26.926.207	12 Laporan	250.574.792	Kec. Tandes
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	10.825.406.400	10.825.406.400	-10.825.406.400		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	90%	70%	70%	0	10.825.406.400	10.825.406.400	-10.825.406.400	75%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	10.825.406.400	10.825.406.400	-10.825.406.400	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	10.825.406.400	10.825.406.400	-10.825.406.400		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	10.825.406.400	10.825.406.400	-10.825.406.400		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	21740 Keluarga	21740 Keluarga	21360 Keluarga	0	10.825.406.400	10.825.406.400	-10.825.406.400	21740 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	255 Keluarga	255 Keluarga	255 Keluarga	0	10.825.406.400	10.825.406.400	-10.825.406.400	255 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	10.825.406.400	10.825.406.400	-10.825.406.400		24.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	21740 Keluarga	21740 Keluarga	21360 Keluarga	0	10.825.406.400	10.825.406.400	-10.825.406.400	21740 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	255 Keluarga	255 Keluarga	255 Keluarga	0	10.825.406.400	10.825.406.400	-10.825.406.400	255 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	9.040.406.400	9.040.406.400	-9.040.406.400		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	21740 Keluarga	21740 Keluarga	21360 Keluarga	0	9.040.406.400	9.040.406.400	-9.040.406.400	21740 Keluarga	12.000.000	Kec. Tandes
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.785.000.000	1.785.000.000	-1.785.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	255 Keluarga	255 Keluarga	255 Keluarga	0	1.785.000.000	1.785.000.000	-1.785.000.000	255 Keluarga	12.000.000	Kec. Tandes
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					266.606.400	222.273.000	252.096.850	14.509.550		266.606.400	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	266.606.400	222.273.000	252.096.850	14.509.550	100%	266.606.400	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					266.606.400	222.273.000	252.096.850	14.509.550		266.606.400	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					266.606.400	222.273.000	252.096.850	14.509.550		266.606.400	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	266.606.400	222.273.000	252.096.850	14.509.550	12 Laporan	266.606.400	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					266.606.400	222.273.000	252.096.850	14.509.550		266.606.400	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	266.606.400	222.273.000	252.096.850	14.509.550	12 Laporan	266.606.400	Kec. Tandes
	Kelurahan Balongsari					3.756.212.645	3.756.212.645	3.756.212.645	0		4.074.284.581	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.756.212.645	3.756.212.645	3.756.212.645	0		4.074.284.581	
7,01	KECAMATAN					3.756.212.645	3.756.212.645	3.756.212.645	0		4.074.284.581	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.756.212.645	3.756.212.645	3.756.212.645	0		4.074.284.581	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	90%	70%	70%	3.756.212.645	3.756.212.645	3.756.212.645	0	75%	4.074.284.581	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.756.212.645	3.756.212.645	3.756.212.645	0	40%	4.074.284.581	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.512.425.290	7.512.425.290	7.512.425.290	0		8.148.569.162	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Balongsari					7.512.425.290	7.512.425.290	7.512.425.290	0		8.148.569.162	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.512.425.290	7.512.425.290	7.512.425.290	0	2 Pokmas / Ormas	8.148.569.162	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	7.512.425.290	7.512.425.290	7.512.425.290	0	2 Unit	8.148.569.162	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Balongsari					7.512.425.290	7.512.425.290	7.512.425.290	0		8.148.569.162	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.512.425.290	7.512.425.290	7.512.425.290	0	2 Pokmas / Ormas	8.148.569.162	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	7.512.425.290	7.512.425.290	7.512.425.290	0	2 Unit	8.148.569.162	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.001.593.745	2.001.593.745	2.001.593.745	0		2.275.800.210	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2.001.593.745	2.001.593.745	2.001.593.745	0	2 Unit	2.275.800.210	Kelurahan Balongsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.754.618.900	1.754.618.900	1.754.618.900	0		1.798.484.371	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.754.618.900	1.754.618.900	1.754.618.900	0	2 Pokmas / Ormas	1.798.484.371	Kelurahan Balongsari
	Kelurahan Banjar Sugihan					3.469.562.003	3.469.562.003	3.469.562.003	0		3.556.301.048	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.469.562.003	3.469.562.003	3.469.562.003	0		3.556.301.048	
7,01	KECAMATAN					3.469.562.003	3.469.562.003	3.469.562.003	0		3.556.301.048	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.469.562.003	3.469.562.003	3.469.562.003	0		3.556.301.048	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	90%	70%	70%	3.469.562.003	3.469.562.003	3.469.562.003	0	75%	3.556.301.048	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.469.562.003	3.469.562.003	3.469.562.003	0	40%	3.556.301.048	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.939.124.006	6.939.124.006	6.939.124.006	0		7.112.602.096	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Banjar Sugihan					6.939.124.006	6.939.124.006	6.939.124.006	0		7.112.602.096	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.939.124.006	6.939.124.006	6.939.124.006	0	2 Pokmas / Ormas	7.112.602.096	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1 Unit	10 Unit	6.939.124.006	6.939.124.006	6.939.124.006	0	2 Unit	7.112.602.096	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Banjar Sugihan					6.939.124.006	6.939.124.006	6.939.124.006	0		7.112.602.096	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.939.124.006	6.939.124.006	6.939.124.006	0	2 Pokmas / Ormas	7.112.602.096	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1 Unit	10 Unit	6.939.124.006	6.939.124.006	6.939.124.006	0	2 Unit	7.112.602.096	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.716.456.403	2.965.676.903	2.965.676.903	-249.220.500		2.784.367.809	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1 Unit	10 Unit	2.716.456.403	2.965.676.903	2.965.676.903	-249.220.500	2 Unit	2.784.367.809	Kelurahan Banjar Sugihan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					753.105.600	503.885.100	503.885.100	249.220.500		771.933.239	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	753.105.600	503.885.100	503.885.100	249.220.500	2 Pokmas / Ormas	771.933.239	Kelurahan Banjar Sugihan
	Kelurahan Karangpoh					4.372.900.881	4.372.900.881	4.372.900.881	0		4.482.223.396	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.372.900.881	4.372.900.881	4.372.900.881	0		4.482.223.396	
7,01	KECAMATAN					4.372.900.881	4.372.900.881	4.372.900.881	0		4.482.223.396	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.372.900.881	4.372.900.881	4.372.900.881	0		4.482.223.396	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	90%	70%	70%	4.372.900.881	4.372.900.881	4.372.900.881	0	75%	4.482.223.396	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.372.900.881	4.372.900.881	4.372.900.881	0	40%	4.482.223.396	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.745.801.762	8.745.801.762	8.745.801.762	0		8.964.446.792	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Karangpoh					8.745.801.762	8.745.801.762	8.745.801.762	0		8.964.446.792	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.745.801.762	8.745.801.762	8.745.801.762	0	2 Pokmas / Ormas	8.964.446.792	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1 Unit	15 Unit	8.745.801.762	8.745.801.762	8.745.801.762	0	2 Unit	8.964.446.792	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Karangpoh					8.745.801.762	8.745.801.762	8.745.801.762	0		8.964.446.792	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.745.801.762	8.745.801.762	8.745.801.762	0	2 Pokmas / Ormas	8.964.446.792	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1 Unit	15 Unit	8.745.801.762	8.745.801.762	8.745.801.762	0	2 Unit	8.964.446.792	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.030.700.881	3.233.880.791	3.233.880.791	-203.179.910		3.106.468.398	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1 Unit	15 Unit	3.030.700.881	3.233.880.791	3.233.880.791	-203.179.910	2 Unit	3.106.468.398	Kelurahan Karangpoh
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.342.200.000	1.139.020.090	1.139.020.090	203.179.910		1.375.754.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.342.200.000	1.139.020.090	1.139.020.090	203.179.910	2 Pokmas / Ormas	1.375.754.998	Kelurahan Karangpoh
	Kelurahan Manukan Kulon					4.827.171.311	4.827.171.311	4.827.171.311	0		4.947.850.587	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.827.171.311	4.827.171.311	4.827.171.311	0		4.947.850.587	
7,01	KECAMATAN					4.827.171.311	4.827.171.311	4.827.171.311	0		4.947.850.587	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.827.171.311	4.827.171.311	4.827.171.311	0		4.947.850.587	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	90%	70%	70%	4.827.171.311	4.827.171.311	4.827.171.311	0	75%	4.947.850.587	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.827.171.311	4.827.171.311	4.827.171.311	0	40%	4.947.850.587	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.654.342.622	9.654.342.622	9.654.342.622	0		9.895.701.174	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Manukan Kulon					9.654.342.622	9.654.342.622	9.654.342.622	0		9.895.701.174	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	9.654.342.622	9.654.342.622	9.654.342.622	0	3 Pokmas / Ormas	9.895.701.174	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1 Unit	9 Unit	9.654.342.622	9.654.342.622	9.654.342.622	0	2 Unit	9.895.701.174	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Manukan Kulon					9.654.342.622	9.654.342.622	9.654.342.622	0		9.895.701.174	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	9.654.342.622	9.654.342.622	9.654.342.622	0	3 Pokmas / Ormas	9.895.701.174	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1 Unit	9 Unit	9.654.342.622	9.654.342.622	9.654.342.622	0	2 Unit	9.895.701.174	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.908.171.311	2.950.971.311	2.973.525.658	-1.065.354.347		1.955.875.591	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1 Unit	9 Unit	1.908.171.311	2.950.971.311	2.973.525.658	-1.065.354.347	2 Unit	1.955.875.591	Kelurahan Manukan Kulon
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.919.000.000	1.876.200.000	1.853.645.653	1.065.354.347		2.991.974.996	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2.919.000.000	1.876.200.000	1.853.645.653	1.065.354.347	3 Pokmas / Ormas	2.991.974.996	Kelurahan Manukan Kulon
	Kelurahan Manukan Wetan					2.666.120.725	2.666.120.725	2.666.120.725	0		2.732.773.739	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.666.120.725	2.666.120.725	2.666.120.725	0		2.732.773.739	
7.01	KECAMATAN					2.666.120.725	2.666.120.725	2.666.120.725	0		2.732.773.739	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.666.120.725	2.666.120.725	2.666.120.725	0		2.732.773.739	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	90%	70%	70%	2.666.120.725	2.666.120.725	2.666.120.725	0	75%	2.732.773.739	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.666.120.725	2.666.120.725	2.666.120.725	0	40%	2.732.773.739	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.332.241.450	5.332.241.450	5.332.241.450	0		5.465.547.478	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Manukan Wetan					5.332.241.450	5.332.241.450	5.332.241.450	0		5.465.547.478	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	5.332.241.450	5.332.241.450	5.332.241.450	0	3 Pokmas / Ormas	5.465.547.478	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	12 Unit	5.332.241.450	5.332.241.450	5.332.241.450	0	1 Unit	5.465.547.478	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Manukan Wetan					5.332.241.450	5.332.241.450	5.332.241.450	0		5.465.547.478	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	5.332.241.450	5.332.241.450	5.332.241.450	0	3 Pokmas / Ormas	5.465.547.478	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	12 Unit	5.332.241.450	5.332.241.450	5.332.241.450	0	1 Unit	5.465.547.478	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.779.920.725	2.073.920.725	2.073.920.725	-294.000.000		1.824.418.740	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	12 Unit	1.779.920.725	2.073.920.725	2.073.920.725	-294.000.000	1 Unit	1.824.418.740	Kelurahan Manukan Wetan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					886.200.000	592.200.000	592.200.000	294.000.000		908.354.999	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	886.200.000	592.200.000	592.200.000	294.000.000	3 Pokmas / Ormas	908.354.999	Kelurahan Manukan Wetan
	Kelurahan Tandes					2.734.655.753	2.734.655.753	2.734.655.753	0		2.779.022.142	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.734.655.753	2.734.655.753	2.734.655.753	0		2.779.022.142	
7,01	KECAMATAN					2.734.655.753	2.734.655.753	2.734.655.753	0		2.779.022.142	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.734.655.753	2.734.655.753	2.734.655.753	0		2.779.022.142	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	90%	70%	70%	2.734.655.753	2.734.655.753	2.734.655.753	0	75%	2.779.022.142	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.734.655.753	2.734.655.753	2.734.655.753	0	40%	2.779.022.142	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.469.311.506	5.469.311.506	5.469.311.506	0		5.558.044.284	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tandes					5.469.311.506	5.469.311.506	5.469.311.506	0		5.558.044.284	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.469.311.506	5.469.311.506	5.469.311.506	0	2 Pokmas / Ormas	5.558.044.284	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	8 Unit	5.469.311.506	5.469.311.506	5.469.311.506	0	1 Unit	5.558.044.284	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tandes					5.469.311.506	5.469.311.506	5.469.311.506	0		5.558.044.284	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.469.311.506	5.469.311.506	5.469.311.506	0	2 Pokmas / Ormas	5.558.044.284	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	8 Unit	5.469.311.506	5.469.311.506	5.469.311.506	0	1 Unit	5.558.044.284	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.765.655.753	1.765.655.753	1.765.655.753	0		1.809.797.144	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	8 Unit	1.765.655.753	1.765.655.753	1.765.655.753	0	1 Unit	1.809.797.144	Kelurahan Tandes
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					969.000.000	969.000.000	969.000.000	0		969.224.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	969.000.000	969.000.000	969.000.000	0	2 Pokmas / Ormas	969.224.998	Kelurahan Tandes
	Kec. Tegalsari					24.019.460.327	34.824.599.296	36.230.915.669	-12.211.455.342		24.322.962.571	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					24.019.460.327	24.019.460.327	36.230.915.669	-12.211.455.342		24.322.962.571	
7,01	KECAMATAN					24.019.460.327	34.824.599.296	36.230.915.669	-12.211.455.342		24.322.962.571	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.643.844.727	23.709.101.184	25.284.713.557	-1.640.868.830		23.923.346.971	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,45 %	95,41%	96,06%	23.643.844.727	23.709.101.184	25.284.713.557	-1.640.868.830	95,42 %	23.923.346.971	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Tegalsari
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.508.498.684	18.508.498.684	19.759.599.907	-1.251.101.223		18.649.934.356	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					18.508.498.684	18.508.498.684	19.759.599.907	-1.251.101.223		18.649.934.356	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	46 Orang/bulan	18.508.498.684	18.508.498.684	19.759.599.907	-1.251.101.223	45 Orang/bulan	18.649.934.356	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					18.508.498.684	18.508.498.684	19.759.599.907	-1.251.101.223		18.649.934.356	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	46 Orang/bulan	18.508.498.684	18.508.498.684	19.759.599.907	-1.251.101.223	45 Orang/bulan	18.649.934.356	Kec. Tegalsari
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					5.032.021.043	5.081.549.700	5.326.382.638	-294.361.595		5.170.087.615	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					5.032.021.043	5.081.549.700	5.326.382.638	-294.361.595		5.170.087.615	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	2 Paket	2 Paket	5.032.021.043	5.081.549.700	5.326.382.638	-294.361.595	27 Paket	5.170.087.615	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.032.021.043	5.081.549.700	5.326.382.638	-294.361.595		5.170.087.615	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	2 Paket	2 Paket	5.032.021.043	5.081.549.700	5.326.382.638	-294.361.595	27 Paket	5.170.087.615	Kec. Tegalsari
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.725.000	115.108.800	194.787.012	-94.062.012		100.725.000	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100.725.000	115.108.800	194.787.012	-94.062.012		100.725.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1 Unit	1 Unit	100.725.000	115.108.800	194.787.012	-94.062.012	7 Unit	100.725.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.725.000	115.108.800	194.787.012	-94.062.012		100.725.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1 Unit	1 Unit	100.725.000	115.108.800	194.787.012	-94.062.012	7 Unit	100.725.000	Kec. Tegalsari
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					176.868.000	213.236.512	213.236.512	-36.368.512		176.868.000	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	176.868.000	213.236.512	213.236.512	-36.368.512	100%	176.868.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					176.868.000	213.236.512	213.236.512	-36.368.512		176.868.000	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					176.868.000	213.236.512	213.236.512	-36.368.512		176.868.000	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	176.868.000	213.236.512	213.236.512	-36.368.512	12 Laporan	176.868.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					176.868.000	213.236.512	213.236.512	-36.368.512		176.868.000	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	176.868.000	213.236.512	213.236.512	-36.368.512	12 Laporan	176.868.000	Kec. Tegalsari

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	10.695.012.000	10.525.716.000	-10.525.716.000		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	0	10.695.012.000	10.525.716.000	-10.525.716.000	75%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	10.695.012.000	10.525.716.000	-10.525.716.000	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	10.695.012.000	10.525.716.000	-10.525.716.000		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	10.695.012.000	10.525.716.000	-10.525.716.000		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	21140 Keluarga	21140 Keluarga	21140 Keluarga	0	10.695.012.000	10.525.716.000	-10.525.716.000	21140 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	240 Keluarga	240 Keluarga	240 Keluarga	0	10.695.012.000	10.525.716.000	-10.525.716.000	240 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	10.695.012.000	10.525.716.000	-10.525.716.000		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	21140 Keluarga	21140 Keluarga	21140 Keluarga	0	10.695.012.000	10.525.716.000	-10.525.716.000	21140 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	240 Keluarga	240 Keluarga	240 Keluarga	0	10.695.012.000	10.525.716.000	-10.525.716.000	240 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	9.015.012.000	8.845.716.000	-8.845.716.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	21140 Keluarga	21140 Keluarga	21140 Keluarga	0	9.015.012.000	8.845.716.000	-8.845.716.000	21140 Keluarga	12.000.000	Kec. Tegalsari
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.680.000.000	1.680.000.000	-1.680.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	240 Keluarga	240 Keluarga	240 Keluarga	0	1.680.000.000	1.680.000.000	-1.680.000.000	240 Keluarga	12.000.000	Kec. Tegalsari
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					198.747.600	207.249.600	207.249.600	-8.502.000		198.747.600	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	198.747.600	207.249.600	207.249.600	-8.502.000	100%	198.747.600	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					198.747.600	207.249.600	207.249.600	-8.502.000		198.747.600	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					198.747.600	207.249.600	207.249.600	-8.502.000		198.747.600	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	198.747.600	207.249.600	207.249.600	-8.502.000	12 Laporan	198.747.600	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					198.747.600	207.249.600	207.249.600	-8.502.000		198.747.600	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	198.747.600	207.249.600	207.249.600	-8.502.000	12 Laporan	198.747.600	Kec. Tegalsari
	Kelurahan Dr. Soetomo					4.976.912.886	4.976.912.886	4.976.912.886	0		5.089.035.701	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.976.912.886	4.976.912.886	4.976.912.886	0		5.089.035.701	
7,01	KECAMATAN					4.976.912.886	4.976.912.886	4.976.912.886	0		5.089.035.701	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.976.912.886	4.976.912.886	4.976.912.886	0		5.089.035.701	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	4.976.912.886	4.976.912.886	4.976.912.886	0	75%	5.089.035.701	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.976.912.886	4.976.912.886	4.976.912.886	0	40%	5.089.035.701	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.953.825.772	9.953.825.772	9.953.825.772	0		10.178.071.402	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Dr. Soetomo					9.953.825.772	9.953.825.772	9.953.825.772	0		10.178.071.402	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	9.953.825.772	9.953.825.772	9.953.825.772	0	3 Pokmas / Ormas	10.178.071.402	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	9.953.825.772	9.953.825.772	9.953.825.772	0	12 Unit	10.178.071.402	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Dr. Soetomo					9.953.825.772	9.953.825.772	9.953.825.772	0		10.178.071.402	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	9.953.825.772	9.953.825.772	9.953.825.772	0	3 Pokmas / Ormas	10.178.071.402	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	9.953.825.772	9.953.825.772	9.953.825.772	0	12 Unit	10.178.071.402	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.703.615.365	3.440.583.875	3.296.638.575	-593.023.210		2.782.905.745	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	2.703.615.365	3.440.583.875	3.296.638.575	-593.023.210	12 Unit	2.782.905.745	Kelurahan Dr. Soetomo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.273.297.521	1.536.329.011	1.680.274.311	593.023.210		2.306.129.956	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2.273.297.521	1.536.329.011	1.680.274.311	593.023.210	3 Pokmas / Ormas	2.306.129.956	Kelurahan Dr. Soetomo
	Kelurahan Kedungdoro					5.247.269.783	5.247.269.783	5.247.269.783	0		5.378.451.520	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					5.247.269.783	5.247.269.783	5.247.269.783	0		5.378.451.520	
7,01	KECAMATAN					5.247.269.783	5.247.269.783	5.247.269.783	0		5.378.451.520	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.247.269.783	5.247.269.783	5.247.269.783	0		5.378.451.520	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	5.247.269.783	5.247.269.783	5.247.269.783	0	75%	5.378.451.520	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	5.247.269.783	5.247.269.783	5.247.269.783	0	40%	5.378.451.520	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					10.494.539.566	10.494.539.566	10.494.539.566	0		10.756.903.040	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kedungdoro					10.494.539.566	10.494.539.566	10.494.539.566	0		10.756.903.040	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	10.494.539.566	10.494.539.566	10.494.539.566	0	2 Pokmas / Ormas	10.756.903.040	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	36 Unit	17 Unit	10.494.539.566	10.494.539.566	10.494.539.566	0	36 Unit	10.756.903.040	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kedungdoro					10.494.539.566	10.494.539.566	10.494.539.566	0		10.756.903.040	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	10.494.539.566	10.494.539.566	10.494.539.566	0	2 Pokmas / Ormas	10.756.903.040	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	36 Unit	17 Unit	10.494.539.566	10.494.539.566	10.494.539.566	0	36 Unit	10.756.903.040	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.482.129.648	3.777.337.597	3.777.337.597	-295.207.949		3.569.182.884	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	36 Unit	17 Unit	3.482.129.648	3.777.337.597	3.777.337.597	-295.207.949	36 Unit	3.569.182.884	Kelurahan Kedungdoro
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.765.140.135	1.469.932.186	1.469.932.186	295.207.949		1.809.268.636	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.765.140.135	1.469.932.186	1.469.932.186	295.207.949	2 Pokmas / Ormas	1.809.268.636	Kelurahan Kedungdoro
	Kelurahan Keputran					3.764.444.658	3.764.444.658	3.764.444.658	0		3.858.555.769	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.764.444.658	3.764.444.658	3.764.444.658	0		3.858.555.769	
7,01	KECAMATAN					3.764.444.658	3.764.444.658	3.764.444.658	0		3.858.555.769	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.764.444.658	3.764.444.658	3.764.444.658	0		3.858.555.769	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.764.444.658	3.764.444.658	3.764.444.658	0	75%	3.858.555.769	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.764.444.658	3.764.444.658	3.764.444.658	0	40%	3.858.555.769	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.528.889.316	7.528.889.316	7.528.889.316	0		7.717.111.538	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Keputran					7.528.889.316	7.528.889.316	7.528.889.316	0		7.717.111.538	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.528.889.316	7.528.889.316	7.528.889.316	0	2 Pokmas / Ormas	7.717.111.538	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	16 Unit	7.528.889.316	7.528.889.316	7.528.889.316	0	20 Unit	7.717.111.538	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Keputran					7.528.889.316	7.528.889.316	7.528.889.316	0		7.717.111.538	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.528.889.316	7.528.889.316	7.528.889.316	0	2 Pokmas / Ormas	7.717.111.538	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	16 Unit	7.528.889.316	7.528.889.316	7.528.889.316	0	20 Unit	7.717.111.538	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.992.220.152	3.038.444.658	3.038.444.658	-1.046.224.506		2.042.025.653	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	16 Unit	1.992.220.152	3.038.444.658	3.038.444.658	-1.046.224.506	20 Unit	2.042.025.653	Kelurahan Keputran
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.772.224.506	726.000.000	726.000.000	1.046.224.506		1.816.530.116	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.772.224.506	726.000.000	726.000.000	1.046.224.506	2 Pokmas / Ormas	1.816.530.116	Kelurahan Keputran
	Kelurahan Tegalsari					3.436.227.866	3.436.227.866	3.436.227.866	0		3.522.133.558	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.436.227.866	3.436.227.866	3.436.227.866	0		3.522.133.558	
7,01	KECAMATAN					3.436.227.866	3.436.227.866	3.436.227.866	0		3.522.133.558	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.436.227.866	3.436.227.866	3.436.227.866	0		3.522.133.558	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.436.227.866	3.436.227.866	3.436.227.866	0	75%	3.522.133.558	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.436.227.866	3.436.227.866	3.436.227.866	0	40%	3.522.133.558	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.872.455.732	6.872.455.732	6.872.455.732	0		7.044.267.116	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tegalsari					6.872.455.732	6.872.455.732	6.872.455.732	0		7.044.267.116	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.872.455.732	6.872.455.732	6.872.455.732	0	2 Pokmas / Ormas	7.044.267.116	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	6.872.455.732	6.872.455.732	6.872.455.732	0	12 Unit	7.044.267.116	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tegalsari					6.872.455.732	6.872.455.732	6.872.455.732	0		7.044.267.116	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	6.872.455.732	6.872.455.732	6.872.455.732	0	2 Pokmas / Ormas	7.044.267.116	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	6.872.455.732	6.872.455.732	6.872.455.732	0	12 Unit	7.044.267.116	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.008.592.830	2.356.437.998	2.356.437.998	-347.845.168		2.058.807.648	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	2.008.592.830	2.356.437.998	2.356.437.998	-347.845.168	12 Unit	2.058.807.648	Kelurahan Tegalsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.427.635.036	1.079.789.868	1.079.789.868	347.845.168		1.463.325.910	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.427.635.036	1.079.789.868	1.079.789.868	347.845.168	2 Pokmas / Ormas	1.463.325.910	Kelurahan Tegalsari
	Kelurahan Wonorejo					3.917.509.415	3.917.509.415	3.917.509.415	0		4.015.447.144	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.917.509.415	3.917.509.415	6.436.127.169	-2.518.617.754		4.015.447.144	
7,01	KECAMATAN					3.917.509.415	3.917.509.415	6.436.127.169	-2.518.617.754		4.015.447.144	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.917.509.415	3.917.509.415	6.436.127.169	-2.518.617.754		4.015.447.144	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.917.509.415	3.917.509.415	6.436.127.169	-2.518.617.754	75%	4.015.447.144	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.917.509.415	3.917.509.415	6.436.127.169	-2.518.617.754	40%	4.015.447.144	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.835.018.830	7.835.018.830	7.835.018.830	0		8.030.894.288	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Wonorejo					7.835.018.830	7.835.018.830	7.835.018.830	0		8.030.894.288	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.835.018.830	7.835.018.830	7.835.018.830	0	1 Pokmas / Ormas	8.030.894.288	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.835.018.830	7.835.018.830	7.835.018.830	0	2 Pokmas / Ormas	8.030.894.288	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	7.835.018.830	7.835.018.830	7.835.018.830	0	10 Unit	8.030.894.288	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	7.835.018.830	7.835.018.830	7.835.018.830	0	14 Unit	8.030.894.288	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Wonorejo					7.835.018.830	7.835.018.830	7.835.018.830	0		8.030.894.288	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.835.018.830	7.835.018.830	7.835.018.830	0	1 Pokmas / Ormas	8.030.894.288	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.835.018.830	7.835.018.830	7.835.018.830	0	2 Pokmas / Ormas	8.030.894.288	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	7.835.018.830	7.835.018.830	7.835.018.830	0	10 Unit	8.030.894.288	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	7.835.018.830	7.835.018.830	7.835.018.830	0	14 Unit	8.030.894.288	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.145.817.754	1.635.017.754	1.635.017.754	-489.200.000		1.188.359.022	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.145.817.754	1.635.017.754	1.635.017.754	-489.200.000	10 Unit	1.188.359.022	Kelurahan Wonorejo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.828.422.443	2.099.254.080	2.254.262.144	-425.839.701		1.874.133.001	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.828.422.443	2.099.254.080	2.254.262.144	-425.839.701	14 Unit	1.874.133.001	Kelurahan Wonorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.089.086.972	1.818.255.335	1.663.247.271	425.839.701		2.141.314.143	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.089.086.972	1.818.255.335	1.663.247.271	425.839.701	1 Pokmas / Ormas	2.141.314.143	Kelurahan Wonorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.372.800.000	883.600.000	883.600.000	489.200.000		1.407.119.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.372.800.000	883.600.000	883.600.000	489.200.000	2 Pokmas / Ormas	1.407.119.998	Kelurahan Wonorejo
	Kec. Tenggilis Mejoyo					21.313.910.423	26.738.034.918	27.829.641.512	-6.515.731.089		21.572.396.789	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					21.313.910.423	21.313.910.423	27.829.641.512	-6.515.731.089		21.572.396.789	
7,01	KECAMATAN					21.313.910.423	26.738.034.918	27.829.641.512	-6.515.731.089		21.572.396.789	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.068.645.251	20.804.229.785	21.895.836.379	-827.191.128		21.303.031.556	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,60 %	96,04%	97,15%	21.068.645.251	20.804.229.785	21.895.836.379	-827.191.128	96,06 %	21.303.031.556	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.600.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.600.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.215.691.428	17.234.988.424	18.145.416.003	-929.724.575		17.347.486.049	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					17.215.691.428	17.234.988.424	18.145.416.003	-929.724.575		17.347.486.049	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	45 Orang/bulan	17.215.691.428	17.234.988.424	18.145.416.003	-929.724.575	59 Orang/bulan	17.347.486.049	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					17.215.691.428	17.234.988.424	18.145.416.003	-929.724.575		17.347.486.049	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	45 Orang/bulan	17.215.691.428	17.234.988.424	18.145.416.003	-929.724.575	59 Orang/bulan	17.347.486.049	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.753.665.423	3.447.883.761	3.629.062.776	124.602.647		3.856.257.107	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					3.753.665.423	3.447.883.761	3.629.062.776	124.602.647		3.856.257.107	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	3.753.665.423	3.447.883.761	3.629.062.776	124.602.647	10 Paket	3.856.257.107	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3.753.665.423	3.447.883.761	3.629.062.776	124.602.647		3.856.257.107	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	3.753.665.423	3.447.883.761	3.629.062.776	124.602.647	10 Paket	3.856.257.107	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					96.688.400	117.425.600	117.425.600	-20.737.200		96.688.400	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					96.688.400	117.425.600	117.425.600	-20.737.200		96.688.400	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	96.688.400	117.425.600	117.425.600	-20.737.200	4 Unit	96.688.400	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					96.688.400	117.425.600	117.425.600	-20.737.200		96.688.400	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	96.688.400	117.425.600	117.425.600	-20.737.200	4 Unit	96.688.400	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					118.639.372	112.227.533	112.227.533	6.411.839		118.739.433	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	97,50%	96,50%	100%	118.639.372	112.227.533	112.227.533	6.411.839	96,85%	118.739.433	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					118.639.372	112.227.533	112.227.533	6.411.839		118.739.433	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					118.639.372	112.227.533	112.227.533	6.411.839		118.739.433	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	118.639.372	112.227.533	112.227.533	6.411.839	12 Laporan	118.739.433	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					118.639.372	112.227.533	112.227.533	6.411.839		118.739.433	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	118.639.372	112.227.533	112.227.533	6.411.839	12 Laporan	118.739.433	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	5.683.006.400	5.683.006.400	-5.683.006.400		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	0	5.683.006.400	5.683.006.400	-5.683.006.400	100%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	5.683.006.400	5.683.006.400	-5.683.006.400	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	5.683.006.400	5.683.006.400	-5.683.006.400		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	5.683.006.400	5.683.006.400	-5.683.006.400		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	11440 Keluarga	11440 Keluarga	11440 Keluarga	0	5.683.006.400	5.683.006.400	-5.683.006.400	11440 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	125 Keluarga	125 Keluarga	125 Keluarga	0	5.683.006.400	5.683.006.400	-5.683.006.400	125 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	5.683.006.400	5.683.006.400	-5.683.006.400		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	11440 Keluarga	11440 Keluarga	11440 Keluarga	0	5.683.006.400	5.683.006.400	-5.683.006.400	11440 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	125 Keluarga	125 Keluarga	125 Keluarga	0	5.683.006.400	5.683.006.400	-5.683.006.400	125 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	4.808.006.400	4.808.006.400	-4.808.006.400		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	11440 Keluarga	11440 Keluarga	11440 Keluarga	0	4.808.006.400	4.808.006.400	-4.808.006.400	11440 Keluarga	12.000.000	Kec. Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	875.000.000	875.000.000	-875.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	125 Keluarga	125 Keluarga	125 Keluarga	0	875.000.000	875.000.000	-875.000.000	125 Keluarga	12.000.000	Kec. Tenggilis Mejoyo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					126.625.800	138.571.200	138.571.200	-11.945.400		126.625.800	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	126.625.800	138.571.200	138.571.200	-11.945.400	100%	126.625.800	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					126.625.800	138.571.200	138.571.200	-11.945.400		126.625.800	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					126.625.800	138.571.200	138.571.200	-11.945.400		126.625.800	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	126.625.800	138.571.200	138.571.200	-11.945.400	12 Laporan	126.625.800	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					126.625.800	138.571.200	138.571.200	-11.945.400		126.625.800	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	126.625.800	138.571.200	138.571.200	-11.945.400	12 Laporan	126.625.800	Kec. Tenggilis Mejoyo
	Kelurahan Kendangsari					2.492.094.718	2.492.094.718	2.492.094.718	0		2.530.397.082	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.492.094.718	2.492.094.718	2.492.094.718	0		2.530.397.082	
7.01	KECAMATAN					2.492.094.718	2.492.094.718	2.492.094.718	0		2.530.397.082	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.492.094.718	2.492.094.718	2.492.094.718	0		2.530.397.082	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	2.492.094.718	2.492.094.718	2.492.094.718	0	100%	2.530.397.082	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.492.094.718	2.492.094.718	2.492.094.718	0	40%	2.530.397.082	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.984.189.436	4.984.189.436	4.984.189.436	0		5.060.794.164	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kendangsari					4.984.189.436	4.984.189.436	4.984.189.436	0		5.060.794.164	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	4.984.189.436	4.984.189.436	4.984.189.436	0	1 Pokmas / Ormas	5.060.794.164	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.984.189.436	4.984.189.436	4.984.189.436	0	1 Unit	5.060.794.164	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kendangsari					4.984.189.436	4.984.189.436	4.984.189.436	0		5.060.794.164	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	4.984.189.436	4.984.189.436	4.984.189.436	0	1 Pokmas / Ormas	5.060.794.164	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.984.189.436	4.984.189.436	4.984.189.436	0	1 Unit	5.060.794.164	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.180.569.950	1.952.694.718	1.930.494.718	-749.924.768		1.210.084.197	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.180.569.950	1.952.694.718	1.930.494.718	-749.924.768	1 Unit	1.210.084.197	Kelurahan Kendangsari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.311.524.768	539.400.000	561.600.000	749.924.768		1.320.312.885	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.311.524.768	539.400.000	561.600.000	749.924.768	1 Pokmas / Ormas	1.320.312.885	Kelurahan Kendangsari
	Kelurahan Kutisari					3.982.424.968	3.454.795.608	3.454.795.608	527.629.360		4.081.985.586	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.982.424.968	3.982.424.968	3.454.795.608	527.629.360		4.081.985.586	
7.01	KECAMATAN					3.982.424.968	3.454.795.608	3.454.795.608	527.629.360		4.081.985.586	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.982.424.968	3.454.795.608	3.454.795.608	527.629.360		4.081.985.586	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.982.424.968	3.454.795.608	3.454.795.608	527.629.360	100%	4.081.985.586	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.982.424.968	3.454.795.608	3.454.795.608	527.629.360	40%	4.081.985.586	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.964.849.936	6.909.591.216	6.909.591.216	1.055.258.720		8.163.971.172	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Kutisari					7.964.849.936	6.909.591.216	6.909.591.216	1.055.258.720		8.163.971.172	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.964.849.936	6.909.591.216	6.909.591.216	1.055.258.720	1 Pokmas / Ormas	8.163.971.172	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.964.849.936	6.909.591.216	6.909.591.216	1.055.258.720	1 Unit	8.163.971.172	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kutisari					7.964.849.936	6.909.591.216	6.909.591.216	1.055.258.720		8.163.971.172	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.964.849.936	6.909.591.216	6.909.591.216	1.055.258.720	1 Pokmas / Ormas	8.163.971.172	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.964.849.936	6.909.591.216	6.909.591.216	1.055.258.720	1 Unit	8.163.971.172	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.785.195.608	2.785.195.608	2.785.195.608	0		2.854.825.494	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.785.195.608	2.785.195.608	2.785.195.608	0	1 Unit	2.854.825.494	Kelurahan Kutisari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.197.229.360	669.600.000	669.600.000	527.629.360		1.227.160.092	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.197.229.360	669.600.000	669.600.000	527.629.360	1 Pokmas / Ormas	1.227.160.092	Kelurahan Kutisari
	Kelurahan Panjang Jiwo					3.801.730.087	3.801.730.087	3.801.730.087	0		3.896.773.333	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.801.730.087	3.801.730.087	3.801.730.087	0		3.896.773.333	
7.01	KECAMATAN					3.801.730.087	3.801.730.087	3.801.730.087	0		3.896.773.333	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.801.730.087	3.801.730.087	3.801.730.087	0		3.896.773.333	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.801.730.087	3.801.730.087	3.801.730.087	0	100%	3.896.773.333	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.801.730.087	3.801.730.087	3.801.730.087	0	40%	3.896.773.333	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.603.460.174	7.603.460.174	7.603.460.174	0		7.793.546.666	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Panjang Jiwo					7.603.460.174	7.603.460.174	7.603.460.174	0		7.793.546.666	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.603.460.174	7.603.460.174	7.603.460.174	0	1 Pokmas / Ormas	7.793.546.666	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.603.460.174	7.603.460.174	7.603.460.174	0	1 Unit	7.793.546.666	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Panjang Jiwo					7.603.460.174	7.603.460.174	7.603.460.174	0		7.793.546.666	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.603.460.174	7.603.460.174	7.603.460.174	0	1 Pokmas / Ormas	7.793.546.666	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.603.460.174	7.603.460.174	7.603.460.174	0	1 Unit	7.793.546.666	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.213.769.857	2.672.363.414	2.672.363.414	-458.593.557		2.269.114.100	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.213.769.857	2.672.363.414	2.672.363.414	-458.593.557	1 Unit	2.269.114.100	Kelurahan Panjang Jiwo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.587.960.230	1.129.366.673	1.129.366.673	458.593.557		1.627.659.233	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.587.960.230	1.129.366.673	1.129.366.673	458.593.557	1 Pokmas / Ormas	1.627.659.233	Kelurahan Panjang Jiwo
	Kelurahan Tenggilis Mejoyo					2.753.433.349	3.281.062.709	3.281.062.709	-527.629.360		2.831.719.178	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.753.433.349	2.753.433.349	3.281.062.709	-527.629.360		2.831.719.178	
7,01	KECAMATAN					2.753.433.349	3.281.062.709	3.281.062.709	-527.629.360		2.831.719.178	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.753.433.349	3.281.062.709	3.281.062.709	-527.629.360		2.831.719.178	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	2.753.433.349	3.281.062.709	3.281.062.709	-527.629.360	100%	2.831.719.178	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.753.433.349	3.281.062.709	3.281.062.709	-527.629.360	40%	2.831.719.178	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.506.866.698	6.562.125.418	6.562.125.418	-1.055.258.720		5.663.438.356	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Tenggilis Mejoyo					5.506.866.698	6.562.125.418	6.562.125.418	-1.055.258.720		5.663.438.356	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	5.506.866.698	6.562.125.418	6.562.125.418	-1.055.258.720	1 Pokmas / Ormas	5.663.438.356	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.506.866.698	6.562.125.418	6.562.125.418	-1.055.258.720	1 Unit	5.663.438.356	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tenggilis Mejoyo					5.506.866.698	6.562.125.418	6.562.125.418	-1.055.258.720		5.663.438.356	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	5.506.866.698	6.562.125.418	6.562.125.418	-1.055.258.720	1 Pokmas / Ormas	5.663.438.356	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.506.866.698	6.562.125.418	6.562.125.418	-1.055.258.720	1 Unit	5.663.438.356	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.619.653.028	2.549.945.309	2.549.945.309	-930.292.281		1.669.594.351	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.619.653.028	2.549.945.309	2.549.945.309	-930.292.281	1 Unit	1.669.594.351	Kelurahan Tenggilis Mejoyo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.133.780.321	731.117.400	731.117.400	402.662.921		1.162.124.827	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1.133.780.321	731.117.400	731.117.400	402.662.921	1 Pokmas / Ormas	1.162.124.827	Kelurahan Tenggilis Mejoyo
	Kec. Wiyung					21.207.296.320	27.442.308.563	29.135.352.122	-7.928.055.802		21.473.436.546	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					21.207.296.320	21.207.296.320	29.135.352.122	-7.928.055.802		21.473.436.546	
7,01	KECAMATAN					21.207.296.320	27.442.308.563	29.135.352.122	-7.928.055.802		21.473.436.546	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.920.240.720	20.691.369.470	22.384.413.029	-1.464.172.309		21.162.380.946	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,53%	98,46%	99,02%	20.920.240.720	20.691.369.470	22.384.413.029	-1.464.172.309	98,48%	21.162.380.946	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.600.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.600.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Wiyung
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.457.720.525	16.599.690.772	18.095.421.901	-1.637.701.376		16.583.086.188	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					16.457.720.525	16.599.690.772	18.095.421.901	-1.637.701.376		16.583.086.188	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	45 Orang/bulan	16.457.720.525	16.599.690.772	18.095.421.901	-1.637.701.376	42 Orang/bulan	16.583.086.188	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					16.457.720.525	16.599.690.772	18.095.421.901	-1.637.701.376		16.583.086.188	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	45 Orang/bulan	16.457.720.525	16.599.690.772	18.095.421.901	-1.637.701.376	42 Orang/bulan	16.583.086.188	Kec. Wiyung
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.375.773.695	3.989.940.819	4.187.253.249	188.520.446		4.492.548.258	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					4.375.773.695	3.989.940.819	4.187.253.249	188.520.446		4.492.548.258	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	2 Paket	4.375.773.695	3.989.940.819	4.187.253.249	188.520.446	5 Paket	4.492.548.258	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.375.773.695	3.989.940.819	4.187.253.249	188.520.446		4.492.548.258	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	2 Paket	4.375.773.695	3.989.940.819	4.187.253.249	188.520.446	5 Paket	4.492.548.258	Kec. Wiyung
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					84.146.500	97.805.879	97.805.879	-13.659.379		84.146.500	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					84.146.500	97.805.879	97.805.879	-13.659.379		84.146.500	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	84.146.500	97.805.879	97.805.879	-13.659.379	5 Unit	84.146.500	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					84.146.500	97.805.879	97.805.879	-13.659.379		84.146.500	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	84.146.500	97.805.879	97.805.879	-13.659.379	5 Unit	84.146.500	Kec. Wiyung
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					143.906.400	148.677.493	148.677.493	-4.771.093		143.906.400	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	143.906.400	148.677.493	148.677.493	-4.771.093	100%	143.906.400	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					143.906.400	148.677.493	148.677.493	-4.771.093		143.906.400	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					143.906.400	148.677.493	148.677.493	-4.771.093		143.906.400	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	143.906.400	148.677.493	148.677.493	-4.771.093	12 Laporan	143.906.400	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					143.906.400	148.677.493	148.677.493	-4.771.093		143.906.400	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	143.906.400	148.677.493	148.677.493	-4.771.093	12 Laporan	143.906.400	Kec. Wiyung
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	6.455.105.600	6.455.105.600	-6.455.105.600		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	0	6.455.105.600	6.455.105.600	-6.455.105.600	100%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	6.455.105.600	6.455.105.600	-6.455.105.600	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	6.455.105.600	6.455.105.600	-6.455.105.600		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	6.455.105.600	6.455.105.600	-6.455.105.600		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12920 Keluarga	12920 Keluarga	12440 Keluarga	0	6.455.105.600	6.455.105.600	-6.455.105.600	12920 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	0	6.455.105.600	6.455.105.600	-6.455.105.600	170 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	6.455.105.600	6.455.105.600	-6.455.105.600		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12920 Keluarga	12920 Keluarga	12440 Keluarga	0	6.455.105.600	6.455.105.600	-6.455.105.600	12920 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	0	6.455.105.600	6.455.105.600	-6.455.105.600	170 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	5.265.105.600	5.265.105.600	-5.265.105.600		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12920 Keluarga	12920 Keluarga	12440 Keluarga	0	5.265.105.600	5.265.105.600	-5.265.105.600	12920 Keluarga	12.000.000	Kec. Wiyung
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.190.000.000	1.190.000.000	-1.190.000.000		12.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	170 Keluarga	170 Keluarga	170 Keluarga	0	1.190.000.000	1.190.000.000	-1.190.000.000	170 Keluarga	12.000.000	Kec. Wiyung
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					143.149.200	147.156.000	147.156.000	-4.006.800		143.149.200	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	143.149.200	147.156.000	147.156.000	-4.006.800	100%	143.149.200	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					143.149.200	147.156.000	147.156.000	-4.006.800		143.149.200	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					143.149.200	147.156.000	147.156.000	-4.006.800		143.149.200	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	143.149.200	147.156.000	147.156.000	-4.006.800	12 Laporan	143.149.200	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					143.149.200	147.156.000	147.156.000	-4.006.800		143.149.200	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	143.149.200	147.156.000	147.156.000	-4.006.800	12 Laporan	143.149.200	Kec. Wiyung
	Kelurahan Babatan					3.557.154.689	3.557.154.689	3.557.154.689	0		3.622.083.551	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.557.154.689	3.557.154.689	3.557.154.689	0		3.622.083.551	
7.01	KECAMATAN					3.557.154.689	3.557.154.689	3.557.154.689	0		3.622.083.551	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.557.154.689	3.557.154.689	3.557.154.689	0		3.622.083.551	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.557.154.689	3.557.154.689	3.557.154.689	0	100%	3.622.083.551	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.557.154.689	3.557.154.689	3.557.154.689	0	40%	3.622.083.551	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.114.309.378	7.114.309.378	7.114.309.378	0		7.244.167.102	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Babatan					7.114.309.378	7.114.309.378	7.114.309.378	0		7.244.167.102	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.114.309.378	7.114.309.378	7.114.309.378	0	4 Pokmas / Ormas	7.244.167.102	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	7.114.309.378	7.114.309.378	7.114.309.378	0	11 Unit	7.244.167.102	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Babatan					7.114.309.378	7.114.309.378	7.114.309.378	0		7.244.167.102	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.114.309.378	7.114.309.378	7.114.309.378	0	4 Pokmas / Ormas	7.244.167.102	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	7.114.309.378	7.114.309.378	7.114.309.378	0	11 Unit	7.244.167.102	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.690.434.808	1.690.434.808	1.690.434.808	0		1.732.695.676	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	1.690.434.808	1.690.434.808	1.690.434.808	0	11 Unit	1.732.695.676	Kelurahan Babatan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.866.719.881	1.866.719.881	1.866.719.881	0		1.889.387.875	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.866.719.881	1.866.719.881	1.866.719.881	0	4 Pokmas / Ormas	1.889.387.875	Kelurahan Babatan
	Kelurahan Balas Klumprik					2.913.946.561	2.913.946.561	2.913.946.561	0		2.986.795.220	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.913.946.561	2.913.946.561	2.913.946.561	0		2.986.795.220	
7,01	KECAMATAN					2.913.946.561	2.913.946.561	2.913.946.561	0		2.986.795.220	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.913.946.561	2.913.946.561	2.913.946.561	0		2.986.795.220	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	2.913.946.561	2.913.946.561	2.913.946.561	0	100%	2.986.795.220	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.913.946.561	2.913.946.561	2.913.946.561	0	40%	2.986.795.220	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.827.893.122	5.827.893.122	5.827.893.122	0		5.973.590.440	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Balas Klumprik					5.827.893.122	5.827.893.122	5.827.893.122	0		5.973.590.440	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.827.893.122	5.827.893.122	5.827.893.122	0	2 Pokmas / Ormas	5.973.590.440	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	5.827.893.122	5.827.893.122	5.827.893.122	0	8 Unit	5.973.590.440	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Balas Klumprik					5.827.893.122	5.827.893.122	5.827.893.122	0		5.973.590.440	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.827.893.122	5.827.893.122	5.827.893.122	0	2 Pokmas / Ormas	5.973.590.440	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	5.827.893.122	5.827.893.122	5.827.893.122	0	8 Unit	5.973.590.440	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.869.946.561	2.224.998.466	2.224.998.466	-355.051.905		1.916.695.222	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.869.946.561	2.224.998.466	2.224.998.466	-355.051.905	8 Unit	1.916.695.222	Kelurahan Balas Klumprik
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.044.000.000	688.948.095	688.948.095	355.051.905		1.070.099.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.044.000.000	688.948.095	688.948.095	355.051.905	2 Pokmas / Ormas	1.070.099.998	Kelurahan Balas Klumprik
	Kelurahan Jajar Tunggal					3.845.296.481	3.845.296.481	3.845.296.481	0		3.941.428.887	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.845.296.481	3.845.296.481	3.845.296.481	0		3.941.428.887	
7,01	KECAMATAN					3.845.296.481	3.845.296.481	3.845.296.481	0		3.941.428.887	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.845.296.481	3.845.296.481	3.845.296.481	0		3.941.428.887	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.845.296.481	3.845.296.481	3.845.296.481	0	100%	3.941.428.887	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.845.296.481	3.845.296.481	3.845.296.481	0	40%	3.941.428.887	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.690.592.962	7.690.592.962	7.690.592.962	0		7.882.857.774	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Jajar Tunggal					7.690.592.962	7.690.592.962	7.690.592.962	0		7.882.857.774	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.690.592.962	7.690.592.962	7.690.592.962	0	2 Pokmas / Ormas	7.882.857.774	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	7.690.592.962	7.690.592.962	7.690.592.962	0	6 Unit	7.882.857.774	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Jajar Tunggal					7.690.592.962	7.690.592.962	7.690.592.962	0		7.882.857.774	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	7.690.592.962	7.690.592.962	7.690.592.962	0	2 Pokmas / Ormas	7.882.857.774	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	7.690.592.962	7.690.592.962	7.690.592.962	0	6 Unit	7.882.857.774	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.682.725.283	2.682.725.283	2.682.725.283	0		2.749.793.411	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	2.682.725.283	2.682.725.283	2.682.725.283	0	6 Unit	2.749.793.411	Kelurahan Jajar Tunggal
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.162.571.198	1.162.571.198	1.162.571.198	0		1.191.635.476	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.162.571.198	1.162.571.198	1.162.571.198	0	2 Pokmas / Ormas	1.191.635.476	Kelurahan Jajar Tunggal
	Kelurahan Wiyung					4.091.838.705	4.091.838.705	4.091.838.705	0		4.269.624.526	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.091.838.705	4.091.838.705	4.091.838.705	0		4.269.624.526	
7,01	KECAMATAN					4.091.838.705	4.091.838.705	4.091.838.705	0		4.269.624.526	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.091.838.705	4.091.838.705	4.091.838.705	0		4.269.624.526	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	4.091.838.705	4.091.838.705	4.091.838.705	0	100%	4.269.624.526	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.091.838.705	4.091.838.705	4.091.838.705	0	40%	4.269.624.526	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.183.677.410	8.183.677.410	8.183.677.410	0		8.539.249.052	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Wiyung					8.183.677.410	8.183.677.410	8.183.677.410	0		8.539.249.052	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.183.677.410	8.183.677.410	8.183.677.410	0	2 Pokmas / Ormas	8.539.249.052	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	8.183.677.410	8.183.677.410	8.183.677.410	0	9 Unit	8.539.249.052	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Wiyung					8.183.677.410	8.183.677.410	8.183.677.410	0		8.539.249.052	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	8.183.677.410	8.183.677.410	8.183.677.410	0	2 Pokmas / Ormas	8.539.249.052	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	8.183.677.410	8.183.677.410	8.183.677.410	0	9 Unit	8.539.249.052	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.048.838.705	3.289.158.705	3.308.445.105	-259.606.400		3.200.549.528	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	3.048.838.705	3.289.158.705	3.308.445.105	-259.606.400	9 Unit	3.200.549.528	Kelurahan Wiyung

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.043.000.000	802.680.000	783.393.600	259.606.400		1.069.074.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.043.000.000	802.680.000	783.393.600	259.606.400	2 Pokmas / Ormas	1.069.074.998	Kelurahan Wiyung
	Kec. Wonocolo					25.345.769.937	34.624.440.430	38.362.474.650	-13.016.704.713		25.654.320.185	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					25.345.769.937	25.345.769.937	38.362.474.650	-13.016.704.713		25.654.320.185	
7,01	KECAMATAN					25.345.769.937	34.624.440.430	38.362.474.650	-13.016.704.713		25.654.320.185	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.017.574.737	24.931.802.318	28.658.833.588	-3.641.258.851		25.302.124.985	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96,6 %	96,40%	96,80%	25.017.574.737	24.931.802.318	28.658.833.588	-3.641.258.851	96,4 %	25.302.124.985	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.665.000	
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.665.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000	8 Dokumen	2.665.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000		2.665.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.932.000	3.932.000	-1.332.000	8 Dokumen	2.665.000	Kec. Wonocolo
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19.985.398.980	20.122.223.806	23.610.308.202	-3.624.909.222		20.138.571.836	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					19.985.398.980	20.122.223.806	23.610.308.202	-3.624.909.222		20.138.571.836	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	61 Orang/bulan	19.985.398.980	20.122.223.806	23.610.308.202	-3.624.909.222	58 Orang/bulan	20.138.571.836	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					19.985.398.980	20.122.223.806	23.610.308.202	-3.624.909.222		20.138.571.836	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	61 Orang/bulan	19.985.398.980	20.122.223.806	23.610.308.202	-3.624.909.222	58 Orang/bulan	20.138.571.836	Kec. Wonocolo
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.899.474.766	4.688.362.480	4.922.167.594	-22.692.828		5.027.534.631	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					4.899.474.766	4.688.362.480	4.922.167.594	-22.692.828		5.027.534.631	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	2 Paket	2 Paket	4.899.474.766	4.688.362.480	4.922.167.594	-22.692.828	11 Paket	5.027.534.631	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.899.474.766	4.688.362.480	4.922.167.594	-22.692.828		5.027.534.631	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	2 Paket	2 Paket	4.899.474.766	4.688.362.480	4.922.167.594	-22.692.828	11 Paket	5.027.534.631	Kec. Wonocolo
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					130.100.991	117.284.032	122.425.792	7.675.199		133.353.518	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					130.100.991	117.284.032	122.425.792	7.675.199		133.353.518	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	1 Unit	130.100.991	117.284.032	122.425.792	7.675.199	2 Unit	133.353.518	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					130.100.991	117.284.032	122.425.792	7.675.199		133.353.518	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	1 Unit	130.100.991	117.284.032	122.425.792	7.675.199	2 Unit	133.353.518	Kec. Wonocolo
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					186.746.400	192.471.712	192.471.712	-5.725.312		186.746.400	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	186.746.400	192.471.712	192.471.712	-5.725.312	100%	186.746.400	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					186.746.400	192.471.712	192.471.712	-5.725.312		186.746.400	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					186.746.400	192.471.712	192.471.712	-5.725.312		186.746.400	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	186.746.400	192.471.712	192.471.712	-5.725.312	12 Laporan	186.746.400	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					186.746.400	192.471.712	192.471.712	-5.725.312		186.746.400	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	186.746.400	192.471.712	192.471.712	-5.725.312	12 Laporan	186.746.400	Kec. Wonocolo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	9.353.010.400	9.353.010.400	-9.353.010.400		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	0	9.353.010.400	9.353.010.400	-9.353.010.400	100%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	9.353.010.400	9.353.010.400	-9.353.010.400	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	9.353.010.400	9.353.010.400	-9.353.010.400		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	9.353.010.400	9.353.010.400	-9.353.010.400		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	18720 Keluarga	18720 Keluarga	18720 Keluarga	0	9.353.010.400	9.353.010.400	-9.353.010.400	18720 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	220 Keluarga	220 Keluarga	220 Keluarga	0	9.353.010.400	9.353.010.400	-9.353.010.400	220 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	9.353.010.400	9.353.010.400	-9.353.010.400		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	18720 Keluarga	18720 Keluarga	18720 Keluarga	0	9.353.010.400	9.353.010.400	-9.353.010.400	18720 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	220 Keluarga	220 Keluarga	220 Keluarga	0	9.353.010.400	9.353.010.400	-9.353.010.400	220 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	7.813.010.400	7.813.010.400	-7.813.010.400		12.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	18720 Keluarga	18720 Keluarga	18720 Keluarga	0	7.813.010.400	7.813.010.400	-7.813.010.400	18720 Keluarga	12.000.000	Kec. Wonocolo
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	1.540.000.000	1.540.000.000	-1.540.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	220 Keluarga	220 Keluarga	220 Keluarga	0	1.540.000.000	1.540.000.000	-1.540.000.000	220 Keluarga	12.000.000	Kec. Wonocolo
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					141.448.800	147.156.000	158.158.950	-16.710.150		141.448.800	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	141.448.800	147.156.000	158.158.950	-16.710.150	100%	141.448.800	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					141.448.800	147.156.000	158.158.950	-16.710.150		141.448.800	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					141.448.800	147.156.000	158.158.950	-16.710.150		141.448.800	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	141.448.800	147.156.000	158.158.950	-16.710.150	12 Laporan	141.448.800	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					141.448.800	147.156.000	158.158.950	-16.710.150		141.448.800	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	141.448.800	147.156.000	158.158.950	-16.710.150	12 Laporan	141.448.800	Kec. Wonocolo
	Kelurahan Bendul Merisi					4.784.051.560	4.784.051.560	4.784.051.560	0		4.879.652.842	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.784.051.560	4.784.051.560	4.784.051.560	0		4.879.652.842	
7.01	KECAMATAN					4.784.051.560	4.784.051.560	4.784.051.560	0		4.879.652.842	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.784.051.560	4.784.051.560	4.784.051.560	0		4.879.652.842	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	4.784.051.560	4.784.051.560	4.784.051.560	0	100%	4.879.652.842	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.784.051.560	4.784.051.560	4.784.051.560	0	40%	4.879.652.842	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.568.103.120	9.568.103.120	9.568.103.120	0		9.759.305.684	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Bendul Merisi					9.568.103.120	9.568.103.120	9.568.103.120	0		9.759.305.684	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	9.568.103.120	9.568.103.120	9.568.103.120	0	3 Pokmas / Ormas	9.759.305.684	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	9.568.103.120	9.568.103.120	9.568.103.120	0	12 Unit	9.759.305.684	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bendul Merisi					9.568.103.120	9.568.103.120	9.568.103.120	0		9.759.305.684	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	9.568.103.120	9.568.103.120	9.568.103.120	0	3 Pokmas / Ormas	9.759.305.684	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	9.568.103.120	9.568.103.120	9.568.103.120	0	12 Unit	9.759.305.684	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.278.051.560	3.278.051.560	3.278.051.560	0		3.360.002.844	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	3.278.051.560	3.278.051.560	3.278.051.560	0	12 Unit	3.360.002.844	Kelurahan Bendul Merisi
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.506.000.000	1.506.000.000	1.506.000.000	0		1.519.649.998	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.506.000.000	1.506.000.000	1.506.000.000	0	3 Pokmas / Ormas	1.519.649.998	Kelurahan Bendul Merisi
	Kelurahan Jemur Wonosari					3.068.822.748	3.413.702.748	3.413.702.748	-344.880.000		3.145.543.312	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.068.822.748	3.068.822.748	3.413.702.748	-344.880.000		3.145.543.312	
7,01	KECAMATAN					3.068.822.748	3.413.702.748	3.413.702.748	-344.880.000		3.145.543.312	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.068.822.748	3.413.702.748	3.413.702.748	-344.880.000		3.145.543.312	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	3.068.822.748	3.413.702.748	3.413.702.748	-344.880.000	100%	3.145.543.312	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.068.822.748	3.413.702.748	3.413.702.748	-344.880.000	40%	3.145.543.312	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.137.645.496	6.827.405.496	6.827.405.496	-689.760.000		6.291.086.624	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Jemur Wonosari					6.137.645.496	6.827.405.496	6.827.405.496	-689.760.000		6.291.086.624	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	6.137.645.496	6.827.405.496	6.827.405.496	-689.760.000	3 Pokmas / Ormas	6.291.086.624	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	6.137.645.496	6.827.405.496	6.827.405.496	-689.760.000	10 Unit	6.291.086.624	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Jemur Wonosari					6.137.645.496	6.827.405.496	6.827.405.496	-689.760.000		6.291.086.624	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	6.137.645.496	6.827.405.496	6.827.405.496	-689.760.000	3 Pokmas / Ormas	6.291.086.624	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	6.137.645.496	6.827.405.496	6.827.405.496	-689.760.000	10 Unit	6.291.086.624	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.150.322.060	2.174.642.658	2.174.642.658	-1.024.320.598		1.179.080.110	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.150.322.060	2.174.642.658	2.174.642.658	-1.024.320.598	10 Unit	1.179.080.110	Kelurahan Jemur Wonosari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.918.500.688	1.239.060.090	1.239.060.090	679.440.598		1.966.463.202	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.918.500.688	1.239.060.090	1.239.060.090	679.440.598	3 Pokmas / Ormas	1.966.463.202	Kelurahan Jemur Wonosari
	Kelurahan Margorejo					2.474.974.571	2.346.219.122	2.346.219.122	128.755.449		2.536.848.931	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.474.974.571	2.474.974.571	2.346.219.122	128.755.449		2.536.848.931	
7,01	KECAMATAN					2.474.974.571	2.346.219.122	2.346.219.122	128.755.449		2.536.848.931	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.474.974.571	2.346.219.122	2.346.219.122	128.755.449		2.536.848.931	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	2.474.974.571	2.346.219.122	2.346.219.122	128.755.449	100%	2.536.848.931	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.474.974.571	2.346.219.122	2.346.219.122	128.755.449	40%	2.536.848.931	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.949.949.142	4.692.438.244	4.692.438.244	257.510.898		5.073.697.862	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Margorejo					4.949.949.142	4.692.438.244	4.692.438.244	257.510.898		5.073.697.862	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	4.949.949.142	4.692.438.244	4.692.438.244	257.510.898	2 Pokmas / Ormas	5.073.697.862	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	4.949.949.142	4.692.438.244	4.692.438.244	257.510.898	8 Unit	5.073.697.862	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Margorejo					4.949.949.142	4.692.438.244	4.692.438.244	257.510.898		5.073.697.862	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	4.949.949.142	4.692.438.244	4.692.438.244	257.510.898	2 Pokmas / Ormas	5.073.697.862	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	4.949.949.142	4.692.438.244	4.692.438.244	257.510.898	8 Unit	5.073.697.862	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.056.612.755	1.056.612.755	1.056.612.755	0		1.083.028.072	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.056.612.755	1.056.612.755	1.056.612.755	0	8 Unit	1.083.028.072	Kelurahan Margorejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.418.361.816	1.289.606.367	1.289.606.367	128.755.449		1.453.820.859	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.418.361.816	1.289.606.367	1.289.606.367	128.755.449	2 Pokmas / Ormas	1.453.820.859	Kelurahan Margorejo
	Kelurahan Sidosermo					2.782.679.236	2.911.434.685	2.911.434.685	-128.755.449		2.852.246.213	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					2.782.679.236	2.782.679.236	2.911.434.685	-128.755.449		2.852.246.213	
7,01	KECAMATAN					2.782.679.236	2.911.434.685	2.911.434.685	-128.755.449		2.852.246.213	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.782.679.236	2.911.434.685	2.911.434.685	-128.755.449		2.852.246.213	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	2.782.679.236	2.911.434.685	2.911.434.685	-128.755.449	100%	2.852.246.213	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	2.782.679.236	2.911.434.685	2.911.434.685	-128.755.449	40%	2.852.246.213	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					5.565.358.472	5.822.869.370	5.822.869.370	-257.510.898		5.704.492.426	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sidosermo					5.565.358.472	5.822.869.370	5.822.869.370	-257.510.898		5.704.492.426	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.565.358.472	5.822.869.370	5.822.869.370	-257.510.898	2 Pokmas / Ormas	5.704.492.426	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	5.565.358.472	5.822.869.370	5.822.869.370	-257.510.898	8 Unit	5.704.492.426	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sidosermo					5.565.358.472	5.822.869.370	5.822.869.370	-257.510.898		5.704.492.426	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	5.565.358.472	5.822.869.370	5.822.869.370	-257.510.898	2 Pokmas / Ormas	5.704.492.426	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	5.565.358.472	5.822.869.370	5.822.869.370	-257.510.898	8 Unit	5.704.492.426	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.867.079.236	2.330.647.817	2.330.647.817	-463.568.581		1.913.756.214	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.867.079.236	2.330.647.817	2.330.647.817	-463.568.581	8 Unit	1.913.756.214	Kelurahan Sidosermo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					915.600.000	580.786.868	580.786.868	334.813.132		938.489.999	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	915.600.000	580.786.868	580.786.868	334.813.132	2 Pokmas / Ormas	938.489.999	Kelurahan Sidosermo
	Kelurahan Siwalankerto					4.232.087.902	3.887.207.902	3.887.207.902	344.880.000		4.509.943.914	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.232.087.902	4.232.087.902	3.887.207.902	344.880.000		4.509.943.914	
7.01	KECAMATAN					4.232.087.902	3.887.207.902	3.887.207.902	344.880.000		4.509.943.914	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.232.087.902	3.887.207.902	3.887.207.902	344.880.000		4.509.943.914	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	100%	100%	4.232.087.902	3.887.207.902	3.887.207.902	344.880.000	100%	4.509.943.914	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.232.087.902	3.887.207.902	3.887.207.902	344.880.000	40%	4.509.943.914	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.464.175.804	7.774.415.804	7.774.415.804	689.760.000		9.019.887.828	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Siwalankerto					8.464.175.804	7.774.415.804	7.774.415.804	689.760.000		9.019.887.828	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	8.464.175.804	7.774.415.804	7.774.415.804	689.760.000	1 Pokmas / Ormas	9.019.887.828	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	8.464.175.804	7.774.415.804	7.774.415.804	689.760.000	6 Unit	9.019.887.828	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Siwalankerto					8.464.175.804	7.774.415.804	7.774.415.804	689.760.000		9.019.887.828	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	8.464.175.804	7.774.415.804	7.774.415.804	689.760.000	1 Pokmas / Ormas	9.019.887.828	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	8.464.175.804	7.774.415.804	7.774.415.804	689.760.000	6 Unit	9.019.887.828	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.244.487.902	3.244.487.902	3.244.487.902	0		3.497.653.915	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	3.244.487.902	3.244.487.902	3.244.487.902	0	6 Unit	3.497.653.915	Kelurahan Siwalankerto
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					987.600.000	642.720.000	642.720.000	344.880.000		1.012.289.999	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	987.600.000	642.720.000	642.720.000	344.880.000	1 Pokmas / Ormas	1.012.289.999	Kelurahan Siwalankerto
	Kec. Wonokromo					29.989.128.660	46.048.283.233	47.752.220.443	-17.763.091.783		30.354.770.792	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					29.989.128.660	29.989.128.660	47.752.220.443	-17.763.091.783		30.354.770.792	
7.01	KECAMATAN					29.989.128.660	46.048.283.233	47.752.220.443	-17.763.091.783		30.354.770.792	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.490.454.139	29.413.340.902	31.117.278.112	-1.626.823.973		29.831.351.829	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,12 %	98,08%	99,58%	29.490.454.139	29.413.340.902	31.117.278.112	-1.626.823.973	98,10 %	29.831.351.829	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000		2.600.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.600.000	3.944.000	3.944.000	-1.344.000	8 Dokumen	2.600.000	Kec. Wonokromo
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					23.019.207.959	23.019.207.959	24.447.600.240	-1.428.392.281		23.195.483.134	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN					23.019.207.959	23.019.207.959	24.447.600.240	-1.428.392.281		23.195.483.134	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	60 Orang/bulan	23.019.207.959	23.019.207.959	24.447.600.240	-1.428.392.281	62 Orang/bulan	23.195.483.134	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					23.019.207.959	23.019.207.959	24.447.600.240	-1.428.392.281		23.195.483.134	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	60 Orang/bulan	23.019.207.959	23.019.207.959	24.447.600.240	-1.428.392.281	62 Orang/bulan	23.195.483.134	Kec. Wonokromo
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					6.334.947.630	6.241.529.743	6.517.074.672	-182.127.042		6.499.570.145	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					6.334.947.630	6.241.529.743	6.517.074.672	-182.127.042		6.499.570.145	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	6.334.947.630	6.241.529.743	6.517.074.672	-182.127.042	8 Paket	6.499.570.145	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6.334.947.630	6.241.529.743	6.517.074.672	-182.127.042		6.499.570.145	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	6.334.947.630	6.241.529.743	6.517.074.672	-182.127.042	8 Paket	6.499.570.145	Kec. Wonokromo
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					133.698.550	148.659.200	148.659.200	-14.960.650		133.698.550	
	Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					133.698.550	148.659.200	148.659.200	-14.960.650		133.698.550	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	133.698.550	148.659.200	148.659.200	-14.960.650	5 Unit	133.698.550	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					133.698.550	148.659.200	148.659.200	-14.960.650		133.698.550	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	133.698.550	148.659.200	148.659.200	-14.960.650	5 Unit	133.698.550	Kec. Wonokromo
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					225.230.400	265.649.131	265.649.131	-40.418.731		225.230.400	
		Persentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	225.230.400	265.649.131	265.649.131	-40.418.731	100%	225.230.400	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					225.230.400	265.649.131	265.649.131	-40.418.731		225.230.400	
	Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan					225.230.400	265.649.131	265.649.131	-40.418.731		225.230.400	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	225.230.400	265.649.131	265.649.131	-40.418.731	12 Laporan	225.230.400	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					225.230.400	265.649.131	265.649.131	-40.418.731		225.230.400	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	225.230.400	265.649.131	265.649.131	-40.418.731	12 Laporan	225.230.400	Kec. Wonokromo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0	16.157.751.200	16.157.751.200	-16.157.751.200		24.000.000	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	0	16.157.751.200	16.157.751.200	-16.157.751.200	75%	24.000.000	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	0	16.157.751.200	16.157.751.200	-16.157.751.200	40%	24.000.000	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0	16.157.751.200	16.157.751.200	-16.157.751.200		24.000.000	
	Meningkatnya kualitas SDM pemuda					0	16.157.751.200	16.157.751.200	-16.157.751.200		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	35220 Keluarga	35220 Keluarga	35220 Keluarga	0	16.157.751.200	16.157.751.200	-16.157.751.200	35220 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	290 Keluarga	290 Keluarga	290 Keluarga	0	16.157.751.200	16.157.751.200	-16.157.751.200	290 Keluarga	24.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					0	16.157.751.200	16.157.751.200	-16.157.751.200		24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	35220 Keluarga	35220 Keluarga	35220 Keluarga	0	16.157.751.200	16.157.751.200	-16.157.751.200	35220 Keluarga	24.000.000	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	290 Keluarga	290 Keluarga	290 Keluarga	0	16.157.751.200	16.157.751.200	-16.157.751.200	290 Keluarga	24.000.000	
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					0	14.127.751.200	14.127.751.200	-14.127.751.200		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	35220 Keluarga	35220 Keluarga	35220 Keluarga	0	14.127.751.200	14.127.751.200	-14.127.751.200	35220 Keluarga	12.000.000	Kec. Wonokromo
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					0	2.030.000.000	2.030.000.000	-2.030.000.000		12.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	290 Keluarga	290 Keluarga	290 Keluarga	0	2.030.000.000	2.030.000.000	-2.030.000.000	290 Keluarga	12.000.000	Kec. Wonokromo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					273.444.121	211.542.000	211.542.000	61.902.121		274.188.563	
		Persentase pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan atau SOP	100%	100%	100%	273.444.121	211.542.000	211.542.000	61.902.121	100%	274.188.563	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					273.444.121	211.542.000	211.542.000	61.902.121		274.188.563	
	Meningkatnya penanganan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wilayah Kecamatan					273.444.121	211.542.000	211.542.000	61.902.121		274.188.563	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	273.444.121	211.542.000	211.542.000	61.902.121	12 Laporan	274.188.563	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					273.444.121	211.542.000	211.542.000	61.902.121		274.188.563	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	273.444.121	211.542.000	211.542.000	61.902.121	12 Laporan	274.188.563	Kec. Wonokromo
	Kelurahan Darmo					4.026.915.210	4.026.915.210	4.026.915.210	0		4.103.588.084	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.026.915.210	4.026.915.210	4.026.915.210	0		4.103.588.084	
7.01	KECAMATAN					4.026.915.210	4.026.915.210	4.026.915.210	0		4.103.588.084	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.026.915.210	4.026.915.210	4.026.915.210	0		4.103.588.084	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	4.026.915.210	4.026.915.210	4.026.915.210	0	75%	4.103.588.084	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.026.915.210	4.026.915.210	4.026.915.210	0	40%	4.103.588.084	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8.053.830.420	8.053.830.420	8.053.830.420	0		8.207.176.168	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Darmo					8.053.830.420	8.053.830.420	8.053.830.420	0		8.207.176.168	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	8.053.830.420	8.053.830.420	8.053.830.420	0	1 Pokmas / Ormas	8.207.176.168	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	8.053.830.420	8.053.830.420	8.053.830.420	0	5 Unit	8.207.176.168	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Darmo					8.053.830.420	8.053.830.420	8.053.830.420	0		8.207.176.168	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	8.053.830.420	8.053.830.420	8.053.830.420	0	1 Pokmas / Ormas	8.207.176.168	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	8.053.830.420	8.053.830.420	8.053.830.420	0	5 Unit	8.207.176.168	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.637.311.383	2.508.095.120	2.508.095.120	-870.783.737		1.678.244.165	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1.637.311.383	2.508.095.120	2.508.095.120	-870.783.737	5 Unit	1.678.244.165	Kelurahan Darmo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.389.603.827	1.518.820.090	1.518.820.090	870.783.737		2.425.343.919	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.389.603.827	1.518.820.090	1.518.820.090	870.783.737	1 Pokmas / Ormas	2.425.343.919	Kelurahan Darmo
	Kelurahan Jagir					3.852.021.931	3.852.021.931	3.852.021.931	0		3.948.322.474	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.852.021.931	3.852.021.931	3.852.021.931	0		3.948.322.474	
7,01	KECAMATAN					3.852.021.931	3.852.021.931	3.852.021.931	0		3.948.322.474	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.852.021.931	3.852.021.931	3.852.021.931	0		3.948.322.474	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.852.021.931	3.852.021.931	3.852.021.931	0	75%	3.948.322.474	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.852.021.931	3.852.021.931	3.852.021.931	0	40%	3.948.322.474	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.704.043.862	7.704.043.862	7.704.043.862	0		7.896.644.948	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Jagir					7.704.043.862	7.704.043.862	7.704.043.862	0		7.896.644.948	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	7.704.043.862	7.704.043.862	7.704.043.862	0	3 Pokmas / Ormas	7.896.644.948	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	7.704.043.862	7.704.043.862	7.704.043.862	0	5 Unit	7.896.644.948	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Jagir					7.704.043.862	7.704.043.862	7.704.043.862	0		7.896.644.948	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	7.704.043.862	7.704.043.862	7.704.043.862	0	3 Pokmas / Ormas	7.896.644.948	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	7.704.043.862	7.704.043.862	7.704.043.862	0	5 Unit	7.896.644.948	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.080.981.234	2.450.932.291	2.450.932.291	-369.951.057		2.133.005.762	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	2.080.981.234	2.450.932.291	2.450.932.291	-369.951.057	5 Unit	2.133.005.762	Kelurahan Jagir
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.771.040.697	1.401.089.640	1.401.089.640	369.951.057		1.815.316.712	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.771.040.697	1.401.089.640	1.401.089.640	369.951.057	3 Pokmas / Ormas	1.815.316.712	Kelurahan Jagir
	Kelurahan Ngagel					3.739.827.446	3.739.827.446	3.739.827.446	0		3.833.323.127	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.739.827.446	3.739.827.446	3.739.827.446	0		3.833.323.127	
7,01	KECAMATAN					3.739.827.446	3.739.827.446	3.739.827.446	0		3.833.323.127	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.739.827.446	3.739.827.446	3.739.827.446	0		3.833.323.127	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	3.739.827.446	3.739.827.446	3.739.827.446	0	75%	3.833.323.127	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	3.739.827.446	3.739.827.446	3.739.827.446	0	40%	3.833.323.127	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					7.479.654.892	7.479.654.892	7.479.654.892	0		7.666.646.254	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Ngagel					7.479.654.892	7.479.654.892	7.479.654.892	0		7.666.646.254	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.479.654.892	7.479.654.892	7.479.654.892	0	2 Pokmas / Ormas	7.666.646.254	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	7.479.654.892	7.479.654.892	7.479.654.892	0	6 Unit	7.666.646.254	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Ngagel					7.479.654.892	7.479.654.892	7.479.654.892	0		7.666.646.254	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7.479.654.892	7.479.654.892	7.479.654.892	0	2 Pokmas / Ormas	7.666.646.254	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	7.479.654.892	7.479.654.892	7.479.654.892	0	6 Unit	7.666.646.254	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.787.627.446	3.127.867.446	3.127.867.446	-340.240.000		2.857.318.128	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	2.787.627.446	3.127.867.446	3.127.867.446	-340.240.000	6 Unit	2.857.318.128	Kelurahan Ngagel
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					952.200.000	611.960.000	611.960.000	340.240.000		976.004.999	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	952.200.000	611.960.000	611.960.000	340.240.000	2 Pokmas / Ormas	976.004.999	Kelurahan Ngagel
	Kelurahan Ngagel Rejo					6.147.398.303	6.147.398.303	6.147.398.303	0		6.560.201.831	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					6.147.398.303	6.147.398.303	6.147.398.303	0		6.560.201.831	
7,01	KECAMATAN					6.147.398.303	6.147.398.303	6.147.398.303	0		6.560.201.831	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6.147.398.303	6.147.398.303	6.147.398.303	0		6.560.201.831	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	6.147.398.303	6.147.398.303	6.147.398.303	0	75%	6.560.201.831	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	6.147.398.303	6.147.398.303	6.147.398.303	0	40%	6.560.201.831	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					12.294.796.606	12.294.796.606	12.294.796.606	0		13.120.403.662	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Ngagel Rejo					12.294.796.606	12.294.796.606	12.294.796.606	0		13.120.403.662	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	12.294.796.606	12.294.796.606	12.294.796.606	0	3 Pokmas / Ormas	13.120.403.662	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	12.294.796.606	12.294.796.606	12.294.796.606	0	7 Unit	13.120.403.662	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Ngagel Rejo					12.294.796.606	12.294.796.606	12.294.796.606	0		13.120.403.662	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	12.294.796.606	12.294.796.606	12.294.796.606	0	3 Pokmas / Ormas	13.120.403.662	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	12.294.796.606	12.294.796.606	12.294.796.606	0	7 Unit	13.120.403.662	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.310.958.303	4.280.034.285	4.280.034.285	-969.075.982		3.652.850.835	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	3.310.958.303	4.280.034.285	4.280.034.285	-969.075.982	7 Unit	3.652.850.835	Kelurahan Ngagel Rejo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.836.440.000	1.867.364.018	1.867.364.018	969.075.982		2.907.350.996	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.836.440.000	1.867.364.018	1.867.364.018	969.075.982	3 Pokmas / Ormas	2.907.350.996	Kelurahan Ngagel Rejo
	Kelurahan Sawunggaling					4.934.810.856	4.934.810.856	4.934.810.856	0		5.058.181.120	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					4.934.810.856	4.934.810.856	4.934.810.856	0		5.058.181.120	
7,01	KECAMATAN					4.934.810.856	4.934.810.856	4.934.810.856	0		5.058.181.120	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.934.810.856	4.934.810.856	4.934.810.856	0		5.058.181.120	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	4.934.810.856	4.934.810.856	4.934.810.856	0	75%	5.058.181.120	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	4.934.810.856	4.934.810.856	4.934.810.856	0	40%	5.058.181.120	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					9.869.621.712	9.869.621.712	9.869.621.712	0		10.116.362.240	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Sawunggaling					9.869.621.712	9.869.621.712	9.869.621.712	0		10.116.362.240	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	9.869.621.712	9.869.621.712	9.869.621.712	0	2 Pokmas / Ormas	10.116.362.240	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	9.869.621.712	9.869.621.712	9.869.621.712	0	12 Unit	10.116.362.240	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sawunggaling					9.869.621.712	9.869.621.712	9.869.621.712	0		10.116.362.240	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	9.869.621.712	9.869.621.712	9.869.621.712	0	2 Pokmas / Ormas	10.116.362.240	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	9.869.621.712	9.869.621.712	9.869.621.712	0	12 Unit	10.116.362.240	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.861.380.658	3.598.563.254	3.598.563.254	-737.182.596		2.932.915.170	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	2.861.380.658	3.598.563.254	3.598.563.254	-737.182.596	12 Unit	2.932.915.170	Kelurahan Sawunggaling
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.073.430.198	1.336.247.602	1.336.247.602	737.182.596		2.125.265.950	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2.073.430.198	1.336.247.602	1.336.247.602	737.182.596	2 Pokmas / Ormas	2.125.265.950	Kelurahan Sawunggaling
	Kelurahan Wonokromo					5.544.293.265	5.544.293.265	5.544.293.265	0		5.682.900.589	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					5.544.293.265	5.544.293.265	5.544.293.265	0		5.682.900.589	
7.01	KECAMATAN					5.544.293.265	5.544.293.265	5.544.293.265	0		5.682.900.589	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.544.293.265	5.544.293.265	5.544.293.265	0		5.682.900.589	
		Persentase kampung yang berpartisipasi dalam pengembangan inovasi	100%	50%	50%	5.544.293.265	5.544.293.265	5.544.293.265	0	75%	5.682.900.589	
		Persentase kampung yang terbangun sarana dan prasarana wilayahnya	100%	20%	20%	5.544.293.265	5.544.293.265	5.544.293.265	0	40%	5.682.900.589	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					11.088.586.530	11.088.586.530	11.088.586.530	0		11.365.801.178	
	Meningkatnya inovasi unggulan Kelurahan Wonokromo					11.088.586.530	11.088.586.530	11.088.586.530	0		11.365.801.178	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	11.088.586.530	11.088.586.530	11.088.586.530	0	2 Pokmas / Ormas	11.365.801.178	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	11.088.586.530	11.088.586.530	11.088.586.530	0	8 Unit	11.365.801.178	
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Wonokromo					11.088.586.530	11.088.586.530	11.088.586.530	0		11.365.801.178	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	11.088.586.530	11.088.586.530	11.088.586.530	0	2 Pokmas / Ormas	11.365.801.178	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	11.088.586.530	11.088.586.530	11.088.586.530	0	8 Unit	11.365.801.178	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.913.364.678	4.061.965.229	4.061.965.229	-1.148.600.551		2.986.198.791	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	2.913.364.678	4.061.965.229	4.061.965.229	-1.148.600.551	8 Unit	2.986.198.791	Kelurahan Wonokromo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.630.928.587	1.482.328.036	1.482.328.036	1.148.600.551		2.696.701.798	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.630.928.587	1.482.328.036	1.482.328.036	1.148.600.551	2 Pokmas / Ormas	2.696.701.798	Kelurahan Wonokromo
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					59.935.900.153	88.689.642.685	89.420.907.417	-29.485.007.264		60.948.557.176	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					59.935.900.153	59.935.900.153	89.420.907.417	-29.485.007.264		60.948.557.176	
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					59.935.900.153	88.689.642.685	89.420.907.417	-29.485.007.264		60.948.557.176	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.308.143.384	14.460.100.721	15.288.370.568	-980.227.184		14.413.344.480	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,96 %	97,92%	99,49%	14.308.143.384	14.460.100.721	15.288.370.568	-980.227.184	97,93 %	14.413.344.480	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.732.732	7.077.120	7.077.120	6.655.612		13.780.864	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.732.732	7.077.120	7.077.120	6.655.612		13.780.864	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	13.732.732	7.077.120	7.077.120	6.655.612	8 Dokumen	13.780.864	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					13.732.732	7.077.120	7.077.120	6.655.612		13.780.864	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	13.732.732	7.077.120	7.077.120	6.655.612	8 Dokumen	13.780.864	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.269.656.347	11.269.656.347	11.894.947.340	-625.290.993		11.354.677.950	
	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN					11.269.656.347	11.269.656.347	11.894.947.340	-625.290.993		11.354.677.950	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	11.269.656.347	11.269.656.347	11.894.947.340	-625.290.993	28 Orang/bulan	11.354.677.950	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					11.269.656.347	11.269.656.347	11.894.947.340	-625.290.993		11.354.677.950	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	11.269.656.347	11.269.656.347	11.894.947.340	-625.290.993	28 Orang/bulan	11.354.677.950	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					170.241.323	165.452.356	202.071.087	-31.829.764		134.359.883	
	Meningkatnya Ketersediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik					170.241.323	165.452.356	202.071.087	-31.829.764		134.359.883	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	170.241.323	165.452.356	202.071.087	-31.829.764	5 Paket	134.359.883	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					170.241.323	165.452.356	202.071.087	-31.829.764		134.359.883	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	170.241.323	165.452.356	202.071.087	-31.829.764	5 Paket	134.359.883	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.854.512.982	3.017.914.898	3.184.275.021	-329.762.039		2.910.525.783	
	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran					2.854.512.982	3.017.914.898	3.184.275.021	-329.762.039		2.910.525.783	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.854.512.982	3.017.914.898	3.184.275.021	-329.762.039	4 Laporan	2.910.525.783	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.854.512.982	3.017.914.898	3.184.275.021	-329.762.039		2.910.525.783	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.854.512.982	3.017.914.898	3.184.275.021	-329.762.039	4 Laporan	2.910.525.783	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					3.275.596.614	4.850.868.290	4.812.455.670	-1.536.859.056		3.750.334.016	
		Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	94,10 %	93,22%	95,12%	3.275.596.614	4.850.868.290	4.812.455.670	-1.536.859.056	93,44 %	3.750.334.016	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					3.275.596.614	4.850.868.290	4.812.455.670	-1.536.859.056		3.750.334.016	
	meningkatnya jumlah lembaga yang difasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					3.275.596.614	4.850.868.290	4.812.455.670	-1.536.859.056		3.750.334.016	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	320 Orang	320 Orang	320 Orang	3.275.596.614	4.850.868.290	4.812.455.670	-1.536.859.056	320 Orang	3.750.334.016	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					3.275.596.614	4.850.868.290	4.812.455.670	-1.536.859.056		3.750.334.016	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	320 Orang	320 Orang	320 Orang	3.275.596.614	4.850.868.290	4.812.455.670	-1.536.859.056	320 Orang	3.750.334.016	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					29.086.004.217	28.979.238.900	28.979.238.900	106.765.317		29.086.200.246	
		Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	23%	23%	29.086.004.217	28.979.238.900	28.979.238.900	106.765.317	42%	29.086.200.246	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					29.086.004.217	28.979.238.900	28.979.238.900	106.765.317		29.086.200.246	
	Meningkatnya lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik					29.086.004.217	28.979.238.900	28.979.238.900	106.765.317		29.086.200.246	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	120 Orang	118 Orang	118 Orang	29.086.004.217	28.979.238.900	28.979.238.900	106.765.317	118 Orang	29.086.200.246	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					29.086.004.217	28.979.238.900	28.979.238.900	106.765.317		29.086.200.246	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	120 Orang	118 Orang	118 Orang	29.086.004.217	28.979.238.900	28.979.238.900	106.765.317	118 Orang	29.086.200.246	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					84.747.113	387.373.500	390.373.500	-305.626.387		84.978.147	
		Indeks Kinerja Ormas	69 Nilai	68.2 Nilai	68.2 Nilai	84.747.113	387.373.500	390.373.500	-305.626.387	68.4 Nilai	84.978.147	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					84.747.113	387.373.500	390.373.500	-305.626.387		84.978.147	
	Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan					84.747.113	387.373.500	390.373.500	-305.626.387		84.978.147	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Orang	30 Orang	30 Orang	84.747.113	387.373.500	390.373.500	-305.626.387	30 Orang	84.978.147	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					84.747.113	387.373.500	390.373.500	-305.626.387		84.978.147	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Orang	30 Orang	30 Orang	84.747.113	387.373.500	390.373.500	-305.626.387	30 Orang	84.978.147	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					381.555.894	1.218.155.854	1.253.235.354	-871.679.460		810.427.407	
		Persentase pencegahan P4GN di kawasan rawan narkoba	92,5 %	90,50%	90,50%	381.555.894	1.218.155.854	1.253.235.354	-871.679.460	91%	810.427.407	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Persentase potensi konflik umat beragama yang terfasilitasi	92,5 %	90,50%	90,50%	381.555.894	1.218.155.854	1.253.235.354	-871.679.460	91%	810.427.407	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					381.555.894	1.218.155.854	1.253.235.354	-871.679.460		810.427.407	
	Meningkatnya lembaga yang berkontribusi dalam mendukung Kerukunan Beragama dan P4GN					381.555.894	1.218.155.854	1.253.235.354	-871.679.460		810.427.407	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang	690 Orang	690 Orang	381.555.894	1.218.155.854	1.253.235.354	-871.679.460	690 Orang	810.427.407	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					381.555.894	1.218.155.854	1.253.235.354	-871.679.460		810.427.407	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang	690 Orang	690 Orang	381.555.894	1.218.155.854	1.253.235.354	-871.679.460	690 Orang	810.427.407	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					12.799.852.931	38.793.905.420	38.697.233.425	-25.897.380.494		12.803.272.880	
		Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	98,40 %	98,00%	98,00%	12.799.852.931	38.793.905.420	38.697.233.425	-25.897.380.494	98,10 %	12.803.272.880	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					12.799.852.931	38.793.905.420	38.697.233.425	-25.897.380.494		12.803.272.880	
	Meningkatnya pelaksanaan pemantauan orang asing dan potensi konflik					12.799.852.931	38.793.905.420	38.697.233.425	-25.897.380.494		12.803.272.880	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	12.799.852.931	38.793.905.420	38.697.233.425	-25.897.380.494	44 Laporan	12.803.272.880	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15 Orang	15 Orang	15 Orang	12.799.852.931	38.793.905.420	38.697.233.425	-25.897.380.494	15 Orang	12.803.272.880	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					12.086.612.792	36.093.057.200	36.084.541.000	-23.997.928.208		12.088.230.027	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15 Orang	15 Orang	15 Orang	12.086.612.792	36.093.057.200	36.084.541.000	-23.997.928.208	15 Orang	12.088.230.027	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	TARGET	PAGU INDIKATIF	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					713.240.139	2.700.848.220	2.612.692.425	-1.899.452.286		715.042.853	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	713.240.139	2.700.848.220	2.612.692.425	-1.899.452.286	44 Laporan	715.042.853	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

WALI KOTA SURABAYA

ERI CAHYADI

PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

